



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN
PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN
PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS:
MESA DAN MESOP PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK)**

SKRIPSI

**LULU LATIFA MUBARAK
0706164006**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN
PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN
PADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS:
MESA DAN MESOP PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**LULU LATIFA MUBARAK
0706164006**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI REGULER
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JULI
2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Lulu Latifa Mubarak

NPM : 0706164006

Tanda Tangan :

Tanggal : 7 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Lulu Latifa Mubarak
NPM : 0706164006
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program
Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Pada
Perusahaan Publik di Indonesia (Studi Kasus:
MESA dan MESOP PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Rosewitha Irawaty, S.H., MLI

(.....)

Penguji : Arman Nefi, S.H., M.M.

(.....)

Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H.

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur tak putus-putusnya Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Pada Perusahaan Publik di Indonesia (Studi Kasus: MESA dan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)” ini. Penulisan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Kepada kedua orang tua Penulis: Bapak Syahrul Mubarak dan Ibu Nurhani Hidayati atas kasih sayang, doa, kepercayaan, pengertian, dan dukungan yang tak pernah putus-putusnya diberikan kepada Penulis. *They have been and will always be my strength, I love you.* Terima kasih pula kepada kedua adik Penulis, Mirna Ulfiana Mubarak dan Hafiz Syihabuddin Mubarak untuk doa dan semangatnya selama ini. Serta seluruh keluarga besar Penulis yang terus mendukung dan mendoakan Penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi seluruh keluarga Penulis. Amin.
2. Kepada Dosen Pembimbing skripsi Penulis, Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., MLI yang telah menyediakan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan membantu Penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing Penulis. Mohon dibukakan pintu maaf atas segala kesalahan yang Penulis lakukan selama proses penulisan skripsi ini, baik yang disengaja ataupun tidak.

3. Kepada Pembimbing Akademik Penulis, Bapak Afdol, S.H., M.H. atas bimbingannya selama Penulis menempuh empat tahun masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Kepada semua dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas ilmu yang selama ini telah diberikan pada Penulis. Semoga seiring ilmu yang dicurahkan untuk kemajuan pendidikan ilmu hukum, Allah SWT juga selalu mencurahkan pahala-Nya. Amin.
5. Kepada Kasubag Pengembangan Kebijakan Keterbukaan Emiten atau Perusahaan Publik Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Ibu Ni Nyoman Puspani (Ibu Komang), serta Bapak I Made Thirtayatra atas kesediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan Penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Kepada Desy Nurhayati, Yulianti Sribudi Utami, Muhammad Megah, Agung Dian Prabowo, Audy Miranti, Dita Rahmasari, Hari Prasetyo, Afif Akbar, dan Silvia Age Gideon untuk segala hal yang telah dilalui bersama selama empat tahun ini, tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan betapa bersyukur Penulis memiliki kalian sebagai teman, *friends for life!* ☺
7. Kepada perempuan-perempuan yang selalu menyenangkan hati, Sheila Ramadhani Alam, Maulidya Nurhalima Siregar, Anindita Rarasati, Riani Atika Nanda Lubis, Arub Charisma Maulidina, Puri Paskatya Yap, dan Maria Kresensia Ayuningtyas untuk segala program senang-senang dan obrolan kacau *group BBM* yang selalu dapat menyunggingkan senyum Penulis, juga untuk semangatnya selama ini. Terima kasih.
8. Kepada teman-teman satu bimbingan Mbak Ira, Nardo, Batara dan Alfa atas dukungan dan semangatnya hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat SMA Negeri 1 Depok, Fadhlina, Anisha Puti Lalita, Ratih Dwi Rahmadanti, Kharizza Kusumaniaz, Adyaningsih Niken Wiranti, Ardiani Rachmasyaputri, Danar Anindito Mu'jizat, Mahisa Taradika, Dani Aufar, Boy Jhoustroy Limbong, Faza Fauzan Adzima, Dean Apriana Ramadhan, Ecky Agassi, Riky Febriansyah Saleh, Prahara Juniawan, Heri Priyambodo, Ary Sandhiko, dan Azmy Basyarahil. *You are my family, and always will be.*

10. Kepada Badan Pengurus Harian Badan Otonom Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI Periode Kepengurusan 2009: Yahdi, Muti, Niken, Desy, Tami, Adit “Bicun”, Hari, Reza, Sheila, Uli, Sisil, Tatiana, Wilda, Ika, Liza dan Ve, serta Keluarga Besar LK2 untuk segala hal yang Penulis dapatkan dari “bukan Badan Otonom biasa” ini.
11. Kepada keluarga *external mootng* UI4MCCUDAYANA dan tim *internal mootng PRO JUSTITIA* atas segala pengetahuan dan sensasi *mootng* yang tak akan pernah bisa Penulis lupakan.
12. Kepada semua staf Biro Pendidikan FHUI (Bapak Selam, Bapak Wahyu, Bapak Indra, Bapak Arif), atas setiap bantuannya selama Penulis menempuh pendidikan di FHUI. Tak lupa kepada Pak Jon dan Bu Surya atas bantuannya pada Penulis selama penyusunan skripsi ini.
13. Kepada para pegawai Perpustakaan FHUI dan Perpustakaan Pusat UI atas bantuannya kepada Penulis selama ini, serta para pegawai Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Bagian Humas dan Perpustakaan Badan Pengawas Pasar Modal Republik Indonesia, juga Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia yang turut membantu Penulis dalam memperoleh data skripsi dan menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu dalam tulisan ini, Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya selama ini. Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis. Amin.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu tentang hukum pasar modal serta ilmu hukum pada umumnya.

Depok. Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Latifa Mubarak
NPM : 0706164006
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham
Oleh Karyawan Pada Perusahaan Publik di Indonesia (Studi Kasus:
MESA dan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediaformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Juli 2011

Yang menyatakan


(Lulu Latifa Mubarak)

ABSTRAK

Nama : Lulu Latifa Mubarak
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Pada Perusahaan Publik (Studi Kasus: MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk)

Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia serta melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan kebijakan MESA dan MESOP di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk pelaksanaan keterbukaan informasinya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan. Adapun kebijakan MESA dan MESOP dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

Kata Kunci :

Program kepemilikan saham oleh karyawan, perusahaan publik, keterbukaan informasi.

ABSTRACT

Name : Lulu Latifa Mubarak
Study Program : Law
Title : Legal Analysis of Employee Stock Ownership Program at Public Company in Indonesia (Case Study: MESA and MESOP of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)

This thesis is explaining about how employee stock ownership program is conducted by public companies in Indonesia and also analyzing MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk from capital market regulations, included its obligation of disclosure. The study was conducted through normative juridical method by tracing data and legal materials related to the title. The result of the study shows that until now there has not been any specified regulations yet regarding employee stock ownership program in Indonesia. For MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, they were conducted by complying capital market regulations.

Key words:

Employee stock ownership program, public company, disclosure.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Definisi Operasional.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN PADA PERSEROAN TERBATAS	
2.1. Modal dan Saham Perseroan Terbatas.....	15
2.1.1. Struktur Modal Perseroan Terbatas.....	18
2.1.2. Penyetoran Saham.....	19
2.1.3. Hak Pemilik Saham dan Klasifikasi Saham.....	22
2.2. Penambahan Modal dan Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Pada Perseroan Terbatas.....	27
2.3. Varian Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan.....	31
BAB 3 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN PADA PASAR MODAL INDONESIA	
3.1. Penyelenggaraan Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Pada Perusahaan Publik.....	37
3.1.1. Melalui Penjatahan Saham Pada Penawaran Umum.....	38
3.1.2. Melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD.....	39
3.1.3. Melalui Pembelian Kembali Saham Oleh Perusahaan.....	40
3.2. Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal.....	43
3.2.1. Prinsip Keterbukaan Sebagai Bentuk Perlindungan Investor.....	45
3.2.2. Pelanggaran Terhadap Prinsip Keterbukaan.....	54
3.2.3. Prinsip Keterbukaan dalam Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Pada Perusahaan Publik.....	55
3.3. Program Opsi Saham Karyawan.....	61
BAB 4 PELAKSANAAN MESA DAN MESOP PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	
4.1. Profil Perusahaan.....	68

4.2. Dasar Pelaksanaan MESA dan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	70
4.3. Analisa Yuridis Pelaksanaan MESA dan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	71
4.4. Keterbukaan Informasi Atas Pelaksanaan MESA dan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	82
BAB 5 PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	90
5.2. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Lampiran 2

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.D.4 Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Lampiran 3

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor XI.B.2 Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Lampiran 4

Surat Edaran Direksi Bursa Efek Nomor: SE-003/BEJ/09-2005 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Penentuan dan Pelaporan Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP.

Lampiran 5

Pengumuman PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BBTN), No. Peng-P-00592/BEI.PPJ/12-2009.

Lampiran 6

Pengumuman Pra Pencatatan Saham MESOP Tahap I dan Pengumuman Pra Pencatatan Saham MESOP Tahap II PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

Lampiran 7

Pengumuman Keterbukaan Informasi PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BBTN), No. Peng-KI-00041/BEI.PPJ/03-2011 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Lampiran 8

Kumpulan Pengumuman Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan MESOP Tahap I PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Lampiran 9

Kutipan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Lampiran 10
Kutipan Laporan Tahunan 2009-2010 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Lampiran 11
Kutipan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* 2009-2010 PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, dengan didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Adapun perekonomian merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan suatu negara. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara, diperlukan pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin besar seiring berjalannya waktu tidak akan dapat dibiayai oleh pemerintah saja melalui penerimaan pajak dan penerimaan lainnya. Belum lagi isu globalisasi yang tidak dapat dielakkan lagi, yang turut berdampak pada perkembangan ekonomi dunia. Hal ini didukung oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang merambah sampai ke segala bidang termasuk bidang ekonomi dan keuangan, dimana saat ini hampir setiap individu atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan dapat dengan mudah dengan hanya menekan tombol pada *keyboard* komputer personalnya dapat melakukan transaksi dengan pihak lain bahkan yang berada di luar batas yuridiksi negaranya.¹

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang didukung oleh peningkatan teknologi komunikasi itu, semakin meningkat pula upaya berbagai perusahaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kegiatan dalam rangka meraih dana untuk ekspansi bisnis dengan berbagai cara. Kegiatan yang dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut menyebabkan kegiatan perekonomian di seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan dengan giat melakukan ekspansi dengan memperluas usahanya

¹ Asril Sitompul, *Pasar Modal: Penawaran Umum & Permasalahannya*, cet.2, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 1.

memasuki lingkup ekonomi global sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia yang semakin meningkat.² Kegiatan ekspansi perusahaan-perusahaan ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, yang mendorong mereka untuk mencari sumber-sumber yang dapat menyediakan dana dalam jumlah yang besar. Dalam hubungan ini, swasta akan menjadi motor dalam kegiatan ekonomi (*private sector leads economy growth*). Robert Pardy mengatakan: “*Sound and efficient security markets allow capital raisers and investors to diversify sources of investment capital and spread investment risk*”.³ Dalam hal ini, pasar modal merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi pengembangan dunia usaha yang mempunyai peran strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, sekaligus salah satu sarana investasi bagi pemodal yang memiliki kelebihan dana.

Dalam perekonomian modern, adanya pasar modal dalam perekonomian suatu negara adalah suatu kebutuhan. Di negara-negara yang ekonominya maju, pasar modal dalam wujud bursa efek, memainkan peran penting dan telah menjadi suatu kebutuhan karena disanalah ekonomi menunjukkan aktivitasnya. Pasar modal menjadi petunjuk bagaimana usahawan dan investor berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Usahawan yang diwakili oleh perusahaan mencari modal dengan memasuki pasar modal, sedangkan pemodal atau investor menginvestasikan dananya juga dengan masuk ke pasar modal.⁴ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pasar modal sebenarnya sama saja dengan pasar-pasar lain pada umumnya, yaitu sesuai namanya adalah tempat berlangsungnya kegiatan jual beli. Yang membedakan pasar modal dengan pasar lainnya adalah objek yang diperjualbelikan di tempat itu.

Yang dimaksud dengan pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang

² *Ibid.*

³ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, cet.1, (Bandung: PT ALUMNI, 2005), hlm. 2. Lihat juga Robert Pardy, *Institutional Reform in Emerging Securities Markets*, *The World Bank*, Washington DC-USA, 1992, hlm. 2.

⁴ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet.1, (Jakarta: Tatanusa, 2006), hlm. 1.

berkaitan dengan efek.⁵ Efek inilah yang menjadi komoditi perdagangan di pasar modal, sehingga pasar modal disebut juga dengan bursa efek. Adapun yang termasuk dalam efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek baik efek yang bersifat utang maupun yang bersifat ekuitas seperti opsi dan waran.⁶ Layaknya pasar biasa, bursa efek juga mempunyai ciri yang sama yaitu sebagai tempat berkumpulnya pembeli dan penjual yang saling memperjualbelikan barang dagangan. Efek dapat disebut juga dengan istilah sekuritas.⁷ Di pasar modal, sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan diperjualbelikan, perusahaan yang menerbitkan sekuritas ini disebut emiten sedangkan pihak yang membeli sekuritas berarti menanamkan modalnya di perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Pembeli sekuritas tersebut dinamakan pemodal atau investor, penerbitan sekuritas disebut emisi.⁸

Sebagaimana diuraikan di atas, kalau bursa efek adalah pasar, maka emiten adalah pihak yang menyediakan “barang-barang” yang diperdagangkan di bursa atau pasar tersebut. Emiten adalah pihak atau perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan efek berupa saham atau obligasi dan ditawarkan kepada masyarakat.⁹ Setelah penawaran umum dilakukan efek yang dikeluarkan oleh emiten akan diperdagangkan di bursa efek. Setelah penawaran umum efek tersebut, emiten pada dasarnya “tidak mempunyai hubungan lagi” dengan efek yang dikeluarkannya tersebut. Dalam arti emiten (dalam batas-batas tertentu) tidak akan berkepentingan atas naik turunnya harga efek emiten tersebut dikarenakan naik turunnya harga tersebut adalah kepentingan pemodal atau investor yang melakukan jual beli atas efek tersebut. Emiten hanyalah

⁵ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pasar Modal*, No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608, Ps. 1 angka 13.

⁶ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5 jo. Penjelasan Ps. 1 angka 5.

⁷ Asril Sitompul, *Pasar Modal: Penawaran Umum & Permasalahannya*, hlm. 3.

⁸ *Ibid.*

⁹ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 9

berkewajiban untuk mengelola usahanya dengan baik dan menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai emiten, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada harga efek tersebut.¹⁰ Oleh karena itu, setiap perusahaan yang telah menjadi emiten akan selalu berusaha meningkatkan kinerja perusahaan agar kredibilitas perusahaan mereka selalu baik di mata investor.

Salah satu cara yang digunakan sebagai strategi peningkatan kinerja perusahaan adalah dengan diadakannya program kepemilikan saham oleh karyawan. Program ini memungkinkan partisipasi karyawan untuk memiliki saham perusahaan tempat mereka bekerja. Program ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan memberikan saham secara cuma-cuma (*stock grant*), menjual saham kepada karyawan, atau dengan memberikan opsi kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan selama periode tertentu.¹¹ Dengan adanya kepemilikan karyawan pada perusahaan atau induk perusahaan tempat mereka bekerja, diharapkan motivasi dan komitmen para karyawan akan meningkat sehingga pada akhirnya juga akan meningkatkan nilai perusahaan. Selain dimaksudkan sebagai insentif bagi karyawan untuk mencapai prestasi tertentu di masa depan, tujuan lain program kepemilikan saham oleh karyawan ini dapat juga dalam rangka menahan karyawan (*retaining program*) ataupun sebagai kompensasi bagi karyawan berprestasi pada masa lalu (*stock-based compensation*).¹²

Program kepemilikan saham oleh karyawan pertama kali dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1950-an, yang lahir dari gagasan seseorang bernama Louis Kelso. Ahli hukum yang juga seorang *investment banker* itu berpendapat bahwa sistem kapitalis akan menjadi lebih kuat apabila karyawan diikutsertakan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ I Made B. Tirthayatra, "Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (ESOP)", <http://made-tirthayatra.blogspot.com/2009/06/program-kepemilikan-saham-bagi-karyawan.html>, diunduh 3 April 2011. Tulisan ini juga diterbitkan di *Warta Bapepam* edisi 13, Januari 2006, hlm. 7.

¹² Faoso F Telaumbanua, "Opsi Saham Karyawan" <http://groups.yahoo.com/group/saham/message/14997>, diunduh pada 4 April 2011.

dalam kepemilikan saham perusahaan.¹³ Dengan demikian, hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan tidak terbatas pada hubungan perburuhan, melainkan karyawan juga sekaligus pemilik perusahaan sehingga diharapkan dengan adanya rasa memiliki dalam perusahaan itu kinerja karyawan dalam perusahaan itu akan semakin baik. Saat ini pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan telah menjadi suatu praktek yang umum dilakukan dalam dunia usaha baik di negara maju maupun di negara berkembang, antara lain di Amerika Serikat, Rusia, Hungaria, Mesir, Jamaika, Trinidad-Tobago, dan Malaysia.

Seperti halnya di negara-negara lain, program kepemilikan saham oleh karyawan ini juga semakin banyak dilakukan di Indonesia. Secara umum, perusahaan yang menyelenggarakannya di Indonesia dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah emiten atau perusahaan publik yang berlokasi di Indonesia, dan kelompok kedua adalah perusahaan-perusahaan yang merupakan anak perusahaan dan perusahaan multinasional di luar negeri.¹⁴ Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai kepemilikan saham oleh karyawan masih terbatas pada penjatahan pasti atas saham yang ditawarkan saat penawaran umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Selain itu, bagi emiten atau perusahaan publik yang ingin melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan, selain dari penjatahan pasti tersebut juga bisa melakukannya melalui penerbitan saham baru yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.D.4 Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ataupun dengan cara

¹³ Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, *Studi Tentang Penerapan ESOP (Employee Stock Ownership Plan) Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, 2002), hlm. 17. Lihat juga Ron Bernstein, David Binns, Marshal Hyman, Martin Staubus. "Designing an Employee Stock Option Plan: A Practical Approach for the Entrepreneurial Company", Foundation for Enterprise Development, La Jolla, California, 2001.

¹⁴ I Made B. Tirthayatra, "Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (ESOP)".

perusahaan membeli kembali saham perusahaan (*share buyback*) yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor XI.B.2 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Walaupun di Indonesia pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan belum diatur secara khusus dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat potensi manfaat yang ada dalam pelaksanaannya untuk kemajuan perusahaan, sudah cukup banyak emiten atau perusahaan publik yang menjalankannya. Salah satu emiten atau perusahaan publik di Indonesia yang melakukan program ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menerapkan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan yang terdiri dari: Program Alokasi Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dan program pemberian opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*). Jumlah saham yang ditawarkan kepada karyawan melalui MESA adalah sebesar 226.928.500 saham dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum. Sedangkan rencana pemberian hak opsi kepada peserta program MESOP untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah dengan jumlah maksimum 4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.¹⁵

Terkait dengan belum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan di Indonesia khususnya pada emiten atau perusahaan publik, sejauh ini bagaimana program ini dilaksanakan? Dan sebagai emiten atau perusahaan publik, bagaimana kaitan antara pelaksanaan program ini dengan kewajiban akan keterbukaan informasi sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi investor? Oleh karena masih terdapatnya ketidakjelasan-ketidakjelasan tersebut, Penulis tertarik untuk menganalisa dan mengkajinya secara lebih lanjut dalam penulisan ilmiah dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN PADA**

¹⁵ Bursa Efek Indonesia, Pengumuman PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BBTN), No. Peng-P-00592/BEL.PPJ/12-2009.

PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA (STUDI KASUS: MESA DAN MESOP PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK)”.

1.2. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan tentang program kepemilikan saham oleh karyawan pada perseroan terbatas?
2. Bagaimana pengaturan tentang proses pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia, serta kaitannya dengan kewajiban atas keterbukaan informasi pada perusahaan publik?
3. Apakah kebijakan MESA dan MESOP sebagai alternatif dari program kepemilikan saham oleh karyawan yang dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Tujuan Umum
 - a. Sebagai suatu sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ilmiah ini, yaitu tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia. Selain itu, diharapkan dapat juga berguna bagi para akademisi dalam memperluas ilmu pengetahuannya dan juga para pihak yang tertarik pada dunia hukum bisnis khususnya bidang hukum pasar modal.

- b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat luas serta menjadi suatu masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia hukum bisnis sehingga dapat menambah khazanah pengetahuan praktis pada dunia hukum bisnis.

2. Tujuan Khusus

- a. Memahami lebih jelas mengenai konsep modal dan saham perseroan terbatas, serta pengaturan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perseroan terbatas sebagai salah satu sarana penambahan modal perseroan terbatas.
- b. Memahami lebih jelas mengenai proses pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia, serta kaitannya dengan kewajiban atas keterbukaan informasi pada perusahaan publik.
- c. Menganalisa proses pelaksanaan MESA dan MESOP oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk apakah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal Indonesia.

1.4. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran dan pemahaman serta persepsi yang sama tentang makna dan definisi dari konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan definisi dari konsep-konsep tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan.¹⁶

¹⁶ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756, Ps. 1 angka 1.

2. Saham adalah instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam suatu perusahaan.¹⁷
3. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹⁸
4. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.¹⁹
5. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.²⁰
6. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.²¹
7. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.²²
8. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.²³

¹⁷ Irsan Nasarudin, *et. al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ed.1, cet.5, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 188.

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, Ps. 1 angka 13.

¹⁹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 4.

²⁰ *Ibid.*, Ps. 1 angka 5.

²¹ *Ibid.*, Ps. 1 angka 6.

²² *Ibid.*, Ps. 1 angka 22.

9. Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.²⁴
10. Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan adalah program manajemen sumber daya manusia berupa program kepemilikan karyawan dalam saham perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja.²⁵
11. MESA adalah singkatan dari *Management and Employee Stock Allocation*, yaitu program alokasi saham manajemen dan karyawan.²⁶
12. MESOP adalah singkatan dari *Management and Employee Stock Option Plan*, yaitu program pemberian opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan.²⁷

1.5. Metode Penelitian

Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut dengan penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia secara umum serta melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan kebijakan MESA dan MESOP di PT Bank

²³ *Ibid.*, Ps. 1 angka 15.

²⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka 25. Lihat juga Ps. 1 angka 7 tentang pengertian Informasi atau Fakta Material, yaitu informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

²⁵ Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, *Studi Tentang Penerapan ESOP*, hlm. 3.

²⁶ Laporan Tahunan 2010 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, hlm. 177.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 178.

Tabungan Negara (Persero) Tbk dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, jika dilihat dari sudut sifatnya, adalah penelitian eksploratoris. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada.²⁸ Dalam hal ini Penulis ingin memaparkan atau menjelaskan mengenai proses pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia, yang seperti diketahui belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal ini. Oleh sebab itu, maka dalam tulisan ini akan dipaparkan atau dijelaskan lebih lanjut mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia serta dalam prakteknya, yaitu dengan menggunakan pelaksanaan MESA dan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai studi kasus.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia. Di dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang akan digunakan diantaranya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.D.4 Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor XI.B.2 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Bursa Efek Nomor I-A

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet.3*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008), hal. 10.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 32.

Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, serta Surat Edaran Bursa Efek Nomor: SE-003/BEJ/09-2005 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Penentuan dan Pelaporan Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, serta menjelaskan bahan hukum primer, yaitu antara lain teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya ensiklopedia atau kamus.

Adapun dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis alat pengumpulan data yaitu melalui:

1. Studi kepustakaan

Yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian kepustakaan terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan dibahas.

2. Studi Lapangan

Yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan media wawancara terhadap narasumber yang dianggap ahli dalam hal-hal yang akan dibahas dalam penulisan ilmiah ini.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan dinyatakan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.³⁰

³⁰ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 67.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini dibagi ke dalam lima bab dimana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian. Uraian atas masing-masing bab menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah, namun secara keseluruhan membentuk suatu pola yang sistematis dalam menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada. Berdasarkan hal tersebut, maka sistematika penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang akan dibahas, pokok-pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN PADA PERSEROAN TERBATAS

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai konsep modal dan saham pada perseroan terbatas diantaranya meliputi struktur modal perseroan terbatas, penyeteroran saham, hak pemegang saham dan klasifikasi saham; pengaturan pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perseroan terbatas sebagai bagian dari penambahan modal perseroan terbatas; serta beberapa varian program kepemilikan saham oleh karyawan.

BAB 3 PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN PADA PASAR MODAL INDONESIA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai proses pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan

publik di Indonesia yang dapat dilakukan melalui: penjatahan saham pada saat penawaran umum, melalui penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), atau melalui pembelian kembali saham oleh emiten atau perusahaan publik (*share buyback*), mengenai prinsip keterbukaan dalam pasar modal, serta mengenai konsep program opsi saham karyawan sebagai salah satu cara bagi karyawan untuk memiliki saham di tempatnya bekerja.

BAB 4 PELAKSANAAN MESA DAN MESOP PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai profil perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai pihak yang melaksanakan kebijakan MESA dan MESOP, dasar proses pelaksanaannya, serta analisa yuridis pelaksanaan kebijakan MESA dan MESOP tersebut ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB 5 PENUTUP

Sebagai bab penutup, bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran dari Penulis mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan.

BAB 2

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN PADA PERSEROAN TERBATAS

2.1. Modal dan Saham Perseroan Terbatas

Pengertian Perseroan Terbatas apabila dilihat dari asal katanya terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan adalah persekutuan yang modalnya terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata Terbatas ditujukan pada tanggung jawab pemegang saham atau pesero yang terbatas pada jumlah nominal dari saham-saham yang dimilikinya.³¹

Adapun Undang-undang Perseroan Terbatas mendefinisikan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.³²

Dari definisi Perseroan Terbatas tersebut dapat ditarik beberapa unsur, yaitu:

- a. Bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum
- b. Bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian
- c. Bahwa Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha
- d. Bahwa seluruh modal Perseroan Terbatas terbagi dalam saham
- e. Bahwa Perseroan Terbatas tunduk pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

³¹ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan) Jilid 2*, (Jakarta: Djambatan, 1984), hlm. 89.

³² Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, Nomor 40 Tahun 2007, Ps. 1 angka1.

Salah satu unsur definisi dari Perseroan Terbatas adalah bahwa modal Perseroan Terbatas seluruhnya terdiri atas saham-saham. Dari pernyataan ini terkandung maksud bahwa modal Perseroan Terbatas diperoleh dari penerbitan saham-saham. Dengan demikian sesungguhnya terdapat perbedaan pengertian antara modal dan saham. Modal adalah jumlah dana yang dibayarkan ke dalam kas Perseroan Terbatas yang jumlahnya sesuai dengan nilai nominal sahamnya. Bagi mereka yang memasukkan modal ke dalam kas Perseroan Terbatas, mendapatkan bukti penyertaan modal berupa saham. Dengan demikian, saham dapat diartikan sebagai surat bukti penyertaan modal ke dalam suatu Perseroan Terbatas. Orang yang menyertakan modal ke dalam Perseroan Terbatas juga disebut sebagai pemegang saham. Pemegang saham memiliki kepentingan terhadap Perseroan Terbatas dimana mereka menyertakan modal, terutama kepentingan atas perolehan laba sebagaimana tujuan utama suatu perusahaan didirikan.³³ Untuk mencapai perolehan laba ini, modal yang diperoleh melalui penerbitan saham digunakan Perseroan untuk melancarkan kegiatan usaha dan bisnis sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.

Modal di dalam ilmu ekonomi perusahaan diartikan sebagai suatu perwujudan persatuan benda yang dapat berupa barang, uang dan hal-hal yang dipergunakan oleh suatu badan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian modal disini berbeda dengan pengertian kekayaan, karena yang dimaksud dengan kekayaan adalah selisih antara milik badan usaha itu yang dinilai dalam jumlah uang dengan hutang-hutang badan usaha yang bersangkutan.³⁴ Dengan demikian, berarti modal merupakan bagian atau salah satu komponen harta kekayaan suatu perusahaan, yang nanti akan diperhitungkan bersama-sama dengan hutang yang dimiliki suatu perusahaan.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa modal adalah jumlah dana yang dibayarkan ke dalam kas Perseroan Terbatas yang jumlahnya sesuai dengan nilai nominal sahamnya. Dalam Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

³³ Agus Sardjono, *Buku Ajar Hukum Dagang*, (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 36.

³⁴ Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*, (Jakarta: Pardnya Paramita, 1986), hlm. 165.

Tentang Perseroan Terbatas pun diatur bahwa modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Nominal saham dicantumkan pada atau di atas saham, dan nilai nominal saham yang dicantumkan di atas saham haruslah dalam mata uang rupiah. Ketentuan ini bersifat imperatif (*dwingendrecht, mandatory rule*). Nilai nominal saham tidak boleh dicantumkan dalam mata uang asing, juga tidak diatur kebolehan mencantumkan mata uang asing yang dibarengi dengan ekuivalennya dalam mata uang rupiah. Nominal saham adalah sebesar yang tercantum di atas saham, yang disebut *per value stock* atau harga *a pari*.³⁵

Nilai nominal saham berbeda dengan harga pasar atau nilai pasar (*market value*). Nilai nominal saham adalah nilai per lembar saham tersebut yang didapat dari jumlah modal dasar perusahaan dibagi dengan jumlah lembar saham yang mewakilinya. Sedangkan harga pasar saham tersebut ditetapkan melalui penilaian terhadap perusahaan dan dengan memperhitungkan permintaan (*demand*) dari pembeli.³⁶ Harga atas saham di pasar (bursa) ditentukan tanpa melihat nominal saham. Nilai nominal dan harga saham merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bergantung atau berpengaruh satu sama lain. Penilaian atau penentuan berapa harga saham yang harus dibayar oleh pembeli (investor) sama sekali hampir atau bahkan tidak melihat pada harga nominal. Bahkan nilai nominal saham sama sekali tidak relevan ketika investor melakukan pembelian atau penjualan atas saham miliknya. Hal ini dikarenakan oleh nilai atau harga saham tersebut ditentukan oleh faktor-faktor lain di luar nilai nominal tersebut, seperti:³⁷

- a. keadaan perusahaan secara umum baik dari kekayaan, manajerial, maupun prospeknya (termasuk juga produk perusahaan di pasar)
- b. keadaan ekonomi suatu negara dimana perusahaan itu ada (atau keadaan ekonomi dunia pada umumnya)
- c. keadaan atau situasi politik pada umumnya.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas, cet.3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 260.

³⁶ Asril Sitompul, *Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya)*, hlm. 6.

³⁷ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 99.

Dengan kata lain setelah berdirinya suatu Perseroan, nilai nominal atas saham Perseroan tidak lagi mencerminkan nilai dari Perseroan. Nilai nominal saham hanya mencerminkan keadaan Perseroan ketika pertama kali didirikan, yaitu ketika penyetoran atas harga saham tersebut dilakukan oleh pendirian saham.

2.1.1. Struktur Modal Perseroan Terbatas

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham perseroan. Harta kekayaan Perseroan Terbatas terdiri dari modal yang terdiri atas:³⁸

a. Modal dasar

Modal dasar atau disebut juga dengan *authorized capital*, adalah jumlah saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham.³⁹ Mengenai jumlah modal dasar suatu Perseroan Terbatas haruslah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dimana harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar bahwa jumlah modal dasar terbagi dalam saham dengan nilai nominal yang pasti (*fixed nominal values*) namun dapat diperbesar jumlahnya dengan menerbitkan saham baru.⁴⁰

b. Modal yang disanggupkan atau ditempatkan

Modal yang Ditempatkan (*Issued Capital*) adalah saham yang telah diambil dan sebenarnya telah terjual, baik kepada para pendiri maupun pemegang saham Perseroan. Para pemegang saham yang telah menyanggupi untuk mengambil bagian sebesar atau sejumlah tertentu dari

³⁸ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, hlm. 102.

³⁹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, cet.1, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 55.

⁴⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 234.

saham Perseroan mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyeteroran kepada Perseroan.⁴¹

c. Modal yang disetor

Modal yang Disetor (*Paid up Capital*) adalah saham yang telah dibayar penuh kepada Perseroan yang menjadi penyertaan atau penyeteroran saham riil yang telah dilakukan, baik oleh pendiri maupun para pemegang saham Perseroan.⁴²

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 32 ayat 1 telah menentukan jumlah minimal modal dasar perseroan, yaitu sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), walaupun jumlah ini belum pasti karena ada beberapa bidang kegiatan usaha tertentu yang jumlah minimal modal dasarnya dapat ditentukan lebih besar oleh undang-undang lain. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha tertentu ini, antara lain kegiatan usaha perbankan, kegiatan usaha asuransi atau *freight forwarding*. Adapun dari modal dasar tersebut, minimal 25% harus ditempatkan dan disetor penuh pada saat pendirian Perseroan. Jadi sekiranya modal ditempatkan diambil oleh para pendiri sebesar 50% dari modal dasar, maka yang harus disetor penuh adalah sebesar 50% dan harus dibayar lunas.

2.1.2. Penyeteroran Saham

Dalam Penjelasan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas secara jelas ditegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyeteroran atas saham dengan cara mengangsur. Mengenai penyeteroran modal tersebut, dibuktikan dengan “tanda bukti penyeteroran yang sah” antara lain bukti setoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas nama Perseroan, data laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

⁴¹ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, hlm. 55.

⁴² *Ibid.*

Undang-undang Perseroan Terbatas dalam Pasal 34 ayat 1 juga menentukan bahwa penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lainnya. Penyetoran atas saham umumnya dilakukan dalam bentuk tunai, yaitu dengan cara membayar harga setoran tersebut kepada perseroan, yang kemudian menerbitkan saham tersebut untuk pemegang saham yang bersangkutan. Untuk perseroan yang baru didirikan, penyetoran atas saham perseroan biasanya dilakukan menurut nilai nominal saham, dimana investor hanya diwajibkan untuk membayar harga saham sesuai dengan harga yang ditulis di atas kertas saham. Dengan demikian seorang pemegang saham dalam suatu perseroan yang baru didirikan misalnya akan menyetorkan uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) misalnya untuk mendapatkan 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham perseroan yang memiliki nilai nominal Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Akan tetapi untuk perusahaan-perusahaan yang telah berdiri dan menjalankan usahanya dengan baik sehingga sudah berkembang, penyetoran tersebut tidak harus sesuai dengan nilai nominal. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut telah berkembang dan menjadi lebih besar dibandingkan ketika pertama kali didirikan. Oleh karena itu calon pemegang saham yang bermaksud membeli saham perseroan biasanya akan membayar melebihi nilai nominal saham tersebut. Pembayaran atau selisih antara nilai nominal saham dengan harga yang harus dibayar oleh pemegang saham tersebut adalah apa yang disebut dengan agio.⁴³

Adapun penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, biasa disebut “pemasukan barang” modal atau “inbreng” atau “*capital brought in to/put into the business*”. Agar penyetoran saham dalam bentuk lain ini dapat dibenarkan hukum, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁴

- a. Dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud
- b. Dapat dinilai dengan uang
- c. Secara nyata telah diterima oleh Perseroan

⁴³ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 95.
“Agio adalah selisih dari seluruh penjualan oleh emiten (pada harga penawaran) dengan nilai nominalnya. Agio saham dicatat oleh emiten sebagai bagian dari modal sendiri”. Lihat juga Johar Arifin dan Muhammad Fakhrudin, *Kamus Istilah Pasar Modal, Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 1999), hlm. 10.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 238.

- d. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang, harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Mengenai penyetoran modal saham yang dilakukan dalam bentuk lain, penilaian setoran modal saham tersebut ditentukan berdasarkan nilai wajar (*fair value*) yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar (*market value*) ataupun berdasarkan penetapan ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Adapun nilai wajar itu mula-mula ditentukan sesuai dengan nilai pasar, jika nilai pasar tidak tersedia maka ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Sedangkan penerapan ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan adalah ahli yang:⁴⁵

- a. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan,
- b. Tidak mempunyai hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris,
- c. Tidak mempunyai hubungan pengendali dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung, dan/atau
- d. Tidak mempunyai hubungan kepemilikan saham dalam Perseroan sebesar 20% atau lebih.

Selanjutnya apabila penyetoran saham dalam bentuk lain terdiri atas benda tidak bergerak, maka menurut Pasal 34 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas penyetoran itu harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih dan pengumuman itu dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah Akta Pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Adapun maksud pengumuman itu adalah untuk memenuhi asas publisitas, yaitu

⁴⁵ Lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 34 ayat 2 beserta Penjelasan.

agar diketahui oleh umum dan juga memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas penyetoran benda tersebut sebagai setoran modal saham, padahal benda itu bukan milik penyetor melainkan milik pihak ketiga.

2.1.3. Hak Pemilik Saham dan Klasifikasi Saham

Terhadap para pemegang saham suatu Perseroan, direksi wajib mengadakan dan melakukan penyimpanan Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus. Adapun informasi yang sekurang-kurangnya dimuat dalam DPS, antara lain sebagai berikut:⁴⁶

- a. Nama dan alamat pemegang saham
- b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham.
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham, paling sedikit sama dengan nilai nominal saham.
- d. Nama dan alamat dari perorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham, atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
- e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain.

Selain berkewajiban mengadakan dan menyimpan DPS, Pasal 50 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 juga mengamanatkan bahwa Direksi juga wajib untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus. Daftar Khusus dalam hal ini sebagai salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan lain, sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Adapun Daftar Khusus memuat keterangan mengenai:

⁴⁶ Indonesia, *Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007*, Ps. 50 ayat 1.

- a. Saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain. Yang dimaksud dengan keluarganya adalah istri atau suami dan anak-anaknya.
- b. Tanggal saham diperoleh

Terhadap DPS dan Daftar Khusus yang disediakan di tempat kedudukan perseroan, yang berhak untuk melihatnya hanya terbatas pada pemegang saham saja, tidak semua pihak dapat melihatnya. Oleh karena itu, di luar pemegang saham tidak dapat memaksakan untuk melihatnya. Pembatasan ini dianggap wajar, karena yang bukan pemegang saham tidak ada kepentingan untuk mengetahui perubahan susunan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

DPS ini menjadi penting keberadaannya dikarenakan hak-hak utama yang dimiliki oleh pemegang saham baru berlaku dan melekat pada diri pemilik saham setelah saham itu dicatat dalam DPS atas nama pemiliknya. Adapun yang termasuk hak utama pemilik saham antara lain:⁴⁷

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
- c. Menjalankan haknya berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas

Akan tetapi, ketentuan mengenai hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, dapat menjadi tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu bagi pemegang saham tersebut. Atau dengan kata lain, hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham adalah tergantung dari klasifikasi saham yang dimilikinya. Saham suatu perseroan terbatas dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama, atau dapat disebut dengan klasifikasi saham. Salah satu prinsip klasifikasi saham, yaitu berupa hak yang sama (*equal right*) kepada pemegangnya.⁴⁸ Jadi, setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama pula. Undang-undang Perseroan Terbatas memperbolehkan Anggaran Dasar Perseroan untuk menetapkan satu atau lebih

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 263

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 264.

klasifikasi saham. Apabila klasifikasi saham suatu Perseroan lebih dari satu, maka Anggaran Dasar harus menetapkan salah satu diantaranya sebagai “saham biasa”. Adapun klasifikasi saham yang diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, antara lain:⁴⁹

a. Saham Biasa

Klasifikasi atau jenis saham biasa ini disebut juga *gewoonte aandeel*, *ordinary share*, *common share*, atau *equity share*. Yang dimaksud dengan saham biasa menurut Penjelasan Pasal 53 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas, adalah:

- 1) Saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan
- 2) Mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan
- 3) Mempunyai hak menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

Saham biasa diberikan kepada setiap orang yang memberikan pemasukan sejumlah uang kepada Perseroan. Kepada orang itu diberikan beberapa lembar saham sesuai dengan uang pemasukannya. Pada setiap saham biasa secara imperatif melekat hak-hak yang disebut diatas. Hak-hak itu dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang mana pengaturannya dalam Anggaran Dasar tersebut boleh melebihi hak-hak yang telah disebut diatas.

b. Saham dengan Tanpa Hak Suara

Seperti yang dijelaskan diatas, saham biasa memberi tiga jenis hak kepada pemiliknya. Salah satu diantaranya, hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS. Akan tetapi, Undang-undang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 53 ayat 4 huruf e membolehkan pengeluaran saham “tanpa hak suara” (*aandelen zonderstemrecht*, *non voting share*) bagi pemiliknya. Dengan demikian pemilik saham ini tidak berhak mengikuti RUPS

⁴⁹ *Ibid.* Lihat juga Pasal 52 ayat 1 dan Pasal 53 ayat 4 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan, karena tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan kesepakatan berkenaan dengan pengurusan Perseroan.

c. Saham dengan Hak Khusus untuk Mencalonkan Anggota Direksi dan/atau Anggota Komisaris

Yang dimaksud dengan klasifikasi saham ini sama dengan “saham prioritas” (*prioriteit aandelen*). Pemilik saham jenis ini mempunyai “hak berbicara khusus” (*bijzondere zeggenschaprechten*). Dalam hal ini, kepada pemilik saham diberi hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan hak ini tidak diberikan kepada pemilik klasifikasi saham yang lain. Oleh karena itu, pemilik saham klasifikasi ini memiliki klausul “oligarki” (*oligarchische clausule, oligarchic clause*) mengenai pencalonan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris secara mutlak.

d. Saham yang Dapat Ditarik Kembali

Yang dimaksud dengan klasifikasi saham ini adalah saham yang setelah jangka waktu tertentu:

- Ditarik kembali, atau
- Ditukar dengan klasifikasi saham lain (*converteerbaar aandelen, convertible share*).

e. Saham yang Memberikan Hak Dividen Lebih Dahulu

Saham klasifikasi ini disebut juga “saham utama” (*preferente aandelen, preference share*). Saham ini memberi atau mempunyai hak lebih dahulu dari “saham biasa” dalam memperoleh keuntungan dan/atau saldo. Oleh karena itu, saham yang mempunyai hak utama atau hak preferen dapat lagi dipecah dalam subklasifikasi sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Saham preferen atau saham utama (*preferente aandelen, preference share*) memperoleh dividen

⁵⁰ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, hlm. 118-119.

Saham ini mempunyai hak lebih dahulu memperoleh pembagian dividen dari pemegang saham klasifikasi lain. Misalnya, kalau pemegang saham biasa menerima dividen 20%, maka saham utama lebih dahulu menerima dividen 20% ditambah 5% sehingga menjadi 25%.

2) Saham utama kumulatif (*cumulatief preferent aandeel, cumulative preference share*)

Yaitu saham preferen yang memberikan hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif. Saham ini mempunyai hak lebih dahulu daripada saham utama atau saham preferen untuk memperoleh hak atas “dividen tunggakan”. Umpamanya apabila pada satu tahun pemegang saham utama kumulatif, karena keadaan tertentu, hanya menerima dividen, maka pada tahun berikutnya apabila keadaan telah memungkinkan, pemegang saham dapat menerima dividen yang tertunggak pada tahun yang lalu.

f. Saham Utama Menerima Lebih Dahulu Pembagian Sisa Kekayaan Perseroan Dalam Likuidasi

Saham jenis ini disebut juga dengan *liquidation preference*. Memang pada umumnya, secara tradisional semua klasifikasi saham secara teoritis mempunyai hak untuk berpartisipasi memperoleh pembagian atas sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi. Akan tetapi, dalam Anggaran Dasar Perseroan dapat ditetapkan klasifikasi saham yang mempunyai hak utama memperoleh pembagian hasil sisa kekayaan likuidasi (*liquidation preference*) dari klasifikasi saham lain. Diluar saham utama likuidasi dapat juga ditetapkan klasifikasi saham yang tidak berpartisipasi atas hasil aset likuidasi. Dengan demikian, ada klasifikasi saham yang berpartisipasi dan ada juga yang tidak berpartisipasi terhadap pembagian hasil kekayaan perseroan dalam likuidasi.

2.2. Penambahan Modal dan Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Pada Perseroan Terbatas

Dalam hal suatu perusahaan ingin mengembangkan kegiatan usahanya, maka untuk mendukung rencana tersebut dibutuhkan suntikan dana yang salah satunya dapat diperoleh melalui penambahan modal perusahaan. Yang dimaksud dengan penambahan modal perseroan menurut Pasal 41 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas, dapat berarti penambahan modal dasar, modal ditempatkan, atau modal disetor. Untuk dapat melakukan penambahan modal perseroan, maka harus dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS. Dalam hal ini, RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS atas penambahan modal perseroan, yang meliputi penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan RUPS. Akan tetapi, pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris ini tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam Daftar Pemegang Saham. Penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris ini dibatasi jangka waktunya oleh Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas, yaitu paling lama satu tahun. Pembatasan jangka waktu itu bersifat final, dalam arti jika jangka waktu itu dilampaui maka dengan sendirinya penyerahan kewenangan itu berakhir. Tidak dapat diperpanjang dikarenakan ketentuan itu sendiri tidak menegaskan bahwa dapat diperpanjang lagi. Penyerahan kewenangan ini pun sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Untuk penambahan modal dasar perseroan, agar keputusan RUPS terkait masalah ini sah, dalam Pasal 42 ayat 1 dinyatakan bahwa RUPS harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar. Hal ini mengingat penambahan besar modal dasar merupakan salah satu bentuk perubahan Anggaran Dasar, sehingga harus ditetapkan oleh RUPS.⁵¹ Adapun dalam Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas

⁵¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, Ps. 19 ayat 1 jo. Ps. 21 ayat 2.

ditentukan bahwa RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum 2/3 bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS, dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali jika Anggaran Dasar menentukan kuorum yang lebih besar. Selain itu, nantinya keputusan RUPS terkait penambahan modal dasar ini harus mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia agar sah menurut hukum.

Untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor, dilakukan dengan pengeluaran saham dari modal atau saham portefel. Modal atau saham portefel (*aandelen portefeulle, share portfolio*) adalah saham yang “belum dikeluarkan” atau “belum ditempatkan”.⁵² Jadi apabila saham yang dikeluarkan atau ditempatkan berjumlah 25% dari modal dasar, berarti modal portefel yang belum dikeluarkan atau ditempatkan adalah sebesar 75%. Setiap saat saham portefel dapat dikeluarkan untuk menambah modal ditempatkan, dengan syarat harus disetor penuh dan dibayar lunas. Mengenai RUPS yang dilakukan untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor, berbeda dengan RUPS penambahan modal dasar, yang dapat digambarkan sebagai berikut:⁵³

- a. Kualitas dan sifat RUPS penambahan modal ditempatkan dan disetor tidak dikategorikan sebagai RUPS perubahan Anggaran Dasar, melainkan disamakan dengan RUPS biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 86 Undang-undang Perseroan Terbatas.
- b. Dengan demikian, keputusan RUPS terkait penambahan modal ditempatkan dan disetor ini sah apabila: RUPS dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari ½ bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, dan disetujui oleh lebih dari ½ bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam Anggaran Dasar.
- c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor yang dilakukan wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia

⁵² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 237.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 250.

untuk dicatat dalam Daftar Perseroan serta untuk diumumkan oleh Menteri dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Setiap penambahan modal perseroan, baik penambahan modal dasar atau modal ditempatkan, akan diikuti dengan tindakan pengeluaran saham. Untuk seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal, dalam hal yang yang dikeluarkan adalah saham atas klasifikasi yang sama, maka haruslah terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham dimana penawaran tersebut seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Sedangkan dalam hal saham yang dikeluarkan adalah saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, juga ditentukan bahwa yang berhak untuk membelinya lebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Sehingga dari ketentuan Pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk pengeluaran saham dalam rangka penambahan modal, harus terlebih dahulu ditawarkan pada setiap pemegang saham. Hak pemegang saham untuk ditawari terlebih dahulu dalam hal perseroan mengeluarkan saham dalam rangka penambahan modal inilah yang biasa disebut dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Namun, selanjutnya diatur bentuk-bentuk pengecualian dimana terdapat ketentuan yang tidak mewajibkan perseroan untuk menawarkan pengeluaran saham pada setiap pemegang saham. Ditegaskan dalam Pasal 43 ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas bahwa ketentuan yang mewajibkan penawaran seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi yang sama, “tidak berlaku” apabila pengeluaran saham:

- a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan
- b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS
- c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi atau restrukturisasi yang telah disetujui RUPS.

Yang dimaksud dengan “saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan”, menurut Penjelasan Pasal 43 ayat 3 huruf a antara lain adalah saham yang dikeluarkan dalam rangka ESOP (*Employee Stock Option Program*) Perseroan dengan segenap hak dan kewajiban yang melekat padanya. Pengecualian terhadap pengeluaran saham yang ditujukan untuk karyawan perseroan pada Pasal 43 ayat 3 huruf a inilah yang menjadi satu-satunya ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang memungkinkan adanya program kepemilikan saham oleh karyawan pada perseroan terbatas, yaitu dalam bentuk *Employee Stock Option Plan* atau opsi saham karyawan.

Tentunya untuk dapat dijalankan dengan baik diperlukan pengaturan lebih lanjut dan lebih rinci mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan ini, namun sayangnya hingga saat ini di Indonesia belum ada perangkat hukum yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut. Padahal mengingat manfaatnya yang dapat digunakan sebagai salah satu strategi peningkatan kinerja perusahaan, sudah cukup banyak perusahaan di Indonesia yang menjalankan program ini. Dengan memungkinkan partisipasi karyawan untuk memiliki saham perusahaan tempat mereka bekerja, diharapkan para karyawan akan lebih termotivasi dan semakin berkomitmen untuk bekerja lebih baik lagi yang pada akhirnya juga akan meningkatkan nilai perusahaan.

Gagasan tentang kepemilikan saham oleh karyawan ini pertama kali datang pada tahun 1950-an dari seorang ahli hukum yang juga seorang *investment banker* Amerika Serikat yang bernama Louis Kelso. Ia berpendapat bahwa sistem kapitalis akan menjadi lebih kuat apabila karyawan diikutsertakan dalam kepemilikan saham perusahaan.⁵⁴ Dengan demikian, hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan tidak terbatas pada hubungan perburuhan, melainkan karyawan juga berkedudukan sekaligus sebagai pemilik perusahaan. Diharapkan hal ini dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) dalam perusahaan, sehingga kinerja karyawan dalam perusahaan tempatnya bekerja juga akan semakin baik.

⁵⁴ Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, *Studi Tentang Penerapan ESOP*, hlm. 17.

Program kepemilikan saham oleh karyawan pada umumnya diselenggarakan untuk mencapai beberapa tujuan antara lain sebagai berikut:⁵⁵

- a. Memberikan penghargaan (*reward*) kepada seluruh pegawai, direksi, dan pihak-pihak tertentu atas kontribusinya terhadap meningkatnya kinerja perusahaan;
- b. Menciptakan keselarasan kepentingan serta misi dari pegawai dan pejabat eksekutif dengan kepentingan dan misi pemegang saham, sehingga tidak ada benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak-pihak yang menjalankan kegiatan usaha perusahaan;
- c. Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap perusahaan karena mereka juga merupakan pemilik perusahaan, sehingga diharapkan akan meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan;
- d. Menarik, mempertahankan, dan memotivasi (*attract, retain, and motivate*) pegawai kunci perusahaan dalam rangka peningkatan *shareholders' value*.
- e. Sebagai sarana program sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan strategi bisnis perusahaan jangka panjang, karena program kepemilikan saham oleh karyawan pada dasarnya merupakan bentuk kompensasi yang didasarkan atas prinsip insentif, yaitu ditujukan untuk memberikan pegawai suatu penghargaan yang besarnya dikaitkan dengan ukuran kinerja perusahaan atau *shareholders' value*.

2.3. Varian Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan

Terdapat beberapa pendekatan yang tersedia bagi perusahaan dalam rangka melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan. Penggunaan masing-masing pendekatan didasari oleh kebutuhan dari masing-masing perusahaan dan setiap pendekatan tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan tersebut, antara lain:

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 10.

1. Pemberian Saham (*Stock Grants*)⁵⁶

Pendekatan paling sederhana adalah suatu perusahaan dapat menghibahkan saham perusahaan kepada karyawan-karyawan yang terpilih. Seringkali, hal ini dilakukan sebagai suatu bentuk kompensasi bonus sebagai penghargaan kepada karyawan atas kinerja yang tinggi, untuk mengenalkan pentingnya seorang karyawan kunci, atau sistem penggajian baru di suatu organisasi. Hibah ini dapat berupa tanpa pembatasan (“*non restricted*”) atau dengan pembatasan (“*restricted*”).

Pemberian saham tanpa pembatasan adalah suatu pemberian penghargaan berupa saham, biasanya diberikan kepada karyawan kunci untuk mencapai tujuan keuangan atau tujuan strategis. Penghargaan ini mirip dengan suatu bonus kas tradisional tetapi penghargaannya dalam bentuk saham. Pemberian saham dengan pembatasan adalah suatu penghargaan yang terikat dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi karyawan. Pembatasan yang paling umum adalah suatu jadwal tunggu berdasarkan waktu, yang mengharuskan karyawan untuk tetap di perusahaan selama suatu jangka waktu tertentu sebelum seluruh kepemilikan atas seluruh sahamnya ditransfer. Pengunduran diri atau pemutusan hubungan kerja karyawan sebelum memenuhi ketentuan tersebut akan berakibat pada hilangnya hak atas pemberian saham yang belum terlewati masa tungguannya dan akan dikembalikan ke perusahaan.

2. Program Pembelian Saham Oleh Karyawan (*Direct Employee Stock Purchase Plans*)⁵⁷

Program Pembelian Saham Oleh Karyawan memungkinkan karyawan membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang menguntungkan. Keputusan karyawan untuk membeli saham yang tersedia untuknya adalah sukarela.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

Dengan program ini karyawan dapat membayar sahamnya melalui pemotongan gaji. Karena karyawan diharuskan membayar “*up front*” (di muka) atas saham yang mereka beli, suatu program pembelian saham oleh karyawan secara umum tidak menghasilkan tingkat partisipasi yang tinggi (biasanya kurang dari 25% dari karyawan yang memenuhi syarat), juga tidak akan merubah ekuitas perusahaan dalam jumlah besar kepada tenaga kerjanya (bila dibandingkan dengan program kepemilikan saham yang lain).

Karena karyawan menginvestasikan uangnya sendiri ketika mereka memperoleh saham melalui suatu *direct purchase plan*, perusahaan harus memastikan bahwa saham yang ditawarkan termasuk dalam kualifikasi untuk pengecualian dari ketentuan registrasi (pernyataan pendaftaran). Pengecualian tersebut secara umum tersedia untuk penjualan yang dibatasi kepada karyawan.

3. *Phantom Stock and Stock Appreciation Rights (SARs)*⁵⁸

Selain pendekatan-pendekatan di atas, terdapat beberapa pendekatan lain untuk membagi ekuitas dengan para karyawan yang secara teknis tidak mengakibatkan transfer kepemilikan saham kepada para karyawan. Sering kali disebut sebagai “*synthetic equity*” programs (program ekuitas sintesis). Program jenis ini dapat dipakai apabila transfer aktual atas kepemilikan ekuitas kepada karyawan adalah tidak memungkinkan atau tidak diinginkan.

Stock Appreciation Rights (SARs) dan *Phantom Stock* adalah penanggungan kompensasi yang khusus dan alat kompensasi insentif yang dirancang untuk memberikan karyawan keuntungan ekonomis atas kepemilikan saham tanpa disertai terjadinya transfer saham sesungguhnya. Suatu program SARs merupakan sebuah hibah kepada seorang karyawan yang memberikannya hak pada suatu waktu tertentu di masa yang akan datang untuk menerima penghargaan berupa kas sebesar kenaikan dalam nilai dari sejumlah tertentu bagian saham perusahaan. *Phantom Shares*

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

merupakan bagian-bagian dari nilai yang berkaitan dengan jumlah ekuivalen saham. Sebagaimana dengan SARs, nilai dari suatu penghargaan *Phantom Stock* biasanya dibayar kepada karyawan dengan kas.

Pertimbangan yang dapat mendukung penggunaan jenis program ini dibandingkan suatu program ekuitas yang sesungguhnya adalah ketentuan pernyataan pendaftaran (*securities registration requirement*), perlakuan akuntansi dan pajak, dan fleksibilitas yang berkaitan dengan penghargaan untuk aspek khusus dari usaha perusahaan (seperti suatu divisi yang tidak secara terpisah berbentuk badan hukum). SARs dan *Phantom Stock* populer bagi perusahaan milik keluarga dimana keluarga tidak menginginkan untuk melepaskan kepemilikan sahamnya. Program-program ini juga dapat digunakan untuk memberikan ekuitas seperti insentif yang dikaitkan dengan kinerja dari suatu divisi perusahaan atau anak perusahaan dan juga dapat digunakan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan asing yang dikarenakan kompleksitas hukum dan administrasi dari hukum negara asalnya membuatnya sulit untuk diberikan penghargaan berupa surat berharga.

4. *Employee Stock Ownership Plans (ESOPs)*⁵⁹

ESOPs merupakan suatu jenis program pensiun yang dirancang untuk menerima kontribusi perusahaan pada suatu pengelola dana (*fund*) yang akan melakukan investasi pada saham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Pendekatan ini merupakan program kepemilikan saham oleh karyawan yang diformulasikan oleh Kelso.

Terdapat dua jenis program ESOPs yang dikenal dalam praktek, yaitu ESOPs *non leveraged* dan ESOPs *leveraged*. ESOPs *non leveraged* dirancang untuk investasi terutama dalam saham perusahaan yang mendukungnya. Dengan suatu ESOPs *non leveraged*, perusahaan membuat suatu kontribusi kepada suatu akun *Trust* setiap tahun atas nama masing-masing karyawan, kebanyakan perusahaan akan mengkontribusi

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

ke suatu program pensiun. Kontribusi tersebut dapat dibuat dalam bentuk saham (yang memperbaiki arus kas perusahaan karena tidak memerlukan pengeluaran), atau dapat juga berbentuk kas yang kemudian digunakan oleh *Trust* untuk membeli saham perusahaan. Saham yang diperoleh dengan program ini dialokasikan kepada akun-akun perorangan yang dikelola untuk masing-masing karyawan yang berpartisipasi. Para karyawan menerima saldo akun mereka setelah pensiun atau pemberhentian oleh perusahaan.

Pada perusahaan yang tidak berencana untuk *go public* atau akan diakuisisi oleh seorang Penawar, *Leveraged ESOPs* telah menjadi sarana ekuitas yang digunakan secara meluas. Program ini dapat digunakan oleh pemilik perusahaan sebagai suatu strategi keluar, memungkinkan untuk menjual sahamnya kepada sekelompok karyawan sebesar nilai pasar wajar penuhnya. *ESOPs* mendanai pembelian dengan melalui suatu pinjaman, yang dijamin oleh perusahaan.

Secara singkat digambarkan, suatu jenis *Leveraged ESOPs* bekerja dalam empat tahap, sebagai berikut:

Tahap Pertama : nilai pasar wajar saham pemilik ditentukan melalui jasa seorang profesional, konsultan penilai independen;

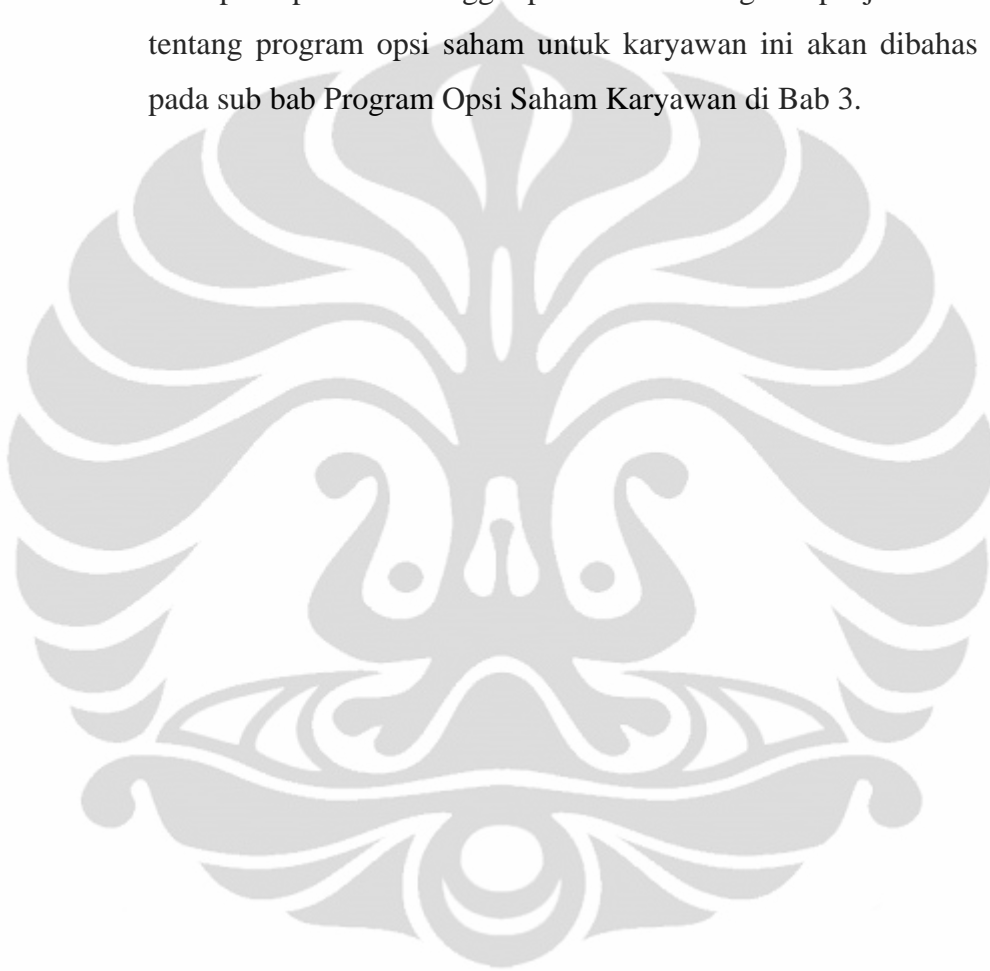
Tahap Kedua : perusahaan membentuk suatu *ESOPs*, yang meliputi pembentukan suatu *Trust* yang akan memegang saham yang akan dibeli oleh para karyawan. Orang atau institusi yang ditunjuk oleh perusahaan akan bertindak sebagai *trustee*;

Tahap Ketiga : *Trustee* meminjam uang dari sebuah bank atau kreditur lainnya, menggunakan kredit perusahaan sebagai penjamin;

Tahap Keempat : *Trustee* mewakili pemilik dengan sebuah check untuk harga beli dan pemilik mentransfer sahamnya kepada *trust*. Kemudian, setelah perusahaan membayar kembali pinjaman *ESOPs*, saham tersebut dialokasikan kepada akun-akun perorangan yang telah dibentuk oleh *trust* untuk masing-masing karyawan.

5. Program Opsi Saham (*Stock Option Plans*)⁶⁰

Pada intinya, dengan program opsi saham suatu perusahaan memberikan kepada karyawan secara perorangan hak kontraktual, atau opsi, untuk membeli suatu jumlah tertentu atas saham perusahaan sepanjang periode waktu tertentu, membayar dengan harga yang ditetapkan pada saat tanggal pemberian. Mengenai penjelasan lebih lanjut tentang program opsi saham untuk karyawan ini akan dibahas tersendiri pada sub bab Program Opsi Saham Karyawan di Bab 3.



⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

BAB 3

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN PADA PASAR MODAL INDONESIA

3.1. Penyelenggaraan Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Pada Perusahaan Publik

Hingga saat ini di Indonesia belum ada perangkat hukum yang mengatur tentang program kepemilikan saham oleh karyawan secara khusus, baik ditinjau dari aspek pasar modal, perpajakan, maupun ketenagakerjaan. Hal ini mengakibatkan penerapan program kepemilikan saham oleh karyawan dibatasi oleh rambu-rambu hukum yang sesungguhnya tidak secara khusus didesain untuk mengatur hal tersebut. Pada Undang-undang Perseroan Terbatas pun ketentuan yang mengatur tentang program kepemilikan saham oleh karyawan hanyalah Pasal 43 ayat 3 dimana dalam hal Perseroan menawarkan pengeluaran saham dalam rangka penambahan modal, ketentuan yang mewajibkan penawaran seluruh saham yang dikeluarkan tersebut harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi yang sama (*Right Issue* atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu / HMETD), adalah “tidak berlaku” apabila pengeluaran saham tersebut ditujukan kepada karyawan Perseroan dalam rangka program kepemilikan saham oleh karyawan. Dalam hal ini Undang-undang Perseroan Terbatas menyebutkan program opsi saham (*Employee Stock Option Program*) sebagai bentuk penyelenggaraan program kepemilikan saham oleh karyawan. Tidak diatur lebih lanjut mengenai bagaimana syarat-syarat dan proses pelaksanaan dari program itu sendiri.

Walaupun belum ada perangkat hukum yang khusus mengatur mengenai pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan, pada prakteknya, mengingat manfaat yang ada dari program tersebut, telah cukup banyak perusahaan dalam hal ini perusahaan publik yang telah melaksanakan program

kepemilikan saham oleh karyawan tersebut. Umumnya terdapat 3 (tiga) cara bagi perusahaan publik atau emiten di Indonesia untuk menyelenggarakan program kepemilikan saham oleh karyawan.

3.1.1. Melalui Penjatahan Saham Pada Penawaran Umum

Dasar dari pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan melalui penjatahan saham pada penawaran umum adalah Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Yang dimaksud dengan Penawaran Umum itu sendiri adalah meliputi penawaran efek oleh emiten yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) pihak dalam batas nilai serta batas waktu tertentu⁶¹, dan biasanya penawaran umum ini dilaksanakan dengan maksud untuk menghimpun modal. Menurut Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7, setiap penawaran umum harus mempunyai satu Manajer Penjatahan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan efek (pembagian atau distribusi efek kepada investor) dalam suatu penawaran umum, atau emiten itu sendiri dalam hal tidak menggunakan jasa Penjamin Emisi Efek.⁶²

Mengenai pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan melalui penjatahan saham pada penawaran umum, Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 dalam angka 11 huruf b butir 2 (a) menyatakan bahwa penjatahan saham dapat diprioritaskan kepada pegawai emiten sampai dengan jumlah paling banyak 10% dari jumlah saham penawaran umum. Banyak perusahaan yang memanfaatkan peraturan ini untuk menyelenggarakan program kepemilikan saham oleh karyawan,

⁶¹ Indonesia, *Undang-undang Tentang Pasar Modal*, Penjelasan Ps. 1 angka 15.

⁶² Lihat angka 2 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

dikarenakan program tersebut dalam hal ini menjadi bagian dari program penawaran umum sehingga tidak ada prosedur khusus yang harus dipenuhi perusahaan dalam menyelenggarakan program kepemilikan saham oleh karyawan di luar prosedur penawaran umum yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, konsekuensinya adalah program kepemilikan saham oleh karyawan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pernyataan pendaftaran penawaran umum dinyatakan efektif oleh Bapepam.

3.1.2. Melalui Penambahan Modal Tanpa HMETD

Umumnya dalam menerbitkan saham baru, emiten atau perusahaan publik harus memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD atau *Right Issue*) kepada pemegang saham yang ada untuk membeli saham-saham yang akan diterbitkan tersebut. HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru, termasuk saham, efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.⁶³ Pemberian HMETD ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan kepada pemegang saham yang ada agar penerbitan saham baru tersebut tidak menyebabkan kepemilikan pemegang saham lama menjadi terdilusi.

Dengan adanya Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, pemberian HMETD kepada pemegang saham lama tidak diwajibkan dengan syarat wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dan sepanjang saham baru yang diterbitkan tidak melebihi 10% dari modal disetor selama jangka waktu 2 tahun, atau dalam hal penerbitan saham baru tersebut dilakukan dalam rangka memperbaiki posisi keuangan perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:⁶⁴

⁶³ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Bapepam Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu*, Nomor IX.D.4, angka 1 huruf b.

⁶⁴ *Ibid.*, angka 2 huruf a.

- a. Bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
- b. Perusahaan lain selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% dari aset perusahaan tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal; atau
- c. Perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham baru atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Dengan adanya celah hukum untuk menerbitkan saham baru tanpa harus memberikan HMETD kepada pemegang saham lama ini, maka banyak emiten atau perusahaan publik yang menyelenggarakan ESOP dengan menggunakan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 ini.

3.1.3. Melalui Pembelian Kembali Saham Oleh Perusahaan

Selain dengan cara menerbitkan saham baru melalui penawaran umum ataupun melalui penerbitan saham baru tanpa HMETD, program kepemilikan saham oleh karyawan dapat dilakukan dengan cara membagikan saham hasil pembelian kembali oleh perusahaan (*share buyback*). Adapun saham hasil pembelian kembali oleh perusahaan ini disebut dengan istilah *treasury stock*. *Treasury stock* adalah saham yang telah diterbitkan atau ditempatkan dan telah disetor penuh oleh pemegang saham dan kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk digunakan untuk tujuan perusahaan.⁶⁵

⁶⁵ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, hlm. 66. Lihat juga *Black Law's Dictionary*: "*Treasury stock is stock which has been issued as fully paid to*

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 37 ayat 1 menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi perusahaan agar dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan, yaitu:

- a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.
- b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan pasar modal.

Untuk perusahaan publik atau emiten, pembelian kembali saham harus memenuhi Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam Peraturan Bapepam ini dinyatakan bahwa perusahaan dapat membeli kembali sahamnya sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-undang Perseroan Terbatas⁶⁶, dengan demikian pembelian kembali saham oleh perusahaan harus memenuhi dua persyaratan dalam Pasal 37 ayat 1 tersebut, jika tidak maka pembelian kembali saham batal karena hukum. Selanjutnya pada Pasal 37 ayat 4 Undang-undang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa saham yang dibeli kembali oleh perusahaan hanya boleh dikuasai perusahaan paling lama 3 tahun, yang kemudian apabila setelah jangka waktu 3 tahun sejak selesainya pembelian kembali saham masih

stockholders and subsequently reacquired by the corporation to be used by it in furtherance of its corporate purposes.”

⁶⁶ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Bapepam Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik*, Nomor XI.B.2, angka 1 huruf b.

“Perusahaan dapat membeli kembali sahamnya sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 UUPT tanpa melanggar ketentuan Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan ini.”

terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh perusahaan, maka perusahaan wajib mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lambat 1 tahun apabila kewajiban pengalihan saham tersebut belum dapat diselesaikan⁶⁷.

Adapun Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 dalam angka 4 huruf a menyebutkan bahwa pengalihan saham hasil pembelian kembali dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek
- b. Ditarik kembali dengan cara pengurangan modal
- c. Pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*
- d. Pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas.

Dengan dimungkinkannya pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan sebagai cara untuk mengalihkan *treasury stock* tersebut, yaitu dalam bentuk *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*, maka hal ini menjadi dasar dilaksanakannya program kepemilikan saham oleh karyawan melalui pembelian kembali saham oleh perusahaan.

Dari beberapa cara untuk melaksanakan program kepemilikan saham oleh karyawan, sumber saham yang ditawarkan dalam pelaksanaan program tersebut dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:⁶⁸

1. Saham yang masih berada dalam portepel

Saham portepel adalah saham yang belum dikeluarkan atau belum ditempatkan.⁶⁹ Konsekuensinya adalah pada saat diterbitkan saham tersebut haruslah disetor penuh sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 33

⁶⁷ *Ibid.*, angka 4 huruf d jo. huruf e.

⁶⁸ I Made B. Thirtayatra, *Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan (ESOP)*.

⁶⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, hlm. 237.

ayat 3. Dalam hal program kepemilikan saham oleh karyawan berupa pemberian saham secara cuma-cuma (*stock grant*), maka setoran tersebut dapat dibayar oleh perusahaan sendiri dimana uang yang digunakan untuk membayar tersebut dicatat sebagai beban bagi perusahaan seperti halnya pembayaran bonus berupa kas bagi karyawan. Yang membedakan adalah pada bonus berupa kas, uang dibayar kepada karyawan sedangkan pada bonus berupa saham, uang tidak keluar dari kas perusahaan dan sebagai gantinya perusahaan memberikan saham kepada karyawan.

2. Saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan (*treasury stock*)

Dalam hal sumber saham untuk pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan berasal dari saham hasil pembelian kembali oleh perusahaan, maka tidak harus terdapat penyetoran uang pada saat *treasury stock* dikeluarkan. Hal ini dikarenakan saham tersebut telah disetor penuh pada saat pertama kali dikeluarkan.

3. Saham beredar yang dimiliki oleh pemegang saham (*outstanding stock*)

Apabila program kepemilikan saham oleh karyawan dilaksanakan dengan saham yang berasal dari saham beredar yang dimiliki oleh pemegang saham, maka juga tidak terdapat penyetoran uang pada saat saham ini diberikan kepada karyawan. Hal ini dikarenakan saham tersebut telah disetor penuh oleh pemegang saham pada saat pertama kali dikeluarkan, sehingga yang terjadi hanyalah pengalihan dari pemegang saham kepada karyawan dan karenanya tidak terkait langsung dengan perusahaan.

3.2. Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal

Dengan berubahnya status suatu perusahaan menjadi perusahaan publik setelah pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam, perusahaan tersebut harus siap dengan konsekuensi-konsekuensi yang terlahir karenanya.

Adapun konsekuensi-konsekuensi yang dimaksud diantaranya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁷⁰

1. Pemegang saham menjadi banyak jumlahnya
2. Tuntutan terhadap *fairness* dan *fair play* semakin tinggi
3. Sering menjadi sorotan masyarakat
4. *Turn over* kepemilikan saham sangat tinggi
5. Adanya kewajiban membuka diri (*disclosure*)
6. Pemisahan yang tegas antara pemilik dengan manajemen perusahaan
7. Tindakan manajemen seringkali menjadi perhatian publik
8. Fleksibilitas manajemen menjadi berkurang
9. Pada saat *go public*, ada konsekuensi biaya yang mesti dikeluarkan oleh perusahaan

Hal ini berbeda sekali dengan suatu perusahaan yang belum *go public*, karena suatu perusahaan yang belum *go public* di Indonesia umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.⁷¹

1. *Controlling interest* berada pada satu tangan (di tangan pendiri)
2. Tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dan manajemen, sehingga tidak ada yang namanya manajemen profesional
3. Ada hubungan afiliasi sehingga potensial timbul *conflict of interest*
4. Umumnya bersifat perusahaan keluarga

Setelah pernyataan pendaftaran suatu perusahaan dinyatakan efektif, kehidupan baru perusahaan tersebut sebagai perusahaan publik akan dimulai, dimana Bapepam menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah menjalankan prinsip keterbukaan. Keterbukaan atau *disclosure* atau transparansi merupakan suatu hal yang mutlak dalam sektor pasar modal untuk dilakukan. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal adalah pedoman umum yang

⁷⁰ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, cet.1, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 3.

⁷¹ *Ibid.*

mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada Undang-undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut.⁷² Adapun yang dimaksud dengan informasi atau fakta material menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 7, adalah informasi ataupun fakta penting yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi ataupun fakta tersebut.

3.2.1. Prinsip Keterbukaan Sebagai Bentuk Perlindungan Investor

Tentunya tidak mudah mengubah budaya perusahaan yang tadinya bersifat tertutup apalagi yang tadinya merupakan perusahaan keluarga, untuk secara drastis mengadopsi budaya perusahaan terbuka terutama dalam hal keterbukaan informasi. Ketika perusahaan masih bersifat tertutup, kejadian yang tidak baik dalam suatu periode merupakan masalah internal, yang dapat diatasi jika perusahaan dijalankan dengan baik dan dapat mengembangkan upaya untuk mencapai kembali keberhasilan dan menelusuri hal-hal apa yang menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan. Apabila penyebabnya adalah adanya kesalahan dalam keputusan manajemen perusahaan, maka hal tersebut pun dapat segera diperbaiki secara internal, di luar pengamatan masyarakat. Namun apabila suatu perusahaan telah menjadi perusahaan publik, tentu penanganan masalah yang serupa akan sangat berbeda. Hubungan yang baik dengan masyarakat atau publik sebagai investor harus dapat terjalin agar reputasi perusahaan tetap baik di mata investor dan dapat terus berkembang dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hubungan yang baik dengan investor ini dapat dicapai, salah satunya melalui keterbukaan informasi. I Putu Gede Ary Suta dalam bukunya yang berjudul

⁷² Indonesia, *Undang-undang Tentang Pasar Modal*, Ps. 1 angka 25.

“Menuju Pasar Modal Modern” mengungkapkan, bahwa ruang lingkup perlindungan terhadap publik sebagai investor, antara lain:⁷³

- Bukan jaminan untuk memperoleh keuntungan (*gain*).

Satu hal yang perlu disadari oleh investor sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal, bahwa investasi di pasar modal melalui pembelian saham bukan merupakan jaminan bagi investor untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengambil keputusan investasi, investor harus benar-benar melakukan evaluasi terhadap jenis saham yang akan dibeli.

- Pengungkapan risiko investasi.

Setiap jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan publik tentunya memiliki risiko usaha. Untuk melindungi kepentingan investor terhadap risiko usaha perusahaan tersebut, Bapepam mewajibkan setiap calon perusahaan publik untuk mengungkapkan risiko usahanya dalam prospektus dan mempublikasikan kepada investor.

- Jaminan untuk memperoleh *equal treatment* (perlakuan yang sama) dalam akses informasi.

Salah satu syarat untuk terciptanya pasar modal yang *fair* dan efisien adalah apabila semua investor dapat mendapatkan informasi dalam waktu dan kualitas yang sama.

Dengan demikian dapat terlihat bahwa pengaturan mengenai keterbukaan atau transparansi atas informasi ini merupakan syarat yang mutlak yang bersifat universal yang ada dalam dunia pasar modal, sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap publik sebagai investor. Mengingat pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana dalam jumlah yang besar dan datang dari mana saja untuk kegiatan bisnis, maka wajar kiranya keterbukaan ini menjadi prinsip yang amat dibutuhkan oleh investor untuk meyakinkan dirinya mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan benar

⁷³ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern, cet. 1*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000), hlm. 98.

sehingga mampu untuk mengambil keputusan investasi karena didukung oleh informasi yang kuat. Oleh karena keterbukaan atau transparansi ini merupakan hal penting untuk dapat menumbuhkan kepercayaan dan menarik investor untuk berinvestasi, maka di satu sisi perusahaan publik atau emiten juga perlu untuk menerapkan keterbukaan informasi yang lengkap, benar, akurat dan tepat waktu. Namun, terdapat pertentangan batasan dan kendala untuk menerapkan keterbukaan antara investor atau pemegang saham di satu pihak dengan emiten atau perusahaan publik di pihak lain, antara lain sebagai berikut:⁷⁴

1. Investor atau pemegang saham menginginkan keterbukaan yang sifatnya *full disclosure* dalam mendapatkan informasi mengenai emiten, sementara emiten hanya bersedia membuka informasi hingga tingkatan tertentu.
2. Investor menginginkan informasi yang tepat waktu, sementara emiten berusaha untuk menahan informasi untuk beberapa waktu dengan alasan pengurangan biaya penyebaran dan penerbitan laporan.
3. Investor menginginkan untuk memperoleh data yang rinci dan akurat, sementara emiten hanya bersedia memberikan informasi secara garis besar.

Pertentangan-pertentangan tersebut tentunya menjadi suatu dilema dalam hukum pasar modal itu sendiri. Di satu pihak hukum terus mengejar dengan memperinci sedetil-detilnya tentang hal-hal apa saja yang harus dibuka oleh pihak-pihak penyandang kewajiban *disclosure*, dalam hal ini perusahaan publik. Akan tetapi di lain pihak hukum juga harus melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut. Ekses yang muncul dari pengungkapan informasi rinci kepada publik bisa menjadikan perusahaan pesaing mengetahui keadaan perusahaan. Oleh karena itu, emiten atau perusahaan publik meminta untuk diberikan hak menjaga informasi yang merupakan rahasia perusahaan. Adalah tugas hukum menyelaraskan dua kepentingan yang saling bertolak belakang ini.⁷⁵ Keselarasan di antara dua

⁷⁴ M. Irsan Nasarudin, *et. al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 228.

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 229.

kepentingan yang kontradiktif ini tersebut tercermin dalam prinsip yuridis yang menyatakan bahwa suatu *disclosure* di pasar modal tidaklah semata-mata “*full*” tetapi juga harus “*fair*”, seperti yang tersimpul dalam istilah *full and fair disclosure*.⁷⁶

Prinsip dasar Undang-undang Pasar Modal adalah bahwa pemerintah seharusnya tidak terlibat dalam keputusan investasi, sehingga peran pemerintah adalah memberikan jaminan bahwa investor dapat memperoleh informasi dan fakta-fakta yang relevan untuk membuat keputusan investasi. Mengingat hampir seluruh investasi menyangkut risiko, maka selalu terdapat kemungkinan investor mengalami kerugian. Dalam hal ini pemerintah harus menahan diri untuk tidak memberikan pernyataan yang menjadi dasar keputusan investasi, karena apabila pemerintah melakukan hal tersebut berarti risiko keputusan investasi beralih dari publik ke pemerintah.⁷⁷

Undang-undang Pasar Modal mewajibkan emiten atau perusahaan publik, atau pihak lain yang terkait untuk menyampaikan informasi penting atau material yang berkaitan dengan tindakan atau efek perusahaan tersebut pada waktu yang tepat (**tepat waktu**) kepada masyarakat dalam bentuk laporan berkala dan laporan peristiwa penting. Emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat. Dapat dikatakan **lengkap** apabila informasi yang disampaikan utuh, tidak ada yang tertinggal, atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Sedangkan yang dimaksud dengan **akurat** adalah apabila informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketepatan. Jika informasi yang disampaikan tidak memenuhi syarat tersebut, maka informasi dapat dikatakan sebagai informasi yang tidak benar atau menyesatkan.⁷⁸

Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu:⁷⁹

⁷⁶ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, hlm. 78.

⁷⁷ I Putu Gede Ary Suta, *Menuju Pasar Modal Modern*, hlm. 99.

⁷⁸ M. Irsan Nasarudin, *et. al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 226.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 229.

1. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*primary market level*), yang didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran Emisi ke Bapepam dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.C.1 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum angka 2 jo angka 6, yaitu:
 - a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran
 - b. Prospektus
 - c. Prospektus Ringkas yang akan digunakan dalam Penawaran Umum
 - d. Prospektus Awal yang akan digunakan dalam rangka Penawaran Awal (jika ada)
 - e. Dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, antara lain:
 - i. rencana jadwal Penawaran Umum
 - ii. contoh surat Efek
 - iii. Laporan Keuangan yang telah diaudit akuntan
 - iv. surat dari akuntan (*comfort letter*) sehubungan dengan perubahan keadaan keuangan emiten yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diaudit
 - v. surat pernyataan dari emiten di bidang akuntansi
 - vi. keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan dalam prospektus
 - vii. laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum
 - viii. riwayat hidup dari para anggota komisaris dan direksi
 - ix. perjanjian penjaminan emisi efek (jika ada)
 - x. perjanjian perwalianamanatan (jika ada)
 - xi. perjanjian penanggungungan (jika ada)
 - xii. perjanjian pendahuluan dengan satu atau beberapa bursa efek (jika akan dicatatkan di bursa efek)
 - xiii. informasi lain sesuai permintaan Bapepam yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan

- kepentingan emiten atau pihak lain yang terafiliasi dalam proses penawaran umum
- xiv. peringkat yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek atas obligasi atau efek yang bersifat hutang lainnya
 - xv. pernyataan tentang kelengkapan dokumen penawaran umum dari: emiten, penjamin pelaksana emisi efek, dan profesi penunjang pasar modal.
2. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa (*second market level*).
- Dalam hal ini emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus menerus (*continuously disclosure*) kepada Bapepam dan Bursa Efek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. Laporan keuangan berkala yang harus disampaikan tersebut terdiri dari laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Yang menjadi prinsip-prinsip dari laporan keuangan berkala adalah sebagai berikut:⁸⁰
- a. Harus disajikan dalam bahasa Indonesia
 - b. Disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya jika ada
 - c. Berdasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal yang ditetapkan oleh Bapepam
 - d. Laporan Keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam
 - e. Laporan Tahunan wajib diumumkan kepada publik, yaitu yang merupakan neraca, laporan laba rugi, laporan komitmen dan kontinjensi (khusus perbankan) wajib diumumkan dalam dua surat kabar salah satu diantaranya berperedaran nasional, sementara bagi

⁸⁰ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, hlm. 97.

perusahaan menengah dan kecil cukup dalam satu surat kabar berperedaran nasional. Sementara itu, untuk laporan keuangan tengah tahunan cukup diumumkan dalam salah satu surat kabar berperedaran nasional.

Adapun laporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari:⁸¹

- a. Neraca
 - b. Laporan laba rugi
 - c. Laporan perubahan ekuitas
 - d. Laporan arus kas
 - e. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya
 - f. Catatan atas laporan keuangan
3. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (*timely disclosure*)
- Emiten atau perusahaan publik wajib untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut. Adapun beberapa peristiwa yang dianggap dapat berpengaruh pada keputusan investor, disebutkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik tepatnya dalam ketentuan angka 2, antara lain sebagai berikut:
- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan
 - b. Pemecahan saham atau pembagian dividen saham
 - c. Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya

⁸¹ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala*, Nomor IX.K.2, angka 1 huruf c.

- d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting
- e. Produk atau penemuan baru yang berarti
- f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen
- g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang
- h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya
- i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material
- j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting
- k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direksi dan komisaris perusahaan
- l. Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan kain
- m. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan
- n. Penggantian wali amanat
- o. Perubahan tahun fiskal perusahaan

Pada intinya, tiga tujuan utama pentingnya prinsip keterbukaan di pasar modal, antara lain sebagai berikut:⁸²

1. Menjaga kepercayaan investor.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan guna meningkatkan kepercayaan investor atau publik terhadap pasar modal, sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dikarenakan apabila terjadi “krisis kepercayaan” atau “ketidakpercayaan” investor kepada pasar modal dan perekonomian, maka investor akan menarik modal mereka dari pasar. Hal ini dapat berakibat pasar dan perekonomian akan rusak secara keseluruhan.

2. Menciptakan pasar yang efisien.

Sistem keterbukaan wajib berusaha menyediakan informasi teknis bagi analis saham dan profesional pasar. Hal ini wajar karena mereka merupakan daya penggerak pasar yang efisien. Dalam suatu pasar yang

⁸² Yulfasni, *Hukum Pasar Modal, cet.1*, (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005), hlm. 76-79.

efisien seluruh informasi publik yang disampaikan secara tepat waktu dan penuh direfleksikan terhadap harga saham. Tingkat efisiensi harga satuan saham adalah hasil kompetisi dalam pasar modal terhadap saham tersebut. Penggerak efisiensi adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mencerminkan dan memfasilitasi kompetisi tersebut, seperti: ketersediaan informasi terhadap saham, biaya transaksi saham, jumlah pedagang dan volume perdagangan.

3. Perlindungan terhadap investor.

Alasan utama mengapa suatu *disclosure* ini diperlukan adalah agar pihak investor dapat melakukan suatu *informed decision* untuk membeli atau tidak membeli suatu efek. Bila emiten atau perusahaan publik, atau lembaga penunjang dan profesi pasar modal tidak melaksanakan prinsip keterbukaan wajib atau bila terjadi *misrepresentation*, maka akan dapat merugikan investor dan hal ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum emiten atau perusahaan publik, lembaga penunjang dan profesi pasar modal karena telah melanggar hak investor untuk memperoleh informasi fakta material.

Jika prinsip keterbukaan informasi terwujud dalam budaya perusahaan (*corporate culture*) yang sahamnya *listing* di bursa efek, tentunya akan menambah kepercayaan perusahaan (*confidence*) dan kepercayaan investor (*trust*), yang pada gilirannya akan meningkatkan, memperkuat akuntabilitas pengelola perusahaan (*good management practices and good corporate citizenship*), kinerja perusahaan dan pasar modal Indonesia. Apabila hal tersebut yang terjadi, maka hampir bisa dipastikan arus modal akan lebih mengalir ke pasar modal Indonesia. Bagi negara, keterbukaan informasi ini berguna untuk mengaktifkan dan mengintensifkan pajak yang akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.⁸³

⁸³ M. Irsan Nasarudin, *et. al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 233.

3.2.2. Pelanggaran Terhadap Prinsip Keterbukaan

Terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang dianggap dapat menimbulkan *misleading* bagi investor dalam memberikan penilaiannya untuk memutuskan membeli atau tidak membeli suatu efek. Beberapa hal yang dilarang dalam hal keterbukaan informasi tersebut, antara lain sebagai berikut:⁸⁴

1. Memberikan informasi yang salah sama sekali
2. Memberikan informasi yang setengah benar
3. Memberikan informasi yang tidak lengkap
4. Sama sekali diam terhadap fakta atau informasi material

Memberikan informasi yang salah dan setengah benar berkaitan dengan kualitas informasi, dalam arti informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak benar atau menyesatkan yang semata-mata ditujukan sebagai *window dressing* untuk menarik investor, tergolong sebagai kejahatan korporasi. Informasi seperti itu tidak akan memberikan gambaran dan penilaian yang memadai bagi investor untuk mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan saham. Penyampaian informasi yang tidak lengkap berkaitan dengan kuantitas informasi. Informasi yang tidak lengkap tidak dapat dijadikan pedoman bagi investor untuk mengambil keputusan jual atau beli. Sedangkan sikap tidak menyampaikan informasi apa-apa atas fakta material merupakan sikap yang tidak informatif karena perusahaan publik atau emiten menolak untuk memberikan penjelasan mengenai peristiwa material yang dimaksud.⁸⁵

Atas pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan Bapepam akan mengenakan sanksi yang dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam ketentuan Pasal 107 Undang-undang Pasar Modal ditegaskan bahwa setiap pihak yang sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain, atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam termasuk

⁸⁴ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, hlm. 79.

⁸⁵ M. Irsan Nasarudin, *et. al.*, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 227.

emiten dan perusahaan publik diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Adapun bentuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Bapepam atas setiap pelanggaran ketentuan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya oleh pihak yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 102 ayat 2 Undang-undang Pasar Modal, yaitu:

1. Peringatan tertulis
2. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pembekuan kegiatan usaha
5. Pencabutan izin usaha
6. Pembatalan persetujuan
7. Pembatalan pendaftaran

3.2.3. Prinsip Keterbukaan dalam Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Pada Perusahaan Publik

Sebagaimana diketahui, di Indonesia belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang kepemilikan saham oleh karyawan ini. Pada prakteknya di Indonesia program kepemilikan saham oleh karyawan dilaksanakan melalui sistem penjatahan pada saat penawaran umum, melalui penambahan modal tanpa HMETD, serta melalui pembelian kembali saham oleh perusahaan. Oleh karena belum adanya ketentuan peraturan perundang-undangan terutama di bidang pasar modal yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan kepemilikan saham oleh karyawan ini, keterbukaan informasi yang dilakukan pun mengacu pada ketentuan masing-masing yang menjadi dasar pelaksanaannya, yang tentunya juga tidak secara khusus dimaksudkan untuk pelaksanaan program kepemilikan oleh saham karyawan tersebut. Adapun bentuk keterbukaan informasi pada masing-masing cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Melalui penjatahan saham pada penawaran umum

Apabila program kepemilikan saham oleh karyawan yang dilaksanakan adalah penjatahan saham pada saat penawaran umum (*Initial Public Offering/IPO*), maka program kepemilikan saham kerja menjadi bagian dari keseluruhan program penawaran umum dan karenanya keterbukaan informasinya pun menjadi satu dengan keseluruhan keterbukaan informasi yang diwajibkan bagi penawaran umum tersebut. Adapun bentuk keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum didahului dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.C.1, yang antara lain adalah prospektus, laporan keuangan yang telah diaudit akuntan, perjanjian emisi, *legal opinion*, dan sebagainya. Mengenai penjatahan saham untuk karyawan yang dilakukan dalam penawaran umum, Manajer Penjatahan wajib mengungkapkan dalam prospektus dan prospektus ringkas, termasuk prospektus awal (jika ada), informasi antara lain mengenai metode penjatahan, kisaran persentase, dan prakiraan pihak atau kalangan tertentu yang akan mendapatkan penjatahan dalam penawaran umum.⁸⁶

2. Melalui penambahan modal tanpa HMETD

Pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD oleh emiten atau perusahaan publik haruslah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dimana 14 hari sebelum RUPS perusahaan wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham yang paling kurang memuat: perkiraan periode pelaksanaan (jika ada), serta analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan perusahaan sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa HMETD juga

⁸⁶ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum*, Nomor IX.A.7, angka 16.

pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal, dengan memenuhi prinsip keterbukaan.⁸⁷

Selain itu, dalam angka 4 huruf a dan b Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 diatur bahwa paling lambat 5 hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam-LK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut. Perusahaan juga wajib memberitahukan kepada Bapepam-LK dan masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain jumlah dan harga saham yang diterbitkan, paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD tersebut.

3. Melalui pembelian kembali saham oleh emiten atau perusahaan publik
Pembelian kembali saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS. Adapun pengumumannya dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS (dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan), dimana pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS (dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS).⁸⁸ Pengumuman RUPS tersebut harus memuat informasi-informasi yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor XI.B.2 angka 2 huruf b, dimana bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan pada Bapepam-LK paling lambat 2 hari kerja setelah diumumkan. Mengenai hasil pembelian kembali saham, harus dilaporkan perusahaan kepada Bapepam-LK secara berkala setiap 6 bulan yaitu pada bulan Juni dan Desember.

⁸⁷ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.D.4*, angka 2 huruf b jo. angka 3 huruf b.

⁸⁸ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor XI.B.2*, angka 2 huruf a jo. *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.J.1* angka 15 huruf b.

Untuk pengalihan hasil saham pembelian kembali, perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam-LK paling lambat 14 hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham hasil pembelian kembali tersebut, yang apabila dilakukan di luar Bursa Efek (dalam hal ini termasuk program kepemilikan saham oleh karyawan), pengumumannya paling sedikit meliputi: identitas pihak yang akan menerima saham, waktu pelaksanaan penjualan saham, kegiatan usaha pihak yang akan menerima saham (jika pihak dimaksud merupakan badan usaha), serta sifat hubungan afiliasi dari pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan perusahaan (jika ada).⁸⁹

Hingga saat ini belum ada pedoman tertulis tentang informasi apa yang harus diungkapkan dalam rangka program kepemilikan saham oleh karyawan. Adapun pada prakteknya, keterbukaan informasi yang dilakukan adalah mengenai program itu sendiri termasuk persentase saham yang dijatahkan kepada karyawan, pihak yang berhak, periode pelaksanaan program, dan informasi lain yang terkait dengan program tersebut. Meskipun belum ada ketentuan yang mengaturnya, namun dalam prakteknya, terhadap emiten atau perusahaan publik yang melakukan program kepemilikan saham oleh karyawan melalui ketiga proses diatas Bapepam dapat meminta keterangan tambahan yang dianggap perlu sebagai bentuk kewajiban emiten atau perusahaan publik akan keterbukaan.⁹⁰

Dalam hal program kepemilikan saham oleh karyawan dilakukan sebelum atau pada saat perusahaan melakukan penawaran umum, informasi tentang program tersebut memang masih terbatas pada apa yang dijelaskan dalam

⁸⁹ *Ibid.*, angka 4 huruf i jo. huruf j.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Ni Nyoman Puspani, Kasubag Pengembangan Kebijakan Keterbukaan Emiten atau Perusahaan Publik Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

prospektus dan hasil RUPS perusahaan tanpa ada kewajiban pengungkapan lebih lanjut tentang perkembangan pelaksanaan program dalam laporan berkala atau sarana lainnya.⁹¹ Namun pada prakteknya, beberapa emiten atau perusahaan publik di Indonesia mencantumkan beberapa informasi terkait perkembangan pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan yang dilakukannya di dalam laporan tahunan (*annual report*). Selain itu, pada prakteknya emiten atau perusahaan publik ada juga yang menerbitkan info memo atau brosur atau buku pedoman kepada karyawannya. Bagi karyawan, informasi ini penting karena terkait dengan tingkat pemahaman peserta akan program yang digulirkan perusahaan sehingga memudahkan mereka untuk berpartisipasi. Adapun biasanya informasi yang dimuat adalah informasi umum tentang kebijakan program kepemilikan saham oleh karyawan yang dilaksanakan, antara lain mencakup nama program, nama perusahaan pelaksana program, tujuan dan jangka waktu program, sifat dan jumlah saham yang ditawarkan, persyaratan, serta pembatasan mengenai penjualan kembali saham yang ditawarkan.⁹²

Bagi emiten yang telah melakukan pencatatan saham di bursa, maka pencatatan saham di bursa akan membebani emiten dengan kewajiban keterbukaan (*disclosure*) tambahan.⁹³ Keterbukaan terus menerus merupakan kewajiban yang dipersyaratkan oleh Undang-undang Pasar Modal dan merupakan kewajiban minimum yang harus dipenuhi oleh emiten. Selain kewajiban minimum tersebut apabila emiten mencatatkan sahamnya di salah satu bursa, maka bursa dapat saja menerapkan kewajiban melakukan tambahan keterbukaan. Kewajiban yang diberlakukan oleh bursa ini adalah merupakan kebijakan bursa sendiri, yang dimaksudkan untuk memberikan transparansi yang lebih baik sehingga pada akhirnya juga merupakan cara untuk memberikan perlindungan yang lebih kepada investor.⁹⁴

⁹¹ Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, *Studi Tentang Penerapan ESOP*, hlm. 95.

⁹² Hasil wawancara dengan I Made Thirtayatra.

⁹³ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, hlm. 218.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 219.

Terkait dengan adanya program kepemilikan saham oleh karyawan, mengenai pencatatannya diatur dalam Peraturan Bursa Efek Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Yang dimaksud dengan program kepemilikan saham oleh karyawan dalam peraturan ini adalah Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (*Employee Stock Option Program/ESOP*) dan Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Komisaris (*Management Stock Option Program/MSOP*), yaitu program kepemilikan saham oleh karyawan, direksi dan komisaris yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka kompensasi kepada karyawan, direksi dan komisaris.⁹⁵ Dalam ketentuan angka II.4 peraturan tersebut diatur bahwa pencatatan (*listing*) atas saham yang berasal dari ESOP/MSOP wajib dilakukan secara pra-pencatatan, yaitu persetujuan atas rencana pencatatan yang diberikan bursa sebelum saham atas pelaksanaan efek diterbitkan, dimana saham baru tersebut baru efektif dicatatkan dan diperdagangkan di bursa setelah dilakukan penerbitan saham baru tersebut.

Dalam Peraturan I-A tersebut, pada ketentuan angka V.2 disebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar pencatatan saham tambahan yang berasal dari ESOP/MSOP dapat dicatatkan di bursa, yaitu sebagai berikut:

- a. Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam setahun. Rencana pelaksanaan ESOP/MSOP wajib dilaporkan kepada bursa selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan ESOP/MSOP.
- b. Harga pelaksanaan ESOP/MSOP sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum laporan rencana pelaksanaan ke bursa.
- c. ESOP/MSOP telah disetujui oleh RUPS yang mengagendakan ESOP/MSOP.

⁹⁵ Bursa Efek Jakarta, *Peraturan Bursa Efek Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat*, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004, angka I.5.

Selain itu juga terdapat Surat Edaran Nomor: SE-003/BEJ/09-2005 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Penentuan dan Pelaporan Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP, dimana diatur dalam angka 3 jo. angka 6 tentang kewajiban menyampaikan laporan mengenai rencana periode pelaksanaan ESOP/MSOP yang wajib disampaikan paling lambat 5 hari sebelum dimulainya setiap periode pelaksanaan ESOP/MSOP dengan mencantumkan penjelasan:

- a. Putusan RUPS yang menyetujui penerbitan ESOP/MSOP
- b. Tatacara mengenai distribusi dan pelaksanaan ESOP/MSOP
- c. Periode pelaksanaan konversi ESOP/MSOP menjadi saham yang akan dilaksanakan
- d. Jumlah keseluruhan ESOP/MSOP yang memiliki hak konversi yang masih berlaku
- e. Jumlah ESOP/MSOP yang berhak untuk dikonversi pada periode pelaksanaan konversi
- f. Harga pelaksanaan ESOP/MSOP tersebut.

Adapun sebagai bentuk keterbukaan informasi, selambat-lambatnya 10 hari bursa setelah berakhirnya Periode Pelaksanaan, dalam angka 8 diatur bahwa Perusahaan Tercatat juga menyampaikan laporan kepada Bursa untuk kemudian diumumkan di Bursa paling lambat 1 hari setelahnya, yang memuat informasi sebagai berikut:

- a. Jumlah ESOP/MSOP yang telah dilaksanakan hak konversinya berikut jumlah saham baru yang telah diterbitkan
- b. Jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan masih berlaku
- c. Jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan habis masa berlakunya (kehilangan hak konversinya), jika ada.

3.3 Program Opsi Saham Karyawan

Salah satu bentuk insentif atau kompensasi berbasis saham yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya adalah dalam bentuk program

opsi saham (*stock option program*). Opsi saham memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu dan pada kondisi-kondisi tertentu. Secara teori, melalui program opsi saham dapat menciptakan perasaan kepemilikan terhadap perusahaan pada karyawan sehingga dapat memotivasi mereka untuk membantu perusahaan agar terus berkembang dan menguntungkan.⁹⁶ Opsi saham karyawan adalah salah satu program insentif bagi karyawan yang populer karena memberikan kesempatan kepada karyawan untuk ikut mengambil bagian dalam kesuksesan perusahaan, dan juga disukai oleh perusahaan karena program tersebut merupakan cara untuk memberikan kompensasi dalam bentuk bukan uang (*non cash* atau *cashless*). Selain itu bagi perusahaan-perusahaan yang masih berkembang yang belum mampu membayar gaji yang tinggi, dapat menggunakan opsi untuk menarik dan mempertahankan karyawan-karyawan penting.⁹⁷

Opsi saham karyawan (*Employee Stock Option*) adalah kontrak antara karyawan dan perusahaan yang memberikan karyawan hak, bukan kewajiban, untuk membeli saham biasa dari perusahaan dengan harga tertentu dan pada jangka waktu tertentu.⁹⁸ Dalam program opsi saham, suatu perusahaan memberikan kepada karyawan secara perorangan hak kontraktual, atau opsi, untuk membeli suatu jumlah tertentu atas saham perusahaan sepanjang periode waktu tertentu, membayar dengan harga yang ditetapkan pada saat tanggal pemberian. Periode waktu tertentu tersebut biasanya antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun dimulai pada tanggal pemberian dan harganya biasanya sama dengan harga pasar wajar saham pada saat pemberian.⁹⁹ Konsep dibalik opsi ini adalah bahwa

⁹⁶ Jean D. Sifleet, *Beyond 401 (k)S for Small Business Owners: A Practical Guide to Incentive, Deferred Compensation, and Retirement Plans*, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2004), hlm. 68.

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 71.

⁹⁸ John Olagues dan John F. Summa, *Getting Started in Employee Stock Option*, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2010), hlm. xi.
“*Employee Stock Options (ESOs) are contracts between the employee (or grantee) and the employer (or grantor) that give the employee the right, but not the obligation, to purchase common stock from the employer for a specific price for a specified period of time.*”

⁹⁹ Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, *Studi Tentang Penerapan ESOP*, hlm. 21.

jika harga saham perusahaan meningkat dalam tahun-tahun setelah pemberian, karyawan mendapatkan keuntungan dengan membeli saham pada harga lebih rendah yaitu harga yang berlaku pada waktu pemberian dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, setelah harga meningkat. Nilai suatu opsi saham bagi karyawan sifatnya terkait pada kinerja perusahaan di masa yang akan datang.

Layaknya bentuk kompensasi bagi karyawan lainnya seperti bonus kas, perusahaan bebas untuk memutuskan kepada siapa mereka akan memberikan opsi dan berapa banyaknya opsi yang akan mereka berikan kepada masing-masing individu. Opsi saham mula-mula hanya diberikan kepada manajemen tingkat tinggi, dan pada beberapa perusahaan, program opsi saham masih menggunakan cara tersebut. Akan tetapi kini terdapat kecenderungan (peningkatan) bahwa perusahaan-perusahaan memberikan opsi saham lebih jauh ke dalam organisasinya, seringkali melibatkan seluruh karyawan, mengingat kemajuan pesat kegiatan perekonomian yang menyulitkan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan karyawan terampil.

Opsi saham dapat digunakan sebagai alat perekrut untuk menarik karyawan yang baik untuk perusahaan, serta dapat digunakan sebagai “borgol emas” untuk mempertahankan mereka.¹⁰⁰ Hal ini dapat dicapai dengan adanya ketentuan *vesting periode* (periode tunggu) pada program opsi saham yang membatasi karyawan untuk dapat melaksanakan atau mengkonversi opsi dalam jangka waktu beberapa tahun setelah opsi diberikan.¹⁰¹ “Borgol emas” ini tentunya akan sangat efektif jika harga sahamnya naik atau lebih tinggi dari harga saham saat diberikan. Atau dengan kata lain, opsi dapat menjadi suatu motivator yang lebih efektif dibandingkan suatu bonus kas, karena tidak seperti kas, opsi terus menerus berlaku sebagai suatu insentif yang baik bagi karyawan setelah mereka diberikan opsi, karena nilai sebenarnya akan ditentukan dengan kinerja perusahaan di masa yang akan datang.

¹⁰⁰ Robert A. Frisch, *ESOP: The Ultimate Instrument in Succession Planning, Second Edition*, (New York: John Wiley & Sons, Inc., 2001), hlm. 240.
“Stock option plans are used as a recruiting device to attract good executives to the company. They also serve as a “golden handcuff” to retain them.”

¹⁰¹ John Olagues dan John F. Summa, *Getting Started in Employee Stock Option*, hlm. 8.
“The time between the grant and when the employee or executive owns and can exercise the options is considered the vesting period.”

Dapat disimpulkan bahwa opsi saham karyawan adalah hak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk membeli sejumlah tertentu saham perusahaan pada harga tetap pada periode tertentu. Dari definisi ini dapat ditarik beberapa unsur dari program opsi saham karyawan, yaitu:

- Bahwa opsi saham karyawan adalah berbentuk **hak**. Dikatakan demikian karena opsi saham yang diberikan kepada karyawan tidak mewajibkan mereka untuk melakukan apapun. Karyawan tidak pernah diharuskan untuk menggunakan opsi yang dihadiahkan kepada mereka, karyawan memiliki kebebasan untuk memutuskan tidak melakukan apapun dan membiarkan opsi miliknya tidak berlaku lagi jika itu merupakan keputusan yang dinilai paling baik bagi karyawan. Dapat dikatakan opsi saham merupakan kesempatan menang-tanpa kalah bagi karyawan. Jika harga saham turun setelah opsi diberikan, mereka dapat tidak melakukan apa dan membiarkan opsi mereka hingga kadaluwarsa. Namun sebaliknya, jika harga saham naik setelah opsi diberikan tentu karyawan akan mengkonversi saham tersebut dengan membelinya dengan harga yang telah ditetapkan saat pemberian opsi.¹⁰² Keuntungan berupa selisih harga opsi saat diberikan dan saat dikonversi atau di-*exercise* inilah yang disebut dengan nilai intrinsik opsi.¹⁰³
- Bahwa opsi saham karyawan **diberikan oleh perusahaan**, dimana opsi saham karyawan merupakan keputusan yang sepenuhnya diprakarsai oleh manajemen (Direksi), dengan dukungan dan persetujuan dari Dewan Komisaris, atau melalui prosedur yang ditentukan Anggaran Dasar. Tidak ada satupun perangkat hukum yang mewajibkan pemberian opsi saham

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 242.

“Stock options are a win/no lose deal for employees. Once they have the option, it is strictly up to them as to whether and when to exercise the option. If the value of the stock declines after the option has been granted, they simply do nothing and allow the exercise date to expire. If, by contrast, the stock increases in value after the date of grant, the employee will, of course, purchase the stock at the price that was fixed as of the date the employee was granted the option.”

¹⁰³ John Olagues dan John F. Summa, *Getting Started in Employee Stock Option*, hlm. 11. *“Intrinsic value equals the difference between the exercise price of employee stock options and the present price of the stock, assuming that the stock is trading above the exercise price.”*

karyawan, perusahaan diberikan kebebasan untuk memberikan opsi saham pada karyawannya, tergantung kondisi perusahaan yang bersangkutan.

- Bahwa opsi saham karyawan memberikan hak bagi karyawan untuk **membeli** saham perusahaan. Hal inilah yang membedakan antara opsi saham karyawan dengan opsi saham biasa. Opsi saham biasa pada dasarnya dibedakan atas dua macam, yaitu *calls* sebagai hak beli dan *puts* sebagai hak jual. Pembeli atau pemilik *call* memiliki hak membeli aktiva tertentu pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Sebaliknya pembeli atau pemilik *put* adalah memiliki hak menjual aktiva tertentu pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang.¹⁰⁴ Opsi saham biasa yang diperdagangkan di pasar modal sebagai efek derivatif dapat memberikan hak untuk membeli atau menjual saham yang mendasarinya, sedangkan opsi saham karyawan benar-benar dibatasi hanya untuk membeli saham perusahaan.
- Bahwa opsi saham karyawan memberikan hak bagi karyawan untuk membeli **sejumlah tertentu saham**. Pada saat perusahaan memberikan opsi saham karyawan, selalu ditentukan berapa jumlah saham yang dapat dibeli oleh masing-masing karyawan yang bersangkutan.
- Bahwa opsi saham karyawan memberikan hak untuk membeli **saham perusahaan**. Porsi saham yang diberikan dalam program opsi saham karyawan adalah saham perusahaan yang khusus ditujukan untuk karyawan perusahaan, sehingga tidak dapat dibeli oleh publik di pasar terbuka.¹⁰⁵ Hal ini penting agar perusahaan dapat menawarkan saham pada harga tertentu, karena seperti diketahui harga saham di pasar terbuka sangat dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat menentukan perubahan naik turunnya harga saham.

¹⁰⁴ Hinsa Siahaan, *Seluk Beluk Perdagangan Instrumen Derivatif: Opsi Saham Call & Put, Rights, Warrants, Convertible Bonds, Swap Tingkat Bunga, Indeks, dan Swap Valuta Asing, cet.1*, (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, 2008), hlm. 13.

¹⁰⁵ John Olagues dan John F. Summa, *Getting Started in Employee Stock Option*, hlm. 21. "One of the most obvious differences, therefore, is that ESOs are not traded in a secondary market as are listed options."

- Bahwa opsi saham karyawan yang diberikan dibayar dengan **harga tetap** yang ditentukan pada saat tanggal pemberian (*grant date*). Harga tetap dikenal juga dengan istilah *exercise price* atau *strike price*, yaitu harga per lembar saham pada harga mana saham dapat dibeli.¹⁰⁶ Jadi jika karyawan berkeputusan untuk menggunakan opsi saham yang dimilikinya, maka jumlah yang dibayarkan untuk setiap lembar sahamnya adalah sesuai dengan harga yang ditetapkan pada saat pemberian opsi tersebut. Harga opsi saham karyawan ini akan tetap sama selama umur opsi walaupun harga pasar saham lebih tinggi dari harga tetap yang diberikan pada saat pemberian.
- Bahwa hak untuk membeli saham dari opsi saham karyawan ini memiliki **periode tertentu**, dimana opsi saham karyawan biasanya memiliki umur yang terbatas. Dengan demikian opsi saham ini bisa dilaksanakan pada periode yang telah ditentukan, sebelum tanggal kadaluwarsa dari opsi.¹⁰⁷

Adapun mengenai kelebihan dan kekurangan opsi saham adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

Kelebihan:

- a. Opsi saham mengaitkan imbalan kepada karyawan dengan keberhasilan yang akan datang karena opsi tersebut hanya menjadi bernilai jika harga saham perusahaan meningkat
- b. Opsi dapat menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan karyawan jika dikaitkan dengan jadwal waktu tunggu
- c. Dari sudut pandang akuntansi, opsi secara umum tidak dipertimbangkan sebagai beban pada buku perusahaan.

¹⁰⁶ Hinsa Siahaan, *Seluk Beluk Perdagangan Instrumen Derivatif*, hlm. 29.

¹⁰⁷ John Olagues dan John F. Summa, *Getting Started in Employee Stock Option*, hlm. 7. "The expiration date of an option is the last day the holder of those options can exercise his or her options."

¹⁰⁸ Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia, *Studi Tentang Penerapan ESOP*, hlm. 23.

Kekurangan:

- a. Karena kompleksitasnya, opsi saham dapat sulit dimengerti oleh karyawan
- b. Kas keluar yang diperlukan pada saat pelaksanaan, dapat dipandang sebagai suatu hal yang negatif oleh karyawan
- c. Jika harga saham turun secara substansial di bawah harga pelaksanaan, opsi tersebut tidak memberikan insentif keuangan bagi karyawan.



BAB 4
PELAKSANAAN MESA DAN MESOP
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK

4.1. Profil Perusahaan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank”) atau dikenal juga dengan Bank BTN, didirikan sebagai bank milik negara semula dengan nama “Bank Tabungan Pos” berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi “Bank Tabungan Negara”. Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2- 6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan perubahan yang didokumentasikan dalam Akta yang dibuat oleh Notaris Emi Susilowati, S.H., No. 45 tanggal 24 April 2008. Perubahan terakhir ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU 35584.AH.01.02 tanggal 25 Juni 2008.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa. Adapun berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip

syariah. Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW.01/3104/DPR RI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp 500 setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp 800 per saham.

Berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. mengenai pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka. Berdasarkan keputusan tersebut, anggaran dasar Bank telah diubah pada tanggal 13 Oktober 2009. Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH 01.02. tahun 2009.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat. Pada tanggal 31 Desember 2010, Bank memiliki 83 kantor cabang (termasuk 20 kantor cabang *syariah*), 222 cabang pembantu

(termasuk 8 kantor cabang pembantu *syariah*), 111 kantor kas, 7 *payment point* dan 2.661 SOPP (*System online Payment Point/Kantor Pos on-line*).

4.2. Dasar Pelaksanaan MESA dan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Dalam menjalankan kegiatan usahanya dan menghadapi tantangan usaha perbankan yang kompetitif dari hari ke hari, sebagai salah satu bentuk strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menerapkan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan. Tujuan utama program ini adalah agar manajemen dan karyawan Bank BTN mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Bank BTN.¹⁰⁹

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada tanggal 6 Oktober 2009, yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank BTN No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, pemegang saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memutuskan beberapa hal dan yang terkait dengan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan, yaitu:¹¹⁰

Menyetujui program kepemilikan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and*

¹⁰⁹ Laporan Tahunan 2010 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, hlm. 176.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 465.

Employee Stock Option Plan/MESOP) dalam rangka IPO dengan ketentuan sebagai berikut:

- Program MESA diberikan maksimal sebesar 9,62% dari saham baru yang diterbitkan dan program MESOP maksimal sebesar 4% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.
- Peserta program MESA dan MESOP adalah karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris, dan anggota Komite Audit.
- Diskon harga saham untuk program MESA sebesar 20% dengan masa *lockup* selama enam bulan. Diskon dimaksud menjadi beban PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Hak opsi program MESOP dapat dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%. Harga pelaksanaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Umur opsi lima tahun sejak diterbitkan dengan *vesting period* (masa tunggu) satu tahun yang mana dalam periode tersebut hak opsi tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan.
- Pengawasan program MESA dan MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada Pemegang Saham.

4.3. Analisa Yuridis Pelaksanaan MESA dan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa manfaat dari program kepemilikan saham oleh karyawan salah satunya adalah untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi karyawan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Mengingat manfaat-manfaat yang bisa didapatkan melalui pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan, PT Bank Tabungan

Negara (Persero), Tbk turut melaksanakan program ini melalui Penjatahan Saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dan Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*) dalam rangka IPO yang dilakukannya.

1. Program MESA

Program MESA (*Management and Employee Stock Allocation*) merupakan bentuk kebijakan program kepemilikan saham oleh karyawan yang dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang berupa alokasi atau penjatahan saham untuk manajemen dan karyawannya dari saham yang ditawarkan melalui penawaran umum perdana saham yang dilakukannya.

Penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 angka 11 huruf b butir 2 (a), penjatahan saham dapat diprioritaskan kepada pegawai emiten sampai dengan jumlah paling banyak 10% dari jumlah saham penawaran umum. Dalam hal ini, jumlah saham yang ditawarkan dalam program MESA adalah sebesar 9,62% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam penawaran umum atau 9,62% dari 2.360.057.000 lembar saham yang ditawarkan, yaitu sebesar 226.928.500 lembar saham. Dengan demikian, pelaksanaan MESA sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam aturan penjatahan saham untuk karyawan dalam penawaran umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7.

Mengenai sumber saham yang ditawarkan dalam program MESA ini adalah 226.928.500 saham yang ditawarkan tersebut merupakan bagian dari saham yang ditawarkan kepada masyarakat pada Penawaran Umum PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk yaitu saham yang diambil dari portepel perusahaan sebanyak 2.360.057.000 lembar saham. Sebagaimana

disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS-LB yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2009 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank BTN No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, bahwa pengeluaran saham baru dalam simpanan (portepel) Bank sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh yaitu 2.723.142.857 lembar saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk manajemen dan karyawan dalam program MESA, yaitu sebesar 9,62% dari saham yang ditawarkan.

Peserta program MESA terdiri dari semua karyawan tetap Bank BTN yang termasuk dalam daftar karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk per tanggal 30 September 2009, seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota komite, kecuali Komisaris Independen dan anggota Komite Audit, yang masih menjabat pada saat implementasi program MESA. Adapun jenis saham yang ditawarkan kepada karyawan melalui program MESA ini adalah saham biasa atas nama seri B, yang memberikan hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, menerima dividen dan membeli saham baru Perseroan.¹¹¹

Mengenai harga pelaksanaan saham yang ditawarkan dalam program MESA, peserta program MESA akan diberikan alokasi untuk membeli saham dengan jatah pasti dengan membayar secara tunai harga saham dengan diskon sebesar 20% dari harga saham saat IPO. Sehingga, harga yang harus dibayarkan oleh peserta program MESA adalah Rp 640 per lembar saham setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana yaitu sebesar Rp 800 per lembar saham. Adapun diskon harga saham untuk program MESA ini menjadi beban PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di tahun 2009. Untuk saham yang dibeli dalam program MESA, tidak dapat dijual dalam periode 6 bulan (atau dengan kata lain memiliki *lock up*

¹¹¹ Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, hlm. 3.

period selama 6 bulan) dihitung sejak tanggal pencatatan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk di Bursa Efek.

2. Program MESOP

Program MESOP (*Management and Employee Stock Option Plan*) merupakan bentuk kebijakan program kepemilikan saham oleh karyawan yang dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang berupa pemberian hak opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawannya untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Program MESOP dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebanyak-banyaknya 4% dari modal ditempatkan dan disetor, setelah Penawaran Umum Perdana, sebagaimana disetujui oleh para pemegang saham dalam RUPS-LB yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2009 dan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank BTN No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Ketentuan ini sesuai dengan yang dipersyaratkan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4 angka 2 huruf a, bahwa penambahan modal tanpa HMETD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS dan sepanjang saham baru yang diterbitkan tidak melebihi 10% dari modal disetor selama jangka waktu 2 tahun.

Yang menjadi peserta dari program MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk adalah anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris, anggota Komite dan pegawai tetap yang tercatat pada tanggal 30 September 2009, kecuali Komisaris Independen dan anggota Komite Audit. Seperti dalam

program MESA, jenis saham yang ditawarkan kepada karyawan melalui program MESOP adalah saham biasa atas nama seri B, sehingga juga memberikan hak-hak layaknya pemegang saham klasifikasi saham biasa yaitu menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, menerima dividen serta membeli saham baru Perseroan.¹¹²

Adapun pelaksanaan program MESOP ini akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 3 (tiga) tahap:¹¹³

- **Tahap Pertama**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40% (empat puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2010.

- **Tahap Kedua**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2011.

- **Tahap Ketiga**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2012.

Hak Opsi yang diberikan kepada peserta program MESOP dalam setiap tahapan tersebut dapat digunakan untuk membeli saham dalam program MESOP, dimana *Option Life* atau Masa Berlakunya Hak Opsi adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Peserta dapat menggunakan haknya untuk membeli saham dalam program

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Bursa Efek Indonesia, Pengumuman PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BBTN), No. Peng-P-00592/BEL.PPJ/12-2009.

MESOP pada periode pelaksanaan dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan yang ditetapkan. Adapun peserta dapat melaksanakan yaitu mengkonversi opsi saham yang dimilikinya menjadi saham, setelah melewati *Vesting Period* (Masa Tunggu) yaitu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Hak Opsi. Selama dalam *Vesting Period*, peserta belum dapat menggunakan Hak Opsi yang diberikan kepadanya untuk membeli saham dalam program MESOP. Mengenai Periode Pelaksanaan dari Hak Opsi, akan ditetapkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode setiap tahunnya selama Masa Berlakunya Hak Opsi (*Option Life*).

Untuk Harga Pelaksanaan dari opsi saham akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan saham perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum laporan akan dibukanya periode pelaksanaan.

Adapun perkembangan pelaksanaan program MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Program MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebanyak-banyaknya 4% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana saham. Setelah melakukan penawaran umum atas 2.360.057.000 lembar saham pada 9-11 Desember 2009, modal ditempatkan dan disetor PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkembang menjadi 8.714.057.000 lembar saham dari sebelumnya 6.354.000.000 lembar saham. Sehingga jumlah opsi yang diberikan melalui program MESOP adalah sebanyak 4% dari 8.714.057.000 lembar

saham, yaitu sebanyak 363.085.500 lembar saham yang dibagikan melalui tiga tahap:

- **Tahap Pertama**

Jumlah opsi yang diterbitkan dan dicatatkan dari MESOP Tahap I adalah sebesar 40% dari total saham yang ditawarkan melalui program MESOP, atau sebesar 145.234.500 saham dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham dan harga pelaksanaan Rp 855 per lembar saham. Selama 5 tahun umur opsi yang dihitung sejak tanggal pemberian, periode pelaksanaan MESOP tahap I ini dapat dilakukan pada beberapa *exercise windows*, antara lain:¹¹⁴

- a. Tahun 2011: pada jangka waktu 30 hari bursa sejak tanggal 1 Februari 2011 dan pada jangka waktu 30 hari sejak tanggal 1 Oktober 2011.
- b. Tahun 2012: pada jangka waktu 30 hari bursa sejak tanggal 1 Februari 2012 dan pada jangka waktu 30 hari sejak tanggal 1 Oktober 2012.
- c. Tahun 2013: pada jangka waktu 30 hari bursa sejak tanggal 1 Februari 2013 dan pada jangka waktu 30 hari sejak tanggal 1 Oktober 2013.
- d. Tahun 2014: pada jangka waktu 30 hari bursa sejak tanggal 1 Februari 2014 dan pada jangka waktu 30 hari sejak tanggal 1 Oktober 2014.
- e. Tahun 2015: antara tanggal 2-30 Januari 2015.

Setelah melewati masa tunggu atau *vesting period* selama setahun, yaitu dari tanggal pemberian 29 Januari 2010, *exercise window* pertama di tahun 2011 untuk melaksanakan opsi dimulai dari tanggal 1 Februari 2011 hingga 16 Maret 2011. Adapun laporan hasil pelaksanaan jumlah ESOP/MSOP yaitu sebagai berikut:¹¹⁵

¹¹⁴ Bursa Efek Indonesia, Pengumuman PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BBTN), No. Peng-P-00072/BEI.PPJ/02-2010.

jumlah saham yang telah dilaksanakan hak konversinya (95.015.000 saham), jumlah saham baru yang telah diterbitkan (95.015.000 saham), jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan masih berlaku (50.219.500 saham), serta jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan habis masa berlakunya atau kehilangan hak konversinya (0 saham).

- **Tahap Kedua**

Jumlah opsi yang diterbitkan dan dicatatkan dari MESOP Tahap II adalah sebesar 30% dari total saham yang ditawarkan melalui program MESOP, atau sebesar 108.925.500 saham dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham dan harga pelaksanaan Rp 1.297,44 per lembar saham. Selama 5 tahun umur opsi yang dihitung sejak tanggal pemberian, periode pelaksanaan MESOP tahap II ini dapat dilakukan pada beberapa *exercise windows*, antara lain:¹¹⁶

- a. Tahun 2012: pada jangka waktu 30 hari bursa sejak tanggal 1 Februari 2012 dan pada jangka waktu 30 hari sejak tanggal 1 Oktober 2012.
- b. Tahun 2013: pada jangka waktu 30 hari bursa sejak tanggal 1 Februari 2013 dan pada jangka waktu 30 hari sejak tanggal 1 Oktober 2013.
- c. Tahun 2014: pada jangka waktu 30 hari bursa sejak tanggal 1 Februari 2014 dan pada jangka waktu 30 hari sejak tanggal 1 Oktober 2014.
- d. Tahun 2015: pada jangka waktu 30 hari bursa sejak tanggal 1 Februari 2015 dan pada jangka waktu 30 hari sejak tanggal 1 Oktober 2015.

¹¹⁵ Bursa Efek Indonesia, Pengumuman PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BBTN), Pengumuman No. Peng-KI-00041/BEI.PPJ/03-2011.

¹¹⁶ Bursa Efek Indonesia, Pengumuman PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BBTN), Pengumuman No. Peng-P-00075/BEI.PPJ/02-2010.

Oleh karena adanya masa tunggu atau *vesting period* selama setahun, maka peserta program MESOP Tahap II dimana opsi saham dari tahapan ini baru diterbitkan dan dibagikan pada Januari 2011, belum bisa meng-*exercise* atau melaksanakan opsi yang dimiliki hingga tanggal 1 Februari 2012.

- **Tahap Ketiga**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan pada program MESOP tahap ketiga ini adalah sisa hak opsi yang belum dibagikan yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, atau sebesar 108.925.500 saham. Opsi saham untuk manajemen dan karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ini akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada Januari 2012.

Dari pengertian opsi saham karyawan yaitu hak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya untuk membeli sejumlah tertentu saham perusahaan pada harga tetap pada periode tertentu, dapat dibandingkan dengan unsur-unsur dari program MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yaitu:

- Bahwa opsi saham karyawan adalah berbentuk **hak**. MESOP berbentuk opsi saham yang diberikan kepada manajemen dan karyawan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang tidak mewajibkan mereka untuk mengkonversi atau meng-*exercise* opsi tersebut. Manajemen dan karyawan diberikan kebebasan untuk menilai dan memutuskan yang menurut mereka terbaik, apakah akan melaksanakan opsi tersebut atau apakah akan membiarkannya hingga kadaluwarsa. Bukti dari kebebasan ini dapat terlihat dari 145.234.500 opsi saham MESOP Tahap I, yang telah di-*exercise* menjadi saham sejumlah 95.015.000 opsi, sisanya belum. Ada kemungkinan para pemilik opsi yang belum melaksanakannya itu masih ingin memantau apakah harga saham pada saat nanti ingin dikonversi

akankah lebih tinggi. Jika lebih tinggi, tentu saja keuntungan berupa nilai intrinsik ini akan lebih besar.

- Bahwa opsi saham karyawan **diberikan oleh perusahaan**. Dalam hal ini pemberian opsi saham melalui MESOP diberikan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan persetujuan RUPS-LB yang digelar tanggal 6 Oktober 2009, yang mana kemudian pengawasan pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Komisaris. Kebijakan pemberian opsi saham manajemen dilakukan dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi kebaikan kinerja perusahaan, tidak ada peraturan manapun yang mewajibkan pemberian opsi saham karyawan tersebut.
- Bahwa opsi saham karyawan memberikan hak bagi karyawan untuk **membeli** saham perusahaan. Program MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memberikan hak bagi manajemen dan karyawan untuk membeli saham perusahaan dengan mengkonversi opsi yang dimiliki menjadi saham biasa atas nama seri B dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham.
- Bahwa opsi saham karyawan memberikan hak bagi karyawan untuk membeli **sejumlah tertentu saham**. Dalam hal ini PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui program MESOP memberikan kepada manajemen dan karyawan sejumlah opsi saham yang telah ditentukan berapa jumlah yang dapat dibeli oleh masing-masing manajemen dan karyawan yang bersangkutan.
- Bahwa opsi saham karyawan memberikan hak untuk membeli **saham perusahaan**. Opsi saham yang diberikan dalam program MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah porsi saham perusahaan yang khusus ditujukan untuk manajemen dan karyawan perusahaan. Opsi saham tersebut tidak ditawarkan kepada publik di pasar terbuka. Adapun jenis saham yang ditawarkan kepada karyawan melalui program MESOP ini adalah saham biasa atas nama seri B, yang memberikan hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, menerima dividen dan membeli saham baru perusahaan.

- Bahwa opsi saham karyawan yang diberikan dibayar dengan **harga tetap** yang ditentukan pada saat tanggal pemberian (*grant date*). Harga tetap dikenal juga dengan istilah *exercise price* atau *strike price*, yaitu harga per lembar saham pada harga mana saham dapat dibeli.¹¹⁷ Pada program MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, *exercise price* untuk opsi dari MESOP Tahap I adalah Rp 855 per lembar saham. Sedangkan *exercise price* untuk opsi dari MESOP Tahap II adalah Rp 1.297,44. Harga yang telah ditetapkan pada saat pemberiannya ini yang akan dibayarkan oleh manajemen dan karyawan jika ingin melaksanakan opsinya, berapapun harga pasar saham pada saat ingin melaksanakan opsi.
- Bahwa hak untuk membeli (mengkonversi) saham dari opsi saham karyawan ini memiliki **periode tertentu**. Opsi saham yang diberikan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk melalui program MESOP, memiliki umur atau masa berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pemberiannya. Adapun setelah diberikan opsi tidak dapat langsung serta merta dikonversi menjadi saham, melainkan ada masa tunggu atau periode tunggu (*vesting period*) yaitu selama 1 tahun. Dalam hal ini, opsi dari MESOP Tahap I diberikan pada 29 Januari 2010, dengan masa tunggu 1 tahun opsi baru dapat di-*exercise* mulai 1 Februari 2011 hingga Januari 2015 dengan memperhatikan periode pelaksanaan (*exercise windows*) yang telah ditetapkan yaitu 2 periode setiap tahunnya (30 hari bursa sejak 1 Februari dan 30 hari bursa sejak 1 Oktober). Dengan demikian opsi saham bisa dilaksanakan pada periode yang telah ditentukan sebelum tanggal kadaluwarsa (*expiration date*) opsi, dalam hal MESOP Tahap I yaitu sebelum 30 Januari 2015.

¹¹⁷ Hinsa Siahaan, *Seluk Beluk Perdagangan Instrumen Derivatif*, hlm. 29.

4.4. Keterbukaan Informasi Atas Pelaksanaan MESA dan MESOP PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

Pengaturan mengenai keterbukaan atau transparansi atas informasi merupakan syarat yang mutlak yang bersifat universal yang ada dalam dunia pasar modal. Prinsip keterbukaan dalam pasar modal mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk kepada Undang-undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek yang dimaksud atau harga dari efek tersebut.¹¹⁸ Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam pasar modal karena dapat mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan investasi. Keterbukaan informasi merupakan bentuk perlindungan bagi investor dengan memberikan investor hak atas suatu *informed-decision*.

Sebagai emiten PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terikat pada kewajiban untuk menerapkan transparansi dan untuk menyediakan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, salah satunya mengenai aksi korporasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini, bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait kebijakan program kepemilikan saham oleh karyawan yaitu MESA dan MESOP yang dijalankannya, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbukaan melalui hasil RUPS

Kebijakan program kepemilikan saham oleh karyawan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam bentuk program MESA dan MESOP dihasilkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang diadakan pada tanggal 6 Oktober 2009 dan hasilnya dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS-LB Bank BTN No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta.

¹¹⁸ Indonesia, *Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal*, Ps. 1 angka 25.

Adapun keputusan yang dihasilkan terkait program MESA dan MESO yaitu:

Menyetujui program kepemilikan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Allocation/MESA) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Option Plan/MESOP) dalam rangka IPO dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Program MESA diberikan maksimal sebesar 9,62% dari saham baru yang diterbitkan dan program MESOP maksimal sebesar 4% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.*
- *Peserta program MESA dan MESOP adalah karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris, dan anggota Komite Audit.*
- *Diskon harga saham untuk program MESA sebesar 20% dengan masa lockup selama enam bulan. Diskon dimaksud menjadi beban PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*
- *Hak opsi program MESOP dapat dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%. Harga pelaksanaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Umur opsi lima tahun sejak diterbitkan dengan vesting period (masa tunggu) satu tahun yang mana dalam periode tersebut hak opsi tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan.*
- *Pengawasan program MESA dan MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada Pemegang Saham.*

Persetujuan RUPS merupakan syarat wajib untuk dapat dilaksanakannya program kepemilikan saham oleh karyawan, baik yang diselenggarakan melalui penjatahan saham pada penawaran umum, melalui penambahan modal tanpa HMETD, maupun melalui pengalihan saham hasil pembelian

kembali oleh perusahaan. Persetujuan RUPS yang dibutuhkan untuk melakukan aksi korporasi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi para pemegang saham. Adapun hasil keputusan RUPS-LB tanggal 6 Oktober 2009 tersebut secara utuh juga dicantumkan di dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2009 sebagai bentuk keterbukaan informasi agar dapat diakses oleh publik.

2. Keterbukaan melalui prospektus

Pelaksanaan MESA yang merupakan penjatahan pasti atas saham yang ditawarkan pada penawaran umum PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, membuat MESA menjadi bagian dari keseluruhan program penawaran umum tersebut. Program MESA pun dapat berjalan efektif bersamaan dengan efektifnya penawaran umum Bank dengan keluarnya Surat Pernyataan Efektif dari Bapepam No. S-10523/BL/2009 tertanggal 8 Desember 2009. Keterbukaan informasi atas MESA pun menjadi satu dengan keseluruhan keterbukaan informasi yang diwajibkan bagi penawaran umum tersebut. Dalam hal ini, prospektus merupakan bentuk keterbukaan emiten terkait proses penawaran umum.

Adapun mengenai bentuk keterbukaan atas penjatahan saham untuk karyawan dalam penawaran umum, Manajer Penjatahan wajib mengungkapkan dalam prospektus dan prospektus ringkas, termasuk prospektus awal (jika ada), informasi antara lain mengenai metode penjatahan, kisaran persentase, dan prakiraan pihak atau kalangan tertentu yang akan mendapatkan penjatahan dalam penawaran umum.¹¹⁹ Dalam prospektus penawaran umumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mengungkapkan informasi mengenai kebijakan MESA dan MESOP, yaitu pada intinya sebagai berikut:¹²⁰

¹¹⁹ Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.A.7*, angka 16.

- a. *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* mengadakan program alokasi saham manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) sebesar 9,62% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum atau sebesar 226.928.500 saham. Saham yang dibeli dalam program MESA tidak dapat dijual dalam periode 6 bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* di Bursa Efek Indonesia.
- b. *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* merencanakan program pemberian opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*) yang memberikan hak opsi kepada peserta program MESOP untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk* dengan jumlah maksimum 4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan ketentuan:
- **Tahap Pertama**
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40% (empat puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2010.
 - **Tahap Kedua**
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2011.
 - **Tahap Ketiga**
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2012.

¹²⁰ Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham *PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk*.

Hak Opsi yang diberikan kepada peserta program MESOP dalam setiap tahapan tersebut dapat digunakan untuk membeli saham dalam program MESOP (Option Life = Masa Berlakunya Hak Opsi) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Peserta dapat menggunakan haknya untuk membeli saham dalam program MESOP pada periode pelaksanaan dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan yang ditetapkan, setelah melewati Vesting Period (Masa Tunggu) yaitu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Hak Opsi, dalam Vesting Period, peserta belum dapat menggunakan Hak Opsi yang diberikan kepadanya untuk membeli saham dalam program MESOP. Periode Pelaksanaan dari Hak Opsi akan ditetapkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode setiap tahunnya selama Masa Berlakunya Hak Opsi (Option Life). Untuk Harga Pelaksanaan dari opsi saham akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan saham perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum laporan akan dibukanya periode pelaksanaan.

Selain itu, dalam prospektus penawaran umumnya PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga memberikan gambaran mengenai struktur modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan program MESA dan MESOP sebagai bentuk pengungkapan informasi agar dipahami oleh calon investor yang saat itu tertarik untuk membeli saham yang ditawarkan melalui penawaran umum.

3. Keterbukaan melalui Laporan Tahunan dan Laporan *Good Corporate Governance*

Laporan Tahunan merupakan salah satu bentuk pelaporan yang wajib disampaikan oleh emiten dan perusahaan publik sebagaimana diamanatkan Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.2 Tentang Laporan Tahunan. Adapun diatur dalam angka 3 butir a (1) bahwa laporan tahunan emiten atau perusahaan publik wajib memuat Ikhtisar Data Keuangan Penting, Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen, Laporan Keuangan yang telah diaudit, dan Laporan Manajemen. Mengenai pelaksanaan program MESA dan MESOP oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, walaupun tidak ada peraturan yang mewajibkan keterbukaan informasi pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan secara berkala dalam bentuk laporan tahunan, namun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencantumkan informasi atas pelaksanaan MESA dan MESOP di dalam Laporan Tahunan perusahaan Tahun 2009 dan 2010.

Sedangkan untuk Laporan *Good Corporate Governance* (GCG), dibuat dan dipublikasikan untuk umum oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penerapan GCG yang tertuang dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku*" serta pemenuhan transparansi pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank. Adapun Laporan Pelaksanaan GCG meliputi: Pengungkapan Pelaksanaan GCG serta Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment*.

Terkait keterbukaan informasi tentang program MESOP, dalam Laporan Pelaksanaan GCG PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2009

dan Tahun 2010, pada bagian “Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank yang belum diungkap pada laporan lainnya” diungkapkan informasi mengenai kebijakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam pemberian *shares option* atau opsi saham, serta pengungkapan *shares option* (MESOP) Tahap I yang mencakup:

- Jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *shares option*
- Jumlah *shares option* yang diberikan
- Jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan
- Harga opsi yang diberikan
- Jangka waktu berlakunya eksekusi *shares option*

4. Keterbukaan akibat pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pencatatan saham di bursa akan membebani emiten dengan kewajiban keterbukaan (*disclosure*) tambahan. Terkait dengan adanya Kepemilikan Saham Oleh Karyawan (*Employee Stock Option Program/ESOP*) dan Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Komisaris (*Management Stock Option Program/MSOP*), Peraturan Bursa Efek Nomor I-A dalam ketentuan II.4 mewajibkan pra-pencatatan terhadap saham yang berasal dari ESOP/MSOP. Dalam hal ini, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah melakukan pra pencatatan untuk MESOP Tahap I dan telah disetujui Direksi PT Bursa Efek Indonesia melalui surat No. S-00743/BEI-PPJ/02-2010 dan diumumkan melalui Pengumuman No. Peng-P-00072/BEI.PPJ/02-2010. Sedangkan pra pencatatan untuk MESOP Tahap II telah disetujui Direksi PT Bursa Efek Indonesia melalui surat No. S-00951/BEI.PPJ/02-2011 dan diumumkan dengan Pengumuman No. Peng-P-00075/BEI.PPJ/02-2010.

Adapun untuk keterbukaan informasi mengenai hasil Pelaksanaan ESOP/MSOP, berdasarkan Surat Edaran Bursa Efek Nomor: SE-003/BEJ/09-2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penentuan dan Pelaporan Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP dalam angka 8 diatur bahwa selambat-lambatnya 10 hari bursa setelah berakhirnya Periode Pelaksanaan, Perusahaan Tercatat menyampaikan laporan kepada Bursa untuk kemudian diumumkan di Bursa yang memuat informasi sebagai berikut:

- d. Jumlah ESOP/MSOP yang telah dilaksanakan hak konversinya berikut jumlah saham baru yang telah diterbitkan
- e. Jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan masih berlaku
- f. Jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan habis masa berlakunya (kehilangan hak konversinya), jika ada.

Adapun paling lambat 1 hari setelah diterimanya laporan hasil pelaksanaan ESOP/MSOP tersebut, pengumuman pencatatan saham hasil konversi ESOP/MSOP diumumkan Bursa. Dalam hal ini, setelah dilaksanakannya konversi MESOP Tahap I untuk *exercise windows* pertama tahun 2011 (1 Februari – 16 Maret 2011), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang diwakili oleh *Corporate Secretary* tertanggal 22 Maret 2011 telah melaporkan Hasil Pelaksanaan ESOP/MSOP PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kepada Bursa Efek Indonesia. Laporan tersebut kemudian tertanggal 23 Maret 2011 diumumkan di Bursa dengan Pengumuman No. Peng-KI-00041/BEI.PPJ/03-2011. Isi laporan tersebut menguraikan: jumlah ESOP/MSOP yang telah dilaksanakan hak konversinya (95.015.000 saham), jumlah saham baru yang telah diterbitkan (95.015.000 saham), jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan masih berlaku (50.219.500 saham), serta jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan habis masa berlakunya atau kehilangan hak konversinya (0 saham). Selain itu, dalam laporan tersebut juga diungkapkan anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah mengkonversi MESOP Tahap I tersebut.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ketentuan yang mengatur tentang program kepemilikan saham oleh karyawan hanyalah Pasal 43 ayat 3. Pasal ini mengatur bahwa dalam hal Perseroan menawarkan pengeluaran saham yang ditujukan kepada karyawan Perseroan, maka tidak diwajibkan melakukan penawaran terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi yang sama. Pengecualian terhadap pengeluaran saham yang ditujukan untuk karyawan perseroan pada Pasal 43 ayat 3 huruf a inilah yang menjadi satu-satunya ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas yang memungkinkan adanya program kepemilikan saham oleh karyawan pada perseroan terbatas, yaitu dalam bentuk *Employee Stock Option Plan* (ESOP) atau opsi saham karyawan. Tidak ada peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai bagaimana syarat-syarat dan proses pelaksanaan ESOP itu sendiri.
2. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal pun juga belum ada peraturan khusus yang mengatur pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan bagi perusahaan publik atau emiten. Pada prakteknya, pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dapat dilakukan melalui penjatahan pasti atas saham yang ditawarkan saat penawaran umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas

Pasar Modal Nomor IX.A.7, melalui penerbitan saham baru tanpa HMETD sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.D.4, ataupun melalui pengalihan saham hasil pembelian kembali oleh perusahaan (*share buyback*) yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor XI.B.2. Mengenai keterbukaan informasi atas program kepemilikan saham oleh karyawan pada emiten atau perusahaan publik, dikarenakan belum ada peraturan khusus mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan itu sendiri, maka juga belum ada ketentuan khusus yang mewajibkan keterbukaan informasi atas pelaksanaannya. Sehingga hingga saat ini keterbukaan informasi yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik pun hanya terbatas dalam bentuk prospektus, hasil RUPS, laporan tahunan perusahaan, ataupun info memo atau brosur atau buku pedoman yang diterbitkan untuk karyawan peserta program. Adapun bagi emiten yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pencatatan dan kewajiban pra-pencatatan atas saham yang diterbitkan melalui program kepemilikan saham oleh karyawan yaitu di dalam Peraturan Bursa Efek Nomor I-A, serta Surat Edaran Nomor: SE-003/BEJ/09-2005 Perihal Tata Cara Pelaksanaan Penentuan dan Pelaporan Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP.

3. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk merupakan salah satu emiten yang telah melaksanakan kebijakan program kepemilikan saham oleh karyawan, melalui program *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) dan program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP). MESA dilakukan dengan memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.A.7, yaitu adalah sebesar 9,62% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam penawaran umum, sedangkan MESOP dilakukan dengan memenuhi Peraturan Bapepam No. IX.D.4, yaitu sebanyak-banyaknya 4% dari modal ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum. Kebijakan MESA dan MESOP pun dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham melalui RUPS-LB yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2009 yang dituangkan dalam Akta

Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank BTN No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta. Mengenai bentuk keterbukaan informasi dari pelaksanaan MESA dan MESOP tersebut dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam bentuk prospektus, hasil RUPS, laporan tahunan dan laporan pelaksanaan *good corporate governance*, serta pengumuman-pengumuman yang dilakukan kepada Bursa Efek.

5.2. Saran

Dengan mempertimbangkan beberapa permasalahan pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan sebagaimana dinyatakan dalam kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan belum adanya perangkat hukum yang khusus dibuat untuk mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan, namun pada prakteknya sudah banyak perusahaan khususnya emiten atau perusahaan publik yang menjalankannya, maka demi kepastian hukum pemerintah kiranya segera mengeluarkan peraturan yang khusus mengatur mengenai masalah ini. Regulasi mengenai aturan main, prosedur, keterbukaan informasi, bahkan hingga aspek perpajakan atas saham yang berasal dari program kepemilikan saham oleh karyawan sangat diperlukan.
2. Dalam hal akan dibentuk peraturan mengenai kepemilikan saham oleh karyawan khususnya tentang sarana untuk keterbukaan informasi, sebaiknya memuat:
 - a. Informasi umum mengenai nama dan rancangan program kepemilikan saham oleh karyawan.
 - b. Kriteria karyawan yang dapat berpartisipasi dalam program tersebut.
 - c. Tata cara dan jangka waktu pembelian saham yang ditawarkan
 - d. Jumlah yang harus dikontribusikan oleh karyawan dalam rangka partisipasinya dalam program tersebut, serta bagaimana cara pembayarannya.

- e. Pembatasan penjualan kembali yang ditetapkan (*lock up*)
 - f. Tata cara pengunduran diri dari program tersebut.
 - g. Kewajiban pelaporan perkembangan pelaksanaan program tersebut.
3. Walaupun belum ada peraturan khusus di bidang pasar modal yang mengatur tentang kewajiban *disclosure* atas pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan, sebagai emiten atau perusahaan publik sudah seharusnya bersikap terbuka dalam memberikan informasi mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan yang dilaksanakan di perusahaannya. Peran *Corporate Secretary* selain memastikan setiap aksi korporasi perusahaan, termasuk program kepemilikan saham oleh karyawan, memenuhi ketentuan peraturan di bidang pasar modal, diharapkan juga dapat menjadi jembatan penghubung yang baik antara perusahaan dengan masyarakat dalam hal akses informasi terkait program kepemilikan saham oleh karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Jusuf. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. cet.1. Bandung: PT ALUMNI, 2005.
- Balfas, Hamud M. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. cet.1. Jakarta: Tatanusa, 2006.
- Frisch, Robert A. *ESOP: The Ultimate Instrument in Succession Planning, Second Edition*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2001.
- Fuady, Munir. *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*. cet.1. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Ginting, Jamin. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. cet.1. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Angkutan*. Jakarta: Pardnya Paramita, 1986.
- Mamudji, Sri., et. al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005.
- Nasarudin, Irsan., et. al. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. ed.1. cet.5. Jakarta: Kencana, 2008.
- Olagues, John dan Summa, John F. *Getting Started in Employee Stock Option*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2010.
- Purwosutjipto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan) Jilid 2*. Jakarta: Djambatan, 1984.
- Sardjono, Agus. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Siahaan, Hinsa. *Seluk Beluk Perdagangan Instrumen Derivatif: Opsi Saham Call & Put, Rights, Warrants, Convertible Bonds, Swap Tingkat Bunga, Indeks, dan Swap Valuta Asing. cet.1.* Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, 2008.

Sifleet, Jean D. *Beyond 401 (k)S for Small Business Owners: A Practical Guide to Incentive, Deferred Compensation, and Retirement Plans.* New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2004.

Sitompul, Asril. *Pasar Modal: Penawaran Umum & Permasalahannya. cet.2.* Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum. cet.3.* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2008.

Suta, I Putu Gede Ary. *Menuju Pasar Modal Modern. cet. 1.* Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2000.

Yulfasni. *Hukum Pasar Modal. cet.1.* Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-undang Tentang Pasar Modal. No. 8 Tahun 1995.* LN No. 64 Tahun 1995. TLN No. 3608.

_____. *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas. No. 40 Tahun 2007.* LN No. 106 Tahun 2007. TLN No. 4756.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.* Nomor IX.A.7.

_____. *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.* Nomor IX.D.4.

_____. *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.* Nomor XI.B.2.

_____. *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Pedoman Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.* Nomor IX.C.1.

_____. *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala*. Nomor IX.K.2.

_____. *Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik*. Nomor IX.K.1.

Bursa Efek Jakarta. *Peraturan Bursa Efek Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat*. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004.

_____. *Surat Edaran Perihal Tata Cara Pelaksanaan Penentuan dan Pelaporan Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP*. Nomor: SE-003/BEJ/09-2005.

Makalah

Tim Studi Penerapan ESOP Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia. *Studi Tentang Penerapan ESOP (Employee Stock Ownership Plan) Emiten atau Perusahaan Publik di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, 2002.

Artikel

Tirthayatra, I Made B. "Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan". *Warta Bapepam Edisi 13*. (Januari 2006), hlm. 7.

_____. "Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan (ESOP)". <http://made-tirthayatra.blogspot.com/2009/06/program-kepemilikan-saham-bagi-karyawan.html>. Diunduh pada 3 April 2011

Telaumbanua, Faoso F. "Opsi Saham Karyawan" <http://groups.yahoo.com/group/saham/message/14997>. Diunduh pada 4 April 2011.

Lain-lain

Bursa Efek Indonesia. Pengumuman PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BBTN), No. Peng-P-00592/BEI.PPJ/12-2009.

_____. Pengumuman PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BBTN), No. Peng-P-00072/BEI.PPJ/02-2010.

_____. Pengumuman PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BBTN), No. Peng-P-00075/BEI.PPJ/02-2010.

_____. Pengumuman PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (BBTN), No. Peng-KI-00041/BEI.PPJ/03-2011.

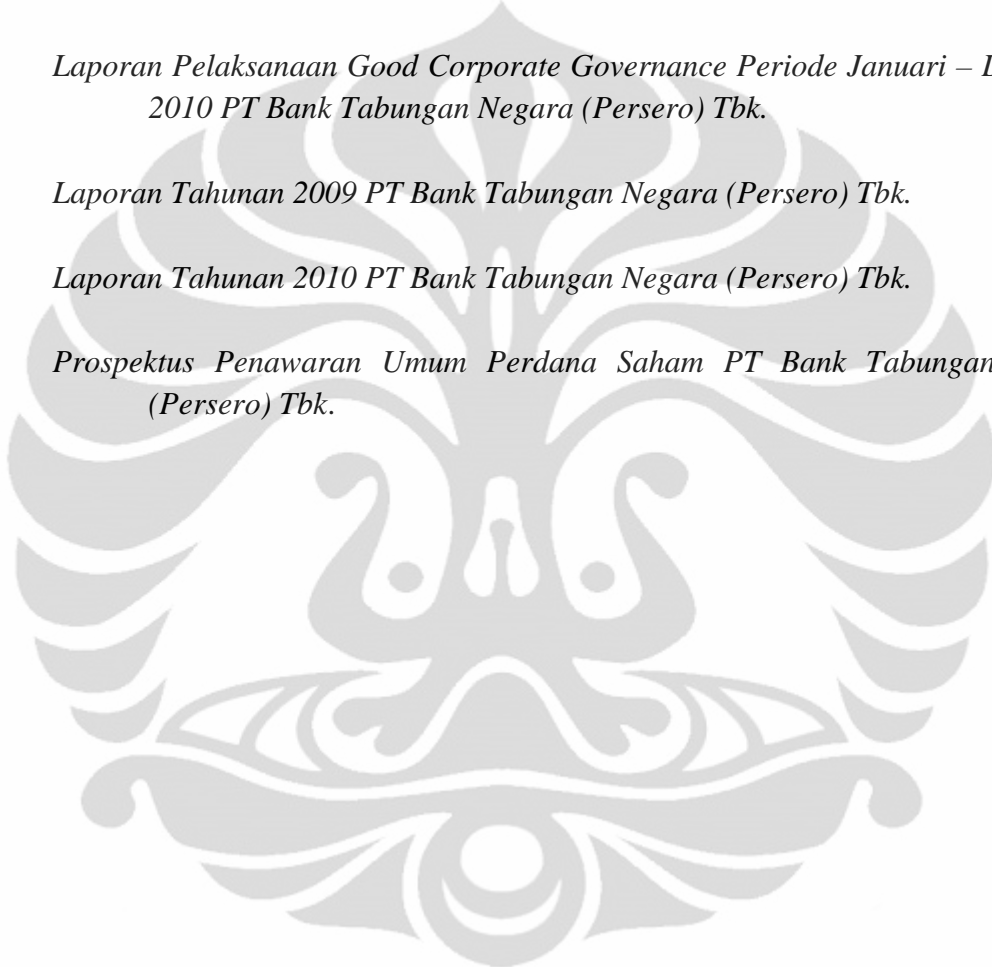
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Januari – Desember 2009 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance Periode Januari – Desember 2010 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Laporan Tahunan 2009 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Laporan Tahunan 2010 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-45/PM/2000
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.A.7 TENTANG TANGGUNG JAWAB MANAJER
PENJATAHAN DALAM RANGKA PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM
PENAWARAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Manajer Penjatahan serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemodal untuk menanamkan modalnya dalam Penawaran Umum, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-48/PM/1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN NOMOR IX.A.7 TENTANG TANGGUNG JAWAB MANAJER PENJATAHAN DALAM RANGKA PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum diatur dalam Peraturan Nomor IX.A.7 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi.

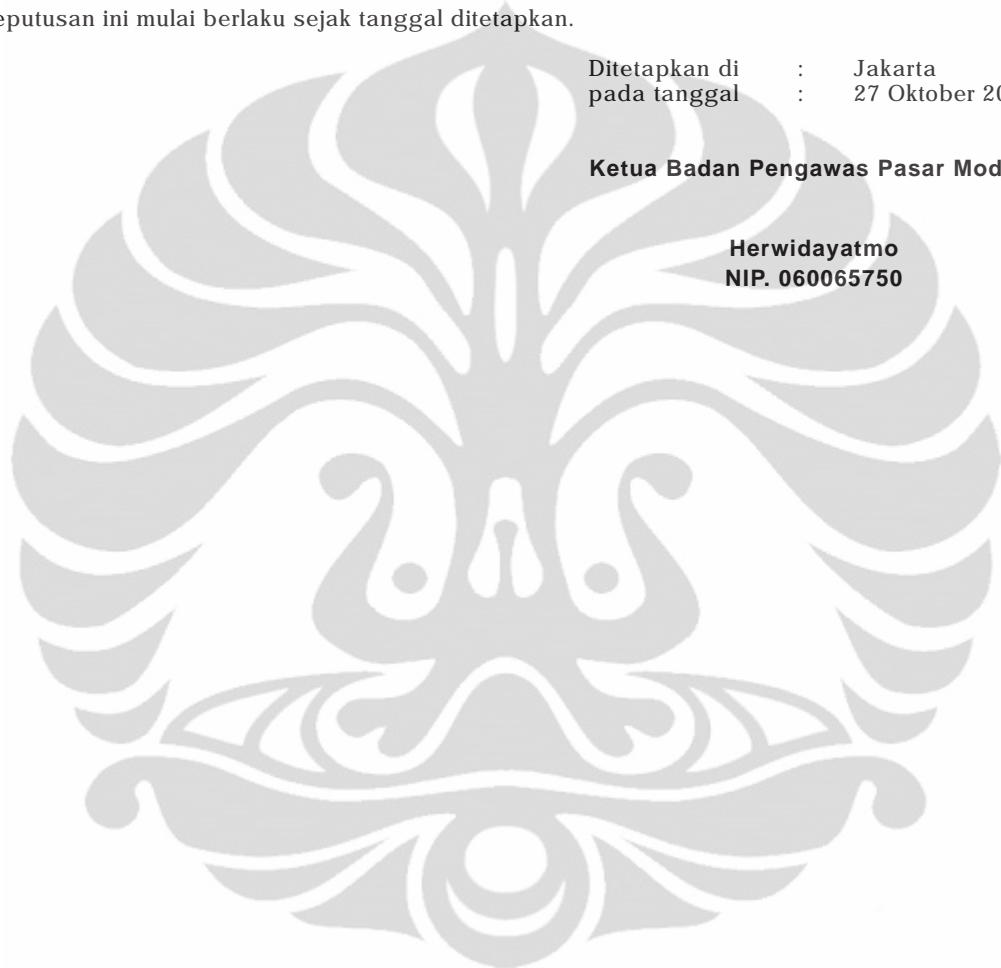
Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Oktober 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP. 060065750



LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-48/PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996,

diubah dengan

Nomor : Kep-45/PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

PERATURAN NOMOR IX.A.7 : TANGGUNG JAWAB MANAJER PENJATAHAN DALAM RANGKA PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM

1. Penawaran Umum

Penawaran Umum dapat merupakan Penawaran Umum kepada masyarakat luas atau kepada kelompok masyarakat tertentu atau sebagian kepada masyarakat luas dan sebagian kepada masyarakat tertentu.

2. Manajer Penjataan

Setiap Penawaran Umum harus mempunyai satu Manajer Penjataan. Manajer Penjataan adalah Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjataan Efek dalam suatu Penawaran Umum, atau Emiten dalam hal tidak menggunakan Penjamin Emisi Efek.

3. Laporan Penjataan

Manajer Penjataan dari suatu Penawaran Umum harus mengisi dan mengajukan Formulir Nomor: IX.A.7-1 lampiran peraturan ini (Laporan Manajer Penjataan mengenai pembagian Efek dalam suatu Penawaran Umum) rangkap 4 (empat) kepada Bapepam dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjataan.

4. Formulir Pemesanan

Formulir pemesanan untuk Penawaran Umum harus memuat pernyataan yang ditandatangani oleh para pemesan mengenai apakah:

- a. pemesan adalah pemodal Indonesia atau pemodal asing;
- b. pemesan telah menerima atau telah berkesempatan membaca Prospektus;
- c. pemesan seorang direktur, komisaris, karyawan atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh perseratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan Efek, atau Pihak lain yang terafiliasi dengan Emiten atau semua Pihak dimaksud, sehubungan dengan Penawaran Umum tersebut;
- d. pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik penerima manfaat;
- e. pemesan mempunyai kontrak dengan Perusahaan Efek sebagaimana dipersyaratkan dalam angka 5 Peraturan Nomor: V.D.3 dan apakah Perusahaan Efek itu bertindak sebagai Agen Penjualan Efek berkaitan dengan pemesanan dimaksud; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-48/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-45/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000

- f. pemesan adalah pegawai, namun tidak termasuk anggota komisaris, direksi dan pemegang saham utama dari Emiten yang bersangkutan.
5. Penggunaan informasi berkaitan dengan pemesanan pembelian Efek
 - a. Manajer Penjatahan dapat menggunakan informasi dari pernyataan para pemesan untuk tujuan penjatahan pemesanan, kecuali jika diketahui hal sebaliknya; dan
 - b. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka Manajer Penjatahan harus menolak penjatahan bagi pemesanan oleh Pihak yang memberikan jawaban “ya” atas pertanyaan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 4 huruf d peraturan ini, atau memberikan jawaban “tidak” atas pertanyaan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 4 huruf e peraturan ini.
 6. Penyerahan bukti kepemilikan Efek dan pengembalian uang pemesanan
 - a. Setiap bukti kepemilikan Efek berupa surat kolektif Efek yang diserahkan sebagai akibat dari suatu pemesanan, harus diterbitkan atas nama pemesan yang bersangkutan;
 - b. Dalam hal Emiten tidak menerbitkan surat kolektif Efek, maka saham-saham tersebut di administrasikan secara elektronik dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - c. Dalam hal terdapat pengembalian uang atas pemesanan pembelian saham yang melewati masa 2 (dua) hari kerja, maka Penjamin Emisi Efek wajib membayar ganti kerugian atas keterlambatan tersebut. Dalam hal ini, Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengungkapkan secara jelas baik melalui Prospektus, Prospektus ringkas, dan atau melalui publikasi lain tentang hal-hal sebagai berikut :
 - 1) tingkat bunga yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan ganti rugi atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan pembelian saham, dengan menyebutkan persentase, tingkat bunga atau pengukur lainnya;
 - 2) tata cara yang akan digunakan dalam melakukan pengembalian uang pemesanan pembelian saham dan ganti rugi yang meliputi antara lain :
 - a) alat pembayaran: uang tunai, cek atau instrumen lainnya;
 - b) jika pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama Pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-48/PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996,

diubah dengan

Nomor : Kep-45/PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

- 3) cara pembayaran: dikirim oleh Penjamin Emisi Efek, diambil langsung oleh pemodal, dimasukkan ke dalam rekening pemodal atau dengan cara lainnya.
 - d. Penyerahan bukti kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a dan angka 6 huruf b peraturan ini dianggap terpenuhi jika Efek dimaksud telah diserahkan kepada pemesan atau dimasukkan ke dalam rekening Efek atas nama pemesan.
 - e. Pengembalian uang pemesanan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf c peraturan ini dianggap terpenuhi jika uang dimaksud telah diserahkan kepada pemesan atau dimasukkan ke dalam rekening Efek atas nama pemesan.
7. Jumlah pesanan untuk setiap Pihak
- a. Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum.
 - b. Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.
 - c. Dalam hal persyaratan pemesanan memerlukan penyertaan dana dari pemesan kategori tertentu, maka persyaratan ini tidak dapat dibebaskan, dikurangi, atau diubah bagi pemesan mana pun dalam kategori dimaksud, dan semua setoran dimaksud harus diserahkan dengan persyaratan yang sama dalam rekening bank di bawah pengendalian Manajer Penjatahan dan wajib diaudit sesuai dengan ketentuan angka 14 peraturan ini.
8. Penjatahan Pasti

Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan Pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
- b. dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki Efek untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan Efek, atau Pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual Efek yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa Efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-48/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-45/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000

9. Dalam rangka menjamin terlaksananya penyebaran saham secara luas, maka Penjamin Emisi Efek harus menggunakan Agen Penjualan Efek yang cukup sehingga munculnya masalah antrian panjang calon pemodal dapat dihindari.
10. Agar pembayaran atas penjatahan saham dapat dilakukan dengan baik tanpa merugikan pemodal akibat adanya perubahan kurs, maka Penjamin Emisi Efek dapat membuka rekening dalam mata uang dolar Amerika dan rupiah pada bank yang berdomisili atau berada di Indonesia.
11. Penjatahan terpusat

Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek sebagai berikut :

- a. jika setelah mengecualikan pemesan Efek terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c peraturan ini dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
- b. jika setelah mengecualikan pemesan Efek terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c peraturan ini dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Efek tersebut dialokasikan secara proporsional tanpa pecahan, jika tidak akan dicatatkan di Bursa; atau
 - 2) Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini, jika akan dicatatkan di Bursa :
 - a) prioritas dapat diberikan kepada para pemesan yang menjadi pegawai Emiten, sampai dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah Penawaran Umum;
 - b) para pemesan yang tidak dikecualikan berdasarkan ketentuan angka 4 huruf c peraturan ini akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa di mana Efek tersebut akan tercatat; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua

Badan Pengawas Pasar Modal

Nomor : Kep-48/PM/1996

Tanggal : 17 Januari 1996,

diubah dengan

Nomor : Kep-45/PM/2000

Tanggal : 27 Oktober 2000

- c) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

12. Penjatahan bagi Pihak terafiliasi

Jika para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 peraturan ini telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c peraturan ini.

13. Penjatahan dalam Penawaran Umum kepada Kelompok Masyarakat Tertentu

Dalam Penawaran Umum kepada kelompok masyarakat tertentu, Emiten harus mengungkapkan dalam Prospektus persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pemesan dan menguraikan prosedur penjatahan yang digunakan, yang dapat merupakan prosedur sebagaimana diuraikan di atas. Dalam hal terdapat prosedur lain yang mendasari tujuan dari Penawaran Umum tersebut, maka hal dimaksud harus diungkapkan dalam Prospektus.

14. Pemeriksaan Khusus

Manajer Penjatahan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam untuk melaksanakan pemeriksaan khusus. Manajer Penjatahan dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penjatahan harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan Akuntan kepada Bapepam mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan, termasuk tersedianya dana hasil Penawaran Umum tersebut. Semua dokumen yang berhubungan dengan proses penjatahan wajib disimpan oleh Manajer Penjatahan yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-48/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996,
diubah dengan
Nomor : Kep-45/PM/2000
Tanggal : 27 Oktober 2000

15. Penjualan Melalui Agen Penjualan Efek

Pemesanan wajib diterima oleh Manajer Penjatahan, baik yang dilakukan dalam formulir asli atau fotokopinya, sepanjang pemesanan tersebut disampaikan melalui Perusahaan Efek yang menjadi anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan Efek. Manajer Penjatahan dimaksud harus memastikan bahwa semua Agen Penjualan Efek yang tercantum dalam Prospektus harus mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh formulir pemesanan dan dokumen pemesanan lain yang diperlukan.

16. Keterbukaan Informasi Metode Penjatahan

Manajer Penjatahan wajib mengungkapkan dalam Prospektus dan Prospektus Ringkas, termasuk dalam Prospektus Awal (jika ada), informasi antara lain mengenai metode penjatahan, kisaran persentase dan prakiraan Pihak atau kalangan tertentu yang akan mendapatkan penjatahan dalam Penawaran Umum.

17. Metode Penjatahan Lain

Penjamin Emisi Efek dapat menggunakan prosedur penjatahan lain untuk Penawaran Umum sepanjang:

- a. prosedur dimaksud telah direkomendasikan oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia dan disetujui oleh Bapepam;
- b. prosedur dimaksud diungkapkan sepenuhnya dalam Prospektus; dan
- c. prosedur dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini, kecuali angka 8, angka 11, dan angka 12 peraturan ini.

18. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Oktober 2000

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

Herwidayatmo
NIP 060065750

LAMPIRAN :
Peraturan Nomor : IX.A.7

FORMULIR NOMOR IX.A.7-1 : LAPORAN MANAJER PENJATAHAN MENGENAI PEMBAGIAN EFEK DALAM PENAWARAN UMUM

Tanggal efektif : Jakarta, 20

Tanggal penjatahan : Yth : Kepada
Ketua Bapepam
di-
J A K A R T A

Tanggal laporan Akuntan harus disampaikan :

Nama Manajer Penjatahan :

Nama Emiten :

Uraian tentang Efek yang ditawarkan :

Nama Akuntan yang akan melakukan pemeriksaan khusus penjatahan :					
Efek yang ditawarkan		Pemesan	JumlahEfek yang dipesan	Jumlah Pemesan	Jumlah uang pemesanan
Efek yang dijatahkan dalam satu satuan perdagangan, kecuali bagi Pihak terafiliasi (angka 4.c . Peraturan Nomor : IX.A.7)	Pemodal Asing				
	Pemodal Indonesia				
Efek yang dijatahkan dalam jumlah lebih dari satu satuan perdagangan, kecuali bagi Pihak terafiliasi (angka 4.c Peraturan No : IX.A.7)	Pemodal Asing				
	Pemodal Indonesia				
Efek yang dijatahkan bagi Pihak terafiliasi tersebut	Pemodal Asing				
	Pemodal Indonesia				
Efek yang tersisa (jika ada)					
Jumlah	Pemodal Asing				
	Pemodal Indonesia				
	Total *)				

Penjamin Emisi Efek yang membeli Efek yang tersisa

No.	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Efek yang dibeli	Jumlah uang
1			
2			
3			
	Jumlah		

Manajer Penjatahan

Tembusan Kepada Yth.
PT (Emiten)

* Jumlah tersebut telah tersedia di perusahaan sesuai dengan Penawaran Umum

**Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance
Periode Januari sampai dengan Desember 2009
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**



PENDAHULUAN

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sudah menjadi bagian dari Perseroan sejak berdiri dan terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Momentum dilakukannya pencatatan saham perdana (IPO – *Initial Public Offering*) pada tahun 2009 menjadi pijakan bagi peningkatan kualitas penerapan GCG yang lebih baik. Bagi Perseroan, GCG merupakan penopang dalam menjalankan bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif.

Salah satu upaya pelaksanaan GCG dimaksud adalah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penerapan GCG yang tertuang dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku*" serta pemenuhan transparansi pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank, dan memperhatikan Surat Bank Indonesia No.11/91/DPB1/TPB1-5 tanggal 20 Juli 2009, perihal Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2008, maka Bank BTN menyusun Laporan Pelaksanaan GCG (periode Januari – Desember 2009) yang meliputi :

- I. Pengungkapan Pelaksanaan GCG
- II. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment*

Selanjutnya Laporan Pelaksanaan GCG Bank BTN adalah sebagai berikut :

I. **PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GCG**

Persyaratan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi:

1. **Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris.**
 - a. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, dengan komposisi sebagai berikut:
Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Zaki Baridwan
Komisaris Independen : Subarjo Joyosumarto
Komisaris : Gatot Mardiwasto
Komisaris : Mulabasa Hutabarat
- 2) Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank BTN berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
- 3) Anggota Dewan Komisaris Bank diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS.
- 4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan.
- 5) Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- 6) Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank BTN, maupun pada Bank dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri.

b. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah anggota Direksi Bank BTN adalah 6 (enam) orang, dengan komposisi sebagai berikut :
Direktur Utama : Iqbal Latanro
Wakil Direktur Utama : Evi Firmansyah
Direktur Bidang I : Sunarwa
Direktur Bidang II : Saut Pardede
Direktur Bidang III : Irman Alvian Zahiruddin
Direktur Bidang IV : Purwadi

- 2) Seluruh anggota Direksi Bank BTN berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
- 3) Direksi Bank diganti dan diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS.
- 4) Seluruh anggota Direksi Bank BTN telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- 5) Direksi tidak memegang jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Bank BTN, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank BTN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 6) Direksi tidak memiliki saham 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank BTN, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan atau perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 7) Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan GCG bagi Bank Umum.
- 8) Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi

2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya. Secara garis besar, tugas utama Dewan Komisaris di antaranya adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi,

memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi serta memastikan Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Kedudukan masing masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Adapun uraian pokok tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank BTN di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank.
 - b) Mengawasi efektivitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Bank.
 - c) Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko.
 - d) Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.
 - e) Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya.
 - f) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - g) Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - h) Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal.
 - i) Menyusun pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.
 - j) Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta

mekanisme *review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.

- k) Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris kepada *stakeholders*.
 - l) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.
- 2) Dewan Komisaris berkewajiban:
- a) Memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang diusulkan Direksi.
 - b) Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan Visi dan Misi Bank.
 - c) Menandatangani RJP, RBB, RKAP, laporan tahunan, dan Laporan dan Kesimpulan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG.
 - d) Melaporkan dengan segera kepada RUPS tentang terjadinya gejala menurunnya kinerja Bank.
 - e) Mengikuti kegiatan operasional Bank dalam hal pengambilan keputusan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. Namun tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
 - f) Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit intern Bank.
 - g) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

- h) Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- i) Membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- j) Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- k) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang sekurang-kurangnya mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja; dan pengaturan rapat.
- l) Mengungkapkan kepemilikan saham, baik pada bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri dan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank, dalam laporan pelaksanaan GCG dan Daftar Khusus.
- m) Menghindari pemanfaatan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- n) Tidak mengambil dan/atau tidak menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- o) Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima pada laporan

pelaksanaan GCG sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Hak dan wewenang Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Berhak memperoleh akses mengenai Bank dan memperoleh informasi secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usaha Bank dan meminta kepada Direksi menghadiri rapat Komisaris untuk memperoleh penjelasan tentang kondisi Bank.
- c) Berhak membentuk Komite-Komite lain untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d) Berhak mengajukan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- e) Berhak mendapatkan bantuan tenaga profesional, apabila diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.
- f) Berhak mendapatkan remunerasi dan fasilitas sesuai yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- g) Berwenang untuk mengambil keputusan di dalam maupun di luar rapat Dewan Komisaris mengenai hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Perseroan, Direksi Bank BTN bertugas mengelola Perseroan, memelihara dan mengurus aset Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi bertugas dan bertanggung-jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan agar *value driver* berfungsi maksimal sehingga profitabilitas operasional naik dan memberikan hasil

akhir berupa peningkatan nilai perusahaan secara berkesinambungan. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama setara, dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Direksi dapat mengambil keputusan, termasuk dalam rapat Direksi, dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun demikian tanggung jawab kolegiat tetap berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Fungsi pengelolaan Perseroan oleh Direksi, pada dasarnya mencakup 5 (lima) tugas utama, yakni: kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi dan tanggung jawab sosial. Fungsi kepengurusan berarti Direksi menyusun visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, program jangka pendek maupun panjang, mengendalikan sumber daya secara efektif dan efisien, memperhatikan kepentingan *minority shareholder* secara wajar dan memiliki tata kerja dan pedoman kerja (*charter*) yang jelas. Direksi menyusun dan melaksanakan manajemen risiko yang mencakup seluruh aspek operasional Perseroan, menyusun satuan pengendalian internal, memastikan kelancaran komunikasi internal (antar bagian) dan eksternal (dengan pemangku kepentingan) serta menyusun dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial korporasi. Adapun tugas Direksi sesuai fungsinya, masing-masing diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama bertugas untuk mengkoordinir anggota Direksi lainnya, agar seluruh kegiatan berjalan sesuai visi, misi, sasaran usaha, strategi, kebijakan dan program kerja yang ditetapkan. Secara spesifik, Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama juga bertanggung jawab untuk menyelaraskan seluruh inisiatif-inisiatif internal dan strategis Perseroan, memastikan terjadinya peningkatan kemampuan bersaing perusahaan, mengendalikan serta mengevaluasi

penerapan prinsip-prinsip GCG dan standar etika. Direktur Utama bertugas mengkoordinasikan tugas operasional di bidang audit internal.

- b) Wakil Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas operasional di bidang sekretariat perusahaan, penelitian dan perencanaan serta kebijakan dan pengembangan bisnis.
- c) Direktur I / Direktur Kepatuhan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas operasional di bidang sumber daya manusia, manajemen risiko dan bertanggung jawab atas *compliance* (kepatuhan) operasional Bank BTN atas segala aturan BI dan ketentuan yang berlaku.
- d) Direktur II / Direktur Pemasaran dan Treasury bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi tugas operasional di bidang *treasury*, pemasaran ritel dan kegiatan syariah Bank BTN.
- e) Direktur III / Direktur Operasional bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional bidang akuntansi agar pembukuan perusahaan sesuai dengan PSAK dan akuntabel, kegiatan di bidang operasional dan kegiatan di bidang teknologi informasi.
- f) Direktur IV / Direktur *Credit Support* bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional atas bidang pengelolaan kredit, bidang pembinaan dan penyelamatan kredit dan bidang pengadaan dan pengolahan logistik.

Disamping tugas-tugas operasional sesuai bidang masing-masing, seluruh Direktur Perseroan bertugas untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang terkait dengan unit kerjanya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris.

Selain tugas utama dan tugas-tugas fungsional dari masing-masing Direktur tersebut, Direksi Perseroan, sebagaimana diatur dalam AD/ART Perseroan dan Pedoman GCG, memiliki wewenang dan tanggung jawab secara kolegal, di antaranya untuk:

- 
- a) Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perseroan, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua termasuk mengangkat ataupun memberhentikan pegawai sesuai peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain atau sebaliknya, serta mewakili Perseroan di dalam atau di luar sidang berkaitan dengan hukum, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, AD/ART dan/atau Keputusan RUPS.
 - c) Menghapus-bukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris, menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi atau penyelesaian piutang Perseroan.
 - d) Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
 - e) Menyiapkan RJPP, RKAP beserta perubahannya dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris, untuk selanjutnya disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
 - f) Membuat Laporan Tahunan atas kinerjanya sebagai wujud pertanggung-jawaban pengurusan Perseroan lengkap dengan dokumen keuangan Perseroan.
 - g) Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkannya kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
 - h) Menyelenggarakan dan memberikan penjelasan dalam RUPS semua hal berkaitan dengan kinerja Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS dan pembebasan tanggung jawab sesuai norma-norma dan peraturan perundang-undangan.

- i) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan.
- j) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawabana serta kewajaran.
- k) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan, kecuali dapat membuktikan bahwa: kerugian bukan akibat kelalaian, telah bertindak dengan hati-hati sesuai maksud dan tujuan Perseroan, tidak memiliki benturan kepentingan atas kerugian yang terjadi dan telah mengambil tindakan pencegahan.
- l) Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Direksi Bank BTN, selama tahun 2009 menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 118 (seratus delapan belas) kali, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan dan/atau strategi yang dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi, diantaranya adalah:

- a) Bidang Kepengurusan, diantaranya:
 - 1) Bidang SDM, menyangkut: rekrutmen, pendidikan dan pelatihan (meningkatkan profesionalisme pegawai), promosi/mutasi, manajemen kinerja, *job grading*, imbal jasa (peningkatan kesejahteraan pegawai), *reward and punishment*, manajemen karir, program penawaran pensiun sukarela terbatas, termasuk implementasi budaya kerja.

- 2) Melakukan penawaran umum obligasi XIII Bank BTN tahun 2009 dengan total dana sebesar Rp. 1.5 trilyun dengan tenor 3,4, dan 5 tahun..
 - 3) Melakukan *Initial Public Offering* (IPO) yang berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 11 Desember 2009.
 - 4) Pelaksanaan program sertifikasi ISO 9001 – 2000 untuk layanan KPR dan KPA komersial, dalam proses penerimaan aplikasi kredit sampai dengan pencairan kredit.
 - 5) Melakukan sekuritasi atas tagihan KPR dan diperjualbelikan di bursa saham.
 - 6) Membangun organisasi yang efektif dengan melakukan pengembangan struktur organisasi, membangun budaya kerja, pembenahan penggolongan jabatan, membangun sistem *balance scorecard*, dan melakukan *workload analysis*.
 - 7) Pengembangan di bidang IT selaras dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2008-2012 yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan bisnis dan produk perbankan serta meningkatkan efisiensi.
 - 8) Pembukaan kantor cabang dan peningkatan kelas kantor cabang.
 - 9) Mengembangkan strategi bisnis, diantaranya, fokus pembedaan kredit, pengembangan dan diversifikasi produk dan pengembangan usaha syariah.
- b) Bidang Manajemen Risiko, diantaranya adalah :
- 1) Pengembangan sistem manajemen risiko, meliputi: pengembangan budaya manajemen risiko, sosialisasi *standard operating procedure* (SOP) secara berkala melalui *Branch Risk Control Officer* (BRCO), pelaksanaan *operational risk self assessment*, pelaksanaan *stress testing* untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi kejadian risiko yang bersifat ekstrim (*catastropy*).
 - 2) Implementasi Basel II, meliputi: persiapan implementasi Basel II yang

mengacu kepada *road map* yang disusun Bank Indonesia, melakukan persiapan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach*, melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional dan *Standardized Model* untuk risiko pasar.

- 3) Penempatan *Division Risk Control Officer* (DRCO) dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO) sesuai dengan struktur organisasi Bank. Per akhir Desember 2009, jumlah *Division Risk Control Officer* (DRCO) yang ditempatkan di Kantor Pusat ada 3 orang yaitu DRCO Risiko Pasar, DRCO Risiko Kredit dan DRCO Risiko Operasional. Sementara itu, jumlah *Branch Risk Control Officer* (BRCO) yang ditempatkan ada 46 orang di 46 Kantor Cabang dari 60 (enam puluh) Kantor Cabang (per Desember 2009). Untuk Kantor Cabang yang belum ditempatkan BRCO, pemantauan pengelolaan risiko dilakukan oleh BRCO dari Kantor Cabang terdekat sebagai berikut:

No	KC Penugasan	Tambahan Cakupan Wilayah Kerja
1	BRCO, KC Batam	KC Tanjung Pinang
2	BRCO, KC Bandung	KC Cimahi
3	BRCO, KC Bekasi	KC Cikarang
4	BRCO, KC Jakarta Harmoni	KC Kelapa Gading SQ dan KC Kebon Jeruk
5	BRCO, KC Jakarta Kuningan	KC Cibubur dan KC Cawang
6	BRCO, KC Manado	KC Gorontalo dan KC Ternate
7	BRCO, KC Makasar	KC Ambon dan KC Kendari
8	BRCO, KC Medan	KC Banda Aceh
9	BRCO, KC Palembang	KC Pangkal Pinang
10	BRCO, KC Tangerang	KC Bumi Serpong Damai

- 4) Penyempurnaan kebijakan dan prosedur pengelolaan manajemen risiko, melalui pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

- 5) Pengembangan sistem informasi manajemen risiko. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.
 - 6) Pembuatan profil risiko dan pengelolaan risiko yang meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik dan risiko kepatuhan.
 - 7) Pengembangan SDM di Bidang Manajemen Risiko, dengan melaksanakan beberapa program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko, yaitu: *Branch Risk Control Officer* dalam menjalankan fungsinya memberikan *second opinion* dan pertimbangan risiko yang melekat dalam setiap bisnis Bank. Sedangkan dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan di bidang manajemen risiko, Bank telah melakukan *internal training* dan mempersiapkan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko).
- c) Bidang Pengendalian Internal
- Secara umum, Direksi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program Bank, menyempurnakan efektifitas proses pengendalian risiko, melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan GCG dan perundang-undangan, dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
- Pada bidang kepatuhan, Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1) Mendorong sosialisasi standart operation procedures (SOP).

2) Melalui Desk Kepatuhan melakukan:

- Pemantauan atas pengenaan denda oleh Bank Indonesia.
- Pemantauan kewajiban bank dan laporan keuangan.
- Membuat action plan pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris.
- Memberikan opini terhadap setiap ketentuan internal yang akan diterbitkan agat *comply* terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memantau pemenuhan komitmen bank kepada BI, BPK, KAP serta tindak lanjut hasil audit internal.
- Memantau penanganan *fraud*.
- Menerapkan prinsip KYC/AML.
- Penanganan *recovery* gedung menara Bank BTN.
- Mengkoordinir pelaksanaan GCG.
- Melaksanakan prinsip-prinsip kehati-hatian, utamanya dalam memenuhi keajiban penyediaan modal minimum, ketentuan BMPK, PDN, tingkat kesehatan Bank dan pemenuhan PPAP.

d) Satuan kerja manajemen risiko bekerja sama dan atau berkoordinasi dengan satuan audit internal dengan melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya peningkatan *internal control* dalam berbagai kegiatan operasional, diantaranya:

1) Dalam setiap pelaksanaan audit di lapangan oleh Divisi Audit Internal telah dilaksanakan prosedur *Audit Rating* dan *Control Self Assesment* berupa kuesioner yang diperuntukkan bagi seluruh jajaran manajemen dimana salah satu variabel diantaranya adalah untuk menilai manajemen Kantor Cabang secara umum serta gaya kepemimpinan dan kontrol di Kantor Cabang sebagai cermin penilaian tata kelola hubungan antara para pelaku GCG

secara detail meliputi hubungan antara Kepala Cabang dengan Para Manajer Lininya serta dengan para pegawai dan sebaliknya.

- 2) Sejak tahun 2006/2007 DAI dan DMR telah menginstruksikan kepada seluruh Kantor Cabang untuk melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di kantor Cabang yang pelaksanaannya harus dan telah dibuat Berita Acara per masing-masing karyawan/pejabat peserta sosialisasi.
 - 3) Para pejabat BRCO yang ditempatkan di Kantor Cabang telah diberikan pelatihan ACL (*Audit Command Language*) oleh Divisi Audit Intern sehingga agar dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dapat melakukan evaluasi dan *asesment* terhadap risiko dan pengendalian rekening aplikasi nasabah dan debitur. Dengan demikian *day to day risk control* dapat di tingkatkan berdasarkan masukan dari BRCO.
- e) Bidang GCG, diantaranya:
- 1) Mengesahkan pedoman GCG.
 - 2) Mengimplementasikan Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan GCG.
 - 3) Pembentukan koordinator dan *assessor* GCG di setiap unit kerja Divisi/Desk.
 - 4) Melaksanakan *self assesment* pelaksanaan GCG Periode Januari sampai dengan Desember 2008.
 - 5) Melaksanakan program *awareness* GCG melalui sosialisasi praktik-praktik GCG melalui media internal di seluruh jajaran Bank BTN.
 - 6) Selain itu, telah dilaksanakan langkah-langkah terkait dengan mekanisme *corporate governance* yang terkait dengan fungsi audit intern diantaranya adalah pelaksanaan audit dengan melakukan prosedur *Audit Rating* dan *Control Self Assesment* seperti yang telah diuraikan di muka.

Dalam pelaksanaan audit di lapangan, dilakukan koordinasi antara Tim Audit Internal DAI dengan pejabat dari DMR yang ditempatkan di Kantor Cabang yaitu *Branch Risk Control Officer* (BRCO). Koordinasi dengan BRCO sangat diperlukan karena BRCO ini yang melakukan *risk assessment*, *control assessment* maupun *GCG assessment* sehari-hari di Kantor Cabang, dibanding DAI yang hanya melakukan audit setiap tahun sekali. Koordinasi DAI dan DMR ini telah diinstruksikan langsung oleh Direktur Kepatuhan yang langsung membawahi DMR dan BRCO.

- e) Bidang CSR. Bank memiliki tanggung jawab atau senantiasa memberi makna dalam setiap langkah bisnis yang diambil. Tanggung jawab sosial Perusahaan, bagi Bank, tidak sekedar kewajiban tetapi mengambil bagian dalam membangun kesejahteraan bersama. Bank berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi para *stakeholders*, yakni: nasabah, pegawai, mitra bisnis, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan sekitar yang menjadi titik pijakan bisnis Bank. Pada tahun 2009, Bank telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah Bank BTN *Green Community*, pemberian bantuan sosial, mudik bersama Bank BTN "Terasa Asik", pemberian beasiswa, pemberian bantuan operasi jantung anak, bantuan kepada korban bencana alam, dan bantuan program kemitraan.

3. Rekomendasi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris selama masa tugasnya pada periode 2009 telah melakukan tugas pengawasan, penelaahan dan pemberian saran kepada Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan, yang meliputi kinerja keuangan, implementasi manajemen risiko, transformasi di segenap lini bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis Bank BTN, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal, termasuk hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Berikut rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris Bank BTN untuk ditindaklanjuti:

1. Meminta kepada Direksi untuk melakukan persiapan dalam rangka implementasi strategi dan pencapaian target Perseroan, seperti pencapaian komposisi kredit, dan penghimpunan dana pihak ketiga.
2. Pembahasan pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) Bank BTN, termasuk program *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) dan *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).
3. Rekomendasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan kinerja Bank BTN secara regular.
4. Pengembangan struktur organisasi baru Bank BTN yang menekankan kepada proses bisnis dan fokus pada nasabah.
5. Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga besar seperti PT. Pos Indonesia, Universitas, Dana Pensiun, dan lain sebagainya untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
6. Meminta kepada Perseroan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam menangani bisnis baru sesuai dengan strategi Bank BTN.
7. Perseroan agar menyempurnakan sistem pengisian jabatan, sistem manajemen kinerja dan manajemen karir bagi pegawai untuk menunjang pengembangan bisnis Bank.
8. Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk Direksi dan setiap unit kerja.
9. Meminta Perseroan untuk terus memantau risiko Perseroan mengingat tingkat ketidakpastian yang tinggi akibat krisis ekonomi global.
10. Memperhatikan keamanan semua gedung kantor yang dimiliki oleh Perseroan, dengan melakukan pemeriksaan secara regular dan memastikan *Data Recovery Sistem* (DRC) dalam keadaan baik agar kegiatan operasional Bank tidak terganggu.
11. Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung pengembangan bisnis dan jaringan Perseroan.
12. Memberikan masukan dalam konsultasi kredit atau rencana penyaluran kredit.

4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari:

- a. Kelengkapan mengenai struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite, yaitu:
- 1) Komite Audit.
 - a) Komite Audit Bank BTN terdiri dari 4 (empat) orang. Salah seorang anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit dan dibantu 3 (tiga) anggota Komite Audit lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang dari yang berasal dari pihak independen.
 - b) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan bahwa setiap anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup, paling tidak dalam salah satu bidang audit, perbankan, keuangan, atau akuntansi, serta memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang-bidang lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya.
 - c) Anggota Komite Audit Bank tidak ada yang berasal dari Direksi BTN maupun dari Bank lain.
 - d) Rangkap jabatan anggota Komite Audit dari pihak independen telah diperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
 - e) Anggota Komite Audit dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

2) Komite Pemantau Risiko.

- a) Komite Pemantau Risiko telah dibentuk dengan Ketua Komisaris Independen dan anggotanya terdiri 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang yang berasal dari pihak independen.
- b) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan dan mempertimbangkan integritas, akhlak, moral, dan independensi serta memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan manajemen risiko.
- c) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank tidak ada yang berasal dari Direksi BTN maupun dari Bank lain.
- d) Rangkap jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi.

- a) Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk dengan Ketua Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang perwakilan pegawai, yaitu Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- b) Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi tidak secara terpisah melainkan menjadi satu kesatuan.
- c) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota telah memiliki kompetensi dan pengetahuan sesuai yang dipersyaratkan BI,

yaitu memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank, dan sistem nominasi serta *succession plan* Bank.

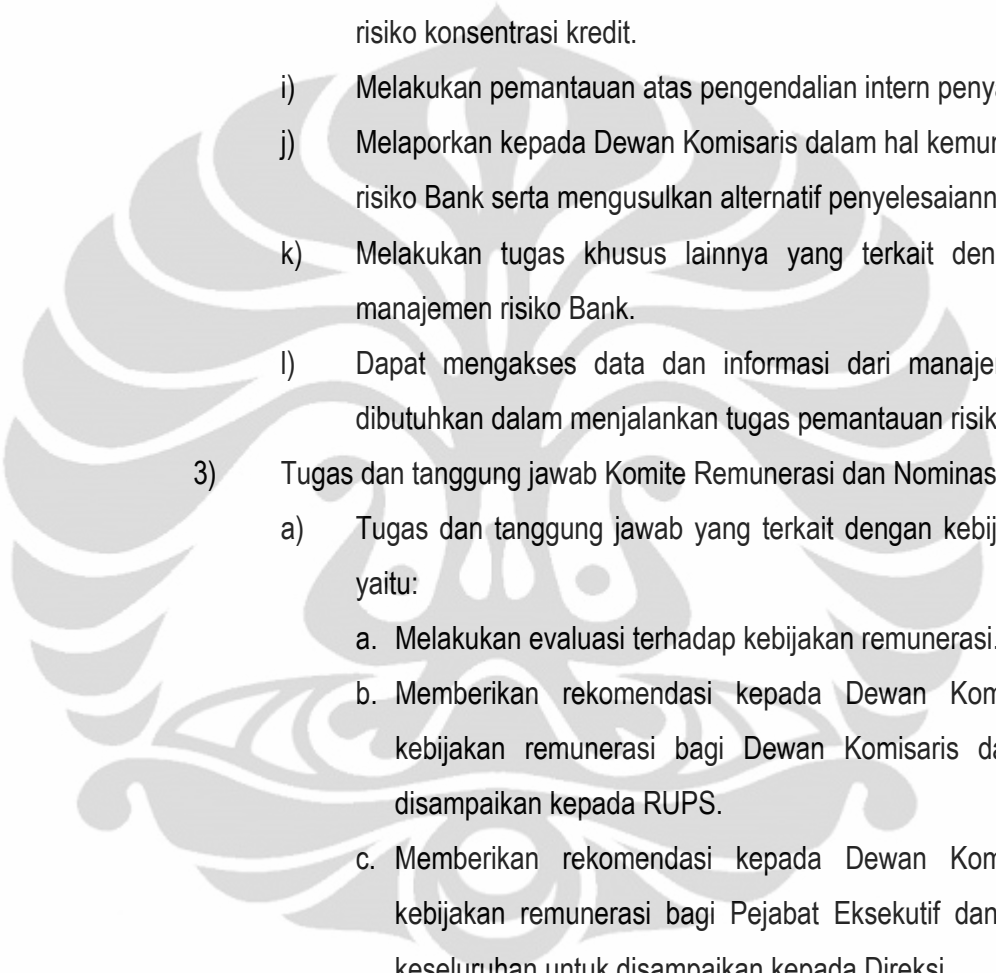
b. Tugas dan tanggung jawab Komite

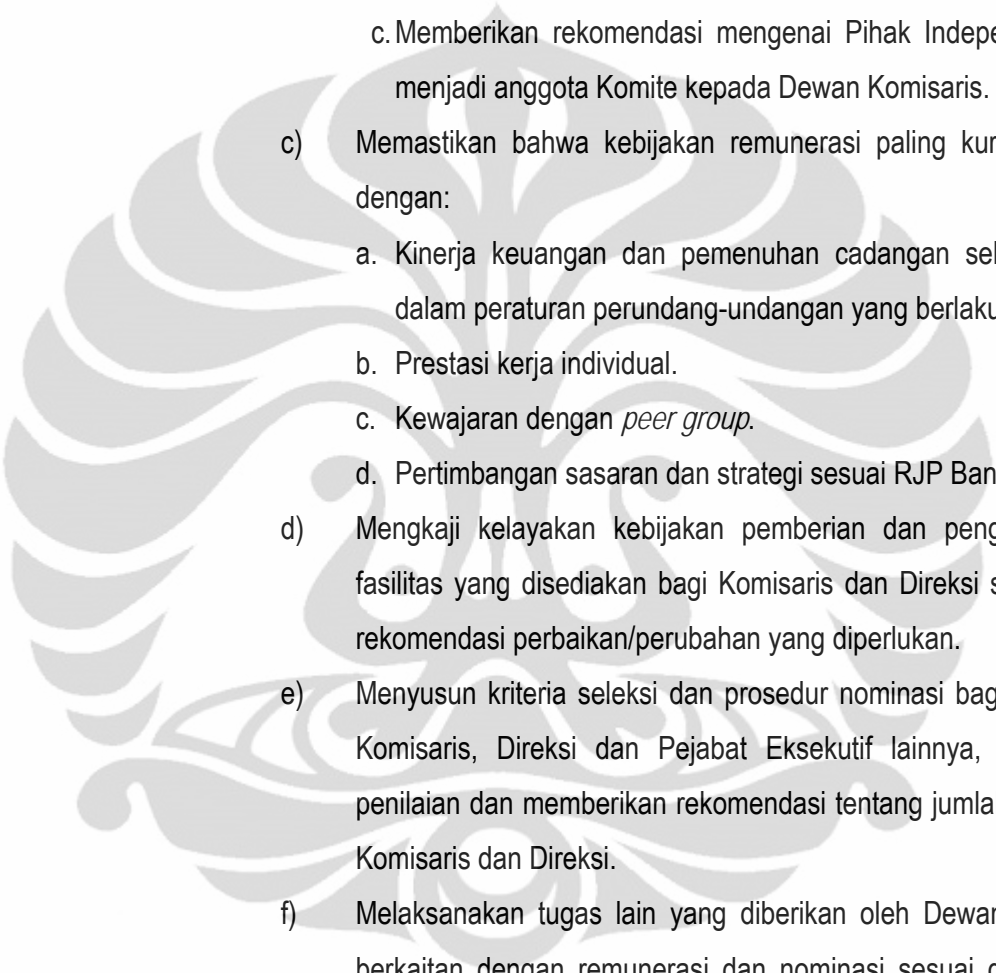
1) Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

Komite ini bertanggung jawab membantu Komisaris dalam pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, yaitu:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan yang terdapat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP).
- b) Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- c) Mengevaluasi laporan manajemen atas ketaatan Perseroan terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI)
 - kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku

- kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku
 - pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas hasil temuan DAI, Kantor Akuntan Publik, BPK dan hasil pengawasan Bank Indonesia
- e) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
 - g) Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk meminta Divisi Audit Internal melaksanakan audit khusus jika diperlukan.
 - h) Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang usulan pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal.
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris.
- 2) Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:
- a) Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank dan memonitor pelaksanaannya.
 - b) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - d) Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank.
 - f) Melakukan pemantauan atas risiko akibat perubahan indikator-indikator dalam pasar (suku bunga, kurs, dan sebagainya) untuk memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu kestabilan Bank.

- 
- g) Melakukan pemantauan atas segenap risiko Bank.
 - h) Mengevaluasi kebijakan, sistem dan pengendalian intern yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko konsentrasi kredit.
 - i) Melakukan pemantauan atas pengendalian intern penyaluran kredit.
 - j) Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaiannya.
 - k) Melakukan tugas khusus lainnya yang terkait dengan pemantauan manajemen risiko Bank.
 - l) Dapat mengakses data dan informasi dari manajemen Bank, yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemantauan risiko.
- 3) Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:
- a) Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan remunerasi, yaitu:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - b) Tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan nominasi, yaitu:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

- 
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
 - c) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai telah dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan *peer group*.
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi sesuai RJP Bank
 - d) Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi perbaikan/perubahan yang diperlukan.
 - e) Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g) Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

c. Frekuensi rapat Komite.

Frekuensi rapat komite adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Frekuensi Rapat		
		Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi
1	Januari	1	2	1
2	Februari	1	1	-
3	Maret	-	-	-
4	April	1	-	-
5	Mei	2	-	-
6	Juni	1	1	1
7	Juli	1	2	-
8	Agustus	1	-	1
9	September	1	-	-
10	Oktober	1	-	-
11	November	1	-	-
12	Desember	1	1	-
	Jumlah	12	7	3

d. 1) Program kerja Komite Audit dan realisasinya pada periode Januari – Desember 2009, diantaranya adalah:

a) Pengawasan atas audit eksternal. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah menyajikan secara wajar, dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Pada tahun buku 2009, Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan adalah KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja (Member of Ernst & Young International), yang juga merupakan auditor laporan keuangan Perusahaan pada tahun buku 2008. Komite audit telah menelaah proses penunjukan tersebut dan penetapan jumlah *fee audit* yang masih dalam batas kewajaran.

Dalam melakukan pengawasan proses audit eksternal, Komite Audit telah berkoordinasi dan mengadakan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik

untuk membahas rencana audit, hambatan dan temuan audit yang penting. Komite Audit selanjutnya memastikan hambatan dan temuan tersebut dapat diatasi dan ditindaklanjuti oleh manajemen. Di samping itu, Komite Audit juga mengevaluasi kualitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, berdasarkan standar audit dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk juga evaluasi atas independensi dan obyektivitas akuntan publik.

Selama tahun buku 2009 terdapat beberapa peristiwa yang berdampak pada posisi keuangan dan hasil usaha Bank, di antaranya, terjadinya musibah kebakaran kabel gedung Kantor Pusat yang menimbulkan kerugian (net) sebesar Rp. 21.929.984.256 dan adanya aksi korporasi pada akhir tahun 2009 yaitu penerbitan saham perdana (IPO) Bank BTN pada tanggal 17 Desember 2009 dalam rangka menambah modal perusahaan.

- b) Pengawasan atas audit internal. Dalam menjalankan fungsi *review* terhadap sistem pengendalian internal, Komite Audit berupaya agar peran audit internal dapat terus senantiasa ditingkatkan dengan melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, pelaporan pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuannya.

Komite Audit telah melakukan *review* hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal selama tahun 2009, yang terdiri dari audit umum konvensional (Kantor Cabang dan Divisi) sebanyak 70 (tujuh puluh) obyek, audit umum syariah sebanyak 16 (enam belas) obyek dan audit teknologi sistem informasi sebanyak 14 (empat belas) obyek dan 8 (delapan) audit khusus. Selama tahun 2009 jumlah obyek yang diaudit telah dapat diselesaikan seratus persen.

Berdasarkan *review* terhadap pelaksanaan audit, Komite Audit menyampaikan saran sebagai berikut:

- Agar auditor internal meningkatkan evaluasi atas pengendalian internal yang

terkait dengan bisnis proses pemberian kredit komersial (*non* KPR), mengingat porsi kredit *non* perumahan akan mengalami peningkatan pada tahun mendatang.

- Agar pada tahun 2010 Divisi Audit Internal dapat melakukan audit yang lebih terfokus pada proses bisnis yang mengandung risiko tinggi melalui penerapan metode audit berbasis risiko (*risk based audit*) secara penuh, serta membangun koordinasi yang lebih baik dengan Divisi Manajemen risiko karena dua divisi tersebut merupakan bagian dari sistem pengendalian internal.

Selain melakukan *review* laporan audit internal, Komite Audit juga memonitor tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas temuan hasil audit pihak lain seperti; audit oleh Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit lainnya, telah dilakukan *review* paket remunerasi Komisaris dan Direksi. Selama tahun buku 2009 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menerima remunerasi sebesar Rp 42.179.003.741,00 Komite Audit menyimpulkan bahwa pembayaran remunerasi Direksi dan Komisaris selama tahun buku 2009 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan tersebut di atas, Komite Audit berpendapat bahwa Penyajian laporan keuangan yang dipublikasikan telah memenuhi azas keterbukaan dan Bank telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Komite Audit juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasehat kepada Direksi.

- 2) Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya pada periode Januari – Desember 2009, diantaranya adalah:
- a) Pemantauan atas pengendalian internal penyaluran kredit. Komite Pemantau Risiko telah melakukan kajian tentang persoalan yang menyangkut *Non Performing Loan Gross* (NPL Gross), kolektibilitas kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), Debitur yang dalam realisasi tahun pertama sudah menunggak (DRBM), khususnya terhadap kantor-kantor cabang tertentu yang NPL Gross-nya di atas 5%, DRBM-nya di atas 2% serta DPK-nya di atas 10%. Disamping itu, Komite Pemantau Risiko juga memonitor daftar 15 (lima belas) cabang dengan risiko kredit tertinggi dilihat dari *outstanding* total kredit, NPL *Gross*, DPK dan DRBM.
 - b) Pemantauan atas penghimpunan dana giro, tabungan dan deposito. Dalam upaya memantau penghimpunan dana pihak ketiga, Komite Pemantau Risiko telah menyusun kajian tentang perkembangan dana giro, tabungan dan deposito sejak tahun 1993 sampai dengan 2009. Hal ini dimaksudkan sebagai dorongan bagi manajemen dan jajarannya agar di masa yang akan datang dapat memperoleh dana pihak ketiga dengan risiko yang lebih kecil.
 - c) Pemantauan atas *review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PMKR) oleh Manajemen. Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi atas usulan *review* PMKR oleh manajemen dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris. Hal ini mendukung tugas Dewan Komisaris sesuai pasal 6 PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Bank.
 - d) Pemantauan atas laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia. Dalam

hal pelaksanaan GCG, Bank telah menyusun Pedoman GCG dan mensosialisasikan kepada seluruh staf dan karyawan Bank. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan prinsip kehati-hatian, tidak ada peraturan dan ketentuan yang dilanggar. Namun dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan antara lain:

- adanya keterlambatan penyampaian laporan ke Bank Indonesia, yang dampaknya dikenakan denda;
 - tindak lanjut atas temuan audit belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan target waktu;
 - sosialisasi *Know Your Customer* dan *Anti Money Laundering* belum sepenuhnya dilaksanakan terhadap semua staf dan karyawan Bank.
- e) Pemantauan atas dampak risiko kebakaran gedung Bank. Terjadinya musibah kebakaran kabel gedung Kantor Pusat pada awal tahun 2009 membawa dampak risiko operasional antara lain: menimbulkan kerugian (net) sebesar Rp. 21.929.984.256, tempat kerja yang menyebar di beberapa tempat. Namun dengan semangat kebersamaan yang tinggi, pada akhir tahun 2009 tempat kerja sudah dapat menyatu kembali.
- f) Pemantauan atas penggunaan teknologi dan sistem informasi. Sampai dengan akhir tahun 2008, penggunaan sistem teknologi dan informasi Bank masih belum memadai. Namun didasari keinginan yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, staf dan pegawai maka sejak awal tahun 2009 program penyempurnaan sistem teknologi dan informasi pada Bank telah dimulai dan diharapkan mulai awal bulan Maret 2010 sudah dapat direalisasikan.
- g) Pemantauan atas penyempurnaan struktur organisasi. Dalam upaya peningkatan kinerja Bank, salah satu hal yang dilakukan adalah penyempurnaan terhadap struktur organisasi dan dilakukan oleh unit khusus

yaitu *Change Management Office*, antara lain dengan dibentuknya Kantor Wilayah. Dengan adanya struktur organisasi yang memadai didukung sistem informasi dan teknologi yang cukup canggih, diharapkan target kinerja Bank akan dapat dicapai.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, Komite Pemantau Risiko berpendapat bahwa:

- a) Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko dan telah mengidentifikasi 8 (delapan) jenis risiko Bank yang terkait.
 - b) Dalam hal penyaluran kredit, Divisi Manajemen Risiko berperan dengan menyampaikan risiko-risiko yang perlu di mitigasi.
 - c) Didukung struktur organisasi yang memadai serta sistem teknologi dan informasi yang cukup canggih, Bank akan dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Komite Pemantau Risiko juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasehat kepada Direksi.
- 3) Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan realisasinya pada periode Januari – Desember 2009, diantaranya adalah:
- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi terkait dengan penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) untuk menilai kinerja Direksi, yang meliputi berbagai aspek sebagai berikut:
 - *Tools* yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi yang dikaitkan dengan penerapan *Balanced Scorecard*.
 - Pembobotan terhadap aspek-aspek yang dinilai, yaitu finansial, operasional, administrasi, kolegiel dan individual, serta terkait kinerja

jangka pendek dan jangka panjang.

- Aspek *fairness* dalam penilaian.

- b) Menyempurnakan pedoman dan tata kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
- c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi mengenai beberapa hal sebagai berikut:

- Pengembangan tugas dan tanggung jawab Komite Personalia dalam hal memonitoring pelaksanaan program *Officer Development Program* (ODP), terutama bagi ODP yang menonjol.
- Rencana rekrutmen dan kenaikan gaji pegawai harus mempertimbangkan Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO).
- Penerapan *grading system* berbasis kompetensi dan *performance base salary* dengan melaksanakan evaluasi jabatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi terkait dengan penentuan KPI untuk menilai kinerja Direksi, Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan paket remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang sepadan dengan kinerjanya. Dalam usulan tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi harus memastikan bahwa kepentingan Perseroan sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern dapat diinformasikan sesuai dengan kinerja dari fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, yaitu:

- a Fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan Bank atau tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan

dan peraturan BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di atur di dalam PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2009, tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK, baik untuk pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank BTN.

2) Posisi Devisa Neto (PDN)

Sampai periode Januari sampai dengan Desember 2009, tidak pernah terjadi pelanggaran Posisi Devisa Neto.

3) Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*)

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank BTN menghadapi berbagai risiko usaha dan untuk mengurangi risiko usaha tersebut Persero menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya melalui penerapan prinsip *KnowYour Customer/Anti Money Laundering (KYC/AML)*.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip KYC/AML merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur Bank secara keseluruhan dengan memasukkan unsur-unsur yang meliputi pengawasan oleh pengurus Bank, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas dan tanggung jawab, sistem pengawasan intern dan pelatihan karyawan.

Penerapan KYC/AML di Kantor Cabang dikoordinasi oleh Penanggung jawab KYC/AML, yaitu: minimal Pejabat setingkat Pembantu Pimpinan Cabang dan pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas Khusus KYC/AML, yaitu: salah satu *customer service* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Cabang setempat. Untuk efektivitas penerapan prinsip KYC/AML di Bank BTN dipantau oleh unit kerja khusus setingkat Kepala Seksi di dalam unit kerja Desk Kepatuhan di Kantor

Pusat. Unit ini disebut sebagai Seksi *Know Your Customer/Anti Money Laundering (KYC/AML)*. Unit kerja ini bertanggung jawab kepada Kepala Desk Kepatuhan, selaku Pejabat Khusus yang ditunjuk oleh Direksi dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, mekanisme tanggung jawab pejabat khusus ini berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan.

Selain itu juga, Perseroan saat ini telah mengembangkan dan memiliki sistem informasi yang memadai untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan mengenai transaksi pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak otoritas.

Pemantauan yang dilakukan terhadap penerapan prinsip KYC/AML di lapangan dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

- a) Untuk *Cash Transaction (CTR)* dilakukan melalui sistem KYC/AML secara *on line* oleh Staf Khusus KYC/AML di *Compliance Desk* berdasarkan data yang *di-up date* Petugas Khusus KYC/AML pada H - 1 setelah proses *End of Day*.
- b) Untuk *Suspicious Transaction (STR)* dilakukan berdasarkan Laporan data yang dikirim oleh Penanggung Jawab KYC/AML di Kantor Cabang.

Penerapan prinsip KYC/AML ini juga senantiasa merupakan obyek pemeriksaan Internal Audit, Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Secara berkesinambungan Bank BTN terus melakukan penyempurnaan terhadap *Customer Information Files (CIF)* untuk meningkatkan keakurasian dan kelengkapan data nasabah agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan standar internasional.

Dengan berlakunya PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) Bagi Bank Umum jo SE BI No. 11/31/DPNP Tanggal 30 November

2009 Perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum, Manajemen telah menetapkan *action plan* penerapan program APU dan PPT pada bulan Desember 2009 guna memastikan terlaksananya perubahan PBI Tentang KYC/AML oleh PBI Tentang Penerapan Program APU dan PPT.

Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab pula untuk memastikan bahwa Bank BTN telah melaksanakan Pokok-Pokok Penerapan Fungsi Kepatuhan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh Desk Kepatuhan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Memberikan opini terhadap penerbitan Peraturan Intern Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Menginformasikan ketentuan Bank Indonesia yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait.
 - Pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
- b) Pemberitahuan kepada Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala setiap semester kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Disamping itu juga dibuat laporan kepada Bank Indonesia setiap semester.

- d) Proses penunjukan Direktur Kepatuhan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e) Mengkoordinir pelaksanaan *self assessment* GCG Bank BTN.
 - f) Mengkoordinir pelaporan dan pelaksanaan GCG.
 - g) Mengkoordinir pelaporan uang palsu.
 - h) Memantau pelaksanaan keputusan ALCO.
- b. Fungsi audit intern

1) Penerapan Fungsi Audit Secara Umum

Divisi Audit Intern (DAI) Bank BTN bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan Bank BTN. DAI merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab, serta melapor langsung kepada Direktur Utama dan Komite Audit. Sifat independen DAI juga diatur dalam Piagam Audit (*Charter Audit*) Intern Bank BTN yang memberikan kewenangan pada DAI untuk bekerja tanpa hambatan, bebas dan obyektif tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Piagam Audit Intern Bank BTN, terakhir ditetapkan menurut surat keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 01/KOM-DIR/DAI/X/2007 tertanggal 10 Oktober 2007 tentang "Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Bank Tabungan Nasional (Persero)". Perseroan sedang melakukan review dan penyesuaian terhadap Piagam Audit ini, dengan memperhatikan status Bank BTN sebagai perusahaan publik.

Fungsi utama DAI adalah membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern bank dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan bank. Tugas-tugas yang dilakukan diantaranya:

- a) Merumuskan perencanaan dan menjabarkan secara operasional pelaksanaan

audit, serta pemantauan tindak lanjut atas hasil audit.

- b) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Bank BTN.
 - c) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen.
 - d) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dengan berlandaskan pada semua ketentuan yang berlaku.
 - e) Melakukan evaluasi guna meningkatkan/menyempurnakan efektifitas manajemen risiko, kontrol dan *governance processes*.
- 2) Pelaksanaan Audit *Sistem Online Payment Point* (SOPP)

Pelaksanaan Audit telah dilakukan terhadap kegiatan operasional terdiri atas:

- a) Audit atas SOPP di Outlet pihak ketiga Kantor Pos untuk Transaksi Penerimaan dan Pembayaran Tabungan Bank BTN (Tabanas Batara dan e'Batara Pos *Online*). SOPP kegiatan transaksi pada *loket counter* Kantor Pos ini merupakan jasa layanan dari pihak Kantor Pos dalam penyediaan jasa layanan untuk penerimaan dan pembayaran Dana Pihak Ketiga produk Tabungan dari Bank BTN, yaitu Tabanas Batara dan e'Batara Pos *Online*. Nilai Transaksi Dana yang diterima dari SOPP ini nilainya cukup signifikan dan mengendap sebagai bagian dari Dana Pihak Ketiga Tabungan sehingga memerlukan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Operasional Bersama termasuk dalam proses pengisian Customer Information File (CIF). Oleh karenanya, kegiatan audit untuk aktifitas ini memerlukan ketentuan kebijakan bersama, karena objek auditnya adalah produk yang dikelola bersama dengan

kebijakan, prosedur, *internal control system* bersama antara bank BTN dan Kantor Pos. Dalam hal ini, proses penerimaan dan pembayaran tabungan di loket kantor pos, proses transfer tagihan dan kewajiban surplus minus dana dari hasil transaksi penerimaan dan pembayaran, hingga proses rekonsiliasinya merupakan variabel kontrol bersama antara Bank BTN dan Kantor Pos. Oleh karenanya, Bank BTN dan Kantor Pos telah membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang mengatur Kebijakan, Sistem dan Prosedur Bersama untuk kegiatan Proses SOPP kantor Pos ini sejak tahun 2005 dan diperbaharui pada tahun 2008 yang telah mengatur kewajiban pihak Kantor Pos untuk menerima aktifitas audit oleh auditor intern Bank BTN maupun Auditor eksternal yang diinformasikan oleh Bank BTN untuk melaksanakan kegiatan audit atas kegiatan SOPP (Kantor Layanan setara Kantor Kas/KLKK) di kantor Pos. Kebijakan bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara PT.BTN (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) tahun 2005 No.30/PKS/DIR/2005 dan No.34/DIRUT/2005, tanggal 10 Mei 2005 dan Addendum No.16/ADD/PKS/DIR/2006 dan No.57/ADD/PKS/DIRBISUG/0706 tanggal 26 Juli 2006, serta Addendum No.19/ADD/PKS/DIR/2007 dan No.49/ADD/PKS/ DIRBISKUG/0507, tanggal 01 Mei 2007 yang kemudian yang diperbaharui dengan PKS tahun 2008 Nomor Pihak Pertama: 111/PKS/DIR/2008 dan Nomor Pihak Kedua:97A/DIRUT/1208 tanggal 01-12-2008 pada pasal 6 Kewajiban Masing-Masing Pihak ayat (2) Kewajiban Pihak Kedua - PT Pos Indonesia (Persero) butir h, mengatur kewajiban PT POS Indonesia sebagai berikut: Mengizinkan Bank Indonesia, Auditor Internal Pihak Pertama (Bank BTN) dan Auditor Eksternal yang diinformasikan Pihak Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Transaksi di UPT SOPP serta menyampaikan data yang diperlukan untuk itu, sebagaimana dimaksud

di dalam peraturan perundangan perbankan yang berlaku. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut, maka Internal Auditor Bank BTN (DAI) telah mulai dapat melaksanakan audit langsung kepada Kantor Pos/Kantor Layanan setara Kantor Kas (KLKK) yang dipilih sebagai sampel di dalam pelaksanaan general audit rutin. Pelaksanaan audit terhadap SOPP (KLKK) kantor Pos oleh Internal Audit ini telah dimulai sejak periode audit tahun 2008 bersamaan dengan pelaksanaan audit umum.

- b) Audit atas SOPP di *Counter / Outlet* Bank BTN sebagai jasa Layanan *Fee Base* untuk kepentingan Entitas / Pihak lain. SOPP kegiatan transaksi pada *loket counter* Bank BTN yang merupakan jasa layanan *fee base* Bank BTN dalam proses penerimaan pembayaran/ angsuran untuk kepentingan entitas pihak ketiga lain seperti: Pembayaran tagihan Telekom, Listrik, Air, SPP Sekolah/ Perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini SOPP hanyalah merupakan bagian pekerjaan *teller* bank BTN untuk kegiatan penerimaan kas dari pelanggan Telepon, PLN, PDAM, atau SPP dari Siswa / Mahasiswa, dan lain sebagainya. Transaksi dalam hal ini hanya merupakan penerimaan dana (*cash in*) dan tidak ada pembayaran (*cash out*), sehingga cukup hanya memerlukan kebijakan, sistem dan SOP internal Bank BTN saja dan tidak memerlukan pengembangan kebijakan, sistem dan prosedur bersama. Dana yang diterima dari SOPP ini tidak mengendap sebagai bagian dari Dana Pihak Ketiga tetapi hanya akan ditampung sementara sebagai Kewajiban Segera Lain dan secara periodik dana di tranfer ke rekening Pihak Ketiga yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank BTN. Oleh karenanya Kegiatan audit dalam hal ini telah dilakukan secara kontinyu otomatis dalam setiap kegiatan audit umum oleh internal audit untuk kantor-kantor cabang yang menjalani kegiatan SOPP ini, khususnya untuk proses bisnis operasional lain

pada unit *teller*. Audit untuk aktifitas ini dilaksanakan terhadap *internal control system* bank BTN khususnya di unit *teller* sebagai bagian dari proses audit umum rutin di Kantor Cabang, sehingga tidak memerlukan ketentuan/ kebijakan Audit bersama antara Bank BTN dengan rekanan Pihak Ketiga karena objek auditnya adalah proses bisnis dan *internal control system* penerimaan kas dalam hal ini merupakan variabel kontrol dari internal Bank BTN.

3) Audit Bersifat Strategis

Pada dasarnya, pelaksanaan audit intern memang telah didorong dan dilaksanakan untuk lebih bersifat strategis. Hal ini telah dinyatakan pada *Internal Audit Charter* maupun Pedoman GCG Bank BTN. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) *Internal Audit Charter* mengatur bahwa audit intern sebagai bagian dari struktur pengendalian intern berperan sebagai mitra kerja strategis (*strategic business partner*), karena fungsinya membantu semua tingkatan manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat, mendorong terwujudnya bank yang sehat dan berkembang secara wajar.
- b) Ketetapan Direksi No.06/DIR/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Pedoman GCG PT.BTN (Persero) huruf N, Pengendalian Internal Bank butir 3, Pengelolaan Fungsi Audit Intern pada huruf b, menjelaskan bahwa Internal Audit DAI berperan sebagai *strategic business partner* bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran bank dengan melakukan evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara objektif dan jasa konsultasi (narasumber) terutama menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk managemen, control* dan *governance processes*.
- c) Pelaksanaan audit yang lebih bersifat strategis telah dilaksanakan oleh auditor

internal melalui pelaksanaan audit umum di lapangan maupun melalui *Desk Audit* dengan penjelasan sebagai berikut:

- *Audit Field Work* (Audit Umum) yang dilakukan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang tidak lagi hanya melalui pendekatan *compliance* saja. Namun, sejalan dengan peran DAI sebagai *strategic bussiness partner*, dilakukan juga manajemen audit dan operasional audit yang lebih strategis untuk mendorong kinerja operasional. Oleh karenanya, hasil audit juga tidak lagi berorientasi pada kepatuhan namun lebih dominan pada rekomendasi perbaikan bagi seluruh aspek kegiatan operasional dan proses bisnis bank yang lebih baik terutama menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk managemen, control* dan *governance processes* untuk mendorong terwujudnya bank yang sehat dan berkembang secara wajar.
- Desk Audit melakukan Koordinasi Lintas Divisi sebagai *follow up* untuk penyelesaian temuan-temuan strategis menyangkut permasalahan kebijakan yang implementasinya tidak/kurang efektif/efisien untuk operasional (perlu disempurnakan) dan menyangkut permasalahan strategis kegiatan operasional yang memerlukan penyelesaian bersama antar Divisi dan dengan Kantor Cabang.

4) Upaya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Audit Agar Suatu Kasus Lebih Cepat Terdeteksi, antara lain:

- a) DAI telah membentuk dan menjalankan satuan kerja Pengendalian Mutu Audit (PMA) dan satuan kerja Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001:2000. Tugas dan Fungsi PMA dan AMI ini adalah menilai kualitas proses pelaksanaan kegiatan audit dan hasil-hasil audit. Hasil penilaian kinerja PMA ini menjadi bagian penilaian SMK individu Auditor, dengan demikian memotivasi para auditor untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan auditnya.

- b) Untuk meningkatkan kualitas para auditor agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan audit yang lebih berkualitas, termasuk agar dapat mendeteksi secara dini adanya penyimpangan/*fraud* telah dilakukan beberapa kali (secara bertahap) pendidikan dan pelatihan “*Forensic Audit* untuk Deteksi Dini *Fraud* dan Penyimpangan” kepada para Auditor sejak tahun 2006. Hingga saat ini lebih dari setengah jumlah auditor DAI telah memperoleh pendidikan *Forensic Audit*.
- c) Dalam pelaksanaan audit di lapangan dilakukan koordinasi antara Tim Audit Internal DAI dengan pejabat dari DMR yang ditempatkan di Kantor Cabang, yaitu: *Branch Risk Control Officer (BRCO)*. Koordinasi dengan BRCO ini sangat diperlukan karena BRCO ini yang melakukan *risk assessment, control assessment* maupun *GCG assessment* sehari-hari di Kantor Cabang, dibanding DAI yang hanya melakukan audit setiap tahun sekali. Koordinasi DAI dan DMR ini telah diinstruksikan langsung oleh Direktur Kepatuhan yang langsung membawahi DMR dan BRCO. Bentuk koordinasi antara DMR dan DAI ini sesuai dengan Risalah Rapat tanggal 25 Juni 2009 nomor 2. Perkembangan dan Tindak Lanjut Hasil Audit butir 2.5 dan 26, yaitu:
- DMR diminta untuk mendorong BRCO agar tiap Kantor Cabang menunjuk Pejabat dan Tim (kesepakatan lokal) yang melakukan monitoring *day to day* terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan audit dan menyelesaikan tindak lanjut temuan. BRCO selalu memantau apakah kesepakatan lokal tersebut di jalankan.
 - Tim Audit DAI agar melakukan evaluasi langsung kepada personil BRCO di kantor cabang bersangkutan termasuk fungsi dan tugas dari BRCO tersebut. Kriteria evaluasi didiskusikan bersama DMR sehingga hasilnya dapat digunakan DMR sebagai data untuk penilaian kinerja BRCO

d) Pembentukan unit Audit Khusus yang terlepas dari penugasan audit umum. Unit Audit Khusus ini khusus untuk menangani kasus-kasus khusus yang bersifat *fraud*, penyimpangan atau pelanggaran berdasarkan hasil temuan awal dari *group* audit umum atau dari sumber pengaduan, temuan kantor cabang, *Branch Risk Control Officer* (BRCO) atau dari sumber-sumber lain. Dengan demikian kasus-kasus khusus ini dapat ditangani secara khusus, fokus dan lebih cepat.

c. Fungsi audit ekstern

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bank telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2009 kepada Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh RUPS.
- 2) Bank telah menunjuk KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang telah terdaftar di Bank Indonesia, sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank per 31 Desember 2009.
- 3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- 4) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank direalisasikan melalui perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan antara pihak Bank BTN dengan KAP.
- 5) Bank menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2009 yang telah diaudit kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan.

6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, meliputi:

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko melalui *review* PKMR yang diajukan oleh Direksi melalui surat nomor 45/KOM/BTNNI2009 tanggal 13 Mei 2009 perihal Persetujuan Review PKMR PT Bank Tabungan Negara (Persero).
- Selama tahun 2009 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat Komite Pemantau Risiko (KPR) sebanyak 7 (tujuh) kali dalam rangka evaluasi kebijakan manajemen risiko.
- Komite Pemantau Risiko berdasarkan notula rapat No. 10/KPR/BTN-I/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tengah melakukan evaluasi kebijakan dan pengendalian internal kredit triwulan II tahun 2009.
- Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko (KPR) telah melakukan evaluasi atas laporan profil risiko Bank yang diantaranya mencakup evaluasi terhadap frekuensi pelaporan profil risiko, penetapan tolok ukur *risk control system* (RCS), dan pembagian kriteria penilaian risiko dan RCS.
- Dewan Komisaris dalam rapat KPR tanggal 1 dan 8 Juni 2009 (notula rapat KPR No.06/KPR/BTN-I/2009 dan No.07/KPR/BTN-I/2009) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen reputasi terkait dengan meningkatnya eksposur risiko reputasi yang disebabkan oleh banyaknya pengaduan nasabah yang dibahas bersama Direksi dan selanjutnya di tindaklanjuti bersama Divisi terkait.
- Dewan Komisaris dalam rapat Komite Pemantau Risiko No. 09/KPR/BTN-

I/2009 tanggal 29 Juli 2009 meminta seluruh jajaran Bank BTN untuk mencermati NPL gross dari Kantor Cabang yang besarnya di atas 6%.

- Komite Pemantau Risiko dalam rapat tanggal 5 Oktober 2009 (notula rapat KPR No. 10/KPR/BTN-I/2009) melakukan evaluasi atas kinerja NPL Kantor Cabang dan hasil pemantauan risiko operasional untuk triwulan II tahun 2009.
- Profil risiko disampaikan kepada Komisaris secara triwulanan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan implementasinya.

2) Direksi melakukan pengawasan aktif dengan melakukan hal-hal berikut:

- Melalui satuan kerja manajemen risiko telah melakukan kaji ulang terkait dengan relokasi *data center* yang dilakukan oleh Divisi Teknologi Infomasi.
- Melalui satuan kerja manajemen risiko melakukan kaji ulang atas kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan dimana setiap kebijakan internal yang menyangkut kegiatan operasional dan sistem informasi Bank harus mendapatkan kajian DMR terlebih dahulu sebelum diminta persetujuannya kepada Direksi.
- Kaji ulang tersebut dilakukan setiap adanya rancangan kebijakan internal oleh divisi yang menyusun kebijakan.
- Direksi telah memastikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang bertugas di satuan kerja manajemen risiko memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan/menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi SDM untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan Satuan Kerja Bisnis dan satuan kerja

manajemen risiko untuk memastikan efektifitas proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian.

- Dalam rangka menyediakan sumber daya yang berkualitas telah dilakukan *fit & proper test* sebagai dasar penempatan pejabat di satuan kerja manajemen risiko (Kepala Divisi, Kepala Bagian Manajemen Risiko Pasar, Kepala Bagian Manajemen Risiko Kredit). Selain itu, dilakukan pelatihan rutin terkait manajemen risiko bagi pegawai dan pejabat di satuan kerja manajemen risiko.
 - Bank telah secara rutin dan berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya dalam seminar yang terkait dengan manajemen risiko.
 - Bank telah mengikutsertakan beberapa pegawai di satuan kerja manajemen risiko untuk mengikuti program magister di bidang manajemen risiko serta perbankan dan keuangan.
 - Bank telah mengikutsertakan staf/pegawai dan pejabatnya untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). Sampai dengan Desember 2009 telah mengikuti ujian sertifikasi untuk level I (436 orang), level II (215) dan level III (87).
 - Bank telah mengikutsertakan staf/pegawai dan pejabatnya untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko level matrikulasi yang diadakan oleh Bankers Association for Risk Management (BARa) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) sebanyak 10 orang hingga 30 Maret 2009.
- b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- 1) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang diatur

dalam Peraturan Direksi No.29/PD/DMR/2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang telah *direview* secara berkala. Pada periode 2009, telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- Direksi menetapkan limit risiko dan besar maksimum risiko dengan mempertimbangkan pengalaman, kemampuan mengelola manajemen risiko, sumber daya manusia, peraturan-peraturan Bank Indonesia, dan praktek prudensial Bank yang baik.
 - Penetapan limit risiko disusun oleh Satuan Kerja Bisnis untuk kemudian direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dan disetujui oleh Direksi.
 - Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam memutus kredit di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per level jabatan.
 - Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam melakukan transaksi terasury per level jabatan.
 - Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam melakukan otorisasi dan fiat bayar di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per level jabatan.
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko:
- 1) Satuan manajemen risiko telah secara efektif melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko melalui laporan *check list* manajemen risiko Kantor Cabang dan laporan profil risiko dan laporan *Quantitative Impact Studies* (QIS).
 - 2) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko telah dilakukan secara aktif oleh *Division Risk Control Officer* (DRCO) di Kantor Pusat

dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO)

- 3) Satuan manajemen risiko melakukan pengumpulan data kerugian risiko operasional selama kurang lebih 5 tahun sejak 2004.
- d) Beberapa hal mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern di Bank BTN:
 - 1) Bank telah membentuk *Division Risk Control Officer* (DRCO) di Kantor Pusat dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO) di Kantor Cabang dalam rangka pengawasan aktif pengelolaan risiko di Divisi dan Kantor Cabang.
 - 2) Bank telah menempatkan BRCO pada 46 Kantor Cabang dari sebelumnya hanya 28 BRCO. Bank juga telah menempatkan 3 orang DRCO pada Divisi di Kantor Pusat dari sebelumnya hanya 2 orang DRCO.
 - 3) Bank telah menyelenggarakan pelatihan pembekalan bagi BRCO baru dan pelatihan ACL bagi seluruh BRCO

7. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) adalah sebagai berikut:

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	949	177.136
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	465	10.553.204
	b. Group	85	1.979.796

8. Rencana Strategis Bank.

- a) Rencana jangka panjang (*corporate plan*) 2008-2012
 - 1) Bank telah memiliki Rencana Jangka Panjang (RJP/*corporate plan*) tahun 2008-2012 yang disusun secara lengkap sesuai Keputusan Menteri BUMN No: KEP-102/M-BUMN/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara dan PBI 6/25/PBI/2004 serta SE BI 6/44/DPNP.
 - 2) Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2008-2012 merupakan rencana strategis

Bank sesuai dengan visi dan misi Bank dimana dalam prosesnya perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris.

- 3) Setelah mendapatkan persetujuan Komisaris selanjutnya Direksi meminta persetujuan dari pemegang saham dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan RUPS pada tanggal 08 April 2008.
- b) Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).
 - 1) Bank BTN telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2009-2011 secara lengkap sesuai PBI 6/25/PBI/2004 dan SE BI 6/44/DPNP.
 - 2) Dalam menyusun RBB tahun 2009-2011, Bank telah memperhatikan tingkat risiko komposit *Risk Control System (RCS)* dalam kaitannya dengan *strategic risk*.
 - 3) Disamping itu, Bank BTN juga memperhatikan dan mempertimbangkan secara realistis, komprehensif, terukur serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian serta mengakomodasi perubahan bisnis internal dan eksternal dalam rangka kelangsungan usaha Bank.
 - 4) Bank secara rutin telah menyampaikan RBB kepada BI setiap tahun dan menyampaikan realisasinya setiap triwulan dan semesteran.
 - 5) Direksi melaksanakan RBB secara efektif dan konsisten sehingga target-target dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dipenuhi atau dapat dicapai untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
- c) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
- d) Realisasikan berbagai hal yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Bank, sesuai surat BI No. 11/91/DPB1/TPB1-5 adalah sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan IPO
IPO Bank BTN telah dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2009 dengan

melepaskan jumlah saham baru sebanyak 2.360.057.000 lembar saham atau setara 27,08% dari total saham perusahaan dengan nilai saham perdana sebesar Rp.800/lembar.

2) Pembukaan jaringan kantor

Sepanjang tahun 2009, telah dibuka beberapa jaringan kantor sesuai rencana sebagai berikut:

- Pembukaan kantor baru KCP sebanyak 21 kantor.
- Peningkatan status KCP menjadi KC sebanyak 1 kantor.
- Penempatan mesin ATM sebanyak 160 unit.
- Pembukaan Layanan Setara Kantor Kas (KLKK-Kantor Pos) sebanyak 500 kantor.
- Pembukaan Payment Point sebanyak 30 unit.
- Operasional Cash Mobile sebanyak 30 unit.
- Hanya pembukaan KCP Syariah baru yang tidak tercapai seluruhnya sesuai rencana, dimana telah buka 1 KCPS dari rencana sebanyak 3 KCPS.

3) Pengembangan produk baru

Sepanjang tahun 2009, telah diluncurkan beberapa produk baru sbb:

- Pengembangan Contact Center.
- Pembayaran dan pembelian pulsa Indosat.
- Gadai BTN iB.
- Giro Investa Batara iB.

4) Restrukturisasi SDM

Sepanjang tahun 2009, ada beberapa program restrukturisasi SDM yang dilaksanakan, sebagai berikut :

- Program budaya kerja dengan fokus pada internalisasi nilai-nilai dasar

perusahaan berdasarkan POLA PRIMA.

- Restrukturisasi organisasi baru dengan tahapan penyusunan organisasi Kantor Pusat yang berdasarkan SBU/SSU.
- Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
- Pembangunan *strategic map Balance Score Card* level korporat yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan *performance management* hingga ke level individu.

5) Strategi peningkatan dana ritel

- Promosi dan hadiah: Telah dilakukan beberapa kegiatan promosi dan pemberian hadiah sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti : Undian berhadiah Tabungan Batara, Bonus Bunga dan *Point Reward* untuk Tabungan Batara Prima, Undian berhadiah Tabungan e'Batara Pos, serta promosi-promosi melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang.
- Perluasan jaringan sebagai strategi dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang murah.
- Peningkatan pelayanan, dengan terus memberikan pelatihan kepada *front liner* dan terus melakukan evaluasi terhadap layanan dengan acuan peningkatan skor inde layanan.
- Aliansi strategis: Telah dilakukan beberapa kerjasama dengan lembaga lain seperti aliansi dengan Kantor Pos dalam meningkatkan penghimpunan DPK melalui *outlet* Kantor Pos. Aliansi lain yang terus dikembangkan adalah kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi dalam mengelola pembayaran Umbangan Pembangunan Pendidikan (SPP).

6) Kajian yang bersifat strategis dan atau upaya untuk mengantisipasi berbagai hal

yang dapat berpengaruh kepada Bank dilakukan dengan mencermati perkembangan:

- Ekonomi makro, diantaranya adalah trend inflasi, kurs, proyeksi IHSG, BI Rate, harga minyak, perkembangan ekonomi dunia (seperti dampak krisis finansial global, resesi dunia, indeks bursa saham global, ketahanan ekonomi Asia, Imbal hasil obligasi jangka panjang dan credit default swap, Ekonomi negara-negara Asia, dan kawasan Amerika Utara dan Uni Eropa)
- Perbankan, diantaranya adalah posisi asset, pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, CAR, ROA dan ROE, NIM dan BOPO, NPL, LDR, dan laba.
- Properti, diantaranya adalah posisi pinjaman properti yang diberikan bank umum dan BPR menurut kelompok bank dan jenis bank.

Kajian-kajian dimaksud telah dilaksanakan oleh Bank secara periodik dan atau telah dilakukan sebagai masukan bagi manajemen dalam memberikan respon dan antisipasi terhadap perkembangan kondisi eksternal.

9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya, yang meliputi:

- a) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank BTN maupun pada lembaga keuangan bukan bank, bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri
- b) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
- c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
 - a) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan

Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank adalah: gaji dan bonus/tantiem.

b) Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun				
	Dewan Komisaris		Direksi		
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	
1. Remunerasi (gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi)*	8*	7.454	6	27.064	
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya*) yang:	a. Dapat dimiliki	4	29	6	2.216
	b. Tidak dapat dimiliki	4	385	6	5.031
Total		7.868		34.311	

Keterangan:

*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

*) Remunerasi untuk Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) Mantan Komisaris dan 4 (empat) Komisaris

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

(satuan orang)

No.	Jumlah Remunerasi Per Orang dlm 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1.	Di atas Rp 2 miliar	6	-
2.	Di atas Rp 1 milyar s.d Rp 2 miliar	-	4
3.	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	-
4.	Rp 500 juta ke bawah	-	4

Keterangan :

*) Remunerasi untuk Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) Mantan Komisaris dan 4 (empat) Komisaris

d) *Shares option*

a) Kebijakan dalam pemberian *shares option*, adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru. Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Options Plan/MESOP*).

Program MESOP diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris, anggota Komite dan pegawai tetap yang tercatat pada tanggal 30 September 2009, kecuali Komisaris Independen dan anggota Komite Audit. Pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program dimaksud, untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak-banyaknya 4% (empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan berdasarkan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.4. Mekanisme pelaksanaan MESOP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1.A. Penanggung jawab program MESOP adalah Direksi di bawah pengawasan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Pelaksanaan program MESOP akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut:

- **Tahap Pertama**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40% (empat puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2010.

- **Tahap Kedua**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2011.

- **Tahap Ketiga**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2012.

Hak Opsi yang diberikan kepada Peserta Program MESOP dalam setiap tahapan tersebut dapat digunakan untuk membeli saham dalam program MESOP (*Option Life* = Masa Berlakunya Hak Opsi) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Peserta dapat menggunakan haknya untuk membeli saham dalam program MESOP pada periode pelaksanaan dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan yang akan ditetapkan dikemudian hari, setelah melewati *Vesting Period* (Masa Tunggu) yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Hak Opsi, dalam *Vesting Period* tersebut peserta belum dapat menggunakan Hak Opsi yang diberikan kepadanya untuk membeli saham dalam program MESOP.

Periode Pelaksanaan akan ditetapkan, sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode setiap tahunnya selama Masa Berlakunya Hak Opsi (*Option Life*). Sedangkan

Harga Pelaksanaan akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan saham perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum laporan akan dibukanya periode pelaksanaan. Pelaksanaan Program MESOP telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pengungkapan *shares option* tahap I yang mencakup:

- Jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *shares option*;
- Jumlah *shares option* yang diberikan;
- Jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan;
- Harga *opsi* yang diberikan;
- Jangka waktu berlakunya eksekusi *share option*.

adalah sebagai berikut:

MESOP TAHAP I

Keterangan / Nama	Jml saham yang dimiliki	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu Pemesanan	
		yang diberikan (Lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)			
KOMISARIS	ZAKI BARIDWAN	-	-	-	-	
	MULABASA HUTABARAT	-	-	-	-	
	SUBARJO JOYOSUMARTO	-	-	-	-	
	GATOT MARDIWASISTO	-	-	-	-	
DIREKSI	IQBAL LATANRO (DIRUT)	-	1,253,500	-	855	2011 S.D 2015

	EVI FIRMANSYAH (WADIRUT)	-	1,195,500	-	855	2011 S.D 2015
	SUNARWA (DIR I)	-	1,137,500	-	855	2011 S.D 2015
	SAUT PARDEDE (DIR II)	-	1,137,500	-	855	2011 S.D 2015
	IRMAN ALVIAN ZAHIRUDDIN (DIR III)	-	1,137,500	-	855	2011 S.D 2015
	PURWADI (DIR IV)	-	1,137,500	-	855	2011 S.D 2015
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	AHMAD NAZRI ADLANI	-	24,000	-	855	2012 S.D 2015
	MOHAMMAD HIDAYAT	-	19,500	-	855	2013 S.D 2015
PEJABAT EKSEKUTIF	RAFLY PASKA(ASSDIR)	-	156,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	RINA MONA LINDYANA (ASSDIR)	-	160,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	MUCHSIN (ASSDIR)	-	153,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	BAKHTIAR EFFENDI (KADIV)	-	130,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	HERNING SUSMAYANTI (KADIV)	-	136,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	RIA ISNIJATI (KADIV)	-	159,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	RINI PUDJIASTUTI (KADIV)	-	155,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	RAKHMAT NUGROHO (KADIV)	-	153,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	ARDIN MH SIMANJUNTAK (KADIV)	-	144,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	SULIS USDOKO (KADIV)	-	138,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	GARDJITO (KADIV)	-	149,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	BUDI HARTONO (KADIV)	-	137,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	HARIS PERDANA (KADIV)	-	148,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	TEDJO SUPRIYANTO (KADIV)	-	140,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	HARDI SIHOTANG (KADIV)	-	141,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	MAS GUNTUR DWI SULISTYANTO (KADIV)	-	155,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	TONY HARMANTO (KADIV)	-	120,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	HARRIS TULISTYA (KADIV)	-	118,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	WILLY ARYATI (KADIV)	-	160,000.00	-	855	2012 S.D 2015
	SOEPRAPTO (KADIV)	-	157,000.00	-	855	2013 S.D 2015
	NASRIL (KADESK)	-	88,000.00	-	855	2011 S.D 2015
	HARRY BUDIONO (KADESK)	-	106,500.00	-	855	2011 S.D 2015
	AHMAD SYAMSUDDIN (KADESK)	-	123,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ADELY, DRS. (WAKADIV)	-	105,000.00	-	855	2011 S.D 2015	

YOHARSYAH S. ADAM (WAKADIV)	-	109,500.00	-	855	2011 S.D 2015
TRIANI PUDJI ASTUTI (WAKADIV)	-	105,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ZON HERIANTO (WAKADIV)	-	90,500.00	-	855	2011 S.D 2015
HERI SOSIAWAN (KACAMA)	-	110,500.00	-	855	2011 S.D 2015
M.SIGIT MINTOWARDONO (KACAMA)	-	124,500.00	-	855	2011 S.D 2015
YUSMANSYAH (KACAMA)	-	116,000.00	-	855	2011 S.D 2015
POERNOMO (KACAMA)	-	118,500.00	-	855	2011 S.D 2015
TURKHON MAULAWY (KACAMA)	-	133,500.00	-	855	2011 S.D 2015
SUTARNO (KACAMA)	-	120,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MOH.YUNAN HARAHAP (KACAMA)	-	132,500.00	-	855	2011 S.D 2015
BUDI SUSILO (KACAMA)	-	116,500.00	-	855	2012 S.D 2015
TURYANTI (WAKACAMA)	-	106,000.00	-	855	2012 S.D 2015
HULMANSYAH (KACATU)	-	105,000.00	-	855	2011 S.D 2015
NASRUL UTAMA (KACATU)	-	107,500.00	-	855	2011 S.D 2015
R.HENDRIONO K (KACATU)	-	99,500.00	-	855	2011 S.D 2015
UTOYO EDY PURWANTO (KACATU)	-	102,000.00	-	855	2011 S.D 2015
YUMNA ELYNAR (KACATU)	-	119,000.00	-	855	2011 S.D 2015
SASMAYA TUHULELEY (WAKACATU)	-	84,000.00	-	855	2012 S.D 2015
TOTO PRIYOHARTONO (KACADA)	-	90,000.00	-	855	2011 S.D 2015
BAGUS PRIYO GUTOMO (KACADA)	-	91,000.00	-	855	2011 S.D 2015
CRISDY B EPSA (KACADA)	-	90,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MUHAMMAD THAMRIN (KACADA)	-	89,500.00	-	855	2011 S.D 2015
CHAERIL AZWAR (KACADA)	-	92,500.00	-	855	2011 S.D 2015
ARIF BUDIMAN (KACADA)	-	93,500.00	-	855	2011 S.D 2015
SIHAR REBECCA SIMANJUNTAK (KACADA)	-	93,500.00	-	855	2011 S.D 2015
V.PRABOWO SAKTI (KACADA)	-	96,000.00	-	855	2011 S.D 2015
DANDUNG HANDOGO (KACADA)	-	93,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ADI SUHARTO (KACADA)	-	85,000.00	-	855	2011 S.D 2015
DARWIS (KACADA)	-	99,500.00	-	855	2012 S.D 2015
MARISA GEMIRALDA (KACADA)	-	94,000.00	-	855	2011 S.D 2015
YOSSIE PD WARDHANA (KACAGA)	-	85,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MAMAT SETIAWAN (KACAGA)	-	88,500.00	-	855	2011 S.D 2015

DANIEL KABAN (KACAGA)	-	81,500.00	-	855	2011 S.D 2015
JOSHUA SILAEN,SE. (KACAGA)	-	87,000.00	-	855	2011 S.D 2015
KASMAWATI (KACAGA)	-	76,000.00	-	855	2011 S.D 2015
REINHARD HARIANJA (KACAGA)	-	83,000.00	-	855	2011 S.D 2015
BAMBANG PRASETYO (KACAGA)	-	66,000.00	-	855	2011 S.D 2015
TEKI DANARDONO (KACAGA)	-	77,500.00	-	855	2011 S.D 2015
ADE PRAWITA (KACAGA)	-	82,500.00	-	855	2011 S.D 2015
WAWAN SUNARYA (KACAGA)	-	89,000.00	-	855	2011 S.D 2015
AGUNG PRIJANTO (KACAGA)	-	79,500.00	-	855	2011 S.D 2015
HENDRATNO (KACAGA)	-	87,500.00	-	855	2011 S.D 2015
EDWARD ALIMIN SYARIF (KACAGA)	-	70,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MUHAMMAD NURDIN (KACAGA)	-	89,500.00	-	855	2011 S.D 2015
SUBUR SARAGIH (KACAGA)	-	78,000.00	-	855	2011 S.D 2015
PRANHARSADI (KACAGA)	-	86,500.00	-	855	2011 S.D 2015
WARGO AGUNG PRIBADI (KACAGA)	-	79,000.00	-	855	2011 S.D 2015
NINIK KUSUMA WARDANI (KACAGA)	-	78,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ADE FIRMAN SETIADI (KACAGA)	-	82,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ERWIN ASRUL (KACAGA)	-	100,000.00	-	855	2011 S.D 2015
HERTANTA (KACAGA)	-	79,500.00	-	855	2011 S.D 2015
SUSI SULASTRI (KACAGA)	-	84,500.00	-	855	2011 S.D 2015
EDY RUDIANA (KACAGA)	-	76,500.00	-	855	2011 S.D 2015
YAYAT HIDAYAT (KACAGA)	-	79,000.00	-	855	2011 S.D 2015
SYAMSUL BAHRI (KACAGA)	-	85,000.00	-	855	2011 S.D 2015
NURMIAH (KACAGA)	-	85,000.00	-	855	2011 S.D 2015
DOHAR SIAHAAN (KACAGA)	-	81,500.00	-	855	2011 S.D 2015
MANCU SILITONGA (KACAGA)	-	79,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ACHMAD NOORACHMAN (KACAGA)	-	77,500.00	-	855	2011 S.D 2015
SURYANTI AGUSTINAR (KACAGA)	-	83,500.00	-	855	2011 S.D 2015
ALEX SOFYAN NOOR (KACAGA)	-	78,000.00	-	855	2011 S.D 2015
R.ANGGARANI (KACAGA)	-	78,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MAMAN KARDIMAN (KACAGA)	-	78,000.00	-	855	2011 S.D 2015
TATANG FATONI (KACAGA)	-	65,500.00	-	855	2011 S.D 2015

GAMARIA (KACAGA)	-	89,000.00	-	855	2011 S.D 2015
EDWIN ABDELMATIN (PPC)	-	58,000.00	-	855	2011 S.D 2015
ROCHMAH (PPC)	-	59,000.00	-	855	2011 S.D 2015
SETIYADI (PPC)	-	56,500.00	-	855	2011 S.D 2015
ISHAK (PPC)	-	57,500.00	-	855	2011 S.D 2015
M. IRWAN HERNANTO (PPC)	-	59,000.00	-	855	2011 S.D 2015
BAHRI KURNIADI (PPC)	-	67,500.00	-	855	2011 S.D 2015
INDRO SETIADJI (PPC)	-	67,500.00	-	855	2011 S.D 2015
TEGUH WAHYUDI (PPC)	-	58,000.00	-	855	2011 S.D 2015
HERRY FITRIANTO (PPC)	-	58,500.00	-	855	2011 S.D 2015
HERMAN SUGIHARTO (PPC)	-	57,000.00	-	855	2011 S.D 2015
MOHAMMAD FAIZ (PPC)	-	57,000.00	-	855	2011 S.D 2015
AMTSAL YUSPIN (PPC)	-	56,500.00	-	855	2011 S.D 2015
TRI MULYONO (PPC)	-	56,000.00	-	855	2011 S.D 2015

e) Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan (skala perbandingan) sebagai berikut:

No	Rasio Gaji	Rasio (Perbandingan)
1	Gaji pegawai *) yang tertinggi dan terendah	13,73 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,11 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,11 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	4,97 : 1

Keterangan :

*) Pegawai adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana

f) Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam periode Januari sampai dengan Desember 2009 adalah 29 kali. Sedangkan jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi tidak ada dan kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat adalah sebagai berikut :

Bulan	Kehadiran Rapat Komisaris (Periode Januari s/d Mei 2009)											
	Zaki Baridwan			Subarjo Joyosumarto			Gatot Mardiwasisto			Mulabasa Hutabarat		
	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran
Jan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feb	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Mar	2	-	2	1	-	1	2	-	2	1	-	1
Apr	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Mei	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Juni	2	-	2	1	-	1	2	-	2	2	-	2
Juli	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3
Agus	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5
Sep	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1
Okt	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5
Nov	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Des	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4
Jumlah	29	0	29	27	0	27	29	0	29	28	0	28

g) Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).

Jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan, *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank, jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya dan jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, adalah sebagai berikut:

Internal Fraud Dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah internal fraud	-	-	3	2		
Telah diselesaikan	-	-	3	2		
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	-	-		
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-		
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-		

Catatan: *Fraud* dengan dampak penyimpangannya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

h) Permasalahan hukum

Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah	
		Perdata	Pidana
1.	Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	11	2
2.	Dalam proses penyelesaian	71	14
	Total	82	16

i) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

1) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Jabatan Yang memiliki benturan kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan*)
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Yayat Hidayat	Kepala Kantor Cabang	Zaki Baridwan Mulabasa Hutabarat	Komisaris Utama Komisaris	Kredit	90	-
2	Herman Sugiharto	Kepala Kantor Cabang	Zaki Baridwan Mulabasa Hutabarat	Komisaris Utama Komisaris	Kredit	45	-
3	Teguh Wahyudi	Kepala Cabang	Edward Alimin	Kepala Cabang	Kredit	100	-

2) Upaya agar pejabat dan pegawai senantiasa menggunakan wewenang dan tugas untuk kepentingan dan tanpa merugikan bank, antara lain:

Komisaris Bank BTN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank. Dewan komisaris hanya terlibat dalam penyediaan dana kepada

pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Diantaranya adalah memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait dengan melaksanakan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses kredit dilaksanakan oleh Kantor Cabang untuk direkomendasikan ke Kantor Pusat u.p Divisi Pengelolaan Kredit (DPK). Selanjutnya, DPK akan meneruskannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan
- b. Khusus untuk transaksi kredit yang mengandung benturan kepentingan, seperti kredit kepada Kepala Cabang, maka Kepala Cabang yang bersangkutan proses pengajuan kredit dilaksanakan oleh Kantor Cabang diluar wilayah kerjanya untuk kemudian direkomendasikan ke Kantor Pusat u.p DPK. Selanjutnya, DPK akan meneruskan permohonan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan keputusan kredit.

Pengaturan Benturan Kepentingan Antara Bank dan Anggota Direksi, yaitu:

- a. Apabila terjadi/terdapat suatu transaksi atau kegiatan hukum yang dilakukan oleh Bank, ternyata melibatkan suatu pihak yang mewakili hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan seorang atau lebih anggota Direksi (namun tidak semua anggota Direksi), maka transaksi atau kegiatan hukum tersebut mengandung unsur "benturan kepentingan" antara kepentingan Bank dan kepentingan anggota Direksi.
- b. Apabila terjadi "benturan kepentingan" sebagaimana dimaksud, maka dengan persetujuan Komisaris, Bank dalam transaksi/kegiatan hukum bersangkutan diwakili oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi memiliki benturan kepentingan, sedangkan anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan harus menarik diri keluar dari transaksi/kegiatan hukum yang bersangkutan.

c. Apabila terjadi/terdapat "benturan kepentingan" yang menyangkut semua anggota Direksi atau semua anggota Direksi terkena/memenuhi ketentuan dimaksud, maka Bank dalam transaksi/kegiatan hukum yang bersangkutan diwakili oleh Komisaris atau yang ditunjuk oleh Komisaris.

d. Dalam hal tidak ada Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank dalam transaksi/kegiatan hukum yang bersangkutan.

Upaya lainnya agar pejabat dan pegawai senantiasa menggunakan wewenang dan tugas untuk kepentingan dan tanpa merugikan bank, antara lain:

a. Direksi telah menginstruksikan bahwa seluruh pegawai Bank BTN termasuk *outsourcing* tidak boleh mempunyai usaha sampingan terkait dengan bisnis Bank BTN, seperti suplier, penyedia lahan, subkontraktor, dan lain sebagainya dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan.

b. Dalam hal penghimpunan dana, Bank telah menerapkan manajemen risiko, tidak memberikan hadiah/insentif kepada nasabah dan/atau pihak terkait berkenaan dengan penempatana dana di Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3) Upaya meningkatkan transparansi dan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan untuk meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, dilakukan dengan melaksanakan mekanisme atau tata cara penanganan, sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengakuan atau tertangkap tangan atau berdasarkan laporan atau hasil temuan intern/pimpinan unit dengan bukti pelanggaran yang cukup, maka dibuat laporan kepada Kepala Cabang/Divisi.

b. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Cabang/Divisi melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

- Menonaktifkan semua *user id* pegawai yang diindikasikan terlibat dalam

pelanggaran.

- Membentuk Tim Pemeriksa.
 - Apabila diperlukan dapat melakukan tindakan administratif berupa *skorsing* terhadap terperiksa.
 - Laporan hasil pemeriksaan beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi disampaikan ke DSDM dan DAI Kantor Pusat untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum diajukan dalam rapat LKS Bipartit khusus untuk rekomendasi sanksi pegawai.
- c. Mekanisme penanganan dapat juga dilaksanakan berdasarkan hasil audit umum/khusus, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan awal *general audit*, atau laporan/pengaduan dari kalangan intern maupun kalangan ekstern disertai dengan bukti yang cukup, maka Tim Audit merekomendasikan kepada Direksi untuk melakukan *Special Audit*.
- d. Atas persetujuan Direksi dibentuk Tim *Special Audit* yang diketuai oleh DAI.
- e. Atas laporan hasil audit dari Tim *Special Audit* yang disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur Kepatuhan, Komisaris, Komite Audit, dan DSDM, maka DSDM mengadakan rapat Bipartit khusus untuk merumuskan dan menyampaikan usulan sanksi kepada Direksi.
- f. Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin mempunyai hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sanksi tersebut secara tertulis, yang ditujukan ke DSDM dengan disertai bukti baru.
- g. Pegawai dapat direhabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pegawai diputus bebas dari segala putusan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Tidak ditemukan cukup bukti yang kuat.
 - Telah selesai menjalani masa pembinaan
- 4) Fungsi Direktur Kepatuhan dan Divisi Audit Internal (DAI) dalam rapat ALCO dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Kebijakan Bank BTN yang mengatur fungsi dan peranan Direktur Kepatuhan dan SKAI dalam rapat ALCO PT.BTN (Persero) adalah Peraturan Direksi yang di dalamnya telah mengatur fungsi Direktur Kepatuhan dan DAI dalam rapat ALCO sebagai berikut:
- Dalam melaksanakan tugasnya, ALCO memiliki susunan personil:
- Anggota Tetap diantaranya adalah Seluruh Direktur (termasuk di dalamnya adalah Direktur Kepatuhan).
 - Anggota Tidak Tetap diantaranya adalah Kepala Divisi Audit Intern. Ketua, Sekretaris dan Anggota ALCO, termasuk Direktur Kepatuhan sebagai anggota tetap dan Kepala Divisi Audit Intern sebagai anggota Tidak Tetap terdiri atas 3 (tiga) hal yaitu:
- Mengikuti Rapat dan aktif memberikan pendapat, usul maupun informasi, terutama yang menyangkut bidang kerjanya.
 - Aktif memberikan data dan masukan kepada ALCO atas berbagai hal yang menyangkut bidang kerjanya untuk memperkaya materi ALCO yang akan dibahas dalam Rapat berikutnya.
 - Menindaklanjuti keputusan-keputusan Rapat ALCO yang telah disahkan oleh Ketua ALCO sebagai pedoman pelaksanaan yang bersifat strategis
- b. Tata cara penyelenggaraan rapat ALCO yang mengatur kuorum Rapat ALCO ditetapkan dengan kehadiran Ketua ALCO dan Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (*ex officio*) serta minimal 3 (tiga) anggota ALCO lain. Rapat

diselenggarakan minimal satu kali dalam sebulan, tetapi jika dipandang perlu Ketua ALCO dapat menyelenggarakan Rapat sewaktu-waktu. Apabila anggota ALCO berhalangan hadir karena sebab-sebab yang tidak diketahui sebelumnya seperti keluar kota, sakit, tugas belajar dan lain-lain, maka Anggota ALCO tersebut dapat menunjuk pejabat lain dari Divisi yang sama untuk mewakili.

c. Implementasi fungsi dan peranan Direktur Kepatuhan dan DAI dalam rapat ALCO adalah sebagai berikut:

- Rapat ALCO yang dilakukan setiap bulan dengan dikoordinir oleh Divisi Treasury selalu mengundang Direktur Kepatuhan sebagai anggota tetap dan Kepala Divisi Audit Intern sebagai anggota tidak tetap.
- Direktur Kepatuhan selalu menghadiri undangan Rapat ALCO setiap bulan karena sesuai ketentuan intern akan menentukan kuorumnya anggota rapat.
- Kepala DAI menghadiri Rapat ALCO bulanan jika tidak sedang berhalangan dengan penugasan lain seperti *exit meeting* ke Kantor-Kantor Cabang, pendidikan-seminar-workshop atau penugasan lain. Dalam hal berhalangan tersebut maka kehadiran Kepala diwakilkan kepada pejabat DAI yang lain.
- Risalah rapat ALCO selalu didistribusikan kembali kepada seluruh anggota ALCO (termasuk Direktur Kepatuhan dan Divisi Audit Intern) untuk ditindaklanjuti secara proporsional oleh sesuai wewenang dan tugas masing-masing anggota.
- Dalam menghadiri rapat ALCO, Direktur Kepatuhan senantiasa menjaga agar Direksi Bank tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan

keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping memastikan bahwa hasil keputusan rapat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan melalui unit kerja kepatuhan. Dalam rapat ALCO, setiap pelaksanaan rapat dimaksud, Direktur Kepatuhan memantau dan atau memastikan bahwa hasil keputusan rapat ALCO sebelumnya telah dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan berdasarkan laporan yang disampaikan unit kerja kepatuhan.

j) *Buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank

1) Kebijakan Bank dalam melakukan *buy back* obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Pada periode 2009, Bank melakukan transaksi *buy back* obligasi, berikut:

Penjelasan Kebijakan Buy Back Obligasi	Jumlah Buy Back Obligasi (jutaan Rp)	Harga Buy Back	Peningkatan Laba dari hasil Buy Back Obligasi (jutaan Rp)
Untuk mendapatkan keuntungan dari Pasar Modal, yaitu dengan melakukan pembelian Obligasi sendiri (buy back) pada saat harga di bawah par	20.000	95.05%	990

k) Pemberian dana kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, yaitu:

1) Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

2) Pemberian dana untuk kegiatan sosial adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan Sosial	Nama/Lembaga Penerima Dana	Jumlah (Rupiah)
1.	Bantuan Korban Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Warga dan Pemda Tasikmalaya • SD Panyaweyuan, SD Tangkil, SD Cisokan, SD Panjinangan di Bogor • SDN 20 Kampung Jambak Padang • dan lain-lain 	1.429.145.660,-
2.	Bantuan Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> • Mahasiswa UI Depok • Perawat RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar • Lokakarya dan pendidikan penanggulangan kanker serviks FK Unair, Surabaya • dan lain-lain. 	1.474.312.535,-
3.	Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> • Yayasan Jantung Anak untuk operasi jantung anak 	506.366.101,-

	Peningkatan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyandang cacat kaki untuk bantuan kaki palsu melalui Kick Andy Foundation • dan lain-lain. 	
4.	Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum	<ul style="list-style-type: none"> • SDN Petojo 13 Jakarta untuk pembangunan perpustakaan • FE Unair untuk pembangunan klinik restukturisasi UMKM • Pesantren Darunajah, Cilegon untuk pembangunan Laboratorium Bahasa • Pemda Cirebon untuk pembangunan sarana umum. • dan lain-lain. 	1.408.727.000,-
5.	Bantuan Sarana Ibadah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan Pura Segara, Kabupaten Buleleng, Bali • Renovasi Masjid Raya Al-Mashun, Medan • dan lain-lain. 	2.161.180.000,-
6.	Bantuan Pelestarian Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Warga Perumahan Villa Bogor Indah. • Pemkot Cimahi untuk program penghijauan • Pemda Jayapura untuk gerakan bersih pantai dan penghijaua. • dan lain-lain. 	657.197.500,-
Total			7.636.928.796,-

II. KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT*

1. Kesimpulan umum hasil *self assessment* adalah predikat komposit Bank tergolong ke dalam kategori Baik dengan nilai komposit 1.56
2. Perhitungan nilai komposit *self assessment* tersebut adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE					
NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0.1	1.5	0.15	Komposisi, kriteria dan independensi Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0.2	1.5	0.3	Komposisi, kriteria dan independensi Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0.1	2	0.2	Komposisi dan kompetensi komite sesuai dibandingkan dengan ukuran kompleksitas usaha Bank, namun masih terdapat kelemahan minor.

4	Penanganan Benturan Kepentingan	0.1	1	0.1	Bank telah dapat mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank melalui kebijakan internal Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.05	2	0.1	Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.05	1	0.05	Organisasi dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah berjalan dengan baik dan efektif atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0.05	1	0.05	Pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi prinsip-prinsip GCG seperti yang tercantum dalam PBI No. 8/4/PBI/2006.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0.075	1.5	0.1125	Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Bank telah berjalan efektif dalam melakukan identifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk risiko dari produk dan aktivitas baru.
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Debitur Besar (<i>large exposures</i>)	0.075	2	0.15	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, tidak pernah ada pelanggaran BMPK, diversifikasi penyediaan dana merata, pengambilan keputusan dilakukan secara independen.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	0.15	2	0.3	Bank telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam penyediaan informasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan.
11	Rencana Strategis Bank	0.05	1	0.05	Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank, disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
Nilai Komposit		1		1.56	BAIK

3. *Action plan* penyempurnaan pelaksanaan GCG sebagai tindak lanjut atas hasil *self assessment* adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi / Tindak lanjut Hasil Self Assessment	Pihak-Pihak Terkait			
		Pemegang Sham / RUPS	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Organ Pendukung
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMISARIS					
1	Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi pengangkatan Dewan Komisaris pada periode berikutnya.		V		V Komite Remunerasi dan Nominasi
2	Membuat kolom khusus pada format notula Rapat Dewan Komisaris yang mendokumentasikan <i>disenting opinion</i> .		V		V Sekretaris Komisaris
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI					
3	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai Tata Kerja Direksi, yaitu mengenai pengaturan waktu kerja.		V		V Corporate Secretary Division dan Legal Desk
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE					
4	Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi pengangkatan Dewan Komisaris pada periode berikutnya.		V		V Komite Remunerasi dan Nominasi
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN					
5	Meng-up-date ketentuan mengenai benturan kepentingan seiring dengan BTN melaksanakan IPO.			V	V Corporate Secretary Division dan Legal Desk
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN					
6	Bank akan membangun software pemantauan kepatuhan dan Aplikasi Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) untuk ketentuan eksternal agar pemantauan kepatuhan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.			V	V Desk Kepatuhan
PENERAPAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN INTERN					
7	Melakukan penyempurnaan terhadap user requirement teknologi informasi pendukung sistem informasi manajemen risiko yang rencana implementasinya akan disusun oleh Tim Implementasi Basel II Bank BTN.				V Divisi Manajemen Risiko
8	Melakukan fit and proper test yang menjadi bahan pertimbangan dalam penempatan pejabat di satuan kerja manajemen risiko. Disamping itu, setiap pegawai di satuan kerja				V Divisi Manajemen Risiko

	manajemen risiko secara periodik diikutsertakan dalam pelatihan di bidang manajemen risiko.		
9	Bank BTN tengah menyusun rencana pemenuhan kewajiban pemenuhan kewajiban sertifikasi manajemen risiko, dimana pemenuhan sertifikasi bagi pegawai yang ada disatukan kerja manajemen risiko menjadi prioritas utama.		V Divisi Manajemen Risiko
10	Melakukan penyempurnaan stuktur organisasi satuan kerja manajemen risiko termasuk upaya pemenuhan BRCO di seluruh Kantor Cabang dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian interen Kantor Cabang.		V Divisi Manajemen Risiko
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN DEBITUR BESAR (LARGE E POSURES)			
11	Bank secara berkala akan mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Debitur Besar (<i>large exposures</i>) agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.		V Divisi Pengelolaan Kredit dan Treasury
PENERAPAN GCG SECARA KESELURUHAN			
12	Melanjutkan proses internalisasi GCG sesuai dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank secara lebih komprehensif dan berkesinambungan	V	V
			V Divisi Sekretaris Perusahaan dan seluruh unit kerja terkait

*) Telah disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank BTN pada tanggal 17 Mei 2010.



COMMITTED
To Our Focus On
Sustainable Growth

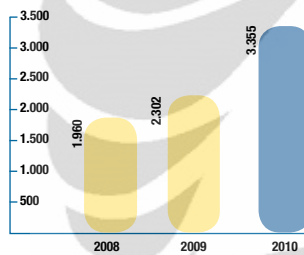
SEKILAS PENCAPAIAN 2008 - 2010

2008 - 2010 PERFORMANCE HIGHLIGHTS

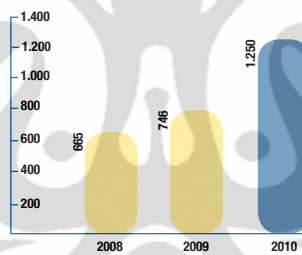
Bank BTN senantiasa fokus kepada bisnis utamanya, sebagai bank tabungan pilihan masyarakat yang unggul dalam pembiayaan perumahan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik serta pelayanan nasabah yang berkualitas untuk menjadi bank kelas dunia.

Bank BTN remains focused on its core business as a savings bank and leading in the housing finance business without neglecting its principles of prudence and good corporate governance as well as quality customer service in order to move toward our goal of becoming a world class bank.

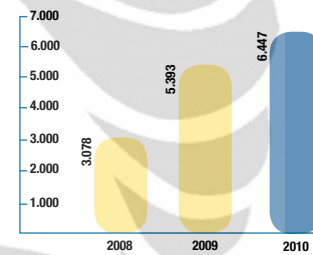
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Bersih*
Interest Income and Income from Profit Sharing-Net*



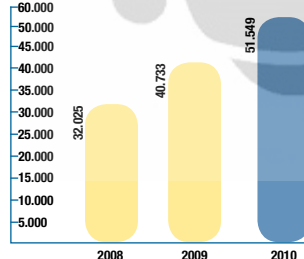
Labanya Sebelum Manfaat (Beban Pajak)*
Income Before Benefit (Expense) Tax*



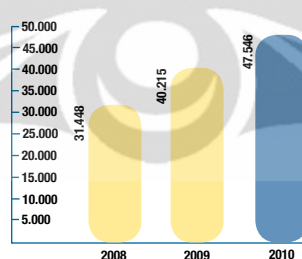
Jumlah Ekuitas*
Net Stockholders' Equity*



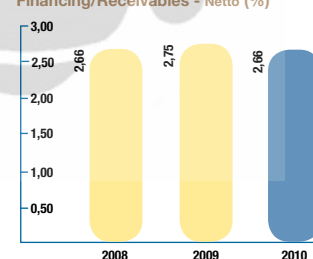
Kredit Yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah*
Loans and Sharia Financing/Receivables*



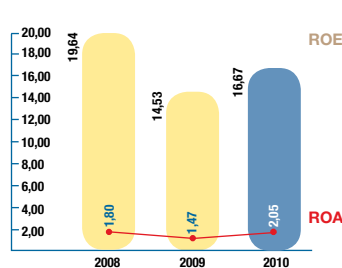
Simpanan dari Nasabah*
Total Deposits*



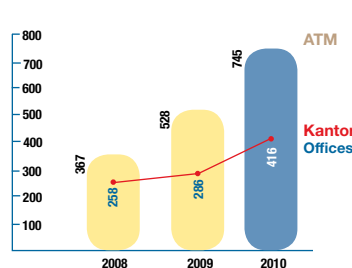
Rasio Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah Bermasalah - Netto (%)
Ratio of Non-Performing Loans and Sharia Financing/Receivables - Netto (%)



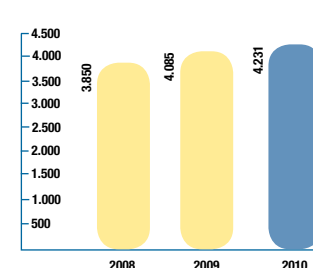
Imbal Hasil Rata-rata Aktiva & Ekuitas (%)
ROA & ROE (%)



ATM & Kantor
ATM & Offices



Jumlah Karyawan
Total Employees



* dalam Rp miliar
* in Rp billion

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

ii

2 Profil Bank BTN

Bank BTN's Profile

- 4 Sekilas BTN
BTN in Brief
- 6 Visi, Misi, Nilai
Vision, Mission, Value
- 10 Kilas Balik Bank BTN
Bank BTN Milestones
- 12 Ikhtisar Keuangan & Operasional
Financial & Operational Highlights
- 14 Ikhtisar Saham & Efek Lainnya
Financial & Operational Highlights
- 16 Peristiwa Penting 2010
2010 Event Highlights
- 20 Penghargaan & Sertifikat 2010
2010 Awards & Certification

22 Laporan Manajemen

Management Report

- 22 Laporan Dewan Komisaris
Report from The Board of Commissioners
- 30 Laporan Direksi
Report from The Board of Directors
- 42 Tanggung Jawab Laporan Tahunan
Responsibility for Annual Reporting

128 Analisa & Diskusi Manajemen atas Kinerja Bank BTN

Management Discussion and Analysis
of Bank BTN's Performance

- 130 Kinerja Keuangan
Financial Performance
- 156 Struktur Modal
Capital Structure
- 156 Rasio Keuangan Perbankan
Dalam Kaitannya Dengan Solvabilitas
dan Kolektibilitas, Liuiditas dan
Rentabilitas Bank
Banking Financial Ratios in Relation With
Solvency, Collectability, Liquidity, and
Profitability Bank
- 159 Belanja Barang Modal dan Komitmen
Material Terkait Dengan Belanja Modal
Capital Expenditures and Material
Commitments Related to Capital
Expenditures
- 160 Arus Kas
Cash Flow
- 161 Komitmen dan Kontijensi
Commitments and Contingencies
- 162 Derivatif dan Fasilitas Lindung Nilai
Derivatives and Hedging Facilities
- 163 Informasi dan Fakta Material Setelah
Tanggal Laporan Akuntan
Material Information and Facts
Subsequent to the Accountant's Report
Date
- 163 Informasi Material yang Mengandung
Benturan Kepentingan dan Transaksi
Afiliasi
Material Information Containing Conflict
of Interest, and Affiliated Transaction
- 164 Informasi Material Lainnya
Other Material Information
- 164 Kebijakan Akuntansi dan Informasi
Keuangan Kejadian Luar Biasa
Accounting Policy and Financial
Information of Extraordinary Events
- 165 Dampak Perubahan Suku Bunga
Terhadap Kinerja Bank
Impact of Interest Rate Changes to
the Bank's Performance
- 166 Perubahan Peraturan dan Dampak
Terhadap Kinerja Bank
Changes in Regulation and the Impact to
The Bank's Performance
- 168 Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi
Keuangan Dan Dampaknya Terhadap
Laporan Keuangan
Information Concerning the Latest
Accounting Standard and the Impact on
Financial Statement



44 Tinjauan Bisnis & Operasional

Business & Operational Overview

- 46 Tinjauan Industri
Industry Overview
- 52 Tinjauan Bisnis
Business Overview
- 88 Tinjauan Operasional
Operational Overview

170	Dampak Konvergensi Perubahan PSAK di Masa Datang Impact of Coverage for The Changes of SFAS in The Future		
171	Dividen Dividend		
172	Laporan dan Informasi Pemegang Saham Shareholders & Investors Information		
174	Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan Share Ownership Composition		
174	Kepemilikan Saham Yang Mencapai 5% atau lebih Per 31 Desember 2010 Share Ownership Composition Reaching 5% or more as per 31 December 2010		
175	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana The Realization of IPO Fund Utilizatio Plan		
179	Kronologis Pencatatan Saham Chronology of Share Listing		
180	Efek Lainnya (KIK-EBA) Other Securities (KIK-EBA)		
180	Akses Informasi Information Access		
181	Informasi Penting Seputar BTN BTN Key Facts		
182	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance		
184	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Menuju <i>World Class Banking</i> The Implementation of Corporate Governance Geared Towards Worldclass Banking		
194	Laporan Tata Kelola Corporate Governance Report		
224	Komite-komite di bawah Komisaris Committees under the Board of Commissioners		
239	Komite-Komite dibawah Direksi Committees under the Board of Directors		
248	<i>IT Governance</i> IT Governance		
255	<i>Code of Conduct</i> Code of Conduct		
278	Audit Internal Internal Audit		
288	Manajemen Risiko Risk Management		
304	<i>Self Assesment BI</i> Self Assesment BI		
306	Rencana Pengembangan GCG 2011 dan Ke Depan GCG 2011 Development Plan and Moving Forward		
			
		310	Prospek Usaha, Keunggulan Kompetitif dan Strategi Business Prospect, Competitive Advantage and Strategy
		312	Prospek Usaha Business Prospect
		313	Keunggulan Kompetitif Bank BTN Bank BTN's Competitive Advantage
		316	Strategi Bank BTN Bank BTN's Strategy
		326	Laporan Keuangan Audit Audited Financial Statements
		517	Data Perusahaan Corporate Data
		518	Bagan Struktur Organisasi Organizational Structure
		521	Profil Anggota Dewan Komisaris Board of Commissioner's Profiles
		526	Profil Anggota Direksi Board of Director's Profiles
		532	Profil Anggota Komite Audit Audit Committee's Profiles
		533	Profil Anggota Komite Pemantau Risiko Risk Management Committee's Profile
		534	Profil Anggota Komite Remunerasi & Nominasi Remuneration & Nomination Committee's Profile
		534	Profil Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board's Profile
		536	Profil Kepala Unit Audit Internal Head of Internal Audit Division's Profile
		536	Profil Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary's Profile
		537	Produk dan Jasa Products and Services
		542	Kantor Cabang Branch Offices
		553	Referensi BAPEPAM-LK BAPEPAM-LK Cross Reference



COMMITTED TO OUR ON SUSTAINABLE GROWTH

Setelah satu tahun menjadi perusahaan terbuka, Bank BTN semakin memperkuat penerapan prinsip tata kelola yang baik dan kehati-hatian dalam praktik usaha yang dijalankan. Kami meyakini, kedua prinsip tersebut merupakan kunci utama untuk terus tumbuh secara berkelanjutan dalam dunia perbankan di Indonesia.

Selama tahun 2010, Bank BTN telah melaksanakan beragam aksi korporasi sekaligus peningkatan kualitas produk dan layanan kepada nasabah dan seluruh pemangku kepentingan. Keseluruhan tindakan tersebut merupakan upaya kami untuk tetap fokus pada visi kami dalam menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan.

Berangkat dari visi kami, pada tahun 2010 Bank BTN berhasil meningkatkan kinerja finansial dan non finansial, terutama dalam bisnis pembiayaan perumahan sebagai inti usaha kami. Memandang ke depan, Bank BTN akan mempertahankan posisi sebagai bank terdepan dalam pembiayaan perumahan serta menuju bank kelas dunia.

After one year as a publicly listed company, Bank BTN continues to strengthen its good corporate governance and prudence in daily business operations. We believe that both principles are crucial to support sustainable business growth in Indonesian banking industry.

Throughout 2010, Bank BTN has conducted an array of corporate actions while improving product and service quality to customers and all of our stakeholders. These activities are part of our effort to stay focused on our vision to become a leading bank in housing finance.

Based on our vision, in 2010 Bank BTN improved its financial and non-financial performance particularly our housing finance business which has become our core business. Looking forward, Bank BTN will maintain its position as the leading bank in housing finance and continue its journey towards becoming a world-class bank.



PROFIL BANK BTN BANK BTN'S PROFILE

**Fokus Usaha Kami:
Menjadi Bank Terkemuka Dalam
Pembiayaan Perumahan**

**Our Business Focus:
To Be The Leading Bank In Housing Finance**



SEKILAS BANK BTN BANK BTN IN BRIEF



Mewujudkan kebahagiaan berjuta keluarga Indonesia merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN. Keinginan ini diwujudkan dengan berfokus pada pembiayaan perumahan, melalui penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk kalangan masyarakat yang luas, baik KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah maupun KPR untuk segmen menengah ke atas.

Tahun 1897 merupakan awal didirikannya Bank BTN yang saat itu disebut Postspaarbank. Lalu pada 1950 namanya berubah menjadi Bank Tabungan Pos dan kembali berganti menjadi Bank Tabungan Negara pada 1963. Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia dan merupakan bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif - Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan, Bank BTN menekankan upaya untuk memperkuat dominasi di pasar pembiayaan perumahan. Namun demikian, berbagai produk dan layanan perbankan yang modern dan lengkap, baik konvensional maupun syariah, tetap disediakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia.

Saat ini, kegiatan Bank BTN didukung oleh jaringan operasional yang tersebar di seluruh Indonesia, baik gerai Bank maupun Kantor Pos yang terhubung secara *online* dengan Bank BTN serta mesin ATM dengan jaringan Link, ATM Bersama dan Visa.

Increasing the welfare of millions of Indonesian families' is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk's (Bank BTN) goal. This is achieved by focusing on housing finance, providing (mortgages) to a wide segment of society, Bank BTN offers both subsidized mortgages for middle to lower income families, and mortgages for the upper middle segment.

Bank BTN was established in 1897 under the name Postspaarbank. The name was changed to Bank Tabungan Pos in 1950 and became Bank Tabungan Negara In 1963. Bank BTN listed its stock offering on 17 December 2009 on the Indonesia Stock Exchange, and was the first Indonesian bank to securitize asset by recording Asset Backed Securities - Collective Investment Contracts.

To provide the best outcome for its stakeholders, Bank BTN prioritizes efforts to strengthen its market dominance in housing finance. However, the Bank also provides various modern and comprehensive banking products and services for conventional and sharia banking services especially developed to meet the needs of Indonesian families.

Currently, the Bank's service provision is supported by its operational network throughout Indonesia, including both full and Post Office branches connected to Bank BTN online as well as ATMs using the Link, ATM Bersama and Visa networks.



PERBANKAN KONSUMER

Segmentasi

Layanan terbaik bagi nasabah individu.

Jaringan Distribusi Nasional

Outlet sejumlah 416 dengan akses jaringan lebih dari 20.000 ATM dan dukungan layanan *online* di 2.661 Kantor Pos seluruh Indonesia.

Pengembangan Teknologi Serta Produk dan Layanan Baru

Berinovasi dengan teknologi untuk menambah fitur-fitur produk serta penyempurnaan layanan seperti Kartu Kredit BTN, *eLoan* dan BTN Prioritas.

PERBANKAN KOMERSIAL

Segmentasi

Fokus pada pinjaman untuk nasabah lembaga dan perusahaan.

Pertumbuhan Kredit Konstruksi

Kredit konstruksi BTN terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Pada 2010 kredit baru yang disalurkan meningkat sebesar Rp 4,9 triliun, meningkat 25,30 % dibanding tahun sebelumnya.

Program Pengembangan Operasional

Bank BTN menawarkan kerjasama Business to Business (B2B) dalam pengelolaan dana operasional lembaga/perusahaan.

PERBANKAN SYARIAH

Segmentasi

Mengutamakan prinsip hukum Islam untuk memberi layanan terbaik bagi nasabah individu maupun perusahaan.

Jaringan Distribusi Syariah

Jaringan tersebar di 28 Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 207 Kantor Layanan Syariah (KLS).

Pertumbuhan Unit Usaha Syariah

Unit Usaha Syariah terus berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun, mencapai laba sebesar Rp 35,3 miliar pada tahun 2010.

CONSUMER BANKING

Segmentation

Best services for individual customers.

National Distribution Network

416 Outlets with access to more than 20,000 ATMs and online service support in 2,661 post offices throughout Indonesia.

Technological Development and New Products and Services

Technological innovations to increase products features and enhance services, such as the BTN Credit Card, *eLoan* and BTN Prioritas.

COMMERCIAL BANKING

Segmentation

Focus on institution and corporate loans.

Construction Loan Growth

Housing construction loans continue to grow. In 2010 the disbursed value of new loans rose to Rp 4,9 trillion, a 25.30% increase compared to the previous year.

Operational Development Program

Bank BTN offers Business to Business (B2B) cooperation for company/institution fund management.

SHARIA BANKING

Segmentation

Founded on the principles of Islamic law to deliver the best services for individual and corporate customers.

Sharia Distribution Network

Networks spread in 28 Sharia Branches and 207 Sharia Service Offices.

Sharia Business Unit Growth

The Sharia Business Unit continues to develop significantly from year to year, reaching Rp 35.3 billion in profit 2010.

VISI DAN MISI

VISION AND MISSION

VISI

Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan

VISION

To be the leading bank in housing finance

MISI

1. Memberikan pelayanan yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri yang terkait, pembiayaan konsumsi serta usaha kecil dan menengah.
2. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.
3. Menyiapkan dan mengembangkan *human capital* yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
4. Melaksanakan manajemen perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* untuk meningkatkan *shareholder value*.
5. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

Seiring dengan berkembangnya langkah bisnis Bank BTN menjadi perusahaan perseroan terbuka, sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Jangka Panjang Bank BTN Tahun 2008 - 2012, maka ditetapkan Visi dan Misi Bank BTN.

Visi menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan, mengandung harapan bahwa Bank BTN senantiasa unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri yang terkait.

Sementara Misi merupakan cita-cita Bank BTN, yang akan ditempuh melalui tiga tahapan transformasi jangka panjang yaitu:

- ▶ Bank BTN menjadi Bank yang "Ready To Compete" pada tahun 2012
- ▶ Bank BTN menjadi Bank yang "Beat Competitor" pada tahun 2017
- ▶ Bank BTN menjadi Bank "World Class" pada tahun 2023

MISSION

1. Providing pre-eminent service in housing finance and related industries, consumer loans and SME loans.
2. Improving competitive excellence through continuous product and service innovation, and the latest technology-based strategic networks.
3. Preparing and developing qualified, professional and high integrity human capital.
4. Executing prudent banking management in accordance with the principles of good corporate governance to increase shareholder value.
5. Caring for community interests and the environment.

Along with the development of Bank BTN's business by becoming public company, as mandated in Bank BTN's 2008 - 2012 Long - Term Plan, Bank BTN established its Vision and Mission.

Bank BTN's vision to become the leading bank in housing finance carries the expectation that the Bank will continue to excel in housing finance and related industries.

The Mission is the goal of Bank BTN, which will be pursued through three stages of long-term transformation:

- ▶ BTN Bank will become the Bank that is "Ready to Compete" in 2012
- ▶ BTN Bank will become the Bank that is "Beats Competitor" in 2017
- ▶ BTN Bank will become a "World Class" Bank in 2023



Satu Bank Untuk **Semua**

Dengan banyak pilihan produk, jasa dan layanan yang unggul dan inovatif.

Kenyamanan dan kemudahan nasabah adalah inspirasi dan semangat kami untuk memberikan pelayanan yang lebih lengkap, tidak hanya mewujudkan rumah idaman tetapi juga semua kebutuhan perbankan lainnya.

AYO ke BANK

Contact Center
021-26533555
www.btn.co.id

Bank  **BTN**

NILAI-NILAI PERUSAHAAN COMPANY VALUES

POLA PRIMA

6 NILAI DASAR

PELAYANAN PRIMA

Memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan (internal dan eksternal).

INOVASI

Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan.

KETELADANAN

Mulai dari diri sendiri menjadi suri tauladan dalam berperilaku yang mencerminkan Nilai-nilai Budaya Kerja Bank BTN bagi insan Bank BTN dan pihak-pihak yang terkait.

PROFESIONALISME

Kompeten di bidangnya dan senantiasa mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja terbaik serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan seluruh insan Bank BTN.

INTEGRITAS

Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.

KERJASAMA

Membangun hubungan yang tulus dan terbuka dengan sesama insan Bank BTN dan pihak lain dilandasi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama.

6 CORE VALUES

SERVICE EXCELLENCE

Delivering service beyond customers' expectations (both internally and externally).

INNOVATION

Constantly developing new ideas and sustainable improvements, thus delivering added value to the Company.

EXEMPLARY BEHAVIOR

Starting with ourselves as role models of the values reflected in Bank BTN's working culture for staff and other concerned parties.

PROFESSIONALISM

Being competent in own expertise and continuously improving ourselves to yield the best performance and deliver added value for the company and everyone in Bank BTN.

INTEGRITY

Being consistent with company regulations, professional code of ethics and good principles in mindset, expression and action.

TEAMWORK

Building sincere and open relationships between the people of Bank BTN, and other parties, based on trustworthy respect for others to achieve our common goals.

12 PERILAKU UTAMA

- ▶ Ramah, sopan dan bersahabat
- ▶ Peduli, proaktif dan cepat tanggap

- ▶ Berinisiatif melakukan penyempurnaan
- ▶ Berorientasi menciptakan nilai tambah

- ▶ Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar
- ▶ Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja

- ▶ Kompeten dan bertanggungjawab
- ▶ Bekerja cerdas dan tuntas

- ▶ Konsisten dan disiplin
- ▶ Jujur dan berdedikasi

- ▶ Tulus dan terbuka
- ▶ Saling percaya dan menghargai

12 MAIN CODE OF CONDUCT

- ▶ Hospitable, polite and friendly
- ▶ Caring, pro-active and responsive

- ▶ Taking initiative to improve
- ▶ Oriented to create added value

- ▶ Being a role model for good and proper behaviour
- ▶ Spurring implementation of working culture values

- ▶ Being competent and responsible
- ▶ Working smart and thoroughly

- ▶ Being consistent and disciplined
- ▶ Being honest and dedicated

- ▶ Being sincere and open-minded
- ▶ Trusting and respecting each other

KILAS BALIK BANK BTN BANK BTN MILESTONES



[1994]

BANK DEVISA

Bank BTN mendapat ijin sebagai Bank Devisa.

FOREIGN EXCHANGE BANK

Bank BTN obtained a license to operate as a Foreign Exchange Bank.

1994

[2005]

UNIT USAHA SYARIAH

Bank BTN membuka Unit Usaha Syariah

SHARIA UNIT

Bank BTN launched its Sharia Business Unit.

2005

2002

[2002]

PINJAMAN TANPA SUBSIDI

Bank BTN sebagai Bank Umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk perumahan (berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-554/ M-MBU/ 2002 tanggal 21 Agustus 2002).

NON-SUBSIDIZED LOANS

Bank BTN, as a commercial bank, focused on non-subsidized housing loans (based on Minister of State-Owned Enterprise Decree No. S-554/M/MBU/2002 dated 21 August 2002).

2009

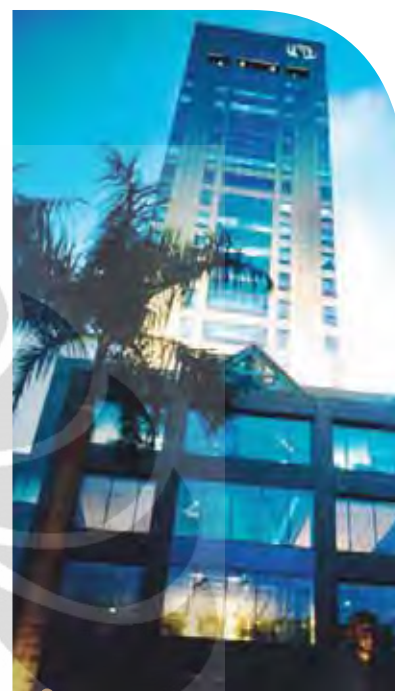
[2009]

SEKURITISASI ASET DAN PENAWARAN SAHAM PERDANA

Bank BTN menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK-EBA) di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun yang sama, Bank BTN melepaskan 2.360.057.000 lembar saham, setara dengan 27,08% dari total saham Bank BTN, dan tercatat sebagai emisi IPO terbesar di tahun 2009 dengan nilai dana sebesar Rp 1,88 triliun.

ASSET SECURITIZATION AND INITIAL PUBLIC OFFERING

Bank BTN became the first bank in Indonesia to list Asset-Backed Securities Collective Investment Contract transactions on the Indonesia Stock Exchange. In the same year, Bank BTN issued 2,360,057,000 shares, representing 27.08% of Bank BTN's total shares, and was the biggest IPO issuer in 2009 with total funds of Rp 1.88 trillion.



2010

[2010]

Bank BTN meletakkan dasar-dasar pertumbuhan berkelanjutan dengan melakukan perubahan struktur organisasi, SDM, IT dan penerapan GCG, seiring dengan pengembangan produk & layanan serta perluasan jaringan.

Bank BTN put sustainable development in place and developed several changes in organizational structure, HR, IT and GCG implementation in line with product and service development as well as network expansion.

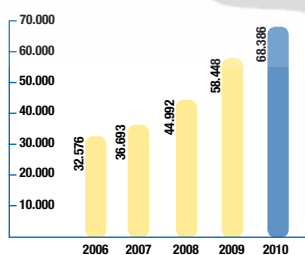
IKHTISAR KEUANGAN & OPERASIONAL

FINANCIAL & OPERATIONAL HIGHLIGHTS

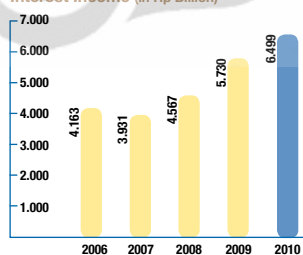
Keterangan (dalam miliar Rupiah) Remarks (in billion Rupiah)	2010	2009	2008	2007	2006
LAPORAN LABA RUGI STATEMENT OF INCOME					
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Interest Income and Income from Profit Sharing	6.499	5.730	4.567	3.931	4.163
Beban Bunga dan Bonus Interest and Bonus Expense	3.144	3.428	2.607	2.178	2.539
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Bersih Interest Income and Income from Profit Sharing - Net	3.355	2.302	1.960	1.753	1.624
Pendapatan Operasional Lainnya Other Operating Income	488	265	217	227	161
Beban Operasional Lainnya Other Operating Expenses	2.247	1.763	1.503	1.391	1.176
Pembalikan (Beban) Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif dan Non-Produktif Reversal of Allowance (Provision) for Possible Losses on Earning and Non-Earning Assets	(311)	(53)	5	8	(57)
Laba Operasional Net Operating Income	1.264	739	670	591	539
Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Bersih Non Operating Income - Net	(13)	6	(4)	11	4
Laba Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan Income Before Benefit (Expense) Tax	1.250	746	666	602	543
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan Deferred Tax Income (Expense)	40	(12)	57	39	(23)
Beban Pajak Kini Current Tax Expense	374	228	292	238	155
Laba Bersih Net Income	916	490	430	402	365
Laba Bersih Per Saham (nilai penuh) Earning Per Share (full amount)	105	76	68	322	292
NERACA BALANCE SHEET					
Aktiva Produktif Earning Assets	65.869	56.255	43.112	33.806	30.337
Kredit yang diberikan Loans	48.703	38.737	30.774	21.796	17.829
Pembiayaan Syariah Sharia Financing	2.847	1.996	1.251	547	312
Penempatan pada BI dan Bank Lain Placement with BI and Other Banks	2.375	2.669	656	55	294
Efek-Efek Securities	932	2.955	1.213	1.872	1.752
Obligasi Pemerintah Government Bonds	7.193	7.380	7.577	8.618	9.738
Total Aset Total Assets	68.386	58.448	44.992	36.693	32.576
Simpanan dari Nasabah Deposits	47.546	40.215	31.448	24.187	21.594
Giro Demand Deposits	5.174	7.364	2.853	2.245	1.637
Tabungan Saving Deposits	10.868	8.941	7.375	7.156	6.057
Deposito Berjangka Time Deposits	31.504	23.910	21.220	14.786	13.900
Surat Berharga yang Diterbitkan Securities Issued	4.140	3.222	2.496	3.235	3.142
Pinjaman Yang Diterima Fund Borrowings	3.400	2.984	3.281	3.626	3.704

Keterangan (dalam miliar Rupiah) Remarks (in billion Rupiah)	2010	2009	2008	2007	2006
Pinjaman Subordinasi Subordinated Loans	-	-	250	250	249
Total Kewajiban Total Liabilities	61.938	53.055	41.914	33.906	30.816
Ekuitas Stockholders' Equity	6.447	5.393	3.078	2.787	1.760
RASIO KEUANGAN (%) FINANCIAL RATIOS					
Imbal Hasil Rata-rata Aktiva (ROA) Return On Assets (ROA)	2,05	1,47	1,80	1,92	1,78
Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (ROE) Return On Equity (ROE)	16,67	14,53	19,64	20,68	23,36
Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) Net Interest Margin (NIM)	5,93	4,60	5,08	5,47	5,13
Rasio Kecukupan Modal (CAR) Capital Adequacy Ratio (CAR)	16,74	21,54	16,14	22,13	17,52
Rasio Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah Bermasalah (NPL/F) - Gross NPL/F - Gross	3,26	3,36	3,20	4,05	3,91
Rasio Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah Bermasalah (NPL/F) - Netto NPL/F - Netto	2,66	2,75	2,66	2,81	1,77
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional Operating Expenses to Operating Income	83,28	88,29	86,18	85,89	87,56
Rasio Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah terhadap Simpanan Loan to Deposit Ratio (LDR)	108,42	101,29	101,83	92,38	83,75
Jumlah Karyawan Total Employees	4.231	4.085	3.850	3.663	3.641
Jumlah ATM Total ATM	745	528	367	221	211
Jumlah Kantor Total of Offices	416	286	258	246	218

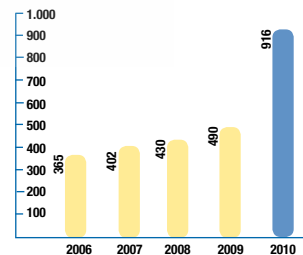
Total Aset (dalam Rp Miliar)
Total Assets (in Rp Billion)



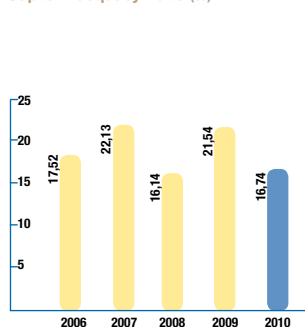
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil
(dalam Rp Miliar)
Interest Income (in Rp Billion)



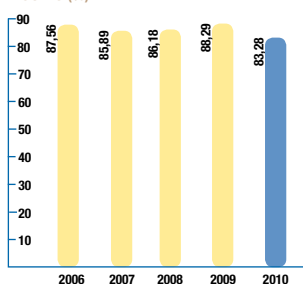
Laba Bersih (dalam Rp Miliar)
Net Income (dalam Rp Billion)



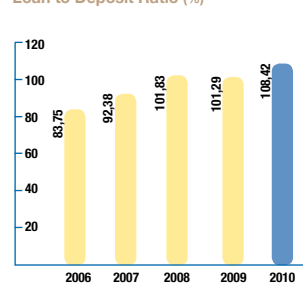
Rasio Kecukupan Modal (%)
Capital Adequacy Ratio (%)



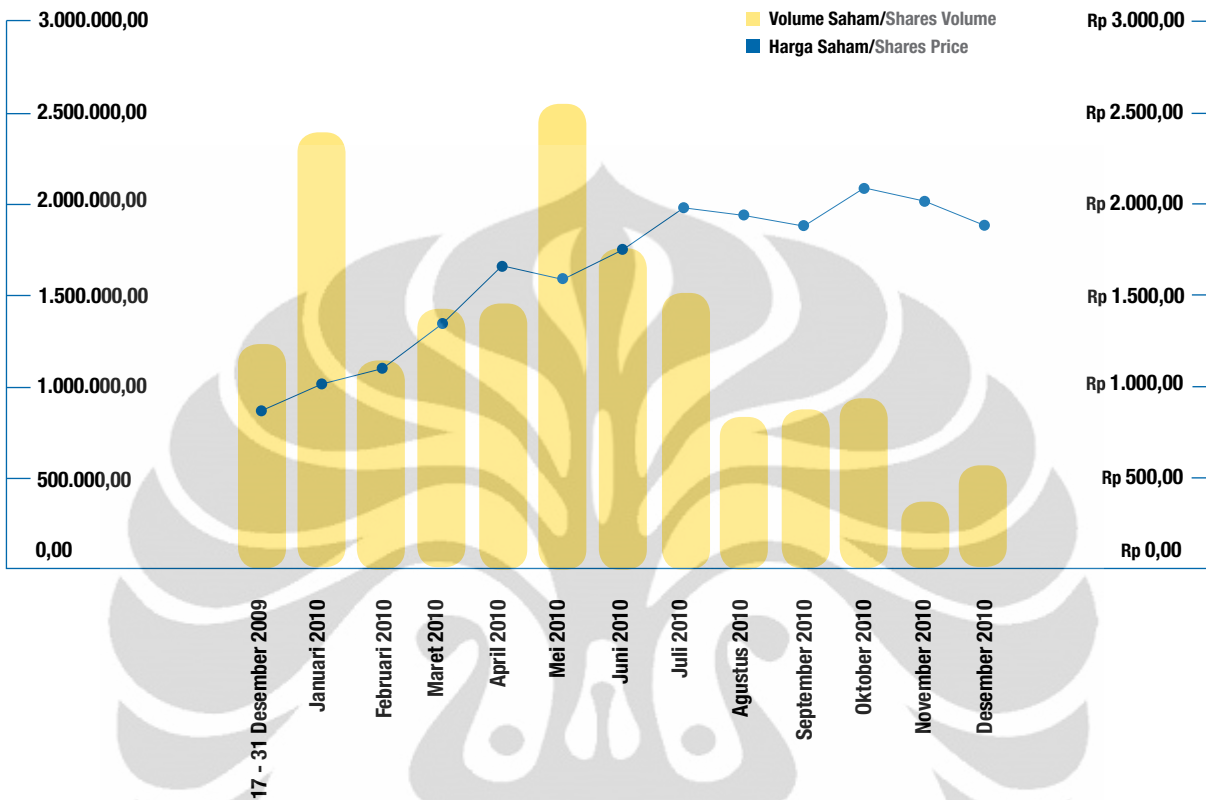
**Rasio Beban Operasional Terhadap
Pendapatan Operasional (%)**
Operating Expense to Operating
Income (%)



**Rasio Kredit yang Diberikan dan
Pembiayaan/Piutang Syariah
Terhadap Simpanan (%)**
Loan to Deposit Ratio (%)



IKHTISAR SAHAM & EFEK LAINNYA STOCK & OTHER SECURITIES HIGHLIGHTS



Kronologis Harga Saham Chronology of Share Price

Kuartal Quarter	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Penutupan Closing	Volume Volume
2010				
I	Rp 1.350	Rp 830	Rp 1.330	4.956.835
II	Rp 1.750	Rp 1.100	Rp 1.700	5.743.107
III	Rp 1.990	Rp 1.670	Rp 1.820	3.210.744
IV	Rp 1.560	Rp 2.050	Rp 1.640	1.872.724
2009*				
IV 17 - 31 Desember 2009	Rp 880	Rp 800	Rp 840	1.235.902

* IPO pada tanggal 17 Desember 2009

IPO on 17 December 2009

Ikhtisar Obligasi**Bonds Highlights**

Obligasi Bonds	Jumlah (Rp) Total (Rp)	Jangka Waktu Period	Tingkat Bunga Interest Rate	Tanggal Penerbitan Issuing Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat*) Rating*)
Obligasi Bank BTN XII Tahun 2006	1.000.000.000.000,00	10 Tahun	12,75% p.a.	20 Sept 2006	19 Sep 2016	idAA-
Obligasi Bank BTN XIII Seri A	300.000.000.000,00	3 Tahun	11,75% p.a.	29 Mei 2009	29 Mei 2012	idAA-
Obligasi Bank BTN XIII Seri B	300.000.000.000,00	4 Tahun	12,00% p.a.	29 Mei 2009	29 mei 2013	idAA-
Obligasi Bank BTN XIII Seri C	900.000.000.000,00	5 Tahun	12,25% p.a.	29 Mei 2009	29 mei 2014	idAA-
Obligasi Bank BTN XIV	1.650.000.000.000,00	10 Tahun	10,25% p.a.	11 Juni 2010	11 Juni 2020	idAA-

* Rating Obligasi periode 10 Maret 2010 s.d. 1 Maret 2011

[Bonds Ratings Period 10 March 2010 to 1 March 2011](#)

Ikhtisar Sekuritisasi KPR BTN**Securitization KPR BTN Highlights**

Sekuritas Securities	Jumlah Penerbitan (Rp) Issuing Amount (Rp)	Outstanding (Rp) per 31 Desember 2010	Tingkat Bunga EBA Kelas A AAA Class A Interest Rate	Tanggal Penerbitan Issuing Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Rating
Sekuritisasi KPR BTN ke-1 (KIKDSMF01)	111.111.108.501,00	63.940.962.306,00	13,00% p.a.	11 Februari 2009	10 Maret 2018	idAAA
Sekuritisasi KPR BTN ke-2 (KIKDSMF02)	391.305.329.159,00	291.410.176.351,48	11,00% p.a.	10 November 2009	10 Desember 2019	idAAA
Sekuritisasi KPR BTN ke-3 (KIKDBTN01)	750.000.230.716,80	744.704.604.433,18	9,25% p.a.	27 December 2010	27 September 2019	idAAA

PERISTIWA PENTING 2010 EVENT HIGHLIGHTS 2010



27 Januari

Kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, Bank BTN bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dalam pengiriman dokumen kepada nasabah atau debitur Bank BTN.

Cooperation with PT Pos Indonesia (Persero)

As an effort to maintain efficiency, Bank BTN signed an agreement with PT Pos Indonesia (Persero) for document shipping to the Bank's customers.



8 Maret

Paparan Kinerja Tahun 2009

Sebagai bentuk keterbukaan kepada publik, Bank BTN menyelenggarakan paparan kinerja atas laporan keuangan per 31 Desember 2009. Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh Bank BTN setiap triwulan.

Public Expose 2009

As means of public transparency, Bank BTN held Public Expose to present 2009 performance in accordance to financial statements as of 31 December 2009 period. Bank BTN conducts this event regularly in every quarter.



14 April

Kartu Multifungsi bagi PNS

Bank BTN bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) meluncurkan Kartu Pegawai Elektronik bagi PNS di wilayah Bangkalan. Kartu multifungsi ini, selain menjadi kartu identitas PNS, juga berfungsi sebagai kartu ATM dan Debit.

Multifunction Card for Civil Servant

Bank BTN in cooperation with National Civil Services Agency (BKN) launched Electronic Card for Civil Servant (KPE) serves in Bangkalan. Beside identity card, this multifunction card also can be used as ATM as well as Debit card.



9 Februari

Ulang Tahun Bank BTN ke-60

Dalam rangkaian kegiatan ulang tahun yang ke-60, Bank BTN menyelenggarakan berbagai acara, antara lain pembukaan kantor kas dan kantor pos *online* di seluruh Indonesia serta Program "Satu Rumah Satu Pohon" kerjasama Bank BTN dengan Kementerian Kehutanan, REI, Apersi dan Perumnas.

60th Anniversary of Bank BTN

To celebrate 60th anniversary, Bank BTN held series of event, such as opening cash offices and online post offices all over Indonesia as well as "Satu Rumah Satu Pohon" program, as cooperation with the Ministry of Forestry, REI, Apersi and Perumnas.



7 April

Kerjasama dengan YKPP

Bank BTN dan Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP) di bawah Kementerian Pertahanan memperbaharui kerjasama yang sudah berlangsung sejak 1980, meliputi pengelolaan dana YKPP, penyediaan fasilitas KPR dan bantuan uang muka bagi anggota YKPP.

Cooperation with YKPP

Bank BTN and Yayasan Kesejahteraan Perumahan Prajurit (YKPP), under the Ministry of Defense, renewed their cooperation that had been going since 1980. This cooperation including YKPP fund management, provision of mortgage facilities and down payment assistance for YKPP members.



24 April

Undian Grand Prize Tabungan BTN Batara

Bertempat di Teater Tanah Airku Taman Mini dan disiarkan langsung oleh TransTV, Bank BTN melakukan undian Grand Prize Tabungan BTN Batara dengan total hadiah sebesar 14 miliar.

Tabungan BTN Batara Grand Prize

Taken place at Teater Tanah Airku, Taman Mini and live broadcasted by TransTV, Bank BTN held Tabungan BTN Batara Grand Prize with total price amounting to Rp 14 billion.



29 April

Public Expose Obligasi 2010

Sebagai sumber dana untuk ekspansi kredit, Bank BTN menerbitkan Obligasi tahun 2010 sebesar Rp 1,5 triliun, dengan tenor 10 tahun.

Bonds Public Expose 2010

As funding source for loan expansion, In 2010, Bank BTN issued Bonds worth Rp 1.5 trillion with 10 years tenor.



19 Mei

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Bank BTN menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2010

Annual General Meeting of Shareholders

Bank BTN held Annual General Meeting of Shareholders in 2010.



20-21 Mei

WSBI Asia Pacific Regional Group Meeting

Dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan *savings & retail* bank di wilayah Asia Pacific, Bank BTN menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan the 16th Meeting of the World Savings Banks Institute (WSBI) Asia Pacific Regional Group di Bali.

WSBI Asia Pacific Regional Group Meeting

To maintain cooperation with savings & retail banks throughout Asia Pacific region, Bank BTN hosted 16th Meeting of the World Savings Banks Institute (WSBI) Asia Pacific Regional Group in Bali.



23 Juni

Jual Beli Tagihan KPR dengan SMF

Menyusul suksesnya sekritisasi KPR BTN dan sebagai alternatif pendanaan melalui pasar sekunder pembiayaan perumahan, Bank BTN menandatangani nota kesepahaman dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk melakukan jual beli tagihan KPR senilai Rp 500 miliar.

KPR Receivables buy and sell through SMF

Following the success of KPR BTN mortgage securitization and as a financing alternative through the secondary market for housing finance, Bank BTN signed Memorandum of Understanding with PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) for KPR receivables buy and sell transaction amounted to Rp 500 billion.



13 Juli

Undian Tabungan BTN – Pos

Bank BTN menggelar undian Heboh Rezeki Tabungan e'Batara Pos di Kantor Pos Jl Lapangan Banteng, Jakarta dengan total hadiah mencapai hampir Rp 13 miliar, yang terdiri dari uang tunai, sepeda motor, paket ibadah umrah serta mobil.

Tabungan BTN – Pos Lottery

Bank BTN held Heboh Rezeki Tabungan e'Batara Pos lottery at Post Office in Jl. Lapangan Banteng, Jakarta with total prize amounted to Rp 13 billion, consisting of cash, motorcycle, Umrah packages and cars.



20 Juli

Kerjasama dengan HDFC India

Bank BTN menjalin kerja sama strategis dengan Housing Development Financial Corporation Limited (HDFC) India. Ruang lingkup kerja sama adalah pelatihan, pertukaran karyawan, *technical advisory service* untuk BTN, dan kemungkinan mendirikan *mortgage learning center* di Indonesia.

Cooperation with HDFC India

Bank BTN established cooperation with dengan Housing Development Financial Corporation Limited (HDFC) India. The cooperation covers training and employee exchange, *technical advisory service* for BTN and the possibility of setting up a mortgage learning center in Indonesia.

PERISTIWA PENTING 2010 EVENT HIGHLIGHTS 2010



2 Agustus

Peresmian Cabang Harapan Indah & Regional Office 1

Dengan tujuan untuk menangkap peluang bisnis yang ada serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah terutama di wilayah Bekasi, Bank BTN membuka kantor cabang Harapan Indah serta meresmikan Regional Office 1 sebagai koordinator kantor cabang di wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Inauguration of Harapan Indah Branch Office & Regional Office 1

To capture business opportunity as well as provide better service for the customers, especially in Bekasi area, Bank BTN operated Harapan Indah Branch Office and inaugurated Regional Office 1 as branch coordinator for DKI Jakarta, Banten and West Java area.



31 Agustus

Launching Kartu Debit BTN

Bekerjasama dengan VISA, Bank BTN meluncurkan Kartu Debit yang dapat digunakan nasabah untuk bertransaksi di merchant-merchant dengan jaringan Visa Internasional.

BTN Debit Card Launching

In cooperation with VISA, Bank BTN launched Debit Card. With this card, Bank BTN's customers can make several transactions in various merchant within Visa International network.



22 September

Penghargaan Annual Report Award 2009

Bank BTN menerima penghargaan Annual Report Award 2009 sebagai Peringkat 2 Kategori BUMN Keuangan Listed.

Annual Report Award 2009

Bank BTN received Annual Report Award 2009 as 2nd rank in State-owned Finance-Listed category.



13 Agustus

Kerjasama dengan BMT Ventura

Bank BTN mengintensifkan kerja sama dengan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) untuk penyaluran pembiayaan modal kerja bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Cooperation with BMT Ventura

Bank BTN intensified the cooperation with Baitul Maal wa Tamwil (BMT) to distribute working capital financing for micro, small and middle enterprises (SME).



5 September

Mudik Bersama Bank BTN

Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan, Bank BTN memberangkatkan 1000 pekerja bangunan ke kampung halamannya di Yogyakarta, Solo dan Semarang, dalam kegiatan "Mudik Bersama Bank BTN"

Mudik Bersama Bank BTN

As a form of awareness to community and environment, Bank BTN dispatched 1000 construction workers to their hometown in Yogyakarta, Solo and Semarang in "Mudik Bersama Bank BTN" event.



1 Oktober

Penandatanganan Akad Kredit FLPP

Bank BTN bekerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat menyalurkan KPR dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Penandatanganan akad kredit pertama dengan fasilitas ini dilaksanakan di kantor cabang Bekasi, disaksikan oleh Bapak Menteri Perumahan Rakyat.

FLPP Credit Contract Signing

To enhance KPR services to the low-income communities, Bank BTN established cooperation with the Ministry of Public Housing to distribute KPR with Liquidity Facility of Housing Finance (FLPP). The first signing of loan contract with FLPP scheme held in Bekasi branch office, witnessed by the Minister of Public Housing.



1 November

Kerjasama dengan Dongbu Savings Bank Korea

Dalam rangka meningkatkan jaringan kerja sama dengan bank-bank dan lembaga keuangan internasional, terutama dalam bisnis retail dan layanan perbankan, Bank BTN menandatangani nota kesepahaman dengan Dongbu Savings Bank Korea.

Cooperation with Dongbu Savings Bank Korea

To enhance cooperation network among international banks and financial institutions, especially in retail business and banking service, Bank BTN signed Memorandum of Understanding with Dongbu Savings Bank Korea.



1-2 November

Public Expose 2010

Memenuhi ketentuan Bapepam-LK, Bank BTN menyelenggarakan Public Expose atas kinerja keuangannya kepada para investor, analis pasar modal dan pemangku kepentingan lainnya.

Public Expose 2010

Comply with Bapepam-LK regulation, Bank BTN held public expose 2010 to report our financial performance to investors, equity analysts and other stakeholders.



9 November

Bantuan Biaya Operasi Jantung

Bank BTN berbagi kepada anak-anak yang mengalami masalah dengan jantung dan sangat membutuhkan biaya operasi segera melalui Yayasan Jantung Indonesia. Penyerahan bantuan secara simbolis kepada 12 anak dilakukan pada ulang tahun ke-29 Yayasan Jantung Indonesia.

Heart Surgery Donation

Bank BTN shared concern to the children with heart disease or abnormalities and urgently need surgery fund through Yayasan Jantung Indonesia. The symbolic ceremony of the donation given to 12 children performed on the 29th anniversary of the Indonesian Heart Foundation.



10 Desember

Rekor MURI dan ISO 9001:2008

Bank BTN menyelenggarakan akad kredit KPR dan KPA dengan peserta terbanyak dalam satu hari, yang mendapatkan sertifikat Museum Rekor Indonesia (MURI). Pada hari yang sama, Bank BTN juga mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 atas layanan kreditnya.

MURI Record and ISO 9001:2008

Bank BTN held KPR and KPA contract signing with most participants in a single day which successfully obtained Museum Rekor Indonesia (MURI) certificate. In the same day, Bank BTN also received ISO 9001:2008 certification for loan services.



18-21 Desember

Launching Tabungan dan Kartu Kredit

Untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga Indonesia, Bank BTN melengkapi produk dan layanannya dengan meluncurkan serangkaian produk tabungan, yaitu Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara dan Tabungan BTN Haji, serta Kartu Kredit.

Savings and Credit Card Launching

To support Indonesian family's needs, Bank BTN provided several product and services such as the launching of various savings products such as Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara and Tabungan BTN Haji, as well as Credit Card.



28 Desember

Peresmian BTN Prioritas

Dengan keinginan memberikan layanan dan fitur produk yang bersaing bagi nasabah primanya, Bank BTN meresmikan outlet BTN Prioritas di kantor cabang Jakarta Kuningan.

BTN Priority Banking Inauguration

With the intention to give competitive product feature and service for the priority customers, Bank BTN Inaugurated BTN Priority Banking outlet in Jakarta Kuningan Branch Office.

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI 2010 AWARDS & CERTIFICATION 2010

PENGHARGAAN AWARDS

- | | | | |
|---|---|--|--|
| 1.  | 2.  | 1. Majalah The Asset – Hong Kong
IPO Terbaik 2009 di Indonesia | 1. The Asset Magazine – Hong Kong
Best 2009 IPO in Indonesia |
| 3.  | 3.  | 2. Majalah Alpha South East Asia – Hong Kong IPO Terbaik untuk kategori Kapitalisasi Menengah (Mid-Cap) 2009 di Asia Tenggara | 2. Alpha South East Asia Magazine - Hong Kong Best Mid-Cap IPO Deal of the Year 2009 in Southeast Asia |
| 4.  | 5.  | 3. Idea Rumah Award 2010 & Majalah Idea Rumah Perusahaan Pilihan Pembaca Kategori KPR | 3. Idea Rumah Award 2010 & Majalah Idea Rumah Most Reader's Choice Category Mortgage Banking Provider |
| 6.  | 6.  | 4. Majalah Investor, Bank Terbaik Kategori Bank Umum Aset di Atas Rp 50 Triliun – Rp 100 Triliun | 4. Investor Magazine Best Bank Category Commercial Bank with asset > 50 trillion – 100 trillion |
| 7.  | 7.  | 5. Majalah Investor, Sebagai Perusahaan Kinerja IPO Terbaik 2010 | 5. Investor Magazine Best Performance IPO 2010 |
| 8.  | 8.  | 6. Majalah SWA Predikat Merek yang Paling Direkomendasi 2010, Pemenang Pertama dalam kategori Pembiayaan Rumah | 6. SWA Magazine The Most Recommended Brand 2010, 1st Winner in Housing Loan Category |
| 11.  | 10.  | 7. Penghargaan Perbankan ABFI & Perbanas Bank dengan Kinerja Terbaik 2010 untuk Kategori Persero | 7. ABFI Banking Award & Perbanas Best Performance Banking in 2010 for Persero Category |
| 10.  | 9.  | 8. Majalah InfoBank Bank yang Berpredikat 'Sangat Bagus' atas Kinerja Keuangan Tahun 2009 | 8. InfoBank Magazine "Very Good" Financial Performance in 2009 |
| 9.  | 9.  | 9. Majalah InfoBank Bank yang Berpredikat 'Sangat Bagus' atas Kinerja Keuangan Tahun 2005 - 2009 | 9. InfoBank Magazine "Very Good " Financial Performance in 2005 – 2009 |
| 11.  | 10.  | 10. Majalah Property & Bank Bank Umum Berkinerja Sangat Bagus: Kinerja IPO Terbaik & Pertumbuhan Ekspansi KPR Terbesar | 10. Property Magazine & Bank, The Best IPO Performance & The Greatest Growth Mortgage Loan Expansion : Best Performance IPO & Biggest Mortgage Growth Expansion |
| 10.  | 9.  | 11. Majalah Property & Bank Unit Usaha Syariah Berpredikat Bagus: Pertumbuhan Ekspansi Pembiayaan Syariah Terfavorit | 11. Property Magazine & Bank The Most Favourite Growth Sharia Mortgage Expansion : Favorite Sharia Funding Growth Expansion |

12. Karim Business Consulting

Peringkat 1 Unit Usaha Syariah Berpredikat Paling Berkembang dalam Pembiayaan

12. Karim Business Consulting 1st Rank The Most Expansive Financing (The Best Sharia Unit Asset > Rp 1 trillion).

13. Karim Business Consulting

Peringkat 3 Unit Usaha Syariah dengan aset lebih dari Rp 1 triliun

13. Karim Business Consulting 3rd Rank The Best Sharia Unit Asset more than Rp 1 trillion.

14. Annual Report Award 2009

Peringkat 2 Kategori BUMN/BUMD Keuangan Listed

14. Annual Report Award 2009 2nd rank for category SOE/local enterprise Financial listed

15. Kementerian Negara Perumahan Rakyat Penghargaan Adiupaya Puritama

Penghargaan Khusus Atas Totalitas Komitmen, Konsistensi & Kinerja yang Luar Biasa Dalam Pelaksanaan Program KPRSH Bersubsidi dan Perintis Penyaluran KP Sarusuna Bersubsidi

15. Ministry of Public Housing Adiupaya Award Special award for total commitment, consistency & extraordinary performance in implementation of subsidized KPRSH program and pioneer in disbursement of subsidized KP Sarusuna

16. Majalah SWA dan Perbanas

Penghargaan Consumer Banking Excellence 2010. Juara 1 dalam kategori KPR terbaik

16. Majalah SWA dan Perbanas Consumer Banking Excellence 2010, The First Winner in Category of The Best KPR

17. Majalah InfoBank

InfoBank BUMN Awards 2010, Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan 2009

17. InfoBank Magazine InfoBank BUMN Awards 2010, predicate of Very Good for 2009 Financial Performance

18. Majalah Housing Estate

Green Property Award 2010, Penghargaan Khusus Pembiayaan Hunian Vertikal Terbanyak

18. Housing Estate Magazine Green Property Award 2010. Special award for the most vertical residential financing

**SERTIFIKASI
CERTIFICATION**

19. ISO 9001:2008 untuk pelayanan Audit Internal, berlaku dari 12 Juli 2010 sampai dengan 11 Agustus 2011

19. ISO 9001:2008 for Internal Audit Services, valid from 12 July 2010 until 11 August 2011

20. ISO 9001:2008 Untuk proses KPR dan KPA mulai dari awal aplikasi sampai dengan pencairan pinjaman, berlaku dari 9 Desember 2010 sampai dengan 6 Januari 2012

20. ISO 9001:2008 for Processing Commercial Housing Loan/Mortgage (KPR & KPA) from Application to Loan Disbursement, valid from 9 December 2010 until 6 January 2012

21. Piagam Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Pemrakarsa dan Penyelenggara Penandatanganan Akad KPR & KPA dengan Peserta Terbanyak dalam Satu Hari

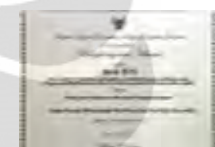
21. Charter of Indonesia Record Museum (MURI) as The Creator and Organizer of KPR & KPA's signing contract with the Highest number of Participants in One Day



12.



13.



15.



18.



16.



17.



19.



20.



21.



14.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS



Pada tahun pertama Bank BTN menjadi perusahaan publik, Dewan Komisaris telah menggariskan beberapa kebijakan dan arahan kepada Direksi, khususnya terhadap prospek usaha. Arahan tersebut adalah agar Bank BTN tetap fokus kepada bisnis pembiayaan perumahan.

In the first year of becoming a publicly listed company, the Board of Commissioners of Bank BTN has defined a number of policies for the Board of Directors to steer the direction of the Bank. Bank BTN will remain focus on the housing finance business.

Para Pemangku Kepentingan yang
Terhormat,

Kami sangat bangga atas pencapaian-pencapaian yang diraih Bank BTN sepanjang tahun 2010. Di tahun tersebut, Bank BTN berhasil meraih pencapaian sangat baik dilihat dari sisi kuantitatif maupun kualitatif. Seluruh pencapaian ini tentu tidak terlepas dari hasil kerja tim Direksi beserta seluruh jajaran karyawan Bank BTN di tengah kondisi ekonomi makro Indonesia yang positif sepanjang tahun 2010.

Sepanjang tahun 2010 perekonomian Indonesia melaju menggembirakan, sebesar 6,1%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2009 yang sebesar 4,5%.

Di sisi lain, pemerintah juga menopang kondisi ini dengan menahan laju inflasi di level 6,96% hingga akhir tahun 2010. Kemudian Bank Indonesia berhasil menjaga suku bunga acuan atau BI Rate yang selama 18 bulan stabil di level 6,5%. BI Rate tersebut pun membuat suku bunga kredit bank stabil pada kisaran 9% hingga 12%. Hal ini membuat

Dear Respected Stakeholders,

We are very proud of Bank BTN's achievements throughout 2010. During the year, Bank BTN succeeded in recording remarkable achievements both in quality and quantity. All of these achievements resulted from the teamwork exhibited by the Board of Directors and all layers of Bank BTN employees in the midst of the positive macroeconomic condition in Indonesia in 2010.

Overall, throughout 2010 the Indonesian economy encouragingly progressed at 6.1% growth, stronger than the 4.5% growth experienced in 2009.

The government supported this growth by controlling the inflation rate at 6.96% until the end of 2010. Bank Indonesia maintained the BI Rate at a stable rate of 6.5% for 18 months. It also encouraged stable banking loan interest rates of between 9% to 12%. This stimulated Bank BTN to actively disburse housing and consumer loans. These factors were

Bank BTN aktif menyalurkan kredit perumahan dan konsumen. Berbagai faktor tersebut didukung dengan menguatnya rupiah di level Rp 8.900 - Rp 9.000 per dolar AS. Dampak dari semua hal ini, perusahaan dan masyarakat lebih leluasa mengambil keputusan kredit untuk mendukung pembelian rumah dan kebutuhan sehari-hari. Kami melihat semua faktor dan kondisi ekonomi ini menjadi kunci penting pertumbuhan sektor perbankan tahun 2010.

Pada tahun pertama Bank BTN menjadi perusahaan publik, dalam menjalankan fungsi pengawasannya Dewan Komisaris telah menggariskan beberapa kebijakan dan arahan kepada Direksi, khususnya terhadap prospek usaha. Arahan Komisaris adalah agar Bank BTN tetap fokus kepada bisnis pembiayaan perumahan. Hal ini untuk mendukung program perumahan dari pemerintah khususnya bagi masyarakat bawah atau kurang mampu yang kami yakin akan dapat terus tumbuh menjadi suatu potensi pasar yang kuat di masa mendatang seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia.

Komisaris menyampaikan agar peningkatan-peningkatan di aspek Tata kelola Perusahaan/Good Corporate Governance (GCG) untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Dengan adanya *roadmap* dan *external assessment* dari pihak independen kami yakin penerapan GCG beserta sosialisasinya ke seluruh karyawan akan semakin baik.

Di samping itu, kami juga mendukung upaya reorganisasi yang dilakukan manajemen untuk mendukung kelancaran bisnis serta untuk meningkatkan efisiensi serta optimalisasi operasi bank dalam menghadapi harapan nasabah yang semakin tinggi dan kompleks. Salah satu yang menjadi perhatian adalah keberhasilan penanganan kredit bermasalah melalui penerapan teknologi seperti *eColl* yang terintegrasi dengan sistem manajemen risiko bank.

Dari sisi pengelolaan likuiditas, kami juga mengharapkan tim manajemen berhati-hati dalam menyeimbangkan kebutuhan dana jangka pendek dengan penyaluran kredit berjangka waktu panjang khususnya bagi penyaluran kredit bagi perumahan. Untuk itu, kami mendukung upaya-upaya yang dilakukan manajemen dalam mencari alternatif pendanaan melalui penerbitan KIK-EBA atau instrumen lainnya selain mendorong peningkatan penghimpunan dana murah yang telah dilakukan sepanjang 2010.

supported by the strengthening Rupiah from Rp 8.900 - Rp 9.000 per USD. One of the impacts of this was that companies and the public were more flexible in taking decisions to borrow money for purchasing houses and daily necessities. We see the entire economic condition as an essential key for banking growth in 2010.

In the first year of becoming a publicly listed company, the Board of Commissioners of Bank BTN defined a number of policies and directions for the Board of Directors, especially with regards to business prospects. These aimed to keep Bank BTN focused on the housing finance business. This aimed to support the government's housing program targeted at lower income families which we believe will continue to grow with a strong market potential in the future in line with improvements in Indonesia's economic condition.

The Board of Commissioners hope the improvements to Bank BTN's Good Corporate Governance (GCG) practices to be sustainable and enhanced. With the existing road map and external assessments by independent parties, we are convinced that the implementation and socialization of GCG principles to all employees will continue to improve.

We also supported reorganization efforts by management substantiate the business flow and to enhance efficiency and optimal banking operations in the face of higher and more complex customer expectations. One of things noted was the accomplishment in handling non performing loans through technological applications such as *eColl* which is integrated with the Bank's risk management system.

On liquidity management, we also expect that management will always be prudent in balancing the short term fund requirements with the disbursement of long term loans especially mortgages. Therefore, we support efforts in finding funding alternatives through the issuance of Asset Backed Securities Collective Investment Contracts or other instruments to complement greater efforts toward increasing our low-cost funding that have been sought over 2010.

Sebagai bank yang terus berkembang, kami bangga dapat membantu pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang senantiasa bertambah seiring dengan meningkatnya laba usaha. Namun di sisi lain, kami menyadari bahwa kecukupan modal adalah satu hal yang wajib dipenuhi agar kami bisa bergerak leluasa. Melihat tingginya kebutuhan permodalan dan dana jangka panjang bagi bank seperti Bank BTN yang fokus pada pembiayaan perumahan, kami mendukung usulan manajemen untuk menurunkan *Dividend Payout Ratio* menjadi kurang dari 30% agar mampu tumbuh lebih tinggi lagi di tahun-tahun mendatang, tentunya setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

KINERJA KEUANGAN 2010

Selama tahun 2010, kinerja keuangan Bank BTN menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan yang meningkat 26,55% dari Rp 40,73 triliun menjadi Rp 51,55 triliun. Oleh karena itu, Laba Sebelum Pajak meningkat 54,18% dari Rp 745,82 miliar pada akhir 2009 menjadi Rp 1,25 triliun pada akhir 2010. Hasil positif juga ditunjukkan oleh rasio-rasio keuangan yang penting seperti CAR yang mencapai 16,74%, LDR 108,42% dan NPL 3,26%. Rasio NIM juga mengalami peningkatan menjadi 5,93%, meski tren suku bunga pinjaman cenderung kompetitif akibat persaingan yang ketat di industri perbankan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Kami menyadari, sebagai perusahaan publik Bank BTN dapat mencetak kinerja terbaik hanya dengan melaksanakan tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang ditetapkan oleh Bapepam-LK dan Bank Indonesia serta mengacu kepada *international best practices*. Untuk itu, kami berusaha menjunjung tinggi prinsip transparansi perusahaan dalam rangka menjaga kinerja Perusahaan dan mengawasi pelaksanaan praktek-praktek GCG khususnya di level Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Komisaris.

As a bank that is continuously growing, we are proud to have the capability to support the Country's development through tax payments that continue to rise in line with the growth of our operating income. However, we are aware that capital adequacy is an obligation to move forward. Seeing the high demand for capital and long-term funds for banks focused on housing finance like Bank BTN, we support the management's recommendation to lower the *Dividend Payout Ratio* to less than 30% in order to enable us to book even higher growth in the coming years. This will be effective upon approval at the General Meeting of the Shareholders.

FINANCIAL PERFORMANCE IN 2010

Throughout 2010, the financial performance of Bank BTN produced satisfactory results. This has been signified by the growth in Loans and Financing which surged 26.55% from Rp 40.73 trillion to Rp 51.55 trillion. Hence, Income before tax rose by 54.18% from Rp 745.82 billion at the end of 2009 to Rp 1.25 trillion at the end of 2010. Positive results were also identified in the key financial ratios such as CAR which reached 16.74%, LDR at 108.42% and NPL at 3.26%. The NIM ratio was also up to 5.93%, notwithstanding the competitive trend of loan interest rates ensuing intense competition in the banking sector.

IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

We realize that as a publicly listed company Bank BTN can only achieve the best performance if it implements the principles of Good Corporate Governance (GCG) stipulated by Bapepam-LK and Bank Indonesia in reference to international best practices. For that purpose, we strive to uphold corporate transparency in overseeing Bank BTN's performance and will supervise GCG practices especially at the Board of Commissioners' level and in committees under the BOC.

Komite Audit telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta memberikan saran kepada Direksi di tahun 2010. Untuk menjaga kontinuitas perusahaan secara profesional, Komite Remunerasi dan Nominasi tahun lalu membentuk sistem penyingkapan atau *talent pool* yang berfungsi untuk mencari, mengusulkan, dan melakukan uji kelayakan terhadap calon Direksi dan Komisaris. Dengan adanya *talent pool*, kami dapat memastikan kepada para pemangku kepentingan bahwa Bank BTN dapat mengantisipasi kekosongan pos jabatan tertentu tanpa menghambat proses operasional Perusahaan. Sepanjang tahun 2010, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercermin dalam hasil pemantauan dan pedoman terkait kebijakan manajemen risiko.

PERUBAHAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

Dalam kesempatan ini, saya atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris mengucapkan selamat bergabung kepada Bapak Deswandhy Agusman yang sejak Juli 2010 diangkat sebagai salah satu Komisaris Independen Bank BTN. Kami percaya pengalaman Beliau akan semakin memperkuat tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab bagi Bank BTN.

OPTIMIS MENYONGSONG HARI DEPAN

Dewan Komisaris menilai, bisnis properti dan perumahan yang tak pernah surut menjadi prospek bagi Bank BTN untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Meskipun demikian, jajaran Direksi perlu tetap mempertimbangkan segala risiko dan tantangan di sektor finansial dengan memelihara likuiditas yang cukup, meningkatkan efisiensi, serta menjaga kualitas aktiva produktif Bank BTN. Selain itu peningkatan dana pihak ketiga, khususnya yang berbasis biaya murah menjadi tantangan tersendiri

The Audit Committee delivered reports, suggestions and notes on various Bank BTN activities requiring the attention of the Board of Commissioners to support the execution of its duties and supervisory functions as well as to propose recommendations to the Board of Directors in 2010. To maintain Bank BTN's continuity in a professional manner, the Remuneration and Nomination Committee set up a talent pool whose function was to search, propose and conduct fit and proper tests with candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners. With the existence of this talent pool, we can assure our stakeholders that Bank BTN is able to anticipate certain unoccupied official positions without interrupting Bank BTN's operational process. Throughout 2010, the Risk Monitoring Committee performed its duties and responsibilities as reflected in the monitoring results and guidelines pertaining to risk management policies.

CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS STRUCTURE

On behalf of all members of the Board of Commissioners, I would like to welcome Bapak Deswandhy Agusman who was appointed as one of Bank BTN's Independent Commissioners in July 2010. We believe that his experience will strengthen the duties and functions of the Board of Commissioners in realizing its responsibilities for Bank BTN.

OPTIMISM IN FACING THE FUTURE

The Board of Commissioners views that the property and housing business which never decelerates presents an opportunity for Bank BTN to continue growing in a sustainable way. Nonetheless, the Board of Directors must always consider any risk or challenge in the financial sector by maintaining adequate liquidity, enhancing efficiency and maintaining the quality of productive assets. Moreover, the improvements in third-party deposits, especially low-cost funds will become a challenge for

bagi manajemen dalam waktu ke depan ini melalui penambahan jaringan dan upaya pemasaran yang berkualitas.

Bank BTN juga berkomitmen untuk melaksanakan serta memperbaiki penerapan prinsip GCG secara berkesinambungan di seluruh lini organisasi. Untuk itu, Bank BTN terus memperbaiki kunci indikator kinerja atau *Key Performance Indicator* (KPI) di setiap tingkat organisasi, mulai dari karyawan hingga manajemen. Untuk melengkapi hal ini, Dewan Komisaris melaporkan bahwa Direksi Bank BTN telah melaksanakan evaluasi atas berbagai kebijakan dan produser internal agar dapat memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Semangat, pengabdian, serta kebulatan visi yang telah dituangkan oleh segenap jajaran karyawan dan Direksi dalam pencapaian kinerja 2010 menjadi kebanggaan khusus bagi Dewan Komisaris. Kami menyadari, pencapaian yang sangat baik tahun 2010 merupakan hasil jerih payah dan dedikasi dari setiap Karyawan dan Direksi. Atas kinerja yang baik tersebut, akhir kata Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap jajaran karyawan dan Direksi Bank BTN, serta kepada para pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan pada Bank BTN selama ini.

management requiring thorough network expansion and increased quality of our marketing strategy.

Bank BTN is committed to applying and improving sustainable GCG principles throughout the organization. To achieve this Bank BTN is strengthening its key performance indicators at every level, from staff to management. The Board of Commissioners reported that Bank BTN Directors have evaluated the policies and internal producers to ensure compliance with all applicable laws.

The spirit, dedication and solid vision that have been actualized by all employees and the Board of Directors into the achievements in the Bank's 2010 performance are of special pride for the Board of Commissioners. We realize that the great achievements in 2010 are the results of the utmost efforts and dedication of every employee and the Board of Directors. For this exemplary performance, the Board of Commissioners would like to end this report by extending our appreciation and gratitude to all employees and the Board of Directors of Bank BTN, as well as its stakeholders for all the supports and trust given to Bank BTN this year.

Jakarta, 31 Desember 2010



Zaki Baridwan
Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner (Independent)

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS





1. Zaki Baridwan

Komisaris Utama (Independen)

President Commissioner (Independent)

2. Subarjo Joyosumarto

Komisaris (Independen)

Commissioner (Independent)

3. Mulabasa Hutabarat

Komisaris

Commissioner

4. Deswandhy Agusman

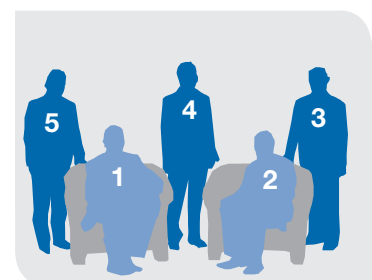
Komisaris (Independen)

Commissioner (Independent)

5. Gatot Mardiwasisto

Komisaris

Commissioner



LAPORAN DIREKSI REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS



Dengan mengacu kepada tahapan implementasi Strategi Bisnis 2012, Bank BTN senantiasa memperkuat fokus pada kredit perumahan melalui perbaikan di berbagai bidang sepanjang tahun 2010.

In reference to the implementation stages of Business Strategy 2012, Bank BTN continuously strengthens its focus on housing loans through improvements in various areas throughout 2010.

Para pemegang saham yang terhormat,

Tanpa terasa setahun lebih Bank BTN telah menjadi perusahaan publik sejak tercatat di Bursa Efek Indonesia pada akhir 2009. Banyak hal yang telah kami lalui dan kerjakan di sepanjang tahun 2010 yang patut kami laporkan dalam laporan tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

KINERJA PERUSAHAAN 2010

Tahun 2010 merupakan masa penting bagi Bank BTN dimana kami meletakkan dasar-dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan baik dari sisi organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, sistem informasi dan teknologi, manajemen risiko sampai penerapan tata kelola yang baik. Hasilnya, Bank BTN tetap konsisten dalam mencetak pertumbuhan usaha dan perolehan laba di tahun 2010 jika dibandingkan dengan pencapaian selama 2009.

Hingga akhir Desember 2010, Bank BTN telah mencetak laba bersih sebesar Rp 915,94 miliar atau tumbuh 86,75% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (y-o-y). Kontribusi laba ini sebagian besar diperoleh dari pendapatan bunga bersih bank yang jumlahnya mencapai Rp 3,35 triliun, atau tumbuh 45,72% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Dear respected shareholders,

One year has passed swiftly since Bank BTN was listed as a public company in the Indonesia Stock Exchange at the end of 2009. We have done many things during 2010 to realize of our responsibility to our shareholders and stakeholders and we would like to report these achievements in this Annual Report.

COMPANY PERFORMANCE IN 2010

2010 was a significant year for Bank BTN we laid down the foundations for sustainable growth, by building our organization, human resources, infrastructure, information technology (IT), and risk management systems, and good corporate governance practices. As a result Bank BTN consistently delivered growth in its business and income during 2010, compared to 2009.

By the end of December 2010, Bank BTN had booked net income of Rp 915.94 billion or 86.75% year-on-year growth. The contribution was mostly from the Bank's net interest income, which amounted to Rp 3.35 trillion, surging by 45.72% from the corresponding period in the previous year.

Dari sisi pertumbuhan aset, per 31 Desember 2010 Bank BTN berhasil meraih peningkatan hingga 17,00% menjadi Rp 68,39 triliun dari Rp 58,45 triliun pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jumlah aset tersebut, Bank BTN tetap berada dalam kelompok 10 bank umum nasional dengan aset terbesar.

Highlighting the growth of total assets, as 31 December 2010, Bank BTN succeeded in booking an increase of 17.00% or Rp 68.39 trillion from a total of Rp 58.45 trillion in assets last year. Based on the size of those assets, Bank BTN remained in the 10 biggest commercial banks in assets category.

Sedangkan dari sisi rasio permodalan, di tengah gencarnya ekspansi kredit yang kami lakukan di tahun 2010, rasio kecukupan modal (CAR) Bank BTN tercatat sebesar 16,74%.

Regarding capital ratio, amidst our aggressive loan expansion in 2010, Bank BTN's capital adequacy ratio (CAR) stood at 16.74%.

Rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) Bank BTN per 31 Desember 2010 sebesar 108,42% memperkuat komitmen kami dalam menjalankan peran sebagai lembaga intermediasi perbankan secara aktif yang fokus dalam pembiayaan bidang perumahan.

Bank BTN's loan to deposit ratio (LDR) as of 31 December 2010 was 108.42% which has reinforced our commitment to taking an active role as a banking sector intermediary directing our focus toward housing finance.



FOKUS PADA STRATEGI BISNIS 2012

Berlandaskan pada strategi bisnis 2012 yang kami bagi dalam lima bidang; kredit, dana, strategi jasa, pengendalian dan manajemen risiko serta strategi pengembangan organisasi dan SDM, maka pencapaian dan kinerja yang telah kami raih sepanjang tahun 2010 adalah sebagai berikut:

FOCUS ON 2012 BUSINESS STRATEGY

Bank BTN has divided its 2012 business strategy into five areas: loans, funding, service, risk controll and management, and organizational and HR development. The following are our strategic accomplishments and performance in 2010:

Bidang Kredit

Sesuai komitmen Bank BTN untuk menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia yang telah menjadi fokus usaha sejak tahun 1974, maka di tahun 2010 Bank BTN secara konsisten kembali menempati posisi pertama sebagai bank dengan pangsa pasar tertinggi (27%) dalam penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) di Indonesia. Total pinjaman yang disalurkan meningkat sebesar 26,55% mencapai Rp 51,55 triliun dibanding periode yang sama di akhir tahun 2009 sebesar Rp 40,73 triliun. Pencapaian ini jauh di atas pertumbuhan kredit secara nasional yang hanya berkisar di angka 22% di tahun 2010. Selain itu, Bank BTN sangat dominan dalam penyaluran KPR Subsidi dimana kami menguasai 97% total pemberian KPR subsidi baru hingga 31 Desember 2010.

Mengacu kepada strategi bisnis 2012, Bank BTN menargetkan komposisi antara kredit perumahan dengan kredit non-perumahan maksimal di posisi 85% : 15%. Hingga akhir 31 Desember 2010, 90,9% kredit yang disalurkan merupakan kredit perumahan yang terdiri dari 72,69% untuk KPR, 11,03% untuk kredit konstruksi perumahan serta sisanya kredit bagi industri terkait perumahan.

Tujuan kami mendiversifikasikan kredit pada kredit non perumahan maksimal sebesar 15% dari total penyaluran kredit adalah untuk mengurangi risiko konsentrasi pinjaman, mengurangi *maturity mismatch* dan meningkatkan *Net Interest Margin* (NIM). Namun hal ini tidak mengurangi fokus kami dalam menjadi pemimpin dalam pembiayaan perumahan di Indonesia.

Prinsip kehati-hatian mewarnai Bank BTN dalam menjalankan fungsi intermediasi perbankan yang tercermin dari stabilnya angka rasio kredit bermasalah/*Net Performing Loan* (NPL) di angka 3,26% di tengah tingginya pertumbuhan kredit sepanjang 2010.

Dari sisi pelayanan bagi nasabah kredit, di tahun 2010 kami melanjutkan upaya percepatan proses kredit melalui program *Loan Origination System* (*eLoan*) seraya melakukan penyempurnaan *Credit Scoring Model* (CSM). Standarisasi proses aplikasi kredit 1 - 5 - 1 (1 hari persetujuan kredit, maksimal 5 hari proses kredit setelah dokumen lengkap, 1 hari proses pencairan kredit) juga terus ditingkatkan penerapannya di seluruh kantor cabang Bank BTN. Pada bidang pembinaan debitur untuk menjaga

Loans

Bank BTN is committed to being the market leader in Indonesian housing finance, which has been our business focus since 1974. Therefore in 2010, Bank BTN was consistently in the top position with the highest market share (27%) in mortgage disbursements in Indonesia. Total loans disbursed rose by 26.55% to Rp 51.55 trillion from Rp 40.73 trillion in 2009. This was well above the nation's loan growth, which stood at 22% in 2010. In addition, Bank BTN was distinctively dominant in channeling subsidized mortgages we tapped 97% of all new subsidized mortgages by 31 December 2010.

In reference to our business strategy for 2012, Bank BTN targeted non-housing loans to reach maximum 85% : 15% ratio. As of the 31 December 2010, 90.9% of our disbursed loans were housing-related loans consisting of 72.69% for mortgages, 11.03% for housing construction loans and the remainder for loans for housing-related industries.

Diversifying our non-housing loans to 15% of total loans disbursed was intended to lower our loan concentration risk, reduce maturity mismatch and increase our *Net Interest Margin* (NIM). Nevertheless, this approach did not diminish our focus on being the leading bank in housing finance in Indonesia.

Prudent principles guide Bank BTN in playing its banking intermediary function, which are reflected in our *Non Performing Loan* (NPL) ratio which remained stable at 3.26% in the midst of high loan growth throughout 2010.

Regarding our service to loan customers, in 2010 we continued our efforts to accelerate the loan process through a *Loan Origination System* (*eLoan*) program while enhancing our *Credit Scoring Model* (CSM). The 1-5-1 standardized loan application process (1 day loan approval, maximum 5 days loan administration process, 1 day for loan disbursement) has undergone continuous improvements and been implemented by all of Bank BTN's branch offices. To maintain the quality of disbursed loans, in September

kualitas kredit yang disalurkan, pada September 2010 kami melakukan *pilot project* di Kantor Cabang Tangerang untuk penerapan *Collection & Recovery Management System-electronic Collection (eColl)*. Diharapkan implementasi *eLoan* dan *eColl* dapat mentransformasikan proses bisnis kredit menjadi lebih efisien dan efektif, cepat dan berkualitas.

Bidang Dana

Sebagai perwujudan dari visi kami untuk menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan, peningkatan dana pihak ketiga, khususnya giro dan tabungan serta perbaikan komposisi dana dengan dana jangka panjang serta mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi fokus penting bagi kami. Implementasi strategi peningkatan penghimpunan dana murah (giro dan tabungan) dilakukan dengan memperluas gerai dan jaringan kantor serta ATM yang dibarengi dengan penambahan jenis produk dan jasa bagi para nasabah kami.

Sepanjang 2010, kami telah membuka 130 kantor dan gerai baru dengan penambahan 217 unit ATM di berbagai lokasi strategis di seluruh Indonesia. Untuk meraih dan meningkatkan jangkauan jaringan kami ke para nasabah, Bank BTN terus meningkatkan kerjasama dengan Kantor Pos dimana saat ini sudah terdapat 2.661 kantor pos yang terhubung secara *Real Time On-Line* dengan Bank BTN.

Bank BTN juga telah meluncurkan rangkaian produk-produk baru dan melakukan peluncuran ulang (*relaunch*) serta *rebranding* produk-produk tabungan seperti Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara, Tabungan BTN Haji serta Tabungan BTN Batara dan BTN Prima. Hasilnya, pada akhir Desember 2010, total dana pihak ketiga tumbuh 18,23% mencapai Rp 47,55 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 40,21 triliun.

Sebagai bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan dimana jangka waktu kredit rata-rata lebih dari satu tahun, maka tantangan Bank BTN adalah mencari alternatif pendanaan jangka panjang untuk mengurangi *maturity mismatch* namun tetap optimal dari sisi biaya dana sehingga tidak membebani *margin* bunga bersih. Dari sisi perbaikan komposisi dana jangka panjang (*wholesale*) untuk menciptakan diversifikasi dan memperbaiki profil *maturity* dana, Bank BTN

2010 Bank BTN conducted a pilot project in a branch office in Tangerang to implement and electronic Collection and Recovery Management System (eColl). We expected eLoan and eColl to transform our loan business into a more efficient and effective process with faster and better quality.

Funding

To realize our vision of being the leading bank in housing finance, the increase in third party deposits particularly to current and saving accounts together with improvements in our funding mix, employing long-term funds became a key focus in securing sustainable growth. The implementation of our growing low-cost fund (current and saving accounts) collection strategy was carried out by expanding our outlets and introducing new types of products and services for our customers.

Throughout 2010, we opened 130 branch offices and outlets with an addition of 217 ATMs in strategic locations throughout Indonesia. To win more customers and broaden our outreach to customers, Bank BTN continues to enhance its collaboration with the Post Office, Bank BTN currently has a total of 2,661 post offices connected online real-time.

Bank BTN has launched a series of new products and re-launched and rebranded its saving products such as Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara, Tabungan BTN Haji, Tabungan BTN Batara and BTN Prima. As a result, at the end of December 2010 third party funds had grown by 18.23%, standing at Rp 47.55 trillion compared to Rp 40.21 trillion in the previous year.

With its focus on housing finance for which the average loan maturity is more than one year, the challenge is seeking alternative long-term funds to minimize the maturity mismatch and remain effective in managing the cost of funds so they do not affect our net interest margin. To improve our long-term/wholesale funds composition and in a bid to diversify and improve our fund maturity profile, Bank BTN has issued Asset Backed Securities Collective Investment Contracts the Mortgage-

melakukan penerbitan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA)/*Mortgage-Backed Securities* (MBS) selain Obligasi. Sepanjang 2010, Bank BTN berhasil meluncurkan KIK EBA sebesar Rp 750 miliar, di samping Obligasi BTN XIV sebesar Rp 1,65 triliun.

Bidang Jasa

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, dari sisi strategi jasa kami berupaya untuk meningkatkan *fee-based income* dengan memanfaatkan *database* nasabah khususnya yang masuk dalam kategori *high value customers* serta memperluas cakupan layanan produk yang bisa kami berikan ke nasabah (*product range*).

Pada tahun 2010, kami membuka layanan *priority banking* pada kantor cabang di Jakarta. Kami juga mulai memperkenalkan rangkaian produk kartu debit dan kartu kredit. *Fee-based income* per 31 December 2010 meningkat 43,24% mencapai Rp 369 miliar dibanding Rp 257 miliar di tahun sebelumnya.

Keberhasilan penerapan strategi jasa juga berhubungan erat dengan peningkatan sistem informasi dan teknologi (IT), khususnya penerapan sistem *Enterprise Data Warehouse System*. Hal ini memungkinkan Bank BTN melakukan segmentasi nasabah dan memperkenalkan produk dan jasa perbankan baru sesuai dengan segmen nasabah yang lebih akurat serta melakukan proses data untuk mendukung penyusunan strategi usaha.

Strategi Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari sisi strategi organisasi dan SDM, sepanjang 2010 kami memperkuat penerapan budaya perusahaan POLA PRIMA yang fokus pada Pelayanan Prima, Inovasi, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Kerjasama. Tujuannya adalah agar dapat mendorong para karyawan dan unit kerja untuk fokus pada pelayanan dan kinerja dalam rangka mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Disamping itu, pada bulan Maret 2010 kami melakukan implementasi struktur organisasi baru di kantor pusat dalam bentuk reorganisasi, yang lebih fokus kepada nasabah (*customer centric*)

Backed Securities (MBS) and bonds. Throughout 2010, Bank BTN issued Rp 750 billion in MBS and Rp 1.65 trillion in BTN Bonds XIV .

Service

To support sustainable business growth, through our service strategy, we strive to increase our *fee-based income* by utilizing our customer database, paying particular attention to 'high value customers'. Bank BTN has also stretched our product range coverage for customers.

In 2010, we opened a priority banking service in our branch offices in Jakarta and started introducing an expanded range of debit and credit cards. As of 31 December 2010, our *fee-based income* had grown by 43.24% to Rp 369 billion compared to Rp 257 billion in the previous year.

Bank BTN's success in implementing our service strategy was closely linked with the improvements we made to our IT system, especially with the implementation of the Enterprise Data Warehouse System. The system has allowed Bank BTN to carry out customer segmentation introduce new banking products and services that are more accurately matched to our customer segments and perform data processes to support our business strategy mapping.

Organizational and Human Resources (HR) Strategy

In this area, throughout 2010 we reinforced the implementation of our corporate culture POLA PRIMA focusing on Service Excellence, Innovation, Exemplary Behavior, Professionalism, Integrity and Teamwork to encourage employees and working units to focus on service and performance in a bid to attain a sustainable competitive advantage.

In March 2010 we also implemented a new organizational structure at the head office. The re-organization focused on customer-centric service and classified our business into consumer

dan membagi segmentasi bisnis pada perbankan konsumen dan komersial. Dengan struktur organisasi ini, Bank BTN diharapkan lebih siap dalam menangani bisnis yang semakin besar dan kompleks, serta tangguh menghadapi persaingan yang kian ketat. Hal ini juga dilatarbelakangi upaya akomodasi Bank BTN atas hadirnya unit-unit bisnis baru seperti *Card & Electronic Banking* dan *Priority Banking & Bancassurance* serta mempercepat pertumbuhan bisnis.

Program reorganisasi secara keseluruhan meliputi Kantor Pusat (*Head Office*) yang terdiri atas divisi/desk dan kantor wilayah (*field organization*), serta kantor cabang dan gerai di bawahnya. Implementasi reorganisasi kantor pusat ini berdasarkan konsep SBU-SSU (*strategic business unit-strategic supporting unit*) agar pelayanan kepada nasabah menjadi semakin fokus sesuai karakteristik masing-masing segmen. Sementara untuk reorganisasi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (Kankas/Kios) yang dilaksanakan pada tahun 2011 dirancang berdasarkan konsep sentralisasi atau *hub&spoke*. Adapun fungsi KCP dan Kankas adalah sebagai *service outlet* yang memberikan layanan (*spoke*) sedangkan fungsi administrasi dan proses/*operation* dilakukan secara sentral di kantor cabang (*hub*).

Dengan penerapan reorganisasi ini, kami mengharapkan operasional Bank BTN akan semakin efisien karena kebutuhan personil telah berkurang, dan di sisi lain proses bisnis menjadi semakin cepat karena didukung oleh sistem IT. Selain itu, dengan penerapan struktur baru, organisasi Bank BTN juga akan fokus pada spesialisasi karyawan yang dapat mengoptimalkan sistem *grading* dan *job planning* karir karyawan yang bersangkutan. Bank BTN juga mulai bisa melakukan pengukuran dan penilaian kinerja melalui *Key Performance Indicators* yang lebih jelas dan terukur serta menerapkan *balanced scorecards* untuk manajemen kinerja yang lebih efisien dan efektif.

Pengendalian dan Manajemen Risiko

Kami menyadari bahwa bisnis bank terkait erat dengan pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko tidak lepas dari penerapan sistem pengendalian (*control*) dari internal maupun eksternal yang keseluruhannya merupakan bagian dari sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

and commercial banking segments. With a new organizational structure, Bank BTN is expected to be more prepared in managing a broader and more complex business that is resilient to increased intense competition. Bank BTN's efforts accommodate our new business units such as *Card and Electronic Banking, Priority Banking and Bancassurance*, and will accelerate our business growth.

The overall re-organization program covered our head Office, which consists of all national divisions/ desks and regional offices (*field organizations*) as well as branch offices and their outlets. The head office re-organization was based on the (*strategic business unit-strategic supporting unit*) concept to sharpen our service focus on our customers based on segment characteristics. The reorganization of Branch Offices, Sub Branch Offices and Cash Outlets, will be carried out in 2011 and is designed around the centralization/hub and spoke concept. Cash outlets function as service providers (*spokes*) while branch offices are responsible for the administrative and operational functions (*hubs*).

We expect that the re-organization of Bank BTN operations will make us more efficient, as it will require fewer personnel, and improvements to our IT systems will increase the speed and effectiveness with which we carry out our business processes. In addition, the new organizational structure will focus on employee specialization, which can optimize the grading and job planning system for career development. Bank BTN has initiated a performance measurement and rating system, using *Key Performance Indicators* (KPIs) in a more defined and quantifiable way as well as implementing *balanced scorecards* for a more efficient and effective performance management.

Risk Control and Management

We realize that Bank BTN's business is closely related to risk management. Risk Management cannot be separated from the implementation of internal and external control systems which support overall good corporate governance (GCG).

Selama 2010, upaya-upaya peningkatan manajemen risiko dilakukan melalui penerapan kerangka kerja Basel II berdasarkan *road map* yang disusun oleh Bank Indonesia mulai dari pembentukan *steering* dan *organizing committee* hingga melakukan *stress testing* dan persiapan implementasi kerangka kerja Basel III. Disamping itu, Bank BTN juga telah memiliki Komite Manajemen Risiko sebagai organ Direksi dalam melakukan pengawasan aktif pengelolaan risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko dimana sepanjang 2010 telah melaksanakan fungsi pemantauan risiko pada tingkat divisi dan kantor cabang di bawah koordinasi pengawasan oleh Komite Pemantau Risiko di level Dewan Komisaris.

PENERAPAN TATA KELOLA

Bagi Bank BTN, penerapan GCG bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan namun merupakan elemen fundamental yang mengacu kepada *international best practices*. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan GCG berarti memfasilitasi *value driver* bekerja optimal, sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan (*value creation*).

Sepanjang tahun 2010, serangkaian langkah strategi dilakukan secara intensif guna membangun, menerapkan dan mengevaluasi secara intensif proses implementasi GCG. Langkah ini merupakan rangkaian *road map* yang terprogram, dengan sasaran akhir terwujudnya Bank BTN sebagai salah satu perusahaan dengan praktik tata kelola terbaik di masa depan.

Demi menjaga agar *road map* dapat terwujud maka ditetapkan berbagai strategi di awal 2010 antara lain *awareness programs*, yang kemudian dilanjutkan dengan proses institusionalisasi, internalisasi, GCG *assessment* oleh pihak ketiga (*third party*) dari CGCG FEB UGM serta monitoring berkelanjutan dengan dukungan IT. Penggunaan pihak ketiga untuk pertama kalinya dalam melakukan *assessment* GCG pada Bank BTN membuktikan keseriusan dan komitmen Bank BTN dalam penerapan GCG.

Throughout 2010 efforts to enhance our risk management systems were taken through the implementation of the Basel II Framework based on Bank Indonesia's road map, starting from the establishment of the steering and organizing committees to stress testing and preparations to implement the Basel III framework. In addition, Bank BTN has a Risk Management Committee under the Board of Directors which assumes an active supervisory role for the risk management and the Risk Management Working Unit. The unit performs a risk supervision function at the division and branch office levels under the coordination of the Risk Monitoring Committee at the Board of Commissioners level.

IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE

For Bank BTN, GCG is not simple implemented to comply with Indonesian laws and regulations it is a fundamental element international best practices. Bank BTN's management believes that GCG is value driver that will enhance value creation.

Throughout 2010, a series of strategic actions were taken intensively to build, implement and evaluate Bank BTN's GCG in a continuous manner. These were part of series of programmed road maps, with the goal of making Bank BTN's good governance practices among the best in Indonesia.

To ensure the realization of the road map, in early 2010 Bank BTN committed to a number of strategies including awareness programs which were supported with enhanced institutionalization process, internalization an external GCG assessment by CGCG FEB UGM as well as sustainable monitoring with IT support. The engagement of a third party for the first time to do our GCG assessment demonstrates the Bank's seriousness and commitment to implementing GCG.

PROSPEK USAHA

Indonesia dengan kondisi ekonomi yang terus tumbuh dan struktur masyarakat bawah dan menengah yang jumlahnya bertambah setiap tahun merupakan prospek utama bagi industri perumahan dan pembiayaan kepemilikan rumah sebagaimana fokus usaha Bank BTN. Rasio kontribusi KPR terhadap Produk Domestik Bruto yang terendah di kawasan Asia menunjukkan tingkat kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat rendah.

Disamping itu, penetrasi KPR di Indonesia akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan penduduk di Indonesia.

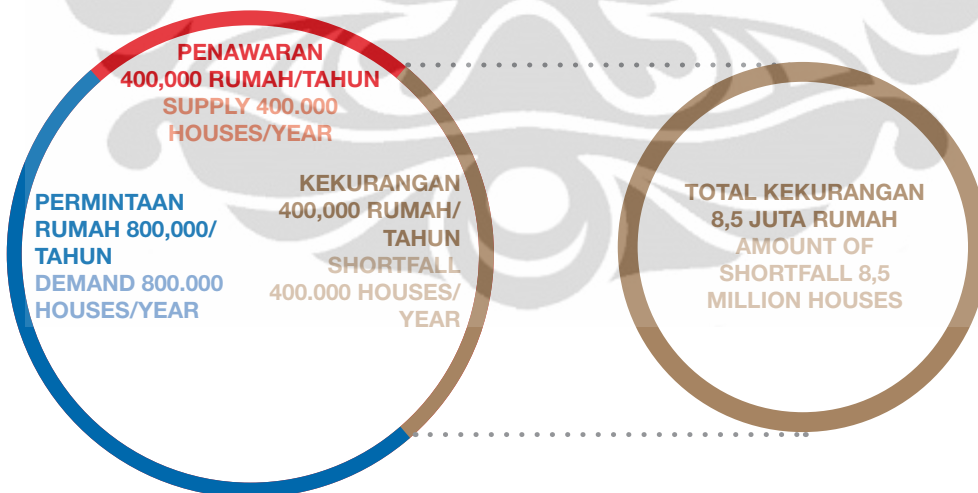
Data dari Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa jumlah permintaan rumah mencapai 800.000/tahun, sementara penawaran hanya 400.000/tahun. Jumlah kekurangan (*backlog*) hingga akhir 2009 telah mencapai 8,5 juta rumah.

BUSINESS PROSPECTS

Indonesia, with its ever-growing economy and large lower and middle populations that continue to increase every year holds substantial potential for the housing industry and house ownership financing, in which Bank BTN is a leading player. With the lowest ratio of mortgage contributions to the Gross Domestic Product in the Asian region house ownership in Indonesia remains very marginal.

However, mortgage penetration in Indonesia continues to increase in line with the rise in per capita income and growth in the Indonesian economy and population.

Statistics from the Ministry of Public Housing show that housing demand reached 800,000/year, while the supply remains at 400,000/year. The backlog at the end of 2009 reached 8.5 million houses.



Sumber: Estimasi Kantor Menpera
Source: Public Housing Ministry Office Estimation

- Demand
Permintaan
- Supply
Penawaran
- Shortfall
Kekurangan

Berdasarkan data-data di atas, maka manajemen yakin pertumbuhan masyarakat kelas menengah Indonesia yang cepat akan berdampak pada meningkatnya permintaan rumah dan pertumbuhan KPR pada masa yang akan datang. Hal ini akan memberikan peluang bagi pertumbuhan yang berkelanjutan bagi Bank BTN yang telah memiliki posisi sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan (KPR) dengan infrastruktur dan SDM yang berpengalaman di bidang kredit perumahan dan hal lain yang berkaitan dengan perumahan.

APRESIASI

Kerja keras tim manajemen dan seluruh karyawan Bank BTN telah menghasilkan pencapaian dan berbagai penghargaan yang kami terima sepanjang tahun 2010. Atas seluruh pencapaian tersebut, kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah ditunjukkan oleh para karyawan. Kami juga berterima kasih kepada Dewan Komisaris, para pemegang saham, mitra usaha dan nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan. Dukungan Anda semua memberikan arti yang besar bagi keberhasilan Bank BTN dalam melanjutkan pertumbuhan yang berkesinambungan di masa depan yang penuh tantangan.

Based on the above data, the Management is confident that the rapid growth of the middle income population will lead to an increase in housing and mortgage demand in the coming years. This will provide Bank BTN with the opportunity for Bank BTN to create sustainable growth given our solid position as a bank focused on mortgages backed with reliable infrastructure and experienced human resources in mortgage and housing-related loans.

APPRECIATION

The hard work of Bank BTN's management team and all of our employees produced a number of achievements and awards in 2010. We would like to extend our highest appreciation to the dedication demonstrated by our employees for our achievements this year. We also express our gratitude to our Board of Commissioners, shareholders, business partners and all of our customers for the trusts you have given us. Your support is of great importance to Bank BTN's success and integral to our continued sustainable growth in the future.

Jakarta, 31 Desember 2010



Iqbal Latanro
Direktur Utama
President Director

DEWAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS

1. Iqbal Latanro

Direktur Utama
President Director

2. Evi Firmansyah

Wakil Direktur Utama
Vice President Director

3. Saut Pardede

Direktur Financial,
Strategic & Treasury
Financial, Strategic
& Treasury Director

4. Irman A. Zahiruddin

Direktur Mortgage
& Consumer Banking
Mortgage & Consumer
Banking Director

5. Sunarwa

Direktur Risk, Compliance
& Human Capital
Risk, Compliance
& Human Capital Director

6. Purwadi

Direktur Housing
& Commercial Banking
Housing & Commercial
Banking Director



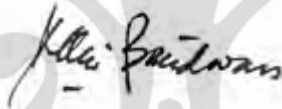


TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN RESPONSIBILITY FOR ANNUAL REPORTING

Laporan Tahunan ini, berikut laporan keuangan dan informasi terkait lainnya, merupakan tanggung jawab Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

This Annual Report, along with the accompanying financial statements and other related information, is the responsibility of the Management of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, and has been approved by the members of the Board of Commissioners whose signatures appear below.

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners



Zaki Baridwan
Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner (Independent)



Subarjo Joyosumarto
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Gatot Mardiwasisito
Komisaris
Commissioner



Deswandhy Agusman
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Mulabasa Hutabarat
Komisaris
Commissioner

Laporan Tahunan ini, berikut laporan keuangan dan informasi terkait lainnya, merupakan tanggung jawab Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan telah disetujui oleh Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

This Annual Report, along with the accompanying financial statements and other related information, is the responsibility of the Management of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, and has been approved by the members of the Board of Directors whose signatures appear below.

DEWAN DIREKSI Board of Directors



Iqbal Latanro
Direktur Utama
President Director



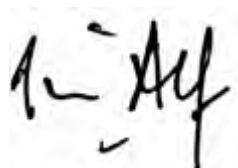
Evi Firmansyah
Wakil Direktur Utama
Vice President Director



Sunarwa
Direktur Risk, Compliance & Human Capital
Risk, Compliance & Human Capital Director



Saut Pardede
Direktur Financial, Strategic & Treasury
Financial, Strategic & Treasury Director



Irman Alvian Zahiruddin
Direktur Mortgage & Consumer Banking
Mortgage & Consumer Banking Director



Purwadi
Direktur Housing & Commercial Banking
Housing & Commercial Banking Director



TINJAUAN BISNIS & OPERASIONAL **BUSINESS & OPERATIONAL OVERVIEW**

Fokus Pada Penciptaan Bisnis & Keunggulan Operasional

**Focus On Creating Business & Operational
Excellence**



TINJAUAN INDUSTRI INDUSTRY OVERVIEW

Sebagai bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan dan kredit terkait sektor perumahan, kinerja Bank BTN di tahun 2010 tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi makro Indonesia yang menggembarakan di tahun tersebut.

With its focus on the housing finance and mortgages, the performance of Bank BTN in 2010 was closely related with the positive growth of Indonesian macro economy in the year.

Perekonomian Indonesia tumbuh memuaskan di level 6,1% pada tahun 2010. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 yang sebesar 4,5%. Di sisi lain, pemerintah berhasil menahan laju inflasi di posisi 7% hingga akhir tahun.

Kondisi ini semakin diperkuat oleh Bank Indonesia (BI) yang berhasil menjaga suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,5%. Sehingga, suku bunga kredit perumahan bank stabil pada kisaran 9% hingga 12%. Tentu hal ini mendorong para pengembang untuk merealisasikan proyek perumahan residensial baru. Di sisi lain, persaingan ketat dalam industri perbankan yang menyebabkan suku bunga KPR/KPA mendorong masyarakat untuk kompetitif sehingga membeli hunian lewat kredit.

KREDIT PERUMAHAN

Berbagai kondisi ekonomi makro yang menggembarakan ini pun berimbas positif pada peningkatan penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit pemilikan apartemen (KPA). Berdasarkan survei Bank Indonesia, total penyaluran kredit properti oleh bank umum tahun lalu mencapai Rp 249,7 triliun. Jumlah ini lebih tinggi 9,87% dibandingkan dengan penyaluran kredit properti hingga kuartal III-2010. Bila dibandingkan dengan total *outstanding* kredit bank umum hingga tahun 2009 yang sebesar Rp 1.743,1 triliun, maka kredit properti tahun 2010 memiliki pangsa sebesar 14,33%.

Penyaluran KPR dan KPA masih merupakan kontributor tertinggi kredit properti dengan pangsa

The Indonesian economy booked a satisfactory growth at 6.1% in 2010. The growth was higher compared to 4.5% in 2009. On another note, the Government managed to curb inflation rate at 7% up until the end of the year.

The condition was further supported by the success of the Central Bank (Bank Indonesia/BI) that managed to maintain the BI's rate at the level of 6.5%. Hence, the interest rate of mortgages was stable at the rate of between 9% and 12%. It definitely has encouraged the housing developers to deliver new residential projects. On another side, the highly competitive banking industry that has led into competitive interest rates for mortgages and apartment loans further pushed the public to buy house through loans.

HOUSING LOANS

The encouraging pictures in the macro economy brought positive impact on the growth of disbursement of mortgages (KPR) and apartment loans (KPA). Referring to of BI's survey, the total property loans disbursed by the commercial banks last year reached Rp 249.7 trillion. The amount was 9.87% higher than the property loans channeled up until QIII-2010. In comparison with the outstanding loans of commercial banks at Rp 1,743.1 trillion in 2009, the market share of property loans in 2010 was 14.33%.

The disbursement of KPR and KPA remained the highest contributor to the property loans, which

59,33%. Sementara kredit konstruksi memiliki pangsa 25,44%, sedangkan pangsa kredit *real estate* mencapai 15,22%.

Hingga tahun 2010 Bank BTN telah menyalurkan *outstanding* kredit sebesar Rp 51,55 triliun. Khusus di tahun 2010, kredit baru yang disalurkan Bank BTN mencapai Rp 21,07 triliun. Dari jumlah posisi kredit ini, sebanyak 90,9% disalurkan sebagai kredit dan pembiayaan perumahan.

Sementara itu, dari posisi kredit dan pembiayaan Bank BTN tersebut, sebesar Rp 37,47 triliun diberikan dalam bentuk KPR dan KPA. Menurut data Bank Indonesia, posisi pinjaman KPR dan KPA yang diberikan oleh seluruh Bank per 31 Desember 2010 adalah Rp 140,59 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa Bank BTN masih menunjukkan kepemimpinannya di industri KPR/KPA dengan pangsa pasar 27%.

Adapun komposisi penyaluran kredit properti industri perbankan tercantum dalam diagram berikut:

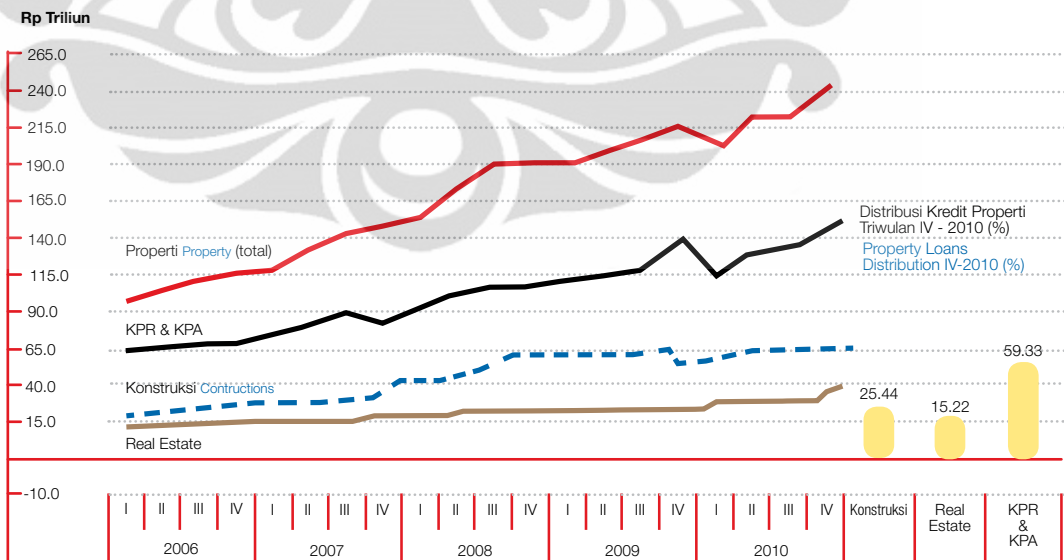
total to 59.33%. Meanwhile, the construction loans accounted to 25.44%, and real estate share was 15.22%.

Up until 2010, Bank BTN channeled a total of Rp 51.55 trillion in outstanding loans. Specifically in 2010, the total of fresh loans disbursed by Bank BTN reached Rp 21.07 trillion. From the amount, 90.9% was disbursed as mortgages and housing finance.

Of the total of loans and financing of Bank BTN, Rp 37.47 trillion was channeled as KPR and KPA. According to BI's data, the total of loans provided by all banks as of 31 December 2010 was Rp 140.59 trillion. The amount signaled Bank BTN's dominance in the KPR/KPA industry with 27% market share.

The composition of property loans in the banking industry was illustrated in the diagram below:

Realisasi Kredit Perbankan terhadap Properti Nasional Realization of Banking Loans to National Property



Sumber: Survei Perkembangan Properti Komersial BI, 2010

Source: BI Commercial Property Development Survey, 2010

Cerahnya industri properti tahun 2010 juga ditandai oleh penyaluran kredit untuk pembangunan perumahan yang tak kalah bergairah. Riset BI menunjukkan, pengembang menutup 54,4%

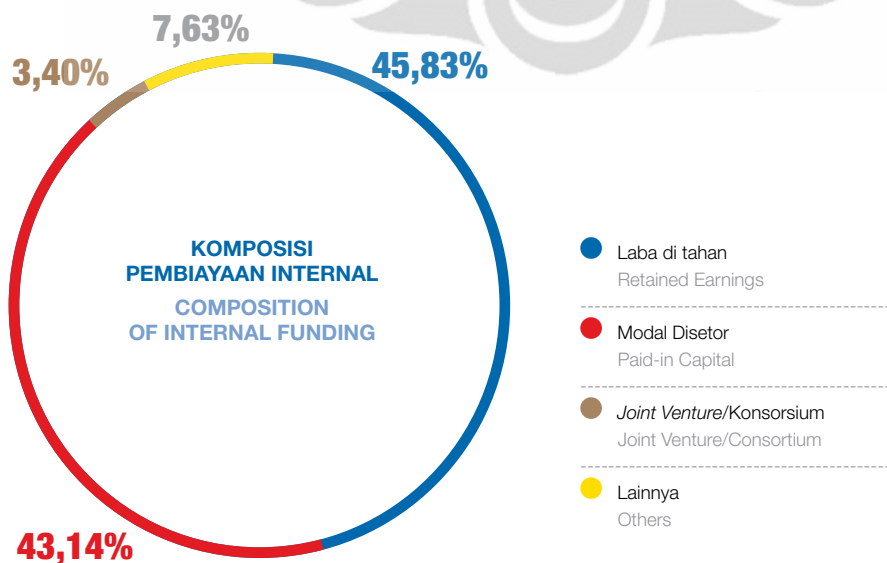
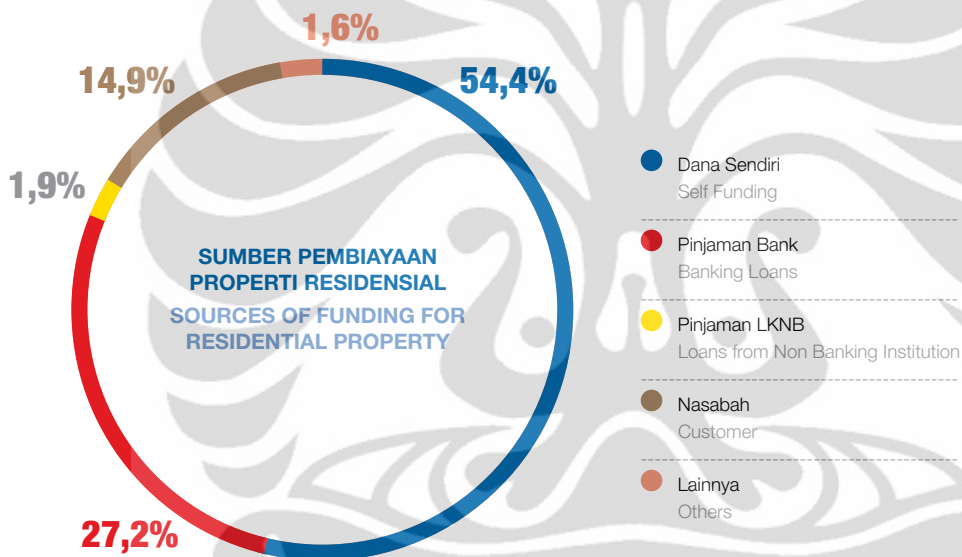
The bullish property industry in 2010 was also marked by the disbursement of loans for the similarly robust housing constructions. The BI's research showed that the housing developers met 54.4%

kebutuhan pembangunan perumahan dari kas internal. Sementara sebanyak 27,2% ditutup dari pinjaman bank, pra-penjualan konsumen sebesar 14,9%, pinjaman lembaga pembiayaan non bank sebesar 1,9%, dan lainnya 1,6%. Hal ini menunjukkan, potensi penyaluran kredit komersial perbankan ke sektor pembangunan perumahan masih besar.

Berikut adalah grafik sumber pendanaan pembangunan perumahan:

financial needs by their internal cash. Meanwhile, 27.2% was provided by the bank loans, advance sales to the consumers accounted for 14.9%, loans by non-banking institutions were at 1.9% and others 1.6%. This means that the potentials of commercial loans disbursement into housing construction sector remained significant.

The source of funding for housing constructions is illustrated in the below graphic:



Sumber : Survei Harga Properti Residensial BI, 2010

Source: BI's Survey on the Residential Property Prices, 2010

PASOKAN PERUMAHAN

Bank BTN memahami, dengan jumlah penduduk sebanyak 240 juta jiwa, atau terbesar keempat di dunia, maka kebutuhan perumahan di Indonesia tak pernah surut. Kembali menengok data BI, penjualan rumah tipe kecil tahun 2010 di 12 kota besar di Indonesia mencapai 36.449 unit, atau tumbuh 8,1% dari 33.694 unit. Di periode sama, rumah tipe menengah berhasil terjual 24.350 unit, atau lebih tinggi 32,5% dari 18.376 unit. Penurunan sebesar 7% justru terjadi pada penjualan rumah tipe besar menjadi 6.907 unit, dari 7.428 unit. Dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa kebutuhan perumahan tak pernah surut seiring dengan pertumbuhan populasi dan pembangunan daerah.

Tingginya kebutuhan akan perumahan juga tercermin dari data Kementerian Perumahan Rakyat yang menyatakan bahwa *backlog* kebutuhan rumah meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 8,5 juta unit di tahun 2009. Pertumbuhan kebutuhan rumah baru sekitar 800.000 unit per tahun dari keluarga baru.

Berikut grafik seputar data penjualan properti residensial di 12 kota besar di Indonesia:

Perkembangan Penjualan Properti Residensial The Statistics of Residential Property Sales

TIPE TYPE	UNIT TERJUAL UNIT SOLD								Quarter to Quarter (%)							
	TW I 2009	II 2009	III 2009	IV 2009	I 2010	II 2010	III 2010	IV 2010	TW I 2009	II 2009	III 2009	IV 2009	I 2010	II 2010	III 2010	IV 2010
Kecil Small	6,026	7,550	10,030	10,088	9,196	10,371	9,120	7,762	(4.35)	25.29	32.85	0.57	(8.84)	12.77	(12.06)	(14.89)
Menengah Middle	3,172	4,381	5,401	5,442	6,270	7,269	5,322	5,498	(10.57)	38.11	23.28	0.39	15.63	15.80	(26.69)	3.31
Besar Big	2,230	2,562	1,316	1,320	1,481	1,685	1,702	2,040	2.29	14.89	(48.63)	0.30	12.20	13.77	1.01	19.87
Rata-rata Average									(4.21)	26.10	2.50	0.42	6.33	14.11	(12.58)	2.76

Sumber : Survei Harga Properti Residensial BI, 2010

Cerahnya industri perumahan juga ditandai oleh harga properti yang senantiasa naik. Hal ini membuat properti masih menjadi pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat. BI memperkirakan, hingga kuartal I-2011 harga perumahan masih akan menguat sebesar 2,53%.

Di sisi lain, sejumlah lembaga riset properti pun memprediksi, tren permintaan perumahan masih

HOUSING SUPPLY

Bank BTN sees that the total population of 240 million, or the fourth largest in the world, would never lead to lack of demands for housing in Indonesia. Looking back at the BI's statistics, the sales of small-type houses in 2010 in 12 Indonesian major cities reached 36,449 units, or an 8.1% increase from 33,694 units. Over the same period, the number of middle-type houses sold was 24,350 units, or 32.5% higher than 18,376 units. The 7% decline was instead seen in the sales of large-type houses, booking 6,907 units from the previous 7,428 units. The conclusion is that the demands of housing would never diminish in line with the population growth and regional developments.

The high demands for housing were also reflected in the data by the Ministry of Public Housing that conveyed the backlog of demands surged from 5.8 million units in 2004 to 8.5 million units in 2009. The annual growth of new residential units from new families was at 800,000.

Below is the graphic of the sales of residential properties in 12 Indonesian major cities:

Source: BI's Survey on the Residential Property Prices, 2010

The optimistic backdrop in the housing industry was also signalled by the ever-increasing property prices. It has made property as an attractive choice for investment. BI estimated that up to quarter I-2011 the housing prices would be even higher by 2.53%.

On the other hand, several property research agencies predicted that the uptick trend in housing

akan terus berlangsung hingga tahun 2011. Memang, pada Februari 2011 BI telah meningkatkan suku bunga acuan alias BI Rate dari 6,5% menjadi 6,75%. Tentunya hal ini akan meningkatkan suku bunga KPR dan KPA dalam waktu dekat.

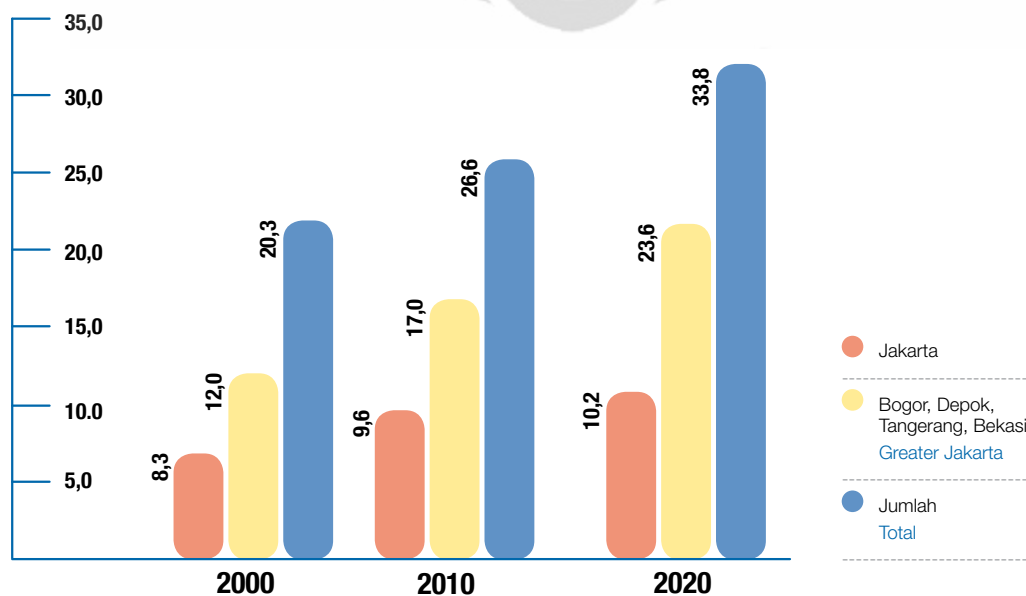
Meskipun demikian, melimpahnya pasokan properti residensial membuat masyarakat tetap menantikan suku bunga KPR dan KPA yang menarik. Dengan dukungan bunga kredit yang rendah, sejumlah lembaga riset memprediksi penjualan perumahan tahun 2011 akan tumbuh sekitar 15% hingga 20%.

MEMPERKUAT KREDIT PERUMAHAN

Dengan sejumlah faktor pendukung di atas, adalah pilihan yang tepat bagi Bank BTN untuk mempertahankan bisnis inti sebagai penyalur kredit perumahan. Jumlah penduduk Indonesia yang tinggi menjadi prospek kebutuhan hunian di masa mendatang. Penduduk Jabodetabek saja, hingga akhir tahun 2010 diprediksi telah mencapai 26,6 juta jiwa. Pada tahun 2020, penduduk Jabodetabek diperkirakan akan mencapai 33,8 juta jiwa. Lalu, pertumbuhan infrastruktur di setiap daerah pun menjadi faktor pendukung kedua berkembangnya sektor perumahan.

Berikut data prospek penduduk Jakarta dan area sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) di tahun 2000-2020:

(dalam juta jiwa)
(in million people)



Sumber: Biro Pusat Statistik (BPS)

Source: Indonesian Central Bureau of Statistics (BPS)

demands would sustain until 2011. BI, in fact, has raised the Central Bank's rate from 6.5% to 6.75%. This subsequently will lift up the KPR and KPA interest rates in near future.

Notwithstanding the above fact, the overflow of supplies in residential property has made the public continue to expect attractive KPR and KPA rates. Given the relatively low loan interest, some research agencies predicted that the sales of housing in 2011 would grow by 15% to 20%.

REINFORCING HOUSING LOANS

Backed up with the above-mentioned factors, Bank BTN's right option is to maintain its core business to be a channel for housing loans. The substantial number of Indonesian population serves as prospects of future housing demands. The total population in Jakarta, Depok, Tangerang and Bekasi areas only is predicted to hit 26.6 million people in 2010. By 2020, the population in the areas is estimated at 33.8 million. Besides that, the development of infrastructure in each region becomes the second contributing factor for the growth in the housing sector.

The following is the prospects of Jakarta and its greater area of Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) population in 2000-2020:

Jumlah penduduk yang tinggi ini membuat kebutuhan hunian tahun 2011 hingga 2020 nanti akan mencapai 1,8 juta unit rumah. Pasokan ini terdiri dari 1,1 juta unit rumah seharga kurang dari Rp 300 juta, 300.000 unit rumah seharga Rp 300 juta-Rp 500 juta, 150.000 unit rumah seharga Rp 500.000 - Rp 1 miliar, dan 50.000 unit rumah seharga Rp 1 miliar ke atas.

Dalam periode yang sama, penduduk Jakarta pun akan membutuhkan 200.000 unit apartemen. Sebanyak 160.000 unit apartemen merupakan apartemen bersubsidi yang dijual di bawah Rp 200 juta. Sebanyak 20.000 unit apartemen berada di segmen menengah dengan harga jual Rp 205 juta-Rp 500 juta. Lalu, sebanyak 14.000 unit apartemen membidik segmen menengah ke atas dengan harga Rp 505 juta - Rp 1,5 miliar. Sementara sebanyak 6.000 unit apartemen menasar segmen atas dengan harga di atas Rp 1,5 miliar.

Namun Bank BTN pun menyadari, peluang industri perumahan tahun 2011 pun diwarnai dengan sejumlah tantangan. Uang muka masih menjadi kendala terpenting bagi masyarakat. Selanjutnya, angsuran, dan syarat serta ketentuan kredit menjadi kendala selanjutnya. Berdasarkan riset Pakar Ekonomi Iman Sugema, sebagian besar masyarakat atau sebanyak 62% sanggup membayar uang muka sebesar 10% dari harga jual rumah. Sementara sebanyak 32% masyarakat sanggup membayar uang muka sebesar 11% - 20% dari harga jual rumah. Lalu jumlah masyarakat yang sanggup membayar 21% - 30% dari harga jual hanya mencapai 6%.

Kondisi di atas tentu menjadi pertimbangan Bank BTN dalam meluncurkan produk kredit perumahan baru demi meraih setiap peluang yang ada. Demi mencapai tujuan ini, Bank BTN pun mendorong pemerintah untuk mendukung perkembangan sektor properti dengan mempermudah perizinan kepemilikan properti, menyelaraskan aturan pusat dan daerah terkait isu properti, serta memberikan insentif pajak pada sektor properti.

The large number of population will spur demands for housing to 1.8 million units over 2011 to 2020. While, the supplies comprise of 1.1 million units priced at less than 300 million, 300,000 units at Rp 300 million - 500 million, 150,000 units at Rp 500 million - Rp 1 billion, and 50,000 units at above Rp 1 billion.

In the same period, the Jakarta residents would need 200,000 units of apartments. Of the number, 160,000 units are subsidized-type sold at below Rp 200 million. A total of 20,000 units are of the middle segment priced at Rp 205 - 500 million. And, 14,000 units target the middle-upper segments with selling prices of Rp 505 million - Rp 1.5 billion. Meanwhile, a total of 6,000 units of apartments are aimed at the upper segment priced at above Rp 1.5 billion.

Bank BTN, however, realizes that the opportunity in the housing sector in 2011 will be accentuated by a number of challenges. The advance payments remain as a main hurdle to the public. While, the installments and the terms and conditions of loans rank next. Based on the research by a Economic Expert Iman Sugeman, the majority of public or 62% in total have the capacity to pay a 10% downpayment of the selling price. Meanwhile, 32% was capable to pay 11% - 20%. Only 6% of the public could pay 21%-30% of the selling price.

The above condition surely becomes a consideration for Bank BTN in introducing new mortgage products to tap every single opportunity. In a bid to achieve this goal, Bank BTN also encourages the Government to support the growth in property sector through easing the permit process for property ownership, synchronizing the property-related stipulations between the central and regions, as well as providing tax incentives in the property sector.

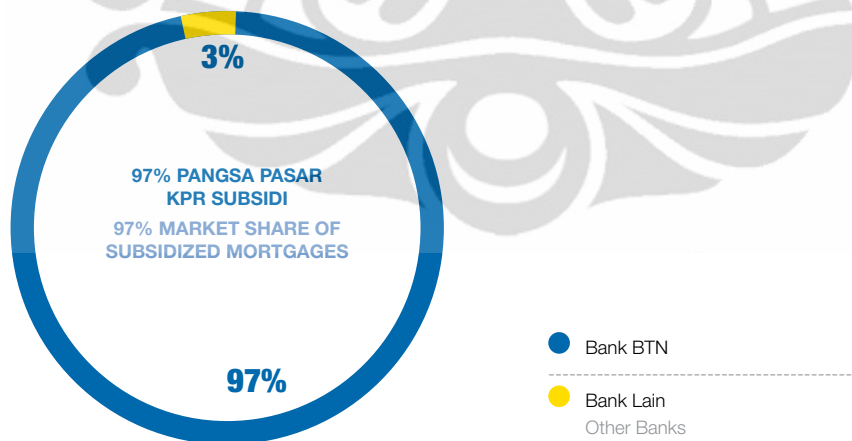
TINJAUAN BISNIS BUSINESS REVIEW

Hingga akhir tahun 2010, Bank BTN masih mempertahankan posisi sebagai bank penyalur kredit perumahan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia per 31 Desember 2010, Bank BTN termasuk dalam 10 bank terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah aset dan kredit. Aset Bank BTN berhasil menyentuh Rp 68,39 triliun di tahun 2010, atau tumbuh 17,00% dari Rp 58,45 triliun pada tahun 2009. Sedangkan kredit dan pembiayaan syariah yang berhasil Bank BTN salurkan mencapai Rp51,55 triliun, atau tumbuh 26,55% dari tahun 2009 yang sebesar Rp 40,73 triliun.

Pangsa pasar Bank BTN sebagai *market leader* kredit perumahan di Indonesia per akhir Desember 2010 adalah sekitar 26,72% atau sedikit meningkat dibanding 25,6% pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan keberhasilan Bank BTN dalam meningkatkan pangsa pasar di tengah persaingan yang ketat dalam industri KPR di Indonesia. Sedangkan untuk pangsa pasar kredit subsidi pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Bank BTN merupakan bank yang tertinggi dengan 97% berdasarkan jumlah kredit baru yang dicairkan per akhir Desember 2010.

Up to the end of 2010, Bank BTN maintained its position as the largest mortgage provider bank, in Indonesia. According to the data of Bank Indonesia as of the 31 December for 2010, Bank BTN was among the ten largest banks in Indonesia based on assets and loans. Bank BTN's total assets reached Rp 68.39 trillion in 2010 or 17.00% increase from Rp 58.45 trillion in 2009. Meanwhile, loans and sharia financing channeled by Bank BTN were Rp 51.55 trillion, or grew 26.55% from Rp 40.73 trillion in 2009.

The market share of Bank BTN, which is a market leader in Indonesian mortgages, was around 26.72% as of the end of December 2010, a slight increase compared to 25.6% in 2009. It has demonstrated the success of Bank BTN in growing its' market share amidst an intense competition among the mortgage industry in Indonesia. Meanwhile, for the market share of the Government subsidized mortgages to low income people (MBR), Bank BTN claimed the biggest portion at 97% based on the new loans disbursed at the end of December 2010.



Dari jumlah total kredit tersebut, Bank BTN berhasil menyalurkan Rp 21,07 triliun sebagai kredit baru yang disalurkan pada tahun 2010. Jumlah ini tumbuh 29,25% dari penyaluran kredit baru tahun sebelumnya yang sebesar Rp 16,30 triliun. Bisnis inti Bank BTN yang bergerak di bidang penyaluran kredit perumahan ditunjukkan lewat alokasi kredit yang sebesar 90,94% di sektor tersebut. Sementara kredit untuk non-perumahan mencapai porsi 9,06%.

Referring to the total amount of the loan, Bank BTN managed to channel Rp 21, 07 trillion as new loans disbursed in 2010. This generated increase of 29.25% derived from new loans in the previous year which amounted to Rp 16,30 trillion. Bank BTN's core business engaged in housing loan disbursements shown through loans allocation by 90.94% in the sector. While non-housing loans for reaching the portion of 9.06%.

Komposisi Kredit dan Pembiayaan Loans and Financing Composition

Jenis Pinjaman Loan Type	Desember 2008		Desember 2009		Desember 2010	
	Rp Miliar	Komposisi	Rp Miliar	Komposisi	Rp Miliar	Komposisi
	Rp Billion	Composition	Rp Billion	Composition	Rp Billion	Composition
Kredit Perumahan Housing Loans	30.548	95,39%	38.285	93,99%	46.881	90,94%
KPR Subsidi Subsidized Mortgages	14.774	46,13%	18.909	46,42%	21.407	41,53%
KPR Non-Subsidi Non-Subsidized Mortgages	10.568	33,00%	12.661	31,08%	16.065	31,16%
Kredit Perumahan Lainnya Other Housing Loans	2.649	8,27%	2.923	7,18%	3.723	7,22%
Kredit Konstruksi Construction Loan	2.557	7,98%	3.792	9,31%	5.686	11,03%
Kredit Non Perumahan Non-Housing Loans	1.477	4,61%	2.447	6,01%	4.668	9,06%
Kredit Konsumer Consumer Loan	539	1,68%	477	1,17%	1.125	2,18%
Kredit Komersial Commercial Loans	938	2,93%	1.970	4,84%	3.542	6,87%
Total Kredit Total Loans	32.005	100,00%	40.732	100,00%	51.549	100,00%

Bank BTN membagi produk dan layanannya menjadi tiga bidang, yakni perbankan konsumen, komersial, dan syariah. Setiap bidang menjalankan bisnis lewat pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa yang terkait dengan ruang lingkungannya.

Bank BTN classifies its products and services into three groups: consumer, commercial and sharia. Each group runs its business through lending, funding and other related services in its respective scope.

PERBANKAN KONSUMER

Produk dan layanan perbankan konsumen (*consumer banking*) di Bank BTN terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi, KPR Non Subsidi, serta Kredit Konsumer Lainnya yang ditujukan kepada nasabah individu. Sedangkan pada produk simpanan, layanan ini mencakup giro, tabungan dan deposito perorangan.

CONSUMER BANKING

Products and services of Bank BTN consumer banking consists of subsidized mortgages, non-subsidized mortgages, and other consumer loans aimed at individual customers. In the funding side, the services consist of individual demand deposits, savings and time deposits.

Produk Konsumer Consumer Products

Produk Kredit Loan Products

KPR Subsidi Subsidized Mortgages

1. KPR BTN Sejahtera Tapak
2. KPR BTN Sejahtera Susun

KPR Non Subsidi Non-Subsidized Mortgages

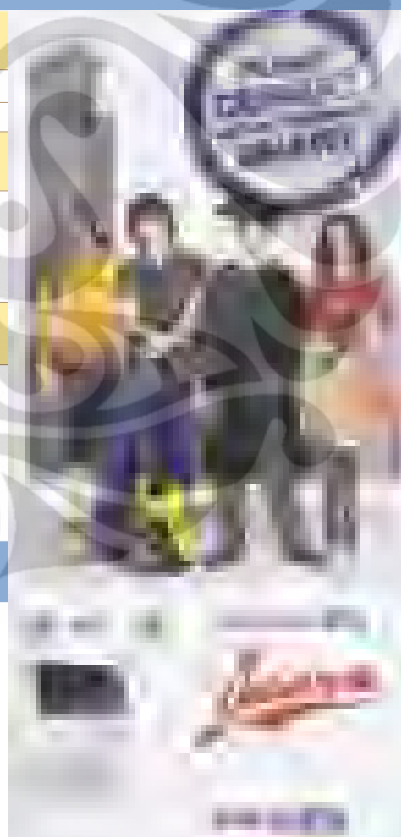
1. KPR BTN Platinum
2. KPA BTN
3. Kredit Ruko BTN
4. Kredit Bangun Rumah BTN

Kredit Konsumer Lainnya Other Consumer Loans

1. Kredit Agunan Rumah BTN
2. Kring BTN
3. Kring BTN Pensiunan
4. Kredit Swadana BTN
5. PUM-KB BTN Jamsostek
6. PRR-KB BTN Jamsostek

Produk Simpanan Deposit Products

1. Giro BTN
2. Tabungan BTN Batara
3. Tabungan BTN Prima
4. Tabungan BTN Junior
5. Tabungan BTN Juara
6. Tabungan BTN Haji
7. Tabungan BTN e'Batara Pos
8. TabunganKu
9. Deposito BTN



Persaingan yang cukup ketat di pasar perbankan konsumen sepanjang tahun 2010 telah menjadi tantangan bagi produk konsumen. Walaupun demikian, perbankan konsumen mampu mencetak pertumbuhan yang stabil. Penyaluran kredit baru dalam perbankan konsumen pada tahun 2010 kami gambarkan sebagai berikut:

An intense competition in consumer banking throughout 2010 was a challenge for consumer products. Yet, Bank BTN's consumer banking managed to record a stable growth. The new loan disbursements in consumer banking in 2010 are illustrated as follows:

Diagram Posisi Kredit Konsumer 2010 (dalam Rp miliar)
Diagram of Consumer Loans Position 2010 (in Rp billion)

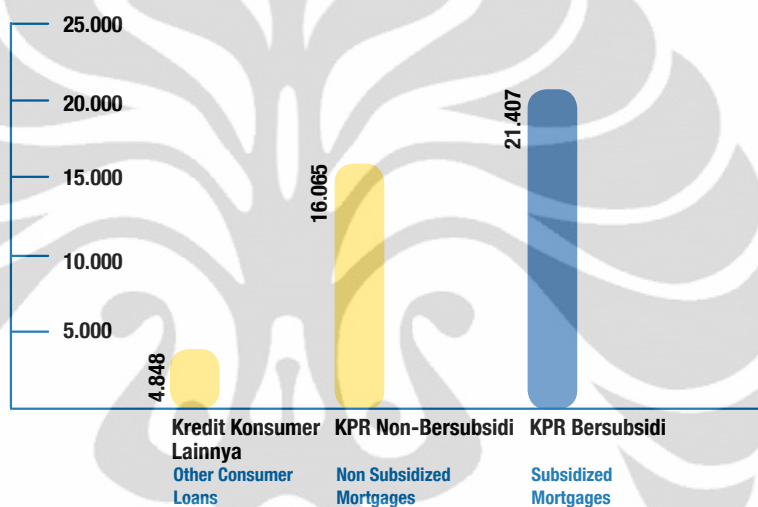
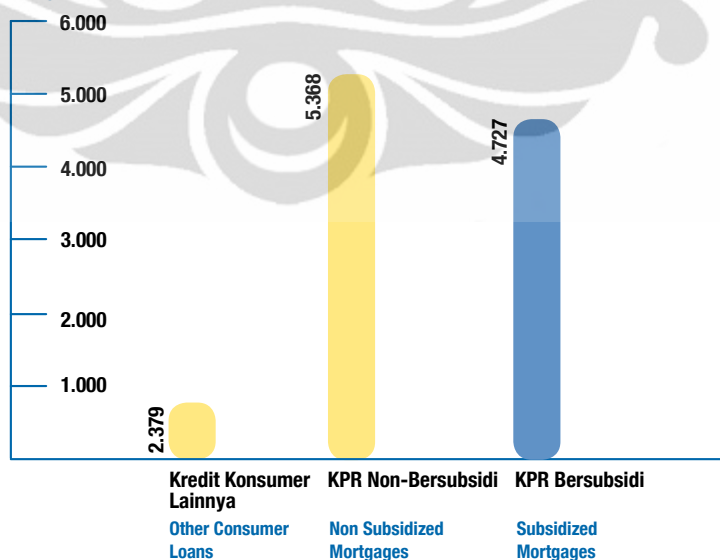
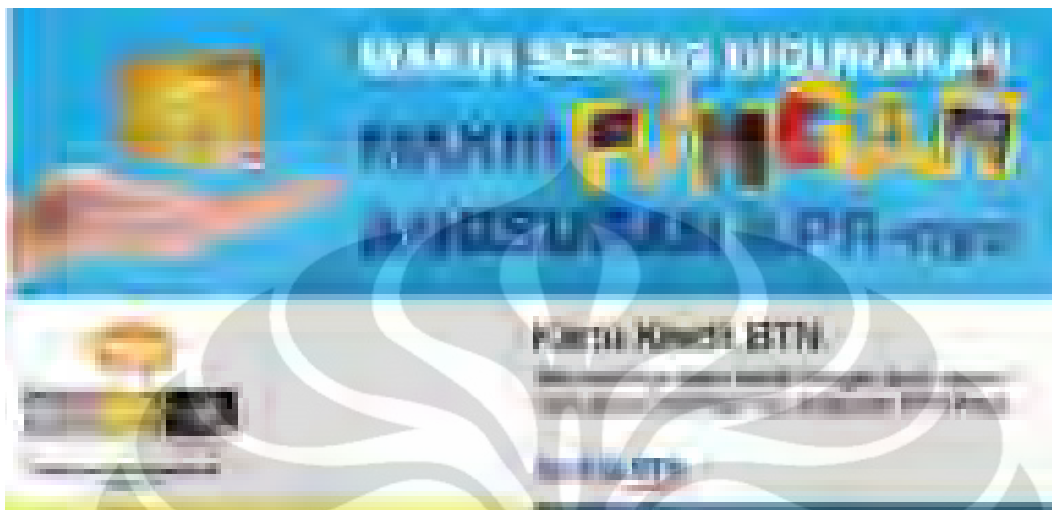


Diagram Penyaluran Kredit Konsumer Baru 2010 (dalam Rp miliar)
Diagram of New Consumer Loan disbursements 2010 (in Rp billion)





Sepanjang tahun 2010, Bank BTN berhasil menyalurkan kredit konsumen, baik secara konvensional maupun syariah sebesar Rp 12,47 triliun, atau 59,20% dari total penyaluran kredit baru Bank BTN selama tahun 2010. Seluruh pinjaman perorangan Bank BTN ini disalurkan dalam mata uang Rupiah.

In 2010, Bank BTN succeeded at channeling consumer loans, in the conventional and Shariah sector, at Rp 12.47 trillion or 59.20% of the total new loan disbursements over 2010. The whole individual loans in Bank BTN were disbursed in Rupiah currency.

Produk Kredit Konsumer

Consumer Loan Products

KPR Bersubsidi

Subsidized Mortgages

Sejak tahun 2010, pemerintah mengubah format penyaluran subsidi perumahan kepada masyarakat, dari sebelumnya berbentuk subsidi uang muka

Since 2010, the Government has changed the format of housing subsidy distribution to the public. Previously, the subsidy was in the form of

Diagram Penyaluran KPR Bersubsidi 2008-2010 (dalam Rp miliar)

Diagram of Subsidized Mortgages Disbursement in 2008-2010 (in Rp billion)

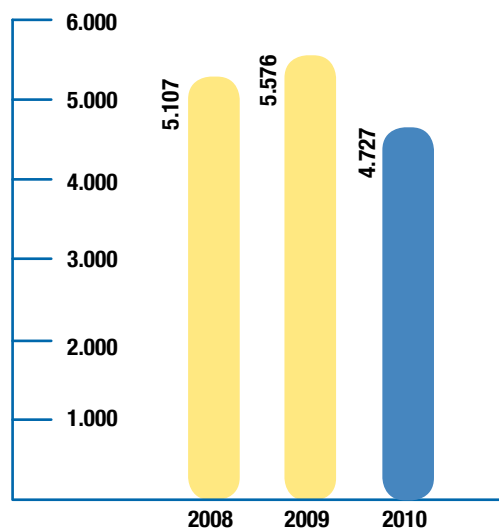
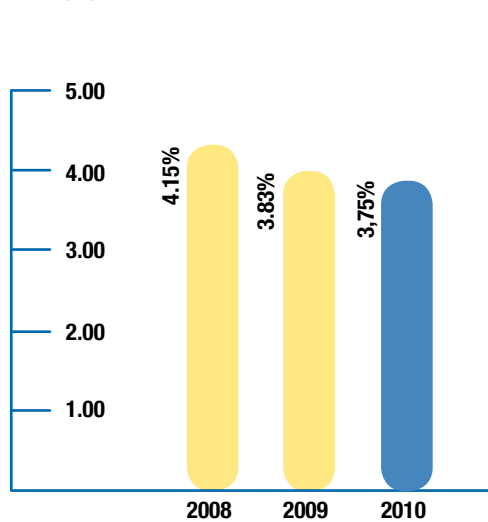


Diagram Tingkat NPL Kredit Perumahan Bersubsidi 2008 - 2010

Diagram of NPL Ratio for Subsidized Mortgages in 2008 - 2010





dan subsidi selisih bunga, menjadi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal ini sesuai dengan beberapa peraturan Pemerintah, diantaranya Peraturan Menteri Keuangan No 290/PMK.05/2010 tentang Penetapan Pusat Pembiayaan Perumahan pada Kementerian Perumahan Rakyat Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang tertanggal 15 Juli 2010 dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/ Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Pemerintah telah menunjuk Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) untuk melaksanakan penerapan FLPP tersebut.

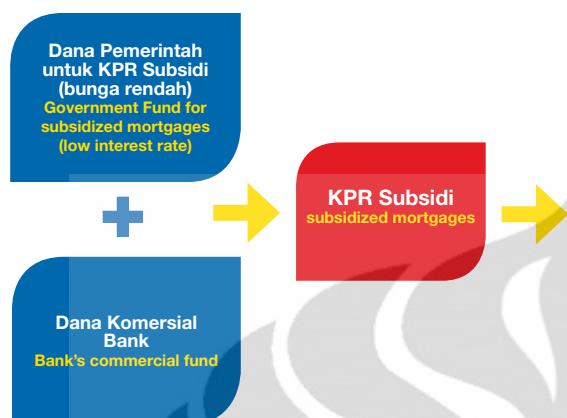
Per 1 Oktober 2010 silam, Bank BTN menerima komitmen dari pemerintah untuk menyalurkan FLPP. Dalam fasilitas ini, pemerintah akan menempati sekitar 60% sumber dana KPR Bank BTN. Sumber dana yang besar ini memungkinkan Bank BTN menyediakan KPR dengan bunga tetap mulai dari 8,15% selama jangka waktu kredit maksimal 15 tahun.

Adapun mekanisme penyediaan FLPP dan skema perhitungan *base lending rate* KPR Subsidi adalah sebagai berikut:

down payments and for the interest rates margin then it was changed into the Liquidity Facility of Housing Finance (FLPP). This is in alignment with a number of Government stipulations, among others the Regulation of the Minister of Finance No. 290/PMK.05/2010 on the Central Stipulation on Housing Finance into the Ministry of Public Housing as a Government Institution Implementing the Management of Public Service Agencies dated 15 July 2010 and the Regulation of the State Minister of Public Housing No.14 Year 2010 on the Provision of Housing through Mortgages/Home Ownership Financing with Support of Liquidity Facility of Housing Finance. The Government has appointed the Central Public Service Agency of Housing Finance (BLU-PPP) to reinforce the regulation.

On October 2010, Bank BTN received, the commitment to distribute the FLPP from the Government. With this facility, the Government will take around 60% of Bank BTN's total funding source. The substantial funding source will allow Bank BTN to provide mortgages with fixed interest rates starting from 8.15% over the maximum maturity period of 15 years.

The mechanism for FLPP's provisions and calculation scheme for subsidized mortgage's base lending rate are as follows:



Perhitungan Base Lending Rate KPR Subsidi
Calculation for Base Lending Rate of Subsidized Mortgages

No	Sumber Dana Funding Sources	Porsi Portion	Bunga Interest	WAR
1	Pemerintah Government	60,00%	0,50%	0,30%
2	BTN	40,00%	9,00%	3,60%
Total Dana Total Fund		100,00%		3,90%
COF				3,90%
COST + MARGIN BANK				4,25%
BASE LENDING RATE				8,15%

Bank BTN menyalurkan FLPP ini melalui dua produk, yakni KPR BTN Sejahtera Tapak yang diperuntukan bagi pembelian rumah tapak (*landed house*) dan KPR BTN Sejahtera Susun untuk pembelian rumah susun. Produk ini hanya ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembelian rumah pertama, yakni yang memiliki penghasilan pokok maksimal Rp 2,5 juta/bulan untuk KPR BTN Sejahtera Tapak (*landed house*) dan maksimal penghasilan pokok Rp 4,5 juta per bulan untuk KPR BTN Sejahtera Susun (*simple apartment*).

Bank BTN distributed the FLPP through two products, namely KPR BTN Sejahtera Tapak aimed at landed house purchases and KPR BTN Sejahtera Susun for flats/simple apartment mortgages. The products are exclusive for low income people who are purchasing their first house. In this category, KPR BTN Sejahtera Tapak are for those who earn a main income of Rp 2.5 million/month and KPR BTN Sejahtera Susun are for those whose main income is Rp 4.5 million/month.

Berikut contoh ilustrasi perhitungan angsuran untuk KPR BTN Sejahtera Tapak dan KPR BTN Sejahtera

Below is the sample illustration of installment for KPR BTN Sejahtera Tapak dan KPR BTN Sejahtera

KPR Sejahtera Tapak

Maks Kredit Max Loans	Tahun Year	Bunga Interest	Angsuran/bulan Installment/month
Rp 50.000.000	15	8,15%	491.300
Rp 60.000.000	15	8,25%	593.100
Rp 70.000.000	15	8,35%	696.200
Rp 80.000.000	15	8,50%	802.900

KPR Sejahtera Susun

Maks Kredit Max Loans	Tahun Year	Bunga Interest	Angsuran/bulan Installment/month
Rp 90.000.000	15	9,25%	944.300
Rp 100.000.000	15	9,35%	1.055.300
Rp 110.000.000	15	9,50%	1.171.000
Rp 120.000.000	15	9,65%	1.288.600
Rp 130.000.000	15	9,80%	1.408.100

Susun.

Susun products.

Sebelum Oktober 2010, Bank BTN masih menyalurkan subsidi pemerintah di bidang kredit perumahan melalui mekanisme lama, yaitu Subsidi Uang Muka (SUM) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Mekanisme ini masih digunakan sampai Desember 2010, sehingga dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2010, pola subsidi yang digunakan adalah pola lama (SUM dan SSB) dan pola baru

Prior to October 2010, Bank BTN still distributed the Government's subsidy for housing loans through old mechanism, which is through Down payment Subsidy (SUM) and Interest Margin Subsidy (SSB). The mechanism was still in effect until December 2010, that from October 2010 to December 2010 the subsidy patterns adopted are the old (SUM and

(FLPP).

Pada SUM ini, pemerintah menutup sebagian uang muka dengan maksimal senilai Rp 8,5 juta per debitur. Selanjutnya, debitur akan melakukan pelunasan untuk tingkat bunga komersil. Sementara dalam SSB, pemerintah menanggung sebagian beban bunga komersil yang seharusnya dibayarkan peminjam selama masa tenor berlangsung.

Bank BTN senantiasa berkomitmen memberikan kredit perumahan bersubsidi kepada rakyat berpenghasilan menengah ke bawah. Di sisi lain, penyaluran kredit tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhitungkan profil risiko pengembalian, serta tetap bersaing dengan industri perbankan. Sebab, semua perbankan nasional dewasa ini dapat menyalurkan KPR Bersubsidi (*level playing field* yang sama). Meskipun persaingan pada penyaluran KPR Bersubsidi semakin bergairah, namun sebagai bank yang sejak 1976 berkomitmen membantu pemerintah dalam program ini, maka Bank BTN tetap memimpin pasar dengan pangsa pasar dominan.

Terbukti, dengan infrastruktur yang matang, pengelolaan operasional yang efisien, serta dapat merebut hati nasabah lewat proses yang cepat, maka Bank BTN mampu menghasilkan profitabilitas dari layanan KPR Bersubsidi.

Hal ini terlihat dari pencapaian Bank BTN di sektor KPR bersubsidi. Sepanjang tahun 2010 Bank BTN berhasil menyalurkan KPR Bersubsidi sebesar Rp 4,73 triliun, atau sebanyak 100.428 unit perumahan. Bila dibandingkan dengan KPR Bersubsidi tahun 2009, penyaluran ini lebih rendah 15,23%. Sepanjang tahun 2010 Bank BTN memang berusaha menaikkan porsi layanan KPR non-subsidi dan kredit non perumahan untuk memperbaiki tingkat imbal hasil. Meski jumlah ini menurun, namun Bank BTN masih tetap memimpin pasar KPR Bersubsidi dengan pangsa 97%.

Keberhasilan menyelenggarakan KPR Bersubsidi juga bisa terlihat dari rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang semakin membaik setiap tahun. Tahun 2010, NPL Bank BTN menurun hanya mencapai Rp 814.351 miliar dari total posisi KPR Bersubsidi yang sebesar Rp 21,41 triliun. Ini menyebabkan rasio NPL KPR Bersubsidi membaik dari 3,83% di tahun 2009 menjadi 3,75% tahun 2010.

Hal ini menunjukkan bahwa Bank BTN tetap dapat

SSB) and new one (FLPP).

In SUM mechanism, the Government provides a certain amount of down payment up to the maximum of Rp 8.5 million per debtor. Afterwards, the debtors will make payments at commercial interest rates. Meanwhile, in SSB mechanism, Government subsidizes commercial interest rate that has to be paid by the debtor during the tenors period.

Bank BTN always holds the commitment to distribute subsidized mortgages to the low income people. On the other side, the loan disbursements are carried out based on the prudent principles, while remaining competitive in the banking sector. That is because today all national banking institutions can distribute subsidized mortgages at the same level of playing field. Even though the competition in the area becomes more intense, as the bank that has been committed since 1976 to be partner of Government in promoting the program, Bank BTN continues to lead the market with a dominant market share.

It was evidenced that with a mature infrastructure, efficient operational management and the fast process attracting the customers, Bank BTN has succeeded in reaping profitability from its subsidized mortgages.

Bank BTN's achievements in subsidized mortgages have verified the success. Along 2010, Bank BTN managed to disburse subsidized mortgages at Rp 4.73 trillion or a total of 100,428 housing units. Compared to the subsidized mortgages in 2009, the 2010 result was 15.23% lower. Throughout the year Bank BTN made efforts in increasing the portion of non subsidized mortgages and non housing loans to improve the return rates. Though the number declined, Bank BTN was still market leader in subsidized mortgages with 97% market share.

The success in providing the subsidized mortgages is also evident in Bank BTN's Non Performing Loan (NPL) ratio that keeps improving every year. In 2010, the NPL went down to Rp 814,351 billion of the total Rp 21.41 trillion subsidized mortgages. It has made the NPL of subsidized mortgages improve from 3.83% in 2009 to 3.75% in 2010.

This signifies Bank BTN's capability to maintain a

mengelola penyaluran KPR Bersubsidi yang tinggi, dan mengimbangnya dengan tingkat pengembalian yang tepat waktu. Demi mencegah tingginya NPL, Bank BTN selalu berupaya menyempurnakan sistem pembinaan dan penyelamatan kredit dengan cara membentuk titik-titik pembinaan kredit (*area collection*) di masing-masing wilayah penyalur kredit.

high amount of subsidized mortgages and balance it with timely loan payments. To mitigate the high NPL, Bank BTN always strives to refine its loans collection and workout system by setting up area collection points in each lending region.

KPR Non Subsidi

Non Subsidized Mortgages

Bank BTN juga memiliki layanan KPR non subsidi untuk mengembangkan portofolio kredit perumahan bagi nasabah segmen menengah ke atas. Layanan yang tergabung dalam perbankan konsumen ini antara lain terdiri dari produk-produk sebagai berikut:

Bank BTN also offers non subsidized mortgages to develop its mortgages portfolio for the middle and upper segment customers. The services grouped in the consumer banking are among others:

▶ KPR BTN Platinum

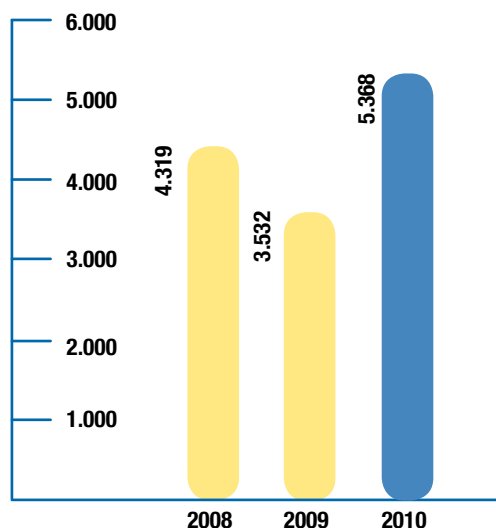
KPR BTN Platinum adalah KPR non subsidi kepada nasabah individu untuk pembelian rumah, baik rumah baru, lama (*second-hand*) dan dalam proses menunggu (*indent*). Lewat KPR ini, Bank BTN memberikan pembiayaan sebesar 80% hingga 90% dari nilai terendah antara harga jual rumah dengan hasil taksasi penilai/*appraisal* atas unit rumah tersebut. Suku bunga yang berlaku dalam KPR BTN Platinum adalah suku bunga mengambang dengan tenor kredit hingga maksimal 15 tahun. Jaminan yang digunakan dalam kredit ini adalah rumah yang dibiayai oleh KPR BTN platinum.

▶ KPR BTN Platinum (House Mortgages)

KPR BTN Platinum provides non subsidized mortgages for house, either brand new, second hand or under construction. The product provides financing from 80% up to 90% of the lowest value of the housing unit between the selling price and appraisal result from the appraisal company. KPR BTN Platinum has floating interest rates with maximum maturity of 15 years. The collateral for the loans is the financed house.

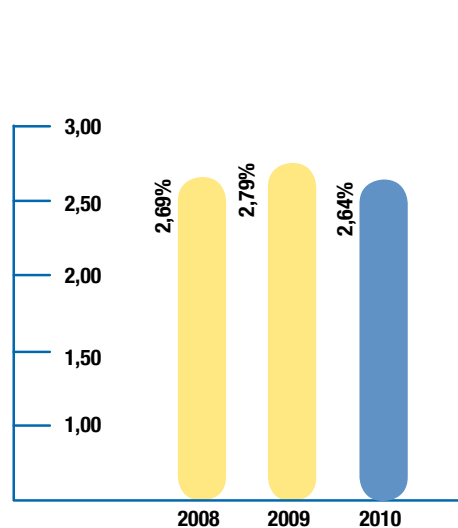
Diagram Penyaluran KPR Non-subsidi 2008-2010 (dalam Rp miliar)

Diagram of non Subsidized Mortgages Disbursement in 2008 - 2010 (in Rp billion)



Grafik Tingkat NPL Perumahan Non Subsidi 2008 - 2010

The NPL ratio Graphics of Non Subsidized Mortgages in 2008 - 2010



▶ **KPA BTN (Kredit Pemilikan Apartemen)**

KPA BTN menyediakan kredit untuk pembelian apartemen dan rumah susun. Maksimal pembiayaan dari kredit ini adalah sebesar 80% hingga 90% dari nilai terendah antara harga jual unit apartemen dengan hasil taksasi penilai/*appraisal* atas unit apartemen tersebut. Suku bunga yang berlaku adalah suku bunga mengambang dengan jangka waktu hingga maksimal 15 tahun.

▶ **Kredit Ruko BTN**

Produk lain yang dimiliki Bank BTN dalam kredit perumahan non subsidi ialah Kredit Ruko BTN. Dalam kredit ini, Bank BTN menyalurkan pinjaman untuk membeli rumah toko (ruko) yang dalam pelaksanaannya dapat difungsikan sebagai toko, kantor, atau keperluan bisnis lainnya. Pada kredit ini, Bank BTN menyediakan pinjaman maksimal 70% dari harga beli atau nilai pasar, tergantung yang lebih rendah.

Kredit Ruko BTN umumnya memiliki jangka waktu kredit hingga maksimal 15 tahun dengan jaminan berupa ruko yang sedang dibiayai. Bank BTN menyediakan kredit ini dengan tingkat suku bunga mengambang serta lebih tinggi daripada suku bunga kredit perumahan.

Berikut kami sajikan tabel pertumbuhan penyaluran baru KPR BTN Platinum dan Kredit Ruko BTN 2008 - 2010.

▶ **KPA BTN (Apartment Mortgages)**

KPA BTN provides loans for apartments and flats. The maximum financing from the loan is from 80% up to 90% of lowest value on the apartment unit between the selling price and appraisal result. KPA BTN has floating interest rates with maximum maturity period of 15 years.

▶ **Kredit Ruko BTN (Shophouse Mortgages)**

Kredit Ruko BTN is another non subsidized loans product that provides financing for shophouse that later can function as shop, office or other businesses. For this product, Bank BTN provides loan at maximum 70% of the buying price or market value, whichever is lower, of the shophouse unit.

Typically, Kredit Ruko BTN has a maturity of maximum 15 years and secured by the financed shophouse. For this loan, Bank BTN applies floating interest rates that are higher than the mortgages for house.

We present in the following table the new disbursements of KPR Platinum and Kredit Ruko (Shophouse Mortgages) BTN in 2008-2010.

Tabel Pertumbuhan Penyaluran Baru KPR BTN Platinum & Kredit Ruko BTN 2008 - 2010 (dalam Rp miliar)

The new disbursements of KPR BTN Platinum and Kredit Ruko BTN in 2008 - 2010 (in Rp billion)

	2008	2009	2010
KPR BTN Platinum	3.620	2.883	4.488
Kredit Ruko BTN	198	126	180

Pulihnya krisis perekonomian tahun 2010 tercermin dalam penyaluran kredit perumahan non subsidi sepanjang tahun 2010 yang mencapai Rp 5,37 triliun, atau lebih tinggi 51,99% dibandingkan dengan realisasi penyaluran tahun 2009 yang sebesar Rp 3,53 triliun. Dari jumlah itu, penyaluran KPR BTN Platinum masih memberikan kontribusi

The recovery from the economy crisis in 2010 was reflected in the non subsidized loan disbursements throughout 2010 that reached Rp 5.37 trillion or 51.99% higher than the realization in 2009 at Rp 3.53 trillion. From that amount, the disbursement of BTN Platinum stood at Rp 4.48 trillion still claimed the highest contribution for non subsidized

terbesar bagi kredit perumahan non subsidi, yakni Rp 4,48 triliun. Angka ini lebih besar 55,66% dibandingkan dengan KPR BTN Platinum tahun 2009 yang sebesar Rp 2,88 triliun. Adapun jumlah pinjaman Kredit Ruko BTN tahun 2010 mencapai Rp 180,12 miliar, lebih banyak 42,43% dari pinjaman tahun 2009 yang sebesar Rp 126,46 miliar. Peningkatan signifikan paling nyata pada KPR non subsidi lainnya terlihat pada realisasi penyaluran pinjaman Kredit Bangun Rumah BTN yang menyentuh Rp 29,78 miliar. Realisasi ini tumbuh 176,97% dari tahun 2009 yang sebesar Rp 10,75 miliar.

Pencapaian ini membuat Bank BTN tetap yakin untuk menjadikan produk kredit non subsidi sebagai salah satu fokus perkembangan bisnis Perusahaan di masa mendatang. Mengingat bila dibandingkan dengan penyaluran pinjaman KPR bersubsidi yang sebesar Rp 4,73 triliun, maka realisasi baru KPR Non Subsidi tahun 2010 ini lebih besar. Pencapaian ini sekaligus menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menyerap perumahan dengan kredit non subsidi sudah semakin besar.

Bank BTN pun senantiasa menjawab tren tersebut dengan berkomitmen melakukan diversifikasi produk yang dapat menjangkau kalangan menengah ke atas. Selain itu, kenaikan penyaluran KPR Non Subsidi pun disebabkan oleh menguatnya citra merek (*brand image*) Bank BTN sebagai bank yang memfokuskan pelayanannya pada pembiayaan perumahan.

Rasio kredit bermasalah, NPL kredit perumahan non subsidi pun menunjukkan perbaikan dari posisi 31 Desember 2009 sebesar 2,79% menjadi 2,64% pada akhir 2010. Bank BTN terus berupaya meminimalisir tingkat NPL di sektor ini dengan memperkuat sistem pembinaan kredit (*collection*) dan menambah jaringan dan tenaga *collection* di tiap-tiap wilayah.

mortgages. The number was 55.66% higher than 2009 that was at Rp 2.88 trillion. Meanwhile, the total of shophouse mortgages in 2010 was Rp 180.12 billion, 42.43% higher than 2009 that was at Rp 126.46 billion. The most visible growth in non subsidized mortgages was identified in disbursements of Kredit Bangun Rumah BTN/ loans for house construction that recorded Rp 29.78 billion. The number represents a 176.97% growth from Rp 10.75 billion in 2009.

Based on the achievement, Bank BTN is confident to incorporate the non subsidized loans into one of its future growth focuses. Furthermore, compared to mortgages loan disbursement amounting Rp 4,73 trillion, the new realization of non subsidized loans have contributed a bigger share. This also indicates that nowadays people purchasing power to absorb the non subsidized loans has been growing.

Bank BTN always anticipates the above trend with its commitment to diversify products that it can reach out the middle and upper segments. Furthermore, the increase in non subsidized mortgages is attributed to the stronger brand image of Bank BTN that is focused to serve the housing finance.

The NPL in non subsidized mortgages showed improvement compared to the position as of 31 December 2009, from 2.79% to 2.64% as of 31 December 2010. Bank BTN always strives to minimize the NPL ratio in this sector by reinforcing its collection system and increasing its network and collection staff in each region.



Kredit Konsumer Lainnya

Meski posisinya sangat melekat pada industri properti Tanah Air, namun Bank BTN menyadari bahwa persaingan industri perbankan Tanah Air semakin intensif. Hal ini menuntut semua pelaku industri dapat mengantarkan berbagai layanan dan produk dalam satu atap. Melihat tren tersebut, Bank BTN pun selalu berupaya menguatkan kredit konsumer lainnya. Dengan dukungan pelanggan yang besar, yakni sekitar 1,2 juta rekening pinjaman dan sekitar 4,8 juta rekening simpanan, maka peluang Bank BTN untuk meningkatkan bisnis di luar kredit perumahan sangatlah besar.

Terbukti, pada tahun 2010, Bank BTN berhasil merealisasikan kredit konsumer lainnya, (tidak termasuk pembiayaan syariah) baik non KPR maupun non perumahan, yang antara lain terdiri dari Kredit Agunan Rumah BTN, Kring BTN dan Kredit Swadana BTN sebesar Rp 2,37 triliun. Penyaluran ini lebih tinggi 81,05% dari realisasi penyaluran kredit konsumer lainnya tahun 2009 yang Rp 1,31 triliun. Berikut kami sajikan realisasi penyaluran kredit konsumer lainnya pada tahun 2010 secara detail:

Other Consumer Loans

Eventhough Bank BTN's position is strongly embedded in the property industry in Indonesia, Bank BTN understands that banking competition in the country has been intensifying. This demands all industry players to adapt in delivering various services and products under one roof. Observing such a trend, Bank BTN always strives to further empower its other consumer loans. The large database, around 1.2 million loan accounts and 4.8 million deposit accounts, will open new prosperous opportunities for Bank BTN to scale up its business aside the mortgages.

In fact, in 2010 Bank BTN has managed to disbursed loan to other consumer sectors (sharia funding excluded), either non mortgages or non housing, which include among others Kredit Agunan Rumah BTN, Kring BTN and Kredit Swadana BTN. The disbursement of these other loans in 2010 was Rp 2.37 trillion, which was 81.05% higher than in 2009 that totaled Rp 1.31 trillion. We present in detailed the realization of other consumer loans over 2010 in the following table:

No.	Produk Kredit Loans Product	Unit	Rp miliar Rp billion
1.	Kredit Agunan Rumah BTN BTN House Collateral Loans	16.846	1.557
2.	PUM-KB BTN Jamsostek	4.269	78
3.	PRR-KB BTN Jamsostek	46	1
4.	Kring BTN	12.214	527
5.	Kredit Swadana BTN	668	203
6.	Kredit lainnya Other loans	8	2
	Jumlah Total	34.051	2.368

► **Kredit Agunan Rumah BTN**

Kredit Agunan Rumah BTN atau dahulu bernama Kredit Griya Multi (KGM) merupakan kredit yang disalurkan Bank BTN untuk mendukung berbagai keperluan nasabah secara individu. Kredit ini dapat dimanfaatkan untuk mendanai berbagai keperluan, dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum. Untuk menikmati fasilitas ini, nasabah perlu memberikan jaminan dengan agunan berupa tanah dan rumah.

Jumlah kredit yang diberikan maksimal 75% dari nilai taksasi oleh penilai. Kemudian, apabila kredit dijamin dengan tanah dan rumah yang digunakan untuk kepentingan komersial, maka nilai kredit yang disalurkan melalui Kredit Bangunan Rumah BTN tidak boleh melebihi 60% dari nilai *appraisal*. Kredit ini memiliki tenor maksimal 10 tahun dengan tingkat suku bunga mengambang dan nilainya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga kredit perumahan.

► **Kring BTN**

Kring BTN adalah penyaluran kredit maksimal Rp 100 juta yang ditawarkan kepada karyawan sebuah perusahaan yang sistem penggajiannya ditangani oleh Bank BTN. Pada kredit ini, Bank BTN akan memotong gaji karyawan untuk pembayaran angsuran kredit. Fasilitas ini bisa dinikmati untuk jangka waktu satu sampai lima tahun dengan sistem suku bunga tetap.

Pada tahun 2010, realisasi Kring BTN menyentuh Rp 527 miliar dengan 12.214 rekening. Jumlah ini lebih tinggi dari penyaluran Kring BTN tahun 2009 yang sebesar Rp 207 miliar, atau setara dengan 5.016 rekening. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kegiatan promosi dan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh tim pemasaran produk Kring BTN.

► **Kredit Agunan Rumah BTN**

Previously named Kredit Griya Multi (KGM), Kredit Agunan Rumah BTN are loans disbursed to support varied customers' needs. The loans can be used to finance any necessity within the boundaries of laws. To enjoy this facility, the customers should provide collateral in form of land and houses.

The maximum loan given is 75% of the estimated appraisal value. If the loan is collateralized with land and houses for commercial purpose, the maximum loan disbursed should not exceed 60% of the appraisal value. Kredit Bangunan Rumah BTN has maximum tenor of 10 years with floating interest rates which are higher than the rates for mortgages.

► **Kring BTN**

Kring BTN is disbursed with a maximum platform of Rp 100 million and is offered to employees of companies for which Bank BTN handle its payroll system. For the payment installments, BTN will directly deduct the employees' salaries. The loan maturity offers flat interest rates up to five years.

In 2010, the disbursement of Kring BTN loans tapped Rp 527 billion with 12,214 accounts. It was well above Rp 207 billion or equal to 5,016 accounts in 2009. The achievement was also driven by promotions and activities initiated by the Kring BTN marketing team.

Pertumbuhan Penyaluran Baru Kredit Agunan Rumah BTN dan Kring BTN 2008 - 2010 (dalam Rp miliar)

Growth of Kredit Agunan Rumah BTN and Kring BTN new disbursement in 2008 - 2009 (in Rp billion)

	2008	2009	2010
Kredit Agunan Rumah BTN	1.135	799	1.557
Kring BTN	275	207	527

Catatan: tidak termasuk pembiayaan syariah

Note: Sharia Financing Excluded

Produk-Produk Pendanaan Konsumer

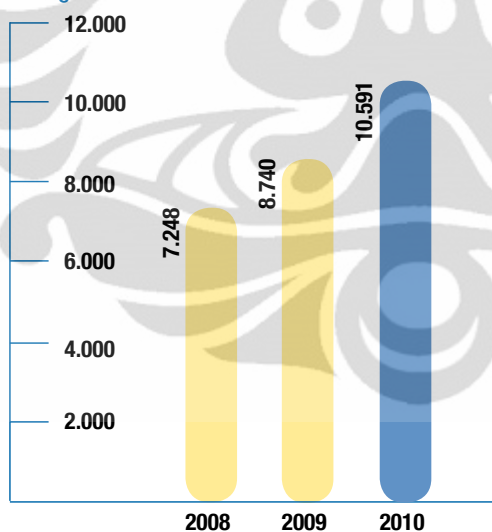
Meski memimpin pasar perkreditan perumahan, namun sebagai salah satu bank besar yang memiliki reputasi tinggi, Bank BTN selalu berusaha menjaga tingkat likuiditas yang sehat. Sehingga, selain gencar menyalurkan kredit, Bank BTN pun senantiasa meningkatkan penghimpunan dana masyarakat. Dalam mengumpulkan dana pihak ketiga tersebut, Bank BTN mengusung strategi mempertahankan komposisi pendanaan (*funding mix*) yang kompetitif dan berbiaya murah. Di bawah ini adalah detail produk pendanaan konsumer (tidak termasuk produk syariah):

Consumer Funding Products

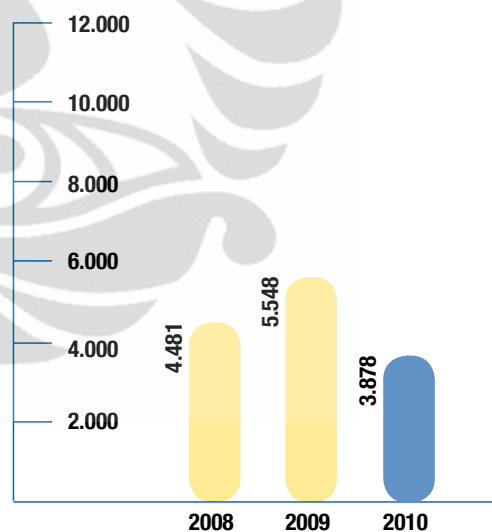
Leading the mortgages market, Bank BTN as one of the highly reputable largest banks always strives to maintain a sound liquidity position. Other than actively disbursing loans, Bank BTN always seeks to increase the collection of public funding. In those efforts, Bank BTN adopts strategies to maintain a competitive funding mix by reducing the portion of time deposits in a bid to mitigate concentration risks. Below are details of consumer funding products (excluding sharia products):

**Grafik Dana Pihak Ketiga Konsumer
(Tabungan & Deposito Berjangka Perorangan) 2008 - 2010 (dalam Rp miliar)**
Third Party Consumer Deposits (Savings and Individual Time Deposits) in 2008-2010 (in Rp billion)

Tabungan
Saving Accounts



Deposito Perorangan
Individual Deposits



Catatan: tidak termasuk dana syariah

Note: Sharia funding excluded

Melalui produk pendanaan konsumer, Bank BTN menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka perorangan. Bank BTN mencatat perolehan dana konsumer tahun 2010 menyentuh Rp 14,46 triliun, sementara pada tahun 2009 sebesar Rp 14,28 triliun. Pertumbuhan ini disebabkan oleh perkembangan positif pendanaan konsumer Bank BTN, baik pada tabungan maupun deposito perorangan. Berikut adalah penjelasan detail produk pendanaan konsumer (tidak termasuk produk Syariah) Bank BTN:

Through the consumer funding products, Bank BTN collects funds from the public in the form of individual saving accounts and time deposits. In 2010 Bank BTN generated consumer funds at Rp 14.46 trillion, in comparison to Rp 14.28 trillion in 2009. The growth was supported by the positive developments in Bank BTN's consumer funding, both in saving accounts and individual time deposits. The details of Bank BTN's consumer fund products (excluding Sharia products) are explained in next pages:

Tabungan

Sepanjang tahun 2010, Bank BTN berhasil menghimpun tabungan (tidak termasuk tabungan syariah) sebesar Rp 10,59 triliun. Angka ini lebih tinggi 21,18% dari tabungan tahun 2009 yang sebesar Rp 8,74 triliun. Penghimpunan tabungan ini diperoleh melalui produk Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Prima, Tabungan Lainnya, Tabanas Batara, dan Tabungan BTN e'Batara Pos. Tabungan Lainnya di tahun 2010 terdiri dari Tabungan BTN Junior dan Tabungan BTN Juara. Kedua jenis tabungan ini merupakan nama baru (*repackaging*) dari Tabungan Batara Junior yang terakhir ditawarkan tahun 2009. Kemudian, ada pula Tabungan BTN Haji dan BTN Haji Plus yang merupakan repackaging dari Tabungan Haji Nawaitu. Tak lupa tahun 2010 Bank BTN ikut meluncurkan produk TabunganKU yang merupakan bagian dari kampanye gemar menabung oleh Bank Indonesia.

Saving Account

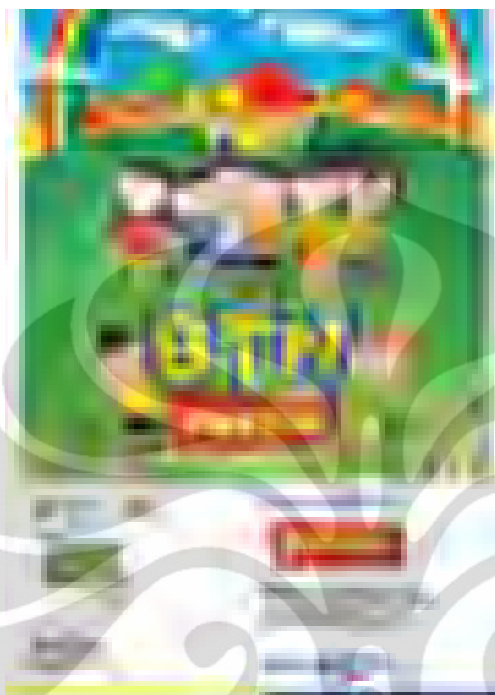
In 2010, Bank BTN managed to collect saving accounts (excluding Sharia savings) at Rp 10.59 trillion. It increased by 21.18% compared to Rp 8.74 trillion in 2009. The total saving accounts came from the following products: Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Prima, Other saving accounts, Tabanas Batara, and Tabungan BTN e'Batara Pos. Other saving accounts in 2010 comprised of Tabungan BTN Junior and Tabungan BTN Juara. Both products are the repackaging of Tabungan Batara Junior which was last marketed in 2009. Bank BTN also has Tabungan BTN Haji and BTN Haji Plus which were resulted from the repackaging of Tabungan Haji Nawaitu. In 2010 Bank BTN also launched the TabunganKu product in conjunction with a campaign to promote saving habits "gemar menabung" by Bank Indonesia.

Komposisi Produk Tabungan Composition of Saving Products

Produk Product	2009		2010		Pertumbuhan Growth			
	Rekening Account	Nominal Rp miliar Rp billion	Rekening Account	Nominal Rp miliar Rp billion	Rekening Account	%	Nominal Rp miliar Rp billion	%
Tabungan BTN Batara	1.403.796	5.505	1.429.869	6.434	26.073	1,9%	929	16,9%
Tabungan BTN Prima	25.630	2.031	26.886	2.257	1.256	4,9%	226	11,1%
Tabungan Lainnya	419.194	183	642.956	426	223.762	53,4%	243	132,7%
Tabanas Batara	1.541.725	218	1.528.704	203	(13.021)	-0,8%	(15)	-6,9%
Tabungan BTN e Batara Pos	650.638	803	1.098.347	1.271	447.709	68,8%	467	58,2%
Total Tabungan	4.040.983	8.740	4.726.762	10.591	685.779	17,0%	1.850	21,1%

Produk Tabungan di tahun 2010 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 21,1 %. Sementara bila dilihat dari sisi jumlah rekening yang berhasil dihimpun, maka produk tabungan tahun lalu mengalami peningkatan sebesar 17,0%. Di samping tabungan lainnya Tabungan BTN eBatara Pos berhasil mencetak pertumbuhan yang tinggi, yakni sebesar 58,2%. Kenaikan signifikan ini seiring dengan strategi Bank BTN yang meningkatkan

The average growth of saving products in 2010 was 21.1%. In regards number of saving accounts, the saving products rose 17.0% from the previous years. For other saving products, BTN eBatara Pos saving recorded a high growth, which was at 58.2%. The significant increase was aligned with Bank BTN's strategy to reinforce partnership with PT Pos Indonesia (Persero) to develop BTN eBatara Pos saving. In this collaboration, the post offices that are



kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) melalui pengembangan Tabungan BTN e-Batara Pos. Dalam kerjasama ini, Kantor Pos yang terkoneksi secara *online* dengan kantor-kantor Bank BTN, secara langsung menawarkan produk tersebut kepada pelanggannya.

Lonjakan yang tinggi dari sisi nominal tabungan juga terjadi pada Tabungan BTN Batara yang tumbuh sebesar Rp 928,78 miliar. Berbagai upaya pemasaran terhadap produk tabungan yang dikerahkan oleh tim pemasaran Bank BTN menjadi salah satu pendorong peningkatan portofolio tabungan. Di masa mendatang, Bank BTN bertekad untuk senantiasa mengembangkan fitur dan meningkatkan program pemasaran pada setiap produk Tabungan demi memperkuat pertumbuhan dana konsumen Bank BTN.

► Deposito Berjangka

Deposito berjangka perorangan Bank BTN mengalami penurunan dana sebesar 30,10% pada akhir 2010 yaitu sebesar Rp 3.878 miliar dari periode tahun sebelumnya sebesar Rp 5.548 miliar. Bank BTN berkomitmen meningkatkan produk ini di masa mendatang guna meminimalkan *maturity mismatch*.



connected online with Bank BTN offices can offer the products directly to its customers.

Based on the nominal amount, high jump of saving products was seen in BTN Batara saving accounts that grew by Rp 928.78 billion. Various efforts that have been carried out by Bank BTN marketing team to promote saving accounts have also contributed to the increase in saving portfolio. In the future, Bank BTN is committed to continue enhancing the features and increasing marketing programs in a bid to reinvigorate the growth in its consumer funding.

► Time Deposit

Bank BTN's individual time deposits booked a decline of 30.10% to Rp 3,878 billion at the end of 2010 from Rp 5,548 billion in the previous year. Committed to increase it in the future in a bid to minimize maturity mismatch.

Jasa

Selain melakukan aktivitas penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga, Bank BTN juga menyediakan layanan berbasis biaya (*fee-based*) seperti Bank Garansi, pengiriman uang antar negara (*remittance*), *collection*, pembayaran gaji (*payroll*) dan sebagai pembayaran (*payment point*) untuk biaya pendidikan, tagihan telepon seluler, serta pembayaran rutin seperti listrik dan air. Selain itu, layanan *priority banking* juga mulai disediakan di tahun 2010 untuk memberikan pelayanan ekstra bagi para nasabah yang memiliki simpanan di atas Rp 250 juta.

Kartu Debit BTN

Salah satu produk terbaru Bank BTN lainnya adalah layanan Kartu Debit BTN yang diluncurkan pada Agustus 2010. Bank BTN sudah menguji coba dan memastikan bahwa sistem Kartu Debit BTN ini dapat berjalan dengan lancar di seluruh sistem pembayaran Visa. Untuk memperbesar jangkauan layanan Kartu Debit BTN ini, tim pemasaran Bank BTN berusaha menjangkau nasabah yang memiliki simpanan di atas Rp 1 juta. Selanjutnya, tim pemasaran pun gencar mempersiapkan materi dan media promosi layanan melalui iklan di surat kabar dan surat elektronik.

Kartu Debit BTN merupakan 'Kartu Serba Bisa'. Kartu Debit ini menyediakan fasilitas bagi nasabah untuk menarik tunai tidak saja di ATM Bank BTN namun dapat pula dilakukan pada jaringan ATM Bersama, Link dan ATM berlogo VISA di seluruh dunia. Di samping itu, nasabah juga akan dapat dengan mudah melakukan transaksi transfer antar rekening Bank BTN atau bank lainnya yang bergabung dalam ATM Bersama. Kartu Serba Bisa ini juga dapat dimanfaatkan untuk pembayaran tagihan KPR, Telkom dan telepon seluler, PLN, pembelian pulsa dan pembayaran tagihan kartu kredit. Yang terpenting, Kartu Debit BTN dapat dipakai untuk berbelanja di seluruh *merchant* yang berlogo VISA

Kartu Kredit BTN

Untuk melengkapi rangkaian produk yang ditawarkan, pada Desember 2010 Bank BTN meluncurkan Kartu Kredit BTN bekerjasama dengan Bank Mandiri. Dengan adanya layanan kartu kredit ini, para nasabah dapat melakukan transaksi berbelanja pada *merchant-merchant* berjangkauan Visa di dalam maupun di luar negeri.

Services

In addition to its activities in loan disbursements and third party funding collection, Bank BTN also provides fee-based services such as Bank Guarantees, remittances, collections, payrolls and payment points for school fees, cellular phone bills and other routine utilities payments such as electricity and water. Furthermore, priority banking services have been effective since 2010 to provide extra services for customers who have deposits above Rp 250 million.

BTN Debit Card

One of the newest products of Bank BTN is BTN Debit Card which was launched in August 2010. Bank BTN has done the testing to ensure the system for the debit card can run well in all Visa payment systems. To enhance the services of BTN Debit Card, Bank BTN's marketing team seeks to reach a greater number of customers with accounts above Rp 1 million. The next step for the marketing team will be to prepare promotional material and media to place advertisements in various news papers and emails.

BTN Debit Card is a 'multifunction card'. It provides facilities to withdraw cash not only in Bank BTN's ATMs but also in ATM Bersama's network, Link and ATMs with the VISA logos around the world. Moreover, the customers can easily do transfers to Bank BTN or other banks' accounts in ATM Bersama's network. The multifunction card can also be used to pay for mortgages, land and cellular phone bills, electricity bills (PLN), cellular top up vouchers and credit card bills. Most importantly, BTN Debit Card can be used to shop in all merchants having the VISA logo.

BTN Credit Card

To complement its product series, in December 2010 Bank BTN launched BTN Credit Card in partnership with Bank Mandiri. With this offer, customers are able to do shopping transactions in Visa networks merchant both in Indonesia and in other countries.

PERBANKAN KOMERSIAL

Dalam rangka menyajikan layanan kepada nasabah dalam satu atap, Bank BTN pun memperluas target pasarnya ke segmen komersial. Hal ini membuat Bank BTN menjadi penyedia solusi total baik untuk perbankan segmen korporat maupun ritel. Bila dilihat dari sasaran industri, konsep solusi total dalam satu atap yang diusung oleh Bank BTN pun menyediakan layanan baik untuk industri perumahan maupun non perumahan.

Dalam perbankan komersial, Bank BTN menyediakan produk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi serta kredit usaha mikro kecil dan menengah (UKM), kredit komersial lainnya, dan bank garansi. Bank BTN juga menawarkan produk penyimpanan dana bagi nasabah lembaga seperti giro dan deposito berjangka bagi lembaga. Sedangkan di layanan jasa perbankan, Bank BTN menawarkan Program Kerjasama Pengembangan Operasional.

Hingga 31 Desember 2010 silam, posisi *outstanding* pinjaman Bank BTN yang diberikan kepada nasabah perbankan komersial, baik secara konvensional maupun pembiayaan syariah, mencapai Rp 9,23 triliun, atau mewakili 17,90% dari total pinjaman yang diberikan. Bila dibandingkan dengan penyaluran pinjaman komersial tahun 2009 yang sebesar Rp 5,76 triliun, posisi ini lebih tinggi 60,18%.

Produk Komersial Commercial Products

Produk Kredit Loan Products

Kredit Konstruksi Construction Loans

1. Kredit Konstruksi BTN
2. Kredit Pendukung Perumahan BTN

Kredit Korporasi Lainnya Other Corporate Loans

1. Kredit Investasi BTN
2. KMK BTN (Kredit Modal Kerja)

Kredit Mikro dan Kredit Usaha Kecil Menengah Micro and SME Loans

1. KUR BTN (Kredit Usaha Rakyat)
2. Kredit Linkage BTN

Produk Simpanan Deposit Products

1. Giro BTN
2. Deposito BTN

COMMERCIAL BANKING

In providing services under one roof to customers, Bank BTN has also expanded its target market into the commercial segment. This has made Bank BTN the best total solution provider for both the corporate and the retail segment. Seen from the industries target, the total solution concept under one roof, promoted by Bank BTN, also provides services for both the housing and the nonhousing industries.

In commercial banking, Bank BTN provides loans for constructions, working capital, investment and SME, other commercial loans and Bank Guarantees. Bank BTN also offers fund deposit products for institutional customers, such as demand deposits and time deposits for institutions. As for banking services, Bank BTN offers the Operational Development Cooperation Program.

Up until the 31 December 2010, the outstanding position of Bank BTN loans to commercial customers, both conventional and sharia ones, reached Rp 9.23 trillion or representing 17.90% of the total loan disbursements. Compared to the commercial loan disbursements in 2009 at Rp 5.76 trillion, the position was 60.18% higher.

Bank BTN menawarkan produk-produk kredit utama kepada nasabah perbankan komersial, antara lain:

Produk Kredit

► Kredit Konstruksi BTN

Sebagai penyedia solusi total untuk industri perumahan, Bank BTN pun menawarkan Kredit Konstruksi BTN atau dahulu bernama Kredit Yasa Griya (KYG) sebagai fasilitas kredit yang diberikan kepada pengembang perumahan. Kredit ini berfungsi sebagai modal kerja yang pada praktiknya dapat digunakan membiayai pembangunan perumahan dan apartemen.

Pada kredit ini, Bank BTN memberikan fasilitas maksimal 80% dari biaya pembangunan atau biaya konstruksi, dengan tingkat suku bunga mengambang. Dalam memutuskan membiayai kredit konstruksi, Bank BTN mempertimbangkan periode tenor kredit berdasarkan pada perkiraan waktu pembangunan dan penciptaan pendapatan yang akan dihasilkan dari proyek tersebut setelah selesai pembangunan. Sebagai jaminan, Kredit Konstruksi BTN mengagunkan tanah dan properti yang dibangun.

Sepanjang tiga tahun terakhir, komitmen Bank BTN pada penyaluran kredit konstruksi ditunjukkan pada pertumbuhan positif pada realisasi kredit selama tahun 2008 hingga 2010. Pada tahun 2010, jumlah realisasi penyaluran Kredit Konstruksi BTN mencapai Rp 4,9 triliun, atau tumbuh 25,30% dari Rp 3,91 triliun pada tahun 2009. Namun demikian, kualitas kredit ini tetap terjaga, terbukti dengan NPL sebesar 2,65% pada tahun 2010 dibandingkan 2,72% pada tahun sebelumnya.

Bank BTN offers main loan products to commercial customers, among others:

Loan Products

► BTN Construction Loans

As a total solution provider for the housing industry, Bank BTN offers BTN construction loans or previously named Kredit Yasa Griya (KYG). These are facilities extended to housing developers, serving as working capital which is in practice and can be used to finance the construction of houses and apartments.

For this type of loan, Bank BTN provides a maximum of up to 80% of the construction cost with floating interest rates. In its decision to finance construction loans, Bank BTN takes into account the maturity period based on the estimated construction period and the income generated upon the completion of the project. As a collateral, BTN Construction Loans are secured by the land and property that is to be built on.

Over the last three years, Bank BTN's commitment to the construction loans is signified by the positive growth in its disbursements from 2008 to 2010. At the end of 2010, the disbursements of BTN construction loans reached Rp 4.9 trillion or 25.30% growth from Rp 3.91 trillion in 2009. Nevertheless, the loans quality is always maintained, as proven by its NPL which stood at 2.65% in 2010 compared to 2.72% from the previous year.

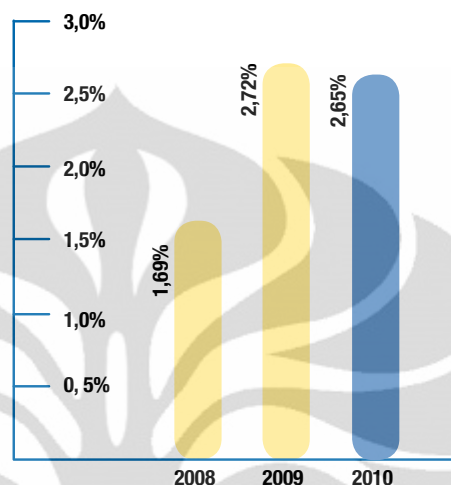
Pertumbuhan Penyaluran Baru Kredit Konstruksi BTN 2008 - 2010 (dalam Rp miliar) Growth in BTN Construction Loan Disbursements in 2008 - 2010 (in Rp billion)

	2008	2009	2010
Kredit Konstruksi BTN	3.293	3.914	4.904

Catatan: tidak termasuk pembiayaan syariah

Notes: sharia funding excluded

Grafik NPL Kredit Konstruksi BTN 2008 - 2010
Graphic of NPL of BTN Construction Loans in 2008 - 2010



Demi menekan laju NPL pada portofolio Kredit Konstruksi, Bank BTN senantiasa menjalankan program patroli *branch*, yakni pemantauan dan pembinaan kantor cabang khususnya kepada segenap kegiatan bisnis kredit komersial. Program ini cukup efektif dalam membantu kantor cabang untuk memetakan permasalahan kredit komersial. Selain itu, program patroli *branch* juga berhasil membantu mencari solusi atas masalah yang dihadapi cabang terkait kredit komersial yang bermasalah. Membaiknya NPL di Kredit Konstruksi juga tak lepas atas dilakukannya restrukturisasi kredit untuk debitur yang kesulitan dalam penyelesaian kreditnya.

Untuk meningkatkan portofolio Kredit Konstruksi, Bank BTN selalu mencoba menyusun kegiatan pemasaran yang tepat guna. Pertama-tama, Bank BTN lebih dahulu menentukan pengembang sasaran utama (*hot prospect developer*). Yang dimaksud dengan pengembang sasaran utama adalah pengembang yang sebelumnya belum terlayani oleh Bank BTN, serta berniat membangun proyek perumahan untuk segmen menengah ke atas yang memiliki rentang harga jual produk seharga Rp 300 juta hingga Rp 500 juta. Lalu, Bank BTN juga selalu menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan pengembang-pengembang besar seperti PT Summarecon Agung Tbk, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Agung Sedayu, dan PT Modernland Realty Tbk.

To curb the NPL ratio in construction loans portfolio, Bank BTN always runs the branch patrol program, which is a monitoring and empowering program for the branch offices, especially on the entire commercial loan business activities. The program is relatively effective to assist branch offices in mapping the problems in the commercial loans. Besides, the program has also been successful in finding solutions for problems faced by the branch offices in non-performing commercial loans. The improved NPL in constructions loans are also linked with the credit restructuring efforts aimed at the debtors facing difficulties to settle their loans.

To improve the portfolio of construction loans, Bank BTN always makes efforts to creating effective marketing activities. Firstly, Bank BTN determines the hot prospect developers, which are the developers who have yet to be served by Bank BTN and intend to construct housing projects for the middle and upper segments with product selling prices of Rp 300 million up to Rp 500 million. Bank BTN also maintains ties with leading developers such as PT Summarecon Agung Tbk, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Agung Sedayu, and PT Modernland Realty Tbk.

► Kredit Pendukung Perumahan

Sebagai solusi permodalan, Bank BTN menyalurkan fasilitas pembiayaan modal kerja dan atau investasi baik bagi industri maupun perdagangan yang masih terkait dengan perumahan. Bank BTN dapat menyalurkan fasilitas ini kepada PT, CV, Koperasi, Firma, dan Perorangan dengan tingkat suku bunga mengambang. Kredit ini menawarkan pembiayaan jangka menengah untuk proyek pembangunan perumahan. Dalam hal ini, Bank BTN menyediakan pembiayaan sebesar maksimal 70% dari total kebutuhan modal kerja pembiayaan proyek atau sebesar 65% dari total biaya investasi proyek tersebut. Untuk modal kerja, Bank BTN menyediakan fasilitas ini dalam jangka waktu maksimal tiga tahun. Sementara untuk kredit investasi, jangka waktu kredit bisa mencapai maksimal lima tahun.

Bank BTN berhasil membukukan penyaluran kredit pendukung perumahan yang membanggakan sepanjang tahun 2010, baik dari segi pertumbuhan realisasi kredit maupun kualitas kredit. Penyaluran kredit mengalami peningkatan sebesar 157,3% dari Rp 693,9 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 1,78 triliun tahun lalu. Perbaikan bukan hanya dilihat dari peningkatan jumlah kredit yang disalurkan, tapi juga penurunan NPL dari 6,61% pada akhir tahun 2009 menjadi 4,37% pada akhir Desember 2010.

► Housing Support Loans

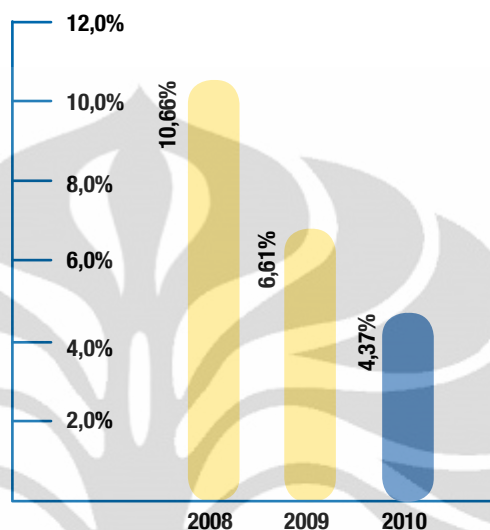
Serving as a solution in capital needs, Bank BTN channels working capital facility or investments for either industry or trading businesses that are still relevant to housing. Bank BTN disburses the loans to corporations (PT), small trading companies (CV), cooperatives, firms and individuals with floating interest rates. This type of loan provides midterm financing for housing construction projects. In this regard, Bank BTN provides financing up to a maximum of 70% of the total working capital requirement or 65% of the total project's investment. The maturity of the loan is maximum of three years for working capital category, and maximum of five years for investment loans.

In housing support loan disbursements, Bank BTN recorded an encouraging result last year both based on the amount and quality. The loan disbursements increased by 157.3% from Rp 693.9 billion in 2009 to Rp 1.78 trillion in 2010. The improvement was not only seen in the growth of disbursed loans, but also in a lower NPL from 6.61% at the end of 2009 to 4.37% as of December 2010.

Pertumbuhan Penyaluran Kredit Pendukung Perumahan Tahun 2008 - 2010 (dalam Rp miliar)

The Growth of Housing Support Loan Disbursements in 2008 - 2010 (in Rp billion)

	2008	2009	2010
UMKM (<5miliar) Micro & SME (<5 billion)			
Terkait Perumahan Housing related	305	229	420
Kredit Investasi Investment Loans	-	112	213
KMK Kontraktor Loans for Contractors	-	200	400
Kredit Modal Kerja Working Capital Loans	-	-	173
Korporasi (<5miliar) Corporations (<5 billion)			
Kredit Investasi Investment Loans		56	200
KMK Kontraktor Working Capital Loans for Contractor		96	380
Total	305	694	1.786

Grafik NPL Kredit Pendukung Perumahan 2008 - 2010**NPL of Housing Support Loans in 2008 - 2011**

Dalam mengembangkan pasar Kredit Konstruksi dan Kredit Pendukung Perumahan, Bank BTN selalu mengusung strategi inovatif agar dapat meraih lebih banyak nasabah. Hal ini pula yang membuat Bank BTN bertahan di tengah persaingan yang semakin dinamis di perbankan komersial. Salah satu strategi yang diusung adalah dengan membuat kebijakan yang meringankan debitur-debitur potensial, seperti pembebasan penyerahan *fixed asset*, pemberian suku bunga khusus bagi pengembang prima, serta pemberian keringanan biaya provisi atas debitur prima.

Khusus untuk produk KMK Kontraktor, Bank BTN telah melakukan strategi pemasaran inovatif lewat kerjasama dengan BUMN dan anak perusahaan BUMN. Beberapa BUMN yang telah menggandeng kerjasama dengan Bank BTN untuk penyaluran KMK Kontraktor antara lain PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Wika Gedung, Wika Realty, PT Hutama Karya, dan PT Adhi Realty.

► Kredit Usaha Rakyat BTN

Bank BTN bangga dapat tumbuh dan berkembang bersama masyarakat lewat penyaluran kredit. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain tanggung jawab sebagai salah satu dari lima bank pemerintah penyaluran kredit kepada UMKM ini juga dilakukan untuk memperluas jangkauan bisnis Bank BTN.

In expanding our markets in construction loans and housing support loans, Bank BTN always emphasizes innovation strategies to reach a greater number of customers. This is also a key to stay strong in the midst of increasingly dynamic competition in commercial banking. One of the strategies applied is by creating relief policies for potential debtors such as; the exemption of fixed assets provision, special interest rates and more flexible provision fees for prime developers.

For working capital loan products for contractors, Bank BTN executed an innovative marketing strategy in cooperation with a number of state owned enterprises and their subsidiaries. The state owned enterprises that have worked together with Bank BTN to disburse this type of loans are among others; PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya, PT Wika Gedung, Wika Realty, PT Hutama Karya, and PT Adhi realtyRealty.

► Micro & Small Medium Enterprises Loans Bank

Bank BTN prides to grow and prosper together with public by disbursing micro, small and middle finance loans. Besides the responsibility of becoming one of five Government banks, loan disbursment to SME also aim to expand Bank BTN's business reach.

Produk penyaluran kredit UKM yang ada di Bank BTN meliputi KUR, Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dan pinjaman program Kemitraan. Dalam penyaluran kredit ini, Bank BTN mengkategorikan nasabah usaha mikro sebagai usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dan penjualan yang maksimal Rp 300 juta per tahun. Untuk segmen ini, Bank BTN menyalurkan KUR Mikro BTN maksimal Rp 20 juta dan Kredit UMKM BTN maksimal Rp 50 juta.

Adapun nasabah Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 500 juta atau penjualan maksimal Rp 2,5 miliar per tahun. Bagi usaha kecil ini, Bank BTN menyalurkan kredit maksimal Rp 500 juta dan Kredit UMKM BTN maksimal Rp 500 juta. Sementara Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 10 miliar atau penjualan maksimal Rp 50 miliar per tahun. Bank BTN menyalurkan kredit maksimal Rp 5 miliar untuk jenis usaha UMKM BTN.

KUR BTN yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui lembaga *linkage* maksimal sebesar Rp 2 miliar. Bank BTN menyalurkan KUR untuk modal kerja dengan batas tenor maksimal tiga tahun dan dapat diperpanjang sampai enam tahun. Sementara KUR untuk investasi memiliki jangka waktu maksimal lima tahun dan dapat diperpanjang maksimal sepuluh tahun.

Sebagai jaminan, pinjaman ini menggunakan proyek atau usaha yang dibiayai sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Bank BTN memberlakukan jaminan tambahan tingkat suku bunga efektif per tahun untuk KUR BTN, dengan rincian maksimum 22% per tahun untuk kredit sampai dengan Rp 20 juta dan 14% per tahun untuk kredit di atas Rp 500 juta.

Sampai dengan tahun 2010, total nasabah KUR Bank BTN (di luar pembiayaan Syariah) mencapai 4.110 rekening. Jumlah ini tumbuh 88,96% dari nasabah KUR tahun 2009 yang sebanyak 2.175 rekening. Peningkatan ini pun terefleksi dalam jumlah penyaluran KUR yang bertambah. Bila tahun 2009 Bank BTN menyalurkan KUR sebesar Rp 178,23 miliar, maka tahun 2010 jumlah ini bertambah besar 102,4% menjadi Rp 360,88 miliar. Namun demikian, NPL untuk KUR mengalami peningkatan, dari 2,80% di tahun 2009 menjadi 3,93% di akhir 2010.

SME loan products at Bank BTN covers KUR, Micro Small and Medium Enterprises (KUMKM) credit and Partnership loan program. In this lending, Bank BTN categorizes its customers as a business that has assets of Rp 50 million and sales of a maximum of Rp 300 million per year. For this segment, Bank BTN channel KUR Mikro maximum Rp 20 million and loans of SMEs BTN maximum Rp 50 million.

The Small Business customers are businesses that have assets up to Rp 500 million, or sale of a maximum of Rp 2.5 billion per year. For small businesses today, Bank BTN disburses loans and a maximum of Rp 500 million maximum Bank BTN MSME loans is Rp 500 million. While Medium Enterprises is a business with assets of Rp 10 billion or selling a maximum of Rp 50 billion per year. Bank BTN distributes a maximum of Rp 5 billion loan to Bank BTN SMEs type of business.

KUR BTN channelled to micro, small and medium enterprises and cooperatives through a linkage institution executing pattern maximum of Rp 2 billion. Bank BTN channels KUR for working capital to limit the maximum tenor of three years and can be extended to six years. While KUR for investment have a maximum term of five years and may be extended a maximum of ten years.

As collateral, the loans mortgages the project or business financed in accordance with the regulations of Bank Indonesia. Bank BTN imposes additional warranty effective interest rate per annum for KUR BTN, with details of the maximum 22% per annum for loans up to Rp 20 million and 14% per annum for loans above Rp 500 million.

Up to the end of 2010, the total of Bank BTN's KUR (sharia funding excluded) customers was 4,110 accounts. The number surged 88.96% from 2,175 accounts in 2009. The increase is also reflected in the increasing KUR disbursements. When in 2009, Bank BTN disbursed KUR at Rp 178.23 billion, in 2010 the number strengthened to Rp 360.88 billion or 102,4% increase. However, NPL for the KUR rose from 2.80% to 3.93% at the end of 2010.

Pertumbuhan Penyaluran KUR BTN Tahun 2008 - 2010**The Growth of KUR BTN Disbursements in 2008 - 2010**

	2008		2009		2010	
	Rekening Account	Kredit (Rp miliar) Loans (Rp billion)	Rekening Account	Kredit (Rp miliar) Loans (Rp billion)	Rekening Account	Kredit (Rp miliar) Loans (Rp billion)
KUR	1.109	195	1.348	178	2.609	361

Pertumbuhan Penyaluran KUR dan KUMK**The Growth of KUR and KUMK Disbursements**

Jenis Kredit Loan type	Realisasi 2009 (Rp miliar) Realization (Rp billion)	Realisasi 2010 (Rp miliar) Realization (Rp billion)	Pertumbuhan (%) Growth (%)
KUR	178	361	102,48
KUMK	50	74	47,86

Tahun 2010, NPL kredit UKM Bank BTN mencapai level 6,38%. Demi memperbaiki portofolio di kredit UKM, Bank BTN pun memberikan kewenangan kepada KCP untuk memutus kredit UKM. Untuk meningkatkan kemampuan segenap staf di KCP tersebut dalam menyalurkan kredit UKM, maka Bank BTN pun menyediakan pelatihan analisis kredit UKM secara berkala.

Bank BTN menyadari, sebagai bank yang mengusung fokus bisnis penyalur kredit perumahan, tentu penyediaan kredit UKM menjadi tantangan besar. Untuk itu, agar dapat bersaing dengan bank lain yang menyajikan layanan serupa, Bank BTN menyediakan persyaratan yang lebih fleksibel serta bunga kredit yang kompetitif. Dalam rangka menjemput bola, Bank BTN pun aktif mengikuti berbagai pameran, seperti yang terakhir mengikuti pameran di SMESCO. Bank BTN juga melakukan kegiatan pemasaran langsung seperti mencetak brosur, *standing banner*, dan spanduk terkait kredit UKM.

► **Kredit Program Linkage**

Bank BTN juga mendukung perekonomian UKM dengan menjalin kerjasama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Realisasi dari kerjasama ini, Bank BTN mengeluarkan Kredit

In 2010, NPL for SME loans reached 6.38%. In a bid to improve the portfolio in SME loans, Bank BTN grants authority to sub branch offices to make decision on SME loans. To enhance the capacity of all staff members in the sub branches in SME loan disbursements, Bank BTN provides analysis training on SME regularly.

Bank BTN realizes that as a bank focusing on the mortgages disbursement, the disbursements of SME loan poses a significant challenge. Hence, to be able to compete with other banks that provide similar services, Bank BTN sets more flexible requirements and competitive interest rates. To approach the customers, Bank BTN proactively takes part in various exhibitions, such as the latest one at SMESCO (a centre of SME and Cooperatives). Bank BTN also carries out direct marketing such as printing brochures, standing banners and banners on SME loans.

► **Linkage Program Loans**

Bank BTN also supports the SME economy by working together with the Permodalan Nasional Madani (PNM), a state owned investment firm and Badan Perkreditan Rakyat or people's credit banks (BPR). As a realization

Linkage yang akan disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dikelola oleh PNM dan BPR.

Tahun 2010 Bank BTN berhasil menyalurkan Kredit Program *Linkage* sebanyak 129 rekening. Jumlah ini mengalami kenaikan cukup pesat, yakni 377,77% dari jumlah nasabah baru tahun 2009 yang sebanyak 27 rekening. Otomatis, penyaluran Kredit Program *Linkage* pun ikut bertumbuh 86,03% dari Rp 80,04 miliar di tahun 2009 menjadi Rp 148,9 miliar tahun 2010.

of the ties, Bank BTN disbursed *Linkage* Loans to the Micro, Small and Medium Enterprises under the management of PNM and BPR.

In 2010 Bank BTN managed to disburse *Linkage* Program Loans into 129 accounts. The number experienced rapid growth of new customers of 377.77% from 27 accounts in 2009. Accordingly, the *Linkage* Program Loan disbursements also grew by 86.03% from Rp 80.04 billion in 2009 to Rp 148.9 billion in 2010.

Penyaluran Kredit Program *Linkage* 2008-2010 Linkage Program Loan Disbursements in 2008-2010

	2008		2009		2010	
	Rekening Account	Kredit (Rp miliar) Loans (Rp billion)	Rekening Account	Kredit (Rp miliar) Loans (Rp billion)	Rekening Account	Kredit (Rp miliar) Loans (Rp billion)
<i>Linkage</i> Program	1	2	27	80	129	149

► Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi)

Pinjaman Koperasi Simpan Pinjam memiliki waktu jatuh tempo satu tahun dan dapat diperpanjang dua kali atas permintaan debitur. Pada umumnya, kredit ini memiliki tingkat suku bunga mengambang. Bank BTN memberikan kredit Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan kebijakan khusus bagi calon debitur potensial dengan fasilitas pendukung sebagai berikut :

- Penurunan biaya provisi sampai dengan 0,5%
- Penurunan suku bunga sampai dengan 0,5%
- Penambahan jangka waktu kredit
- Penurunan rasio *coverage* agunan dengan di-cover asuransi kredit untuk BUMN
- Kelonggaran biaya administrasi

► Credit Cooperatives

Cooperatives loans mature in one year that can be extended twice based on the debtors' request. In general, the loans have floating interest rates. Bank BTN provides this type of loans based on the special policy for the potential debtors with the following supporting facilities:

- Reduction of provision cost up to 0.5%
- Reduction of interest rates up to 0.5%
- Extension of maturity period.
- Reduction of collateral coverage ratio by loan insurance for state owned enterprises.
- Flexibility in administration fees.

Produk Pendanaan Komersial

Di samping menyalurkan kredit, Bank BTN juga memperkuat bisnis perbankan komersial lewat produk dan layanan pendanaan. Adapun produk-produk pendanaan komersial yang ada di Bank BTN antara lain giro dan deposito berjangka lembaga. Tahun 2010, pendanaan komersial pun ikut mencetak pencapaian yang menggembirakan, seperti yang tertuang dalam tabel dibawah ini:

Commercial Funding Products

Complementing its loan disbursement business, Bank BTN also reinforces its commercial banking through funding products and services. The products provided by Bank BTN are among others demand deposit and time deposit. In 2010, the commercial funding has also recorded an optimistic achievement, as presented in the following table.

Pertumbuhan Dana Komersial Bank BTN tahun 2008 - 2010 (dalam Rp miliar)

Growth of Commercial Fund in 2008 - 2010 (in Rp billion)

	2008	2009	2010
Giro Demand Deposits	2.794	7.257	5.036
Deposito Lembaga Institutional Time Deposits	16.183	17.223	25.640

Catatan: tidak termasuk dana syariah

Notes: sharia funding excluded

Pertumbuhan Giro dan Deposito Berjangka Lembaga diperoleh dari upaya Bank BTN meningkatkan kegiatan pemasaran dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik instansi pemerintahan, pemerintah daerah, BUMN/ BUMD, swasta, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga lainnya, terkait pengelolaan dana operasional lembaga. Dengan mengikuti Program Pengembangan Operasional ini, nasabah instansi dapat memperoleh bantuan fasilitas aset atau dana untuk kepentingan operasional dengan cara menjaga saldo minimum dalam bentuk rekening koran di Bank BTN selama tiga sampai lima tahun.

The growth in Demand Deposits and Institutional Time Deposits are resulted from Bank BTN's efforts in further activating its marketing activities by working together with various institutions such as Governmental institutions, state/region owned enterprises, private, universities, hospital and other institutions related with the institutions' operational fund. By joining the Operational Development Program, institutional customers can obtain facilities assistance of assets or funds for operational purpose by maintaining a minimum balance in their checking account for three to five years.

Bank BTN selalu berupaya melakukan optimalisasi pemasaran produk pendanaan komersial dengan menggenjot penawaran kerjasama *Business to Business* (B2B). Salah satu caranya adalah dengan menjadi bank penyedia layanan pembayaran SPP online untuk lembaga pendidikan dan Program Pengembangan Operasional B2B. Tujuan dari kerjasama ini tak lain adalah memperoleh penempatan dana murah, khususnya dalam bentuk giro, dalam jumlah besar serta berjangka waktu yang panjang sekitar tiga hingga lima tahun.

Bank BTN strives to optimize its marketing for commercial funding products by boosting its B2B (Business to Business) cooperations. An example is by becoming the service provider bank for online school fees payment for educational institutions and B2B Operational Development Program. The definite purpose of this cooperation is to access low-cost funding, especially in form of demand deposits in a substantial amount and for the period around three to five years.

Bank BTN melihat, peluang pasar lembaga yang belum terjangkau oleh layanan dan produk Perusahaan masih terbuka luas. Ini menjadi peluang sekaligus prospek positif bagi Bank BTN dalam menjangkau nasabah lembaga baru. Untuk itu, ke depannya Bank BTN akan menambah portofolio pendanaan komersial dengan menjaring nasabah baru serta tak lupa memelihara dan mengoptimalkan penjangkauan terhadap nasabah yang sudah ada.

BTN has identified significant opportunities in institutional market that have yet to be met with the right products and services. This serves as opportunities as well as positive prospects for Bank BTN to reach new customers. For the future, Bank BTN will expand its commercial funding portfolio by winning new customers and to keep on securing and optimizing the existing customer base.

Untuk mendukung penghimpunan dana nasabah yang lebih besar, Bank BTN bahkan menyediakan tenaga penjual dana lembaga tidak terikat (*selling officer non organic*) yang ditempatkan di kantor-kantor cabang potensial. Dengan struktur

To support the collection of larger customers funding, Bank BTN also has non-organic selling officers dispatched at the potential branch offices. With a new organization structure that is more focused on the service to customers, Bank BTN

organisasi baru yang lebih fokus kepada pelayanan terhadap nasabah, kini Bank BTN memiliki sumber daya yang cukup untuk mencari dan menghimpun dana lembaga.

Strategi selanjutnya yang akan dilakukan Bank BTN ialah dengan mendorong pertumbuhan kerjasama dengan segmen menengah ke bawah seperti perguruan tinggi, sekolah menengah dan dasar, dan rumah sakit lewat layanan *Payment Point*, SPP Online, dan PPO B2B.

Bank BTN pun selalu berusaha menyediakan solusi total perbankan (*one stop service*) kepada nasabah yang meliputi seluruh jenis produk pendanaan, kredit, dan jasa layanan yang tersedia untuk mendukung kebutuhan nasabah lembaga dan perorangan.

Bank BTN menyadari bahwa loyalitas nasabah hanya dapat terbentuk dengan pelayanan dan nilai tambah yang optimal. Untuk menciptakan dan memelihara loyalitas nasabah, Bank BTN secara rutin menyelenggarakan Customer Loyalty Program. Program yang melibatkan peran aktif manajemen Bank BTN ini dituangkan dalam bentuk turnamen olah raga, kesenian, dan apresiasi budaya lainnya.

Jasa

Sebagai penyedia solusi total perbankan, Bank BTN juga menyediakan layanan bagi lembaga seperti bank garansi, fasilitas pembayaran gaji secara *online*, pembayaran pajak, penerimaan pembayaran tagihan utilitas (PLN, telepon dan PDAM) dan penerimaan setoran pendidikan (SPP) dari sekolah atau perguruan tinggi.

Strategi Perbankan Komersial

Pertumbuhan portofolio perbankan komersial sepanjang tahun lalu tak terlepas dari upaya Bank BTN memperluas jaringan kantor untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan. Di samping itu, keberhasilan perbankan komersial juga merupakan hasil terbentuknya fungsi Relationship Manager (RM) yang bertanggung jawab membina hubungan dengan nasabah perusahaan.

now has adequate resources to seek and collect institutional funds.

The next strategy is to drive more collaborations with middle and low segments such as university, primary and high schools and hospitals through Payment Point, Online school fees payment and PPO B2B services.

Bank BTN always exerts its utmost efforts in providing one stop service to customers, which comprised all types of funding products, loans and services available to support the needs of institutional and individual customers.

Bank BTN is aware that customer loyalty can only be built with optimal services and added values. To build and maintain customer loyalty, Bank BTN routinely organizes sessions for Customer Loyalty Program. The program that involves active role of Bank BTN's management is run through sports tournaments, arts and other cultural appreciation activities.

Services

As a total banking solution provider, Bank BTN also provides services for institutions such as bank guarantee, online payroll, tax payment, payment point for utilities payment (electricity, phone and water) and school fees of schools or universities.

Commercial Banking Strategy

The growth in commercial banking portfolio throughout last year is not apart from Bank BTN's efforts to expand its office network as an effort to ease and speed up services. Besides that, the success in commercial banking was also a result of the establishment of Relationship Manager (RM) function that is responsible for building relationship with customers.

Menghadapi persaingan yang kian ketat di bisnis perbankan komersial, Bank BTN selalu melengkapi diri dengan menawarkan produk dan layanan yang kompetitif bagi nasabah. Salah satu caranya adalah dengan mendorong kantor cabang untuk memonitor Kredit Konstruksi yang sudah terbit Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SP2K) tetapi belum akad, untuk dapat segera direalisasikan. Bank BTN juga selalu memantau waktu penarikan Kredit Konstruksi, sehingga dapat segera menarik kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, Bank BTN memberikan plafon Kredit yang menarik kepada para pengembang prima, serta menentukan pengembang sasaran utama (*hot prospect developer*). Dengan cara ini, Bank BTN optimistis dapat tetap menjadi pemimpin pasar di segmen tersebut.

Meskipun menjadi pemimpin pasar yang dominan pada KPR bersubsidi untuk masyarakat menengah ke bawah, Bank BTN tidak melupakan usaha lainnya demi menjaga rasio likuiditas yang sehat serta pelayanan menyeluruh bagi nasabah. Untuk itu, Bank BTN pun tetap menawarkan KPR kepada golongan menengah atas, memelihara pemberian kredit perumahan Non KPR, dan pemberian kredit Non Perumahan seperti kredit komersial skala menengah dan besar.

Bank BTN juga akan melakukan penawaran langsung kepada Lembaga BUMN atau swasta dengan prioritas sektor berikut ini:

1. Sektor Pendidikan
2. Sektor Kesehatan
3. Sektor Telekomunikasi
4. Sektor Infrastruktur
5. Sektor Terkait Perumahan
6. Sektor lainnya.

Dengan dukungan sekitar enam juta pelanggan kredit dan pendanaan, maka Bank BTN memiliki fondasi yang kuat menjalankan *cross-selling* produk dan jasa yang ditawarkan. Hal ini juga memungkinkan Bank BTN melakukan ekspansi jumlah portofolio kredit non-perumahan. Hal ini tercermin dari bertumbuhnya porsi portofolio kredit non-perumahan sejak tahun 2008 hingga 2010 lalu seperti terlihat pada grafik di bawah ini sehingga mencapai diversifikasi kredit perumahan dan non perumahan sebesar 85% : 15%.

Facing an intensifying competition in commercial banking business, Bank BTN continuously arms itself with competitive products and services offered to customers. One approach to realize it is by encouraging the branch offices to monitor Construction Loans which have been issued with Approval Letter for Loan Disbursement (SP2K) but have yet to secure pledge, to be immediately realized. Bank BTN keeps to monitor the withdrawal period of Construction Loans so that it can be withdrawn immediately, yet still follows the prudent principles. The next step is Bank BTN offers an attractive loan limit to the prime developers and selects the hot prospect developers. Through this approach, Bank BTN is optimistic to maintain its position as a market leader in the segment.

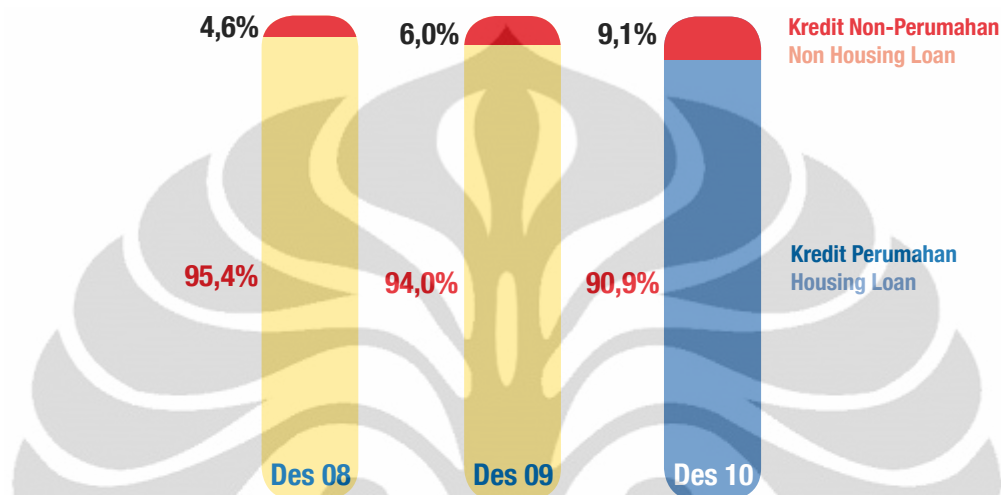
In spite of being market leader whose dominance in subsidized mortgages targeting the middle lower segment, Bank BTN does not disregard other segments to secure a sound liquidity ratio and total services for all customers. Bank BTN, thus, also offers mortgages for middle upper segment and maintain non-mortgages housing loans and non-housing loans like middle and large scale commercial loans.

Bank BTN also has direct offers to the Government and private institutions with the following priority sectors:

1. Education
2. Health
3. Telecommunication
4. Infrastructure
5. Housing related
6. Others.

Supported by approximately six million lending and funding, Bank BTN has a strong foundation to do products and services cross-selling. This also allows Bank BTN to take steps in expanding its non housing loans portfolio. This has been reflected in the growth of non housing portion since 2008 up to 2010 as shown by the below graphic, to achieve housing and non-housing loans as 85% : 15%.

Porsi Kredit Perumahan & Non-Perumahan Portion of Housing & Non Housing Loan



UNIT USAHA SYARIAH

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, kehadiran perbankan Syariah menjadi kebutuhan yang penting di Indonesia. Membaca kebutuhan ini, sejak tahun 2004 Bank BTN tak hanya melayani perbankan konvensional, tapi juga menawarkan produk dan jasa pembiayaan dan pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk menjaga akidah dan prinsip Islam yang berlaku, Bank BTN selalu berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah sebelum menerbitkan produk dan jasa Syariah yang ditawarkan. Dewan Pengawas Syariah ini terdiri dari satu orang ketua dan dua orang anggota yang ketiganya merupakan anggota dari Dewan Syariah Nasional.

SHARIA BUSINESS UNIT

As a country with the largest Moslem population in the world, the presence of Sharia banking is an essential necessity in Indonesia. Identifying such a need, since 2004, Bank BTN does not only serve conventional banking, but also offers financing and funding products and services which conform to the Islamic principles. To keep with the Islamic beliefs and principles, Bank BTN always consults the Sharia Supervisory Board before offering Shariah products and services. The Board comprises of one chief and two members who are members of the National Sharia Board.

Produk Syariah

Sharia Products

Produk Pembiayaan Financing Products

1. KPR BTN Sejahtera Tapak iB
2. KPR BTN Sejahtera Susun iB
3. KPR BTN Platinum iB
4. KPR BTN Indent iB
5. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB
6. Pembiayaan Multijasa BTN iB
7. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB
8. Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB
9. Pembiayaan Talangan Haji BTN iB
10. Pembiayaan Gadai BTN iB

Produk Pembiayaan Financing Products

11. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB
12. Pembiayaan Investasi BTN iB
13. Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Produk Dana Funding Products

1. Tabungan BTN Batara iB
2. Tabungan BTN Prima iB
3. Tabungan BTN Haji iB
4. Deposito BTN iB
5. Giro BTN iB
6. Giro BTN Investa iB

Pada tahun 2010, Unit Usaha Syariah (UUS) berhasil mencetak kinerja memuaskan. Hal tersebut tercermin dalam peningkatan total laba sebesar 11,48% dari sebelumnya di tahun 2009 yang sebesar Rp 31,7 miliar menjadi sebesar Rp 35,3 miliar di tahun 2010.

Pencapaian ini diperoleh dari produk-produk utama UUS yang meliputi pembiayaan konsumen (KPR BTN iB) dan pembiayaan komersial yang meliputi Pembiayaan Modal Kerja BTN iB dan Pembiayaan Konstruksi BTN iB. Perluasan jaringan pun menjadi faktor pendukung berkembangnya UUS Bank BTN. Saat ini, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan Syariah dengan mudah melalui jaringan UUS Bank BTN yang tersebar di 20 Kantor Cabang Syariah (KCS), 8 kantor cabang pembantu syariah dan 207 Kantor Layanan Syariah (KLS).

Dalam menjalankan usahanya, UUS Bank BTN memfokuskan bisnisnya pada produk pembiayaan rumah, pembiayaan komersial, dan transaksi ritel lainnya. Bank BTN yakin UUS dapat menjawab kebutuhan nasabah yang memprioritaskan prinsip-prinsip Islam dalam bertransaksi, dengan memberikan nilai tambah berupa keunggulan Bank BTN dalam sebagai bank penyalur pembiayaan perumahan terbesar di Indonesia.

In 2010, the Sharia Business Unit (UUS) has successfully recorded a satisfactory performance. It is reflected in the increase of total income by 11.48% from Rp 31.7 billion in 2009 to Rp 35.3 billion in 2010.

The achievement was from UUS' main products comprising of consumer funding (KPR BTN iB) and commercial funding consisting of BTN iB's working capital financing and BTN iB's construction financing. The network expansion is also among the contributing factors for the growth. Presently, customers can do Sharia banking transactions with ease in UUS Bank BTN's network that is available in 20 Sharia Branch Offices (KCS), 8 Sharia Sub-Branch Offices and 207 Sharia Service Offices (KLS).

In running its business, UUS Bank BTN focuses its business on housing financing products, commercial financing and other retail transactions. Bank BTN is confident that UUS will be able to meet the needs of customers who prioritize Islamic principles in their transactions by providing added value in the form of advantages of Bank BTN as the largest housing finance provider bank in Indonesia.

Produk Pembiayaan Syariah

Per tanggal 31 Desember 2010, posisi pembiayaan Syariah Bank BTN mengalami peningkatan sebesar 42,62% dari Rp 1,99 triliun pada 2009 menjadi Rp 2,84 triliun tahun 2010.

► KPR BTN iB dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Bank BTN menawarkan produk ini dengan prinsip jual beli (*Murabahah*) dengan tingkat harga dan margin yang disepakati bersama

Sharia Financing Products

As of 31 December 2010, the position of Bank BTN's sharia financing was up 42.62% from Rp 1.99 trillion in 2009 to Rp 2.84 trillion in 2010.

► BTN iB mortgages and BTN iB Vehicles Financing

Bank BTN offers these products under buy sell principle (*Murabahah*) with a price and margin mutually agreed on with our customers. Based

dengan nasabah. Berdasarkan prinsip *Murabahah*, Bank BTN membeli rumah, apartemen, atau kendaraan bermotor yang diinginkan oleh nasabah kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dalam tingkat harga dan marjin yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, nasabah akan membayar secara periodik kepada Bank BTN, dengan nilai setara dengan pembayaran angsuran kendaraan atau rumah konvensional pada umumnya.

► **Pembiayaan Modal Kerja BTN iB**

Dalam pembiayaan modal kerja ini, Bank BTN menggunakan akad *Mudharabah*. Dengan prinsip ini, Bank BTN akan menyediakan modal kerja bagi bisnis nasabah (*Mudharib*). Selanjutnya, nasabah akan mengembalikan pembiayaan tersebut berdasarkan bagi hasil pendapatan yang didapat dari kegiatan bisnis yang sedang dibiayai. Pembagian bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank BTN dan nasabah.

► **Pembiayaan Konstruksi BTN iB**

Pembiayaan Konstruksi BTN iB atau dahulu bernama Pembiayaan Yasa Griya iB merupakan fasilitas pembiayaan konstruksi perumahan dengan menggunakan akad *Musarakah*. Lewat produk ini, Bank BTN menyediakan pembiayaan bagi pengembang perumahan dan kontraktor untuk dalam bentuk modal kerja untuk membiayai pembangunan perumahan dan infrastruktur terkait. Nantinya, nasabah akan mengembalikan pembiayaan dari Bank BTN, beserta bagi hasil pendapatan nasabah dari bisnis yang dibiayai.

► **KPR BTN Indent iB**

Dalam pembiayaan ini, Bank BTN menggunakan akad *Isthisna*. Melalui prinsip ini, Bank BTN membeli perumahan yang dibangun oleh pengembang atas dasar pesanan atau permintaan nasabah. Lalu Bank BTN menjual perumahan tersebut kepada nasabah setelah sebelumnya menyepakati harga dan imbal hasil atas rumah tersebut. Nantinya, nasabah akan membayar harga dan imbal hasil tersebut secara berkala dengan jumlah yang setara dengan jumlah pembayaran angsuran KPR rumah konvensional.

► **Pembiayaan Investasi BTN iB**

Bank BTN menyediakan pembiayaan ini bagi nasabah lembaga atau perusahaan guna

on the *Murabahah* principle, Bank BTN buys houses, apartments or motor vehicles chosen by customers then resells it to customers at the mutually agreed price and margin. Afterwards, customers will pay periodically to Bank BTN a value equal to the conventional installment for the vehicles or houses.

► **BTN iB Working Capital Financing**

In this type of financing, Bank BTN adopts *Mudharabah* pledge. Under the principle, Bank BTN will provide working capital for customers' business (*Mudharib*). After that, customers will return the finance based on sharing of income earned from the financed business. The income sharing is determined based on the agreement between Bank BTN and its customers.

► **BTN iB Constructions Financing**

BTN iB construction financing or previously named Yasa Griya iB Financing is a financing facility for housing constructions adopting the *Musarakah* pledge. With this product, Bank BTN provides financing for housing developers and contractors in the form of working capital to finance related housing and infrastructure constructions. Customers later will return the financing together with the share of income the customers earn from the financed business.

► **BTN Indent iB Mortgages**

In this financing model, Bank BTN uses the *Isthisna* pledge. Under this principle, Bank BTN buys house estates built by developers based on the order or request of customers. Bank BTN then sells the house to customers at the agreed price and profit. Later, the customers will pay the price and profit periodically with an amount that is similar to the installments of conventional mortgages.

► **BTN iB Investment Financing Bank**

BTN provides financing for institutional or corporate customers to meet their capital

memenuhi kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) seperti pembelian mesin, pembangunan atau rehabilitasi gedung, pengadaan peralatan laboratorium, dan lainnya. Pembiayaan ini disalurkan dengan sistem akad jual beli (*Murabahah*), atau kerjasama, atau *joint venture* (Musyarakah). Selanjutnya, nasabah akan mengembalikan pembiayaan ini sesuai dengan *cash flow* yang telah disepakati.

► **Pembiayaan Gadai BTN iB**

Pembiayaan ini sejenis dengan pegadaian. Artinya, pembiayaan disalurkan berdasarkan harta nasabah, berupa emas sebagai barang yang digadaikan. Kemudian Bank BTN akan mengenakan imbal jasa atas penyimpanan barang gadai (*Ujrah*) tersebut.

Sepanjang tahun 2010 realisasi penyaluran pembiayaan baru UUS Bank BTN mencapai Rp 1,83 triliun, atau lebih tinggi 30,25% dari Rp 1,40 triliun pada tahun 2009.

expenditures such as machinery purchases, building constructions or renovations, provisions of laboratory equipment and others. The financing is channeled under the sell buy pledge system (*Murabahah*), or joint venture (*Musyarakah*). Customers will return the financing based on the agreed cash flow.

► **BTN iB Pawn Financing**

The financing is similar to pawning. It means that the financing is channeled based on the customers' assets, in this case gold as a pawned asset. Then, Bank BTN will apply fees on the storage of the pawned assets.

Throughout 2010 the realization of new financing by Bank BTN Sharia Business Unit reached Rp 1.83 trillion or 30.25% higher than Rp 1.40 trillion in 2009.

Realisasi Pembiayaan Syariah Dari Tahun 2008 Hingga 2010 **Realization of Sharia Financing From 2008 To 2010**

Pembiayaan Syariah Sharia Financing	2008		2009		2010	
	Rekening Account	Rp miliar Rp billion	Rekening Account	Rp miliar Rp billion	Rekening Account	Rp miliar Rp billion
Pembiayaan Konsumer Consumer Financing						
KPR Subsidi Subsidized Mortgages	2.582	88	1.596	71	2.340	86
KPR BTN iB BTN iB mortgages	2.582	88	1.596	71	2.148	75
KPR BTN Sejahtera iB (FLPP) BTN Sejahtera iB Mortgages	-	-	-	-	192	11
KPR Non Subsidi Non Subsidized Mortgages	2.734	317	2.653	367	3.684	413
KPR BTN Platinum iB BTN Platinum iB Mortgages	2.734	317	2.574	354	3.571	399
Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB Bangun Rumah BTN iB Financing	-	-	79	13	113	14
Non Perumahan Non Housing	507	30	149	4	695	11
Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB BTN iB Motor Vehicle Financing	-	-	-	-	51	4

Pembiayaan Syariah Sharia Financing	2008		2009		2010	
	Rekening Account	Rp miliar Rp billion	Rekening Account	Rp miliar Rp billion	Rekening Account	Rp miliar Rp billion
Pembiayaan Gadai BTN iB BTN iB Pawn Financing	507	30	64	4	644	7
Multiguna Lainnya BTN iB BTN iB Other Multipurpose	-	-	85	1	-	-
Pembiayaan Komersial Commercial Financing						
Pembiayaan Konstruksi BTN iB BTN iB Construction Financing	175	132	170	154	161	319
Pembiayaan Modal Kerja BTN iB BTN iB Working Capital Financing	778	473	1.047	721	1.220	852
Pembiayaan Investasi BTN iB BTN iB Investment Financing	45	13	38	90	79	126
Pembiayaan KUR BTN iB KUR BTN iB Financing	-	-	-	-	104	26
Total Sharia Financing	6.821	1.053	5.653	1.408	8.283	1.833

Produk Pendanaan Syariah

Hingga 31 Desember 2010, pendanaan Syariah Bank BTN mencapai Rp 2,40 triliun. Jumlah ini meningkat 66,20% dibandingkan dengan pendanaan Syariah Bank BTN tahun 2009 yang mencapai Rp 1,44 triliun. Dana ini dihimpun dari total 31.327 rekening pendanaan Syariah Bank BTN. Jumlah ini lebih tinggi dari jumlah rekening pendanaan Syariah Bank BTN tahun 2009 yang sebanyak 22.618 rekening.

Berikut adalah produk-produk pendanaan Syariah Bank BTN yang ditawarkan kepada nasabah:

▶ Tabungan BTN Prima iB

Produk Tabungan BTN Prima iB atau dahulu bernama Tabungan Investa Batara iB melandaskan layanannya pada prinsip *Mudharabah* (bagi hasil). Prinsip ini mengakui bahwa pendanaan yang ditanam oleh nasabah merupakan investasi dimana nasabah akan menerima pembagian hasil sesuai dengan nisbah atau rasio yang telah disepakati dengan Bank BTN. *Nisbah* ini kemudian akan dibayarkan ke rekening nasabah secara bulanan.

Tahun 2010 Bank BTN mencatat peningkatan jumlah total Tabungan BTN Prima iB sebesar

Sharia Funding Products

Up to the 31 December 2010, Bank BTN's sharia funding reached Rp 2.40 trillion. The amount was an increase of 66.20% compared to Rp 1.44 trillion in 2009. The funding came from 31,327 accounts in Bank BTN Sharia's funding. The amount is above the total of accounts in 2009, which was at 22,618.

The following is Bank BTN's sharia funding products offered to customers:

▶ BTN Prima iB Saving Account

BTN Prima iB saving accounts, or previously named Investa Batara iB, bases its services on the *Mudharabah* (yield sharing) principle. The principle acknowledges the funds deposited by customers as an investment in which customers will receive yield sharing based on the ratio agreed upon with Bank BTN. The amount will be transferred monthly to the customers' account.

In 2010 Bank BTN recorded a growth in the amount of BTN Prima iB savings by 44.35%

44,35% dari Rp 124 miliar di tahun 2009 menjadi Rp 179 miliar di tahun 2010.

▶ **Tabungan BTN Batara iB**

Tabungan BTN Batara iB menerapkan prinsip *Wadiah* atau titipan. Melalui prinsip ini, Bank BTN tidak menjanjikan akan memberikan tambahan atau hadiah kecuali dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan, atau yang kerap disebut *athaya*. Dalam hal ini, Bank BTN memberikan bonus secara sukarela. Saat ini, kebijakan Bank BTN menerapkan pemberian bonus secara bulanan. Dengan begitu, nasabah akan menerima pembagian bonus tersebut ke dalam rekening setiap bulan. Hingga 31 Desember 2010, jumlah total Tabungan Batara iB meningkat 19,74% dari Rp 76 miliar di tahun 2009 menjadi Rp 91 miliar di tahun 2010.

▶ **Tabungan BTN Haji iB**

Untuk memenuhi kebutuhan ibadah Haji, Bank BTN pun menyediakan Tabungan BTN Haji iB atau sebelumnya bernama Tabungan Baitulah Batara iB. Tabungan ini memang khusus digunakan untuk melengkapi kebutuhan naik haji nasabah dan didasarkan pada prinsip *Mudharabah*. Dengan prinsip ini, nasabah akan menerima pembagian bagi hasil sesuai nisbah atau rasio yang telah disepakati dengan Bank. Selanjutnya, Bank BTN akan membayar pembagian hasil tersebut ke dalam rekening nasabah setiap bulan. Hingga 31 Desember 2010, total Tabungan BTN Haji iB mencapai Rp 5,7 miliar. Jumlah ini meningkat dari Rp 3,8 miliar pada tahun 2009.

▶ **Deposito BTN iB**

Penawaran investasi diberikan melalui Deposito BTN iB yang mengusung prinsip *Mudharabah*. Produk ini merupakan bentuk kemitraan bisnis antara Bank BTN dengan nasabah. Dengan prinsip ini, nasabah hanya dapat menarik rekening ini pada saat yang telah disepakati bersama antara nasabah dengan Bank BTN. Nasabah sebagai pemilik dana atau yang disebut *sohibul maal* bertindak sebagai penyedia dana. Sementara bank sebagai pengelola dana atau *mudharib*, akan bertanggung jawab mengelola dana tersebut. Kemudian, hasil investasi akan dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan *nisbah* atau rasio bagi hasil yang telah disepakati bersama. Hingga akhir tahun 2010, total Deposito BTN

from Rp 124 billion in 2009 to Rp 179 billion in 2010.

▶ **BTN Batara iB Saving Account**

BTN Batara iB adopts the *Wadiah* or the deposit principle. Under this principle, Bank BTN offers no extras or rewards to the customers, with exception of an unpromised bonus/*athaya*. In this case, Bank BTN gives a voluntary bonus. Presently, Bank BTN's policy is to give monthly bonuses. Hence, customers will receive a share of the bonus paid to their accounts monthly. Up to the 31 December 2010, the amount of Batara iB saving accounts increased 19.74% from Rp 76 billion in 2009 to Rp 91 billion in 2010.

▶ **BTN Haji iB Saving Account**

To meet the needs of the Haji pilgrimages, Bank BTN offers the BTN Haji iB saving accounts or previously named the Tabungan Baitulah Batara iB. The saving account is specially intended for assisting the needs of customers' hajj pilgrimages and is based on the *Mudharabah* principle. With this principle, customers will receive yield sharing based on the ratio agreed upon with the Bank. Then, Bank BTN will pay the share to the customers' account monthly. Up to the 31 December 2010, the total of BTN Haji iB saving accounts reached Rp 5.7 billion which increased from Rp 3.8 billion in 2009.

▶ **BTN iB Time Deposit**

The investment opportunity is available through the BTN iB Time Deposit product that applies the *Mudharabah* principle. The product is a business joint venture between Bank BTN and its customers. Using this principle, the customers can only withdraw their deposits at the mutually agreed point in time. Customers as a fund owner, or called *sohibul maal*, act as a fund supplier. While the bank as the fund manager, or *mudharib*, will be responsible to manage the fund. Then, the investment yield will be shared among the customers and the bank based on the agreed yield sharing ratio. At the end of 2010, the total BTN iB deposits rose 74.80% from Rp 1.13 trillion in 2009 to Rp 1.99 trillion in 2010.

iB telah meningkat 74,80% dari Rp 1,13 triliun di tahun 2009 menjadi Rp 1,99 triliun tahun 2010.

► **Giro BTN iB**

Giro BTN iB menerapkan akad *wadiah* atau titipan. Dengan prinsip ini, nasabah dapat menarik dana kapan saja, namun Bank BTN tidak menyediakan imbalan kecuali dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan. Adapun jumlah total Giro Batara iB tahun 2010 turun dari Rp 107,7 miliar di tahun 2009 menjadi Rp 99 miliar di tahun 2010.

► **Giro BTN Investa iB**

Giro BTN Investa iB merupakan produk yang baru meluncur November 2009 dan menerapkan prinsip *Mudharabah*. Dengan prinsip ini, nasabah diharuskan menjaga saldo minimal tertentu selama jangka waktu yang telah disepakati bersama. Kemudian, nasabah akan menerima bagi hasil sesuai *nisbah* atau rasio yang telah disepakati dengan Bank BTN. Hingga 31 Desember 2010, total Giro BTN Investa iB sebesar Rp 39 miliar, meningkat jauh dari tahun 2009 yang sebesar Rp 3 miliar.

► **BTN iB Demand Deposit**

This product applies the *wadiah* or the deposit principle. Based on this principle, customers are allowed to withdraw their funds at anytime, yet Bank BTN offers no return with an exception of an unpromised bonus. The total of Giro Batara iB in 2010 declined from Rp 107.7 billion in 2009 to Rp 99 billion in 2010.

► **BTN Investa iB Demand Deposit**

BTN Investa iB Demand Deposit is a new product that was launched in November of 2009 and adopts the *Mudharabah* principle. The principle requires customers to maintain a minimum balance for a mutually agreed period. The customers will then receive yield sharing based on the ratio agreed upon with Bank BTN. Up until the 31 December 2010, the total amount of BTN Investa iB Demand Deposits was Rp 39 billion, increasing significantly from Rp 3 billion in 2009.

Peningkatan *Brand Awareness* Produk Syariah

Sebagai langkah strategis dalam memperkenalkan produk Syariah kepada nasabah luas, Bank BTN senantiasa aktif berpartisipasi dalam acara-acara seminar yang berhubungan dengan produk-produk Pembiayaan Syariah. Selain bertujuan meningkatkan *brand awareness*, kegiatan ini bertujuan menjangkau lebih banyak nasabah Syariah. Di samping mengikuti seminar, Bank BTN pun kerap melakukan pemasaran langsung melalui tim penjualan perseorangan. Terbukti, kegiatan promosi semacam ini berhasil mendongkrak bisnis Syariah.

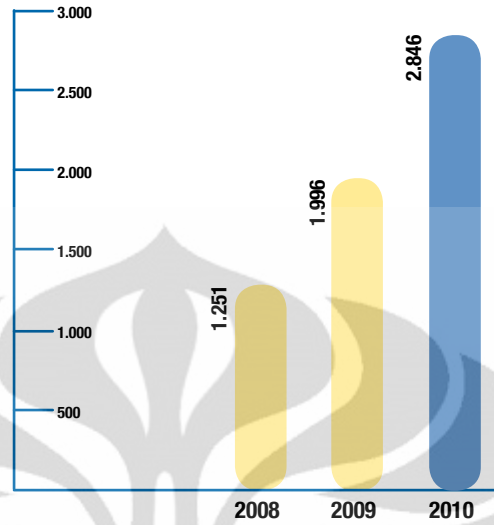
Untuk memberikan nilai tambah berkelanjutan kepada nasabah, Bank BTN bertekad untuk meneruskan pengembangan bisnis Syariah. Untuk itu, Bank BTN berkomitmen menambah jumlah cabang guna mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi di BTN Syariah. Hingga tahun 2010 layanan Syariah Bank BTN dapat diakses melalui 20 kantor cabang syariah, 8 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), 207 Kantor Layanan Syariah pada Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Pembantu Konvensional.

Intensifying Sharia Product Brand Awareness

As a strategic step in introducing Sharia products to a wide number of customers, Bank BTN is always proactive in participating in seminar events relevant to Sharia Financing products. Other than to increase brand awareness, such activities target to capture more Sharia customers. In addition to seminars, Bank BTN often employs direct marketing through its individual sales team. These promotional activities are proven to leverage Sharia business.

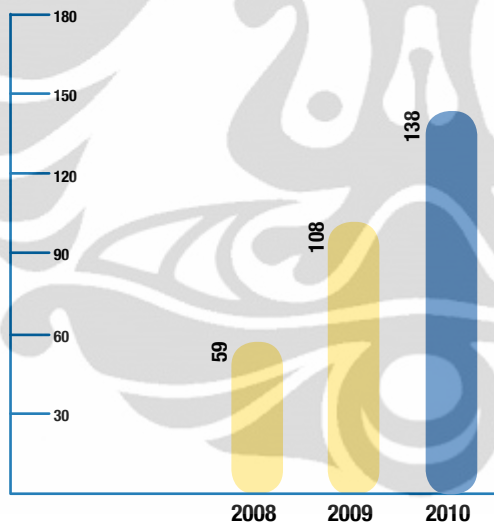
To create added value to customers in a sustainable way, Bank BTN strongly intends to continue its Sharia business development. For that purpose, Bank BTN is committed to add more branches to give an easy way for customers to do transactions in the Sharia business. Up to 2010, Bank BTN Sharia services could be accessed at 20 Sharia branch offices, 8 Sharia Sub-Branch Offices, 207 Sharia Service Offices at the conventional Branch Offices and Sub Branch Offices.

Pembiayaan Syariah (dalam miliar Rp)
Sharia Financing (In Rp billion)

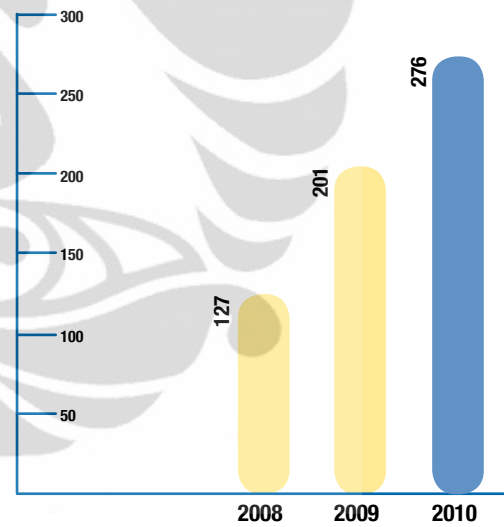


Simpanan Syariah (Dalam Rp miliar)
Sharia Deposits (In Rp billion)

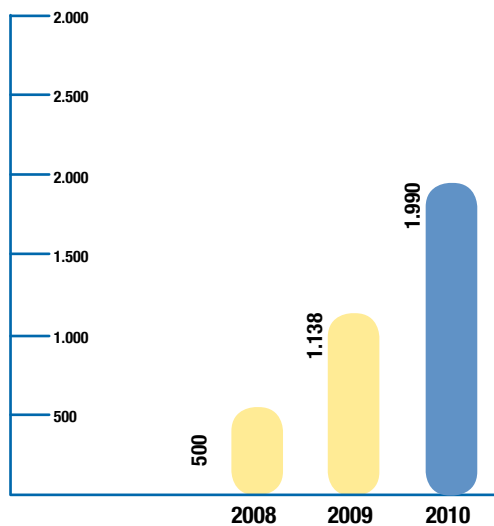
Giro Syariah
Sharia Demand Deposits



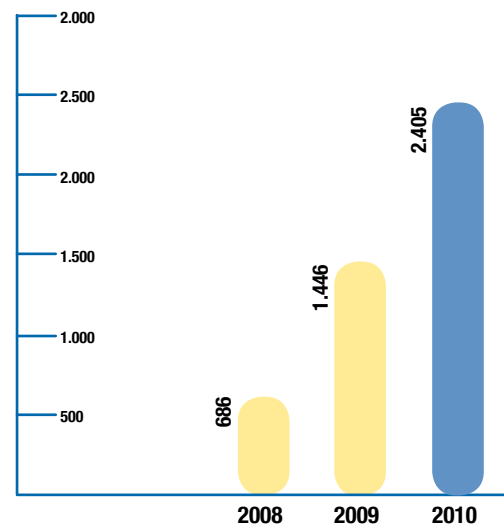
Tabungan Syariah
Sharia Saving Accounts



Deposito Syariah
Sharia Time Deposits



Total Pendanaan Syariah
Total Sharia Financing



TINJAUAN OPERASIONAL OPERATIONAL REVIEW

TEKNOLOGI INFORMASI

Sebagai salah satu dari sepuluh bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset dan penyaluran kredit, Bank BTN menyadari bahwa peningkatan jumlah nasabah selalu diikuti oleh komitmen untuk meningkatkan layanan. Salah satu cara meningkatkan layanan adalah dengan memperbaiki kehandalan teknologi informasi (TI) dalam setiap layanan dan *delivery* produk-produk perbankan kami. Selain bertujuan meningkatkan layanan, TI yang handal pun mendukung kami dalam melakukan efisiensi di berbagai bidang serta akselerasi penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan agar Bank BTN mampu mempertahankan posisi sebagai penyedia pembiayaan perumahan terdepan di Indonesia.

Menyadari pentingnya TI bagi Bank BTN, sejak 2008 silam Bank BTN telah menyusun *blueprint* arah perkembangan teknologi dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2008-2012. Dalam RSTI tersebut, Bank BTN telah menetapkan Visi dan Misi TI sesuai dengan tahapan pencapaian tujuan yang diharapkan sampai dengan tahun 2012:

Visi

Mensinergikan Strategi TI dan Strategi Bisnis Dengan Memberikan Layanan Berkualitas, Melampaui Ekspektasi Nasabah, Mendorong Profitabilitas dan Fokus Pada Inovasi Produk

Misi

- ▶ Melakukan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan
- ▶ Menerapkan Transformasi Proses Bisnis Secara Menyeluruh
- ▶ Menerapkan GCG Secara Utuh dan Berkesinambungan
- ▶ Melakukan *Update* Teknologi Untuk Memenuhi dan Melampaui Kebutuhan Nasabah

Dengan misi dan visi yang jelas, sepanjang 2010 melalui *Information and Communication Technology Division* (ICTD), Bank BTN melaksanakan program-program penerapan di bidang IT dan operasional sebagai berikut:

- a. Melanjutkan Pemenuhan Untuk Normalisasi Operasional ICTD dan Implementasi Konsep *Dual Data Center* (DC2)

INFORMATION TECHNOLOGY

As one of ten largest banks based on assets and loan disbursements in Indonesia, Bank BTN is aware that the increase in the number of customers should always go along with the commitment to improve service. One step to improve service is by refining the capability of information technology (IT) in each of services and delivery of our banking products. Other than aimed at supporting our services, the competent IT also backs us in executing efficiency efforts in various aspects and accelerating the implementation of risk management and corporate governance for enabling Bank BTN to maintain its position as a leading housing provider bank in Indonesia.

Realizing the critical role of IT for Bank BTN, since 2008 Bank BTN has devised a blueprint on its Strategic Plan of Technology Information (RSTI) 2008-2012. In the plan, Bank BTN has defined the IT vision and mission in line with the achievement of action plan phases up to 2012:

Vision

Aligning IT Strategy and Business Strategy by Delivering Service Quality, Exceeding Customer Expectation, Driving Profitability, and Focusing on Product Innovation

Mission

- ▶ Continuously Improve Human Resource Development
- ▶ Implementing Business Process Transformation
- ▶ Implementing Good Corporate Governance
- ▶ Technology Update to Meet and Exceed The Customer's Requirement

With a definite mission and vision, throughout 2010 through its Information and Communication Technology Division (ICTD), Bank BTN has carried out the implementation programs in the following IT and operational areas as follows:

- a. Continue to Fulfil the Operational Normalization of ICTD and Implementation of Dual Data Centre (DC2)



► **Pemindahan lokasi *Disaster Recovery Site* ke *Operational Center* yang dibangun untuk difungsikan sementara sebagai *DC2*.**

Bank BTN menyadari pentingnya pengamanan melalui pemulihan data (*data recovery*) dan pembentukan data cadangan (*back up data*) setiap nasabah melalui konsep *DC2* dalam sistem *Disaster Recovery Center*.

Kesadaran ini bertolak pada pengalaman ketika kantor pusat Bank BTN mengalami musibah kebakaran pada pagi hari tanggal 2 Februari 2009. Peristiwa kebakaran yang terjadi di lantai *basement* dan asap dari kabel yang terbakar itu secara nyata menimbulkan kerusakan pada beberapa peralatan dan sistem teknologi. Demi mencegah dampak yang lebih besar saat itu, Bank BTN pun mengalihkan sistem operasional ke *Disaster Recovery Center* yang berada di lokasi yang berbeda. Hasilnya, pada jam 11.00 WIB hari yang sama, sebanyak 58 kantor telah dapat beroperasi kembali di hari yang sama sejak kejadian kebakaran tersebut. Sehingga, seluruh kantor Bank BTN dapat beroperasi seperti sedia kala di hari kedua.

► **The relocation of *Disaster Recovery Site* to the *Operational Centre* set up to temporarily function as *DC2*.**

Bank BTN understands the importance of the security through data recovery and provision of back up data of each customer through *DC2* in the *Disaster Recovery Center* system.

The awareness arose from experience when a fire broke out in Bank BTN's head office on 2nd February 2009 morning. The incident took place in the basement level and smoke from the burnt cables caused physical damages on a number of equipments and technology system. To prevent a more severe impact, Bank BTN at that time relocated its operational system into the *Disaster Recovery Center* located in a different location. The outcome was at 11.00 local time on the same day the fire broke out a total of 58 offices could resume operation. Subsequently, all Bank BTN offices can operate normally on the second day.

Belajar dari pengalaman tersebut, sejak awal 2010 Bank BTN telah mengembangkan sistem DC2 yang selangkah lebih maju dibandingkan dengan sistem *Data Center & Disaster Recovery Center* (DC&DRC). Dengan pengembangan Dual Data Center ini Bank BTN memiliki data yang sama secara realtime pada kedua DC tersebut. Data center (DC) pun dapat mendukung operasional bisnis Bank BTN lewat pengelolaan dan penyediaan data yang lebih baik. Pada sistem Dual Data Center, DC yang berlaku sebagai DC production melakukan replikasi secara *realtime* dan *production* dapat dipindahkan sewaktu-waktu.

Pengembangan dari sistem DC&DRC menjadi sistem Dual DC kemudian dilanjutkan dengan proses pemindahan *Disaster Recovery Site* ke ruang *Operational Center* yang untuk sementara difungsikan sebagai DC2 yang telah disiapkan dengan kualitas ruangan sesuai dengan *Data Center* (DC1) yang memenuhi standar *best practices*.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di *Data Center* dilakukan dengan menyediakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pemahaman terhadap operasional *Data Center*. Seluruh personal telah mendapatkan pelatihan CDCP. Sepuluh orang diantaranya telah mendapatkan sertifikasi CDCP (*Certified Data Center Profesional*).

Ke depan, Bank BTN menargetkan pada tahun 2011 sudah memiliki 2 unit DC dan 1 unit *operation center* yang persiapannya telah dilakukan sejak tahun 2010 lalu.

Semua inisiatif perbaikan akan terus dilakukan agar kualitas layanan TI dapat mencapai hasil yang lebih handal serta menghindari risiko reputasi dan risiko operasional inisiatif dalam penyusunan dokumen-dokumen kebijakan internal perusahaan yang berhubungan dengan IT Governance. Bank BTN juga telah menyusun dan mengesahkan kebijakan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai standarisasi dalam pelaksanaan jika terjadi kondisi bencana.

Learning from the experience, since the beginning 2010 Bank BTN has developed a DC2 system that is one step ahead compared to *Data Center & Disaster Recovery center* (DC&DRC) system. With the development in Dual Data Center Bank BTN has a uniform realtime data base at both DCs. The Data Center (DC) is also capable to support Bank BTN's business through a better data management and provision. In the Dual Data system, the DC serving as DC production performs realtime replication and production that is portable at anytime.

The development of DC&DRC system into Dual DC system then was continued with the relocation of *Disaster Recover Site* into the *Operational Center* room that is temporarily used as DC2. The room has been prepared with the quality on par with the *Data Center* (DC1) that meets the best practices standard.

In addition, the improvement of human resources quality at the *Data Center* is carried out by organizing workshops to enhance the understanding on the *Data Center* operations. The entire personnel have undergone the CDCP. Ten of them have obtained CDCP (*Certified Data Center Profesional*) certification.

Moving forward, Bank BTN targets to have 2 DC units and 1 operation center unit of which the preparation has been started since 2010.

All initiatives for improvements will be continuously implemented so that the IT service quality can achieve a more satisfactory results as well as to prevent the reputation and operational risks the initiatives in mapping the company's internal documents related with IT Governance. Bank BTN has also devised and formalized the *Business Continuity Plan* (BCP) as a standardization in the execution should there be a disastrous circumstances.

▶ Standarisasi Perangkat Keras di Kantor Cabang

Guna mendukung pelayanan kepada cabang dari sisi penyediaan perangkat keras (*hardware*) yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan pelayanan bagi nasabah, maka Bank BTN melakukan standarisasi perangkat *server*, *router*, dan *switch* di seluruh Kantor Cabang.

▶ Portal Service Desk

Selain dari sisi perangkat keras, Bank BTN juga menyediakan saluran (*channel*) bagi internal Bank BTN dalam implementasi penyelesaian insiden/masalah IT maupun eskalasinya melalui satu pintu (*single point of contact*). Solusi penyelesaian masalah IT ini disediakan melalui pemanfaatan aplikasi portal Service Desk.

- b. Merealisasikan kelanjutan proyek 2010 dan inisiatif proyek 2011 yang telah dianggarkan untuk mencapai tahapan misi TI Bank BTN di tahun 2010, yaitu antara lain:

▶ Enterprise Data Warehouse (EDW/iDss)

EDW atau iDss adalah aplikasi teknologi pengganti Management Information System (MIS) untuk kepentingan marketing dalam rangka meningkatkan *fee based income*. Melalui EDW, Bank BTN mampu memiliki profil seluruh dan kinerja debitur, juga data calon debitur yang sedang mengajukan proposal kredit.

Dengan data yang berhasil dikumpulkan melalui EDW, Bank BTN dapat menyusun produk dan strategi pemasaran yang tepat berdasarkan karakteristik calon debitur, segmentasi, demografi, geografi dan lain-lain untuk meningkatkan *fee based income*. Dengan adanya EDW tata kelola Informasi akan menjadi lebih baik serta akan mempercepat dan mendukung proses pengambilan keputusan.

▶ Middleware (iBridge) Sistem berbasis Service Oriented Architecture (SOA)

Dalam rangka mendukung peluncuran suatu produk, program pemasaran atau pun pelayanan kepada nasabah yang bekerjasama dengan pihak ketiga/institusi lain di luar Bank BTN maka diperlukan suatu aplikasi IT yang dapat membantu mempercepat koneksi antara sistem IT yang berbeda di dua atau

▶ Standardization of Hardware at Branch Offices

To support services pertaining to hardware to branches that will later support service improvements to customers, Bank BTN has performed standardization on server, router and switch equipment in all branch offices.

▶ Portal Service Desk

Other than the hardware, Bank BTN also provides channels for the Bank's internal purpose in the settlement implementation towards the incidents/problems in IT or their escalation through a single point of contact. The solution for IT problems is provided through the use of Service Desk portal application.

- b. To realize the continuation of 2010 projects and project initiatives in 2011 that have been budgetted in achieving the phases of IT mission in 2010, among others:

▶ Enterprise Data Warehouse (EDW/iDss)

EDW or iDss is a technology application in place of Management Information System (MIS) for marketing purpose in a bid to drive fee based income. Through EDW, Bank BTN is able to retrieve profiles of the existing debtors and their performance, as well as the prospective debtors that are submitting loans application.

Using the collected data through EDW, Bank BTN can formulate the right products and marketing strategy based on the characteristics of prospective debtors, segmentation, demographic, geography and others to boost its fee-based income. With the EDW, the information governance will improve as well as will speed up and back decision making process.

▶ Service Oriented Architecture (SOA) Base Middleward (iBridge) System

To support the launch of a product, marketing program or service to the customers that are in cooperation with third party/other institutions outside Bank BTN an IT application that can help accelerate the connecting between two different IT systems in two or more institutions. Partnership with the third party can run based

lebih institusi. Kerjasama dengan pihak ketiga tersebut dapat berupa kerjasama online, *host to host*, *link* jaringan atau lainnya yang pada intinya dapat memperluas jaringan usaha dan memberi pelayanan lebih bagi para nasabah.

Tahun 2010 lalu, Bank BTN telah menerapkan aplikasi *Middleware (iBridge)* berbasis Service Oriented Architecture (SOA), suatu teknologi yang mampu menghubungkan dan melakukan translasi berbagai ragam komunikasi sistem antar institusi. Dengan demikian, setelah penandatanganan MoU dengan pihak ketiga, dalam waktu yang singkat SOA akan bisa menterjemahkan (*connect*) kedua sistem yang berbeda sehingga bisa langsung terhubung satu sama lain.

► **Loan Origination System (LOS) eLoan**

Salah satu teknologi baru yang telah dirintis di akhir 2009 dan mulai diadopsi di tahun 2010 adalah *Loan Origination System (LOS)* yang dipopulerkan menjadi *eLoan*. Melalui sistem *eLoan*, semua proposal kredit akan masuk dan diolah secara elektronik berbasis *workflow* sehingga seluruh proses dapat termonitor secara *realtime*, lebih cepat, obyektif dan terstandar di seluruh cabang.

Karena berbasis *web* yang menggunakan teknologi *workflow*, *eLoan* memungkinkan suatu mekanisme *monitoring* dan kontrol seluruh proses persetujuan kredit. Sistem berbasis *web* pun memungkinkan petugas kredit mengakses data dari laptop, PDA, atau perangkat lain dari jarak jauh. Lalu, untuk mempercepat proses informasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan data, sistem *eLoan* juga mengaplikasikan teknologi *digital imaging*. Penggunaan *eLoan* lebih lanjut akan berdampak pada standarisasi, efisiensi, kecepatan, serta ketepatan proses persetujuan kredit yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan ekspansi kredit Bank BTN.

► **Collection and Recovery Management System (CRMS)/eColl**

Pemasangan *eLoan* berbarengan dengan aplikasi CRMS atau juga dikenal sebagai *eColl*. CRMS adalah sistem teknologi yang membantu pengelolaan para debitur yang memiliki tunggakan kredit. *eColl* yang berbasis *web* ini secara otomatis akan membantu

on online, *host to host*, *network link* or other basis, which has a main purpose to expand business network or provide more services to customers.

In 2010, Bank BTN has implemented a *Middleware (iBridge)* application based on Service Oriented Architecture (SOA), a technology that can link and perform translation of numerous system communications inter-institutions. Hence, following the MoU signing with the third party, in near future SOA will be able to connect two different systems so they are directly online one to another.

► **Loan Origination System (LOS) eLoan**

One of the latest technologies initiated at the end of 2009 and to be adopted in 2010 is *Loan Origination System (LOS)* that is popularly introduced as *eLoan*. Through *eLoan* system, all loan applications will go through and be processed electronically on *workflow* basis that the whole process can be monitored in real time, faster, objective and standardized in all branches.

Provided that *eLoan* is a web-based system using *workflow* technology, it allows a monitoring and control mechanism over the entire loan approval process. The web based system also enables the loan officers to have long distant access to data using laptop, PDA or other devices. Then, to speed up the information process and improve efficiency in the data storage, *eLoan* system also applies digital imaging technology. The use of *eLoan* will bring impacts on standardization, efficiency, speed as well as accuracy of loan approval process which subsequently will improve the quality and expansion of Bank BTN's loans.

► **Collection and Recovery Management System (CRMS)/eColl**

The installation of *eLoan* has been done at the same time with CRMS application or known as *eColl*. CRMS is a technology system that assists the managing of debtors who own overdue payments. The web-based *eColl* will automatically help the billing officer to have

petugas penagihan memiliki informasi yang cepat dan akurat atas tunggakan, *terms of payments* debitur serta informasi-informasi lain seperti janji debitur dalam melakukan pembayaran tunggakan karena seluruhnya dapat di *input* dan di *update* melalui PDA dari jarak jauh.

Penggunaan *eColl* berdampak pada kemudahan dalam pembinaan kredit yang akan meningkatkan kinerja penerimaan angsuran dan memperbaiki kualitas kredit yang telah disalurkan. Dengan bantuan teknologi atau sistem *eColl* ini, rasio kredit bermasalah/*Non Performing Loan* (NPL) dan rasio hapus buku bisa ditekan.

- c. Melanjutkan Pengembangan aplikasi PSAK 50/55 dan aplikasi *GL Enterprise* sebagai *interface* yang merupakan salah satu regulasi perbankan yang wajib diterapkan oleh bank

Penerapan aturan PSAK 50/55 merupakan salah satu regulasi akuntansi perbankan yang wajib diterapkan oleh seluruh bank di Indonesia oleh Bank Indonesia pada tahun 2010.

information promptly and accurately on the overdue payments, terms of payments as well as information such debtors' pledges to pay the past due amounts because all information can be inputted and updated via PDA via long distant access.

The use of *eColl* has created an ease in loan collection that will boost performance in taking in payments of installment as well as improve the quality of disbursed loans. With the help of technology or *eColl* system, the Non Performing Loan (NPL) and written off ratios can be minimized.

- c. Continue the development of PSAK50/55 and *GL Enterprise* application serving as an interface that is one of compulsory Banking regulations to be adopted by the Bank.

The implementation of PSAK 50/55 regulation is one of the banking accounting regulations by Bank Indonesia that is mandatory to be implemented by all banks in Indonesia.

Tata Kelola TI

Untuk mendukung implementasi tata kelola perusahaan di bidang informasi teknologi, maka di tahun 2010 dilanjutkan proses penyusunan dokumen-dokumen kebijakan internal perusahaan yang berhubungan dengan aspek *IT Governance*.

Hal ini sesuai dengan regulasi perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/15/PBI/2007 mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

Selain itu, selama 2010 telah dilakukan *review* kebijakan secara reguler antara lain:

- ▶ *Review* Rencana Strategis Sistem Informasi (RSTI) 2008-2012
- ▶ *Review IT Governance*
- ▶ *Review* SOP Teknologi Informasi

Review bertujuan untuk menyesuaikan dan memperbaiki kebijakan-kebijakan tersebut berdasarkan kondisi dan situasi di lapangan agar mampu meningkatkan efektifitas penerapan kebijakan-kebijakan tersebut.

IT Governance

To support the implementation of Corporate Governance in technology information area, in 2010 Bank BTN continued with the mapping process of internal policy documents that are related with the *IT Governance* aspects.

This is in compliance with a banking regulation issued by Bank Indonesia in Bank Indonesia's Regulation (PBI) No.9/15/PBI/2007 on the Implementation of Risk Management in Information Technology Application by the Public Banks.

Moreover, throughout 2010 the Bank has conducted regular review on its policies among others:

- ▶ Review on Strategic Plan of Information system (RSTI) 2008-2012
- ▶ Review on IT Governance
- ▶ Review on IT SOP

The reviews aimed to adjust and improve those policies based on real situations so that we are able to increase effectiveness in implementing the policies.

Investasi di Bidang Teknologi Informasi di Tahun 2010

Untuk mendapatkan infrastruktur TI yang handal, Bank BTN selalu konsisten mengalokasikan sebagian dari pendapatan Perusahaan untuk digunakan sebagai anggaran TI. Dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, total belanja modal (*capital expenditure*) Bank BTN untuk mengembangkan TI mencapai USD 45,058 juta, atau sekitar Rp 401,02 miliar (kurs Rp 8.900 per dolar AS).

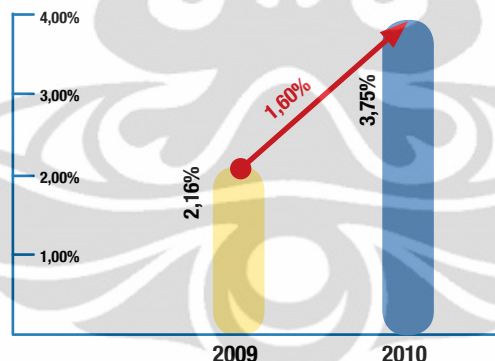
Berikut adalah grafik realisasi capex TI berbanding pendapatan Bank BTN tahun selama dua tahun terakhir:

Capital Expenditure (Capex) in Information Technology Area in 2010.

To develop a reliable IT infrastructure, Bank BTN is always consistent to allocate a portion of the Company's income for IT budget. Starting from 2008 to 2010, Bank BTN's capital expenditure for IT development reached USD 45.058 million, or around Rp 401.02 billion (exchange rate: Rp 8,900 per USD).

Below is the realization of IT capex compared with Bank BTN's revenue in the last two years:

Grafik Realisasi Capex TI Terhadap Pendapatan
The Realization of IT Capex to Bank BTN's Revenue Graph



Capex tersebut antara lain kami gunakan untuk hal berikut:

1. Pengembangan aplikasi strategis dan inovatif

The capital expenditure is used for the following things:

1. Development of strategic and innovative applications

- Aplikasi *eLoan* : *Loan Origination System (LOS)*
- Aplikasi *eColl* : *Collection Recovery Management System (CRMS)*
- Aplikasi *iFlow* : *Document Management System*
- Aplikasi *iDss* : *Enterprise Data Warehouse (EDW)*
- Aplikasi *iBridge* : *Middleware*

- *eLoan* application: *Loan Origination System (LOS)*
- *eColl* application : *Collection Recovery Management System (CRMS)*
- *iFlow* application: *Document Management System*
- *iDss* application : *Enterprise Data Warehouse (EDW)*
- *iBridge* application: *Middleware*

- Aplikasi PSAK 50/55 dan Sistem Pendukungnya
- Aplikasi iCTQ : PMO
- Aplikasi HRIS /HCIS
- iCPress : VoIP (IP Telephony)
- iIdentify : Aplikasi Single Sign On

2. Pengembangan infrastruktur

- ▶ Pengadaan perangkat pendukung *Operational Center* sesuai standar *Ruangan Data Center*
- ▶ Pengadaan *Total Security Solution* Tahap II

3. Tata Kelola TI

- ▶ Kemitraan konsultasi TI
- ▶ Kemitraan vendor TI

2. Infrastructure development

- ▶ Provision of supporting devices for *Operational Center* based on the standard of *Data Center Room*
- ▶ Provision of *Total Security Solution* Phase II

3. IT Governance

- ▶ IT Consulting Partnership
- ▶ IT Vendor Partnership

Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi

Kami percaya, sistem TI yang terdepan hanya lahir dari tangan-tangan sumber daya manusia yang handal. Karenanya, agar sistem TI dapat tumbuh berkembang di internal Perusahaan, Bank BTN selalu menyelenggarakan transfer pengetahuan secara rutin. Selain berguna mensosialisasikan sistem teknologi baru, proses transfer pengetahuan ini dapat memastikan teknologi dapat terus tumbuh berkesinambungan. Dalam hal ini, sumber daya manusia yang bergerak di bidang TI akan membagikan pengetahuan dan keahliannya seputar sistem dan program yang terdapat di internal Perusahaan. Proses transfer keahlian TI ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:

a. Lokakarya

Bank BTN menyelenggarakan lokakarya bagi sumber daya manusia yang mengelola divisi TI secara berkala. Lokakarya ini umumnya membahas tentang proyek teknologi yang sedang berjalan, maupun rencana yang akan dilaksanakan. Bank BTN melakukan lokakarya ini minimal satu kali dalam setahun. Selain itu, kegiatan ini pun dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing proyek.

b. Pelatihan untuk Pelatih dan Pengguna

Bank BTN juga melakukan pelatihan tentang penerapan aplikasi atau sistem baru yang

Human Resources Development in Information Technology Area

We believe that advanced IT system can only be developed by highly competent human resources. Therefore, for a progressive IT system to exist in its internal environment, Bank BTN holds knowledge transfer session regularly. The other benefit than to socialize new technology system, the knowledge transfer process can also ensure the sustainable growth of technology. In this regard, the human resources in IT sector will share knowledge and skills on the system and program within company. The knowledge transfer process can be realized through a number of ways, among others:

a. Workshop

Bank BTN frequently organizes workshop for human resource that manages IT division. The workshop generally discusses about the current technology, either the plan or ongoing practice. Bank BTN organizes this workshop minimal once a year. In addition, such an activity can also be carried out based on the necessity of each project.

b. Training for Trainer and User

Bank BTN also holds training on the implementation of new technology or ongoing

tengah berjalan. Proses ini dilakukan antara Divisi TI dengan Divisi lainnya selaku pengguna sistem atau aplikasi program TI. Sistem *training for trainer* diterapkan agar metode penggunaan aplikasi program TI dapat menyebar luas secara cepat. Bank BTN optimis, dengan metode ini, aplikasi TI dapat mendukung kegiatan operasional bisnis.

c. Peningkatan Pengetahuan Teknologi Informasi

Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian setiap sumber daya manusia Divisi TI, Bank BTN juga mengirimkan pegawai-pegawainya untuk mengikuti kursus-kursus, pelatihan, dan seminar seputar teknologi. Kursus, seminar, dan pelatihan yang diikuti ini biasanya dilakukan di luar Perusahaan dan disesuaikan dengan kebutuhan divisi.

Selain sertifikasi internasional seperti *Certified Data Center Profesional* (CDCP) untuk personil di *Data Center*, Bank BTN juga mengirimkan beberapa delegasi karyawan untuk mengikuti beragam sertifikasi layanan TI yang diakui di industri perbankan internasional seperti CISA (*Certified Information System Audit*), ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*), CCNA (*Certified Cisco Network Administrator*), CDCP (*Certified Data Center Profesional*), CEH (*Certified Ethical Hacker*), CHFI (*Computer Hacking Forensic Investigation*), CPE (*Certified eBusiness Profesional*).

Pada masa yang akan datang, Bank BTN berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan sistem TI demi meningkatkan layanan terhadap nasabah. Untuk itu, menciptakan TI secara berkelanjutan telah menjadi bagian dari pelaksanaan misi Bank BTN dalam melakukan *Human Capital Improvement*.

Rencana Pengembangan TI di Masa Mendatang

Bank BTN meyakini, penerapan sistem TI yang memadai akan membawa Bank BTN menjadi pemain terdepan di bidang pembiayaan perumahan. Untuk itu, Bank BTN berkomitmen melakukan penyempurnaan sistem TI dari waktu ke waktu agar dapat menghadapi persaingan di industri perbankan yang kian ketat, serta meningkatkan layanan kepada nasabah.

Menyadari hal itu, Bank BTN telah menyusun rencana kerja sekaligus semangat Divisi TI

new system. The process was executed IT Division and other Divisions as the users of IT system or application program. The training for trainer is adopted so that the method to use IT application programs can be disseminated quickly.

c. Improvements on IT Knowledge

To improve the capability and skills of IT human resources, Bank BTN also sends its employees to attend courses, training and seminars on the technology. These are usually held outside the company and tailor made based on the requirement of the related division.

In addition to international certification such as Certified Data Center Profesional (CDCP) for the personnel in its data center, Bank BTN also sends employee representatives to take various certifications on IT service, which are recognized in the international banking industry such as CISA (Certified Information System Audit), ITIL (Information Technology Infrastructure Library), CCNA (Certified Cisco Network Administrator), CDCP (Certified Data Center Profesional), CEH (Certified Ethical Hacker), CHFI (Computer Hacking Forensic Investigation) and CPE (Certified eBusiness Profesional).

For the future, Bank BTN is committed to always refine its IT system to improve service to customers. Thus, creating a sustainable IT is already part of the actualization of Bank BTN's mission in performing Human Capital improvements.

Future Plan for IT Development

Bank BTN sees that an adequate IT system will drive Bank BTN to be the most leading player in the housing finance. Therefore, Bank BTN is committed to keeps on enhancing its IT system to face the increasingly intense competition in the banking system, and to improve service to customers.

Based on the awareness, Bank BTN has devised a working plan and has also built the spirit of IT



menempuh tahun 2011. Rencana kerja berikut ini telah ditetapkan untuk mendukung misi ICTD Bank BTN:

1. Stabilisasi operasional menuju *operational excellence*. Caranya adalah dengan melakukan evaluasi terhadap *job description* sebagai dasar penyempurnaan proses operasional pada tahun 2011.
2. Utilisasi dan efisiensi pada seluruh sumber daya IT meliputi *hardware*, *software*, dan *brainware*. Hal ini dilakukan melalui perencanaan kapasitas untuk seluruh *hardware*, membuat SOP untuk aplikasi yang telah diimplementasikan, dan melakukan pelatihan atau sertifikasi untuk meningkatkan kualitas SDM.
3. SLA *time to market* kebutuhan bisnis, dengan melakukan rencana kerja bersama di seluruh divisi sebagai dasar pelaksanaan Proyek TI 2011.
4. Peningkatan keahlian sumber daya TI melalui berbagai pelatihan, terutama pelatihan berstandar internasional.

Division to go through year 2011. The following plan has been set to support Bank BTN's ICTD mission:

1. Operational stabilization towards operational excellence. The approach is by conducting evaluation on the job description as the ground for operational process improvements in 2011.
2. Utilization and efficiency on all IT human resources comprising hardware, software and brainware. This is done through the capacity planning for the entire hardware, devising SOP for the adopted applications and organizing training and certifications to improve HR quality.
3. SLA *time to market* for business needs, by performing collective working plan in all divisions as the basis for the implementation of IT projects in 2011.
4. Skills improvement for IT human resources through various workshops, especially the international standard ones.

Selain menyusun rencana kerja TI untuk tahun 2010, Bank BTN pun telah menyusun aplikasi strategis dan inovatif yang siap dikembangkan tahun 2010. Pemilihan aplikasi tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Besar TI 2008-2012. Beberapa aplikasi strategis dan inovatif tersebut ialah sebagai berikut:

Pengembangan dan Implementasi Aplikasi Inovatif

One Stop Service

Aplikasi ini merupakan fasilitas untuk memasarkan produk kredit konsumen, proses permohonan, dan persetujuan kredit konsumen melalui *website*.

Banking 2.0

Aplikasi ini meliputi *internet banking*, *mobile banking*, dan IVR. Aplikasi ini bisa juga disebut *Full Service Banking* yang menawarkan pengalaman berbeda bagi setiap pelanggan, dimana saja, kapan saja, dan melalui berbagai saluran layanan.

Implementasi Single Sign On

Ini merupakan sistem terintegrasi yang memungkinkan Bank BTN memfasilitasi dan mengontrol pengguna akses aplikasi *online* yang kritikal. Selain itu, aplikasi ini dapat menjaga informasi pribadi atau bisnis sesuai dengan kewenangan yang ditentukan.

Implementasi Document Management System

Layanan ini merupakan aplikasi *Workflow* informasi dan document (*paperless*) sehingga proses atau alur informasi dokumen menjadi lebih mudah, cepat, dan terkelola dengan baik.

Implementasi Pengembangan Aplikasi RTGS & SKN

Aplikasi *interface* ini bertujuan mendukung proses operasional kliring. Aplikasi ini digunakan untuk mempercepat pelayanan terhadap nasabah dalam melakukan pengiriman uang menggunakan kliring.

Infrastruktur Teknologi Informasi

- Persiapan pemilihan lokasi dan Pembangunan *Data Center 2*.
- Standarisasi & Pembenahan Infrastruktur TI Kantor Cabang.

Other than devising IT working plan for 2010, Bank BTN has mapped strategic and innovative applications that are ready to be developed in 2010. The selection of applications was aligned with the IT Grand Working Plan 2008-2012. Some strategic and innovative applications are as follows:

Development and Implementation of Innovative Applications

One Stop Service

The application is a facility for marketing consumer loan products, application process and consumer loan approval via *website*.

Banking 2.0

The application consists of internet banking, mobile banking and IVR. The application can be also called *Full Service Banking* offering different experience for every customer, anywhere, anytime and through various service channels.

Implementation of Single Sign On

This is an integrated system that allows Bank BTN to facilitate and control the user access to critical online applications. Furthermore, this application can protect personal or business information based on the defined authority.

Implementation of Document Management System

The service is an application of information and document workflow (*paperless*) to make the information flow and process become easier, faster and well managed.

Implementation of RTGS & SKN Enhancement

The interface application is aimed at supporting the clearing operational process. The application is used to speed up service to customers in transferring money through clearing.

Information Technology Infrastructure

- Preparation to select location and Construction of *Data Center 2*.
- Standardization & Improvement of IT Infrastructure in Branches.



SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan Bank BTN sepanjang tahun 2010 tak terlepas dari peran serta segenap pegawai. Karena itu, Bank BTN selalu memandang pegawai sebagai aset utama dan berharga, bukan sekadar pelengkap untuk mencapai target bisnis. Prinsip ini kami kelola dalam sebuah paradigma “Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia”, yang menempatkan pegawai sebagai “nyawa” penting dari sebuah perusahaan.

Dengan begitu, Bank BTN tak hanya berorientasi profil belaka, tapi juga memperhatikan dukungan penuh bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Berbekal tujuan tersebut, Bank BTN mengelola segenap pegawai melalui *Human Capital Division* (HCD) yang dalam kegiatan operasionalnya berfungsi melengkapi setiap sumber daya manusia (SDM) agar menjadi ahli dan unggul di bidangnya. Pada akhirnya, SDM mampu berprestasi dan mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bank BTN.

Demi mencapai tujuan tersebut, HCD bertanggung jawab mengelola SDM mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen karir, hingga peningkatan kesejahteraan. Sebagai Bank

HUMAN RESOURCES

Bank BTN's success throughout 2010 was not apart from the contribution by all employees. Hence, Bank BTN views that employees are a main and valuable asset, not simply as supplement to achieve its business target. We manage this principle within a paradigm “Human Resources Management and Development,” that position employees as the central “life” of a company.

Thus, Bank BTN is not just a profit-oriented company but it is fully attentive towards its surrounding community and environment. From that point, Bank BTN manages all employees through its Human Capital Division (HCD). In its operational activities, HCD functions to equip each human resource to be an expert and excell in his/ her area. At the end, the human resource is capable to perform and support the realization of Bank BTN's Vision and Mission.

To attain such a purpose, HCD is responsible to manage human resources, starting from recruitment process, competency development, career management up to welfare improvement.

milik Pemerintah sekaligus milik publik, Bank BTN berkomitmen senantiasa melakukan transformasi bisnis demi mencetak kinerja terbaik secara berkesinambungan. Salah satu caranya adalah dengan mentransformasi budaya kerja lewat penanaman nilai-nilai dasar (*core values*) Bank BTN, yakni POLA PRIMA yang memiliki kepanjangan: Pelayanan Prima, Inovasi, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas, dan Kerjasama.

Rincian mengenai pengembangan sumber daya manusia di Bank BTN sebagai bagian dari kunci keberlanjutan perusahaan dapat dilihat dalam Laporan Keberlanjutan 2010 yang disajikan dalam buku terpisah. Di bagian ini kami akan melaporkan rincian dan komposisi data karyawan di 2010 dibandingkan dengan tahun 2009, informasi pelatihan biaya yang dikeluarkan terkait SDM serta adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan.

Komposisi SDM berdasarkan level organisasi, kependidikan dan usia

Berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2010, jumlah pegawai tetap Bank BTN mencapai 4.231 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan jumlah pegawai tetap di tahun 2009 yang berjumlah 4.085 orang.

Tabel Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Jenjang Kepangkatan
The Table of Total Employees Based on Grade

Pangkat Grade	31 Desember 2010 31 December 2010	31 Desember 2009 31 December 2009
Direktur Muda Junior Director	1	1
Staf Utama Senior Staff	53	51
Staf Madya Middle Level Staff	700	634
Staf Muda Junior Staff	378	419
Pengatur Clerk	2.524	2.423
Pengatur Muda Junior Clerk	575	557
Total	4.231	4.085

As a bank owned by both the government and public, Bank BTN is committed to always carry out business transformation to deliver best performance in a sustainable way. One of the actions is by transforming work culture through the cultivation of Bank BTN's core values called POLA PRIMA, an acronym for Service Excellence, Innovation, Exemplary Behavior, Professionalism, Integrity and Teamwork in bahasa.

The details on the human resources development in Bank BTN, which is part of the keys for the company's sustainability can be found in the Sustainability Report 2010, presented in a separate book. In this part we will report the details and composition of employees data in 2010 compared to 2009, information on training, employees-related spending as well as the equal opportunity to all employees.

Human Resources Composition based on the organizational level, education and age

Based on the latest data as of 31st December 2010, the number of Bank BTN's permanent employees reached 4,231 persons. The total increased from the total in 2009, which was at 4,085 persons.

Tabel Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Total Number of Employees Based on Education Level

Pendidikan Education	31 Desember 2010 31 December 2010	31 Desember 2009 31 December 2009
Pasca Sarjana Post Graduate	249	240
Sarjana Bachelor	1.955	1.999
Sarjana Muda Diploma	866	756
SLTA Senior High	1.160	1.089
SLTP Junior High	1	1
SD Primary School	-	-
Total	4.231	4.085

Tabel Jumlah Pegawai Tetap Berdasarkan Tingkat Usia
Total Number of Employees Based on Age

Usia Age	31 Desember 2010 31 December 2010	31 Desember 2009 31 December 2009
Di atas 55 tahun Over 55 years old	-	-
> 51 - 55 tahun > 51 - 55 years old	344	270
> 46 - 50 tahun > 46 - 50 years old	806	722
> 41 - 45 tahun > 41 - 45 years old	855	828
> 36 - 40 tahun > 36 - 40 years old	1.007	1.192
> 31 - 35 tahun > 31 - 35 years old	182	178
> 26 - 30 tahun > 26 - 30 years old	686	590
> 20 - 25 tahun > 20 - 25 years old	351	305
Total	4.231	4.085

Pada periode tahun 2010, terdapat 94 pegawai yang mengundurkan diri. Berdasarkan angka ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat *turnover* Bank BTN hanya sebesar 2,22% per tahun, atau sangat rendah. Lingkungan kerja yang kondusif menjadi alasan tingkat *turnover* yang sangat rendah tersebut. Ke depannya, Bank BTN berkomitmen menjaga lingkungan kerja yang sehat demi terciptanya suasana kerja yang sehat, aman, dan nyaman.

Peningkatan Kompetensi SDM

Bank BTN menyadari perkembangan bisnis hanya dapat dicapai dengan peningkatan kualitas SDM sebagai mitra utama dalam mendukung kelangsungan usaha. Karenanya, Bank BTN selalu berupaya meningkatkan daya dan kemampuan pegawai, dengan dukungan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif.

Oleh karena itu, manajemen membuka kesempatan bagi setiap SDM untuk menempuh program pendidikan dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan tersebut antara lain meliputi:

- ▶ Pendidikan karir yang dilaksanakan secara berkala. Program ini berfungsi mensosialisasikan rencana pengembangan ke depan. Pengembangan ini meliputi pembukaan sejumlah *outlet*, perluasan organisasi dan jaringan kantor cabang, serta pengembangan karir. Bank BTN bangga dapat mengadakan program ini secara berkesinambungan, di antaranya adalah pendidikan pegawai baru, orientasi pegawai, *Intermediate Supervisory Training*, *Advance Supervisory Training*, *Top Management Program* dan Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (Sespibank).
- ▶ Pendidikan dan pelatihan di bidang teknis perbankan. Bank BTN mengadakan program ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai seputar target tahunan yang difokuskan pada peningkatan penghimpunan dana murah dan kredit bermargin tinggi. Pendidikan reguler yang diadakan Bank BTN meliputi berbagai bidang atau teknis perbankan, di antaranya: analisis kredit umum, analisis kredit perorangan, pengembangan sistem informasi, prinsip mengenal nasabah (*KYC Principle*), *Service Excellence*, *managing service*, audit, akuntansi, perpajakan, Asset

During 2010, there were 94 resigning employees. The number deduces that the annual turnover rate of Bank BTN was only 2.22%, which is insignificant. An environment that is conducive to work is the reason for the low turnover. Moving forward, Bank BTN is committed to maintain a healthy, safe and comfortable working atmosphere.

The Enhancement of HR Competency

Bank BTN is aware that business growth can only be attained through the improvements in quality of human resources as a main partner in supporting the business sustainability. Hence, Bank BTN continuously strives to refine the capacity and capability of employees, with the support of healthy atmosphere that is conducive to work.

Therefore, the management offers opportunities for each HR to take education and training programs. The programs comprises, among others:

- ▶ Education on career path that is regularly organized. This program functions to socialize the future development plan. The development includes the opening of outlets, expansion of organization and branches network as well as career development. Bank BTN takes pride in holding this program continuously, including the new employees education, employees induction, *Intermediary Supervisory Training*, *Advance Supervisory Training*, *Top Management Program* and *The School of Bank's Staff and Leaders (Sespibank)*.
- ▶ Education and training in banking techniques. Bank BTN holds the program to enhance the knowledge and skills of employees over the annual targets that are focused on the growth of cheap funding and high margin loans. The regular classes held by Bank BTN covers many banking topics and techniques, such as: commercial loan analysis, individual loan analysis, information system development, *KYC Principle*, *Service Excellence*, managing service, audit, accounting, taxation, *Asset Liability Management (ALMA)* and treasury and treasury research and planning,



Liability Management (ALMA) dan *treasury*, penelitian dan perencanaan, *treasury* syariah, laporan bank umum syariah, akuntansi dan perpajakan syariah, *Customer Relationship Management*, *business intelligent*, analisis peluang pasar, sosialisasi LOS dan CRMS, dan manajemen risiko.

Di samping itu, HCD juga melengkapi segenap pegawai dengan berbagai pelatihan seperti: *Loan Origination System*, *Loan Account Officer*, *Managing Service*, *Selling* dan *Negotiation Skill*, sekuritisasi kredit kepemilikan rumah (KPR), pembinaan debitur, operasional dan prosedur, hukum dan keprotokolan, pengembangan bisnis cabang, sistem operasional dan prosedur, serta prosedur pengadaan barang dan jasa, kemampuan penjualan, penanganan komplain nasabah, serta pemasaran dan promosi.

- ▶ Pelatihan sosialisasi yang terkait dengan transformasi organisasi dan pengembangan jaringan. Sosialisasi ini dilakukan melalui pelatihan implementasi budaya kerja serta struktur organisasi baru bagi segenap manajemen dan karyawan di Kantor Pusat

sharia treasury, *public bank reporting*, *sharia accounting and taxation*, *Customer Relationship Management*, *business intelligent*, *market opportunity analysis*, *LOS and CRMS socialization and risk management*.

In addition, HCD also empowers all employees with various training programs such as: *Loan Origination System*, *Loan Account Officer*, *Managing Service*, *Selling and Negotiation Skill*, *securitization of mortgages*, *collection*, *operational and procedures*, *legal and protocol*, *business development of branches*, *system operations and procedures*, *products and services procurement*, *sales skill*, *customers' complaints handling as well as marketing and promotions*.

- ▶ The socialization training related with the organizational transformation and network development. The socialization is carried out through training on work culture implementation and new organizational structure for all management and employees

maupun kantor cabang. Dalam hal ini, pelatihan mengangkat tema-tema yang lebih berorientasi kepada fokus pelanggan, sosialisasi dan pelatihan seputar peran dan target kantor layanan setara kantor kas, dan *workshop* mengenai tata urutan kebijakan perusahaan.

- ▶ Pendidikan akademis. Bank BTN memberi kesempatan kepada setiap pegawai untuk mengikuti pendidikan S-2, baik di dalam maupun di luar negeri.
- ▶ Program peningkatan integritas pegawai serta peningkatan efektivitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG). Mengingat pentingnya program ini, Bank BTN secara berkesinambungan melaksanakan pendidikan di bidang GCG, budaya kerja, motivasi, *emotional spiritual quotient*, etika, kepribadian, dan lain sebagainya.
- ▶ Bank BTN pun tak lupa menaruh perhatian pada pengelolaan risiko perbankan sebagai bagian kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan Bank Indonesia. Untuk itu, Bank BTN secara konsisten mengikutsertakan pejabat dan staf untuk mengikuti program Sertifikat Manajemen Risiko dan pendidikan di bidang manajemen risiko secara berkesinambungan.
- ▶ Sedangkan untuk mengembangkan kapasitas pegawai di bidang lainnya, Bank BTN konsisten melakukan dan mendorong setiap pegawai mengikuti seminar, *workshop*, *outbound* (*team building*), pelatihan persiapan pensiun, dan lain sebagainya.

in Head Office and branches offices. In this regard, the training emphasizes on themes with orientation on the customers focus, socialization and training on the role and target of service offices equal to cash outlets, and *workshop* on the hierarchy of company policies.

- ▶ Academic education. Bank BTN provides opportunity for each employee to pursue postgraduate education, whether local or overseas universities.
- ▶ Employees' integrity enhancement program and effectiveness improvement on the implementation of Good Corporate Governance (GCG). Considering the importance of this program, Bank BTN consistently holds education program in GCG areas, work culture, motivation, emotional spiritual quotient, etiquette, personality and others.
- ▶ Bank BTN also pays attention on the banking risk management as part of compliance with the Bank Indonesia regulations. Thereby, Bank BTN consistently sends its officials and staff members to attend the Risk Management Certification programs and training in risk management area in a sustainable way.
- ▶ To refine the employees' capacity in other areas, Bank BTN consistently holds and encourages every employee to participate in seminar, *workshop*, *outbound* (*team building*), retirement preparation *workshop*, et cetera.

Pendidikan Akademis Academic Education	Jumlah Peserta Per 31 Desember 2010 No. of Participants as of 31 December 2010
<i>Magister of Banking and Finance</i> di Universitas Indonesia <i>Magister of Banking and Finance in University of Indonesia</i>	3
<i>Magister of Accounting & Finance Managerial</i> (MAKSI) <i>Magister of Accounting & Finance Managerial</i> (MAKSI)	0
<i>Post Graduate Program in Banking Management</i> (Perbanas) <i>Post Graduate Program in Banking Management</i> (Perbanas)	3
<i>MBA in Sharia Banking & Finance</i> (ITB-LPPI) <i>MBA in Sharia Banking & Finance</i> (ITB-LPPI)	2

Pendidikan Karier Career Education	Jumlah Peserta Per 31 Desember 2010 No. of Participants as of 31 December 2010
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai baru <i>New Employees Education and Training</i>	315
Orientasi Pegawai <i>Employees Induction</i>	0
<i>Basic Supervisory Training</i> untuk Penyelia <i>Basic Supervisory Training for Supervisor</i>	123
<i>Intermediate Supervisory Training</i> untuk Kepala Seksi <i>Intermediate Supervisory Training for Section Head</i>	58
<i>Advance Supervisory Training</i> untuk Kelapa Cabang Pembantu <i>Advance Supervisory Training for Head of Sub Branches</i>	59
<i>Top Management Program</i> untuk Kepala Bagian dan Kepala Cabang <i>Top Management Program for Division Head and Head of Branches</i>	0
SespiBank untuk Kepala Cabang Kelas 1 ke atas <i>School for Bank's Staff and Leaders for first class and above Head of Branches</i>	3
Assessment <i>Assessment</i>	18
Pendidikan Teknis Technical Education	Jumlah Peserta Per 31 Desember 2010 No. of Participants as of 31 December 2010
Pelayanan Prima Kantor Cabang <i>Service Excellence in Branches</i>	210
Teknik Penjualan untuk Para Pemasar <i>Selling Techniques for Marketers</i>	86
Teknik Penjualan untuk Pengawas <i>Selling Techniques for Supervisors</i>	0
Pelatihan Sekuritisasi Kredit Perumahan <i>Mortgages Securitization Training</i>	34
Pelatihan Analisis Kredit <i>Loans Analysis Training</i>	737
Pelatihan Pembinaan Debitur <i>Collection Training</i>	20
Pelatihan Syariah <i>Sharia Training</i>	396
Pelatihan Operasional dan Prosedur <i>Operational and Procedure Training</i>	219
Pelatihan Pengembangan Sistem Informasi <i>Information System Development Training</i>	245
Pelatihan Manajemen Risiko <i>Risk Management Training</i>	251
Pelatihan <i>Know Your Customer</i> <i>Know Your Customer Training</i>	196
Pelatihan Audit <i>Audit Training</i>	1.668
Pelatihan Penelitian dan Perencanaan <i>Research and Planning Training</i>	1.695
Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa <i>Procurement Training</i>	62

Pendidikan Teknis Technical Education	Jumlah Peserta Per 31 Desember 2010 No. of Participants as of 31 December 2010
Pelatihan Pengembangan Bisnis Cabang <i>Branches Business Development Training</i>	915
Pelatihan Akutansi dan Perpajakan <i>Accounting and Taxation Training</i>	29
Pelatihan Hukum dan Keprotokolan <i>Legal and Protocol Training</i>	3.017
Pelatihan <i>Treasury</i> <i>Treasury Training</i>	60
Pendidikan Yang Berhubungan Dengan Bisnis Business-related Education	Jumlah Peserta Per 31 Desember 2010 No. of Participants as of 31 December 2010
Sosialisasi Budaya Kerja <i>Work culture socialization</i>	82
Sosialisasi IPO dan Sosialisasi Aplikasi MESA <i>IPO and MESA Application Socialization</i>	82
Pelatihan dan Sosialisasi Sistem <i>Online</i> Kantor Pos <i>Post Office Online System Training and Socialization</i>	5.285
Lainnya Others	Jumlah Peserta Per 31 Desember 2010 No. of Participants as of 31 December 2010
Seminar <i>Workshop</i>	449
<i>Motivation and Emotional Spiritual Quotient</i> <i>Motivation and Emotional Spiritual Quotient</i>	272
<i>Outbond</i> <i>Outbound</i>	2.731
Etika dan Kepribadian <i>Etiquette and Personality</i>	53
Pelatihan <i>Human Resources Information System</i> <i>Human Resources Information System Training</i>	18
Pelatihan untuk Menjadi Pelatihan <i>training for trainer</i> <i>Training for Trainer</i>	0

Untuk segenap program pengembangan SDM tersebut, sepanjang tahun 2010 Bank BTN telah mengalokasikan dana untuk program-program pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan program pengembangan pegawai lainnya sebesar Rp 57.364.809.000,- meningkat dibandingkan tahun 2009 yang sebesar Rp 41.163.036.000,-

For all HR development programs as detailed above, throughout 2010 Bank BTN has allocated fund for education, training programs, socialiation and other employees development programs at Rp 57.364.809.000,- rising from Rp 41.163.036.000,- in 2009.



Bank BTN memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jender, dan kondisi fisik.

Bank BTN provides equal opportunities for all employees in developing career and perform their duties in a professional without discriminating on the basis of ethnic, religion, race, group, gender and physical condition.

Rencana dan Strategi SDM tahun 2011

Sebagai salah satu dari 10 bank terbesar di Indonesia, sudah menjadi cita-cita Bank BTN untuk senantiasa mencetak pencapaian unggul secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank BTN menyadari pentingnya keberadaan setiap insan BTN sebagai mitra utama usaha. Berbekal kesadaran tersebut, Bank BTN telah merencanakan strategi "Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" tahun 2011 yang meliputi berbagai hal sebagai berikut:

1. Mengembangkan pegawai yang kompeten dan bermotivasi dengan melakukan program sebagai berikut:

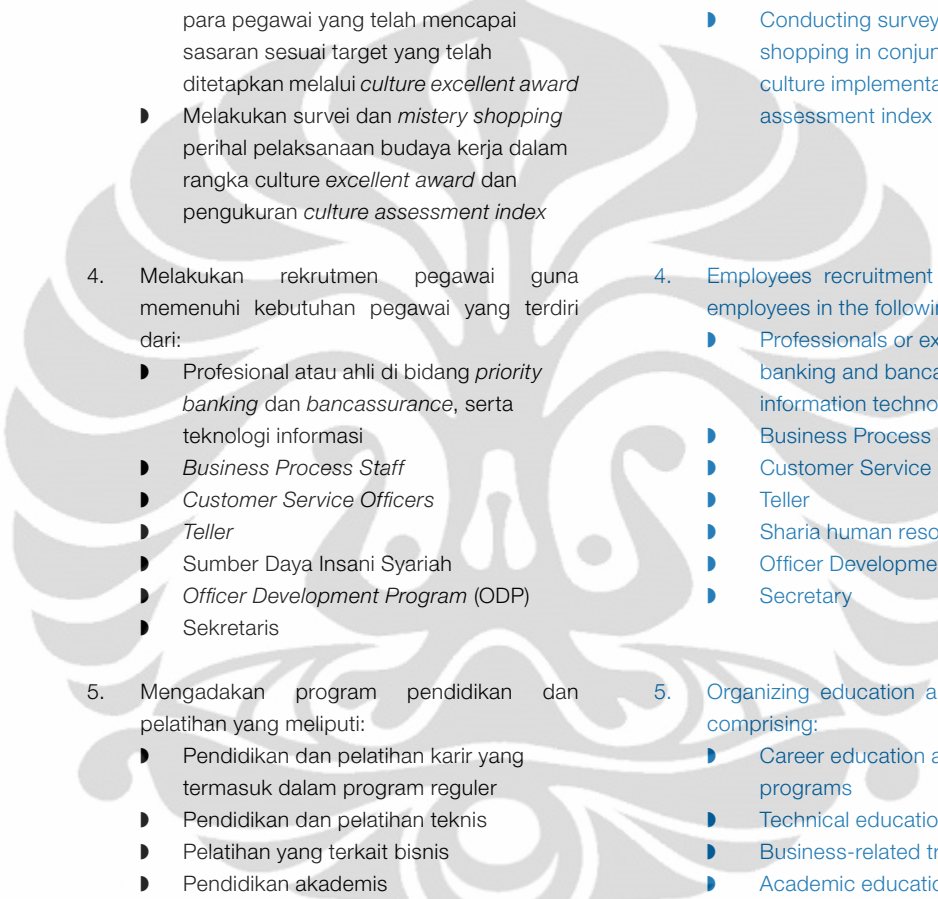
HR Plan and Strategy in 2011

One of 10 largest banks in Indonesia, Bank BTN aspires to deliver outstanding achievements continuously. Bank BTN realizes the significance of the existence of each of BTN personel as a main business partner. With such an awareness, Bank BTN has planned "Human Resources Management and Development" strategies in 2011 that incorporated the following points:

1. Develops competent and highly-motivated employees by holding following programs:



- ▶ Evaluasi sistem *training need analysis*
 - ▶ Program integrasi *training*
 - ▶ Implementasi sistem *reward* berdasarkan *grading*
 - ▶ Implementasi manajemen karir (*career path*)
 - ▶ Implementasi *assessment center*
 - ▶ Pemindehan pegawai berdasarkan struktur organisasi baru di kantor cabang
 - ▶ Program Penawaran Pensiun Sukarela Terbatas (PPST)
2. Meneruskan program pembangunan organisasi yang efektif berbasis kinerja dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
- ▶ Penyesuaian dan perbaikan proses bisnis demi mencetak pertumbuhan usaha
 - ▶ Implementasi perhitungan pegawai me lalui *workload analysis*
 - ▶ Implementasi penggolongan jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang baru
 - ▶ Implementasi sistem kinerja per unit kerja
 - ▶ Implementasi *balanced score card* tiap masing-masing individu
- ▶ System evaluation for Training need analysis
 - ▶ Training for Integration program
 - ▶ Implementation of reward system based on grading
 - ▶ Implementation of career path
 - ▶ Implementation of assessment center
 - ▶ Relocation of employees based on new organizational structure in branches.
 - ▶ Limited Voluntary Early Retirement Program (PPST)
2. Continue with an effective performance-based organizational development program by holding following programs:
- ▶ Adjustment and improvement on business process to achieve business growth
 - ▶ Implementation of employees projection through workload analysis
 - ▶ Implementation of positions grouping aligned with new organizational structure
 - ▶ Implementation of performance system per work unit
 - ▶ Implementation of balanced score card for each individual

- 
3. Membangun budaya perusahaan yang didasarkan pada nilai-nilai POLA PRIMA melalui program sebagai berikut:
 - ▶ Memonitor program internalisasi budaya kerja
 - ▶ Memberikan penghargaan kepada para pegawai yang telah mencapai sasaran sesuai target yang telah ditetapkan melalui *culture excellent award*
 - ▶ Melakukan survei dan *mystery shopping* perihal pelaksanaan budaya kerja dalam rangka *culture excellent award* dan pengukuran *culture assessment index*
 4. Melakukan rekrutmen pegawai guna memenuhi kebutuhan pegawai yang terdiri dari:
 - ▶ Profesional atau ahli di bidang *priority banking* dan *bancassurance*, serta teknologi informasi
 - ▶ *Business Process Staff*
 - ▶ *Customer Service Officers*
 - ▶ *Teller*
 - ▶ Sumber Daya Insani Syariah
 - ▶ *Officer Development Program (ODP)*
 - ▶ Sekretaris
 5. Mengadakan program pendidikan dan pelatihan yang meliputi:
 - ▶ Pendidikan dan pelatihan karir yang termasuk dalam program reguler
 - ▶ Pendidikan dan pelatihan teknis
 - ▶ Pelatihan yang terkait bisnis
 - ▶ Pendidikan akademis
 - ▶ Pendidikan dan pelatihan lainnya yang bertujuan mengembangkan kompetensi pegawai
3. Building corporate culture based on POLA PRIMA values through the following programs:
 - ▶ Monitoring on work culture internalization program
 - ▶ Awarding employees who have achieved targets through culture excellent award
 - ▶ Conducting survey and mystery shopping in conjunction with work culture implementation and culture assessment index
 4. Employees recruitment to fill the needs for employees in the following sectors:
 - ▶ Professionals or experts in priority banking and bancassurance, and information technology
 - ▶ Business Process Staff
 - ▶ Customer Service Officer
 - ▶ Teller
 - ▶ Sharia human resources
 - ▶ Officer Development Program (ODP)
 - ▶ Secretary
 5. Organizing education and training programs comprising:
 - ▶ Career education and training in regular programs
 - ▶ Technical education and training
 - ▶ Business-related training
 - ▶ Academic education
 - ▶ Education and other training aimed at developing employees' competency

JARINGAN

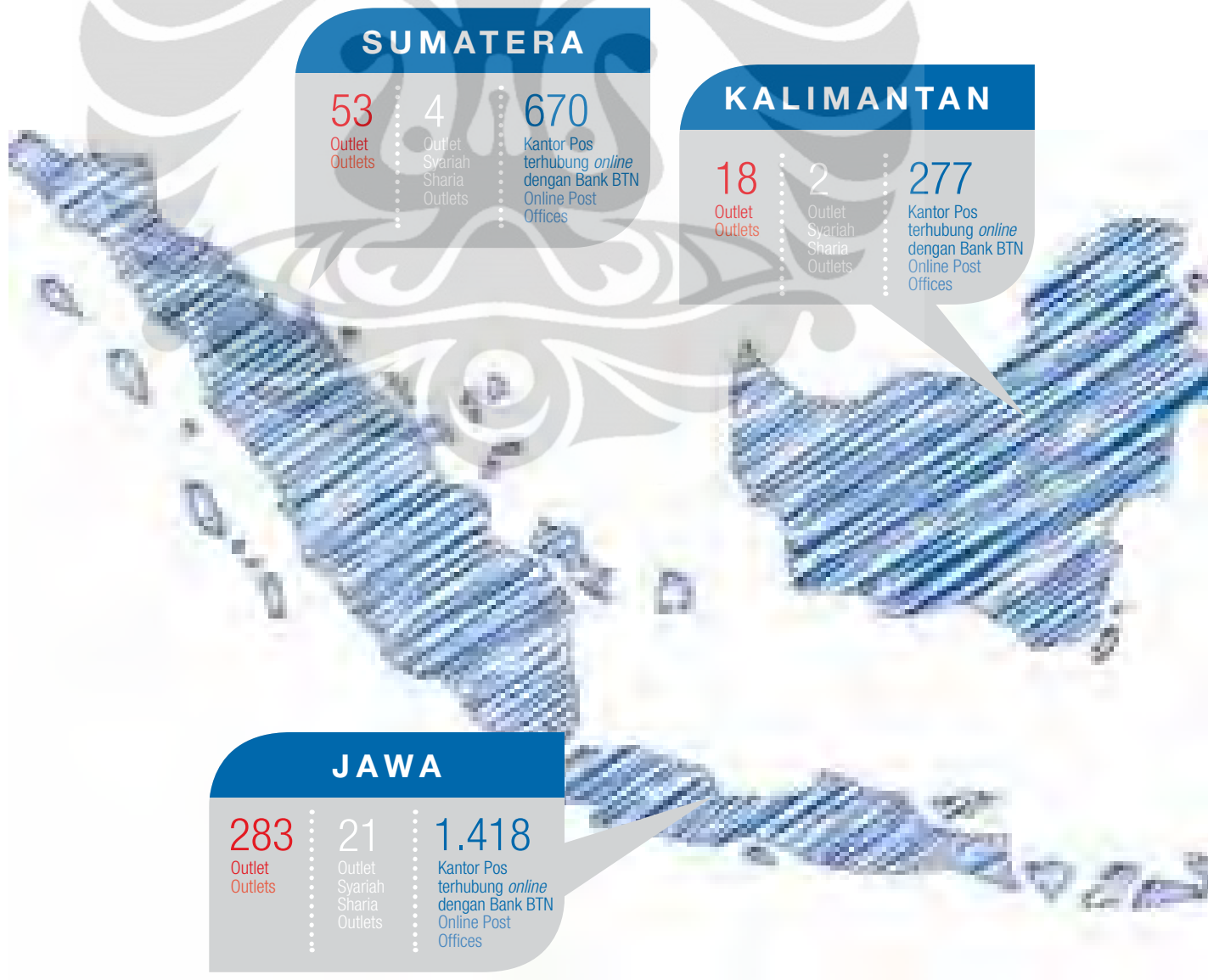
Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1897, Bank BTN telah dipercaya mengelola dana masyarakat hingga saat ini. Berdirinya Bank BTN kokoh hingga saat ini menjadi bukti nyata bahwa Bank BTN senantiasa menjaga kepercayaan para nasabah dengan menjunjung tinggi prinsip pelayanan dan pengabdian yang tinggi pada masyarakat.

Terlebih sejak tahun 1974, ketika Bank BTN memfokuskan kegiatan usaha sebagai penyalur pembiayaan perumahan. Sejak saat itu, Bank BTN senantiasa menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan gerakan kepemilikan rumah oleh rakyat. Berbekal tujuan ini, Bank BTN selalu berkomitmen meningkatkan akses ketersediaan

NETWORK

Since it was established in 1897, Bank BTN has been trusted by public to manage their fund. The strong standing of Bank BTN is a testimony that Bank BTN always safeguards its customers' trust by upholding the service excellence and high dedication to the public.

Such a commitment became stronger when in 1974 Bank BTN directed its business focus to be an intermediary in housing finance. Since then, Bank BTN continuously becomes the government's partner in promoting the movement of home ownership by the public. Carrying such a purpose, Bank BTN always commits to enhance



jaringan, baik dalam bentuk kantor cabang, anjungan tunai mandiri (ATM), maupun *internet banking* yang tersebar hingga ke pelosok Indonesia.

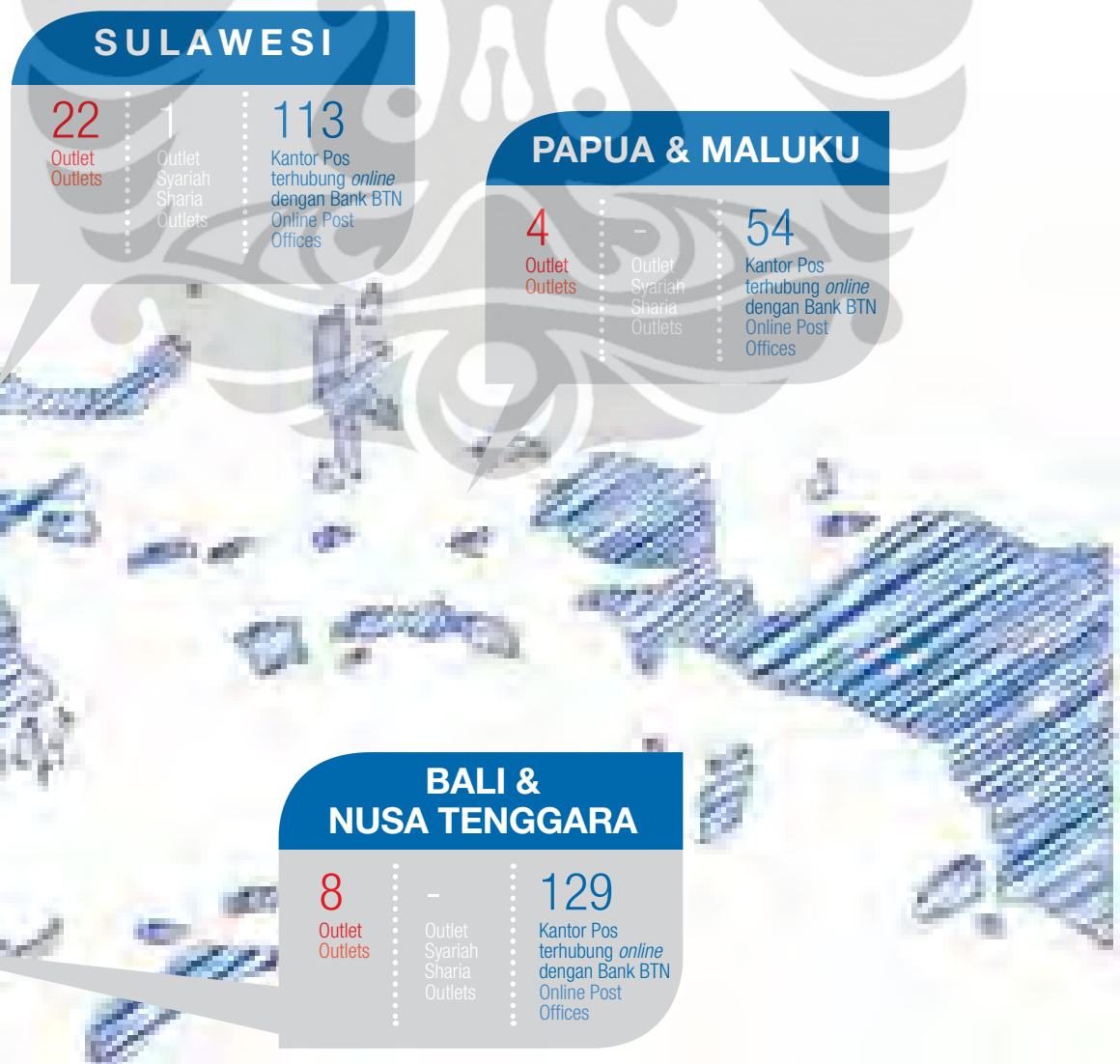
Upaya memperbaiki layanan ini ditempuh melalui berbagai hal, mulai dari memperluas jumlah dan jangkauan jaringan hingga meningkatkan sistem teknologi informasi yang mendukung kualitas layanan. Adalah suatu kebanggaan bagi Bank BTN dapat membantu memberikan solusi perumahan serta memberikan nilai tambah kepada setiap nasabah lewat layanan yang tersedia.

Sebagai pemimpin di industri pembiayaan perumahan, Bank BTN selalu melengkapi diri dengan perluasan dan peningkatan kualitas layanan dan jaringan. Jangkauan dan kualitas

the availability of its network access, automated teller machines (ATMs) as well as internet banking spreading across Indonesia.

The efforts to improve its services are realized through varied means, starting from expanding the size and coverage of network up to enhancing the information technology system in a bid to support the quality of service. It is Bank BTN's pride to help provide solutions in housing sector and create added value for each customer through our available services.

As a key market player in the housing finance industry, Bank BTN always complements its presence with the expansion and enhancement in its service excellence and network. The coverage



layanan ini menunjukkan tekad Bank BTN untuk terus menjadikan nasabah sebagai prioritas utama. Sepanjang tahun 2010, Bank BTN telah melakukan peningkatan layanan sebagai berikut:

- ▶ Memiliki total 745 ATM
- ▶ Berada di lebih dari 20.000 ATM yang terhubung secara *online* lewat jaringan Link, ATM Bersama dan Visa

Berdasarkan data per 31 Desember 2010, Bank BTN memiliki total 63 kantor cabang, 214 kantor cabang pembantu, 111 kantor kas, 20 kantor cabang Syariah, 8 kantor cabang pembantu syariah, 7 *payment point*, 745 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 20.000 ATM termasuk jaringan ATM Link, ATM Bersama dan Visa.

Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan data per 31 Desember 2009 dimana Bank BTN memiliki 61 kantor cabang, 204 kantor cabang pembantu, 20 kantor cabang syariah, 12 *payment point*, 528 ATM, serta lebih dari 20.000 jaringan ATM Link dan ATM Bersama.

Di samping memperluas jangkauan ke wilayah baru, Bank BTN pun lebih mendekatkan diri kepada nasabah, melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan menyediakan layanan setara kantor kas di 2.661 Kantor Pos di seluruh Indonesia. Berikut data seputar jaringan distribusi Bank BTN selama tiga tahun terakhir:

Perkembangan Jaringan Bank BTN Bank BTN Network Expansion

JARINGAN KANTOR OFFICE NETWORK	2008	2009	2010
Kantor Cabang Branch Office	60	61	63
Kantor Cabang Pembantu Sub-branch Office	182	204	214
Kantor Kas Cash Outlets	-	-	111
Kantor Cabang Syariah Sharia Branch Office	16	20	20
Kantor Cabang Pembantu Syariah Sharia Sub-branch Office	-	1	8
Total Jaringan Kantor Total Office Network	258	286	416
Mesin ATM ATM Machine	367	528	745
Kantor Pos Online Online Post Offices	1.545	2.045	2.661

and quality of service demonstrates the Bank's determination to make its customers as main priority. Throughout 2010, Bank BTN taken the following steps to enhance its service:

- ▶ Having a total of 745 ATMs
- ▶ More than 20,000 ATMs via Link, ATM Bersama and Visa network

Based on the data as of 31st December 2010, Bank BTN has a total of 63 branches, 214 sub branches, 111 cash outlets, 20 Sharia branches, 8 Sharia sub-branches, 7 payment points, 745 ATMS throughout Indonesia, and providing access in more than 20,000 ATMS including ATM Link, ATM Bersama and Visa network.

The number increased compared to the data of 31st December 2009 when Bank BTN had 61 branches, 204 sub branches, 20 Sharia branches, 12 payment points, 528 ATMs and more than 20,000 ATMS via ATM Link and ATM Bersama network.

Other than broadening its outreach into new areas, Bank BTN has also made itself become more accessible to its customers. Through partnership with PT Pos Indonesia (Persero), Bank BTN provides services equal to the ones by cash outlets in 2,661 post offices in all over Indonesia. Information about distribution channel of Bank BTN in the last three years, as follows:

Informasi seputar penyebaran lokasi kantor cabang termasuk kantor cabang pembantu, kantor kas, ATM dan Kantor Layanan Setingkat Kantor Kas (KLKK) sampai dengan 31 Desember 2010 dalam bentuk tabel di bawah ini:

Data of Bank BTN's coverage of branches including sub branches, cash outlets, ATMs and Service Offices equal of cash outlets (KLKK) up to 31st December 2010:

Jaringan Bank BTN Tahun 2010 BTN Network in 2010

	SUMATERA	JAWA	BALI & NUSA TENGGERA	KALIMANTAN	SULAWESI	PAPUA & MALUKU	TOTAL
Kantor Cabang Branch Office	11	36	3	5	5	3	63
Kantor Cabang Pembantu Sub-branch Office	31	155	5	10	12	1	214
Kantor Kas Cash Outlets	11	92	-	3	5	-	111
Kantor Cabang Syariah Sharia Branch Office	4	13	-	2	1	-	20
Kantor Cabang Pembantu Syariah Sharia Sub-Branch Office	-	8	-	-	-	-	8
Mesin ATM ATM Machine	104	533	18	46	35	9	745
Kantor Pos Online Online Post Offices	670	1.418	129	277	113	54	2.661

Kantor Pusat

Kantor Pusat Bank BTN terletak di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130, Indonesia.

Head Office

Bank BTN's head office is located at Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10310, Indonesia.

Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu

Dalam menyusun fungsi masing-masing kantor cabang agar dapat mencapai target secara optimal, Bank BTN membagi jenjang kantor cabang ke dalam empat tingkatan. Keempat tingkatan itu adalah kantor cabang utama, kantor cabang kelas satu, kantor cabang kelas dua, dan kantor cabang kelas tiga. Setiap tingkatan di kantor cabang tersebut beroperasi secara mandiri, memiliki otoritas kredit yang berbeda sesuai dengan klasifikasi masing-masing, serta mempunyai target berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi bank.

Klasifikasi kantor cabang ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain jumlah nasabah, jumlah kantor cabang pembantu dan kantor kas yang bernaung di bawah suatu kantor cabang, serta saldo rekening secara menyeluruh. Bank BTN

Branch Offices and Sub Branch Offices

In mapping the functions of branches so that each can achieve their target optimally, Bank BTN divides the hierarchy of branches into four levels: main branches, first class branches, second class branches and third class branches. Every level of branch operates independently, having a different loan authority based on each classification as well as varied targets according to the bank's classification.

The classification is determined based on a set of criteria, among others total of customers, total of sub branches and cash outlets under one branch and total of overall account balance. Bank BTN

menyadari, perkembangan setiap kantor cabang sangat tergantung kerjasama tim seluruh karyawan di kantor cabang tersebut. Karena itu, sangat mungkin kelas setiap kantor cabang meningkat sesuai dengan pencapaian kinerja masing-masing kantor cabang tersebut. Bank BTN sendiri senantiasa mengevaluasi klasifikasi yang diterapkan secara rutin dan menyesuaikan kelas cabang berdasarkan kinerja yang dicapainya.

Selain melayani produk perbankan dalam mata uang Rupiah, sejak 1994 Bank BTN juga telah menggenggam label sebagai bank devisa. Sejak saat ini Bank BTN dapat menerima simpanan dalam mata uang asing baik giro maupun deposito. Untuk memaksimalkan izin sebagai bank devisa, maka Bank BTN juga menyediakan layanan pengiriman uang dari luar negeri atau *remittance* dan jual beli mata uang asing atau *money changer* di 14 kantor cabang yang mendukung layanan tersebut.

Untuk memastikan Visi dan Misi Bank BTN bisa tersosialisasi dengan maksimal, Bank BTN mengawasi kegiatan operasional di seluruh kantor cabang. Dalam hal ini, kantor cabang induk mengawasi kantor cabang pembantu dan kantor kas yang berada di bawah ruang lingkungannya. Itu sebabnya, produk dan layanan di kantor cabang pembantu sama dengan yang ditawarkan oleh kantor cabang. Hanya saja, kantor cabang dan kantor cabang pembantu memiliki tingkat kewenangan persetujuan permohonan kredit yang berbeda. Sementara itu, ruang lingkup kerja kantor kas lebih difokuskan pada penghimpunan dana pihak ketiga ritel.

Kantor Pos Online

Tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi membuat kebutuhan perbankan pun semakin kompleks. Nasabah tak hanya membutuhkan solusi menyeluruh dari produk dan layanan perbankan, namun juga akses yang mudah dan cepat. Melihat kebutuhan tersebut, Bank BTN berinisiatif menjemput bola dengan lebih mendekati nasabah lewat produk inovatif dan berkualitas.

Salah satunya adalah melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dalam meluncurkan produk Tabungan BTN eBatara Pos sejak tahun 2005. Produk Tabungan eBatara Pos merupakan peremajaan produk Tabanas Batara. Tabungan ini melayani nasabah secara *online realtime* dan dapat

realizes that the progress of each branch is relied on the team work of all employees in the branch. Therefore, it is very feasible that the category of each branch to be upgraded based on its performance. Bank BTN routinely evaluates the classification and adjusts the branch class on the ground of the achieved performance.

Other than providing services for banking products in Rupiah currency, since 1994 Bank BTN has hold predicate as a foreign exchange bank. Bank BTN now can accept deposits in foreign currencies, both demand and time deposits. To maximize its license as foreign exchange bank, Bank BTN also provides remittance services and money changing services at 14 branches providing such services.

To ensure the optimal socialization of Bank BTN's vision and mission, Bank BTN oversees the operational activities in all branches. In this case, the main branch offices oversee the sub branches and cash outlets under its authority. Hence, products and services in sub branches are similar with ones offered by branches. The difference lies in the authority level of credit application approval. Meanwhile, the work scope of cash outlets is more focused on the third party funding from retail sector.

Online Post Offices

The increasing public mobility has led into more complex banking needs. The customers do not only need comprehensive solutions from the banking products and services, but also easy and quick access. Observing that need, Bank BTN has taken initiative to be proactive in approaching customers with innovative and quality products.

One move is through collaboration with PT Pos Indonesia (Persero) through the launching of eBatara Pos saving account in 2005. The saving product was an enhancement of Tabanas Batara product. The saving offers online and realtime services and can be accessed in all outlets of online

diakses di seluruh *outlet* kantor pos *online*. Selain Tabungan BTN eBatara Pos, kantor pos online juga menerima layanan pembayaran angsuran KPR, setoran Tabungan Batara dan Giro, serta layanan jasa perbankan lainnya.

Terhitung sejak 1 Desember 2008, Bank BTN memperbaharui kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero). Bila sebelumnya pola kerjasama Bank BTN dengan Pos Indonesia dalam menyediakan Tabungan eBatara Pos ditetapkan berdasarkan biaya transaksi (*fee*), maka lewat perubahan kerjasama ini kerjasama berubah menjadi pembagian pendapatan atau *revenue sharing*. Dengan pola kerjasama *revenue sharing* ini, Bank BTN memberikan imbal jasa kepada Pos Indonesia sebesar prosentase tertentu dari posisi saldo harian Tabungan BTN eBatara Pos. Di sisi lain, untuk layanan dalam bentuk angsuran KPR, setoran Tabungan Batara dan Giro, serta layanan jasa perbankan lainnya, Bank BTN memberikan imbal jasa kepada Pos Indonesia dengan menggunakan basis biaya transaksi.

Kantor Cabang Syariah dan Kantor Layanan Syariah

Hingga akhir Desember 2010, Bank BTN kembali mengulang kesuksesannya dengan menambah jaringan kantor pos *online* hingga berjumlah 2.661 gerai, meningkat dari tahun 2009 yang berjumlah 2.045 gerai. Bank BTN juga telah mengerahkan dan menempatkan lebih dari 60 unit mesin ATM di gerai pos yang tersebar di seluruh Indonesia. Ke depan, Bank BTN akan terus meningkatkan layanan pos online.

Kantor Cabang Syariah dan Kantor Layanan Syariah Hingga 31 Desember 2010, kantor cabang Syariah dan kantor cabang pembantu Syariah Bank BTN telah mencapai 28 gerai. Jumlah ini melebihi jumlah kantor cabang Syariah dan kantor cabang pembantu Syariah Bank BTN tahun 2009 yang sebanyak 20 gerai.

Selain di kantor cabang dan kantor cabang pembantu syariah, nasabah juga dapat menikmati layanan perbankan Syariah melalui Kantor Layanan Syariah (KLS) yang terdapat di kantor cabang atau kantor cabang pembantu konvensional. Hingga 31 Desember 2010, Bank BTN telah memiliki 207 KLS, atau lebih banyak dari tahun 2009 yang sebesar 119 gerai KLS.

post offices. Other than BTN eBatara Pos saving, the online post office can also accept the payment for KPR installment, cash deposits for Batara saving and demand deposits, and other banking services.

Since 1st December 2008, Bank BTN has renewed its partnership with PT Pos Indonesia (Persero). Previously, the partnership in providing eBatara Pos saving had been based on transaction fee, which was then shifted into the revenue sharing scheme. Under the revenue sharing, Bank BTN pays PT Pos Indonesia a certain percentage of the BTN eBatara Pos daily balance. On another side, for services in KPR installment, deposit of Batara saving and demand deposits, Bank BTN pays an amount to PT Pos Indonesia based on transaction fee basis.

Shariah Branches and Service Offices

Up to the end of December 2010, Bank BTN repeated its success by increasing its online post office network to a total of 2,661 outlets from 2,045 outlets in 2009. Bank BTN has also dispatched and placed more than 60 ATM units in post offices all over Indonesia. In the future, Bank BTN will keep on enhancing its online post office services.

As of 31 December 2010, the total of Bank BTN's Sharia branches and sub branches has reached 28 outlets. The total was higher than a total of 20 outlets in 2009.

Other than in Sharia branches and sub branches, the customers can also access services of Sharia banking through the Sharia Service Outlets (KLS) located at the conventional branches or sub branches. Up to 31 December 2010, Bank BTN has 207 KLSs, increasing from 119 KLSs in 2009.

ATM dan kartu ATM

Sepanjang tahun 2010 Bank BTN telah memiliki 745 mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan jumlah pemegang kartu ATM Bank BTN sebanyak 934.817. Selain itu, nasabah juga dapat mengakses ATM di lebih dari 20.000 mesin ATM berlogo Link dan ATM Bersama. Tentu angka tahun lalu lebih tinggi dari jumlah mesin ATM tahun 2009 yang sebanyak 528 unit, dengan 567.000 pemegang kartu.

Agar tercapainya tujuan ini, Bank BTN secara aktif terus menambah jaringan ATM dalam memudahkan serta menambah kenyamanan nasabah. Penambahan jaringan ini merupakan strategi Bank BTN dalam memperluas jaringan ATM, meningkatkan penggunaan kartu ATM serta menyediakan kenyamanan layanan bagi para pemegang kartu ATM.

Berbekal kesadaran ini Bank BTN selalu menempatkan ATM di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, kantor pos *online*, pusat perbelanjaan, gedung kantor serta area perumahan. Kartu ATM BTN juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran, menarik dana, memantau saldo, dan mentransfer dana antar rekening Bank BTN atau ke rekening bank lain yang terkoneksi dengan jaringan ATM Link dan ATM Bersama.

Bank BTN pun senantiasa menambah fungsi kartu ATM untuk memudahkan kegiatan sehari-hari para nasabah. Seperti saat ini, nasabah juga bisa menggunakan kartu ATM untuk membayar tagihan telepon, telepon selular, kartu kredit, air, dan tagihan lainnya. Bank BTN dapat menyajikan fungsi tambahan tersebut karena telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia jasa atau pihak ketiga yang terkait penyediaan fasilitas tersebut.

Selain itu, urusan pembayaran pulsa prabayar pun kini menjadi lebih mudah. Sebab, Bank BTN memungkinkan nasabah membeli voucher pulsa prabayar untuk telepon seluler melalui ATM Bank BTN. Dengan sejumlah kegunaan tambahan ini, jumlah transaksi ATM BTN selama tahun 2010 telah mencapai 12,3 juta transaksi senilai Rp 5,98 triliun. Jumlah ini merangkak naik dari posisi 2009 yang sebanyak 6,8 juta transaksi, senilai Rp 2,51 triliun.

ATM and ATM Cards

Throughout 2010 Bank BTN has 745 Automated Teller Machines (ATMs) with 934,817 ATM cardholders. Complementing the Bank's own ATMs, the customers can access ATMs in more than 20,000 ATMs having Link and ATM Bersama logo. The number was above the last year's, in which the total of ATMs was 528 units with 567,000 cardholders.

To realize Bank BTN's goal in this facility, it actively continues to increase the number of ATMs into its network in a bid to provide ease and convenience to the costumers. The addition of ATMs was Bank BTN's strategy in enhancing its ATM network, increasing the usage of ATM cards as well as providing conveniences for the ATM cardholders.

Departing from this awareness, Bank BTN always place ATM machine(s) in its branches, sub branches, cash outlets, online post offices, malls, office buildings and residential areas. BTN ATM Card can also be used as a payment means, to withdraw cash, check balance and transfer fund to Bank BTN's or other banks' accounts connected in the ATM Link or ATM Bersama network.

Bank BTN keeps on improving the functions of ATM cards to ease the daily activities of customers. Nowadays, costumers can use their ATM card to pay telephone, cellular phone, credit card, water and other bills. All the services become available since Bank BTN has signed agreement with providers or third parties related with provision of the services.

Complementing from the above-mentioned services, the purchase of prepaid top up vouchers now becomes easier. Bank BTN's customer can purchase prepaid top up vouchers for cellular phone in Bank BTN's ATMs. With the additional features, the total of transactions in BTN ATMs during 2010 has reached 12,3 million totaled Rp 5.98 trillion. This number has grown from 6.8 million transactions amounted to Rp 2.51 trillion in 2009.



Akhir tahun 2009, Bank BTN juga meluncurkan Kartu Debit BTN. Melalui kerja sama dengan jaringan Visa International, kartu ini dapat digunakan untuk tarik tunai di ATM berlogo Visa serta untuk keperluan pembelian di merchants berlogo Visa di seluruh dunia.

At the end of 2009, Bank BTN launched BTN Debit Card. In conjunction with the Visa International, the card can be used to withdraw cash at the ATMs having Visa logo as well as to make purchase at the merchants with Visa logo all around the globe.

SMS Banking

Untuk kembali menghantarkan nilai tambah bagi para nasabah, maka sejak tahun 2004 Bank BTN meningkatkan jaringan distribusi lewat SMS Banking. Melalui fasilitas ini, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan secara *mobile*, mudah, *online*, dan *realtime*. Layanan SMS Banking pun kini menjadi solusi bagi nasabah yang ingin bertransaksi namun memiliki waktu terbatas. Untuk dapat menikmati fasilitas ini, nasabah tinggal mengetik layanan pesan singkat sederhana. SMS Banking pun dapat diakses melalui telepon seluler merek apapun dengan menggunakan pesan SMS yang sederhana. Adapun layanan yang tersedia antara lain pemindahan dana ke rekening Bank BTN, pembayaran tagihan dan isi ulang pulsa telepon selular.

SMS Banking

To deliver another added value for its customers, since 2004 Bank BTN has strengthened its distribution network with SMS Banking. Thanks to the facility, costumers can do their mobile, easy, online and realtime banking transactions. The kind of service is a solution for costumers who have a limited time to do banking transaction. To use this facility, a customer can just type a simple sms. SMS Banking can also be accessed with any brand of cellular phone by using a simple SMS. The available services via this facility are among others, fund transfer to Bank BTN's accounts, bill payment and cellular phone top up.

PEMASARAN

Di tengah persaingan industri perbankan yang kian dinamis, Bank BTN telah menunjukkan kredibilitas dan kemampuannya dalam bersaing. Hal ini terbukti dengan tercatatnya Bank BTN sebagai salah satu dari sepuluh bank terbesar di Indonesia dengan aset senilai Rp 68,38 triliun. Adapun dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga, Bank BTN pun mampu menghimpun dana masyarakat sebesar Rp 47,54 triliun. Dari sisi kredit, posisi kredit dan pembiayaan Bank BTN telah mencapai Rp 51,55 triliun.

Pencapaian ini tentu tak terlepas dari kepercayaan nasabah terhadap layanan solusi total yang ditawarkan Bank BTN sebagai bank yang memfokuskan usahanya pada penyaluran pembiayaan perumahan. Sebagai pemimpin pasar di bidang pembiayaan perumahan, bisnis Bank BTN memang didominasi pada bidang ritel penyaluran KPR. Namun demikian, dengan tujuan untuk meningkatkan margin dan mempertahankan likuiditas, serta memperluas jangkauan pasar, Bank BTN terus berupaya untuk mengembangkan bisnis di bidang lainnya serta menjangkau berbagai segmen nasabah.

Demi menyukseskan penjangkauan pasar yang lebih luas ini, Bank BTN telah melakukan perubahan pada struktur organisasi, baik di kantor pusat maupun kantor cabang. Struktur organisasi yang baru lebih berorientasi pada bisnis dan nasabah, yang membagi dengan jelas bisnis konsumen dan komersial, baik yang berbasis konvensional maupun dengan prinsip syariah. Adanya unit khusus yang menangani ketiga bisnis di atas, merupakan bukti serius Bank BTN dalam memperluas jangkauan bisnis dan nasabah. Tak lupa Bank BTN juga menambah tenaga *selling officer* dan merekrut tenaga profesional untuk meningkatkan intensitas bisnis dan pemasaran.

Untuk terus menjaga reputasi dan posisinya dalam industri perbankan Indonesia, memelihara loyalitas nasabah serta menghasilkan bisnis yang semakin luas dan berkelanjutan, maka segenap manajemen dan karyawan pun senantiasa melancarkan berbagai strategi pemasaran yang cermat dan tepat.

Berikut ialah strategi pemasaran untuk masing-masing bisnis utama Bank BTN.

MARKETING

In an increasingly dynamic banking industry, Bank BTN has demonstrated its credibility and capability in facing competition. This has been validated with Bank BTN's position as one of the ten largest banks in Indonesia having assets of Rp 68.38 trillion. From the third party funding, Bank BTN has succeeded in generating public fund at Rp 47.54 trillion. While on the loans disbursement, the Bank BTN's loan and financing has stood at Rp 51.55 trillion.

The achievements are closely linked with customers' trust in total solution services offered by Bank BTN as a bank focusing on the housing finance. As the market leader in the housing finance sector, Bank BTN's business is distinctively dominated by the disbursement of retail mortgages. Nonetheless, with a goal to increase margin and maintain liquidity as well as to expand coverage in the market, Bank BTN continuously seeks to grow its business in other sectors and capture varied segments of customers.

In a bid to pave the way for a wider market capture, Bank BTN has transformed its organization structure, both at the head office and branches offices. The new organization structure is more oriented on the business and customers, which clearly divides the consumer and commercial business of both the conventional and Sharia based. A special unit set up to manage the three business categories confirm Bank BTN's seriousness in expanding its business and customers scope. Last but not least, Bank BTN also added the number of its selling officers and has recruited professionals to enhance its business and marketing intensity.

To maintain its reputation and position in the Indonesian banking industry, maintain customers' loyalty and create an even greater and sustainable business, the whole management team and employees always seek to perform an intelligent and right marketing strategy.

The following sections are about marketing strategy for each of Bank BTN's core businesses.



Satu Bank Untuk Semua

Terbentang ke seluruh negeri dengan produk dan layanan terlengkap dan inovatif.

Contact Center
021-26533555
www.btn.co.id



Berkomitmen memberikan lebih banyak kemudahan kepada lebih banyak insan negeri dengan terus mengembangkan jaringan serta produk dan layanan yang tidak hanya mewujudkan rumah idaman, tapi semua kebutuhan perbankan Anda.



Perbankan Konsumer

Untuk membuktikan kepercayaan masyarakat sebagai bank penyalur kredit perumahan terpercaya, di tahun 2010 Bank BTN mencatatkan Rekor MURI sebagai bank dengan akad KPR dan KPA terbanyak dalam satu hari. Kegiatan ini adalah salah satu program pemasaran yang dilakukan untuk memperkuat merek sebagai pemimpin pasar dalam bidang pembiayaan perumahan, khususnya KPR. Setiap program pemasaran dalam kredit konsumer memang difokuskan untuk mendukung bisnis inti Bank BTN ini.

Tahun 2010, Bank BTN memasarkan produk baru untuk kredit subsidi yakni KPR BTN Sejahtera Tapak (*landed house*) maupun KPR BTN Sejahtera Susun (rumah susun). Untuk memasarkan produk KPR Sejahtera ini, Bank BTN gencar melakukan sosialisasi kepada para pengembang di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, Bank BTN bekerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Selain itu, Bank BTN juga melakukan berbagai promosi melalui media massa tentang kesiapan Bank BTN melaksanakan KPR BTN Sejahtera.

Bank BTN yakin akan mampu membuat segmen KPR BTN Sejahtera ini senantiasa berkembang. Salah satu strategi untuk memperbesar segmen ini adalah dengan menjalin kerjasama yang baik

Consumer Banking

To authenticate the public trust in Bank BTN as a reliable mortgage provider bank, in 2010 Bank BTN listed itself in MURI Record as a bank having the most pledges of mortgage and apartment loan each day. The activity is one of marketing programs to reinforce the brand as a market leader in housing finance sector, especially mortgages. Each marketing program in consumer loans is intently focused on supporting the core businesses of Bank BTN.

In 2010, Bank BTN marketed a new product for subsidized loans called KPR BTN Sejahtera Tapak for landed house and KPR BTN Sejahtera Susun for flats. To market both products, Bank BTN conducted active socialization on the products to developers throughout the country. This was in cooperation with the Public Housing Ministry. In addition, Bank BTN also carried out many promotions via media on Bank BTN's readiness to offer KPR BTN Sejahtera.

Bank BTN is convinced in being able to grow KPR BTN Sejahtera segment in a continuous way. One strategy to achieve this is by forming ties with the Central Public Service Agency for Housing Finance

dengan pihak Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLUPPP) dan Kemenpera. Selanjutnya, juga dilakukan kerja sama dengan seluruh pengembang yang membangun perumahan untuk kelompok sasaran subsidi, yakni masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah (MBM). Bank BTN meyakini bahwa selain mendukung pemerintah dalam program kepemilikan rumah, penyaluran KPR Bersubsidi juga merupakan salah satu peluang untuk bersaing dalam pasar kredit perumahan yang ketat.

Namun demikian, kepemimpinan Bank BTN di pembiayaan perumahan segmen menengah ke bawah tak membuat manajemen melupakan potensi bisnis lainnya yang menasar segmen menengah ke atas. Untuk itu, Bank BTN pun menyediakan solusi menyeluruh perbankan dalam satu atap melalui pemberian KPR Non Subsidi, Non KPR hingga kredit Non Perumahan. Perluasan segmentasi pasar juga dilakukan Bank BTN seiring dengan pengembangan produk kredit.

Beberapa kegiatan promosi pada produk kredit konsumen antara lain adalah dengan mengikuti berbagai pameran properti di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui kerjasama dengan REI dan Apersi. Kegiatan *canvassing* yakni membuka stand khusus di perumahan-perumahan, pemasangan spanduk dan penyebaran brosur di perumahan yang memiliki tingkat hunian tinggi juga banyak dilakukan Bank BTN.

Strategi lain adalah kerjasama dengan kolektor angsuran, melakukan *direct selling* dengan mengirimkan surat penawaran pada instansi-instansi serta tim pemasaran dan petugas administrasi para pengembang. Dalam pendekatan ini, Bank BTN menyediakan promosi khusus dengan memberikan keringanan biaya provisi dan administrasi, serta insentif dengan memberikan *fee marketing* kepada para staf pemasaran mitra pengembang tersebut.

Upaya lain adalah memperlebar jangkauan penyaluran kredit, terutama KPR non subsidi dan kredit non perumahan adalah lewat kerjasama dengan berbagai instansi, institusi pendidikan, serta perusahaan dalam penyaluran KPR kepada para pegawainya. Bank BTN memberlakukan promosi khusus untuk KPR dengan tingkat suku bunga khusus bagi karyawan BUMN.

(BLU PPP) and the Ministry of Public Housing. Then, Bank BTN also works together with all developers that construct housing for the target subsidy segments, which are the low income people (MBR) and middle to low income people (MBM). Bank BTN believes that other than supporting the Government in housing ownership program, the disbursement of subsidized mortgages serves as an opportunity to compete in a highly competitive mortgages market.

Notwithstanding the above fact, Bank BTN's dominance in middle lower segment does not make its management disregard other business potentials that target the middle upper segment. Hence, Bank BTN provides comprehensive banking solutions under one roof through the disbursement of non subsidized mortgages, non mortgage and also non housing loans. The expansion of market segmentation is sought together with the development of loan products.

A number of promotional activities pertaining to consumer loan products has been realized in Bank BTN's participation in property exhibitions in all over Indonesia, both organized by Bank BTN or in conjunction with REI and Apersi. Bank BTN also frequently held some canvassing activities like opening special stands at real estates, setting banners and distributing brochures in housing estates with high occupation level.

Other implementation of strategy include cooperation with collectors, direct selling by sending offering letters to institutions, their marketing teams and administrative officers of developers. In this approach, Bank BTN has special promotion by offering a more flexible provision and administrative fees, incentives and giving marketing fees to the marketing officers of the partner developers.

Other efforts have included broadening the scope of loans disbursement especially the non subsidized mortgages and non housing loans with a number of Government institutions, educational institutions as well as corporations with regards loans to employees. Bank BTN applies exclusive promotions for mortgages with special interest rates for state owned company employees.



Untuk memasarkan produk kredit konsumen lainnya, seperti Kring BTN, Bank BTN gencar melakukan kampanye iklan *above the line*, salah satunya melalui iklan di media cetak lokal. Program promosi lain untuk Kring BTN adalah melalui program *fee* kolektor yang progresif dan sosialisasi produk tersebut.

Selain melalui program promosi, peningkatan performa bisnis KPR juga dilakukan dengan meningkatkan pelayanan. Hal ini diwujudkan lewat penyederhanaan proses persetujuan kredit, peningkatan kewenangan persetujuan kredit pada kantor-kantor cabang dan *regional office* serta percepatan proses persetujuan kredit melalui layanan 1-5-1 dan *eLoan* (Loan Origination System) di seluruh kantor cabang. Layanan 1-5-1 untuk kredit non subsidi ini telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008.

Dengan tingkat penyaluran kredit yang tinggi, Bank BTN selalu berupaya untuk tetap mengusung prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Demi menjaga tingkat pengembalian yang sehat, Bank BTN selalu mengupayakan pembinaan terhadap debitur baik yang lancar memenuhi kewajiban maupun tidak. Pembinaan ini termasuk salah satu nilai tambah layanan Bank BTN untuk menjamin pemberian kredit berlangsung aman dan lancar serta kualitas kredit dapat tetap dipertahankan.

To market other consumer loan products, such as Kring BTN, Bank BTN intensifies the above the line ad campaigns, for instance by placing advertisements in local print media. Other promotional activities for Kring BTN are executed through progressive collector fee program and product socialization.

Other than employing promotional programs, the performance enhancement for mortgage business has been also sought through service improvements. They have been realized through the simplification in loans approval process, empowerment of loans approval authority in branch and regional offices and the acceleration of loans approval process through 1-5-1 service and *eLoan* (Loan Origination System) in all branch offices. The 1-5-1 service for non subsidized loans has been awarded an ISO 9001:2001 certification.

Having a large scale of loan disbursements, Bank BTN always upholds prudent principles in disbursing loans. To secure a sound collection level, Bank BTN always seeks to educate its debtors, either those who can fulfill their obligations well or those who cannot. The education becomes one of added values of Bank BTN's service to ensure safe and smooth credit disbursements and maintain its loans quality

Pada sisi lain, Bank BTN juga menyadari bahwa ketersediaan likuiditas menjadi hal yang mutlak demi menciptakan neraca keuangan yang sehat. Oleh karena itu, di tahun 2010 Bank BTN tidak melupakan upaya penghimpunan dana masyarakat berbiaya murah. Salah satunya adalah dengan melakukan *rebranding* dan *repackaging* terhadap beberapa produk yang disesuaikan dengan segmen nasabah yang dituju agar lebih kompetitif di pasaran.

Tahun 2010 Bank BTN meluncurkan Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara dan Tabungan BTN Haji. Ketiga tabungan ini merupakan *repackaging* dari tabungan sebelumnya, tentu dengan fitur yang lebih menarik. Produk ini melengkapi produk tabungan yang telah ada, yaitu Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Prima, dan Tabungan BTN eBatara Pos. Khusus Tabungan BTN eBatara Pos, Bank BTN melayani tabungan ini melalui Kantor Pos.

Dalam mempromosikan keenam jenis tabungan tersebut, Bank BTN secara aktif memasang iklan di berbagai media dan melakukan program undian berhadiah. Dalam program undian berhadiah, Bank BTN menyediakan hadiah rumah dan uang tunai untuk nasabah Tabungan BTN Batara dan Tabungan BTN eBatara Pos. Kegiatan promosi lain untuk produk dana konsumen adalah melakukan *customer gathering*, program *double bonus*, program *customer get customer* dan *employee get customer*.

Selain produk, layanan pada bidang konsumen juga mendapatkan perhatian serius pada tahun 2010. Di tahun tersebut, Bank BTN memperkenalkan layanan kartu debit BTN dan kartu kredit BTN untuk menjawab kebutuhan nasabah. Dengan layanan ini, nasabah dapat melakukan penarikan uang tunai di lebih dari 20.000 ATM dan berbelanja pada merchant-merchant dengan jaringan Visa International di seluruh dunia.

Layanan lainnya yang ditawarkan pada tahun 2010 adalah BTN Prioritas. Layanan ini menyediakan fasilitas menarik dan prioritas bagi nasabah dengan saldo di atas Rp 250 juta. Kesemua layanan ini melengkapi layanan Bank BTN yang telah ada, seperti iMobile BTN, Host-to-Host Payment untuk pembayaran tagihan telepon, telepon seluler dan listrik, penerimaan SPP serta pembayaran gaji karyawan (*payroll*). Kesemua ini dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah kepada nasabah.

On the other side, Bank BTN also understands that the availability of liquidity is imperative for a sound financial balance sheet. Thus, in 2010 Bank BTN did not set aside efforts to generate low-cost public funding. One of them was by rebranding and repackaging of some products to be better matched with the targeted customer segments so that they are more competitive in the market.

In 2010 Bank BTN launched BTN Junior Saving Account, BTN Juara Saving Account and BTN Haj Saving Account. The three are the repackaging from previous products with more attractive features. The products have complemented the existing saving products: BTN Batara, BTN Prima and BTN eBatara Pos. Specifically for BTN eBatara Pos, the product is available through Post Offices.

In promoting the six products of saving account, Bank BTN has intensified the placement of advertisements in various media and lucky draw program. For the lucky draw program, Bank BTN offered house and cash prizes for BTN Batara and BTN eBatara Pos customers. Other promotional events for costumers consisted of customer gathering, double bonus program, customer get customer program and employee get customer.

In addition to products, in 2010 Bank BTN also concentrated on its service to customers. In the year, Bank BTN introduced BTN debit card and credit card to meet the customers' needs. With this service, the customers can withdraw cash in more than 20,000 ATMs and shop at merchants in Visa International network all around the world.

Another kind of service offered in 2010 is BTN Prioritas. The service provides attractive facilities and priorities for customers having a balance above Rp 250 million. All the services have complemented the range of existing services such as iMobile BTN, Host-to-Host Payment to pay telephone, cellular and electricity, school fees and payroll. Those are aimed at creating added values to customers.



Peningkatan produk ritel tentunya juga harus diimbangi dengan perluasan jaringan, melalui saluran-saluran yang mudah untuk dijangkau. Oleh karena itu, Bank BTN menambah jaringan distribusi dengan membuka 111 unit Kantor Kas untuk meningkatkan jangkauan pemasaran dan layanan produk konsumen di tahun 2010. Selain itu, Bank BTN pun akan menambah kantor layanan setara Kantor Kas di kantor Pos Online sebanyak 616 kantor serta memperluas jaringan ATM menjadi 745 mesin ATM milik sendiri dan lebih dari 20.000 ATM melalui jaringan ATM Link dan ATM Bersama.

The enhancement in retail products must be in line with network expansion through the availability of easy accesses. Therefore, Bank BTN added its distribution network with 111 units of Cash Outlet to widen its marketing coverage and consumer product services to customers in 2010. Moreover, Bank BTN will also increase the number of its service offices equal to cash outlets in Online Post Online by 616 offices and expand ATM network into 745 own ATMs and more than 20,000 ATMs through ATM Link and ATM Bersama network.

Perbankan Komersial

Sebagai bukti keseriusan Bank BTN menggarap segmen korporasi dan seiring dengan penyempurnaan struktur organisasi, manajemen serta karyawan pun menaruh perhatian penting pada kecukupan tenaga pemasar di segmen ini. Pada segmen ini Bank BTN melayani nasabah korporasi melalui relationship manager dan Account Manager yang berada di kantor pusat dan kantor cabang.

Relationship Manager bertanggungjawab pada spesifikasi produk pembiayaan Bank BTN serta bertanggungjawab dalam membangun hubungan baik serta memberikan solusi keuangan kepada nasabah Bank BTN. Sementara Account Manager Bank BTN difokuskan untuk melayani produk pendanaan, penyaluran solusi investasi, serta memantau pendanaan dan portofolio investasi untuk nasabah umum.

Karena fokus pada pembiayaan perumahan, maka program pemasaran pada bidang kredit komersial juga dititikberatkan pada peningkatan Kredit Konstruksi BTN. Untuk meningkatkan portofolio kredit ini, Bank BTN menentukan pengembang sasaran utama (*hot prospect developer*), yaitu pengembang yang sebelumnya belum terlayani, serta berniat membangun proyek perumahan untuk segmen menengah ke atas dan memiliki rentang harga jual produk seharga Rp 300 juta hingga Rp 500 juta. Disamping itu, Bank BTN juga selalu menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan pengembang-pengembang besar seperti PT Summarecon Agung Tbk, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Agung Sedayu, dan PT Modernland Realty Tbk. Dalam memasarkan kredit ini, Bank BTN juga berperan aktif dalam pameran konstruksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan organisasi-organisasi pengembang seperti REI dan Apersi.

Selain nasabah yang bergerak dalam bisnis perumahan, target nasabah komersial Bank BTN lainnya adalah instansi atau perusahaan yang beroperasi di sektor telekomunikasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan industri yang terkait dengan perumahan. Oleh karena itu, untuk memasarkan kredit modal kerja, Bank BTN melakukan kontrak kerjasama dengan BUMN atau anak perusahaan BUMN seperti PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Wijaya Karya Tbk, PT Wika

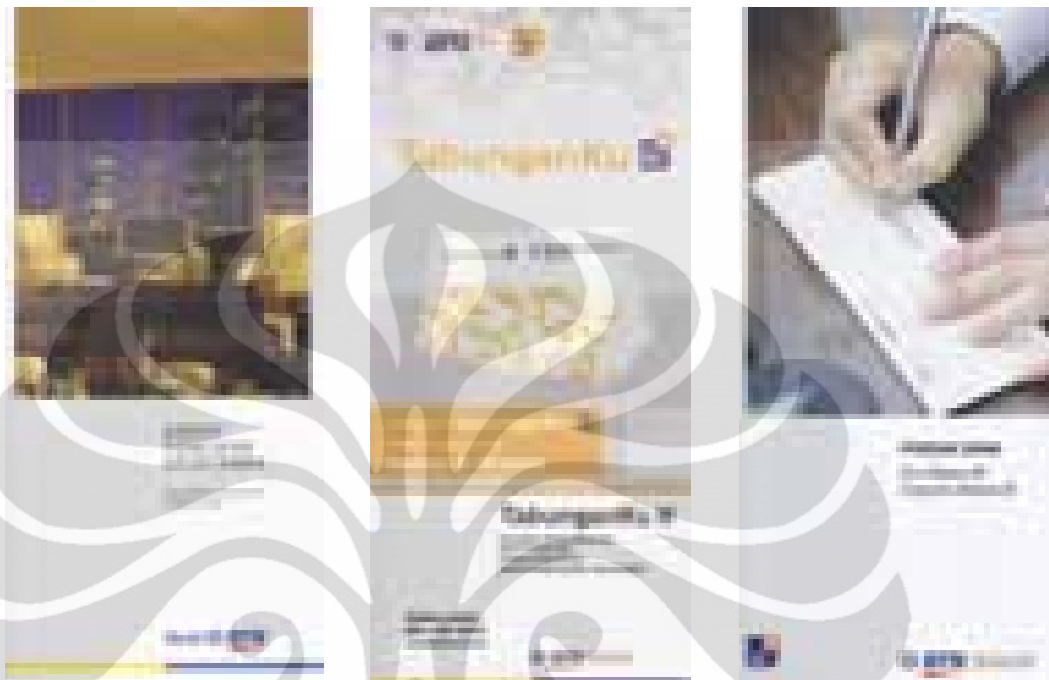
Commercial Banking

As a realization of Bank BTN's dedication in working on corporate segment and along with the enhancement in its organization structure, the management together with employees give attention on the sufficient number of marketing officers in this segment. In this segment Bank BTN serves corporate clients through its relationship manager and account manager based in head office and branch officers.

A relationship manager is responsible for the specification of Bank BTN's funding products as well for maintaining good ties and providing financial solutions to the customers. Meanwhile, account manager is focused on servicing funding products, the distribution investment solutions and monitoring investment portfolio for general customers.

Owing to its focus on housing finance, the marketing program of commercial loan sector is also centered on the growth of BTN Construction Loans. To achieve a better portfolio, Bank BTN selects the hot prospect developers which are developers who have yet to be served and intend to build housing for middle upper segment with housing selling prices range from Rp 300 million to Rp 500 million. Aside from that, Bank BTN also maintains good relationship and working ties with major developers such as PT Summarecon Agung Tbk, PT Agung Podomoro Land Tbk, PT Agung Sedayu, and PT Modernland Realty Tbk. In marketing the loans, Bank BTN also frequently participates in constructing exhibitions organized by Public Housing Ministry and organizations of developers such as REI and Apersi.

Other than customers having business in housing sector, other target commercial customers of Bank BTN are institutions or companies in telecommunication, infrastructure, health, education and other industries related with housing. Thus, to market capital working loans, Bank BTN has established working contracts with state owned companies and their subsidiaries such as PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Wijaya Karya Tbk, PT Wika Gedung, PT Wika Realty, PT Utama



Gedung, PT Wika Realty, PT Utama Karya, dan PT Adhi Realty.

Karya, and PT Adhi Realty.

Untuk mengembangkan kredit usaha mikro, kecil dan menengah, Bank BTN menyiapkan strategi pemasaran dengan memberikan persyaratan yang lebih fleksibel serta bunga kredit yang kompetitif. Dalam rangka menjemput bola, Bank BTN pun aktif mengikuti berbagai pameran KUMK dan KUR yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, seperti yang terakhir mengikuti pameran di SMESCO. Bank BTN juga melakukan kegiatan pemasaran langsung seperti menyebarkan brosur, memasang *banner* dan spanduk terkait kredit UKM. Tak lupa, kerjasama dengan lembaga *linkage* baik itu antar instansi atau BUMN juga ditingkatkan.

Dalam rangka meningkatkan produk pendanaan komersial yaitu Giro dan Deposito Berjangka Lembaga, Bank BTN mengembangkan kegiatan pemasaran dengan cara menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik instansi pemerintahan, BUMN/BUMD, swasta, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga lainnya, terkait pengelolaan dana operasional. Dengan mengikuti Program Pengembangan Operasional ini, nasabah instansi dapat memperoleh bantuan fasilitas aset atau dana untuk kepentingan operasional dengan cara menjaga saldo minimum dalam bentuk rekening koran di Bank BTN selama tiga sampai lima tahun.

To develop micro, small and medium business loans, Bank BTN has prepared a marketing strategy that offers more flexible terms and competitive interest rates. To be more proactive in approaching customers, Bank BTN also participates frequently in many events on SMEs and People's loan held by the State Ministry for Cooperatives and SMEs, such as the last one at the SMESCO building. Bank BTN also conducts direct marketing activities such as distributing brochures, setting banners to promote the SME loans. It has also intensified partnership with linkage institutions, both interinstitutionally or with other state owned companies.

In order to increase commercial funding products comprising of institutional demand deposits and time deposits, Bank BTN intensifies its marketing activities through cooperation with various institutions, whether it is Government institution, state or region owned enterprises, private, university, hospital and other institutions. By joining the Operational Development Program, the institutional customers can have assistance of assets facilities or fund for operational purpose by maintaining a minimum balance in form of checking account in Bank BTN for three to five years.

Bank BTN selalu berupaya melakukan optimalisasi pemasaran produk pendanaan komersial dengan menggenjot penawaran kerjasama Business to Business (B2B). Salah satu caranya ialah dengan menjadi bank penyedia layanan pembayaran SPP *online* untuk lembaga pendidikan dan Program Pengembangan Operasional B2B. Tujuan dari kerjasama ini tak lain ialah memperoleh penempatan dana murah, khususnya dalam bentuk giro, dalam jumlah besar serta berjangka waktu yang panjang sekitar tiga hingga lima tahun.

Bank BTN pun selalu berusaha menyediakan solusi total perbankan (One Stop Service) kepada nasabah yang meliputi seluruh jenis produk pendanaan, kredit, dan jasa layanan yang tersedia untuk mendukung kebutuhan nasabah lembaga dan perorangan. Bank BTN menyadari bahwa loyalitas nasabah hanya dapat terbentuk dengan pelayanan dan nilai tambah yang optimal. Untuk menciptakan dan memelihara loyalitas nasabah, Bank BTN secara rutin menyelenggarakan Customer Loyalty Program. Program yang melibatkan peran aktif manajemen Bank BTN ini dituangkan dalam bentuk turnamen olah raga, kesenian, dan apresiasi budaya lainnya.

Perbankan Syariah

Program pemasaran dan promosi Unit Usaha Syariah Bank BTN selalu disesuaikan dengan Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dalam program tersebut, Bank Indonesia menetapkan target pangsa pasar perbankan Syariah sebesar 5% dari total aset perbankan nasional.

Mengacu pada program tersebut, Bank BTN telah berkontribusi melalui layanan pembiayaan Unit Usaha Syariah (UUS) yang mencapai Rp 2,84 triliun. Penyaluran pembiayaan Syariah ini memberikan sumbangsih sebesar 5,5% terhadap total pinjaman Bank BTN yang sebesar Rp 51,55 triliun di akhir tahun 2010. Kontribusi ini telah mengalami kenaikan dari kontribusi UUS sebesar 4% terhadap total kredit dan pembiayaan pada tahun 2009.

Sebagai unit usaha yang baru saja memulai bisnisnya pada tahun 2004, Bank BTN memandang bisnis Syariah memiliki potensi besar untuk berkembang pesat ke depannya. Hal ini dibuktikan dari pertumbuhan bisnis Syariah di Bank BTN yang tinggi dari tahun ke tahun. Agar dapat menjangkau

Bank BTN strives to optimize its marketing for commercial funding products by boosting B2B (Business to Business) collaborations. For instance, by becoming the service providers for online school fees payment to educational institutions and B2B Operational Development Program. The definite purpose of this cooperation is to gain access to low-cost funding, especially in form of demand deposits at a substantial amount and with a notable period around three to five years.

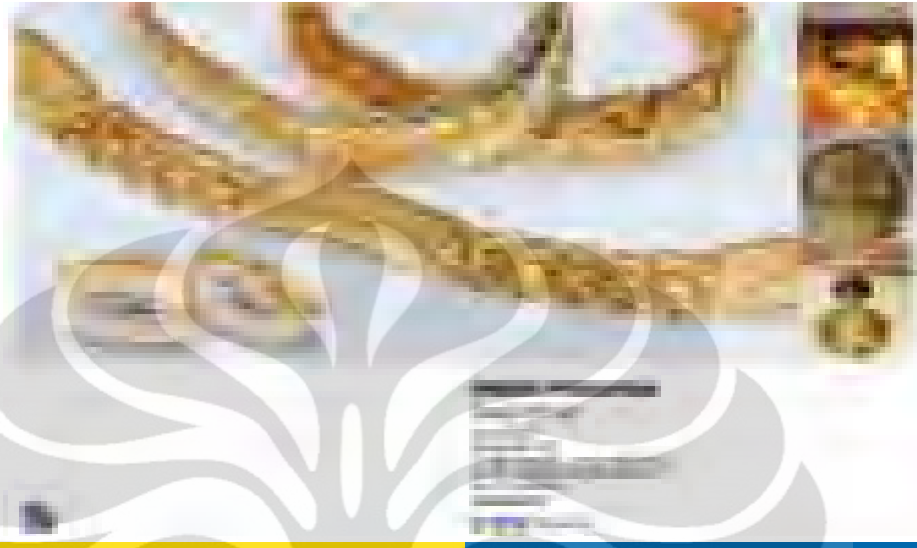
Bank BTN always takes effort in providing One Stop Service to customers, which covers all funding products, loans and services to support the needs of institutional and individual customers. Bank BTN is aware that customers loyalty can only be built with optimal services and added values. To create and secure customers loyalty, Bank BTN routinely organizes sessions for Customer Loyalty Program. The program that involves active participation of Bank BTN's management is implemented through sports tournaments, arts and other cultural appreciation activities.

Sharia Banking

The marketing and promotional programs for Sharia Business Unit in Bank BTN are always aligned with the Acceleration Program of Sharia Banking Development 2007-2008 issued by Bank Indonesia. In the program, Bank Indonesia stipulates that the target market share of Sharia Banking is 5% of the total national banking assets.

In reference to the program, Bank BTN has made contribution through the financing service of Sharia Business Unit (UUS) that totaled 2.84 trillion. The disbursement of Sharia financing contributes 5.5% to Bank BTN's total loans that were at Rp 51.55 trillion at the end of 2010. The contribution grew from the previous year's one which was 4% of the total loans and financing in 2009.

Bank BTN is in view that as a newly operated business unit starting in 2004, Sharia business has high potentials to thrive in the future. This has been proven by the significant Sharia business growth in Bank BTN every year. To capture the prospective market, Bank BTN always seeks to



pasar yang menjanjikan tersebut, Bank BTN senantiasa menambah produk-produk pembiayaan baru seperti KPR MMQ BTN iB, Pembiayaan Multijasa BTN iB, Pembiayaan Suka-Suka BTN iB dan Pembiayaan KUR BTN iB. Untuk melengkapi produk pendanaan, BTN Syariah juga meluncurkan Deposit on Call Batara iB, Tabungan Terencana BTN iB dan TabunganKU iB.

Demi meningkatkan jangkauan UUS, Bank BTN memaksimalkan program promosi yang bertujuan untuk mengembangkan *brand image*, melalui promosi di media elektronik seperti TV dan radio, media cetak, media outdoor, pameran, dan program sponsor. Yang tak kalah penting adalah program pemeliharaan loyalitas nasabah seperti undian dan hadiah langsung.

Untuk memberikan nilai tambah berkelanjutan kepada nasabah, Bank BTN bertekad menambah jumlah cabang guna mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi di BTN Syariah. Sedangkan untuk mempermudah nasabah dalam mengakses layanan dan produk Syariah, Bank BTN juga selalu berupaya menghadirkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi, antara lain penambahan fitur-fitur baru seperti Kartu Debit, Kartu BTN iB, SPP Online Batara iB, Payroll Batara iB, dan lain-lain.

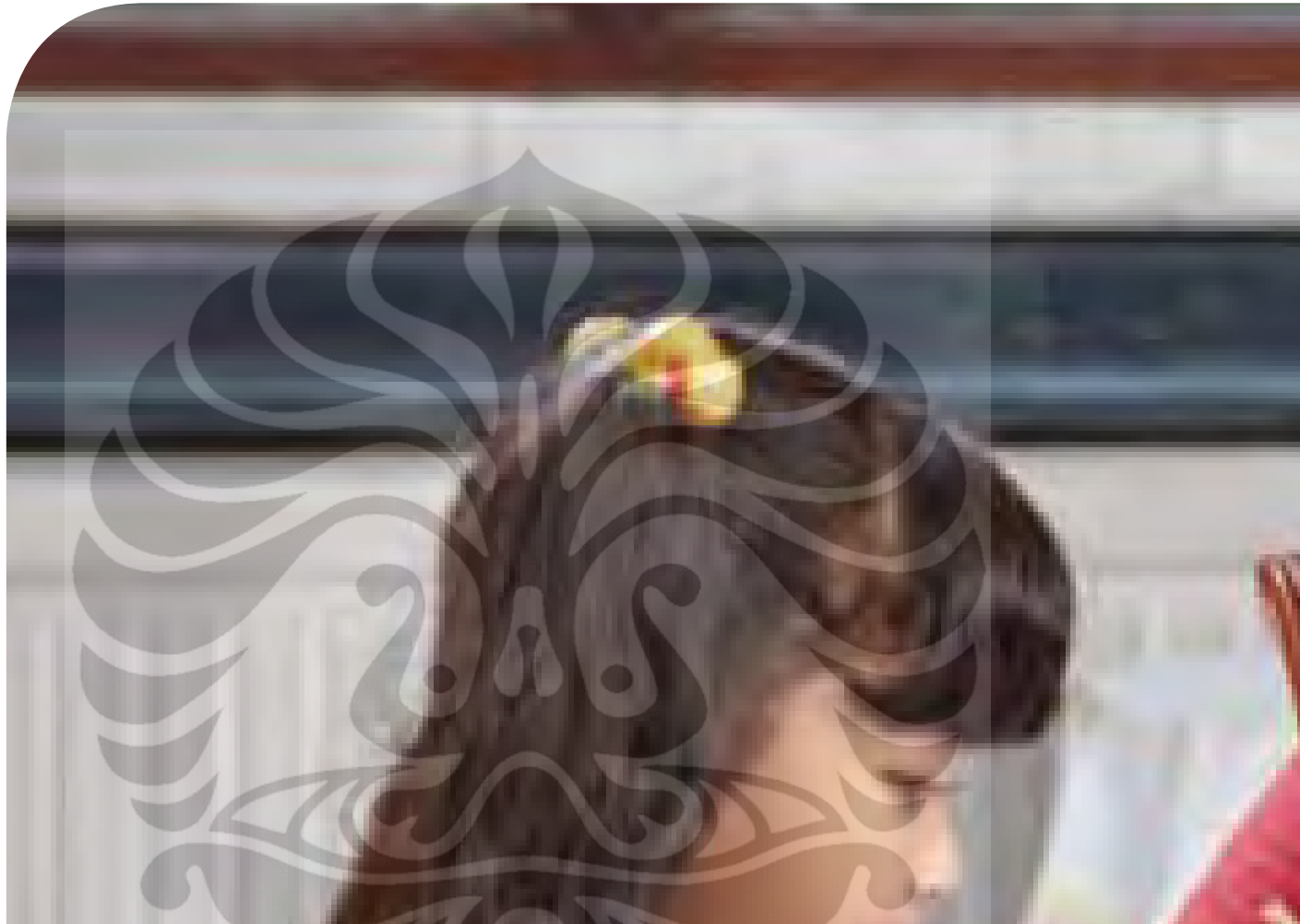
Dengan strategi tersebut, maka kinerja perbankan Syariah senantiasa dapat mendukung pertumbuhan Bank BTN ke depan. Pada akhirnya, perkembangan usaha Bank BTN pun akan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

add new funding products, such as MMQ BTN iB mortgages, Multijasa BTN iB financing, Suka-Suka BTN iB financing and KUR BTN iB financing, into its Sharia products line-up. To complement the funding products, BTN Sharia has also launched Deposit on Call Batara iB, Terencana BTN iB saving and TabunganKU iB saving.

In order to improve the coverage by its Sharia Business Unit, Bank BTN has maximized promotion programs aimed at enhancing brand image through promotions in electronic media such TV and radio, print media, outdoor media, exhibition and sponsorship. Not less important is programs to maintain customers loyalty such as lucky draw and instant gifts.

To create sustainable added values, Bank BTN is committed to increase the number of branches to give ease to customers to do transactions in BTN Sharia. While, to ease the access to Sharia services and products, Bank BTN always seeks to apply innovation in technology utilization by among others the addition of new features such as Debit Card, BTN iB Card, School fee payment through Online Batara iB, Payroll Batara iB and others.

Employing the above strategies, the performance of Sharia banking will be always feasible to support the future growth of Bank BTN. Subsequently, the growth of Bank BTN's business will, as well, create added value for all its stakeholders.



**ANALISA & PEMBAHASAN
MANAJEMEN ATAS KINERJA BANK BTN**
MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS
FOR BANK BTN'S PERFORMANCE

**Fokus Terhadap Kinerja
Keuangan yang Seimbang**
Focus on Balanced Financial Performance





Analisis dan pembahasan berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 dan 2009 yang termasuk dalam Laporan Tahunan ini. Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK Indonesia dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan untuk Industri Perbankan Indonesia. Selain itu, kami juga akan memberikan analisis dan diskusi untuk kinerja kami dalam unit bisnis syariah, yang didirikan sejak tahun 2004, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kinerja keuangan kami.

The following analysis and discussion should be read in conjunction with annual financial statements for the year ending 31 December 2010 and 2009 included in this Annual Report. The financial statements were prepared in accordance with the Indonesian GAAP and Accounting and Reporting Guidelines for the Indonesian Banking Industry. In addition, we would also provide analysis and discussion for our performance in sharia unit business, established since 2004, which is an integral part of our financial performance.

KINERJA KEUANGAN **FINANCIAL PERFORMANCE**

Pesatnya pertumbuhan masyarakat kelas menengah telah mempengaruhi peningkatan permintaan potensial untuk perumahan dan dukungan pembiayaan. Sesuai dengan informasi industri perumahan yang diambil dari Kementerian Perumahan Rakyat, total permintaan perumahan per tahun telah mencapai 800.000 rumah meskipun pasokan hanya mencapai 400.000 rumah. Hal ini berarti bahwa setiap tahun, negara kita memiliki kekurangan kebutuhan perumahan 400.000 unit per tahun.

The rapid growth of middle class society has affected to the increase of potential demand for housing and its financing supports. In accordance with the housing industry information taken from Ministry of Public Housing, total demand of housing per year has reached 800,000 houses although the supply has reached merely 400,000 houses. This meant that every year, our country has shortfall of housing needs at 400,000 units per year.

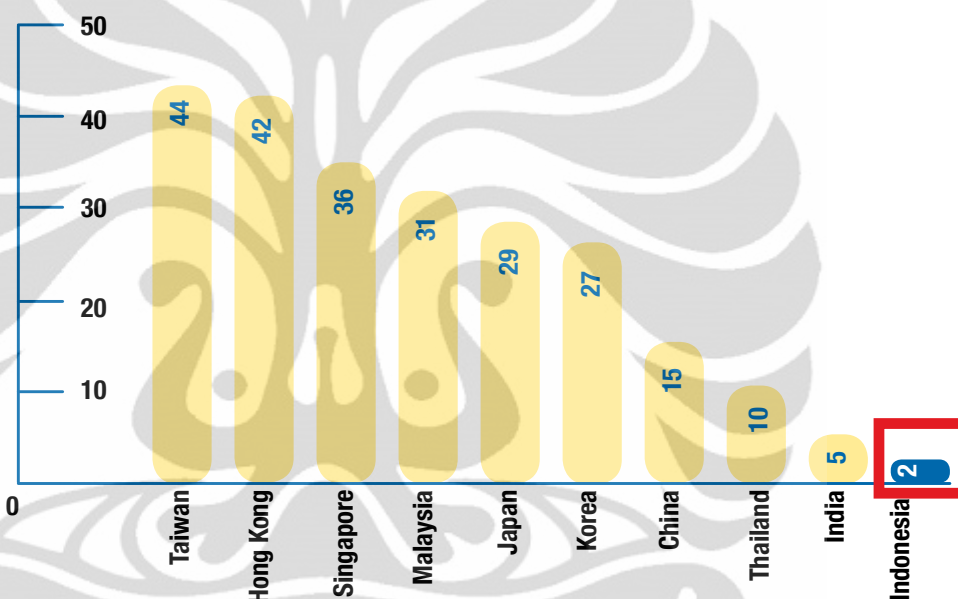
Dukungan pembiayaan bagi industri perumahan di Indonesia tercermin dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Berdasarkan data KPR untuk pembiayaan rumah yang diambil dari Estimasi Goldman

The financing support for housing industry in Indonesia was reflected in mortgages (KPR) product. Based on the data of mortgage loan for home financing taken from Goldman Sachs

Sachs Research, kontribusi jumlah pembiayaan rumah terhadap nilai Produksi Domestik Bruto (PDB) di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Fakta ini telah menunjukkan kepada kita bahwa bisnis pembiayaan KPR masih memiliki peluang yang baik untuk bertumbuh dan berkembang guna memenuhi pertumbuhan permintaan perumahan di Indonesia.

Research Estimates, the total contribution of housing finance to the Gross Domestic Production (GDP) in Indonesia was lower comparing to other countries in Asia. This fact has shown us that home financing business still has good opportunity to grow and develop to meet the increasing demand for housing in Indonesia.

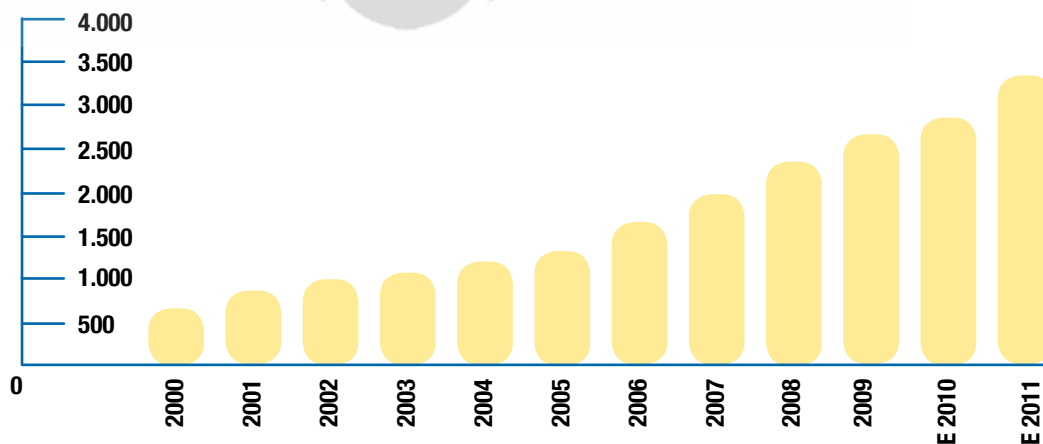
Kredit Perumahan (KPR) dalam % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Mortgage loan as % of Total Gross Domestic Product (GDP)



Sumber: Bank Sentral setiap negara, Estimasi Goldman Sachs Research

Source: Central Bank of each Country, Goldman Sachs Research Estimates

PDB Perkapita Indonesia
Indonesia's GDP Per Capita



Sumber: Estimasi Goldman Sachs Research

Source: Goldman Sachs Research Estimates

Sejak tahun 1974, Bank BTN telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyediakan pembiayaan rumah, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah.

Since 1974, Bank BTN has been appointed by the Government to provide housing finance, especially for low middle society. For many years, Bank BTN

Selama bertahun-tahun, Bank BTN telah menjadi salah satu lembaga keuangan yang aktif mengambil bagian dari program pemerintah untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pembiayaan perumahan masyarakat. Beberapa kredit perumahan dan paket pembiayaan telah ditawarkan dengan biaya bunga yang terjangkau untuk melaksanakan peranan Bank BTN dalam program perumahan pemerintah.

Sebagai strategi untuk menjaga rentabilitas, ketika menawarkan paket pembiayaan rumah (KPR) dengan tingkat bunga rendah dan terjangkau, Bank BTN juga mengadakan diversifikasi produk portofolio pinjaman dan mengelola sumber pendanaan untuk melindungi margin bunga bersih. Selama bertahun-tahun, Bank BTN telah menawarkan paket KPR dengan tingkat bunga rendah dan terjangkau dan paket kredit non perumahan untuk entitas yang menjalankan industri bisnis perumahan dengan tingkat bunga yang bersaing dan terjangkau. Pada tahun 2010, Bank BTN memiliki 74% KPR dan 26% non KPR dari portofolio kredit yang merupakan bagian dari aktiva produktif. Bank BTN memperoleh dukungan dana dari Bank Indonesia melalui Penyalur Kredit Program dan Fasilitas Kredit Likuiditas dengan beban bunga rendah dan juga mengeluarkan obligasi jangka panjang untuk mengurangi perbedaan periode jatuh tempo aktiva dan kewajiban. Pada tahun 2010, sumber dana Bank BTN terdiri dari 80,4% dana pihak ketiga dan 19,6% dana *wholesale*, yang diantaranya berasal dari pinjaman berjangka waktu panjang dan obligasi yang diterbitkan.

Sebagai hasil dengan strategi Bank BTN, selama tahun 2010, Bank BTN berhasil mencapai *margin* bunga bersih lebih tinggi dan pertumbuhan laba bersih yang memuaskan sebesar 86,75% lebih tinggi dari jumlah yang dicapai pada tahun 2009 dan menghasilkan pertumbuhan ekuitas sebesar 20% pada tahun 2010. Portofolio kredit meningkat 27% lebih tinggi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan aset sebesar 17% selama tahun 2010.

Dengan hasil tersebut, Bank BTN telah berhasil menjadi pemimpin pasar dalam pembiayaan rumah; terbesar kesembilan atas saldo kredit portofolio dan terbesar kesepuluh atas aktiva bank di Indonesia pada tahun 2010.

has become one of the financial institutions that actively took part in the Government program to guarantee the availability of housing finance needs to the public. Several housing loans and financing packages have been offered with lower and affordable interest charges to execute Bank BTN's role in Government housing program.

As part of the strategy to maintain the profitability while offering the affordable and low interest rates of mortgage packages, Bank BTN has diversity its loan portfolio product and manage its funding sources to cover its net interest margin. During the years, Bank BTN has offered housing loan packages with affordable and low interest rate and non-housing loan packages for entities which carry out home business industries with competitive and affordable interest rate. In 2010, Bank BTN loan portfolio as part of its earning asset consisted of 74% mortgages and 26% non-mortgages loans. Bank BTN obtained funding support from Bank Indonesia through Loan Channelling Program and Liquidity Loan Facilities that offered low interest cost as well as issuing long term bonds to reduce the mismatch maturity period between assets and liabilities. As of 2010, Bank BTN source of funds comprised of 80,4% third party deposits and 19,6% wholesale funds, such as long term borrowings and securities issued.

As a result from our strategy implementation during 2010 Bank BTN had successfully achieved higher net interest margin and satisfying growth of net income at 86.75% higher compare to the amount achieved in 2009 thus resulted the growth of equities by 20% in 2010. The loans portfolio increased by 27% that impacted to the growth of assets by 17% throughout 2010.

With those achievements, Bank BTN had successfully become the market leader in housing finance as well as became the ninth largest bank based on loans portfolio and tenth largest bank based on asset size among banks in Indonesia during 2010.

LAPORAN LABA RUGI

Pada tanggal 31 Desember 2010, Bank BTN telah berhasil mencapai laba bersih sebesar Rp 916 miliar yang meningkat secara signifikan sebesar 86,75% lebih tinggi dari laba tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama disebabkan dari kenaikan pendapatan bunga dan bagi hasil syariah masing-masing sebesar 16% dan 29% lebih tinggi dan penurunan beban bunga sebagai biaya pendapatan sebesar 8% lebih rendah pada tahun 2010. Kenaikan pendapatan bunga terpengaruh dari kenaikan portofolio kredit pada 27% lebih tinggi pada tahun 2010. Penurunan beban bunga terutama didorong oleh penurunan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka pendek periode 1 bulan dari 6,43% menjadi 5,98%.

STATEMENTS OF INCOME

As of 31 December 2010, Bank BTN has successfully achieved net income at the amount of Rp 916 billion that increased significantly at 86.75% higher than the prior year profit. The increase was mainly driven from the increase of interest income and income from sharia profit sharing which were 16% and 29% higher as well as the decrease of interest expenses as the cost of revenues by 8% in 2010. The increase of interest revenues were affected from the increase in loans portfolio by 27% in 2010. The decreases in interest expenses were mainly driven by the decrease in average interest rate for short term time deposits of 1- month period from 6.43% to 5.98%.

Laporan Laba Rugi
Statements of Income

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Bunga	6.326.333	5.471.728	16	Interest Income and Income from Profit Sharing Interest
Pendapatan Bagi Hasil secara Syariah	172.419	133.259	29	Income from Sharia
Pendapatan Provisi dan Komisi	-	124.954	- 100	Fees and Commissions Revenues
Dikurangi: Beban Bunga & Bonus	3.143.934	3.427.732	- 8	Less: Interest Expenses and Bonus Expenses
Pendapatan Bunga & Bagi Hasil - Bersih	3.354.818	2.302.209	46	Interest Income and Income from Profit Sharing - Net
Pendapatan Operasional Lainnya	487.890	264.857	84	Other Operating Income
Dikurangi: Beban Operasional Lainnya	2.247.211	1.763.409	27	Less : Other Operating Expenses
Laba Operasional	1.263.717	739.438	71	Income from Operations
Pendapatan/(Beban) non Operasional - Bersih	(13.495)	6.379	- 312	Non-Operating Income/(Expense) - Net
Laba Sebelum Manfaat (Beban) Pajak	1.250.222	745.817	68	Income before Benefit (Expense) Taxes
Beban Pajak - Bersih	(334.284)	(239.574)	40	Tax Expense - Net
Laba Bersih Sebelum Pos Luar Biasa	915.938	506.243	81	Net Income before Extraordinary Item
Pos Luar Biasa - Bersih	-	(15.790)	-100	Extraordinary Item - Net
Laba Bersih	915.938	490.453	87	Net Income

Pendapatan Bunga - Pendapatan

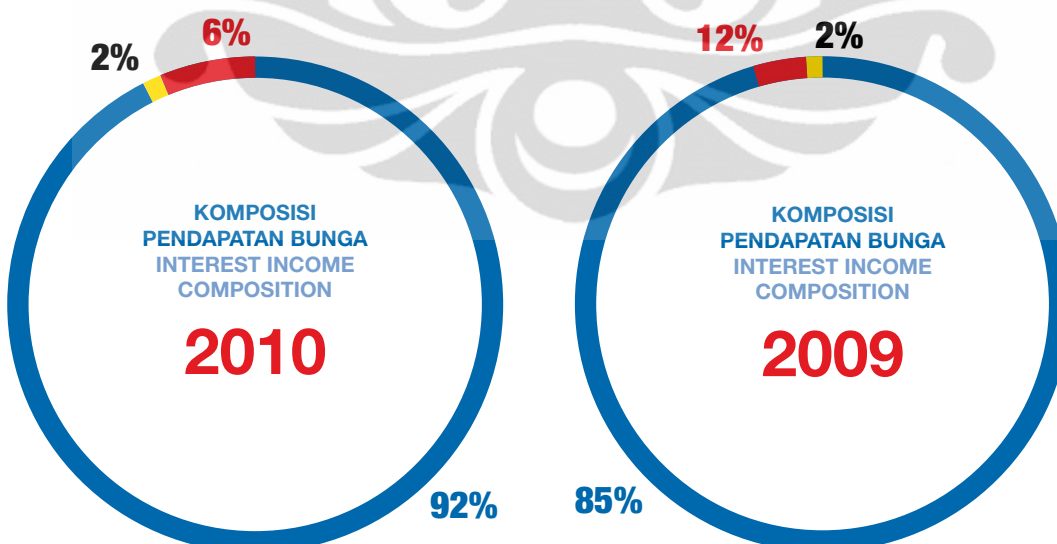
Bank BTN memperoleh pendapatan bunga dari hasil penyaluran kredit perumahan (KPR) dan non-perumahan serta dari penempatan dana pada portofolio obligasi pemerintah yang dimiliki. Pendapatan bunga yang diperoleh dari kredit yang diberikan merupakan kontribusi terbesar pada 92% dari total pendapatan bunga selama 2010.

Interest Income - Revenues

Bank BTN generated interest income from disbursing housing loans and non-housing loans and fund placement in Government bonds portfolio. The interest income generated from loans was the biggest contribution at 92% from total interest income achieved during 2010.

Pendapatan Bunga Interest Income

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Kredit Yang Diberikan	5.836.048	4.662.561	25	Loans
Obligasi Pemerintah	383.960	633.685	- 39	Government Bonds
Efek-efek	89.506	112.085	- 20	Securities
Penempatan Pada Bank Lain	13.003	27.933	- 53	Placements with Other Banks
Tagihan Swap Suku Bunga	-	35.464	- 100	Interest Rate Swap Receivables
Giro Pada Bank Indonesia	3.816	-	n.a	Current accounts with Bank Indonesia
Jumlah Pendapatan Bunga	6.326.333	5.471.728	16	Total Interest Income



- Kredit Yang Diberikan
Loans
- Obligasi Pemerintah
Government Bonds
- Efek-efek
Securities

Pendapatan Bunga dari Kredit yang Diberikan

Selama tahun 2010, pinjaman KPR terdiri dari pinjaman KPR Bersubsidi dan pinjaman KPR non subsidi. Tingkat bunga rata-rata kredit perumahan mengalami penurunan dari 11,66% per tahun pada tahun 2009 menjadi 11,18% per tahun pada tahun 2010. Di samping itu, suku bunga rata-rata atas kredit korporasi juga mengalami penurunan dari 13,31% per tahun pada 2009 menjadi 12,63% per tahun pada 2010. Penurunan ini disebabkan dari stabilnya kondisi pasar dan penurunan BI rate yang menjadi stimulasi pasar untuk menarik nasabah melakukan transaksi pembiayaan pada Bank BTN. Sebagai dampak dari kondisi ini, portofolio kredit meningkat 27% lebih tinggi pada tahun 2010, dan membuat Bank BTN masih memperoleh pertumbuhan pendapatan bunga dari kredit pada tingkat 25% di tahun 2010 sekalipun tingkat suku bunga menjadi lebih rendah dari tahun 2009.

KPR Subsidi

Pinjaman KPR Bersubsidi adalah pembiayaan rumah yang ditawarkan kepada masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan bulanan maksimal Rp 4,5 juta.

Bank BTN menjalankan perannya sebagai perantara antara dana pemerintah dan paket pembiayaan rumah bagi masyarakat menengah ke bawah melalui KPR Subsidi. Pinjaman KPR Subsidi memberikan pembiayaan rumah dengan tingkat bunga yang tetap dihitung dari biaya bunga atas 60% dana pemerintah yang memiliki biaya bunga 0,5% dan 40% dana komersial dengan suku bunga pasar ditambah dengan margin yang diharapkan sebesar 4,25%. Sebelum Oktober 2010, Bank BTN menyalurkan subsidi KPR melalui mekanisme lama, yaitu Subsidi Uang Muka (SUM) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB). Mekanisme ini masih digunakan sampai Desember 2010. Sejak Bulan Oktober sampai dengan Desember 2010, kami menggunakan dua pola subsidi yaitu pola lama (SUM dan SSB) serta pola baru bernama Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selama tahun 2010, Bank BTN telah membebaskan tingkat bunga tetap untuk pinjaman KPR Subsidi sebesar 8,15% sampai dengan 8,50%

KPR Non-Subsidi

Fasilitas ini memberikan pembiayaan rumah dengan tingkat bunga mengambang yang dihitung

Interest Income from Loans

During 2010, the housing loan consists of subsidized mortgage loan and non-subsidized mortgage loan. The average interest rate of housing loans decreased from 11.66% p.a in 2009 to 11.18% p.a. in 2010. In addition, the interest rate of corporate loans decreased from 13.31% p.a. in 2009 to 12.63% p.a. in 2010. The decrease of interest rate of loans was caused by the stable market condition and the decline of BI rate, that stimulate market to attract the customer. As the impact of this condition, the loans portfolio increased by 27% in 2010, and Bank BTN still achieved the growth of interest income from loan by 25% in 2010 even though the average interest rate was lower compare to 2009.

Subsidized Mortgages

The subsidized mortgage loan was the home financing offered to the lower middle society who had maximum monthly income of Rp 4.5 million.

Bank BTN plays its' roles as the intermediary between the Government fund and home financing package for lower middle societies through the subsidized mortgages. The subsidized mortgage loan provided home financing with fixed interest rate calculated from the cost interest of 60% Government fund that has 0.5% of interest cost and 40% commercial funds following with the market interest rate, add with expected margin at 4.25%. Prior to October 2010, Bank BTN distributed subsidized mortgages through a mechanism called Down Payment Subsidy (SUM) and Interest Margin Subsidy (SSB). These mechanisms were still applied until December 2010. Therefore, from October until December 2010 we used both mechanisms (SUM and SSB) and new mechanism called Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) subsidies.

During 2010, Bank BTN has charged fixed interest rate for subsidized mortgage loans at 8.15% up to 8.50%.

Non-Subsidized Mortgages

This loan provided home financing with floating interest rate as calculated based on the cost of

dari tingkat biaya bunga atas sumber pendanaan kredit ditambah dengan margin yang ditentukan berdasarkan kebijakan internal Bank BTN.

Pada 2010, tingkat suku bunga normal atas KPR non subsidi adalah antara 11%-13% yang memberikan kontribusi margin bunga bersih sebesar 6%-8%.

Kredit Non-Perumahan

Sebagai salah satu strategi untuk menjaga rentabilitas bisnis, Bank BTN telah mengadakan diversifikasi produk untuk mempertahankan margin bunga yang lebih baik. Di samping menawarkan pembiayaan KPR, Bank BTN juga memberikan kredit non-perumahan seperti: pinjaman modal kerja dan kredit investasi bagi perusahaan, terutama untuk perusahaan yang menjalankan bisnis dalam industri perumahan.

Pada 2010, tingkat suku bunga dari kredit non KPR adalah antara 11% - 15% yang memberikan kontribusi margin bunga bersih sebesar 5% - 8%.

Pendapatan Bunga dari Obligasi Pemerintah

Bank BTN juga memperoleh pendapatan bunga dari saldo penempatan dana pada Obligasi Pemerintah selama periode tertentu. Selama tahun 2010, Bank BTN telah menjual dengan janji pembelian kembali atas beberapa obligasi pemerintah sebesar Rp 4,3 triliun. Transaksi ini secara signifikan mengurangi pengakuan pendapatan bunga yang mengakibatkan penurunan pendapatan bunga dari obligasi pemerintah sebesar 39% di tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan bunga dari Obligasi Pemerintah memberikan kontribusi terhadap jumlah pendapatan sebesar 6% pada tahun 2010 dan 12% pada tahun 2009.

Pendapatan Bunga dari Penempatan Lain-lain

Untuk mengoptimalkan kelebihan dana yang tersedia di Bank BTN dan mengelola likuiditas, manajemen *treasury* menyelenggarakan penempatan dana pada instrumen keuangan tertentu yang dapat menghasilkan pendapatan bunga dari penempatan tersebut. Selama tahun 2010, Bank BTN telah mengurangi penempatan dana dalam efek dan penempatan pada bank lain untuk meningkatkan penempatan dana dalam rekening giro dengan BI sehubungan dengan kepatuhan pada peraturan

interest rate from the funding resources of the loan added with the expected margin set based on the Bank BTN policy.

As of 2010, the normal interest rate of non subsidized mortgage loan was between 11%-13% that contributed net interest margin at 6%-8%.

Non-Housing Loans

As one of the strategy to keep the profitability of the business, Bank BTN has provided diversification of product to maintain better interest margin. In spite of offering housing finance, Bank BTN also provided non-housing loans such as: working capital loans and investment loans for the companies, especially for the entities which conduct the business in the housing industries.

As of 2010, the interest rate of non housing loan was between 11% - 15% that contributed net interest margin at 5% - 8%.

Interest Income from Government Bonds

Bank BTN also obtained interest income from the outstanding balances of fund placement in Government Bonds for certain period. During 2010, Bank BTN has sold under repurchase agreements several Government bonds at the amount of Rp 4.3 trillion. This transaction has significantly reduced the interest income recognition that the income from Government Bonds decreased by 39% in 2010 from previous year.

Interest income from Government Bond provided contribution to total revenues at 6% in 2010 and 12% in 2009.

Interest Income from Other Placement

To optimize the excess of available fund in Bank BTN and manage its liquidity, the treasury management provided fund placement in several financial instruments that could generate interest income from the placement. During 2010, Bank BTN has reduced its fund placement in the securities and placement to other banks to increase the fund placement in current account with BI, in regards with the compliance of Bank Indonesia Regulation No.12/19/PBI/2010, dated

Bank Indonesia No.12/19/PBI/2010, tanggal 4 Oktober 2010, tentang "Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia untuk Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing". Sebagai dampaknya, pendapatan bunga yang diperoleh dari saldo penempatan dana dalam efek dan penempatan pada bank lain mengalami penurunan masing-masing sebesar 20% dan 53% lebih rendah pada tahun 2010 dibandingkan dengan tahun 2009.

4 October 2010, regarding "Statutory Reserves at Bank Indonesia for Commercial Bank in Rupiah and Foreign Currencies". Therefore, the interest income generated from outstanding balances of fund placement in securities and placement to other banks decreased respectively at 20% and 53% lower in 2010 comparing to 2009.

Bagi Hasil Syariah

Unit usaha syariah didirikan sejak tahun 2004 dengan tujuan untuk menyediakan layanan pembiayaan dan layanan simpanan atas konsep dasar prinsip syariah. Sejalan dengan natura bisnis Bank BTN, unit usaha syariah juga menawarkan pembiayaan rumah dengan konsep *murabahah* (jual beli). Selain itu, kami juga menyediakan pembiayaan non perumahan seperti pembiayaan modal kerja dan investasi dalam konsep *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Paket pembiayaan sebagian besar didukung oleh dana simpanan berbasis syariah.

Sharia Profit Sharing

Sharia business unit was established in 2004 for the purpose of providing financing and deposits service based on sharia principles. In line with the nature business of Bank BTN, sharia business unit also offered housing finance with *murabahah* (sale and purchase) concept. In addition, we also provided non-housing financing for working capital and investing based on *mudharabah* and *musyarakah* (profit sharing) concept. The financing packages were mostly supported by the funding from sharia-based deposits.

Bagi Hasil Syariah - Bersih Sharia Profit Sharing - Nett

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Margin Murabahah iB	159.485	106.159	50	Margin Murabahah iB
Margin Istishna iB	8.623	4.023	114	Margin Istishna iB
Bagi Hasil Mudharabah	113.591	73.578	54	Profit Sharing Mudharabah
Bagi Hasil Musyarakah	19.228	12.880	49	Profit Sharing Musyarakah
Bonus Wadiah	9	7	29	Bonus Wadiah
Lain-lain	43.147	43.895	-2	Others
Jumlah Pendapatan	344.083	240.542	43	Total Revenues
Dikurangi: Bagi Hasil kepada Investor	(152.753)	(91.529)	67	Less: Profit Sharing to Investors
Beban Operasional Lainnya	(18.911)	(15.754)	20	Other Operational Expenses
Bagi Hasil Syariah (bersih)	172.419	133.259	29	Sharia Profit Sharing (net)

Pendapatan yang diperoleh dari paket pembiayaan syariah merupakan margin yang diakui dari transaksi *murabahah* (jual beli) dan bagi hasil dalam transaksi *mudharabah*. Selama tahun 2010, transaksi pembiayaan syariah meningkat signifikan yang ditunjukkan dari pertumbuhan aset syariah sebesar 51% lebih tinggi dibandingkan 2009. Sejalan dengan pertumbuhan aset, pendapatan meningkat 43% lebih tinggi selama 2010 dibandingkan tahun 2009.

Untuk mendukung pertumbuhan aset, deposito berjangka *mudharabah* meningkat 75% lebih tinggi pada tahun 2010. Sebagai hasilnya, Bank memberikan bagi hasil kepada para pemilik deposito pada jumlah 67% lebih tinggi dari nilai tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan kinerja keuntungan bagi hasil syariah, Bank BTN mencapai kenaikan keuntungan bersih sebesar 29% lebih tinggi pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009 dan memberikan kontribusi sebesar 2,6% dari pendapatan bruto pada tahun 2010.

Beban Bunga

Beban bunga menurun sebesar 8% lebih rendah pada tahun 2010 jika dibandingkan dengan beban bunga pada tahun 2009 yang terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga deposito berjangka dari 6,43% menjadi 5,98%, sejalan dengan penurunan BI rate.

Beban Bunga dari Deposito Berjangka

Sebagian besar sumber dana dari Bank BTN berasal dari deposito berjangka sebesar 51% dari total kewajiban pada tahun 2010. Sebagai hasilnya, beban bunga dari deposito berjangka merupakan jumlah beban bunga terbesar pada tingkat 57% dari jumlah beban bunga pada tahun 2010.

Selama tahun 2010, beban bunga dari deposito berjangka menurun pada 21% lebih rendah dibandingkan dengan beban bunga yang dibayar pada tahun 2009. Penurunan ini didorong oleh penurunan tingkat suku bunga rata-rata selama 2010, yang sebagai berikut:

The revenues generated from sharia financing packages were resulted from the margin recognized from *murabahah* (sale and purchase) transaction and profit sharing in *mudharabah* transaction. During 2010, the sharia financing transaction increased significantly which were shown by the growth of sharia assets at 51% higher than 2009. In line with the growth of assets, the revenues increased by 43% during 2010 compare to 2009.

To support the growth of assets, the time deposits *mudharabah* increased by 75% in 2010. As a result, Bank BTN provided the profit sharing to the owner of time deposits at 67% higher than prior year amount.

Overall, the Sharia profit sharing performance, the Bank BTN achieved the increase of net profit sharing at 29% higher in 2010 comparing to 2009 and contributed at 2.6% of total gross revenues in 2010.

Interest Expenses

Interest expenses decreased by 8% in 2010 comparing to interest expenses in 2009 which was mainly driven by the decrease of interest expenses from time deposits from 6.43% to 5.98%, in line with the decrease of BI rate.

Interest Expenses from Time Deposits

Most of funding resources of the Bank BTN were generated from time deposits at 51% of total liabilities in 2010. As resulted, the interest expense from time deposits was the largest amount of interest expense at 57% of total interest expense in 2010.

During 2010, the interest expenses from time deposits decreased by 21% than the interest expenses paid in 2009. The decrease were driven by the decrease of average interest rate during 2010, which were the following:

Tingkat Suku Bunga Rata-rata**Average Interest Rates**

	2010	2009	
	dalam persentase in percentage (%)		
Rata-rata Tingkat Suku Bunga:			Average interest Rates of:
Deposito Berjangka Rupiah:			Time Deposits Rp:
1 bulan	5,98	6,43	1 month
3 bulan	5,98	6,43	3 months
6 bulan	6,31	6,68	6 months
12 bulan	6,58	6,68	12 months
24 bulan	6,67	6,68	24 months
Deposito Berjangka USD	0,42	2,17	Time Deposits USD

Beban Bunga**Interest Expenses**

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Deposito Berjangka	1.798.521	2.267.720	-21	Time Deposits
Surat-surat Berharga yang Diterbitkan	449.824	358.777	25	Securities Issued
Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	247.054	257.604	-4	Securities Sold Under Repurchase Agreements
Tabungan	308.553	286.731	8	Savings Deposits
Pinjaman yang Diterima	119.585	111.655	7	Fund Borrowings
Giro	121.009	90.047	34	Demand Deposits
Simpanan dari Bank lain	90.920	35.211	158	Deposits from Other Banks
Pinjaman Subordinasi	-	12.600	-100	Subordinated Loans
Kewajiban Swap Suku Bunga	509	-	100	Interest Rate Swap Liabilities
Jumlah Beban Bunga	3.135.975	3.420.345	-8	Total Interest Expenses

Beban Bunga dari Tabungan dan Giro

Selama tahun 2010, tingkat bunga rata-rata tabungan meningkat dari 3,86% pada tahun 2009 menjadi 6,50% pada tahun 2010. Selain itu, tingkat bunga rata-rata giro meningkat dari 2,76% pada

Interest Expenses from Savings Deposits and Demand Deposits

During 2010, the average interest rate of saving deposits increased from 3.86% in 2009 to 6.50% in 2010. In addition, the average interest rate of demand deposits increased from 2.76% in 2009 to

tahun 2009 menjadi 3,04% pada tahun 2010. Oleh karena kenaikan suku bunga rata-rata, beban bunga yang dihitung dari saldo tabungan dan giro meningkat 8% dan 34% lebih tinggi pada tahun 2010.

Beban bunga dari tabungan dan giro berpengaruh terhadap total beban bunga tahun 2010 dengan kontribusi sebesar 14%.

Beban Bunga dari Surat-surat Berharga yang Diterbitkan

Beban bunga meningkat 25% lebih tinggi pada tahun 2010 yang terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah terhutang dari surat berharga yang diterbitkan pada 2010. Selama tahun 2010, Bank BTN telah menerbitkan Obligasi BTN XIV sebesar Rp 1,65 triliun dengan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun yang meningkatkan jumlah saldo surat-surat berharga yang diterbitkan menjadi 28% lebih tinggi.

Beban bunga dari surat berharga yang diterbitkan mempengaruhi total beban bunga sebesar 14% pada tahun 2010.

Beban Bunga dari Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Beban ini mengalami penurunan sebesar 4% lebih rendah pada tahun 2010 yang seiring dengan penurunan saldo efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar 3% lebih rendah pada neraca per tahun 2010. Selain itu, beban ini memberikan kontribusi terhadap total beban bunga pada tahun 2010 sebesar 8%.

Beban Bunga dari Pinjaman yang Diterima

Beban bunga dari pinjaman yang diterima meningkat sebesar 7% lebih tinggi pada tahun 2010 yang disebabkan oleh peningkatan saldo pinjaman yang diterima selama tahun 2010. Beban bunga ini memberikan kontribusi terhadap jumlah beban bunga pada tahun 2010 sebesar 4%. Kontribusi yang rendah ini disebabkan oleh tingkat bunga rendah atas pinjaman yang diberikan yang merupakan dana subsidi dari BI untuk mendukung kebutuhan pembiayaan rumah di Indonesia.

Beban Bunga dari Simpanan dari Bank Lain

Beban bunga meningkat dari Rp 35 miliar pada 2009 menjadi Rp 91 miliar pada 2010 yang disebabkan

3.04% in 2010. Therefore the increase of average interest rate, the interest expenses recognized from outstanding balances of saving deposits and demand deposits increased at 8% and 34% higher in 2010.

Interest expenses from saving and demand deposits affected to the total interest expense in 2010 with 14% contribution.

Interest Expenses from Securities Issued

The interest expenses increased by 25% higher in 2010 which were mainly caused by the increase of outstanding amount of securities issued as of 2010. During 2010, Bank BTN has issued BTN Bonds XIV at the amount of Rp 1.65 trillion with interest rate at 10.25% p.a. that increased the outstanding amount of securities issued 28%.

The interest expenses from securities issued affected to the total interest expense with 14% contribution in 2010.

Interest Expenses from Securities Sold Under Repurchase Agreement

The expenses decreased by 4% lower in 2010 which were in line with the decrease of outstanding balances of securities sold under repurchase agreement at 3% lower in the balance sheet as of 2010. In addition, this expense contributed the total interest expenses in 2010 at 8%.

Interest Expenses from Fund Borrowings

The interest charges from fund borrowings increased by 7% in 2010 due to the increase of outstanding balances of fund borrowings during 2010. This interest expense provided contribution to the total interest expenses in 2010 at 4%. The low contribution of this expense was caused by the low interest rate of fund borrowings that represented for the subsidized funding from BI to support the home financing needs in Indonesia.

Interest Expenses from Deposits from Other Banks

The interest expenses increased from Rp 35 billion in 2009 to Rp 91 billion in 2010 which was caused

oleh meningkatnya jumlah simpanan bank lain yang ditempatkan pada Bank BTN di tahun 2010. Beban ini memberikan kontribusi terhadap jumlah beban bunga sebesar 3% pada tahun 2010.

Pendapatan Operasional Lainnya

Selama tahun 2010, pendapatan operasional lainnya meningkat secara signifikan sebesar 84% lebih tinggi dari jumlah yang dicapai pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan *fee based income*, antara lain pendapatan yang diakui dari denda dan biaya administrasi pinjaman dan simpanan; pengakuan yang signifikan dari keuntungan penjualan obligasi pemerintah dan keuntungan penjualan efek; dan juga untuk pendapatan yang dicatat dari pemulihan kredit yang sebelumnya telah dihapusbukukan.

Peningkatan denda dan biaya administrasi atas simpanan dan pinjaman sebesar 17% lebih tinggi dipengaruhi oleh kenaikan kredit sebesar 27% dan simpanan sebesar 18% selama tahun 2010. Oleh peningkatan kredit, akan ada peningkatan probabilitas atas keterlambatan pembayaran pinjaman dimana Bank BTN dapat menerima jumlah denda yang lebih tinggi pada tahun 2010. Selain itu, dengan kenaikan simpanan, akan ada peningkatan jumlah rekening simpanan dimana Bank BTN dapat menerima jumlah biaya administrasi, yang dibebankan ke setiap rekening simpanan, dengan jumlah lebih tinggi dari pencapaian tahun 2009.

Pendapatan Operasional Lainnya Other Operating Income

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Pungutan Administrasi dan Denda Simpanan dan Kredit yang Diberikan	244.817	208.936	17	Penalties and Administration Fees on Deposits and Loans
Keuntungan dari Penjualan Obligasi Pemerintah – Bersih	42.444	5.198	717	Gain on Sale of Government Bonds – Net
Keuntungan dari Penjualan Efek-Efek – Bersih	68.051	-	n.a	Gain on Sale of Securities – Net
Keuntungan dari Perubahan Nilai Efek-Efek untuk Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi - Bersih	4.360	2	217.900	Gain from Change in Value of Fair Value Through Profit or Loss Securities - Net
Pendapatan dari Penerimaan Hapus Buku	78.648	-	n.a	Income from Recovery of Loans Written-off
Lain-lain	49.570	50.721	-2	Others
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	487.890	264.857	84	Total Other Operating Income

by the increase of outstanding deposits from other banks in 2010. The expense has contributed to the total interest expenses at 3% in 2010.

Other Operating Income

During 2010, other operating income increased significantly at 84% higher than the amount achieved in 2009. The increase was mainly driven by the increase of fee based income, such as income recognized from penalties and administration fees on deposits and loans; the significant recognition of gain on sale of Government bonds and gain on sale of securities; and also for the income recorded from the recovery of loans that previously has been written-off.

The increase of penalties and administration fees on deposits and loans at 17% higher was affected by the increase of loans at 27% and deposits at 18% during 2010. Due to the increase of loans, there would be an increase of probability for late installment of loan whereas Bank BTN could receive higher total amount of penalties in 2010. In addition, by the increase of deposits, there would be an increase of total deposits account whereas Bank BTN could receive higher total administration fee, which was charged to every deposit account at higher amount than the achievement in 2009.

Selama tahun 2010, Bank telah menjual sebagian obligasi pemerintah dengan janji dibeli kembali dengan total nilai nominal sebesar Rp 4,3 triliun lebih tinggi dari nilai obligasi pemerintah yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tahun 2009 senilai Rp 4,2 triliun. Tujuan transaksi ini adalah untuk meningkatkan sumber pendanaan Bank.

Untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia yang baru no.12/19/PBI/2010, tanggal 4 Oktober 2010, Bank telah menjual surat berharga untuk membeli dan meningkatkan penempatan dana dalam rekening giro pada Bank Indonesia. Dalam transaksi penjualan, Bank telah mengakui keuntungan atas penjualan efek sebesar Rp 68 miliar yang meningkat secara signifikan dari jumlah nihil pada tahun 2009.

Selain itu, Bank juga telah menerima pembayaran dari kredit yang sebelumnya telah dihapusbukukan sebesar Rp 78 miliar yang meningkat dari jumlah nihil pada tahun 2009.

Beban Usaha

Selama tahun 2010, beban operasional meningkat secara signifikan sebesar 27% lebih tinggi daripada jumlah yang terjadi pada tahun 2009. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif dan non produktif sebesar 487%, kenaikan gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar 21% dan peningkatan beban umum dan administrasi sebesar 31%.

Berdasarkan bisnis Bank BTN, aset didominasi oleh kredit. Oleh karena itu, penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif dan non produktif dialokasikan sebagian besar dari portofolio kredit. Selama tahun 2010, kredit meningkat sebesar 27% lebih tinggi dari tahun 2009. Berdasarkan analisis kolektibilitas kredit, 96,74% dari pinjaman yang dalam kondisi baik dan sisa 3,26% portofolio dalam kondisi bermasalah. Manajemen telah menghitung penyisihan penurunan nilai aktiva berdasarkan status pinjaman dalam analisis kolektibilitas. Karena portofolio kredit meningkat sebesar 27% lebih tinggi, penyisihan penurunan nilai aset meningkat secara signifikan pada tahun 2010.

During 2010, Bank BTN has sold some Government bonds under repurchase agreement at the total amount of Rp 4.3 trillion which were higher than the amount of Government bonds sold under repurchase agreement in 2009 at Rp 4.2 trillion. The purpose of this transaction is to increase our funding resources.

To comply with the new Bank Indonesia Regulation no. 12/19/PBI/2010, dated 4 October 2010, the Bank has sold its securities to purchase and increase its fund placement in current account with Bank Indonesia. Due to the sale transaction, the Bank has recognized gain on sales of securities at the amount of Rp 68 billion which increased significantly from zero amount in 2009.

In addition, the Bank has also received payment of loans that have previously written off at the amount of Rp 78 billion which increased from zero amount in 2009.

Operating Expenses

During 2010, operating expenses increased significantly at 27% higher than the amount occurred in 2009. The increase was mainly driven by the increase of provision for impairment losses on earning and non earning assets at 487%, the increase of salaries and employee benefits at 21% and the increase of general and administrative expenses at 31%.

Based on Bank BTN business, the assets were predominantly loans. Therefore, the provisions for impairment losses on earning and non-earning assets were allocated mostly from loans portfolio. During 2010, the loans increased by 27% higher than in 2009. Based on the loans collectability analysis, 96,74% of loans were in performing condition and the remaining of 3,26% portfolio were in the non performing condition. The management has calculated the provision for impairment of assets based on the loans status in the collectability analysis. Due to the increase of loans portfolio by 27%, the provision for impairment of assets increased significantly in 2010.

Beban Usaha

Operating Expenses

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Kerugian Aset Produktif dan Non-Produktif	310.536	52.864	487	Provision for Impairment Losses on Earning and Non-earning Assets
Beban Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	21.244	11.355	87	Provision for Impairment Losses on Commitments and Contingencies
Gaji dan Tunjangan Karyawan	1.136.484	937.075	21	Salaries and Employee Benefits
Umum dan Administrasi	886.244	673.954	31	General and Administrative
Premi Program Penjaminan Pemerintah	79.964	70.562	13	Premium on Government's Guarantee Program
Lain-lain	144.519	81.818	77	Others
Jumlah Beban Operasional	2.578.991	1.827.628	41	Total Operating Expenses

Peningkatan gaji dan kesejahteraan karyawan didorong oleh peningkatan karyawan tetap dari 4.085 karyawan di tahun 2009 menjadi 4.231 karyawan di tahun 2010. Selain itu, Bank BTN juga telah meningkatkan gaji pokok karyawan dan mendistribusikan bonus pada tahun 2010 yang didasarkan pada kinerja mereka.

Kenaikan beban umum dan administrasi disebabkan oleh kenaikan biaya perbaikan dan pemeliharaan sebagai dampak dari peningkatan *outlet* Bank BTN dengan tambahan 111 kantor kas pada tahun 2010.

The increase of salaries and employee benefit was driven by the increase of permanent employees from 4,085 employees in 2009 to 4,231 employees in 2010. In addition, Bank BTN has also increased the basic salaries of its employees and distributed bonus in 2010 based on their performance.

The increase of general and administrative expenses was caused by the increase of repair and maintenance expenses that affected from the increase of our outlets at additional of 111 cash offices in 2010.

Laba Operasional

Secara kinerja keseluruhan, khususnya pada peningkatan signifikan pendapatan bruto dan penurunan beban pokok pendapatan, Bank BTN mencapai pertumbuhan laba operasional sebesar 71% lebih tinggi pada tahun 2010. Hal ini berarti bahwa kami telah berhasil menerapkan strategi untuk diversifikasi produk kredit dan mengurangi komposisi dana yang memiliki biaya bunga yang tinggi dalam tujuan pencapaian margin bunga bersih yang lebih tinggi.

Income from Operations

In overall performance, especially for the significant increase of gross revenues and the decrease of cost of revenues, Bank BTN achieved the growth of income from operation at 71% higher in 2010. This meant that Bank BTN has successfully implemented its strategy to diversify its loan products and reduce the composition of funding that had high interest cost to achieve higher net interest margin.



Pajak Penghasilan

Berdasarkan UU No.7/1983, sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Undang-Undang No.36/2008, tentang pajak penghasilan, tarif pajak progresif menurun dari 28% pada tahun 2009 menjadi 25% pada tahun 2010. Pada tahun 2010, Bank BTN telah mencapai peningkatan laba operasional sebesar 71%. Setelah memperhitungkan beban bukan operasional tahun 2010 sebesar Rp 13 miliar, maka laba sebelum pajak menjadi meningkat sebesar 68% lebih tinggi daripada laba yang dicapai pada tahun 2009. Dengan adanya ketentuan tarif pajak progresif yang mengalami penurunan sampai 25% dari laba sebelum pajak, beban pajak penghasilan tahun 2010 meningkat hanya 40% lebih tinggi dari beban pajak pada tahun 2009.

Laba Bersih

Peningkatan pendapatan dari operasional dan peningkatan yang relatif kecil pada beban pajak penghasilan karena perubahan peraturan pajak, telah berpengaruh terhadap peningkatan yang signifikan dari laba bersih. Laba bersih pada tahun 2010 sebesar Rp 915 miliar meningkat signifikan 86,75% lebih tinggi dari jumlah yang dicapai pada tahun 2009.

Income Taxes

Based on the Law no.7/1983, as amended fourth time by Law no.36/2008, regarding for income tax, the progressive tax rate decreased from 28% in 2009 to 25% in 2010. In 2010, Bank BTN had achieved the increase of income from operation by 71%. After calculating the non-operational expenses in 2010 at the amount of Rp 13 billion, the income before tax increased by 68% than 2009. Based on the regulation of progressive tax rate which had decreased to 25%, the income tax expenses in 2010 merely increased by 40% than the amount in 2009.

Net Income

The increase of income from operation and the small increase of income taxes expenses because of the amendment of tax regulation had affected to the significant increase of net income. The net income in 2010 was amounting to Rp 915 billion, increased significantly at 86.75% higher than the amount achieved in 2009.

ASET

Selama tahun 2010, jumlah aktiva meningkat secara signifikan dari Rp 58 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 68 miliar pada tahun 2010. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan portofolio kredit yang diberikan sebesar 27% lebih tinggi pada tahun 2010. Selain itu, dengan pertumbuhan aktiva tersebut, Bank BTN telah menjadi salah satu dari 10 bank dengan aset terbesar di Indonesia.

Aset Assets

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Kas	362.769	294.357	23	Cash
Giro pada Bank Indonesia	4.126.152	2.842.112	45	Current Accounts with Bank Indonesia (BI)
Giro pada Bank lain - bersih	151.387	25.692	489	Current Accounts with Other Banks - Net
Penempatan pada BI dan Bank lain - Bersih	2.371.810	2.665.406	-11	Placement with BI and Other Banks - Net
Efek-efek - Bersih	928.357	2.951.080	-69	Securities - Net
Obligasi Pemerintah - Bersih	7.193.270	7.380.213	-3	Government Bonds - Net
Tagihan Swap suku bunga - Bersih	-	33.059	-100	Interest Rate Swap Receivables - Net
Kredit yang diberikan - Bersih	50.668.815	40.029.401	27	Loans - Net
Aset pajak tangguhan - Bersih	38.836	72.221	-46	Deferred Tax Assets - Net
Aset tetap - Bersih	1.450.837	1.236.672	17	Premises and Equipment - Net
Bunga yang masih akan diterima	580.476	508.542	14	Interest Receivables
Aset lain - lain	512.830	408.912	25	Other Assets
Jumlah Aset	68.385.539	58.447.667	17	Total Assets

ASSETS

During 2010, total assets increased significantly from Rp 58 billion in 2009 to Rp 68 billion in 2010. The increase was mainly driven by the increase of loans portfolio by 27% in 2010. In addition, with this growth of assets, Bank BTN has become one of the tenth banks with the largest assets in Indonesia.

Kredit

Sejalan dengan bisnisnya, Bank BTN menyediakan fasilitas pinjaman untuk pembiayaan rumah untuk semua golongan masyarakat. Sebagai salah satu strategi Bank BTN untuk tujuan pencapaian margin bunga bersih yang tinggi, Bank BTN mengadakan diversifikasi fasilitas pinjaman untuk paket pembiayaan non perumahan seperti: pinjaman modal kerja dan kredit investasi.

Loans

In line with its business, Bank BTN provided loan facilities for housing finance packages to all segment of the public. As one of Bank BTN strategies to achieve higher net interest margin, Bank BTN diversified its loans facilities to non-home financing packages such as: working capital loans and investment loans.

Berikut ini adalah jenis produk pinjaman yang ditawarkan oleh Bank:

KPR Subsidi

Merupakan paket pembiayaan KPR yang disediakan bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan bulanan maksimal Rp 4,5 juta per bulan. Fasilitas ini menawarkan tingkat bunga tetap, mulai dari 8,15% per tahun. Selain itu, fasilitas ini didanai oleh Likuiditas dari Pemerintah dan pendanaan komersial dari Bank BTN dengan biaya bunga rata-rata sebesar 3,90%.

Sampai dengan akhir tahun 2010, Bank BTN telah mendistribusikan KPR Subsidi sebesar Rp 21 triliun yang meningkat 13% lebih tinggi dari saldo portofolio pada tahun 2009.

KPR non-subsidi

Merupakan paket pembiayaan rumah yang diberikan dengan tingkat bunga mengambang, yang disesuaikan dengan kondisi pasar. Fasilitas ini telah menawarkan tingkat bunga rata-rata antara 10 - 12% selama tahun 2010.

Sampai dengan akhir tahun 2010, Bank BTN telah menyediakan KPR non subsidi sebesar Rp 16 triliun yang meningkat 30% lebih tinggi dari saldo portofolio tahun 2009.

Kredit Komersial

Merupakan paket-paket pembiayaan bagi perusahaan, antara lain kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit usaha rakyat.

Kredit komersial memberikan kontribusi sebesar 18% dari portofolio kredit pada tahun 2010. Saldo portofolio sebesar Rp 9 triliun mengalami peningkatan signifikan pada posisi 60% lebih tinggi dari jumlah yang didistribusikan pada tahun 2009.

Terlepas dari segmen bisnis komersial, Bank BTN juga telah menyediakan paket pembiayaan dalam unit bisnis Syariah seperti: pembiayaan rumah dengan konsep *murabahah* (jual beli), modal kerja dan pembiayaan investasi atas dasar *mudharabah* (bagi hasil) dan *musyarakah* (sindikate). Per 31 Desember 2010, aktiva pembiayaan unit syariah memberikan kontribusi sebesar Rp 2,8 triliun atau sebesar 6% dari saldo portofolio kredit pada tahun 2010. Jumlah ini meningkat 42% lebih tinggi dari jumlah yang dilaporkan pada tahun 2009.

The following are the type of loan products offered by the Bank:

Subsidized mortgages

The mortgages for lower middle segment of the public who had maximal monthly income of Rp 4.5 million. This facility offered fixed interest rate, starting from 8.15% p.a. In addition, the facility was funded by the Liquidity facility from Government and Bank BTN commercial funding with average interest expense at 3.90%.

Up to the end of 2010, the Bank has distributed subsidized mortgage amounting to Rp 21 trillion which was 13% higher than the amount of portfolio in 2009.

Non-subsidized mortgages

The housing finance with the floating interest rate, adjusted with the market condition. This facility offered average interest rate between 10 - 12% during 2010.

Until the end of 2010, Bank BTN has provided non-subsidized mortgage at the amount of Rp 16 trillion which was 30% higher than the amount of portfolio in 2009.

Commercial Loans

The financing packages for company, such as working capital loan, investment loan and small, micro and medium loans.

Commercial loans contributing at 18% of loans portfolio in 2010. The outstanding balances of portfolio which was amounting to Rp 9 trillion increased significantly by 60% than the amount distributed in 2009.

In spite of the commercial business segment, Bank BTN has also provided financing packages in Sharia unit business such as: housing finance in *murabahah* (sale and purchase) concept, working capital and investing financing in basic of *mudharabah* (profit sharing) and *musyarakah* (syndicate). As of 31 December 2010, the sharia financing assets contributed at the amount of Rp 2.8 trillion or 6% of the total loans portfolio in 2010. This amount increased significantly by 42% than the amount reported in 2009.

Seperti dijelaskan sebelumnya, Bank BTN didirikan sejak tahun 1897 dan memiliki kompetensi yang baik dan berpengalaman dalam mengelola asetnya. Dengan demikian, Bank BTN telah menjadi lembaga keuangan yang dapat dipercaya untuk menghasilkan layanan dukungan pembiayaan, terutama untuk pembiayaan rumah (KPR) untuk tingkat dan tujuan masyarakat yang berbeda. Hal ini ditunjukkan bahwa Bank BTN telah menjadi *market leader* atas pangsa pasar 27% untuk pembiayaan rumah pada 2010.

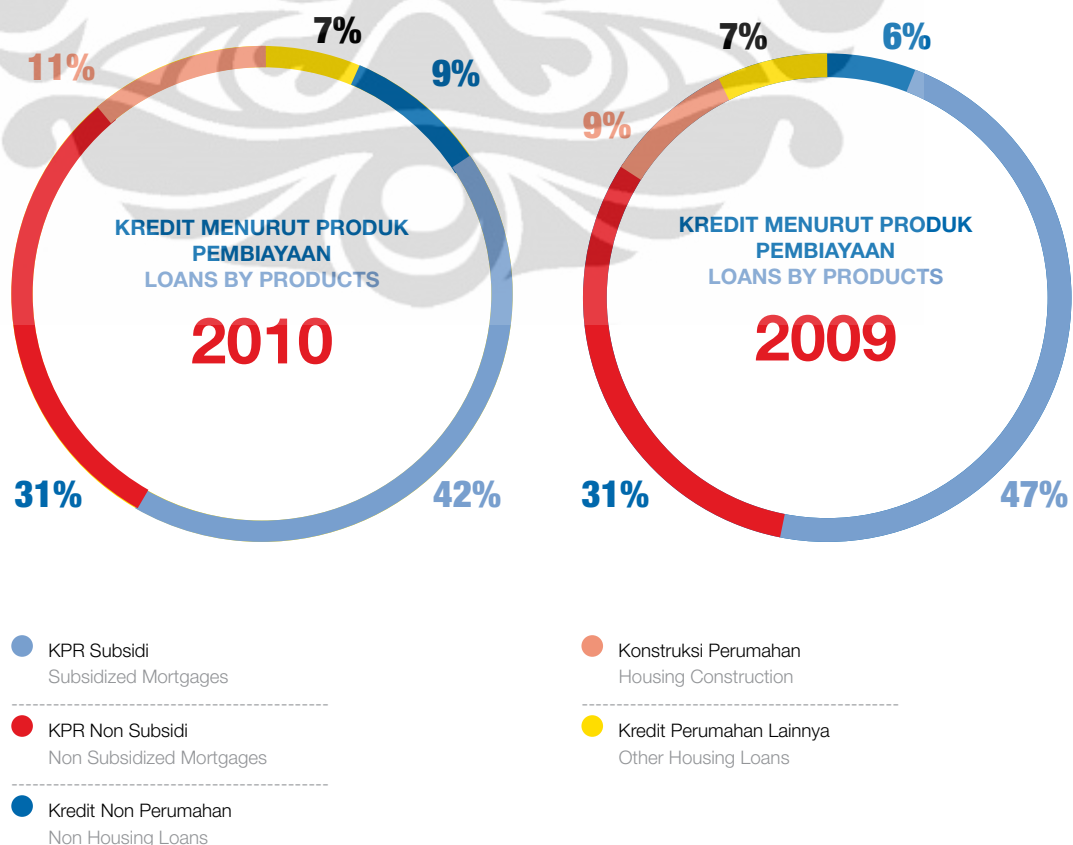
Pada bulan April 2010, Bank BTN telah mengumumkan untuk menurunkan suku bunga kredit bank pada kisaran 0,5% - 1%. Pengumuman ini dilakukan sebagai stimulasi pasar untuk menarik pelanggan guna melakukan transaksi keuangan dengan Bank BTN.

Pinjaman KPR Bersubsidi memberikan kontribusi tertinggi atas portofolio kredit, yang berada pada posisi 41,53% di tahun 2010.

As explained earlier, Bank BTN had been established since 1897 and had good competency and well experienced in managing its assets. Thus, Bank BTN has become trustworthy financial institution to produce financing assistance, especially for housing finance to different level and purpose of the public. This was shown by becoming the market leader based on 27% market share for housing finance in 2010.

On April 2010, Bank BTN announced its plan to reduce the loan interest rate approximately between 0.5%-1%. This announcement was conducted as market stimulation to attract customers in doing business with Bank BTN.

The subsidized mortgage provided the highest contribution of portfolio which was at 41.53% in 2010.



Dalam pandangan sektor ekonomi, kredit didominasi oleh sektor bisnis properti, terutama untuk sektor perumahan yang memberikan kontribusi sebesar 74% pada tahun 2010. Sektor-sektor lainnya diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 11%; layanan bisnis sebesar 4%, manufaktur, publik dan sektor lainnya sebesar 11% dari jumlah kredit pada tahun 2010.

Selama tahun 2010, rasio NPL turun dari 2,75% pada tahun 2009 menjadi 2,66% pada tahun 2010. Hal ini berarti bahwa risiko tidak tertagihnya kredit (risiko kredit) selama tahun 2010 lebih rendah dibandingkan tahun 2009. Meskipun risiko lebih rendah, Bank BTN masih membentuk penyisihan kemungkinan kerugian tidak tertagihnya kredit sebesar Rp 881 miliar dan dibebankan pada laporan laba rugi pada Rp 323 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan yang dibentuk telah memadai untuk menutup kerugian akibat risiko kredit.

Kas dan Setara Kas

Di samping rentabilitas, Bank BTN juga harus menjaga kondisi likuiditas antara aset dan kewajiban. Sejak dahulu, Bank BTN telah mengoptimalkan pengelolaan treasury untuk menjaga likuiditas Bank BTN dengan melakukan penempatan dana pada beberapa instrument keuangan yang lebih likuid. Kami mengklasifikasikan aset yang sangat likuid tersebut sebagai kas dan setara kas yang terdiri dari:

Kas

Kas merupakan untuk dana kas yang disediakan oleh *teller* atau disimpan dalam *Automatic Teller Machine (ATM)* untuk kegiatan operasional Bank, seperti: untuk menyediakan dana kas berdasarkan permintaan penarikan simpanan nasabah Bank.

Selama tahun 2010, kas meningkat 23% lebih tinggi dari jumlah tahun 2009. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan 111 kantor kas dan 217 mesin ATM selama tahun 2010.

Giro pada Bank Indonesia (BI)

Pada tanggal 4 Oktober 2010, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan No 12/19/PBI/2010, untuk mengubah peraturan sebelumnya sehubungan dengan Giro Wajib Minimum (GWM). Peraturan

In the view of economic sector, the loans were predominantly for the property business, especially for housing sector which contributed at 74% in 2010. The other sectors were construction sector at 11%, business service at 4%, public service, manufacture and others sector at 11% of total loans in 2010.

During 2010, the NPL ratio decreased from 2.75% in 2009 to 2.66% in 2010. This meant that the risk of uncollectible loans (credit risk) during 2010 was lower than in 2009. Eventhough the risk was lower, Bank BTN still provided provision of possibility losses occurred on uncollectibility of loans at the amount of Rp 881 billion and charged to the statement of profit and loss at Rp 323 billion. Management believed that the provision was adequate to cover the loss due to credit risk.

Cash and Cash Equivalent

Beside the profitability aspect, Bank BTN should maintain liquidity condition between its assets and liabilities. Bank BTN had optimized treasury management to keep the liquidity of Bank BTN by placing the fund in several financial instruments which were more liquid. We classified the most liquid assets as cash and cash equivalent which consist of:

Cash

The cash represented for the cash fund that was held by the teller or kept in the Automatic Teller Machine (ATM) for Bank BTN operational activities such as to provide cash fund based on withdrawal request from the Bank's deposits owner.

During 2010, the cash increased by 23% than the amount in 2009. The increase was mainly due to the addition of 111 cash offices and 217 ATM machines during 2010.

Current Accounts with Bank Indonesia (BI)

On 4 October 2010, Bank Indonesia (BI) issued Regulation No. 12/19/PBI/2010, to amend the previous regulations in regards with the Minimum Reserve Requirement (GWM). This regulation

ini menyatakan bahwa GWM untuk rekening Rupiah menjadi sebesar 10,5% yang terdiri dari 8% GWM utama dan GWM sekunder 2,5% dari total dana pihak ketiga Rupiah, sedangkan GWM untuk rekening mata uang asing menjadi 1% dari mata uang asing total dana pihak ketiga. Untuk GWM utama, Bank BTN harus menjaga cadangan minimum di Giro pada BI, sedangkan untuk GWM sekunder, Bank BTN harus memelihara cadangan minimum di efek yaitu Sertifikat Bank Indonesia dan Obligasi Pemerintah.

Sebagai dampak dari perubahan peraturan tersebut, Bank BTN harus menyediakan dana tambahan penempatan giro pada BI yang berpengaruh terhadap peningkatan saldo 45% lebih tinggi pada tahun 2010. Setelah tambahan penempatan, Bank BTN telah memenuhi peraturan tersebut.

Giro pada Bank Lain

Dana yang ditempatkan dalam rekening giro pada bank lain bertujuan untuk menyediakan cara yang lebih mudah dalam melaksanakan transfer dana/ pengiriman uang/ penyelesaian transaksi antara lokal dan/atau bank internasional. Fluktuasi giro ini bergantung pada frekuensi transaksi dana yang diberikan oleh nasabah. Selama tahun 2010, rekening giro pada bank lain mengalami peningkatan 489% lebih tinggi dari saldo tahun 2009.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Pada tahun 2010, penempatan pada BI dan bank lain mengalami penurunan tidak signifikan sebesar 11% lebih rendah yang dikarenakan dari pertimbangan Bank BTN untuk mengalokasikan kelebihan dana guna mendukung peningkatan kredit pada tahun 2010.

Efek-efek

Selama tahun 2010, efek-efek menurun sebesar 69% lebih rendah dari saldo tahun 2009. Penurunan ini disebabkan dari transaksi penjualan sertifikat Bank Indonesia yang dilakukan Bank BTN dimana Bank BTN memperoleh keuntungan sebesar Rp 68 miliar atas penjualan ini.

states that the GWM for Rupiah account becomes 10.5% that consists of 8% primary GWM and 2.5% secondary GWM from the total Rupiah third party deposits, while the GWM for foreign currency of account becomes 1% from the total foreign currency of third party deposits. For primary GWM, Bank BTN should maintain the minimum reserve in Current Account with BI, while for secondary GWM, Bank BTN should maintain minimum reserve in securities i.e. Certificates of Bank Indonesia and Government Bonds.

As the result of the amendment of the regulation, Bank BTN had to provide additional fund placement in current accounts with BI that impacting to the increase of 45% outstanding balance in 2010. After the additional placement, Bank BTN had complied with the regulation.

Current Account with Other Banks

The fund placed in the current account with other banks was to facilitate transfer/remittance/settlement of fund transaction between local and/or international banks. The fluctuation on this current accounts depend on the funds transaction frequency provided by the customers. During 2010, the current account with other banks increased by 489% than the balance in 2009.

Placement with Bank Indonesia and Other Banks

In 2010, the placement with Bank Indonesia and other banks decreased insignificantly by 11% due to the consideration from Bank BTN to allocate the excess funds to support the increase of loans in 2010.

Securities

During 2010, the securities decreased by 69% than the balance in 2009. The decrease was caused by the selling of Bank Indonesia's certificate. Therefore, Bank BTN received gain on sale of securities at the amount of Rp68 billion.

Aset Tetap

Aset tetap meningkat sebesar 17% lebih tinggi dari saldo tahun 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh tambahan 111 kantor kas untuk memperluas jaringan kegiatan operasional selama 2010.

KEWAJIBAN

Pertumbuhan aset sebesar 17% lebih tinggi didukung oleh peningkatan kewajiban pada 17% lebih tinggi pada tahun 2010. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan simpanan dari nasabah sebesar 18%; penerbitan surat berharga baru selama tahun 2010 yang meningkatkan efek yang diterbitkan sebesar 28%; dan tambahan fasilitas pinjaman yang diberikan yang meningkat sebesar 14% lebih tinggi pada tahun 2010.

Premises and Equipment

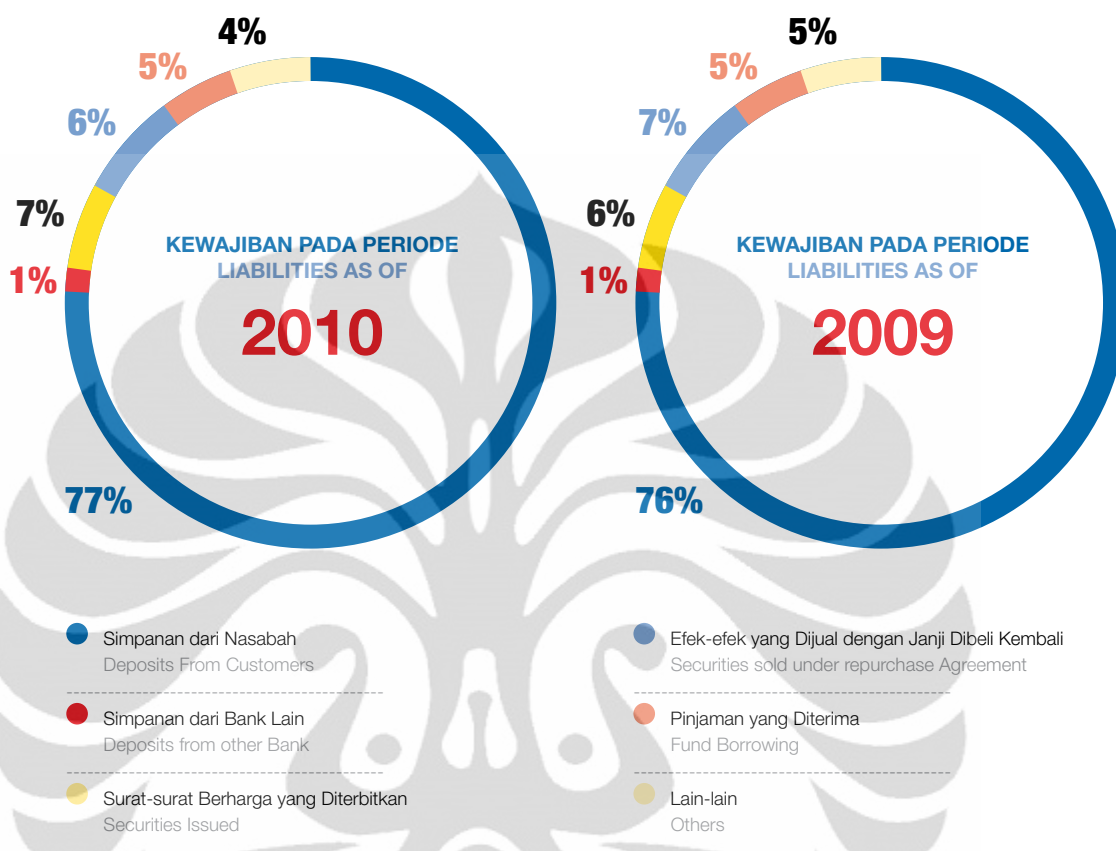
Premises and equipment increased by 17% higher than the position in 2009. The increase was caused by the additional 111 cash offices to expand Bank BTN's operational activities during 2010.

LIABILITIES

The growth of assets by 17% was supported by the increase of liabilities by 17% in 2010. The increases were resulted from the increase of deposits from customers by 18%; the new issuing of securities during 2010 that increase securities issued by 28% and additional facilities of fund borrowing that was increased by 14% in 2010.

Kewajiban Liabilities

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Kewajiban Segera	781.931	664.765	18	Current Liabilities
Simpanan dari Nasabah	47.546.047	40.214.954	18	Deposits
Simpanan dari Bank Lain	558.271	504.763	11	Deposits from Other Banks
Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	3.463.819	3.564.709	-3	Securities Sold under Repurchase Agreement
Surat-Surat Berharga yang Diterbitkan	4.139.934	3.221.894	28	Securities Issued
Pinjaman yang Diterima	3.399.787	2.983.997	14	Fund Borrowings
Bunga yang Masih Harus Dibayar	163.106	161.604	1	Accrued Interest
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	60.782	39.538	54	Estimated Losses On Commitments and Contingencies
Kewajiban lain-lain	1.824.584	1.698.318	7	Other Liabilities
Jumlah Kewajiban	61.938.261	53.054.542	17	Total Liabilities



Simpanan dari Pihak Ketiga

Simpanan dari pihak ketiga merupakan dana yang ditempatkan di Bank BTN dari nasabah. Simpanan tersebut terdiri dari giro, tabungan dan deposito berjangka yang disajikan menurut tingkat likuiditas simpanan tergantung dari produk simpanan yang ditawarkan. Simpanan dari pihak ketiga merupakan kontribusi pendanaan terbesar, yakni sekitar 77% dari jumlah kewajiban selama 2009 dan 2010.

Selama tahun 2010, produk simpanan adalah sebagai berikut:

Giro Saldo giro pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 5,17 triliun, yang terdiri dari giro berdasarkan prinsip konvensional (Rupiah dan USD) sebesar Rp 5,03 triliun, atau 97% dari total giro, dan giro yang dikelola dalam unit bisnis syariah sebesar Rp 138 miliar atau sebesar 3% dari jumlah giro pada tahun 2010.

Deposits from Third Parties

Deposits from third parties are funds placed in Bank BTN by the customers. The deposits consist of the demand deposits, the saving deposits and time deposits which were presented according to the liquidity level of the deposits based on the deposits product offered. The deposits from third parties were the largest contribution of funding resources at approximately 77% of total liabilities during 2009 and 2010.

During 2010, the deposits products were as the following:

Demand Deposits The outstanding balance of demand deposits at the amount of Rp 5,17 trillion consist of demand deposits with conventional principle (Rp and USD) at Rp 5,03 trillion, or 97% of total demand deposits, and demand deposits managed in sharia unit business at the amount of Rp 138 billion or 3% of total demand deposits in 2010.

Posisi giro sebesar Rp 5 triliun pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 30% lebih rendah daripada jumlah yang dilaporkan pada tahun 2009. Penurunan ini disebabkan adanya dana Pemerintah yang ditempatkan pada akhir tahun 2009 namun ditarik kembali pada awal 2010.

Tabungan terdiri dari: Tabungan BTN Batara; Tabungan BTN Prima, Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara, Tabungan BTN Haji, Tabungan BTN eBatara Pos, Tabungan BTN Batara iB, Tabungan BTN Prima iB, dan Tabungan BTN Haji iB yang dikelola dalam perbankan komersial dan unit syariah.

Pada tahun 2010, dana pihak ketiga Bank BTN dari tabungan sebesar Rp 10,8 triliun, meningkat sebesar 22% lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan pada tahun 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh strategi manajemen untuk meningkatkan sumber dana ritel yang berbiaya murah. Pada tahun 2010, Bank juga melaporkan saldo Tabungan BTN Batara iB dengan prinsip Wadiah dan Tabungan BTN Prima iB yang berprinsip *Mudharabah*, yang merupakan tabungan yang dikelola dalam unit syariah sebesar Rp 276 miliar atau sebesar 3% dari jumlah tabungan pada tahun 2010.

Deposito Berjangka terdiri dari Deposito Berjangka konvensional (dalam Rp dan USD) serta Deposito Berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.

Pada tahun 2010, deposito berjangka Bank BTN sebesar Rp 32 triliun yang meningkat secara signifikan sebesar 32% lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan pada tahun 2009. Peningkatan ini diperoleh dari upaya Bank BTN menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga dan instansi dalam pengelolaan dana operasional lembaga. Pada tahun 2010, Bank BTN melaporkan saldo deposito dengan prinsip konvensional sebesar Rp 29,51 triliun dan Deposito BTN iB dengan prinsip *Mudharabah*, yakni deposito berjangka yang dikelola dalam bisnis unit syariah sebesar Rp 1,9 triliun atau sebesar 6% dari total deposito pada tahun 2010. Deposito berjangka Syariah merupakan sumber dana terbesar untuk aset syariah.

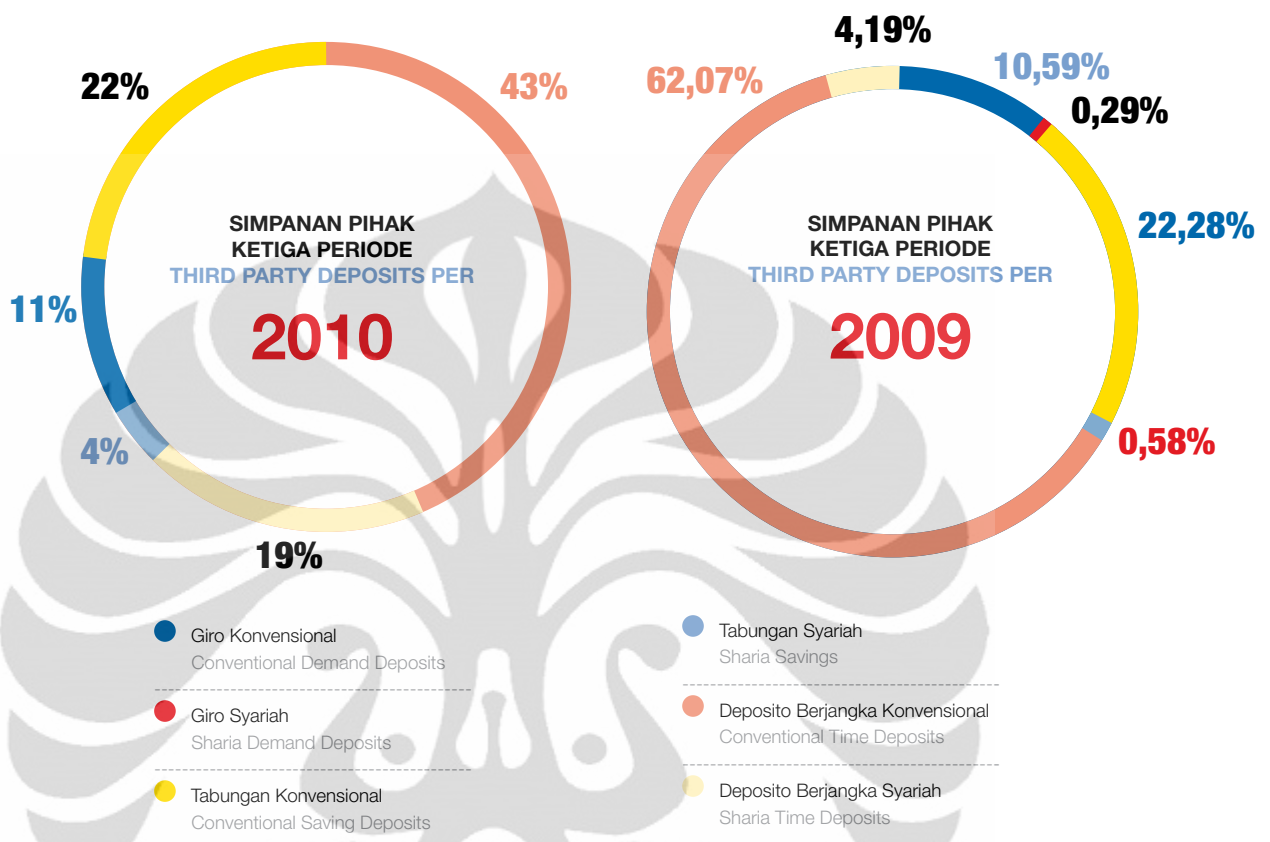
The balance of demand deposits at the amount of Rp 5 trillion decreased by 30% than the amount reported in 2009. The decrease was caused by the placement of Government funds at the end of 2009 but were withdrawn at the beginning of 2010.

Saving Deposits consist of: Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Prima, Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara, Tabungan BTN Haji, Tabungan BTN eBatara Pos, Tabungan BTN Batara iB, Tabungan BTN Prima iB, and Tabungan BTN Haji iB that were managed in commercial banking and sharia unit business.

As of 2010, the third party deposits of Bank BTN from savings was recorded at of Rp 10.8 trillion, increased by 22% than the amount reported in 2009. The increase was caused by the management strategy to increase low-cost retail source of funds. As of 2010, the Bank had also reported the outstanding balances of Tabungan BTN Batara iB based on Wadiah principles and Tabungan BTN Prima iB with *Mudharabah* principles, the saving deposits managed in sharia unit business was amounted to of Rp 276 billion or 3% from the total savings in 2010.

Time Deposits consist of conventional time deposits (in Rp and USD) and time deposits which was managed with sharia principle.

In 2010, time deposits of Bank BTN was amounted to Rp 32 trillion, or increased significantly by 32% than the amount reported in 2009. The increase was caused by Bank BTN's effort to cooperate with various institutions to manage their operational funds. As of 2010, Bank BTN had reported the outstanding balances of deposits with conventional principle at the amount of Rp 29,51 trillion and Deposito BTN iB with *Mudharabah* principle (time deposits managed in sharia unit business) at the amount of Rp 1.9 trillion or 6% of total time deposits in 2010. The Sharia time deposits were the largest source of funds for sharia assets.



Secara keseluruhan dari kontribusi dana simpanan dari pelanggan, deposito berjangka selama 1 bulan adalah kontribusi terbesar atau 43% dari total simpanan dari pihak ketiga pada tahun 2010.

Overall, time deposit with 1-month period. Was the largest contributor of total customers' deposit which was accounted for 43% of total deposits in 2010.

Simpanan dari Bank Lain

Guna memudahkan pelaksanaan transfer dana/ pengiriman uang/ penyelesaian antara lokal dan/ atau bank internasional, Bank telah menempatkan dana pada beberapa bank lain yang dicatat sebagai giro pada bank lain di bagian aset. Sebaliknya, bank lain akan menempatkan dana mereka di Bank BTN yang akan dicatat sebagai Simpanan dari Bank Lain, sebagai bagian dari kewajiban. Fluktuasi rekening tersebut bergantung pada frekuensi transaksi dana yang diberikan oleh pelanggan. Selama tahun 2010, simpanan ini meningkat sebesar 11% lebih tinggi dari saldo tahun 2009.

Deposits from Other Banks

To facilitate fund transfer/remittance/settlement between local and/or international banks, Bank BTN had placed some fund to other banks that was recorded as current account with other banks in assets section. On the other hand, other banks would place their funds in Bank BTN that would be recorded as Deposits from Other Banks as part of the liabilities. The fluctuation of these accounts relied on the funds frequency transaction provided by the customers. During 2010, the accounts increased by 11% than the balance in 2009.

Efek-efek yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali

Sumber pendanaan alternatif lain selain dari simpanan nasabah adalah efek yang dijual dengan janji dibeli kembali. Selama tahun 2010, Bank BTN telah menjual sebagian obligasi pemerintah dengan janji dibeli kembali dengan total nilai nominal sebesar Rp 4,3 triliun kepada PT Bank Mandiri Tbk, Deutsche Bank AG, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and Standard Chartered Bank.

Pada tahun 2010, kewajiban ini justru mengalami penurunan sebesar 3% lebih rendah dari saldo tahun 2009. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa efek telah jatuh tempo pada tahun 2010 dan Bank BTN telah membeli kembali efek tersebut sesuai dengan perjanjian.

Surat-surat Berharga yang Diterbitkan

Selama tahun 2010, Bank BTN telah menerbitkan Obligasi BTN XIV sebesar Rp 1,65 triliun dengan bunga 10,25% per tahun. Selain itu, Bank BTN juga telah melunasi Obligasi BTN XI sebesar Rp 750 miliar yang jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2010. Efek bersih antara penerbitan obligasi baru dan penyelesaian obligasi yang telah jatuh tempo telah meningkatkan kewajiban ini sebesar 28% lebih tinggi pada tahun 2010. Kontribusi dana dari surat berharga yang diterbitkan adalah sebesar 7% dari jumlah kewajiban tahun 2010.

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima terdiri dari dukungan dana dari Bank Indonesia dalam bentuk Fasilitas Kredit Likuiditas dengan tingkat bunga rata-rata 6,6% per tahun. Sampai dengan akhir tahun 2010, Bank BTN telah menerima Fasilitas Kredit Likuiditas sebesar Rp 1,7 triliun untuk mendukung KPR bersubsidi.

Sumber pendanaan lainnya yang merupakan bagian pinjaman yang diterima, Bank BTN juga telah menerima pinjaman beragunan aset dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan jumlah Rp 500 miliar.

Sebagai hasilnya, pinjaman dana meningkat 14% lebih tinggi pada tahun 2010. Selain itu, dana dari pinjaman yang diterima telah memberikan kontribusi dana sebesar 5% dari jumlah kewajiban pada tahun 2010.

Securities Sold Under Repurchase Agreement

Other alternative funding sources besides deposits were the securities sold under repurchase agreement. During 2010, Bank BTN has sold some Government bonds under repurchase agreement at the total amount of Rp 4.3 trillion to PT Bank Mandiri Tbk, Deutsche Bank AG, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited and Standard Chartered Bank.

As of 2010, this liability decreased by 3% than the outstanding balances in 2009. The decrease was caused by the maturity of some securities in 2010 and Bank BTN has repurchased the securities based on the agreement.

Securities Issued

During 2010, Bank BTN has issued new BTN Bonds XIV at the amount of Rp 1.65 trillion with the interest at 10.25% per annum. In addition, the Bank has also fully repaid BTN Bonds XI at the amount of Rp 750 billion which was matured on 6 July 2010. The net effect between the new issuance of bonds and the settlement of matured bonds has increased the liability by 28% in 2010. The fund contributed from securities issued was 7% of total liabilities in 2010.

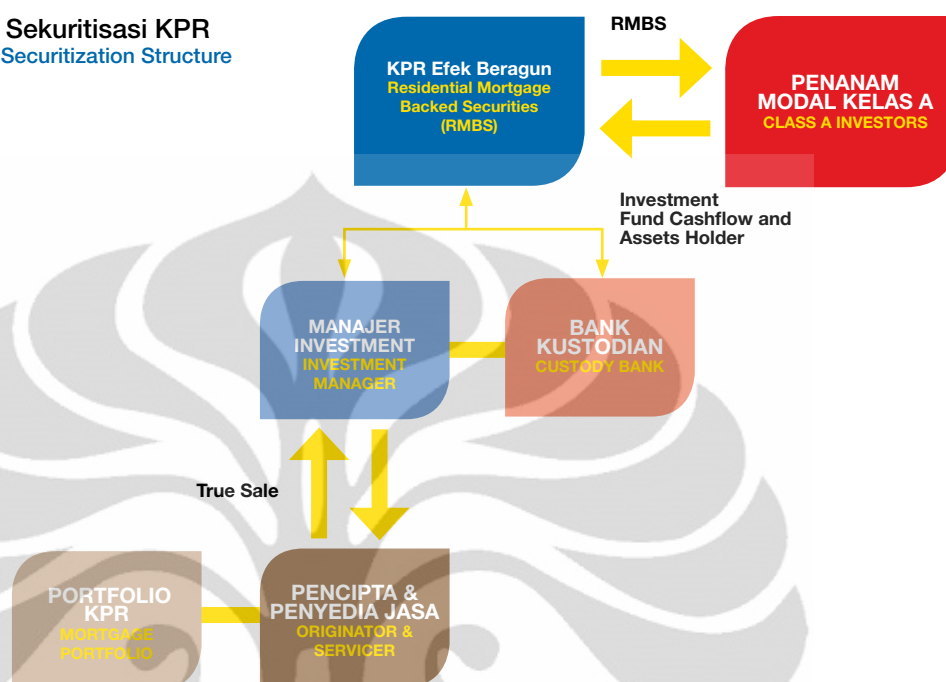
Fund Borrowings

Fund borrowings consist of funding support from Bank Indonesia which was provided as Liquidity Loan Facilities with the average interest rate of 6.6% per annum. Up to the end of 2010, Bank BTN has received Liquidity Credit Facilities at Rp 1.7 trillion to support the subsidized mortgage loan.

As other alternative source of funding that was part of the fund borrowings, Bank BTN also received asset backed loans from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) at the amount of Rp 500 billion.

As the results, the fund borrowing increased by 14% 2010. In addition, the fund borrowings contributed to the source of funding at 5% of total liabilities in 2010.

Struktur Sekuritisasi KPR Mortgage Securitization Structure



EKUITAS

Pada tahun 2010, total ekuitas meningkat secara signifikan sebesar 20% lebih tinggi yang terutama didorong oleh peningkatan signifikan dari laba bersih sebesar 86,75% atau sekitar Rp 425 miliar pada tahun 2010. Sebagai dampaknya, ekuitas tumbuh dari Rp 5,4 triliun menjadi Rp 6,4 triliun pada tahun 2010.

EQUITIES

As of 2010, total equities increased significantly by 20% which was mainly driven by the significant increase of net income by 86.75% or approximately Rp 425 billion in 2010. As the impact, the equities grew from Rp 5.4 trillion to Rp 6.4 trillion in 2010.

Ekuitas Equities

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Modal Saham	4.357.029	4.357.029	0	Share Capital
Tambahan Modal Disetor – Bersih	639.626	639.626	0	Additional Paid in Capital – Net
Opsi Saham	60.845	-	100	Stock Option
Keuntungan (kerugian) yang Belum Direalisasi Atas Efek-Efek dan Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual - Bersih	127.641	(54.239)	-335	Unrealized Gain(loss) On Available for Sale Securities and Government Bonds – Net
Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya	307.488	158.421	94	Appropriated Retained Earnings
Saldo Laba	954.649	292.288	227	Retained Earnings
Jumlah Ekuitas	6.447.278	5.393.125	20	Total Equities

STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE

Struktur Modal Capital Structures

	2010	2009	
	dalam persentase (%) in percentage (%)		
Struktur Modal Bank:			Capital Structures of Bank:
Kewajiban	91	91	Liabilities
Ekuitas	9	9	Equities
Aktiva	100	100	Assets

Pada tahun 2009 dan 2010, aktiva Bank BTN dibiayai oleh 91% dari kewajiban dan 9% dari ekuitas. Sejalan dengan natura bisnis Bank BTN yang mendukung pemerintah untuk mengadakan ketersediaan kebutuhan perumahan, Bank BTN telah berperan sebagai penyalur keuangan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah mendukung dana untuk kebutuhan perumahan yang dicatat sebagai kewajiban dan Bank BTN menyalurkan dana sebagai produk pembiayaan rumah bersubsidi yang merupakan aset Bank BTN. Dengan natura transaksi demikian, sesuai dengan strategi dan kebijakan bank untuk mengurangi perbedaan selisih periode antara aktiva dan sumber pendanaan, sebagian besar aset dibiayai dalam bentuk kewajiban yang dicatat oleh Bank BTN.

In 2009 and 2010, Bank BTN assets were financed by 91% of liabilities and 9% of equities. In line with the nature business of Bank BTN for supporting the Government to provide the availability of housing needs, Bank BTN has become the financial channeling between the Government and the public. The Government supported funding for housing needs that recorded as liabilities and the Bank distributed the fund as the subsidized home financing product that was managed as Bank BTN assets. By this nature of transaction and in accordance with Bank BTN strategy and policy to reduce the mismatch period between Bank assets and source of funds, most of the assets were financed in the form of liabilities as recorded by Bank BTN.

RASIO KEUANGAN PERBANKAN DALAM KAITANNYA DENGAN SOLVABILITAS DAN KOLEKTIBILITAS, LIKUIDITAS, DAN RENTABILITAS BANK BANKING FINANCIAL RATIOS IN RELATION WITH SOLVENCY, COLLECTABILITY, LIQUIDITY, AND PROFITABILITY OF BANK

Rasio Keuangan Financial Ratios

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam persentase (%) in percentage (%)			
Rasio Kecukupan Modal	16.74	21.54	-22	Capital Adequacy Ratio
Rasio Kredit dan Pembiayaan/ Piutang Syariah Bermasalah	2.66	2.75	-3	Non Performing Loan/Sharia Financing Ratio
Rasio Kredit dan Pembiayaan/ Piutang Syariah terhadap Simpanan	108.42	101.29	7	Loan/Sharia Financing to Deposits Ratio
Margin Pendapatan Bunga Bersih	5.93	4.6	29	Net Interest Margin
Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional	83.28	88.29	-6	Operational Expenses to Operating Income Ratio
Imbal Hasil Rata-Rata Aktiva	2.05	1.47	39	Return on Assets
Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas	16.67	14.53	15	Return on Equity

SOLVABILITAS DAN KOLEKTABILITAS

Rasio Kecukupan Modal

Rasio ini menurun 22% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan atas aktiva produktif, khususnya peningkatan fasilitas kredit perumahan (KPR) sebesar 27% pada tahun 2010. Di samping itu, berdasarkan Surat Edaran No.11/3/DPNP tertanggal 27 Januari 2009, perhitungan risiko operasional untuk biaya modal ditentukan 10% dari rata-rata pendapatan bruto tahunan selama 3 tahun terakhir yang diimplementasikan secara efektif per tanggal 1 Juli 2010 yang berpengaruh terhadap kalkulasi rasio pada tahun 2010.

Sesuai dengan peraturan BI, Rasio Kecukupan Modal minimum yang ditetapkan BI adalah sebesar 8%. Dengan rasio kecukupan Bank BTN berada pada tingkat 16,74%, sekalipun rasio tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya, struktur permodalan Bank BTN tersebut tetap memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar dan risiko kredit dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI dan struktur modal Bank BTN sudah memenuhi Peraturan BI.

Rasio Kredit Bermasalah dan manajemen kolektabilitas

Rasio ini menurun dari 2,75% pada tahun 2009 menjadi 2,66% pada tahun 2010. Hal ini berarti bahwa Bank BTN telah mengurangi kredit bermasalah dimana menurunkan tingkat risiko kredit dan kerugian yang mungkin terjadi akibat dari penurunan nilai kredit.

Untuk menutup kemungkinan kerugian yang terjadi karena tidak tertagihnya kredit dan aktiva produktif, Bank BTN selalu mengadakan analisa umur aktiva dan perhitungan penyisihan atas kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya kredit. Penambahan penyisihan ini diakui sebagai bagian dari biaya operasional selama periode berjalan. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan yang dibentuk pada tahun 2010 telah cukup mampu untuk menutupi kerugian yang mungkin terjadi karena tidak tertagihnya kredit.

SOLVENCY AND COLLECTABILITY

Capital Adequacy Ratio

The ratio decreased by 22% than prior year. The decrease was caused by the significant increase of productive assets, especially for housing loans facilities at 27% in 2010. In addition, based on Circular Letter No. 11/3/DPNP dated 27 January 2009, the calculation of Operational Risk capital charge is set at 10% of average positive annual gross income during the last 3 years which was implemented effectively on 1 July 2010, that affected the ratio calculation in 2010.

In accordance with the BI regulation, the minimum Capital Adequacy Ratio requirement for the Bank is set at 8%. With CAR of 16.74% in 2010, even though the ratio was lower than prior year, Bank BTN capital was still capable to cover the market risk and credit risk whereas the ratio was still higher than the minimum requirement. Therefore, Bank BTN has complied with the BI regulation.

Non Performing Loan Ratio and its collectability management

This ratio decreased from 2.75% in 2009 to 2.66% in 2010. This meant that Bank BTN has decrease its non-performing loan which would reduce the credit risk and the possibility of losses occurred from the impairment of loans.

To cover the possibility losses occurred due to the uncollectible of loans and productive assets, Bank BTN always provided the aging analysis and calculated provision of possibility for losses of uncollectible accounts. The addition of the provision was recognized as part of operation expenses during the current period. The management ensured that the provision provided in 2010 has sufficiently cover the losses occurred due to the uncollectible loans.

LIKUIDITAS

Rasio Kredit terhadap Simpanan

Rasio ini meningkat 7% lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh peningkatan signifikan dari kredit pada tahun 2010, khususnya dari peningkatan portofolio kredit perumahan. Portofolio kredit meningkat 27% lebih tinggi, sementara simpanan meningkat 18% lebih tinggi pada tahun 2010. Hal tersebut berarti bahwa Bank BTN memiliki likuiditas yang baik dimana semua pendanaan dari pihak ketiga ditempatkan pada aset produktif. Di samping itu, rasio ini berada di atas rata-rata minimal LDR yang ditetapkan pemerintah sebesar 69,55%. Dengan demikian, Bank BTN telah mematuhi standar likuiditas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

RENTABILITAS

Margin Pendapatan Bunga Bersih

Margin pendapatan bunga bersih meningkat dari 4,6% pada tahun 2009 menjadi 5,93% pada tahun 2010. Peningkatan ini disebabkan oleh penerapan strategi Bank BTN dalam diversifikasi portofolio kredit untuk mencapai margin bunga yang lebih tinggi.

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional

Rasio ini menurun 6% lebih rendah dari perhitungan beban operasional terhadap pendapatan operasional pada tahun 2009. Penurunan ini menunjukkan bahwa pendapatan operasional Bank BTN mengalami peningkatan pada tahun 2010 dimana manajemen telah berhasil mengelola tingkat suku bunga yang tepat terhadap nasabah dan mengurangi biaya operasional yang terlihat dari keberhasilan Bank meraih margin yang lebih tinggi pada tahun 2010.

Imbal Hasil Rata-rata Aktiva

Rasio ini meningkat dari 1,47% pada tahun 2009 menjadi 2,05% pada tahun 2010. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan signifikan dari laba bersih Bank BTN sebesar 86,75% di tahun 2010, yang lebih tinggi dari perolehan tahun 2009.

LIQUIDITY

Loan to Deposit Ratio

The ratio increased by 7% than previous year which was caused by the significant increase of loans in 2010, particularly the increase of housing loans portfolio. The Loans increased by 27% and the deposits increased by 18% in 2010. It meant that Bank BTN has good liquidity that all of the third parties deposits was managed in the productive assets. In addition, the ratio was above the average LDR set by the Government at 69.55%. Therefore, Bank BTN has complied with BI Regulation to maintain its liquidity.

PROFITABILITY

Net Interest Margin

Net interest margin increased from 4.6% in 2009 to 5.93% in 2010. The increase was caused by the implementation of Bank BTN strategy to diversify its loans portfolio to achieve higher interest margin.

Operational Expenses to Operating Income Ratio

The ratio decreased by 6% than the operational expenses to operating income ratio calculated in 2009. The decrease had shown that the operational income of Bank BTN has increased in 2010 whereas the management had successfully managed the right interest rate for customers and reduced operational cost, thus, the Bank was capable to achieve higher margin during 2010.

Return on Assets

The ratio increased from 1.47% in 2009 to 2.05% in 2010. The increase was caused by the increase of Bank BTN net income by 86.75% in 2010 which was higher than the achievement in 2009.

Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas

Rasio ini meningkat dari 14,53% pada tahun 2009 menjadi 16,67% pada tahun 2010 yang seiring dengan peningkatan imbal hasil rata-rata aktiva. Peningkatan ini disebabkan terutama oleh peningkatan signifikan dari laba bersih Bank BTN sebesar 86,75% di tahun 2010, yang lebih tinggi dari perolehan tahun 2009.

Return on Equity

The ratio increased from 14.53% in 2009 to 16.67% in 2010 which was in line with the return on assets ratio. The increase was caused by that the increase of Bank BTN net income by 86.75% in 2010 which was higher than the achievement in 2009.

BELANJA BARANG MODAL DAN KOMITMEN MATERIAL YANG TERKAIT DENGAN BELANJA MODAL CAPITAL EXPENDITURES AND MATERIAL COMMITMENTS RELATED TO CAPITAL EXPENDITURES

Selama tahun 2010, Bank BTN telah mendirikan 111 kantor kas baru untuk tujuan ekspansi jaringan pelayanan Bank BTN di Indonesia. Sebagai hasilnya, selama tahun 2010, Bank BTN telah melakukan rincian belanja modal sebagai berikut:

During 2010, Bank BTN has established 111 new cash offices to expand its services network in Indonesia. As the result, during 2010, Bank BTN had provided capital expenditures as the following:

Belanja Modal Capital Expenditures

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Tanah	19.175	300	6.292	Land
Bangunan	227.958	37.356	510	Buildings
Peralatan Kantor dan Kendaraan Bermotor	275.841	106.783	158	Offices Furnitures, Fixtures and Motor Vehicles
Aset dalam Penyelesaian	29.292	232.898	-87	Construction in Progress
Jumlah Belanja Modal	552.266	377.337	46	Total Capital Expenditures
Arus Kas Pembayaran untuk Belanja Modal	335.552	347.641	-3	Cash Paid for Capital

Bank BTN berkomitmen dalam penyediaan dan pelaksanaan investasi untuk ATM dan pembentukan Kantor Cabang baru guna memperluas cakupan lokasi layanan Bank BTN di masa mendatang. Bank BTN telah menetapkan target untuk membangun 200 kantor kas baru dan 500 mesin ATM sebagai implementasi dari rencana ekspansi Bank BTN.

Bank BTN committed to provide and implement the investment of ATM and new Branch Offices establishment to expand the scope of service location in the future. Bank BTN has set target to build 200 new cash offices and 500 ATM machines as the implementation of the expansion plan.

Sumber pendanaan atas belanja modal berasal dari penjualan efek-efek dan arus kas masuk atas sekuritisasi aset. Seluruh transaksi tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga Bank tidak memiliki risiko mata uang asing dalam transaksi belanja modal.

The source of funds for capital expenditures were from the sale of securities and cash inflow from assets securitization. All transaction were performed in Indonesian Rupiah currency that there were no foreign currency risk occurred in the capital expenditures transaction.

ARUS KAS CASH FLOW

Selama tahun 2010, Bank BTN telah menggunakan arus kas bersih yang diperoleh dari kegiatan investasi sebesar Rp 2,9 triliun yang terutama dari penjualan efek dan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 1 triliun terutama dari penerbitan obligasi BTN baru dan penerimaan pinjaman untuk mendukung peningkatan kredit setelah dihitung dari alokasi dana simpanan dari pihak ketiga dalam kegiatan operasional Bank BTN sebesar Rp 2,8 triliun. Manajemen lebih fokus pada peningkatan kredit untuk memberikan margin bunga yang lebih tinggi yang merupakan salah satu strategi Bank. Selain itu, sebagai dampak dari tindakan manajemen tersebut melalui aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan, Bank memiliki kelebihan dana kas sebesar Rp 1,2 triliun yang lebih rendah 43% dari jumlah yang dicapai pada tahun 2009. Kelebihan dana kas sebagian besar dialokasikan sebagai tambahan giro pada Bank Indonesia untuk memenuhi peraturan baru dari Bank Indonesia No.12/19/PBI/2010 tentang tentang "Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia untuk Bank Umum dalam Rupiah dan Mata Uang Asing".

During 2010, Bank BTN had used the net cash flow received from investing activities amounted to Rp 2.9 trillion especially from the sale of securities and net cash flow received from financing activities amounted to Rp 1 trillion mainly from issuance new BTN bonds and borrowing received to support the increase of loans after calculating the fund allocation from third parties deposits in the operating activities at the amount of Rp 2.8 trillion. The management was more focused in the improvement of loans to provide higher interest margin which was part of Bank BTN's strategy. Furthermore, due to the management action through Bank BTN operational, investing and financing activities, the Bank has an excess of cash fund at the amount of Rp 1.2 trillion which were 43% lower 43% from the amount achieved in 2009. The excess of cash fund were mostly allocated to current account with Bank Indonesia account to comply with the new regulation from Bank Indonesia No 12/ 19/PBI/ 2010 regarding "Statutory Reserves at Bank Indonesia for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currencies".

Arus Kas Cash Flow

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	(2.832.958)	1.458.866	-294	Net Cash Flow from Operational Activities
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	2.982.362	(3.018.809)	-199	Net Cash Flow from Investing Activities
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	1.091.678	3.729.876	-71	Net Cash Flow from Financing Activities
Arus Kas Bersih	1.241.082	2.169.933	-43	Net Cash Flow

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

COMMITMENT AND CONTINGENCIES

Komitmen dan Kontinjensi

Commitment and Contingencies

	2010	2009	Perubahan Changes (%)	
	dalam Rp jutaan in Rp million			
Komitmen				Commitment
Kewajiban Komitmen Terdiri Dari:				Commitment Liabilities Consist Of:
Fasilitas Kredit Yang Belum Digunakan	4,511.576	3.112.793	45	Unused Loan Facilities Commitment
Lain-lain	84	73	15	Others
Komitmen Bersih	4.511.660	3.112.866	45	Commitment (Net)
Kontinjensi				Contingencies
Tagihan Kontinjensi Terdiri Dari:				Contingencies Receivables Consist of:
Pendapatan Bunga dalam Penyelesaian	390.774	304.446	28	Interest Income on Non Performing Asset
Garansi yang Diterima	30.052	70.621	-57	Guaranteed Received
Lain-lain	215.601	157.317	37	Others
Jumlah tagihan kontinjensi	636,427	532,384	20	Total Contingencies receivables
Kewajiban kontinjensi terdiri dari:				Contingencies liabilities consist of:
Garansi yang diterbitkan	44,057	57,611	-24	Guarantees issued
Tagihan Kontinjensi (bersih)	592,370	474,773	25	Contingent Receivables (net)

Komitmen dan kontinjensi merupakan rekening administratif yang timbul dari transaksi kredit. Komitmen mengacu pada komitmen penyediaan pembiayaan dari instrumen keuangan yang mengakibatkan pengakuan aktiva dan/atau kewajiban selama periode tertentu. Kontinjensi merupakan probabilitas aset dan/atau kewajiban yang dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa kejadian sehubungan dengan kredit dan transaksi akseptasi di Bank BTN. Komitmen dan kontinjensi meningkat sebesar 25% lebih tinggi yang disebabkan oleh pertumbuhan kredit sebesar 27% selama 2010.

Commitment and contingencies are the administrative accounts from the loans transaction. Commitment referred to the committed financial instruments that would cause the recognition of assets and/or liabilities to be provided for certain period. Contingencies referred to the probability of assets and/or liabilities occurred as the impact of several events relating to loans and acceptance transactions. The commitment and contingencies increased by 25% which were caused by the increase of loans transaction by 27% during 2010.



DERIVATIF DAN FASILITAS LINDUNG NILAI DERIVATIVES AND HEDGING FACILITIES

Bank BTN menghadapi risiko pasar atas perubahan tingkat suku bunga dan menggunakan instrumen derivatif sehubungan dengan aktivitas manajemen risiko. Bank BTN tidak menggunakan atau menerbitkan instrumen derivatif untuk tujuan diperdagangkan.

Pada bulan September 2006 dan 2005, Bank BTN menandatangani perjanjian *swap* suku bunga dengan Standard Chartered Bank dan ABN AMRO Bank N.V. untuk melindungi risiko suku bunga yang berhubungan dengan obligasi tingkat bunga tetap yang diterbitkan oleh Bank BTN (obligasi BTN IX tahun 2003, obligasi BTN XI tahun 2005 dan obligasi BTN XII tahun 2006). Perjanjian ini memiliki jumlah nilai nosional sebesar Rp 625 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 12% yang dibayar oleh *counter parties*. Perjanjian ini telah jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2010 yang sesuai dengan jatuh tempo obligasi Bank BTN.

Bank BTN is exposed to market risks for the changes of interest rates, and uses derivative instruments in relation with its risk management activities. Bank BTN does not use or issue derivative financial instruments for trading purposes.

In September 2006 and 2005, Bank BTN entered into interest rate swap agreements with Standard Chartered Bank and ABN Amro Bank N.V. to hedge against interest rate risks relating to fixed rate bonds issued by Bank BTN (BTN IX bonds in 2003, BTN XI bonds in 2005 and BTN XII bonds in 2006). The total notional amount of the agreement were amounting to Rp 625 billion with fixed interest rate at 12%, paid by the counter parties. These agreements have matured on 6 July 2010 which were in line with the matured of those bonds.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

MATERIAL INFORMATION AND FACTS SUBSEQUENT TO THE ACCOUNTANT'S REPORT DATE

Tidak ada informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

There were no material information and facts occurred subsequently to the accountant's report date.

INFORMASI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI

MATERIAL INFORMATION CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND AFFILIATED TRANSACTION

Selama tahun 2009 dan 2010, tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Bank BTN, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 "Benturan Kepentingan".

During 2009 and 2010, there were no transactions with related parties that directly or indirectly related with main business of Bank BTN and identified as conflict of interest based on BAPEPAM-LK Regulation No. IX.E.1 "Conflict of Interest".

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi antara Bank dengan pihak afiliasi:

The following are the transaction occurred between the Bank and its related parties:

Selama tahun 2010, Bank BTN telah mengadakan transaksi fasilitas pinjaman kepada karyawan tetap, pihak yang memiliki hubungan istimewa, sebesar Rp 21 miliar. Selain itu, Bank juga telah menerima simpanan dari pihak istimewa sebesar Rp 97 miliar pada 2010.

During 2010, Bank BTN has provided loans facilities transaction for its permanent employees, the related parties at the amount of Rp 21 billion. In addition, Bank BTN has also received deposits from related parties at the amount of Rp 97 billion as of 2010.

Untuk transaksi fasilitas pinjaman kepada karyawan, Bank BTN telah membebankan tingkat suku bunga berdasarkan biaya bunga yang berlaku di pasar, ditambah dengan margin bunga yang sesuai. Selama tahun 2010, tingkat suku bunga rata-rata pinjaman portofolio kepada karyawan adalah sebesar 7,30%. Untuk transaksi deposito berjangka, Bank BTN telah membayarkan beban bunga dengan mengikuti tingkat suku bunga deposito yang berlaku di pasar.

For loans facilities transaction to the employees, Bank BTN has charged interest rate based on the market cost of interest, added with proper interest margin. During 2010, the average interest rate of loans portfolio to employees were 7.30%. For deposits transaction, Bank BTN has paid interest expenses based on the market interest rate accepted in the market.

Mengingat bahwa manajemen telah mengkalkulasi tingkat suku bunga berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar, Bank BTN telah melakukan transaksi dengan pihak istimewa secara wajar.

Based on the condition that the management has calculated the interest rate following the market rate, Bank BTN has conducted the related parties transaction in a fair manner.

INFORMASI MATERIAL LAINNYA OTHER MATERIAL INFORMATION

Informasi material lainnya yang terjadi selama 2010 adalah sebagai berikut:

- ▶ Bank BTN telah menerbitkan Obligasi BTN XIV dan menerima dana sebesar Rp 1,65 triliun yang dicatat sebagai bagian dari kewajiban Bank.
- ▶ Bank BTN telah melunasi Obligasi BTN XI sebesar Rp 750 miliar yang jatuh tempo pada tahun 2010.
- ▶ Bank BTN telah menjual obligasi pemerintah sesuai dengan perjanjian dibeli kembali sebagai alternatif sumber pendanaan dengan total nilai nominal sebesar Rp 4,3 triliun.
- ▶ Bank BTN telah menarik Fasilitas Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia sebesar Rp 1,7 triliun untuk membiayai produk Kredit KPR Bersubsidi.
- ▶ Bank BTN menerima sumber pendanaan alternatif dari sekuritisasi aset sebesar Rp 750 miliar pada tahun 2010.

Dengan rincian di atas, selama tahun 2010, aktivitas pendanaan yang signifikan telah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sumber pendanaan yang tepat dalam membiayai aktivitas operasional dan belanja modal. Bank BTN menyediakan produk pembiayaan KPR kepada masyarakat dan pengusaha kecil dan menengah sebagai aktivitas operasionalnya. Di samping itu, Bank BTN telah menambah banyak atas kantor cabang baru dan ATM untuk tujuan ekspansi jaringan pelayanan yang merupakan bagian dari aktivitas belanja modal Bank.

Other material information occurred during 2010 were the following:

- ▶ Bank BTN has issued Bonds BTN XIV and received funding at the amount of Rp 1.65 trillion which was recorded as part of the Bank liabilities.
- ▶ Bank BTN has fully paid Bonds BTN XI at the amount of Rp 750 billion that has matured in 2010.
- ▶ Bank BTN has sold its Government bonds under repurchase agreement as the alternative of funding resources at the total amount of Rp 4.3 trillion.
- ▶ Bank BTN has withdrawn Rp 1.7 trillion of Liquidity Credit Facility from Bank Indonesia to finance the Subsidized Mortgage product.
- ▶ Bank BTN has received asset securitization at the amount of Rp 750 billion as part of other alternative funding resources in 2010.

With the detail above, during 2010, many significant financing activities performed for the purpose of proper financing resources of operational activities and capital expenditures. Bank BTN provided home financing products for consumer and small medium enterprise as its operational activities. In addition, Bank BTN has added more branches and ATM for expansion of its services network which was part of Bank capital expenditure commitment.

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN INFORMASI KEUANGAN KEJADIAN LUAR BIASA ACCOUNTING POLICY AND FINANCIAL INFORMATION OF EXTRAORDINARY EVENTS

Selama tahun 2009, Bank telah menderita kerugian dari peristiwa luar biasa atas kebakaran yang merusak menara BTN sebesar Rp 15 miliar. Nilai ini dihitung dari nilai tercatat aset yang mengalami kerusakan dikurangi dengan nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi.

Bank BTN telah jelas menjelaskan kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan, di dalam catatan laporan keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 yang termasuk dalam laporan ini.

Bank BTN telah menerapkan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Perbankan Indonesia (PAPI), yang diperbarui pada tahun 2008 dan Pernyataan

During 2009, Bank has suffered loss from extraordinary event for the fire damaged of BTN Building at the amount of Rp 15 billion. This value was calculated from the carrying value of assets damaged less the reimbursement value received from insurance company.

Bank BTN has clearly explained the significant accounting policy applied in the notes of financial statements as of 31 December 2010 and 2009 that were included in this report.

Bank BTN has applied Accounting and Reporting Guidelines for the Indonesian Banking Industry (PAPI), updated in 2008 and Statement of Financial

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 31 yang mengatur tentang Akuntansi Perbankan dalam penerbitan laporan keuangan tahunan. Selama tahun 2010, Bank BTN juga telah menerapkan revisi PSAK 50 dan PSAK 55 yang menjelaskan tentang instrumen keuangan yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010.

Accounting Standard (SFAS) no. 31 that stated about Accounting for the Banking Industry in publishing the annual financial statements. During 2010, Bank BTN has also implemented the revision of SFAS 50 and SFAS 55 that explained about financial instruments which were accepted effectively on 1 January 2010.

DAMPAK PERUBAHAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA BANK

IMPACT OF INTEREST RATE CHANGES TO THE BANK'S PERFORMANCE

Kondisi pasar keuangan yang stabil pada tahun 2010 telah menyebabkan penurunan yang cukup terhadap suku bunga selama tahun 2010 yang secara langsung dipengaruhi dari penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) yang berpengaruh terhadap penurunan tingkat suku bunga deposito rata-rata selama tahun 2010. Selain itu, untuk menstimulasi nasabah untuk melakukan transaksi pembiayaan dengan Bank BTN, pada April 2010, manajemen telah mengumumkan untuk menurunkan suku bunga kredit antara 0,5%-1% agar dapat memiliki suku bunga yang lebih kompetitif dan lebih menarik banyak nasabah. Sebagai dampak dari tindakan manajemen dan kondisi pasar, tingkat bunga rata-rata kredit dan deposito mengalami penurunan sebesar 0,5% lebih rendah dari suku bunga rata-rata terjadi pada tahun 2009.

The stable financial market condition in 2010 had triggered the decrease of interest rate during 2010 that was directly influenced by the decrease of Bank Indonesia (BI) rate that affected to the decrease of average interest rate of deposits during 2010. In addition, to stimulate the customer to provide the financing transaction with Bank BTN, as of April 2010, the management has announced to reduce its credit interest rate between 0.5 – 1% to have more competitive interest rate and attract more customers. As the impact of management action and market condition, the average interest rate of loan and deposits decreased by 0.5% lower than the average interest rate occurred in 2009.

Akan tetapi, strategi pemasaran telah menarik aktivitas nasabah secara signifikan dimana portofolio kredit meningkat sebesar 27% lebih tinggi. Selain itu, dengan peningkatan kredit, volume transaksi pendapatan bunga meningkat dari pendapatan kotor yang meningkat sebesar 13% lebih tinggi pada tahun 2010. Oleh karena rata-rata tingkat suku bunga simpanan juga telah menurun, beban pokok pendapatan bunga menurun sebesar 8% lebih rendah pada tahun 2010. Secara keseluruhan kinerja, Bank BTN telah berhasil mencapai pertumbuhan laba bersih sebesar 86,75%.

However, the marketing strategy has attracted the customer activities significantly that the loans portfolio increased at 27% higher. In addition, by the increase of loans, the volume of interest income transaction increased that the gross revenues grew by 13% higher in 2010. Consider that average interest rate of deposits has also decreased the cost of interest revenues decreased by 8% lower in 2010. In overall performance, Bank BTN successfully achieved the growth of net profit at 86.75%.

Dengan fakta ini, dampak perubahan suku bunga telah menyebabkan pertumbuhan signifikan terhadap kinerja Bank BTN. Tingkat suku bunga kredit yang lebih rendah telah mendorong peningkatan volume transaksi kredit yang menumbuhkan pendapatan dan suku bunga atas beban pokok pendapatan yang lebih rendah telah mengurangi biaya operasional sehingga Bank BTN mampu untuk mencapai margin pendapatan bunga bersih dari 4,60% pada 2009 menjadi 5,93% pada tahun 2010.

By this fact, the impact of interest rate changes has caused the significant growth of Bank BTN performance. The lower interest rate of loan has stimulated to increase the volume transaction of loans that grew the revenues and the lower cost of interest rate has reduced the operational cost that Bank BTN was capable to achieve the higher net interest margin, from 4.60% in 2009 to 5.93% in 2010.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BANK

CHANGES IN REGULATION AND THE IMPACT TO THE BANK'S PERFORMANCE

A. Sesuai dengan Surat Edaran No 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009, Bank BTN harus menyediakan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional berdasarkan formula berikut ini yang dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 30 Juni 2010, perhitungan biaya modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari pendapatan rata-rata bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir.
2. Sejak 1 Juli 2010 sampai dengan 31 Desember 2010, perhitungan biaya modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan rata-rata bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir.
3. Sejak 1 Januari 2011, perhitungan biaya modal Risiko Operasional ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari pendapatan rata-rata bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Bank BTN telah menghitung biaya modal risiko operasional sebesar 10% dari pendapatan rata-rata bruto positif tahunan selama tiga tahun terakhir. Sebagai hasilnya, dampak dari perubahan peraturan ini adalah peningkatan nilai aktiva tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dan risiko operasional yang berpengaruh terhadap penurunan rasio kecukupan modal (CAR) pada 2010. Jadi, selain dari peningkatan aktiva produktif, penurunan CAR dari 21,54% pada 2009 menjadi 16,74% pada tahun 2010 juga disebabkan dari peningkatan biaya modal risiko operasional karena perubahan peraturan pada tahun 2010.

B. Sesuai dengan peraturan BI mengenai PDN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BI No 6/20/PBI/2004 pada tanggal 15 Juli 2004 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BI Nomor 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010, Posisi Devisa Neto (PDN) maksimum bank harus sebesar 20% dari modal. Oleh karena perubahan rasio PDN melalui modal, Bank BTN harus lebih mengelola aktiva dan kewajiban guna mematuhi peraturan baru. Selama tahun 2010, Bank telah mengelola dengan baik PDN yang sesuai dengan peraturan tersebut.

A. In accordance with Circular Letter No. 11/3/DPNP dated 27 January 2009, Bank BTN should provide the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk based on the following formula which is applied gradually, namely:

1. Commencing 1 January 2010 until 30 June 2010, the calculation of Operational Risk capital charge is set at 5% (five percent) of the average positive annual gross income during the last three years.
2. Commencing 1 July 2010 until 31 December 2010, the calculation of Operational Risk capital charge is set at 10% (ten percent) of average positive annual gross income during the last three years.
3. From 1 January 2011, the calculation of Operational Risk capital charge is set at 15% (fifteen percent) of the average positive annual gross income during the last three years.

As of 31 December 2010, Bank BTN has implemented the calculation of the operational risk capital charge at 10% of average positive annual gross income during the last three years. As the result, the impact of the changes of this regulation was the increase of value for risk weighted assets for credit risk and operational risk that affected to the decrease of Capital Adequacy Ratio (CAR) as of 2010. Therefore apart from the increase productive assets, the decrease of CAR from 21.54% in 2009 to 16.74% in 2010 was also caused from the increase of operational risk capital charge due to the changes of regulation in 2010.

B. In accordance with BI regulation concerning Net Open Position (NOP) as amended by BI Regulation No. 6/ 20/PBI/2004 on 15 July 2004 and as further amended by BI Regulation No. 12/10/PBI/2010 dated July 1, 2010, the maximum Net Open Position (NOP) of banks should be at 20% of its capital. Consider of the changes NOP ratio through the capital, Bank BTN should maintain its assets and liabilities merely to comply with the new regulation. During 2010, the Bank had well maintained its NOP that comply with the regulation.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Posisi Devisa Neto Bank BTN adalah sebesar 2,18% yang meningkat dari 1,15% pada tahun 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh pertumbuhan aset dan kewajiban selama tahun 2010. Meskipun Posisi Devisa Neto Bank BTN di tahun 2010 lebih tinggi dari tahun 2009 namun Bank BTN telah memenuhi peraturan baru BI dimana rasio PDN masih lebih rendah dari PDN maksimum yang ditetapkan oleh BI sebesar 20%. Selanjutnya, perubahan peraturan ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Bank BTN.

- C. Pada tanggal 4 Oktober 2010, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan No 12/19/PBI/2010, untuk mengubah peraturan sebelumnya sehubungan dengan Giro Wajib Minimum (GWM). Peraturan ini menyatakan bahwa GWM untuk rekening Rupiah menjadi 10,5% yang terdiri dari 8% GWM utama dan GWM sekunder 2,5% dari total dana pihak ketiga Rupiah, sedangkan GWM untuk rekening mata uang asing menjadi 1% dari total dana pihak ketiga mata uang asing. Untuk GWM utama, Bank BTN harus menjaga cadangan minimum di Giro pada Bank Indonesia, sedangkan untuk GWM sekunder, Bank harus memelihara cadangan minimum di efek yaitu Sertifikat Bank Indonesia dan Obligasi Pemerintah.

Selama tahun 2010, Bank BTN telah menyediakan dana tambahan penempatan kas dalam rekening giro pada Bank Indonesia yang meningkat sebesar 45% lebih tinggi dari tahun 2009. Peningkatan giro pada Bank BTN Indonesia merupakan dampak dari perubahan peraturan Giro Wajib Minimum yang ditetapkan oleh BI, dengan maksud untuk menjaga kepatuhan Bank terhadap peraturan BI dan juga untuk mempertahankan likuiditas Bank BTN.

As of 31 December 2010, the Net Open Position of Bank BTN was at 2.18% which increased from 1.15% in 2009. The increase was caused by the growth of its assets and liabilities during 2010. Even though the Net Open Position of Bank BTN was higher in 2010 than in 2009, Bank BTN has complied with the new regulation of BI because the ratio was still lower than the maximum NOP set by BI at 20%. Furtherly, the changes of the regulation did not impact significantly to the compliance of Bank BTN.

- C. On 4 October 2010, Bank Indonesia (BI) issued Regulation No. 12/19/PBI/2010, to amend the previous regulations in regards with the Minimum Reserve Requirement (GWM). This regulation states that the GWM for Rupiah account becomes 10.5% that consists of 8% primary GWM and 2.5% secondary GWM from the total Rupiah third party deposits, while the GWM for foreign currency account becomes 1% from the total foreign currency third party deposits. For primary GWM, the Bank should maintain the minimum reserve in Current Account with Bank Indonesia, while for secondary GWM, Bank BTN should maintain minimum reserve in securities i.e. Certificates of Bank Indonesia and Government Bonds.

During 2010, Bank BTN has provided the additional cash fund placement in the current account with Bank Indonesia that increased by 45% than in 2009. The increase of current account with Bank Indonesia was the impact of the changes regulation of Minimum Reserve Requirement set by BI, with the purpose to keep Bank BTN comply with BI regulation and also to maintain Bank BTN liquidity.

PERKEMBANGAN TERAKHIR STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

LAST UPDATE OF STATEMENT FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SFAS) AND ITS IMPACT TO THE FINANCIAL STATEMENT

Revisi PSAK 50 dan 55

Ikatan Akuntan Indonesia telah menyediakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 50 dan 55 yang mengatur tentang instrumen keuangan yang telah berlaku secara efektif untuk pelaksanaan per 1 Januari 2010. Sesuai dengan standar tersebut, manajemen harus memberikan penilaian tentang metode pengukuran, penyajian dan pengungkapan tentang aset dan kewajiban keuangan yang berasal dari instrumen keuangan. Oleh karena itu, manajemen harus mempertimbangkan metode pengukuran yang tepat atas aset dan kewajiban keuangan yang akan mempengaruhi nilai Bank pada satu periode pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Bank BTN telah mengadakan penilaian aset dan kewajibannya guna mematuhi standar pelaporan yang telah direvisi tersebut. Bank BTN menerapkan metode diskonto melalui metode suku bunga efektif dan metode biaya yang diamortisasi untuk menganalisis apakah pengukuran aset dan kewajiban serta penyajian dan pengungkapan telah menampilkan penilaian yang wajar.

Berdasarkan analisa penilaian, aset dan kewajiban pada tanggal 31 Desember 2010 telah dilaporkan berdasarkan metode yang diterapkan dalam PSAK 50 dan 55 (revisi 2006). Berikut adalah metode penelitian yang diterapkan pada aset dan kewajiban keuangan Bank BTN:

Pinjaman yang diberikan

Portofolio kredit terdiri dari kredit dengan tingkat bunga mengambang dan kredit dengan tingkat bunga tetap. Bank BTN telah mencatat portofolio dengan metode biaya perolehan yang diamortisasi. Bank BTN telah melakukan analisa penilaian dengan membandingkan nilai tercatat dengan estimasi nilai wajar kredit dengan menggunakan metode arus kas diskonto atas aliran kas yang diharapkan yang akan diterima oleh Bank BTN di masa mendatang yang dihitung pada tingkat suku bunga pasar saat ini. Sebagai hasil penilaian, nilai tercatat telah mewakili estimasi nilai wajar sehingga tidak ada penyesuaian yang signifikan untuk penilaian kredit.

The revision of SFAS 50 and 55

Indonesian Institute of Accountant has provided Statement Financial Accounting Standard no. 50 and 55 that stated about financial instrument which were accepted effectively for implementation as of 1 January 2010. In accordance with these standards, the management should provide assessment about the measurement method, presentation and disclosure about financial assets and liabilities supported by the financial instruments. Therefore, the management should consider for proper measurement method of financial assets and liabilities that would affect the Bank's values on one reporting period.

As of 31 December 2010, Bank BTN has provided the valuation assessment of its assets and liabilities to comply with the revision standard. Bank BTN applied discounted cash flow by using effective interest rate method and amortized cost valuation method to analyze whether the measurement and presentation as well as the disclosure of assets and liabilities has been represented in a fair manner.

Based on the valuation assessment, the assets and liabilities as of 31 December 2010 has been reported based on the method applied in SFAS 50 and 55 (revision 2006). The following were the valuation method applied in the financial assets and liabilities of Bank BTN:

Loans

The loans portfolio consists of loans with floating interest rate and loans with fixed interest rate. Bank BTN has recorded the portfolio with the amortised cost method. Bank BTN has provided valuation assessment by comparing the carrying value with the estimated fair value of loans using discounted cash flow method for the expected future cash flow that would be received by Bank BTN at current market rate. As the result, the carrying amount has represented the estimated fair value so there were no significant adjustments for the loans valuation.

Kas dan Setara Kas

Bank BTN menggunakan metode arus kas diskonto yang menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk hutang dengan risiko kredit yang sama dan akan jatuh tempo untuk penempatan pada bank lain dan tingkat bunga mengambang untuk rekening giro pada Bank Indonesia. Karena jatuh tempo kas dan setara kas berada di bawah dari satu tahun, nilai tercatat kas dan setara kas adalah sama dengan estimasi nilai wajar.

Efek-efek

Bank BTN menggunakan harga pasar atau kuota dari harga broker sebagai metode penilaian untuk efek-efek tersebut. Ketika beberapa informasi efek-efek tidak tersedia, Bank BTN menggunakan estimasi dikutip dari harga pasar untuk efek-efek dengan karakteristik yang sama atau model penilaian yang menggunakan valuasi internal untuk estimasi nilai wajar. Sebagai hasil penilaian, nilai tercatat tidak memiliki perbedaan signifikan dengan estimasi nilai wajar.

Simpanan dan Pinjaman yang Diterima

Bank BTN menggunakan saldo yang terhutang sebagai estimasi nilai wajar untuk simpanan dan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat bunga kewajiban untuk penilaian pinjaman. Berdasarkan penilaian tersebut, saldo Bank BTN tercatat atas deposito dan pinjaman telah merepresentasikan estimasi nilai wajar.

Derivatif

Estimasi nilai wajar untuk instrumen derivatif yang dinilai dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar, seperti suku bunga dan kurs valuta asing. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan termasuk kontrak berjangka dan swap adalah model penilaian yang menggunakan perhitungan nilai sekarang. Karena transaksi derivatif telah jatuh tempo pada tahun 2010, tidak ada penyesuaian yang signifikan untuk transaksi derivatif Bank BTN.

Cash and Cash Equivalent

Bank BTN used discounted cash flow method using the prevailing money market interest rates for debt with similar credit risk and remaining maturity for placement with other banks and floating interest rate for current account with Bank Indonesia. Because the maturity of cash and cash equivalent were below one year, therefore the carrying amount of cash and cash equivalent were similar with the estimated fair value.

Securities

Bank BTN used the market prices or broker price quotation as the valuation method for the securities. When some securities information were not available, Bank BTN used estimated quoted market price for securities with similar characteristic or used internal valuation model for the estimation of fair value. As the results of the assessment, the carrying amount did not have significant differences with the estimated fair value.

Deposits and the Borrowings

Bank BTN used the amount repayable as the estimated fair value for deposits and discounted cash flow using interest rate of debt for the Borrowing valuation. Based on the assessment, Bank BTN carrying amount of the deposits and borrowings has represented the estimated fair value.

Derivatives

The estimated fair value for derivative instruments were valued using components that can be observed in the market, such as interest rate and foreign exchange rate. Valuation techniques most widely used include forward and swap valuation model that uses the present value calculation. Because the derivative transaction has been matured in 2010, there were no significant adjustments for derivative transaction in Bank BTN.

DAMPAK KONVERGENSI PERUBAHAN PSAK DI MASA DATANG

IMPACT OF CONVERGENCE FOR THE CHANGES OF SFAS IN THE FUTURE

Selama 2009-2010, Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa revisi standar akuntansi keuangan di Indonesia. Beberapa standar telah efektif berlaku di tahun 2010, seperti: PSAK no. 26, PSAK 50 dan 55, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Standar lainnya efektif berlaku pada tahun 2011, seperti:

- PSAK No. 1 (Penyajian Laporan Keuangan)
- PSAK No. 2 (Laporan Arus Kas)
- PSAK No. 3 (Laporan Keuangan Interim)
- PSAK No. 5 (Segmen Operasi)
- PSAK No. 7 (Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi)
- PSAK No. 8 (Peristiwa setelah Periode Laporan)
- PSAK No. 19 (Aktiva Tidak Berwujud)
- PSAK No. 23 (Pendapatan)
- PSAK No. 48 (Penurunan Nilai Aset)
- PSAK No. 57 (Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi)
- ISAK ada. 14 (Aset tidak berwujud – Biaya Situs)

Standar-standar revisi yang signifikan tersebut dibuat berdasarkan International Financial Reporting Standard (IFRS) yang akan efektif berlaku dan dilaksanakan untuk laporan keuangan Bank pada tahun 2011.

Sebagai entitas di Indonesia yang harus mengikuti PSAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, revisi signifikan atas PSAK akan mengakibatkan risiko pelaporan keuangan yang akan berasal dari kegagalan untuk mematuhi standar revisi tersebut. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko pelaporan keuangan, selama tahun 2010, Bank BTN telah mengevaluasi dampak keuangan dari revisi, interpretasi dan pencabutan PSAK terhadap laporan keuangan Bank. Selain itu, mulai tahun 2011, Bank akan menerapkan kalkulasi penurunan nilai atas kredit secara kolektif berdasarkan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 untuk penyesuaian atas penerapan revisi PSAK.

During 2009-2010, the Indonesian Institute of Accountant has issued several revisions for financial accounting standard in Indonesia. Some of the standards have effectively accepted in 2010, such as: SFAS no. 26, SFAS 50 and 55, as explained before. The remaining standards are effectively accepted in 2011, such as:

- SFAS No. 1 (Presentation of Financial Statement)
- SFAS No. 2 (Statements of Cash Flows)
- SFAS No. 3 (Interim Financial Reporting)
- SFAS No. 5 (Operating Segments)
- SFAS No. 7 (Related Party Disclosures)
- SFAS No. 8 (Events after the Reporting Period)
- SFAS No. 19 (Intangible Assets)
- SFAS No. 23 (Revenue)
- SFAS No. 48 (Impairment of Assets)
- SFAS No. 57 (Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets)
- ISAK No. 14 (Intangible Assets – Website Costs)

Those significant revision standards were made based on International Financial Reporting Standard (IFRS) that would be effectively accepted and implemented to the Bank financial statement as of 2011.

As part of the Indonesian entity that should complying with SFAS as published by the Indonesian Institute of Accountant, significant revision of SFAS would resulted a financial reporting risk that would be recognized from the failure to comply with the revision standard. Therefore, to mitigate the financial reporting risk, during 2010, Bank BTN has evaluated the financial effects of the revision, the interpretations and standard revocation on the Bank's financial statements. In addition, starting in 2011, the Bank would apply the collective impairment calculation on loans based on the prevailing Bank Indonesia Regulation on Assets Quality Ratings for Commercial Banks, as allowed under Bank Indonesia Circular Letter No.11/33/DPNP dated on 8 December 2009 for adoption of revised SFAS.

Persiapan Bank BTN dalam rangka konvergensi PSAK ke IFRS

Bank BTN's Preparation for PSAK to IFRS' Convergence

No.	Keterangan <i>Description</i>		
	Tahap 1 Tahun 2008 - 2009 Persiapan Awal & Infrastruktur Phase 1 2008 - 2009 Initial Preparation & Infrastructure	Tahap 2 Tahun 2009 - 2010 Implementasi Awal & Analisa Transaksi Phase 2 2009 - 2010 Initial Implementation & Transaction Analysis	Tahap 3 Tahun 2010 - 2012 Implementasi Tahap Lanjut & Safe Guarding Phase 3 2010 - 2012 Advance Implementation & Safe Guarding
1.	Rekonsiliasi PSAK dengan IFRS PSAK and IFRS reconciliation	Melakukan analisa transaksi terhadap semua transaksi signifikan yang berdampak Performing transaction analysis on all impacted significant transactions	Penyelesaian pengembangan sistem dan penerapan aplikasi sistem baru Completing system development and new system implementation
2.	Identifikasi dampak signifikan terhadap Bank Identification of significant impact for the Bank	Revisi Kebijakan dan Prosedur Revising Policies and Procedures	Mengevaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif Evaluating the impact of PSAK implementation comprehensively
3.	Kajian dampak penerapan pada Laporan Keuangan, Struktur Organisasi, IT dan SDM Studies on impact of the implementation to the Financial Statements, Organizational Structure, IT and HR	Mempersiapkan SDM melalui <i>internal training, workshop & seminar</i> Preparing HR through internal training, workshops & seminar	Revisi Kebijakan dan Prosedur Baru Revising Policies and New Procedures
4.	Kajian pendekatan penerapan sistem Studies on system implementation approach	Simulasi secara paralel dengan pengembangan sistem secara bertahap Parallel simulation with gradual system development	-
5.	Pengadaan konsultan pendamping dan sistem Consultant and system procurement	Mempersiapkan proforma laporan keuangan sesuai PSAK 50 & 55 (revisi 2006) Preparing financial statement proforma in accordance with PSAK 50 & 55 (revised 2006)	-
6.	Pembentukan Tim <i>Task Force</i> Task Force Team Establishment	-	-
7.	Mempersiapkan SDM melalui <i>training internal, workshop dan seminar</i> HR Preparation through internal training, workshop and seminar	-	-
8.	<i>Data Gap Analysis & Data Feeding</i> Gap Analysis Data & Data Feeding	-	-

DIVIDEN

DIVIDEND

Bank BTN akan melakukan kebijakan dividen sebagai berikut:

1. Membayarkan dividen tunai minimum 25% dari laba bersih setiap tahunnya, yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi.
2. Keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank BTN setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Selama tahun 2010, Bank BTN telah membagikan dividen tunai sebesar Rp 131,53 miliar sesuai dengan keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 19 Mei 2010. Dividen tunai tersebut dihitung berdasarkan pencapaian kinerja keuangan per 31 Desember 2009.

Bank BTN will carry out its dividend policy as following:

1. Pay a minimum of 25% of the net income as cash dividends each year. The exact amount will be decided after the GMS based on recommendations from the Board of Directors.
2. Dividend payments are based on the profit, financial conditions and liquidity, compliance with others statutory regulations and other factors considered relevant by the Board of Directors of Bank BTN after GMS approval.

During 2010, Bank BTN has distributed cash dividend at the amount of Rp 131.53 billion as decided in the Annual General Meeting of Shareholders dated on 19 May 2010. The cash dividend was calculated based on the achievement of financial performance as of 31 December 2009.

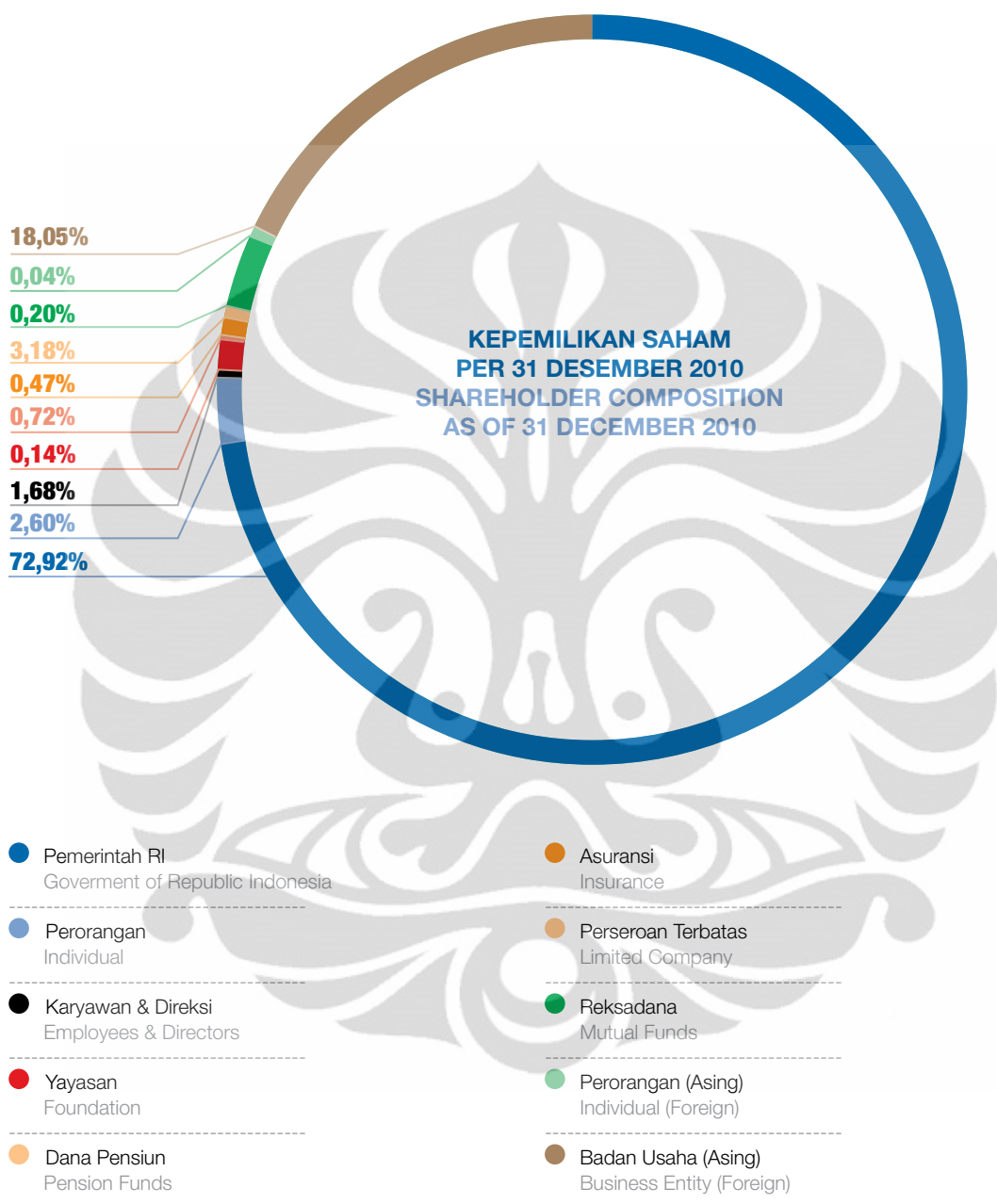


INFORMASI PEMEGANG SAHAM & INVESTOR INFORMATION TO SHAREHOLDERS & INVESTORS

Fokus Pada Penciptaan Nilai Focus On Value Creation



KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM SHAREHOLDERS COMPOSITION



PEMEGANG SAHAM TERCATAT YANG MEMILIKI LEBIH DARI 5% SAHAM PER 31 DESEMBER 2010

REGISTERED SHAREHOLDERS ABOVE 5% SHARES AS OF 31 DECEMBER 2010

Nama Name	Jumlah Saham Number of Shares	% Saham % of Share
Pemerintah Republik Indonesia Government of Republic Indonesia	6.354.000.000	72,92%

Komposisi Pemegang Saham
Per 31 Desember 2010Shareholders Composition
As of 31 December 2010

Pemegang Saham		Jumlah Investor Total Investor	Lembar Saham Shares	% Saham % Share	Shareholders	
Nasional	Pemerintah RI	1	6.354.000.000	72,92%	National	Government of Republic Indonesia
	Perorangan	6.327	226.254.000	2,60%		Individual
	Karyawan & Direksi (MESA & MESOP)	2.785	146.497.000	1,68%		Employees & Directors (MESA & MESOP)
	Yayasan	10	12.709.000	0,14%		Foundation
	Dana Pensiun	65	62.834.000	0,72%		Pension Funds
	Asuransi	17	41.101.500	0,47%		Insurance
	Perseroan Terbatas	67	277.514.156	3,18%		Limited company
	Reksadana	30	17.251.000	0,20%		Mutual Funds
	Asing	Perorangan	23	3.321.000	0,04%	Foreign
Badan Usaha		145	1.572.574.345	18,05%		Business Entity
Jumlah		9.470	8.714.056.001	100,00%	Total	Total

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that Reach 5% or More in Paid-in Capital

Kepemilikan Saham
Per 31 Desember 2010Share Ownership
As of 31 December 2010

Nama Name	Bank BTN	Perusahaan Lain Other Company	Bank lain Other Bank	Lembaga Keuangan Bukan Bank Non Bank Financial Institution	Keterangan Information
Dewan Komisaris Board of Commissioners					
1. Zaki Baridwan	-	-	-	-	Tidak ada None
2. Subarjo Joyosumarno	-	-	-	-	
3. Mulabasa Hutabarat	-	-	-	-	
4. Gatot Mardiwastoto	-	-	-	-	
5. Deswandhy Agusman	-	-	-	-	
Direksi Board of Directors					
1. Iqbal Latanro	-	-	-	-	Tidak ada None
2. Evi Firmansyah	-	-	-	-	
3. Sunarwa	-	-	-	-	
4. Saut Pardede	-	-	-	-	
5. Irman Alvian Zahiruddin	-	-	-	-	
6. Purwadi	-	-	-	-	

REALISASI RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM THE REALIZATION OF IPO FUND UTILIZATION PLAN

Berikut ini adalah rincian pergerakan atas utilisasi dan realisasi dana hasil penawaran umum selama 2009 dan 2010:

The following were the detail movement of the IPO fund utilization and realization during 2009 and 2010:

Tabel Penggunaan Dana IPO
Table of Utilization IPO Proceeds

Tanggal Date	Uraian Description	Jumlah (Rp) Amount (Rp)	Penggunaan Dana Utilization
17 Desember 2009 17 December 2009	Hasil IPO IPO Proceeds	1.888.234.882.515	-
	Biaya IPO Cost of IPO	68.580.713.165	-
	Hasil Bersih IPO Net Proceeds IPO	1.819.654.169.350	-
	Realisasi Penggunaan Dana hingga 31 Desember 2009 Realization of Fund Utilization until December 2009	1.271.656.210.000	Penyaluran Kredit Loan Disbursement
31 Desember 2009 31 December 2009	Sisa Dana Remaining Proceeds	547.997.959.350	-
	Penggunaan Dana Fund Utilization	547.997.959.350	Penyaluran Kredit Loan Disbursement
24 Februari 2010 24 February 2010	Sisa Dana Remaining Proceeds	-	-

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM

Bank BTN juga menerapkan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan. Tujuan utama program ini adalah agar manajemen dan karyawan Bank BTN mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Bank BTN.

SHARES OWNERSHIP PROGRAMS

Bank BTN also implements the Management Stock Ownership Program for its management and employees to enable management and employees of Bank BTN to build a sense of belonging in the Bank, which is expected to increase the productivity of employee and ultimately improve the overall corporate performance. This increase in corporate value can be enjoyed by all Bank BTN stakeholders.

Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Bank BTN terdiri dari:

A. Program Alokasi Saham Manajemen dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank BTN No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui Program MESA untuk pemesan khusus sebagai berikut:

Peserta Program MESA terdiri dari semua karyawan tetap Bank BTN yang termasuk dalam daftar karyawan Bank BTN per tanggal 30 September 2009, seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota komite, kecuali Komisaris Independen dan anggota Komite Audit, yang masih menjabat pada saat implementasi Program MESA.

Jumlah saham dalam Program MESA sebesar 9,62% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam penawaran umum atau sebesar 226.928.500 saham. Program MESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7, dimana peserta Program MESA akan diberikan alokasi untuk membeli saham dengan jatah pasti dengan membayar secara tunai harga saham dengan diskon sebesar 20% dari harga saham saat Penawaran Umum Perdana.

Beban pembelian saham dengan harga diskon tersebut menjadi tanggungan Bank BTN. Saham yang dibeli dalam program MESA tidak dapat dijual dalam periode 6 bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Bank BTN di Bursa Efek.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program MESA kurang dari 226.928.500 saham, maka sisa saham akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.

The Management and Employee Stock Ownership Program of Bank BTN consists of:

A. Management and Employee Stock Allocation (MESA)

Deed of Statement of Decision No. EGMS of Bank BTN No. 7 dated October 12, 2009 made by Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, approved the MESA program for special orders as follows:

MESA Program participants include all regular employees of Bank BTN who were included on Bank BTN's employee list as of September 30, 2009 and all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Secretary of the Board of Commissioners and members of the committee, except members of Independent Commissioner and the Audit Committee, who are still holding the position at the time of MESA Program implementation.

The number of shares in the MESA program is 9.62% of the total issued shares to the public in a public offering, or equal to 226,928,500 shares. The MESA program is implemented in accordance with BAPEPAM Regulation No. IX.A.7, whereas the qualified participants in the MESA program will be given a limited allocation of stocks available for purchase by cash payment, with a 20% discount on the IPO stock price.

The expense of selling shares at a discounted price is borne by Bank BTN. Shares purchased through the MESA program cannot be sold within a period of six months from the date of listing.

If the number of shares booked in the MESA program is less than 226,928,500 shares, the remaining shares will be offered to the public.

B. Program Pemberian Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen Dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank BTN No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan/MESOP*).

Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Bank BTN, sebanyak-banyaknya 4% dari modal ditempatkan dan disetor Bank BTN, setelah Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan berdasarkan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.4. Mekanisme pelaksanaan MESOP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1.A yang akan dilaporkan kemudian. Penanggung jawab program MESOP adalah Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Pelaksanaan program MESOP akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut:

- ▶ Tahap Pertama
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40% dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2010.
- ▶ Tahap Kedua
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2011.
- ▶ Tahap Ketiga
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2012.

Hak Opsi yang diberikan kepada peserta program MESOP dalam setiap tahapan tersebut dapat digunakan untuk membeli saham dalam program MESOP (*option life* = masa berlakunya hak opsi) selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya.

B. Management and Employee Stock Option Plan/MESOP

Based on Deed of Statement of Decision No. EGMS of Bank BTN No. 7 dated October 12, 2009 made by Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, the Shareholders approved the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).

The MESOP program is a stock purchase option right for qualified participants to purchase new shares to be issued from Bank BTN's portepel. A maximum of 4% of the issued and paid-up capital of Bank BTN will be offered after the IPO, based on Bapepam Regulation No. IX.D.4. The MESOP implementation mechanism will be conducted in accordance with Regulation of the Indonesia Stock Exchange No.1.A which will be reported later. The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, is responsible for the MESOP Program and report to the GMS.

The MESOP program implementation will be done by issuing a rights option in three phases, with the following details:

- ▶ First Stage
The maximum number of option rights to be issued is 40% of the total shares in the MESOP program, and will be published and distributed to participants of the MESOP program in 2010.
- ▶ Second Stage
The maximum number of option rights to be issued is 30% of the total shares in the MESOP program, and will be published and distributed to participants of the MESOP program in 2011.
- ▶ Third Stage
The maximum number of option rights to be issued is 30% of the total shares in the MESOP program, and will be published and distributed to participants of the MESOP program in 2012.

Option rights granted to participants of the MESOP program in each stage can be made by buying stock through the MESOP program (Option Life = Option Right validity period) for five years from the date of issuance.

Peserta dapat menggunakan haknya untuk membeli saham dalam program MESOP pada periode pelaksanaan dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan yang akan ditetapkan dikemudian hari, setelah melewati *Vesting Period* (Masa Tunggu) yakni 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Hak Opsi, dalam *Vesting Period* tersebut Peserta belum dapat menggunakan Hak Opsi yang diberikan kepadanya untuk membeli saham dalam program MESOP.

Periode Pelaksanaan akan ditetapkan, sebanyak-banyaknya 2 periode setiap tahunnya selama Masa Berlakunya Hak Opsi (*option life*). Sedangkan Harga Pelaksanaan akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum laporan akan dibukanya periode pelaksanaan.

Pelaksanaan Program MESOP telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Bank BTN dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Participants may use their rights to purchase shares in the MESOP program during the exercise period by paying full exercise price to be determined later, after passing through a one-year vesting period from the date of issuance, during which the option is not exercisable.

As many as two exercise periods will be determined each year during the period of validity Rights Option (Option Life). While the exercise price will be determined in reference to the provisions set forth in item IA V.2.2 Regulation Appendix I Decree of the Board of Directors of PT Jakarta Stock Exchange No. 305/BJ/07-2004 dated 19 July 2004, which is at least 90% of the average of Bank BTN's shares closing price recorded in 25 consecutive stock exchange days on the regular market before the opening of the exercise period report.

The MESOP Program implementation was undertaken in accordance with the terms and conditions set by the Board of Directors of Bank BTN, with respect to prevailing laws and regulations.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM CHRONOLOGY OF SHARE LISTING

Riwayat Saham

Share History

Nama Name	Keterangan Details	Harga Nominal Nominal Price	Jumlah Saham Number of Shares	Nilai Buku Book Price	Harga Saham Share Price
17 Desember 2009	IPO	Seri B @ Rp 500,-	2.360.057.000	500	Rp. 800

Tidak ada perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun 2010.

Saham Bank BTN dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia.

The aren't any changes regarding number of shares since first listing until the end of 2010.

Bank BTN's shares are listed in Indonesia Stock Exchange.

EFEK LAINNYA (KIK - EBA) OTHER SECURITIES (KIK - EBA)

Sebagai upaya meningkatkan laju kredit, pada bulan Oktober 2010 Bank BTN melakukan program sekuritisasi aset bagi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) jilid III senilai Rp 750 miliar. Pada KIK EBA III ini, Bank BTN kembali menunjuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebagai *arranger* dan pembeli siaga. Sekuritisasi Aset tahap ketiga ini efektif sejak Desember 2010.

Tahun 2009, Bank BTN telah dua kali melakukan sekuritisasi aset KPR, masing-masing sebesar Rp 111 miliar dan senilai Rp 391 miliar.

Upaya sekuritisasi aset ini merupakan program Bank BTN untuk mengurangi risiko *liquidity mismatch* karena melalui sekuritisasi ini Bank BTN mengubah aset KPR yang tidak likuid menjadi instrumen surat modal yang likuid. Aset KPR yang dilibatkan dalam sekuritisasi ini adalah aset KPR dengan peringkat AAA.

In an effort to increase the disbursement of loan, in October 2010 Bank BTN launched asset securitization program for Assets Backed Securities-Collective Investment Contract (KIK-EBA) vol III, worth Rp 750 billion. In KIK-EBA vol III, Bank BTN appointed PT Sarana Multigriya Finance (SMF) as arranger and standby buyer. The third stage of asset securitization was effective since December 2010.

In 2009, Bank BTN had issued two securitized mortgage assets, amounting to Rp 111 billion and Rp 391 billion.

The asset securitization was Bank BTN's program to reduce liquidity mismatch risk since through the securitization Bank BTN was able to transfer non-liquid mortgage assets into liquid capital paper instruments. Asset securitization of mortgages that were included in this securitization were mortgage assets with AAA ratings.

AKSES INFORMASI INFORMATION ACCESS

Bank BTN selalu menerapkan transparansi dan menyediakan akses informasi kepada seluruh pemangku kepentingan melalui Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Investor. Saat ini, Sekretaris Perusahaan Bank BTN adalah Rakhmat Nugroho dan Hubungan Investor Bank BTN dikepalai oleh Nofri R. Putra.

Sebagai bagian dari upaya keterbukaan dan kepatuhan terhadap peraturan Bapepam – LK, Bank BTN memberikan informasi atas setiap aksi korporasi yang dilakukan melalui *press release* yang disebarkan kepada media nasional serta dapat diakses pada situs Bank BTN (www.btn.co.id). Kami juga menyediakan Contact Center pada nomor 62-21 265 33555 untuk layanan pelanggan dan *email* untuk investor melalui investor_relations@btn.co.id.

Bank BTN maintains its transparency and provides access to information for different stakeholders through the Corporate Secretary and Investor Relation. Rakhmat Nugroho serves as Bank BTN's Corporate Secretary and Investor Relation headed by Nofri R. Putra recently.

As a part of our transparency effort as well as compliance to Bapepam – LK regulation, Bank BTN provides information of all corporate actions through the published press release distributed to national media and also can be obtained from Bank BTN official website (www.btn.co.id). We also provide Contact Center Service at 62-21 265 33555 for customer call inquiries and email for investors, investor_relations@btn.co.id.

INFORMASI PENTING SEPUTAR BTN BTN KEY FACTS

Nama Perusahaan

Name of Company

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel. 62-21 6336789, 6332666
Fax. 62-21 6346704

Pendirian Perusahaan

Establishment Date

9 Februari 1950
9 February 1950

Komposisi Pemegang Saham (per 31 Desember 2010)

Shareholders Composition

(as of 31 December 2009)

- Pemerintah Republik Indonesia 72.92%
- Karyawan dan Direksi 1.68%
- Masyarakat 25.40%
- The Government of Republic of Indonesia 72.92%
- Employees and BOD 1.68%
- Public 25.40%

Pencatatan Saham

Listing

Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

Jenis Usaha

Line of Business

Bank Umum
Commercial Bank

Kode Saham

Ticker Code

BBTN

Akuntan Publik

Public Accountant

Purwanto, Suherman & Surja
Anggota Ernst & Young Global
Gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta Menara 2 Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53,
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : 62-21 5289 5000
Fax. : 62-21 5289 4100

Biro Administrasi Efek

Share Register

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav 34 –35, Jakarta
10220, Indonesia
Tel . 62-21 570 9009
Fax. 62-21 570 9026

Pemeringkat Efek

Rating Agency

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Setiabudi Atrium Suite 809 – 810
Jl. HR Rasuna Said Kav. 62
Jakarta 12920, Indonesia
Tel. 62-21 521 0077
Fax. 62-21 521 0078

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Rakhmat Nugroho
Menara Bank BTN Lantai 20
Jl. Gajah Mada No.1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel. 62-21 6336789, 6332666
Fax. 62-21 6336719

Hubungan Investor

Investor Relations

Nofri R. Putra
Menara Bank BTN Lantai 20
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel. 62-21 638 70107, 638 70142
Fax. 62-21 638 70104

Situs Perusahaan

Company Website

www.btn.co.id

Pusat Informasi

Contact Centre

62-21 265 33555

Pemegang Saham Bank BTN

BANK BTN Shareholders

Sampai dengan 31 Desember 2010, Bank BTN dimiliki oleh 9.470 pemegang saham, yang terdiri dari 9.302 pemegang saham domestik dan 168 pemegang saham asing.

As of 31 December 2010 Bank BTN owned by 9,470 shareholders ranging from 9,302 domestic shareholders and 168 foreign shareholders.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2011 2011 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

RUPS Tahunan akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2011 di Jakarta

The AGMS will be held on 19 May 2011 in Jakarta



TATA KELOLA PERUSAHAAN CORPORATE GOVERNANCE

Fokus Kepada Penguatan Tata Kelola Perusahaan

Focus On Strengthening Our Corporate
Governance



TINJAUAN TATA KELOLA PERUSAHAAN GCG OVERVIEW

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN MENUJU WORLD CLASS BANKING

Pada penghujung tahun 2009, Bank BTN membuka lembaran sejarah baru dengan menjadi perusahaan terbuka. Langkah strategis ini membawa perubahan mendasar dengan tekad menjadi perusahaan kelas dunia (*world class banking company*). Dengan demikian, segenap aspek pengelolaan bisnis Bank harus disempurnakan dengan melakukan berbagai proses transformasi bisnis.

Seiring dengan ketetapan langkah untuk bertransformasi, Bank BTN senantiasa melengkapi berbagai pranata organisasi dan membangun mekanisme pengelolaan bisnis yang andal. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik/Good Corporate Governance (GCG) pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Bank secara konsisten.

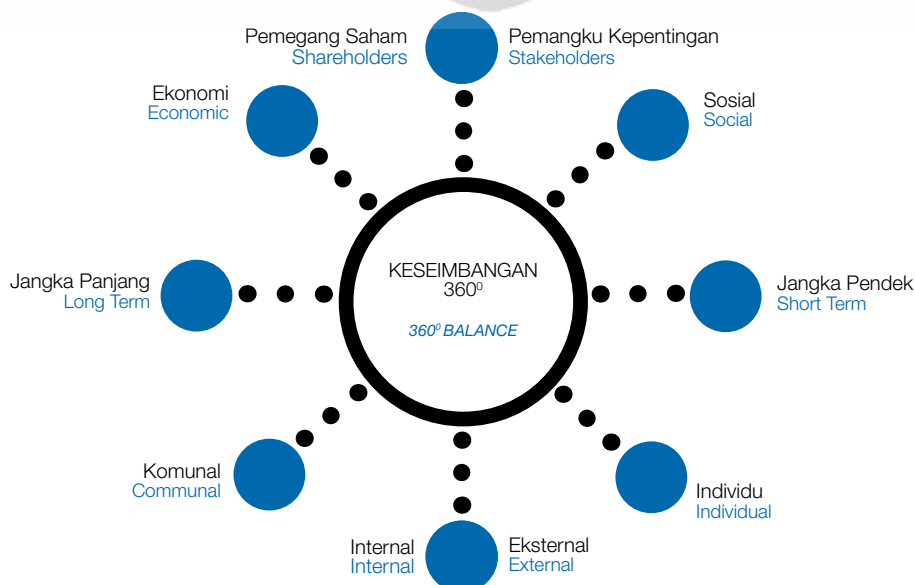
Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* (TARIF), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara paripurna/menyeluruh (360 derajat) sehingga segenap bentuk kepentingan, baik ekonomi maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan seperti terlihat pada ilustrasi bagan berikut:

THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE GEARED TOWARDS WORLD-CLASS BANKING

Bank BTN marked the end of 2009 with a strategic move by turning itself into a publicly-held company. This move, aimed at elevating the Bank to the level of a world-class banking company, prompted the Bank to initiate business transformation to improve the whole array of its business management.

This commitment in business transformation has driven Bank BTN to continue improving its organizational infrastructure and developing reliable business management mechanisms, including, primarily, a consistent implementation of good corporate governance at all of the Bank's organizational levels.

Bank BTN is implementing the basic GCG principles that include transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness (TARIF) in the belief that such principles are capable of engendering an all-embracing business equilibrium (a 360-degree business equilibrium), converging a wide variety of interests – whether economy or social, individual or group, internal or external, short term and long term as well as shareholders or stakeholders' interest – into a point of equilibrium as the below illustration shows:



Bagi Bank BTN, penerapan GCG bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. Namun, lebih dari semua itu, merupakan elemen fundamental yang mengacu kepada *international best practices*. Kami berkeyakinan bahwa dengan melakukan implementasi GCG secara konsisten dan berkesinambungan akan memfasilitasi *value driver* bekerja optimal. Hal ini diharapkan akan meningkatkan nilai perusahaan (*value creation*) selain menghasilkan empat manfaat utama sebagai berikut:

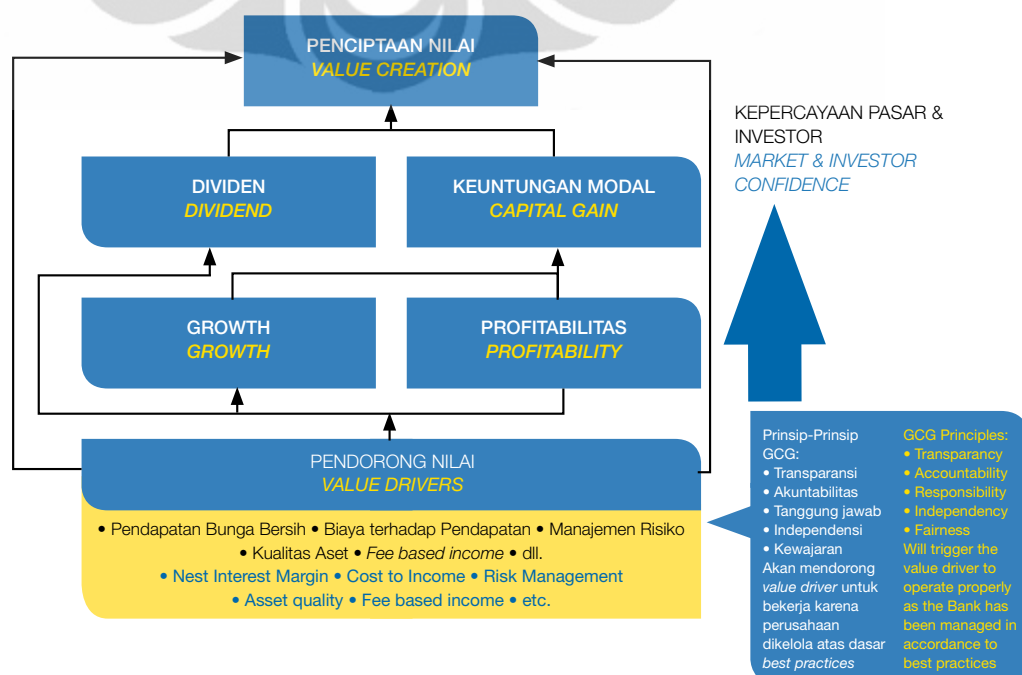
1. Meningkatkan kinerja Bank melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*, melalui peningkatan kinerja keuangan dan pengurangan risiko atas tindakan yang mungkin dilakukan yang tidak sinkron dengan tujuan Bank.
3. Meningkatkan kepercayaan investor, seiring dengan dorongan Pemerintah untuk mengundang investor ke Indonesia sebagai salah satu pasar yang sedang berkembang (*emerging markets*).
4. Tercapainya *stakeholder satisfaction* yang meliputi *task satisfaction* dan *employee satisfaction*.

Bagan *Proses Value Creation* sebagai hasil penerapan prinsip-prinsip TARIF GCG, sebagai berikut:

More than just being compliant with regulations, Bank BTN regards GCG practices as fundamental elements whose roots are to be found in international best practices. Bank BTN believes that a consistent and sustained GCG implementation will facilitate value drivers in achieving their full potential, leading to higher value creation and four other benefits described below:

1. Improving the Bank's performance through a better decision-making process, more efficient operations and improved services to stakeholders.
2. Increasing corporate value through higher financial performance and less risky business maneuvers that are not in sync with the Bank's objectives.
3. Gaining more investor confidence, in line with the government's call for more investments in Indonesia as one of emerging markets.
4. Meeting stakeholder satisfaction, elaborated as task satisfaction and employee satisfaction.

The Illustration of a Value Creation Process Resulting from Implementing GCG TARIF Principles, described below:



Road Map Tahapan Implementasi GCG

Sepanjang tahun 2010, serangkaian langkah strategis dilakukan secara intensif guna membangun, menerapkan dan mengevaluasi secara terus-menerus proses implementasi GCG. Hal ini kami lakukan melalui penetapan rangkaian *road map* yang terprogram, dengan sasaran akhir terwujudnya Bank BTN sebagai salah satu perusahaan dengan praktek tata kelola terbaik di masa depan. Diharapkan dengan tercapainya sasaran akhir tersebut, Bank BTN optimis dapat meningkatkan kinerja secara berkesinambungan (*sustainable*).

Sasaran awal tahapan pertama program *road map* adalah menumbuhkan komitmen manajemen dalam menerapkan GCG. Kemudian, diikuti langkah lanjutan dengan penyempurnaan *soft structure infrastructure* GCG.

The Roadmap for Implementations Phase of GCG

Throughout 2010, Bank BTN intensively took strategic steps to develop, implement and continuously evaluate the implementation of GCG through a series of programmed roadmaps aimed to make Bank BTN one of the companies with the best GCG practices in the future. Bank BTN is confident that achieving this goal will enable the Bank to deliver sustainable improvement in its performance.

The roadmap program initially aims at instigate the Bank management's commitment in implementing GCG, followed by refining GCG softstructure and GCG infrastructure.



Penyempurnaan *soft structure* bertujuan melengkapi kebijakan pendukung, selain meningkatkan tanggung jawab dalam menjaga segenap kepentingan *stakeholders*. Sedangkan, *infrastructure* GCG dilengkapi dengan melakukan penyempurnaan organisasi yang diperlukan.

Tahapan selanjutnya dalam *road map* implementasi GCG yaitu *awareness programs*, yang dilanjutkan dengan proses institusionalisasi, internalisasi, GCG *assessment (self assessment* maupun *third party assessment)* serta *monitoring* berkelanjutan dengan dukungan teknologi informasi sebagai *enabler* dan *transformer*.

Tahapan *road map* implementasi Bank BTN, sebagai berikut:

- 1) Tahapan Pra Implementasi: Pada tahapan ini, terdapat 3 (tiga) hal yang dilakukan, yaitu:
 - a. Mengukuhkan Komitmen Manajemen.
 - b. Membangun *Soft Structure*.
 - c. Melengkapi *Infrastructure*.
- 2) Tahapan Implementasi: Pada tahapan ini dilakukan beberapa strategi, yaitu:
 - a. *Awareness programs*.
 - b. Internalisasi dan institusionalisasi.
 - c. *Monitoring* dan pengembangan *software (Corporate Governance Management System)*.
 - d. Evaluasi dan *self assessment*.
 - e. Eksternalisasi.
- 3) Tahapan Siklus Implementasi: *Monitoring* yang berkelanjutan senantiasa dilakukan, menuju sukses jangka panjang.

Beberapa program implementasi GCG yang penting dan telah dilaksanakan dengan baik oleh Bank BTN pada periode 2010, antara lain:

Komitmen Manajemen

- Bagi Bank BTN, penerapan GCG bukan sekadar memenuhi peraturan perundang-undangan. Namun, lebih dari semua itu, merupakan elemen fundamental yang mengacu kepada *international best practices*. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan GCG berarti memfasilitasi *value driver* bekerja optimal, sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan (*value creation*).
- Oleh karena itu, manajemen memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan GCG secara konsisten. Hal ini diwujudkan dengan melalui:

A refinement in GCG soft structure aims to complete supporting policies and also to increase the responsibility in maintaining the interests of stakeholders. While GCG's infrastructure is enhanced by performing required organization's refinement.

Another phase in the roadmap of GCG implementations is awareness programs, followed by institutionalization, internalization, GCG assessment (self assessment and third-party assessment) and IT-assisted continual monitoring that serves as an enabler and transformer.

Bank BTN's roadmap of phased implementations of GCG is as follows:

- 1) The pre-implementation phase. This phase consists of:
 - a. Strengthening the management's commitment
 - b. Developing soft structure
 - c. Complementing infrastructure
- 2) The Implementation Phase: This phase includes the below strategies:
 - a. Awareness programs
 - b. Internalization and institutionalization
 - c. Monitoring and software development (Corporate Governance Management System)
 - d. Evaluation and self assessment
 - e. Externalization
- 3) The Implementation Cycle Phase: A continual monitoring that aims for long-term success.

Below are several of Bank BTN's well-executed GCG implementation programs for 2010:

Management's Commitment

- More than just being compliant with regulations, Bank BTN regards GCG practices as fundamental elements whose roots are to be found in international best practices. Bank BTN believes that consistent and sustained GCG implementation will facilitate value drivers in achieving their full potential, leading to higher value creation.
- Therefore, the management is fully committed to implementing GCG consistently, as shown by the below practices:

- a. Penetapan GCG sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator/KPI*) dalam kontrak Manajemen.

Bank BTN telah mengimplementasikan GCG sebagai KPI Bank BTN dan menerapkannya secara konsisten serta menjadikan GCG sebagai landasan operasional bisnis, melalui beberapa upaya sebagai berikut:

- 1) Sesuai Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2008 - 2012, Bank BTN telah menetapkan berbagai strategi dan prioritas program kerja. Salah satunya adalah "Implementasi GCG sesuai ketentuan BI dan/atau *best practices*".
 - 2) Sesuai peta strategi Bank BTN 2009-2012 melalui implementasi Balance Score Card (BSC), GCG telah ditetapkan sebagai salah satu KPI Bank BTN, yaitu pada perspektif *People, Organization and Information and Communication Technology*.
 - 3) Pelaksanaan GCG di Bank BTN telah dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2011 khususnya pada bagian Kebijakan Umum Direksi (KUD) tahun 2011 disampaikan bahwa pengelolaan manajemen yang optimal di bidang Human Capital, IT, Manajemen Risiko menuju efisiensi operasional melalui peningkatan pelaksanaan GCG di seluruh level organisasi. Kualitas pelaksanaan GCG juga sudah dimasukkan sebagai Sasaran Strategis, *Key Performance Indicator* dan *Corporate Strategic Initiative Level* Tahun 2011.
 - 4) Unit kerja sudah menandatangani Kontrak Kinerja dimana indeks pelaksanaan GCG sudah di jadikan indikator dalam KPI masing-masing unit kerja.
- b. Melaksanakan segenap tahapan *road map* implementasi GCG di atas secara konsisten.
- c. Melakukan revitalisasi penerapan budaya kerja yang dikenal dengan POLA PRIMA. Penjelasan lengkap mengenai POLA PRIMA sebagai budaya kerja dapat dilihat pada bagian nilai-nilai Bank BTN pada laporan tahunan ini.

- a. Bank BTN has determined GCG as Key Performance Indicator in the Management contracts.

Bank BTN has made GCG as major part of Bank BTN's KPI and has consistently promoted its implementations. The Bank has adopted GCG as its business operational groundwork, as indicated by the below practices:

- 1) In accordance with the 2008-2012 Long-Term Plan, Bank BTN has determined a variety of strategies and working program priorities, including "GCG implementations that are in compliance with BI regulations and/or best practices".
 - 2) In line with Bank BTN's 2009-2012 Strategy Map through the implementation of the Balance Score Card (BSC), GCG has been included in the Bank's KPI under the perspectives of People, Organization and Information and Communication Technology.
 - 3) Bank BTN has included GCG implementations in its 2011 Working Plan and Budget, particularly the 2011 Board of Directors' Public Policy (KUD), in which it is stipulated that a fully functional management in the Human Capital, IT and Risk Management can be achieved through improved implemetations of GCG across the Bank's organizational levels. Bank BTN has included the degree of GCG implementations in the Bank's 2011 Strategic Objectives, Key Performance Indicator and Corporate Strategic Initiative Level.
 - 4) The Bank's working units have signed Performance Contracts in which CGC implementations serve as indicators in the KPIs of each of the units.
- b. Consistently implementing each phase of the GCG implementation roadmap above.
- c. Revitalizing the implementation of working ethic known as the POLA PRIMA. Further explanation about POLA PRIMA as our work culture can be found at Bank BTN value part in this Annual Report.

Tahapan Membangun GCG Soft Structure

- a. Tujuannya membangun *Soft Structure* GCG antara lain, namun tidak terbatas pada hal-hal:
 - 1) Melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG.
 - 2) Menjadi pedoman bagi Bank BTN dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya (*corporate culture*) yang diharapkan.
 - 3) Merupakan bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi Bank BTN dalam rangka meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ Bank BTN dalam rangka menjaga kepentingan stakeholders sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- b. Membangun dan/atau melakukan *review* dan/atau pengembangan terhadap beberapa *Soft Structure* GCG dan telah dilakukan institusionalisasi yang meliputi berbagai kebijakan, antara lain:
 - 1) Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 - 2) Board Manual
 - 3) *Corporate Code of Conduct*
 - 4) Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
 - 5) Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Gratifikasi
 - 6) Kebijakan Aktivitas Politik
 - 7) Kebijakan *Whistleblowing*
 - 8) Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Debitur Besar (Dana Besar)
 - 9) Kebijakan Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait
 - 10) Kebijakan Rencana Strategis

Tahapan Melengkapi Infrastructure GCG

Infrastructure GCG dilengkapi dengan cara:

- 1) Melakukan identifikasi atas *infrastructure* GCG yang telah dimiliki Bank BTN dan menata ulang kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG.
- 2) Restrukturisasi internal pada bidang-bidang yang diperlukan sesuai dengan fokus yang dipilih dalam kerangka kerja implementasi GCG yang mencakup aktivitas-aktivitas, seperti,

The Phases of GCG Soft Structure Development

- a. The following are a number of objectives in the development of GCG Soft Structure, but not necessarily exhaustive:
 - 1) Complementing supporting policies in GCG implementations.
 - 2) Serving as guideline to Bank BTN's daily operations that are in sync with Bank BTN's culture.
 - 3) Functioning as a written commitment that binds all organizational levels of Bank BTN.
- b. Reviewing and/or developing the GCG Soft Structure, while ushering in institutionalization that comprises the following policies:
 - 1) Operating procedure for the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 - 2) Board Manual
 - 3) Corporate Code of Conduct
 - 4) Policy on Dealing with Conflict of Interest
 - 5) Policy on Giving and Accepting Gifts/ Gratification
 - 6) Policy on Political Activities
 - 7) Policy on Whistleblowing
 - 8) Policy on Providing Funds of Large Exposure
 - 9) Policy on providing Funds to Related Parties
 - 10) Policy on Strategic Plans

The Phases of Complementing GCG Infrastructure

The following are phases with which GCG Infrastructure is complemented:

- 1) Identifying the GCG infrastructure available with Bank BTN and adjusting policies to make them in sync with GCG principles.
- 2) Internal restructuring of organizational units in accordance with the GCG implementation focus that includes such activities as organizational improvements, establishment of committees,

penyempurnaan organisasi yang diperlukan, pembentukan komite-komite, GCG *Champion*, pengembangan *software* serta aktivitas lainnya yang diperlukan.

3) Beberapa *infrastructure* GCG yang telah dilengkapi oleh Bank BTN pada periode 2010 adalah:

- Perubahan Struktur Organisasi Baru
Bank BTN telah membentuk unit kerja baru yang secara khusus menangani implementasi GCG, yaitu GCG *Department*, yang merupakan bagian dari *Corporate Secretary Division*.
- Penunjukan GCG *Champion* (koordinator dan asesor GCG) di seluruh unit kerja Kantor Pusat dalam upaya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan implementasi GCG sehari-hari.
- Pembuatan GCG *Scoreboard* untuk memantau implementasi pelaksanaan GCG di setiap unit kerja dan sekaligus sebagai indikator untuk menentukan pencapaian KPI unit kerja sesuai metode *Balanced Scorecard*.
- *Monitoring* dan Pengembangan GCG *Software* (*Corporate Governance Management System*).
Agar proses monitoring (identifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan memberikan saran langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini) terhadap pelaksanaan implementasi GCG menjadi lebih efektif dan efisien, Bank BTN telah melakukan analisis dan pengembangan GCG *Software* (*Corporate Governance Management System*) dengan dukungan teknologi informasi.

a GCG *Champion*, software development and other necessary activities.

3) The following are GCG infrastructure efforts Bank BTN accomplished in 2010:

- Establishment of a New Unit
Bank BTN has set up the GCG Department, a new unit specially tasked with GCG implementations, which is part of the Corporate Secretary Division.
- Appointment of a GCG *Champion* (a GCG coordinator and assessor) at each working unit of the Had Office to smoothen the daily coordination of GCG implementations.
- Adoption of a GCG *Scoreboard* to monitor GCG implementations at each working unit. The *Scoreboard* also serves as an indicator whether the KPI achievement by a working unit is in accordance with the *Balanced Scorecard* method.
- Monitoring and Development of GCG *Software* (*Corporate Governance Management System*).
Bank BTN has made use of IT technology to ensure more effective and more efficient monitoring (problem identification, finding alternative solutions and offering suggestions) of GCG implementations. To ensure GCG implementation monitoring process (problem identification, finding alternative solutions and offering recommendations as early correction) becomes more effective and efficient, Bank BTN developed analysis and GCG software (*Corporate Governane Management System*).

Tahapan Eksekusi Strategi

GCG awareness program

Dalam rangka membangun GCG *awareness* secara berkesinambungan maka diperlukan peningkatan pemahaman mengenai GCG dari segenap jajaran dan tingkatan organisasi Bank BTN secara. Untuk itu, Bank BTN telah melaksanakan kegiatan-kegiatan:

- 1) Menugaskan 2 (dua) pegawai untuk mengikuti *The 8th International Conference on Corporate Governance: Corporate Governance*

Phases of Strategy Implementations

GCG awareness program

As better comprehension of GCG across organizational levels is necessary to build sustainable GCG awareness, the following are activities that Bank BTN accomplished to meet such an end:

- 1) Sending 2 (two) employees to attend the 8th International Conference on Corporate Governance: Corporate Governance

and Sustainability; Previous International Conferences Organized by the Centre for Good Corporate Research, Birmingham Business School, Inggris, pada tanggal 23 Juni 2010.

- 2) Pemasangan *banner* tentang GCG *awareness* di semua unit kerja di Kantor Pusat.
- 3) Sosialisasi melalui artikel GCG di majalah PARAS (majalah internal Bank BTN).
- 4) GCG *Awareness Inhouse Training*. Bank BTN telah melaksanakan GCG *Awareness Inhouse Training* pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2010 dengan peserta seluruh Kepala Divisi/Desk/*Regional Office* dan GCG *Champion* seluruh unit kerja.
- 5) Melakukan induksi kepada pegawai baru Bank BTN akan pentingnya GCG.
- 6) Melakukan *teleconference* dalam rangka melakukan sosialisasi tentang arti penting implementasi GCG dengan Kantor Cabang.
- 7) Sosialisasi Kebijakan GCG melalui *workshop*. Sebagai sarana untuk sosialisasi dan sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan terhadap 4 (empat) kebijakan GCG, yaitu: *Code of Conduct*, *Conflict of Interest*, *Gratifikasi* dan *Aktivitas Politik*, Bank BTN telah mengadakan *workshop* bekerja sama dengan Lembaga Komisararis dan Direksi Indonesia (LKDI) pada tanggal 26 - 27 Oktober 2010.

Institusionalisasi dan Internalisasi

- 1) Hasil pembangunan dan/atau *review* dan/atau pengembangan terhadap beberapa GCG *Soft Structure* sebagaimana yang diuraikan pada butir 2.b di atas telah dilakukan institusionalisasi oleh manajemen sebagai kebijakan resmi Bank.
- 2) Internalisasi dilakukan dengan membentuk struktur organisasi baru, penunjukan GCG *Champion* seluruh unit kerja Kantor Pusat, mengembangkan GCG *scoreboard* unit kerja dan monitoring serta pengembangan GCG software (*Corporate Governance Management System*) sebagaimana yang diuraikan pada butir 3.c di atas.

GCG Assessment Program

Self Assessment

Pada bulan Januari sampai dengan Maret 2010, telah melaksanakan evaluasi implementasi GCG dengan melakukan *self assessment* pelaksanaan

and Sustainability; Previous International Conferences Organized by the Centre for Good Corporate Research, Birmingham Business School, the United Kingdom, on 23 June 2010.

- 2) Putting up GCG-promoting banners at all working units of the Head Office.
- 3) GCG Socialization via Paras magazine (The internal magazine of Bank BTN).
- 4) GCG Awareness Inhouse Training. Bank BTN held the GCG Awareness Inhouse Training on October 13 - 15, 2010 attended by all Heads of Divisions/Desks/*Regional Offices* and each of GCG Champions across working units.
- 5) Putting in place an induction program for new employees of Bank BTN aimed to instill awareness of the importance of GCG.
- 6) Holding teleconference sessions with Branch Offices to socialize the importance of GCG implementations.
- 7) Socializing GCG policies through workshops. To socialize GCG implementations and gather some inputs with regard to 4 (four) GCG policies—Code of Conduct, Conflict of Interests, Gratification and Political Activities—Bank BTN, in collaboration with the Indonesian Commissioners and Directors Association (LKDI), held a workshop on 26 - 27 October 2010.

Institutionalization and Internalization

- 1) The management has institutionalized the results and/or reviews of GCG Soft Structure development, as outlined on point 2.b above, as one of the Bank's official policies.
- 2) Internalization was accomplished by establishing a new organizational structure, appointment of GCG Champions across the working units of the Head Office, development of GCG Scoreboard and monitoring of working units and development of GCG software (a Corporate Governance Management System) as outlined on point 3.c above.

GCG Assessment Program

Self Assessment

From January to March 2010, Bank BTN conducted GCG-related self assessment, in which the Bank evaluated its GCG implementations for the January-

GCG periode Januari - Desember 2009, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dengan nilai komposit 1.56 yang tergolong dalam kategori Baik.

Third Party Assessment

Bank BTN telah melaksanakan *third party assessment* bekerja sama dengan *Centre for Good Corporate Governance* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (CGCG FEB UGM).

Eksternalisasi

Untuk dapat memberikan gambaran kepada segenap stakeholders tentang pelaksanaan praktek-praktek GCG di Bank BTN, pada bulan Desember 2010, Bank BTN telah melakukan komunikasi kepada pihak eksternal dan segenap *stakeholders*, melalui advertorial di Harian Umum Nasional, yaitu: melalui harian Kompas pada tanggal 29 Desember 2010 dan harian Bisnis Indonesia pada tanggal 30 Desember 2010, dengan materi seluruh kegiatan implementasi GCG di Bank BTN periode 2010.

Manajemen berkeyakinan, dengan adanya *road map* implementasi GCG hingga tahun 2012 ini, Bank BTN siap menghadapi tantangan bisnis ke depan dan meniti jalan menuju *world class banking company*.

Third Party Assessment

Dalam rangka melakukan evaluasi dan monitoring implementasi GCG, Bank BTN bekerjasama dengan CGCG FEB UGM untuk melakukan GCG *assessment*.

Assessment tersebut dilakukan berdasarkan CGCG UGM's *Corporate Governance Rating Model* dengan menggunakan riset empiris, baik menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, dan dibangun berdasarkan 2 perspektif utama, yaitu perspektif prinsip-prinsip dasar dan perspektif partisipan. Dari perspektif prinsip, terdapat 5 prinsip dasar yang dicermati, yaitu *Transparency, Accountability and Responsibility, Responsiveness, Independency, dan Fairness*. Dari perspektif partisipan, terdapat 5 partisipan dengan fungsi utamanya masing-masing, yaitu Direksi yang memiliki fungsi utama dalam *oversight*; *Board of Executives* (BoE) yang memiliki fungsi utama dalam *enforcement*, Dewan Komisaris/Komite-komite yang

December 2009 period as required by Bank Indonesia, resulting in a total score of 1.56 (Good).

Third Party Assessment

Bank BTN teamed up with the Center for Good Corporate Governance of the Faculty of Economics and Business of Gadjah Mada University (CGCG FEB UGM) to conduct third-party assessment of the Bank's GCG implementations.

Externalization

In December 2010, Bank BTN communicated its GCG implementation practices for 2010 to the stakeholders and the general public through advertisement in the December 29 2010 edition of the National Daily Kompas and the December 30 2010 edition of the National Daily Bisnis Indonesia.

Bank BTN Management is confident that the GCG implementation roadmap through 2012 will enable the Bank to face future business challenges and meet its target of becoming a world-class banking company.

Third Party Assessment

Partnering with the CGCG FEB UGM, Bank BTN evaluated and monitored Bank BTN GCG implementations.

The assessment was based on CGCG UGM's Corporate Governance Rating Model and using on empirical research with quantitative and qualitative approaches focusing on two main perspectives, namely a primary principle perspective and participatory perspective. The primary principle perspective concentrates on Transparency, Accountability and Responsibility, Responsiveness, Independency, and Fairness. The participatory perspective involved five participants with their respective roles. These five participants are the Board of Directors with oversight as its main role; the Board of Executives (BoE) that is primarily responsible for enforcement; the Board of Commissioners/Committees (BoC) that mainly plays

memiliki fungsi utama dalam *advisory*, Auditor yang berperan utama dalam *assurance*, dan *stakeholders* yang berperan utama dalam *monitoring*.

Berbagai tahapan yang dilakukan menjadikan semua pihak yang berkepentingan dapat berkontribusi, sesuai dengan kapabilitas dan fungsi masing-masing dalam *assessment* GCG. Metode penelitian berupa observasi, survei, wawancara, dan studi dokumen dilakukan untuk pengumpulan data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model peratingan yang dikembangkan secara sistematis, dan analisis dilakukan menggunakan *software* aplikasi yang dirancang khusus.

Pada awal *assessment*, perancangan instrumen berupa seperangkat pertanyaan (kuesioner), disusun secara khusus untuk menyesuaikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan GCG yang berlaku di industri perbankan. Selanjutnya, instrumen tersebut didiskusikan dengan perwakilan dari Bank BTN untuk mendapatkan saran dan komentar yang menjadikan instrumen peratingan lebih komprehensif dan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki Bank BTN. Terdapat 5 jenis kuesioner yang dirancang sesuai dengan jenis partisipan. Selanjutnya, CGCG FEB UGM menyampaikan seperangkat kuesioner yang telah disesuaikan ke masing-masing partisipan. Tahap ini disebut sebagai tahap *self-assessment*, yaitu tahap dimana para partisipan menilai sendiri kualitas penerapan GCG. Tahap selanjutnya, setelah menerima hasil kuesioner dari para partisipan, tim peratingan dari CGCG FEB UGM melakukan observasi, wawancara, dan teknik-teknik lainnya untuk mengumpulkan bukti serta mengkonfirmasi hasil yang diperoleh dari *self-assessment*. Pada tahap kelima, tim CGCG FEB UGM akan menganalisis data yang terkumpul dan selanjutnya mengirimkan hasil analisis ke pihak Bank BTN untuk dicermati. Berdasarkan umpan-balik yang diterima dari Bank BTN, maka CGCG FEB UGM melakukan analisis dan penyimpulan akhir.

Setelah melakukan *assessment* secara independen dan obyektif, CGCG FEB UGM menyimpulkan bahwa kualitas penerapan GCG Bank BTN untuk periode 2010 adalah dalam kategori BAIK (*GOOD*). Skor kualitas penerapan GCG Bank BTN adalah 945.96 (Sembilan ratus empat puluh lima koma sembilan enam) dari nilai maksimal 1.000 (seribu) sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 4.c.2 di atas. Menurut CGCG FEB UGM, sebagian besar program GCG sudah dilakukan dengan baik oleh Bank BTN.

an advisory role; Assurance is the main function of auditors, and Stakeholders that mainly involve in monitoring.

The assessment phases were designed to enable contribution of those concerned in accordance with their respective capability and function in the assessment. Data were gathered through observations, surveys, interviews and study of documents. Furthermore, the collected data were analyzed by specifically designed application software using a systematic ratings model.

Questionnaire was used in the initial stage of the assessment, the questions of which were specially designed to be related to GCG practices in the banking industry. Bank BTN's representatives were later engaged in a discussion, in which their suggestions and comments were sought to make the ratings instrument more comprehensive and closer to Bank BTN's characteristics. Five types of questionnaire were designed to meet participants' unique characteristics. The phase when the CGCG FEB UGM handed out questionnaire forms to each of the participants is called the self-assessment phase, in which participants give their own judgment of the Bank's GCG practices. Once the filled-in questionnaire forms were returned and collected, the CGCG FEB UGM ratings team conducted observations, interviews and other techniques to gather evidence and confirm the questionnaire results. In the fifth phase, the CGCG FEB UGM team analyzed the collected data and sent them to Bank BTN's representatives for further examination. The team's final conclusion was made in consideration of the suggestions and inputs provided by Bank BTN.

The independent and objective assessment of Bank BTN's GCG implementations by the CGCG FEB UGM resulted in score of 945.96 of total of 1,000 (one thousand) as outlined in point 4.c.2 above, giving the Bank's GCG practices a "GOOD" rating. According to the CGCG FEB UGM, most of Bank BTN's GCG practices were excellently accomplished.

LAPORAN TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank BTN telah diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2010, yang telah menghasilkan keputusan sebagai berikut:

Keputusan Agenda Pertama

- a) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, yang berafiliasi dengan Ernst & Young sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. RPC-11516, tanggal 7 April 2010.
- b) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan No. LHA-1813/PW30/4/2010, tanggal 12 Maret 2010.
- c) Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, sepanjang:
 - Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - Tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

Corporate Governance Structures

The General Meeting of Shareholders (RUPS)

Bank BTN's Annual General Meeting of Shareholders held on 19 May, 2010 resulted in the following decisions:

First Agenda Decision

- a) Approval of the Bank's Annual Report including the Board of Commissioners' Oversight Report for the fiscal year ended on December 31 2009 and verification of the Bank's audited Financial Statement for the fiscal year ended on December 31 2009. The Bank's Financial Statement was audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, which is affiliated with Ernst & Young as stated in the report No. RPC-11516 on April 7, 2010.
- b) Approval and verification of the Bank's Annual Report on the Partnership and Community Development Program for the fiscal year ended on December 2009 audited by the Jakarta II-based Supreme Audit and Development Agency as stated in the report No. LHA-1813/PW30/4/2010 on March 12, 2010.
- c) Granting *acquit et decharge* to the Board of Directors for their managerial activities and to the Board of Commissioners for their supervisory activities for the fiscal year ended on December 2009, including their management and supervision of the Partnership and Community Development Program, so long as the activities were:
 - Not in violation of laws and regulations; and
 - Included in the Bank's Annual Report and Financial Statement as well as in the Annual Report on the Partnership and Community Development Program for the fiscal year ended on December 31, 2009.

Keputusan Agenda Kedua

Menyetujui dan menetapkan laba bersih Perseroan periode 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp 292.288.237.805 (dua ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah) (selanjutnya disebut Laba Bersih Perseroan) sebagai berikut :

- a) Sebesar 45,00% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 131.529.707.012 (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh ribu dua belas rupiah) ditetapkan sebagai Dividen tunai kepada 8.714.057.000 (delapan miliar tujuh ratus empat belas juta lima puluh tujuh ribu) saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Khusus dividen bagian Pemerintah akan disetorkan ke Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) No.502.000.000 di Bank Indonesia.
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan pembayaran Dividen Tunai dan menetapkan tatacara pembayaran dividen tunai serta jadwal pembayaran Dividen Tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek, atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran Dividen Tunai dimaksud diumumkan dalam 2 (dua) Surat Kabar harian dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek.
- b) Sebesar 2,00% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 5.845.764.756 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dialokasikan untuk Program Kemitraan.
- c) Sebesar 2,00% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 5.845.764.756 (lima miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dialokasikan untuk Program Bina Lingkungan.
- d) Sebesar 45,85% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 134.000.000.000,- (seratus tiga puluh empat miliar rupiah) dialokasikan untuk Cadangan Tujuan atau Cadangan yang telah ditentukan penggunaannya.

Second Agenda Decision

Approval and verification of the Bank's net earnings that reached Rp 292,288,237,805 (two hundred ninety-two billion two hundred eighty-eight million two hundred and thirty-seven thousand eight hundred and five rupiah) (hereinafter referred to as the Bank's Net Earnings). The details of which are as follows:

- a) Around 45.00% of the Bank's Net Earnings or around Rp 131.529.707.012 (one hundred thirty-one billion five hundred twenty-nine million seven hundred and seven thousand and twelve rupiah) were earmarked as cash Dividends for 8.714.057.000 saham (eight billion seven hundred fourteen million fifty seven thousand shares), which were arranged as follows:
 - The dividend paid to the government is to be deposited in the State General Treasury Account number 502.000.000 at Bank Indonesia.
 - Authorizing the Bank's Board of Directors to administer the payment of Cash Dividends, Providing guidelines for and schedules of cash dividend Payment, including a meeting with the market authority and other related agencies to seek approval of the cash dividend payment date. The cash dividend payment was announced in two National Dailies in compliance with BEI regulations.
- b) Around 2.00% of the Bank's Net Earnings or around Rp 5.845.764.756 (five billion eight hundred forty five million seven hundred sixty-four thousand seven hundred and fifty-six rupiah) were earmarked for the Partnership Program.
- c) Around 2.00 percent of the Bank's Net Earnings or around Rp 5.845.764.756 (five billion eight hundred and five million seven hundred and sixty-four thousand seven hundred and six rupiah) were earmarked for the Community Development Program.
- d) Around 45.85 percent of the Bank's Net Earnings or around Rp 134.000.000.000,- (one hundred and thirty-four billion rupiah) were earmarked for an Appropriated Reserve or a Reserve set aside for a specific purpose.

e) Sebesar 5,15% dari Laba Bersih Perseroan atau sebesar Rp 15.067.001.281,- (lima belas miliar enam puluh tujuh juta seribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai Dana Cadangan Umum untuk memenuhi ketentuan pasal 70 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Agenda Ketiga

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Auditor yang akan mengaudit Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik dan Auditor dimaksud.

Keputusan Agenda Keempat

- a) Menetapkan gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2010 tidak mengalami kenaikan dan oleh karenanya besarnya gaji dan honorarium tersebut tetap sama dengan besarnya gaji dan honorarium yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diadakan pada tanggal 8 Mei 2009.
- b) Tantiem sebesar 3,25% (tiga koma dua puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 yang telah dianggarkan sebelumnya, untuk dibayarkan kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2009. Porsi tantiem untuk Wakil Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama dan Komisaris masing-masing sebesar 95%, 90%, 50% dan 45% dari tantiem Direktur Utama.
- c) Pajak atas tantiem ditanggung penerima dan tidak boleh dibebankan kepada Perseroan.
- d) Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan fasilitas, tunjangan dan santunan purna jabatan bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan Perseroan. Mengenai honorarium, tantiem, fasilitas, tunjangan serta santunan purna jabatan Sekretaris

e) Around 5.15 percent of the Bank's Net Earnings or around Rp 15.067.001.281,- (fifteen billion sixty-seven million one thousand two hundred and eighty-one rupiah) were earmarked for a General Reserve in compliance with article 70 of the Law No. 40/2007 on Limited Liability Company.

Third Decision on the Agenda

Authorizing the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm for an audit of the Bank's Financial Statement and Auditors for an audit of the Bank's Annual Report on the Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year ended on 31 December, 2010, including audit fees and other related requirements.

Fourth Decision on the Agenda

- a) Salaries and honoraria of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners were set to remain the same as determined during the Bank's General Meeting of Shareholders on 8 May 2009.
- b) A bonus of 3.25 percent (three point twenty-five percent) of the Bank's Net Earnings for the 1 January 2009 to 31 December 2009 period was to be paid to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who held their posts in 2009. The bonuses granted to the Deputy President Director, Directors, the President Commissioner and Commissioners were 95 percent, 90 percent, 50 percent and 45 percent of that granted to the Presindet Director, respectively.
- c) Taxes on the bonuses were charged to the recipients, not the Bank.
- d) The Board of Commissioners was authorized with the arrangement of perquisites and functional allowances for retired members of the Board of Commissioners and the Board of Directors for 2010 onward as determined by the Bank's Annual General Meeting of Shareholders. Authority to decide honorarium, tantiem, facility, allowance as well as retirement benefits of Board of Commissioners' Secretary mandated to Board of Commissioners. Amount

Dewan Komisaris dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Besaran honorarium, tantiem, fasilitas, tunjangan serta santunan purna jabatan Sekretaris Dewan Komisaris adalah sebagaimana yang berlaku selama ini.

Keputusan Agenda Kelima

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2008 tanggal 03 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu acuan bagi Direksi dalam menetapkan pengadaan Barang dan Jasa Perseroan.

Keputusan Agenda Keenam

- a) Menyetujui kenaikan manfaat pensiun bulanan bagi peserta Dana Pensiun Perseroan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terhitung mulai 1 Januari 2010.
- b) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan perubahan Peraturan Dana Pensiun Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pernyataan Pendiri Dana Pensiun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) No. 35/DIR/DSDM/VIII/2009, tanggal 31 Agustus 2009 dalam rangka kenaikan manfaat pensiun dan menyetujui Pernyataan Tertulis Pendiri yang berkaitan dengan perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut dan hal-hal lain yang dipersyaratkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.

Keputusan Agenda Ketujuh

Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh dalam rangka Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Pegawai (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*) serta melakukan perubahan persyaratan peserta Program MESOP Tahap 2 dan Tahap 3.

Keputusan Agenda Kedelapan

- a) Menyetujui dan mengangkat Sdr. Deswandhy Agusman sebagai Komisaris Independen. Pengangkatan yang bersangkutan berlaku

of honorarium, tantiem, facility, allowance as well as retirement benefits of Board of Commissioners' Secretary as applicable recently.

Fifth Decision on the Agenda

Affirming the Bank's compliance with the SOE Ministerial Regulation No. PER-05/MBU/2008 on General Guidelines to Goods and Services Procurement by State-Owned Enterprises, to which the Board of Directors refer in the Bank's goods and services procurement.

Sixth Decision on the Agenda

- a) Approval of Rp 150 rise in the monthly payment of the Bank's Retirement Fund, effective on 1 January 2010.
- b) Authorizing the Bank's Board of Directors to revise the Bank's regulation on Retirement Fund as stipulated in the Statement of the Founders of Retirement Fund of PT Bank Tabungan Negara No. 35/DIR/DSDM/VIII/2009 issued on 31 August 2009 on the benefits of a rise in the Retirement Fund and gave approval of Written Statement of the Retirement Fund's Founders with regard to any adjustment to the regulation on Retirement Fund and other other related issues that are required by Law No. 11/1992 on Retirement Fund and Its Implementations.

Seventh Decision on the Agenda

Approval to authorize the Board of Commissioners to increase the Invested and Paid-in Capital with regard to the the Management and Employee Stock Option Plan/MESOP) and a revision to membership requirements of the MESOP Phase 2 and Phase 3.

Eighth Decision on the Agenda

- a) The appointment of Mr. Deswandhy Agusman as the Bank's Independent Commissioner. His appointment is subject to Bank Indonesia's

efektif setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (kelima) sejak pengangkatan.

- b) Memberikan kewenangan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan keputusan Rapat ini dengan akta tersendiri di hadapan Notaris dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Keputusan Agenda Kesembilan

Dalam Rapat telah dilaporkan:

- a) Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
- b) Pelaksanaan distribusi Hak Opsi pada Program MESOP Tahap 1

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melaksanakan tugas. Secara garis besar, tugas utama Dewan Komisaris di antaranya adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi serta memastikan Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

Komposisi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2010 terdiri dari 5 (lima) anggota dengan 3 (tiga) di antaranya sebagai Komisaris Independen yang berarti lebih dari 50% dari Komisaris yang ada. Dewan Komisaris Bank BTN mempunyai integritas dan kompetensi yang memadai sesuai dengan persyaratan *fit and proper test*. Adapun komposisi

approval based on the result of his Fit and Proper Test and is also subject to binding laws and regulations. His tenure of office will last until the end of the fifth Annual General Meeting of Shareholders.

- b) Authorizing and granting representational rights to the Board of Directors to make any necessary measure with regard to the decisions above, including – yet not limited – strengthening the decisions made during the meeting under the notary act as well as registering the Bank's directorial structure as referred to above in the Company Registration as stipulated in the Law No. 3/1982 on Required Company Registration.

Ninth Decision on the Agenda

Reported at the GMS as follows:

- a) Realization of IPO proceeds
- b) Implementation of Option Rights in MESOP Program series 1.

The Board of Commissioners

The Board of Commissioners are collectively responsible and accountable for their organizational function briefly, the Board of Commissioners are responsible for supervising the Board of Directors, providing suggestions and inputs to the Board of Directors and ensuring that GCG principles are fully implemented by the Bank. Each member of the Board of Commissioners, including the President Commissioner, is organizationally equal. The President Commissioner is responsible for coordinating activities of the Board of Commissioners.

The Structural Composition of the Board of Commissioners

As of 31 December 2010, the Board of Commissioners is comprised of five members, with independent commissioners being a majority with three members. The Board of Commissioners of Bank BTN is adequately competent and morally sound as required by the fit and proper test. The following table shows the structural composition of

Dewan Komisaris hingga 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

the Board of Commissioners as of December 31, 2010:

Jabatan Position	Nama Name
Komisaris Utama (Independen) President Commissioner (Independent)	Zaki Baridwan
Komisaris Commissioner	Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen Independent Commissioners	Subarjo Joyosumarto
Komisaris Commissioner	Gatot Mardiwasisito
Komisaris Independen (diangkat per Juli 2010) Independent Commissioner (appointed in July 2010)	Deswandhy Agusman

Independensi Dewan Komisaris

- a) Anggota Dewan Komisaris Bank BTN saat ini ada yang menduduki jabatan di instansi lain, Mulabasa Hutabarat yang menjabat sebagai Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK Kementerian Keuangan. Subarjo Joyosumarto (Komisaris Independen) menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia serta Gatot Mardiwasisito yang menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa I pada Kementerian BUMN.
- b) Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari beturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap bank dan kelompok usaha bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank. Selain itu dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

The Independency of the Board of Commissioners

- a) Three members of Bank BTN's Board of Commissioners are also executives in other governmental bodies. Mulabasa Hutabarat is Head of Pension Fund Office at the Bapepam-LK of the Finance Ministry. Subarjo Joyosumarto (Independent Commissioner) is Indonesian Banking Development Agency Managing Director, while Gatot Mardiwasisito is Deputy Assistant for Services Affairs at the Ministry of State-Owned Enterprises.
- b) Independent Commissioners are expected to induce a more objective working atmosphere by promoting fairness and equality among groups of interest including minority shareholders and stakeholders and are free of conflict of interest. In support of GCG implementations, the General Meeting of Shareholders determined the number of independent commissioners in the Bank's Board of Commissioners as stipulated by laws and regulations, whose role is to supervise banks and non-bank financial institutions. The PBI No. 8/14/PBI/2006 on the Implementation of Good Corporate Governance by Commercial Banks stipulates that independent commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have any financial, managerial, ownership and family relationships with the other Commissioners, Directors or controlling shareholders or any other relationships that are likely to have adverse impacts on their independency.

- c) PBI tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah Anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. Salah satu Komisaris Independen ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit. Saat ini 3 (tiga) orang dari 5 (lima) anggota Komisaris Bank BTN yang merupakan Komisaris Independen, yaitu Zaki Baridwan Komisaris Utama sekaligus adalah Ketua Komite Audit dan Subarjo Joyosumarto sekaligus Ketua Komite Pemantau Risiko serta Deswandhy Agusman sekaligus Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (Diangkat menjadi anggota Komisaris pada bulan Juli 2010).
- c) The PBI also requires that at least 50 percent of the total members of the Board of Commissioners are independent commissioners, with one of them being appointed as Chairman of the Audit Committee. Three of the five members on Bank BTN's Board of Commissioners are independent commissioners, namely Zaki Baridwan, President Commissioner and Head of the Audit Committee, Subarjo Joyosumarto, Head of the Risk Monitoring Committee and Deswandhy Agusman, Head of Remuneration and Nomination Committee (was appointed as member of the Board of Commissioners on July 2010).
- d) Dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan kewajiban, Dewan Komisaris:
- Bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.
 - Sebagai bagian dari organ pengawasan, anggota Komisaris memiliki perhatian dan komitmen penuh dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk itu, anggota Komisaris Bank harus memiliki pengetahuan, kemampuan, komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai dan integritas yang tinggi, serta telah memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - ✓ Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - ✓ Hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
 - ✓ Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan, Badan Usaha Milik Negara, Badan usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d) The Board of Commissioners is responsible for:
- Taking independent measures, implying that no conflict of interest is involved in its function, in the way it relates to other members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors.
 - As part of a supervisory body, the members of the Board of Commissioners are committed to fulfilling their role. Apart from being there when needed, well-informed, resourceful and morally sound, members of the Board of Commissioners are expected to meet the criteria:
 - ✓ The Board of Commissioners are related, both financially and family, with the members of the Board of Directors and the Bank's Controlling Shareholders.
 - ✓ Or any other relationship that is likely to hamper its independency.
 - ✓ The Bank's Board of Commissioners is not allowed to be part of Boards of Commissioners or Directors or Executive Officials at more than 1 (one) non-bank institutions, State-Owned Enterprises, Regional Governments-Owned Enterprises, Private Companies and other official duties as stipulated in the Bank's Article of Association and effectual laws and regulations.
 - ✓ Passing the Bank Indonesia-required Fit and Proper Test.

- ✓ Telah lulus uji kelayakan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang uji kelayakan (Fit and Proper Test).
- ✓ Diusulkan oleh Pemegang Saham dan dipilih dalam RUPS.
- ✓ Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
 - Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- ✓ Recommended by Shareholders and appointed during the RUPS.
- ✓ Five years prior to his/her appointment:
 - No court ruling declaring him/her bankrupt
 - No part of a Board of Directors or Board of Commissioners or Supervisory Board responsible for a company's bankruptcy.
 - Never convicted of fraud with losses to the State, State-Owned Enterprises, or any financial institution.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris

- a) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Bank BTN oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Bank BTN dan sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis Bank BTN.
- b) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan, ketentuan Bank Indonesia dan/atau keputusan RUPS, diantaranya adalah:
 - Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank BTN (kebijakan kepengurusan oleh Direksi).
 - Mengawasi efektivitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Bank BTN.
 - Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko.
 - Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.
 - Memantau kepatuhan Bank BTN terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya.

The Board of Commissioners is responsible for:

- a) Supervising management policies, Bank BTN's operations by the Board of Directors, including supervision of Bank BTN's Long-Term Plan, Annual Business Plan and Budget (RKAP), Article of Association and RUPS Policies, laws and regulations, which are conducted in the interest of the Bank BTN and in line with the Bank BTN's business objectives.
- b) The following are responsibilities assigned to the Board of Commissioners in compliance with the Bank BTN's Article of Association, laws and Bank Indonesia's regulations and/or the RUPS:
 - Supervising and counseling the Board of Directors in the latter's management operations and policies.
 - Supervising the efficacy of GCG implementations across the Bank's organizational levels.
 - Supervising the implementation of risk management
 - Monitoring and evaluating the performance of the Board of Directors
 - Monitoring the Bank BTN's compliance with Bank Indonesia's regulations and effective laws and regulations and the Bank's commitment to Bank Indonesia and other related parties.

- Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal.
- Menyusun pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.
- Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.
- Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris kepada stakeholders.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Bank BTN terus proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tentunya mengacu pada implementasi atas rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris terhadap Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk. Selama tahun 2010 Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi, antara lain:

- Memberikan rekomendasi atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Bank BTN tahun 2010 untuk disahkan dalam RUPS
- Memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank BTN tahun 2010 - 2012.
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas penerbitan Obligasi XIV.
- Meminta Direksi agar terus meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi internal kontrol.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi terhadap pemberian kredit yang memiliki risiko tinggi dan minta kepada Direksi agar memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*).

- Directing, monitoring and evaluating the effectuation of the Long-Term Plan (RJP), the Bank's Business Plan (RBB) and the Bank's Work Plan and Budget.
- Examining and considering the development of use of information technology.
- Recommending External Auditors for the RUPS to approve and monitoring the External Auditors' assignment.
- Laying down job description for each member of the Board of Commissioners in accordance with their area of expertise and experience.
- Drafting the Board of Commissioners' annual work plan and performance target and review mechanisms.
- Developing information sharing mechanisms from the Board of Commissioners to stakeholders.
- Reporting the performance of the Board of Commissioners to the RUPS.

Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

As a part of Board of Commissioner's duty and responsibility, Bank BTN Supervises Board of Directors' performance effectively. The supervision is in accordance with implementation or recommendation given by Board of Commissioners to Board of Directors as well as through the committees. Through out 2010, Board of Commissioners gave following recommendation:

- Providing recommendation on Bank BTN's 2010 Work Plan and Corporate Budget for the RUPS to approve.
- Providing recommendation on Bank BTN's 2010 - 2012 Bank Business Plan.
- Providing the Board of Directors with recommendation on the XIV Bond issue.
- Calling on the Board of Directors to continue improving external control.
- Providing the Board of Directors with recommendation on high-risk credit facilities and reminding them of the prudence principles.

- Agar memperhatikan cabang-cabang yang mempunyai NPL tinggi dan berupaya lebih progresif untuk memperbaiki NPL sesuai target pada RKAP dan RBB.
- Menyetujui Direksi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan bagi karyawan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian.
- Memberikan arahan dalam rangka penyempurnaan penyusunan RKAP yang akan datang.
- Memberikan persetujuan atas RKAP tahun 2011 dan rekomendasi RBB untuk tahun 2011 - 2013.
- Merekomendasikan agar realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dijadikan *Key Performance Indicator* (KPI) Direksi.
- Menekankan agar semua jajaran Bank BTN taat dan disiplin terhadap peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan kewajiban laporan kepada BI agar tepat waktu sehingga tidak dikenakan denda dari Bank Indonesia.
- Meminta kepada Direksi dan semua jajaran agar segera menyelesaikan semua temuan-temuan yang ada, baik temuan BPK-RI, BI, Auditor Eksternal (KAP) maupun temuan Auditor Internal (IAD).
- Meminta kepada Direksi dan semua jajaran Bank BTN Direksi agar memperhatikan dan menekan BOPO yang tinggi.
- Mengoptimalkan keberadaan Kantor Cabang baru, sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berbiaya murah, yaitu giro dan tabungan akan meningkat.
- Mengoptimalkan *fee based income*, antara lain dengan penerbitan Kartu Kredit, dan harus dihitung antara *cost* dan *benefit*.
- Keeping an eye on branches with high NPLs and progressively reducing the NPLs to a level targeted in the RKAP and RBB.
- Giving approval of the Board of Directors' initiative to provide education for employees to broaden their knowledge and enhance their skills.
- Providing directions to improve the drafting of future RKAP.
- Approval of the 2011 RKAP and recommendation on the 2011 - 2013 RBB.
- Recommending that the Loans for the micro-, small and medium-scale enterprise (MSME) sector (KUR) be set as the Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors.
- Promoting compliance among Bank BTN's employees of all organizational levels with laws and regulations and asserting early report to BI to prevent fines.
- Encouraging the Board of Directors and other executives to attend immediately to any finding of irregularities by the Supreme Audit Agency, BI, External Auditors and Internal Auditors.
- Encouraging the Bank's Board of Directors and employees across organizational levels to keep BOPO at an agreeable level.
- Optimizing the role played by the Bank's branches to increase cost-efficient third-party funds, such as clearing and savings accounts.
- Optimizing fee based income, including issuing credit cards, while considering its costs and benefits.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran dasar Perseroan, Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dan dalam rapat tersebut, Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. Rapat Dewan komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Dewan Komisaris dan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju.

The Frequency of Meetings and Attendance Rate of the Board of Commissioners

As stipulated in the Bank's Article of Association, the Meeting of the Board of Commissioners is held once a month, or more where necessary and that the Board of Directors is allowed to attend the meeting. Any decision taken during the meeting that is attended by more than half of the members of the Board of Commissioners is legally valid and binding. The decisions taken during the Meeting of the Board of Commissioners are legally binding for all members of the Board of Committee and that the decisions are made in the spirit of consultation in the best interest of all. When the Board of Commissioners is in disagreement with regard to a decision, a vote will be taken.

Adapun tingkat kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Komisaris dalam tahun 2010 sebagai berikut:

The following is the attendance rate of the members of the Board of Commissioners in the Meetings of the Board of Commissioners for 2010:

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Zaki Baridwan	22	100
Gatot Mardiwasiso	22	100
Mulabasa Hutabarat	22	100
Subarjo Joyosumarto	22	100
Deswandhy Agusman (mulai bertugas per Juli 2010) (appointed in July 2010)	9	41

Pelatihan Komisaris

Bank BTN senantiasa melakukan pengembangan kompetensi bagi seluruh jajarannya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, selama Tahun 2010, anggota Dewan Komisaris Bank BTN telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar antara lain:

The Training of the Board of Commissioners

Bank BTN is committed to develop the competency of the Bank's employees. The following is the list of the training programs, workshops, conferences, seminars and other competency-developing programs that the members of the Bank's Board of Commissioners attended for 2010.

Daftar Kehadiran The List of The Training Programs

Zaki Baridwan	<ul style="list-style-type: none"> Seminar Senior Management Risk Summit 2010 – Bali, Indonesia Executive Risk Management Refresher Program – Paris, Perancis Global Islamic Finance Forum – Kuala Lumpur, Malaysia
Mulabasa Hutabarat	<ul style="list-style-type: none"> Seminar Senior Management Risk Summit 2010 – Bali, Indonesia
Subarjo Joyosumarto	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Panel Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau dari Aspek Hukum – Jakarta, Indonesia Seminar Senior Management Risk Summit 2010 – Bali, Indonesia Seminar Sharpening Leadership for Senior Executive – Jakarta, Indonesia Global Islamic Finance Forum – Kuala Lumpur, Malaysia
Gatot Mardiwasiso	<ul style="list-style-type: none"> Executive Risk Management Refresher Program – Paris, Perancis Global Islamic Finance Forum – Kuala Lumpur, Malaysia Diskusi Panel Pertanggungjawaban Kebijakan Ditinjau dari Aspek Hukum – Jakarta, Indonesia Seminar Sharpening Leadership for Senior Executive –Yogyakarta, Indonesia Seminar Senior Management Risk Summit 2010 – Bali, Indonesia International Conference Bara Risk Forum 2010 – Bali, Indonesia
Deswandhy Agusman (mulai bertugas per Juli 2010) (appointed in July 2010)	<ul style="list-style-type: none"> International Conference Bara Risk Forum 2010 – Bali, Indonesia

Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank BTN

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Financial and Familial Relationships among the Board of Commissioners and the Board of Directors and/or Bank BTN's Controlling Shareholders

There are no financial or familial relationships between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, other Directors or Bank BTN's Controlling Shareholders, as illustrated in the following table:

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with					
	Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris (BOC)												
Zaki Baridwan		X		X		X		X		X		X
Gatot Mardiwastito		X		X		X		X		X		X
Mulabasa Hutabarat		X		X		X		X		X		X
Subarjo Joyosumarto		X		X		X		X		X		X
Deswandhy Agusman		X		X		X		X		X		X
Direksi (BOD)												
Iqbal Latanro		X		X		X		X		X		X
Evi Firmansyah		X		X		X		X		X		X
Sunarwa		X		X		X		X		X		X
Saut Pardede		X		X		X		X		X		X
Iman Alvian Zahiruddin		X		X		X		X		X		X
Purwadi		X		X		X		X		X		X

Prosedur Penetapan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris

Mulai tahun 2010, prosedur penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris akan dilakukan sebagai berikut:

- Dewan Komisaris meminta Komite Remunerasi dan Nominasi untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
- Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
- Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris, remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.
- Dewan Komisaris membahas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
- RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris.

Remuneration Procedure of the Members of the Board of Commissioners

Since 2010, remuneration procedures of the members of the Board of Commissioners are as follows:

- The Board of Commissioners requests the Remuneration and Nomination Committee to launch a remuneration study for the members of the Board of Commissioners.
- The Remuneration and Nomination Committee makes a remuneration recommendation for the members of the Board of Commissioners.
- The Remuneration and Nomination Committee provides the Board of Commissioners with a recommendation on remuneration for the members of the Board of Commissioners.
- The Board of Commissioners holds a discussion on the Remuneration and Nomination Committee's recommendation.
- The Board of Commissioners provides the RUPS with a remuneration recommendation for the members of Board of Commissioners.
- The RUPS determines remuneration for the members of Board of Commissioners.

Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Mulai tahun 2010, prosedur penetapan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan dilakukan sebagai berikut:

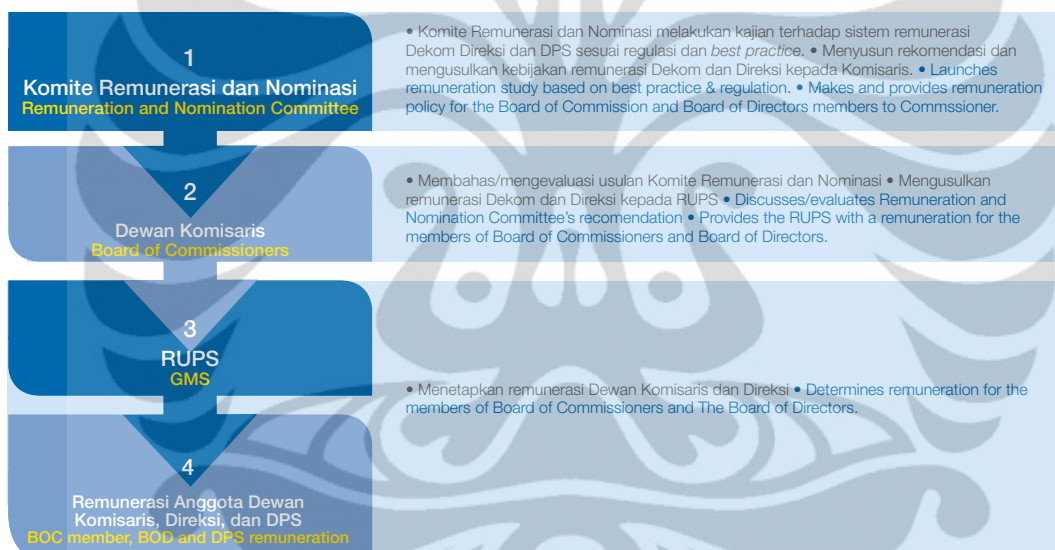
Board of Commissioners and Board of Directors' Remuneration Determination

Board of Commissioners and Board of Directors' Remuneration Procedure

As of 2010, determination procedure of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors was conducted as follows:

Bagan Prosedur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

The Chart of Procedure of Remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors



Remunerasi Komisaris dan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

- Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank adalah: gaji dan bonus/tantiem.
- Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah:

The Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The following are remuneration and perquisite packages/policies of the Board of Commissioners and the Board of Directors:

- The remuneration and perquisite packages/policies of the Board of Commissioners and the Board of Directors determined during the Bank's General Meeting of Shareholders are comprised of salaries and bonuses.
- The following are types of remuneration and perquisites extended to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, including the number of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors along with the number of remuneration and perquisite packages/policies:



Tabel Remunerasi Fasilitas Lain
Table of Remuneration and Perquisites

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and other Facilities	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun Amount Received 1 Year			
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
	Orang Person	Rp Juta Rp Million	Orang Person	Rp Juta Rp Million
1. Remunerasi (gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi)* Remuneration (salaries, leave allowance, routine allowance, tantiem, health and communication benefit)*	5	9.854	6	29.738
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya*) yang: Other facilities in natura form (residence, transportation, health insurance and many more*) which is				
a. Dapat dimiliki a. can be owned	-	-	-	-
b. Tidak dapat dimiliki b. can not be owned	5	1.075	6	3.984
Total		10.929		33.722

Keterangan:

- Add 1 : Gaji, Tantiem, Tunjangan Cuti, Tunjangan Pajak Penghasilan, Uang Sandang, Tunjangan Hari Raya dan Premi Santunan Purna Jabatan
- Add 2 : - Direksi mendapat fasilitas perumahan, transportasi dan kesehatan
- Komisaris mendapat fasilitas transportasi dan kesehatan

Note:

- Add 1: Salaries, Bonuses, Leave Benefits, Income Tax Benefits, Clothing Allowances, Religious Holiday Benefits and Retirement Benefits
- Add 2: - Directors receive such perquisites as housing facilities, transportation allowances and healthcare support
- Commissioners receive transportation and healthcare facilities

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

The following is annual remuneration grouped according to level of income:

Tabel Remunerasi Kelompok
Table of Group Remuneration

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 tahun Amount of Remuneration per Person in 1 Year	Jumlah Direksi Number of BOD	Jumlah Komisaris Number of BOC
Di atas Rp 2 miliar Above Rp 2 billion	6	4
Di atas Rp 1 milyar s.d Rp 2 miliar Above Rp 1 billion to Rp 2 billion	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar Above Rp 500 million to Rp 1 billion	-	1
Rp 500 juta ke bawah Under Rp 500 million	-	-

Direksi

Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Perseroan, Direksi Bank BTN bertugas mengelola Perseroan, memelihara dan mengurus aset Perseroan serta mewakili Perseroan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi bertugas dan bertanggung-jawab secara kolegal dalam mengelola Bank BTN agar *value driver* berfungsi maksimal sehingga profitabilitas operasional naik dan memberikan hasil akhir berupa peningkatan nilai perusahaan secara berkesinambungan. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama setara, dengan tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Direksi dapat mengambil keputusan, termasuk dalam rapat Direksi, dan melaksanakan keputusan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, namun demikian tanggung jawab kolegal tetap berlaku. Tindakan yang dilakukan oleh anggota Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh rapat Direksi.

Komposisi

Jumlah anggota Direksi Bank BTN adalah 6 (enam) orang, dengan komposisi sebagai berikut:

Direktur Utama President Director	Iqbal Latanro
Wakil Direktur Utama Vice President Director	Evi Firmansyah
Direktur <i>Risk, Compliance dan Human Capital</i> Risk, Compliance and Human Capital Director	Sunarwa
Direktur <i>Financial, Strategic dan Treasury</i> Financial, Strategic and Treasury Director	Saut Pardede
Direktur <i>Mortgage dan Consumer Banking</i> Mortgage and Consumer Banking Director	Irman Alvian Zahiruddin
Direktur <i>Housing dan Commercial Banking</i> Housing and Commercial Banking Director	Purwadi

Independensi Direksi

- a) Direksi senantiasa bertindak independen, dalam arti tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris.

The Board of Directors

As stipulated in Bank BTN's Article of Association, The Board of Directors of Bank BTN is responsible for managing the Bank BTN's assets and represent the Bank BTN in court and out-of-court affairs. The Board of Directors are colegially responsible for managing Bank BTN and maximizing value drivers that lead to higher profitability and sustainable growth in corporate values. While the President Director is responsible for coordinating Directors, the President Director and the Directors are organizationally equal. The Board of Directors have the right to make decisions, including the decisions taken during the Board's meetings, and enforce the decisions according to the duties and capacities of each member of the Board of Directors, while the collegial responsibility remains the same. Prior to approval by the Meeting of the Board of Directors, each member of the Board of Directors is responsible for any decision he or she made.

Composition

The following are the composition of Bank BTN's six members of the Board of Directors:

Independence of the Board of Directors

- a) The Board of Directors is independent in its actions. This implies that no conflict of interest that may hamper its duties is involved, including in the way it relates internally and to the Board of Commissioners.

- b) Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- c) Direksi tidak memegang jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Bank BTN, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank BTN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- d) Direksi tidak memiliki saham 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank BTN, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan atau perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- e) Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan GCG bagi Bank Umum.
- f) Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi
- g) Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya:
- Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau BUMN dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- b) The Board of Directors is not related, both financially and family, with the members of the Board of Commissioners and Bank BTN's Controlling Shareholders or any other relationships that may impede the Board from accomplishing its duties independently.
- c) Members of the Board of Directors are not holding President Director or Director posts in State-Owned Enterprises, Regional Governments-Owned Enterprises and privately-held companies and any other functional positions in government agencies, both central and regional, as stipulated in Bank BTN's Article of Association and other effectual laws and re regulations.
- d) Board of Directors does not own a 5 percent stake or more in paid-in capital in Bank BTN, other banks, non-bank financial institutions and any other companies, individually or in group, domestically or overseas.
- e) The Board of Directors is not related, both financially and family, with the members of the Board of Commissioners and Bank BTN's Controlling Shareholders or any other relationships that may impede the Board from accomplishing its duties independently as stipulated in GCG guidelines for Public Banks.
- f) The Board of Directors must not delegate any of its duties, when such delegation may alter its function.
- g) Five years prior to its appointment:
- No court ruling declaring him/her bankrupt
 - No part of a Board of Directors or Board of Commissioners or Supervisory Board responsible for a company's bankruptcy.
 - Never convicted of fraud with losses to the State, State-Owned Enterprises, or any financial institution.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Secara khusus, tugas Direksi tersebut mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Memimpin dan mengurus Bank BTN sesuai kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Mewujudkan pelaksanaan RJP, RBB dan RKAP, termasuk pencapaian target keuangan dan non keuangan.
- c) Mewujudkan pelaksanaan fungsi pengendalian internal yang meliputi, Audit Internal, Audit eksternal, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Bank.
- d) Membangun dan memanfaatkan teknologi informasi.
- e) Menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, seperti RJP, RBB, RKAP, Manajemen Informasi Sistem (MIS), suksesi/mutasi/promosi pejabat eksekutif, program pengembangan *human capital*, pertanggungjawaban manajemen risiko, dan kinerja pemanfaatan teknologi informasi.
- f) Menyelenggarakan RUPS dan membuat risalah RUPS.
- g) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Intern, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- h) Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank BTN pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- i) Mengungkapkan kebijakan Bank BTN yang bersifat strategis di bidang human capital kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.
- j) Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank BTN.
- k) Mempertanggungjawabkan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada pemegang saham melalui RUPS.
- l) Memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan nilai-nilai etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus, tugas Direktur Kepatuhan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Specifically, the duties of the Board of Directors include:

- a) Managing Bank BTN's in the capacity stipulated in the Bank's Article of Association and effectual laws and regulations.
- b) Ensuring the implementation of RJP, RBB and RKAP, including meeting the financial and non-financial targets.
- c) Ensuring the implementation of internal control that includes Internal Audit, External Audit, Risk Management and the Bank BTN's Compliance.
- d) Developing and employing information technology.
- e) Providing the Board of Commissioners with complete, accurate, up-to-date and timely information with regard to RJP, RBB, RKAP, System Information Management, replacement/mutation/promotion of executives, human capital development programs, risk management accountability and IT use performance.
- f) Holding the RUPS and taking minutes of the RUPS.
- g) Following up audit findings and recommendation from the Internal Audit Division, External Auditors and results of Bank Indonesia's supervision as well as findings by other authorities.
- h) Ensuring the implementation of GCG principles in each of the Bank BTN's operations across Bank BTN's organizational structure.
- i) Communicating the Bank BTN's strategic policies on human capital to lower level employees using media that employees have easy access to.
- j) Being fully responsible for the Bank BTN's managerial operations.
- k) Being accountable by reporting his duties and responsibilities to the shareholders through the RUPS.
- l) Attending to shareholders' interests in accordance with ethical values and effectual laws and regulations.

Specifically, the duties of the Compliance Director include:

- a) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank BTN telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- b) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- c) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank BTN terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank BTN kepada Bank Indonesia dan pihak ketiga lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab setiap anggota Direksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dapat menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi. Tugas dan wewenang Direksi dalam melakukan supervisi atas divisi adalah:

- a) Melakukan pembinaan dan pengawasan atas Divisi yang berada di bawah supervisinya, terutama berkenaan dengan pelaksanaan keputusan Direksi.
- b) Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing Direktur dapat memberikan keputusan atas permasalahan yang diajukan oleh Divisi yang berada di bawah supervisinya.
- c) Mengambil tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka peningkatan kinerja Bank BTN dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank.
- d) Menyampaikan hasil dan tindakan-tindakan dan langkah-langkah di atas kepada Direktur Utama, baik secara langsung maupun dalam forum Rapat Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diantara anggota Direksi, ditetapkan pembagian supervisi Direktur Utama atas Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Kantor Cabang, sebagai berikut:

- a) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank BTN dan melakukan supervisi atas *Internal Audit Division*, *Corporate Secretary Division*, dan *Change Management Office*.
- b) Wakil Direktur Utama sebagai Operation Director dan melakukan supervisi atas *Information dan Communication Technology Division*, *Logistic dan Network Division*, dan *Operation dan Bussiness Support Division*.

- a) Determining necessary measures to ensure that Bank BTN is fully compliant with all of Bank Indonesia's regulations and effectual laws and regulations as part of the implementation of prudence peinciples.
- b) Monitoring and preventing the Bank BTN from engaging in activities that violate effectual laws and regulations.
- c) Monitoring and maintaining the Bank BTN's compliance with the agreements and commitments that Bank BTN has made with Bank Indonesia and third parties.

The Bank's Article of Association stipulates that each member of the Board of Directors has the right to negotiate the job description of his or her counterpart. The Board of Directors' supervisory duties and authority toward the Bank BTN's divisions include:

- a) Supervising and counseling the divisions upon which the Board of Directors has authority, primarily with regard to the implementation of the Board of Directors' policies.
- b) Each Director, in his or her capacity, can provide a solution to issues raised by a division under their supervision.
- c) Taking necessary measures that are in accordance with their capacity and allowed by the Bank's Article of Association to improve the Bank's performance.
- d) Reporting the measures and the results to the President Director, directly or during the Meetings of the Board of Directors.

The following is job description of the Board of Directors with regard to its supervisory role toward the Bank's divisions and branches.

- a) The President Director has the right and authority to supervise the Internal Audit Division, the Corporate Secretary Division and the Change Management Office on behalf of the Board of Directors and as a representative of Bank BTN.
- b) Vice President Director as Operation Director supervises Information and Communication Technology Division, Logistic and Network Division, and Operation and Bussiness Support Division.

- c) Direktur *Housing and Comercial Banking*, melakukan supervisi atas *Housing dan Comercial Lending Division, Comercial Funding dan Services Division, dan Sharia Division*.
- d) Direktur *Risk, Compliance dan Human Capital*, melakukan supervisi atas *Compliance Desk, Risk Management Division, Legal dan Loan Documen Desk dan Human Capital Division*.
- e) Direktur *Mortgage dan Consumer Banking*, melakukan supervisi atas *Mortgage dan Consumer Lending Division, Consumer Funding dan Service Division, Card Business dan Electronic Banking Desk, Pos Office Alliance Desk dan Priority Banking dan Bancassurance Desk*.
- f) *Financial, Strategic dan Treasury Director*, melakukan supervisi atas *Planing dan Performance Management Division, Financial dan Accounting Division, Treasury Division, dan Collection dan Workout Division*.

Dalam hal salah seorang anggota Direksi berhalangan, maka ditetapkan sebagai Direktur supervisi pengganti adalah dengan urutan, sebagai berikut:

- a) Jika *President Director* berhalangan, maka yang bertindak sebagai *Director* supevisi pengganti sesuai dengan urutan adalah *Vice President Director* atau anggota Direksi lain yang tertua dalam usia.
- b) Jika *Vice President Director* berhalangan dan yang bersangkutan tidak melakukan penunjukan kepada salah seorang anggota Direksi lainnya untuk bertindak sebagai *Director supervisi* pengganti, maka yang bertindak sebagai *Director* supervisi pengganti sesuai dengan urutan adalah *Housing dan Comercial Banking Director* atau *Mortgage dan Consumer Banking Director* atau *Financial, Strategic dan Treasury Director* atau *President Director*.
- c) Jika *Housing dan Comercial Banking Director* berhalangan dan yang bersangkutan tidak melakukan penunjukan kepada salah seorang anggota Direksi lainnya untuk bertindak sebagai *Director* supevisi pengganti, maka yang bertindak sebagai *Director* supevisi pengganti sesuai dengan urutan adalah *Mortgage dan Consumer Banking Director* atau *Financial, Strategic dan Treasury Director* atau *Vice President Director* atau *President Director*.

- c) *Housing and Comercial Banking Director* supervises *Housing and Comercial Lending Division, Comercial Funding and Services Division, and Sharia Division*.
- d) *Risk, Compliance and Human Capital Director* supervises *Compliance Desk, Risk Management Division, Legal and Loan Documen Desk and Human Capital Division*.
- e) *Mortgage and Consumer Director* supervises *Mortgage and Consumer Lending Division, Consumer Funding and Service Division, Card Business and Electronic Banking Desk, Pos Office Alliance Desk and Priority Banking and Bancassurance Desk*.
- f) *Financial, Strategic and Treasury Director* supervises *Planning and Performance Management Division, Financial and Accounting Division, Treasury Division, and Collection and Workout Division*.

When a Director is momentarily unavailable for official duties, his or her duties will be taken over by a replacement supervision Director, arranged as follows:

- a) When *President Director* is unavailable, *Vice President Director* or other Director who are by age the most senior is to become a replacement supervision Director on behalf of *President Director*.
- b) When *Vice President Director* is unavailable and he or she has yet to appoint any member of the Board of Directors as a replacement, then *Housing and Comercial Banking Director* or *Mortgage and Consumer Director* or *Financial, Strategic and Treasury Director* or *President Director* is to become the replacement supervision Director on behalf of *Vice President Director*, respectively.
- c) When *Housing and Comercial Banking Director* is unavailable and he or she has yet to appoint any member of the Board of Directors as a replacement, then *Mortgage and Consumer Director* or *Financial, Strategic and Treasury Director* or *Vice President Director* or *President Director* is to become the replacement supervision Director on behalf of *Housing and Comercial Banking Director*, respectively.

- d) Jika *Risk, Compliance* dan *Human Capital Director* berhalangan, maka yang bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti adalah *Vice President Director*, dengan ketentuan pada saat *Vice President Director* sedang bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti *Risk, Compliance* dan *Human Capital Director*, maka yang bersangkutan tidak boleh merangkap pula sebagai Direktur supervisi pengganti dari *President Director* dan jabatan *Vice President Director* sebagai supervisi Operation diserahkan kepada *Housing* dan *Comercial Banking Director*.
- e) Jika *Mortgage* dan *Consumer Banking Director* berhalangan dan yang bersangkutan tidak melakukan penunjukan kepada salah seorang anggota Direktur lainnya untuk bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti, maka yang bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti sesuai dengan urutan adalah *Financial, Strategic* dan *Treasury Director* atau *Housing* dan *Comercial Banking Director* atau *Vice President Director* atau *President Director*.
- f) Jika *Financial, Strategic* dan *Treasury Director* berhalangan dan yang bersangkutan tidak melakukan penunjukan kepada salah seorang anggota Direktur lainnya untuk bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti, maka yang bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti sesuai dengan urutan adalah *Housing* dan *Comercial Banking Director* atau *Mortgage* dan *Consumer Banking Director* atau *Vice President Director* atau *President Director*.
- g) *President Director* untuk kepentingan Bank BTN atas pertimbangannya sendiri dapat menetapkan Direktur supervisi pengganti lain yang tidak sama dengan ketentuan di atas.
- d) When *Risk, Compliance* and *Human Capital Director* is unavailable, then *Vice President Director* is to become the replacement supervision Director on behalf of *Risk, Compliance* and *Human Capital Director*. However, *Vice President Director* cannot concurrently become the replacement supervision Director for *Risk, Compliance* and *Human Capital Director* and *President Director* and that *Vice President Director's* function as *Supervision Operation Director* must be delegated to *Housing* and *Comercial Banking Director*.
- e) When *Mortgage* and *Consumer Director* is unavailable and he or she has yet to appoint any member of the Board of Directors as a replacement, then *Financial, Strategic* and *Treasury Director* or *Housing* and *Comercial Banking Director* or *Vice President Director* or *President Director* is to become the replacement supervision Director on behalf of *Housing* and *Comercial Banking Director*, respectively.
- f) When *Financial, Strategic* and *Treasury Director* he or she has yet to appoint any member of the Board of Directors as a replacement, then *Housing* and *Comercial Banking Director* or *Mortgage* and *Consumer Director* or *Vice President Director* or *President Director* is to become the replacement supervision Director on behalf of *Financial, Strategic* and *Treasury Director*, respectively.
- g) In the best interest of the Bank, however, *President Director* can appoint a replacement supervision Director other than the above arrangement.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi Bank BTN, selama tahun 2010 menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan dan/atau strategi yang dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi, di antaranya adalah:

The Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Throughout 2010, the Board of Directors of Bank BTN held as many as 95 (ninety-five) Board of Directors Meetings, in which a variety of issues and/or the Bank's management strategy are discussed. The following are issues and/or strategy discussed and decisions made during the the Board of Directors Meetings:

Bidang Kepengurusan, diantaranya:

- 1) Evaluasi kinerja Bank tahun 2009, penetapan RKAP 2011 dan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2011 - 2013
- 2) Implementasi PSAK 50/55
- 3) Pengembangan produk dan layanan baru (Tabungan, Kartu Kredit dan *Priority Banking*)
- 4) Pengembangan jaringan kantor (kantor kas)
- 5) Implementasi struktur organisasi baru untuk kantor cabang dan kantor pusat
- 6) Kebijakan penghimpunan dana melalui sekuritisasi KPR

Bidang Manajemen Risiko, diantaranya:

- 1) Pengembangan sistem manajemen risiko, meliputi: pengembangan budaya manajemen risiko, sosialisasi standard *operating procedure* (SOP) secara berkala melalui *Branch Risk Control Officer* (BRCO), pelaksanaan *operational risk self assessment*, pelaksanaan stress testing untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi kejadian risiko yang bersifat ekstrim (*catastrophy*).
- 2) Implementasi Basel II, meliputi: persiapan implementasi Basel II yang mengacu kepada *road map* yang disusun Bank Indonesia, melakukan persiapan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach*, melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional dan *Standardized Methods* untuk risiko pasar.
- 3) Penempatan *Division Risk Control Officer* (DRCO) dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO) sesuai dengan struktur organisasi Bank BTN. Per akhir Desember 2010, jumlah *Division Risk Control Officer* (DRCO) yang ditempatkan di Kantor Pusat ada 3 orang yaitu DRCO Risiko Pasar, DRCO Risiko Kredit dan DRCO Risiko Operasional. Sementara itu, jumlah *Branch Risk Control Officer* (BRCO) yang ditempatkan ada 42 orang di 42 Kantor Cabang dari 63 Kantor Cabang (per Desember 2010). Untuk beberapa Kantor Cabang yang belum ditempatkan BRCO, pemantauan pengelolaan risiko dilakukan oleh BRCO dari Kantor Cabang terdekat sebagai berikut:

On management Issues:

- 1) The Bank's 2009 performance evaluation, the 2011 RKAP and the 2011 - 2013 Bank Business Plan
- 2) Implementation of PSAK 50/55
- 3) Development of new products and services (Savings, Credit Card and Priority Banking)
- 4) Development of office network (cash services)
- 5) Implementation of new organizational structure for the Main Office and branch offices.
- 6) Fund raising policy through KPR bond issuance

Risk Management:

- 1) Development of a risk management system, which comprises the development of risk management culture, regular socialization of standard operating procedure (SOP) by Branch Risk Control Officer (BRCO), implementation of operational risk self assessment and implementation of stress testing to gauge the Bank's resilience in dealing with risk-related catastrophe.
- 2) Implementation of the Basel II that includes: preparing to implement the Basel II based on Bank Indonesia's roadmap, preparing to adopt the Standardized Approach to measure credit risks, calculating required minimum capital using the Basic Indicator Approach for operating risks and Standardized Methods for market risks.
- 3) Appointment and assignment of Division Risk Control Officer (DRCO) and Branch Risk Control Officer (BRCO) in accordance with the Bank's organizational structure. As of December 2010, there are three Division Risk Control Officers (DRCO) at the Main Office, namely Market Risk DRCO, Credit Risk DRCO and Operating Risk DRCO. Furthermore, there are 42 Branch Risk Control Officers (BRCO) at 42 branches, of a total of 63 branches (as of December 2010). For branches where DRCO is not yet available, risk management monitoring will be conducted by BRCOs from the nearest Branches as the table below shows.

Tabel Cabang**Table of Branches**

No	KC Penugasan Branch Offices Location	Tambahan Cakupan Wilayah Kerja Extended Work Area
1	BRCO KC Batam	KC Tanjung Pinang
2	BRCO KC Bandung	KC Cimahi
3	BRCO KC Cibubur	KC Harapan Indah
4	BRCO KC Jakarta Harmoni	KC Kebon Jeruk
5	BRCO KC Mataram	KC Kupang
6	BRCO KC Manado	KC Gorontalo dan KC Ternate
7	BRCO KC Makasar	KC Amboon dan KC Kendari
8	BRCO KC Malang	KC Jember
9	BRCO KC Palembang	KC Pangkal Pinang dan KC Jambi
10	BRCO KC Surabaya Pemuda	KC Surabaya Darmo
11	BRCO KC Jakarta Cawang	KC Jakarta Kelapa Gading
12	BRCO KC Karawang	KC Cikarang
13	BRCO KC Tangerang	KC Tangerang Karawaci
14	BRCO KC Pekanbaru	KC Padang
15	BRCO KC Pontianak	KC Samarinda

- 4) Penyempurnaan kebijakan dan prosedur pengelolaan manajemen risiko, melalui pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.
- 5) Pengembangan sistem informasi manajemen risiko. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.
- 6) Pembuatan profil risiko dan pengelolaan risiko yang meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.
- 7) Pengembangan SDM di Bidang Manajemen Risiko, dengan melaksanakan beberapa program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko, yaitu: *Branch Risk Control Officer* dalam menjalankan fungsinya memberikan *second opinion* dan pertimbangan risiko yang melekat dalam setiap bisnis Bank.
- 4) Improvement of the Bank's policy and management procedures on risk management is accomplished through reviewing internal policies, conducting a gap analysis and accommodating widely-adopted best practices to improve the quality of risk management implementation.
- 5) Development of a risk management information system. The development of a risk management information system will begin with identifying and improving risk database that is expected to be of use to be gradually developed and applied to the information technology system, leading to integrated and timely risk measurement and monitoring.
- 6) Development of risk profiles and risk management that includes credit risks, market risks, liquidity risks, operating risks, legal risks, reputation risks, strategic risks and compliance risks.
- 7) Human resources development in risk management is carried by sending risk management officers to human resources development programs. Part of Branch Risk Control Officer's duties is to provide a second opinion and risk consideration, which is an essential part in each of the Bank's business operation. Bank BTN involved all of Bank BTN's employees in risk management certification

Sedangkan dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan di bidang manajemen risiko, Bank BTN telah mengikutsertakan seluruh pegawai di Bank BTN termasuk di RMD, DRCO dan sebagian besar BRCO dalam rangka sertifikasi manajemen risiko, selanjutnya Bank BTN juga melakukan *internal training* dan mempersiapkan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko).

programs to improve their capacity in risk management, including RMD, DRCO and most of BRCO. Other risk management programs include internal trainings and pre-tests for executives and employees taking a certification test held by the Risk Management Certification Agency (BSMR).

Bidang Pengendalian Internal

- 1) Evaluasi fungsi *compliance* pada *internal control* di kantor cabang.
- 2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan audit Bank.
- 3) Penanganan dan tindak lanjut terhadap *fraud*.
- 4) Penanganan dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kredit yang disekuritisasi.
- 5) Satuan kerja manajemen risiko bekerja sama dan atau berkoordinasi dengan satuan audit internal dengan melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya peningkatan internal control dalam berbagai kegiatan operasional, diantaranya:
 - Dalam setiap pelaksanaan audit di lapangan oleh Divisi Audit Internal telah dilaksanakan prosedur Audit Rating dan Control Self Assessment berupa kuesioner yang diperuntukkan bagi seluruh jajaran manajemen dimana salah satu variabel diantaranya adalah untuk menilai manajemen Kantor Cabang secara umum serta gaya kepemimpinan dan kontrol di Kantor Cabang sebagai cermin penilaian tata kelola hubungan antara para pelaku GCG secara rinci meliputi hubungan antara Kepala Cabang dengan Para Manajer Lini serta dengan para pegawai dan sebaliknya.
 - Sejak tahun 2006/2007 DAI dan DMR telah menginstruksikan kepada seluruh Kantor Cabang untuk melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di kantor Cabang yang pelaksanaannya harus dan telah dibuat Berita Acara per masing-masing karyawan/pejabat peserta sosialisasi.
 - Para pejabat BRCO yang ditempatkan di Kantor Cabang telah diberikan pelatihan ACL (Audit Command Language) oleh Divisi Audit Internal agar dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dapat melakukan evaluasi dan *assessment* terhadap risiko dan

On internal Control

- 1) Evaluation of compliance functions of internal control at branches
- 2) Follow-up to the Bank's audit results
- 3) Treatment of and follow-up to bank fraud.
- 4) Treatment and examination of marketable credit documents.
- 5) The risk management task force is teamed up with the internal audit task force in taking tangible measures to enhance internal control in the Bank's operations, as shown below.
 - The Internal Audit Division has always used Audit Rating and Control Self Assessment procedures every time the division holds a field audit. The procedures include handing out questionnaire forms to all levels of the Bank's management to generally measure the management of the Bank's Branch Offices, including style of leadership and control, which may reflect relationship patterns between Heads of Branch Offices and their Line Managers as well as the employees.
 - Since 2006/ 2007, DAI and DMR have called on Branch Offices to evaluate and socialize the Standard Operational Procedure (SOP) whose implementation must be included in a special report made by each of the program's participant.
 - The Internal Audit Division has provided the BRCO officers at Branch Offices with Audit Command Language training to enable the BRCO officers to make risk-and-control evaluation and assessment of customers' and debtors' account applications. This

pengendalian rekening aplikasi nasabah dan debitur. Dengan demikian *day to day risk control* dapat di tingkatkan berdasarkan masukan dari BRCO.

Bidang GCG, diantaranya:

Melaksanakan rangkaian *road map* program implementasi GCG sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian "Road Map Tahapan Implementasi GCG"

Bidang CSR, diantaranya:

Bank BTN memiliki tanggung jawab atau senantiasa memberi makna dalam setiap langkah bisnis yang diambil. Tanggung jawab sosial Perusahaan, bagi Bank BTN, tidak sekedar kewajiban tetapi mengambil bagian dalam membangun kesejahteraan bersama. Bank BTN berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi para *stakeholders*, yakni: nasabah, pegawai, mitra bisnis, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan sekitar yang menjadi titik pijakan bisnis Bank. Pada tahun 2010, Bank telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah Bank BTN Integrated Community Program, pemberian bantuan sosial, mudik bersama Bank BTN "Mudik Untuk Semua", pemberian beasiswa, pemberian bantuan operasi jantung anak, bantuan kepada korban bencana alam Wasior, gempa bumi Mentawai dan letusan Gunung Merapi, bantuan pembinaan kepada atlet judo dalam rangka mendukung program Indonesia Emas 2011, serta bantuan program kemitraan lainnya. Laporan lengkap dapat dilihat pada laporan berkelanjutan 2010.

Frekuensi dan Efektivitas Komunikasi antara Direksi dan Auditor Eksternal

Koordinasi dan kerjasama antara manajemen Bank dan auditor eksternal dilaksanakan secara periodik dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses audit secara keseluruhan. Untuk itu dalam setiap kali pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, Direksi membuka ruang yang seluas-luasnya bagi koordinasi dan komunikasi antara auditor eksternal dengan manajemen Bank. Hal ini bertujuan dalam pelaksanaan audit tercipta keseragaman pemahaman mengenai hal yang menjadi obyek pemeriksaan serta terciptanya solusi yang efektif dalam mengatasi sumber permasalahan yang ada. Direksi juga secara aktif melakukan pemantauan tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan audit eksternal dalam setiap rapat koordinasi antara Direksi dengan satuan-satuan kerja terkait sehingga diharapkan di masa mendatang temuan serupa tidak akan terulang kembali.

leads to higher day-to-day risk control thanks to the BRCO officers' input.

On GCG, among others:

Holding a series of GCG implementation roadmaps as described above in "Roadmap for GCG Implementations".

On CSR, among others:

Bank BTN sees Corporate Social Responsibility as more than meeting one of regulatory requirements; CSR is a joint effort to improve stakeholders' welfare, in which Bank BTN is an active participant. The stakeholders include Bank BTN's customers, employees, business partners, shareholders, the general public and locals where Bank BTN operates. The Bank's CSR programs in 2010 include Bank BTN Integrated Community Program, Bank BTN "Mudik Untuk Semua" program, Scholarship assistance, heart surgeries for children, extending humanitarian aid to victims of natural disasters in Wasior, Mentawai as well as victims of volcanic eruption and supporting the Indonesia Emas 2011 program by assisting the nation's judo athletes. Complete report can be found on Sustainability Report 2010.

Frequency and Effectiveness of Communication between the Board of Directors and the External Auditors

Coordination and cooperation between Bank BTN's management and external auditors are conducted periodically to enhance the efficiency and effectiveness of audit process as a whole. Therefore, every time an external audit takes place, the Board of Directors is open for coordination and communication with external auditors so as to find an effective solution to any issue that arises. The Board of Directors actively monitors the follow-ups of external audit findings in the meetings with related divisions to prevent such findings in the future.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

- a) Dewan Komisaris meminta Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) untuk melakukan kajian remunerasi bagi anggota Direksi.
- b) Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun rekomendasi remunerasi bagi anggota Direksi.
- c) Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan kepada Dewan Komisaris, remunerasi bagi anggota Direksi.
- d) Dewan Komisaris membahas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- e) Dewan Komisaris mengusulkan remunerasi bagi anggota Direksi kepada RUPS.
- f) RUPS menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi

Untuk bagan prosedur penetapan remunerasi direksi bisa dilihat dihalaman 202.

Indikator Kinerja Direksi

Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja Direksi dan sekaligus dijadikan sebagai dasar penetapan remunerasi terdiri dari :

- Kontrak Kerja Manajemen, yang meliputi pencapaian target-target keuangan Bank BTN, seperti ROA, ROE, *Profit Margin*, CER.
- Proyek Transformasi Bisnis Bank BTN, antara lain: proyek internalisasi budaya kerja, implementasi struktur organisasi baru, implementasi *balanced scorecard*, implementasi *human capital management*.
- Kinerja Direktorat, yang meliputi pencapaian target Kantor Cabang dan pencapaian target divisi dengan menggunakan metode *balanced scorecard* yang mencakup empat perspektif, yaitu: *financial*, *customer*, *internal business process*, dan *learning and growth*.

Remuneration Procedure for the Board of Directors

- a) The Board of Commissioners calls on the Remuneration and Nomination Committee (KRN) to consider remuneration for the members of the Board of Directors.
- b) The Remuneration and Nomination Committee (KRN) makes a remuneration recommendation for the members of the Board of Directors.
- c) The Remuneration and Nomination Committee (KRN) provides Board of Commissioners with a remuneration recommendation for the Board of Directors.
- d) The Board of Commissioners discuss the Remuneration and Nomination Committee (KRN)'s recommendation.
- e) The Board of Commissioners provides the RUPS with a remuneration recommendation for the Board of Directors.
- f) The RUPS determines remuneration for the Board of Directors.

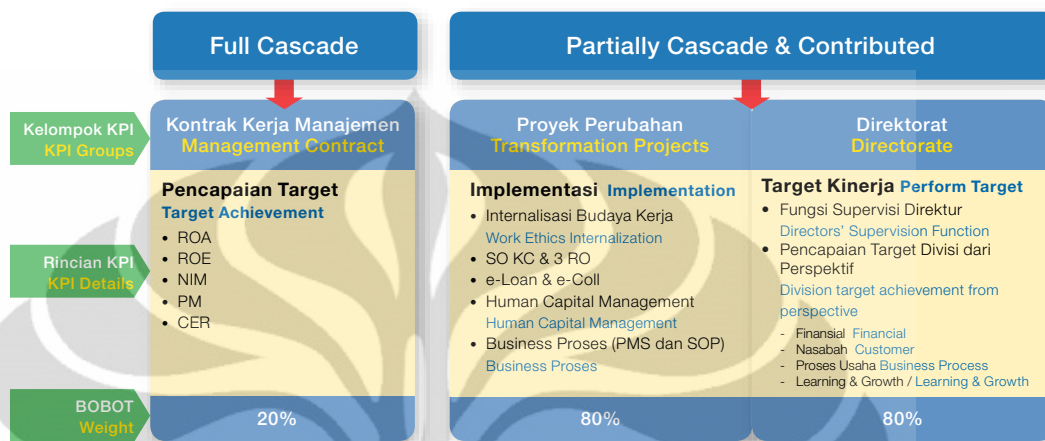
The illustration of the remuneration procedure for the Board of Directors can be seen on page 202.

Performance Indicator of the Board of Directors

Key Performance Indicators (KPI) used to measure the Board of Directors' performance and determine remuneration for the Board of Directors consist of:

- Management Contracts for Work that include achievements of corporate financial targets such as ROA, ROE, Profit Margin and CER.
- Bank BTN's Business Transformation Projects that include the work culture internalization project, the implementation of new organizational structure, the implementation of balanced scorecard and the implementation of human capital management.
- Directorate performance that includes target achievements of Branch Offices and target achievements of divisions that are measured using the balanced scorecard method comprising four perspectives, namely financial, customer, internal business process, and learning and growth.

Bagan Kerja dan Remunerasi Chart of Performance and Remuneration



Rapat Direksi

Frekuensi rapat Direksi yang diselenggarakan dalam periode Januari sampai dengan Desember 2010 adalah 95 kali dan tingkat kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat adalah sebagai berikut:

The Board of Directors Meeting

The Board of Directors held 95 meetings over the January-December 2010 period with frequency of attendance as shown below:

Tabel Kehadiran Rapat Direksi
Table of Attendance in the Board of Directors Meetings

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Iqbal Latanro Direktur Utama President Director	78	82
Evi Firmansyah Wakil Direktur Utama Vice President Director	81	85
Sunarwa Direktur Director	82	86
Saut Pardede Direktur Director	83	87
Irman Alvian Zahiruddin Direktur Director	63	66
Purwadi Direktur Director	80	84

Pelatihan Direksi

Bank senantiasa melakukan pengembangan kompetensi bagi seluruh jajarannya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Direksi, selama Tahun 2010, anggota Direksi Bank BTN telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar antara lain:

Trainings of the Board of Directors

The Bank is committed to developing the competency of its employees. Throughout 2010, in an effort to enhance the Board of Directors' capacity in accomplishing its duties, the Board of Directors of Bank BTN attended a variety of training programs, workshops, conferences and seminars, as the table on next page shows:

Tabel Pelatihan Direksi
Table of the Board of Directors' Trainings

Iqbal Latanro	<ul style="list-style-type: none"> Global Government Finance Summit – Singapura The 16th Meeting of WSBI Asia Pacific Regional Group – Bali, Indonesia Sertifikasi Manajemen Risiko, London - Inggris
Evi Firmansyah	<ul style="list-style-type: none"> Workshop Strategy Into IT Action: How to Align Business Strategy with IT Strategy Through IT Investment – Jakarta, Indonesia Seminar "Risk Management in Retail Banking" – Amsterdam, Belanda The 17th General Assembly Meeting pada tanggal 11 Juni 2010 di Edinburgh, Skotlandia The 16th Meeting of WSBI Asia Pacific Regional Group – Bali, Indonesia Euronet ESCAPE Client Conference and Training – Arkansas, USA Banking Technology Summit 2010 – Sapporo, Jepang
Sunarwa	<ul style="list-style-type: none"> Expand Leadership Program for BOD/BOC – Jakarta, Indonesia International Conference Bara Risk Forum 2010 – Bali, Indonesia Pelatihan & Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) Tingkat 5 – Jakarta, Indonesia Seminar Manajemen Bank Dalam Rangka Mewujudkan Sistem Perbankan yang Sehat – Jakarta, Indonesia International Executive Education Course, International Housing Finance Program, Wharton Real Estate Center, The Wharton School University Pennsylvania – Philadelphia, Amerika Serikat Workshop on Securitization – Philadelphia, Amerika Serikat
Saut Pardede	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan & Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) Tingkat 4 – Jakarta, Indonesia Pelatihan & Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) Tingkat 5 – Jakarta, Indonesia The 16th Meeting of WSBI Asia Pacific Regional Group – Bali, Indonesia Seminar Senior Management Risk Summit 2010 – Bali, Indonesia Diskusi Fair Competition & Acceleration of Economic Development – Jakarta, Indonesia International Executive Education Course, International Housing Finance Program, Wharton Real Estate Center, The Wharton School University Pennsylvania – Philadelphia, USA Workshop on Securitization – Philadelphia, USA The Seacen – Bank Indonesia High Level Seminar for Deputy Governors: Optimal Central Banking for Financial Stability – Bali, Indonesia
Irman Alvian Zahiruddin	<ul style="list-style-type: none"> Perdagangan Bebas China-Asean: Tantangan dan Peluang BUMN di Tahun 2010 – Jakarta, Indonesia Cambridge Executive Education Program "Shaping Our Future in The Global Recovery" – Cambridge, Inggris Risk Management Refresher Course – London, Inggris Palladium Norton Breakfast Conference – Jakarta, Indonesia The 16th Meeting of WSBI Asia Pacific Regional Group – Bali, Indonesia 13th WSBI Postal Savings Banks Forum and "Doubling savings account project" mid-term Workshop – Afrika Selatan Global Savings Forum – Seattle Washington, Amerika Serikat
Purwadi	<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya Peran Komisaris, Direksi & Dewan Pengawas Syariah dalam Pengurusan Bank – Jakarta, Indonesia Pelatihan & Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) Tingkat 4 – Jakarta, Indonesia Pelatihan & Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR) Tingkat 5 – Jakarta, Indonesia Biaya Benchmark Lokakarya Pengawas Syariah Dalam Pengurusan Bank – Kuala Lumpur, Malaysia International Programme on Housing Finance Management 2010, Center for Housing Finance (HDFC's Training Center) Lonavla – India

Hubungan Komisaris – Direksi

Penjelasan/Laporan Direksi Kepada Komisaris

- a) Setiap waktu, Komisaris/anggota Komisaris dapat meminta penjelasan atau laporan (lisan maupun tertulis) kepada Direksi/anggota Direksi,

Relationship between Board of Commissioners and the Board of Directors

The Board of Directors' Report to The Board of Commissioners

- a) The Board of Commissioners/members of the Board of Commissioners can anytime ask the Board of Directors/members of the Board

tentang segala hal dan kegiatan/perbuatan Direksi/anggota Direksi dalam menjalankan fungsinya masing-masing terhadap Bank BTN.

- b) Permintaan Komisaris/anggota Komisaris untuk mendapat penjelasan/laporan dari Direksi/anggota Direksi, diberitahukan dengan surat dan dengan merinci hal-hal yang perlu dijelaskan/dilaporkan, termasuk menetapkan cara penyampaian penjelasan/laporan yang diinginkan (lisan atau tertulis) serta hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Komisaris.
- c) Untuk penjelasan/laporan secara lisan, Komisaris menetapkan tempat dan waktu pelaksanaannya.
- d) Untuk penjelasan/laporan secara tertulis, Komisaris menetapkan batas waktu penjelasan/laporan sudah harus diterima Komisaris.
- e) Direksi/anggota Direksi wajib menyampaikan penjelasan/laporan yang diminta Komisaris sebaik-baiknya, seakurat-akuratnya dan tepat waktu.

Pemeriksaan Komisaris di Tempat Bank

- a) Setiap waktu, Komisaris/anggota Komisaris berwenang melakukan pemeriksaan di tempat Bank atau tempat lain yang digunakan Bank.
- b) Pemeriksaan ditempat Bank dapat dilakukan Komisaris tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu (lisan atau tertulis) kepada Direksi.
- c) Direksi/anggota Direksi wajib melayani dengan wajar dan baik kegiatan pemeriksaan di tempat Bank BTN yang dilakukan Komisaris/anggota Komisaris, termasuk menyiapkan dan/atau menyediakan sarana yang diperlukan guna kelancaran pemeriksaan dimaksud.

Pemberian Nasihat dari Komisaris Kepada Direksi

- a) Setiap waktu, diminta atau tidak, Komisaris dapat memberikan nasehat kepada Direksi/anggota Direksi, yang antara lain meliputi:
 - Rencana pengembangan Bank BTN, rencana kerja dan anggaran tahunan serta perubahan dan tambahannya, laporan-laporan berkala dan laporan-laporan lainnya.
 - Laporan tahunan dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku Bank BTN, beserta laporan laporan lainnya.

of Directors to explain or report (verbally or in writing) to the Board of Commissioners/ members of to the Board of Commissioners on the activities/actions of the Board of Directors/ members of the Board of Directors pertaining to their duties to Bank BTN.

- b) The Board of Commissioners will send a letter to the Board of Directors to notify the latter about the former's request for report. The letter contains points that need to be reported, including the form of the report (verbally or in writing).
- c) For a verbal report, the Board of Commissioners determines the venue and time for the report to be conveyed.
- d) For a report in writing, the Board of Commissioners determines the report submission deadline.
- e) It is mandatory that the Board of Directors/ members of the Board of Directors accurately and timely explain/report what is requested by the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners' Inspection at the Bank's Compound

- a) The Board of Commissioners/members of the Board of Commissioners have the authority to conduct inspection at Bank BTN's compound or any compound used by Bank BTN.
- b) The Board of Commissioners' inspection at Bank BTN's compound can be in conducted as an unannounced visit or an announced visit (verbally or in writing).
- c) The Board of Directors/members of the Board of Directors are required to receive the Board of Commissioners/members of the Board of Commissioners' visit/inspection appropriately, including preparing what is needed for the inspection.

The Board of Commissioners' Advice to the Board of Directors

- a) The Board of Commissioners can advise the Board of Directors anytime, wheter being requested or not. The Board of Commissioners' advice includes:
 - The Bank's expansion plans, the Bank's annual business plan and budget including its revision and addition and periodical reports.
 - The Bank's annual report pertaining to income statement in a certain fiscal year and other related reports.

- b) Dari waktu ke waktu, diminta atau tidak diminta, Direksi berkewajiban menyampaikan kepada Komisaris bahan/berkas berkaitan dengan poin 1 di atas, termasuk hal lainnya yang dianggap perlu/terkait. Bahan/berkas ini disampaikan kepada Komisaris dalam amplop tertutup, melalui atau tanpa melalui Sekretaris Komisaris.
 - c) Komisaris meneliti dan menelaah serta membahas segala sesuatunya, dan selanjutnya jika dipandang perlu memberikan pendapat, saran dan/atau nasehat secara wajar dan obyektif kepada Direksi, termasuk memberikan nasehat mengenai langkah perbaikan yang perlu ditempuh dalam hal Komisaris beranggapan bahwa kinerja Bank menunjukkan gejala kemunduran.
 - d) Nasihat (termasuk pendapat/saran) Komisaris disampaikan kepada Direksi/anggota Direksi secara tertulis dan dalam amplop tertutup, maupun secara lisan (rapat).
- b) The Board of Directors is required anytime, wheter being requested or not, to submit materials/files pertaining to point 1 above or other related issues to the Board of Commissioners. The materials/files are submitted to the Board of Commissioners in a sealed envelope, by way of the Board of Commissioners' Secretary or not.
 - c) The Board of Commissioners carefully examines and discusses the report, and, where necessary, advises the Board of Directors appropriately and objectively, including advice on what necessary measures the Board of Directors should take to improve the Bank's performance, should the Board of Commissioners finds that the Bank's performance lower than expected.
 - d) The Board of Commissioners' advice to the Board of Directors can be conveyed in writing (in a sealed envelope) or verbally (during a meeting).

Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Komisaris

Perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu:

- a) Memindahtangankan dan menghapuskan aktiva tetap milik Bank BTN yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris.
- b) Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun atau perpanjangannya yang mengakibatkan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c) Memberikan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- d) Melakukan penyertaan modal pada perseroan lain.
- e) Mendirikan anak perusahaan dan atau perusahaan patungan.
- f) Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
- g) Menetapkan dan merubah logo Bank BTN.
- h) Membentuk yayasan, organisasi dan atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung

The Board of Directors' Measures that Need the Board of Commissioners' Approval

The Board of Directors' measures that need the Board of Commissioners' written approval include:

- a) Transferring and writing off Bank BTN's fixed assets in excess of what is approved in the Board of Commissioners' Meeting.
- b) Entering into a partnership with other business entities in the form of an operational partnership, management contract, a Build, Operate and Transfer (BOT) partnership, a Build, Operate and Own (BOO) partnership and other related partnerships with a time period of more than three years.
- c) Providing funding to related parties
- d) Contributing capital to other companies
- e) Setting up a subsidiary and/or a joint venture
- f) Providing contributed capital to a subsidiary and/or a joint venture
- g) Altering Bank BTN's logo
- h) Setting up a foundation, organization and/or association that is directly and indirectly related to the Bank that may result in financial losses to Bank BTN.

maupun tidak langsung dengan Bank yang dapat berdampak finansial bagi Bank BTN.

- i) Membebaskan biaya Bank BTN yang bersifat tetap dan rutin untuk kegiatan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Bank BTN.
- j) Mengusulkan wakil Bank BTN untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Bank BTN dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Permintaan Direksi untuk mendapat persetujuan Komisaris diajukan kepada Komisaris secara tertulis dan dalam amplop tertutup. Terhadap permintaan Direksi tersebut, Komisaris segera memberikan atau tidak memberikan persetujuan, dan disampaikan kepada Direksi secara tertulis dalam amplop tertutup.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Frekuensi rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi yang diselenggarakan dalam periode Januari sampai dengan Desember 2010 adalah 22 kali dan tingkat kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat adalah sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Rapat Gabungan*
Table of Joint Meetings Attendance*

Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance	% Kehadiran % Attendance
Zaki Baridwan	22	100
Gatot Mardiwasisto	22	100
Mulabasa Hutabarat	22	100
Subarjo Joyosumarto	22	100
Deswandhy Agusman**	14	63
Iqbal Latanro	12	55
Evi Firmansyah	11	50
Sunarwa	16	73
Saut Pardede	16	73
Irman Alvian Zahiruddin	14	64
Purwadi	17	77

Keterangan:

* Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan bidang supervisi masing-masing direksi.

** Mulai bertugas per Juli 2010

- i) Regularly charging Bank BTN for the activities or events held by a foundation, organization and/or association that is directly or indirectly related to Bank BTN.
- j) Recommending Bank BTN's representative for membership in the Board of Director or the Board of Commissioners of a joint venture or subsidiary that provides significant contribution to Bank and/or is of strategic value to the Bank as determined by the Board of Commissioners.

The Board of Directors' request to the Board of Commissioners is submitted in the form of a letter in a sealed envelope. The Board of Commissioners' approval or disapproval of the request is submitted to the Board of Directors in the form of a letter in a sealed envelope.

Joint Meetings of the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors held 22 joint meetings over the January-December 2010 period, with attendance as shown in the table below:

Note:

* Joint Meeting of Board of Commissioner and Board of Directors based on each Directors' supervision area.

** Appointed in July 2010

Komite-Komite Dibawah Komisaris

Komite Audit

Dasar pembentukan Komite Audit

Komite Audit dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan perundangan, yang meliputi Keputusan Ketua BAPEPAM nomor 29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan Bank Indonesia, PBI No: No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M.MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, pelaksanaan tugas Komite Audit juga diatur dalam Piagam Komite Audit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Fungsi Utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja Bank BTN. Hal tersebut terutama berkaitan dengan *review* sistem pengendalian internal Bank BTN, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit, baik internal maupun eksternal sertamelakukan *review* implementasi *good corporate governance*.

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Struktur dan keanggotaan Komite Audit dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara No.63/KOM/BTN/VII/2009 Tanggal 15 Juli 2009 tentang pengangkatan anggota Komite Audit, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 168/DIR/2009 tanggal 30 Juli 2009, dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. 189/Dir/2010 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

Committees under the Board of Commissioners

The Audit Committee

Legal Basis for the Establishment of the Audit Committee

The Audit Committee's duties are based on laws and regulations, including BAPEPAM Chairperson Decree No. 29/PM/2004 on Establishment and Guidelines to the Audit Committee, Bank Indonesia Regulation PBI No. 8/4/PBI/2006 on 30 January 2006 on Implementations of Good Corporate Governance for Publicly-Held Banks, revised by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 on 5 October 2006 and the State Minister for SOEs Decree No. Kep-117/M.MBU/2002 on 31 July 2002 on Implementations of Good Corporate Governance Practices by State-Owned Enterprises, as well as the Audit Committee Charter determined by the Board of Commissioners and the Board of Directors.

The main duty of the Audit Committee is to assist the Board of Commissioners in supervising Bank BTN's performance, primarily in reviewing Bank BTN's internal control system, ensuring the quality of financial statement and improving internal and external audit effectiveness as well as reviewing the implementation of good corporate governance.

Structure of Membership of the Audit Committee

The structure and membership of the Audit Committee is based on the decision of the the Board of Commissioners Meeting and strengthened by the Circular Letter of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara No.63/KOM/BTN/VII/2009 on 15 July 2009 on the Assignment of the Members of the Audit Committee and also by the Board of Directors Circular Letter No. 168/Dir/2010 on 30 July 2009 and revised by the the Board of Directors Decree No. 189/DIR/2010 on the Assignment of Members of the Audit Committee of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, as shown below:

Tabel Daftar Komite Audit
Table of Register of Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position
Zaki Baridwan	Sebagai Ketua (Komisaris independen) As Chairman (Independent Commissioner)
Gatot Mardiwasiso	Sebagai Anggota (Komisaris) As Member (Commissioner)
Lifransyah Gumay	Sebagai Anggota (Pihak Independen) As Member (Independent Party)
Dewi Wulan Sari*	Sebagai Anggota (Pihak Independen) As Member (Independent Party)
M. Syafruddin**	Sebagai Anggota (Pihak Independen) As Member (Independent Party)

Catatan :

*) Dewi Wulan Sari menjabat dari bulan Agustus 2009 s.d Juli 2010

***) M. Syafruddin menggantikan Dewi Wulan Sari sejak bulan Agustus 2010

Note:

*) Dewi Wulan Sari was in office from August 2009 to July 2010

***) M. Syafruddin replaced Dewi Wulan Sari since August 2010

Susunan komposisi, keahlian dan kriteria independensi Komite Audit tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam – LK.

The Independency composition, expertise and criteria of the Audit Committee are in compliance with Bank Indonesia and BAPEPAM-LK regulations

Tugas dan Tanggung Jawab

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan yang terdapat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP)
- Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- Mengevaluasi laporan manajemen atas ketaatan Bank BTN terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank BTN.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - ✓ Pelaksanaan tugas *Internal Audit Division*.
 - ✓ Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku.
 - ✓ Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku.

Duties and Responsibilities

- Examining the Bank's past and future financial information such as financial statements, projections, and financial information included in the Bank's Business Plan, Bank BTN's Work Plan and Budget and the Bank's Long-Term Plan.
- Evaluating the effectiveness of audit implementations by external auditors, including external auditors' independency and objectivity as well as audit adequacy to ensure that crucial risks have been taken into consideration.
- Evaluating management's report on Bank BTN's compliance with banking regulations.
- Monitoring and evaluating the preparation and implementation of internal audit, as well as monitoring the follow-ups of audit results to ensure internal control adequacy including the adequacy of financial reporting process. The following are issues to be monitored and evaluated:
 - ✓ Implementation of duties by the Internal Audit Division
 - ✓ Ensuring that the audit by the Public Accounting Firm meets the generally-accepted standards.
 - ✓ Ensuring that the financial statement meets the generally-accepted standards.

- Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan *Internal Audit Division*, Kantor Akuntan Publik, BPK dan hasil pengawasan Bank Indonesia
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank BTN.
- Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk meminta *Internal Audit Division* melaksanakan audit khusus jika diperlukan.
- Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang usulan pengangkatan Kepala *Internal Audit Division*.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris

- ✓ Follow-ups by the Board of Directors pertaining to findings by the Internal Audit Division, the Public Accounting Firm, BPK and Bank Indonesia's supervision.
- ✓ Providing the Board of Commissioners with a recommendation on the appointment of the Public Accounting Firm for the Board of Commissioners to report it during the General Meeting of Shareholders.
- ✓ Probing and examining complaints raised against Bank BTN's and reporting them to the Board of Commissioners.
- ✓ Calling on the Board of Commissioners to urge the Internal Audit Division to conduct audit where necessary.
- ✓ Providing the Board of Commissioners with a recommendation on proposal for the appointment of the Head of the Internal Audit Division.
- ✓ Accomplishing other tasks assigned by the Board of Commissioners.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang tahun 2010, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

The Frequency of Meetings and Attendance of the Audit Committee

Throughout 2010, the Audit Committee held 12 (twelve) meetings.

Tabel Kehadiran Rapat Komite Audit
Table of Attendance of Audit Committee Meetings

Nama Name	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance
Zaki Baridwan	12	12
Gatot Mardiwasisto	12	12
Lifransyah Gumay	12	11
Dewi Wulan Sari*	7	5
M. Syafruddin**	5	5

Catatan :

*) Dewi Wulan Sari menjabat dari bulan Agustus 2009 s.d Juli 2010

***) M. Syafruddin menggantikan Dewi Wulan Sari sejak bulan Agustus 2010

Note:

*) Dewi Wulan Sari was in office from August 2009 to July 2010

***) M. Syafruddin replaced Dewi Wulan Sari since August 2010

Rapat tersebut merupakan rapat resmi Komite Audit. Selain rapat tersebut, komite Audit juga menghadiri rapat Komite Pemantau Risiko dan rapat lainnya yang diadakan atas undangan Dewan Komisaris membahas hal-hal tertentu dengan manajemen.

The meetings were official meetings of the Audit Committee. Additionally, the Audit Committee attended the Risk Monitoring Committee meetings and other meetings held by the Board of Commissioners to discuss certain issues with the management.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Pengawasan atas audit eksternal

Auditor eksternal bertanggungjawab untuk mengaudit laporan keuangan sesuai dengan

A Brief Report on the Audit Committee's Activities

Supervision of eksternal audit

External auditors are responsible for auditing financial statement in accordance with Public

Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah menyajikan secara wajar, dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Pada tahun buku 2010, Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Bank BTN adalah KAP Purwantono, Suherman dan Surya (KAP PSS-EY). Kantor Akuntan Publik tersebut merupakan Kantor Akuntan Publik baru setelah mengalami pergantian nama dari sebelumnya KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja. Pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik tersebut telah melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite Audit telah menelaah proses penunjukan tersebut dan penetapan jumlah *fee audit* yang masih dalam batas kewajaran.

Dalam melakukan pengawasan proses audit eksternal, Komite Audit telah berkoordinasi dan mengadakan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas rencana audit, isu utama, temuan audit yang penting, serta kemungkinan adanya hambatan dalam penugasan audit. Komite Audit selanjutnya memastikan hambatan dan temuan tersebut dapat diatasi dan ditindaklanjuti oleh manajemen. Di samping itu, Komite Audit juga mengevaluasi kualitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, berdasarkan standar audit dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk juga evaluasi atas independensi dan obyektivitas akuntan publik.

Pengawasan atas audit internal

Dalam menjalankan fungsi *review* terhadap sistem pengendalian internal, Komite Audit berupaya agar peran audit internal dapat terus senantiasa ditingkatkan dengan melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, pelaporan pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuannya.

Komite Audit melakukan *review* hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Internal Audit Division selama tahun 2010, yang terdiri dari audit umum konvensional (Kantor Cabang dan Divisi) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) obyek, audit umum Syariah sebanyak 21 (dua puluh satu) obyek dan audit teknologi sistem informasi

Accountant Professional Standards prevailing in Indonesia and providing an opinion of whether a financial statement has appropriately and accurately disclosed all material aspects of the Bank's financial position and cash flows in accordance with the generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia.

For the 2010 fiscal year, the Public Accountant Office assigned to audit Bank BTN's consolidated financial statement was the KAP Purwantono, Suherman and Surya (KAP PSS-EY), which was formerly known as the KAP Purwantono, Sarwoko and Sandjaja. The Public Accounting Firm was appointed through a tender as required by regulations. The Audit Committee examined the appointment and auditing fees, and found them adequately reasonable.

The Audit Committee coordinated and held meetings with the Public Accounting Firm to discuss such issues as auditing plans, main issues, important auditing findings and other matters that may hamper auditing process. The Audit Committee further ensured that the obstacles and findings were surmountable and followed up by the management. Moreover, the Audit Committee evaluated the audit quality by the external auditors according to auditing standards and other related measures. The Audit Committee also evaluated the public accountants' independence and objectivity.

Supervision of the Internal audit

In reviewing the internal control system, the Audit Committee ascertains the ever-increasing role of the internal audit by evaluating human resources, organizational structure, internal audit implementation reporting and a follow-up of auditing findings.

The Audit Committee reviewed the Internal Audit Division's performance for 2010, comprising conventional general audit of 73 (seventy three) objects (Branch Offices and Divisions), sharia general audit of 21 (twenty one) objects and information technology system audit of 14 (fourteen) objects and

sebanyak 14 (empat belas) obyek dan 6 (enam) audit khusus. Selama tahun 2010 jumlah obyek yang diaudit telah dapat diselesaikan seratus persen.

Berdasarkan *review* terhadap pelaksanaan audit, Komite Audit menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Agar auditor internal meningkatkan evaluasi atas pengendalian internal yang terkait dengan bisnis proses pemberian kredit komersial (non KPR), termasuk KUR agar NPL dapat ditekan mengingat porsi kredit non perumahan dan KUR akan mengalami peningkatan pada tahun mendatang.
2. Agar pada tahun 2011 Internal Audit Division dapat melakukan audit yang lebih terfokus pada proses bisnis yang mengandung risiko tinggi melalui penerapan metode audit berbasis risiko (*risk based audit*), dengan penerapan metode ini kekurangan sumber daya auditor diharapkan dapat teratasi.

Selain melakukan *review* laporan audit internal, Komite Audit juga memonitor tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas temuan hasil audit pihak lain seperti; audit oleh Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit lainnya, telah dilakukan *review* paket kompensasi/remunerasi Komisaris dan Direksi. Selama tahun buku 2010 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menerima kompensasi/remunerasi sebesar Rp 24.863.699.144. Komite Audit menyimpulkan bahwa pembayaran kompensasi/remunerasi Direksi dan Komisaris selama tahun buku 2010 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan seperti tersebut diatas, Komite Audit berpendapat bahwa:

1. Penyajian laporan keuangan yang dipublikasikan telah memenuhi azas keterbukaan.
2. Bank telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Komite Audit juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas Bank BTN yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta memberikan nasehat kepada Direksi.

special audit of 6 (six) objects. Therefore, all audit objects were fully covered in 2010.

Based on the review of audit implementation, the Audit Committee suggested that:

1. Internal auditors improve their evaluation of internal control pertaining to commercial credit facilities (non KPR), including KUR, to contain NPL. This is particularly important, as demand for non-KPR and KUR credit facilities is expected to rise in the coming years.
2. The Internal Audit Division be more focused on its audit in high-risk businesses by adopting the risk-based audit method. Adoption of the method is expected to provide a solution to a shortage of auditors.

In addition to reviewing internal audit, the Audit Committee monitored the management in dealing with audit findings by other agencies, including Bank Indonesia and the Supreme Audit Agency.

Reviewing the compensation/remuneration package for the Board of Commissioners and the Board of Directors is also part of the Audit Committee's assignment. For the 2010 fiscal year, the Board of Commissioners and the Board of Directors were granted Rp 24,863,699,144 in compensation/remuneration. Audit by the Audit Committee found that the compensation/remuneration payment to the Board of Commissioners and the Board of Directors had been in compliance with the regulation.

The above-mentioned audit and discussions led the Audit Committee to conclude that:

1. The reported financial statement meets the openness principles.
2. Bank BTN has an adequate internal control system.

Furthermore, the Audit Committee provided a report, suggestions and notes to Bank BTN's activities in support of the Board of Commissioners' supervisory and consultative role pertaining to the Board of Directors.

Independensi Anggota Komite Audit

- Komite Audit Bank BTN terdiri dari 4 (empat) orang. Salah seorang anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit dan dibantu 3 (tiga) anggota Komite Audit lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang dari yang berasal dari pihak independen.
- Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan bahwa setiap anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup, paling tidak dalam salah satu bidang audit, perbankan, keuangan, atau akuntansi, serta memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang-bidang lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya.
- Anggota Komite Audit Bank BTN tidak ada yang berasal dari Direksi Bank BTN maupun dari Bank lain.
- Rangkap jabatan anggota Komite Audit dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- Anggota Komite Audit dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank BTN, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komite Pemantau Risiko

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dalam melakukan tugasnya berpedoman pada peraturan perundangan, antara lain: Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M.MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia

Independence of the Audit Committee Members

- Bank BTN Audit Committee has four members. One of the Audit Committee's members is an Independent Commissioner of Bank BTN's Board of Commissioners. This Independent Commissioner chairs the Audit Committee, assisted by three other members of the Audit Committee—a Commissioner and independent auditors.
- It is required that the Audit Committee's members are morally sound and adequately qualified with reasonable experience in either auditing, banking, financial, or accounting practices.
- No member of the Audit Committee come from Bank BTN Board of Directors or other companies.
- Dual employment of the Audit Committee's independent members is tolerated after taking into account several aspects that include competence, criteria, independence, confidentiality, code of ethics and duty implementation.
- To ensure their independence, independent members of the Audit Committee are free from any financial, managerial, stake ownership and/or family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors and/or Controlling Shareholders, or with Bank BTN.

The Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee's Structure, Membership, Expertise and Independence

In accomplishing its duties, the Risk Monitoring Committee is compliant with laws and regulations, including SOEs Ministerial Decree No. Kep-117/M.MBU/2002 dated 31 July 2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices at State-Owned Enterprises, Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 on Risk Management Implementation for Publicly-Held Banks, Bank Indonesia Regulation

Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang dirumuskan dalam surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara No.63/KOM/BTN/VII/2009 Tanggal 15 Juli 2009 tentang pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 169/DIR/2009 tanggal 30 Juli 2009. Susunan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk periode 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2011 dengan susunan keanggotaan, sebagai berikut:

Ketua : Subarjo Joyosumarto
(Komisaris Independen)
Anggota : Mulabasa Hutabarat (Komisaris)
Anggota : Prihartono (Pihak Independen)
Anggota : Haryanto (Pihak Independen)

Tugas dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko diatur dalam Piagam Pemantau Risiko Nomor SKB-01/DEKOM-BTN/IV/2009 dan Nomor SKB-01/DIR-BTN/IV/2009 tanggal 1 April 2009, yaitu bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan risiko Bank BTN:

- Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank dan memonitor pelaksanaannya.
- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank BTN.

No. 8/4/PBI/2006 dated 30 January 2006 on GCG Implementation for Publicly-Held Banks, Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 on Revision of Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 on GCG Implementation for Publicly-Held Banks and Bank Indonesia Regulation No.11/25/PBI/2009 dated 1 July 2009 on Risk Management Implementation for Publicly-Held Banks.

The structure and membership of the Risk Monitoring Committee is based on the decision of the the Board of Commissioners Meeting and strengthened by the Circular Letter of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara No.63/KOM/BTN/VII/2009 dated 15 July 2009 on the Assignment of the Members of the Risk Monitoring Committee and by the Board of Directors Circular Letter No. 169/Dir/2009 dated 30 July 2009. The following is membership structure of the Risk Monitoring Committee of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk for the 1 August 2009 - 31 July 2011 period.

Chairperson : Subarjo Joyosumarto
(Independent Commissioner)
Member : Mulabasa Hutabarat
(Commissioner)
Member : Prihartono (Independent Party)
Member : Haryanto (Independent Party)

Assignment and Responsibility

The assignment of the Risk Monitoring Committee is based on the Risk Monitoring Chart No. SKB-01/DEKOM-BTN/IV/2009 and No. SKB-01/DIR-BTN/IV/2009 dated a 1 April 2009, in which it is stipulated that the Risk Monitoring Committee is assigned to assist the Board of Commissioners in supervising Bank BTN's risk policy.

- Evaluating Bank BTN's risk management policy and monitoring its implementation.
- Evaluating the applicability of the risk management policy and its implementation to provide a recommendation for the Board of Commissioners.
- Monitoring and evaluating the Risk Management Committee and the Risk Management Task Force to provide a recommendation for the Board of Commissioners.
- Promoting empowerment of Bank BTN's risk management function

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> e) Melakukan pemantauan atas risiko akibat perubahan indikator-indikator dalam pasar (suku bunga, kurs, dan sebagainya) untuk memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu kestabilan Bank BTN. f) Melakukan pemantauan atas segenap risiko Bank BTN. g) Mengevaluasi kebijakan, sistem dan pengendalian internal yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko konsentrasi kredit. h) Melakukan pemantauan atas pengendalian intern penyaluran kredit. i) Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank BTN serta mengusulkan alternatif penyelesaiannya. j) Melakukan tugas khusus lainnya yang terkait dengan pemantauan manajemen risiko Bank BTN. k) Dapat mengakses data dan informasi dari manajemen Bank BTN, yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemantauan risiko. | <ul style="list-style-type: none"> e) Monitoring the risks of changes in in market indicators (exchange rates, currencies) to ensure the changes will not affect Bank BTN's stability f) Monitoring all Bank BTN's potential risks g) Evaluating effective internal policy, system and control to identify, measure, monitor and contain credit concentration risks. h) Monitoring internal control of loan disbursement i) Reporting to the Board of Commissioners on Bank BTN's potential risks and recommending solutions to the issues. j) Engaging in other tasks related to Bank BTN's risk management monitoring k) Having access to data and information from the Bank's management to support it in its risk monitoring activities. |
|---|---|

Rangkap Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank BTN tidak merangkap jabatan atau terafiliasi sebagai pejabat dalam struktur organisasi Perseroan.

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko pada periode Januari - Desember 2010, diantaranya adalah:

- Pemantauan atas pengendalian internal penyaluran kredit. Komite Pemantau Risiko telah melakukan kajian tentang persoalan yang menyangkut *Non Performing Loan Gross* (NPL Gross), kolektibilitas kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), Debitur yang dalam realisasi tahun pertama sudah menunggak (DRBM), khususnya terhadap kantor-kantor cabang tertentu yang NPL Gross-nya di atas 5%, DRBM-nya di atas 2% serta DPK-nya di atas 10%. Disamping itu, Komite Pemantau Risiko juga memonitor daftar 15 (lima belas) cabang dengan risiko kredit tertinggi dilihat dari *outstanding* total kredit, NPL Gross, DPK dan DRBM.
- Pemantauan atas review Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PMKR) oleh Manajemen. Komite Pemantau Risiko telah melakukan

Concurrent Positions of Risk Monitoring Committee Members

Any Risk Monitoring Committee Member of Bank BTN is not allowed to hold a concurrent position or affiliated as an officer in the organizational structure of the Company.

Implementation of Risk Monitoring Committee Duties

The implementation of Risk Monitoring Committee duties in the period January - December 2010 included as follows:

- Monitoring internal control of lending. Risk Monitoring Committee has conducted studies on matters of Gross Non Performing Loans (Gross NPL), Special Mention (DPK) loan classification, Debtors that in the realization of the first year have been in arrears (DRBM), especially certain branches with Gross NPL above 5%, DRBM above 2% and DPK above 10%. In addition, Risk Monitoring Committee has also monitored the list of 15 (fifteen) branches with the highest credit risk viewed from total loans outstanding, Gross NPL, DPK and DRBM.
- Monitoring on review of Risk Management Policy Guidelines (PKMR) by Management. Risk Monitoring Committee has conducted an evaluation of PKMR proposal review by

evaluasi atas usulan *review* PMKR oleh manajemen dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris. Hal ini mendukung tugas Dewan Komisaris sesuai pasal 6 PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Bank BTN.

- Pemantauan atas penghimpunan dana giro, tabungan dan deposito. Dalam upaya memantau penghimpunan dana pihak ketiga, Komite Pemantau Risiko telah menyusun kajian tentang perkembangan dana giro, tabungan dan deposito sejak tahun 1993 sampai dengan 2009. Hal ini dimaksudkan sebagai dorongan bagi manajemen dan jajarannya agar di masa yang akan datang dapat memperoleh dana pihak ketiga dengan risiko yang lebih kecil.
- Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan pertemuan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, Komite Pemantau Risiko berpendapat bahwa:
 - ✓ Bank BTN telah memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko dan telah mengidentifikasi 8 (delapan) jenis risiko Bank BTN yang terkait.
 - ✓ Dalam hal penyaluran kredit, Divisi Manajemen Risiko berperan dengan menyampaikan risiko-risiko yang perlu dimitigasi.

Komite Pemantau Risiko juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas Bank BTN yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasehat kepada Direksi

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko periode 1 Januari – 31 Desember 2010, adalah sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko
Attendance List of Risk Monitoring Committee Meetings

Nama Name	Rapat KPR Risk Monitoring Committee Meeting	Rapat Gabungan Joint Meeting
Subarjo Joyosumarto	7	39
Mulabasa Hutabarat (Komisaris) <i>Commissioner</i>	7	39
Prihartono (Pihak Independen) <i>Independent Party</i>	7	39
Haryanto (Pihak Independen) <i>Independent Party</i>	7	39
Total	7	39

management and subsequently reported to Board of Commissioners. This supports the duties of Board of Commissioners under article 6 of PBI No. 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 mentioned above, which states that Board of Commissioners is responsible for approving and evaluating the Risk Management policy of Bank BTN.

- Monitoring fund raising of current accounts, savings and time deposits. In an effort to monitor third-party deposits, Risk Monitoring Committee has prepared studies on the development of current accounts, savings and time deposits from 1993 until 2009. It is intended as an incentive for management and staff for the future to obtain third party funds with less risk.
- Based on review and discussion at meetings mentioned above, Risk Monitoring Committee believes that:
 - Bank BTN has a Risk Management Policy Manual and has identified 8 (eight) types of risk associated with the Bank.
 - In terms of lending, Risk Management Division acts by conveying risks that need mitigation.

Risk Monitoring Committee has also submitted reports, suggestions and notes on various activities of Bank BTN that need the attention of the Board of Commissioners in carrying out its oversight duties and functions and in providing advice to the Board of Directors.

Frequency of Risk Monitoring Committee Meetings

Risk Monitoring Committee Meetings for the period 1 January – 31 December 2010 are as follows:

Rapat Komite Pemantau Risiko adalah pertemuan untuk membahas laporan profil risiko dengan Direksi, Divisi Manajemen Risiko, dan Divisi terkait. Rapat Gabungan adalah pertemuan untuk membahas hal-hal yang terkait manajemen risiko antara Dewan komisaris, Direksi, senior manajemen lainnya, dan Komite-Komite yang membantu Dewan Komisaris. Rapat Gabungan ini diselenggarakan atas undangan Dewan Komisaris.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

- Komite Pemantau Risiko telah dibentuk dengan Ketua Komisaris Independen dan anggotanya terdiri 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang yang berasal dari pihak independen.
- Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan dan mempertimbangkan integritas, akhlak, moral, dan independensi serta memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan manajemen risiko.
- Anggota Komite Pemantau Risiko Bank tidak ada yang berasal dari Direksi BTN maupun dari Bank lain.
- Rangkap jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Laporan Pelaksanaan Kerja Komite Pemantau Risiko

Pemantauan dilakukan terhadap delapan risiko bank. Pada tahun 2010, secara keseluruhan, profil risiko Bank BTN berada pada posisi *Low to Moderate*, dengan tren yang stabil/tetap. Pemantauan dilakukan terhadap pedoman yang terkait dengan kebijakan manajemen risiko. Selain itu, dalam implementasinya, pemantauan lebih mendalam dilakukan terhadap risiko-risiko berikut: kredit, likuiditas, reputasi, dan kepatuhan.

Pemantauan atas Pedoman Terkait Kebijakan Manajemen Risiko

Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi usulan Pedoman Kebijakan Penerapan Program

Risk Monitoring Committee meeting is a meeting to discuss the risk profile with Board of Directors, Risk Management Division, and associated Divisions. Joint Meeting is a meeting to discuss matters related to risk management between Board of Commissioners, Directors, other senior management, and committees assisting the Board of Commissioners. Joint Meeting is held at the invitation of the Board of Commissioners.

Independence of Risk Monitoring Committee

- Risk Monitoring Committee has been formed with the Independent Commissioner as Chairman and its members consist of 1 (one) Commissioner and 2 (two) persons from independent parties.
- Competencies/qualifications as a member of Risk Monitoring Committee have fulfilled requirements that the appointment of any Risk Monitoring Committee member has taken into account and considered the integrity, character, morals, and independence and knowledge in the field of economics, finance, banking and risk management.
- No Risk Monitoring Committee member comes from the Board of Directors of Bank BTN or another Bank.
- Concurrent position of a Risk Monitoring Committee member from an independent party has taken into account and considered the competence, criteria, independence, confidentiality, code of conduct and performance of duties and responsibilities.

Risk Monitoring Committee Work Implementation Report

Monitoring has been conducted on eight bank risks. In 2010, overall, Bank BTN's risk profile was in *Low to Moderate* position, with a stable/constant trend. Monitoring has been conducted on guidelines relating to risk management policy. In addition, in implementation, more deeply monitoring has been committed against the following risks: credit, liquidity, reputation, and compliance.

Monitoring of Guidelines Related to Risk Management Policy

Risk Monitoring Committee has evaluated the proposed Policy Guidelines on Program

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Sementara itu, Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) Bank sampai dengan akhir tahun 2010 masih dalam proses perbaikan dan persetujuan. Hal ini mendukung tugas Dewan Komisaris sesuai pasal 6 PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tersebut di atas, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank BTN.

Risiko Kredit

Dalam upaya memantau penyaluran kredit, Komite Pemantau Risiko telah melakukan kajian yang menyangkut *Non Performing Loan (NPL) Gross*, *Non Performing Financing (NPF) Gross* dan Debitur yang dalam realisasi tahun pertama sudah menunggak (DRBM). Pemantauan dilakukan terhadap cabang-cabang konvensional dan cabang-cabang Syariah dengan *outstanding* total kredit terbesar.

Komite Pemantau Risiko juga secara khusus memantau kantor-kantor cabang tersebut di atas yang NPL Gross-nya dan NPF Gross-nya diatas 5%, serta DRBM-nya diatas 2%.

Risiko Likuiditas

Dalam upaya memantau penghimpunan dana pihak ketiga, Komite Pemantau Risiko telah menyusun kajian tentang perkembangan dana giro, tabungan dan deposito. Selain itu juga mengkaji *one month maturity mismatch*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, pemeliharaan *Secondary Reserve (SR)*, Giro Wajib Minimum (GWM), dan BOPO.

Secara khusus Komite Pemantau Risiko memantau proporsi penghimpunan dana murah dan penghimpunan dana mahal, *coscentration risk* yang berhubungan dengan dana pihak ketiga, dan efisiensi beban operasional relatif terhadap pendapatan operasionalnya.

Risiko Reputasi

Komite Pemantau Risiko memantau risiko reputasi terutama yang berhubungan dengan aktivitas Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Informasi Manajemen (TSI dan SIM). Secara khusus, Komite terus memantau frekuensi keluhan nasabah yang berhubungan dengan aktivitas ini.

Risiko Kepatuhan.

Dalam hal pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Bank BTN telah menyusun Pedoman GCG dan mensosialisasikan kepada seluruh pejabat

Implementation of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention for Commercial Banks. Meanwhile, Bank BTN's Risk Management Policy Guidelines (PKMR) until the end of 2010 is still in the process of refinement and approval. This supports the duties of Board of Commissioners under article 6 of PBI No. 5/8/PBI/2003 dated 19 May 2003 mentioned above, which states that the Board of Commissioners is responsible for approving and evaluating Bank BTN's risk management policy.

Credit Risk

In an effort to monitor credit disbursements, Risk Monitoring Committee has conducted a study concerning Gross Non Performing Loan (Gross NPL), Gross Non Performing Financing (Gross NPF) and debtors that have been in arrears in the realization of the first year (DRBM). Monitoring has been carried out on conventional and Sharia branches with the largest loans outstanding.

Risk Monitoring Committee has also specifically monitored those branches above with Gross NPL and Gross NPF above 5%, and DRBM above 2%.

Liquidity Risk

In an effort to monitor third-party funding, Risk Monitoring Committee has prepared studies on the development of current accounts, savings and time deposits. It also examines one month maturity mismatch, maintenance of Secondary Reserves (SR), Statutory Reserves (GWM), and BOPO.

In particular, Risk Monitoring Committee monitors the proportion of low-cost funding and expensive funding, concentration risk associated with third party funds, and efficiency in operating expenses relative to operating revenues.

Reputation Risk

Risk Monitoring Committee monitors risks associated with operations, mainly activities of Information Technology System (ITS) and Management Information System (MIS). In particular, the Committee continues to monitor the frequency of customer complaints related to this activity.

Compliance Risk

In terms of implementation of Good Corporate Governance, Bank BTN has prepared GCG Guidelines and socialized to all officials and staff.

dan staf. Komite memfokuskan pada ketaatan Bank BTN terhadap penyampaian laporan kepada Bank Indonesia.

Berdasarkan pemantauan, penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan pertemuan yang telah dilakukan seperti tersebut di atas, Komite Pemantau Risiko berpendapat bahwa:

1. Bank BTN telah memiliki PKMR dan telah mengidentifikasi 8 jenis risiko. Namun demikian, proses revisi dan persetujuan PKMR yang sesuai dengan kondisi terkini diharapkan sudah dapat disetujui Dewan Komisaris.
2. Dalam hal risiko kredit, Bank BTN perlu lebih mengendalikan NPL, NPF, dan DRBM terhadap cabang-cabang tertentu yang NPL, NPF, serta DRBMnya relatif besar.
3. Dalam hal risiko likuiditas, Perseroan perlu lebih memperbaiki proporsi penghimpunan dana murah dan penghimpunan dana mahal, menurunkan *concentration risk*, serta menurunkan rasio BOPO.
4. Frekuensi keluhan nasabah yang berhubungan dengan aktivitas TSI dan SIM agar diupayakan terus menurun dengan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.
5. Ketaatan dalam penyampaian laporan kepada Bank Indonesia masih dapat lebih ditingkatkan.

Komite Pemantau Risiko juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas Bank BTN yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan saran kepada Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi dan Nominasi berpedoman kepada peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Selain itu, pelaksanaan tugas Komite Remunerasi dan Nominasi juga diatur dalam Piagam Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

The Committee focuses on observance by Bank BTN in submitting reports to Bank Indonesia.

Based on monitoring, review and discussion at meetings held as mentioned above, Risk Monitoring Committee believes that:

1. Bank BTN already has a PKMR and has identified eight types of risk. However, process of PKMR review and approval in accordance with the latest conditions is still expected to be approved by Board of Commissioners.
2. In terms of credit risk, Bank BTN needs to better control NPL, NPF, and DRBM of certain branches with relatively large NPL, NPF, and DRBM.
3. In terms of liquidity risk, the Company needs to further improve the proportion of low-cost funding and expensive fund raising, lower concentration risk, and reduce BOPO ratio.
4. The frequency of customer complaints relating to ITS and MIS activities has decreased through more improvement of customer service quality.
5. Adherence to submission of reports to Bank Indonesia can still be improved.

Risk Monitoring Committee has also submitted reports, suggestions and notes of various Bank BTN's activities that need to get attention from the Board of Commissioners in carrying out its oversight duties and functions and in providing advice to the Board of Directors.

Remuneration and Nomination Committee

Structure and Membership of Remuneration and Nomination Committee

In performing its duties, Remuneration and Nomination Committee is guided by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated 5 October 2006 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 on the implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. In addition, the performance of duties of the Remuneration and Nomination Committee is also stipulated in the Remuneration and Nomination Charter of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang dirumuskan dalam Surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara No.33/KOM/BTN/IX/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Pengangkatan Sdr. Deswandy Agusman Sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 207/DIR/2010 tanggal 8 September 2010. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut:

Per Januari - Juni 2010

Ketua : Zaki Baridwan
(Komisaris Utama - Independen)
Anggota : Gatot Mardiwastito (Komisaris)
Anggota : Rini Pudjiastuti
(Kepala Divisi Human Capital)

Per Juli s.d Desember 2010

Ketua : Deswandhy Agusman
(Komisaris Independen)
(diangkat per Juli 2010)
Anggota : Gatot Mardiwastito (Komisaris)
Anggota : Rini Pudjiastuti
(Kepala Divisi Human Capital)

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan penetapan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Komisaris, Direksi, pejabat eksekutif dan pegawai, yaitu:

- Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan remunerasi, yaitu:
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Structure and membership of Remuneration and Nomination Committee has been established by decision of a Board of Commissioner's meeting as formulated in the Letter of PT Bank Tabungan Negara's Board of Commissioners No.33/KOM/BTN/IX/2010 dated 1 September 2010 on the Appointment of Deswandy Agusman As Chairman of Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. and determined by Board of Directors Decree No. 207/DIR/2010 dated 8 September 2010. The composition of Remuneration and Nomination Committee of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. is as follows:

As of January - June 2010

Chairman : Zaki Baridwan
(President Commissioner -
Independent)
Member : Gatot Mardiwastito (Commissioner)
Member : Rini Pudjiastuti
(Human Capital Division Head)

As of July to December 2010

Chairman : Deswandhy Agusman
(Independent Commissioner)
(appointed as of July 2010)
Member : Gatot Mardiwastito (Commissioner)
Member : Rini Pudjiastuti
(Human Capital Division Head)

Duties and Responsibilities

Remuneration and Nomination Committee assists the Commissioners in carrying out oversight functions on matters relating to the determination of qualifications and the process of nomination and remuneration of Commissioners, Directors, executives and employees, namely:

- Duties and responsibilities relating to remuneration policy:
 - a. Evaluating remuneration policy.
 - b. Providing recommendations to Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board to be submitted to the General Meeting of Shareholders (RUPS).
 - c. Providing recommendations to Board of Commissioners regarding the remuneration policy for executive officers and employees as a whole to be submitted to Board of Directors.

- Tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan nominasi, yaitu:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
 - Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai telah dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Prestasi kerja individual.
 - c. Kewajaran dengan *peer group*.
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi sesuai Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank BTN.
 - Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi perbaikan atau perubahan yang diperlukan.
 - Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Direksi.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- Duties and responsibilities relating to nomination policy:
 - a. Formulating and provide recommendations regarding systems and procedures for selection and or replacement of members of Board of Commissioners, Directors and Sharia Supervisory Board to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders (RUPS).
 - b. Providing recommendations on prospective members of Board of Commissioners and or Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders (RUPS).
 - c. Providing recommendations on Independent Parties that may become members of the Committee to the Board of Commissioners.
 - Ensuring that the remuneration policy is at least in accordance with:
 - a. Financial performance and fulfillment of reserves as stipulated in the applicable laws and regulations.
 - b. Individual work performance.
 - c. Fairness to the peer group.
 - d. Consideration of goals and strategies in accordance with the Long Term Plan (RJP) of Bank BTN.
 - Assessing the feasibility of policies on providing and using facilities provided for Commissioners and Directors and providing recommendations for improvements or changes that are needed.
 - Developing selection criteria and nomination procedures for members of the Board of Directors and other Executive Officers, make an assessment system and provide recommendations on the number of members of the Board of Directors.
 - Carrying out other tasks given by Board of Commissioners relating to remuneration and nomination in accordance with applicable regulations.
 - Reporting assessment results and recommendations to the Board of Commissioners periodically or at any time if needed.

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk dengan Ketua Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri

Independence of Remuneration and Nomination Committee

Remuneration and Nomination Committee has been formed with the Independent Commissioner as Chairman with 2 (two) members consisting of 1 (one)

dari 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang perwakilan pegawai, yaitu: Kepala Divisi Human Capital.

Commissioner and 1 (one) employee representative, namely Head of Human Capital Division.

Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi tidak secara terpisah melainkan menjadi satu kesatuan.

Commissioners established a Remuneration and Nomination Committee that is not separate but rather one unit.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai sistem remunerasi, sistem nominasi dan *succession plan* Bank BTN.

Members of the Remuneration and Nomination Committee have competence and knowledge of the remuneration system, nomination system and succession plan of Bank BTN.

Susunan komposisi, keahlian dan kriteria independensi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Composition, expertise and independence criteria of the Remuneration and Nomination Committee have been in compliance with Bank Indonesia regulations.

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Frequency of Remuneration and Nomination Committee Meetings

Sepanjang tahun 2010, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali.

During the year 2010, Remuneration and Nomination Committee has met 5 (five) times.

Daftar Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Meeting Attendance List of Remuneration and Nomination Committees

Nama Name	Jumlah Kehadiran Attendance
Zaki Baridwan (sebagai Ketua dari Januari s/d Juni 2010) (as Chairman from January to June 2010)	3
Deswandhy Agusman (diangkat per Juli 2010) (appointed as of July 2010)	2
Gatot Mardiwasisto	5
Rini Pudjiastuti	5
TOTAL	5

Laporan Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Work Implementation Report of Remuneration and Nomination Committee

Selama tahun 2010, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

During 2010, Remuneration and Nomination Committee has carried out some of the following:

- Melakukan pembahasan dan evaluasi program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2009 dan menyusun program kerja tahun 2010.
- Mengembangkan dan mengesahkan Piagam Komite Remunersai dan Nominasi.
- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) Direksi, kepala divisi dan pejabat eksekutif Bank BTN, terutama

- Conducting discussion and evaluation of the work program of Remuneration and Nomination Committee for the period of 2009 and create a work program for 2010.
- Developing and ratifying Remuneration and Nomination Committee Charter.
- Evaluating and providing recommendations on policy setting of Key Performance Indicators (KPI) for Directors, division heads and executive officers of Bank BTN, mainly related to the

berkaitan dengan parameter yang digunakan dalam penilaian kinerja terkait dengan penerapan metode *Balanced Scorecard*.

4. Melakukan evaluasi dan rekomendasi tentang penetapan sistem *reward and punishment* pegawai Bank BTN, terutama terkait dengan kebijakan penetapan jasa produksi.
5. Memberikan rekomendasi agar manajemen dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga pemberdayaan sumber daya manusia dapat lebih efektif.
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2010.
 - Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap penerapan *Talent Pool*, terkait mekanisme dan metode yang digunakan yang harus selaras dengan penerapan.

parameters used in performance assessment related to implementation of the *Balanced Scorecard* method.

4. Conducting evaluations and recommendations concerning establishment of reward and punishment system Bank BTN's employees, primarily related to policy determination of production bonus.
5. Providing recommendations for management to optimize the use of information technology so that empowerment of human resources can be more effective.
6. Evaluating implementation of the work program of Remuneration and Nomination Committee for 2010.
 - Conduct evaluations and recommendations on implementation of the *Talent Pool*, and related mechanisms and methods used should be in harmony with its application.

Komite-Komite dibawah Direksi

Komite Manajemen Risiko

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Ketetapan Direksi No.12/DIR/DKMR/2004 tentang Komite Manajemen Risiko Perseroan tanggal 26 April 2004, maka susunan struktur organisasi komite manajemen risiko adalah sebagai berikut:

- Ketua : Direktur Kepatuhan
- Sekretaris : Kepala Risk Management Division
- Anggota : Seluruh Direksi kecuali Direktur Utama
Seluruh Kepala Divisi

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Komite Manajemen Risiko adalah untuk memastikan bahwa Perseroan pada setiap waktu telah memiliki kerangka manajemen risiko yang lengkap serta efektif dan penuh kehati-hatian (*prudential principle*) untuk melindungi kepentingan baik pemegang saham maupun nasabah.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama Tahun 2010, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 2 kali rapat dengan hasil keputusan sebagai berikut:

Committees under the Board of Directors

Risk Management Committee

Structure and Membership

Based on Directors Decree No.12/DIR/DKMR/2004 on Risk Management Committee of the Company dated 26 April 2004, the organizational structure composition of risk management committee is as follows:

- Chairman : Compliance Director
- Secretary : Risk Management Division Head
- Members : All Directors except the President Director
All Heads of Divisions

Duties and Responsibilities

The task of Risk Management Committee is to ensure that the Company at any time has had a comprehensive and effective and prudent risk management framework to protect the interests of both shareholders and customers.

Implementation of Duties and Frequency of Meetings

During the year 2010, Risk Management Committee held 2 meetings with the following decisions:

- Melakukan pembahasan mengenai Pembiayaan Multijasa BTN iB.
- Melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi atas rencana peluncuran produk baru, yaitu Kartu Kredit *Co-Brand* Bank BTN, Pembiayaan Talangan Haji BTN iB dan Pembiayaan Multimanfaat BTN iB.

Komite Aset & Liability – ALCO

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Direksi No.19/PD/DTRS/2004 tentang Asset Liability Committee (ALCO) Perseroan tanggal 22 Juli 2004, maka susunan struktur personil ALCO adalah sebagai berikut:

1. Ketua:
Direktur Utama
2. Sekretaris (merangkap anggota):
Direktur yang melakukan supervisi Treasury
3. Anggota:
 - Seluruh Direksi kecuali Direktur Utama
 - Seluruh Kepala Divisi

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite ALCO bertugas mengelola aset dan kewajiban Perseroan. Dalam aspek yang lebih luas, ALCO juga memiliki tugas mengelola likuiditas, pengelolaan perbedaan waktu (*gap management*), pengelolaan valuta asing, manajemen suku bunga, manajemen investasi dan pendapatan.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama Tahun 2010, Komite Aset & Liability telah mengadakan 12 kali rapat dengan hasil keputusan sebagai berikut:

- Melakukan *review* dan penyesuaian terhadap suku bunga produk Dana dan Kredit, Nisbah produk pendanaan Syariah serta *margin* dan bagi hasil pembiayaan Syariah.
- Menetapkan langkah-langkah strategis bagi peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga, khususnya dana ritel dan optimalisasi pertumbuhan kredit.
- Menetapkan kebijakan dan strategi transaksi Treasury, dalam bentuk penerbitan Obligasi dan Sekuritisasi KPR.

- Conduct discussions on BTN iB Multiservices Financing.
- Conduct discussions and made recommendations on the planned launch of new products, namely Bank BTN Co-Brand Credit Card, BTN iB Haji Bailout Financing and BTN iB Multibenefit Financing.

Asset & Liability Committee – ALCO

Structure and Membership

Based on Board of Directors Regulation No.19/PD/DTRS/2004 on Asset Liability Committee (ALCO) of the Company dated 22 July 2004, composition of ALCO personnel structure is as follows:

1. Chairman:
President Director
2. Secretary (also a member):
Director who supervises Treasury
3. Members:
 - All Directors except the President Director
 - All Heads of Divisions

Duties and Responsibilities

ALCO is responsible for managing the assets and liabilities of the Company. In a broader aspect, ALCO also has the task of managing liquidity, management of time differences (*gap management*), foreign exchange management, interest rate management, investment and income management.

Implementation of Duties and Frequency of Meetings

During the year 2010, Asset Liability Committee has held 12 meetings with the following decisions:

- Review and adjust interest rates of Funding and Credit products, Sharia finance product ratios and margins and profit sharing of Sharia financing.
- Define strategic measures for increasing third party funding, particularly retail funds and optimize credit growth.
- Establish policies and strategies on Treasury operations, in the form of issuance of bonds and mortgage securitization.

- Menetapkan langkah-langkah optimalisasi dan perbaikan rasio-rasio keuangan antara lain BOPO, NIM, LDR dan PPAP.
- Menetapkan langkah-langkah perbaikan kualitas kredit melalui rasio Non Performing Loan (NPL) dan Debitur Realisasi Baru Menunggak (DRBM).

Komite Kredit

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 02/DIR/DKPB/2010 tentang Komite Kredit tanggal 15 Januari 2010, maka susunan struktur Organisasi Komite Kredit adalah sebagai berikut:

1. Ketua:
Direktur Utama
2. Wakil Ketua:
Direktur yang melakukan supervisi Kredit
3. Sekretaris:
 - Kepala Divisi Pengelolaan Kredit
 - Kepala Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit
4. Anggota:
 - Wakil Direktur Utama
 - Direktur Akunting, Direktur Treasuri dan Direktur Sekretariat Perusahaan
 - Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis, Kepala Divisi Treasuri, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Akuntansi dan Kepala Divisi Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit bertugas untuk memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemberian kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit sesuai batas wewenangnya berdasarkan integritas profesionalisme yang dilakukan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama Tahun 2010, Komite Kredit telah mengadakan beberapa kali rapat membahas dan memutuskan permohonan-permohonan kredit dengan *plafond* kredit yang melebihi wewenang Kantor Cabang dan harus diputuskan dalam Komite Kredit.

- Define steps to optimize and improve financial ratios, among others BOPO, NIM, LDR and PPAP.
- Establish measures of credit quality improvement through Non Performing Loan (NPL) ratio and Newly Realized Debtors in Arrears (DRBM).

Credit Committee

Structure and Membership

Based on Directors Regulation No. 02/DIR/DKPB/2010 on Credit Committee dated 15 January 2010, composition of Credit Committee's organizational structure is as follows:

1. Chairman:
President Director
2. Deputy Chairman:
Director Supervising Credit
3. Secretary:
 - Head of Loans Management Division
 - Head of Loans Collection and Workout Division
4. Members:
 - Deputy President Director
 - Accounting Director, Treasury Director and Director of Corporate Secretariat
 - Head of Policy and Business Development, Division Head of Treasury, Head of Corporate Secretary Division, Head of Accounting Division and Head of Sharia Division

Duties and Responsibilities

Credit Committee is in charge of presenting the decision of approval or rejection of loan applications, restructuring and settlement of loans that do not comply with the provisions that have been established and is responsible for carrying out tasks relating to the granting of loans, restructuring and settlement within the limits of its authority based on professional integrity conducted honestly, objectively, carefully and thoroughly.

Implementation of Duties and Frequency of Meetings

During 2010, Credit Committee held several meetings to discuss and decide on loan applications that exceeded the authority of Branch Offices and had to be decided in the Credit Committee.

Komite Produk

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Direksi No.04/DIR/DPRT/0202 tentang Komite Produk Perseroan tanggal 22 Februari 2002, maka susunan struktur Organisasi Komite Produk adalah sebagai berikut:

1. Ketua :
Direktur III
2. Anggota:
 - Seluruh Direksi, kecuali Direktur Utama
 - Seluruh Kepala Divisi

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Produk bertugas memberikan pengarahan dan pertimbangan atas rencana pengembangan produk Perseroan sehingga produk Perseroan yang akan dikeluarkan memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku serta mempunyai daya saing dan daya tarik terhadap kompetisi pasar.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama Tahun 2010, Komite Produk telah mengadakan beberapa kali rapat dengan materi mengenai pengembangan produk dan layanan baru sebagai berikut:

- Pembahasan kerjasama antara Bank BTN dengan Bank Mandiri dalam hal penerbitan Kartu Kredit *Co-Brand* Bank BTN.
- Pengembangan produk dan layanan baru, seperti Kartu Debit BTN, Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara, Tabungan BTN Haji dan BTN Prioritas.
- Pengembangan fitur-fitur produk dan layanan nasabah, seperti Program Pengembangan Operasional.
- Pengembangan produk dan layanan Syariah antara lain Pembiayaan Multijasa BTN iB, Pembiayaan Multimanfaat BTN iB, SPP Online dan Payroll BTN iB.
- Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga, antara lain Perguruan Tinggi dan Kantor Pos.
- Peningkatan kualitas layanan di *outlet-outlet* Bank BTN.

Product Committee

Structure and Membership

Based on Directors Regulation No.04/DIR/DPRT/0202 on Product Committee of the Company dated 22 February 2002, composition of Product Committee's organizational structure is as follows:

1. Chairman:
Director III
2. Members:
 - All Directors except the President Director
 - All Heads of Divisions

Duties and Responsibilities

Product Committee is responsible for providing guidance and consideration of the Company's product development plans so that Bank BTN's newly launched products can meet the applicable provisions and procedures and have the competitiveness and attractiveness of market competition.

Implementation of Duties and Frequency of Meetings

During 2010, Product Committee has held several meetings with materials on development of new products and services as follows:

- Discussion on cooperation between Bank BTN and Bank Mandiri issuance of Bank BTN Co-Brand Credit Card.
- Development of new products and services, such as BTN Debit Card, Tabungan BTN Junior, Tabungan BTN Juara, Tabungan BTN Haji and BTN Prioritas.
- Development of product features and customer service, such as Operations Development Program.
- Development of Sharia products and services including BTN iB Multiservice Financing, BTN iB Multibenefit Financing, Online SPP and BTN iB Payroll.
- Increased cooperation with third parties, including Universities and the Post Office.
- Improved quality of service in outlets of Bank BTN.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 25/PD/ICTD/2010 tanggal 22 November 2010 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (Steering Committee for IT) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, maka susunan struktur Organisasi Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

1. Ketua:
Direktur yang melakukan supervisi Teknologi Informasi
2. Sekretaris merangkap anggota:
Kepala *Information and Communication Technology Division*
3. Anggota:
 - Direktur yang melakukan supervisi *Risk Management and Compliance*
 - Direktur yang melakukan supervisi *Consumer Banking*
 - *Risk Management Division Head*
 - *Operation and Business Support Division Head*
 - *Regional Office Head*
 - *Treasury Division Head, Logistic and Network Division Head, Finance and Accounting Division Head, Consumer Funding and Services Division Head, Sharia Division Head, Mortgage and Consumer Lending Division Head, Commercial Funding and Services Division Head* sebagai anggota tidak tetap

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi yang terkait dengan:

- Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank BTN;
- Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi;
- Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati (*project charter*);

Information Technology Steering Committee

Structure and Membership

Based on Directors Regulation No. 25/PD/ICTD/2010 dated 22 November 2010 on Information Technology Steering Committee of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, composition of Information Technology Steering Committee's organizational structure is as follows:

1. Chairman:
Director supervising Information Technology
2. Secretary and member :
Head of Information and Communication Technology Division
3. Members:
 - Director supervising Risk Management and Compliance
 - Director supervising Consumer Banking
 - Risk Management Division Head
 - Operation and Business Support Division Head
 - Regional Office Head
 - Treasury Division Head, Logistic and Network Division Head, Finance and Accounting Division Head, Consumer Funding and Services Division Head, Sharia Division Head, Mortgage and Consumer Lending Division Head, Commercial Funding and Services Division Head as non-permanent members

Duties and Responsibilities

Information Technology Steering Committee is responsible for providing recommendations to Board of Directors relating to:

- Information Technology Strategic Plan in line with the strategic plan of Bank BTN's business activities;
- Suitability of Information Technology projects approved by the Information Technology Strategic Plan;
- Suitability between the implementation of Information Technology projects with the agreed project plan (*project charter*);

- Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank BTN;
- Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank BTN pada sektor Teknologi Informasi agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank BTN;
- Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya;
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama Tahun 2010, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan 3 kali rapat dengan hasil keputusan sebagai berikut:

- Proyek-proyek IT prioritas pada tahun 2010.
- Keselarasan terhadap program IT, *people* dan *process*.
- Tindak lanjut hasil temuan audit IT.
- Struktur organisasi Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- Implementasi Aplikasi ITM Release 4.1.
- Pengembangan IT Governance.
- Project Inisiatif IT tahun 2011.

Komite Personalia

Struktur dan Keanggotaan

Berdasarkan Peraturan Direksi No.15/PD/DSDM/2008 tentang Komite Personalia Perseroan tanggal 28 Juli 2008, maka susunan struktur Organisasi Komite Personalia adalah:

1. Ketua:
Direktur yang melakukan supervisi *Human Capital Division*
2. Sekretaris merangkap anggota:
Kepala Divisi *Human Capital*
3. Anggota:
 - Kepala Divisi Audit Internal
 - Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis
 - Kepala Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit
 - Kepala Divisi Pengelolaan Kredit
 - Kepala Divisi Pemasaran Ritel

- Compliance with Information Technology management information system needs and the business needs of the Bank BTN;
- Effectiveness of measures to minimize the risk of Bank BTN's investment in the Information Technology sector so that the investment contributes to the achievement of Bank BTN's business objectives;
- Monitoring of the performance of Information Technology and improvement efforts;
- Efforts to resolve the related problems of Information Technology, which cannot be resolved by the user and the provider unit, effectively and timely

Implementation of Duties and Frequency of Meetings

During the year 2010, Information Technology Steering Committee has held 3 (three) meetings with the following decisions:

- Priority IT projects in 2010.
- Alignment of IT programs, *people* and *process*.
- Follow-up of IT audit findings.
- Organizational structure of Information Technology Steering Committee.
- Implementation and Application of ITM Release 4.1.
- Development of IT Governance.
- IT project initiatives in 2011.

Personnel Committee

Structure and Membership

Based on Directors Regulation No.15/PD/DSDM/2008 on Personnel Committee of the Company dated 28 July 2008, composition of Personnel Committee's organizational structure is as follows:

1. Chairman:
Director supervising Human Capital Division
2. Secretary and member:
Human Capital Division Head
3. Members :
 - Head of Internal Audit Division
 - Head of Policy and Business Development
 - Head of Credit Development and Rescue
 - Credit Management Division Head
 - Division Head of Retail Marketing

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Personalia bertugas menetapkan dan memutuskan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *human capital*, kenaikan dan variabel imbal jasa, insentif dan kemaslahatan serta memantau dan mengawasi pelaksanaan program *human capital* dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan *human capital*.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat

Selama Tahun 2010, Komite Personalia telah mengadakan 19 kali rapat dengan hasil keputusan sebagai berikut:

- Menetapkan promosi dan mutasi terhadap karyawan.
- Menetapkan strategi dan kebijakan mengenai rekrutmen karyawan sesuai kebutuhan dan strategi bisnis Bank BTN.
- Menetapkan strategi dan program pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan karyawan.
- Memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai *reward* berupa insentif dan sanksi bagi karyawan.
- Menetapkan kebijakan *Management and Employee Stock Option* (MESOP) Bank BTN.

Dewan Pengawas Syariah

Struktur dan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Struktur dan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Bank BTN per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

1. Ketua: Nazri Adlani
2. Anggota: Mohamad Hidayat
3. Anggota: Muhammad Syakir Sula

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Memberikan nasihat dan saran kepada Direktur serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) agar sesuai dengan prinsip Syariah, yang meliputi:

- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank BTN.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank BTN sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
- Memberikan opini Syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS Bank BTN.
- Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme

Duties and Responsibilities

Personnel Committee is in charge of setting and deciding strategies, policies and the human capital management system, increases and variables of remuneration, incentives and benefits and to monitor and oversee the implementation of human capital programs and resolve issues related to human capital.

Implementation of Duties and Frequency of Meetings

During 2010, Personnel Committee has held 19 meetings with the following decisions:

- Define promotion and rotation of employees.
- Establish strategies and policies regarding recruitment of employees as needed and business strategies of the Bank.
- Establish strategies and educational programs and training for staff development.
- Decide and establish policies regarding rewards in the form of incentives and sanctions for employees.
- Set policy of Management and Employee Stock Option (MESOP) for Bank BTN.

Sharia Supervisory Board

Structure and Membership of Sharia Supervisory Board

Structure and membership of Sharia Supervisory Board of Bank BTN as of 31 December 2010 are as follows:

1. Chairman: Nazri Adlani
2. Member: Mohamad Hidayat
3. Member: Muhammad Syakir Sula

Duties and Responsibilities of Sharia Supervisory Board

Provide advice and suggestions to the Directors, oversee activities of Sharia Business Unit (UUS), and conform to the principles of Sharia including to:

- Assess and ensure compliance with Sharia principles in the operational guidelines and products issued by UUS of Bank BTN.
- Oversee new product development process by UUS of Bank BTN since the beginning until the issuance of such product.
- Give Sharia opinions on new products and/or restructured financing.
- Request fatwa to the National Sharia Board for UUS new products of Bank BTN.
- Conduct periodic reviews for compliance with Sharia principles on the mechanisms of

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank BTN.

- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas Syariah

Selama Tahun 2010, DPS telah melaksanakan 19 (sembilan belas) kali rapat dan menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- Memberikan opini mengenai produk dan layanan UUS Bank BTN, yaitu Pembiayaan Multijasa BTN iB, Pembiayaan Suka-Suka BTN iB, Layanan SPP Online BTN iB, Deposit on Call BTN iB, Pembiayaan Rekening Koran (*Revolving*) dan Pembiayaan Talangan Haji BTN iB.
- Memberikan opini mengenai:
 - ✓ Akad *Mudharabah* Bank BTN dengan PT Sarana Multigriya Finance mengenai *Refinancing Portfolio* KPR BTN iB.
 - ✓ Ketentuan mengenai alih nasabah (Novasi) Pembiayaan KPR BTN iB.
 - ✓ Akad *Mudharabah* pembukaan rekening Deposito on Call.
 - ✓ Pelaksanaan transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah.
 - ✓ Penentuan biaya administrasi (*fee ujroh*) Rekening Antar Kantor (RAK) Cabang.
 - ✓ Rencana kerjasama Talangan Haji antara UUS Bank BTN dengan AJB Bumiputera 1912.
 - ✓ Pembahasan pemberian bagi hasil Deposito on Call BTN iB.
 - ✓ Akad Gadai BTN iB.
 - ✓ Pembahasan program pemberian hadiah bagi pengguna produk dan layanan UUS.
 - ✓ Pembahasan Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
 - ✓ Pembahasan koreksi klausul-klausul Akad *Mudharabah* kerjasama Refinancing Portfolio KPR BTN iB antara UUS Bank BTN dengan PT Sarana Multigriya Finance.

Pelatihan Dewan Pengawas Syariah

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah, selama Tahun 2010, anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BTN telah mengikuti berbagai program pelatihan, *workshop*, konferensi, seminar antara lain:

collection and disbursement of funds and Bank BTN's services.

- Request data and information related to Sharia aspects of the UUS unit within the framework of the implementation of its duties.

Implementation of Sharia Supervisory Board Duties

During the year 2010, Sharia Supervisory Board has conducted 19 (nineteen) meetings and produced some of the following:

- Giving opinions about products and services by UUS of Bank BTN, namely BTN iB Multiservice Financing, BTN iB Suka-Suka Financing, BTN iB SPP Online Service, BTN iB Deposit on Call, Current Account Financing (*Revolving*) and BTN iB Haji Bailout Financing.
- Giving opinions about:
 - ✓ *Mudharabah* Agreement between Bank BTN with PT Sarana Multigriya Finance regarding BTN iB KPR Portfolio Refinancing.
 - ✓ Provisions concerning the transfer of customers (*Novation*) of BTN iB KPR Financing.
 - ✓ *Mudharabah* Agreement on opening accounts for Deposito on Call.
 - ✓ Implementation of Sharia Interbank Money Market transactions.
 - ✓ Determination of administration charges (*ujroh fee*) on Inter-Office Accounts (RAK) for Branches.
 - ✓ Haji Bailout cooperation plan between UUS of Bank BTN with AJB Bumiputera 1912.
 - ✓ Discussion of providing profit sharing to BTN iB Deposito on Call.
 - ✓ Pledge Agreement of BTN iB.
 - ✓ Discussion of gift-giving program for users of UUS products and services.
 - ✓ Discussion of BTN iB KPR Sejahtera Financing with Housing Financing Liquidity Support Facility (FLPP).
 - ✓ Discussion of correction clauses to *Mudharabah* Agreement BTN iB KPR Portfolio Refinancing cooperation between UUS of Bank BTN with PT Sarana Multigriya Finance.

Training of Sharia Supervisory Board

To support the implementation of Sharia Supervisory Board's duties, during the year 2010, members of Sharia Supervisory Board of the Bank have participated in various training programs, workshops, conferences, seminars, among others:

Nazri Adlani

- *Ijtima Samawi* (Forum Syariah yang diadakan Dewan Syariah Nasional/DSN)

Mohamad Hidayat

- *Ijtima Samawi* (Forum Syariah yang diadakan Dewan Syariah Nasional/DSN)

Muhammad Syakir Sula

- *Ijtima Samawi* (Forum Syariah yang diadakan Dewan Syariah Nasional/DSN)
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah

Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal, Bank BTN sebagai perusahaan publik membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat yang dijabat oleh Rakhmat Nugroho (biografi singkat Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada bagian Data Perusahaan dalam laporan tahunan ini).

Tugas Sekretaris Perusahaan adalah:

- Memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak.
- Berperan sebagai penghubung utama (*contact person*) antara Bank, BAPEPAM-LK dan publik.
- Mengikuti perkembangan pasar modal dan memberikan masukan kepada Direksi mengenai ketentuan tentang pasar modal.

Bank BTN telah melaporkan penunjukan Sekretaris Perusahaan kepada BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia serta mengumumkannya di salah satu harian nasional.

Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2010, antara lain:

- Melakukan paparan kinerja triwulanan Bank BTN kepada media sebagai bentuk keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik.
- Memberikan informasi kepada pemegang saham dan masyarakat terkait kinerja dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Bank BTN.
- Menyampaikan laporan berkala dan insidental kepada Bapepam-LK dan bursa, termasuk laporan mengenai hasil pelaksanaan aksi-aksi korporasi seperti IPO.
- Mengkoordinasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Direksi dan membuat risalah hasil Rapat Direksi.

Nazri Adlani

- *Ijtima Samawi* (Sharia Forum held by the National Sharia Council)

Mohamad Hidayat

- *Ijtima Samawi* (Sharia Forum held by the National Sharia Council)

Muhammad Syakir Sula

- *Ijtima Samawi* (Sharia Forum held by the National Sharia Council)
- Certification of the Sharia Supervisory Board

Corporate Secretary

To improve services to investors, Bank BTN as a public company has formed a Corporate Secretary with the role of the Bank's liaison with investors, capital market participants, regulators and analysts which is chaired by Rakhmat Nugroho (a brief biography of the Corporate Secretary can be viewed in the Corporate Data section of this annual report).

Duties of the Corporate Secretary are:

- Facilitate effective communication and ensure availability of information to various parties.
- Serve as primary contact person between the Bank, BAPEPAM-LK and the public.
- Follow the development of capital markets and advise Board of Directors on provisions concerning the capital market.

Bank BTN has reported appointment of the Corporate Secretary to BAPEPAM-LK and the Indonesian Stock Exchange and made announcement in one national daily.

Some of the activities undertaken by the Corporate Secretary during 2010 are among others:

- Conduct exposure of the Bank's quarterly performance to the media as a form of information disclosure and Good Corporate Governance.
- Provide information to shareholders and related communities on performance and activities of the Company.
- Deliver periodic and incidental reports to Bapepam-LK and the stock exchange, including a report on the results of the implementation of corporate actions such as IPO.
- Coordinate the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders.
- Attend every execution of the Board of Directors Meeting and make minutes of the Board of Directors Meeting.

IT Governance

IT Governance Bank BTN merupakan tata laksana dalam bentuk perencanaan dalam menerapkan dan menggunakan IT yang digunakan oleh suatu organisasi agar sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Penerapan dan pengembangan *IT Governance* Bank BTN mengacu kepada penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan BI untuk penggunaan teknologi informasi yang wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha bank dan telah ditetapkan tolak ukur dan standar yang harus dipatuhi oleh Bank BTN mengenai *IT Governance*, yakni: PBI nomor: 9/15/2007, tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum dimana Bank BTN wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan Teknologi Informasi.

BANK BTN memiliki *IT Governance control objective maturity level* sebesar 5.00/5.00 berdasarkan COBIT ME4 'Provide IT Governance', dengan rata-rata *IT Governance control objective maturity level* pada sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan sebesar 3,59/5.00.

Sedangkan rata-rata *IT Governance control objective maturity level* industry dari 37 BUMN yang di *pooling* tahun 2011 adalah 2,44/5.00. (Lab IT Governance UI, Maret 2011)

Hasil *pooling* di yang dilakukan oleh Lab IT Governance Universitas Indonesia pada Maret tahun 2011 menunjukkan bahwa Bank BTN memiliki *IT Governance control objective maturity level* sebesar 5.00/5.00 berdasarkan COBIT ME4 'Provide IT Governance', dengan rata-rata *IT Governance control objective maturity level* pada sektor Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan sebesar 3,59/5.00. Sedangkan rata-rata *IT Governance control objective maturity level* industry dari 37 BUMN yang di *pooling* tahun 2011 adalah 2,44/5.00. Hasil ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank BTN dalam membangun dan menerapkan *IT governance* pada tahun-tahun sebelumnya.

Selama tahun 2010, beberapa upaya peningkatan GCG yang terkait erat dengan dukungan IT, antara lain:

IT Governance

Bank BTN's *IT Governance* is management in the form of planning in implementing and using IT by the organization to fit with the vision, mission and goals of the organization.

IT Governance implementation and development in Bank BTN refers to the application of risk management in accordance with Bank Indonesia regulations to use information technology that must be adapted to the purpose, business policy, size and complexity of banking business, and benchmarks and standards established to be adhered to by Bank BTN on *IT Governance*, namely: PBI Number 9/15/2007 on the application of risk management in the use of information technology by commercial banks, which Bank BTN is required to implement effective risk management on the use of Information Technology.

BANK BTN has *IT Governance control objective maturity level* of 5.00/5.00 based on COBIT ME4 'Provide IT Governance', with an average of *IT Governance control objective maturity level* in the sectors of Finance, Rental and Service Company of 3.59/5.00.

While the average *IT Governance control objective maturity level* industry of 37 state-owned companies pooled in 2011 was 2.44/5.00. (IT Governance Lab, UI, March 2011)

Pooling results conducted by the *IT Governance* Lab, University of Indonesia in March 2011 showed that the Bank has the objective of *IT governance control objective maturity level* of 5.00/5.00 based on COBIT ME4 'Provide IT Governance', with an average *IT governance control objective maturity level* in the sectors of Finance, Rental and Business Services of 3,59/5.00. While the average *IT governance control objective maturity level* of 37 state-owned companies pooled in 2011 was 2,44/5.00. These results cannot be separated from the efforts undertaken by Bank BTN in developing and implementing *IT governance* in the previous years.

During 2010, several efforts to increase GCG are closely related to IT support, among others:

Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Audit Berbasis IT (Audit Management System)

- Peranan Internal Audit Division (IAD) sebagai *Strategic Business Partner* diwujudkan dengan diterapkannya Audit yang Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*) yang dikembangkan oleh IAD sejak tahun 2002 kemudian dilanjutkan dengan diterapkannya ISO 9001:2008 sebagai komitmen IAD untuk menjaga mutu audit supaya dapat memberikan *assurance* yang lebih baik kepada *stakeholders*. Ruang Lingkup pelaksanaan audit yang semakin luas sejalan dengan berkembangnya bisnis Bank BTN menyebabkan kebutuhan akan dukungan sistem teknologi informasi menjadi lebih besar.
- Sejak akhir tahun 2010, Bank BTN telah mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi Audit Management System (AMS). Aplikasi ini membantu kegiatan otomasi dan integrasi seluruh kegiatan audit mulai dari proses perencanaan audit, persiapan dan pelaksanaan *field audit*, *quality assurance*, serta pelaporan dan *monitoring* tindak lanjut audit.
- Peningkatan yang telah dicapai melalui pengembangan AMS ini antara lain:
 - ✓ Sistem komputerisasi dan otomasi yang terintegrasi mulai dari kegiatan perencanaan sampai, pelaporan hingga monitoring hasil audit. Aplikasi ini juga memungkinkan integrasi dengan sistem lain seperti Risk Assessment Profil Risiko dari Risk Management Division.
 - ✓ Kemudahan akses oleh manajemen dan pihak internal maupun eksternal dengan dibatasi sesuai kewenangan.
 - ✓ Fitur *paperless* sehingga meningkatkan efisiensi waktu bagi auditor dalam mempersiapkan dokumen auditnya serta memungkinkan dikurangnya penggunaan kertas dan dokumentasi menjadi lebih baik.
 - ✓ Dokumentasi berbasis komputer sehingga dapat menghemat kebutuhan ruang untuk penyimpanan dan memudahkan akses terhadap informasi.
 - ✓ Mengurangi kegiatan manual sehingga meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko kesalahan manusia.
 - ✓ Kemudahan pelaksanaan *monitoring* oleh manajemen untuk seluruh kegiatan audit baik melalui media internet maupun intranet.

Development and Application of IT-Based Audit Management System

- The role of Internal Audit Division (IAD) as a Strategic Business Partner is realized with the implementation of Risk-Based Audit developed by IAD since 2002, and then continued with the implementation of ISO 9001:2008 as IAD's commitment to maintain the quality of audits in order to provide better assurance to stakeholders. The scope of the expanded audit is in conformity with Bank BTN's business growth causing the need for support information technology systems become larger.
- Since the end of 2010, Bank BTN has developed and implemented application of Audit Management System (AMS). This application helps automation and integration of all activities of the audit from audit planning process, preparation and execution of field audits, quality assurance, and reporting and monitoring follow-up audit.
- Improvement achieved through the development of AMS includes:
 - ✓ Integrated computerization and automation system from planning to reporting, to monitoring audit results. The application also allows integration with other systems such as Risk Assessment Risk Profile of Risk Management Division.
 - ✓ Ease of access by management and internal and external parties in accordance with the limited authority.
 - ✓ Paperless features thereby increasing the efficiency of time for the auditor in preparing audit documents and allowing reduced use of paper and documentation for the better.
 - ✓ Computer-based documentation in order to save space requirement for storage and easy access to information.
 - ✓ Reduce manual activities that improve accuracy and reduce the risk of human error.
 - ✓ Ease of implementation monitoring by management for all audit activities either via internet or intranet.

Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Dalam rangka penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank BTN, dan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009, Bank BTN mengembangkan dan menerapkan Aplikasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah Bank BTN.

Aplikasi ini menggantikan dan/atau merupakan pengembangan aplikasi sebelumnya yang mengacu kepada ketentuan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. 2/1/KEP.PPATK/2003 dan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) No. 3/1/KEP.PPATK/2004 berupa: "Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia jasa Keuangan".

Aplikasi ini memiliki kemampuan:

- Mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank sehingga dapat menyajikan informasi serta laporan dengan cepat dan akurat sesuai dengan apa yang tertera dalam Peraturan BI.
- Memberikan laporan yang dikaitkan dengan profil nasabah, seperti pekerjaan, penghasilan dan lokasi usaha dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
- Memberikan laporan *Cash Transaction Report* (CTR) dan *Suspicious Transaction Report* (STR) sesuai dengan aplikasi GRIPS yang dikembangkan oleh PPATK.
- Mengidentifikasi Nasabah Bank BTN yang berasal dari suatu negara atau memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam data base Daftar Teroris.
- Melakukan pengelolaan profil nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File*).

Development and Implementation of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Application Program (APU and PPT)

In order to implement the program on Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention at Bank BTN, and referring to Bank Indonesia Regulation No. 11/28/PBI/2009, Bank BTN develops and implements the Application Implementation Program on Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention (APU and PPT) that can identify, analyze, monitor and provide effective reporting on the characteristics of transactions conducted by Bank BTN's customers.

This application replaces and/or development of a previous application that refers to the provisions of the Decision of Head of Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) No. 2/1/KEP.PPATK/2003 and the Decision of Head of Financial Transaction reports and Analysis Center No. 3/1/KEP.PPATK/2004 in the form of "Cash Financial Transaction Report Guidelines and Reporting Procedures for Financial Service Providers".

This application has the ability to:

- Identify, analyze, monitor and provide effective reporting on the characteristics of transactions conducted by customers of the bank so as to provide information and reports quickly and accurately in accordance with what is stated in BI Regulations.
- Provide reports associated with customer profiles, such as employment, income and location of business with risk-based approach.
- Provide reports on Cash Transaction Report (CTR) and Suspicious Transaction Report (STR) in accordance with GRIPS application developed by PPATK.
- Identify a Bank BTN's Customer originating from a country or has a similarity or resemblance to the name listed in the Terrorist List data base.
- Perform integrated management of customer profile (Single Customer Identification File).

- Memenuhi dan mempercepat proses bisnis dalam menyajikan laporan data nasabah dengan memperhatikan 7 parameter FORMUSA (*Fast, Open, Reliable, Measurable, User Friendly, Secure, dan Accessible anytime anywhere*).
- Dapat diakses oleh seluruh *user* Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Syariah.

Pengembangan dan Penerapan Aplikasi PSAK 50/55

Bank Indonesia sebagai regulator perbankan telah meminta kepada seluruh Bank Umum untuk mempersiapkan penerapan PSAK 50 (r2006) dan PSAK 55 (r2006) yang akan berlaku efektif per tanggal 01 Januari 2010, dimana PSAK tersebut pada dasarnya akan digunakan untuk kepentingan penyusunan dan penyajian laporan keuangan, termasuk laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan keuangan publikasi.

Milestone kritical yang telah dilakukan Bank BTN dalam pengembangan dan penerapan aplikasi ini terdiri dari beberapa fase, sebagai berikut :

- Fase pengadaan *software* dan *hardware*.
- Fase *development* dan kustomisasi berdasarkan kondisi data dan sistem dimiliki BTN agar sesuai dengan ketentuan PSAK 50 (r2006) dan PSAK 55 (r2006).
- Fase *Fine Tuning* untuk melakukan persiapan akhir sudah harus diselesaikan.
- Phase *Go-Live*.

Membangun Key Risk Indicator (KRI) dan Database Risiko dengan Dukungan EDW

- Bank BTN telah melakukan *operational risk self assessment* melalui *check list* secara triwulanan untuk mengidentifikasi *operational key risk indicator* di Kantor Cabang. Hasil *self assessment* yang ditujukan untuk memetakan potensi risiko operasional dari unit-unit kerja Kantor Cabang tersebut. Di samping digunakan sebagai dasar pencatatan kerugian risiko operasional dalam *database* risiko operasional juga berguna untuk mengembangkan parameter risiko operasional pada laporan profil risiko dan persiapan untuk melakukan pengukuran risiko operasional dengan menggunakan model internal (*advanced measurement approach*). Dalam rangka membangun sistem informasi

- Meet and accelerate business processes in the present customer data report with respect to 7 FORMUSA (*Fast, Open, Reliable, Measurable, User Friendly, Secure, and Accessible anytime anywhere*) parameters.
- Can be accessed by all users in Head Office, Branch Office or Sharia Branch Office.

Development and Implementation of PSAK 50/55 Application

Bank Indonesia as the banking regulator has asked all Commercial Banks to prepare for the implementation of PSAK 50 (r2006) and PSAK 55 (r2006) which will be effective as of 01 January 2010, in which PSAK will basically be used for preparation and presentation of financial statements, including publication of financial statements as stipulated in Bank Indonesia regulation regarding publication of financial statements.

Critical milestones that have been made by Bank BTN in the development and implementation of this application consist of several phases, as follows:

- Phase of software and hardware procurement.
- Development and customization phase based on the condition of BTN data and system to conform with the provisions of PSAK 50 (r2006) and PSAK 55 (r2006).
- Fine tuning phase to make final preparations that should be done.
- Go-Live phase.

Developing Key Risk Indicators (KRI) and Risk Database with EDW Support

- Bank BTN has conducted operational risk self-assessment through a check list on a quarterly basis to identify key operational risk indicators in the Branch Office. The result of self-assessment is intended to map potential operational risks of working units of such Branch Office. Besides being used as the basis of operational risk losses recorded in the database of operational risk, it is also useful for developing operational risk parameters on the risk profile reports and prepare to perform measurement of operational risk using internal models (*advanced measurement approach*). In order to build a timely and comprehensively operational risk management system, in 2010

manajemen risiko operasional secara tepat waktu dan komprehensif, pada tahun 2010 bank telah menganggarkan untuk pengadaan solusi pengelolaan Key Risk Indicator (KRI) dengan bantuan *vendor* guna mengetahui pemicu risiko operasional (*operational risk driver*).

- Pembangunan *database* risiko yang saat ini tengah dilakukan Risk Management Division (RMD) terkait dengan kebijakan IT yang dibuat adalah sudah pada tahap penyampaian jenis data yang diperlukan oleh Bank BTN dalam rangka penyusunan profil risiko Bank BTN dan untuk keperluan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bank sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Terkait dengan pembangunan *database* risiko tersebut, *Information and Communication Technology Division* (ICTD) telah menyiapkan infrastrukturnya berupa *Enterprise Data Warehouse* (EDW). Hingga saat ini telah dilakukan pembahasan secara intensif antara ICTD dan RMD guna menyelaraskan antara kebutuhan *database* oleh RMD dan kemungkinan ketersediaan data dimaksud dalam EDW. Sejalan dengan hal tersebut, RMD saat ini juga tengah menyusun kebijakan pembangunan *database* risiko dimaksud dan penyusunan kebijakan tersebut telah mencapai tahap finalisasi.

Pengembangan dan Penerapan Aplikasi e-Procurement dan Tata Kelola Aset

Seiring dengan semakin berkembangnya Bank BTN, maka semakin banyak pula aset yang harus dari proses pengadaannya sampai *disposal*. Oleh Karena itu, Bank BTN melakukan pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (*E - Procurement*) untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi. Begitu pula dalam mengelola aset Bank BTN yang sangat beragam, maka dikembangkanlah *software* tata kelola aset. Dengan pengelolaan aset yang baik, mulai dari pengadaannya sampai *disposal*, Bank BTN berkeyakinan mampu mengurangi biaya yang tidak perlu sehingga mampu meningkatkan kinerja menjadi lebih baik.

Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Human Capital Information System

Dalam rangka implementasi struktur organisasi baru Bank BTN, diperlukan pengembangan dan

Bank has budgeted for the procurement of management solution Key Risk Indicators (KRI) with the help of vendors in order to capture operational risk drivers.

- Development of risk database now being done by the Risk Management Division (RMD) related to IT policy made is already at the submission stage of data types required by Bank BTN in order to arrange Bank BTN's risk profile and for the purpose of calculating Bank BTN's Capital Adequacy Ratio as a provision stipulated by Bank Indonesia. Related to the development of the risk database referred to, Information and Communication Technology Division (ICTD) has set up its infrastructure in the form of Enterprise Data Warehouse (EDW). Intensive discussions have been undertaken to date between ICTD and RMD in order to harmonize the needs of the database by RMD and the possible availability of the data referred to in EDW. In line with this, RMD is also drafting a policy database development and preparation of such risks and these policies have reached the finalization stage.

Application Development and Implementation of e-Procurement and Asset Governance

Along with the development of Bank BTN, the more assets must be managed from the process of procurement until disposal. Therefore, Bank BTN has performed the development and implementation of a Procurement Management Information System (E-Procurement) to improve the effectiveness and efficiency. Similarly, to manage the very diverse assets of Bank BTN has been developed a software for asset governance. With good management of assets, ranging from procurement to disposal, Bank BTN believes able to reduce unnecessary costs so as to improve better performance.

Application Development and Implementation of Human Capital Information System

In order to implement a new organizational structure of Bank BTN, there should be an accurate

penerapan terhadap aplikasi *Human Capital Information System* (HCIS) yang akurat sehingga dibutuhkan suatu sistem yang handal.

Kecepatan penyajian informasi HCIS menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan bisnis oleh manajemen. Untuk itu perlu dukungan teknologi yang tepat guna untuk mengakomodir kebutuhan tersebut.

Pengembangan sistem HCIS ini dilakukan karena sistem yang ada sebelumnya, tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan 'openness' sehingga sulit untuk dikembangkan dan dalam rangka memenuhi kebutuhan struktur organisasi baru Bank BTN dan 'User Requirement' *Human Capital Management*. Dalam jangka panjang, hal ini juga berdampak pada efisiensi waktu dan biaya (*paperless*) serta mempermudah informasi untuk pengembangan operasional dan *performance management*.

Pengembangan dan penerapan Aplikasi HCIS ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan *performance management* dan Bank BTN yang harus segera memiliki 'System Enterprise Resources Planning' (ERP) untuk pengembangan aplikasi 'Human Capital Information System'.

Pengembangan dan Penerapan Video Conference

Seiring perkembangan bisnis Bank BTN, maka jumlah cabang maupun *outlet* di seluruh Indonesia juga turut berkembang dengan pesat. Bahkan *outlet-outlet* tersebar sampai ke daerah-daerah yang hanya dapat dijangkau dengan beberapa jam transportasi darat. Sehingga, untuk melakukan koordinasi dengan cabang terdekat atau bahkan dengan Kantor Pusat, dibutuhkan *effort* yang sangat besar.

Untuk itu, dimana kecepatan pertukaran informasi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pengambilan keputusan bisnis, maka perlu dukungan teknologi yang tepat guna untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Teknologi tepat guna yang akan diterapkan untuk mensolusikan kebutuhan tersebut adalah *Video Conference System*. Hal dimaksud sejalan pula dengan *IT Business Value* Bank BTN, yang disingkat "ESCORTS", yaitu:

application development and implementation of Human Capital Information System (HCIS) so that a reliable system is needed.

The speed of HCIS information presentation has become a very determining factor in business decision making by management. For that we need the right technology support in order to accommodate those needs.

HCIS system development is done because the existing system does not fully meet the requirements of openness thus difficult to develop, and in order to meet the needs of the new organizational structure of Bank BTN and Human Capital Management User Requirements. In the long run, it also affects the time and cost efficiency (*paperless*) and simplifies information for operational development and performance management.

Development and implementation of HCIS application is intended to meet operational needs and performance management and Bank BTN should immediately have an Enterprise Resources Planning (ERP) System for application development of the Human Capital Information System.

Development and Implementation of Video Conference

Along with business development of Bank BTN, the number of branches and outlets across Indonesia has also grown rapidly. Outlets are even spread to areas which are accessible only by a few hours of ground transportation, so that to coordinate with the nearest branch or even with Head Office will require a huge effort.

For that, where speed of information exchange has become a very determining factor in business decision making, it is necessary to support the right technology in order to accommodate those needs. The appropriate technology to be applied to meet these needs is the Video Conference system. It is also in line with Bank BTN's IT Business Value, which is abbreviated ESCORTS, namely:



- E: *Efficiency*, sejauh mana *Video Conference* dapat meningkatkan efisiensi
 - S: *Service/Product Quality*, sejauh mana *Video Conference* dapat meningkatkan kualitas layanan/ produk
 - C: *Competitiveness*, sejauh mana *Video Conference* dapat menjadi perangkat untuk meningkatkan nilai kompetitif
 - O: *Operational Cost*, sejauh mana *Video Conference* dapat menurunkan biaya operasional
 - R: *Risk*, sejauh mana *Video Conference* dapat menekan risiko
 - T: *Trust*, sejauh mana *Video Conference* dapat meningkatkan *Trust*
 - S: *Speed Of Process*, sejauh mana *Video Conference* dapat meningkatkan kecepatan proses bisnis
- E: *Efficiency*, the extent to which *Video Conference* can enhance efficiency
 - S: *Service/Product Quality*, the extent to which *Video Conference* can improve service/ product quality
 - C: *Competitiveness*, the extent to which *Video Conference* can be a tool to enhance competitive value
 - O: *Operational Cost*, the extent *Video Conference* can lower operational costs
 - R: *Risk*, the extent to which *Video Conference* can reduce risk
 - T: *Trust*, the extent to which video conference can enhance trust
 - S: *Speed of Process*, the extent to which *Video Conference* can improve the speed of business processes

Pengembangan dan penerapan Sistem *Video Conference* adalah untuk mempercepat pertukaran informasi melalui "*Remote Virtual Communication*", dibandingkan jika peserta *meeting* harus melakukan perjalanan untuk saling bertemu. Kualitas komunikasi pun tetap terjaga, karena komunikasi dua arah dapat dilakukan selayaknya berkomunikasi dengan bertatap muka langsung. Dalam jangka panjang, hal ini juga berdampak efisiensi terhadap biaya percakapan telepon, dan biaya perjalanan dinas.

Development and implementation of the *Video Conference* system is to accelerate exchange of information through *Remote Virtual Communication* compared to meeting participants having to travel far to meet in person. Communication quality can be maintained, because the two-way communication can be done as if communicating face to face. In the long run, it will also affect cost efficiency of telephone conversations and travel expenses.

Code of Conduct

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank BTN mengupayakan penerapan standar etika terbaik sesuai dengan *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku) dan Etika Bisnis untuk menunjang pelaksanaan GCG pada setiap personil.

Keberadaan *Code of Conduct*

Adapun keberadaan *Code of Conduct* Bank BTN dimaksudkan antara lain untuk:

- Menerapkan nilai-nilai Bank BTN ke dalam standar perilaku pegawai dan etika bisnis yang selaras dengan visi dan misi Bank BTN.
- Menjabarkan nilai-nilai Bank BTN ke dalam standar perilaku pegawai dan etika bisnis yang harus dipatuhi oleh seluruh insan Bank BTN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.
- Menjelaskan secara rinci standar perilaku pegawai dan etika bisnis agar insan Bank BTN dapat menilai wujud perilaku yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.
- Memberikan panduan dasar bagi segenap tingkatan dan jenjang organisasi Bank BTN dalam melaksanakan standar perilaku dan etika bisnis ketika melakukan interaksi antara pegawai dengan pegawai, nasabah, investor (Pemegang Saham), pemasok, pemerintah, lingkungan dan segenap *stakeholders* lainnya.
- Sebagai upaya nyata dalam meningkatkan citra Bank BTN secara berkesinambungan dimata masyarakat sehingga Bank BTN tidak hanya dikenal melalui prestasi angka-angka dan kinerja keuangannya yang baik, namun, lebih dari semua itu, juga dikenal menempuh cara berbisnis yang etis dan bermartabat dalam mencapai prestasi-prestasi tersebut.

Isi *Code of Conduct*

Pedoman perilaku terbagi atas lima bagian dimana di dalamnya terkandung penerapan standar etika bisnis dalam hubungannya dengan berbagai *stakeholders* mulai dari pegawai, nasabah, penyedia barang dan jasa, pesaing, mitra kerja, pemerintah, masyarakat, media massa dan organisasi profesi.

Code of Conduct

In conducting its business, Bank BTN seeks the application of best ethical standards in accordance with the Code of Conduct and Business Ethics to support the implementation of GCG in each personnel.

Code of Conduct Existence

The existence of Bank BTN's Code of Conduct is intended, among other things, to:

- Apply Bank BTN's values into employees' code of conduct and ethical business practices in line with the vision and mission of the Bank BTN.
- Describe Bank BTN's values into employees' code of conduct and business ethics to be followed by all Bank BTN's staff in carrying out their duties and responsibilities of every day.
- Explain in detail employees' code of conduct and business ethics for human beings of Bank BTN to assess the desired behavior and help give consideration if meeting skepticism in the act.
- Provide basic guidelines for all levels and the organization of the Bank in implementing employees' code of conduct and business ethics while performing interaction between employees and employees, investors (shareholders), suppliers, government, environment and all other stakeholders.
- As a real effort in improving the image of the Bank on an ongoing basis in the public eye so that Bank BTN is not only known through performance figures and its good financial performance, but more than all that, is also known to resort to doing business in an ethical and dignified way in achieving these accomplishments.

Code of Conduct's Content

Code of Conduct is divided into five sections therein standards of business ethics in relation to various stakeholders ranging from employees, customers, providers of goods and services, competitors, partners, governments, communities, mass media and professional organizations.

Penerapan Tuntunan Perilaku Pegawai (POLA PRIMA)

1. Memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal, dengan cara berperilaku:
 - Ramah, sopan dan bersahabat.
 - Peduli, proaktif dan cepat tanggap.
2. Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi Bank, dengan cara:
 - Berinisiatif melakukan penyempurnaan.
 - Berorientasi menciptakan nilai tambah.
3. Mulai dari diri sendiri menjadi suri tauladan dalam berperilaku yang mencerminkan Nilai-nilai Budaya kerja Bank, dengan cara berperilaku:
 - Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar.
 - Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja.
4. Kompeten dibidangnya dan senantiasa mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja, terbaik serta memberikan nilai tambah bagi Bank BTN dan seluruh insan Bank BTN, dengan cara:
 - Kompeten dan bertanggungjawab.
 - Bekerja cerdas dan tuntas.
5. Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan Bank BTN, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji, dengan cara berperilaku:
 - Konsisten dan disiplin.
 - Jujur dan berdedikasi.
6. Membangun hubungan yang tulus dan terbuka dengan sesama pegawai dan pihak lain dilandasi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama, dengan cara berperilaku:
 - Tulus dan terbuka.
 - Saling percaya dan menghargai.

Penanganan Benturan Kepentingan

- Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara:
- Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
 - Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis Bank BTN di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.
 - Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain, dengan cara:
 - ✓ Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing perusahaan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/istri dan anak.
 - ✓ Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan, termasuk suami/istri dan anak.
 - ✓ Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain dan/atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif.
 - ✓ Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/jasa dan konsumen.
 - Dalam hal pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan ikut serta.
 - Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan harus mengeluarkan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan keputusan yang diambil oleh pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Employee Conduct Implementation Guide (POLA PRIMA)

1. Provide services that exceed customers expectations, both internal and external customers, by way of behaving:
 - Cordial, polite and friendly.
 - Care, proactive and responsive.
2. Constantly develop new ideas and continuous improvements that add value to the Bank by means of:
 - Initiatives in making improvements.
 - Oriented to creating added value.
3. Start from yourself become role models in behavior that reflects the cultural values of the Bank by way of behaving:
 - Being an example of good and correct manners.
 - Motivating application of cultural value of work.
4. Competent in their field and continuously develop themselves so as to produce the best performance and provide added value to the company and the entire staff of Bank BTN by acting:
 - Competent and responsible.
 - Working intelligently and thoroughly.
5. Consistent between thoughts, words and actions in accordance with company regulations, code of professional ethics and laudable principles of truth, by way of behaving:
 - Be consistent and disciplined.
 - Honest and dedicated
6. Building a genuine and open relationship with fellow employees and other parties based on mutual trust and respect, to achieve common goals, by way of behaving:
 - Sincere and open.
 - Mutual trust and respect.

Handling Conflicts of Interest

- Employees always avoid conditions, circumstances or appearance of conflict of interest and abuse of office by way of:
- Complying with regulations, established systems and procedures.
 - In carrying out their duties and obligations, members of the Board of Commissioners and Directors and employees of the Bank should always give priority to economic interests of the company above personal or family economic interests, or other parties.
 - Members of the Board of Commissioners and Directors and employees of the Bank are prohibited from abusing office for personal interest or profit, family and other parties, by way of:
 - ✓ Does not have stock ownership in a business entity which is a partner or competitor of the company in the amount that can affect decision making including husband/wife and children.
 - ✓ Does not have a business that is directly related to the company's activities, including husband/wife and children.
 - ✓ No concurrent positions and jobs in other companies and/or in accordance with applicable regulations, which may lead to decisions to be not objective.
 - ✓ Does not give or receive loans from providers of goods/services and consumers.
 - In terms of discussion and decision making that contain elements of conflict of interest, the parties concerned are not allowed to participate.
 - Any shareholder who has a conflict of interest should exclude his/her voice in the General Meeting of Shareholders (RUPS) in accordance with decisions taken by shareholders who do not have a conflict of interest.

Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Gratifikasi

- Setiap Pengurus dan Pegawai Bank dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung, kepada pejabat negara dan/atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Pegawai Bank dapat memberikan hadiah/ cinderamata dan *entertainment* kepada pihak lain dengan syarat :
 - ✓ Menunjang kepentingan Bank.
 - ✓ Tidak dimaksudkan untuk menyuap.
 - ✓ Telah dianggarkan oleh Bank, dan
 - ✓ Apabila hadiah/ cinderamata berupa benda maka harus mencantumkan logo/ nama Bank
- Setiap Pengurus dan Pegawai Bank perusahaan dilarang menerima sesuatu untuk kepentingannya, baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- Menerima *entertainment* dalam bentuk jamuan makan.
- Menerima benda-benda promosi yang tidak mencantumkan logo/ nama perusahaan pemberi.
- Donasi oleh Bank ataupun pemberian suatu aset perusahaan kepada partai politik atau seorang atau lebih calon anggota badan legislatif maupun eksekutif, hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam batas kepatutan sebagaimana ditetapkan oleh Bank, donasi untuk amal dapat dibenarkan.
- Setiap Pengurus dan Pegawai Bank perusahaan diharuskan setiap tahun membuat pernyataan tidak memberikan sesuatu dan atau menerima sesuatu yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Kepatuhan terhadap Peraturan

- Organ perusahaan dan pegawai Bank harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank.
- Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan pegawai Bank melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan Bank.
- Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Kerahasiaan dan informasi Perusahaan

- Pegawai Bank senantiasa memanfaatkan data dan informasi Bank untuk meningkatkan *corporate value* dan pengambilan keputusan dengan cara:
- Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta pegawai Bank harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Bank dan kelaziman dalam dunia usaha. Oleh karena itu, Bank mengupayakan beberapa hal, sebagai berikut:
 - ✓ Menggunakan sistem keamanan data yang baik.
 - ✓ Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada *stakeholders* dengan tetap mempertimbangkan kepentingan Bank.
 - ✓ Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
 - ✓ Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja.
 - ✓ Menjaga kerahasiaan informasi tentang konsumen.
 - Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta pegawai Bank dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambil-alihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham.
 - Setiap mantan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank dilarang mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia perusahaan yang diperolehnya selama menjabat, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik Bank.

Giving and Receiving Gifts/Gratuities

- Each Bank's Officer and Employee are prohibited from giving or offering something, either directly or indirectly, to state officials and or individuals representing business partners, which are meant to influence decision making. Bank employees may give gifts/souvenirs and entertainment to other parties provided that:
 - Supporting the interests of the Bank.
 - Not intended to bribe.
 - It has been budgeted by the Bank, and
 - If the gift/ souvenir is in the form of an object it must include the logo/name of the Bank.
- Each Officer and Employee of the company's Bank are prohibited from receiving anything for their interests, either directly or indirectly, from business partners, who can influence decision making:
 - Receive entertainment in the form of banquets.
 - Receive promotional items that do not include the logo/name of the giver company.
- Donation by the Bank or the provision of a company's asset to a political party or one or more candidates for the legislature or executive should only be undertaken in accordance with laws and regulations. In the limit of decency as determined by the Bank, donations to charity may be justified.
- Each Officer and Employee of the company's Bank are required every year to make a statement not to give something and receive something that can influence decision making.

Compliance with Regulations

- Organ of the company and employees of the Bank shall implement laws and regulations and banking regulations.
- Board of Commissioners must ensure that Directors and employees of the Bank implement laws and regulations and banking regulations.
- Companies must keep records of their assets, debts and capital properly in accordance with generally accepted accounting principles.

Confidentiality and Company Information

Bank employees always make use of data and information of the Bank to enhance corporate value and decision making by way of:

- Members of the Board of Commissioners and Directors, shareholders and employees of the Bank must maintain confidentiality of company information in accordance with laws and regulations, regulations of the Bank and habits in the business world. Therefore, the Bank sought a few things, as follows:
 - Using good data security system.
 - Provide information that is relevant and proportionate to the stakeholders to continue consider the interests of the Bank.
 - Avoid dissemination of data and information to other parties who are not interested either during work or after stopped working.
 - Submit all data related to the company at the time stopped working.
 - Maintain confidentiality of information about consumers.
- Each member of the Board of Commissioners and Directors, shareholders and employees of the Bank shall not misuse information relating to the Bank, including but not limited to planned takeovers, mergers and buy back shares.
- Any former member of the Board of Commissioners and Directors and employees of the Bank shall not disclose confidential company information acquired during his/her tenure, unless the information is necessary for the inspection and investigation in accordance with the laws and regulations, or is no longer a secret property of the Bank.

Aktivitas Politik

Pegawai bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara:

- Tidak melakukan aktivitas politik dalam bentuk apapun, baik di dalam lingkungan Bank maupun diluar lingkungan Bank kecuali menjalankan hak-hak politiknya sebagai warga negara.
- Tidak menggunakan fasilitas Bank untuk kepentingan golongan/ partai politik tertentu.
- Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Bank BTN.

Penerapan Whistleblowing System

- Dewan Komisaris berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan, diproses secara wajar dan tepat waktu.
- Bank menjamin perlindungan terhadap individu yang melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap etika bisnis, pedoman perilaku, peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris memberikan tugas kepada komite-komite.

Whistleblowing System

Selain berkenaan dengan berbagai perihal di atas, sejak tahun 2010, upaya penting lainnya yang dilakukan oleh Bank BTN dalam menegakkan prinsip-prinsip GCG adalah berupaya untuk membangun dan menerapkan *whistleblowing system* (WBS), yaitu: suatu sistem yang mengelola pengaduan/pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum dan/atau perbuatan tidak etis/tidak semestinya, yang digunakan untuk mengoptimalkan peran Pengurus dan Pegawai Bank BTN dan mitra kerja dalam mengungkap pelanggaran yang terjadi di lingkungan Bank BTN.

Lingkup pengaduan/pengungkapan yang ditindaklanjuti dalam WBS, meliputi:

1. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, seperti, namun tidak terbatas pada:
 - Pemalsuan tanda tangan.
 - Korupsi.
 - Pencurian.
 - Penggelapan.
 - *Mark-up*.
 - Penggunaan narkoba.
 - Perusakan barang.
2. Pelanggaran terhadap *Code of Conduct* Bank BTN.
3. Pelanggaran terhadap prinsip akuntansi yang berlaku.
4. Pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur operasional Bank BTN, ataupun kebijakan, prosedur, peraturan lain yang dianggap perlu oleh Bank BTN.

Whistleblowing System

Besides the various subjects above, since 2010, other important efforts undertaken by Bank BTN in upholding the principles of GCG is working to develop and implement a *whistleblowing system* (WBS), i.e. system that manages complaints/disclosures in relation to the behavior against legal and/or unethical or inappropriate behavior, which is used to optimize the role of the Management and Employees of Bank BTN and business partners in revealing violations that occurred within Bank BTN.

The scope of the complaint/disclosure being followed up in the WBS including:

1. Violations of laws and regulations, including but not limited to:
 - Signature forgery.
 - Corruption.
 - Theft.
 - Embezzlement.
 - *Mark-up*.
 - The use of drugs.
 - Destruction of goods.
2. Violations of the Code of Conduct of Bank BTN.
3. Violation of accepted accounting principles.
4. Violations of Bank BTN's policies and operational procedures, or policies, procedures, other regulations deemed necessary by Bank BTN.

Political Activities

Employees to be neutral towards all political parties by:

- Not doing any form of political activity, both inside and outside the Bank's environment except running political rights as citizens.
- Not using bank facilities for the benefit of a certain group/political party.
- Not carry, demonstrate, deploy, and distribute symbols, images and ornaments of political parties within the Company.

Whistleblowing Application System

- Board of Commissioners is obliged to receive and ensure that complaints about violations of business ethics, code of conduct, company rules, and laws and regulations are processed fairly and on time.
- The Bank guarantees protection of individuals who report violations of business ethics, code of conduct, company rules, and laws and regulations. In doing so, the Board of Commissioners assigns tasks to committees.

5. Tindakan kecurangan lainnya yang dapat menimbulkan kerugian finansial ataupun non-finansial.
6. Pelanggaran *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemberian manfaat dan remunerasi.
7. Penggunaan kekerasan terhadap pegawai atau pimpinan.
8. Pemerasan, pelecehan, ketidakjujuran.
9. Membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.
10. Membahayakan keamanan Bank BTN.

5. Other fraudulent acts that can lead to financial or non-financial loss.
6. Violation of the Standard Operating Procedure (SOP) relating to procurement of goods and services, granting benefits and remuneration.
7. The use of violence against staff or leadership.
8. Extortion, harassment, dishonesty.
9. Endanger the occupational safety and health.
10. Endanger the security of Bank BTN.

Keberadaan whistleblowing system

Bagi Bank BTN, keberadaan WBS merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa keberadaan WBS bagi Bank BTN diharapkan menjadi sistem yang efektif dalam mengungkap terjadinya berbagai bentuk kecurangan dan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat serta bertujuan untuk:

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial dan dapat merusak citra Bank BTN.
2. Mempermudah manajemen dalam menangani laporan-laporan pelanggaran secara efektif dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan informasi dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya.

The existence of whistleblowing system

For Bank BTN, the existence of WBS is part of the internal control system in preventing the occurrence of diversion practices. With another expression, it can be said that the existence of WBS for the Bank is expected to be an effective system in revealing various forms of fraud and be able to resolve them in a short time, as well as is aimed to:

1. Create a conducive climate and encourage the reporting of matters which can cause financial and non-financial loss and can ruin the image of the Bank BTN.
2. Ease the management in handling violation reports effectively as well as to protect the anonymity of the reporter and to maintain confidentiality of information in specific record with guaranteed security.

3. Melindungi pelapor dari balasan pihak yang dilaporkan ataupun pihak-pihak lain.
4. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini.
5. Menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
6. Mengurangi risiko yang dihadapi Bank BTN, akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja, dan reputasi.
7. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dari terjadinya pelanggaran.
8. Meningkatnya reputasi Bank BTN di mata pemangku kepentingan (*stakeholders*), regulator, dan masyarakat umum.

Mekanisme Whistleblowing System

Mekanisme yang dibangun oleh Bank BTN dalam menerapkan WBS adalah pelapor membuat pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya kepada:

- WBS Team melalui sarana/media, yaitu: surat atau email atau faksimili atau telepon atau *short message service* (SMS) untuk laporan pengaduan/pengungkapan, berkaitan dengan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai.
- Direksi melalui sarana/media, yaitu: surat atau email atau faksimili atau telepon atau *short message service* (SMS) untuk laporan pengaduan/pengungkapan, berkaitan dengan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh WBS CCO dan WBS Team, dan akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama. Pananganan lebih lanjut atas laporan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Direksi.
- Komisaris melalui sarana/media, yaitu: surat atau email atau faksimili atau telepon atau *short message service* (SMS) untuk laporan pengaduan/pengungkapan berkaitan dengan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Direksi, dan akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris. Penanganan lebih lanjut diserahkan kepada Dewan Komisaris dan bila diperlukan investigasi, dapat menggunakan investigator/auditor luar yang independen.

3. Protect the reporter from the reported party or other parties counter acts.
4. Reduce the losses incurred due to the breach through early detection.
5. Handling violations internally first, before they escalate into violations with public nature.
6. Reduce the risk faced by Bank BTN as a result of violations in the aspects of financial, operational, legal, safety, and reputation.
7. Reduce the cost in dealing with the consequences of the violations.
8. The increasing reputation of the Bank BTN in the eyes of stakeholders, regulators and public.

Mechanism of Whistleblowing System

The mechanism established by the Bank in implementing the WBS is by way of reporter making a complaint/disclosure and sending it to:

- WBS team, through facility/media, i.e : a letter or e-mail or facsimile or telephone or short message service (SMS), to report the complaint/disclosure related to the violations/deviations made by the employee.
- Board of Directors, through facility/media, i.e a letter or e-mail or facsimile or telephone or short message service (SMS) to report the complaint/disclosure related to violations/deviations made by the WBS and WBS CCO Team, and will be acted upon by the President Director. Further handling of the violation report will be executed by the Board of Directors.
- Commissioner, through facility/media, i.e a letter or e-mail or facsimile or telephone or short message service (SMS) to report the complaint/disclosure related to the violations/deviations made by the Board of Directors, and will be acted upon by the Board of Commissioners. Further handling is forwarded to the Board of Commissioners and, if investigation is necessary, the independent external investigator/auditors can be called upon.

Laporan pengaduan/pengungkapan tersebut, sekurang-kurangnya memuat hal-hal:

- Informasi mengenai data diri, memuat nama, alamat, nomor telepon, faksimili, *email* (atau dengan pilihan anonim).
- Memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 - a. Permasalahan yang diadukan.
Pokok pengaduan/pengungkapan yang ingin dilaporkan dan jumlah kerugian bilamana bisa diperkirakan. Akan lebih baik apabila satu pengaduan/pengungkapan hanya untuk satu masalah saja sehingga lebih fokus.
 - b. Pihak yang terlibat.
Siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kejadian yang dilaporkan, termasuk saksi yang ada dan siapa atau pihak-pihak mana saja yang diuntungkan/dirugikan.
 - c. Lokasi Kejadian
Lokasi/lapangan/unit kerja mana masalah tersebut terjadi, dengan menyebut nama, tempat atau fungsi yang dimaksud secara spesifik.
 - d. Waktu Kejadian
Periode kejadian dari masalah tersebut, baik tanggal, bulan, atau tahun tertentu saat masalah tersebut terjadi.
 - e. Bagaimana terjadinya dan apakah ada bukti.
 - f. Apakah kasus ini pernah dilaporkan kepada orang/pihak lain.
 - g. Apakah kasus ini pernah terjadi sebelumnya.
- WBS Team menerima pengaduan/pengungkapan, mencatat dan menuangkan ke dalam format standar yang menghasilkan:
 - a. Laporan penerimaan kontak sesuai kategori lingkup pengaduan/pengungkapan.
 - b. Laporan pengungkapan (*disclosure report*).
- WBS Team menyampaikan laporan pengungkapan (*disclosure report*) kepada Dewan Komisaris/Direksi (sesuai dengan kategori terlapor).
- WBS Team melakukan penelaahan awal/klarifikasi terhadap pengaduan/pengungkapan tersebut dan membuat resume, kemudian dilaporkan kepada Dewan Komisaris/Direksi

The complaint/disclosure report should at least consist of the following:

- Information about the personal information, which consists of name, address, telephone number, facsimile, e-mail (or by choice of anonymous).
- Provide an initial indication that can be accounted for, as follows:
 - a. Problems being complained.
Main complaints/disclosures to be reported and the amount of loss, if can be expected. It would be better if one complaint/disclosure report is for a single issue only in order to ensure more focus.
 - b. Parties involved.
Who should be responsible for the reported incident, including the witness and which person or parties being advantaged or disadvantaged.
 - c. Location of incident.
Location/site/working unit whereby the problem occurred by way of mentioning name, place or function specifically.
 - d. Time of occurrence.
Period of occurrence of the problem, whether date, month, or particular year when the problem occur.
 - e. How did the problem happen and whether evidence is available.
 - f. Whether this case has ever been reported to person or other parties.
 - g. Whether this case ever happened before.
- WBS Team receives complaints/disclosures, records and writes into a standard format to produce:
 - a. Report of received contacts in accordance with categories of complaints/disclosures.
 - b. Disclosure Report.
- WBS Team submits disclosure report to the Board of Commissioners/Board of Directors (in accordance with the categories of party being reported).
- WBS Team performs initial review/clarification to the complaint/disclosure and makes the resume, then reports to the Board of Commissioners/Board of Directors (in accordance with the

(sesuai dengan kategori terlapor). Berdasarkan hasil laporan tersebut, Dewan Komisaris/Direksi memutuskan tindak lanjut, sebagai berikut:

- a. Dihentikan, jika tidak memenuhi persyaratan indikasi awal.
 - b. Bekerja sama dengan Auditor Internal sesuai dengan substansi pengaduan/pengungkapan.
 - c. Bekerja sama dengan investigator eksternal jika substansi pengaduan/pengungkapan terkait dengan citra/reputasi Bank BTN dan/atau menimbulkan kerugian yang besar dan/atau belum pernah ditindaklanjuti oleh Auditor Internal.
- Tim Investigasi melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris/Direksi. Berdasarkan hasil laporan tersebut, Dewan Komisaris/Direksi memutuskan:
 - a. Laporan pengungkapan ditutup, jika tidak terbukti.
 - b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, jika terbukti dan terkait dengan tindakan administratif.
 - c. Meneruskan tindak pidana kepada penyidik untuk proses lebih lanjut, jika terbukti dan terkait dengan tindak pidana umum atau korupsi. Dalam hal ini, WBS Team melakukan koordinasi dengan *Legal and Loan Document Desk* guna memastikan adanya bukti permulaan yang cukup dan jika bukti-bukti cukup maka direkomendasikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan.

categories of party being reported). Based on the results of the report, the Board of Commissioners/Board of Directors decides the follow up, as follows:

- a. Terminated, if it is not qualified the requirement of initial indications.
 - b. Working closely with the Internal Auditor in accordance with the substance of the complaint/disclosure.
 - c. Work with external investigators if the substance of the complaint/disclosure related to the image/reputation of the Bank and/or causing of loss and/or had never been followed up by Internal Auditor.
- Investigation Team investigates and reports the results to the Board of Commissioners/Board of Directors. Based on the results of the report, the Board of Commissioners/Board of Directors decides:
 - a. Disclosure report is closed, if it is not proven.
 - b. Impose sanctions in accordance with prevailing regulations, if it is proven and related to administrative action.
 - c. Forward the criminal offense to the investigator for further proceedings, if it is proven and related to common criminal offence or corruption. In this case, WBS Team coordinates with the Legal and Loan Document Desk to ensure there are sufficient initial evidences and if evidences are then sufficient, then it will be recommended to the Board of Directors for approval.

Upaya Penegakan Code of Conduct Bank BTN 2010

No	Upaya	Keterangan
1	Penguikuan Komitmen dan Pengembangan <i>Soft Structure</i> GCG (termasuk di dalamnya tentang etika bisnis)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagaimana yang dijelaskan di atas pada bagian bahwa manajemen memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan GCG secara konsisten. Hal ini termasuk di dalamnya adalah implementasi etika bisnis dan POLA PRIMA yang <i>inheren</i> dengan implementasi GCG. Hal ini diwujudkan dengan melalui upaya: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penetapan GCG (termasuk didalamnya adalah impelementasi etika bisnis dan POLA PRIMA) salah satu <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) sesuai Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2008-2012 ✓ Sesuai Strategy Map Bank BTN 2009-2012 melalui implementasi Balance Score Card (BSC), GCG (termasuk etika bisnis dan POLA PRIMA) telah ditetapkan sebagai salah satu KPI Bank BTN yaitu pada perspektif <i>People, Organization and Information and Communication Technology</i>. ✓ Implementasi GCG (termasuk etika bisnis dan POLA PRIMA) merupakan salah satu KPI yang dimasukkan dalam kontrak manajemen seluruh unit kerja.

- Proses penelaahan awal/klarifikasi dan investigasi dimaksud dibuatkan dalam Berita Acara.
- WBS Team melaporkan hasil investigasi kepada Dewan Komisaris/Direksi.
- Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan Direksi dan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Bank BTN dapat memberikan penghargaan kepada pelapor. Bentuk dan jenis penghargaan dimaksud ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Penggunaan dan output sistem whistleblowing

Pada tahun 2010, belum ada penggunaan dan output WBS, karena masih dalam tahap pengembangan. Direncanakan, WBS akan dilaksanakan oleh Bank BTN pada tahun 2011.

Penyebaran Code of Conduct dan Upaya Penegakannya.

- *Code of Conduct* disebarakan kepada semua pegawai melalui media internet Bank yang dinamakan *Access Internal Management Standart* (AIMS) yang dapat diakses oleh semua pegawai dengan mudah setiap saat.
- Secara periodik, segenap pegawai disampaikan tentang etika bisnis untuk dapat dilaksanakan secara tertib melalui media Memo dan/ atau Surat dari Direksi ataupun Divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola etika bisnis.
- Pada tahun 2010, upaya penegakkan *Code of Conduct* dilakukan dengan berbagai cara yang dapat dilihat pada tabel berikut:

- The process of initial review/clarification and investigation is made in the form of Minutes.
- WBS Team reports the investigation results to the Board of Commissioners/ Board of Directors.
- Based on the Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors and with certain considerations, Bank BTN may give the award to the reporter. The form and type of award is determined by the Board of Commissioners and Board of Directors.

Use and output whistleblowing system

In 2010, there has been no utilization and output of WBS, since it is still in development stage. It is planned that WBS will be implemented by the Bank in 2011.

Dissemination of Code of Conduct and its Enforcement Efforts.

- Code of Conduct is disseminated to all employees via the Bank's internet called Access Internal Management Standards (AIMS) which can be accessed by all employees with ease at any time.
- Periodically, business ethics are communicated to all employees to be implemented in an orderly manner through the media of Memo and/or Letters from the Board of Directors or the Division responsible for managing business ethics.
- In 2010, enforcement efforts of Code of Conduct were done in several ways which can be seen in the following table:

Bank BTN's Code of Conduct Enforcement Efforts 2010

No	Efforts	Description
1	The Strengthening of Commitment and Development of GCG Soft Structure (including business ethics)	<ul style="list-style-type: none"> • As elaborated above that the management is fully committed to consistently implementing GCG, the commitment entails with it the implementations of business ethics and POLA PRIMA that are inherent in the GCG implementation. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Incorporating GCG practices in the Bank's operations (including business ethics and POLA PRIMA implementations) are in accordance with the Bank's 2008-2012 Long-Term Plan. ✓ In conformity with Bank BTN's 2009-2012 Strategy Map through a Balance Score Card (BSC) implementation, GCG (including business ethics and POLA PRIMA) has been determined as one of Corporate KPIs, namely in the perspective of People, Organization and Information and Communication Technology. ✓ The GCG implementation (including business ethics and POLA PRIMA) is one of the KPIs included in management contracts across business units.

No	Upaya	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Penguksuhan Komitemen Manajemen untuk melaksanakan etika bisnis dan pedoman perilaku pegawai sebagai budaya kerja Bank dituangkan dalam GCG <i>Softstructure</i> Bank berupa Kebijakan-Kebijakan pengurus secara tertulis. • Bank BTN senantiasa melakukan <i>review</i> dan/ atau up-date terhadap kebijakan etika bisnis Bank BTN sehingga selaras dengan <i>best practice</i> dan regulasi, dengan penjelasan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bank telah memiliki kebijakan yang mengatur sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, yaitu: ✓ Ketetapan Direksi No. 06/DIR/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Pedoman Good Corporate Governance PT Bank Tabungan Negara. ✓ Peraturan Direksi No.03/PD/DSDM/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Perubahan Peraturan Direksi No 07/PD/DSDM/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Prosedur dan Sanksi Disiplin Pegawai PT Bank Tabungan Negara. ✓ Peraturan Direksi No.07/PD/DSDM/2007 tanggal 25 Juni 2007 tentang Prosedur & Sanksi Disiplin Pegawai PT Bank Tabungan Negara. ✓ Peraturan Direksi No.29/PD/CSD/2010 tgl 14 Desember 2010 tentang Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT BTN (Bank Tabungan Negara). <p>Pada tahun 2010 Bank BTN telah melakukan <i>up date</i> peraturan yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan dan GCG, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peraturan Direksi tentang Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris PT BTN Tbk. dan Direksi PT BTN Tbk. tentang Panduan Tata Kerja Komisaris dan Direksi (Board Manual). ✓ Peraturan Direksi tentang Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT BTN Tbk. ✓ Peraturan Direksi tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) PT BTN (Persero) Tbk. ✓ Peraturan Direksi tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku Pegawai (Code of Conduct) PT BTN (Persero) Tbk. ✓ Peraturan Direksi tentang Larangan Pemberian dan Penerimaan Bagi Direksi, Komisaris Dan Pegawai PT BTN (Persero) Tbk. ✓ Peraturan Direksi tentang Aktivitas Politik Komisaris, Direksi Dan Pegawai PT BTN (Persero) Tbk. <p>Didalam kebijakan-kebijakan tersebut telah diatur berbagai hal sebagai pedoman dalam melaksanakan etika bisnis dan perilaku pegawai, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penanganan/pengelolaan <i>Conflict of Interest</i> pada pengurus, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dewan Komisaris dan Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/ perusahaan bukan keuangan. ✓ Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Bank. ✓ Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank BTN, maupun pada Bank dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri. ✓ Dewan Komisaris dan Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Bank BTN, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank BTN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

No	Efforts	Description
		<ul style="list-style-type: none"> • The sanctioning of management commitment to implement business ethics and code of ethics as the Bank's work ethos is included in the Bank's GCG Soft Structure in the form of management's policies. • The Bank always reviews and/or updates its business ethics policies to make them in sync with best practices and regulations, as shown below: <ul style="list-style-type: none"> ✓ The Bank has policies that regulate the settlement system and procedure of conflict of interest : ✓ The Board of Directors Decree No. 06/DIR/DK/2009 dated May 27 2009 on Guidelines to Good Corporate Governance of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ✓ The Board of Directors Regulation No.3/PD/DSDM/2008 dated March 24 2008 on Revision to the Board of Directors Regulation No.07/PD/DSDM/2007 dated June 25 2007 on Procedures and Disciplinary Penalties Imposed on the Employees of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ✓ The Board of Directors Regulation No.07/PD/DSDM/2007 dated June 25 2007 on Procedures and Disciplinary Penalties Imposed on the Employees of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ✓ The Board of Directors Regulation No.29/PD/CSD/2010 dated December 14 2010 on the Manual of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. <p>The following are the Bank's 2010 update of regulations related to conflict of interest and GCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ The Board of Directors Regulation on the Joint Decision Letter of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk on the Board Manual. ✓ The Board of Directors Regulation on the Manual of the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ✓ The Board of Directors Regulation on the Manual of Conflict of Interest of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ✓ The Board of Directors Regulation on the Manual of Business Ethics and Code of Conduct of the Employees of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ✓ The Board of Directors Regulation on the prohibition of Gratuities by and for the Board of Directors, the Board of Commissioners and Employees of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ✓ The Board of Directors Regulation on the political activities of the Board of Commissioners, the Board of Directors and employees of PT BTN (Persero) Tbk. <p>The policies regulate a variety of affairs as the guidelines for carrying out business ethics and code of conduct, which can be elaborated as:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The following are preventive measures to address Conflict of Interest among the management: <ul style="list-style-type: none"> ✓ The Board of Commissioners and the Board of Directors do not have overlapping duties as members of the Board of Commissioners, the Board of Directors or executives at more than 1 (one) non-financial institution. ✓ The Board of Commissioners and the Board of Directors do not have financial and family relationships with members of the Board of Directors and the Bank's controlling shareholders. ✓ The Board of Commissioners and the Board of Directors do not own an ownership stake of 5 percent or more, whether in Bank BTN or in any other companies, domestically or overseas. ✓ The Board of Commissioners and the Board of Directors do not have overlapping duties as a president directors or directors at state-owned regional or private companies or any official positions in relation to Bank BTN's administrative operations, any structural and functional positions at the central and regional governments or any other positions as regulated by Bank BTN's Article of Association and other enforceable laws and regulations.

No	Upaya	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank BTN, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan/atau perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri. ✓ Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank BTN, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan GCG bagi Bank Umum. • Upaya agar pejabat dan pegawai senantiasa menggunakan wewenang dan tugas untuk kepentingan dan tanpa merugikan bank, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Komisaris Bank BTN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank BTN. Dewan komisaris hanya terlibat dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/ atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan. Diantaranya adalah memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait dengan melaksanakan tata cara sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Proses kredit dilaksanakan oleh Kantor Cabang untuk direkomendasikan ke Kantor Pusat. Selanjutnya, Kantor Pusat akan meneruskannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. • Khusus untuk transaksi kredit yang mengandung benturan kepentingan, seperti kredit kepada Kepala Cabang, maka Kepala Cabang yang bersangkutan proses pengajuan kredit dilaksanakan oleh Kantor Cabang diluar wilayah kerjanya untuk kemudian direkomendasikan ke Kantor Pusat. Selanjutnya, Kantor Pusat akan meneruskan permohonan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan keputusan kredit. • Pengaturan Benturan Kepentingan antara Bank BTN dan Anggota Direksi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Apabila terjadi/ terdapat suatu transaksi atau kegiatan hukum yang dilakukan oleh Bank, ternyata melibatkan suatu pihak yang mewakili hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan seorang atau lebih anggota Direksi (namun tidak semua anggota Direksi), maka transaksi atau kegiatan hukum tersebut mengandung unsur "benturan kepentingan" antara kepentingan Bank BTN dan kepentingan anggota Direksi. ✓ Apabila terjadi "benturan kepentingan" sebagaimana dimaksud, maka dengan persetujuan Komisaris, Bank BTN dalam transaksi/ kegiatan hukum bersangkutan diwakili oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi memiliki benturan kepentingan, sedangkan anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan harus menarik diri keluar dari transaksi/kegiatan hukum yang bersangkutan. ✓ Apabila terjadi/ terdapat "benturan kepentingan" yang menyangkut semua anggota Direksi atau semua anggota Direksi terkena/ memenuhi ketentuan dimaksud, maka Bank BTN dalam transaksi/ kegiatan hukum yang bersangkutan diwakili oleh Komisaris atau yang ditunjuk oleh Komisaris. ✓ Dalam hal tidak ada Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank BTN dalam transaksi/ kegiatan hukum yang bersangkutan.
2.	Melengkapi Infrastruktur	Sebagaimana yang dijelaskan di atas pada bagian IV. Implementasi GCG Periode 2010, beberapa GCG <i>infrastructure</i> (termasuk untuk implementasi etika bisnis dan POLA PRIMA) yang telah dilengkapi oleh Bank BTN pada periode 2010 adalah:

No	Efforts	Description
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ The Board of Commissioners and the Board of Directors do not own an ownership stake of 5 percent or more of paid-in capital in Bank BTN, other banks, non-bank financial institutions and/other companies, individually or in groups, domestically or overseas. ✓ The Board of Commissioners and the Board of Directors have no financial, managerial, stake ownership and family relationships with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Controlling shareholders or with the Bank, which will prevent them from performing independently as stipulated in the GCG regulation for publicly-held banks. • The following are preventive measures to ensure executives and employees exercise their authority and duties in the best interest of the bank: <ul style="list-style-type: none"> ✓ The Board of Commissioners of Bank BTN is not involved in managerial decision making. The Board of Commissioners is only involved in providing funds for related parties, and other activities stipulated in the Bank's Article of Association and other enforceable laws and regulations associated with the Board of Commissioners' supervisory role. <ul style="list-style-type: none"> • Credit processes are administered by the Branch Office to be recommended to the Main Office. Furthermore, the Main Office will pass the recommendation to the Board of Commissioners for approval. • When conflict of interest is involved in a credit transaction, such as a credit facility sought by the Head of a Branch Office, the Head of the Branch Office is required to transfer the credit processing to other Branch Office outside of his or her working area, which is then recommended to the Main Office. The Main Office will then pass the credit request to the Board of Commissioners for approval. • The Following are Measures to Be Taken When Conflict of Interest Occurs Between the Bank and Members of the Board of Directors: <ul style="list-style-type: none"> ✓ If the Bank's transaction or a legally-sanctioned activity involves a blood relative – of up to a third level in a family hierarchy, both horizontally and vertically including in-laws – of one member or more (but not all) of the Board of Directors, then such a transaction puts the interest of the Bank and that of the member (s) of the Board of Directors in conflict. ✓ If the aforementioned conflict of interest occurs, then the Bank, with the Board of Commissioners' approval, will be represented by a disinterested member of the Board of Directors, while a member or members of the Board of Directors must not involve themselves in the transaction. ✓ If a transaction with potential conflict of interest as described above involves all members of the Board of Directors, then the Board of Commissioners or an appointed member of the Board of Commissioners will represent the Bank in the transaction. ✓ Should the Board of Commissioners be not available, then the RUPS will assign one or more individuals to represent the bank in the transaction.
2.	Infrastructural Improvement	As described in part IV above on GCG Implementation for 2010, the following are several of the Bank's GCG-based infrastructural improvements (including the implementations of business ethics and POLA PRIMA) for 2010:

No	Upaya	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Struktur Organisasi Baru Bank BTN telah membentuk unit kerja baru yang secara khusus menangani implementasi GCG dan POLA PRIMA, yaitu GCG Departemen, yang merupakan bagian dari Corporate Secretary Division dan unit kerja Culture Specialist yang merupakan bagian dari Human Capital Division. Penunjukan GCG <i>Champion</i> (koordinator dan asesor GCG) di seluruh unit kerja Kantor Pusat dalam upaya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan implementasi GCG (termasuk etika bisnis) sehari-hari dan Change Agent yang mengkoordinir pelaksanaan program Budaya Kerja di seluruh unit kerja. Pembuatan GCG <i>Scoreboard</i> untuk memantau implementasi pelaksanaan GCG di setiap unit kerja (termasuk di dalamnya adalah implementasi etika bisnis) dan sekaligus sebagai indikator untuk menentukan pencapaian KPI unit kerja sesuai metode <i>Balanced Scorecard</i>. Pengembangan GCG <i>Software</i> (Corporate Governance Management System) Agar proses <i>monitoring</i> (identifikasi permasalahan, mencari alternatif pemecahan dan memberikan saran langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini) terhadap pelaksanaan implementasi GCG (termasuk etika bisnis) menjadi lebih efektif dan efisien, Bank BTN telah melakukan analisis dan pengembangan GCG <i>Software</i> (Corporate Governance Management System) dengan dukungan teknologi informasi. Sesuai dengan rencana kerja Bank BTN, pada tahun 2011 dan ke depan, akan dibangun dan/ atau dikembangkan transparansi pengadaan barang dan jasa serta <i>Whistleblowing System</i> di dalam menu <i>Corporate Governance Management System</i> yang berbasis teknologi informasi.
3	<p>Mengeksekusi beberapa strategi, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Awareness</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kebijakan etika bisnis Bank BTN secara berkesinambungan. Pada tahun 2010 telah dilakukan <i>workshop</i> dan <i>review</i> kebijakan etika bisnis Bank yang meliputi 4 (empat) kebijakan, yaitu: <i>Code of Conduct</i>, <i>Conflict of Interest</i>, Gratifikasi dan Aktivitas Politik, Bank BTN telah mengadakan <i>workshop</i> bekerja sama dengan Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI) pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2010. Melakukan induksi kepada pegawai baru Bank BTN akan pentingnya etika bisnis dan POLA PRIMA untuk menanamkan etika bisnis dan POLA PRIMA kepada pegawai baru Secara intensif melakukan program <i>awareness</i> penyemaian nilai-nilai POLA PRIMA, sebagai budaya perusahaan, yang meliputi berbagai program budaya kerja Bank BTN, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Melaksanakan <i>workshop</i>, sosialisasi dan <i>training for trainer</i> tentang POLA PRIMA. ✓ Pemasangan <i>banner</i>, visualisasi program budaya kerja unit kerja, ✓ Melaksanakan program <i>reward</i> untuk unit kerja terbaik yang melaksanakan POLA PRIMA. <p>Program <i>awareness</i> etika bisnis dan budaya kerja ini akan senantiasa dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Institusionalisasi dan Internalisasi 	<p>Manajemen telah menginstruksikan kepada semua unit kerja untuk melaksanakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Setiap Divisi/Desk/Regional Office wajib mentransparansikan transaksi yang mengandung benturan, yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangannya. Setiap pejabat diwajibkan mengungkapkan penerimaan dan pemberian gratifikasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

No	Efforts	Description
		<ul style="list-style-type: none"> Setting Up New Organizational Structure Bank BTN set up two new working units with special assignments, namely the GCG Department and the Culture Specialist. The GCG Department, which is part of the Corporate Secretary Division, is specially assigned with the implementation of GCG and POLA PRIMA, while the Culture Specialist, which is part of the Human Capital Division. The appointment of GCG Champions (GCG coordinators and assessors) at all of the Main Office's working units, aimed to improve daily GCG implementation (including business ethics) and the appointment of Change Agents, assigned to coordinate the implementation of the Work Culture program across working units. Providing GCG Scoreboard to monitor the implementation of GCG practices (including the implementation of business ethics) across working units and making the GCG Scorecard an indicator to determine a working unit's KPI achievement in accordance with the Balanced Scorecard method. Development of GCG Software In order to make monitoring process of GCG implementation (including business ethics) more effective and efficient, Bank BTN conducted an analysis and development of IT-assisted GCG software (Corporate Governance Management System). In accordance with Bank BTN work plan for 2011 and beyond, we will establish and/ or develop transparency of procurement for goods and services as well as whistleblowing system inside IT based (Corporate Governance Management System).
3	Executing strategies, including: <ul style="list-style-type: none"> Awareness 	<ul style="list-style-type: none"> Sustainable socialization of the Bank's business ethics policy Throughout 2010, the Bank held workshops and reviews of the Bank's business ethics policy comprising Code of Conduct, Conflict of Interest, Gratification and Political Activities. Bank BTN, in collaboration with the Indonesian Board of Commissioners and Board of Directors Agency (LKDI) held a workshop on October 26-27, 2010. Providing induction sessions for Bank BTN's new recruiters on the importance of business ethics and POLA PRIMA to cultivate them in those principles. Intensively carrying out the awareness of POLA PRIMA values program that is comprised of a variety of Bank BTN's work culture programs, including: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Holding workshops, socialization and training for trainers on POLA PRIMA. ✓ Providing banners and visualization of working units' work culture program. ✓ Providing a reward program for the best working unit in POLA PRIMA implementation. <p>The business ethics and work culture awareness program will be conducted regularly and consistently.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Institutionalization and Internalization 	<p>The management has instructed working units to do the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> Every Division/Desk/Regional Office is required to disclose any transaction that involves conflict of interest, including revealing the names and positions of those engaged in such a transaction, the names and positions of those making decision on such a transaction as well as types of transaction, transaction values and all related details. Every executive is required to disclose gratification-related activities in accordance with Corruption Eradication Commission (KPK) regulations.

No	Upaya	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> • Setiap pejabat bank wajib melaporkan harta kekayaan sesuai ketentuan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). • Dalam hal penghimpunan dana, Bank BTN telah menerapkan manajemen risiko, tidak memberikan hadiah/insentif kepada nasabah dan/atau pihak terkait berkenaan dengan penempatan dana di Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Setiap pegawai Bank BTN diinstruksikan tidak boleh mempunyai usaha sampingan terkait dengan bisnis Bank BTN, seperti suplier/rekanan, penyedia barang/jasa, penyedia lahan, subkontraktor dan lain sebagainya baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan. • Pegawai Bank BTN dan Pengurus Dana Pensiun serta Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BTN tidak diperkenankan untuk menerima hadiah dari pihak ketiga dalam bentuk apapun dan nilai berapapun. Demikian juga dengan pemberian hadiah kepada Penyelenggara Negara dalam bentuk apapun dan nilai berapapun. Kebijakan ini selain bertujuan untuk menjamin pelaksanaan GCG di Bank BTN juga untuk menghindarkan pegawai Bank BTN dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. • Kepala Cabang selaku Pembina Koperasi Pegawai Bank BTN diminta agar memastikan bahwa Koperasi Pegawai dalam berbisnis dengan Bank BTN telah sesuai dengan AD/ART Koperasi Pegawai. • Penyediaan tenaga <i>outsourcing</i> yang membutuhkan pembinaan atau keahlian khusus (satpam, penjaga malam) hanya diberikan kepada perusahaan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi yang sesuai. • Sejak tahun 2010, Bank BTN telah berupaya untuk mengimplementasikan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) yang akan dilanjutkan pengembangannya secara intensif pada tahun 2011 dan pada masa-masa mendatang. • Melaksanakan program institusionalisasi dan internalisasi POLA PRIMA Bank BTN kepada seluruh unit kerja, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang, dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Setiap unit kerja telah menyusun program kerja budaya kerja di unit kerja masing-masing. ✓ Setiap unit kerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program budaya kerja masing-masing unit kerja kepada <i>Culture Specialis (Human Capital Division)</i> untuk dilakukan evaluasi. <p>Program institusionalisasi dan internalisasi etika bisnis dan budaya kerja ini akan senantiasa dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi dan <i>Assessment</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan <i>assessment</i> GCG (termasuk di dalamnya pelaksanaan etika bisnis), baik dengan menggunakan metode <i>self assessment</i> maupun bermitra dengan pihak <i>independent</i>. • Melakukan penilaian implementasi Budaya Kerja melalui pelaksanaan <i>culture assessment</i> index unit kerja secara periodik. <p>Program evaluasi dan <i>assessment</i> etika bisnis dan budaya kerja ini akan senantiasa dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Eksternalisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan program eksternalisasi kepada pihak ketiga dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bank BTN telah melakukan komunikasi penerapan GCG (termasuk didalamnya implementasi etika bisnis) kepada pihak eksternal dan segenap <i>stakeholders</i>, melalui <i>advertorial</i> di Harian Umum Nasional, yaitu: melalui harian Kompas pada tanggal 29 Desember 2010 dan harian Bisnis Indonesia pada tanggal 30 Desember 2010, dengan materi seluruh kegiatan implementasi GCG di Bank BTN periode 2010. ✓ Mengkomunikasikan POLA PRIMA melalui media kalender dan majalah-majalah nasional, seperti GATRA, INFOBANK, PROPERTY AND BANK, MEN'S OBSESSION dan TRUST. <p>Program eksternalisasi etika bisnis dan budaya kerja ini akan senantiasa dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten.</p>

No	Efforts	Description
		<ul style="list-style-type: none"> • Every executive is required to report his/her wealth in compliance with KPK regulations. • When it comes to deposit accounts, the Bank applies a risk management principle, refraining from providing customers or related parties with incentives related to their deposits in the Bank. • Every employee of Bank BTN is instructed to refrain from engaging in side businesses related to Bank BTN's business, such as supplier/partnership, goods or service providers, land providers and sub-contractors to prevent potential conflict of interest. • Bank BTN's employees, Pension Fund Managers and Bank BTN Employee Welfare Foundation are not allowed to receive gratification in any form and value. They are also forbidden from extending gifts to state officials in any form and value. The policy aims to ensure GCG implementation and prevent conflict of interest. • The Branch Office Head as Bank BTN Employee Cooperative Patron is required to ensure that Employee Cooperative in its business with the Bank is compliant with Employee Cooperative Article of Association. • Outsourcing services are accepted from providers with suitable qualifications. • Since 2010, Bank BTN has implemented the Whistleblowing System (WBS) whose development will be intensively continued in 2011 and beyond. • Implementation of the POLA PRIMA institutionalization and internalization program across Bank BTN's working units, at the Main Office and Branch Offices, includes: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Every working unit makes their own work culture program. ✓ Every working unit is required to report their work culture implementation to the Culture Specialist of the Human Capital Division for evaluation. <p>The business ethics and work culture institutionalization and internalization program will be continued regularly and consistently.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluation and Assessment 	<ul style="list-style-type: none"> • Applying GCG assessment (including business ethics implementation), using both self-assessment method or partnering with an independent institution. • Applying periodic culture assessment index of working units . <p>Business ethic and work culture evaluation and assessment will be practiced consistently in a sustainable manner.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Externalization 	<ul style="list-style-type: none"> • An externalization program for the third party was conducted as follows: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bank BTN communicated GCG implementation (including business ethics implementation) to the external parties and stakeholders through advertisement in National dailies, namely Kompas on 29 December 2010 and Bisnis Indonesia on 30 December 2010, containing Bank BTN's GCG implementation for 2010. ✓ Communicating POLA PRIMA through such media as calendars and national magazines including GATRA, INFOBANK, PROPERTY AND BANK, MEN'S OBSESSION AND TRUST. <p>The business ethics and work culture externalization program will be continued regularly and consistently.</p>

Pernyataan Budaya Perusahaan

Pernyataan mengenai Budaya Perusahaan telah disahkan secara resmi melalui Peraturan Direksi yang dikenal sebagai nilai-nilai POLA PRIMA yang terdiri dari: PELAYANAN PRIMA, INOVASI, KETELADANAN, PROFESIONAL, INTEGRITAS dan KERJASAMA dan kebijakan etika bisnis yang tertuang dalam kebijakan *Code of Conduct* Bank BTN.

Akuntan Bank

- Sesuai dengan RUPS Bank BTN telah diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2010, bahwa RUPS memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dalam rangka kebutuhan atas audit laporan keuangan tahun buku 2010
- Dewan Komisaris telah menunjuk KAP Purwanto, Suherman & Surja (KAP PSS-EY), member firm Ernst & Young Global, sebagai Auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun Buku 2010.
- Berdasarkan penunjukan dimaksud maka jumlah periode akuntan publik, dalam hal ini KAP Purwanto, Suherman & Surja (PSS-EY), melakukan audit atas laporan keuangan tahunan Bank BTN adalah sebanyak 1 (satu) periode yaitu periode audit tahun buku 2010.
- Besar biaya audit yang dikeluarkan sebesar Rp 1.235.000.000,- (terbilang: satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk pajak-pajak dan *Out of Pocket Expenses* (OPE).

Penyediaan Dana Pihak Terkait dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) adalah sebagai berikut:

No	Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah Total	
		Debitur Debitors	Nominal (Rp jutaan) Nominal (Rp millions)
1	Kepada Pihak Terkait To Related Parties	441	21.230
2	Kepada Debitur Inti To Prime Debtors		
	a. Individu Individuals	-	-
	b. Group Group	25	1.637.522

Corporate Culture Statement

The statement on Corporate Culture has been officially approved by Board of Directors Regulation, known as POLA PRIMA values consisting of: PRIMA SERVICES, INNOVATION, EXEMPLARY, PROFESSIONAL, INTEGRITY and COOPERATION and business ethics policies contained in the Code of Conduct policy of Bank BTN.

Bank Accountants

- In accordance with the RUPS of Bank BTN which was held on 19 May 2010, RUPS provides power and authority to the Board of Commissioners to determine a public accounting firm in the context of auditing needs of financial statements of fiscal year 2010.
- Board of Commissioners has appointed public accounting firm Purwanto, Suherman & Surja (KAP PSS-EY), member firm of Ernst & Young Global, as Auditors to audit financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk of Fiscal Year 2010.
- Based on the designation referred to the number of public accounting period, in this case public accounting firm Purwanto, Suherman & Surja (PSS-EY), conducted an audit of the annual financial statements of Bank BTN for as much as 1 (one) audit period of fiscal year 2010.
- An audit cost of Rp 1,235,000,000,- (one billion two hundred thirty five million rupiah) has been incurred, inclusive of taxes and Out of Pocket Expenses (OPE).

Provision of funds to Related Parties and Large Exposures

Provision of funds to related parties and large exposures are as follows:

Jumlah Penyimpangan Internal

Berikut tabel jumlah penyimpangan internal hingga 31 Desember 2010:

Internal Fraud

The following table lists the number of internal fraud until 31 December 2010:

Internal Fraud Dalam 1 Tahun Internal Fraud in 1 Year	Jumlah kasus yang dilakukan oleh Number of cases performed by					
	Pengurus Management		Pegawai Tetap Fixed Employees		Pegawai Tidak Tetap Non-Fixed Employees	
	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year
Jumlah internal fraud Number of internal fraud	-	-	19	7		
Telah diselesaikan Has been settled	-	-	17	4		
Dalam proses penyelesaian internal In internal settlement process	-	-	1	3		
Belum diupayakan penyelesaiannya Settlement has not been pursued	-	-	-	-		
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Has been followed up through the legal process	-	-	1	-		

Catatan: *Fraud* dengan dampak penyimpangannya lebih dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Note: *Fraud* with deviation impacts of more than Rp 100,000,000,- (one hundred million rupiah)

Perkara yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2010, jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebagai berikut:

Litigation

During 2010, the number of civil and criminal law issues completed (already have final and conclusive legal force) and still in the process of settlement is as follows:

No	Permasalahan Hukum Legal Issues	Jumlah Total		
		Perdata Civil	Pidana Criminal	Hubungan Industrial Industrial Relations
1	Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Has been completed (already have final and conclusive legal force)	7	-	1
2	Dalam proses penyelesaian In the process of completion	85	-	-
	Total	92	-	1

Dari sejumlah perkara tersebut, beberapa perkara dengan nilai tuntutan di atas Rp 1 miliar adalah sebagai berikut:

The following are some Litigation Cases with more than Rp 1 billion in damages:

Gugatan Mengenai Perselisihan Agunan

Pokok Perkara	Penggugat adalah ahli waris melakukan gugatan kepada Bank BTN karena keberatan tanah dan bangunan di perumahan di Depok menjadi agunan kredit Bank BTN KC. Depok.
Kasus Posisi	Penggugat melakukan gugatan kepada Bank BTN dikarenakan agunan berupa: tanah dan bangunan di perumahan di Depok yang diajukan agunan kredit oleh debitur kepada Bank BTN Kantor Cabang Depok, saat ini dalam tindakan penyitaan dikarenakan kredit dalam kolektibilitas macet merupakan harta warisan, dimana dalam kredit/penjaminan agunan tersebut, dilakukan oleh salah satu ahli waris yang bekerjasama dengan debitur. Kerugian Finansial: Rp 225.000.000,- (pokok kredit).
Status Penyelesaian Perkara	Penggugat menuntut tuntutan material dan immaterial sebesar tuntutan Rp 1.080.000.000,-
Pengaruh terhadap Kondisi Keuangan Bank	Sedang dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung. Tidak mempengaruhi keuangan Bank BTN.

Gugatan Mengenai Sistem Informasi Debitur (SID)

Pokok Perkara	Penggugat menggugat Bank BTN, dikarenakan di dalam Sistem Informasi Debitur (SID) masih muncul nama yang bersangkutan dengan pertimbangan Penggugat sudah membayar lunas kepada Bank BTN Kantor Cabang Palembang.
Kasus Posisi	Penggugat memiliki tunggakan yang belum lunas. Bank BTN memberikan surat pemberitahuan sebanyak 3 kali, penggugat baru datang dan melunasi. Pada SID muncul kolektibilitas 5 (macet) karena belum melunasi. Data bisa hilang di SID 2 tahun kemudian. Penggugat menggugat karena di SID masih muncul nama penggugat sebagai debitur yang macet. Tuntutan kerugian dari Penggugat sebesar Rp 1.530.000.000,-
Status Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • PN (Bank BTN) Menang • Banding ke PT sedang dalam proses
Pengaruh terhadap Kondisi Keuangan Bank	Tidak mempengaruhi keuangan Perusahaan.

Gugatan dari Konsumen

Pokok Perkara	<i>Developer</i> sebagai nasabah kredit BTN dengan proyek Apartemen di Jakarta. Konsumen <i>developer</i> tersebut melaporkan Bank BTN ke Kejaksaan Agung dengan delik tindak pidana korupsi.
Kasus Posisi	<ol style="list-style-type: none"> <i>Developer</i> Apartemen di Jakarta masuk dalam kolektibilitas 5 (macet). Laporan ke Kejaksaan Agung dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian dan monitoring kredit kepada <i>developer</i>. <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan perkara dibantu oleh Kuasa Hukum Berry Sidabutar & Partners, dengan tugas utama adalah mengamankan posisi Bank BTN terhadap tuntutan eksternal. • Bahwa dalam penanganan perkara telah dilakukan pengamanan dari pihak Kuasa Hukum dengan dukungan bukti dokumen kredit, sehingga posisi hukum Bank BTN tidak lagi dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi. <i>Developer</i> ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akibat dari gugatan pihak konsumen <i>developer</i>. Status agunan telah diikat secara sempurna dalam bentuk Hak Tanggungan terhadap proyek apartemen di Jakarta, berdasarkan hal tersebut Bank BTN menggunakan hak privilese untuk melakukan eksekusi sendiri melalui KPKNL sampai dengan tanggal 22 Februari 2011. Proses lelang terhambat dikarenakan pada hari dan tanggal yang bersamaan Kepala KPKNL diperiksa di Mabes Polri.
Status Penyelesaian Perkara	Sedang dalam proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Pengaruh terhadap Kondisi Keuangan Bank	Tidak mempengaruhi keuangan Bank BTN, karena jaminan kredit sudah diikat dalam Hak tanggungan, Bank BTN mempunyai hak <i>preference</i> (didahulukan)

Collateral Related Lawsuits

Case of Lawsuit	The plaintiff is an heir of a plot of land, filing a lawsuit against Bank BTN for a plot of land in Depok residential area used as a collateral for Bank BTN's loans.
Case Position	The plaintiff filed a lawsuit against Bank BTN for an inherited plot of land in Depok residential area that the Bank seized for nonperforming loans secured by one of the heirs of the land. Financial Loss : Rp 225,000,000 The plaintiff sought Rp 1,080,000,000 in material and immaterial damages.
Case Settlement Status	Being appealed in the Supreme Court
Impact on The Bank's Financial Conditions	No impact on the Bank's financial conditions.

Debtor Information System Lawsuit

Case of Lawsuit	The plaintiff sued Bank BTN, claiming the Bank maintained the plaintiff's name in the Debtor Information System despite the fact that the plaintiff had settled his/her loans with Bank BTN Branch in Palembang.
Case Position	The plaintiff had not settled the loans. After Bank BTN sent notification letters 3 times, the plaintiff came and settled the loans. The Debtor Information System (SID) recorded the loans as bad loan or collectibility (level 5) because the loans has not been settled. The recorded data can be eliminated from SID within 2 years. Plaintiff sued Bank BTN due to the listing of debtor in SID as bad debt loans. The plaintiff is seeking Rp 1,530,000,000 in damages
Case Settlement Status	<ul style="list-style-type: none"> • Bank BTN won the case with the District Court • Being appealed with the Higher Court
Impact on The Bank's Financial Conditions	No impact on the Bank's financial conditions

Consumer Litigation

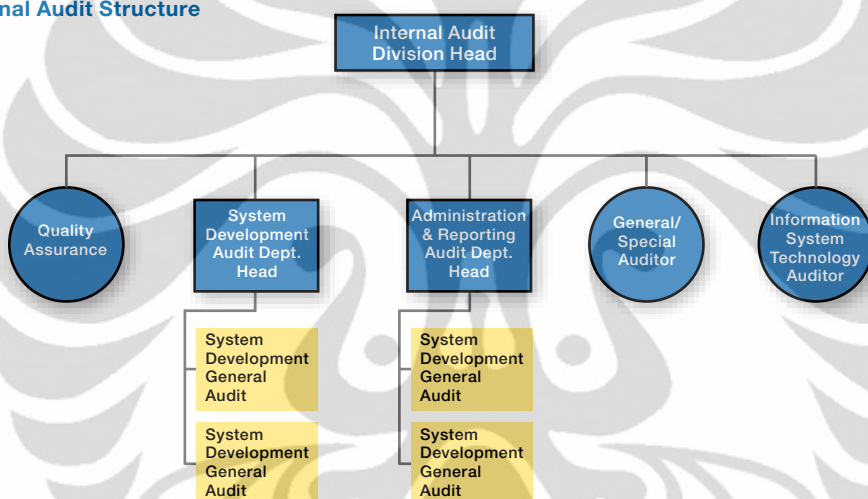
Case of Lawsuit	The developers of the an apartment in Jakarta, who are also Bank BTN's debtor, filed a lawsuit with the Attorney General's Office against Bank BTN for alleged corruption.
Case Position	<ol style="list-style-type: none"> The developer's apartment loans in Jakarta were categorized into a collectibility 5 (non-performing). A lawsuit was filed with the Attorney General's Office indicting on alleged corruption in the chenneling and monitoring of credit facilities to the developers. <ul style="list-style-type: none"> • The Bank was represented in the litigation by the Berry Sidabutar & Partners Law Firm, with its main task was to defend Bank BTN against external litigation. • The legal representatives defended the bank in the legal proceedings by producing credit documents as evidence, clearing Bank BTN of corruption allegation. The litigation resulted in the Central Jakarta District Court declaring the developers bankrupt. The collateral status was perfectly secured in the form of Mortgage Rights over the apartment in Jakarta. Based on the new status, Bank BTN exercised its privilege right to bring by itself the court ruling to action by way of the State Assets and Auction Service Office (KPKNL) until February 22, 2011. The auction process was hampered as the Head of KPKNL was detained by the National Police Headquarters on the same date of the auction.
Litigation Settlement Status	Under judicial investigation by the Attorney General's Office
Impact on the Bank's Financial Conditions	The Bank's financial conditions were not impacted as credit collateral had been perfectly secured through the Mortgage Rights, thus, Bank BTN held preference rights.

Audit Internal

Ketua dan Struktur Audit Internal

- Fungsi Audit Internal Bank BTN dilaksanakan oleh Internal Audit Division (IAD) yang diketuai oleh Bankhtiar Effendi (biografi singkat Kepala IAD dapat dilihat pada bagian Data Perusahaan dalam laporan tahunan ini). Adapun struktur organisasi IAD sebagai berikut:

Struktur Audit Internal Internal Audit Structure



- IAD berperan sebagai *strategic business partner* bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Bank BTN dengan melakukan evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara obyektif dan jasa konsultasi (narasumber) terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management, control* dan *governance processes*. Hal ini dilakukan dengan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

Piagam Audit Internal

- Piagam Audit Internal Bank BTN ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 01/DEKOM-DIR/DAI/II/2010 tertanggal 17 Maret 2010 tentang "Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Bank Tabungan Nasional (Persero) Tbk".

Internal Audit

Head and Structure of Internal Audit

- The Internal Audit function of Bank BTN is carried out by Internal Audit Division (IAD) led by Bakhtiar Effendi (brief biography Head of IAD can be found at Corporate Data section in this Annual Report). The organizational structure of IAD, as follows:

- IAD acts as a *strategic business partner* for all levels of management in order to encourage the achievement of goals and objectives of Bank BTN with an evaluation based on *risk-based audit* objectively and consulting services (resource persons), particularly those involving the enhancement and improvement of *risk management, control* and *governance processes*. This is done through a proactive approach, enthusiastic and dynamic, communicating effectively, oriented to business and *stakeholders*, an understanding of the subject matter (*root of the problem*) and areas with high risk, an emphasis on quality findings, and recommending practical and workable solutions.

Internal Audit Charter

- Internal Audit Charter of Bank BTN is determined based on Joint Decree of Board of Commissioners and Board of Directors No. 01/DEKOM-DIR/DAI/II/2010 dated 17 March 2010 on "Internal Audit Charter of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk".

- Piagam Audit Internal ini dimaksudkan sebagai pedoman standar yang memuat ukuran minimal tentang Fungsi Audit Internal yang perlu diselenggarakan oleh Bank BTN serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Intern. Piagam Audit Internal ini ditujukan pula untuk terciptanya kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat perneliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Bank.
- Ruang lingkup pekerjaan audit oleh DAI mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan organisasi Bank. Pekerjaan audit tersebut dilakukan melalui pendekatan *risk-based* audit dengan melihat minimal 8 risiko yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia, yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan.

Berdasarkan arahan Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris, ruang lingkup pekerjaan audit oleh IAD juga mencakup kegiatan badan-badan usaha afiliasi dan anak perusahaan yang secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi terselenggaranya secara baik kepentingan Bank BTN.

Ruang lingkup pekerjaan IAD mencakup audit dan penilaian atas efektivitas *risk management*, kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah digariskan, serta efektivitas *governance processes* dengan melakukan:

- Audit ketaatan (*compliance audit*) terhadap kebijakan, rencana dan anggaran, prosedur, peraturan, pelaporan Bank BTN dibidang keuangan, akuntansi dan kegiatan operasional lainnya;
- Audit keuangan (*financial audit*) dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang wajar, handal, tepat waktu, lengkap dan berguna baik bagi kepentingan Bank BTN, masyarakat maupun Bank Indonesia, termasuk melakukan verifikasi atas kewajaran penyajian laporan keuangan pada akhir tahun buku;
- Audit operasional (*operational management audit*) dalam rangka meningkatkan efisiensi,

- Internal Audit Charter is intended as a guide that includes a standard minimum size of Internal Audit functions that needs to be held by Bank BTN as well as aspects relating to the implementation of Internal Audit. Internal Audit Charter is intended also to create and promote common understanding and foundation of the maintenance level of interests and commitments from all parties related to the Bank.
- The scope of audit work by IAD covers all aspects and elements of organizational activities of the Bank. Audit work is carried out through risk-based audit approach by at least looking at 8 risks referring to Bank Indonesia Regulations, namely Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputational Risk, Strategic Risk and Compliance Risk.

Under the direction of President Director and or Board of Commissioners, the scope of audit work by IAD also includes activities of affiliated enterprises and subsidiaries that are directly or indirectly expected to affect the implementation of the interests of Bank BTN as well.

The scope of IAD's work includes audit and assessment of the effectiveness of risk management, adequacy and effectiveness of internal control systems, quality of performance in carrying out responsibilities that have been outlined, as well as the effectiveness of governance processes by performing:

- Compliance audit of policies, plans and budgets, procedures, regulations, bank reporting in finance, accounting and other operational activities;
- Financial audit in the framework of the implementation of accounting and fair presentation of financial statements, reliable, timely, complete and useful both for the interests of the Bank, the public and Bank Indonesia, including to verify the fairness of presentation of financial statements at the end of the fiscal year;
- Operational management audit in order to improve efficiency, security of resources

pengamanan sumber daya dan dana, serta konsistensi dan efektivitas atas manfaat suatu kegiatan operasional atau program yang telah ditetapkan;

- Audit rating dalam rangka menilai kinerja suatu unit kerja Bank berdasarkan hasil audit dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya.
- Audit teknologi sistem informasi (*information and technology system audit*) untuk memastikan terjaminnya integritas data (benar, lengkap, aman, tepat waktu), efektivitas dan efisiensi prosedur operasi dan kelangsungan operasional teknologi sistem informasi, serta kepatuhan terhadap ketentuan teknologi sistem informasi. Termasuk melakukan audit atas setiap implementasi aplikasi TSI untuk memastikan bahwa aplikasi telah sesuai dengan yang ditetapkan, kepatuhan terhadap ketentuan, terdapat kontrol yang memadai dan tersedianya sarana penelusuran kembali (*audit trail/trace*), serta memberi rekomendasi mengenai kontrol yang perlu diterapkan;
- Audit khusus dan investigasi (*special and investigation audit*) terhadap hal-hal yang diduga atau diperkirakan berindikasi tindak perbuatan kecurangan/penyalahgunaan/manipulasi (*fraud*), penggelapan, penyimpangan terhadap ketentuan/peraturan internal maupun eksternal, dan lain sebagainya berdasarkan Instruksi Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris.
- Pemantauan secara *of-site* atau *monitoring* (*desk audit*) terhadap segala aktivitas di seluruh unit kerja Bank BTN melalui analisis terhadap dokumen dan laporan;
- Penilaian atas sistem pengamanan harta kekayaan Bank BTN termasuk sumber daya dan dana, serta memastikan eksistensi harta kekayaan Bank BTN.

Pelaksanaan Tugas Audit Internal

Sesuai dengan program kerja tahun 2010, selama tahun buku 2010, telah dilakukan audit dengan *resume* kegiatan audit dapat disajikan melalui tabel berikut:

and funds, as well as consistency and effectiveness of the benefits of an operational activity or program that has been set;

- Audit rating in order to assess the performance of a work unit of the Bank based on audit results and assessments in the areas of finance, accounting, operations and other activities;
- Information and technology system audit to ensure security of data integrity (correct, complete, safe, on time), effectiveness and efficiency of operating procedures and operational viability of information systems technology, and compliance with the provisions of information systems technology, including carrying out an audit of each implementation of ITS application for ensuring that the application is in compliance with the law, adherence to regulations, the existence of adequate control, the availability of back tracking (audit trail/trace), and provide recommendations regarding control that needs to be implemented;
- Special dan investigation audit on matters suspected or thought to contain an indication of fraud/abuse/manipulation (fraud), embezzlement, diversion of provisions/internal and external regulations and so forth based on the instructions of President Director and or the Board of Commissioners;
- Off-site monitoring or desk audit on all activities in all work units of the Bank through an analysis of documents and reports;
- Assessment of the security system of Bank assets, including resources and funding, and ensuring the existence of Bank assets.

Implementation of Internal Audit Tasks

In accordance with the work program in 2010, during fiscal year 2010 has been carried out audits with audit activities summarized in the following table:

No	Jenis Audit Type of Audit	Jumlah Temuan Number of Findings	Selesai Completed	Belum Selesai Not Finished Yet
1.	General Audit – Kantor Cabang General Audit – Branch Offices	1.659	1.313	346
2.	General Audit – Kantor Cabang Syariah General Audit – Sharia Branch Offices	493	145	348
3.	Audit Teknologi Sistem Informasi Information System Technology Audit	181	93	88
4.	General Audit – Kantor Pusat General Audit – Head Office	154	115	39
5.	General Audit – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan General Audit – Partnership and Community Development Program	9	0	9
6.	Bank Indonesia Bank Indonesia	85	55	30
7.	BPK – RI BPK – RI	117	112	5
8.	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	209	187	22

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Komite Audit dan Auditor Eksternal berkoordinasi secara aktif dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Auditor eksternal mengkomunikasikan mengenai rencana pelaksanaan audit laporan keuangan Bank BTN yang didalamnya menyangkut ruang lingkup penugasan, *deliverables* dan *deadling*, metodologi audit, cakupan audit dan jadwal pelaksanaan audit.

Komite Audit juga secara rutin melakukan pemantauan terhadap kinerja IAD maupun Auditor Eksternal melalui rapat koordinasi yang dilakukan setiap bulan. Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai tindak lanjut temuan-temuan audit oleh auditor eksternal.

Jasa Non Audit

Dalam rangka penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006) yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2010, Bank BTN menggunakan Jasa Konsultan dari Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio dan Rekan – Deloitte (KAP OBS-Deloitte) dengan tahapan sebagai berikut:

Coordination of External Auditors and the Audit Committee

Audit Committee and External Auditors shall coordinate actively in the implementation of audit of financial statements. External auditors shall communicate about plans for auditing financial statements of Bank BTN, to cover the scope of assignments, deliverables and deadlines, audit methodology, audit coverage and audit implementation schedule.

Audit Committee also regularly monitors the performance of IAD and External Auditors through coordination meetings conducted every month. Follow-up of audit findings by external auditors is also discussed in the meetings.

Non-Audit Services

In line with the application of PSAK 50 and PSAK 55 (revised 2006) which became effective as of 1 January 2010, Bank BTN uses the Consulting Services of Public Accounting Firm Osman Bing Satrio and Partners – Deloitte (KAP OBS-Deloitte) with the following stages:

No	Pengadaan Procurement	Mekanisme Pengadaan Procurement Mechanism	Jangka Waktu Period	Jenis Pekerjaan Type of Activities
1	Tahap I Stage I	<p>Pemilihan Langsung diantara 3 konsultan yang memiliki pengalaman atas penerapan PSAK 50/55 (yang diadopsi dari IAS 32 dan 39) dan LBU 2008 yaitu: Price Waterhouse Coopers (PWC), KPMG dan Deloitte. Dan dalam pemilihan tersebut dimenangkan oleh KAP OBS Deloitte.</p> <p>Direct election between 3 (three) consultants who have experience on the application of PSAK 50/55 (adopted from IAS 32 and 39) and LBU 2008 namely: Price Waterhouse Coopers (PWC), KPMG and Deloitte, and the election is won by KAP OBS Deloitte.</p>	<p>Agustus – Oktober 2008</p> <p>August – October 2008</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Awareness Training • GAP Analysis • Penelaahan awal terhadap COA, GL dan LBU. • Mengembangkan detail Roadmap. • Awareness Training • GAP Analysis • Initial review of COA, GL and LBU. • Develop a detailed roadmap
2	Tahap II Stage II	<p>Penunjukan Langsung KAP OBS Deloitte, karena merupakan pekerjaan lanjutan.</p> <p>Direct appointment of KAP OBS Deloitte as it is a continuation of work.</p>	<p>Desember 2008 – September 2010</p> <p>December 2008 – September 2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa Transaksi yang berhubungan dengan klasifikasi, pengukuran dan penurunan nilai instrumen (aset) keuangan. • Data Updating & Cleansing • Test case yang meliputi data kredit, dan treasury. • Implementasi • Supervisi Implementasi • Analyzing transactions relating to the classification, measurement and impairment of financial instruments (assets). • Data Updating & Cleansing • Test case which includes credit and treasury data • Implementation • Supervision of implementation
3	Tahap III Stage III	<p>Penunjukan Langsung KAP OBS Deloitte, karena merupakan pekerjaan lanjutan.</p> <p>Direct appointment of KAP OBS Deloitte as it is a continuation of work.</p>	<p>Oktober 2010 – s.d Mei 2011</p> <p>October 2010 – May 2011</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Aspek Bisnis dan Akuntansi meliputi: Revisi Jurnal Standar dan Kebijakan Akuntansi, Pendampingan dalam Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan, proses roll out individual impairment, konsultasi dan rekomendasi terkait aktivitas implementasi PSAK 50/55. • Pendampingan Aspek Solusi IT • Pelaporan, Supervisi Implementasi, dan Sosialisasi. • Aspects of Business and Accounting Assistance include: Revisions to Journal of Accounting Standards and Policies. Assistance in the presentation and disclosure of financial statements, roll out of individual impairment, consultation and recommendations related to implementation of PSAK 50/55. • Mentoring IT Solution Aspects. • Reporting, Supervision of Implementation, and Socialization.

Publikasi Pembayaran Pajak

- Pembayaran pajak badan maupun karyawan merupakan bentuk pertanggungjawaban dan pertanggungjelas Bank BTN kepada pemerintah (bertindak sebagai *stakeholders*) atas penerimaan pajak dari Bank BTN.
- Pembayaran pajak badan maupun pegawai Bank dapat disampaikan sebagai berikut:
 - ✓ Pembayaran PPh Pasal 25 periode Januari 2010 s.d Desember 2010 adalah sebesar Rp 278.831.496.747. Untuk pembayaran akhir tahun (PPh Pasal 29) (sampai saat Annual Report ini dibuat) masih dalam perhitungan sambil menunggu penyelesaian laporan keuangan yang telah diaudit.
 - ✓ Pembayaran PPh Pasal 21 untuk karyawan periode Januari 2010 s.d. Desember 2010 adalah sebesar Rp 72.895.556.950.
 - ✓ Mengenai bentuk pelaporan pajak dalam Laporan Tahunan telah dilakukan sesuai standar PSAK yang berlaku dimana juga telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik. Saat ini, pengungkapan mengenai rincian Hutang Pajak telah dijabarkan dalam catatan "Kewajiban Segera", sedangkan dalam catatan "Perpajakan", Bank BTN telah menjelaskan secara rinci hitungan PPh Badannya, dimana juga memuat rekonsiliasi antara laba komersial dan laba fiskal. Ke depannya (laporan keuangan audit per 31 Desember 2010 saat ini masih dalam tahap penyelesaian), berdasarkan hasil *benchmarking* dengan perusahaan lain, pengungkapan mengenai Hutang Pajak tetap akan dituangkan dalam catatan "Kewajiban Segera", hanya rincian dari hutang pajak tersebut akan dijabarkan dalam catatan "Perpajakan".

Partisipasi dalam Perhimpunan Profesi Auditor Internal

Dalam rangka memperluas dan mengembangkan wawasan dan kompetensi profesional Auditor Internal, Organisasi Internal Audit bank BTN telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan para auditornya dalam berbagai organisasi perhimpunan (asosiasi) profesi auditor internal, diantaranya:

- Terlibat aktif sebagai pengurus dan pengawas dalam kegiatan perhimpunan profesi audit intern Forum Komunikasi Satuan Pengawasan

Publication of Tax Payment

- Payment of corporate and employee taxes is a form of accountability and responsibility of the Bank to the government (acting as stakeholder) of taxes received from the Bank BTN.
- Payment of corporate and employee taxes by the Bank can be done as follows:
 - ✓ Payment of Income Tax Article 25 for the period January 2010 to December 2010 is Rp 278,831,496,747. Year-end tax payment (income tax article 29) (to date this Annual report is made) is still in the computation while waiting for completion of audited financial statements.
 - ✓ Payment of employees' Income Tax Article 21 for the period January 2010 to December 2010 is Rp 72,895,556,950.
 - ✓ The form of tax reporting in Annual Reports has been made according to the applicable PSAK standards and has been audited by a Public Accounting Firm. Currently, the disclosures regarding details of the Tax Debt have been described in the note on "Immediate Liabilities", whereas in the note on "Taxation", Bank BTN has explained in detail the calculation of its Corporate Tax, which contains reconciliation between commercial profit and fiscal profit. Next (audited financial statements as of 31 December 2010 are still in finalization stage), based on the results of benchmarking with other companies, disclosure of Tax Debt will continue be set forth in the note on "Immediate Liabilities" and the details of the tax debt will be outlined in the note on "Taxation".

Participation in Professional Association of Internal Auditors

In order to expand and develop knowledge and professional competence of Internal Auditors, the Internal Audit organization of Bank BTN has participated in sending its auditors to various organizations of internal auditor professional associations, among others:

- Actively involved as administrators and supervisors in the activities of internal audit profession association Forum Komunikasi

Internal (FKSPI) - BUMN/ BUMD periode 2010-2013.

- Organisasi Internal Audit Bank BTN telah menyertakan para auditornya dalam berbagai kegiatan Perhimpunan Profesi auditor internal lain, diantaranya sebagai anggota Ikatan Auditor Internal Bank (IAIB), Perhimpunan Audit Internal Indonesia (PAII) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan selanjutnya anggota IAD juga diupayakan untuk menjadi member asosiasi lain seperti of The Institute of Internal Auditor (IIA)-Indonesia Chapter.
- Keikutsertaan anggota IAD pada berbagai perhimpunan profesi Internal Auditor sangat mendukung peningkatan kompetensi dan wawasan anggota IAD untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas audit maupun pengembangan dalam pengelolaan kegiatan auditnya. Perhimpunan-perhimpunan tersebut merupakan ajang pertukaran informasi serta forum diskusi (*benchmarking*) diantara para internal auditor terkait isu-isu terkini dalam dunia *auditing* dan perbankan.
- Untuk melengkapi kompetensi melalui partisipasi dan keterlibatan dalam berbagai organisasi perhimpunan (asosiasi) profesi Auditor Internal, maka setiap personil Auditor IAD juga telah dipersyaratkan untuk memperoleh sertifikasi profesi audit internal seperti *Qualified Internal Auditor* (QIA). Program sertifikasi lain yang diikuti juga meliputi Sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi tingkat Nasional seperti Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) maupun sertifikasi tingkat Internasional seperti *Certified Internal Auditor* (CIA) dan *Certified Information System Audit* (CISA).

Laporan Kepatuhan

Laporan Pelaksanaan Direktur Kepatuhan

Laporan Direktur Kepatuhan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia. Pada periode 2010, Direktur Kepatuhan telah melaksanakan tugasnya, antara lain:

- Memastikan Bank BTN telah memenuhi peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- Memantau dan menjaga kegiatan usaha Bank BTN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satuan Pengawasan Intern (FKSPI)-BUMN/ BUMD for the period 2010-2013.

- The Internal Audit organization of Bank BTN has included its auditors to participate in various activities of other internal auditors professional associations, among others as a member of Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB), Perhimpunan Audit Internal Indonesia (PAII) and Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), and subsequently IAD members are also strived to become members of The Institute of Internal Auditor (IIA)-Indonesia Chapter.
- The participation of IAD members in various professional associations of internal auditors strongly supports the improving competence and knowledge of IAD members for the smooth execution of audit assignments and management of audit activities. Such associations represent an arena of information exchange and discussion forum (*benchmarking*) between internal auditors related to current issues in auditing and the banking world.
- To add competency through participation and involvement in various organizations of Internal Audit professional association, each IAD auditor has also been required to obtain an internal auditor professional certification such as *Qualified Internal Auditor* (QIA). Other certification programs followed also include *Competency Certification* from the national level professional certification institute such as *Professional Banking Certification Institute* (LSPP) and international level certification such as *Certified Internal Auditor* (CIA) and *Certified Information System Audit* (CISA).

Compliance Report

Compliance Director's Implementation Report

The Compliance Director's report refers to applicable Bank Indonesia regulations. In the period of 2010, the Compliance Director has carried out his duties, among other:

- Ensuring that Bank BTN has complied with the regulations of Bank Indonesia and prevailing laws and regulations in the context of implementing prudential principles.
- Monitoring and maintain the Bank's business activities in accordance with applicable regulations.

- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank BTN terhadap perjanjian dan komitmen dengan pihak eksternal.

Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Perbankan

Dalam rangka memenuhi kepatuhan Bank BTN terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian, Bank BTN dalam periode Laporan Direktur Kepatuhan bulan Juli –Desember 2010, telah melaporkan beberapa hal sebagai berikut :

- Rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit dan risiko pasar, sampai dengan posisi 31 Desember 2010 adalah 17,94 %, sedangkan rasio kewajiban penyediaan modal minimum untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional 16,55 %.
- Selama periode laporan tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- Selama periode laporan tidak terjadi pelanggaran Posisi Devisa Netto (PDN).
- Posisi Devisa Netto keseluruhan terhadap Modal dan Posisi Devisa Netto Neraca terhadap Modal per 31 Desember 2010 adalah masing-masing 2,5700 % dan 2,1937 %.

Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisisme Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009 Perihal Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisisme, langkah langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh Bank BTN adalah sebagai berikut:

- Menyusun ketentuan internal tentang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisisme (PPT), yaitu:
 - ✓ Peraturan Direksi No.17/PD/DK/2010 tanggal 29 Juni 2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisisme di Bank BTN.
 - ✓ Surat Edaran Direksi No.26/DIR/DK/2010 tanggal 30 Juni 2010 Perihal Pedoman

- Monitoring and ensuring adherence of Bank BTN to agreements and commitments with external parties.

Implementation of Prudential Banking Principles

In order to fulfill adherence of Bank BTN to the implementation of prudential principles, Bank BTN in its Compliance Director's Report for the period of July to December 2010, has reported some of the following:

- Capital adequacy ratio for credit risk and market risk until 31 December 2010 was 17.94%, while capital adequacy ratio for credit risk, market risk and operational risk was 16.55%.
- There was no violation or transgression of the Legal Lending Limit (LLL) during the reporting period.
- There was no violation of Net Open Position (NOP) during the reporting period.
- The Overall Net Open Position to Capital and Net Open Position of Balance Sheet to Capital as of 31 December 2010 reached 2.5700% and 2.1937% respectively.

Implementation of Compliance with Anti-Money Laundering Program and Terrorism Financing Prevention

With the enactment of Bank Indonesia Regulation No.11/28/PBI/2009 dated 1 July 2009 on the Implementation of Anti-Money Laundering Program and Terrorist Financing Prevention for Commercial Banks and Bank Indonesia Circular Letter No.11/31/DPNP dated 30 November 2009 on Implementation Guidelines of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention, anticipatory measures that have been conducted by Bank BTN are as follows:

- Develop internal regulations on Anti-Money Laundering (APU) and Terrorism Financing Prevention (PPT), namely:
 - ✓ Directors Regulation No.17/PD/DK/2010 dated 29 June 2010 on the Implementation of Anti-Money Laundering Program and Terrorism Financing Prevention at Bank BTN.
 - ✓ Directors Circular Letter No.26/DIR/DK/2010 dated 30 June 2010 on

Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

- Sosialisasi, Pendidikan & Pelatihan APU dan PPT.
 - ✓ Pendidikan APU dan PPT diberikan kepada calon pegawai: *Customer Service, Teller Service, Business Process, Officer Development Program (ODP)*.
 - ✓ Sosialisasi APU dan PPT diberikan kepada pegawai sebagai sarana update pengetahuan terbaru terkait APU dan PPT.
 - ✓ Sosialisasi APU dan PPT diberikan kepada pegawai Kantor Pos atas pembukaan Kantor Layanan setara Kantor Kas Bank BTN di Kantor Pos yang melayani produk tabungan e'Batara Pos.

Pengkinian Data Nasabah

Bank BTN telah menyusun Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah. Sedangkan untuk pengkinian data nasabah yang berbasis risiko akan dilakukan pada tahun 2011 dengan prioritas kepada nasabah yang memiliki saldo lebih dari Rp 500.000.000.

Pelaksanaan Compliance Control

Untuk meminimalisir temuan yang berulang (menggejala) disebabkan lemahnya Kontrol Internal di Kantor Cabang, telah dilakukan evaluasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyimpangan prosedur dan atau ketentuan yang berlaku. Untuk itu menetapkan langkah-langkah selanjutnya, yaitu

- Tahap Pengenalan I, pemeriksaan *Compliance Control* dilakukan oleh Kantor Cabang dengan mengambil 1 (satu) tanggal *sampling* di bulan Juni 2010.
- Tahap Pengenalan II, pemeriksaan *Compliance Control* dilakukan oleh Kantor Cabang dengan mengambil 3 (tiga) tanggal *sampling* di bulan Juli 2010.
- Uji coba pemeriksaan *Compliance Control* yang dilakukan oleh Kantor Cabang, yaitu:
 - ✓ Periode pemeriksaan *Compliance Control* dibuat dalam kurun waktu bulanan (12 periode dalam setahun) dengan mengambil beberapa tanggal *sampling* setiap bulan dan dilaporkan ke *Compliance Desk* paling lambat pada tanggal 5 (lima) setelah periode laporan.

Implementation Guidelines of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention.

- Socialization, Education and Training of APU and PPT
 - ✓ APU and PPT education is given to prospective employees of Customer Service, Teller Service, Business Process and Officers Development Program (ODP).
 - ✓ Socialization of APU and PPT is given to employees as a means of updating the latest knowledge related to APU and PPT.
 - ✓ Socialization of APU and PPT is given to employees of the Post Office or the opening of Service Office equivalent to Cash Office of Bank BTN at the Post Office serving e'Batara Pos savings product.

Customer Data Updating

Bank BTN has prepared a Customer Data Updating Plan Report, while to update risk-based customer date will be conducted in 2011 with priority to customers with balances of more than Rp 500,000,000.

Implementation of Compliance Control

To minimize repeated findings caused by Internal Control weaknesses of Branch Offices, an evaluation has been made of the factors that led to the emergence of deviations to procedures and regulations. For that, the following steps have been taken, namely:

- Identification Phase I, Compliance control examination conducted by the Branch Office by taking 1 (one) sampling date in June 2010.
- Identification Phase II, Compliance control examination conducted by the Branch Office by taking 3 (three) sampling dates in June 2010.
- Compliance control trial examination conducted by Branch Offices, namely:
 - ✓ Compliance control examinations are made on a monthly basis (12 periods in a year) by taking some sampling dates each month which is reported to the Compliance Desk no later than the fifth after the reporting month.



- ✓ Dari hasil pemeriksaan *Compliance Control* yang dimulai bulan Agustus 2010 s.d Desember 2010 didapat rata-rata indeks kepatuhan sebesar 85,76% untuk Kantor Cabang Konvensional dan 85,06% untuk Kantor Cabang Syariah.
 - Uji petik pemeriksaan *Compliance Control* yang dilakukan oleh Tim Standardisasi *Compliance Control* Kantor Pusat di 6 (enam) Kantor Cabang Konvensional dan 4 (empat) Kantor Cabang Syariah (wilayah Jabodetabek) dari tanggal 7 Desember 2010 - 24 Desember 2010. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mereview pelaksanaan kegiatan *Compliance Control* yang dilakukan oleh Kantor Cabang.
 - Finalisasi draft Peraturan Direksi (PD), Surat Edaran Direksi (SE), *Standard Operating Procedure* (SOP) serta *Job Description Compliance Control*.
- ✓ From the *Compliance control* examination results which began in August 2010 to December 2010 was found an average compliance index of 85.76% in the case of Conventional Branch Office and 85.06% in the case of Sharia Branch Office.
 - *Compliance control* examination sampling was conducted by the *Compliance Control Standardization Team* of Head Office on 6 (six) Conventional Branch Offices and 4 (four) Sharia Branch Offices (Greater Jakarta) from 7 December 2010 to 24 December 2010. This activity aims to evaluate and review the implementation of *Compliance control* conducted by Branch Offices.
 - Finalization of draft Directors Regulation, Directors Circular Letter, *Standard Operating Procedure* (SOP) and *Job Description of Compliance Control*.

Manajemen Risiko

Risiko-risiko Bank BTN

- Beberapa risiko yang dihadapi oleh Bank BTN antara lain: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis.
- Dalam rangka mengelola risiko-risiko dimaksud, Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, secara rutin per triwulan menyampaikan laporan profil risiko ke Bank Indonesia yang meliputi laporan pengelolaan risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis. Laporan profil risiko tersebut mencakup parameter, indikator dan formula yang digunakan dalam menilai tingkat risiko dan sistem pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank BTN.
- Profil risiko kantor cabang disusun oleh *Branch Risk and Control Officer* (BRCO) dan disampaikan secara triwulanan kepada Divisi Manajemen Risiko dan salinannya ditembuskan kepada Divisi Audit Internal sebagai bahan untuk melakukan general audit ke kantor cabang.
- Secara umum risiko komposit yang dimiliki Bank BTN pada triwulan IV tahun 2010 berada pada level *low to moderate*, di mana terdapat kategori risiko *moderate* untuk jenis risiko kredit, *low* untuk jenis risiko lainnya. Hal tersebut didukung oleh *Risk Control System* (RCS) yang memadai (*acceptable*) untuk ke tujuh jenis risiko dan RCS yang kuat (*strong*) untuk risiko strategis. RCS dimaksud meliputi pengawasan aktif Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan limit, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko serta efektifitas pengendalian internal.

Upaya Mengelola Risiko

Berbagai upaya pengelolaan risiko yang telah dilakukan Bank BTN, antara lain:

- **Penerapan Kerangka Kerja Basel II**
Penerapan kerangka kerja manajemen risiko sesuai dengan standar internasional yang dikeluarkan oleh *The Basel Committee on Banking Supervision* (Basel II) di Bank BTN

Risk Management

Bank BTN's Risks

- Some of the risks faced by Bank BTN include credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk.
- In order to manage the risks referred to, Risk Management Unit in accordance with PBI No. 11/25/PBI/2009 dated 1 July 2009 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, routinely submit quarterly risk profile reports to Bank of Indonesia that include risk management reports among others credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. The risk profile report includes parameters, indicators and formulas used in assessing the level of risk and risk control system implemented by Bank BTN.
- A Branch Office Risk Profile is prepared by the Branch Risk and Control Officer (BRCO) and submitted quarterly to the Risk Management Division and a copy is forwarded to the Internal Audit Division as material to make a general audit to branch offices.
- In general, composite risk held by Bank BTN in the fourth quarter of 2010 is at low to moderate level, where there is a moderate risk category for the type of credit risk, low for other types of risk. This conclusion is supported by the Risk Control System (RCS), acceptable for the 7 (seven) types of risk and a strong RCS for strategic risk. Such RCS shall include active supervision of Commissioners and Directors, adequacy of policies, procedures and limits, measurement, monitoring and information system of risk management and internal control effectiveness.

Risk Management Efforts

Various risk management efforts have been made by Bank BTN, among others:

- **Basel II Framework Implementation**
The application of risk management framework in accordance with international standards issued by the Basel Committee on Banking Supervision (Basel II) in Bank BTN refers to the

mengacu kepada *road map* yang disusun oleh Bank Indonesia dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- ✓ Membentuk *steering committee*.
- ✓ Membentuk *organizing committee*.
- ✓ Menyusun *road map* implementasi Basel II.
- ✓ Melakukan *gap analysis*.
- ✓ Menyusun kebijakan pengelolaan *database*.
- ✓ Membangun *internal loss event data* dengan dukungan *enterprise data warehouse*.
- ✓ Menyusun lini bisnis.
- ✓ Mengembangkan klasifikasi aset.
- ✓ Pengadaan konsultan manajemen risiko dan teknologi informasi.
- ✓ Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
- ✓ Sosialisasi implementasi kerangka manajemen risiko Basel II.

Bank BTN telah membentuk *steering committee* yang berfungsi sebagai tim pengarah implementasi Basel II. Guna merencanakan dan melaksanakan pengelolaan risiko dengan kerangka kerja Basel II, bank juga telah membentuk *organizing committee* yang bertugas merumuskan langkah-langkah sistematis dan berkesinambungan guna memastikan implementasi Basel II *framework* pada seluruh jajaran organisasi. *Organizing committee* ini beranggotakan pejabat dan staf dari divisi-divisi terkait yang dikelompokkan sesuai dengan kriteria 3 pilar Basel II (Pilar 1: *Minimum Capital Requirement*, Pilar 2: *Supervisory/Regulatory Review* dan Pilar 3: *Disclosure/Market Discipline*). Bank BTN juga telah menyusun *road map* implementasi kerangka kerja Basel II sejalan dengan *road map* yang telah dibuat oleh Bank Indonesia. Di samping itu, Bank BTN telah pula melakukan *gap analysis* sebagai *output action plan* untuk pengelolaan risiko dengan kerangka Basel II.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank BTN telah melakukan persiapan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* dan telah melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009

roadmap drawn up by Bank Indonesia with the following steps:

- ✓ Establish a steering committee.
- ✓ Form an organizing committee.
- ✓ Develop implementation roadmap of Basel II.
- ✓ Perform gap analysis.
- ✓ Develop a database management policy.
- ✓ Build internal loss event data with enterprise data warehouse support.
- ✓ Develop business lines.
- ✓ Develop an asset classification.
- ✓ Procurement of risk management and information technology consultants.
- ✓ Improve the competence of human resources.
- ✓ Socialization of the implementation of Basel II risk management framework.

Bank BTN has established a steering committee that serves as a steering team to implement Basel II. In order to plan and implement risk management with Basel II framework, the Bank has also formed an organizing committee in charge of formulating measures to ensuring a systematic and sustained implementation of Basel II framework at all levels of the organization. Organizing committee consists of officials and staff from related divisions that are grouped according to the criteria of the 3 pillars of Basel II (Pillar 1: Minimum Capital Requirements, Pillar 2: Supervisory/Regulatory Review and Pillar 3: Disclosure/Market Discipline). Bank BTN has also developed a roadmap to the implementation of Basel II framework in line with the roadmap that has been made by Bank Indonesia. In addition, Bank BTN has also performed a gap analysis as the output of an action plan for risk management with Basel II framework.

As a follow up of the implementation of Pillar 1 of Basel II, Bank BTN has made preparations on credit risk measurement using the Standardized Approach and has computed minimum capital requirements by using the Basic Indicator Approach for operational risk in accordance with BI Circular Letter No. 11/3/DPNP dated 27 January 2009 regarding the calculation of Risk

perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SE BI No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

- **Stress Testing**

Guna melengkapi pengukuran risiko khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank BTN telah melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Selain melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas bank secara keseluruhan, Bank BTN juga melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas tertentu, khususnya aktivitas baru, yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko suku bunga. Saat ini, *stress test* yang dilakukan oleh bank difokuskan pada 3 (tiga) jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar (termasuk di dalamnya risiko suku bunga) dan risiko likuiditas.

- **Stress Testing pada Risiko Pasar**

Pada tahun 2010, *stress test* terhadap risiko pasar dilakukan dengan menggunakan skenario-skenario yang terkait dengan perubahan BI Rate dimana skenario-skenario tersebut dibentuk berdasarkan konsepsi: jika BI Rate mengalami peningkatan maka suku bunga (*rate*) pada sisi aset dan kewajiban dari neraca Bank BTN akan meningkat sejalan dengan peningkatan BI Rate tersebut. Dalam hal ini, skenario dibentuk berdasarkan peningkatan BI rate sebesar 25 basis *point* (0,25%), 50 basis *point* (0,50%), 75 basis *point* (0,75%) dan 100 basis *point* (1%). Dampak dari perubahan-perubahan suku bunga terhadap kinerja Bank BTN diukur dengan menggunakan 3 (tiga) ukuran, yaitu Laba (Rugi) Setelah Pajak, Total Aset, serta rasio-rasio keuangan (yang meliputi ROA, ROE, BOPO dan CAR).

- **Stress Testing pada Risiko Likuiditas**

Pada tahun 2010, mengingat risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang memberikan kontribusi terbesar terhadap eksposur risiko bank secara keseluruhan, maka *stress test*

Weighted Assets (ATMR) for Operational Risk by Using the Basic Indicator Approach (PID) and the Standardized Model for market risk in accordance with BI Circular Letter No. 9/33/DPNP dated 18 December 2007 regarding Guidelines for Use of Standard Methods in the Calculation of Capital Adequacy of Commercial Banks with Market Risk.

- **Stress Testing**

In order to complement measurement of risk, particularly market risk and liquidity risk, Bank BTN has performed stress tests on worst case scenario at least once a year. In addition to scenario analysis of overall banking activities, Bank BTN has also performed scenario analysis on a particular activity, in particular a new activity, that potentially increases exposure to interest rate risk. Currently, stress tests conducted by the bank are focused on 3 (three) types of risk, namely credit risk, market risk (including interest rate risk) and liquidity risk.

- **Stress Test to Market Risk**

In 2010, stress tests to market risk were conducted using scenarios associated with changes in BI Rate where the scenarios were created based on the concept: if BI Rate has increased, the interest rate on asset and liability sides of the bank's balance sheet will increase in line with Bank BTN increase of BI Rate. In this case, the scenario has been established by an increase in BI Rate of 25 basis points (0.25%), 50 basis points (0.50%), 75 basis points (0.75%) and 100 basis points (1%). The impact of interest rate changes on Bank BTN's performance is measured by using 3 (three) sizes, namely Profit (Loss) After Tax, Total Assets, and financial ratios (which include ROA, ROE, BOPO and CAR).

- **Stress Test on Liquidity Risk**

In 2010, given that liquidity risk is one of the risks that contributed most to the overall bank risk exposure, stress test on interest rate is associated with a risk event of liquidity risk,

terhadap risiko suku bunga dikaitkan dengan *risk event* dari risiko likuiditas, yaitu penarikan dana oleh para pemilik dana (*deposit run*). Dalam stress test ini, skenario-skenario dibangun berdasarkan konsepsi: Jika deposan inti menarik dananya dari bank dengan proporsi tertentu maka guna memenuhi berbagai kebutuhan likuiditasnya, Bank BTN akan mencari dana di pasar uang dengan suku bunga pinjaman (*rate*) yang relatif lebih tinggi daripada suku bunga deposito. Dalam hal ini, skenario-skenario yang digunakan dalam stress test dibangun sebagai kombinasi dari skenario-skenario penarikan dana oleh deposan inti dan skenario-skenario suku bunga pinjaman yang dikenakan terhadap Bank BTN. Dampak dari perubahan-perubahan suku bunga terhadap kinerja Bank BTN diukur dengan menggunakan 3 (tiga) ukuran, yaitu Laba (Rugi) Setelah Pajak, Total Aset, serta rasio-rasio keuangan (yang meliputi ROA, ROE, NIM, BOPO dan CAR).

• **Persiapan Implementasi Basel III**

Sejalan dengan perkembangan terkini kerangka kerja manajemen risiko yang telah disusun oleh *Basel Committee on Banking Supervision* dalam rangka memperkuat permodalan Bank BTN untuk memitigasi risiko *procyclicality* dan *systemic risk* serta menerapkan standar likuiditas global, Bank BTN juga telah mempersiapkan diri guna mengadopsi dan mengimplementasikan manajemen risiko dengan kerangka kerja Basel III. Persiapan yang telah dilakukan oleh Bank BTN, antara lain:

- ✓ Penunjukan dan penyampaian nama-nama anggota yang masuk ke dalam *working group* Basel III kepada Bank Indonesia untuk *sub-group* risiko pasar dan likuiditas, *sub-group* risiko operasional, *sub-group* risiko kredit dan *sub-group* Pilar 3.
- ✓ Mengikuti sosialisasi rencana persiapan implementasi Basel III *framework* di Bank Indonesia.

Untuk selanjutnya, Bank BTN akan terus melakukan rencana persiapan penerapan kerangka kerja Basel III di dalam *working group* masing-masing di bawah koordinasi Bank Indonesia.

namely withdrawal of funds by owners of funds (*deposit run*). In the stress test, scenarios are built based on the concept: if core depositors withdraw their funds from banks with a certain proportion to meet their liquidity needs, Bank BTN will seek funds in the money market with interest rates relatively higher than time deposit rates. In this case, the scenarios used in the stress test is constructed as a combination of funds withdrawal scenarios by core depositors and scenarios of loan interest rates charged to Bank BTN. The impact of interest rate changes on Bank BTN's performance is measured by using 3 (three) sizes, namely Profit (Loss) After Tax, Total Assets, and financial ratios (which include ROA, ROE, NIM, BOPO and CAR).

• **Implementation Preparation of Basel III**

In line with recent developments, the risk management framework that has been prepared by the *Basel Committee on Banking Supervision* in order to strengthen Bank BTN's capital to mitigate *procyclicality* risk and *systemic risk* and implement global standards, Bank BTN have also been preparing themselves to adopt and implement a risk management framework for Basel III. Preparation has been done by Bank BTN, among other things:

- ✓ Appointment and notification of the names of members included in the Basel III *working group* to Bank Indonesia for the market and liquidity risk *sub-group*, operational risk *sub-group*, credit risk *sub-group* and the Pillar 3 *sub-group*.
- ✓ Following the socialization plan for the implementation of the Basel III *framework* at Bank Indonesia.

Next, Bank BTN will continue to prepare a plan for the implementation of Basel III *framework* within each *working group* under the coordination of Bank Indonesia.

- **Pengembangan Key Risk Indicator**

Bank BTN telah melakukan *operational risk self assessment* melalui *check list* secara triwulanan untuk mengidentifikasi *operational key risk indicator* di Kantor Cabang. Hasil *self assessment* yang ditujukan untuk memetakan potensi risiko operasional dari unit-unit kerja Kantor Cabang tersebut. Di samping digunakan sebagai dasar pencatatan kerugian risiko operasional dalam *database* risiko operasional juga berguna untuk mengembangkan parameter risiko operasional pada laporan profil risiko dan persiapan untuk melakukan pengukuran risiko operasional dengan menggunakan model internal (*advanced measurement approach*). Dalam rangka membangun sistem informasi manajemen risiko operasional secara tepat waktu dan komprehensif, pada tahun 2010 Bank BTN telah menganggarkan untuk pengadaan solusi pengelolaan *Key Risk Indicator* (KRI) dengan bantuan vendor guna mengetahui pemicu risiko operasional (*operational risk driver*).

- **Pengembangan Risk Database**

Pembangunan database risiko yang saat ini tengah dilakukan *Risk Management Division* (RMD) terkait dengan kebijakan IT yang dibuat adalah sudah pada tahap penyampaian jenis data yang diperlukan oleh Bank BTN dalam rangka penyusunan profil risiko Bank BTN dan untuk keperluan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank BTN sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Terkait dengan pembangunan *database* risiko dimaksud, *Information and Communcation Technology Division* (ICTD) telah menyiapkan infrastrukturnya berupa *Enterprise Data Warehouse* (EDW). Hingga saat ini telah dilakukan pembahasan secara intensif antara ICTD dan RMD guna menselaraskan antara kebutuhan *database* oleh RMD dan kemungkinan ketersediaan data dimaksud dalam EDW. Sejalan dengan hal tersebut, RMD saat ini juga tengah menyusun kebijakan pembangunan *database* risiko dimaksud dan penyusunan kebijakan tersebut telah mencapai tahap finalisasi.

- **Key Risk Indicator Development**

Bank BTN has performed self assessment operational risks through quarterly check list to identify operational key risk indicators in branch offices. The result of self assessment will be used to map the potential operational risks of the branch's working units. Aside from the tool as the basis to record potential loss of operational risks in the operational risk database, the result of self assessment is also useful to float the operational risks parameters in the risk profile report and as preparation to measure operational risks by using an advanced measurement approach. In order to build operational risks management information system in a timely and comprehensif manner, in 2010, Bank BTN has budgeted for the procurement of solutions of Key Risk Indicator (KRI) management with the support from vendors aiming to capture operational risks drivers.

- **Risk Database Development**

The development of risk database which is currently conducted by Risk Management Division (RMD) in relation to IT policy has reached a submission stage of data types required by Bank BTN to arrange Bank BTN's risk profile and for the purpose of calculating Bank BTN's Capital Adequacy Ratio in line with provision stipulated by Bank Indonesia.

In relation to the development of risk database aforementioned, Information and Communication Technology Division (ICTD) has set up the infrastructure in the form of Enterprise Data Warehouse (EDW). Up to date, it has been carried out intensive discussions between ICTD and RMD in order to harmonize the database required by RMD and the possible availability of the data referred in the EDW. In line with this, currently RMD is also drafting policies of the abovementioned development of risk database and the preparation of such policies has reached the finalization stage.

Struktur organisasi Manajemen Risiko di Bank BTN adalah sebagai berikut:

Komite Pemantau Risiko

Sesuai dengan Peraturan Direksi no. 12/PD/RMD/2010 tanggal 12 Mei 2010 Perihal Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, sebagai tindak lanjut pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko, Bank BTN telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagai organ Komisaris yang berfungsi sekurang-kurangnya:

- Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya.
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Komite Manajemen Risiko

Bank BTN juga telah membentuk Komite Manajemen Risiko sebagai organ Direksi dalam melakukan pengawasan aktif pengelolaan risiko. Komite ini diketuai oleh Direktur *Risk, Compliance* dan *Human Capital* dan sekretaris Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko. Kewenangan komite ini, minimal:

- Menyusun kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency* plan apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
- Melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko.
- Melakukan pembenaran (*justification*) atas hal-hal yang berhubungan dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank BTN yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan. Justifikasi ini disampaikan kepada Direktur Utama berdasarkan analisis bisnis yang berhubungan dengan transaksi atau kegiatan usaha Bank BTN tertentu yang menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank BTN.

The organizational structure of Risk Management at Bank BTN is as follows:

Risk Monitoring Committee

In accordance with Directors Regulation No. 12/PD/RMD/2010 dated 12 May 2010 regarding Risk Management Policy Manual, as follow-up of active supervision of the Board of Commissioners on the application of risk management, Bank BTN has established a Risk Monitoring Committee as an organ of Commissioners to at least:

- Evaluating the appropriateness of risk management policy and its implementation.
- Monitoring and evaluating the performance of duties of Risk Management Committee and risk management unit.

Risk Management Committee

Bank BTN has also established a Risk Management Committee as an organ of Directors in conducting active supervision of risk management. The Committee is chaired by the Risk, Compliance and Human Capital Director and Secretary of the Head of Risk Management Unit. The authority of this committee at least includes:

- Developing risk management policies and amendments thereto including risk management strategies and contingency plans if external conditions that are not normal have happened.
- Performing correction or improvement to the implementation of risk management periodically or incidentally as a result of changes in external and internal conditions of the bank that affect capital adequacy, the bank's risk profile and evaluation results of the effectiveness of risk management implemented.
- Justifying matters relating to business decisions that deviate from normal procedures (*irregularities*), such as decisions that led to a significant excess of expansion compared with the bank's business plan previously set or making risk exposure that has exceeded a predetermined limit. Justification is submitted to the President Director based on business analysis relating to transactions or business activities of a certain Bank BTN that deviate from the procedure established by Bank BTN.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Berdasarkan Ketetapan Direksi Nomor 01/DIR/DPP/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, *Risk Management Division* (RMD), dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada *Risk, Compliance* dan *Human Capital Director*. Divisi Manajemen Risiko terdiri dari *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department* dan *Operational Risk Management Department*. *Market Risk Management Department* berfungsi untuk melakukan pengelolaan risiko pasar dan risiko likuiditas. Fungsi *Credit Risk Management Department* melakukan pengelolaan risiko kredit sedangkan *Operational Risk Management Department* berfungsi mengelola risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko reputasi dan risiko hukum. Setiap Departemen Head dibantu oleh *Unit Policy* dan *Procedure* dan *Unit Assessment* dan *Measurement*. Dalam menjalankan fungsi pemantauan risiko pada tingkat Divisi dan Kantor Cabang, Kepala Divisi Manajemen Risiko juga dibantu oleh *Division Risk Control Officer* (DRCO) dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO) di bawah koordinasi *Division/Branch Risk Management Coordinator* yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Divisi Manajemen Risiko. DRCO merupakan pejabat pada Divisi Manajemen Risiko yang ditempatkan di Kantor Pusat dengan membidangi beberapa divisi sebagai mitra Kepala Divisi dalam mengelola risiko. BRCO adalah pejabat pada Divisi Manajemen Risiko yang ditempatkan di Kantor Cabang sebagai mitra Kepala Cabang dalam mengelola risiko. Per akhir Desember 2010, jumlah *Division Risk Control Officer* (DRCO) yang ditempatkan di Kantor Pusat ada 3 orang yaitu DRCO Risiko Pasar, DRCO Risiko Kredit dan DRCO Risiko Operasional. Sementara itu, jumlah *Branch Risk Control Officer* (BRCO) yang ditempatkan ada 43 orang di 43 Kantor Cabang dari 65 (enam puluh lima) Kantor Cabang (per Desember 2010). Untuk Kantor Cabang-Kantor Cabang yang belum ditempatkan BRCO, pemantauan pengelolaan risiko dilakukan oleh BRCO dari Kantor Cabang terdekat.

Pengembangan SDM di Bidang Manajemen Risiko

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Bank BTN telah melaksanakan pendidikan dan

Risk Management Unit

Based on Directors Decree No. 01/DIR/DPP/2010 dated 18 January 2010 on Head Office's Organizational Structure of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, *Risk Management Division* (RMD) is led by a Division Head who reports directly to the *Risk, Compliance and Human Capital Director*. *Risk Management Division* consists of *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department* and *Operational Risk Management Department*. The *Market Risk Management Department's* function is to manage market risk and liquidity risk. The function of *Credit Risk Management Department* is to manage credit risk, while the *Operational Risk Management Department's* function is to manage operational risk, compliance risk, strategic risk, reputation risk and legal risk. Each Department Head is assisted by the *Policy and Procedure Unit* and the *Assessment and Measurement Unit*. In running risk monitoring function at Division and Branch Office levels, Head of *Risk Management Division* is also assisted by the *Division Risk Control Officers* (DRCO) and *Branch Risk Control Officers* (BRCO) under the coordination of *Risk Management Coordinator Division/Branch* who is directly responsible to Head of *Risk Management Division*. DRCO is an official of *Risk Management Division*, stationed at Head Office in charge of several divisions as partner of the Division Head in managing risk. A BRCO is an official of the *Risk Management Division* stationed at the Branch Office as a partner of the Branch Manager in managing risks. As of end December 2010, the number of *Division Risk Control Officers* (DRCO) stationed at Head Office totaled 3 (three) persons, namely *Market Risk DRCO*, *Credit Risk DRCO* and *Operational Risk DRCO*. Meanwhile, the number of *Branch Risk Control Officers* (BRCO) stationed totaled 43 (forty three) persons at 43 (forty three) Branch Offices out of 65 (sixty five) Branch Offices (as of December 2010). In the case of Branch Offices that do not yet have a BRCO, risk management monitoring is undertaken by the BRCO from the nearest Branch Office.

Human Resource Development in the Field of Risk Management

Bank BTN has, in the field of human resource development, conducted education and training

pelatihan bagi pejabat manajemen risiko yaitu *Branch Risk Control Officer* untuk meningkatkan fungsinya dalam memberikan *second opinion* dan *risk review* atas setiap risiko material yang melekat dalam setiap aktivitas/produk Bank BTN.

Untuk mengembangkan kompetensi pejabat dan karyawan Bank BTN di bidang manajemen risiko, Bank BTN telah melakukan *in-house training* dan mempersiapkan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko). Sejak tahun 2005 sampai dengan akhir Desember 2009, jumlah pejabat dan staf yang telah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko banyak 381 orang, dengan rincian level 1 sebanyak 208 orang, level 2 sebanyak 116 orang dan level 3 sebanyak 57 orang dan level 4 sebanyak 12 orang. Selain itu, terdapat 10 pejabat dan staf yang telah lulus mengikuti sertifikasi manajemen risiko level Matrikulasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dan *Banker Association of Risk Management* (BARA).

Profil Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, secara rutin per triwulan menyampaikan laporan profil risiko ke Bank Indonesia yang meliputi laporan pengelolaan risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategis. Laporan profil risiko tersebut mencakup parameter, indikator dan formula yang digunakan dalam menilai tingkat risiko dan sistem pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank BTN.

Profil risiko kantor cabang disusun oleh *Branch Risk and Control Officer* (BRCO) dan disampaikan secara triwulanan kepada Divisi Manajemen Risiko dan salinannya ditembuskan kepada Divisi Audit Internal sebagai bahan untuk melakukan *general audit* ke kantor cabang.

Secara umum risiko komposit yang dimiliki Bank BTN pada triwulan IV tahun 2010 berada pada level *low to moderate*, di mana terdapat kategori

for risk management officers, namely Branch Risk Control Officers to enhance their function in providing second opinion and risk review of any material risk inherent in each activity/product of the Bank.

To develop the competence of Bank BTN's officials and employees in risk management, Bank BTN has conducted in-house trainings and prepared pre-tests as an initial filter for officials and employees who wish to follow certification exams held by the Risk Management Certification Board (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko, BSMR). The number of officers and staff from 2005 until the end of December 2009 who have passed the certification exams of risk management reached 381 persons, with details of level 1 as much as 208 people, level 2 of 116 people, level 3 of 57 people and level 4 of 12 people. In addition, 10 officers and staff have passed the Matriculation level risk management certification exam held by the Banking Professional Certification Institute (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, (LSPP) and the Bankers Association of Risk Management (BARA).

Risk Profile

In accordance with Bank Indonesia Regulation No. 11/25/PBI/2009 dated 1 July 2009 on the Amendment of Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, Bank BTN's Risk Management Working Unit submits a risk profile report to Bank Indonesia on quarterly basis. The risk profile report includes among others credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. The risk profile report covers parameter, indicator and formulas used in rating the risk level and risk control system used by Bank BTN.

The risk profile of branch offices is prepared by Branch Risk and Control Officer (BRCO) and submitted quarterly to Risk Management Division, and the copy of the report is forwarded to Internal Audit Division as a basis for conducting general audit to branch offices.

In general, the composite risks borne by Bank BTN in the fourth quarter of 2010 were at low to moderate level, whereby the compositions were moderate for

risiko *moderate* untuk jenis risiko kredit, *low* untuk jenis risiko lainnya. Hal tersebut didukung oleh *Risk Control System* (RCS) yang memadai (*acceptable*) untuk ke tujuh jenis risiko dan RCS yang kuat (*strong*) untuk risiko strategis. RCS dimaksud meliputi pengawasan aktif Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan limit, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko serta efektifitas pengendalian internal.

credit risk and low for other risks. The risks rating was support by an acceptable Risk Control System (RCS) for the seven types of risks and a strong RCS for strategic risk. The above mentioned RCS shall comprise of active supervision of Board of Commissioners and Board of Directors, adequate policies, procedures and limit, measurement, monitoring and risk management information system, as well as internal controls effectiveness.

**Profil Risiko
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Posisi 31 Desember 2010**

Risk Profil
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
As of 31 December 2010

NO	RISIKO RISKS	INHERENT RISK (IR)			RISK CONTROL SYSTEM (RCS)			RISIKO KOMPOSIT COMPOSITE RISKS
		SKOR IR IR SCORE	BOBOT WEIGHT	SKOR IR IR SCORE	SKOR RCS RCS SCORE	BOBOT WEIGHT	SKOR RCS RCS SCORE	
		PREDIKAT IR IR PREDICATE		TERBOBOT WEIGHTED	PREDIKAT RCS RCS PREDICATE		TERBOBOT WEIGHTED	
1	KREDIT CREDIT	65,28	12,50%	8,16	65,77	12,50%	8,22	MODERATE
		MODERATE			ACCEPTABLE			
2	PASAR MARKET	91,80	12,50%	11,48	64,80	12,50%	8,10	LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			
3	LIKUIDITAS LIQUIDITY	68,80	12,50%	8,60	66,66	12,50%	8,33	LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			
4	OPERASIONAL OPERATIONAL	84,20	12,50%	10,53	63,86	12,50%	7,98	LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			
5	HUKUM LEGAL	99,60	12,50%	12,45	65,94	12,50%	8,24	LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			
6	REPUTASI REPUTATION	70,00	12,50%	8,75	65,47	12,50%	8,18	LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			
7	STRATEGIS STRATEGIC	87,25	12,50%	10,91	67,12	12,50%	8,39	LOW
		LOW			STRONG			
8	KEPATUHAN COMPLIANCE	94,29	12,50%	11,79	65,77	12,50%	8,22	LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			
	AGREGAT AGGREGATE	82,65	100%		65,67	100%		LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			

Rencana Pengembangan Manajemen Risiko

Di samping pengembangan *dashboard* Key Risk Indicator (KRI) dengan bantuan solusi KRI, bank akan terus melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophy*. *Stress testing* tersebut akan difokuskan pada risiko kredit, pasar, dan likuiditas. Selain itu, untuk mengembangkan sistem manajemen risiko, Bank BTN akan mengembangkan sistem manajemen informasi risiko dan melakukan kaji ulang terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) untuk meningkatkan salah satu fungsi *risk control system*. Bank BTN juga akan terus melakukan persiapan implementasi Basel III *framework* sejalan dengan *road map* yang telah disusun oleh Bank Indonesia.

Perlindungan Nasabah

Pusat pengaduan nasabah pada saat ini dapat ditangani oleh Contact Center di Kantor Pusat dan Customer Service serta Loan Service Unit di masing-masing Kantor Cabang (KC)/Kantor Cabang Syariah (KCS). Register pengaduan nasabah di masing-masing KC/KCS akan didokumentasikan dalam bentuk laporan Triwulanan dan dikirimkan ke Kantor Pusat c.c. *Customer Claim Unit Consumer Funding* dan *Services Division* untuk kemudian dilaporkan ke Bank Indonesia secara berkala.

Penanganan komplain nasabah dikelola oleh *Customer Service* masing-masing KC/KCS dan *Contact Center*, kemudian apabila diperlukan, pengaduan tersebut dieskalasi ke unit-unit terkait termasuk unit di Kantor Pusat sesuai dengan permasalahan.

Penjelasan rinci mengenai aktivitas seputar peningkatan layanan kepada konsumen atau nasabah bisa dilihat pada buku Laporan Keberlanjutan 2010 yang disajikan bersamaan dengan Laporan Tahunan ini.

Program Pengembangan Masyarakat dan Lingkungan

Sepanjang tahun 2010, Bank BTN telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam program pengembangan masyarakat, baik melalui aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun Bina

Risk Management Development Plan

Besides development of Key Risk Indicators (KRI), Bank BTN will with the help of a KRI solution, continue to conduct stress tests at regular intervals to assess capital adequacy in the event of any incident of an extreme or catastrophe nature. The stress tests will be focused on credit risk, market risk and liquidity risk. In addition, to develop a risk management system, the Bank will develop risk information management systems and conduct a review of Risk BTN Management Policy Guideline (PKMR) to enhance one of the functions of the risk control system. Bank BTN will also continue to prepare the implementation of Basel III framework in line with the roadmap prepared by Bank Indonesia.

Customer Protection

At this time, the center for customer complaints can be handled by the Contact Center at Head Office and Customer Service and Loan Service Unit at each Branch Office/Sharia Branch Office. The customer complaints register in each Branch Office/Sharia Branch Office will be documented in the form of quarterly reports and submitted to Head Office c.c. *Customer Claim Unit Consumer Funding* and *Services Division* to then be reported to Bank Indonesia periodically.

Customer complaints handling is managed by Customer Service of each respective Branch Office/Sharia Branch Office and Contact Center, then if necessary, the complaints are escalated to the relevant units, including units at Head Office in accordance with the problems.

Detailed explanation about the activities around improving services to customers or clients can be seen in the book on 2010 Sustainability Report which is presented in conjunction with this Annual Report.

Community Development Program and Environment

During 2010, Bank BTN has undertaken various activities in community development programs, both through the activities of Corporate Social Responsibility (CSR) and Environmental

Lingkungan. Biaya yang telah dikeluarkan dalam melaksanakan aktivitas tersebut sebagai komitmen Bank BTN untuk melaksanakan pengembangan masyarakat sebagai berikut:

Development. The costs incurred in carrying out such activities represent Bank BTN's commitment to carry out community development as follows:

No	Bidang Field	Jumlah Bantuan (Rp) Total Aid (Rp)
1.	Bantuan korban bencana alam Aid to victims of natural disasters	634.500.000,-
2.	Bantuan pendidikan dan pelatihan Education and training assistance	2.070.115.300,-
3.	Bantuan peningkatan kesehatan Health improvement aid	890.585.556,-
4.	Bantuan pengembangan prasarana dan sarana umum Aid for development of infrastructure and public facilities	1.418.541.000,-
5.	Bantuan sarana ibadah Aid to places of worship	1.022.369.000,-
6.	Bantuan pelestarian alam Conservation aid	176.148.000,-
	Bantuan melalui BUMN Peduli BUMN Peduli aid	1.400.000.000,-
	Lain-lain Others	1.950.867,-
	Total bantuan Total aid	7.614.209.723,-

Penjelasan rinci mengenai aktivitas seputar program pengembangan masyarakat bisa dilihat pada buku Laporan Keberlanjutan 2010 yang disajikan bersamaan dengan Laporan Tahunan ini.

Detailed explanation about the activities surrounding the community development programs and the environment can be seen in the 2010 Sustainability Report which is presented in conjunction with this Annual Report.

Daftar Siaran Pers Bank BTN Tahun 2010

No.	Siaran Pers	Tanggal
1.	IPO Bank BTN Raih Award dari Majalah The Asset	18 Januari 2010
2.	Kerjasama Bank BTN dengan PT Pos Indonesia Untuk Tingkatkan Efisiensi Proses	27 Januari 2010
3.	HUT Bank BTN Ke-60 Bersama Pelaku Bisnis Perumahan Menanam Pohon	07 Februari 2010
4.	60 tahun Bank BTN: Optimisme Tumbuh dengan Kinerja yang Baik	09 Februari 2010
5.	Bank BTN akan Terbitkan Obligasi ke-14	17 Februari 2010
6.	Bank BTN Turunkan Suku Bunga Kredit	19 Februari 2010
7.	Pertumbuhan Aset Mencapai 30% Membawa Bank BTN Masuk 10 Bank Terbesar di Indonesia	08 Maret 2010
8.	Bank BTN Turunkan Lagi Suku Bunga Kredit	18 Maret 2010
9.	Bank BTN Undi Tabungan Batara Milyaran Rupiah	28 Maret 2010
10.	Laba Bank BTN Tumbuh 72%	09 April 2010
11.	Bank BTN Dukung Gerakan Menanam Pohon di Solo	11 April 2010
12.	Bank BTN Undi Tabungan Batara Milyaran Rupiah	11 April 2010
13.	Bank BTN Terbitkan Kartu Elektronik PNS	14 April 2010
14.	Bank BTN Undi Grandprize Rumah Lebih Dari 1 Milyar	24 April 2010
15.	Untuk Mendukung Bisnis Perumahan Bank BTN Terbitkan Obligasi	29 April 2010
16.	Lompatan Bisnis Bank BTN Pasca RUPST Organisasi Baru yang Berorientasi pada Konsumer	19 Mei 2010
17.	Savings Banks See Promising Opportunities In Financial Inclusion: Institutions gather in Bali at the invitation of Bank BTN	20 Mei 2010
18.	Bank BTN Mendapat Penghargaan Best Bank 2010	03 Juni 2010
19.	Relokasi Kantor Untuk Meningkatkan Kinerja	07 Juni 2010

Akses informasi dan data perusahaan

Bank BTN senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi mengenai informasi finansial dan perusahaan, publikasi (*press release*), produk dan aksi korporasi melalui *website* www.btn.co.id.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi Call Center (021) 265 33555 atau email webadmin@btn.co.id. Bagi investor dapat langsung menghubungi *Corporate Secretary/Investor Relations* Bank BTN dengan mengirim email ke investor_relations@btn.co.id atau telepon ke (62-21) 638 70142.

Bank BTN juga senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui surat kepada Bapepam-LK dan Electronic Reporting kepada Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Berikut daftar siaran pers, penyampaian pelaporan dan korespondensi dengan Bapepam - LK dan BEI sepanjang 2010.

Access to information and corporate data

Bank BTN continues to make it easy for its *stakeholders* to access financial and corporate information, publications (*press release*), products and corporate actions through the *website* www.btn.co.id.

For more information, customers can contact the Call Center (021) 265 33555 or email webadmin@btn.co.id. For investors to directly contact the *Corporate Secretary/Investor Relations* of Bank BTN by sending an email to investor_relations@btn.co.id or call (62-21) 638 70142.

Bank BTN also continues to report information and material facts through letters to Bapepam-LK and Electronic Reporting to the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id).

Here is a list of *press releases*, submission of reports and correspondence with Bapepam - LK and IDX throughout 2010.

Press Release List of Bank BTN in 2010

No.	Press Release	Date
1.	IPO Bank BTN Wins Award from The Asset Magazine	18 January 2010
2.	Bank BTN Cooperation with PT Pos Indonesia to Increase Process Efficiency	27 January 2010
3.	Anniversary of the Bank's 60th Joint Housing Business Performers Tree Planting	07 February 2010
4.	60 years of Bank BTN: Optimism Grows with Good Performance	09 February 2010
5.	Bank BTN will Issue 14th Bonds	17 February 2010
6.	Bank BTN Lower Lending Rates	19 February 2010
7.	Asset Growth Reached 30% Takes Bank BTN to Top 10 Banks in Indonesia	08 March 2010
8.	Bank BTN Lending Rates Lower Again	18 March 2010
9.	Bank BTN Batara Savings Raffles Billions of Rupiah	28 March 2010
10.	Bank BTN Profit Grows 72%	09 April 2010
11.	Bank BTN Supports Tree Planting Movement in Solo	11 April 2010
12.	Bank BTN Batara Savings Raffles Billions of Rupiah	11 April 2010
13.	Bank BTN Issues Civil Servants Electronic Card	14 April 2010
14.	Bank BTN Raffles Grandprize Houses More Than 1 Billion	24 April 2010
15.	Bank BTN Issues Bonds To Support Housing Business	29 April 2010
16.	Bank BTN Business Leap Post AGM of New Organization Oriented to Consumers	19 May 2010
17.	Savings Banks See Promising Opportunities In Financial Inclusion: Institutions gather in Bali at the invitation of Bank BTN	20 May 2010
18.	Bank BTN Receives Award as Best Bank in 2010	03 June 2010
19.	Office Relocation To Improve Performance	07 June 2010

No.	Siaran Pers	Tanggal
20.	Guna Mendukung Pembiayaan Perumahan BTN – SMF Kembangkan Transaksi Repo	23 Juni 2010
21.	Undian Tabungan eBatara Pos Bank BTN Menyiapkan Total Hadiah Rp. 13.000.000.000,-	13 Juli 2010
22.	Laba Tumbuh Hampir 100% Kinerja Bank BTN Semester I 2010 Meningkat Dibanding Periode yang Sama Tahun 2009	16 Juli 2010
23.	Bank BTN Lakukan Aliansi Strategis Dengan HDFC India	22 Juli 2010
24.	Bank BTN Buka Operasional Regional Office	02 Agustus 2010
25.	Bank BTN Kerjasama Dengan PNM Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembangan UMKM	09 Agustus 2010
26.	Bank BTN Kerjasama Dengan BMT Ventura Fasilitas Kredit Modal Kerja Untuk Pengembangan UMKM	13 Agustus 2010
27.	Bank BTN Luncurkan Debit Visa Serba Bisa	31 Agustus 2010
28.	Bank BTN Fasilitas Mudik 1.000 Pekerja Informal	05 September 2010
29.	KPR Sudah Mulai Difasilitasi dengan FLPP: FLPP akan Meningkatkan Kapasitas Kredit Bank BTN	01 Oktober 2010
30.	Laba Tumbuh 84%; Kredit Tumbuh 29% Kinerja Bank BTN Triwulan III 2010 Secara Umum Meningkat	25 Oktober 2010
31.	BTN Lakukan Kerjasama dengan Dongbu Saving Bank Korea	01 November 2010
32.	BTN Umumkan Kinerja Tahunan Masih Menguasai 25,6% Pasar KPR di Indonesia	02 November 2010
33.	Kartu Kredit Bank BTN Hasil Sinergi antara BTN dan Mandiri Dalam Pengembangan Produk	08 Desember 2010
34.	Bank BTN Mencatatkan Akad Kredit KPR & KPA pada MURI	10 Desember 2010
35.	Layanan KPR dan KPA Bank BTN Peroleh ISO 9001:2008	14 Desember 2010
36.	BTN Kerjasama dengan SMF tentang Refinancing KPR iB	16 Desember 2010
37.	3 Produk Baru Tabungan BTN Mendekatkan Bisnis dengan Kebutuhan Keluarga	18 Desember 2010
38.	Bank BTN Luncurkan Kartu Kredit Produk Baru yang Diharapkan Dapat Melengkapi Kebutuhan Nasabah	20 Desember 2010
39.	BTN Buka Layanan Priority Banking: Diharapkan Dapat Memberikan Pelayanan Lebih Kepada Nasabah	28 Desember 2010
40.	KIK EBA BTN Mendapat Peringkat idAAA	29 Desember 2010

Transparansi Penyampaian Laporan Transparency Report Submission

No	Jenis Laporan Type of Report	Penerbitan Publication	
		Media Media	Tanggal Date
1.	Laporan Tahunan 2009 2009 Annual Report	Website, Bapepam-LK, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, YLKI, Lembaga Pemeringkat, Asosiasi Perbankan, IBI, Lembaga Penelitian Ekonomi & Keuangan, Majalah Ekonomi & Keuangan Website, Bapepam-LK, Ministry of State-Owned Enterprises, Bank Indonesia, YLKI, Rating Agency, Banking Association, IBI, Research Institute of Economics & Finance, Economics & Finance Magazine	30 April 2010 30 April 2010
2.	Laporan Keuangan Publikasi <ul style="list-style-type: none"> Tahunan per 31 Desember Triwulan per 31 Maret Tengah Tahun per 30 Juni Triwulan per 30 September Published Financial Statements <ul style="list-style-type: none"> Annually as of 31 December Quarterly as of 31 March Semi-annually as of 30 June Quarterly as of 30 September 	Website & Surat Kabar Website & Newspaper	09 Maret 2010 12 April 2010 16 Juli 2010 16 Oktober 2010 09 March 2010 12 April 2010 16 July 2010 16 October 2010

No.	Press Release	Date
20.	In Order To Support Housing Financing BTN – SMF Develop Repo Transactions	23 June 2010
21.	eBatara Pos Savings Lottery - Bank BTN Prepare Total Prizes of Rp 13,000,000,000,-	13 July 2010
22.	Profit Grows Nearly 100% - Bank BTN Semester I 2010 Performance Increase Compared With Same Period In 2009	16 July 2010
23.	Bank BTN Makes Strategic Alliance With HDFC India	22 July 2010
24.	Bank BTN Opens Regional Operations Office	02 August 2010
25.	Bank BTN Cooperation With PNM Working Capital Loan Facility For MSME Development	09 August 2010
26.	Bank BTN Cooperation With BMT Ventura Working Capital Loan Facility For MSME Development	13 August 2010
27.	Bank BTN Launches Multifunction Debit Visa	31 August 2010
28.	Bank BTN Facilitates Mudik 1,000 Informal Workers	05 September 2010
29.	KPR Already Start Facilitated with FLPP: FLPP will Increase Credit Capacity of Bank BTN	01 October 2010
30.	Earnings Growth of 84%, Loan Growth of 29% - Bank BTN Third Quarter Performance Increase In General	25 Oktober 2010
31.	BTN Makes Cooperation with Dongbu Saving Bank Korea	01 November 2010
32.	BTN Announces Annual Performance - Still Mastering 25.6% Mortgage Market in Indonesia	02 November 2010
33.	Bank BTN Credit Card Synergy Result Between BTN and Bank Mandiri In Product Development	08 Desember 2010
34.	Bank BTN Listed KPR & KPA Credit Agreement with MURI	10 Desember 2010
35.	KPR & KPA Service of Bank BTN Obtain ISO 9001:2008	14 Desember 2010
36.	BTN Cooperation with SMF on KPR iB Refinancing	16 Desember 2010
37.	BTN 3 New Savings Products Bring Closer Business and Family Needs	18 Desember 2010
38.	Bank BTN Launches New Priduct Credit Card Expected To Complete Customer Needs	20 Desember 2010
39.	BTN Opens Priority Banking Services: Expected To Provide More Services To Customers	28 Desember 2010
40.	KIK EBA BTN Gets idAAA Rating	29 Desember 2010

No	Jenis Laporan Type of Report	Penerbitan Publication	
		Media Media	Tanggal Date
3.	Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2009 2009 GCG Implementation Report	Website, Bapepam-LK, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, YLKI, Lembaga Pemeringkat, Asosiasi Perbankan, IBI, Lembaga Penelitian Ekonomi & Keuangan, Majalah Ekonomi & Keuangan Website, Bapepam-LK, Ministry of State-Owned Enterprises, Bank Indonesia, YLKI, Rating Agency, Banking Association, IBI, Research Institute of Economics & Finance, Economics & Finance Magazine Website, Bapepam-LK, Ministry of State-Owned Enterprises, Bank Indonesia, YLKI, Rating Agency, Banking Association, IBI, Research Institute of Economics & Finance, Economics & Finance Magazine	31 Mei 2010 31 May 2010

Laporan kepada Bapepam-LK

1. Surat No. 652/S/CSD/IR/XII/2010, tanggal 28 Desember 2010 perihal Keterbukaan Informasi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
2. Surat No. 660/S/CSD/IR/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010, perihal Keterbukaan Informasi *Listing* Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.
3. Surat No. 637/S/CSD/IR/XII/2010, tanggal 9 Desember 2010, perihal Kerjasama antara Bank BTN dengan Bank Mandiri mengenai Penerbitan Kartu Kredit Merek Bersama (Co-Branding).
4. Surat No. 422/S/DIR/CSD/VIII/2010, tanggal 25 Agustus 2010, perihal Penyampaian Akta Notaris Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Surat Pernyataan.
5. Surat No. 545/S/CSD/IR/X/2010, tanggal 5 Oktober 2010, perihal Keterbukaan Informasi dimulainya Fasilitas Pemberian KPR dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
6. Surat No. 521/S/CSD/IR/IX/2010, tanggal 1 September 2010, perihal Peluncuran Produk Kartu Debit VISA Bank BTN.
7. Surat No. 587/S/CSD/IR/X/2010, tanggal 28 Oktober 2010, perihal Laporan Keuangan Bank BTN per 30 September 2010.
8. Surat No. 409/S/DIR/CSD/VIII/2010, tanggal 19 Agustus 2010, perihal Laporan Transaksi Afiliasi dalam rangka Kenaikan Manfaat Pensiun Bank BTN.
9. Surat No. 512/S/CSD/IR/VIII/2010, tanggal 26 Agustus 2010, perihal Komite Audit Bank BTN.
10. Surat No. 426/S/CSD/IR/VI/2010, tanggal 24 Juni 2010, perihal Keterbukaan Informasi dalam rangka Penandatanganan Perjanjian antara Bank BTN dengan SMF.
11. Surat No. 482/S/CSD/IR/VIII/2010, tanggal 10 Agustus 2010, perihal Pengangkatan anggota Komite Audit Bank BTN.
12. Surat No. 389/S/CSD/IR/VI/2010, tanggal 3 Juni 2010, perihal Penyampaian Bukti Iklan Penggantian Corporate Secretary.

Reports to Bapepam-LK

1. Letter No. 652/S/CSD/IR/XII/2010, dated 28 December 2010 concerning Information Disclosure of Assets Backed Securities-Collective Investment Contract.
2. Letter No. 660/S/CSD/IR/XII/2010, dated 30 December 2010, concerning Listing Information Disclosure of Assets Backed Securities-Collective Investment Contract.
3. Letter No. 637/S/CSD/IR/XII/2010, dated 9 December 2010, concerning Cooperation between Bank BTN and Bank Mandiri on the Issuance of Co-Branding Credit Card.
4. Letter No. 422/S/DIR/CSD/VIII/2010, dated 25 August 2010, concerning Delivery of Notarial Deed on Change of Composition of the Board of Commissioners and Statement.
5. Letter No. 545/S/CSD/IR/X/2010, dated 5 October 2010, concerning Information Disclosure of the Commencement of Housing Loan Facility with Home Financing Liquidity Facility (FLPP).
6. Letter No. 521/S/CSD/IR/IX/2010, dated 1 September 2010, Concerning Bank BTN Visa Debit Card Product Launch.
7. Letter No. 587/S/CSD/IR/X/2010, dated 28 October 2010, concerning Bank BTN Financial Statements as of 30 September 2010.
8. Letter No. 409/S/DIR/CSD/VIII/2010, dated 19 August 2010, concerning Affiliated Transactions Report in order to Increase Bank BTN Pension Benefit.
9. Letter No. 512/S/CSD/IR/VIII/2010, dated 26 August 2010, concerning Audit Committee of Bank BTN.
10. Letter No. 426/S/CSD/IR/VI/2010, dated 24 June 2010, concerning Information Disclosure in the context of Signing Agreements between Bank BTN with SMF.
11. Letter No. 482/S/CSD/IR/VIII/2010, dated 10 August 2010, concerning Appointment of Audit Committee members of Bank BTN.
12. Letter No. 389/S/CSD/IR/VI/2010, dated 03 June 2010, concerning Submission of Advertisement Evidence about Replacement of Corporate Secretary.

13. Surat No. 466/S/CSD/IR/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010, perihal Laporan Keuangan Tengah Tahunan Bank BTN per 30 Juni 2010.
14. Surat No. 449/S/CSD/IR/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010, perihal Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi XIV.
15. Surat No. 470/S/CSD/IR/VII/2010, tanggal 23 Juli 2010, perihal Pengangkatan Dewan Komisaris Bank BTN.
16. Surat No. 250/S/CSD/V/2010, tanggal 19 Mei 2010, perihal Penyampaian Hasil RUPS Tahunan.
17. Surat No. 379/S/CSD/IR/VI/2010, tanggal 1 Juni 2010, perihal Penggantian Corporate Secretary Bank BTN.
18. Surat No. 143/S/DIR/CSD/IV/2010, tanggal 8 April 2010, perihal Penyampaian Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
19. Surat No. 232/S/CSD/IR/IV/2010, tanggal 13 April 2010, perihal Laporan Keuangan Unaudited per 31 Maret 2010.
20. Surat No. 259/S/CSD/IR/IV/2010, tanggal 21 April 2010, perihal Penyampaian Bukti Iklan RUPS Tahunan.
21. Surat No. 306/S/CSD/IR/IV/2010, tanggal 4 Mei 2010, perihal Penyampaian Bukti Iklan Panggilan dan Agenda RUPS Tahunan.
22. Surat No. 183/S/CSD/DIR/III/2010, tanggal 17 Maret 2010, perihal Penyampaian Laporan Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.
13. Letter No. 466/S/CSD/IR/VII/2010, dated 19 July 2010, concerning Semi Annual Financial Statements as of 30 June 2010 of Bank BTN.
14. Letter No. 449/S/CSD/IR/VII/2010, dated 9 July 2010, concerning Submission of Realization Report on Proceeds of Bond XIV Issue.
15. Letter No. 470/S/CSD/IR/VII/2010, dated 23 July 2010, concerning Appointment of Board of Commissioners of Bank BTN.
16. Letter No. 250/S/CSD/V/2010, dated 19 May 2010, concerning Submission of Annual General Meeting of Shareholders Results.
17. Letter No. 379/S/CSD/IR/VI/2010, dated 01 June 2010, concerning Replacement of Corporate Secretary of Bank BTN.
18. Letter No. 143/S/DIR/CSD/IV/2010, dated 8 April 2010, concerning Submission of Annual General Meeting of Shareholders Agenda.
19. Letter No. 232/S/CSD/IR/IV/2010, dated 13 April 2010, concerning Unaudited Financial Statements as of 31 March 2010.
20. Letter No. 259/S/CSD/IR/IV/2010, dated 21 April 2010, concerning of Advertisement Evidence about the Annual General Meeting of Shareholders.
21. Letter No. 306/S/CSD/IR/IV/2010, dated 4 May 2010, concerning Submission of Advertisement Evidence about Invitations and Agenda dor Annual General Meeting of Shareholders.
22. Letter No. 183/S/CSD/DIR/III/2010, dated 17 March 2010, concerning Submission of Information Disclosure on Certain Shareholders.

Self Assessment BI

- 1) Implementasi GCG membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan Bank BTN. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.
- 2) Sesuai dengan PBI No.8/4/PBI/2006 yang mengharuskan Bank melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self assessment*)

Self Assessment BI

- 1) GCG implementation requires an assessment to see how far the development of the principles of GCG has been implemented by Bank BTN. The assessment is also useful for ensuring improved quality of GCG implementation on an ongoing basis into the business process.
- 2) In accordance with PBI No.8/4/PBI/2006 which requires the Bank to conduct an internal self assessment of the implementation of GCG, the Bank has assessed.

KESIMPULAN UMUM HASIL					
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE					
NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,1	1	0,10	Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan BI
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,2	1	0,20	Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi ketentuan BI
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,1	1,5	0,15	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memenuhi prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan BI
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0,1	1	0,10	Bank telah dapat mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank melalui kebijakan internal Bank
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0,05	1,5	0,075	Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0,05	1	0,05	Organisasi dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah berjalan dengan baik dan efektif atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,05	1	0,05	Pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi prinsip-prinsip GCG sebagaimana ketentuan BI
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	0,075	1,5	0,113	Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Bank telah berjalan efektif dalam melakukan identifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (related party) dan Debitur Besar (large exposures)	0,075	1,5	0,113	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, tidak pernah ada pelanggaran BMPK, diversifikasi penyediaan dana merata, pengambilan keputusan dilakukan secara independen

terhadap pelaksanaan GCG, maka Bank telah melakukan penilaian GCG secara internal sejak tahun 2007 dengan menggunakan Metode *Self Assessment*.

- 3) Hal penting lainnya yang telah dilakukan Manajemen pada 2010 adalah penunjukan GCG *Champion* (Koordinator dan Assessor) GCG Bank BTN di setiap unit kerja Divisi Kantor Pusat.
- 4) Hasil *Self-Assessment* untuk periode Januari sampai Desember 2010 adalah sebagai berikut:

GCG internally since 2007 by using the *Self Assessment Method*.

- 3) Another important thing that has been conducted by Management in 2010 was the appointment of a GCG *Champion* (Coordinator and Assessor) of Bank BTN in each work unit of Head Office's Divisions.
- 4) *Self Assessment* results for the period January to December 2010 are as follows:

GENERAL ASSESSMENT RESULT

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

NO	ASSESSED FACTORS	WEIGHT	RANKING	SCORE	NOTES *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Implementation of the Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners	0,1	1	0,10	All implementation of BOC duties and responsibilities has already complied Central Bank's regulations
2	Implementation of the Roles and Responsibilities of the Directors	0,2	1	0,20	All implementation of BOD duties and responsibilities has already complied Central Bank's regulations
3	Completeness and implementation of committee's Roles	0,1	1,5	0,15	Implementation of Committee's duties and responsibilities has already complied GCG principles as well as Central Bank's regulations
4	Conflict of Interest Handling	0,1	1	0,10	Bank BTN through its internal policy has prevented or avoid the conflict of interest cases that could inflict losses on Bank BTN
5	Implementation of Compliance Function	0,05	1,5	0,075	The Compliance Function undertaken by Compliance Director and Compliance Unit has proceeded well based on their duties and authority in which such elements have maintained their independency property
6	Implementation of Internal Audit Function	0,05	1	0,05	The organization and function of Bank BTN' Internal Audit Unit has run well and effectively with regard all aspects and components in Bank BTN's activities
7	Implementation of External Audit function	0,05	1	0,05	The implementation to appoint public accountant and public accounting firm has met GCG principles as stated in Central Bank's regulations
8	Risk Management Function including Internal Control System	0,075	1,5	0,113	The function of Risk Management and Internal Control have run effectively indentifying and controlling all Bank BTN's risks
9	Credit Allocation to Related Party (s) and Key Debtors	0,075	1,5	0,113	Bank BTN has updated and completed written policy, system and procedure in place in the event fund provision to related party and large exposures; there were no breach against BPMK, even diversification of fund provision, and decisions were independently made

KESIMPULAN UMUM HASIL

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	0,15	1,5	0,23	Bank telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam penyediaan informasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan BI.
11	Rencana Strategis Bank	0,05	1	0,05	Rencana Bisnis Bank (business plan) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank, disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
Nilai Komposit		1		1,23	SANGAT BAIK

Nilai Komposit Composite Score	Predikat Komposit Composite Rank
Nilai komposit < 1,5 Composite Score < 1.5	Sangat Baik Very Good
1,5 ≤ Nilai komposit < 2,5 1.5 ≤ Composite Score < 2.5	Baik Good
2,5 ≤ Nilai komposit < 3,5 2.5 ≤ Composite Score < 3.5	Cukup Baik Fair
3,5 ≤ Nilai komposit < 4,5 3.5 ≤ Composite Score < 4.5	Kurang Baik Unfavourable
4,5 ≤ Nilai komposit < 5 4.5 ≤ Composite Score < 5	Tidak Baik Poor

Rencana Pengembangan GCG 2011 dan ke Depan

- 1) Bank BTN telah menetapkan program kerja periode 2011 dengan target sebagai berikut:
 - a) Berusaha mendapatkan nilai komposit "Sangat Baik" versi BI.
 - b) Berusaha mendapatkan predikat perusahaan "Sangat Baik" versi *Center for Good Corporate Governance* FEB UGM.
 - c) Terwujudnya kepercayaan investor dan/ atau *stakeholders* sehingga mampu menjaga kinerja saham Bank BTN.
 - d) Memiliki GCG Soft Structure dan GCG Infrastructure sesuai *best practices*/sesuai standar internasional.
 - e) GCG tersosialisasi dan terimplementasi dengan sangat baik
 - f) Meningkatkan citra Bank BTN, antara lain dengan cara berupaya untuk mendapatkan hasil optimal dalam event GCG Award 2011.

GCG Development Plan For 2011 and Beyond

- 1) Bank BTN has set a work program for the period of 2011 with targets as follows:
 - a) Striving to earn a "Very Good" BI version composite score.
 - b) Striving to earn a "Very Good" company title based on the version of FEB UGM Center for Good Corporate Governance.
 - c) Realization of investors and/or stakeholders confidence for having been able to maintain the stock performance of Bank BTN.
 - d) Have GCG Soft Structure and GCG Infrastructure in accordance with best practices of international standards.
 - e) GCG has been very well socialized and implemented
 - f) Improving the image of Bank BTN, among other things by trying to get optimal results in during the GCG Award 2011 event.

GENERAL ASSESSMENT RESULT

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

NO	ASSESSED FACTORS	WEIGHT	RANKING	SCORE	NOTES *)
		(a)	(b)	(a) x (b)	
10	Transparancy of Financial and Non Financial Conditions, GCG Implementation Reports and Internal Reporting	0,15	1,5	0,23	Bank BTN has fully met GCG principles in providing financial and non-financial informations based on Central Bank's regulations.
11	Company's Strategic Planning	0,05	1	0,05	Bank BTN's business plan confirms its vision and mission as well as its corporate plan formulated in every realistic manner and have taken consideration all external and internal factors, prudent principles and sound banking principles.
Composite Score		1		1,23	VERY GOOD

2) Untuk mencapai target tersebut maka akan dilakukan beberapa program sebagai berikut:

a) Melanjutkan program *awareness* secara berkesinambungan dengan melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya:

- Peningkatan kompetensi segenap pegawai dan jajaran Bank BTN tentang GCG melalui kegiatan *workshop*, training, seminar, konferensi, sosialisasi dan edukasi secara konsisten dan berkesinambungan.
- Melaksanakan program induksi GCG kepada pegawai baru.
- Senantiasa mengembangkan dan/atau menyempurnakan *Corporate Governance Management System* Bank BTN dengan dukungan teknologi informasi sebagai pusat informasi, sosialisasi, komunikasi dan edukasi GCG.
- Membangun dan mengembangkan GCG *e-learning* berbasis teknologi informasi.
- Membangun dan melaksanakan program *reward* dan *recognition* implementasi GCG untuk segenap jajaran dan seluruh unit kerja.

b) Melanjutkan proses institusional dan internalisasi dengan cara:

- Melakukan analisis dan/atau *review* dan/atau *update* terhadap *Soft Sturcture* GCG dan *infrastructure* GCG secara

2) To achieve these targets several programs to be conducted are as follows:

a) Conducting *awareness* programs continuously through various activities, among other things:

- Increasing competence of all employees of Bank BTN on GCG through workshops, training, seminars, conferences, socialization and education consistently and continuously.
- Implementing GCG induction programs for new employees.
- Continually developing and/or refining Bank BTN's Management System Corporate Governance with the support of information technology as a center of information, socialization, communication and education of GCG.
- Building and developing GCG *e-learning* based on information technology.
- Developing and implementing rewards and recognition program of GCG for all ranks and all work units.

b) Continuing institutional and internalized processes by way:

- Performing analysis and/or review and/or updating of GCG Soft Structure and GCG Infrastructure on an ongoing basis

berkesinambungan agar sesuai dengan *best practices* dan perkembangan bisnis yang terjadi.

- Melakukan analisis dan/atau senantiasa membangun/menyempurnakan penerapan GCG *Scoreboard* untuk seluruh unit kerja (Divisi/Desk/*Regional Office* dan Kantor Cabang) dengan menggunakan metode *Balanced Scorecard*.
 - Memonitor pemenuhan KPI GCG pada setiap unit kerja sehingga selaras dengan pencapaian KPI Bank BTN, visi dan misi Bank BTN.
 - Membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan etika bisnis.
 - Membangun dan mengembangkan *Whistleblowing System (WBS)*.
 - Membangun dan mengembangkan sistem *reward* dan *recognition* untuk pemilihan unit kerja terbaik dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- e) Monitoring terhadap pelaksanaan implementasi GCG secara berkelanjutan dan pengembangan GCG *Software*, dengan cara:
- Melakukan evaluasi dan *monitoring* implementasi GCG secara berkelanjutan melalui *tools* GCG *Scoreboard* di seluruh unit kerja.
 - Otomatisasi GCG *Scoreboard* menjadi GCG *software* yang terintegrasi dengan Corporate Governance Management System berbasis teknologi informasi.
 - Optimalisasi pelaksanaan koordinasi implementasi GCG melalui GCG Champion seluruh di seluruh unit kerja yang telah ditunjuk.
 - Optimalisasi pengembangan *Corporate Governance Management System*, diantaranya:
 - Pengembangan media komunikasi dan implementasi etika bisnis serta WBS.
 - Transparansi pengadaan barang dan jasa.
 - Otomasi komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Direksi dengan seluruh unit kerja.

to conform with best practices and current business development.

- Performing analysis and/or continuously build and refine the implementation of GCG *Scoreboard* for all work units (Division/Desk/*Regional Office* and Branch Office) using the *Balanced Scorecard Method*.
 - Monitoring compliance with GCG KPI on each work unit so in tune with the achievement of corporate KPI, vision and mission of Bank BTN.
 - Monitoring and developing business ethics management systems.
 - Building and developing *Whistleblowing System (WBS)*.
 - Building and developing a system of rewards and recognition for the selection of the best work unit in the implementation of GCG principles.
- e) Monitoring sustainable implementation of GCG and developing GCG *Software*:
- Evaluating and monitoring sustainable implementation of GCG through GCG *Scoreboard* tool throughout the work units.
 - Automation of GCG *Scoreboard* to become GCG software integrated with Corporate Governance Management System based on information technology.
 - Optimizing implemented coordination of GCG through GCG Champions in all designated work units.
 - Optimizing development of Corporate Governance Management System, including:
 - Development of communication media and implementation of business ethics and WBS.
 - Transparency in the procurement of goods and services.
 - Automation of communication between Board Of Commissioners with Board of Directors, and Directors with all work units.

- Transparansi program kerja GCG.
 - dan lain sebagainya sesuai perkembangan bisnis.
- d) Evaluasi dan GCG *assessment program* secara konsisten.
- Melaksanakan *self assessment* dengan menggunakan metode sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia secara konsisten.
 - Melaksanakan *self assessment* pada level unit kerja dengan menggunakan GCG Scoreboard unit kerja berdasarkan metode *Balanced Scorecard*.
 - Melaksanakan *third party assessment* dengan mengundang pihak independen untuk melakukan peratingan implementasi GCG Bank BTN.
 - Mengikuti GCG *Award* yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Majalah SWA.
 - Menindaklanjuti hasil-hasil GCG *assessment* di atas dalam rangka penyempurnaan implementasi GCG secara berkesinambungan.
- e) Melaksanakan program eksternalisasi secara konsisten setiap akhir tahun dengan melaksanakan advortorial implementasi GCG pada tahun berjalan.
- f) Program penyempurnaan berkelanjutan menggunakan metode Plan Do Check Action (PDCA).
- Transparency of GCG work program.
 - and so forth in accordance with business development.
- d) Evaluating GCG *assessment program* consistently
- Carrying out self assessment using the method as stipulated by Bank Indonesia consistently.
 - Implementing self assessment at the level of work units using the GCG Scoreboard for work units based on the Balanced Scorecard method.
 - Implementing third party assessment by inviting an independent party to perform rating of Bank BTN's GCG.
 - Participating in the GCG Award organized by the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine.
 - Following up GCG assessment results above in order to continuously improve implementation of GCG.
- e) Implement externalization program consistently each end of the year by carrying out GCG advortorial in the current year.
- f) Continuous improvement program using Plan Do Check Action (PDCA) method.



**PROSPEK USAHA,
KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN STRATEGI**
BUSINESS PROSPECTS, COMPETITIVE ADVANTAGES AND
STRATEGIES

**Fokus Pada Kekuatan dan
Strategi Untuk Meraih Peluang
Masa Depan**

Focus On Our Strengths and Strategies to Reap
Future Opportunities



PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECTS

Bank BTN yakin bahwa permintaan perumahan di Indonesia akan senantiasa meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk serta perbaikan perekonomian. Sesuai perkiraan dari Departemen Pekerjaan Umum (sebelumnya dikenal sebagai Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah), di Indonesia dalam 5 tahun terakhir permintaan atas rumah baru diperkirakan mencapai sebesar 800.000 unit, sementara persediaan rumah baru hanya mencapai sekitar 400.000 unit setiap tahunnya, yang sebagian besar dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

Tingginya kebutuhan akan perumahan juga tercermin dari data Kementerian Perumahan Rakyat yang menyatakan bahwa *backlog* kebutuhan rumah meningkat dari 5,8 juta unit pada tahun 2004 menjadi 7,4 juta unit di tahun 2009. Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) memperkirakan permintaan terhadap sektor perumahan tahun 2011 akan tumbuh 15% dari tahun sebelumnya. Di samping itu, menurut data Bank Indonesia, indeks harga perumahan meningkat dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sekitar 7,6% per tahun.

Melihat data tersebut di atas, Bank BTN percaya bahwa bisnis di bidang pembiayaan perumahan akan terus tumbuh. Keyakinan ini juga diperkuat dengan beberapa faktor penunjang antara lain:

- a. Stabilitas ekonomi makro dalam mendorong pertumbuhan perbankan dan pasar perumahan.
- b. Pertumbuhan jumlah penduduk, terutama keluarga muda, yang membutuhkan rumah.
- c. Mekanisme sekuritisasi KPR telah berjalan dengan respon pasar yang cukup baik
- d. Perkembangan pasar modal, memudahkan akses terhadap pendanaan, baik melalui obligasi atau instrumen lainnya.
- e. Aliansi strategis dengan Kantor Pos, Perguruan Tinggi, Lembaga Kesehatan, memberikan akses yang lebih dalam bisnis Bank BTN.
- f. Rencana pembangunan infrastruktur besar-besaran membuka peluang Bank BTN untuk mengembangkan pasar perumahan yang semakin luas.
- g. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan pengembang sebagai saluran distribusi eksternal untuk mengembangkan produk-produk Bank BTN serta dukungan kuat *stakeholders* utama Bank BTN seperti REI, APERSI dan Bapetarum.
- h. Dukungan kuat Pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat kepada Bank BTN untuk penyaluran KPR bersubsidi bagi masyarakat menengah bawah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
- i. Perubahan status hukum dan regulasi kepemilikan tanah.

Bank BTN believes that housing demand in Indonesia will continue to increase in line with population growth and economic improvement. According to the estimation of the Ministry of Public Works (formerly known as the Department of Regional Housing and Infrastructure), in Indonesia in the last 5 years, the demand for new houses is estimated to reach 800,000 units, while the supply of new houses reached only about 400,000 units annually, which is mostly built independently by the community.

The high demand of housing is also reflected from the data of Ministry of Public Housing which indicated that the backlog of housing demand increased from 5.8 million units in 2004 to 7.4 million units in 2009. The Indonesian Real Estate association (REI) predicted that the demand towards housing sector in 2011 will grow by 15% from the previous year. In addition, according to the data from Bank Indonesia, the housing price index increased by a compound annual growth rate of about 7.6% per year.

In view of the above mentioned data, Bank BTN believes that housing finance business will continue to grow. This confidence is also strengthened by several supporting factors, as follows:

- a. Macro economic stability in encouraging the growth of the banking and housing markets.
- b. Population growth, especially young families, who required housing.
- c. Mechanism of mortgage securitization has been running with a fairly good market response.
- d. The development of capital markets creating easy access to funding, either through bonds or other instruments.
- e. The strategic alliances with the Post Office, Universities, Institute of Health, provide greater access in the business of Bank BTN.
- f. Plan for massive infrastructure development creates opportunity for Bank BTN to develop an increasingly broad housing market.
- g. Well-established cooperation with the developer as an external distribution channel to develop products of Bank BTN, as well as strong support from primary stakeholders of Bank BTN such as REI, APERSI and Bapetarum.
- h. Strong support from the Government through the Ministry of Public Housing to the Bank for the distribution of subsidized mortgages for mid- to lower-income communities through the Liquidity Facility of Housing Finance.
- i. The changes of legal status and regulations on land ownership.

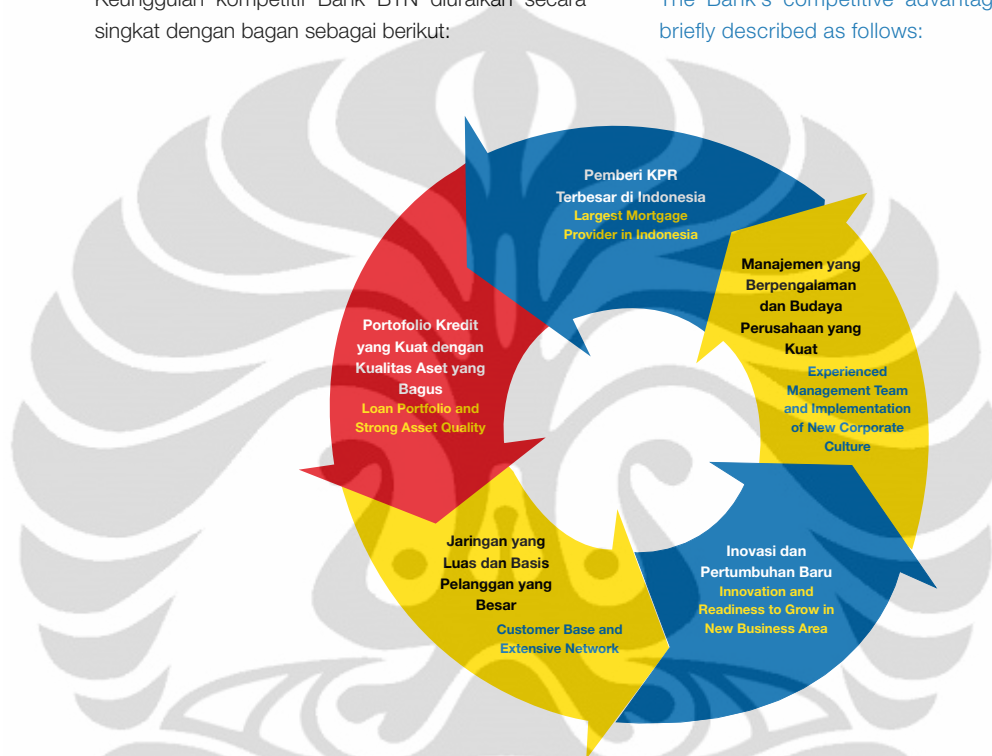
KEUNGGULAN KOMPETITIF BANK BTN COMPETITIVE ADVANTAGES OF BANK BTN

Hasil yang dicapai sepanjang 2010 mencerminkan kemampuan Bank BTN dalam memanfaatkan keunggulan-keunggulan kompetitif atas peluang-peluang yang ada.

The results achieved during 2010 reflected the ability of Bank BTN in using competitive advantages of the opportunities existed.

Keunggulan kompetitif Bank BTN diuraikan secara singkat dengan bagan sebagai berikut:

The Bank's competitive advantages with a chart briefly described as follows:



Pemberi kredit perumahan terbesar di Indonesia

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, Bank BTN adalah *market leader* pemberi kredit perumahan terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 26,72% dari jumlah KPR dan KPA yang beredar di Indonesia per 31 Desember 2010. Posisi Bank BTN sebagai pemimpin pasar dalam kredit perumahan telah terbentuk sejak tahun 1976, dimana Bank BTN ditunjuk sebagai lembaga penyalur kredit perumahan. Kredit perumahan Bank BTN terdiri atas KPR bersubsidi dan KPR non-subsidi. Dalam segmen kredit perumahan bersubsidi di Indonesia, Bank BTN memiliki pangsa pasar sebesar 97% dari jumlah KPR bersubsidi sampai dengan 31 Desember 2010.

Largest mortgage provider in Indonesia

Based on data published by Bank Indonesia, Bank BTN is the largest market leader of the housing loans provider in Indonesia with a market share of 26.72% of total outstanding mortgages in Indonesia as of 31 December 2010. The position of Bank BTN as a market leader in mortgage market has been established since 1976 whereby Bank BTN was appointed as a distribution institution of housing loans. Bank BTN's mortgage loans consist of non-subsidized and subsidized mortgages. In subsidized mortgages segment in Indonesia, Bank BTN has market share of 97% of subsidized mortgages issued until 31 December 2010.

Posisi Bank BTN sebagai pemimpin dalam pasar kredit perumahan telah membentuk citra perusahaan yang kuat, sehingga membantu Bank BTN dalam meraih pasar kelompok masyarakat dengan

The position of Bank BTN as a leader in the mortgage market has formed a strong corporate image, thus helping Bank BTN achieve the market of mid-to lower-income communities.

pendapatan menengah ke atas. Per tanggal 31 Desember 2010, *outstanding* kredit perumahan (termasuk pembiayaan syariah) mencapai jumlah Rp 46,8 triliun yang terdiri dari 46% KPR bersubsidi, 34% KPR non-subsidi serta kredit perumahan dan konstruksi sebesar 20%.

Basis nasabah dan jaringan yang luas

Bank BTN memiliki basis nasabah yang luas, dengan rekening kredit sekitar 1,2 juta serta sekitar 4,8 juta rekening simpanan per tanggal 31 Desember 2010. Basis nasabah Bank BTN (termasuk di antaranya kredit konsumen dan komersial) menjadi dasar yang kuat untuk memasarkan produk dan jasa Bank BTN dalam rangka meningkatkan bisnis kredit non-perumahan.

Bank BTN juga semakin memperluas jaringan operasinya, dengan menambah jumlah *outlet*nya, baik kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas. Jumlah *outlet* sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebanyak 416. Selain itu, Bank BTN juga telah memiliki 2.661 jaringan kantor di Kantor Pos seluruh Indonesia yang terhubung secara *online*. Pada *outlet* Bank BTN di Kantor Pos, nasabah dapat membuka rekening tabungan, melakukan pengecekan saldo, serta melakukan pembayaran cicilan. Kerjasama Bank BTN dengan PT Pos Indonesia (Persero) telah memperluas jaringan Bank BTN secara signifikan pada nasabah dan konsumen potensial.

Portofolio kredit serta kualitas aset yang kuat

Bank BTN menjaga rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan non-performing (NPL/F) pada tingkat yang relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio NPL bersih pada tingkat 2,66%, 2,75% dan 2,66% secara berturut-turut untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2008, 2009 dan 2010.

Bank BTN sangat memperhatikan kualitas manajemen risiko dan telah membentuk sistem organisasi dan sistem informasi terpusat yang ditujukan untuk memberikan informasi secepatnya atas risiko operasi, sehingga meningkatkan manajemen risiko Bank BTN dan sistem kontrol internal. Sebagai contoh, untuk mengelola risiko kredit dengan lebih efektif, Bank BTN telah mengimplementasikan beberapa inisiatif, termasuk

As of 31 December 2010, outstanding housing loans (including Sharia financing) reached Rp 46.8 trillion consisting of 46% of subsidized loans, 34% of non-subsidized loans and housing and construction loans of 20%.

Customer base and extensive network

Bank BTN has an extensive customer base, with approximately 1.2 million loan accounts and approximately 4.8 million deposits as of 31 December 2010. BTN Bank's customer base (including among others consumer and commercial loans) provides a solid foundation for marketing products and services of the Bank to enhance non-housing loans business.

Bank BTN has expanded further its operational network by adding its outlets, whether branch offices, sub-branch offices and cash offices. Total outlets as of 31 December 2010 are 416. Additionally, Bank BTN has owned 2,661 online office networks at Post Offices all over Indonesia. At the Bank outlets in the Post Office, customers can open a savings account, check balances, and pay mortgage installments. Bank BTN cooperation with PT Pos Indonesia (Persero) has significantly expanded the Bank's network for existing and potential customers.

Loan portfolio and strong asset quality

Bank BTN maintains the ratio of loans and financing/Sharia receivables classified as non-performing (NPL/F) at a relatively low level. This is indicated by the value of the net NPL ratio of 2.66%, 2.75% and 2.66% respectively for the year ended on 31 December 2008, 2009 and 2010.

Bank BTN pays high attention on the quality of risk management and has established a centralized organization and information systems aimed at providing immediate information on the operational risk, thus increasing Bank BTN risk management and internal control systems. For example, to manage credit risk more effectively, Bank BTN has implemented several initiatives, including changing the loan approval process, the internal credit rating

mengubah proses persetujuan kredit, sistem penilaian kredit internal, sistem pemeringkatan serta meninjau dan menguji model penilaian kredit. Bank BTN juga menerapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan Basel II yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

Inovasi dan kesiapan untuk tumbuh dalam area bisnis baru

Per Desember 2010, Bank BTN telah sukses menawarkan Efek Beragunan Aset (EBA) di Indonesia, yang mencapai jumlah Rp 750 miliar. Posisi utama Bank BTN di bidang kredit perumahan dan kualitas aset yang kuat telah memberikan kontribusi pada kesuksesan peluncuran EBA tersebut. Pengembangan pasar EBA dapat membantu mendiversifikasi sumber pendanaan Bank BTN, meningkatkan kapasitas pemberian kredit dan memaksimalkan neraca Bank BTN. Bank BTN juga mendirikan unit usaha Syariah pada tahun 2004 yang hingga sekarang telah bertumbuh dengan pesat. Bank BTN kini telah mengubah posisinya sebagai bank dengan produk dan jasa ritel yang bervariasi melalui usaha pengembangan dan diversifikasi produk.

Tim manajemen yang berpengalaman dan implementasi budaya perusahaan yang baru

Tim manajemen senior Bank BTN memiliki pengalaman yang luas dalam industri di Indonesia. Kemampuan dalam memberikan arah strategi dan membuat inisiatif bisnis dalam pasar yang kompetitif telah dibuktikan melalui posisi utama Bank BTN dalam sektor kredit perumahan di bidang perbankan di Indonesia. Manajemen senior Bank BTN memiliki pengalaman rata-rata lebih dari 20 tahun dalam industri perbankan. Tim manajemen senior Bank BTN telah mengeluarkan sejumlah inisiatif bagi Bank BTN, termasuk implementasi dari inisiatif tata kelola perusahaan yang menyeluruh serta penerapan rencana strategis Bank BTN berupa Visi 2012.

Bank BTN mengimplementasikan budaya kerja perusahaan yang baru pada akhir tahun 2008 yang memusatkan pada pelayanan nasabah serta peningkatan produktivitas karyawan. Ke depannya, Bank BTN akan menerapkan sistem penilaian kinerja karyawan yang menekankan pada nilai-nilai profesionalisme, integritas dan fokus terhadap nasabah.

system, rating system, as well as reviewing and testing of credit rating model. Bank BTN is also implementing regulations in relations to Basel II applied by Bank Indonesia.

Innovation and readiness to grow in new business areas

As of December 2010, the Bank has successfully offered Assets Backed Securities (ABS) in Indonesia, reaching to Rp 750 billion. Bank BTN main position in the sector of housing loans and strong asset quality contributed to the successful launching of the abovementioned ABS. The development of ABS market can help diversifying funding sources, increasing lending capacity and maximizing the balance sheet of Bank BTN. Bank BTN also established Sharia business unit in 2004, which until now has been growing rapidly. Bank BTN has now changed its position to a bank having retail products and services that vary through the business development and product diversification.

Experienced management team and implementation of new corporate culture

Bank BTN's senior management team has extensive experiences in the industry in Indonesia. Ability in providing strategic directions and creating business initiatives in a competitive market has been proven through Bank BTN's prime position in the mortgage sector in the banking sector in Indonesia. Bank BTN's senior management team have experiences more than 20 years in the banking industry. Bank BTN's senior management team has issued a number of initiatives for Bank BTN, including the implementation of the initiative of overall corporate governance, as well as the implementation of Bank BTN's strategic plan in the form of Vision 2012.

Bank BTN has implemented a new corporate culture at the end of 2008 which focuses on customer service and the increased of employee productivity. Looking ahead, Bank BTN will implement employee performance appraisal system that emphasizes the values of professionalism, integrity, and focus on the customer.

STRATEGI BANK BTN BANK BTN'S STRATEGY



RENCANA STRATEGIS BANK BTN

Rencana Jangka Panjang

Dalam rangka memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan persaingan bisnis perbankan yang semakin ketat, Bank BTN telah dan sedang melakukan perubahan berkelanjutan. Rencana perubahan telah tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Tahun 2008 - 2012. Bank BTN melakukan penajaman visi dan misi. Visi Bank BTN adalah "Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan" Visi dimaksud sesuai dengan posisi yang ingin dicapai Bank BTN dalam memenuhi kriteria bank fokus sebagaimana yang diatur dalam Arsitektur Perbankan Indonesia.

Dengan penajaman Visi dan Misi Bank BTN, maka dirumuskan arah dan tujuan pengembangan Bank BTN menuju Visi dimaksud yaitu:

1. *Funding based* yang lebih luas dengan meningkatkan pertumbuhan dana ritel.
2. Profil *customer based* yang lebih optimal dalam rangka peningkatan *core funding*.
3. Meningkatkan portofolio kredit.
4. Komposisi pemberian kredit bank BTN sebesar 85% pada kredit perumahan dan maksimal 15% pada kredit lainnya (kredit pendukung perumahan).
5. Terselenggaranya pengelolaan manajemen yang optimal dalam bidang *Human Capital*, Sistem Informasi, Pemasaran, Cabang Bisnis, Pengukuran Kinerja, Manajemen Risiko, Operasional untuk mendukung bisnis Bank BTN.

STRATEGIC PLANS OF BANK BTN

Long Term Plan

In order to utilize the strength to face the increasingly tight challenges and competition in banking industry, Bank BTN has been and is still making sustainable changes. The plan to make changes has been stated in the 2008 - 2012 Long Term Plan. Bank BTN has sharpened its vision and mission. The vision of Bank BTN is to be the leading bank in housing finance. This vision is in line with the position to be achieved by Bank BTN in meeting the criteria of a focused bank as stipulated in the Indonesian Banking Architecture.

By sharpening our vision and mission, Bank BTN then formulated the direction and development goals towards such vision, namely:

1. Broader funding base through increased growth of retail funds.
2. Customer-based profile that is more optimal in order to increase core funding.
3. Increasing loan portfolio growth.
4. Lending composition is 85% on housing loans and a maximum of 15% on other loans (housing loan support).
5. The implementation of optimal management in the fields of Human Capital, Information Systems, Marketing, Research and Development, Business Branch, Performance Measurement, Risk Management, Operations to support Bank BTN's business.

6. Struktur organisasi yang mampu mendukung bisnis Bank BTN sehingga akan mempunyai daya saing yang tinggi.
7. Budaya perusahaan berubah dari hanya sebatas slogan menjadi perilaku pada seluruh jajaran Bank BTN, termasuk budaya menjual (*sale culture*).
8. Efisiensi di segala bidang.
9. Dipertahankannya tingkat *Net Interest Margin* yang cukup memadai.
10. Jaringan distribusi yang beragam dan efektif.
11. Manajemen risiko yang lebih baik untuk pasar yang dipilih.
12. Proses dan pelaporan yang akurat.

Strategi bisnis dan kerangka kerja dalam rangka mencapai visi dimaksud dikelompokkan sebagai berikut:

Pembiayaan dan Pengembangan Aset

Concentric Diversification

- ▶ Realokasi komposisi pembiayaan sebesar 85% untuk pembiayaan perumahan yang mengarah kepada pembiayaan KPR segmen menengah-atas (KPR komersial),
- ▶ Maksimal 15% untuk pembiayaan non perumahan.

Market Segmentation

Pasar pembiayaan ditujukan kepada pasar menengah.

Market Penetration

- ▶ *Re-branding* and *re-positioning* Bank BTN sebagai Bank Perumahan kelas menengah-atas yang memiliki produk beragam dan bersaing.
- ▶ Diversifikasi produk, fitur dan skema pembiayaan yang inovatif dibandingkan dengan kompetitor.
- ▶ Menyediakan standar layanan pembiayaan terbaik yang sesuai dengan karakteristik target pasar yang dituju.

Strategic Alliance

- ▶ *Co-Branding*
- ▶ Pembelian aset produktif dari institusi lain.

Asset Management

- ▶ Sekuritisasi KPR secara berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan perputaran KPR, serta meningkatkan *fee-based income*.

6. Organizational structure that can support Bank BTN's business in order to have high competitiveness.
7. Corporate culture changes from a slogan only to become behavior of the entire staff of Bank BTN, including sales culture.
8. Efficiency in all sectors.
9. Maintenance of an adequate Net Interest Margin.
10. Diverse and effective distribution network.
11. Better risk management for selected markets.
12. Accurate reporting and process.

The business strategy and framework to achieve the vision is grouped as follows:

Assets Financing and Development

Concentric Diversification

- ▶ Reallocation of financing composition by 85% to housing finance that lead to mortgages to the upper-middle segment (commercial housing finance)
- ▶ A maximum of 15% for non-housing finance.

Market Segmentation

Financing is aimed to the middle market.

Market Penetration

- ▶ *Re-branding* and *re-positioning* of Bank BTN as an upper-middle class housing finance bank that has diverse and competitive products.
- ▶ Diversification of products and features and innovative financing schemes compared with competitors.
- ▶ Providing the best financing services standards, according to the characteristics of the intended target market.

Strategic Alliance

- ▶ *Co-Branding*.
- ▶ Purchase of productive assets from other institutions.

Asset Management

- ▶ Securitization of mortgages on an ongoing basis, to increase capacity and velocity of mortgages, and to increase fee-based income.

- ▶ Mengatur komposisi aset produktif sehingga menghasilkan *return* yang optimal.

Pengembangan dana dan permodalan

Product Development

- ▶ Meningkatkan komposisi dana ritel yang berbiaya rendah melalui perbaikan produk dana ritel yang ada saat ini serta didukung dengan upaya promosi yang terarah.
- ▶ Mengembangkan transaksi derivatif dari produk dana sebagai strategi untuk mengurangi biaya dana tinggi.
- ▶ *Re-positioning* Bank BTN menjadi Bank yang dikenal memiliki variasi produk dana ritel dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan target pasar sasaran sehingga dapat digunakan untuk mempertahankan dan menambah basis nasabah.
- ▶ Menyediakan standar layanan produk dana dan jasa terbaik yang sesuai dengan karakteristik target pasar yang dituju.

Horizontal Diversification

Inovasi produk dana dan jasa yang dikemas dengan produk investasi

Mengelola Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) yang Berimbang Sehingga Mengarah Kepada Biaya Dana yang Lebih Murah.

Layanan Jasa dan Pengembangan Jaringan

Concentric Diversification

- ▶ Menambah jasa layanan baru yang berkualitas untuk peningkatan pangsa pasar, penerimaan *fee-based* serta peningkatan transaksi.
- ▶ Mengembangkan jasa layanan yang ada yang berkualitas untuk peningkatan penerimaan serta peningkatan transaksi.

Horizontal Diversification

- ▶ Mengembangkan layanan personal untuk segmen pasar berpenghasilan menengah-atas
- ▶ Mengembangkan produk-produk jasa yang memberikan manfaat untuk kebutuhan nasabah lembaga.

- ▶ Adjusting the composition of productive assets to produce an optimum return.

Development of funds and capital

Product Development

- ▶ Improve the composition of low-cost retail funds through improved retail fund products currently available, supported by targeted promotional efforts.
- ▶ Develop derivative transactions of wholesale funding products as a strategy to reduce high cost funds.
- ▶ Re-positioning of Bank BTN to be a Bank known to have variations in retail funding products and services that can meet the needs of the target market aiming to maintain and increase its customer base.
- ▶ Providing the best deposit product and services service standards in accordance with the characteristics of the intended target market.

Horizontal Diversification

Innovation of funding and services products packaged together with investments products.

Managing a Balanced Composition of Third Party Deposits that may Lead to a Low-Cost Funds

Services and Network Development

Concentric Diversification

- ▶ Add new quality services to increase market share, fee-based income and increased transaction volume.
- ▶ Develop existing quality services to increase market share, fee-based income and increased transaction volume.

Horizontal Diversification

- ▶ Develop personal service to segments of upper-middle income market (priority banking – wealth management).
- ▶ Develop services products that bring benefits the needs of institutional customers.

Pengembangan Jaringan Kantor Baru Baik Melalui Pertumbuhan Organik maupun Non-Organik.

Struktur Organisasi

- ▶ Struktur organisasi kantor pusat diarahkan menuju pembentukan SBU dan SSU yang sejalan dengan arah pengembangan bisnis.
- ▶ Struktur organisasi di kantor cabang diarahkan menuju organisasi yang sejalan dengan arah pengembangan bisnis.
- ▶ Perlunya pembentukan fungsi (dengan kapasitas lintas unit kerja) yang secara khusus melakukan pemantauan serta penyesuaian terhadap segala fungsi unit kerja yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang dalam rangka transformasi secara komprehensif sesuai dengan RJP yang telah ditetapkan.

Personalia dan Kinerja

- ▶ Mengimplementasikan nilai-nilai dasar perusahaan baru yang telah ditetapkan sebagai budaya perusahaan yang baru, "POLA PRIMA"
- ▶ Membangun "Budaya Kinerja" di dalam Bank BTN, bergerak menuju prinsip-prinsip "gaji sesuai kinerja", serta keterkaitan imbal jasa dengan kemajuan kompetensi.
- ▶ Mempercepat implementasi perbaikan kapabilitas akuntansi manajemen dan SDM berbasis kompetensi.
- ▶ Melaksanakan pengukuran Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (KPI) yang sejalan dengan strategi Bank melalui pendekatan *Balanced Score Card*.
- ▶ Melakukan perubahan prosedur dan kebijakan SDM untuk mengaitkan kinerja individual (sejalan dengan pencapaian tujuan Bank BTN) dan imbal jasa individual.

Infrastruktur dan Pengendalian

- ▶ Meningkatkan kecepatan pemenuhan dukungan infrastruktur melalui pemenuhan sumber daya manusia, organisasi dan sumber daya lainnya.
- ▶ Mengoptimalkan fungsi logistik dan IT dengan menerapkan manajemen yang efektif antara lain melalui:

Development of New Office Network Through Both Organic and Non-Organic Growth.

Organizational Structure

- ▶ The organizational structure of head office is directed towards the establishment of SBU and SSU in accordance with the direction of business development.
- ▶ The organizational structure at the branch office is directed toward organizations that are in line with the direction of business development.
- ▶ The need for the establishment of functions (with capacity across business units) that specifically monitor and adjust all existing business units at head office and branch offices in the framework of a comprehensive transformation in accordance with the Long Term Plan which has been established.

Personnel and Performance

- ▶ Implementing the new basic values of the company which has been designated as the new corporate culture "POLA PRIMA."
- ▶ Building "Performance Culture" in Bank BTN, moving towards the principles of "salary according to performance", and relationship of compensation with competency development.
- ▶ Accelerate implementation of management accounting capability and competency-based human resources.
- ▶ Implementing performance measurement in accordance with Key Performance Indicators (KPI) in line with Bank BTN strategy through the *Balanced Score Card* approach.
- ▶ Making changes to procedures and human resource policies to link individual performance (in line with achieving objectives of Bank BTN) and earnings of individual services.

Infrastructure and Control

- ▶ Increasing fulfillment speed of infrastructure support through the fulfillment of human resources, organizational and other resources.
- ▶ Optimizing logistics and IT functions to implement effective management, among others through:

- Otomasi proses-proses yang sebelumnya dilakukan secara manual (proses kredit, *scoring*, pengadaan, dan penilaian kinerja).
- Meningkatkan fleksibilitas bagi unit bisnis atau jaringan kantor cabang dalam melakukan pengadaan logistik dengan meningkatkan otorisasi dan kewenangan yang dimilikinya.
- ▶ Melakukan pelatihan, lokakarya dan *benchmarking* untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan seragam mengenai implementasi GCG.
- ▶ Membangun dan melaksanakan pedoman pelaksanaan, evaluasi dan monitoring implementasi GCG bagi seluruh jenjang dan tingkatan organisasi yang dilengkapi dengan software GCG agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- ▶ Membangun dan menerapkan *Corporate Code of Conduct*.
- ▶ Melakukan sosialisasi dan internalisasi GCG.
- ▶ Melengkapi organ-organ yang ada di fungsi Kepatuhan sehingga dapat melaksanakan peran dan fungsi kepatuhan secara optimal.
- Automation of processes that were previously done manually (credit process, scoring, procurement and performance measurement).
- Increase flexibility for business units or branch office network in the procurement of logistics through increasing authority.
- ▶ Conducting training, workshops and benchmarking to gain a full understanding and uniform implementation of GCG.
- ▶ Developing and implementing guidelines for implementation, evaluation and monitoring of Good Corporate Governance implementation for all levels of the organization already equipped with GCG software in order to be implemented effectively and efficiently.
- ▶ Establishing and implementing a Corporate Code of Conduct.
- ▶ Socializing and internalizing GCG.
- ▶ Complementing the organs existing in the compliance function to allow implementation of compliance roles and functions optimally.

Manajemen Risiko

- ▶ Fokus pada program implementasi Basel II *framework* termasuk dalam proses pengumpulan risiko untuk menyiapkan pengukuran risiko mengacu pada pendekatan yang lebih maju termasuk menerbitkan pedoman internal untuk memastikan pengumpulan data risiko dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
- ▶ Membangun dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko dan otomasi proses pengukuran risiko untuk mendukung akurasi pengambilan keputusan dan efisiensi proses bisnis.
- ▶ Redefinisi fungsi DRCO dan BRCO untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan risiko di seluruh unit sesuai dengan perubahan organisasi yang direncanakan.

Risk Management

- ▶ Focusing on program implementation of Basel II framework is included in the process of collecting risk database to prepare risk measurement referring to more advanced approaches including issuing internal guidelines to ensure risk exposure data collection, carried out consistently and continuously.
- ▶ Developing and implementing risk management information systems and risk measurement process automation to support decision-making accuracy and efficiency of business processes.
- ▶ Redefining of DRCO and BRCO functions to optimize risk monitoring implementation across all risk taking units in accordance with the planned changes to the organization.

Rencana Jangka Menengah

Bank BTN telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2011 - 2013 dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta berdasarkan asumsi dan kondisi yang terus berkembang.

Medium Term Plan

Bank BTN has prepared 2011-2013 Bank's Business Plan taking into account the strengths, weaknesses, opportunities and threats as well as based on ongoing assumptions and conditions.

Secara umum program kerja operasional untuk periode RBB 2011 - 2013 khususnya tahun 2011 merupakan program kerja lanjutan dari tahun sebelumnya yang mencakup target bidang dana, kredit, pengembangan unit syariah dan target operasional.

Upaya yang dilakukan Bank BTN dari sisi pendanaan bank untuk mencapai likuiditas yang optimal adalah menggali sumber dana jangka panjang dan melakukan pertumbuhan dana ritel dengan melakukan strategi marketing terintegrasi mulai dari pengembangan produk dana ritel, jaringan dan yang lebih baik pada tataran implementasinya.

Secara umum apa yang akan dilakukan di 2011 merupakan program lanjutan yang berkesinambungan dari tahun sebelumnya. Adapun program kerja tersebut antara lain:

Penggunaan Credit Scoring Model

Penggunaan akan diintegrasikan dengan layanan yang lebih cepat melalui rencana implementasi *Loan Origination System (eLoan)*. *ELoan* merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan sebagai sistem pendukung utama dalam proses aplikasi kredit yang bertujuan agar proses permohonan kredit menjadi lebih efisien, efektif dan terjaga kualitas kreditnya.

Rencana pengembangan jaringan kantor

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan penghimpunan dana ritel yang merupakan maka direncanakan Bank BTN akan mengembangkan jaringan kantor baik konvensional maupun unit usaha syariah: Pembukaan Kantor Wilayah, Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, dan penambahan ATM serta relokasi Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu.

Pengembangan jaringan Kantor Kas diprioritaskan pada daerah pemukiman dengan sebaran terbesar pada wilayah Jabodetabek.

Rencana penghimpunan dana wholesale

Sejalan dengan pertumbuhan bisnis kredit yang cukup pesat dan dalam rangka mengurangi *maturity mismatch* maka Bank BTN merencanakan akan

In general, the operational work program of the Business Plan period 2011 - 2013, particularly 2011 is a work program continued from the previous year, including target areas of funding, credit, development of sharia units and operational targets.

Efforts undertaken by Bank BTN from the funding side of the bank to achieve optimal liquidity is to explore long-term funding sources and strive for retail funds growth by performing an integrated strategic marketing starting from retail funds product development, better networking and marketing communication at the level of implementation.

In general what will be done in 2011 is a continuation of the sustainable program from the previous year. The work program includes:

Use of Credit Scoring Model

The use of a Credit Scoring Model will be integrated with faster service through the implementation plan of Loan Origination System (eLoan). *ELoan* is an information technology system developed as a major support system in the credit application process that aims for the loan application process to become more efficient, effective and secured credit quality.

Office network development plan

In order to improve growth of retail funds raising which is a low cost funding, Bank BTN plans to develop a network of offices both conventional and sharia: the opening of Regional Office, Branch Office, Sub-branch Office, Cash Office, and the addition of ATM outlets as well as relocation of Branch Offices and Sub-branch Offices.

The development of Cash Office network is prioritized in residential areas with the largest distribution in the Greater Jakarta area.

Wholesale funding plan

In line with the rapid growth of credit business and in order to reduce maturity mismatch, Bank BTN plans to raise wholesale funds derived from issuance

menghimpun dana yang berasal dari penerbitan surat hutang atau *medium term notes* atau *term purchase program*.

Rencana Jangka Pendek

Sebagai landasan kerja tahun 2011 yang akan digunakan sebagai usaha mencapai visi dan misi Bank BTN, maka telah ditetapkan arah Kebijakan Umum Bank BTN sebagai berikut:

"Meningkatkan kinerja bisnis dengan fokus dana berbiaya murah dan pertumbuhan yang berkualitas melalui inovasi, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan organisasi yang berbasis kinerja".

Secara umum Kebijakan Umum Bank BTN tersebut mempunyai makna bahwa Bank BTN berusaha meningkatkan kinerja dengan fokus pada:

- ▶ Peningkatan dana berbiaya murah (*Current Account and Saving account - CASA*) dengan segmentasi yang lebih terarah;
- ▶ Pertumbuhan kredit yang fokus pada pembiayaan perumahan dengan perluasan pada segmen menengah;
- ▶ Menjaga dan memperbaiki kualitas kredit melalui inovasi produk, jasa, jaringan dan penyempurnaan proses bisnis berbasis IT;
- ▶ Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terus menerus.

Berdasarkan rencana kerja tersebut, telah ditentukan target utama yang akan dicapai di tahun 2011:

- ▶ Pertumbuhan kredit direncanakan di atas rata-rata pertumbuhan nasional yaitu berkisar antara 25% sampai dengan 30% dengan tetap mempertahankan kualitas, sehingga target – *non performing loans gross* berada di bawah 4%;
- ▶ Pertumbuhan dana pihak ketiga direncanakan lebih tinggi dari pertumbuhan kredit yaitu di atas 30%;
- ▶ Penurunan rasio efisiensi sebagai cerminan dari perbaikan proses bisnis dan pangsa bisnis secara bertahap menuju pada rasio rata-rata industri;
- ▶ Pertumbuhan aset direncanakan untuk mempertahankan *share* Bank BTN pada posisi 10 besar bank di Indonesia.

of promissory notes, medium term notes or term purchase program.

Short Term Plan

As a foundation of work in 2011, which will be used as an attempt to achieve the vision and mission of Bank BTN, Bank BTN sets the direction of the Public Policy as follows:

"Improving business performance with a focus on low-cost funding and quality growth through innovation, development of human resources, and performance-based organization."

In general, these policies have the meaning that Bank BTN strives to improve performance with a focus on:

- ▶ Increased low-cost funding (*Current Account and Saving account - CASA*) with a more targeted segmentation
- ▶ Loan growth in house financing with a focus on expansion in the middle segment
- ▶ Maintain and improve loan quality through product innovation, services, network and IT-based business process improvement
- ▶ Development of human resources continuously

The business target and development strategies defined in 2011 are as follows:

- ▶ Loan growth is planned above the national average ranging from 25% to 30% while maintaining quality, so that the target of non performing loans – gross is under 4%;
- ▶ Third party deposits has planned higher than loan growth, namely above 30%;
- ▶ Decrease in efficiency ratio as a reflection of improved business processes and business share increased gradually towards the industry average;
- ▶ Assets growth is planned to maintain Bank BTN's share in the top 10 banks in Indonesia.



Adapun sasaran dan strategi pengembangan bisnis yang ditetapkan pada tahun 2011, adalah sebagai berikut:

- a. **Pendanaan yang luas dengan pertumbuhan dana berbiaya murah**
 - ▶ Pengembangan dan peluncuran produk, layanan dan fitur baru, meliputi kredit konsumen dan komersial, termasuk layanan berbasis elektronik (*eBanking*).
 - ▶ Optimalisasi aliansi strategis dengan beberapa lembaga, antara lain kantor pos, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga negara, lembaga kesehatan, BUMN/BUMD dan pemerintah daerah.
 - ▶ Melakukan undian berhadiah untuk nasabah tabungan, termasuk tabungan di kantor pos.
 - ▶ Melakukan promosi dan komunikasi atas produk-produk dana ritel melalui dan nasabah eksisting dan akuisisi nasabah baru melalui penjualan oleh *selling officer*.
 - ▶ Menyelenggarakan program *Frontliners of the Year*.

To support this, there are key targets and some key initiatives that will be used as reference in preparing the 2011 work program as follows:

- a. **Broad funding base by increasing the growth of retail funds**
 - ▶ Development and launching of products, services and new features, consisting of consumer and commercial loans, including electronic based service (*eBanking*).
 - ▶ Optimizing strategic alliance with several institutions, among others post office, educational institutions, state institutions, health institutions, State Owned Enterprise (SOE), and local Governments.
 - ▶ Providing lottery for savings customers, including savings accounts in post office.
 - ▶ Holding promotion and communication on retail fund products through up selling and cross selling of existing customers and acquisition of new customers through the sale by the selling officer.
 - ▶ Holding Front Liners of the Year program

b. Pertumbuhan kredit yang berkualitas

- ▶ Melakukan promosi produk-produk kredit dengan tujuan penguatan dan produk kredit perumahan pada segmen menengah, misalnya dengan mengadakan pameran properti.
- ▶ Pengembangan produk dan fitur baru untuk KPR.
- ▶ Peningkatan kompetensi analis.
- ▶ Meningkatkan efektifitas penagihan kredit, antara lain implementasi sistem penagihan yang terintegrasi menggunakan *eColl*, intensifikasi penagihan khususnya untuk kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (DPK) 1 dan 3. Sementara penyelesaian kredit kolektibilitas Macet dilakukan melalui lelang Hak Tanggungan serta peningkatan efektifitas pola penagihan dan kerjasama dengan *lawyer* untuk penagihan kredit-kredit besar.
- ▶ Melanjutkan tahap implementasi *eLoan*, dan standarisasi layanan KPR Non Subsidi pola 1 3 1 yang berbasis *eLoan*.
- ▶ Up grade penerapan ISO KPR Komersial dari sebelumnya ISO 9001:2000 pada 16 Kantor Cabang menjadi ISO 9001:2008 berbasis *eLoan*.

c. Peningkatan *margin* kredit

- ▶ Peluncuran produk baru di bidang kredit komersial
- ▶ Peningkatan kerja sama sinergi dengan BUMN dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan portofolio kredit komersial.

d. Peningkatan *fee based income*

- ▶ Meningkatkan *operational excellence* dengan tujuan loyalitas dan kepercayaan nasabah melalui kinerja infrastruktur yang prima (jaringan IT *online*, ATM, dll.), kesalahan yang rendah serta komitmen yang terpenuhi.
- ▶ Melakukan berbagai program promosi, antara lain promosi kartu debit dan kartu kredit melalui *merchant* dan program *poin reward*.

e. Perluasan Jaringan distribusi

- ▶ Perluasan jaringan fisik berupa pembukaan baru Kantor Kas di wilayah pemukiman di kota-kota besar dan lokasi mitra strategis. Sedangkan layanan syariah akan difokuskan pada pembukaan Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu (KCPS).

b. Growth of quality loans

- ▶ Conducting promotion on loans products focused on strengthening of the brand and repositioning of mortgage product on the middle segment, by way of property exhibition.
- ▶ Developing new products and features for mortgages.
- ▶ Increasing analyst competency.
- ▶ Increasing billing effectiveness, among others implementation of an integrated billing system using *eColl*, billing intensification specifically for classification of Special Mention collectability (DPK) billing 1 and billing 3. In addition, loan settlement program of loss collectability is done through mortgage auction as well as increased effectiveness of billing patterns and cooperation with *Lawyer* for collection of huge loans.
- ▶ Continuing implementation stage of *eLoan*, and standardization of Non-Subsidized Mortgage Services *eLoan* based pattern 1 3 1.
- ▶ Up-grading of ISO application on commercial mortgage from the previous ISO 9001:2000 to ISO 9001:2008 *eLoan* based in 16 Branch Offices.

c. Improvement of loan margin

- ▶ Launching of new products of commercial loans.
- ▶ Improvement of cooperation synergy with State Owned Enterprise (SOE) and educational institutions to increase commercial loans portfolios.

d. Improvement of fee based income

- ▶ Increasing operational excellence aiming to obtain customer loyalty and trust, through promote performance of infrastructure (on line IT network, ATM, etc.), low error and fulfillment of commitments.
- ▶ Conducting various promotional programs, among others, debit card and credit card promotions through merchant, and point reward program.

e. Expansion of distribution channel

- ▶ Expanding of physical network expansion in the form of opening of new Cash Offices in residential areas of big cities and on the location of strategic partners. With regard to Sharia business unit, the service will be focused on opening Sharia Branch Office and Sub-Branch Office (KCPS).

- ▶ Optimalisasi jaringan distribusi dengan peningkatan efektivitas jaringan ATM, seperti melakukan relokasi atas ATM yang kurang produktif ke lokasi yang mempunyai potensi lebih baik.
- ▶ Perluasan kerjasama jaringan ATM dengan mitra seperti Prima, Nets, atau Meps.
- ▶ Pemenuhan mesin ATM pada setiap kantor dan penambahan mesin ATM di beberapa kantor cabang yang memiliki antrian cukup tinggi serta penempatan mesin ATM adalah pada mitra-mitra strategis (seperti Perguruan Tinggi dan Rumah Sakit) serta lokasi-lokasi bisnis ritel.

f. Melanjutkan implementasi struktur organisasi baru di kantor cabang.

g. Pengelolaan manajemen yang optimal di bidang *human capital*, IT dan manajemen risiko menuju efisiensi operasional.

- ▶ Optimizing distribution network by increasing effectiveness of ATM network, such as relocating less productive ATM outlets to the better potential locations.
- ▶ Expansion of cooperation of ATM networks with partners such as Prima, Nets, or MEPS.
- ▶ Fulfillment of ATM machines at every office outlets and the addition of ATM machines in several branch offices which has long queue, as well as placement of ATM machines on strategic partners (such as universities and hospitals) and retail business locations.

f. Continuing the implementation of new organization structure at branch offices.

g. Optimal management in the field of human capital, IT and risk management towards operational efficiency.



LAPORAN KEUANGAN AUDIT AUDITED FINANCIAL STATEMENTS

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Laporan keuangan beserta laporan auditor independen
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
dan 2009

Financial statements with independent auditors' report
years ended 31 December 2010 and 2009



Daftar Isi	Halaman Pages	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi	330	Board of Directors' Statement
Laporan Auditor Independen	331	Independent Auditors' Report
Neraca	333	Balance Sheets
Laporan Laba Rugi	338	Statements of Income
Laporan Perubahan Ekuitas	340	Statements of Changes in Stockholders' Equity
Laporan Arus Kas	343	Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan	346	Notes to the Financial Statement
1. Umum	346	1. General
2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan	353	2. Summary of Significant Accounting Policies
3. Penerapan awal PSAK NO. 50 (Revisi 2006) dan PSAK NO. 55 (Revisi 2006)	397	3. Initial Adoption Of PSAK NO. 50 (Revised 2006) And PSAK NO. 55 (Revised 2006)
4. Pelaksanaan Kuasi-reorganisasi	398	4. Implementation Of Quasireorganization
5. Kas	399	5. Cash
6. Giro Pada Bank Indonesia	399	6. Current Accounts With Bank Indonesia
7. Giro Pada Bank Lain	401	7. Current Accounts With Other Banks
8. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	403	8. Placements with Bank Indonesia and other banks
9. Efek-efek	404	9. Securities
10. Obligasi pemerintah	411	10. Government bonds
11. Tagihan dan kewajiban SWAP suku bunga	414	11. Interest rate SWAP receivables and liabilities
12. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	416	12. Loans and sharia financing/receivables
13. Aset tetap	431	13. Premises and equipment
14. Bunga yang masih akan diterima	434	14. Interests receivables
15. Aset lain-lain	434	15. Other assets
16. Kewajiban segera	436	16. Current liabilities
17. Giro	436	17. Demand deposits
18. Tabungan	437	18. Savings deposits
19. Deposito berjangka	437	19. Time deposits
20. Simpanan dari bank lain	439	20. Deposits From Other Banks
21. Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	440	21. Securities sold under repurchase agreements
22. Surat-surat berharga yang diterbitkan	448	22. Securities issued
23. Pinjaman yang diterima	454	23. Fund borrowings
24. Bunga yang masih harus dibayar	459	24. Accrued interest
25. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	459	25. Estimated losses on commitments and contingencies
26. Kewajiban lain-lain	460	26. Other liabilities
27. Ekuitas	461	27. Stockholders' equity
28. Program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham (MESOP)	470	28. Management and employee stock option plan (MESOP)
29. Pendapatan bunga	471	29. Interest income
30. Beban bunga	471	30. Interest expense
31. Pendapatan operasional lainnya - lain-lain	472	31. Other operating income - others
32. Beban penyisihan (pembalikan) kerugian aktiva produktif dan nonproduktif	472	32. Provision (reversal) of allowance for possible losses on earning and non-earning assets
33. Beban umum dan administrasi	472	33. General and administrative expenses
34. Gaji dan tunjangan karyawan	472	34. Salaries and employee benefits
35. Beban operasional lainnya - lain-lain	473	35. Other operating expenses - others
36. Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih	473	36. Non-operating income (expense) - net
37. Perpajakan	473	37. Taxation
38. Pos luar biasa	475	38. Extraordinary item
39. Komitmen dan kontinjensi	476	39. Commitments and contingencies
40. Kewajiban imbalan kerja	476	40. Provision for employee benefits
41. Pelaporan segmen	479	41. Segment reporting
42. Jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum	482	42. Government guarantees on the obligations of commercial banks
43. Transaksi hubungan istimewa	483	43. Transactions with related parties
44. Posisi devisa neto	485	44. Net open position
45. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum	486	45. Minimum required capital adequacy ratio (CAR)
46. Manajemen risiko	487	46. Risk management
47. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan	505	47. Fair value of financial assets and liabilities
48. Reklasifikasi akun dan laporan arus kas	508	48. Reclassification of account and statements of cash flows
49. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang direvisi	509	49. Revised Statements of Financial Accounting Standards
50. Laba bersih per saham	514	50. Earnings per share
51. Informasi tambahan	515	51. Additional information
52. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan	515	52. Reissuance of Financial Statements
53. Penyelesaian Laporan Keuangan	515	53. Completion of the Financial Statements



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan beserta laporan auditor independen
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2010 dan 2009/
*Financial statements with independent auditors' report
years ended December 31, 2010 and 2009*

Purwantono, Suherman & Surja

ERNST & YOUNG

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2010 DAN 2009
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS WITH
THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2010 AND 2009
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1. Nama/Name | : | Iqbal Latanro |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 |
| Alamat Rumah/Residential Address | : | Jl. Denpasar Raya Blok A 12, RT 002 RW 002
Setia Budi, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon/Telephone | : | (021) 634 6764 |
| Jabatan/Title | : | Direktur Utama/President Director |
| 2. Nama/Name | : | Saut Pardede |
| Alamat Kantor/Office Address | : | Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 |
| Alamat Rumah/Residential Address | : | Jl. Kayu IV/6 RT 005 RW 006
Kayu Putih, Jakarta Timur |
| Nomor Telepon/Telephone | : | (021) 638 51856 |
| Jabatan/Title | : | Direktur/Director |

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; | 1. <i>We are responsible for the preparation and the presentation of the Financial Statements of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;</i> |
| 2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; | 2. <i>The Financial Statements of the Company have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information in the Financial Statements of the Company has been disclosed in a complete and truthful manner;</i> |
| b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The Financial Statements of the Company do not contain any incorrect material information or fact, nor do they omit information or fact;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | 4. <i>We are responsible for the internal control system of the Company.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This declaration has been made in a truthful manner.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors
Jakarta, 25 Maret 2011/Jakarta, March 25, 2011

	
Iqbal Latanro Direktur Utama/President Director	Saut Pardede Direktur/Director

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-1014/PSS/2011

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Kami telah mengaudit neraca PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-1014/PSS/2011

**The Stockholders, Boards of
Commissioners and Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

We have audited the balance sheets of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") as of December 31, 2010 and 2009, and the related statements of income, changes in stockholders' equity and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2010 and 2009, and the results of its operations and its cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Seperti dijelaskan pada Catatan 2d dan 3 atas laporan keuangan, efektif 1 Januari 2010, Bank menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Penerapan PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi 2006) ini dilakukan secara prospektif.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-861/PSS/2011 tanggal 25 Maret 2011 atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Terkait dengan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi BTN XV Bank BTN tahun 2011, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan seperti disebutkan di atas yang disertai dengan beberapa perubahan dalam penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan tersebut (Catatan 52).

As discussed in Notes 2d and 3 to the financial statements, effective January 1, 2010, the Bank adopted Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures", and PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement". These PSAK No. 50 and No. 55 (Revised 2006) have been applied prospectively.

We have issued independent auditors' report No. RPC-861/PSS/2011 dated March 25, 2011 of the Bank's financial statements in the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008. Related to the Bank's plan for the Public Offering of BTN Bonds XV 2011, the Bank has reissued its financial statements mentioned above with certain changes in the presentation and disclosures of such financial statements (Note 52).

Purwanto, Suherman & Surja



Drs. Hari Purwanto

Izin Akuntan Publik No. 98.1.0065/Public Accountant License No. 98.1.0065

25 Maret 2011/March 25, 2011

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NERACA
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
BALANCE SHEETS
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	2010	Catatan/ Notes	2009	
ASET				ASSETS
KAS	362.769	2a,5	294.357	CASH
GIRO PADA BANK INDONESIA	4.126.152	2a,2f,6	2.842.112	CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN	153.797	2a,2d,2f,7	33.378	CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.410)		(7.686)	Allowance for impairment losses
	151.387		25.692	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN	2.374.930	2d,2g,8	2.669.169	PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(3.120)		(3.763)	Allowance for impairment losses
	2.371.810		2.665.406	
EFEK-EFEK - setelah dikurangi bunga dan diskonto dan ditambah premium yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp6.941 dan Rp6.359 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009		2d,2h,9		SECURITIES - Net of interest and discount plus unamortized premium of Rp6,941 and Rp6,359 as of December 31, 2010 and 2009, respectively
- Nilai wajar melalui laporan laba rugi	399.000		20.002	Fair value through - profit or loss
- Tersedia untuk dijual	4.702		105.432	Available-for-sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	527.475		2.830.057	Held-to-maturity -
Jumlah efek-efek	931.177		2.955.491	Total securities
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.820)		(4.411)	Allowance for impairment losses
	928.357		2.951.080	
OBLIGASI PEMERINTAH setelah dikurangi diskonto dan ditambah premium yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp3.763 dan Rp8.158 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009		2d,2h,10		GOVERNMENT BONDS Net of unamortized discount and plus premium of Rp3,763 and Rp8,158 as of December 31, 2010 and 2009, respectively
- Nilai wajar melalui laporan laba rugi	-		10.723	Fair value through - profit or loss
- Tersedia untuk dijual	5.822.033		4.984.710	Available-for-sale -
- Dimiliki hingga jatuh tempo	1.371.237		2.384.780	Held-to-maturity -
	7.193.270		7.380.213	
TAGIHAN SWAP SUKU BUNGA	-	2d,2i,11, 29,30	33.410	INTEREST RATE SWAP RECEIVABLES
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-		(351)	Allowance for impairment losses
	-		33.059	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
BALANCE SHEETS (continued)
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	2010	Catatan/ Notes	2009	
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH		2c,2d,2j, 2k,12,17, 18,19,23,43		LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES
Kredit yang diberikan				<i>Loans</i>
Pihak ketiga	48.682.818		38.718.344	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	20.102		18.858	<i>Related parties</i>
Jumlah kredit yang diberikan	48.702.920		38.737.202	<i>Total loans</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(725.119)		(619.829)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	47.977.801		38.117.373	
Pembiayaan/piutang syariah				<i>Sharia financing/receivables</i>
Pihak ketiga	2.845.849		1.995.144	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	732		608	<i>Related parties</i>
Jumlah pembiayaan/piutang syariah	2.846.581		1.995.752	<i>Total sharia financing/receivables</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(155.567)		(83.724)	<i>Allowance for impairment losses</i>
	2.691.014		1.912.028	
	50.668.815		40.029.401	
ASET PAJAK TANGGUHAN - Bersih	38.836	2x,37	72.221	DEFERRED TAX ASSETS - Net
ASET TETAP		2l,13,33		PREMISES AND EQUIPMENT
Nilai tercatat	2.034.213		1.962.073	<i>Carrying value</i>
Akumulasi penyusutan	(583.376)		(725.401)	<i>Accumulated depreciation</i>
	1.450.837		1.236.672	
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	580.476	14	508.542	INTERESTS RECEIVABLE
ASET LAIN-LAIN	512.830	2d,2m,15	408.912	OTHER ASSETS
JUMLAH ASET	68.385.539		58.447.667	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
BALANCE SHEETS (continued)
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

	2010	Catatan/ Notes	2009	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY
KEWAJIBAN				LIABILITIES
KEWAJIBAN SEGERA	781.931	2n,16	664.765	CURRENT LIABILITIES
SIMPANAN DARI NASABAH		2c,2o,43		DEPOSITS
Giro		17		<i>Demand deposits</i>
Pihak ketiga	5.010.691		7.222.120	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	25.261		34.439	<i>Related parties</i>
	5.035.952		7.256.559	
Giro Wadiah		17		<i>Wadiah demand deposits</i>
Pihak ketiga	135.240		99.919	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.983		7.794	<i>Related parties</i>
	138.223		107.713	
	5.174.175		7.364.272	
Tabungan		18		<i>Savings deposits</i>
Pihak ketiga	10.567.700		8.714.702	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	23.560		25.624	<i>Related parties</i>
	10.591.260		8.740.326	
Tabungan Wadiah dan Mudharabah		18		<i>Wadiah and Mudharabah</i>
Pihak ketiga	274.348		200.021	<i>savings deposits</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	2.019		617	<i>Third parties</i>
	276.367		200.638	<i>Related parties</i>
	10.867.627		8.940.964	
Deposito Berjangka		19		<i>Time Deposits</i>
Pihak ketiga	29.496.407		22.743.026	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	17.518		28.093	<i>Related parties</i>
	29.513.925		22.771.119	
Deposito Berjangka Mudharabah		19		<i>Mudharabah Time Deposits</i>
Pihak Ketiga	1.964.850		1.133.098	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	25.470		5.501	<i>Related parties</i>
	1.990.320		1.138.599	
	31.504.245		23.909.718	
Jumlah Simpanan Dari Nasabah	47.546.047		40.214.954	<i>Total Deposits</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
BALANCE SHEETS (continued)
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	2010	Catatan/ Notes	2009	
SIMPANAN DARI BANK LAIN	558.271	2p,20	504.763	DEPOSITS FROM OTHER BANKS
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI - setelah dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp16.165 dan Rp6.777 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009	3.463.819	2q,10,21	3.564.709	SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS - Net of unamortized interest expense of Rp16,165 and Rp6,777 as of December 31, 2010 and 2009, respectively
SURAT-SURAT BERTARAF YANG DITERBITKAN - setelah dikurangi obligasi dalam perbendaharaan sebesar Rp20.000 pada tanggal 31 Desember 2009 dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp10.066 dan Rp8.106 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009	4.139.934	1c,2r, 22	3.221.894	SECURITIES ISSUED - Net of treasury bonds of Rp20,000 as of December 31, 2009, and unamortized bonds issuance cost of Rp10,066 and Rp8,106 as of December 31, 2010 and 2009, respectively
PINJAMAN YANG DITERIMA	3.399.787	12,23	2.983.997	FUND BORROWINGS
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	163.106	24	161.604	ACCRUED INTERESTS
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	60.782	2e,25,39	39.538	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	1.824.584	26	1.698.318	OTHER LIABILITIES
JUMLAH KEWAJIBAN	61.938.261		53.054.542	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
BALANCE SHEETS (continued)
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	2010	Catatan/ Notes	2009	
EKUITAS				STOCKHOLDERS' EQUITY
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009				Capital stock - Rp500 par value per share as of December 31, 2010 and 2009
Modal dasar - 20.478.432.000 saham (terdiri dari 1 lembar saham seri A dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009				Authorized - 20,478,432,000 shares (consisting of 1 share of Series A dwiwarna and 20,478,431,999 shares of series B) as of December 31, 2010 and 2009
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.714.057.000 saham (terdiri dari 1 lembar saham seri A dwiwarna dan 8.714.056.999 lembar saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009	4.357.029	27a	4.357.029	Issued and fully paid - 8,714,057,000 shares (consisting of 1 share of series A dwiwarna and 8,714,056,999 shares of series B) as of December 31, 2010 and 2009
Tambahan modal disetor	639.626	27b	639.626	Additional paid-in capital
Opsi Saham	60.845	28	-	Stock Option
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih	127.641	2h,9,10	(54.239)	Unrealized gains (losses) on available- for-sale securities and government bonds - net
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	307.488		158.421	Appropriated retained earnings
Saldo laba belum ditentukan Penggunaannya *)	954.649	2b,3	292.288	Unappropriated retained earnings *)
JUMLAH EKUITAS	6.447.278		5.393.125	NET STOCKHOLDERS' EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	68.385.539		58.447.667	TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

*) Saldo rugi sebesar Rp14.226.290 pada tanggal 31 Mei 2007 telah dieliminasi dengan saldo laba telah ditentukan penggunaannya, keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual dan obligasi pemerintah, selisih penilaian kembali aset tetap dan modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat kuasi-reorganisasi Bank pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounting to Rp14,226,290 as of May 31, 2007 was eliminated against the net amount of the appropriated retained earnings, unrealized gain (loss) on available-for-sale securities and government bonds, revaluation increment on premises and equipment and issued and fully paid capital stock during Bank's quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF INCOME
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

	2010	Catatan/ Notes	2009	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil				Interest Income and Income from Profit Sharing
Bunga	6.326.333	2c,2s,29,43	5.471.728	Interest
Provisi dan komisi	-	2t	124.954	Fees and commissions
Bagi hasil secara syariah	172.419	2u	133.259	Income from sharia
Jumlah Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	6.498.752		5.729.941	Total Interest Income and Income from Profit Sharing
Beban Bunga dan Bonus				Interest and Bonus Expenses
Bunga	(3.135.975)	2c,2s,30,43	(3.420.345)	Interest
Beban pendanaan lainnya	(4.365)		(4.115)	Other financing expenses
Bonus	(3.594)	2u	(3.272)	Bonus
Jumlah Beban Bunga dan Bonus	(3.143.934)		(3.427.732)	Total Interest and Bonus Expenses
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Bersih	3.354.818		2.302.209	Interest Income and Income from Profit Sharing - Net
Pendapatan Operasional Lainnya				Other Operating Income
Pungutan administrasi dan denda simpanan dan kredit yang diberikan	244.817		208.936	Penalties and administration fees on deposits and loans
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - bersih	42.444	2h,10	5.198	Gain on sale of government bonds - net
Keuntungan dari penjualan efek-efek - bersih	68.051	2h,9	-	Gain on sale of securities - net
Keuntungan dari perubahan nilai efek-efek untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi - bersih	4.360	2h,9	2	Gain from change in value of fair value through profit or loss securities - net
Pendapatan dari penerimaan hapus buku	78.648		-	Income from recovery of loans written-off
Lain-lain	49.570	31	50.721	Others
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	487.890		264.857	Total Other Operating Income
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Kerugian Aset Produktif dan Non-Produktif	(310.536)	2e,32	(52.864)	Provision for Impairment Losses on Earning and Non-earning Assets
Beban Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	(21.244)	2e,25	(11.355)	Provision for Impairment Losses on Commitments and Contingencies

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF INCOME (continued)
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

	2010	Catatan/ Notes	2009	
Beban Operasional Lainnya				<i>Other Operating Expenses</i>
Gaji dan tunjangan karyawan	(1.136.484)	2v,34,40,43	(937.075)	<i>Salaries and employee benefits</i>
Umum dan administrasi	(886.244)	33	(673.954)	<i>General and administrative</i>
Premi program penjaminan Pemerintah	(79.964)	42	(70.562)	<i>Premium on Government's guarantee program</i>
Kerugian dari transaksi mata uang asing - bersih	-	2w	(11.407)	<i>Loss on foreign exchange transactions - net</i>
Kerugian pembelian kembali obligasi dalam perbendaharaan - bersih	-	2r,22	(127)	<i>Loss on repurchase of treasury bonds - net</i>
Kerugian dari perubahan nilai obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi - bersih	-	2h,10	(27)	<i>Loss from changes in value of fair value through profit or loss government bonds - net</i>
Lain-lain	(144.519)	35	(70.257)	<i>Others</i>
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(2.247.211)		(1.763.409)	<i>Total Other Operating Expenses</i>
LABA OPERASIONAL	1.263.717		739.438	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - BERSIH	(13.495)	36	6.379	NON-OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK	1.250.222		745.817	INCOME BEFORE BENEFIT (EXPENSE) TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK		2x,37		TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	(374.350)		(227.996)	<i>Current</i>
Tangguhan	40.066		(11.578)	<i>Deferred</i>
Beban Pajak - Bersih	(334.284)		(239.574)	<i>Tax Expense - Net</i>
LABA BERSIH SEBELUM POS LUAR BIASA	915.938		506.243	NET INCOME BEFORE EXTRAORDINARY ITEM
POS LUAR BIASA - BERSIH	-	2l,13,38	(15.790)	EXTRAORDINARY ITEM - NET
LABA BERSIH	915.938		490.453	NET INCOME
LABA BERSIH PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE
Dasar (nilai penuh)	105	2z,27,50	76	<i>Basic (full amount)</i>
Dilusian (nilai penuh)	104	50	-	<i>Diluted (full amount)</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
 (Disajikan dalam jutaan rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY
Years Ended December 31, 2010 and 2009
 (Expressed in millions of rupiah,
 unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Fully Paid Capital Stock	Tambah modal disetor/ Additional paid-in capital	Keuntungan (kerugian) Yang Belum Direalisasi Atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah Yang Tersedia Untuk Dijual - bersih/ Unrealized Gains (Losses) on Available-for-sale Securities and Government Bonds - net	Saldo Laba Gains (Losses) on Telah Ditentukan Penggunaannya */ Appropriated/ Retained Earnings	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya */ Unappropriated/ Retained Earnings *	Ekuitas Bersih/ Net Stockholders' Equity	
	2.559.804	-	(114.747)	202.939	430.474	3.078.470	Balance as of December 31, 2008
Saldo per 31 Desember 2008	-	-	-	-	490.453	490.453	Net income for the year
Laba bersih (satu tahun)	-	-	-	-	(43.047)	(43.047)	Distribution of net income Dividends
Pembagian laba bersih	-	-	-	-	(374.513)	-	Appropriation for general and special reserves
Dividen	-	-	-	-	(12.914)	(12.914)	Partnership and environmental development program
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	-	-	-	-	-	-	Capitalization of appropriated retained earnings and income for the six-months period ended June 30, 2009 into issued and fully paid capital stock
Program kemitraan dan bina lingkungan	-	-	-	-	(198.165)	-	Stock issuance
Kapitalisasi Laba yang telah ditentukan penggunaannya dan laba bersih periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh	617.196	-	-	(419.031)	-	-	
Penerbitan saham	1.180.029	-	-	-	-	1.180.029	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial
statements.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Keuntungan (kerugian) Yang Belum Direalisasi Atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah Yang Tersedia Untuk Dijual - bersih/ Unrealized Gains (Losses) on Available-for-sale Securities and Government Bonds - net	Saldo Laba Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Retained Earnings	Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya *)/ Ekuitas Bersih/ Unappropriated Retained Earnings *)	Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya *)/ Ekuitas Bersih/ Net Stockholders' Equity
Tambahan modal disetor	-	708.017	-	-	-	708.017
Biaya emisi saham	-	(68.391)	-	-	-	(68.391)
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual	-	-	60.508	-	-	60.508
Saldo per 31 Desember 2009	4.357.029	639.626	(54.239)	158.421	292.288	5.393.125

Additional paid-in capital
Stock issuance cost

Unrealized gain on
available-for-sale securities
and government bonds

Balance as of December 31, 2009

*) Saldo rugi sebesar Rp14.226.290 pada tanggal 31 Mei 2007 telah dieliminasi dengan saldo laba telah ditentukan penggunaannya, keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual dan obligasi pemerintah, selisih penilaian kembali aset tetap dan modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat kuasi-reorganisasi Bank pada tanggal 31 Mei 2007

*) Accumulated losses amounting to Rp14,226,290 as of May 31, 2007 was eliminated against the net amount of the appropriated retained earnings, unrealized gain (loss) on available-for-sale securities and government bonds, revaluation increment on premises and equipment and issued and fully paid capital stock during Bank's quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)
Years ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Diseror Penyul/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahan modal diseror/ Additional paid-in capital	Keuntungan (kerugian) yang Belum Direalisasi Atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah Yang Tersedia Untuk Dijual - bersih/ Unrealized Gains (Losses) on Available-for-sale Securities and Government Bonds - net	Saldo Laba Telah Ditemukan Penggunaannya/ Appropriated Retained Earnings	Saldo Laba Belum Ditemukan Penggunaannya *)/ Unappropriated Retained Earnings*	Ekuitas Bersih/ Net Stockholders' Equity	Balance as of December 31, 2009 Impact of transitional adjustments on the implementation of Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 55 (Revised 2006)
Saldo per 31 Desember 2009		4.357.029	639.626	(54.239)	158.421	292.288	5.393.125	Balance as of December 31, 2010 after the implementation of SFAS No. 55 (Revised 2006)
Dampak penyesuaian transisi atas Penerapan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.55 (Revisi 2006)		-	-	-	-	-	38.711	38.711
Saldo 1 Januari 2010 setelah Penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006)		4.357.029	639.626	(54.239)	158.421	330.999	5.431.836	5.431.836
Laba bersih		-	-	-	-	915.938	915.938	915.938
Pembagian laba bersih Dividen	27c	-	-	-	-	(131.530)	(131.530)	(131.530)
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan		-	-	-	1.49.067	(149.067)	-	-
Program kemitraan dan bina lingkungan		-	-	-	-	(11.691)	(11.691)	(11.691)
Opsi saham	28	-	-	-	-	-	60.845	60.845
Keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual	21,9,10	-	-	181.880	-	-	181.880	181.880
Saldo per 31 Desember 2010		4.357.029	639.626	127.641	307.488	954.649	6.447.278	Balance as of December 31, 2010

*) Saldo rugi sebesar Rp14.226.290 pada tanggal 31 Mei 2007 telah dieliminasi dengan saldo laba telah ditentukan penggunaannya, keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual dan obligasi pemerintah, selisih penilaian kembali aset tetap dan modal ditempatkan dan diseror penuh pada saat kuasi-reorganisasi Bank pada tanggal 31 Mei 2007

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

	2010	Catatan/ Notes	2009	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil, provisi dan komisi	6.424.521		5.691.970	<i>Interest and profit sharing, fees and commissions received</i>
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukkan	78.758	12	86.671	<i>Bad debt recoveries</i>
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(3.141.922)		(3.462.878)	<i>Interest and bonus, fees and commissions paid</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan	(291.979)		(269.211)	<i>Corporate income tax paid</i>
Beban operasional lainnya - bersih	(2.131.694)		(1.379.881)	<i>Other operating expenses - net</i>
Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - bersih	(13.495)		6.379	<i>Other non-operating income (expense) - net</i>
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan kewajiban operasi	924.189		673.050	<i>Cash receipts before changes in operating assets and liabilities</i>
Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi:				<i>Changes in operating assets and liabilities:</i>
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				<i>Decrease (increase) in operating assets:</i>
Penempatan pada bank lain	62.450		-	<i>Placements with other banks</i>
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan tersedia untuk dijual	(278.269)		(36.049)	<i>Fair value through profit or loss and available-for-sale securities</i>
Obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi dan tersedia untuk dijual	(532.558)		288.294	<i>Fair value through profit or loss and available-for-sale government bonds</i>
Tagihan swap suku bunga	33.410		(49)	<i>Interest rate swap receivables</i>
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	(10.895.306)		(8.794.395)	<i>Loans and sharia financing/receivables</i>
Aset lain-lain	282.084		(43.972)	<i>Other assets</i>
Kenaikan (penurunan) dalam kewajiban operasi:				<i>Increase (decrease) in operating liabilities:</i>
Kewajiban segera	34.795		120.096	<i>Current liabilities</i>
Simpanan dari nasabah				<i>Deposits</i>
Giro	(2.220.607)		4.462.404	<i>Demand deposits</i>
Giro <i>Wadiah</i>	30.511		48.638	<i>Wadiah demand deposits</i>
Tabungan	1.850.934		1.491.859	<i>Savings deposits</i>
Tabungan <i>Wadiah</i> dan <i>Mudharabah</i>	75.729		74.007	<i>Wadiah and Mudharabah savings deposits</i>
Deposito berjangka	6.742.806		2.051.316	<i>Time deposits</i>
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	851.721		637.986	<i>Mudharabah time deposits</i>
Simpanan dari bank lain	53.509		174.573	<i>Deposits from other banks</i>
Kewajiban swap suku bunga	-		(2.115)	<i>Interest rate swap liabilities</i>
Kewajiban lain-lain	126.265		272.923	<i>Other liabilities</i>
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas normal	(2.858.337)		1.418.566	<i>Net cash (used in) generate from normal activities</i>
Penerimaan dari klaim asuransi	25.379		40.300	<i>Collection of fire insurance claim</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(2.832.958)		1.458.866	<i>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
Years Ended
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

	2010	Catatan/ Notes	2009	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan (pembelian) efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	2.304.519		(2.660.034)	Sale (purchase) of held-to-maturity securities
Pembelian aset tetap	(335.552)	13	(347.641)	Acquisitions of premises and equipment
Penjualan (Pembelian) obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	1.013.395		(11.134)	Sale (Purchase) of held-to-maturity government bonds
Kas Bersih diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	2.982.362		(3.018.809)	Net Cash provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	1.650.000		1.500.000	Proceed from issuance of securities
Pelunasan pinjaman subordinasi	-		(250.000)	Repayment of subordinated loan
Pembayaran biaya emisi surat-surat berharga yang diterbitkan	-		(6.231)	Payment of securities issuance costs
Hasil dari efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(100.890)		1.789.710	Proceeds from securities sold under repurchase agreements
Penjualan (pembelian) kembali obligasi dalam perbendaharaan	20.000		(20.000)	Resale (repurchase) of treasury bonds
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan	(750.000)		(750.000)	Payment of maturity of securities issued
Penerbitan saham	-		1.888.046	Stock issuance
Biaya emisi penerbitan saham	-		(68.391)	Stock issuance cost
Pembayaran dividen dan program Kemitraan dan Bina Lingkungan	(143.221)	27c	(55.961)	Payments of dividends and Partnership and Environmental Development Program
Penerimaan (Pembayaran) pinjaman yang diterima	415.789		(297.297)	Proceed (Payment) of fund borrowings
Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	1.091.678		3.729.876	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.241.082		2.169.933	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5.714.016		3.544.083	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	6.955.098		5.714.016	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
Years Ended
December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

	2010	Catatan/ Notes	2009	
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:				<i>The details of cash and cash equivalents at end of year are as follows:</i>
Kas	362.769	2a,5	294.357	<i>Cash</i>
Giro pada Bank Indonesia	4.126.152	2a,6	2.842.112	<i>Current accounts with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	153.797	2a,7	33.378	<i>Current accounts with other banks</i>
Penempatan pada bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2.312.380		2.544.169	<i>Placement with other banks - maturing within three months or less since the acquisition date</i>
Jumlah	6.955.098		5.714.016	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A. Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan perubahan yang didokumentasikan dalam Akta yang dibuat oleh Notaris Emi Susilowati, S.H., No. 45 tanggal 24 April 2008. Perubahan terakhir ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-35584.AH.01.02 tanggal 25 Juni 2008.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip *syariah*.

Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip *syariah* pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang *syariah* pertama di Jakarta - Harmoni.

1. GENERAL

a. Bank's establishment

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") was originally established as a state-owned bank under the name "Bank Tabungan Pos" based on Martial Law No. 9 of 1950 dated February 9, 1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to "Bank Tabungan Negara" based on Government Regulation Amendment of Law No. 4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989.

Based on Government Regulation No. 24 of 1992, the status of the Bank has been changed to a state-owned limited liability corporation (Persero). The Bank's deed of establishment as a limited liability corporation was documented under deed No. 136 dated July 31, 1992 of Muhani Salim, S.H. and was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 dated August 12, 1992, and was published in Supplement No. 6A of State Gazette No. 73 dated September 11, 1992. The articles of association of the Bank has been amended several times, the last amendment was made under notarial deed No. 45 dated April 24, 2008 of Emi Susilowati, S.H. This was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-35584.AH.01.02 dated June 25, 2008.

Based on the Decision Letter No. 27/55/KEP/DIR dated September 23, 1994 of the directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

According to article 3 of the Bank's articles of association, the scope of the Bank's activities is to conduct commercial banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Bank's activities based on *sharia* principles.

The Bank started its activities based on *sharia* principles on February 14, 2005 through the establishment of its first *sharia* branch in Jakarta - Harmoni.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Berdasarkan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. mengenai pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka.

Berdasarkan keputusan tersebut, anggaran dasar bank telah diubah pada tanggal 13 Oktober 2009. Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH.01.02. tahun 2009.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Bank memiliki 83 kantor cabang (termasuk 20 kantor cabang *syariah*), 222 cabang pembantu (termasuk 8 kantor cabang pembantu *syariah*), 111 kantor kas, 7 *payment point* dan 2.661 SOPP (*System on-line Payment Point/Kantor Pos on-line*).

b. Rekapitalisasi

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang penambahan penyertaan Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang penambahan modal Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp2.805.000, sehingga tambahan penyertaan Pemerintah keseluruhan menjadi sebesar Rp14.005.000. Penambahan modal tersebut dilakukan melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi Pemerintah untuk Bank sebesar Rp9.803.500 dan Rp4.201.500 masing-masing pada tanggal 25 Juli 2000 dan 31 Oktober 2000 (Catatan 27a).

1. GENERAL (continued)

a. Bank's establishment (continued)

The decision in the Extraordinary Stockholders' General Meeting to amend all of the Bank's articles of association to become a public company was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H.

Based on the decision above, the Bank's articles of association has been amended on October 13, 2009. The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its letter No. AHU-49309.AH.01.02. of 2009.

The Bank is domiciled in Jakarta and its head office is located at Jalan Gajah Mada No. 1, Central Jakarta.

As of December 31, 2010, the Bank has 83 branches (including 20 sharia branches), 222 sub-branches (including 8 sharia sub-branch), 111 cash office, 7 Payment Points and 2,661 SOPP (System on-line Payment Point/on-line Post office).

b. Recapitalization

On May 28, 1999, the government issued Government Regulation No. 52 of 1999 regarding the increase in the government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp11,200,000. On August 21, 2000, the government issued Government Regulation No. 68 of 2000 regarding the increase in the government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp2,805,000 so that the additional Government capital participation would total Rp14,005,000. The increase in the Government participation was settled through the issuance to the Bank of the government's recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 and Rp4,201,500 on July 25, 2000 and October 31, 2000, respectively (Note 27a).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Rekapitalisasi (lanjutan)

Pada tanggal 28 Februari 2001, Direksi Bank dan Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Manajemen yang berisikan antara lain bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi akhir Bank adalah sebesar Rp13.843.540 dan kelebihan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp161.460 harus dikembalikan kepada Pemerintah. Pada tanggal 5 November 2001, kelebihan obligasi rekapitalisasi tersebut dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

c. Penawaran umum obligasi Bank

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 14 kali penerbitan dan 1 kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN I/ BTN Bonds I	50.000	5 tahun/years	25 Juli 1994/ July 25, 1994	18,75% tetap/ 18.75% fixed
Obligasi BTN II/ BTN Bonds II	50.000	5 tahun/years	1 Juni 1995/ June 1, 1995	16,25% tetap/ 16.25% fixed
Obligasi BTN III/ BTN Bonds III	50.000	5 tahun/years	11 November 1996/ November 11, 1996	20,00% tetap/ 20.00% fixed
Obligasi BTN IV/ BTN Bonds IV	100.000	5 tahun/years	23 Januari 1998/ January 23, 1998	17,00% tetap/ 17.00% fixed

1. GENERAL (continued)

b. Recapitalization (continued)

On February 28, 2001, the Bank's directors and the Minister of Finance entered into a management contract which includes, among others, the total final recapitalization requirement of the Bank of Rp13,843,540 and the excess recapitalization bonds of Rp161,460 should be returned to the government. On November 5, 2001, the Bank returned such excess recapitalization bonds to the government.

As a result of the management contract, the Minister of Finance issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the determination of the final amount of the government's required capital contribution to the Bank amounting to Rp13,843,540 and implementation of the government's rights as a result of the additional contributed capital of the Republic of Indonesia to the capital of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk as a limited liability company in relation to the commercial banks recapitalization program through conversion to become 13,843,540 shares of stock which were issued by the Bank with a nominal value (full amount) of Rp1,000,000 per share. This regulation was applied retroactively to May 31, 2007.

c. Public offering of bonds

The Bank issued fourteen series of bonds and a series of subordinated bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2010, with the details as follows:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Penawaran umum obligasi Bank (lanjutan)

c. Public offering of bonds (continued)

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN VI/ BTN Bonds V	150.000	5 tahun/years	31 Juli 1998/ July 31, 1998	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 15.25% fixed for first and second years, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VII/ BTN Bonds VI	350.000	5 tahun/years	21 Desember 2000/ December 21, 2000	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.25% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VIII/ BTN Bonds VII	200.000	5 tahun/years	22 Juli 2001/ July 22, 2001	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.125% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VIII/ BTN Bonds VIII	400.000	5 tahun/years	18 Juli 2002/ July 18, 2002	14,15% tetap/ 14.15% fixed
Obligasi BTN IX/ BTN Bonds IX	750.000	5 tahun/years	2 Oktober 2008/ October 2, 2008	12,50% tetap/ 12.50% fixed
Obligasi BTN X/ BTN Bonds X	750.000	5 tahun/years	25 Mei 2009/ May 25, 2009	12,20% tetap/ 12.20% fixed
Obligasi BTN XI/ BTN Bonds XI	750.000	5 tahun/years	6 Juli 2010/ July 6, 2010	12,00% tetap/ 12.00% fixed
Obligasi BTN XII/ BTN Bonds XII	1.000.000	10 tahun/years	19 September 2016/ September 19, 2016	12,75% tetap/ 12.75% fixed
Obligasi BTN XIII A/ BTN Bonds XIII A	300.000	3 tahun/years	29 Mei 2012/ May 29, 2012	11,75% tetap/ 11.75% fixed
Obligasi BTN XIII B/ BTN Bonds XIII B	300.000	4 tahun/years	29 Mei 2013/ May 29, 2013	12,00% tetap/ 12.00% fixed
Obligasi BTN XIII C/ BTN Bonds XIII C	900.000	5 tahun/years	29 Mei 2014/ May 29, 2014	12,25% tetap/ 12.25% fixed
Obligasi BTN XIV/ BTN Bonds XIV	1.650.000	10 tahun/years	11 Juni 2020/ June 11, 2020	10,25% tetap/ 10.25% fixed
Obligasi Subordinasi BTN I/ Subordinated Bonds BTN I	250.000	10 tahun/years	25 Mei 2014/ May 25, 2014	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun ke enam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan/ 12.60% fixed for first year until fifth year, 22.60% fixed for sixth year until tenth year if the Bank does not exercise its option to buyback on the fifth year since the issuance date

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW.01/3104/DPR R/VI/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (nilai penuh) per saham.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Allocation/MESA). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lockup* selama enam bulan. Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in its Chairman letter No. PW.01/3104/DPR R/VI/2009 dated May 29, 2009, and was enacted by the government as stipulated by the Republic of Indonesia Government Regulation of No. 66 of 2009 and regulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of the stock ownership structure of the state through Initial Public Offering of the shares of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the registration statement submitted by the Bank relating to the Initial Public Offering of 6,353,999,999 ordinary shares Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 ordinary shares New Series B, at Rp500 (full amount) per share to the public, became effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, were listed and traded in the Indonesia Stock Exchange on December 17, 2009, with the selling price of Rp800 (full amount) per share.

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank implemented the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares for registered employees as of September 30, 2009. The MESA Program became effective on September 17, 2009 and all qualified employees took the program consisting of 226,928,500 Series B shares (with nominal value of Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering price of Rp800 per share) and a lock up period until six months. The share price discount for MESA program was recognized as the Bank's expense in 2009, amounting to 20% or Rp41,353 including the income tax expense.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan karyawan

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-29/MBU/2008 tanggal 22 Januari 2008, susunan dewan komisaris Bank pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama (merangkap komisaris independen)

Komisaris

Komisaris Independen

Komisaris

Komisaris Independen

Zaki Baridwan

Mulabasa Hutabarat

Subarjo Joyosumarto

Gatot Mardiwastito

Deswandhy Agusman*

* Diangkat berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan No. 2 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal 2 Agustus 2010

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-291/MBU/2007 tanggal 19 Desember 2007, susunan dewan direksi Bank adalah sebagai berikut:

2010*

Direktur Utama

Wakil Direktur Utama

Direktur Risk, Compliance & Human Capital

Direktur Financial, Strategic & Treasury

Direktur Mortgage & Consumer Banking

Direktur Housing & Commercial Banking

Iqbal Latanro

Evi Firmansyah

Sunarwa

Saut Pardede

Irman Alvian Zahiruddin

Purwadi

* Berdasarkan Ketetapan Direksi No. 04/DIR/DSP/2010 tanggal 1 Maret 2010.

2009

Direktur Utama

Wakil Direktur Utama

Direktur Kepatuhan

Direktur Treasury dan Syariah

Direktur Keuangan

Direktur Kredit

Iqbal Latanro

Evi Firmansyah

Sunarwa

Saut Pardede

Irman Alvian Zahiruddin

Purwadi

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Bank adalah sebesar Rp39.592 dan Rp34.518 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang diadakan pada tanggal 19 Mei 2010 dan 8 Mei 2009, Bank membagikan *tantiem* masing-masing sebesar Rp11.157 dan Rp12.940 bagi dewan komisaris dan direksi yang dialokasikan dari laba bersih yang dibayarkan masing-masing pada tanggal 21 Mei 2010 dan 12 Mei 2009 (Catatan 34).

1. GENERAL (continued)

e. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and employees

Based on the Decision Letter No. KEP-29/MBU/2008 dated January 22, 2008 of the Ministry of State-owned Enterprises, the composition of the Bank's Board of Commissioners as of December 31, 2010 and 2009 is as follows:

President Commissioner - (also acting as Independent Commissioner)

Commissioner

Independent Commissioner

Commissioner

Independent Commissioner

* Appointed based on the Bank's annual General Stockholders' Meeting No. 2 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dated August 2, 2010

Based on the Decision Letter No. KEP-291/MBU/2007 dated December 19, 2007 of the Ministry of State-owned Enterprises, the composition of the Bank's Board of Directors is as follows:

***2010**

President Director

Vice President Director

Risk, Compliance & Human Capital Director

Financial, strategic & Treasury Director

Mortgage & Consumer Banking Director

Housing & Commercial Banking Director

* Based on Director's decision No. 04/DIR/DSP/2010 dated March 1, 2010.

2009

President Director

Vice President Director

Compliance Director

Treasury and Sharia Director

Finance Director

Credit Director

Salaries and other compensation benefits paid to the Boards of Directors and Commissioners of the Bank amounted to Rp39,592 and Rp34,518 for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively. In the Stockholders' General Meeting held on May 19, 2010 and May 8, 2009 the Bank distributed bonuses to the directors and commissioners amounting to Rp11,157 and Rp12,940, respectively, which were allocated from net income paid on May 21, 2010 and May 12, 2009 (Note 34).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 16/DIR/2009 tanggal 10 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

Ketua	A. Nazri Adlani	Chairman
Anggota	Moh. Hidayat	Member

Susunan Dewan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 189/DIR/2010 tanggal 24 Agustus 2010 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No. 30/KOM/BTN/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010) adalah sebagai berikut:

Ketua	Zaki Baridwan	Chairman
Anggota	Gatot Mardiwasiso	Member
Anggota	Lifransyah Gumay	Member
Anggota	Muchamad Safruddin	Member

Susunan Dewan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 112/DIR/2008 tanggal 7 Agustus 2008 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No. 42/KOM/BTN/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008) adalah sebagai berikut:

Ketua	Zaki Baridwan	Chairman
Anggota	Gatot Mardiwasiso	Member
Anggota	Lifransyah Gumay	Member
Anggota	Dewi Wulan Sari	Member

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah 5.312 orang dan 4.085 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

e. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and employees (continued)

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2010 and 2009 based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 16/DIR/2009 dated February 10, 2009 is as follows:

Based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 30/KOM/BTN/VIII/2010 dated August 4, 2010 followed by the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 189/DIR/2010 dated August 24, 2010, the composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2010 is as follows:

Based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 42/KOM/BTN/VII/2008 dated July 16, 2008 followed by the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 112/DIR/2008 dated August 7, 2008, the composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2009 is as follows:

The Bank's permanent employees as of December 31, 2010 and 2009 totalled 5,312 and 4,085 persons (unaudited), respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan praktek yang lazim berlaku dalam industri perbankan serta pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK) Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan" yang terlampir dalam lampiran keputusan ketua BAPEPAM - LK No. KEP.06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 serta Surat Edaran BAPEPAM - LK No. SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang "Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, dan Perbankan" juga standar akuntansi dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia.

Bank menerapkan PAPI (versi 2008) dalam mempersiapkan laporan keuangan tahun 2010 dan menerapkan PAPI (versi 2001) dalam mempersiapkan laporan keuangan tahun 2009.

PSAK No. 31, "Akuntansi Perbankan", yang telah diterapkan Bank dalam mempersiapkan laporan keuangan tahun 2009, telah dicabut efektif tanggal 1 Januari 2010 berkaitan dengan penerapan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", efektif pada 1 Januari 2010 (Catatan 2d).

Untuk cabang Bank yang didasarkan pada prinsip perbankan *syariah*, laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 - 106 tentang Penyajian Laporan Keuangan *Syariah*, Akuntansi *Murabahah*, Akuntansi *Salam*, Akuntansi *Istishna*, Akuntansi *Mudharabah*, dan Akuntansi *Musarakah*, menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan *Syariah* yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap topik-topik tersebut dan Pedoman Akuntansi Perbankan *Syariah* Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan atas kerjasama IAI dengan Bank Indonesia.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of financial statement presentation

The financial statements have been prepared using the prevailing banking industry practices and accounting and reporting guidelines prescribed by the Indonesian Banking Regulatory Authority and the Indonesian Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM - LK), consisting mainly of BAPEPAM - LK Rule No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation Guidelines" included in appendix of the Chairman BAPEPAM - LK decision No. KEP.06/PM/2000 dated March 13, 2000 and Circular Letter No. SE-02/BL/2008 dated January 31, 2008 regarding the "Guidelines on Financial Statement Presentation and Disclosures for Issuers or Public Companies in General Mining, Oil and Gas, and Banking Industry" as well as accounting standards and Accounting Guidelines for Indonesian Banking Sector (PAPI) issued by the Indonesian Institute of Accountants.

The Bank applied the PAPI (2008 version) in the preparation of the 2010 financial statements and applied the PAPI (2001 version) in the preparation of the 2009 financial statements.

SFAS No. 31, "Accounting for the Banking Industry", which was applied by the Bank in the 2009 financial statements, has been revoked effective January 1, 2010 in connection with the adoption of SFAS No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and SFAS No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures", also effective on January 1, 2010 (Note 2d).

The financial statements of the Bank's *sharia* branches have been presented in conformity with PSAK No. 101-106 concerning *Sharia* Financial Statements Presentation, Accounting for *Murabahah*, Accounting for *Salam*, Accounting for *Istishna*, Accounting for *Mudharabah* and Accounting for *Musarakah* which superseded PSAK No. 59, "Accounting for *Sharia* Banks", in relation to the recognition, measurement, presentation and disclosures for the above-mentioned topics and the Accounting Guidelines for Indonesian *Syariah* Banks (PAPSI) issued under the cooperation of IAI with Bank Indonesia.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain dan disusun dengan dasar akrual (kecuali tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai *non-performing* sebelum 1 Januari 2010, pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*).

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Sejak tanggal 1 Januari 2010, untuk keperluan laporan arus kas, yang termasuk kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya. Sebelum 1 Januari 2010, kas dan setara kas hanya terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain yang tidak dibatasi dan tidak digunakan sebagai jaminan. Perubahan tersebut terjadi sehubungan dengan dicabutnya PSAK No. 31, "Akuntansi Perbankan", efektif tanggal 1 Januari 2010 dan PAPI tahun 2001.

Untuk tujuan komparatif, akun-akun yang terdiri dari kas dan setara kas di dalam laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah direklasifikasi (Catatan 48).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of financial statement presentation (continued)

The financial statements have been prepared on a historical cost basis, unless otherwise stated, and under the accrual basis of accounting (except for interest receivable on non-performing earning assets prior to January 1, 2010, revenue from istishna and profit sharing for mudharabah and musyarakah financing).

The statements of cash flows have been prepared based on the modified direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Starting January 1, 2010, for the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with other banks and Certificates of Bank Indonesia maturing 3 (three) months since acquisition date, and not used as collateral for borrowings and not restricted in use. Before January 1, 2010, cash and cash equivalents consist only of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks which are not restricted and not used as collateral. This change was made in conformity with the revocation of PSAK No. 31, "Accounting for the Banking Industry", effective January 1, 2010 and PAPI year 2001.

For comparative purposes, the accounts comprising cash and cash equivalents in the statements of cash flows for the year ended December 31, 2009 had been reclassified (Note 48).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan (lanjutan)

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan rupiah.

b. Kuasi-Reorganisasi

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", Kuasi-Reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan kewajibannya berdasarkan nilai wajar. Dengan Kuasi-Reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan neraca yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasi menjadi nihil.

Estimasi nilai wajar aset dan kewajiban dalam rangka Kuasi-Reorganisasi ditentukan berdasarkan informasi terbaik sesuai dengan karakteristik aset dan kewajiban yang bersangkutan atau nilai pasar aset dan kewajiban yang bersangkutan. Apabila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, estimasi nilai sekarang atau arus kas diskontoan. Untuk aset dan kewajiban tertentu, penilaian dilakukan sesuai PSAK terkait.

Sebagai hasil dari Kuasi-Reorganisasi per tanggal 31 Mei 2007, saldo defisit Bank sebesar Rp14.226.290 dieliminasi ke akun saldo laba telah ditentukan penggunaannya, keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual dan obligasi pemerintah, selisih penilaian kembali aset tetap dan modal ditempatkan dan disetor penuh.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of financial statement presentation (continued)

The reporting currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statements are rounded in millions of Rupiah.

b. Quasi-Reorganization

Based on PSAK No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its balance sheet showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated.

The fair value estimation for assets and liabilities under a quasi-reorganization is determined based on the best available information according to the characteristics of the related assets and liabilities or the market value for the related assets and liabilities. If the market value is not available, the fair value estimation is conducted by considering the value of similar assets, present value estimation, or discounted cash flows. For certain assets and liabilities, the valuation is conducted according to the related PSAK's.

As a result of the quasi-reorganization as of May 31, 2007, the Bank's deficit balance amounting to Rp14,226,290 was eliminated against the net amount of the appropriated retained earnings, unrealized gain (loss) on available-for-sale securities and government bonds, revaluation increment on premises and equipment and issued and fully paid capital stock.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Semua transaksi signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan Pemerintah, termasuk dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dan Lembaga Penjaminan Simpanan tidak diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK tersebut.

d. Aset keuangan dan kewajiban keuangan

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, obligasi pemerintah, kredit yang diberikan dan aset lain-lain (piutang lain-lain dan piutang bunga)

Kewajiban keuangan Bank terdiri dari kewajiban segera, simpanan, simpanan dari bank lain, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali dan kewajiban lain-lain (setoran jaminan dan hutang bunga).

Bank menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, yang menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai" dan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with certain parties which are regarded as having related party relationships as defined under PSAK No. 7, "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties, whether or not made under the terms and conditions similar to those granted to third parties, are disclosed in the notes to the financial statements. Transactions with state-owned/region-owned entities, and companies owned or controlled by the government including entities related to the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) or Government Guarantee Unit (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) and Deposit Guarantee Institution (Lembaga Penjaminan Simpanan), are not disclosed as transactions with related parties in accordance with the above-mentioned PSAK.

d. Financial assets and liabilities

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, government bonds, loans and other assets (other receivables and interests receivable).

The Bank's financial liabilities consist of current liabilities, deposits, deposits from other banks, securities issued, fund borrowings, securities sold under repurchase agreement, other liabilities (security deposits and accrued interest).

The Bank adopted PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" and PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" with effect beginning January 1, 2010, which replaced PSAK No. 55 (Revised 1999), "Accounting for Derivatives and Hedging Activities" and PSAK No. 50, "Accounting for Investments in Certain Debt and Equity Securities", respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

Dampak penyesuaian transisi atas penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dijelaskan pada Catatan 3.

(i) Klasifikasi

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Bank mengklasifikasi aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu aset keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok yang diperdagangkan;
- Kredit yang diberikan dan piutang;
- Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo;
- Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Kewajiban keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu kewajiban keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan kewajiban keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
- Kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Kategori aset dan kewajiban diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset dan kewajiban keuangan yang diperoleh atau dimiliki Bank terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

The effect of the transitional adjustments on the initial adoption of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006) is discussed in Note 3.

(i) Classification

Starting January 1, 2010, the Bank classified its financial assets in the following categories on initial recognition:

- Financial assets held at fair value through profit or loss, which have 2 (two) sub-classifications, i.e. financial assets designated as such upon initial recognition and financial assets classified as held-for-trading;
- Loans and receivables;
- Held-to-maturity investments;
- Available-for-sale financial assets.

Financial liabilities are classified into the following categories on initial recognition:

- Financial liabilities at fair value through profit or loss, which has 2 (two) sub-classifications, i.e. those designated as such upon initial recognition and those classified as held-for-trading;
- Other financial liabilities.

Financial instruments at fair value through profit or loss - held-for-trading are those financial assets and liabilities that the Bank acquires or incurs principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or holds as part of a portfolio that is managed together for short-term profit or position taking.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif. Aset dan kewajiban dalam kelompok ini dicatat pada nilai wajar dalam neraca dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh untuk dijual segera dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok investasi tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Investasi dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Investasi yang dimiliki untuk periode yang tidak dapat ditentukan tidak dikategorikan dalam klasifikasi ini.

Kategori tersedia untuk dijual terdiri dari aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak dikelompokkan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya. Setelah pengukuran awal, investasi tersedia untuk dijual diukur menggunakan nilai wajar dengan laba atau rugi yang diakui sebagai bagian dari ekuitas sampai dengan investasi dihentikan pengakuannya atau sampai investasi dinyatakan mengalami penurunan nilai dimana akumulasi laba

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

Derivatives are also categorised under this sub-classification unless they are designated as effective hedging instruments. Assets and liabilities classified under this category are carried at fair value in the balance sheets, with any gains or losses being recognized in the statements of income.

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and are not quoted in an active market, except:

- those that the Bank intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the Bank upon initial recognition designates at fair value through profit or loss;
- those that upon initial recognition designated as available-for-sale investments; or
- those for which may not be recovered all of its initial investment substantially, other than because of credit deterioration, which shall be classified as available-for-sale.

Held-to-maturity investments consist of non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturity which the Bank has the positive intention and ability to hold until maturity. Investments intended to be held for an undetermined period of time are not included in this classification.

The available-for-sale category consists of non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in one of the other categories of financial assets. After initial recognition, available-for-sale investments are measured at fair value with gains or losses being recognized as part of equity until the investment is derecognized or until the investment is determined to be impaired at which time the cumulative gains or losses previously reported in equity is included in the statements of income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

atau rugi sebelumnya dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan dalam laporan laba rugi. Hasil efektif dan (bila dapat diaplikasikan) hasil dari nilai tukar dinyatakan kembali untuk investasi tersedia dijual dan dilaporkan pada laporan laba rugi.

The effective yield and (where applicable) results of foreign exchange restatement for available-for-sale investments are reported in the statements of income.

(ii) Pengakuan awal

(ii) Initial recognition

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way purchases) are recognized on the settlement date.

b. Aset keuangan dan kewajiban keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau kewajiban keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

b. Financial assets and liabilities are initially recognised at fair value plus, for those financial assets not at fair value through profit and loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

(iii) Subsequent measurement

a. Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

a. Available-for-sale financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently carried at fair value.

b. Kredit yang diberikan dan piutang serta investasi dimiliki hingga jatuh tempo dan kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

b. Loans and receivables and held-to-maturity investments and other financial liabilities are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Penghentian pengakuan

(iv) Derecognition

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

a. Financial assets are derecognized when:

- *The rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

(iv) Derecognition (continued)

- Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan
- (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*), dan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut

- The Bank has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass through arrangement'; and

- Either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a "pass through arrangement", and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

- b. Kewajiban keuangan dihentikan pengakuannya jika kewajiban keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

- b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are released or cancelled or have expired.

Jika suatu kewajiban keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu kewajiban yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

(iv) Derecognition (continued)

Bank menghapusbukukan kredit atau aset produktif lainnya ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di neraca, sedangkan jika setelah tanggal neraca dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya.

The Bank writes off loans or other financial assets when there is no realistic prospect of collection in the near future or the Bank's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the balance sheet, if recovered in current year and are recognized in the statements of income as other operational income, if recovered after balance sheet date.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

(v) Income and expense recognition

a. Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

a. For available-for-sale securities and financial assets and liabilities measured at amortized cost, interest income and interest expense is recognised in the statement of income using the effective interest method.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are included in the statements of income.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui secara langsung dalam ekuitas, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

Gains and losses arising from the changes in fair value of available-for-sale financial assets other than foreign exchange gains and losses are recognised directly in equity, until the financial asset is derecognised or impaired.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

At the time the financial asset is derecognised or impaired, the cumulative gains or losses previously recognised in equity is recognised in the statements of income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

(vi) Reclassification of financial assets

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan.

The Bank shall not reclassify a financial instrument into or out of the fair value through profit or loss category while it is held or issued.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dimana:

The Bank cannot classify financial assets as held-to-maturity investments, if in the current year or in the 2 (two) preceding years, held-to-maturity investments have been sold or reclassified in more than an insignificant amount before due date (more than an insignificant amount if compared to the total amount of held-to-maturity investmentst), unless that sale or reclassification are:

- a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b. terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank.

- a. conducted when the financial assets are close to maturity date or repurchase date where the change of interest rate will not affect significantly its financial assets' fair value;
- b. made after the Bank has obtained substantially all the principal amount of financial assets in accordance with the payment schedule or the Bank has obtained early payment; or
- c. related to specific events that occurred out of control of the Bank, non-recurring, and cannot be reasonably anticipated fairly by the Bank.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya.

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized fair value change are reported in equity up to derecognition of such financial assets.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan kewajiban keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset keuangan atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu aset dapat dipertukarkan, atau suatu kewajiban dapat diselesaikan, diantara para pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar pada tanggal pengukuran, termasuk didalamnya adalah nilai pasar dari *Interdealer Market Association (IDMA)* atau harga yang diberikan oleh *broker (quoted price)* dari Bloomberg dan Reuters pada tanggal pengukuran.

Jika tersedia, Bank mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulating agency*) dan merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are off set and the net amount is presented in the balance sheet when, and only when, the Bank has a legal right to off set the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

(viii) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognised and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(ix) Fair value measurement

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, and willing parties in an arm's length transaction on the measurement date, including the market value from the Interdealer Market Association (IDMA) or the price given by brokers (quoted price) from Bloomberg and Reuters on the measurement date.

When available, the Bank measures the fair value of an instrument using quoted prices in an active market for that instrument. A market is regarded as active if quoted prices are readily available from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulating agency and represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Aset keuangan dan kewajiban keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Bank menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, kuotasi harga pasar yang sesuai bagi aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan biasanya sama dengan harga penawaran yang berlaku, sementara untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki adalah harga permintaannya. Jika Bank memiliki aset dan kewajiban dimana risiko pasarnya saling hapus, maka Bank dapat menggunakan nilai tengah dari pasar sebagai dasar untuk menentukan nilai wajar posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka atau neto (*net open position*), dimana yang lebih sesuai.

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Sejak 1 Januari 2010

Pada setiap tanggal neraca, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan yang tidak dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

If a market for a financial instrument is not active, the Bank determines the fair value using a valuation technique. Valuation techniques include using the recent arm's length transactions between knowledgeable, and willing parties (if available), reference to the current fair value of other instruments that are substantially the same and discounted cash flow analysis.

Starting January 1, 2010, the appropriate quoted market price for an asset held or liability to be issued is usually the current bid price and, for an asset to be acquired or liability held, the current offer or asking price. When the Bank has asset and liability with off setting market risk, the Bank can use middle-market prices to measure the fair value of off setting risk positions and apply bid or ask price to the net open positions as appropriate.

e. Allowance for impairment losses on financial assets

Starting January 1, 2010

At each balance sheet date the Bank assesses whether there is objective evidence that the financial assets not carried at fair value through profit and loss are impaired. Financial assets are impaired when there is objective evidence that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset, and that the loss event has an impact on the future cash flows on the asset that and be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of the impairment are as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2010 (lanjutan)

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- f. data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
 1. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
 2. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) dan 12 (dua belas) bulan, dan untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on assets (continued)

Starting January 1, 2010 (continued)

- a. significant financial difficulties by the issuer or debtor;
- b. breach of contract, like defaults or deferred principal payment or interest;
- c. the creditor, with economic or legal reason in connection with the financial difficulties of the debtor, provided relief (concession) to the debtor and that relief will not be given to the debtor if the debtor does not have such difficulties;
- d. there is a possibility that the debtor will be declared bankrupt or perform other financial reorganization;
- e. the loss of an active market for the financial assets resulting to financial difficulties; or
- f. observable data has indicated that there is impairment on the future cash flows of the financial assets since the initial measurement, although the impairment cannot be identified to the individual financial assets in that group, including:
 1. deterioration of the payment status of the debtor in that group; and
 2. national or local economic condition is related to the default on assets in that group.

The estimation of period between the occurrence of events and identification of loss are determined by management for every identified portfolio. Generally, that period varies between 3 (three) and 12 (twelve) months, and for specific cases it needs longer period.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2010 (lanjutan)

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria diatas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) Kredit yang diberikan dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 yang direstrukturisasi.

Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai.
2. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.
3. Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Starting January 1, 2010 (continued)

The Bank first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Bank determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Accounts that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in the collective assessment of impairment.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value and objective evidence of impairment;
2. Restructured loans which individually have significant value.

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) loans with amount equal or greater than Rp5,000 with collectibility classification as substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured loans with amount equal to or greater than Rp5,000.

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

1. Loans which individually have significant value and there is no objective evidence of impairment;
2. Loans which individually have insignificant value;
3. Restructured loans which individually have insignificant value.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2010 (lanjutan)

Berdasarkan kriteria di atas, penilaian secara kolektif dilakukan untuk: (a) Kredit yang diberikan dengan nilai sama dengan atau lebih besar dari Rp5.000 dengan kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus serta tidak direstrukturisasi; atau (b) Kredit yang diberikan dengan nilai dibawah Rp5.000.

Dalam menentukan penurunan nilai secara kolektif, Bank menerapkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP (SE-BI) tanggal 8 Desember 2009, "Perubahan atas Surat Edaran No. 11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ("PAPI)". Surat Edaran Bank Indonesia tersebut memuat penyesuaian atas PAPI 2008 tentang ketentuan transisi atas estimasi penurunan nilai kredit secara kolektif bagi bank yang memenuhi syarat.

Sesuai dengan lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP (SE-BI) tanggal 8 Desember 2009, Bank menentukan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit secara kolektif dengan mengacu pada pembentukan penyisihan umum dan penyisihan khusus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aset bank umum. Sesuai dengan SE-BI tersebut ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dapat diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2011.

Penyisihan kolektif untuk kredit yang dikelompokkan sebagai dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet dihitung setelah dikurangi dengan nilai agunan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai berdasarkan nilai tercatat (biaya perolehan amortisasi).

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika kredit yang diberikan atau surat-surat berharga dan obligasi pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Starting January 1, 2010 (continued)

Based on the above criteria, the Bank performs collective assessment for: (a) loans with amount equal to or greater than Rp5,000 with collectibility classification as current and special mention, and have never been restructured; or (b) loans with amount below Rp5,000.

In assessing collective impairment, the Bank applies Bank Indonesia Circular Letter No. 11/33/DPNP (SE-BI) dated December 8, 2009, "The Amendment to the Bank Indonesia Circular Letter No. 11/4/DPNP dated January 27, 2009 on the Implementation of Accounting and Reporting Guidelines for the Indonesian Banking Industry". The Bank Indonesia Circular Letter contains the amendment to PAPI 2008 regarding the transitional provision on estimation of collective impairment of loans for eligible banks.

In accordance with the appendix to the Bank Indonesia Circular Letter No. 11/33/DPNP (SE-BI) dated December 8, 2009, the Bank determines the allowance for collective impairment losses of loans by referring to general allowance and specific allowance in accordance with Bank Indonesia regulations regarding the assessment of commercial banks' asset quality. In accordance with the aforementioned SE-BI, the transition rule for collective impairment calculation on loans can be applied until December 31, 2011.

Collective allowance for loans classified as special mention, substandard, doubtful and loss is calculated after deducting the value of allowable collateral in accordance with Bank Indonesia regulations. The calculation of allowance for impairment losses is based on carrying amount (amortized cost).

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective interest rate. If loans or held-to-maturity marketable securities and government bonds have variable interest rate, the discount rate used to measure loss on impairment is the applicable

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2010 (lanjutan)

tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Sebagai panduan praktis, Bank dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi, dimana perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian penurunan nilai yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai. Ketika peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca menyebabkan jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

Untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, pada setiap tanggal neraca, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Kerugian penurunan nilai atas surat-surat berharga yang tersedia untuk dijual diakui dengan mengeluarkan kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas ke dalam laporan laba rugi. Jumlah kerugian kumulatif yang dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan, setelah dikurangi dengan nilai pelunasan pokok dan amortisasi, dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi. Perubahan cadangan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

Starting January 1, 2010 (continued)

effective interest rate specified in the contract.

As a practical guidance, the Bank can measure the impairment based on the instrument's fair value by using observable market price, where the calculation of present value of estimated future cash flows on collateralised financial assets reflects the generated cash flow from the foreclosure of collateral net of costs to acquire and sell the collateral, regardless whether such acquisition occurs or not. Impairment losses are recognized in the statements of income and reflected in the allowance for impairment losses account as a deduction from financial assets carried at amortized cost.

Interest income on the impaired financial assets continues to be recognized using the original rate of interest used to discount the future cash flows for the purpose of measuring the impairment loss. When subsequent event causes the amount of impairment loss to decrease, the impairment loss is reversed through the statements of income.

For financial assets classified as available-for-sale, the Bank assesses at each balance sheet date whether there is objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.

Impairment losses on available-for-sale marketable securities are recognized by transferring the cumulative loss that has been recognized directly in equity to the statements of income. The cumulative loss that has been removed from equity and recognized in the statements of income is the difference between the acquisition cost, net of any principal repayment and amortization, and the current fair value, less any impairment loss previously recognized in the statements of income. Changes in impairment provision attributable to time value are

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas asset keuangan (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2010 (lanjutan)

penurunan nilai yang diatribusikan ke dalam nilai waktu tercermin sebagai bagian dari pendapatan bunga.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar surat-surat berharga dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual yang mengalami penurunan nilai meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan dan pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi.

Jika persyaratan kredit yang diberikan, piutang atau surat-surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo dinegosiasi ulang atau dimodifikasi karena debitur atau penerbit mengalami kesulitan keuangan, maka penurunan nilai diukur dengan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah.

Jika, pada suatu periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur atau penerbit), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan.

Sesuai surat edaran Bank Indonesia No. 12/516/DPNP/DPnP tanggal 21 September 2010, terkait dengan implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 tentang Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, khususnya mengenai pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), ditegaskan kembali bahwa terhadap Transaksi Rekening Administratif (TRA) dan Aktiva Non Produktif tetap diwajibkan untuk membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) sesuai PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible impairment on financial assets (continued)

Starting January 1, 2010 (continued)

reflected as a component of interest income.

If in a subsequent period, the fair value of an impaired available-for-sale marketable securities and government bonds increases and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statements of income, the impairment loss is reversed, with the amount of reversal recognized in the statements of income.

If the requirements on loans receivable or held-to-maturity marketable securities are renegotiated or modified since the debtor or issuer has financial difficulties, the impairment is measured with the original effective interest rate used before the requirements were changed.

If, in the next period, the amount of allowance for impairment losses is decreased and the decrease can be related objectively to an event that occurred after the recognition of the impairment loss (i.e. upgrade debtor's or issuer's collectibility), the impairment loss that was previously recognized has to be reversed by adjusting the allowance account.

Based on Bank Indonesia Circular letter No. 12/516/DPNP/DPnP dated September 21, 2010, relating to the implementation of Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 55 on Financial Instruments: Recognition and Measurement, specifically for the provision of allowance for impairment losses, it is reiterated that allowance for losses on administrative accounts and non-earning assets shall be established based on PBI No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks which has been amended by Regulation No. 11/2/PBI/2009 (Asset Quality PBI).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2010 (lanjutan)

Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 11/2/PBI/2009 (PBI Kualitas Aktiva).

Untuk aset keuangan unit usaha (cabang) Bank yang bergerak dalam bidang Perbankan Syariah, Bank menerapkan PBI No. 8/21/PBI/2006, tanggal 5 Oktober 2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 9/9/2007 tanggal 18 Juni 2007 dalam menentukan kerugian penurunan nilai.

Sebelum 1 Januari 2010

Bank membentuk penyisihan penghapusan aset produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi berdasarkan review dan evaluasi terhadap eksposur tiap debitur. Dalam kaitan tersebut, ketentuan Bank Indonesia (BI) tentang Pembentukan Penyisihan Kerugian Aset dan Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi yang mempunyai risiko kredit digunakan sebagai acuan. Aset produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, obligasi pemerintah, tagihan swap suku bunga, kredit yang diberikan, pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah serta komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit.

Aset non-produktif adalah aset Bank yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk properti terbengkalai dan *suspense accounts*.

Komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit terdiri dari fasilitas kredit yang belum ditarik dan garansi yang diterbitkan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Bank mengklasifikasikan aset produktif ke dalam lima kategori. aset produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus" sedangkan aset produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan sebagai "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible impairment on financial assets (continued)

Starting January 1, 2010 (continued)

For the financial assets of the unit (branch) that is engaged in Sharia Banking, Bank Syariah applies PBI No. 8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 as amended by PBI No. 9/9/2007 dated June 18, 2007 for determination of impairment loss.

Prior to January 1, 2010

The Bank provides allowance for losses on its earning assets and estimated losses on commitments and contingencies based upon a regular review and evaluation of individual debtor exposures. In connection with this provision, the requirement of Bank Indonesia (BI) regarding the Allowance for Losses on Assets and Estimated Losses on Commitments and Contingencies bearing credit risk are used as reference. Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with other banks, securities, government bonds, interest rate swap receivables, loans, sharia financing/receivables, and commitments and contingencies bearing credit risk.

Non-earning assets are the Bank's assets that bear potential loss, such as abandoned properties and suspense accounts.

Commitments and contingencies that bear credit risk consist of unused loan facilities and guarantees issued.

Based on Bank Indonesia regulation, the Bank classifies its earning assets into five categories. Performing earning assets are classified as "Current" and "Special Mention"; while non-performing earning assets are classified as "Substandard", "Doubtful" and "Loss".

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2010 (lanjutan)

Pengklasifikasian aset produktif ke dalam satu dari lima kategori tersebut didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 atas Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang mana pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. Dalam penerapan peraturan ini, Bank mengklasifikasikan aset produktif berdasarkan evaluasi manajemen Bank atas prospek usaha, kinerja (*performance*), kemampuan membayar setiap debitur dan juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aset produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit. Pengklasifikasian kualitas aset produktif untuk kredit dan penyediaan dana lain sampai dengan jumlah Rp1.000, kredit usaha kecil (KUK) didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, serta kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu sampai dengan jumlah Rp1.000 didasarkan atas ketepatan debitur pembayaran pokok atau bunga.

Jumlah minimum penyisihan kerugian aset produktif, aset non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit dihitung dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

Pembentukan jumlah minimum penyisihan kerugian aset produktif serta estimasi komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit berdasarkan peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Penyisihan umum sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar kecuali untuk aset produktif dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Hutang Pemerintah (Obligasi Rekapitalisasi dan Obligasi Pemerintah lainnya) dan bagian aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan,

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible impairment on financial assets (continued)

Prior to January 1, 2010 (continued)

The classification of earning assets into one of the five categories is based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding valuation of the Quality of Assets in Commercial Banks, wherein certain provisions have been amended by PBI No. 8/2/PBI/2006 dated January 30, 2006 and No. 9/6/PBI/2007 dated March 30, 2007, and PBI No. 11/2/PBI/2009 dated January 29, 2009. In the implementation of these regulations, the Bank classifies its earning assets based on management's evaluation on the debtor's business prospects, performance, ability to repay and also after considering other factors, such as classification based on the results of Bank Indonesia's examination, classification by other commercial banks for earning assets given by more than one bank and the availability of the debtor's audited financial statements. The classification of the quality of earning assets for loans and other funding for amounts of up to Rp1,000, loans to small-scale businesses based on the applicable Bank Indonesia regulation, and loans and other funding for debtors in certain locations for business provisions existing in certain region for amounts of up to Rp1,000 is based on the debtor's compliance with the schedule of payment for principal and interest.

The minimum amount of allowance for possible losses on earning assets, non-earning assets and estimated losses on commitments and contingencies which have credit risks is calculated in accordance with the Bank Indonesia regulations mentioned above.

The recognition of the minimum allowance for possible losses on earning assets and estimated losses on commitments and contingencies with credit risks based on such Bank Indonesia guidelines is as follows:

- 1). General allowance at the minimum of 1% of earning assets classified as current, excluding earning assets in the form of Bank Indonesia certificates (SBI), government bonds (recapitalization bonds and other government bonds) and part of earning assets pledged with cash collateral, in the form of current deposit, time deposit, savings deposit, guarantee payment, gold, SBI, government

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

e. Allowance for possible impairment on financial assets (continued)

Sebelum 1 Januari 2010 (lanjutan)

Prior to January 1, 2010 (continued)

emas, SBI, Surat Hutang Pemerintah, jaminan Pemerintah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *standby letter of credit* dari *prime bank* yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP)* atau *International Standard Practices (ISP)* yang berlaku.

debentures, guarantee by the Republic of Indonesia according to the prevailing regulations, standby letter of credit from prime bank issued in accordance with the prevailing Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP) or International Standard Practices (ISP).

- 2). Penyisihan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
- 5% dari aset produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan
 - 15% dari aset produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi agunan
 - 50% dari aset produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan
 - 100% dari aset produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan.

- 2). *Special reserve at the minimum of:*
- 5% of earning assets classified as special mention, net of collateral*
 - 15% of earning assets classified as substandard, net of collateral*
 - 50% of earning assets classified as doubtful, net of collateral*
 - 100% of earning assets classified as loss, net of collateral.*

Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan penyisihan kerugian aset hanya dilakukan untuk aset produktif saja. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang ditetapkan berdasarkan nilai terendah antara nilai agunan yang dapat diperhitungkan dengan nilai pengikatan agunan dimana nilai maksimal adalah sebesar nilai pengikatan agunan.

The use of collateral value as deductible factor in calculating allowance for possible losses is only made on earning assets. The value of deductible collaterals is based on the lower value between the collateral value and the pledged value, with a maximum amount equal to the pledged value.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan kerugian aset produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi terdiri atas surat berharga dan saham yang

The value of collaterals that can be calculated as deduction in the form of allowance for possible losses on earning assets and estimated losses on commitments and contingencies consists of the maximum amount of 50% of the recorded value at the

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2010 (lanjutan)

aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan, persentase tertentu dari tanah, gedung, rumah tinggal, mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan dan resi gudang yang laporan penilaiannya tidak melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau tidak melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan dari tanggal neraca apabila jaminannya berupa tanah atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal yang penilaiannya dilakukan oleh penilai independen. Penilaian untuk plafon kredit diatas Rp5 miliar dilakukan oleh penilai independen.

Estimasi kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit disajikan di sisi kewajiban pada neraca.

Saldo aset produktif dihapuskan atas beban masing-masing penyisihan kerugian pada saat manajemen Bank berpendapat bahwa aset tersebut sudah tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan pembayaran aset produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan penyisihan kerugian selama periode berjalan. Jika terdapat kelebihan dari penerimaan pokok kredit yang dihapusbukukan, kelebihannya diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi.

Sejak dan sebelum 1 Januari 2010

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif dan penentuan kualitas aset produktif cabang syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 yang mana pasal-pasal tertentu telah diamandemen dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Allowance for possible impairment on financial assets (continued)

Prior to January 1, 2010 (continued)

end of the month of securities and shares of stock actively traded in the stock exchange in Indonesia or have investment rating, certain percentage of land, building, residential house, machine attached to a land, airplane, ship, land vehicles, inventory and warehouse receipt, with appraisal reports dated not more than 24 (twenty-four) months or not more than 30 (thirty) months from the balance sheet date if the collaterals are in the form of land or residential building appraised by an independent appraiser. The appraisal is required to be made by an independent appraiser for principal loans above Rp5 billion.

Estimated losses on commitments and contingencies which have credit risks are presented in the liabilities section of the balance sheets.

The outstanding balances of earning assets are written off against the respective allowance for possible losses when the assets are determined by the Bank's management to be definitely uncollectible. Recovery of earning assets previously written off is recorded as an addition to the allowance for possible losses during the current period. If there is an excess from the recovery of loan principal previously written off, the excess is recorded as interest income in the statement of income.

Starting and prior to January 1, 2010

As of December 31, 2010 and 2009, the guidance for the recognition of allowance for possible losses and the determination of classification of earning assets of sharia branch is based on Regulation No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 of Bank Indonesia regarding the Valuation of Quality of Earning Assets in Commercial Banks which Operate under Sharia Principles, effective on January 1, 2007 with certain provisions amended by PBI No. 9/9/PBI/2007 dated June 18, 2007.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Sejak tanggal 1 Januari 2010, giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, giro pada Bank Indonesia dinyatakan sebesar saldo giro, dan giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Sejak tanggal 1 Januari 2010, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia dan bank lain berupa deposito berjangka termasuk deposito berjangka *mudharabah*, *tabungan mudharabah* dan *inter-bank call money* yang disajikan sebesar nilai penempatan Bank yang tertera dalam kontrak dikurangi penyisihan kerugian.

h. Efek-efek dan obligasi pemerintah

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi dan obligasi subordinasi.

Obligasi pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah RI termasuk obligasi rekapitalisasi yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bank umum.

Efek-efek syariah diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo.

Sejak 1 Januari 2010

Kecuali untuk efek-efek syariah yang masih menggunakan perlakuan akuntansi sebelumnya, surat berharga dan obligasi pemerintah pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, efek-efek dan obligasi pemerintah dicatat sesuai kategorinya, yaitu tersedia untuk dijual, dimiliki hingga jatuh tempo atau nilai wajar melalui laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Starting January 1, 2010, current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

Prior to January 1, 2010, current accounts with Bank Indonesia are stated at the outstanding balance, and current accounts with other banks are stated at the outstanding balance less allowance for impairment losses.

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

Starting January 1, 2010, placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

Prior to January 1, 2010, placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia and other banks in the form of time deposits including *mudharabah* time deposits, *mudharabah* savings and *inter-bank call money* which are stated at the amount placed by the Bank or at the contract amount, net of allowance for possible loss.

h. Securities and government bonds

Securities consist of securities traded in the capital market and money market, such as Bank Indonesia Certificates (SBI), bonds and subordinated bonds.

Government bonds are bonds issued by the Indonesian Government including recapitalization bonds that are issued by the government for general bank recapitalization.

Sharia marketable securities are classified as held-to-maturity investments.

Starting January 1, 2010

Except for sharia securities which are measured using the previous accounting treatment, securities and government bonds are initially measured at fair value. Subsequently securities and government bonds are accounted for depending on their classification as either available-for-sale, held-to-maturity or fair value through profit or loss.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan obligasi pemerintah (lanjutan)

Sejak 1 Januari 2010 (lanjutan)

Penilaian efek-efek dan obligasi pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Bank tidak mengklasifikasikan efek-efek dan obligasi pemerintah sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya Bank telah menjual atau mereklasifikasi efek-efek dan obligasi pemerintah dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than an insignificant*) sebelum jatuh tempo selain dari pada penjualan atau reklasifikasi yang telah dijelaskan dalam PSAK 55.

Untuk efek-efek dan obligasi pemerintah yang pada tanggal 1 Januari 2010, dipindahkan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat diakui secara langsung pada laporan laba rugi

2. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai investasi tersedia untuk dijual dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi.
3. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang dimiliki untuk diperdagangkan dinyatakan pada nilai wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and government bonds (continued)

Starting January 1, 2010 (continued)

Valuation of securities and government bonds are stated based on the classification of the securities as follows:

1. Held-to-maturity securities and government bonds are carried at amortized cost using the effective interest rate method.

The Bank does not classify the securities and government bonds as financial assets held-to-maturity, if in the year or within the past two years previously the Bank has sold or reclassified securities and government bonds held-to-maturity more than an insignificant amount prior to maturity other than sales or reclassifications that have been described in SFAS 55.

For securities and government bonds which were reclassified as of January 1, 2010 from the held-to-maturity category to fair value through profit or loss category, the difference between the fair value and the carrying value is directly recognized in the statements of the income.

2. Securities and government bonds which are classified as available-for-sale investments are stated at fair value. Interest income is recognized in the statements of income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains or losses on securities and government bonds available-for-sale are recognized in income statement.
3. Fair value through profit or loss securities and government bonds are carried at fair value.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan obligasi pemerintah (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan. Pendapatan bunga dari efek-efek dan obligasi pemerintah dicatat dalam laporan laba rugi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak. Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi pemerintah tersebut dijual.

Untuk efek-efek dan obligasi pemerintah yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal neraca, kemudian disesuaikan dengan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut. Untuk efek-efek dan obligasi pemerintah yang tidak mempunyai harga penawaran pasar, estimasi atas nilai wajar surat-surat berharga dan obligasi pemerintah ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya adalah sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih surat-surat berharga dan obligasi pemerintah tersebut. Per 31 Desember 2010, Bank menggunakan harga penawaran pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal neraca sebagai nilai wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and government bonds (continued)

Unrealized gains or losses resulting from the increase or decrease in fair values are recognized in the current year statements of income. The interest income from securities and government bonds is recorded in the statement of income according to the terms of the contract. Upon sale of fair value through profit or loss securities and government bonds portfolio, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the securities and government bonds are sold.

For securities and government bonds that are actively traded in organized financial markets, fair value is generally determined by reference to quoted market bid prices by the stock exchanges at the date close to the balance sheet date, adjusted for transaction costs necessary to realize the assets. For securities and government bonds where there is no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which is substantially the same or is calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of securities and government bonds. As of December 31, 2010, the Bank used quoted market bid prices by the stock exchange at the date close to the balance sheet date as their fair value.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan obligasi pemerintah (lanjutan)

Pemindahan efek-efek dan obligasi pemerintah dari kelompok nilai wajar melalui laporan laba rugi ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat berdasarkan nilai wajar pada tanggal pemindahan.

Sebelum 1 Januari 2010

Efek-efek dan obligasi pemerintah disajikan sebesar nilai bersih setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai dan premium atau diskonto yang belum diamortisasi. Premium dan diskonto diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Penilaian efek-efek dan obligasi pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

1. Efek-efek dan obligasi pemerintah untuk diperdagangkan disajikan pada nilai wajar. Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari kenaikan/penurunan nilai wajar diakui pada laba rugi periode berjalan. Pada saat surat-surat berharga untuk diperdagangkan dijual, selisih antara harga penjualan dengan nilai wajar yang tercatat pada akhir tahun diakui sebagai keuntungan atau kerugian dari penjualan yang direalisasi.
2. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual disajikan pada nilai wajar. Keuntungan/kerugian yang belum direalisasi dari kenaikan/penurunan nilai wajar tidak diakui pada laba rugi periode berjalan, melainkan sebagai komponen terpisah dalam ekuitas. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba atau rugi pada saat realisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and government bonds (continued)

The reclassification of securities and government bonds from fair value through profit or loss category to available-for-sale category is recorded at fair value at the reclassification date.

Prior to January 1, 2010

Securities and government bonds are stated net of allowance for impairment losses and unamortized interest/ premium or discount. Premiums and discounts are amortized using the straight-line method.

Valuation of securities and government bonds is stated based on the classification of the securities as follows:

1. Trading securities and government bonds are stated at fair value. The unrealized gains/losses resulting from the increase/decrease in fair value are recognized in the current period profit or loss. Upon the sale of securities in a trading portfolio, the difference between the selling price and fair value per books is recognized as a realized gain or loss on sale.
2. Available-for-sale securities and government bonds are stated at fair value. Unrealized gains/losses resulting from the increase/decrease in fair value are not recognized in the current period profit and loss but are presented as a separate component in equity. Gains or losses are recognized in profit or loss upon realization.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Efek-efek dan obligasi pemerintah (lanjutan)

Sebelum 1 Januari 2010 (lanjutan)

3. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai perolehan yang disesuaikan dengan diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Penurunan nilai wajar permanen atas surat-surat berharga untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

SBI disajikan sebesar nilai nominal setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi. Obligasi disajikan sebesar nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan dan penurunan nilai wajar diakui pada operasi periode berjalan. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku. Penentuan harga perolehan dalam perhitungan laba/rugi yang direalisasikan digunakan metode identifikasi khusus. Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurang dari akun efek-efek.

i. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif diakui di neraca pada nilai wajar dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai. Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai kewajiban apabila memiliki nilai wajar negatif.

Sejak 1 Januari 2010, transaksi derivatif diakui sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Tagihan dan kewajiban derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2010, transaksi derivatif diakui sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 1999), "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Securities and government bonds (continued)

Prior to January 1, 2010 (continued)

3. Held-to-maturity securities and government bonds are stated at cost adjusted for unamortized discounts or premiums.

Any permanent decline in the fair value of securities held-to-maturity and available-for-sale is charged to profit and loss in the year incurred.

Certificate Bank Indonesia are stated at nominal value net of unamortized interest. Bonds are stated at fair value. Gains or unrealized losses resulting from the increase and decrease in fair value are recognized in the current operations. Fair value is determined based on prevailing market prices. Determination of the acquisition price in the calculation of profit or loss realized uses the specific identification method. Allowance for losses are stated as reduction from the securities account.

i. Derivative instruments

Derivative financial instruments are recognized in the balance sheet at fair value less allowances for impairment losses. Each derivative contract is carried as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

Starting January 1, 2010, derivative transactions are recognized in accordance with SFAS No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities that are designated at fair value through profit or loss.

Prior to January 1, 2010, derivative transactions are recognized in accordance with SFAS No. 55 (Revised 1999), "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities".

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statements of income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Instrumen derivatif (lanjutan)

Akuntansi untuk perubahan dalam nilai wajar suatu instrumen derivatif berdasarkan transaksi lindung nilai yang efektif mengharuskan pemenuhan kriteria atas pendokumentasian, tujuan dan pengungkapannya. Bank melakukan kontrak derivatif *swap* suku bunga untuk melindungi risiko pasar akibat fluktuasi suku bunga yang berkaitan dengan obligasi tingkat bunga tetap yang diterbitkan oleh Bank. Instrumen tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai transaksi lindung nilai yang efektif sesuai dengan persyaratan khusus menurut PSAK No. 55 dan tidak ditujukan sebagai aktivitas lindung nilai untuk tujuan akuntansi. Dengan demikian, perubahan nilai wajar instrumen tersebut dicatat langsung pada operasi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Bank tidak memiliki transaksi derivatif.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Sejak tanggal 1 Januari 2010

Kredit yang diberikan pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai, berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Derivative instruments (continued)

The accounting for changes in the fair value of a derivative instrument under an effective hedging transaction requires that the criteria on documentation, designation and disclosure be met. The Bank has entered into interest rate swap derivative contracts to hedge market risks arising from fluctuations in interest rates relating to the fixed interest rate bonds issued by the Bank. Those instruments do not qualify as effective hedging transactions with specific terms under PSAK No. 55 and are not designated as hedging activities for accounting purposes. Accordingly, changes in the fair value of such instruments are recorded directly in the current year's operations.

As of December 31, 2010, the Bank does not have derivative transactions.

j. Loans

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified time.

Starting January 1, 2010

Loans are initially measured at fair value plus transaction cost that are directly attributable to obtain financial assets, and after initial recognition loans are measured at amortized cost based on the effective interest rate method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as loans and receivables.

Prior January 1, 2010

Loans are stated at their outstanding balance less allowance for impairment losses, based on the management's review on the loans collectibility at the end of the each year.

Loans under syndicated loans or channeling loans are stated at the principal amount according to the risk portion assumed by the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Sejak tanggal 1 Januari 2010 (lanjutan)

Kredit yang diberikan disajikan sebesar saldo kredit bruto dikurangi dengan penyisihan kerugian yang dibentuk.

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit penyisihan kerugian. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, dikreditkan ke dalam penyisihan kerugian kredit di neraca.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru.

Sejak Tanggal 1 Januari 2010

Saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang atau dimodifikasi (kredit restrukturisasi), penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang dinegosiasi ulang untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pembayaran di masa depan. Kredit terus menjadi subjek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010

Kredit yang direstrukturisasi dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit yang diberikan pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan penghasilan bunga secara proporsional.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Loans (continued)

Starting January 1, 2010 (continued)

Loans are stated at their gross outstanding balance net of allowance for possible losses.

Loans are written off when there is no realistic prospect of collection or when the Bank's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When loans are deemed uncollectible, they are written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries of previously written off loans are credited to the allowance for losses in the balance sheet.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and the agreement of new loans conditions.

Starting January 1, 2010

Once the loan terms have been renegotiated or modified (restructured loans), any impairment is measured using the original effective interest rate as calculated before the modification of terms and the loan is no longer considered past due. Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and the future payments are likely to occur. The loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, calculated using the loan original effective interest rate.

Prior to January 1, 2010

Restructured loans are presented at the lower of the carrying value of the loan at the time of restructuring or the net present value of the total future cash receipts after restructuring. Losses arising from any excess of the carrying value of the loan at the time of restructuring over the net present value of the total future cash receipts after restructuring are recognized in the statements of income. Thereafter, all cash receipts under the new terms shall be accounted for as the recovery of principal and interest revenue, on a proportionate basis.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Penjualan Kredit Pemilikan Rumah (Sekuritisasi KPR)

Sejak tanggal 1 Januari 2010

Dalam rangka sekuritisasi atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("Kumpulan Tagihan"), Bank telah melakukan penjualan atas Kumpulan Tagihan kepada pihak ketiga (sekuritisasi KPR)..

Perlakuan akuntansi atas sekuritisasi KPR mengacu kepada PSAK 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" tentang penghentian pengakuan asset keuangan.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010

Perlakuan akuntansi atas sekuritisasi KPR mengacu kepada Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-493/BL/2008 tentang perubahan peraturan BAPEPAM-LK No. IX.K.1 tentang pedoman kontrak investasi kolektif efek beragunan aset (*Asset-Backed Securities*) yang menyatakan bahwa dalam hal pengalihan aset keuangan sebagai akibat dari transaksi antara kreditor awal dan kontrak investasi kolektif efek beragunan aset dimaksudkan untuk memenuhi transaksi jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara akuntansi, maka pengalihan dimaksud harus memenuhi persyaratan jual putus/lepas menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemenuhan kondisi jual beli atau tukar menukar putus/lepas atau tidak, wajib dilakukan secara konsisten dan didukung dengan pendapat akuntan yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

Keputusan BAPEPAM-LK tersebut juga menyatakan bahwa dalam hal aset yang membentuk portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset yang penerbitannya didasarkan pada aset keuangan yang telah dialihkan dari kreditor awal tersebut, maka kreditor awal hanya dapat melakukan jual beli atau tukar menukar putus/lepas dimaksud paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai aset keuangan yang dialihkannya tersebut.

Perlakuan akuntansi Bank juga mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum yang mengatur bahwa kondisi jual putus terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Loans (continued)

Sales of housing loans (Bank's mortgage securitization)

Starting January 1, 2010

In connection with the Bank's mortgage securitization on its housing loans bills ("pool of receivables"), the Bank sold its pool of receivables to third parties (Bank's mortgage securitization).

Accounting treatment for Bank's mortgage securitization based on SFAS 55 (2006 Revision) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" on derecognition of financial assets.

Prior to January 1, 2010

The accounting treatment of the Bank's mortgage securitization is based on the Decision Letter No. KEP-493/BL/2008 of the Chairman of BAPEPAM-LK concerning the amendment of BAPEPAM-LK Regulation No. IX.K.1 regarding the Guidelines on Collective Investment Contract (Asset-Backed Securities), which states that if a transfer of financial assets resulting from a transaction with an initial creditor and collective investment contract on asset-backed securities is considered to meet an outright purchase or sale or exchange transaction for accounting, such transfer must meet the criteria of outright purchase or sale based on generally accepted accounting principles. The fulfillment of the criteria outright purchase or sale or exchange must be consistently met and supported with an opinion by an accountant registered with BAPEPAM-LK.

The above decision letter of BAPEPAM-LK also states that in connection with assets forming the Collective Investment Contract on Asset-Backed Securities portfolio which was issued based on the financial assets transferred from the initial creditor, the creditor will only be allowed to conduct an outright buy or sale or exchange transaction at the maximum of 10% of the amount of financial asset transferred.

The Bank's accounting treatment is also based on Bank Indonesia Regulation No. 7/4/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding the Prudence Concept in Asset Securitization Activities for Commercial Banks which provides that an outright sale occurs if the following terms are met:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Penjualan Kredit Pemilikan Rumah (Sekuritisasi KPR) (lanjutan)

Sebelum tanggal 1 Januari 2010 (lanjutan)

- a. Seluruh manfaat yang diperoleh dan atau akan diperoleh dari aset keuangan telah dialihkan kepada penerbit;
- b. Risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan secara signifikan telah beralih kepada Penerbit; dan
- c. Kreditur asal tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun tidak langsung atas aset keuangan yang dialihkan.

PBI tersebut mengatur lebih lanjut bahwa pemenuhan kondisi "jual putus" tersebut wajib dilengkapi dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang independen.

k. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah* dan piutang *istishna*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga pembelian dan margin yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual dan dibuat secara eksplisit (dinyatakan dalam akad pembiayaan). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* yang timbul diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Pada tanggal neraca, piutang *murabahah* dinyatakan sebesar saldo piutang dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir periode. Pendapatan margin *murabahah* yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurang atas saldo piutang *murabahah*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Loans (continued)

Sales of housing loans (Bank's mortgage securitization) (continued)

Prior to January 1, 2010 (continued)

- a. All benefits obtained and/or will be obtained from the financial asset have been transferred to the issuer;
- b. Credit risks from the financial asset transferred have been transferred significantly to the issuer; and
- c. The original creditor does not have a direct or indirect control of the financial asset transferred.

The Bank Indonesia regulation further states that the fulfillment of the "outright sale" condition must be accompanied by the opinion of an independent auditor and legal practitioner.

k. Sharia financing/receivables

Sharia financing/receivables are receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale or purchase arrangements and profit sharing between the Bank and other parties for certain a period of time. Such receivables consist of receivables that arise from *murabahah* transactions, *istishna* transactions, *mudharabah* financing and *musyarakah* financing.

Murabahah is a transaction carried out based on sales or purchase agreement whereby the price and the profit margin are agreed by the buyer and seller and are disclosed explicitly. *Murabahah* may be carried out based on certain order or no order to purchase certain goods. Under *murabahah*, the purchase will be realized by the Bank after the order from the customers is received. At the effective date of the *murabahah* agreement, the resulting *murabahah* receivable is recognized at the acquisition cost of the *murabahah* asset plus the agreed margin. At balance sheet date, the *murabahah* receivable is stated at the outstanding balance less allowance for possible losses which is provided based on the management's review on the collectibility level of the receivables at the end of each year. Deferred *murabahah* margin is presented as a contra account of *murabahah* receivables.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal neraca, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal neraca, pembiayaan *musarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi penyisihan kerugian.

l. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Sharia financing/receivables (continued)

Mudharabah represents joint financing between the Bank as the owner of the fund and the customer as the business executor. Distribution of profit sharing on a project or other business activity is determined in accordance with the mutually agreed nisbah (*pre-determined ratio*). At balance sheet date, *mudharabah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for possible losses which is provided based on the management's review on its collectibility level at the end of each year.

Musarakah is a partnership contract between fund owners (*musarakah partners*) to contribute funds and conduct business on a joint basis through partnership with profit sharing based on a predetermined ratio, while loss is shouldered proportionally based on the capital contribution. At the balance sheet date, *musarakah* financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for possible losses based on the management's review on the *musarakah* financing collectibility level at the end of each year.

Istishna is a purchase agreement between an *al-mustashni* (buyer) and an *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to make or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at an agreed price. *Istishna* receivables are presented based on the outstanding billings to the final buyer less allowance for possible losses.

l. Premises and equipment

Premises and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the premises and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in statements of income as incurred.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/Years	
Bangunan	10 - 20	<i>Buildings</i>
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4 - 8	<i>Office furniture and fixtures, and motor vehicles</i>

Pada setiap akhir tahun buku, Bank melakukan penelaahan atas nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Sesuai dengan PSAK No. 47 tentang "Akuntansi Tanah", biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak pemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama umur hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, periode mana yang lebih pendek.

Bank melakukan penelaahan untuk menentukan indikasi adanya penurunan nilai aktiva pada akhir periode sesuai dengan PSAK No. 48 tentang "Penurunan Nilai Aktiva". Jika terdapat indikasi penurunan nilai, Bank menghitung taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atas nilai semua aktivitya untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai aset dan mengakuinya sebagai kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Premises and equipment (continued)

Depreciation of buildings is computed using the straight-line method while depreciation of office furnitures and fixtures, and motor vehicles is computed using the double-declining balance method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the Bank and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period such asset is derecognized.

Landrights are recorded at cost and not depreciated. In accordance with PSAK No. 47, "Accounting for Land", certain expenses incurred in the acquisition or extension of the terms of the landrights are deferred and amortized over the terms of the landrights or their useful lives, whichever period is shorter.

The Bank conducts a review to determine whether there are indications of asset impairment at the end of the year in accordance with PSAK No. 48, "Accounting for Impairment of Asset Value". If there are any indications of impairment, the Bank should compute the estimated recoverable amount of all its assets to determine if there is a decrease in the value of the assets, and recognize an impairment loss in the current year statements of income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

m. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

n. Kewajiban segera

Kewajiban segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank lain.

Sejak 1 Januari 2010, kewajiban segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Sebelum 1 Januari 2010, kewajiban segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank.

o. Simpanan

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Giro *Wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Tabungan *Mudharabah* merupakan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati (Catatan 2k). Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Premises and equipment (continued)

Construction in progress is stated at cost. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate premises and equipment account when the construction is substantially completed and the asset constructed is ready for its intended use.

m. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

n. Current Liabilities

This account are recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

Starting January 1, 2010, current liabilities are stated at amortized cost. Prior to January 1, 2010, current liabilities are stated at the amounts payable by the Bank

o. Deposits

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which are available for withdrawal at any time and earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the Bank's policy. Mudharabah savings deposits represent third party funds which earn profit sharing from the Bank's revenue for the use of funds in accordance with the agreed nisbah (Note 2k). Wadiah and Mudharabah savings deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Simpanan (lanjutan)

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Deposito berjangka *Mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dimuka. Pemegang deposito hanya bisa menarik deposito tersebut pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank. Deposito berjangka *Mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Sejak 1 Januari 2010, simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan dan dana syirkah temporer yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, simpanan nasabah dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah.

p. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka dan *inter-bank call money*.

Sejak tanggal 1 Januari 2010, simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Deposits (continued)

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits represent third party placements in which the profit sharing is in accordance with the nisbah as determined and agreed in advance. Depositors are entitled to withdraw the fund at specific dates in accordance with agreements between the depositors and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at the amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

Starting January 1, 2010, deposits from customers are classified as financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate method except for deposits and temporary syirkah fund that are stated as the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

Prior to January 1, 2010, deposits from customers are stated at the amounts payable to customers.

p. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of savings deposits, demand deposits, time deposits and inter-bank call money.

Starting January 1, 2010, deposits from other banks are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest rate method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

Prior to January 1, 2010, deposits from other banks are stated at the amount due to the other banks.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Sejak 1 Januari 2010, efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai kewajiban dalam neraca sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif. Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Sebelum 1 Januari 2010, efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai kewajiban dalam neraca sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar di muka yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar di muka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode amortisasi garis lurus.

r. Surat-surat berharga yang diterbitkan dan Obligasi Subordinasi

Surat-surat berharga yang diterbitkan termasuk obligasi yang diperdagangkan di pasar modal.

Sejak 1 Januari 2010, setelah pengukuran awal, efek hutang yang diterbitkan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya-biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Sebelum 1 Januari 2010, efek hutang yang diterbitkan dicatat sebesar nilai nominal dikurangi saldo diskonto yang belum diamortisasi. Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan obligasi dan obligasi subordinasi diakui sebagai diskonto dan dikurangkan langsung dari hasil emisi dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi tersebut dengan menggunakan metode garis lurus. Obligasi Subordinasi yang diterbitkan dan diperdagangkan dipasar modal disajikan terpisah sebagai bagian dari "Pinjaman Subordinasi" dalam neraca.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Securities sold under repurchase agreements

Starting January 1, 2010, securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the balance sheet, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using effective interest rate method. Securities sold under agreements to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Prior to January 1, 2010, securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the balance sheet, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest. The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using the straight-line amortization method.

r. Securities issued and Subordinated Bonds

Securities issued include bonds traded in the capital market.

Since January 1, 2010, after the initial measurement, debt securities issued are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortised cost is calculated by taking into account any discount or premium on initial recognition and costs that are an integral part of the effective interest rate.

Prior to January 1, 2010, debt securities issued are presented at nominal value less unamortized discount. Costs incurred in connection with the issuance of bonds and subordinated bonds are recognised as discounts and offset directly from the proceeds derived from such offering and amortized over the period of the bonds using the straight-line method. Subordinated bonds issued and traded in the capital market are reported separately as part of "Subordinated Loans" in the balance sheets.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Surat-surat berharga yang diterbitkan (lanjutan)

Obligasi yang diterbitkan Bank yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali (obligasi dalam perbendaharaan) disajikan sebagai pengurang surat berharga yang diterbitkan. Pembelian kembali obligasi yang tidak dimaksudkan sebagai pelunasan diperlakukan seolah-olah telah terjadi pelunasan dalam laporan keuangan. Selisih antara nilai nominal obligasi dengan nilai wajar pada tanggal pembelian kembali dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan. Pendapatan bunga yang dihasilkan dari obligasi dalam perbendaharaan disajikan sebagai pengurang atas biaya bunga hutang obligasi.

s. Pendapatan dan beban bunga

Sejak tanggal 1 Januari 2010, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Securities issued (continued)

Bonds issued and purchased by the Bank with the intention to resell (treasury bonds) are presented as a deduction of bonds payable issued. The repurchase of bonds which is not intended to be a payment is treated in the financial statements as if there is a payment. The difference between the bonds nominal amount and the fair value at the date of buy-back is credited or charged to the current period statements of income. Interest income from treasury bonds is presented as a deduction of interest expense on bonds payable.

s. Interest income and expense

Starting January 1, 2010, interest income and expenses are recognised in the statements of income using the effective interest rate methods. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to the carrying amount of the financial asset or financial liability.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate.

If a financial asset or group of similar financial assets has diminished its value as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (impairment) (pada tahun 2009 sebagai kredit non-performing). Kredit non-performing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 terdiri dari kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pada saat kredit diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai (pada tahun 2009 sebagai kredit non-performing).

Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aset produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai bermasalah diakui pada saat bunga tersebut diterima (berbasis kas).

- Pada saat pinjaman diklasifikasikan sebagai kredit bermasalah, tagihan bunga yang telah diakui sebelumnya sebagai pendapatan, tetapi belum diterima akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi.
- Pendapatan bunga atas kredit dalam kategori *non-performing* (menurut Peraturan Bank Indonesia) diakui dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan pada saat pembayarannya diterima.
- Penerimaan pembayaran atas pinjaman yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman. Kelebihan penerimaan dari pokok pinjaman diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi.
- Pendapatan bunga dari kredit yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas kredit menjadi lancar sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Interest income and expense (continued)

Loans for which the principal or interest has been past due for 90 (ninety) days or more, or where reasonable doubt exists as to the timely collection, are generally classified as impaired loans (in 2009 as non-performing loans). Non-performing loans for the year ended December 31, 2009 are classified as substandard, doubtful and loss. Interest accrued but not yet collected is reversed when a loan is classified as impaired loan (in 2009 as non-performing loans).

Prior to January 1, 2010, interest income on loans or other earning assets which are classified as non-performing is recognized only to the extent that interest is received in cash (cash basis).

- When an earning asset is classified as non-performing, any interest income previously recognized and accrued but not yet collected is reversed against interest income and recognized as contingent receivable.
- Interest income on non-performing loans (under Bank Indonesia guidelines) is recognized in the statements of income as income only when cash collections are received.
- Payments received from loans which are classified as doubtful or loss are first applied as reduction of loan principal. Any excess of payments received over the loan principal on these loans is recognized as interest income in the statements of income.
- Interest income from restructured loan is recognised only to the extent that interest is received in cash, before the loan's quality become current as determined by Bank Indonesia Regulation No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding Asset Quality Rating for Commercial Banks, as amended by Bank Indonesia Regulation No. 11/2/PBI/2009 dated January 29, 2009.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pendapatan provisi dan komisi

Sejak 1 Januari 2010, pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2010, pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi berdasarkan metode garis lurus sesuai dengan jangka waktu kontrak serta diklasifikasikan sebagai pendapatan provisi dan komisi pada laporan laba rugi. Saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan untuk pinjaman yang dilunasi sebelum jatuh temponya diakui pada saat pinjaman dilunasi. Selanjutnya pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya tidak signifikan langsung diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan sebagai pendapatan provisi dan komisi.

u. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan *istishna*, marjin *murabahah*, bonus dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban bonus secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan *Istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang. Pendapatan marjin *murabahah* diakui sepenuhnya pada saat terjadinya, apabila akad berakhir dalam periode yang sama dengan periode laporan keuangan; atau selama periode akad secara proporsional apabila akad tersebut melampaui satu periode laporan keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Fees and commissions

Starting January 1, 2010, fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest rate method and classified as part of interest income in the statements of income.

Prior to January 1, 2010, significant fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized using the straight-line method over the term of the underlying contract and is classified as fees and commission income in the statement of income. Unamortized fees and commissions relating to loans settled prior to maturity are recognized at the settlement date. Furthermore, fees and commissions income which were not significant, were directly recognized in current year statement of income as fees and commissions income.

u. Sharia profit sharing income and bonus expense

Sharia profit sharing income represents income from *istishna*, margin from *murabahah*, bonuses and profit-sharing on *mudharabah* and *musyarakah* financing and other earning assets which are recognized on the accrual basis. Sharia bonus expense represents the bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Income from *istishna* is recognized at the date of transfer of assets. *Murabahah* margin income is recognized in full as earned if the related period of the contract ends in the same period of the financial statements; or proportionately over the period of the contract if the contract covers more than one financial statement period.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah (lanjutan)

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan/piutang *syariah* dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam piutang *murabahah* dan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan. Dari jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank.

v. Imbalan kerja

Bank mengakui kewajiban imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Bank menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Imbalan Kerja" untuk mengakui kewajiban imbalan kerja.

Bank memiliki program pensiun manfaat pasti ("Program Pensiun") untuk karyawan yang memenuhi syarat. Dana pensiun dibiayai dari iuran karyawan dan iuran Bank. Iuran karyawan adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan iuran Bank adalah sesuai dengan perhitungan aktuaris. Aktiva Program Pensiun diadministrasikan dan dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (DPBTN). DPBTN mendapat izin dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 untuk mengganti statusnya dari yayasan menjadi dana pensiun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Sharia profit sharing income and bonus expense (continued)

Total margin and profit sharing on the sharia financing/receivables transactions and other earning assets for distribution to the depositors and the Bank are computed proportionately based on allocation of funds from the depositors and the Bank to be used to finance the *murabahah* receivables and *mudharabah* and *musyarakah* financing and other earning assets financed. The total available margin income and profit sharing for such customers are distributed to customers as "*shahibul maal*" (owner of funds) and to the Bank as "*mudharib*" (fund manager) in accordance with a mutually pre-determined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which use the Bank's funds all belong to the Bank.

v. Employee benefits

The Bank recognizes its employee service entitlement liability in accordance with Labor Law No. 13 of 2003 dated March 25, 2003. The Bank adopts PSAK No. 24 (Revised 2004), "Accounting for Employee Benefits", to account for its liability for employee service entitlements.

The Bank has a defined benefit pension plan ("Pension Plan") covering all its eligible employees. The Pension Plan is funded through contributions from both the employees and the Bank. Employees' contributions are computed at 5% of the employees' basic pension salaries and the Bank's contributions are based on actuarial computations. The Pension Plan's assets are being administered and managed by Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (DPBTN). DPBTN obtained the approval from the Ministry of Finance based on Decision Letter No. KEP-232/KM.17/1993 dated October 13, 1993 to change its status as a foundation to become a pension fund.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Imbalan kerja (lanjutan)

Selain program pensiun manfaat pasti, Bank juga menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti yang pesertanya adalah pegawai aktif Bank sejak September 2004. Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) yang telah memperoleh izin usaha oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor KEP-1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Kontribusi atas iuran karyawan terhadap Program Pensiun Iuran Pasti sebesar 25% dari jumlah iuran.

Bank juga memiliki program manfaat pasti lainnya ("Program Lainnya") seperti program Tunjangan Hari Tua (THT), program perawatan kesehatan pasca kerja dan lainnya. Kontribusi karyawan terhadap dana THT adalah sebesar 1,35% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank besarnya 3 kali dari kontribusi peserta. Aktiva Program Lainnya diadministrasikan dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

Biaya atas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*Present Value of Defined Benefit Obligation*) dan 10% dari nilai wajar aktiva program pada tanggal tersebut. Besarnya keuntungan dan kerugian aktuarial tersebut diakui menggunakan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja dari para karyawan dalam program tersebut. Selanjutnya, beban jasa lalu (*past service cost*) atas kewajiban manfaat pasti atau perubahan dari kewajiban imbalan dari program yang telah ada harus diamortisasi berdasarkan sisa periode sampai imbalan tersebut menjadi hak (*vested*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Employee benefits (continued)

Other than the defined benefit plans, the Bank also has a defined contribution pension plan with participants consisting of the Bank's entire active employees since September 2004. This defined pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) which obtained its operating permit from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. KEP-1100/KM.17/1998 dated November 23, 1998. Contribution from employees in the defined pension plan is 25% from the total contribution.

The Bank has also other defined benefit plans ("other plans") such as Old-age Retirement plan (Tunjangan Hari Tua or THT), healthcare program for retirement and other benefits. Employees' contributions are 1.35% of their net wages for old-age retirement benefits and the Bank contributes 3 times the employees' contributions. The other plan assets are being administered and managed by Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

The cost of providing employee benefits is determined separately for each plan using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the cumulative unrecognized actuarial net gains or losses for each individual plan from prior period exceed the higher of the 10% of the present value of the defined benefit obligation and 10% of the fair value of the plan assets at such date. These actuarial gains or losses are recognized using the straight-line method over the remaining average working lives of the employees covered by the plan. Further, past service cost on the defined benefit plans or changes in the benefit liability from existing programs must be amortized based on the remaining period until the benefits become vested.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Imbalan kerja (lanjutan)

Bank juga memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu suatu jangka waktu tertentu sebelum usia pensiun jabatan pegawai yang membebaskan pegawai dari tugas-tugas rutin sebagaimana pegawai aktif dimana pegawai tidak masuk kerja dengan tetap memperoleh fasilitas kepegawaian yang ditentukan, meliputi: gaji, fasilitas kesehatan, tunjangan hari raya keagamaan, cuti tahunan (jika pada periode tahun berjalan masih terdapat masa kerja pegawai aktif), cuti besar (jika perhitungan cuti besarnya jatuh tempo pada periode MPP), uang duka dan santunan duka. Pegawai yang berhak mendapatkan MPP adalah pegawai yang bekerja 1 tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal, yaitu mulai usia 55 tahun sampai dengan usia 56 tahun.

Bank juga memberikan jasa produksi kepada karyawan yang memiliki kualifikasi dan untuk setiap periode laporan dicadangkan dan diakui sebagai beban pada periode berjalan yang jumlahnya diestimasi berdasarkan persentase tertentu atas laba bersih yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Bank memberikan program Santunan Purna Jabatan kepada Direksi, Komisaris dan Sekretaris Komisaris yang aturan pelaksanaannya mengacu kepada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 Januari 2003. Keputusan rapat tersebut mengatur, antara lain, Santunan Purna Jabatan diberikan dalam pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iuran tahunannya ditanggung oleh Bank. Sedangkan besaran premi atau iuran tahunan yang ditanggung adalah maksimal 25% dari gaji/honorarium dalam satu tahun dan jumlah tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Bank setiap tahun anggaran dan diakui sebagai beban pada periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Employee benefits (continued)

The Bank also provides employee benefits in the form of retirement preparation period (MPP), which is defined as a certain period of time before an employee reaches retirement age in which an employee is released from routine duties as active employee where the employee does not report for work but still receives specified employee facilities which consist of: salary, health benefits, religious holiday benefit, annual leave (if there is active employee's working period in the current year), major leave (if the calculation of the major leave falls within the retirement preparation period) and family death benefits. Employees entitled for the retirement preparation period (MPP) are active employees within one year from the normal pension age, which ranges from 55 to 56 years old.

The Bank provides production service benefit also to its qualified employees and, for each report period, has provided and recognized as expense in the current period, the amount is estimated based on a certain percentage of net income which has been approved by the stockholder in the Annual Stockholders' General Meeting regarding the Bank's annual Budget and Work Plan (RKAP).

The Bank provides post-work benefit program to the Board of Directors, Board of Commissioners and the Commissioners' Secretary which is implemented by referring to the decision in the Annual Stockholders' General Meeting held on January 15, 2003. The decision of such meeting provides, among others, that post-work benefits be given through an insurance program or pension savings with annual insurance premium/contribution being paid by the Bank. The amount of annual insurance premium/contribution paid amounts up to a maximum of 25% of the annual salary/fee and should be disclosed in the Bank's RKAP for each budget year and recorded as an expense in the current year.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs *spot* Reuters pada tanggal tersebut pukul 16.00 WIB. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	2010	2009
1 Dolar Amerika Serikat	9.010,00	9.395,00
1 Poundsterling Inggris	13.941,18	15.164,94
1 Euro Eropa	12.017,99	13.542,43
1 Yen Jepang	110,75	102,19
1 Dolar Singapura	7.025,89	6.704,50
1 Dolar Australia	9.169,00	8.453,16
1 Dolar Hong Kong	1.159,08	1.211,48

x. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak untuk periode bersangkutan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aktiva dan kewajiban yang tercatat di neraca dengan dasar pengenaan pajak atas aktiva dan kewajiban tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak yang belum digunakan, seperti akumulasi rugi pajak yang belum digunakan, juga diakui apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada periode aset atau kewajiban tersebut direalisasi atau diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan-peraturan pajak) yang berlaku atau secara substansi telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At balance sheet dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into rupiah based on Reuters' spot rates at 16.00 WIB (West Indonesian local time) on those dates. The resulting gains or losses are credited or charged to current year's statements of income.

As of December 31, 2010 and 2009, the exchange rates used in translating the foreign currencies into rupiah are as follows (full amounts in rupiah):

	2010	2009	
1 Dolar Amerika Serikat	9.010,00	9.395,00	United States Dollar 1
1 Poundsterling Inggris	13.941,18	15.164,94	British Poundsterling 1
1 Euro Eropa	12.017,99	13.542,43	European Euro 1
1 Yen Jepang	110,75	102,19	Japanese Yen 1
1 Dolar Singapura	7.025,89	6.704,50	Singapore Dollar 1
1 Dolar Australia	9.169,00	8.453,16	Australian Dollar 1
1 Dolar Hong Kong	1.159,08	1.211,48	Hong Kong Dollar 1

x. Income tax

Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the related period. Deferred tax assets and liabilities are recognized for all temporary differences between the balance sheet and tax bases of such assets and liabilities at each reporting date. Unused tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that future realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the assets are realized or the liabilities are settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are credited or charged to the current period operations, except for the change relating to transaction previously charged or credited directly to equity.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Pajak penghasilan (lanjutan)

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

y. Pelaporan segmen

Berdasarkan PSAK No. 5 (Revisi 2000) tentang "Pelaporan Segmen", Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan segmen geografis (segmen utama) dan segmen usaha (segmen sekunder) Bank.

z. Laba bersih per saham dasar dan dilusian

Laba bersih per saham dasar dan dilusian dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan sesuai dengan PSAK No. 56 tentang "Laba Per Saham".

aa. Penggunaan estimasi

Dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, manajemen Bank telah menggunakan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Adanya unsur ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi dapat menyebabkan jumlah sebenarnya yang dilaporkan pada tahun yang akan datang berbeda dengan jumlah yang telah diestimasi.

Pertimbangan profesional dan estimasi yang signifikan adalah sebagai berikut:

Nilai wajar atas instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang tercatat pada neraca tidak tersedia di pasar aktif, ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (input) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia, bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Income tax (continued)

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

y. Segment reporting

Based on PSAK No.5 (Revised 2000), "Segment Reporting", the Bank identifies and discloses financial information based on the Bank's geographical segment (major segment) and business segment (secondary segment).

z. Basic and diluted earnings per share

Basic and diluted earnings per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding during the related year in accordance with PSAK No. 56, "Earnings Per Share".

aa. Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods might be based on amounts which differ from those estimates.

The most significant uses of the judgment and estimates are as follows:

Fair value of financial instruments

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the balance sheet can not be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. The judgment include considerations of liquidity,

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Penggunaan estimasi (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan (lanjutan)

dan masukan model seperti volatilitas dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

Penurunan nilai kredit yang diberikan dan piutang

Bank mereview kredit yang diberikan dan piutang secara individu pada setiap tanggal neraca untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi. Secara khusus, justifikasi oleh manajemen diperlukan dalam estimasi jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai. Dalam estimasi arus kas ini, Bank membuat justifikasi tentang situasi keuangan peminjam dan nilai realisasi bersih agunan.

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai tersebut di masa mendatang.

3. PENERAPAN AWAL PSAK NO. 50 (REVISI 2006) DAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006)

PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010 dan diterapkan secara prospektif.

Ketentuan Transisi atas Penerapan Awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dilaksanakan sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Indonesia, memberikan tambahan pedoman di bawah ini:

1. Perhitungan Suku Bunga Efektif
Perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada tanggal 1 Januari 2010 ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK No. 55 (Revisi 2006) sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Use of estimates (continued)

Fair value of financial instruments (continued)

and inputted model such as volatility and discount rates, prepayment rates and default rate assumptions.

Impairment losses on loans and receivables

The Bank reviews its loans and receivables individually at each balance sheet date to assess whether an impairment loss should be recorded in the income statement. In particular, judgment by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss. In estimating these cash flows, the Bank makes judgments about the borrower's financial situation and the net realizable value of collateral.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may differ, resulting in future changes to the allowance.

3. INITIAL ADOPTION OF PSAK NO. 50 (REVISED 2006) AND PSAK NO. 55 (REVISED 2006)

PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" and PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" became effective for financial statements beginning on or after January 1, 2010 and should be applied prospectively.

The transitional provisions on the Initial Adoption of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006) in accordance with Technical Bulletin No. 4 that was issued by the Indonesian Institute of Accountants, provide additional guidance as follows:

1. Effective Interest Rate Calculation
Effective interest rate calculation for financial instruments measured at amortized acquisition cost that were previously acquired and still have balances as of January 1, 2010 is determined based on the future cash flows that will be received since the initial application of PSAK No. 55 (Revised 2006) up to the maturity date of such financial instruments.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PENERAPAN AWAL PSAK NO. 50 (REVISI 2006) DAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006) (lanjutan)

2. Penghentian Pengakuan
Instrumen keuangan yang sudah dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2010 tidak dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan penghentian pengakuan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006).
3. Instrumen Keuangan Majemuk
Instrumen keuangan majemuk yang ada pada tanggal 1 Januari 2010 harus dipisahkan antara komponen kewajiban dan komponen ekuitas berdasarkan paragraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006). Pemisahan tersebut ditentukan berdasarkan sifat, kondisi, persyaratan, dan hal lainnya dari instrumen keuangan tersebut pada tanggal 1 Januari 2010.
4. Klasifikasi Instrumen Keuangan sebagai Kewajiban atau Ekuitas
Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas sesuai dengan paragraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006).
5. Penurunan Nilai Instrumen Keuangan
Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank menentukan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai ini dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2010.

3. INITIAL ADOPTION OF PSAK NO. 50 (REVISED 2006) AND PSAK NO. 55 (REVISED 2006) (continued)

2. Derecognition
Derecognized financial instruments before January 1, 2010 are not re-evaluated based on the derecognition provision in PSAK No. 55 (Revised 2006).
3. Compound Financial Instruments
Compound financial instruments that existed as of January 1, 2010, should be separated between liability and equity component based on paragraph 11 of PSAK No. 55 (Revised 2006). Such separation is determined based on the nature, conditions, requirements, and other matters on such financial instrument as of January 1, 2010.
4. Classification of Financial Instruments as Liability or Equity
As of January 1, 2010, the Bank has classified financial instruments as liability or equity in accordance with paragraph 11 of PSAK No. 50 (Revised 2006).
5. Impairment of Financial Instruments
As of January 1, 2010, the Bank has determined the impairment of financial instruments based on the current conditions. The difference between the current impairment and the impairment based on the previous generally accepted accounting principles is recognized directly in the beginning balance of retained earnings as of January 1, 2010.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

3. PENERAPAN AWAL PSAK NO. 50 (REVISI 2006) DAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006) (lanjutan)

3. INITIAL ADOPTION OF PSAK NO. 50 (REVISED 2006) AND PSAK NO. 55 (REVISED 2006) (continued)

1 Januari 2010/January 1, 2010

	Sebelum penyesuaian/ Before adjustment	Efek dari penyesuaian transisi penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)/ Effect of transitional adjustments on initial adoption of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006)	Setelah penyesuaian/ After adjustment	
Aset - bersih setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai				Assets - net of allowance for impairment losses
Giro pada bank lain	25.692	258	25.950	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	132.925	2.862	135.787	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	5.483.561	1.810	5.485.371	Securities
Kredit yang diberikan	38.117.373	46.333	38.163.706	Loans
Tagihan Swap Suku Bunga	33.059	351	33.410	Interest Rate Swap Receivables
Aset pajak tangguhan - bersih	72.221	(12.903)	59.318	Deferred tax assets - net
Ekuitas				Equity
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	292.288	38.711	330.999	Unappropriated retained earnings

4. PELAKSANAAN KUASI-REORGANISASI

4. IMPLEMENTATION OF QUASI-REORGANIZATION

Kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, yang disebabkan terutama oleh melemahnya kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga yang tidak stabil, sangat langkanya likuiditas serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak yang buruk bagi industri perbankan di Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak pada para debitur Bank dalam memenuhi kewajibannya sehingga Bank mengalami defisit yang cukup besar. Berdasarkan neraca pada tanggal 31 Mei 2007 Bank memiliki akumulasi saldo defisit sejumlah Rp14.226.290.

The unfavorable economic condition starting in 1997-mid until 1999, which was caused mainly by the weakening of the rupiah in relation to other foreign currencies such as the United State dollar, the instability of interest rates, liquidity problem and the low level of trust by investors, has provided an adverse impact to the banking industry in Indonesia. This condition has also affected the Bank debtors in fulfilling their obligations. As a result, the Bank suffered a significant amount of deficit. Based on the balance sheet as of May 31, 2007, the Bank had an accumulated deficit balance amounting to Rp14,226,290.

Untuk memperoleh awal yang baik (*fresh start*) dengan neraca yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit, maka Bank melaksanakan Kuasi-Reorganisasi per 31 Mei 2007 (Catatan 2b). Kuasi-Reorganisasi dilakukan Bank sebagai langkah penting untuk bisa meneruskan usaha secara lebih baik.

In order to make a fresh start with a balance sheet showing present values without the burden of deficit, the Bank conducted a Quasi-Reorganization as of May 31, 2007 (Note 2b). The Quasi-Reorganization was recognized by the Bank as a necessary step to positively continue its business.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tanggal 19 Januari 2006, pemegang saham Bank memutuskan antara lain bahwa pemegang saham mendukung rencana Bank untuk melakukan Kuasi-Reorganisasi dalam rangka menetapkan besarnya nilai akhir Penyertaan Modal Negara dalam Bank dan perbaikan struktur modal Bank, dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

In the Bank's General Stockholders' Meeting held on January 19, 2006 regarding the Approval of the Bank's Budget and Work Plan, the stockholder decided, among others, that they support the Bank's plan to conduct the Quasi-Reorganization in order to decide the final amount of the Government's capital contribution and to restructure the Bank's capital, which should be implemented according to the prevailing regulations.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

5. KAS

	2010	2009	
Rupiah	362.139	294.103	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	542	156	United States Dollar
Euro Eropa	79	89	European Euro
Dolar Singapura	7	7	Singapore Dollar
Yen Jepang	2	2	Japanese Yen
Jumlah	362.769	294.357	Total

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp66.394 dan Rp59.642 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

The rupiah balance included cash in ATMs (Automatic Teller Machines) of Rp66,394 and Rp59,642 as of December 31, 2010 and 2009, respectively.

6. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2010	2009	
Rupiah	4.122.382	2.840.750	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	3.770	1.362	United States Dollar
Jumlah	4.126.152	2.842.112	Total

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp122.233 dan Rp77.502 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts amounting to Rp122,233 and Rp77,502 as of December 31, 2010 and 2009, respectively, which are accounted for based on sharia banking principles.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

The minimum reserve ratios as of December 31, 2010 and 2009 required under Bank Indonesia regulations are as follows:

	2010	2009	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Rupiah			Rupiah
Utama	8%	5%	Primary
Sekunder	2,5%	2,5%	Secondary
Dolar Amerika Serikat	1%	1%	United States Dollar
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Rupiah	5%	5%	Rupiah

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

6. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM Bank (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Rupiah			Rupiah
Utama	8,08%	6,96%	Primary
Sekunder	6,06%	15,97%	Secondary
Dolar Amerika Serikat	1,33%	1,21%	United States Dollar
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Rupiah	5,69%	5,73%	Rupiah

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2010 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang "Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing". Sedangkan rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2009 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang "Perubahan Atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang GWM Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing".

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, perhitungan rasio GWM berdasarkan prinsip perbankan syariah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diamandemen dengan PBI No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan PBI No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum.

6. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The minimum reserve ratio of the Bank (unaudited) as of December 31, 2010 and 2009 is as follows:

The statutory reserves ratio as of December 31, 2010 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 12/19/PBI/2010 dated October 4, 2010 concerning "Statutory Reserves at Bank Indonesia for Commercial Banks in Rupiah and Foreign Currencies". While the statutory reserves ratio as of December 31, 2009 is calculated based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 10/25/PBI/2008 dated October 23, 2008 concerning "The Amendment of PBI No. 10/19/PBI/2008 concerning The Statutory Reserves of Commercial Banks with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies".

As of December 31, 2010 and 2009, the computation of the minimum reserve ratio based on sharia banking principles was based on Bank Indonesia Regulation No. 6/21/PBI/2004 dated August 3, 2004 concerning the Minimum Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies for Commercial Banks which operate under sharia banking principles, which regulation was amended by Bank Indonesia Regulations No. 8/23/PBI/2006 dated October 5, 2006 and No. 10/23/PBI/2008 dated October 16, 2008.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

7. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	2010	2009
Rupiah	11.749	4.481
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	119.579	9.090
Euro Eropa	21.554	19.223
Yen Jepang	915	584
	142.048	28.897
Jumlah	153.797	33.378
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.410)	(7.686)
Bersih	151.387	25.692

b. Berdasarkan bank

	2010	2009
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk	3.024	669
Standard Chartered Bank, Jakarta	2.250	156
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.199	160
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.674	808
Citibank N.A., Jakarta	918	910
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	738	960
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	726	527
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	156	186
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	18	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	14	-
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	11	21
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	-	2
Lainnya	21	82
Jumlah Rupiah	11.749	4.481
<u>Mata uang asing</u>		
JP Morgan Chase Bank N.A., London	119.529	18.802
Deutsche Bank AG	19.180	1.663
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	2.374	7.427
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tokyo	915	584
Citibank N.A.	50	421
Jumlah mata uang asing	142.048	28.897
Jumlah	153.797	33.378
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.410)	(7.686)
Bersih	151.387	25.692

7. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. By currency

Rupiah
Foreign currencies
United States Dollar
European Euro
Japanese Yen
Total
Less allowance for impairment losses
Net

b. By bank

<u>Rupiah</u>
PT Bank Sharia Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Citibank N.A., Jakarta
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
PT Bank Sharia Muamalat Indonesia Tbk
Others
Total Rupiah
<u>Foreign currencies</u>
JP Morgan Chase Bank N.A., London
Deutsche Bank AG
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Tokyo Branch
Citibank N.A.
Total foreign currencies
Total
Less allowance for impairment losses
Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

7. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 tidak terdapat giro pada bank lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Dalam giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp3.024 dan Rp672 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2010	2009	
Rupiah	2,67%	1,91%	Rupiah
Mata uang asing	0,10%	0,03%	Foreign currencies

d. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2010	2009	
Saldo awal tahun	7.686	10.011	Balance at beginning of year
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 3)	(258)	-	Adjustment in relation with the implementation of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006) (Note 3)
Pembentukan (pembalikan) penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 32)	(5.018)	(2.325)	Provision for (reversal of) allowance during the current year (Note 32)
Saldo akhir tahun	2.410	7.686	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

7. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

b. By bank (continued)

As of December 31, 2010 and 2009, the Bank had no current accounts with other banks with related party relationship.

Current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp3,024 and Rp672 as of December 31, 2010 and 2009, respectively.

c. Average annual interest rates for current accounts with other banks are as follows:

	2010	2009	
Rupiah	2,67%	1,91%	Rupiah
Foreign currencies	0,10%	0,03%	Foreign currencies

d. The changes in the allowance for impairment losses on current accounts with other banks are as follows:

	2010	2009	
Saldo awal tahun	7.686	10.011	Balance at beginning of year
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 3)	(258)	-	Adjustment in relation with the implementation of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006) (Note 3)
Pembentukan (pembalikan) penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 32)	(5.018)	(2.325)	Provision for (reversal of) allowance during the current year (Note 32)
Saldo akhir tahun	2.410	7.686	Balance at end of year

The management believes that the allowance for losses provided on current accounts with other banks is adequate.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

	2010	2009
Rupiah		
Deposito berjangka Mudharabah		
PT Bank Rakyat		
Indonesia (Persero) Tbk	192.000	10.654
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	75.000	-
PT Bank Sinarmas	45.000	-
Tabungan Mudharabah		
PT Bank Rakyat		
Indonesia (Persero) Tbk	-	1
	312.000	10.655
<i>Inter-bank call money</i>		
Standard Chartered Bank, Jakarta	62.550	125.000
	62.550	125.000
<i>Deposit facility</i>		
Bank Indonesia (setelah dikurangi dengan diskonto yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp611 dan Rp2.519 pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009)	1.999.389	2.532.481
	1.999.389	2.532.481
Dolar Amerika Serikat		
Deposito berjangka Bank of New York, Hong Kong	991	1.033
Jumlah	2.374.930	2.669.169
Dikurangi penyisihan kerugian Penurunan nilai	(3.120)	(3.763)
Bersih	2.371.810	2.665.406

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 tidak terdapat penempatan Bank Indonesia dan pada bank lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp312.000 dan Rp10.655 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

b. Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain mempunyai sisa umur hingga jatuh tempo kurang dari satu bulan kecuali untuk penempatan dalam bentuk *inter-bank call money* pada Standard Chartered Bank, Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang mempunyai sisa umur hingga jatuh tempo antara 6 sampai dengan 12 bulan dan 1 sampai 3 bulan.

8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Based on currency and type

	Rupiah
Mudharabah time deposits	
PT Bank Rakyat	
Indonesia (Persero) Tbk	10.654
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-
PT Bank Sinarmas	-
Mudharabah savings deposits	
PT Bank Rakyat	
Indonesia (Persero) Tbk	1
	10.655
<i>Inter-bank call money</i>	
Standard Chartered Bank, Jakarta	125.000
	125.000
<i>Deposit facility</i>	
Bank Indonesia (net of unamortized discount of Rp611 and Rp2,519 as of December 31, 2010 and 2009, respectively)	2.532.481
	2.532.481
United States Dollar	
Time deposits	
Bank of New York, Hong Kong	1.033
Total	2.669.169
Less allowance for impairment losses	(3.763)
Net	2.665.406

As of December 31, 2010 and 2009, there were no placements with Bank Indonesia and other banks with related party relationship.

As of December 31, 2010 and 2009, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp312,000 and Rp10,655, respectively.

b. Based on Remaining Period Until Maturity

As of December 31, 2010 and 2009, the placements with Bank Indonesia and other banks have remaining period to maturity of less than one month except for the placements in the form of *inter-bank call money* in Standard Chartered Bank, Jakarta, which have remaining periods to maturity of between six month and twelve months, and 1 month to three months

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

8. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

- c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Rupiah	6,11%	7,19%
Dolar Amerika Serikat	0,19%	0,30%

Rupiah
United States Dollar

- d. Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Saldo awal tahun	3.763	6.542
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 3)	(2.862)	-
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 32)	2.219	(2.779)
Saldo akhir tahun	3.120	3.763

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

- e. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, penempatan berupa deposito berjangka pada Bank of New York, Hong Kong merupakan deposito Bank untuk keanggotaan VISA International (VISA) yang hanya dapat ditarik ketika Bank sudah tidak lagi menjadi anggota VISA.
- f. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, penempatan berupa *inter-bank call money* pada Standard Chartered Bank, Jakarta merupakan penempatan yang dilakukan sehubungan dengan transaksi efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan Standard Chartered Bank (Catatan 21).

8. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

- c. Average annual interest rates for placements with other banks are as follows:

	2010	2009
Rupiah	7,19%	7,19%
United States Dollar	0,30%	0,30%

- d. The changes in the allowance for possible losses on placements with other banks are as follows:

	2010	2009
Balance at beginning of year	3.763	6.542
Adjustment in relation with the implementation of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006) (Note 3)	(2.862)	-
Provision of allowance during the current year (Note 32)	2.219	(2.779)
Balance at end of year	3.120	3.763

Management believes that the allowance for impairment losses provided on placements with other banks is adequate.

- e. As of December 31, 2010 and 2009, the placement in the form of time deposits in Bank of New York, Hong Kong represents the Bank's deposit for membership in VISA International (VISA) which can only be withdrawn upon termination of the VISA membership.
- f. As of December 31, 2010 and 2009, the placement in the form of *inter-bank call money* in Standard Chartered Bank, Jakarta represents the placement in relation to the sale of securities transaction under repurchase agreement with Standard Chartered Bank (Note 21).

9. EFEK-EFEK

- a. Berdasarkan jenis dan penerbit

	2010	2009
Nilai wajar melalui laporan laba rugi		
Rupiah		
Sertifikat Bank Indonesia	391.670	-
Obligasi		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Seri II 2009	-	10.000
PT Perusahaan Listrik Seri XII A	2.047	-
PT Pupuk Kalimantan Timur	5.283	-

9. SECURITIES

- a. Based on type and issuer

	2010	2009
Fair value through profit or loss		
Rupiah		
Bank Indonesia Certificates	391.670	-
Bonds		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Series II 2009	-	10.000
PT Perusahaan Listrik Seri XII A	2.047	-
PT Pupuk Kalimantan Timur	5.283	-

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan penerbit (lanjutan)

	2010	2009
<u>Nilai wajar melalui laporan laba rugi</u>		
Rupiah (lanjutan)		
Obligasi Subordinasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Seri I 2009	-	5.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Seri II 2009	-	5.002
Sub-jumlah	399.000	20.002
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
Rupiah		
Obligasi		
Perum Pegadaian Seri XII A 2007	-	19.334
Bank Ekspor Indonesia Seri IV A 2009	-	10.368
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Seri I B 2007	-	9.925
PT Indosat Tbk Seri VI A 2008	-	10.000
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Seri IV 2007	-	9.347
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Seri IX A 2007	-	9.800
PT Jasa Marga (Persero) Seri XIII R 2007	-	7.035
PT Excelcomindo Pratama Tbk Seri II 2007	-	5.000
PT Bank Panin Tbk Seri II B 2007	-	4.987
PT Berlian Laju Tanker Tbk Seri III 2007	4.702	5.083
Obligasi Subordinasi PT Bank NISP Tbk Seri II 2008	-	4.935
	4.702	95.814
Dolar Amerika Serikat		
Obligasi		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN 2017	-	9.618
Sub-jumlah	4.702	105.432

9. SECURITIES (continued)

a. Based on type and issuer (continued)

	Fair value through profit or loss Rupiah (continued)
Subordinated Bonds	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Series I 2009	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Series II 2009	
Sub-total	
<u>Available-for-sale</u>	
Rupiah	
Bonds	
Perum Pegadaian Series XII A 2007	
Bank Ekspor Indonesia Series IV A 2009	
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Series I B 2007	
PT Indosat Tbk Series VI A 2008	
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Series IV 2007	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Series IX A 2007	
PT Jasa Marga (Persero) Series XIII R 2007	
PT Excelcomindo Pratama Tbk Series II 2007	
PT Bank Panin Tbk Series II B 2007	
PT Berlian Laju Tanker Tbk Series III 2007	
Subordinated Bonds PT Bank NISP Tbk Series II 2008	
United States Dollar	
Bonds	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN 2017	
Sub-total	

Dimiliki hingga jatuh tempo

	2010	2009
Rupiah		
Sertifikat Bank Indonesia	300.000	2.650.000
Obligasi		
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)		
Syariah Ijarah I 2006	30.000	30.000
Sukuk Ijarah II 2007	28.000	28.000
Sukuk Ijarah IV 2010	3.000	-
PT Indosat Tbk		
Sukuk Ijarah III 2008	30.000	30.000
Sukuk Ijarah II 2007	15.000	15.000
Syariah Ijarah 2005	14.000	14.000

Held-to-maturity

	Rupiah
Bank Indonesia Certificated	
Bonds	
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	
Syariah Ijarah I 2006	
Sukuk Ijarah II 2007	
Sukuk Ijarah IV 2010	
PT Indosat Tbk	
Sukuk Ijarah III 2008	
Sukuk Ijarah II 2007	
Syariah Ijarah 2005	

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan penerbit (lanjutan)

	2010	2009
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)</u>		
Rupiah (lanjutan)		
PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008	14.000	14.000
PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008	11.000	11.000
PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007	2.000	2.000
Efek Beragunan Aset KIK EBA Danareksa SMF III - KPR BTN (Catatan 12f)	45.000	-
Efek Beragunan Aset KIK EBA Danareksa SMF II - KPR BTN (Catatan 12f)	31.305	31.305
Efek Beragunan Aset KIK EBA Danareksa SMF I - KPR BTN (Catatan 12f)	11.111	11.111
	<u>534.416</u>	<u>2.836.416</u>
Bunga dan diskonto yang belum diamortisasi	(7.006)	(6.439)
Premi yang belum diamortisasi	65	80
Bersih	<u>527.475</u>	<u>2.830.057</u>
Jumlah	931.177	2.955.491
Penyisihan kerugian Penurunan nilai	(2.820)	(4.411)
Bersih	<u>928.357</u>	<u>2.951.080</u>

9. SECURITIES (continued)

a. Based on type and issuer (continued)

	2010	2009
<u>Held-to-maturity (continued)</u>		
Rupiah (continued)		
PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008	14.000	14.000
PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008	11.000	11.000
PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007	2.000	2.000
Efek Beragunan Aset KIK EBA Danareksa SMF III - KPR BTN (Note 12f)	45.000	-
Efek Beragunan Aset KIK EBA Danareksa SMF II - KPR BTN (Note 12f)	31.305	31.305
Efek Beragunan Aset KIK EBA Danareksa SMF I - KPR BTN (Note 12f)	11.111	11.111
	<u>534.416</u>	<u>2.836.416</u>
Bunga dan diskonto yang belum diamortisasi	(7.006)	(6.439)
Premi yang belum diamortisasi	65	80
Bersih	<u>527.475</u>	<u>2.830.057</u>
Jumlah	931.177	2.955.491
Penyisihan kerugian Penurunan nilai	(2.820)	(4.411)
Bersih	<u>928.357</u>	<u>2.951.080</u>

b. Jatuh tempo dan suku bunga

b. Maturity and interest rate

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah Bank Indonesia	Sertifikat Bank Indonesia/ BI Certificates	< 1 tahun/ < 1 year	Rata-rata 6,50% dan 7,53% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009/Average of 6.50% and 7.53% for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively	Rupiah Bank Indonesia

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

9. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
Perum Pegadaian Seri XII A 2007	Obligasi/Bonds	4 September 2017/ September 4, 2017	10,0250% tetap/ 10.0250% fixed	Perum Pegadaian Series XII A 2007
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Seri IX A 2007	Obligasi/Bonds	10 Juli 2017/ July 10, 2017	10,4000% tetap/ 10.4000% fixed	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Series IX A 2007
Seri XII A 2007	Obligasi/Bonds	8 Juli 2015/ July 8, 2015	9,7000% tetap/ 9.7000% fixed	Series XII A 2007
Syariah Ijarah I 2006	Obligasi/Bonds	21 September 2016/ September 21, 2016	13,6000%/ 13.6000%	Syariah Ijarah I 2006
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	10 Juli 2017/ July 10, 2017	10,4000%/ 10.4000%	Sukuk Ijarah II 2007
Sukuk Ijarah IV 2010	Obligasi/Bonds	28 Desember 2019/ December 28, 2019	12,5500%/ 12.5500%	Sukuk Ijarah IV 2010
PT Indosat Tbk Seri VI A 2008	Obligasi/Bonds	9 April 2013/ April 9, 2013	10,2500% tetap/ 10.2500% fixed	PT Indosat Tbk Series VI A 2008
Sukuk Ijarah III 2008	Obligasi/Bonds	4 September 2013/ September 4, 2013	10,2500%/ 10.2500%	Sukuk Ijarah III 2008
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	29 Mei 2014/ May 29, 2014	10,2000%/ 10.2000%	Sukuk Ijarah II 2007
Syariah Ijarah 2005	Obligasi/Bonds	21 Juni 2011/ June 21, 2011	12,0000%/ 12.0000%	Syariah Ijarah 2005
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Seri I B 2007	Obligasi/Bonds	19 April 2012/ April 19, 2012	10,6000% tetap/ 10.6000% fixed	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Series I B 2007
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Seri IV 2007	Obligasi/Bonds	15 Mei 2012/ May 15, 2012	10,0125% tetap/ 10.0125% fixed	PT Indofood Sukses Makmur Tbk Series IV 2007
PT Jasa Marga (Persero) Seri XIII R 2007	Obligasi/Bonds	21 Juni 2017/ June 21, 2017	10,2500% tetap/ 10.2500% fixed	PT Jasa Marga (Persero) Series XIII R 2007
PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Seri IV A 2009	Obligasi/Bonds	28 Juni 2010/ June 28, 2010	10,0000% tetap/ 10.0000% fixed	PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Series IV A 2009
PT Berlian Laju Tanker Tbk Seri III 2007	Obligasi/Bonds	5 Juli 2012/ July 5, 2012	10,3500% tetap/ 10.3500% fixed	PT Berlian Laju Tanker Tbk Series III 2007
Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	7 Mei 2012/ May 7, 2012	10,3000%/ 10.3000%	Sukuk Ijarah 2007
PT Pupuk Kalimantan Timur	Obligasi/Bonds	4 Desember 2014/ December 4, 2014	10,7500% tetap/ 10.7500% fixed	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Bank Panin Tbk Seri II B 2007	Obligasi/Bonds	19 Juni 2012/ June 19, 2012	10,7500% tetap/ 10.7500% fixed	PT Bank Panin Tbk Series II B 2007
PT Excelcomindo Pratama Tbk Seri II 2007	Obligasi/Bonds	26 April 2012/ April 26, 2012	10,3500% tetap/ 10.3500% fixed	PT Excelcomindo Pratama Tbk Series II 2007
PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008	Obligasi/Bonds	6 Mei 2013/ May 6, 2013	13,7500%/ 13.7500%	PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008
PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008	Obligasi/Bonds	7 Juli 2013/ July 7, 2013	14,5600%/ 14.5600%	PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Seri II 2009	Obligasi/Bonds	3 Januari 2011/ January 3, 2011	9,5000% tetap/ 9.5000% fixed	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Series II 2009

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Date of Maturity	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan) PT Bank NISP Tbk Serii II 2008	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	11 Maret 2018/ March 11, 2018	11,1000% tetap/ 11.1000% fixed	Rupiah (continued) PT Bank NISP Tbk Series II 2008
PT Bank Mandiri Tbk Serii I 2009	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	11 Desember 2016/ December 11, 2016	11,8500% tetap/ 11.8500% fixed	PT Bank Mandiri Tbk Series I 2009
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Serii II 2009	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	22 Desember 2014/ December 22, 2014	10,9500% tetap/ 10.9500% fixed	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Series II 2009
KIK - EBA Danareksa SMF III - KPR BTN (Catatan 12f)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	27 September 2019/ September 27, 2019	Tidak tetap/ Variable cash flow	KIK - EBA Danareksa SMF III - KPR BTN (Note 12f)
KIK - EBA Danareksa SMF II - KPR BTN (Catatan 12f)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	10 Desember 2019/ December 10, 2019	Tidak tetap/ Variable cash flow	KIK - EBA Danareksa SMF II - KPR BTN (Note 12f)
KIK - EBA Danareksa SMF I - KPR BTN (Catatan 12f)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	10 Maret 2018/ March 10, 2018	Tidak tetap/ Variable cash flow	KIK - EBA Danareksa SMF I - KPR BTN (Note 12f)
Dolar Amerika Serikat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN 2017	Obligasi/Bonds	28 Juni 2017/ June 28, 2017	7,250% tetap/ 7.250% fixed	United States dollar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN 2017

9. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

**c. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo
(efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo)**

**c. Remaining period to maturity (held-to-maturity
securities)**

	2010	2009	
≤ 1 tahun	314.000	2.650.000	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 5 tahun	72.000	86.000	> 1 year ≤ 5 years
> 5 tahun ≤ 10 tahun	148.416	100.416	> 5 years ≤ 10 years
	534.416	2.836.416	
Bunga dan diskonto yang belum diamortisasi	(7.006)	(6.439)	Unamortized interest and discount
Premi yang belum diamortisasi	65	80	Unamortized premium
Bersih	527.475	2.830.057	Net

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

d. Peringkat

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero) dan Moody's Investor Service pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Penerbit	Jenis/ Type	2010	2009	Issuer
Perum Pegadaian Seri XII A 2007	Obligasi/Bonds	-	idAA+	Perum Pegadaian Series XII A 2007
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Seri IX A 2007	Obligasi/Bonds	-	idAA-	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Series IX A 2007
Seri XII A 2007	Obligasi/Bonds	idAA+		Series XII A 2007
Syariah Ijarah I 2006	Obligasi/Bonds	idAA-(Sy)	idAA-(Sy)	Syariah Ijarah I 2006
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	idAA+(Sy)	idAA-(Sy)	Sukuk Ijarah II 2007
Sukuk Ijarah IV 2010	Obligasi/Bonds	idAA+(Sy)	idAA-(Sy)	Sukuk Ijarah IV 2010
PLN 2017	Obligasi/Bonds	-	Ba2	PLN 2017
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Seri I B 2007	Obligasi/Bonds	-	idAA+	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Series I B 2007
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Seri IV 2007	Obligasi/Bonds	-	idAA	PT Indofood Sukses Makmur Tbk Series IV 2007
PT Jasa Marga (Persero) Seri XIII R 2007	Obligasi/Bonds	-	idAA-	PT Jasa Marga (Persero) Series XIII R 2007
PT Bank Panin Tbk Seri II B 2007	Obligasi/Bonds	-	idAA-	PT Bank Panin Tbk Series II B 2007
PT Excelcomindo Pratama Tbk Seri II 2007	Obligasi/Bonds	-	idA+	PT Excelcomindo Pratama Tbk Series II 2007
PT Berlian Laju Tanker Tbk Seri III 2007	Obligasi/Bonds	idA-	idA	PT Berlian Laju Tanker Tbk Series III 2007
Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	idA+(Sy)	idA(Sy)	Sukuk Ijarah 2007
PT Pupuk Kalimantan Timur	Obligasi/Bonds	idAA	-	PT Pupuk Kalimantan Timur
PT Indosat Tbk Seri VI A 2008	Obligasi/Bonds	-	idAA+	PT Indosat Tbk Series VI A 2008
Sukuk Ijarah III 2008	Obligasi/Bonds	idAA+(Sy)	idAA+(Sy)	Sukuk Ijarah III 2008
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	idAA+(Sy)	idAA+(Sy)	Sukuk Ijarah II 2007
Syariah Ijarah I 2005	Obligasi/Bonds	idAA+(Sy)	idAA+(Sy)	Syariah Ijarah I 2005
PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Seri IV A 2009	Obligasi/Bonds	-	idAAA	PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Series IV A 2009
PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008	Obligasi/Bonds	idA+(Sy)	idA+(Sy)	PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008
PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008	Obligasi/Bonds	idBBB(Sy)	idBBB(Sy)	PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Seri II 2008	Obligasi/Bonds	-	idAA	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Series II 2008
PT Bank NISP Tbk Seri II 2008	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	-	idA+	PT Bank NISP Tbk Series II 2008
PT Bank Mandiri Tbk Seri I 2009	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	-	idAA+	PT Bank Mandiri Tbk Series I 2009
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Seri II 2009	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	-	idAA+	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Series II 2009

9. SECURITIES (continued)

d. Rating

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero) and Moody's Investor Service on December 31, 2010 and 2009, are as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

- e. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai efek-efek adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Saldo awal tahun	4.411	4.029
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 3)	(1.810)	-
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 32)	219	382
Saldo akhir tahun	2.820	4.411

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai.

- f. Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan efek-efek sebesar Rp68.051 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek - bersih" di laporan laba rugi.
- g. Bank mengakui keuntungan bersih dari kenaikan nilai efek-efek untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi Rp4.360 dan Rp2 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari perubahan nilai efek-efek untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi - bersih" di laporan laba rugi.

9. SECURITIES (continued)

- e. The changes in the allowance for impairment losses on securities are as follows:

	2010	2009
Balance at beginning of year	4.411	4.029
Adjustment in relation with the implementation of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006) (Note 3)	(1.810)	-
Provision of allowance during the year (Note 32)	219	382
Balance at end of year	2.820	4.411

Management believes that the allowance for impairment losses provided on securities is adequate.

- f. The Bank recognized net gain on sale of securities amounting to Rp68,051 for the year ended December 31, 2010 which is presented in the statement of income as "Gain on sale of securities - net".
- g. The Bank recognized net gain from the increase in value of fair value through profit or loss securities amounting to Rp4,360 and Rp2 for the years ended December 31, 2010 and 2009 which is presented in the statement of income as "Gain from change in value of fair value through profit or loss securities - net".

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

9. EFEK-EFEK (lanjutan)

- h. Nilai pasar untuk obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2010 adalah 94,033% sampai dengan 105,667%, dari nilai nominal obligasi yang dimiliki oleh Bank.
- i. Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank melakukan reklasifikasi atas efek-efek dimiliki hingga jatuh tempo menjadi efek-efek diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Nilai pasar pada tanggal pemindahan adalah sebesar Rp2.643.791.
- j. Bank mengakui kerugian bersih yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp18 dan keuntungan bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp2.213 yang disajikan dalam akun "Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih" dalam komponen ekuitas.

9. SECURITIES (continued)

- h. As of December 31, 2010, the market values of all held-to-maturity bonds ranged from 94.033% to 105.667% of the nominal amounts of bonds owned by the Bank.
- i. On January 1, 2010, the Bank reclassified held-to-maturity securities to become fair value through profit or loss securities. The total market value at the date of transfer amounted to Rp2,643,791.
- j. The Bank recognized net loss from decrease in value of available-for-sale securities amounting to Rp18 for the year ended December 31, 2010, and net gain from increase in value of available-for-sale securities amounting to Rp2,213 for the year ended December 31, 2009 which is presented as "unrealized gain (loss) on available-for-sale securities and government bonds - net" as a component of the stockholders' equity.

10. OBLIGASI PEMERINTAH

10. GOVERNMENT BONDS

	2010	2009	
Nilai wajar melalui laporan laba rugi			<i>Fair value through profit or loss</i>
Tingkat bunga tetap			<i>Fixed interest rate</i>
FR 002	-	10.723	<i>FR 002</i>
Jumlah Obligasi Pemerintah -			Total Government Bonds -
Nilai wajar melalui laporan			Fair value through profit or loss
laba rugi	-	10.723	
Tersedia untuk dijual			<i>Available-for-sale</i>
Tingkat bunga tetap			<i>Fixed interest rate</i>
Rupiah			<i>Rupiah</i>
FR 0020	36.117	35.402	<i>FR0020</i>
FR 0033	11.281	11.112	<i>FR0033</i>
FR 0047	-	55.143	<i>FR0047</i>
FR 0010	-	40.520	<i>FR0010</i>
FR 0036	-	32.664	<i>FR0036</i>
FR 0048	-	32.333	<i>FR0048</i>
FR 0026	-	32.332	<i>FR0026</i>
FR 0028	-	30.782	<i>FR0028</i>
FR 0038	-	22.014	<i>FR0038</i>
FR 0045	-	21.735	<i>FR0045</i>
FR 0013	-	10.577	<i>FR0013</i>
	47.398	324.614	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

10. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)**10. GOVERNMENT BONDS (continued)**

	2010	2009	
Tersedia untuk dijual (lanjutan)			<i>Available-for-sale (continued)</i>
Tingkat bunga tetap (lanjutan)			<i>Fixed interest rate (continued)</i>
Dollar Amerika Serikat			<i>United States Dollar</i>
RI 2018	-	31.077	<i>RI 2018</i>
RI 2017	-	20.756	<i>RI 2017</i>
RI 2016	-	10.693	<i>RI 2016</i>
RI 2037	-	9.328	<i>RI 2037</i>
	-	71.854	
Sub-jumlah	47.398	396.468	<i>Sub-total</i>
Tingkat bunga mengambang			<i>Variable interest rate</i>
VR 0031	1.140.649	1.074.375	<i>VR 0031</i>
VR 0023	907.893	875.916	<i>VR 0023</i>
VR 0028	823.136	811.241	<i>VR 0028</i>
VR 0020	759.630	-	<i>VR 0020</i>
VR 0029	725.682	457.228	<i>VR 0029</i>
VR 0027	570.437	540.028	<i>VR 0027</i>
VR 0026	468.411	461.265	<i>VR 0026</i>
VR 0021	348.343	338.697	<i>VR 0021</i>
VR 0022	27.521	26.597	<i>VR 0022</i>
VR 0018	2.233	2.201	<i>VR 0018</i>
VR 0017	700	694	<i>VR 0017</i>
	5.774.635	4.588.242	
Jumlah Obligasi Pemerintah - Tersedia untuk dijual	5.822.033	4.984.710	Total Government bonds - Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo			<i>Held-to-maturity</i>
Tingkat bunga tetap			<i>Fixed interest rate</i>
FR 0010	-	10.000	<i>FR 0010</i>
Tingkat Bunga mengambang			<i>Variable interest rate</i>
VR 0031	1.125.000	1.125.000	<i>VR 0031</i>
VR 0029	200.000	457.938	<i>VR 0029</i>
VR 0020	-	750.000	<i>VR 0020</i>
Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0002 2008	50.000	50.000	<i>Government sharia bond Series IFR-0002 2008</i>
	1.375.000	2.392.938	
Diskonto yang belum diamortisasi	(3.901)	(8.444)	<i>Unamortized discount</i>
Premi yang belum diamortisasi	138	286	<i>Unamortized premium</i>
Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo - bersih	1.371.237	2.384.780	Government bonds held-to-maturity - net
Jumlah	7.193.270	7.380.213	Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

10. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Obligasi pemerintah sejumlah nominal Rp4.262.730 dan Rp4.200.527 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 21).

Obligasi tingkat bunga tetap memperoleh bunga tahunan berkisar antara 12,500% sampai dengan 14,275% dan 6,625% sampai dengan 15,425% masing-masing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

Nilai pasar untuk obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing berkisar antara 100,5450% sampai dengan 120,3915% dan antara 89,8138% sampai dengan 118,0056% dari nilai nominal obligasi yang dimiliki oleh Bank. Keuntungan yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp127.659. Sedangkan kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp56.452. Keduanya disajikan dalam akun "Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual - bersih" dalam komponen ekuitas.

Nilai pasar untuk obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing berkisar antara 101,3700% sampai dengan 101,3910% dan 95,500% sampai dengan 101,3000% dari nominal obligasi.

Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan obligasi pemerintah sebesar Rp42.444 dan Rp5.198 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - bersih" di laporan laba rugi.

Bank mengakui kerugian bersih dari perubahan nilai obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi sebesar Rpnil dan Rp27 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang disajikan dalam akun "Kerugian dari perubahan nilai obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi - bersih" di laporan laba rugi.

10. GOVERNMENT BONDS (continued)

As of December 31, 2010 and 2009, the government bonds with nominal amounts of Rp4,262,730 and Rp4,200,527, respectively, were sold under repurchase agreements (Note 21).

The bonds with fixed interest rates bear interest at annual rates ranged from 12.500% to 14.275% and from 6.625% to 15.425% for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively.

As of December 31, 2010 and 2009, the market values of available-for-sale government bonds ranged from 100.5450% to 120.3915% and from 89.8138% to 118.0056%, respectively, of the nominal amounts of the bonds owned by the Bank. As of December 31, 2010 the unrealized gain due to the increase in the fair value of available-for-sale government bonds amounted to Rp127,659. While in December 31, 2009, the unrealized loss due to the decrease in the fair value of available-for-sale government bonds amounted to Rp56,452. Both are presented as "Unrealized gains (losses) on available-for-sale securities and government bonds - net" as a component of Stockholders' equity.

As of December 31, 2010 and 2009, the market values of held-to-maturity government bonds ranged from 101.3700% to 101.3910% and from 95.500% to 101.3000% respectively of the bonds nominal amounts.

The Bank recognized net gain on sale of government bonds amounting to Rp42,444 and Rp5,198 for the years ended December 31, 2010 and 2009, which is presented in the statement of income as "Gain on sale of government bonds - net".

The Bank recognized net loss from the change in value of government bonds classified as fair value through profit or loss amounting to Rpnil and Rp27 for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively, which is presented as "Loss from change in value of fair value through profit or loss government bonds - net" in the statements of income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

10. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/177/DpG/DPNP tanggal 9 Oktober 2008 perihal Penetapan Nilai Wajar dan Reklasifikasi Surat Utang Negara (SUN), pada tanggal 19 Desember 2008, Bank telah melakukan reklasifikasi Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual ke Obligasi Pemerintah Dimiliki Hingga Jatuh Tempo efektif per tanggal 1 September 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp2.332.938. Nilai pasar Obligasi Pemerintah yang Tersedia untuk Dijual pada tanggal pemindahan (1 September 2008) tersebut adalah Rp2.322.981. Selisih antara nilai nominal dan nilai pasar diamortisasi sampai dengan obligasi jatuh tempo. Laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas dan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo obligasi.

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank juga telah melakukan reklasifikasi Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ke Obligasi Pemerintah Tersedia Untuk Dijual. Nilai pasar pada tanggal pemindahan adalah sebesar Rp994.515.

11. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN SWAP SUKU BUNGA

Bank menghadapi risiko pasar atas perubahan tingkat suku bunga dan menggunakan instrumen derivatif sehubungan dengan aktivitas manajemen risiko. Bank tidak menggunakan atau menerbitkan instrumen derivatif untuk tujuan diperdagangkan.

Pada bulan September 2006 dan 2005, Bank menandatangani perjanjian *swap* suku bunga dengan beberapa *counter-party* untuk melindungi risiko suku bunga yang berhubungan dengan obligasi tingkat bunga tetap yang diterbitkan oleh Bank (obligasi BTN IX tahun 2003, obligasi BTN XI tahun 2005 dan obligasi BTN XII tahun 2006) dan rincian saldo pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

10. GOVERNMENT BONDS (continued)

Based on Letter No. 10/177/DpG/DPNP dated October 9, 2008 of Bank Indonesia regarding Fair Value Determination and Reclassification of State Promissory Notes, as of December 19, 2008, the Bank reclassified government bonds classified as available-for-sale to become held-to-maturity government bonds with nominal amount of Rp2,332,938, effective on September 1, 2008. The market value of available-of-sale government bonds as of reclassification date (September 1, 2008) amounted to Rp2,322,981. The difference between the nominal and market value is amortized until maturity of the bonds. The unrealized gain or loss on the date of reclassification is presented as a component of stockholders' equity and amortized until the maturity date of the bonds.

On January 1, 2010, the Bank also reclassified government bonds classified as held to maturity to become available-for-sale. The market value amounted to Rp994,515 on the date of reclassification.

11. INTEREST RATE SWAP RECEIVABLES AND LIABILITIES

The Bank is exposed to market risks on the changes in interest rates, and uses derivative instruments in connection with its risk management activities. The Bank does not use or issue derivative financial instruments for trading purposes.

In September 2006 and 2005, the Bank entered into interest rate swap agreements with several counter-parties to hedge against interest rate risks relating to fixed rate bonds issued by the Bank (BTN IX bonds in 2003, BTN XI bonds in 2005 and BTN XII bonds in 2006) and the details as of December 31, 2010 and 2009 are as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

11. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN SWAP SUKU BUNGA (lanjutan)

11. INTEREST RATE SWAP RECEIVABLES AND LIABILITIES (continued)

31 Desember 2009/December 31, 2009

Counter-party	Tanggal Kontrak/ Contract Date	Tanggal Efektif/ Effective Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Jumlah Nosional (Kontrak)/ Notional Amount (Contract)	Suku bunga tetap yang dibayar oleh counter-party/ Fixed interest rate paid by counter-party	Suku bunga mengambang yang dibayar oleh Bank/ Floating interest rate paid by the Bank	Counter-party
Tagihan swap suku bunga Standard Chartered Bank ABN-AMRO Bank N.V.	1/9/2005 22/9/2005	6/9/2005 26/9/2005	6/7/2010 6/7/2010	375.000 250.000	12,00% 12,00%	SBI 3 bulan/months -1,60% SBI 3 bulan/months -1,70%	Interest rate swap receivables Standard Chartered Bank ABN-AMRO Bank N.V.
Nilai Wajar/Fair Values							
				2009			
Tagihan swap suku bunga Standard Chartered Bank ABN-AMRO Bank N.V.				19.934			Interest rate swap receivables Standard Chartered Bank
				13.476			ABN-AMRO Bank N.V.
Jumlah				33.410			Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai				(351)			Allowance for impairment losses
Bersih				33.059			Net

Pada tahun 2009, rata-rata tingkat suku bunga mengambang yang dibayar oleh Bank kepada counter-party Standard Chartered Bank dan ABN-AMRO Bank N.V. adalah masing-masing sebesar 7,02% dan 6,92%.

In 2009, the average floating interest rate paid by the Bank to Standard Chartered Bank and ABN-AMRO Bank N.V. amounted to 7.02% and 6.92%, respectively.

Bank mencatat beban bunga atas transaksi swap suku bunga sebesar Rp509 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 (Catatan 30). Bank juga mencatat penerimaan bunga atas transaksi swap suku bunga sebesar Rp35.464 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 (Catatan 29).

The Bank recorded interest expense amounting to Rp509 from the interest rate swap transactions for the year ended December 31, 2010 (Note 30). The Bank also recorded interest income amounting to Rp35,464 from the interest rate swap transactions for the year ended December 31, 2009 (Note 29).

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai pada tagihan swap suku bunga adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for impairment losses on interest rate swap receivables are as follows:

	2010	2009	
Saldo awal tahun	351	333	Balance at beginning of year
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 3)	(351)	-	Adjustment in relation with the implementation of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006) (Note 3)
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 32)	-	18	Provision of allowance during the current year (Note 32)
Saldo akhir tahun	-	351	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai tagihan swap suku bunga telah memadai.

Management believes that the allowance for impairment losses on the interest rate swap receivables is adequate.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah adalah dalam Rupiah. Rincian kredit yang diberikan oleh Bank berdasarkan jenis, sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah

	2010	2009
Konsumsi		
Pemilikan rumah (KPR)	36.667.857	31.570.061
Non-kepemilikan rumah	5.810.141	3.194.310
	42.477.998	34.764.371
Modal kerja	7.676.765	5.301.415
Investasi	1.097.065	343.046
Sindikasi	48.882	48.882
Direksi dan karyawan		
Pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa	227.957	255.774
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	20.834	19.466
Jumlah	51.549.501	40.732.954
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(880.686)	(703.553)
Bersih	50.668.815	40.029.401

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES

All loans provided by the Bank, including sharia financing/receivables are in rupiah. The details of loans classified by type, economic sector, period based on agreements, remaining period to maturity and collectibility are as follows:

a. Types of Loans and Sharia Financing/Receivables

Consumer Housing loan
Non-housing loan
Working capital Investment
Syndicated Directors and employees
Non-related parties
Related parties
Total
Less allowance for impairment losses
Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

b. Sektor Ekonomi

b. Economic Sector

	2010	2009	
Perumahan			Property
Pemilikan rumah (KPR)	36.462.967	31.570.061	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	726.058	7.098.184	Non-housing loan
	37.189.025	38.668.245	
Konstruksi	5.940.398	570.504	Construction
Jasa-jasa dunia usaha	1.849.210	155.046	Business service
Manufaktur	89.318	4.221	Manufacturing
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	18.869	3.692	Transportation, warehousing, and communication
Perdagangan, restoran, dan hotel	175.422	60.245	Trading, restaurant and hotel
Pertanian	11.771	6.145	Farming
Pertambangan	31.379	118	Mining
Jasa-jasa sosial	37.931	1.463	Social service
Listrik, Gas, dan Air	6.393	443	Electricity, gas and water
Lain-lain	6.199.785	1.262.832	Others
Jumlah	51.549.501	40.732.954	Total
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai	(880.686)	(703.553)	Less allowance for impairment losses
Bersih	50.668.815	40.029.401	Net

c. Kolektibilitas

c. Collectibility

	2010		2009		
	Pokok/ Principal	Penyisihan/ Allowance	Pokok/ Principal	Penyisihan/ Allowance	
Individual Kolektif	3.865.833	82.320	-	-	Individual Collective
Lancar	39.785.072	454.180	34.326.341	389.390	Current
Dalam perhatian khusus	6.305.616	68.882	5.036.303	65.319	Special mention
Kurang lancar	147.724	5.392	120.956	4.232	Substandard
Diragukan	217.291	22.147	182.637	19.876	Doubtful
Macet	1.227.965	247.765	1.066.717	224.736	Loss
Jumlah	51.549.501	880.686	40.732.954	703.553	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES (continued)

d. Jangka Waktu (sesuai dengan perjanjian kredit dan pembiayaan/piutang syariah)

d. Loan Period (based on agreements covering loan and sharia financing/receivables)

	2010	2009	
≤ 1 tahun	1.312.123	893.963	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	2.761.676	2.021.729	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	5.821.985	3.314.836	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	41.653.717	34.502.426	> 5 years
Jumlah	51.549.501	40.732.954	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(880.686)	(703.553)	Allowance for impairment losses
Bersih	50.668.815	40.029.401	Net

e. Sisa Umur Jatuh Tempo

e. *Remaining Period to Maturity*

	2010	2009	
≤ 1 tahun	4.839.130	2.989.680	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	2.661.539	1.782.696	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	6.094.314	4.524.875	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	37.954.518	31.435.703	> 5 years
Jumlah	51.549.501	40.732.954	Total
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(880.686)	(703.553)	Allowance for impairment losses
Bersih	50.668.815	40.029.401	Net

f. Informasi Pokok Lainnya

f. *Other Significant Information*

i. Termasuk di dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

i. *The loans include sharia financing/receivables with details, as follows:*

	2010	2009	
Piutang Murabahah	1.312.613	981.836	Murabahah receivables
Pembiayaan Mudharabah	1.136.847	808.813	Mudharabah financing
Pembiayaan Musyarakah	329.833	157.468	Musyarakah financing
Piutang Istishna	65.486	47.486	Istishna receivables
Rahn	1.802	149	Rahn
Jumlah	2.846.581	1.995.752	Total
Penyisihan kerugian Penurunan nilai	(155.567)	(83.724)	Allowance for impairment losses
Bersih	2.691.014	1.912.028	Net

ii. Suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit perumahan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 11,18% dan 11,66%. Suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit korporasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 12,63% dan 13,31%.

ii. *The average annual interest rates for housing loans were 11.18% and 11.66% for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively. The average annual interest rates for corporate loans for the years ended December 31, 2010 and 2009 were 12.63% and 13.31%, respectively.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

- iii. Kredit konsumsi terdiri dari kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit yang berkaitan dengan perumahan. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, KPR masing-masing sebesar Rp1.010.133 dan Rp896.311 telah dijadikan jaminan pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (Catatan 23).
- iv. Kredit yang diberikan dijamin dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank (Catatan 17, 18 dan 19).
- v. Bank telah melakukan sekuritisasi pertama atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("Kumpulan Tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai Koordinator Global dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas Kumpulan Tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa SMFI-KPR BTN (KIK-DSMF-I) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 80 tanggal 16 Januari 2009 dan Akta cessie No. 70 tanggal 11 Februari 2009. KIK-DSMF-I dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 79 tanggal 16 Januari 2009. Nilai pokok Kumpulan Tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan Kumpulan Tagihan terseleksi adalah sebesar Rp111.111 yang terdiri dari 5.060 debitur dengan harga sebesar nilai pokok Kumpulan Tagihan pada tanggal cut-off final (7 Januari 2009). Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur Kumpulan Tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 15% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah tanggal 7 Desember 2015. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Other Significant Information (continued)

- iii. Consumer loans consist of housing loans and other housing-related loans. As of December 31, 2010 and 2009, housing loans amounting to Rp1,010,133 and Rp896,311, respectively, are used as collateral for loans obtained from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (Note 23).
- iv. The loans are collateralized by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell, current accounts, savings deposits, time deposits, or by other collaterals generally acceptable to the Bank (Notes 17, 18 and 19).
- v. The Bank conducted the first securitization on its housing loans bills ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Global Coordinator, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, was sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa SMF I-KPR BTN (KIK-DSMF-I) based on sale-purchase deed No. 80 dated January 16, 2009 and cessie deed No. 70 dated February 11, 2009. KIK-DSMF-I was established based on Collective Investment Contract, between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 79 dated January 16, 2009. As of January 7, 2009, (cut-off date), the pool of receivables, which represents selected receivables totaling Rp111,111 and consisting of 5,060 debtors, was sold and transferred at their total principal value. The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale amounted to 15% with a maximum maturity up to December 7, 2015. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

Selanjutnya, KIK-DSMF-I menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas Kumpulan Tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DSMF-1 issued Asset-Backed Securities (ABS) which represent an instrument of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

(i) EBA Kelas A senilai Rp100.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 13% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 10 Maret 2018. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Moody's Indonesia yaitu *Aaa_id* (*triple A; Stable Outlook*). Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DSMF-I telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui surat No. S-647/BL/2009 tanggal 29 Januari 2009; dan

(i) Class A ABS amounting to Rp100,000 which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of class A ABS with interest at the annual fixed rate of 13% and due on March 10, 2018. The Class AABS were rated *Aaa_id* (*triple A; Stable Outlook*) by PT Moody's Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DSMF-I became effective based on Letter No. S-647/BL/2009 dated January 29, 2009 of the Chairman of BAPEPAM-LK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp11.111 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2018. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 10 Februari 2009, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada neraca Bank (Catatan 9).

(ii) Class B ABS with principal value of Rp11,111 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on March 10, 2018. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that the Bank has the first priority to purchase Class B ABS. Class B ABS holders have the right on the residual cash flow based on the payment priorities in each interest period. On February 10, 2009, the Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities on the Bank's balance sheets (Note 9).

Transaksi penjualan Kumpulan Tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan Kumpulan Tagihan sebesar Rp111.111 dari neraca Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank has excluded the pool of receivables amounting to Rp111,111 from its balance sheets (*derecognition*).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

Atas transaksi sekuritisasi atas Kumpulan Tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 114/PKS/DIM/08 tanggal 4 Desember 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua Perjanjian Penyediaan Jasa No. 46/ADD/PKS/DIR/2008 tertanggal 26 Desember 2008. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DSMF-I dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DSMF-I yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 114/PKS/DIM/08 dated December 4, 2008 which was last amended by the second Amendment of Service Provider Agreement No. 46/ADD/PKS/DIR/2008 dated December 26, 2008, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DSMF-I and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DSMF-I, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas Kumpulan Tagihan telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut off* final (7 Januari 2009), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, Kumpulan Tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari Kumpulan Tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terhutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (January 7, 2009), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders which are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher price between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables after deducting the amount of late payments on the receivable at the time of exercising the clean-up call or (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

- vi. Bank telah melakukan sekuritisasi kedua atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("Kumpulan Tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai koordinator Global dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas Kumpulan Tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa SMFII-KPR BTN (KIK-DSMF-II) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 135 tanggal 19 Oktober 2009 dan Akta cession No. 33 tanggal 10 November 2009. KIK-DSMF-II dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 13 tanggal 5 Agustus 2009 dan diamandemen dengan akta No. 134 tanggal 19 Oktober 2009. Nilai pokok Kumpulan Tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan Kumpulan Tagihan terseleksi adalah sebesar Rp391.305 yang terdiri dari 15.114 debitur dengan harga sebesar nilai pokok Kumpulan Tagihan pada tanggal *cut-off* final (7 Oktober 2009). Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur Kumpulan Tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 15% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 7 Oktober 2017. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

Selanjutnya, KIK-DSMF-II menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas Kumpulan Tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

- vi. The Bank conducted the second securitization transaction on its housing loans bills ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Global Coordinator, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables which have met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, was sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa SMFII-KPR BTN (KIK-DSMF-II) based on sale-purchase deed No. 135 dated October 19, 2009 and cession deed No. 33 dated November 10, 2009. KIK-DSMF-II was established based on Collective Investment Contract, between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 13 dated August 5, 2009 which was amended with deed No. 134 dated October 19, 2009. On the final cut-off date (October 7, 2009), the pool of receivables, which represents selected receivables totaling Rp391,305 and consisting of 15,114 debtors, was sold and transferred at their total principal value. The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale amounted to 15% with a maximum maturity up to October 7, 2017. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Further, KIK-DSMF-II issued Asset-Backed Securities (ABS) which represent an instrument of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

(i) EBA Kelas A senilai Rp360.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 10 Desember 2019. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 30 Oktober 2009, Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DSMF-II telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui surat No. S-9604/BL/2009 tanggal 30 Oktober 2009; dan

(i) Class A ABS amounting to Rp360,000 which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of class A ABS with interest at the annual fixed rate of 11% and due on December 10, 2019. The Class A ABS was rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DSMF-II became effective based on Letter No. S-9604/BL/2009 dated October 30, 2009 of the Chairman of BAPEPAM-LK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp31.305 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2019. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 10 November 2009, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada neraca Bank (Catatan 9).

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp31,305 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and mature on December 10, 2019. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that the Bank has the first priority to purchase Class B ABS. Class B ABS holders have the right on the residual cash flow based on the payment priorities in each interest period. On November 10, 2009, Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities on the Bank's balance sheets (Note 9).

Transaksi penjualan Kumpulan Tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan Kumpulan Tagihan sebesar Rp391.305 dari neraca Bank (penghentian pengakuan).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank has removed the pool of receivables amounting to Rp391,305 from its balance sheets (*derecognition*).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

Atas transaksi sekuritisasi atas Kumpulan Tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 56/PKS/DIR/2009 tanggal 7 Agustus 2009. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DSMF-II dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DSMF-II yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 56/PKS/DIR/2009 dated August 7, 2009, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DSMF-II and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DSMF-II, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas Kumpulan Tagihan telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut off* final (7 Oktober 2009), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, Kumpulan Tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari Kumpulan Tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (October 7, 2009), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders which are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher price between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivable at the time of exercising the clean-up call or (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

- vii. Bank telah melakukan sekuritisasi ketiga atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("Kumpulan Tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai coordinator Global dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas Kumpulan Tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa BTN (KIK-DBTN-01) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 158 tanggal 16 Desember 2010 dan Akta cession No. 33 tanggal 27 Desember 2010. KIK-DBTN-01 dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management

- vii. The Bank conducted the third securitization transaction on its housing loans bills ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Global Coordinator, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables which have met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, was sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa BTN01-KPR BTN (KIK-DBTN-01) based on sale-purchase deed No. 158 dated December 16, 2010 and cession deed No. 33 dated December 27, 2010. KIK-DBTN-01 was established based on Collective Investment Contract, between PT Danareksa Investment Management

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 118 tanggal 15 Desember 2010. Nilai pokok Kumpulan Tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan Kumpulan Tagihan terseleksi adalah sebesar Rp750.000 yang terdiri dari 33.663 debitur dengan harga sebesar nilai pokok Kumpulan Tagihan pada tanggal *cut-off* final (12 Desember 2010). Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur Kumpulan Tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 15% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 27 September 2019. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

as the investment manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 118 dated December 15, 2010. On the final cut-off date (December 12, 2010), the pool of receivables, which represents selected receivables totaling Rp750,000 and consisting of 33,663 debtors, was sold and transferred at their total principal value. The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale amounted to 15% with a maximum maturity up to September 27, 2019, 2017. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Selanjutnya, KIK-DBTN-01 menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas Kumpulan Tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DBTN-01 issued Asset-Backed Securities (ABS) which represent an instrument of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

- (i) EBA Kelas A senilai Rp688.500 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 27 September 2019. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 30 Oktober 2009, Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DBTN-01 telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui surat No. S-11491/BL/2010 tanggal 23 Desember 2010; dan

- (i) Class A ABS amounting to Rp688,500 which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of class A ABS with interest at the annual fixed rate of 9.25% and due on September 27, 2019. The Class ABS was rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DBTN-01 dated October 30, 2009 became effective based on Letter No. S-11491/BL/2010 dated December 23, 2010 of the Chairman of BAPEPAM-LK; and

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp61.500 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 27 Desember 2010, Bank telah membeli EBA Kelas B sebesar 6% dari keseluruhan EBA Kelas B yang ditawarkan dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada neraca Bank (Catatan 9).

Transaksi penjualan Kumpulan Tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan Kumpulan Tagihan sebesar Rp750.000 dari neraca Bank (penghentian pengakuan).

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp61,500 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and mature on September 27, 2019. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that the Bank has the first priority to purchase Class B ABS. Class B ABS holders have the right on the residual cash flow based on the payment priorities in each interest period. On December 27, 2010, Bank purchased 6% of Class B ABS offered and recorded it as held-to-maturity securities on the Bank's balance sheets (Note 9).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank has removed the pool of receivables amounting to Rp750,000 from its balance sheets (derecognition).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

Atas transaksi sekuritisasi atas Kumpulan Tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 47/PKS/DIR/2010 tanggal 15 November 2010. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DBTN-01 dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DBTN-01 yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 47/PKS/DIR/2010 dated November 15, 2010, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DBTN-01 and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DBTN-01, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas Kumpulan Tagihan telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut off* final (12 Desember 2010), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, Kumpulan Tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari Kumpulan Tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terhutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (December 12, 2010), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders which are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher price between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivable at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

12. LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES (continued)

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

viii. Kredit yang diberikan kepada direksi dan karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya yang dibebani bunga dengan suku bunga rata-rata pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 7,30% dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 7,55% dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 10 tahun. Kredit ini dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

viii. The loans given to the Bank's directors and employees consist of loans intended for acquisitions of vehicles and other personal necessities with average interest of 7.30% for the year ended December 31, 2010 and 7.55% for the year ended December 31, 2009, with terms of 1 to 10 years. The loans are settled through monthly payroll deductions.

ix. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp20.834 dan Rp19.466. Persentase kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 0,0410% dan 0,0477%.

ix. As of December 31, 2010 and 2009, the outstanding balances of loans and sharia financing/receivables from related parties amounted to Rp20,834 and Rp19,466, respectively. As of December 31, 2010 and 2009, the percentages of loans and sharia financing/receivables from related parties represent approximately 0.0410% and 0.0477%, respectively, of the total loans and sharia financing/receivables.

x. Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

x. The changes in the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

	2010	2009	
Saldo awal tahun	703.553	556.595	Balance at beginning of year
Penyesuaian sehubungan dengan penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) (Catatan 3)	(46.333)	-	Adjustment in relation with the implementation of PSAK No. 50 (Revised 2006) and PSAK No. 55 (Revised 2006) (Note 3)
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 32)	323.376	68.301	Provisions during the year (Note 32)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	110	86.671	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(100.020)	(8.014)	Loans written-off
Saldo akhir tahun	880.686	703.553	Balance at the end of year

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

Termasuk di dalam saldo penyisihan kerugian adalah penyisihan kerugian pembiayaan/piutang *syariah* sebesar Rp155.567 dan Rp83.724 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

As of December 31, 2010 and 2009, the balance of allowance for impairment losses includes allowance for possible losses of sharia financing/receivables amounting to Rp155,567 and Rp83,724, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *syariah* yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables are adequate.

xi. Kredit bermasalah dan sedang dalam proses penyelamatan atau restrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp170.434 dan Rp140.913. Restrukturisasi yang dilakukan Bank adalah dengan menanggihkan pembayaran bunga dan/atau memperpanjang masa pembayaran pokok kredit dan bunga tertunggak, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan penambahan fasilitas kredit.

xi. As of December 31, 2010 and 2009, non-performing loans under restructuring amounted to Rp170,434 and Rp140,913, respectively. Restructuring schemes undertaken by the Bank include the suspension of payment of interest and/or extension of payment period for loan principal and interest payable, decrease in interest rates, discount on interest payable and granting of additional credit facilities.

xii. Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit (*credit limit*) dan kebijakan penyaluran kredit yang seragam, melakukan pengawasan individual portofolio secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit.

xii. The credit control function of the Bank focuses on preventing the deterioration of the quality of credit portfolio and unsound practices in granting credit facilities that may result in losses. Credit risks are managed by establishing credit limits and setting uniform lending policies, periodic monitoring of individual portfolio, and measuring the collectibility level of credit portfolio.

xiii. Dalam laporan Bank ke Bank Indonesia disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa maupun kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

xiii. Based on report submitted by the Bank to Bank Indonesia as of December 31, 2010 and 2009, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

xiv. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode *gross* dan *net*) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut:

xiv. The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the gross and net methods) are shown in the following table:

Kolektibilitas	2010		2009		Collectibility
	Konvensional/ Conventional	Syariah	Konvensional/ Conventional	Syariah	
Kurang Lancar	139.581	12.982	108.657	12.299	Substandard Doubtful Loss
Diragukan	198.916	28.085	180.587	2.050	
Macet	1.204.510	98.475	1.014.296	52.421	
	1.543.007	139.542	1.303.540	66.770	Allowance for impairment losses for NPL/NPF
Penyisihan kerugian Penurunan nilai atas NPL/NPF	(230.232)	(81.920)	(198.475)	(50.369)	
Bersih	1.312.775	57.622	1.105.065	16.401	Net
Jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	48.702.920	2.846.581	38.737.202	1.995.752	Total loans and sharia financing/receivables
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (Gross NPL/NPF)	3,17%	4,90%	3,37%	3,35%	% of non-performing loans and sharia financing/ receivables (Gross NPL/NPF)
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (Net NPL/NPF)	2,70%	2,02%	2,85%	0,82%	% of non-performing loans and sharia financing/ receivables (Net NPL/NPF)

NPL/NPF neto dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setelah dikurangi penyisihan kerugian dengan jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah keseluruhan.

The net NPL/NPF ratios are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables net of allowance for possible losses, by the total loans and sharia financing/receivables.

xv. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan sebesar 3,38% dan 3,17% dari jumlah kredit sindikasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.

xv. Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2010 and 2009, the Bank's share as a co-lender in syndicated loans was 3.38% and 3.17%, respectively, of the total syndicated loans.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**12. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**12. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

f. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

f. Other Significant Information (continued)

xvi. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Bank memiliki saldo kredit yang dihapusbukukan masing-masing sebesar Rp776.246 dan Rp754.984. Bank terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit tersebut. Ikhtisar mutasi kredit hapus buku adalah sebagai berikut:

xvi. The Bank has loans written-off as of December 31, 2010 and 2009 amounting to Rp776,246 and Rp754,984, respectively. The Bank continues to pursue these loans for collection. The summary of the movements of the loans written-off is as follows:

	2010	2009	
Saldo awal tahun	754.984	833.641	<i>Balance at beginning of year</i>
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	100.020	8.014	<i>Write-off during the current year</i>
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	(78.758)	(86.671)	<i>Recovery of loans written-off</i>
Saldo akhir tahun	776.246	754.984	<i>Balance at the end of year</i>

13. ASET TETAP

13. PREMISES AND EQUIPMENT

	2010				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ Reklasifikasi/ <i>Additions/ Reclassifications</i>	Pengurangan/ Reklasifikasi/ <i>Deductions/ Reclassifications</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Nilai Tercatat					<i>Carrying Value</i>
Tanah	512.086	19.175	-	531.261	<i>Land</i>
Bangunan	448.988	227.958	939	676.007	<i>Buildings</i>
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	739.964	275.841	274.577	741.228	<i>Office furnitures, fixtures and motor vehicles</i>
Jumlah	1.701.038	522.974	275.516	1.948.496	<i>Total</i>
Aktiva dalam penyelesaian	261.035	29.292	204.610	85.717	<i>Constructions in progress</i>
Jumlah Nilai Tercatat	1.962.073	552.266	480.126	2.034.213	<i>Total Carrying Value</i>
Akumulasi Penyusutan					<i>Accumulated Depreciation</i>
Bangunan	153.593	30.041	-	183.634	<i>Buildings</i>
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	571.808	102.218	274.284	399.742	<i>Office furnitures, fixtures and motor vehicles</i>
Jumlah Akumulasi Penyusutan	725.401	132.259	274.284	583.376	<i>Total Accumulated Depreciation</i>
Nilai Buku	1.236.672			1.450.837	<i>Net Book Value</i>

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

13. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

2009					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Nilai Tercatat</u>					<u>Carrying Value</u>
Tanah	511.786	300	-	512.086	Land
Bangunan	545.397	37.356	133.765	448.988	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	655.155	106.783	21.974	739.964	Office furnitures, fixtures and motor vehicles
Jumlah	1.712.338	144.439	155.739	1.701.038	Total
Aktiva dalam penyelesaian	28.137	232.898	-	261.035	Constructions in progress
Jumlah Nilai Tercatat	1.740.475	377.337	155.739	1.962.073	Total Carrying Value
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	168.283	19.293	33.983	153.593	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	499.547	79.840	7.579	571.808	Office furnitures, fixtures and motor vehicles
Jumlah Akumulasi Penyusutan	667.830	99.133	41.562	725.401	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	1.072.645			1.236.672	Net Book Value

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp132.259 dan Rp99.133 (Catatan 33).

Hak atas tanah terdiri dari hak milik dan hak guna bangunan yang diperoleh untuk jangka waktu antara 20 tahun sampai 30 tahun yang akan berakhir pada berbagai tanggal, yaitu antara tanggal 11 Januari 2011 sampai 30 Maret 2036, kecuali untuk sembilan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang telah jatuh tempo pada tahun 2010 yang sedang dalam proses peningkatan status menjadi hak milik. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu hak atas tanah dapat diperbaharui/ diperpanjang kembali.

Penambahan aset tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 termasuk reklasifikasi dari properti terbengkalai sebesar Rp12.104. Penambahan aset tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 termasuk reklasifikasi dari properti terbengkalai sebesar Rp29.696.

Depreciation of premises and equipment charged to operations amounted to Rp132,259 and Rp99,133 for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively (Note 33).

Landrights consist of ownership rights and rights to use for periods ranging from 20 to 30 years and will expire on various dates from January 11, 2010 up to March 30, 2036 except for nine rights to build (HGB) which expired in 2010 which are in the process of status upgrade to ownership rights. Management has the opinion that the terms of the landrights can be renewed/extended upon their expiration.

For the year ended December 31, 2010, additions to premises and equipment include reclassification from abandoned properties amounting to Rp12,104. For the year ended December 31, 2009 additions to premises and equipment include reclassification from abandoned properties amounting to Rp29,696.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap kecuali tanah diasuransikan terhadap risiko kerugian karena kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu antara lain pada PT Asuransi Bina Griya Upakara (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) dan PT Asuransi Ramayana Tbk. Jumlah seluruh nilai pertanggungan adalah sebesar Rp1.495.742 dan Rp1.086.430 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko tersebut adalah cukup.

Persentase tingkat penyelesaian aktiva dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing diperkirakan sebesar 88,75% dan 83,89%. Aktiva dalam penyelesaian terdiri dari bangunan dan peralatan kantor dan diperkirakan akan selesai dalam waktu kurang dari 1 sampai 2 tahun setelah tanggal neraca.

Pada tanggal 2 Februari 2009, telah terjadi kebakaran pada Ruang *Mechanical and Electrical* dan *Air Handling Unit Room* Gedung Menara BTN dari lantai basement sampai ke lantai atap. Gedung Menara BTN yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat, merupakan gedung dimana kantor pusat Bank, kantor Bank Cabang Harmoni dan Cabang Syariah Jakarta berada. Berdasarkan laporan konsultan bangunan tertanggal 20 Februari 2009, status struktur Gedung Menara BTN paska kebakaran hanya mengalami kerusakan minor sehingga setelah dilakukan pembersihan dan perbaikan, struktur gedung dapat difungsikan kembali.

Bank telah melakukan estimasi atas penurunan nilai aset tetap akibat kebakaran yang perhitungannya didasarkan pada laporan PT LAPI ITB melalui suratnya kepada Bank tanggal 22 Juni 2009 tentang tingkat kerusakan akibat kebakaran. Berdasarkan perhitungan tersebut Bank telah mencatat penurunan nilai aset tetap sebesar Rp98.930 yang terdiri dari penurunan nilai gedung sebesar Rp98.849 dan penurunan nilai mesin sebesar Rp81.

13. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Premises and equipment, except landrights, are covered by insurance against fire and other risks under certain blanket policies with, among others, PT Asuransi Bina Griya Upakara (a related party) and PT Asuransi Ramayana Tbk. The total insurance coverage amounted to Rp1,495,742 and Rp1,086,430 as of December 31, 2010 and 2009, respectively. Management has the opinion that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

The percentages of completion of the constructions in progress as of December 31, 2010 and 2009 were approximately 88.75% and 83.89%, respectively. Constructions in progress consist of buildings and furnitures and fixtures and are estimated to be completed in less than 1 year up to 2 years after the balance sheet date.

On February 2, 2009, the Mechanical and Electrical and Air Handling Unit Room of the BTN Tower Building, caught fire from the basement floor to the top-most floor. The BTN Tower Building, which is located in Jalan Gajah Mada No.1, Central Jakarta, is utilized as the Bank's Head Office, Jakarta Harmoni Branch Office and Jakarta Sharia Branch Office. Based on the building consultants' report dated February 20, 2009, the BTN Tower Building's structure suffered minor damage and requires clean-up and repairs before it can be used again.

The Bank estimated an impairment of assets due to the fire based on the report dated June 22, 2009 of PT LAPI ITB to the Bank regarding the level of damage due to the fire. Based on the above calculation, the Bank recorded an impairment loss amounting to Rp98,930 which consisted of the impairment of building and machineries amounting to Rp98,849 and Rp81, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

13. ASET TETAP (lanjutan)

Terkait peristiwa kebakaran tersebut di atas, perusahaan asuransi PT Binagriya Upakara, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dan PT Asuransi Parolamas, telah menunjuk *Independent Loss Adjuster* untuk melakukan penilaian kerusakan yang terjadi atas sarana dan prasarana gedung serta peralatan dan perlengkapan kantor Bank. Penilaian ini untuk menentukan nilai kerugian yang terjadi akibat kebakaran sebagai dasar menentukan jumlah klaim yang dapat ditanggung perusahaan asuransi. Gedung Menara BTN telah diasuransikan oleh Bank dengan jenis asuransi diantaranya adalah asuransi kebakaran atas inventaris dan asuransi *Property All Risk* atas Gedung Menara BTN dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp260.206 dan Rp224.421.

Bank telah membukukan pendapatan klaim atas asuransi diatas dengan jenis asuransi *Property All Risk* untuk Gedung Menara BTN dan asuransi kebakaran untuk inventaris sebesar Rp77.000 berdasarkan surat dari PT Binagriya Upakara sebagai pemimpin perusahaan asuransi Bank tanggal 30 Juni 2009. Kerugian akibat kebakaran dan pendapatan klaim atas asuransi telah dibukukan pada tahun 2009 (Catatan 38).

13. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

In connection with this event, the insurance companies, PT Binagriya Upakara, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk and PT Asuransi Parolamas, appointed an *Independent Loss Adjuster* to appraise the damage on the building infrastructure and the Bank's office supplies and equipment. This appraisal determined the amount of loss incurred due to the fire, which was used as the basis to determine the claim from the insurance companies. The BTN Tower Building is insured by the Bank under several insurance policies which, among others, are on supplies and property all-risk insurance on the BTN Tower Building with coverage amounting to Rp260,206 and Rp224,421, respectively.

Based on letter dated June 30, 2009 from PT Binagriya Upakara, as a lead insurer, the Bank recorded income from the insurance claim on the property all-risks insurance for the BTN Tower Building and fire insurance on office supplies and equipment amounting to Rp77,000. The fire loss and claim for insurance were recognized in year 2009 (Note 38).

14. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

	2010	2009
Kredit yang diberikan	501.730	415.420
Obligasi pemerintah	71.338	85.825
Efek-efek	6.916	6.030
Penempatan pada bank lain	492	1.267
Jumlah	580.476	508.542

14. INTERESTS RECEIVABLES

Loans
Government bonds
Securities
Placements with other banks
Total

15. ASET LAIN-LAIN

	2010	2009
Tagihan kepada pihak ketiga	262.024	240.566
Biaya dibayar di muka	215.480	128.356
Beban ditangguhkan kompensasi saham	8.693	-
Properti terbengkalai - setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp8.462 dan Rp18.722 masing-masing untuk tahun 2010 dan 2009	1.711	5.503
Nota debet dalam penyelesaian - bersih	180	719
Lainnya	24.742	33.768
Jumlah	512.830	408.912

15. OTHER ASSETS

Third party receivables
Prepaid expenses
Deferred stock compensation
Abandoned properties - net of allowance for losses of Rp8,462 and Rp18,722 in 2010 and 2009, respectively
Debit notes in process - net
Others
Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

15. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia qq Kementerian Perumahan Rakyat atas subsidi selisih bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), tagihan kepada perusahaan asuransi terkait dengan klaim Bank atas kerugian akibat kebakaran (Catatan 12), tagihan kepada Perum Asabri sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada anggota Asabri dan tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sehubungan dengan kerja sama penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos dan penagihan angsuran KPR.

Biaya dibayar di muka diantaranya merupakan biaya-biaya sewa gedung, sewa rumah, sewa kendaraan dan asuransi.

Properti terbengkalai adalah aset tetap yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai aset tetap yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang telah dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas properti terbengkalai adalah cukup.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank tanggal 22 Mei 2007 dan persetujuan Komisaris Bank tanggal 10 Oktober 2007, Bank telah menghapusbukkan properti terbengkalai sebesar Rp19.199.

Bank terus melakukan usaha-usaha penjualan atas properti terbengkalai tersebut. Properti terbengkalai yang dihapusbukkan ini tidak disajikan dalam neraca, tetapi disajikan di luar neraca dalam buku besar Bank. Ikhtisar mutasi properti terbengkalai hapus buku adalah sebagai berikut:

	2010	2009	
Saldo awal tahun	19.199	19.199	<i>Balance at beginning of year</i>
Penghapusbukkan selama tahun berjalan	-	-	<i>Write-off during the current year</i>
Saldo akhir tahun	19.199	19.199	<i>Balance at end of year</i>

15. OTHER ASSETS (continued)

Third party receivables represent receivables from customers and other parties such as the Government of the Republic of Indonesia qq Department of People's Housing in connection with the subsidy for interest rate differentials on housing loans, insurance companies in connection with the Bank's claim due to loss on fire (Note 12), Perum Asabri in connection with the Bank's loan facility to members of Asabri and PT Pos Indonesia (Persero) in connection with the mutual operation of Tabungan Batara Kantor Pos and collection of KPR installments.

Prepaid expenses represent, among others, rental of building, house and vehicle, and insurance.

Abandoned properties represent fixed asset previously classified under premises and equipment which are owned by the Bank but are not used in the Bank's regular or normal operations. Management has the opinion that the allowance for possible losses is adequate to cover losses on the abandoned properties.

In the Bank's Annual Stockholders' General Meeting (RUPS) held on May 22, 2007 and the Bank Commissioners' approval dated October 10, 2007, the Bank wrote off abandoned properties of Rp19,199.

The Bank continues to pursue the sale of the abandoned properties. These abandoned properties written-off are not presented in the balance sheet but maintained as off-balance sheet account in the Bank's general ledgers. The summary of the movement of the abandoned properties written-off is as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

16. KEWAJIBAN SEGERA**16. CURRENT LIABILITIES**

	2010	2009	
Hutang pajak			Taxes payable
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 4 (2)	30.134	29.355	Article (4) 2
Pasal 25	25.890	14.464	Article 25
Pasal 21	8.841	6.914	Article 21
Pasal 29 (Catatan 37)	95.519	24.574	Article 29 (Note 37)
Titipan nasabah	462.342	405.359	Customer remittances
Bagi hasil yang belum dibagikan	6.288	4.111	Undistributed profit sharing
Deposito berjangka jatuh tempo	4.661	1.110	Matured time deposits
Bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah	671	684	Interest on time deposits not collected by customers
Lain-lain	147.585	178.194	Others
Jumlah	781.931	664.765	Total

17. GIRO**17. DEMAND DEPOSITS**

	2010	2009	
Non Bank			Non-bank
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	4.917.263	7.291.883	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	228.668	30.156	United States Dollar
	5.145.931	7.322.039	
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa			Related parties
Rupiah	28.244	42.187	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	-	46	United States Dollar
	28.244	42.233	
Jumlah	5.174.175	7.364.272	Total

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, saldo giro termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp138.223 dan Rp107.713.

As of December 31, 2010 and 2009, demand deposits include deposits based on sharia banking principles amounting to Rp138,223 and Rp107,713, respectively.

Suku bunga rata-rata per tahun pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 untuk giro dalam Rupiah masing-masing sebesar 3,04% dan 2,76%, sedangkan untuk suku bunga giro dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar 0,05% dan 0,38%.

Average annual interest rates for the years ended December 31, 2010 and 2009 were 3.04% and 2.76%, respectively, for Rupiah demand deposits and 0.05% and 0.38%, respectively, for United States Dollar demand deposits.

Giro yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp102.756 dan Rpnil.

Demand deposits amounting to Rp102,756 and RpNil as of December 31, 2010 and 2009, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

18. TABUNGAN

	2010	2009
Tabungan Batara	10.591.260	8.740.326
Tabungan Batara Mudharabah	184.198	124.312
Tabungan Batara Wadiah	92.169	76.326
Jumlah	10.867.627	8.940.964

18. SAVINGS DEPOSITS

Batara savings deposits
Batara Mudharabah savings deposits
Batara Wadiah savings deposits

Total

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp276.367 dan Rp200.638.

As of December 31, 2010 and 2009, savings deposits include savings deposits based on sharia banking principles amounting to Rp276,367 and Rp200,638, respectively.

Suku bunga rata-rata per tahun untuk tabungan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah 6,50% dan 3,86%.

Average annual interest rates for the years ended December 31, 2010 and 2009 on the above deposits are 6.50% and 3.86%, respectively.

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1.652 dan Rp7.957.

Savings deposits amounting to Rp1,652 and Rp7,957 as of December 31, 2010 and 2009, respectively, are pledged as collateral for loans extended by the Bank to its customers.

Tabungan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp23.560 dan Rp25.624.

As of December 31, 2010 and 2009, savings deposits of related parties amounted to Rp23,560 and Rp25,624, respectively.

Tabungan wadiah dan mudharabah dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp2.019 dan Rp617.

Wadiah and mudharabah savings deposits of related parties as of December 31, 2010 and 2009 amounted to Rp2,019 and Rp617, respectively.

19. DEPOSITO BERJANGKA

a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

19. TIME DEPOSITS

a. *The average interest rates of time deposits are as follows:*

	Suku Bunga Rata-rata Per Tahun (%)/ Average Annual Interest Rate (%)		
	2010	2009	
Rupiah			Rupiah
1 bulan	5,98	6,43	1 month
3 bulan	5,98	6,43	3 months
6 bulan	6,31	6,68	6 months
12 bulan	6,58	6,68	12 months
24 bulan	6,67	6,68	24 months
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
1 bulan	0,42	2,17	1 month
3 bulan	0,42	2,17	3 months
6 bulan	0,42	2,17	6 months
12 bulan	0,42	2,17	12 months

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

19. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

- b. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu:

	2010	2009
Rupiah		
1 bulan	20.531.013	12.502.518
3 bulan	7.406.619	6.951.596
6 bulan	826.927	1.535.050
12 bulan	2.710.975	2.895.150
24 bulan	19.571	16.139
	31.495.105	23.900.453
Dolar Amerika Serikat		
1 bulan	9.005	9.124
3 bulan	135	70
6 bulan	-	24
12 bulan	-	47
	9.140	9.265
Jumlah	31.504.245	23.909.718

19. TIME DEPOSITS (continued)

- b. The details of time deposits by currency and contract period are as follows:

	2010	2009	
Rupiah			Rupiah
1 bulan	20.531.013	12.502.518	1 month
3 bulan	7.406.619	6.951.596	3 months
6 bulan	826.927	1.535.050	6 months
12 bulan	2.710.975	2.895.150	12 months
24 bulan	19.571	16.139	24 months
	31.495.105	23.900.453	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
1 bulan	9.005	9.124	1 month
3 bulan	135	70	3 months
6 bulan	-	24	6 months
12 bulan	-	47	12 months
	9.140	9.265	
Jumlah	31.504.245	23.909.718	Total

- c. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan sisa umur hingga jatuh tempo:

	2010	2009
Rupiah		
≤ 1 bulan	22.538.508	15.106.388
> 1 bulan ≤ 3 bulan	6.604.540	6.455.683
> 3 bulan ≤ 6 bulan	727.902	938.164
> 6 bulan ≤ 12 bulan	1.616.175	1.388.139
> 12 bulan ≤ 24 bulan	7.980	12.079
	31.495.105	23.900.453
Dolar Amerika Serikat		
≤ 1 bulan	9.005	9.124
> 1 bulan ≤ 3 bulan	135	94
> 3 bulan ≤ 6 bulan	-	-
> 6 bulan ≤ 12 bulan	-	47
	9.140	9.265
Jumlah	31.504.245	23.909.718

- c. Details of time deposits by currency and remaining period to maturity are as follows:

	2010	2009	
Rupiah			Rupiah
≤ 1 bulan	22.538.508	15.106.388	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	6.604.540	6.455.683	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	727.902	938.164	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	1.616.175	1.388.139	> 6 months ≤ 12 months
> 12 bulan ≤ 24 bulan	7.980	12.079	> 12 months ≤ 24 months
	31.495.105	23.900.453	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
≤ 1 bulan	9.005	9.124	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	135	94	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	-	-	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	-	47	> 6 months ≤ 12 months
	9.140	9.265	
Jumlah	31.504.245	23.909.718	Total

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp1.990.320 dan Rp1.138.599.

As of December 31, 2010 and 2009, time deposits based on sharia banking principles amounted to Rp1,990,320 and Rp1,138,599, respectively.

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada konsumennya pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp28.016 dan Rp125.403.

As of December 31, 2010 and 2009, time deposits amounting to Rp28,016 and Rp125,403, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

19. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Deposito berjangka dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp17.518 dan Rp28.093.

Deposito berjangka *Mudharabah* dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp25.470 dan Rp5.501.

20. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Tingkat bunga rata-rata untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

Kolektibilitas	2010		2009		Collectibility
	Rupiah/ Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currency	Rupiah/ Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currency	
Tabungan	-	-	5,8%	-	Savings deposits
Giro	2,03%	-	1,25%	-	Demand deposits
Deposito	6,57%	-	7,53%	-	Time deposits
Penempatan dari bank lain	-	-	6,81%	0,40%	Placements from other banks

Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2010					Jumlah/ Total	
	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1 - 3 bulan/ > 1 - 3 months	> 3 - 6 bulan/ > 3 - 6 months	> 6 - 12 bulan/ > 6 - 12 months			
<u>Pihak ketiga</u>							<u>Third parties</u>
<u>Rupiah</u>							<u>Rupiah</u>
Deposito	467.500	71.460	1.340	800	541.100	Time deposits	
Giro	16.688	-	-	-	16.688	Demand deposits	
Tabungan	483	-	-	-	483	Savings deposits	
	484.671	71.460	1.340	800	558.271		
<u>Mata uang asing</u>							<u>Foreign currencies</u>
Penempatan dari bank lain	89.253	-	-	-	89.253	Placements from other banks	
	501.748	950	1.040	1.025	504.763		

19. TIME DEPOSITS (continued)

As of December 31, 2010 and 2009, time deposits of related parties amounted to Rp17,518 and Rp28,093, respectively.

As of December 31, 2010 and 2009, *Mudharabah* time deposits of related parties amounted to Rp25,470 and Rp5,501, respectively.

20. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

The average interest rates of deposits from other banks are as follows:

Details of deposits from other banks by remaining period to maturity are as follows:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI**

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, rincian saldo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut:

**21. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS**

As of December 31, 2010 and 2009, the details of securities sold under repurchase agreements are as follows:

2010						
Nasabah	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Nilai Pembelian Kembali/ Repurchase Value	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Bersih/ Net Value	Customer
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0021	22 November/ November 22, 2010	22 Februari/ February 22, 2011	252.166	2.547	249.619	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0021
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0031	22 November/ November 22, 2010	22 Februari/ February 22, 2011	512.706	5.178	507.528	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0031
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0020	28 Maret/ March 28, 2005	23 April/ April 23, 2015	260.000	-	260.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0020
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0020	29 Maret/ March 29, 2005	23 April/ April 23, 2015	390.000	-	390.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0020
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0028	19 Februari/ February 19, 2010	20 Februari/ February 20, 2012	250.000	-	250.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0028
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0029	19 Februari/ February 19, 2010	20 Februari/ February 20, 2012	250.000	-	250.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0029
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0026	3 Desember/ December 3, 2010	3 Maret/ March 3, 2011	355.862	3.973	351.889	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0026
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0023	2 Desember/ December 2, 2010	2 Maret/ March 2, 2011	406.700	4.467	402.233	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0023
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Obligasi pemerintah seri VR0027	18 Februari/ February 18, 2010	18 Februari/ February 18, 2011	249.999	-	249.999	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Government Bonds series VR0027
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Obligasi pemerintah seri VR0023	22 September/ September 22, 2010	22 September / September 22, 2011	240.001	-	240.001	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Government Bonds series VR0023
Standard Chartered Bank Obligasi pemerintah seri VR0028	24 September / September 24, 2010	24 September / September 24, 2011	312.550	-	312.550	Standard Chartered Bank Government bonds series VR0028
Jumlah			3.479.984	16.165	3.463.819	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**21. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

2009

Nasabah	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Nilai Pembelian Kembali/ Repurchase Value	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Bersih/ Net Value	Customer
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0029	21 Oktober/ October 21, 2009	21 Januari/ January 21, 2010	175.441	787	174.654	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0029
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0031	21 Oktober/ October 21, 2009	21 Januari/ January 21, 2010	335.444	1.505	333.939	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0031
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0031	15 Oktober/ October 15, 2009	15 Januari/ January 15, 2010	513.601	1.446	512.155	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0031
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0028	7 Juli/ July 7, 2009	21 Januari/ January 21, 2010	208.612	931	207.681	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0028
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0029	7 Juli/ July 7, 2009	21 Januari/ January 21, 2010	318.470	1.421	317.049	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0029
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0027	14 Oktober/ October 14, 2009	14 Januari/ January 14, 2010	254.856	687	254.169	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0027
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0028	13 Agustus/ August 13, 2009	13 Agustus/ August 13, 2010	250.000	-	250.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0028
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0020	29 Maret/ March 29, 2005	23 April/ April 23, 2015	390.000	-	390.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0020
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0020	28 Maret/ March 28, 2005	23 April/ April 23, 2015	260.000	-	260.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0020
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Obligasi pemerintah seri VR0026	7 Agustus/ August 7, 2009	9 Agustus/ August 9, 2010	240.062	-	240.062	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Government Bonds series VR0026
Standard Chartered Bank Obligasi pemerintah seri VR0031	18 Februari/ February 18, 2009	18 Februari/ February 18, 2010	625.000	-	625.000	Standard Chartered Bank Government bonds series VR0031
Jumlah			3.571.486	6.777	3.564.709	Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Bank memiliki kontrak-kontrak penjualan obligasi pemerintah kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah VR0021 dan VR0031 yaitu tanggal 22 November 2010, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp247.660 dan Rp503.544 (jumlah seluruhnya sebesar Rp751.204) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0021 dan VR0031 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp305.000 dan Rp620.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp925.000) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank dikenakan bunga oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 0,75%. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Dalam transaksi ini, Bank berkewajiban membeli kembali obligasi pemerintah tersebut dengan nilai pembelian kembali sudah termasuk bunga pada setiap tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal-tanggal 24 Mei 2010, 23 Agustus 2010, 22 November 2010, dan 22 Februari 2011, dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0021 dan VR0031 dengan nilai nominal Rp925.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0020 yaitu 29 Maret 2005 dan 28 Maret 2005, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp390.000 dan Rp260.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp650.000) dari Deutsche Bank AG, Jakarta dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0020 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp300.000 dan Rp450.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp750.000) kepada Deutsche Bank AG, Jakarta. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank AG, Jakarta sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,45% yang terutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah. Deutsche Bank AG, Jakarta membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebesar Rp650.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0020 dengan nilai nominal sebesar Rp750.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

**21. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

The Bank has contracts to sell bonds with agreements to repurchase with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk covering government bonds. On the commencement date of the contract to sell government bonds series VR0021 and VR0031, November 22, 2010, the Bank received funds amounting to Rp247,660 and Rp503,544 (totaling Rp751,204) from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and delivered the government bonds series VR0021 and VR0031 with nominal values of Rp305,000 and Rp620,000, respectively (totaling Rp925,000) to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Bank is charged with interest by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates plus 0.75%. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pays to the Bank the same amount of coupons it receives. In this contract, the Bank is obliged to repurchase the government bonds with repurchase value including the interest charges on each maturity dates, which are, May 24, 2010, August 23, 2010, November 22, 2010 and February 22, 2011 and receive the government bonds series VR0021 and VR0031 with total nominal value of Rp925,000 or funds in the same amount (Note 10).

On the commencement date of the contract to sell government bonds series VR0020, March 29, 2005 and March 28, 2005, the Bank received funds amounting to Rp390,000 and Rp260,000, respectively, (totaling Rp650,000) from Deutsche Bank AG and delivered the government bonds series VR0020 with nominal values of Rp300,000 and Rp450,000 (totaling Rp750,000) to Deutsche Bank AG. The Bank is charged with interest rate by Deutsche Bank AG at a rate equal to the interest rate for 3 months Bank Indonesia Certificates plus 1.45% which is payable quarterly or based on terms of the government bonds. Deutsche Bank AG pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp650,000 to Deutsche Bank AG and will receive back the government bonds series VR0020 with total nominal value of Rp750,000 or funds in the same amount (Note 10).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah kepada Deutsche Bank AG dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah VR0028 dan VR0029 yaitu tanggal 19 Februari 2010, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp250.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp500.000) dari Deutsche Bank AG dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0028 dan VR0029 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp324.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp648.000) kepada Deutsche Bank AG. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank AG sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 0,95% yang terhutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah. Deutsche Bank AG membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG sebesar Rp500.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0028 dan VR0029 dengan nilai nominal sebesar Rp648.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah kepada Deutsche Bank AG dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah VR0026 yaitu tanggal 3 Desember 2010, Bank menerima dana sebesar Rp350.000 dari Deutsche Bank AG dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0026 dengan nilai nominal sebesar Rp437.500 kepada Deutsche Bank AG. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank AG sebesar 6,7% yang terhutang setiap bulan. Deutsche Bank AG membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG sebesar Rp355.863 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0026 dengan nilai nominal sebesar Rp437.500 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

**21. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

On the commencement date of the contract to sell government bonds series VR0028 and VR0029, February 19, 2010, the Bank received funds amounting to Rp250,000 and Rp250,000 (totaling Rp500,000) from Deutsche Bank AG and delivered the government bonds series VR0028 and VR0029 with nominal values of Rp324,000 and Rp324,000, respectively (totalling Rp648,000) to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Bank is charged with interest by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates plus 0.95% which is payable quarterly or based on terms of the government bonds. Deutsche Bank AG pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp500,000 to Deutsche Bank AG and will receive back the government bonds series VR0028 and VR0029 with total nominal value of Rp648,000 or funds in the same amount (Note 10).

On the commencement date of the contract to sell government bonds series VR0026, December 3, 2010, the Bank received funds amounting to Rp350,000 from Deutsche Bank AG and delivered the government bonds series VR0026 with nominal value of Rp437,500 to Deutsche Bank AG. The Bank was charged with interest by Deutsche Bank AG at the rate of 6.7%, which is payable monthly. Deutsche Bank AG pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp355,863 to Deutsche Bank AG and will receive back the government bonds series VR0026 with total nominal value of Rp437,500 or funds in the same amount (Note 10).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah kepada Deutsche Bank AG dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah VR0023 yaitu tanggal 2 Desember 2010, Bank menerima dana sebesar Rp400.000 dari Deutsche Bank AG dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0023 dengan nilai nominal sebesar Rp500.000 kepada Deutsche Bank AG. Bank dikenakan bunga oleh HSBC sebesar 6,7% yang terutang setiap bulan. Deutsche Bank AG membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG sebesar Rp406.700 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0023 dengan nilai nominal sebesar 500.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

Bank memiliki kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0027 kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak yaitu tanggal 18 Februari 2010, Bank menerima dana sebesar Rp249.999 dari HSBC dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0027 dengan nilai nominal sebesar Rp368.615 kepada HSBC. Bank dikenakan bunga oleh HSBC sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 0,55% yang terutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah.

HSBC membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada HSBC sebesar Rp249.999 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0027 dengan nilai nominal total sebesar Rp368.615 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0023 kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) yaitu tanggal 22 September 2010, Bank menerima dana sebesar Rp240.001 dari HSBC dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0023 dengan nilai nominal sebesar Rp304.615 kepada HSBC. Bank dikenakan bunga oleh HSBC sebesar 7,69% yang terutang setiap bulan. Deutsche Bank AG membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. HSBC membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada HSBC sebesar Rp240.001 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0023 dengan nilai nominal total sebesar Rp304.615 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

**21. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

On the commencement date of the contract to sell government bonds series VR0023, December 2, 2010, the Bank received funds amounting to Rp400,000 from Deutsche Bank AG and delivered the government bonds series VR0023 with nominal value of Rp500,000 to Deutsche Bank AG. The Bank was charged with interest by Deutsche Bank AG at the rate of 6.7%, which is payable monthly. Deutsche Bank AG pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp406,700 to Deutsche Bank AG and will receive back the government bonds series VR0023 with total nominal value of Rp500,000 or funds in the same amount (Note 10).

The Bank has contract to sell bonds with agreements to repurchase covering government bonds series VR0027 with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). On the commencement date of the contract, February 18, 2010, the Bank received funds amounting to Rp249,999 from HSBC, and submitted government bonds series VR0027 with total nominal values of Rp368,615 to HSBC. The Bank is charged with interest by HSBC at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates plus 0.55% which is payable quarterly or based on terms of the government bonds.

HSBC pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp249,999 to HSBC and will receive back the government bonds series VR0027 with total nominal value of Rp368,615 or funds in the same amount (Note 10).

On the commencement date of the contract to sell government bonds series VR0023, September 22, 2010, the Bank received funds amounting to Rp240,001 from HSBC, and submitted government bonds series VR0023 with total nominal values of Rp304,615 to HSBC. The Bank was charged with interest by HSBC at the rate of 7.69%, which is payable monthly. HSBC pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp240,001 to HSBC and will receive back the government bonds series VR0023 with total nominal value of Rp304,615 or funds in the same amount (Note 10).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Bank memiliki kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0028 kepada Standard Chartered Bank, Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak yaitu tanggal 24 September 2010, Bank menerima dana sebesar Rp312.550 dari Standard Chartered Bank dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0028 dengan nilai nominal sebesar Rp329.000 kepada Standard Chartered serta menyerahkan dana sebesar Rp62.550 (Catatan 8). Bank dikenakan bunga oleh Standard Chartered Bank sebesar Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan sebesar 7,69% yang terhutang setiap triwulan. Standard Chartered Bank membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Standard Chartered Bank sebesar Rp312.550 dan menerima kembali dana sebesar Rp62.550 dan obligasi pemerintah seri VR0028 dengan nilai nominal sebesar Rp329.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

Bank memiliki kontrak-kontrak penjualan obligasi pemerintah kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah VR0029 dan VR0031 yaitu tanggal 21 Oktober 2009, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp171.819 dan Rp328.520 (jumlah seluruhnya sebesar Rp500.339) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0029 dan VR0031 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp215.000 dan Rp430.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp645.000) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank dikenakan bunga oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,65%. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah.

Dalam transaksi ini, Bank berkewajiban membeli kembali obligasi pemerintah tersebut dengan nilai pembelian kembali sudah termasuk bunga pada setiap tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal-tanggal 21 Oktober 2009, 21 Januari 2010, 21 April 2010 dan 16 Juli 2010, dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0029 dan VR0031 dengan nilai nominal Rp645.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

**21. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

The Bank has contract to sell bonds with agreements to repurchase covering government bonds series VR0028 with Standard Chartered Bank. On the commencement date of the contract, September 24, 2010, the Bank received funds amounting to Rp312,550 from Standard Chartered Bank and submitted government bonds series VR0028 with a total nominal value of Rp329,000 and placement amounting to Rp62,550 (Note 8) to Standard Chartered Bank. The Bank was charged with interest by Standard Chartered Bank at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates of 7.69%, which is payable quarterly. Standard Chartered Bank pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp312,550 to Standard Chartered Bank and will receive again the placement amounting to Rp62,550 and the government bonds series VR0028 with a total nominal value of Rp329,000 or funds in the same amount (Note 10).

The Bank has contracts to sell bonds with agreements to repurchase with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk covering government bonds. On the commencement date of the contract to sell government bonds series VR0029 and VR0031, October 21, 2009, the Bank received funds amounting to Rp171,819 and Rp328,520 (totaling Rp500,339) from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and delivered the government bonds series VR0029 and VR0031 with nominal values of Rp215,000 and Rp430,000, respectively (totaling Rp645,000) to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Bank is charged with interest by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates plus 1.65%. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pays to the Bank the same amount of coupons it receives.

In this contract, the Bank is obliged to repurchase the government bonds with repurchase value including the interest charges on each maturity dates, which are, October 21, 2009, January 21, 2010, April 21, 2010 and July 16, 2010 and receive the government bonds series VR0029 and VR0031 with total nominal value of Rp645,000 or funds in the same amount (Note 10).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0031 yaitu tanggal 15 Oktober 2009, Bank menerima dana sebesar Rp504.097 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp621.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank dikenakan bunga sebesar 7,35% yang terhutang pada tanggal jatuh tempo kontrak tersebut. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp513.601 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal Rp621.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0028 dan VR0029 yaitu tanggal 7 Juli 2009, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp199.399 dan Rp304.406 (jumlah seluruhnya sebesar Rp503.805) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0028 dan VR0029 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp245.000 dan Rp375.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp620.000) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank dikenakan bunga oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 8,40% yang terhutang pada tanggal jatuh tempo kontrak tersebut. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp527.082 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0028 dan VR0029 dengan nilai nominal sebesar Rp620.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

Bank memiliki kontrak-kontrak penjualan obligasi pemerintah kepada Deutsche Bank AG dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0027 yaitu tanggal 14 Oktober 2009, Bank menerima dana Rp250.000 dari Deutsche Bank AG dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0027 dengan nilai nominal Rp320.000 kepada Deutsche Bank AG. Bank dikenakan bunga sebesar 7,60% yang terhutang pada tanggal jatuh tempo kontrak tersebut. Deutsche Bank AG membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG sebesar Rp254.856 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0027 dengan nilai nominal Rp320.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

**21. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

On the commencement date of the contract to sell government bonds series VR0031, October 15, 2009, the Bank received funds amounting to Rp504,097 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and delivered the government bonds series VR0031 with nominal value of Rp621,000 to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Bank is charged with interest rate by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at the rate of 7.35% which is payable on the maturity date. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp513,601 to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and will receive back the government bonds series VR0031 with total nominal value of Rp621,000 or funds in the same amount (Note 10).

On the commencement date of the contract to sell government bonds series VR0028 and VR0029, July 7, 2009, the Bank received funds amounting to Rp199,399 and Rp304,406, respectively, (totalling Rp503,805) from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and delivered the government bonds series VR0028 and VR0029 with nominal values of Rp245,000 and Rp375,000 (totalling Rp620,000) to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Bank is charged with interest rate by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at the rate of 8.40% which is payable on the maturity date. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp527,082 to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and will receive back the government bonds series VR0028 and VR0029 with total nominal value of Rp620,000 or funds in the same amount (Note 10).

The Bank has contracts to sell bonds with agreements to repurchase with Deutsche Bank AG covering government bonds. On the commencement date of the contract to sell of government bonds series VR0027, October 14, 2009, the Bank received funds amounting to Rp250,000 from Deutsche Bank AG and delivered the government bonds series VR0027 with nominal value of Rp320,000 to Deutsche Bank AG. The Bank is charged with interest rate by Deutsche Bank AG at the rate of 7.60% which is payable on the maturity date. Deutsche Bank AG pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp254,856 to Deutsche Bank AG and will receive back the government bonds series VR0027 with total nominal value of Rp320,000 or funds in the same amount (Note 10).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJ
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0028 yaitu tanggal 13 Agustus 2009, Bank menerima dana sebesar Rp250.000 dari Deutsche Bank AG dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0028 dengan nilai nominal sebesar Rp310.527 kepada Deutsche Bank AG. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank AG sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,25% yang terhutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah. Deutsche Bank AG membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG sebesar Rp250.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0028 dengan nilai nominal sebesar Rp310.527 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0020 yaitu 29 Maret 2005 dan 28 Maret 2005, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp390.000 dan Rp260.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp650.000) dari Deutsche Bank AG, Jakarta dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0020 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp300.000 dan Rp450.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp750.000) kepada Deutsche Bank AG, Jakarta. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank AG, Jakarta sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,45% yang terhutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah. Deutsche Bank AG, Jakarta membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima oleh pemegang dari obligasi pemerintah. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebesar Rp650.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0020 dengan nilai nominal sebesar Rp750.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

**21. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

On the commencement date of the contract to sell government bonds series VR0028, August 13, 2009, the Bank received funds amounting to Rp250,000 from Deutsche Bank AG and delivered the government bonds series VR0028 with nominal value of Rp310,527 to Deutsche Bank AG. The Bank is charged with interest rate by Deutsche Bank AG at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates plus 1.25% which is payable quarterly. Deutsche Bank AG pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp250,000 to Deutsche Bank AG and will receive back the government bonds series VR0028 with total nominal value of Rp310,527 or funds in the same amount (Note 10).

On the commencement date of the contract to sell government bonds series VR0020, March 29, 2005 and March 28, 2005, the Bank received funds amounting to Rp390,000 and Rp260,000, respectively, (totaling Rp650,000) from Deutsche Bank AG and delivered the government bonds series VR0020 with nominal values of Rp300,000 and Rp450,000 (totaling Rp750,000) to Deutsche Bank AG. The Bank is charged with interest rate by Deutsche Bank AG at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates plus 1.45% which is payable quarterly or based on terms of the government bonds. Deutsche Bank AG pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp650,000 to Deutsche Bank AG and will receive back the government bonds series VR0020 with total nominal value of Rp750,000 or funds in the same amount (Note 10).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Bank memiliki kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0026 kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak yaitu tanggal 7 Agustus 2009, Bank menerima dana sebesar Rp240.062 dari HSBC dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0026 dengan nilai nominal sebesar Rp309.000 kepada HSBC. Bank dikenakan bunga oleh HSBC sebesar 8,15% yang terutang setiap bulan. HSBC membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada HSBC sebesar Rp240.062 dan menerima kembali obligasi pemerintah seri VR0026 dengan nilai nominal total sebesar Rp309.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

Bank memiliki kontrak penjualan obligasi pemerintah seri VR0031 kepada Standard Chartered Bank, Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak yaitu tanggal 18 Februari 2009, Bank menerima dana sebesar Rp625.000 dari Standard Chartered Bank dan menyerahkan obligasi pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp625.000 serta menyerahkan dana sebesar Rp125.000 kepada Standard Chartered Bank (Catatan 8). Bank dikenakan bunga oleh Standard Chartered Bank sebesar Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,70% yang terutang setiap triwulan. Standard Chartered Bank membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Standard Chartered Bank sebesar Rp625.000 dan menerima kembali dana sebesar Rp125.000 dan obligasi pemerintah seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp625.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 10).

**21. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

The Bank has contract to sell bonds with agreements to repurchase covering government bonds series VR0026 with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). On the commencement date of the contract, August 7, 2009, the Bank received funds amounting to Rp240,062 from HSBC, and submitted government bonds series VR0026 with total nominal values of Rp309,000 to HSBC. The Bank was charged with interest by HSBC at the rate of 8.15%, which is payable monthly. HSBC pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp240,062 to HSBC and will receive back the government bonds series VR0026 with total nominal value of Rp309,000 or funds in the same amount (Note 10).

The Bank has contract to sell bonds with agreements to repurchase covering government bonds series VR0031 with Standard Chartered Bank. On the commencement date of the contract, February 18, 2009, the Bank received funds amounting to Rp625,000 from Standard Chartered Bank and submitted government bonds series VR0031 with a total nominal value of Rp625,000 and placement amounting to Rp125,000 (Note 8) to Standard Chartered Bank. The Bank was charged with interest by Standard Chartered Bank at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates plus 1.70%, which is payable quarterly. Standard Chartered Bank pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp625,000 to Standard Chartered Bank and will receive again the placement amounting to Rp125,000 and the government bonds series VR0031 with a total nominal value of Rp625,000 or funds in the same amount (Note 10).

**22. SURAT-SURAT
DITERBITKAN**

BERHARGA

YANG

	2010	2009
Rupiah		
Obligasi BTN XIV	1.650.000	-
Obligasi BTN XIII	1.500.000	1.500.000
Obligasi BTN XII	1.000.000	1.000.000
Obligasi BTN XI	-	750.000
Jumlah	4.150.000	3.250.000
Obligasi BTN XI dalam perbendaharaan	-	(20.000)
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	(10.066)	(8.106)
Bersih	4.139.934	3.221.894

22. SECURITIES ISSUED

	Rupiah
BTN Bonds XIV	-
BTN Bonds XIII	1.500.000
BTN Bonds XII	1.000.000
BTN Bonds XI	750.000
Total	3.250.000
Treasury bonds BTN XI	(20.000)
Deferred bonds issuance cost	(8.106)
Net	3.221.894

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

22. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Obligasi

a. Bonds

i. Obligasi BTN XIV

i. BTN Bonds XIV

Bank menerbitkan Obligasi BTN XIV Tahun 2010 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.650.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 10,25% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 Juni 2020. Penerbitan Obligasi BTN XIV tahun 2010 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-4916/BL/2010 tanggal 3 Juni 2010

The Bank issued BTN Bonds XIV of 2010 with a total nominal value of Rp1,650,000 which are registered at the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with annual fixed interest rate of 10.25% payable every 3 months and are due on June 11, 2020. The issuance of BTN Bonds XIV of 2010 became effective based on Letter No. S-4916/BL/2010 dated June 3, 2010 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang saham.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank pari-passu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Company both movable and immovable, those that have existing and will exist in the future serve as collateral for shareholders.

Setelah ulang tahun ke-1 (pertama) Obligasi sejak tanggal penerbitan, Bank dapat melakukan pembelian kembali (buy-back) atas obligasi yang belum jatuh tempo, secara langsung maupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar.

After the first anniversary from the bonds issuance date, the Bank may buy back the unmatured bonds directly or indirectly, partially or in full at market price.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Obligasi BTN XIV mendapat penilaian peringkat IdAA-, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). Harga rata-rata tertimbang obligasi BTN XIV pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 103,0023%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XIV adalah PT Bank Mega Tbk.

As of December 31, 2010, BTN Bonds XIV were rated IdAA- by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). The weighted average prices for BTN Bonds XIV for the years ended December 31, 2010 were 103.0023%. The trustee for BTN Bonds XIV is PT Bank Mega Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

22. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Obligasi (lanjutan)

a. Bonds (continued)

ii. Obligasi BTN XIII

ii. BTN Bonds XIII

Bank menerbitkan Obligasi BTN XIII Tahun 2009 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.500.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 11,75%, 12% dan 12,25% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi BTN XIII Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Mei 2012, 29 Mei 2013 dan 29 Mei 2014. Penerbitan Obligasi BTN XIII tahun 2009 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-4019/BL/2009 tanggal 19 Mei 2009.

The Bank issued BTN Bonds XIII of 2009 with a total nominal value of Rp1,500,000 which are registered at the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with annual fixed interest rate of 11.75%, 12%, and 12.25%, payable every 3 months for BTN XIII Series A, Series B and Series C, respectively, and are due on May 29, 2012, May 29, 2013, and May 29, 2014, respectively. The issuance of BTN Bonds XIII of 2009 became effective based on Letter No. S-4019/BL/2009 dated May 19, 2009 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank *pari-passu*, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Obligasi BTN XIII mendapat penilaian peringkat IdAA-, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). Harga rata-rata tertimbang obligasi BTN XIII A, B, dan C pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 masing-masing sebesar 103,3390%, 104,3125%, dan 104,7133% dan 31 Desember 2009 masing-masing sebesar 100,9490%, 101,1555%, dan 101,9988%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XIII adalah PT Bank Mega Tbk.

As of December 31, 2010 and 2009, BTN Bonds XIII were rated IdAA- by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). The weighted average prices for BTN Bonds XIII A, B and C for the year ended December 31, 2010 were 103.3390%, 104.3125%, and 104.7133% and December 31, 2009 were 100.9490%, 101.1555% and 101.9988% respectively. The trustee for BTN Bonds XIII is PT Bank Mega Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

iii. Obligasi BTN XII

Bank menerbitkan Obligasi BTN XII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya (BES) (dimerger dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 12,75% yang dibayarkan tiap tiga bulanan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2016. Penerbitan Obligasi BTN XII Tahun 2006 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM No. S-1844/BL/2006 tanggal 8 September 2006.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit yang diberikan. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Obligasi BTN XII mendapat penilaian peringkat masing-masing "idAA-" dan "idAA-", dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). Harga rata-rata tertimbang Obligasi BTN XII pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah 105,62% dan 101,17%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XII adalah PT Bank Mega Tbk.

22. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

iii. BTN Bonds XII

The Bank issued BTN Bonds XII of 2006 with a total nominal value of Rp1,000,000 which are registered at the Surabaya Stock Exchange (BES) (which merged with the Jakarta Stock Exchange to become the Indonesia Stock Exchange). The bonds were issued at 100% of their nominal value with the annual fixed interest rate of 12.75%, payable every 3 months. These bonds are due on September 19, 2016. The issuance of BTN Bonds XII of 2006 became effective based on Letter No. S-1844/BL/2006 dated September 8, 2006 of the Chairman of BAPEPAM.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank *pari-passu*, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditors' rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2010 and 2009, BTN Bonds XII were rated "idAA-" and "idAA-", respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). The weighted average prices for BTN Bonds XII for the years ended December 31, 2010 and 2009 were 105.62% and 101.17%, respectively. The trustee for BTN Bonds XII is PT Bank Mega Tbk.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

iv. Obligasi BTN XI

Bank menerbitkan Obligasi BTN XI Tahun 2005 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp750.000 yang terdaftar di BES (dimerger dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 12,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2010. Penerbitan Obligasi BTN XI tahun 2005 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM No. S-1696/PM/2005 tanggal 28 Juni 2005.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit yang diberikan. Obligasi tersebut tidak dijamin dengan agunan khusus, maupun oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Obligasi BTN XI mendapat penilaian peringkat masing-masing "idAA-" dari PT Pefindo. Harga rata-rata tertimbang Obligasi BTN XI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 adalah 103,46%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XI adalah PT Bank Niaga Tbk. Obligasi BTN XI telah jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2010.

Perjanjian perwaliananatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% dari seluruh kekayaan Bank.

22. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

iv. BTN Bonds XI

The Bank issued BTN Bonds XI of 2005 with a total nominal value of Rp750,000 which are registered at the BES (which merged with the Jakarta Stock Exchange to become the Indonesia Stock Exchange). These bonds were issued at 100% of their nominal value with the annual fixed interest rate of 12.00%, payable every 3 months. These bonds are due on July 6, 2010. The issuance of BTN Bonds XI of 2005 became effective based on Letter No. S-1696/PM/2005 dated June 28, 2005 of the Chairman of BAPEPAM.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The bonds are not secured by specific collateral or guaranteed by other third parties and are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

As of December 31, 2009, BTN Bonds XI were rated "idAA-", respectively, by PT Pefindo. The weighted average prices for BTN Bonds XI for the years ended December 31, 2009 were 103.46%. The trustee for BTN Bonds XI is PT Bank Niaga Tbk. BTN Bonds XI matured on July 6, 2010.

The trusteeship agreements covering all the bonds impose several restrictive covenants on the Bank and require the trustees' written approval, prior to performing the following:

- Transfer, transfer the right to, or pledge as collateral, all or more than 50% of the Bank's total assets.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**22. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

- Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Mengubah bidang usaha Bank yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Membagikan dividen kepada para pemegang saham, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.

Pada tanggal 31 Desember 2010 and 2009, Bank telah memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian perwalianan tersebut.

b. Obligasi dalam perbendaharaan

Pada tanggal 31 Desember 2009 Bank memiliki obligasi dalam perbendaharaan yang merupakan obligasi BTN XI. Pada tahun 2009 Bank membeli kembali obligasi BTN X dan XI dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp27.000 dan Rp20.000 dengan harga beli masing-masing sebesar Rp27.027 dan Rp20.100. Obligasi BTN X dan XI dalam perbendaharaan telah jatuh tempo masing-masing pada tanggal 25 Mei 2009 dan 6 Juli 2010. Pada tanggal 31 Desember 2010, bank tidak memiliki obligasi dalam perbendaharaan.

22. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

- Enter into consolidation or merger and/or acquire entities that would result in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfil its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.
- Change the main business of the Bank resulting in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfil its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.
- Distribute dividends to stockholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.

As of December 31, 2010 and 2009, the Bank has complied with the existing terms of the above trusteeship agreements.

b. Treasury Bonds

On December 31, 2009 the Bank has treasury bonds which are BTN bonds XI. In 2009, the Bank bought back BTN Bonds X and XI with nominal value of Rp27,000 and Rp20,000 at the purchase price of Rp27,027 and Rp20,100, respectively. BTN Bonds X and XI in matured on 25 May 2009 and July 6, 2010, respectively. On December 31, 2010, the Bank has no treasury bonds.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PINJAMAN YANG DITERIMA

23. FUND BORROWINGS

	2010	2009	
Rupiah			Rupiah
Bank Indonesia			Bank Indonesia
Penyalur kredit program	1.099.107	1.113.798	Loan channeling program
Fasilitas kredit likuiditas	287.577	411.082	Liquidity loan facility
	1.386.684	1.524.880	
Pemerintah			Government
Rekening Dana Investasi	613.103	759.117	Investment Funds Account
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.400.000	700.000	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Jumlah	3.399.787	2.983.997	Total

a. Bank Indonesia

a. Bank Indonesia

i. Penyalur Kredit Program

i. Loan Channeling Program

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, Bank telah ditunjuk sebagai Bank Koordinator penyaluran Kredit Program untuk Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sederhana (KPR-RS) dan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS). BUMN yang ditunjuk sebagai Bank Koordinator dalam penyaluran Kredit Program tersebut, juga ditunjuk untuk menerima pengalihan KLBI dalam rangka kredit program yang belum digunakan dan masih berjalan serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/3/PBI/2000 tanggal 1 Februari 2000 dan diperbaharui melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/20/PBI/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan KLBI Dalam Rangka Kredit Program. Meskipun Bank telah ditunjuk sebagai Bank Koordinator, dalam program tersebut Bank tetap berpartisipasi sebagai bank pelaksana.

Based on Decision Letter No. 487/KMK.017/1999 dated October 13, 1999 of the Minister of Finance, the Bank was appointed as coordinator in the loan channeling program for Simple Housing Loans (KPR-RS) and Very Simple Housing Loans (KPR-RSS). The state-owned companies which are appointed as coordinator banks in the Loan Channeling Program are also appointed to receive the transfer of KLBI under the loan program for those unused and still outstanding and approved but not yet drawn based on Bank Indonesia Regulation No. 2/3/PBI/2000 dated February 1, 2000 as amended by Bank Indonesia Regulation No. 5/20/PBI/2003 dated September 17, 2003 concerning the "Transfer of Management of KLBI within the Framework of Credit Program". Although the Bank was appointed as a coordinator for channeling loans, the Bank also participates in the program as an executor bank.

Berdasarkan perjanjian didokumentasikan dalam akta No. 13 oleh Notaris Ismudjadi, S.H., tanggal 15 November 1999 antara Bank dengan Bank Indonesia tentang Pengalihan Pengelolaan KLBI, Bank telah menerima penyerahan pengalihan pengelolaan KLBI yang telah ditarik oleh bank-bank pelaksana sebesar Rp2.539.023 pada posisi tanggal 31 Oktober 1999 dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memberi wewenang kepada Bank untuk menagih kepada bank-bank pelaksana sebesar angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

Based on an agreement between the Bank and Bank Indonesia which is covered by deed No. 13 dated November 15, 1999 of Notary Ismudjadi, S.H., regarding the transfer of management of KLBI, the Bank accepted from Bank Indonesia the management of KLBI totaling Rp2,539,023 as of October 31, 1999 drawn by participating banks. Bank Indonesia has given the Bank the authority to bill the executor banks for the principal installments at maturity.

Tanggung jawab dalam pengelolaan KLBI tersebut antara lain:

Responsibilities in the management of the KLBI include the following:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Bank Indonesia (lanjutan)

i. Penyalur Kredit Program (lanjutan)

- a) Menerima permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank Pelaksana;
- b) Menganalisis persyaratan teknis dan keuangan terhadap permohonan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
- c) Membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
- d) Menerbitkan Surat Perjanjian Kerja untuk dan atas nama Bank Indonesia;
- e) Mengadministrasikan kelonggaran tarik yang dikelola; dan
- f) Mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing Bank Pelaksana untuk disalurkan kembali melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo. Bank Indonesia tidak mengenakan bunga terhadap angsuran pokok KLBI yang dikelola oleh Bank.

Hak tagih atas KLBI yang pengelolaannya dibawah Bank, sampai KLBI tersebut jatuh tempo atau dilunasi sebelum jatuh tempo, tetap dimiliki oleh Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, jumlah angsuran dari bank-bank pelaksana yang diterima oleh Bank termasuk Bank sendiri sebagai bank pelaksana yang belum disetorkan ke Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp1.099.107 dan Rp1.113.798.

ii. Fasilitas Kredit Likuiditas

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia (Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI) pada berbagai tanggal sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1999 untuk menunjang program Pemerintah. Suku bunga rata-rata per tahun KLBI adalah sebesar 6,60% pada masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 10 sampai 20 tahun dan digunakan untuk pembiayaan sebagai berikut:

23. FUND BORROWINGS (continued)

a. Bank Indonesia (continued)

i. Loan Channeling Program (continued)

- a) Receive application from executor banks to draw down unused facility;
- b) Analyze technical and financial terms submitted by the executor banks to draw down unused facility;
- c) Recommend to Bank Indonesia the draw down of unused facility as proposed by the executor banks;
- d) Issue working agreement letter for and on behalf of Bank Indonesia;
- e) Administer unused facility that are managed; and
- f) Manage collection of KLBI principal installments received from executor banks and re-lend through executor banks until maturity period. Bank Indonesia does not charge interest on KLBI principal installments which are managed by the Bank.

The right to bill KLBI under the management of the Bank until KLBI have matured or are repaid before maturity remains with Bank Indonesia.

As of December 31, 2010 and 2009, the total installment payments received by the Bank from executor banks, including the Bank itself as an executor bank but not yet paid to Bank Indonesia amounted to Rp1,099,107 and Rp1,113,798, respectively.

ii. Liquidity Loan Facility

This account represents borrowing facilities obtained from Bank Indonesia (Bank Indonesia Liquidity Loans or KLBI) on various dates from 1983 through 1999 in line with the Government Program. Average annual interest rate of KLBI was 6.60% for each of the years ended December 31, 2010 and 2009. These borrowings will mature within 10 to 20 years and were used to finance the following:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Bank Indonesia (lanjutan)

ii. Fasilitas Kredit Likuiditas (lanjutan)

	2010	2009
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	225.266	303.598
Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS)	62.311	107.484
Jumlah	287.577	411.082

Sesuai Undang-undang No. 23 tanggal 17 Mei 1999, sejak tahun 1999, Bank Indonesia tidak lagi memberikan fasilitas KLBI. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/5/PBI/1999 tanggal 1 September 1999, seluruh KLBI yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan perjanjian tanggal 16 November 1999 antara Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah. Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Bank, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

b. Pemerintah

i. Rekening Dana Investasi (RDI)

Akun ini merupakan fasilitas Rekening Dana Investasi (RDI) yang diterima Bank dari Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS) dan Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sederhana (KPR-RS).

Pinjaman ini pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dibebani suku bunga rata-rata per tahun sebesar 3,70%. Jangka waktu pinjaman ini adalah masing-masing 10, 15 dan 20 tahun dan jatuh tempo dalam berbagai tanggal sampai tahun 2016.

23. FUND BORROWINGS (continued)

a. Bank Indonesia (continued)

ii. Liquidity Loan Facility (continued)

Housing loans (KPR)
Very simple housing loans
(KPR-RSS)
Total

In accordance with Law No. 23 dated May 17, 1999, effective 1999, Bank Indonesia will no longer grant KLBI. Based on Bank Indonesia regulation No. 1/5/PBI/1999 dated September 1, 1999, all outstanding KLBI and those which have not yet matured and which have been approved but not yet drawn down are transferred to state-owned companies based on the agreement dated November 16, 1999 between the Government and the state-owned companies appointed by the Government. The state-owned companies appointed by the Government are the Bank, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

b. Government

i. Investment Funds Account

This account represents Investment Funds Account (Rekening Dana Investasi or RDI) facility obtained from the Government of the Republic of Indonesia which was used to finance Very Simple Housing Loans (KPR-RSS) and Simple Housing Loans (KPR-RS).

These borrowings are charged with average annual interest rates for the years ended December 31, 2010 and 2009 of 3.70%. The loans have terms of 10, 15 and 20 years and have various maturity dates until 2016.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

23. FUND BORROWINGS (continued)

b. Pemerintah (lanjutan)

b. Government (continued)

i. Rekening Dana Investasi (RDI) (lanjutan)

i. *Investment Funds Account (continued)*

Berdasarkan perjanjian pinjaman yang dibuat pada tanggal 19 Maret 1999 antara Pemerintah dan Bank, Bank telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai koordinator dalam penyaluran dana RDI kepada bank pelaksana. Tujuan penyediaan dana ini adalah untuk membiayai program KPR-RSS dan KPR-RS dengan jumlah maksimum sebesar Rp22.000.

Based on the loan agreement dated March 19, 1999 between the Government and the Bank, the Bank was appointed by the Government as coordinator for the channeling of RDI loans to executor banks. The funds are intended to finance KPR-RSS and KPR-RS with a maximum amount of Rp22,000.

Jumlah dana yang diterima dari bank pelaksana untuk pokok dan bunga yang belum disetorkan ke Departemen Keuangan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing adalah sebesar Rp7.663 dan Rp4.739.

As of December 31, 2010 and 2009, the total funds received from executor banks for principal and interest payments not yet paid to the Ministry of Finance amounted to Rp7,663 and Rp4,739, respectively.

ii. Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil

ii. *Funding of Micro-and Small-scale Loans*

Bank dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 14 Mei 2004 menandatangani perjanjian pinjaman dalam rangka Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil dengan maksimal pinjaman sebesar Rp250.000. Dana pinjaman tersebut bersumber dari Surat Hutang Pemerintah. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga SBI berjangka waktu 3 bulan dan dibayarkan setiap 3 bulan. Bank sudah membayar lunas pada tanggal jatuh tempo atas pendanaan yang diterima. Perjanjian ini akan jatuh tempo pada 10 Desember 2009.

On May 14, 2004, the Bank and the Government of the Republic of Indonesia entered into a borrowing agreement for funding of micro-and small-scale loans with a maximum amount of Rp250,000. The funding of such borrowing was derived from Government debentures. The loans bear interest at the rate of three months Bank Indonesia Certificates which is payable every 3 months. The Bank has fully settled the funding received. This borrowing agreement matured on December 10, 2009.

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

Akun ini terdiri dari Fasilitas Pinjaman IV, Fasilitas Jual Beli Tagihan KPR bersyarat dan Pembiayaan yang diperoleh dari SMF yang ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

This account represents Loan Facility IV, Term Purchase Program and financing obtained from PT SMF which is intended to finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

Plafon pinjaman untuk Fasilitas Pinjaman IV dan Fasilitas Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat masing-masing sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman untuk Fasilitas IV adalah 60 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2013 serta untuk Fasilitas Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.

Loan principal for Loan Facility IV and Term Purchase Program amounted to Rp500,000, respectively with maturity period of 60 months and will mature on June 4, 2013 for Loan Facility IV and maturity period on a roll-over basis for the Term Purchase Program.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Suku bunga per tahun atas Fasilitas Pinjaman IV ini adalah sebesar 10,25% dan bersifat tetap selama 5 (lima) tahun. Pokok Fasilitas Pinjaman IV dibayar pada tanggal jatuh tempo. Suku bunga atas Fasilitas Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat dapat ditinjau secara periodik oleh kedua pihak dan suku bunga yang berlaku sejak tanggal 23 Juni 2010 sampai dengan 23 Juni 2013 adalah sebesar 9,75%.

Jaminan atas Fasilitas Pinjaman IV dan Fasilitas Jual Beli Tagihan KPR Bersyarat adalah tagihan KPR dengan kriteria tertentu termasuk hak agunan yang melekat atas tagihan tersebut dengan jumlah minimum masing-masing sebesar 150% dan 100% dari nilai plafon pinjaman pada saat penandatanganan perjanjian dan wajib dikelola minimum sebesar 100% dari outstanding pinjaman sampai jatuh tempo.

Fasilitas Pembiayaan dari SMF merupakan fasilitas pembiayaan *mudharabah murabahah* dan *mudharabah muqayyadah* dengan plafon pembiayaan masing-masing sebesar Rp200.000. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah murabahah* dan *mudharabah muqayyadah* masing-masing adalah selama 60 bulan dan 3 tahun sejak tanggal pencairan dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 13 November 2014 dan 16 Desember 2013.

Porsi Nisbah yang disepakati untuk tahun pertama atas fasilitas pembiayaan *mudharabah murabahah* adalah sebesar 65,59% untuk SMF dan 34,41% untuk Bank dan atas pembiayaan *mudharabah muqayyadah* sebesar 67,37% untuk SMF dan 32,63% untuk Bank. Nisbah tersebut bersifat tetap selama tahun pertama. Besarnya Nisbah akan ditinjau setiap tahun. Pembayaran pokok atas kedua fasilitas pembiayaan ini dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Jaminan atas kedua fasilitas pembiayaan ini adalah tagihan KPR dengan kriteria tertentu dengan jumlah minimum sebesar 125% dari nilai fasilitas pembiayaan pada saat penandatanganan akad dan wajib dikelola minimum sebesar 100% dari nilai fasilitas pembiayaan sampai jatuh tempo.

23. FUND BORROWINGS (continued)

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Loan Facility IV bears interest at the annual fixed rate of 10.25% for the five-year period until maturity. The principal payment for Loan Facility IV will be settled on its maturity date. Interest rate for the Term Purchase Program is evaluated periodically by both parties and the prevailing interest rate from June 23, 2010 until June 23, 2013 amounted to 9.75%.

The guarantees for the Loan Facility IV and Term Purchase Program are the Housing Loans (KPR) bills with specific criteria, including collateral rights associated with the bills, with a minimum amount of 150% and 100%, respectively of the loan principal at the signing of the agreements and should be maintained with a minimum amount up to 100%, respectively of the outstanding loans until the maturity date.

The Financing Facilities received from PT SMF are *mudharabah murabahah* and *mudharabah muqayyadah* financing with financing limits amounting to Rp200,000, respectively with maturity period of 60 months and 3 years from withdrawal date and will mature on November 13, 2014 and December 16, 2013, respectively.

The agreed portion of revenue sharing for the *mudharabah murabahah* financing at the annual rate of 65.59% for PT SMF and 34.41% for the Bank and for *mudharabah muqayyadah* financing at 67.37% for PT SMF and 32.63% for the Bank which is fixed for the first year. The agreed portion of revenue sharing will be reviewed in each year. The principal payment for Financing Facilities will be settled on its maturity date.

The guarantees for the financing obtained are the Housing Loans (KPR) bills with specific criteria, with a minimum amount of 125% of the financing principal at the signing of the agreement and should be maintained with a minimum amount up to 100% of the outstanding financing until the maturity date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

24. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2010	2009
Deposito berjangka	102.955	86.049
Surat-surat berharga yang diterbitkan	29.779	41.067
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	19.120	21.576
Pinjaman yang diterima	10.792	11.894
Simpanan dari bank lain	460	1.018
Jumlah	163.106	161.604

24. ACCRUED INTEREST

<i>Time deposits</i>
<i>Securities issued</i>
<i>Securities sold under repurchase agreements</i>
<i>Fund borrowings</i>
<i>Deposits from other Banks</i>
Total

25. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yang berasal dari garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar Rp60.872 dan Rp39.538.

Kolektibilitas garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Lancar Rupiah		
Fasilitas kredit yang belum ditarik	4.246.241	2.946.360
Garansi yang diterbitkan	41.309	53.536
	4.287.550	2.999.896
Dolar Amerika Serikat Garansi yang diterbitkan	2.748	4.075
	4.290.298	3.003.971
Dalam Perhatian Khusus Rupiah		
Fasilitas kredit yang belum ditarik	265.335	166.433
Jumlah	4.555.633	3.170.404

25. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Estimated losses on commitments and contingencies in Rupiah and United States Dollar arising from guarantees issued and unused loan facilities as of December 31, 2010 and 2009 are Rp60,872 and Rp39,538, respectively.

The collectibility classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks is as follows:

<i>Current Rupiah</i>
<i>Unused loan facility</i>
<i>Guarantees issued</i>
<i>United States Dollar</i>
<i>Guarantees issued</i>
<i>Special mention Rupiah</i>
<i>Unused loan facility</i>
Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

25. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Saldo awal tahun	39.538	28.183
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	21.244	11.355
Saldo akhir tahun	60.782	39.538

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai.

26. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

	2010	2009
Dana jaminan pengembang	1.086.619	1.006.415
Penerimaan di muka	313.960	422.694
Cadangan atas bonus	227.571	121.915
Kesejahteraan pegawai dan sosial	156.734	66.298
Biaya yang masih harus dibayar	33.977	38.534
Setoran jaminan	3.919	26.403
Nota kredit dalam penyelesaian	1.579	15.374
Lainnya	225	685
Jumlah	1.824.584	1.698.318

Penerimaan di muka merupakan penerimaan bunga subsidi yang diberikan pemerintah terkait dengan pembiayaan Rumah Sehat Sederhana (RSH).

Cadangan atas bonus merupakan kewajiban atas jasa produksi karyawan pada tahun berjalan yang belum dibagikan pada akhir tahun.

Dalam saldo akun "Kesejahteraan pegawai dan sosial" pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, termasuk Kewajiban Imbalan Kerja (Cadangan) masing-masing sebesar Rp83.085 dan Rp46.707 (Catatan 40).

25. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The changes in the estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

	2010	2009
Balance at beginning of year	39.538	28.183
Provision during the current year	21.244	11.355
Balance at end of year	60.782	39.538

Management has the opinion that the provision for estimated losses on commitments and contingencies is adequate.

26. OTHER LIABILITIES

	2010	2009
Developers' security deposits	1.086.619	1.006.415
Unearned income	313.960	422.694
Bonus payable	227.571	121.915
Social and employee welfare	156.734	66.298
Accrued expenses	33.977	38.534
Guarantee deposits	3.919	26.403
Credit notes in process	1.579	15.374
Others	225	685
Total	1.824.584	1.698.318

Unearned income represents interest income from subsidized fund from the Government relating to simple housing loans (RSH).

Bonus payable represents unpaid employees' bonus for the current year which is not yet distributed at the end of the year.

As of December 31, 2010 and 2009, social and employee welfare includes employee benefits (reserve) liability amounting to Rp83,085 and Rp46,707, respectively (Note 40).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

27. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2010/ December 31, 2010 and 31 Desember 2009/ December 31, 2009				
	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)/ Par Value Per Share (Full Amount)	Jumlah Nilai Saham/ Total Shares Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of owned share	
Modal Dasar					<i>Authorized</i>
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0%	<i>Series A Stock Dwiwarna</i>
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100%	<i>Common Stock Series B</i>
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000		10.239.216	100%	Total Authorized
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					<i>Issued and fully paid</i>
Negara Republik Indonesia					<i>Government</i>
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0%	<i>Stock Dwiwarna Series A</i>
Saham Biasa atas nama Seri B	6.353.999.999	500	3.177.000	72,92%	<i>Common Stock Series B</i>
Masyarakat					<i>Public</i>
Saham Biasa atas nama Seri B*	2.360.057.000	500	1.180.029	27,08%	<i>Common Stock Series B*</i>
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	8.714.057.000	500	4.357.029	100%	Total Issued and fully paid

Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah telah menyetujui jumlah rekapitalisasi Bank sebesar Rp14.005.000 melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi yaitu sebesar Rp9.803.500 pada tanggal 25 Juli 2000 dan sebesar Rp4.201.500 pada tanggal 31 Oktober 2000. Berdasarkan Kontrak Manajemen pada tanggal 28 Februari 2001, jumlah penyertaan modal Pemerintah direvisi menjadi sebesar Rp13.843.540 (Catatan 1b).

Sebelum Kuasi-Reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007 (Catatan 2b), Anggaran Dasar Bank belum diubah, khususnya mengenai perubahan modal maka penempatan Pemerintah ini sementara dibukukan sebagai tambahan modal disetor pada ekuitas di neraca.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY

a. Capital Stock

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock as of December 31, 2010 and 2009 are as follows:

On August 21, 2000, the Government approved the Bank recapitalization of Rp14,005,000 through the issuance of recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 on July 25, 2000 and Rp4,201,500 on October 31, 2000. Based on Management Contract dated February 28, 2001, the recapitalization amount was revised to Rp13,843,540 (Note 1b).

Before the Quasi-Reorganization as of May 31, 2007 (Note 2b), pending the amendment of the Bank's articles of association, particularly the change in capital, this government placement was temporarily recorded as additional paid-in capital, a component of stockholders' equity in the balance sheets.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen antara Direksi Bank dan Menteri Keuangan, Menteri mengeluarkan Peraturan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Bank dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham baru yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

Kemudian, untuk pelaksanaan peraturan tersebut di atas, Pemegang Saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2008 memutuskan:

1. Peningkatan Modal Dasar Bank dari Rp5.000.000 yang terbagi atas 5 juta saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham menjadi 15.093.540 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham.
2. Penerbitan saham baru Bank sejumlah 13.843.540 saham dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham yang diambil dari saham portopel Bank.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

As a result of the Management Contract between the Bank directors and the Ministry of Finance, the Minister issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the final amount of the Government's capital contribution to the Bank which amounted to Rp13,843,540 and the implementation of the Government rights as a result of the additional contributed capital by the Republic of Indonesia to the Bank in relation to the commercial bank recapitalization program by converting it to 13,843,540 new shares of stock which were issued by the Bank, with nominal value amounting to Rp1,000,000 per share (full amount). This regulation was applied retroactively in May 31, 2007.

Further, for the implementation of the above regulation, the Bank's stockholder, in the Stockholders' General Meeting held on March 26, 2008, decided the following:

1. Increase in the authorized capital stock from Rp5,000,000 which consists of 5 million shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share to 15,093,540 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share.
2. Issuance of 13,843,540 new Bank shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share which are taken from the Bank's unissued shares.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Perubahan Anggaran Dasar Bank sehubungan dengan Keputusan RUPS Bank tersebut di atas telah dilegalisasi dengan akta No. 63 tanggal 31 Maret 2008 Notaris Siti Rayhana, S.H., notaris pengganti dari notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-16595.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 3 April 2008.

Selanjutnya, sehubungan dengan Kuasi-Reorganisasi Bank efektif pada tanggal 31 Mei 2007, Pemegang Saham pada saat RUPS Bank yang dilakukan pada tanggal 22 April 2008 memutuskan:

1. Bahwa Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-67/MBU/2008 selaku wakil pemerintah dalam RUPS Bank yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Bank dan Perubahan Anggaran Dasar mempunyai daya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.
2. Pelaksanaan Kuasi-Reorganisasi Bank efektif pada tanggal 31 Mei 2007 guna menutup saldo defisit sebesar Rp14.226.290 dengan mengeliminasi defisit tersebut ke Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya, perubahan Nilai Wajar Obligasi Pemerintah (Obligasi Rekapitalisasi) dan Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap masing-masing sebesar Rp1.021.336, (Rp6.213) dan Rp677.431 serta mengurangi modal saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp12.533.736.
3. Penurunan nilai nominal per lembar saham Bank dari semula Rp1.000.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp169.595,99 (Rupiah penuh) sebagai akibat pengurangan modal saham ditempatkan dan disetor Bank sebesar Rp12.533.736, sehingga modal saham ditempatkan dan disetor Bank menjadi Rp2.559.804 yang terbagi atas 15.093.540 lembar saham dengan nilai nominal Rp169.595,99 (Rupiah penuh) per lembar saham.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The amendment of the Bank's articles of association in relation to the above decision in the Stockholders' General Meeting, which is legalized under deed No. 63 dated March 31, 2008 of Notary Siti Rayhana, S.H., who replaced Notary B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its decision letter No. AHU-16595.AH.01.02 of 2008, dated April 3, 2008.

Further, in connection with the Quasi-Reorganization effective as of May 31, 2007, the Bank's stockholder, in the Stockholders' General Meeting held on April 22, 2008, decided the following:

1. The decision No. KEP-67/MBU/2008 of the Ministry of the State-owned Enterprises, which acted as the Government's representative in the Bank's Stockholders' General Meeting held on March 26, 2008 regarding the addition in the Government's capital contribution to the Bank's capital and the amendment of the articles of association, was to be applied retroactively to May 31, 2007.
2. The implementation of the Bank's Quasi-Reorganization became effective as of May 31, 2007 to absorb the deficit balance amounting to Rp14,226,290 by eliminating such deficit against the appropriated retained earnings, change in fair value of government bonds (recapitalization bonds) and revaluation increment on premises and equipment which amounted to Rp1,021,336, (Rp6,213) and Rp677,431, respectively, and by reducing the issued and fully paid capital stock by Rp12,533,736.
3. Decrease in the Bank's nominal value per share from Rp1,000,000 (full amount) to Rp169,595.99 (full amount) as a result of the decrease in issued and fully paid capital stock amounting to Rp12,533,736 resulting in the Bank's issued and fully paid capital stock to become Rp2,559,804 consisting of 15,093,540 shares with a nominal value of Rp169,595.99 (full amount) per share.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

4. Perubahan modal saham dasar Bank dari semula Rp15.093.540 menjadi Rp10.239.216 yang terbagi atas 60.374.163 lembar saham dengan nilai nominal Rp169.595,99 (Rupiah penuh) per lembar saham.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Bank tentang Perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah dilegalisasi dengan akta No. 45 tanggal 24 April 2008, Notaris Emi Susilowati, S.H. dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-35584.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008.

Kedua keputusan perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007 sehingga pada tanggal 31 Mei 2007 (setelah Kuasi-Reorganisasi) modal saham dasar Bank menjadi sebesar Rp10.239.216 yang terbagi atas 60.374.163 lembar saham dengan nilai nominal Rp169.595,99 (Rupiah penuh) per lembar saham dan modal saham ditempatkan dan disetor penuh Bank menjadi sebesar Rp2.559.804 yang terbagi atas 15.093.540 lembar saham dengan nilai nominal Rp169.595,99 (Rupiah penuh) per lembar saham.

Pada tanggal 18 Juli 2009, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2009 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Bank yang ditetapkan sebesar Rp12.533.736 yang berlaku pada tanggal 31 Mei 2007 dan bertujuan untuk mengeliminasi kerugian (defisit) Bank melalui Kuasi-Reorganisasi. Pengurangan penyertaan modal tersebut menyebabkan perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh Negara Republik Indonesia yang semula sebesar Rp15.093.540 atau sebanyak 15.093.540 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 (Rupiah penuh) menjadi sebesar Rp2.559.804 atau sebanyak 15.093.540 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp169.595,99 (Rupiah penuh).

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

4. The change in the Bank's authorized capital stock from Rp15,093,540 to become Rp10,239,216 consisting of 60,374,163 shares with a nominal value of Rp169,595.99 (full amount) per share.

The decision in the Bank's Stockholders' General Meeting regarding the Amendment of the Bank's Articles of Association was notarized under deed No. 45 dated April 24, 2008 of Notary Emi Susilowati, S.H. and was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its decision letter No.AHU-35584.AH.01.02 of 2008 dated June 25, 2008.

The two decisions on the amendment of the Bank's Articles of Association were applied retroactively to May 31, 2007 resulting in the Bank's authorized capital stock as of May 31, 2007 (after Quasi-Reorganization) to become Rp10,239,216 which consists of 60,374,163 shares with a nominal value of Rp169,595.99 (full amount) per share and the Bank's issued and fully paid capital stock to become Rp2,559,804 which consists of 15,093,540 shares with a nominal value of Rp169,595.99 (full amount) per share.

On July 18, 2009, the Government issued Regulation No. 50 of 2009 regarding the decrease in the Government's Capital Participation in the Bank determined at Rp12,533,736 retroactive to May 31, 2007 and for the purpose of the loss (deficit) elimination through Quasi-Reorganization. The decrease in the Government's capital participation resulted in the change in the issued and fully paid capital stock from Rp15,093,540 or 15,093,540 shares with a nominal value per share of Rp1,000,000 (full amount) to Rp2,559,804 or 15,093,540 shares with a nominal value per share of Rp169,595.99 (full amount).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 6 Oktober 2009 pemegang saham memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. RUPS-LB menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor penuh dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia, yaitu dari Rp2.559.804 yang terdiri atas 5.119.608.000 lembar saham menjadi Rp3.177.000 yang terdiri atas 6.354.000.000 lembar saham yang berasal dari:
 - a. Kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp289.888.397.772 (Rupiah penuh).
 - b. Kapitalisasi cadangan tujuan sebesar Rp129.142.251.563 (Rupiah penuh).
 - c. Kapitalisasi saldo laba periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2009 sebesar Rp198.165.350.665 (Rupiah penuh).
2. Perubahan seluruh Anggaran Dasar, yaitu:
 - a. Dalam RUPS pemegang saham menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka antara lain disesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.J.1 dan perubahan status PT Bank Tabungan Negara (Persero) dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 - b. Dalam RUPS pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham Bank yang semula Rp169.595,99 (Rupiah penuh) setiap saham menjadi sebesar Rp500 setiap saham.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting dated October 6, 2009, decided as follows:

1. The Extraordinary Stockholders' General Meeting approved the increase in issued and fully paid-up capital in PT Bank Tabungan Negara (Persero) which is carried out by the Republic of Indonesia, from Rp2,559,804 including 5,119,608,000 shares to Rp3,177,000 including 6,354,000,000 shares, which resulted from the following items:
 - a. Capitalized general reserve amounting to Rp289,888,397,772 (full amount)
 - b. Capitalized special reserve amounting to Rp129,142,251,563 (full amount).
 - c. Capitalized retained earnings from January 1 until June 30, 2009 amounting to Rp198,165,350,665 (full amount).
2. The changes in the entire articles of association, are as follows:
 - a. In the Extraordinary Stockholders' General Meeting, The shareholders approved to change PT Bank Tabungan Negara (Persero)'s articles of association to become a public company based on Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) Rule No. IX.J.1 and the change in the Bank's status from a Limited Company to Public Company.
 - b. In the Extraordinary General Shareholders' Meeting, The shareholders agreed the change in nominal amount of shares of Rp169,595.99 (full amount) per share to become Rp500 per share.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

- c. Pemegang saham menyetujui penerbitan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna senilai Rp500 dan saham Seri B pada Bank berdasarkan ketentuan pasar modal. Pemegang saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak-hak istimewa untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dan meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
3. Pemegang saham menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Bank sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 lembar saham sehingga kepemilikan Negara Republik Indonesia menjadi paling sedikit 70% atau 6.354.000.000 lembar saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran baru. Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*). Persetujuan tersebut berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Bank.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

- c. The shareholders approved the issuance of 1 (one) share of Series A Dwiwarna amounting to Rp500 and Series B based on the capital market regulations. The shareholder of Series A Dwiwarna has the rights to approve the appointment and termination of the Boards of Commissioners and Directors, including the approval on the amendment in the articles of association, mergers, joint ventures, acquisition and separation, the proposal on the liquidation of the Bank, dismissal and to obtain reports and explanation regarding certain issues from the Bank's Boards of Directors and Commissioners with consideration on the prevailing rules and regulations, specially on Capital Market regulation.

3. The shareholders approved issuance of new shares from the Bank with a maximum amount of 30% of the total issued and fully paid up capital after the issuance of new share or a maximum of 2,723,142,857 shares, resulting in the ownership of the Republic of Indonesia with a minimum of 70% or 6,354,000,000 shares of the total issued and fully paid up capital after the new issuance. The newly issued shares are offered to the public through Initial Public Offering (IPO) which included the shares for Management and Employee Stock Option Plan (MESOP). The approval became effective after the issuance of the Government regulation regarding the amendment of the share ownership structure through the Bank's Initial Public Offering.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Bank untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum saham perdana termasuk jumlah saham program MESA dan MESOP.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi Bank untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, kecuali penetapan harga penawaran dan kepastian jumlah saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana (IPO) termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Mencatatkan saham-saham Bank dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - b. Mencatatkan seluruh saham Bank yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek.
6. Menyetujui program kepemilikan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*) dalam rangka IPO dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program MESA diberikan maksimal sebesar 9,62% dari saham baru yang diterbitkan dan program MESOP maksimal sebesar 4% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.
 - b. Peserta program MESA dan MESOP adalah karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit.
 - c. Diskon harga saham untuk program MESA sebesar 20% dengan masa *lockup* selama enam bulan. Diskon dimaksud menjadi beban Bank.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

4. Authorize the Bank's Board of Commissioners to declare the realization of the total issued shares in the IPO including the total shares of MESA and MESOP programs.
5. Authorize the Bank's Board of Directors to implement the necessary actions, except to decide on the share price and amount of shares offered through the IPO, in connection with the IPO which includes but is not limited to:
 - a. Record the Bank's share in Collective Custody in accordance with Indonesian Central Securities Depository's regulations
 - b. Record all the Bank's shares which were issued and fully paid up to the Indonesian Stock Exchange.
6. To approve the stock ownership by management and employees through the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program and under the grant of option right to Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) in connection with the IPO and with following terms:
 - a. MESA program is allocated with a maximum amount of 9.62% of the newly issued shares and a maximum amount of 4% of the issued and fully paid-up capital for the MESOP program.
 - b. Participants of the MESA and MESOP program are registered employees as of September 30, 2009 and the Board of Directors, the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, Secretary of the Board of Commissioners and members of the Audit Committee.
 - c. Stock price discount in the MESA program amounted to 20% with a lockup period until six months. The discount will be charged as the Bank's expenses.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

- d. Hak opsi program MESOP dapat dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%. Harga pelaksanaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Umur opsi lima tahun sejak diterbitkan dengan *vesting period* (masa tunggu) satu tahun yang mana dalam periode tersebut hak opsi tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan.
- e. Alokasi saham MESA dan MESOP antara manajemen dan karyawan adalah 5%:95% dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, prestasi kerja, masa kerja, jabatan, hak dan kewajiban.
- f. Pengawasan program MESA dan MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada Pemegang Saham.

Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan RUPS-LB tersebut di atas telah diaktakan dengan akta No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-49309.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009.

Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

- d. The MESOP program can be executed in three stages. Stage I amounting to 40%, stage II amounting to 30% and stage III amounting to 30%. The exercise price must comply with the prevailing rules and regulations. The option will expire in five years since the date of issuance with one year vesting period which is the period the option is not exercisable.
- e. MESA and MESOP stock allocation to management and employees is 5%:95% and should be implemented by considering justice, fairness, work achievement, work position, rights and obligation concept.
- f. The implementation of MESA and MESOP is monitored by the Board of Commissioners and its implementation must comply with prevailing regulation which will be reported to the stockholders.

The amendment of the Bank's Articles of Association was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H. and was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its decision letter No. AHU-49309.AH.01.02. year 2009 dated October 13, 2009.

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 year 2009 and regulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of structure of the stock ownership through IPO of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the registration statement which was submitted by the Bank related to the IPO of 6,353,999,999 ordinary shares of Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 ordinary shares of New Series B, amounting to Rp500 (full amount) per share to the public, became

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (nilai penuh) per saham dan pada saat yang bersamaan seluruh saham tersebut juga dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Bersamaan dengan efektifnya IPO Bank, program MESA telah efektif dengan jumlah lembar saham biasa Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham).

b. Tambahan modal disetor - Bersih

Tambahan modal disetor sebesar Rp639.626 berasal dari hasil penjualan 2.360.057.000 lembar saham biasa atas nama seri B pada saat penawaran umum perdana saham pada harga penawaran Rp800 (Rupiah Penuh) per saham dikurangi dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dan dikurangi dengan biaya-biaya emisi penawaran umum perdana saham sebesar Rp68.391 yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Surat No. S-146/MBU/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal penetapan hasil dan biaya privatisasi.

c. Penggunaan Laba

2010

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 19 Mei 2010, pemegang saham memutuskan pengalokasian laba bersih untuk pembayaran dividen sebesar Rp131.530, pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar Rp134.000, dana cadangan umum untuk memenuhi ketentuan pasal 70 UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Rp15.067, tantiem direksi dan komisaris sebesar Rp11.157 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan masing-masing sebesar Rp11.691.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, started to be traded on December 17, 2009 with the selling price of Rp800 (full amount) per share and listed in the Indonesia Stock Exchange.

Along with the effectiveness of the Bank's IPO, the MESA program were effective with number of Series B shares totaling 226,928,500 shares (with nominal value Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering amounting to Rp800 per share).

b. Additional paid in capital - Net

Additional paid in capital amounting to Rp639,626 resulted from the sale of 2,360,057,000 ordinary B series shares in the initial public offering at sale price amounting to Rp800 (full amount) per share less nominal value amounting to Rp500 (full amount) per share and less stock issuance cost amounting to Rp68,391 which was based on the approval from the Ministry of State-owned Enterprises in its Letter No. S-146/MBU/2010 dated March 10, 2010 regarding regarding the proceeds and privatization expense.

c. Profit Distribution

2010

In the Annual Stockholders' General Meeting held on May 19, 2010, the stockholder decided to distribute dividends of Rp131,530, to allocate as general and special reserve amounting to Rp134,000, to allocate as general reserve to comply with article 70 law No. 40 effective 2007 amounting to Rp15,067, for directors' and commissioners' tantiem amounting to Rp11,157 and for the partnership and environmental development program amounting to Rp11,691.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

c. Penggunaan Laba (lanjutan)

2009

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 8 Mei 2009, pemegang saham memutuskan pengalokasian laba bersih untuk pembayaran dividen sebesar Rp43.047 atau sebesar Rp2.852 per lembar saham (Rupiah penuh), pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar Rp374.513, tantiem direksi dan komisaris sebesar Rp12.940 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar Rp12.914.

28. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP)

Jumlah saham yang akan diterbitkan pada opsi saham tahap 1 adalah 145.234.500 lembar dengan harga eksekusi adalah Rp855 (Rupiah penuh). Masa berlaku opsi adalah selama 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal pendistribusian hak opsi, 29 Januari 2010. Opsi saham mempunyai masa tunggu (*vesting period*) selama 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 1 Februari 2011.

Periode eksekusi yang ditetapkan Bank dimulai pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 setiap bulan Februari dan bulan Oktober selama 30 hari bursa di bulan bersangkutan.

Nilai wajar dari opsi saham tahap pertama yang dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2010 adalah sebesar Rp422,05 (Rupiah penuh), sesuai dengan Laporan Penilaian yang dikeluarkan oleh PT Towers Watson pada tanggal 22 September 2010 dengan menggunakan model penentuan harga opsi Binomial (*Binomial option pricing model*).

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

c. Profit Distribution (continued)

2009

In the Annual Stockholders' General Meeting held on May 8, 2009, the stockholder decided to distribute dividends of Rp43,047 or Rp2,852 (full amount) per share and to allocate Rp374,513 as general and special reserve, Rp12,940 as directors' and commissioners' *tantiem* and Rp12,914 for the partnership and environmental development program.

28. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP)

The amount of shares which will be issued in option stage 1 amounted to 145,234,500 shares with execution price at Rp855 (Rupiah full amount). The option period is 5 (five) years starting from the date of distribution, January 29, 2010. The option has vesting period of 1 (one) year until February 1, 2011.

The Bank determined that the execution period begins in 2011 until 2014 with execution periods in every February and October of each year for 30 working days in pertaining months.

The fair value of option stage which was distributed on January 29, 2010 amounted to Rp422.05 (Rupiah full amount), based on the Valuation Report by PT Towers Watson dated September 22, 2010, using the Binomial option pricing model.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

28. PROGRAM KOMPENSASI MANAJEMEN DAN KARYAWAN BERBASIS SAHAM (MESOP) (lanjutan)

Nilai wajar dari opsi yang diberikan merupakan estimasi dengan asumsi sebagai berikut:

Suku bunga bebas risiko:	7,808%
Ekspektasi periode opsi	5 tahun/years
Ekspektasi ketidakstabilan harga saham	50%
Ekspektasi dividen yang dihasilkan	2%
Tingkat pengunduran diri karyawan	1%

Jumlah biaya opsi saham yang tercatat pada akun beban gaji dan upah (Catatan 35) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp52.152.

28. MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (MESOP) (continued)

The option fair value is estimated using the following assumptions:

Risk free rate:
Expected option period
Volatility rate
Dividend yield
Employee resignation rate

The compensation cost recorded in the salaries and wages expense (Note 35) amounted to Rp52,152 for the year ended December 31, 2010.

29. PENDAPATAN BUNGA

29. INTEREST INCOME

	2010	2009	
Kredit yang diberikan	5.836.048	4.662.561	Loans
Obligasi pemerintah	383.960	633.685	Government bonds
Efek-efek	89.506	112.085	Securities
Penempatan pada bank lain	13.003	27.933	Placements with other banks
Tagihan swap suku bunga (Catatan 11)	-	35.464	Interest rate swap receivables (Note 11)
Giro pada Bank Indonesia	3.816	-	Current accounts with Bank Indonesia
Jumlah	6.326.333	5.471.728	Total

30. BEBAN BUNGA

30. INTEREST EXPENSE

	2010	2009	
Deposito berjangka	1.798.521	2.267.720	Time deposits
Surat-surat berharga yang diterbitkan	449.824	358.777	Securities issued
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	247.054	257.604	Securities sold under repurchase agreements
Tabungan	308.553	286.731	Savings deposits
Pinjaman yang diterima	119.585	111.655	Fund borrowings
Giro	121.009	90.047	Demand deposits
Simpanan dari bank lain	90.920	35.211	Deposits from other banks
Pinjaman subordinasi	-	12.600	Subordinated loans
Kewajiban swap suku bunga (Catatan 11)	509	-	Interest rate swap liabilities (Note 11)
Jumlah	3.135.975	3.420.345	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

31. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

	2010	2009
Jasa perbankan	32.551	29.584
Jasa penagihan - payment points	3.601	3.637
Lain-lain	13.418	17.500
Jumlah	49.570	50.721

31. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

<i>Bank services</i>	
<i>Collection services - payment points</i>	
<i>Others</i>	
Total	

32. BEBAN PENYISIHAN (PEMBALIKAN) KERUGIAN AKTIVA PRODUKTIF DAN NON-PRODUKTIF

	2010	2009
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 12)	323.376	68.301
Giro pada bank lain (Catatan 7)	(5.018)	(2.325)
Penempatan pada bank lain (Catatan 8)	2.219	(2.779)
Efek-efek (Catatan 9)	219	382
Properti terbengkalai	(10.260)	(10.733)
Tagihan swap suku bunga (Catatan 11)	-	18
Bersih	310.536	52.864

32. PROVISION (REVERSAL) OF ALLOWANCE FOR POSSIBLE LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS

<i>Loans and sharia financing/receivables (Note 12)</i>	
<i>Current accounts with other banks (Note 7)</i>	
<i>Placements with other banks (Note 8)</i>	
<i>Securities (Note 9)</i>	
<i>Abandoned properties</i>	
<i>Interest rate swap receivables (Note 11)</i>	
Net	

33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2010	2009
Perbaikan dan pemeliharaan	196.111	152.573
Sewa	144.274	109.963
Penyusutan (Catatan 13)	132.259	99.133
Promosi	156.267	98.036
Listrik, air dan komunikasi	100.705	81.015
Beban kantor	72.652	59.703
Transportasi	41.204	34.535
Jasa profesional	18.114	16.903
Lainnya	24.658	22.093
Jumlah	886.244	673.954

33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

<i>Repairs and maintenance</i>	
<i>Rent</i>	
<i>Depreciation (Note 13)</i>	
<i>Promotion</i>	
<i>Electricity, water and telecommunications</i>	
<i>Office expenses</i>	
<i>Transportation</i>	
<i>Professional fees</i>	
<i>Others</i>	
Total	

34. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

	2010	2009
Gaji dan upah	1.007.881	857.678
Pelatihan dan pengembangan	57.365	41.163
Lainnya	71.238	38.234
Jumlah	1.136.484	937.075

34. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

<i>Salaries and wages</i>	
<i>Training and development</i>	
<i>Others</i>	
Total	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

35. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

	2010	2009
Imbalan atas jasa penagihan	42.097	26.723
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah	29.949	24.910
Lainnya	72.473	18.624
Jumlah	144.519	70.257

35. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

<i>Fees for collection services</i>
<i>Loss on bad debt settlement</i>
<i>Others</i>
Total

36. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL - BERSIH

	2010	2009
Pendapatan sewa gedung	-	60
Pendapatan (beban) lainnya - bersih (masing-masing di bawah Rp500)	(13.495)	6.319
Bersih	(13.495)	6.379

36. NON-OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET

<i>Building rental income</i>
<i>Others - net (each below Rp500)</i>
Net

37. PERPAJAKAN

a. Rekonsiliasi antara laba sebelum (beban) manfaat pajak menurut laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan dan sebelum pos luar biasa sesuai dengan laporan laba rugi	1.250.222	745.817
Beda temporer:		
Penurunan nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(17.923)	(3.828)
Penyisihan untuk imbalan kerja - bersih	34.721	15.680
Penyisihan (pembalikan) kerugian aktiva produktif dan non-produktif	91.315	(33.610)
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan:		
Kenikmatan karyawan	39.852	49.411
Sewa	17.951	14.462
Beban kantor	10.850	8.365
Dana sosial dan representasi	4.934	5.992
Perbaikan dan pemeliharaan	11.712	9.671
Penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut pajak	1.608	2.201
Denda pajak	5	111
Taksiran penghasilan kena pajak sebelum pos luar biasa	1.445.247	814.272
Pos luar biasa - bersih (Catatan 38)	-	(21.930)
Taksiran penghasilan kena pajak	1.445.247	792.342

37. TAXATION

a. The reconciliation between income before income tax benefit (expense), as shown in the statements of income, and estimated taxable income for the years ended December 31, 2010 and 2009 is as follows:

<i>Income before income tax benefit and extraordinary item per statements of income</i>
<i>Temporary differences:</i>
<i>Decrease in value of trading securities</i>
<i>Provision for employee benefits - net</i>
<i>Provision (reversal) of allowance for possible losses on earning and non-earning assets</i>
<i>Permanent differences:</i>
<i>Non-deductible expenses:</i>
<i>Employee welfare</i>
<i>Rent</i>
<i>Office expense</i>
<i>Social funds and representation</i>
<i>Repairs and maintenance</i>
<i>Depreciation of premises and equipment which are non-depreciable for tax purposes</i>
<i>Tax penalties</i>
<i>Estimated taxable income before extraordinary item</i>
<i>Extraordinary item (Note 38)</i>
Estimated taxable income

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

37. PERPAJAKAN (lanjutan)**37. TAXATION (continued)**

	2010	2009	
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	374.350	221.856	<i>Income tax expense in accordance with applicable tax rate</i>
Pajak penghasilan yang dibayar sendiri - Pasal 25	(278.831)	(197.282)	<i>Income tax paid - Article 25</i>
Hutang pajak penghasilan Badan (Catatan 16)	95.519	24.574	<i>Corporate income tax payable (Note 16)</i>

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 di atas digunakan sebagai dasar penyajian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2010.

The tax computation for the year ended December 31, 2010 above was used as the basis for the amount reported in the Bank's tax return for 2010.

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 tersebut diatas sesuai dengan jumlah yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2009.

The tax computation for the year ended December 31, 2009 above is in accordance with the Bank's tax return report in 2009.

- b. Rincian manfaat (beban) pajak tangguhan - bersih dengan memperhitungkan pengaruh beda temporer pada tarif pajak adalah sebagai berikut:

- b. *The details of the deferred income tax benefit (expense) - net computed on temporary differences tax rate are as follows:*

	2010	2009	
Penyisihan (pembalikan) kerugian aktiva produktif dan non-produktif	22.829	(13.985)	<i>Provision (reversal) of allowance for possible losses on earning and non-earning assets</i>
Penurunan (kenaikan) nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(4.482)	(1.412)	<i>Decrease (increase) in value of trading securities</i>
Penyisihan (pembayaran) untuk imbalan kerja - bersih	8.681	3.819	<i>Provision for (payment of) employee benefits - net</i>
Kompensasi berbasis saham (MESOP)	13.038	-	<i>Stock option (MESOP)</i>
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan - Bersih	40.066	(11.578)	<i>Deferred Income Tax Benefit (Expense) - Net</i>

- c. Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan

- c. *Deferred tax assets (liability)*

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

The tax effects on significant outstanding temporary differences between commercial and tax reporting purposes are as follows:

	2010	2009	
Aset Pajak Tangguhan - efek dari laba rugi			<i>Deferred tax asset - effect from income statement</i>
Aset Pajak Tangguhan			<i>Deferred tax assets</i>
Penyisihan kerugian aktiva produktif dan non-produktif	48.041	38.115	<i>Allowance for possible losses on earning and non-earning assets</i>
Penyisihan untuk imbalan kerja	20.972	12.291	<i>Provision for employee benefits</i>
Kewajiban Pajak Tangguhan			<i>Deferred tax liability</i>
Penurunan nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	442	4.924	<i>Decrease in value of trading securities</i>
Kompensasi berbasis saham (MESOP)	13.038	-	<i>Stock option (MESOP)</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

37. PERPAJAKAN (lanjutan)

37. TAXATION (continued)

	2010	2009	
Aset Pajak Tangguhan - efek dari ekuitas			Deferred tax asset - effect from equity
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi Pemerintah	(45.830)	16.891	<i>Unrealized gain (losses) of available - for sale securities and government bonds</i>
Kompensasi berbasis saham (MESOP)	2.173	-	<i>Stock option (MESOP)</i>
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	38.836	72.221	Deferred Tax Assets - Net
d. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum pajak penghasilan dan (beban) pajak penghasilan - bersih seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:			d. <i>The reconciliation between the income tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before income tax and the income tax expense - net shown in the statements of income for the years ended December 31, 2010 and 2009, is as follows:</i>
	2010	2009	
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan dan sebelum pos luar biasa sesuai dengan laporan laba rugi	1.250.222	745.817	<i>Income before income tax and extraordinary item per statements of income</i>
Pos luar biasa - bersih	-	(21.930)	<i>Extraordinary Item - net</i>
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi	1.250.222	723.887	<i>Income before income tax per statements of income</i>
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	(312.556)	(202.688)	<i>Income tax expense at the applicable tax rate</i>
Beda tetap - bersih	(21.728)	(25.260)	<i>Permanent differences - net</i>
Koreksi	-	(5.486)	<i>Adjustments</i>
Beban Pajak Penghasilan sebelum manfaat pajak pos luar biasa	(334.284)	(233.434)	<i>Income tax expense before extraordinary income tax benefit</i>
Manfaat pajak penghasilan pos luar biasa	-	(6.140)	<i>Extraordinary income tax benefit</i>
Beban pajak penghasilan - bersih	(334.284)	(239.574)	Income tax expense - net

38. POS LUAR BIASA

38. EXTRAORDINARY ITEM

Pos luar biasa terdiri atas kerugian yang dialami Bank pada tahun 2009 sebagai dampak kebakaran gedung Menara BTN. Perhitungan kerugian akibat kebakaran gedung Menara BTN adalah sebagai berikut (Catatan 13):

Extraordinary item represents the net loss suffered by the Bank in 2009 from the fire that damaged the Bank's building. The amount of the net loss is calculated as follows (Note 13):

Nilai buku gedung	98.849	<i>Book value of building</i>
Nilai buku mesin	81	<i>Book value of machineries</i>
Pendapatan klaim asuransi	(77.000)	<i>Claim from insurance</i>
Kerugian kebakaran - bersih	21.930	<i>Loss</i>
Manfaat pajak penghasilan	(6.140)	<i>Income tax benefit</i>
Kerugian kebakaran- bersih setelah pajak	15.790	Net loss due to fire - net of tax

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

	2010	2009
<u>KOMITMEN</u>		
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik (Catatan 25)	4.511.576	3.112.793
Lain-lain	84	73
Jumlah Kewajiban Komitmen	4.511.660	3.112.866
<u>KONTINJENSI</u>		
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	390.774	304.446
Garansi yang diterima	30.052	70.621
Lain-lain	215.601	157.317
Jumlah Tagihan Kontinjensi	636.427	532.384
Kewajiban Kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 25)	44.057	57.611
Tagihan Kontinjensi - Bersih	592.370	474.773

40. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Bank membentuk cadangan imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 berdasarkan laporan aktuarial yang dilakukan oleh Bestama Aktuarial dan PT Dian Artha Tama, aktuaris independen berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 17 Februari 2011 dan 18 Februari 2010 dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

- Tingkat bunga teknis per tahun 9% dan 10% untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
- Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun per tahun 9% dan 7% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
- Tingkat mortalitas (kematian) mengikuti GAM - 1971 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
- Tingkat cacat diasumsikan sebesar 0,05% per tahun.
- Tingkat pengunduran diri per tahun sejak usia < 46, 46 - 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan 56 tahun masing-masing sebesar 1%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 9% dan 100%.

39. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The outstanding commitments and contingencies as of December 31, 2010 and 2009 are as follows:

<u>COMMITMENTS</u>	
Commitments payable	
Unused loan facility commitments (Note 25)	
Others	
Total commitments payable	
<u>CONTINGENCIES</u>	
Contingent receivables	
Interest income on non-performing assets	
Guarantees received	
Others	
Total contingent receivables	
Contingent payables	
Guarantees issued (Note 25)	
Contingent receivables - net	

40. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS

The Bank provided allowance for employee benefits for the years ended December 31, 2010 and 2009 based on the actuarial calculation performed by Bestama Aktuarial and PT Dian Artha Tama, an independent actuary, based on its reports dated February 17, 2011 and February 18, 2010, respectively, by using the projected unit credit method.

The key assumptions used in the actuarial calculations are as follows:

- Annual discount rates of 9% and 10% for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively.
- Basic pensionable annual salary increase rate of 9% and 7% for the years ended December 31, 2010 and 2009.
- Mortality rate following GAM - 1971 for the years ended December 31, 2010 and 2009.
- Assumed disability rate of 0.05% per year.
- Retirement rates per year for ages < 46, 46 - 50, 51, 52, 53, 54, 55 and 56 years: 1%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 9% and 100%, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

40. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (lanjutan)

Berikut adalah ringkasan komponen dari status pendanaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan biaya imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut:

2010

a. Kewajiban untuk imbalan kerja

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Kewajiban kini	816.433	414.873	1.231.306	Present value of obligation
Nilai wajar aktiva program	836.983	472.761	1.309.744	Fair value of plan assets
Status pendanaan	20.550	57.888	78.438	Funded status
Keuntungan aktuarial ditangguhkan	125.002	(36.083)	88.919	Deferred actuarial gain
Kelebihan nilai wajar aktiva	145.552	21.805	167.357	Excess of assets fair value
Eliminasi kelebihan nilai wajar atas kewajiban	(145.552)	(21.805)	(167.357)	Elimination of assets fair value over liability
Kewajiban yang diakui dalam neraca	-	-	-	Liability recognized in balance sheets

b. Biaya imbalan kerja

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Biaya jasa kini	19.128	10.944	30.072	Current service cost
Biaya bunga	60.241	32.995	93.236	Interest cost
Amortisasi keuntungan aktuarial ditangguhkan	-	(2.810)	(2.810)	Amortization of deferred actuarial gain
Pengembangan aktiva program	(64.948)	(33.461)	(98.409)	Assets program development
Beban imbalan kerja - bersih	14.421	7.668	22.089	Employee benefits expense - net

c. Mutasi atas Kelebihan nilai wajar aset atas kewajiban untuk imbalan kerja

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Saldo pada awal tahun	128.902	18.532	147.434	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan	(14.421)	(7.668)	(22.089)	Employee benefits expense during the current year
luran pemberi kerja tahun berjalan	31.071	10.941	42.012	Bank's contribution during the current year
Saldo pada akhir tahun	145.552	21.805	167.357	Balance at end of year

40. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The following summarizes the components of the funded status as of December 31, 2010 and 2009 and the employee benefits expense recognized in the statements of income for the years then ended:

2010

a. Employee benefits liability

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Kewajiban kini	816.433	414.873	1.231.306	Present value of obligation
Nilai wajar aktiva program	836.983	472.761	1.309.744	Fair value of plan assets
Status pendanaan	20.550	57.888	78.438	Funded status
Keuntungan aktuarial ditangguhkan	125.002	(36.083)	88.919	Deferred actuarial gain
Kelebihan nilai wajar aktiva	145.552	21.805	167.357	Excess of assets fair value
Eliminasi kelebihan nilai wajar atas kewajiban	(145.552)	(21.805)	(167.357)	Elimination of assets fair value over liability
Kewajiban yang diakui dalam neraca	-	-	-	Liability recognized in balance sheets

b. Employee benefits expense

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Biaya jasa kini	19.128	10.944	30.072	Current service cost
Biaya bunga	60.241	32.995	93.236	Interest cost
Amortisasi keuntungan aktuarial ditangguhkan	-	(2.810)	(2.810)	Amortization of deferred actuarial gain
Pengembangan aktiva program	(64.948)	(33.461)	(98.409)	Assets program development
Beban imbalan kerja - bersih	14.421	7.668	22.089	Employee benefits expense - net

c. Movement of excess of assets fair value over liability for employee benefits

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Saldo pada awal tahun	128.902	18.532	147.434	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan	(14.421)	(7.668)	(22.089)	Employee benefits expense during the current year
luran pemberi kerja tahun berjalan	31.071	10.941	42.012	Bank's contribution during the current year
Saldo pada akhir tahun	145.552	21.805	167.357	Balance at end of year

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

40. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (lanjutan)

**40. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS
(continued)**

2009

2009

a. Kewajiban untuk imbalan kerja

a. Employee benefits liability

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Kewajiban kini	602.406	329.946	932.352	Present value of obligation
Nilai wajar aktiva program	721.635	418.274	1.139.909	Fair value of plan assets
Status pendanaan	119.229	88.328	207.557	Funded status
Keuntungan aktuarial ditangguhkan	9.672	(69.796)	(60.124)	Deferred actuarial gain
Kelebihan nilai wajar aktiva	128.901	18.532	147.433	Excess of assets fair value
Eliminasi kelebihan nilai wajar atas kewajiban	(128.901)	(18.532)	(147.433)	Elimination of assets fair value over liability
Kewajiban yang diakui dalam neraca	-	-	-	Liability recognized in balance sheets

b. Biaya imbalan kerja

b. Employee benefits expense

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Biaya jasa kini	20.558	24.094	44.652	Current service cost
Biaya bunga	44.848	26.503	71.351	Interest cost
Amortisasi keuntungan aktuarial ditangguhkan	-	(4.244)	(4.244)	Amortization of deferred actuarial gain
Pengembangan aktiva program	(55.266)	(28.899)	(84.165)	Assets program development
Beban imbalan kerja - bersih	10.140	17.454	27.594	Employee benefits expense - net

c. Mutasi atas Kelebihan nilai wajar aset atas kewajiban untuk imbalan kerja

c. Movement of excess of assets fair value over liability for employee benefits

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Saldo pada awal tahun	110.049	21.805	131.854	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan	(10.140)	(17.454)	(27.594)	Employee benefits expense during the current year
luran pemberi kerja tahun berjalan	28.992	14.181	43.173	Bank's contribution during the current year
Saldo pada akhir tahun	128.901	18.532	147.433	Balance at end of year

Selain cadangan imbalan kerja atas program pensiun dan program lainnya (program Tunjangan Hari Tua (THT), program perawatan kesehatan pasca kerja dan lainnya), Bank juga telah membentuk cadangan imbalan kerja atas Program Pensiun luran Pasti dan Program Masa Persiapan Pensiun (MPP). Jumlah kewajiban cadangan imbalan kerja dari kedua program tersebut berdasarkan hasil perhitungan aktuaris independen, Bestama Aktuaria (tahun 2010) dan PT Dian Artha Tama (tahun 2009), adalah sebesar Rp83.085 dan Rp46.707 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009. Sedangkan beban kedua program tersebut diatas yang telah dibebankan pada laporan laba rugi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp53.866 dan Rp14.463.

In addition to the employee benefit liability on pension program and other programs (Old-age Retirement plan) (Tunjangan Hari Tua or THT), healthcare program for retirement and other benefits), the Bank also provides estimated liability for defined contribution pension plans and employee's retirement preparation period (MPP) benefits. As of December 31, 2010 and 2009, the employee benefits liability on both programs based on the calculation of the independent actuary, Bestama Aktuaria (2010) and PT Dian Artha Tama (2009), amounted to Rp83,085 and Rp46,707, respectively. The above expenses are recorded in the statements of income for the years ended December 31, 2010 and 2009 which amounted to Rp53,866 and Rp14,463, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

41. PELAPORAN SEGMENT

41. SEGMENT REPORTING

a. Informasi segmen usaha berdasarkan wilayah geografis:

a. Segment information based on geographical area is as follows:

		2010						
Keterangan	Kantor Pusat/ Head Office	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa selain Jabotabek/ Java excluding Jabotabek	Sumatera/ Sumatra	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	Description
Pendapatan Segmen	698.193	2.665.283	1.291.598	949.838	893.840	-	6.498.752	Segment Income
Beban Segmen	828.845	1.693.007	323.587	157.898	140.597	-	3.143.934	Segment Expenses
Pendapatan segmen - bersih	(130.652)	972.276	968.011	791.940	753.243	-	3.354.818	Segment income - net
Pendapatan operasional lainnya	208.104	101.346	79.579	51.113	47.748	-	487.890	Other operating income
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian aktiva produktif dan non-produktif	(107.428)	(101.048)	(25.521)	(39.871)	(36.668)	-	(310.536)	Reversal of allowance (provision) for possible losses on earning and non-earning assets
Beban estimasi Kerugian komitmen dan kontinjensi	(993)	(9.017)	(5.517)	(2.155)	(3.562)	-	(21.244)	Provision for possible losses on commitments and contingent expense
Beban operasional lainnya	(1.333.548)	(311.024)	(296.251)	(157.441)	(148.947)	-	(2.247.211)	Other operating
Laba (rugi) operasional	(1.364.517)	652.533	720.301	643.586	611.814	-	1.263.717	Income (Loss) from Operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih	(1.054.048)	1.592.666	(95.654)	(249.422)	(207.037)	-	(13.495)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak penghasilan - bersih	(334.284)	-	-	-	-	-	(334.284)	Income tax expense - net
Laba (Rugi) Bersih	(2.752.849)	2.245.199	624.647	394.164	404.777	-	915.938	Net Income (Loss)
Jumlah Aset	36.195.494	46.566.713	15.411.288	10.163.655	9.867.095	(49.818.706)	68.385.539	Total Assets
Jumlah Kewajiban	32.902.570	44.845.953	14.777.638	9.769.494	9.461.312	(49.818.706)	61.938.261	Total Liabilities
		2009						
Keterangan	Kantor Pusat/ Head Office	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa selain Jabotabek/ Java excluding Jabotabek	Sumatera/ Sumatra	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	Description
Pendapatan Segmen	833.855	2.326.052	1.052.726	796.816	720.492	-	5.729.941	Segment Income
Beban Segmen	762.231	1.948.591	399.089	172.211	145.610	-	3.427.732	Segment Expenses
Pendapatan segmen - bersih	71.624	377.461	653.637	624.605	574.882	-	2.302.209	Segment income - net
Pendapatan operasional lainnya	18.637	95.048	70.223	39.838	41.111	-	264.857	Other operating income
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian aktiva produktif dan non-produktif	(46.796)	4.886	3.126	4.695	(18.775)	-	(52.864)	Reversal of allowance (provision) for possible losses on earning and non-earning assets
Beban estimasi Kerugian komitmen dan kontinjensi	(144)	(6.813)	(2.852)	(982)	(564)	-	(11.355)	Provision for possible losses on commitments and contingent expense
Beban operasional lainnya	(983.587)	(257.930)	(255.449)	(135.007)	(131.436)	-	(1.763.409)	Other operating expenses
Laba (rugi) operasional	(940.266)	212.652	468.685	533.149	465.218	-	739.438	Income (Loss) from Operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih	(1.133.275)	1.435.893	34.205	(192.226)	(138.218)	-	6.379	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak penghasilan - bersih	(239.574)	-	-	-	-	-	(239.574)	Income tax expense - net
Laba bersih sebelum Pos Luar biasa	(2.313.115)	1.648.545	502.890	340.923	327.000	-	506.243	Net income before extraordinary item
Pos luar biasa - bersih	(15.790)	-	-	-	-	-	(15.790)	Extraordinary item - net
Laba (Rugi) Bersih	(2.328.905)	1.648.545	502.890	340.923	327.000	-	490.453	Net Income (Loss)
Jumlah Aset	32.115.824	38.650.682	12.738.678	8.132.462	7.544.301	(40.734.280)	58.447.667	Total Assets
Jumlah Kewajiban	28.995.187	37.549.038	12.235.787	7.791.539	7.217.271	(40.734.280)	53.054.542	Total Liabilities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

41. PELAPORAN SEGMENT (lanjutan)

41. SEGMENT REPORTING (continued)

b. Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha:

b. Segment information based on business type is as follows:

		2010				
		Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
Pendapatan segmen		6.326.333	172.419	-	6.498.752	Segment income
Beban segmen		(3.140.340)	(3.594)	-	(3.143.934)	Segment expenses
Pendapatan segmen - bersih		3.185.993	168.825	-	3.354.818	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya		468.979	18.911	-	487.890	Other operating income
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian aktiva produktif dan non-produktif		(184.442)	(126.094)	-	(310.536)	Reversal of allowance (provision) for possible losses on earning and non-earning assets
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		(21.244)	-	-	(21.244)	Provision for possible losses on commitments and contingencies
Beban operasional lainnya		(2.194.899)	(52.312)	-	(2.247.211)	Other operating expenses
Laba operasional		1.254.387	9.330	-	1.263.717	Income from Operation
Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih		(39.511)	26.016	-	(13.495)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak penghasilan - bersih		(334.284)	-	-	(334.284)	Income tax expense - net
Laba bersih		880.592	35.346	-	915.938	Net income
Jumlah Aset		114.767.537	3.436.708	(49.818.706)	68.385.539	Total Assets
		2009				
		Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
Pendapatan segmen		5.596.682	133.259	-	5.729.941	Segment income
Beban segmen		(3.424.459)	(3.273)	-	(3.427.732)	Segment expenses
Pendapatan segmen - bersih		2.172.223	129.986	-	2.302.209	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya		249.101	15.756	-	264.857	Other operating income
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian aktiva produktif dan non-produktif		15.827	(68.691)	-	(52.864)	Reversal of allowance (provision) for possible losses on earning and non-earning assets
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi		(11.355)	-	-	(11.355)	Provision for possible losses on commitments and contingencies
Beban operasional lainnya		(1.721.133)	(42.276)	-	(1.763.409)	Other operating expenses
Laba operasional		704.663	34.775	-	739.438	Income from Operation
Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih		9.455	(3.076)	-	6.379	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak penghasilan - bersih		(239.574)	-	-	(239.574)	Income tax expense - net
Laba bersih sebelum pos luar biasa		474.544	31.699	-	506.243	Income before extraordinary item
Pos luar biasa - bersih		(15.790)	-	-	(15.790)	Extraordinary item - net
Laba bersih		458.754	31.699	-	490.453	Net income
Jumlah Aset		96.925.283	2.256.664	(40.734.280)	58.447.667	Total Assets

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

41. PELAPORAN SEGMENT (lanjutan)

Penjelasan:

- Wilayah Jabotabek terdiri dari kantor cabang Bekasi, Bogor, Bumi Serpong Damai, Cilegon, Cikarang, Ciputat, Cibubur, Depok, Jakarta Harmoni, Jakarta Kuningan, Jakarta Cawang, Karawang, Kebon Jeruk, Kelapa Gading dan Karawaci, Tangerang serta kantor cabang syariah Jakarta Harmoni, Bekasi, Bogor, Tangerang dan Cilegon.
- Wilayah Jawa selain Jabotabek terdiri dari kantor cabang Bangkalan, Bandung, Cirebon, Cimahi, Gresik, Jember, Kediri, Madiun, Malang, Semarang, Solo, Surabaya, Pekalongan, Purwakarta, Purwokerto, Sidoarjo, Tasikmalaya dan Yogyakarta serta kantor cabang syariah Bandung, Cirebon, Malang, Solo, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta.
- Wilayah Sumatra terdiri dari kantor cabang Banda Aceh, Bandar Lampung, Batam, Bengkulu, Jambi, Medan, Padang, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta kantor cabang syariah Batam, Medan, Pekanbaru dan Palembang.
- Wilayah lainnya terdiri dari kantor cabang Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Gorontalo, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Mataram, Palangkaraya, Palu, Pontianak, Samarinda dan Ternate dan serta kantor cabang syariah Banjarmasin, Makassar dan Balikpapan.
- Aset lain-lain yang dieliminasi dengan kewajiban lain-lain merupakan akun rekening antar kantor.

41. SEGMENT REPORTING (continued)

Explanations:

- The Jabotabek area consists of branches in Bekasi, Bogor, Bumi Serpong Damai, Cilegon, Cikarang, Ciputat, Cibubur, Depok, Jakarta Harmoni, Jakarta Kuningan, Jakarta Cawang, Karawang, Kebon Jeruk, Kelapa Gading and Karawaci, Tangerang, and sharia branches in Jakarta Harmoni, Bekasi, Bogor, Tangerang and Cilegon.
- The Java area, excluding Jabotabek, consists of branches in Bangkalan, Bandung, Cirebon, Cimahi, Gresik, Jember, Kediri, Madiun, Malang, Semarang, Solo, Surabaya, Pekalongan, Purwakarta, Purwokerto, Sidoarjo, Tasikmalaya and Yogyakarta, and sharia branches in Bandung, Cirebon, Malang, Solo, Semarang, Surabaya and Yogyakarta.
- The Sumatra area consists of branches in Banda Aceh, Bandar Lampung, Batam, Bengkulu, Jambi, Medan, Padang, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru and Tanjung Pinang, and sharia branches in Batam, Medan, Pekanbaru and Palembang.
- Other areas consist of branches in Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Gorontalo, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Mataram, Palangkaraya, Palu, Pontianak, Samarinda and Ternate, and sharia branches in Banjarmasin, Makassar and Balikpapan.
- Other assets which were eliminated against other liabilities represent inter-branch accounts.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**42. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Bank telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp79.964 dan Rp70.562.

**42. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE
OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS**

Based on article 8 of the Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, as a result of the termination of the role and winding-up of IBRA, the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998 would be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit (Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah) (UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementing Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Minister of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005. To replace UP3, based on Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 of the Republic of Indonesia regarding the Lembaga Penjamin Simpanan, the Government established Deposit Insurance Corporation (LPS) which is an independent institution to guarantee public funds including funds from other banks in the form of current deposits, time deposits, certificates of deposit, savings on deposits and/or other equivalent form.

The Bank paid premium on the guarantee program amounting to Rp79,964 and Rp70,562 for the years ended December 31, 2010 and 2009, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

43. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, kecuali untuk kredit yang diberikan pada direksi dan karyawan Bank.

Saldo aset dan kewajiban serta pendapatan bunga dan beban bunga dari transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	2010	2009
Aset		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah untuk direksi dan karyawan	20.834	19.466
Persentase jumlah aset pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah aktiva	0,0305%	0,0333%
Kewajiban		
Giro dan giro Wadiah	28.244	42.233
Tabungan dan tabungan Wadiah dan Mudharabah	25.579	26.241
Deposito berjangka dan deposito berjangka Mudharabah	42.988	33.594
Jumlah kewajiban untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa	96.811	102.068
Persentase jumlah kewajiban pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah kewajiban	0,1563%	0,1924%
<u>Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil</u>		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.908	1.448
Persentase jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah pendapatan bunga dan pendapatan bagi hasil	0,0294%	0,0253%

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank entered into transactions with related parties. Transactions with related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, with the exception of loans granted to the Bank's directors and employees.

Balances of assets and liabilities, and interest income earned from and expenses incurred on transactions with related parties are as follows:

Assets
Loans and sharia financing/receivables for directors and employees
Percentage of assets from related parties to total assets
Liabilities
Demand deposits and Wadiah demand deposits
Savings deposits and Wadiah and Mudharabah savings deposits
Time deposits and Mudharabah time deposits
Total liabilities to related parties
Percentage of liabilities to related parties to total liabilities
<u>Interest Income and Profit Sharing</u>
Loans and sharia financing/receivables
Percentage of interest income and profit sharing from related parties to total interest income and income from profit sharing

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

43. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

**43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

	2010	2009	
<u>Beban Bunga dan Bonus</u>			<u>Interest Expense and Bonus</u>
Giro dan giro <i>Wadiah</i>	474	522	<i>Demand deposits and Wadiah demand deposits</i>
Tabungan dan tabungan <i>Wadiah</i> dan <i>Mudharabah</i>	768	518	<i>Savings deposits and Wadiah and Mudharabah savings deposits</i>
Deposito berjangka dan deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	1.310	309	<i>Time deposits and Mudharabah time deposits</i>
Jumlah beban bunga dan bonus untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>2.552</u>	<u>1.349</u>	<i>Total interest expense and bonus incurred on related parties</i>
Persentase jumlah beban bunga dan bonus untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah beban bunga dan bonus	<u>0,0812%</u>	<u>0,0394%</u>	<i>Percentage of interest expense and bonus incurred on related parties to total interest expense and bonus</i>
Gaji dan kompensasi lainnya (termasuk <i>tantiem</i>) yang dibayarkan kepada dewan komisaris Bank	9.854	7.454	<i>Salaries and other compensation (including tantiem) paid to the Bank's board of commissioners</i>
Gaji dan kompensasi lainnya (termasuk <i>tantiem</i>) yang dibayarkan kepada direksi Bank	29.738	27.064	<i>Salaries and other compensation (including tantiem) paid to the Bank's board of directors</i>
Gaji dan kompensasi lainnya (termasuk <i>tantiem</i>) yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Bank	<u>39.592</u>	<u>34.518</u>	<i>Salaries and other compensation (including tantiem) paid to the Bank's board of commissioners and board of directors</i>
Persentase jumlah gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Bank terhadap jumlah gaji dan tunjangan karyawan	<u>3,4837%</u>	<u>3,6836%</u>	<i>Percentage of salaries and other compensation paid to the Bank's board of commissioners and board of directors to total salaries and employee benefits</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

44. POSISI DEVISA NETO

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN neraca dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009:

		2010				
	Aktiva/ Assets	Kewajiban/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position			
Neraca						
Dolar Amerika Serikat	359.806	473.171	113.365			<i>Balance Sheet</i>
Euro Eropa	15.042	1	15.041			<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	917	-	917			<i>European Euro</i>
Dolar Singapura	7	-	7			<i>Japanese Yen</i>
	375.772	473.172	129.330			<i>Singapore Dollar</i>
Rekening Administratif						
Dolar Amerika Serikat	2.748	-	2.748			<i>Administrative Accounts</i>
	378.520	473.172	132.078			<i>United States Dollar</i>
Modal			6.069.569			Capital
Rasio PDN (Neraca)			2,13%			<i>NOP ratio (Balance Sheet)</i>
Rasio PDN (Rekening Administratif)			0,05%			<i>NOP ratio (Administrative Accounts)</i>
Rasio PDN			2,18%			NOP ratio
2009						
	Aktiva/ Assets	Kewajiban/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position			
Neraca						
Dolar Amerika Serikat	103.810	151.642	47.832			<i>Balance Sheet</i>
Euro Eropa	9.179	-	9.179			<i>United States Dollar</i>
Yen Jepang	586	-	586			<i>European Euro</i>
Dolar Singapura	7	-	7			<i>Japanese Yen</i>
	113.582	151.642	57.604			<i>Singapore Dollar</i>
Rekening Administratif						
Dolar Amerika Serikat	5.822	-	5.822			<i>Administrative Accounts</i>
	119.404	151.642	63.426			<i>United States Dollar</i>
Modal			5.507.241			Capital
Rasio PDN (Neraca)			1,05%			<i>NOP ratio (Balance Sheet)</i>
Rasio PDN (Rekening Administratif)			0,11%			<i>NOP ratio (Administrative Accounts)</i>
Rasio PDN			1,15%			NOP ratio

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM**

**45. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR)**

Perhitungan CAR Bank pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

The computations of the Bank's CARs as of December 31, 2010 and 2009 are as follows:

	2010		2009	
Modal Inti	5.653.536	a	4.513.696	Core Capital
Modal Pelengkap (Maksimal 100% dari Modal Inti)	416.033	b	993.545	Supplementary Capital (Maximum of 100% of Core Capital)
Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	-	c	-	Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Risk
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	6.069.569	d=a+b	5.507.241	Total Core Capital and Supplementary Capital
Jumlah Modal Inti, Modal Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	6.069.569	e=c+d	5.507.241	Total Core Capital, Supplementary Capital and Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Investment
Penyertaan	-	f	-	
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit	6.069.569	g=d-f	5.507.241	Total Capital for Credit Risk
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar	6.069.569	h=e-f	5.507.241	Total Capital for Credit Risk and Market Risk
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit	33.282.669	i	25.289.156	Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk
ATMR untuk Risiko Pasar	208.458	j	277.277	Risk Weighted Assets (RWA) for Market Risk
ATMR untuk risiko operasional	2.774.087	k	-	Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit dan Risiko operasional	36.056.756	l=i+k	25.289.156	Total Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk and Operational Risk
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	36.265.214	m=i+j+k	25.566.433	Total Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (lanjutan)**

	2010		2009	
CAR untuk Risiko Kredit dan Risiko Operasional	16,83%	n=g/l	21,78%	CAR for Credit Risk and Operational Risk
CAR untuk Risiko Kredit Risiko Operasional dan Risiko Pasar	16,74%	o=g/m	21,54%	CAR for Credit Risk, Operational Risk and Market Risk
CAR Minimum yang Diwajibkan	8%		8%	Minimum CAR

46. MANAJEMEN RISIKO

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebagai Bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau pembiayaan perumahan, portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi, tingkat suku bunga SBI yang meningkat dan stagflasi perekonomian dunia yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan bisnis Bank. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut telah dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Bank telah berupaya meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar di bidang pembiayaan KPR serta mengembangkan pembiayaan di sektor non kredit perumahan yang mencakup bidang telekomunikasi, perdagangan, perkebunan dan infrastruktur/industri. Dengan demikian porsi kredit perumahan dan non perumahan menjadi 75:25.

Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata tekad Bank dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Pengelolaan risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank tetap dilaksanakan dalam berbagai bentuk antara lain penyempurnaan sistem *credit scoring model*, penambahan jaringan dan jumlah ATM secara mandiri maupun dengan bekerja sama dengan bank lain.

45. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) (continued)

46. RISK MANAGEMENT

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, as a bank that primarily focuses on providing loans and financing housing loans, most of its asset portfolio are significantly influenced by external business changes, such as inflation, increasing BI certificate interest rate and global economic crisis that could affect the Bank's business development. The Bank has taken actions to minimize those negative impacts through day-to-day risk management activities based on the prudence banking practices to ensure the Bank's continuous performance and sustainable growth.

The Bank is maintaining and continuously improving its market share on housing loans and other areas, and developing the financing for the non-housing loan sectors, telecommunication, trade, and agriculture and infrastructure industries. As a result, the portion between housing loans and non-housing loans become 75:25.

These above-mentioned measures are taken to provide added value to the shareholders. The risk management process is an inseparable element of the Bank's daily activities and business growth. These steps are implemented in many forms such as improvement of credit scoring model system addition of network and ATM outlet independently or corporation with other bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan lama yang dirasakan kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Berdasarkan Ketetapan Direksi Nomor 01/DIR/DPP/2010 tanggal 18 Januari 2010 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, *Risk Management Division* (RMD), dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada *Risk, Compliance & Human Capital Director*. *Risk Management Division* terdiri dari *Market Risk Management Department*, *Credit Risk Management Department* dan *Operational Risk Management Department*. *Market Risk Management Department* berfungsi untuk melakukan pengelolaan risiko pasar dan risiko likuiditas. Fungsi *Credit Risk Management Department* melakukan pengelolaan risiko kredit sedangkan *Operational Risk Management Department* berfungsi mengelola risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko strategis, risiko reputasi dan risiko hukum. Setiap *Departemen Head* dibantu oleh Unit *Policy & Procedure* dan Unit *Assessment & Measurement*. Dalam menjalankan fungsi pemantauan risiko pada tingkat Divisi dan Kantor Cabang, Kepala *Risk Management Division* juga dibantu oleh *Division Risk Control Officer* (DRCO) dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO) di bawah koordinasi *Division/Branch Risk Management Coordinator* yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala *Risk Management Division*.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Committee

The Bank's Risk Management Committee (RMC) is actively involved in providing advice on the inherent risk associated to the Bank's policies and provides evaluation on regulations considered to be outdated and requires updating. The RMC is also actively involved in conducting risk measurement to the risks associated to new products and/or services to enable the Bank to take the necessary mitigating actions. The RMC can evaluate the Risk Management Policy Guidance, if needed.

Risk Management Unit

Under the Director's decision No. 01/DIR/DPP/2010 dated January 18, 2010 concerning Organization Structure of Head Office PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, the Risk Management Division (RMD) is headed by a head division which is responsible directly to the Risk Compliance & Human Capital Director. Risk Management Division consist of: Market Risk Management Department, Credit Risk Management Department and Operational Risk Management Department. Market Risk Management Department is responsible for managing market risk and liquidity risk. Credit Risk Management Department is responsible for credit risk management, otherwise Operational Risk Management Department is responsible for managing operational risk, compliance risk, strategic risk, reputation risk and legal risk. Department Head is assisted by Policy & Procedure Unit and Assessment & Measurement Unit. In performing monitoring risk function at Division and Branches level, Head of RMD also assisted by Division Risk Control Officer (DRCO) and Branch Risk Control Officer (BRCO) under Division/Branch Risk Management Coordinator which directly responsible to Head of Risk Management Division.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Satuan Kerja Manajemen Risiko (lanjutan)

DRCO merupakan pejabat pada *Risk Management Division* yang ditempatkan di Kantor Pusat dengan membidangi beberapa divisi sebagai mitra Kepala Divisi dalam mengelola risiko. BRCO adalah pejabat pada Divisi Manajemen Risiko yang ditempatkan di Kantor Cabang sebagai mitra Kepala Cabang dalam mengelola risiko. Per 31 Desember 2010, jumlah *Division Risk Control Officer* (DRCO) yang ditempatkan di Kantor Pusat ada 3 orang yaitu DRCO Risiko Pasar, DRCO Risiko Kredit dan DRCO Risiko Operasional. Sementara itu, jumlah *Branch Risk Control Officer* (BRCO) yang ditempatkan ada 43 orang di 43 Kantor Cabang dari 62 (enam puluh dua) Kantor Cabang (per 31 Desember 2010). Untuk Kantor Cabang-Kantor Cabang yang belum ditempatkan BRCO, pemantauan pengelolaan risiko dilakukan oleh BRCO dari Kantor Cabang terdekat.

Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Unit (continued)

DRCO is a Risk Management Division officer employed at Head Office that is tasked in several division to be a partner of Head of Division to manage all risk facing the division. BRCO is an officer employed at Risk Management Division at Branch Office to be a partner of branch manager to mitigate all risks Branch Office face. As of December 31, 2010, The total Division Risk Control Officer (DRCO) deployed in Head Office are 3 people consist of DRCO Market Risk, DRCO Credit Risk and DRCO Operational Risk. Meanwhile, the total Branch Risk Control Officer (BRCO) deployed are 43 people in 43 branches consist of 62 (sixty two) branch offices (as of December 31, 2010). For branch offices which DRCO not been deployed, the risk management are monitored by the BRCO in the nearest branch.

Policy Improvements and Risk Management Procedures

The Bank's risk management policies are formalized in the Risk Management Policies Manual (RMPM). RMPM sets out the minimum requirements based on Bank Indonesia regulation. A regular review is conducted on internal policies to comply with the prevailing regulations from regulatory bodies by doing gap analysis and accommodating best practices to enhance the quality of the risk management implementation.

The Bank also performs risk management on information systems which focuses on risk database collection and improvement. The data is gradually developed and applied in the information technology system so that risk measurement and monitoring can be integrated into the Bank's risk management in a timely basis.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum secara rutin per triwulan menyampaikan laporan profil risiko ke Bank Indonesia yang meliputi laporan pengelolaan risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Laporan profil risiko tersebut mencakup parameter, indikator dan formula yang digunakan dalam menilai tingkat risiko dan sistem pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank.

Secara umum risiko komposit yang dimiliki Bank pada triwulan III tahun 2010 berada pada *level low to moderat*, di mana terdapat kategori risiko moderat pada jenis risiko kredit, likuiditas, strategik dan reputasi sedangkan risiko lainnya berada pada tingkat *low to moderate*. Hal tersebut didukung oleh *Risk Control System* yang memadai (*acceptable*) meliputi pengawasan aktif Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan limit, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen, serta efektifitas pengendalian intern.

Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Unit kerja *Supporting Group Asset & Liability* memiliki tugas untuk membantu Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) dalam memaksimalkan profitabilitas dengan mengevaluasi serta mengkaji prospek bisnis Bank dengan mengacu kepada RKAP Bank dan kondisi terkini dari makro ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja Bank. Bank akan berupaya untuk mengalokasikan sumber-sumber pendanaan ke dalam aktiva produktif dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan melakukan review terhadap sumber pendanaan, biaya pendanaan, penetapan suku bunga serta risiko likuiditas yang dihadapi Bank.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile

The Risk Management Unit, was set up based on Bank Indonesia Regulation No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the amendment of Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks. It submits a risk profile report to Bank Indonesia on a quarterly basis. The risk profile report covers all risks facing the bank as follows: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. The risk profile report includes parameters, indicators and formulas used by the Bank to assess the level of risks and the risk control system implemented.

In general, the Bank's composite risk at the third quarter of year 2010 was at low to moderate level, with moderate risk level for credit and low risk level for strategic risk and low to moderate risk level for all the other rest risks. The Board of Directors and Commissioners actively participates in the risk management process to mitigate the risks. The Risk Control System has set up adequate policies and processes, limits and procedures, effective management information system and internal control system.

Asset and Liability Management

The Asset & Liability Supporting Group Working Unit assists the Asset & Liability Committee (ALCO) in maximizing profit by evaluating and analyzing the Bank's business prospects, subject to the Bank's Budget and Work Plan (RKAP) and the current macroeconomic condition that could affect the Bank's performance. The Bank allocates its financing sources on earning assets based on the concept of prudence and reviews the financing sources, financing cost, interest rate determination and liquidity risk faced by the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan. Penerapan dan pengelolaan manajemen risiko telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Dalam PBI Nomor 11/25/PBI/2009 risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.

Dari sisi kebijakan, Bank telah mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang juga mengatur kebijakan di bidang risiko kredit, antara lain mengatur mengenai perhitungan risiko kredit dengan menerapkan perhitungan yang paling sederhana yaitu pendekatan standar sesuai dengan ketentuan PBI No.10/15/PBI/2008 tentang "Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum". Selain mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, Bank selalu meng-up date manual kebijakan kredit dan pembiayaan serta melibatkan *Risk Management Division* dalam bentuk pembuatan kajian risiko atas kebijakan kredit dan pembiayaan Bank.

Untuk aktivitas pengukuran kredit, Bank telah melakukan kajian dan *review* terhadap *Credit Scoring Model* (CSM) yang akan menjadi dasar dalam pemberian keputusan kredit. Dengan penyempurnaan *Credit Scoring Model* tersebut diharapkan Bank dapat memproses kredit secara masal sebagai upaya untuk mendukung percepatan pelayanan, akurasi data dan proses sekuritisasi KPR.

Pemantauan risiko kredit dilakukan secara berkala oleh *Risk Management Division* termasuk *Branch Risk Control Officer* dan *Division Risk Control Officer* untuk memantau secara harian (*day to day monitoring*) eksposur risiko kredit baik dari proses pemberian kredit sampai dengan berakhirnya kredit. Pemantauan tersebut meliputi semua aspek baik dari sisi kepatuhan terhadap persyaratan kredit, kecukupan agunan sampai dengan penanganan kredit bermasalah.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk

Credit risk management is part of the overall risk management. Implementation and management of risk management has been stipulated in Bank Indonesia regulation (PBI) No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks. In the PBI No. 11/25/PBI/2009 credit risk is defined as the risk of loss due to failure of the debtor and/or other parties in fulfilling their obligations to the Bank.

In terms of policy, the Bank has reviewed the Risk Management Policy Guidelines which also set policies on credit risk, among others, regulates the calculation of credit risk by applying the simplest calculation which is the standard approach in accordance to the provisions of PBI No.10/15/PBI/2008 on "Capital Adequacy of Commercial Banks". In addition to reviewing the Risk Management Policy Guidelines, the Bank always updated the credit and financing manual policy and involve Risk Management Division in creating the risk assessments for credit and financing policies of the Bank.

For the credit measurement activity the Bank has conducted study and review of the Credit Scoring Model (CSM), which will become the basis for credit granting decisions. With the completion of the Credit Scoring Model, the Bank is expected to process the credit en masse in a bid to support the acceleration of service, accuracy of data and the process of KPR securitization.

Credit risk monitoring are conducted regularly by the Risk Management Division, including the Branch Risk Control Officer and Division Risk Control Officer to monitor on a daily basis (day to day monitoring) good credit risk exposure from the credit granting process until the maturity of the credit. Monitoring covers all aspects in terms of compliance from the terms of the loan, adequacy of collateral up to the handling of non-performing loans.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Proses selanjutnya adalah dengan melakukan pengendalian risiko yang dilakukan oleh *Risk Management Division* bersama organ di bawahnya yaitu *Branch Risk Control Officer* dan *Division Risk Control Officer* dengan memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan aktivitas perkreditan melaksanakan ketentuan secara konsisten sesuai SOP maupun limit yang telah ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian. Apabila terjadi pelanggaran yang signifikan maka *Branch Risk Control Officer* dan *Division Risk Control Officer* bertindak cepat melaporkan kepada *Risk Management Division* untuk ditindaklanjuti.

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Bank adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan (*non-housing related*).

Berikut ini adalah rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah bermasalah yang diklasifikasikan *non-performing* dan rasio kualitas aset produktif Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010 dan 2009:

	2010	2009	
Rasio NPL - bruto	3,26 %	3,36 %	<i>NPL ratio - gross</i>
Rasio NPL - bersih	2,66 %	2,75 %	<i>NPL ratio - net</i>
Rasio kualitas aset produktif (tidak diaudit)	2,80 %	2,69 %	<i>Earnings assets quality ratio (unaudited)</i>

Rasio kualitas aset produktif merupakan rasio aset yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* dibandingkan dengan jumlah aset produktif.

- (i) Eksposur maksimum risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung kredit lainnya

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada neraca pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

	2010			
	Nilai kotor/ <i>Gross value</i>	Penyisihan kerugian penurunan nilai/ <i>Allowance for impairment losses</i>	Nilai bersih/ <i>Net value</i>	
Giro pada Bank Indonesia	4.126.152	-	4.126.152	<i>Current account with Bank Indonesia</i>
Giro pada bank lain	153.797	(2.410)	151.387	<i>Current account with other banks</i>
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.374.930	(3.120)	2.371.810	<i>Placements with Bank Indonesia and other banks</i>
Efek-efek	931.177	(2.820)	928.357	<i>Securities</i>
Obligasi pemerintah	7.193.270	-	7.193.270	<i>Government bonds</i>
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	51.549.501	(880.686)	50.668.815	<i>Loans and sharia financing/receivables</i>
Bunga yang masih akan diterima	580.476	-	580.476	<i>Interest receivables</i>
Aset lain-lain*)	262.024	-	262.024	<i>Other assets*)</i>
Jumlah	67.171.327	(889.036)	66.282.291	Total

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga

*) Consist of third party receivables

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

The next process is to control the risks undertaken by the Risk Management Division with the organs beneath the Branch Risk Control Officer and the Division Risk Control Officer to ensure that the work unit who carry out credit activities consistently implement the provisions of SOP and the limit that has been set and meet the standards prudence. In the event of significant violations then the Branch Risk Control Officer and the Division Risk Control Officer will act quickly to report to the Risk Management Division for further action.

Another strategic step in the implementation of the Bank credit risk management is to make the distribution of credit risk and control with concentration of credit by increasing the loan portfolio as well as financing outside the housing sector (*non-housing related*).

The following are the non-performing loans (NPL) ratio and the earnings asset quality ratio of the Bank as of December 31, 2010 and 2009:

Earnings asset quality ratio is the ratio of assets classified as non-performing to total earning assets.

- (i) Maximum exposure of the credit risk before collateral held and other credit enhancements

Credit risk exposures relating to the assets on the balance sheet as of December 31, 2010 are as follows:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

Eksposur risiko kredit terhadap rekening administratif pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Credit risk exposures relating to off-balance sheet items as of December 31, 2010 are as follows:

Keterangan	Eksposur Maksimum/ Maximum Exposure	Description
Fasilitas kredit yang belum ditarik	4.511.576	Unused loan facilities
Garansi yang diterbitkan	44.057	Guarantees issued
Jumlah	4.555.633	Total

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Bank pada tanggal 31 Desember 2010, tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya. Untuk aset neraca, eksposur di atas ditentukan berdasarkan nilai tercatat bersih seperti yang diungkapkan pada neraca.

The above table represents credit risk exposures of the Bank as of December 31, 2010, without taking into account any collateral held or other credit enhancements. For on-balance sheet assets, the exposures set out above are based on net carrying amounts as reported in the balance sheet.

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Sektor geografis

a) Geographical sectors

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2010. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

The following table provides details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorized by geographical region as of December 31, 2010. For this table, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

2010

	Kantor Pusat/ Home Office	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera/ Sumatera	Lain-lain*)/ Others *)	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	4.126.152	-	-	-	-	4.126.152	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	146.921	312	2.846	2.148	1.570	153.797	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.374.930	-	-	-	-	2.374.930	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	931.177	-	-	-	-	931.177	Securities
Obligasi Pemerintah	7.193.270	-	-	-	-	7.193.270	Government Bonds
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	-	18.927.742	14.544.690	9.048.462	9.028.607	51.549.501	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	78.745	185.893	139.993	90.965	84.880	580.476	Interest receivables
Aset lain-lain*)	228.697	2.934	17.810	8.542	4.041	262.024	Other assets*)
Jumlah kotor	15.079.892	19.116.881	14.705.339	9.150.117	9.119.098	67.171.327	Total gross
Penyisihan kerugian penurunan nilai						(889.036)	Allowances for impairment losses
Bersih						66.282.291	Net

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga

*) Consist of receivables to third party

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif adalah sebagai berikut:

Credit risk exposure related to off-balance sheet items is as follows:

2010							
	Kantor Pusat/ Home Office	Jabodetabek/ Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera/ Sumatera	Lain-lain*)/ Others *)	Jumlah/ Total	
Rekening administratif							Off-balance sheet
Fasilitas kredit							Unused loan facilities
yang belum ditarik	1.816.601	1.177.474	723.135	794.366	-	4.511.576	Guarantees issued
Garansi yang diterbitkan	11.814	26.129	1.581	4.533	-	44.057	
Jumlah	1.828.415	1.203.603	724.716	798.899	-	4.555.633	Total

b) Sektor industri

b) Industry sectors

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri:

The following table provides the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit support), as categorized based on industry sectors:

2010							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total	
Giro pada Bank Indonesia	4.126.152	-	-	-	-	4.126.152	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	153.797	-	-	-	153.797	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.999.389	375.541	-	-	-	2.374.930	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	300.000	-	-	631.177	-	931.177	Securities
Obligasi Pemerintah	7.193.270	-	-	-	-	7.193.270	Government Bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	-	19.090	548.132	8.569.319	42.412.960	51.549.501	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	-	373.932	-	206.544	-	580.476	Interest receivables
Aset lain-lain*)	216.227	9.440	-	36.357	-	262.024	Other assets*)
Jumlah kotor	13.835.038	931.800	548.132	9.443.397	42.412.960	67.171.327	Total gross
Penyisihan kerugian penurunan nilai						(889.036)	Allowances for impairment losses
Bersih						66.282.291	Net

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga

*) Consist of third party receivables

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut:

2010						
Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik	7.300	-	4.118.764	385.512	4.511.576	Unused loan facilities
Garansi yang diterbitkan	-	-	44.057	-	44.057	Guarantees issued
Jumlah	7.300	-	4.162.821	385.512	4.555.633	Total

(iii) Giro pada Bank lain

Per 31 Desember 2010, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia, kecuali atas saldo pada Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam sebesar Rp2.374.

(iv) Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Per 31 Desember 2010, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

(v) Efek-efek

Per 31 Desember 2010, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

(vi) Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Per 31 Desember 2010, akun-akun administratif ini tidak mengalami penurunan nilai.

(vii) Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Per 31 Desember 2010, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan Bank Indonesia.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

Credit risk exposure relating to administrative account items are as follows:

(iii) Current Accounts with Other Banks

As of December 31, 2010, this financial asset is not-impaired individually as well as collectively according to Bank Indonesia regulation, except for balance in Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam amounted to Rp2,374.

(iv) Placements with Bank Indonesia and other banks

As of December 31, 2010, this financial asset is not-impaired individually as well as collectively according to Bank Indonesia regulation.

(v) Securities

As of December 31, 2010, this financial asset is not impaired individually as well as collectively according to Bank Indonesia regulation.

(vi) Estimated losses on commitments and contingencies

As of December 31, 2010, these off-balance sheet items are not impaired.

(vii) Loans and sharia financing/receivables

As of December 31, 2010, this financial asset is impaired individually as well as collectively according to Bank Indonesia regulation.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

Ikhtisar kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan adalah sebagai berikut:

Loans and sharia financing/receivables are summarized as follows:

	2010			Jumlah/ Total	
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Kolektif/ Collective		
	Individual/ Individual				
Properti:					Property:
Perumahan	35.287.889	-	1.175.078	36.462.967	Housing loan
Non-perumahan	692.591	-	33.467	726.058	Non-housing loan
Perdagangan, restoran dan hotel	166.038	-	9.384	175.422	Trading, restaurants and hotels
Perindustrian	39.863	48.882	573	89.318	Manufacturing
Jasa dunia usaha	1.750.580	-	98.630	1.849.210	Business services
Konstruksi	5.778.719	70.381	91.298	5.940.398	Construction
Pertanian	11.411	-	360	11.771	Agriculture
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	18.727	-	142	18.869	Transportation, warehousing and communications
Listrik, gas dan air	6.393	-	-	6.393	Electricity, gas and water
Pertambangan	31.265	-	114	31.379	Mining
Jasa pelayanan sosial	37.584	-	347	37.931	Social services
Lain-lain	6.011.598	4.600	183.587	6.199.785	Others
Jumlah Rupiah	49.832.658	123.863	1.592.980	51.549.501	Total Rupiah
Dikurangi: penyisihan kerugian penurunan nilai	(556.447)	(48.935)	(275.304)	(880.686)	Less: Allowance for impairment losses
Bersih	49.276.211	74.928	1.317.676	50.668.815	Net

Risiko Pasar

Market Risk

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Bank. Secara umum Bank terekspose pada risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, namun seiring dengan kondisi eksternal pasar keuangan yang kurang baik di tahun 2008 risiko pasar yang terpapar secara langsung adalah portofolio yang termasuk di dalam *Trading Book* dimana nilai *mark-to-market* harga obligasi yang cenderung turun akan berpengaruh langsung terhadap laba rugi Bank. Meskipun hal ini terjadi secara umum di perbankan nasional, namun Bank ke depan akan mengambil kebijakan mengenai portofolio mana saja yang akan ditetapkan sebagai *Fair value through profit or loss*, *Held to Maturity* atau *Available for Sale* tergantung kepada tujuan dan kemampuan Bank dalam menghadapi risiko yang melekat di dalamnya.

Market risk is defined as the risk due to market variable factors and the Bank's portfolio movements. In general, the Bank is exposed to interest rate and currency rate risks and, with the unfavorable financial market external conditions in 2008, market risk has directly affected the portfolio classified in the *Trading Book* with the declining *mark-to-market* values on bond prices affecting the Bank's profit and loss. This condition has greatly affected the national banking industry but the Bank will take actions to select portfolio to be classified in the financial assets and liabilities at fair value through profit or loss, *held-to-maturity* or *available-for-sale* categories, depending on the Bank's intention and ability to meet the associated inherent risks.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Bank menggunakan perhitungan *Standard Method*. Metode internal model yang direncanakan pada masa yang akan datang akan digunakan, pada saat ini aktivitas yang dilakukan adalah melakukan identifikasi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan model ini sesuai ketentuan yang telah diterbitkan regulator. Sedangkan risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejala eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang.

(i) Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga timbul atas instrumen keuangan yang mempunyai kemungkinan atas perubahan tingkat suku bunga yang akan berdampak pada arus kas masa depan.

Tabel di bawah ini merupakan kisaran tingkat suku bunga per tahun untuk aset dan kewajiban yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

In measuring market risk, the Bank uses the Standardized Method in its calculation. The planned internal model method will be implemented in the future, with its current activities to include the identification of requirements based on the regulations by the regulatory bodies which should be met in implementing the model, while the Exchange risk due to fluctuating exchange rate is managed by maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia Regulation. External pressures are accommodated by conducting stress testing to evaluate the ability of the Bank to keep up with various kinds of external condition changes.

Included in the market risk are risk of financial instrument price changing, caused by market factors changing, such as changes in interest risk and currency risk.

(i) Interest rate risk

Interest rate risks arise from financial instruments which has the possibility of changing due to interest rates movements.

The tables below summarize the range of interest rates per annum for significant assets and liabilities for the year ended December 31, 2010:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

(i) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

	2010		
	Rupiah/ Rupiah %	Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar %	
ASET			ASSETS
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,50%	0,01%	Placement with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	10,27%	-	Securities
Obligasi pemerintah			Government bonds
- Tingkat bunga tetap	6,94%	-	Fixed interest rate -
- Tingkat bunga mengambang	6,69%	-	Floating interest rate -
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	12,60%	-	Loans and sharia financing/receivables
KEWAJIBAN			LIABILITIES
Simpanan nasabah			Deposit from customers
- Giro	3,28%	0,05%	Demand deposit -
- Tabungan	6,5%	-	Saving deposit -
- Deposito Berjangka	7,03%	2,17%	Time deposit -
Simpanan dari bank lain	6,69%	-	Deposit from other bank
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	7,52%	-	Securities sold under repurchase agreements
Surat berharga yang diterbitkan	11,13%	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima	6,61%	-	Fund borrowings

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (Gross) (Tidak diaudit).

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (Gross) (Unaudited).

	2010					Jumlah/ Total	
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah non-interest bearing/sharia		
Suku bunga mengambang/Floating interest rate							
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas	-	-	-	-	362.769	362.769	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	-	4.126.152	4.126.152	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	153.797	-	-	-	-	153.797	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	2.062.930	312.000	2.374.930	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek-bersih	-	-	-	784.304	146.873	931.177	Securities - net
Obligasi Pemerintah	-	7.095.734	-	97.536	-	7.193.270	Government Bonds
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	26.869.376	-	-	21.833.545	2.846.580	51.549.501	Loans and sharia financing /receivables
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	580.476	580.476	Interest receivables
Aset lain-lain*)	-	-	-	-	262.024	262.024	Other assets*)
Jumlah aset keuangan	27.023.173	7.095.734	-	24.778.315	8.636.874	67.534.096	Total financial assets
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai						(889.036)	Less: Allowances for impairment losses
Bersih						66.645.060	Net

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

(i) Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

(i) Interest rate risk (continued)

2010						
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariaah non-interest bearing/sharia	Jumlah/ Total
Suku bunga mengambang/Floating interest rate						
Kewajiban Keuangan						Financial Liabilities
Kewajiban segera**)	-	-	-	-	473.962	473.962
Simpanan dari nasabah						Deposits from customers
Giro	5.035.952	-	-	-	138.223	5.174.175
Tabungan	10.591.260	-	-	-	276.367	10.867.627
Deposito berjangka	-	-	-	29.513.925	1.990.320	31.504.245
Simpanan dari bank lain	17.171	-	-	335.910	205.190	558.271
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	4.139.934	-	4.139.934
Efek-efek yang						Securities issued
dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	-	3.463.819	-	3.463.819
Pinjaman yang diterima	-	2.899.787	-	500.000	-	3.399.787
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	163.106	163.106
Kewajiban lain-lain***)	-	-	-	-	1.090.538	1.090.538
Jumlah kewajiban keuangan	15.644.383	2.899.787	-	37.953.588	4.337.706	60.835.464
Gap repricing suku bunga-kotor	11.378.790	4.195.947	-	(13.175.273)	4.299.168	6.698.632
						Total financial liabilities
						Gross interest repricing gap

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga

*) Consist of third party receivables

**) Kewajiban segera terdiri dari titipan nasabah, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah

**) Current liabilities consist of customer remittances, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers

***) Kewajiban lain-lain terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang

***) Other liabilities consist of guarantee deposits and developers security deposits

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Posisi dana pihak ketiga, likuiditas aset, kewajiban kepada *counter-parties* dan komitmen kredit kepada debitur merupakan sumber potensi likuiditas bagi Bank. Ketidakmampuan untuk menghimpun dana dengan biaya wajar akan berdampak kepada profitabilitas Bank. Bank mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

The amounts of third party funds, asset liquidity, liabilities to counter-parties and loan commitments to debtors are potential liquidity sources for the Bank. The incapability to raise funds with tolerable cost will impact the Bank's profitability. The Bank manages its liquidity risk to fulfill each agreed financial liability on a timely basis and to maintain an adequate and optimum liquidity position at any time.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas mencakup antara lain pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, penetapan strategi pendanaan serta memelihara akses pasar yang mencukupi. Likuiditas Bank saat ini diukur melalui posisi *primary reserve* dan *secondary reserve*. Bank memelihara *primary reserve* dan *secondary reserve* untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik penarikan dana tidak terduga maupun ekspansi aktiva. Bank memelihara *primary reserve* dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dan Kas di cabang-cabang.

The policy on liquidity risk management covers, among others, the maintenance of optimum liquidity reserve, determination of funding strategy and maintaining an adequate access to the market. The Bank's current liquidity is measured through its primary and secondary reserves. The Bank maintains its primary and secondary reserves to fulfill its liquidity needs to satisfy unexpected withdrawals or expansion of assets. The Bank maintains its primary reserve through the minimum reserve requirements imposed by Bank Indonesia and cash in its branches.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas disusun sesuai dengan aktivitas bisnis yang dilaksanakan unit kerja operasional dan memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Untuk mengetahui kemampuan Bank melakukan serangkaian skenario likuiditas yang mencakup kondisi normal dan tidak normal termasuk kondisi ekstrim/krisis. Selain melalui dana pihak ketiga, Bank dapat memenuhi kebutuhan likuiditas melalui sumber-sumber dana alternatif seperti: sekuritisasi asset, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali ataupun melalui penjualan surat berharga seperti Surat Utang Negara (*government bonds*).

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan kewajiban keuangan yang menjadi arus kas masuk atau keluar.

	2010					
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Lainnya/ Others*)	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ > 1 - 6 Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months
ASET						
Kas	362.769	-	362.769	-	-	-
Giro pada Bank Indonesia	4.126.152	-	4.126.152	-	-	-
Giro pada bank lain	151.387	(2.410)	153.797	-	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.371.810	(3.120)	2.311.389	-	62.550	991
Efek-efek	928.357	(2.820)	-	684.855	-	246.322
Obligasi Pemerintah	7.193.270	-	-	-	700	7.192.570
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	50.668.815	(880.686)	453.410	1.957.650	2.428.070	46.710.371
Bunga yang masih akan diterima	580.476	-	580.476	-	-	-
Aktiva lain-lain**)	262.024	-	-	-	-	262.024
Jumlah	66.645.060	(889.036)	7.987.993	2.642.505	2.491.320	54.412.278
KEWAJIBAN						
Kewajiban segera ***)	473.962	-	473.962	-	-	-
Simpanan nasabah	47.546.047	-	38.589.315	7.332.577	1.616.175	7.980
Simpanan dari bank lain	558.271	-	484.671	72.800	800	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.463.819	-	-	1.761.268	552.551	1.150.000
Surat berharga yang diterbitkan	4.139.934	-	-	-	-	4.139.934
Pinjaman yang diterima	3.399.787	-	-	100.939	-	3.298.848
Bunga yang masih harus dibayar	163.106	-	163.106	-	-	-
Kewajiban lain-lain****)	1.090.538	-	835.727	21.414	21.618	211.779
Jumlah	60.835.464	-	40.546.781	9.288.998	2.191.144	8.808.541
Perbedaan jatuh tempo	5.809.596	(889.036)	(32.558.788)	(6.646.493)	300.176	45.603.737

- *) Termasuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset dan kewajiban keuangan
 **) Terdiri dari tagihan pihak ketiga
 ***) Terdiri dari titipan nasabah, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
 *****) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The policy on liquidity risk management is prepared in accordance with the business activities carried out by operational units and considers the needs to expand the business. The Bank conducts liquidity scenarios which include normal, abnormal and extreme conditions to identify the Bank's ability to manage liquidity risk. The Bank is able to fulfill liquidity needs through alternative sources of financing other than through third party funds, which include asset securitization, securities under repurchase agreements or sale of securities including government bonds.

The maturity tables on the following pages provide information about the expected maturities within which financial assets and liabilities are converted into cash inflows or outflows.

2010	
ASET	
Cash	
Current accounts with Bank Indonesia	
Current accounts with other banks	
Placements with Bank Indonesia and other banks	
Securities	
Government Bonds	
Loans and sharia financing/receivables	
Interest receivables	
Other assets**)	
Total	
LIABILITIES	
Current liabilities***)	
Deposits from customers	
Deposits from other banks	
Securities sold under repurchase agreements	
Securities issued	
Fund Borrowings	
Accrued interest	
Other liabilities****)	
Total	
Maturity gap	

- *) Includes allowances for impairment losses of financial assets and liabilities
 **) Consist of third parties receivables
 ***) Consist of customer remittances, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers
 *****) Consist of guarantee deposits and developers' security deposits

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

	2009				Jumlah/ Total
	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1 - 6 bulan/ > 1 - 6 months	> 6 - 12 bulan/ > 6 - 12 months	> 12 bulan/ > 12 months	
Aset					
Kas	294.357	-	-	-	294.357
Giro pada Bank Indonesia	2.842.112	-	-	-	2.842.112
Giro pada bank lain	33.378	-	-	-	33.378
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.546.688	125.000	-	-	2.671.688
Efek-efek	2.670.002	10.368	-	281.480	2.961.850
Obligasi pemerintah	10.732	50.520	10.577	7.316.542	7.388.371
Tagihan swap suku bunga	-	-	33.410	-	33.410
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	236.938	1.102.127	1.650.615	37.743.274	40.732.954
Lain-lain	984.172	-	-	1.986.298	2.970.470
Jumlah Aset	9.618.379	1.288.015	1.694.602	47.327.594	59.928.590
Kewajiban					
Giro	7.256.559	-	-	-	7.256.559
Giro Wadiah	107.713	-	-	-	107.713
Tabungan	8.740.326	-	-	-	8.740.326
Tabungan Wadiah dan Mudharabah	200.638	-	-	-	200.638
Deposito berjangka	14.408.989	6.976.221	1.373.835	12.074	22.771.119
Deposito berjangka Mudharabah	706.524	417.720	14.350	5	1.138.599
Simpangan dari bank lain	501.748	1.990	1.025	-	504.763
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.806.424	625.000	490.062	650.000	3.571.486
Surat-surat berharga yang diterbitkan	-	-	750.000	2.500.000	3.250.000
Pinjaman yang diterima	7.502	125.353	111.002	2.740.140	2.983.997
Lain-lain	2.515.937	23.396	24.892	-	2.564.225
Jumlah Kewajiban	36.252.360	8.169.680	2.765.166	5.902.219	53.089.425
Aset (Kewajiban) Bersih	(26.633.981)	(6.881.665)	(1.070.564)	41.425.375	6.839.165

Risiko Operasional

Dalam mengidentifikasi risiko operasional, Bank mengelompokkan sumber risiko operasional untuk kemudian dilakukan identifikasi risiko operasional yang material pada kantor cabang konvensional dan syariah melalui *checklist* bulanan yang dilaporkan setiap bulan ke Direktur yang membidangi Manajemen Risiko.

Dalam mengukur risiko operasional, *Risk Management Division* telah melakukan simulasi perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). Perhitungan kebutuhan modal minimum (CAR) telah memperhitungkan risiko operasional selain risiko kredit dan risiko pasar sejak 1 Januari 2010 dengan berbagai skenario α sebagai *multiplier* *Gross Income* Bank. Mulai tanggal 1 Januari 2011, Bank akan menggunakan α sebesar 15%.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

	2009				Jumlah/ Total
	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1 - 6 bulan/ > 1 - 6 months	> 6 - 12 bulan/ > 6 - 12 months	> 12 bulan/ > 12 months	
Assets					
Cash	294.357	-	-	-	294.357
Current accounts with Bank Indonesia	2.842.112	-	-	-	2.842.112
Current accounts with other banks	33.378	-	-	-	33.378
Placements with Bank Indonesia and other banks	2.546.688	125.000	-	-	2.671.688
Securities	2.670.002	10.368	-	281.480	2.961.850
Government bonds	10.732	50.520	10.577	7.316.542	7.388.371
Interest rate swap receivables	-	-	33.410	-	33.410
Loans and sharia financing/receivables	236.938	1.102.127	1.650.615	37.743.274	40.732.954
Others	984.172	-	-	1.986.298	2.970.470
Total Assets	9.618.379	1.288.015	1.694.602	47.327.594	59.928.590
Liabilities					
Demand deposits	7.256.559	-	-	-	7.256.559
Wadiah demand deposits	107.713	-	-	-	107.713
Savings deposits	8.740.326	-	-	-	8.740.326
Wadiah and Mudharabah savings deposits	200.638	-	-	-	200.638
Time deposits	14.408.989	6.976.221	1.373.835	12.074	22.771.119
Mudharabah time deposits	706.524	417.720	14.350	5	1.138.599
Deposits from other banks	501.748	1.990	1.025	-	504.763
Securities sold under repurchase agreements	1.806.424	625.000	490.062	650.000	3.571.486
Securities issued	-	-	750.000	2.500.000	3.250.000
Fund borrowings	7.502	125.353	111.002	2.740.140	2.983.997
Others	2.515.937	23.396	24.892	-	2.564.225
Total Liabilities	36.252.360	8.169.680	2.765.166	5.902.219	53.089.425
Net Assets (Liabilities)	(26.633.981)	(6.881.665)	(1.070.564)	41.425.375	6.839.165

Operational Risk

In identifying operational risk, the Bank has classified the operational risk events and identifies material operational risk faced by conventional and sharia branches by preparing monthly checklist to be reported monthly to the Chief Risk Officer.

In measuring operational risk, Risk Management Division has performed the simulation of capital charge for operational risk under Basic Indicator Approach based on Bank Indonesia Circle No. 11/3/DPNP dated January 27, 2009 concerning Risk Weight Asset for operational risk calculated by Basic Indicator Approach. The Bank has calculated capital adequacy ratio for operational risk on a vary scenarios of α as multiplier since January 1, 2011. Starting from January 1, 2011, the Bank has employed a worth 15%.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Dalam pemantauan risiko operasional, Divisi Audit Intern melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktifitas. Divisi Manajemen Risiko berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktifitas fungsional, produk atau layanan baru.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank. Divisi Manajemen Risiko bertugas untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Risiko Hukum

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan regulasi hukum yang mendukung, dan kelemahan perjanjian. Di samping itu, setiap divisi bersama-sama dengan Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Sekretariat Perusahaan secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama Divisi Sekretariat Perusahaan berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, Divisi Sekretariat Perusahaan memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Risiko Reputasi

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

In monitoring operational risk, the Bank's Internal Audit Division conducts an appraisal on the implementation of risk management policies and procedures on each activity. The Risk Management Division ensures that the risk identification, measurement, monitoring and controlling process is effective in each of the functional activities, new products or services.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by risk taking unit within the Bank. The Risk Management Division ensures that the Bank has adequate policies and procedures to mitigate operational risk which must be complied and carried out by each risk taking unit in conducting accurate, efficient and timely transactions and activities.

Legal Risk

The Bank identifies legal risk based on its causes which include legal litigation, absence of support in law or regulation and weak agreement. At the same time, each division together with the Risk Management Division and Corporate Secretary Division, analyzes periodically the impact of changes in certain rules and regulations on the Bank's legal risk exposures.

Legal risk measurement is conducted by the Risk Management Division and Corporate Secretary Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

Legal risk monitoring is conducted by the Risk Management Division to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance implementation against the Bank's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

In controlling legal risk, the Corporate Secretary Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and conducts a regular review on cooperative agreements with counterparties.

Reputational Risk

Reputational risk is identified on inherent risk factors associated to functional activities including disclosure requirement, customer complaints to the Bank, employee attitudes when providing service to customers and the Bank's communication system.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko reputasi. Risiko reputasi Bank dikelola oleh Divisi Sekretariat Perusahaan, dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh Divisi Kebijakan dan Pengembangan (DKPB).

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dibangun sistem pemantauan reputasi yang dirancang agar dapat secara rutin memeriksa transaksi, peraturan, teknologi dan trend, perkembangan dan perubahan yang berpotensi mempengaruhi bisnis Bank. Dalam hal ini, Bank melakukan analisis kesenjangan antara kinerja Bank dengan harapan stakeholder pada umumnya nasabah khususnya, melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta dengan mengoptimalkan fungsi *corporate secretary*.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

Risiko Strategik

Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan faktor-faktor penyebab risiko pada aktifitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi, serta operasional dan jasa. Kemudian, setiap divisi dan kantor cabang mencatat dan menatausahakan setiap kejadian terkait risiko strategik dalam suatu database yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja fungsional individu, dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko strategik dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko secara berkala dengan mengidentifikasi strategi-strategi fungsional yang sedang dijalankan beserta target sasarannya. Selanjutnya Dewan Komisaris, Direksi, divisi dan kantor cabang mereview strategi dasar dan fokus pada perubahan manajemen Bank, perkreditan korporasi, pembiayaan perdagangan, treasury, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputational Risk (continued)

Reputational risk measurement is conducted based on the evaluation results of its causes. The Bank's reputation risk is handled by the Corporate Secretary Division and reported to Bank Indonesia by the Consumer Funding & Services Division.

The reputational risk system is designed to routinely examine transactions, regulations, technology and trends, current developments and changes that could potentially affect the Bank's business. In this case, the Bank analyzes the gap between the Bank's performance against stakeholders' expectation in general and customers' expectation in particular, and identifies issues that may potentially raise reputation risk by optimizing the corporate secretary's functions.

In controlling reputational risk, corporate secretary division is responsible for implementing policies related to managing and settling negative issues or avoiding contra-productive information and performs the Public Service Obligation (PSO) function in connection with carrying out corporate social responsibility.

Strategic Risk

Strategic risk is identified based on its causes on each of the functional activities such as loans, treasury and investment and operating and service activities. Each division and branch office record and maintain events related to strategic risk in a database which could be used to estimate potential loss in a certain period of time across certain functional activity.

Strategic risk measurement is conducted based on the Bank's performance by making a comparison between the expected and actual results, evaluating individual functional performance and examining progress achieved against predetermined targets.

Strategic risk monitoring is conducted periodically by the Risk Management Division by identifying functional strategies currently carried out and their related targets. The Boards of Commissioners and Directors, divisions and branches review basic strategies and focus on the Bank's management transformation, corporate loans, trade finance, treasury, operational and information technology system strengths and weaknesses.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Strategik (lanjutan)

Dalam pengendalian risiko strategik, Divisi Penelitian dan Perencanaan berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala. Selanjutnya, Divisi Manajemen Risiko, satuan kerja bisnis, Divisi Audit Intern dan kantor cabang Bank memantau risiko strategik dengan membandingkan hasil yang ingin dicapai (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja fungsional unit kerja, dan memastikan pencapaian target (*target objective*).

Risiko Kepatuhan

Dalam identifikasi risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja. Di samping itu, Satuan Kerja Kepatuhan menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk direview.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereview semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko kepatuhan dengan memantau secara teratur seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan dan melakukan review.

Terkait pengendalian risiko kepatuhan, Divisi Sekretariat Perusahaan (DSP) membuat daftar peraturan dan hukum yang mengatur kegiatan perbankan dan mendistribusikan daftar tersebut kepada divisi yang tepat. Di samping itu DSP telah menyediakan portal khusus yang bernama Akses Internal Manajemen Standard (AIMS) untuk memudahkan seluruh unit kerja melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank. Selanjutnya, Satuan Kerja Kepatuhan membandingkan hasil yang diharapkan (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kemampuan fungsional masing-masing divisi, dan memeriksa perkembangan yang sudah dicapai untuk memastikan bahwa Bank dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Strategic Risk (continued)

In controlling strategic risk, the Planning & Performance Management Division analyzes actual results with target plans and periodically reports to the Board of Directors. The Risk Management Division, risk taking unit, Internal Audit Division and branches monitor strategic risk by comparing the expected results with the actual results, evaluating risk taking unit performance and ensuring target achievement (target objective).

Compliance Risk

In identifying compliance risk, the Compliance Desk prepares a list of prevailing laws and regulations affecting each of the risk taking units. This Desk also analyzes risk events that may raise compliance risk and reports such matters to the Risk Management Division and Risk Management Committee to be reviewed.

Compliance risk measurement is conducted by measuring the potential loss caused by the Bank's non-compliance or inability to comply with prevailing regulations. The level of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to comply with prevailing and upcoming regulations. These activities include reviewing all penalties, litigation and complaints received by the Bank.

In monitoring compliance risk, the Risk Management Division and The Compliance Desk evaluate the effectiveness of compliance risk management implementation by regularly reviewing all types of activities which have potential compliance risk and conducting a general review.

In regards to the control of compliance risk, the Corporate Secretary Division prepares a list of laws and regulations that regulate banking activities and distributes it to the relevant divisions. At the same time, the Corporate Secretary Division has provided an internet site named as "Standard Management Internal Access" (AIMS) allowing risk taking units to have access to the Bank's internal regulations. The Compliance Desk then compares the expected results with the actual results, evaluates each division's functional ability and examines improvement achieved to ensure the Bank's ability to attain the predetermined goal.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Sedangkan profil risiko kantor cabang disusun oleh *Branch Risk and Control Officer* (BRCO) disampaikan secara triwulanan kepada Divisi Manajemen Risiko dan salinannya ditembuskan kepada Divisi Audit Internal sebagai bahan untuk melakukan general audit ke kantor cabang. Dan secara berkala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan pemantauan terhadap penyelesaian audit baik dari intern maupun ekstern, dalam hal ini BRCO melakukan proses evaluasi dan memastikan kantor cabang telah menyelesaikan temuan/hasil pemeriksaan tersebut.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Bank telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko yaitu *Branch Risk Control Officer* dalam menjalankan fungsinya memberikan *second opinion* dan pertimbangan risiko yang melekat dalam setiap bisnis Bank.

Untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan di bidang manajemen risiko, Bank telah melakukan *internal training* dan mempersiapkan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko). Sejak tahun 2005 sampai dengan akhir Tahun 2010, jumlah pejabat dan staf yang telah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko sebanyak 744 orang, dengan rincian level 1 sebanyak 420 orang, level 2 sebanyak 219 orang dan level 3 sebanyak 82 orang serta level 4, 13 orang. Selain itu terdapat 10 pejabat dan staf yang telah lulus mengikuti sertifikasi manajemen risiko level matrikulasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dan Banker's Association of Risk Management (BARa).

47. NILAI WAJAR ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan kewajiban keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2010 dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

The branches' risk profile is prepared by the Branch Risk Control Officer (BRCO) and reported quarterly to the Risk Management Division with a copy to the Internal Audit Division as a basis to conduct a general audit on those branches. The Internal Audit Working Unit (SKAI) regularly monitors internal and external audit completion and the BRCO, in this context, evaluates and ensures that branches have resolved the audit findings.

Human Resources Development

In the Human Resource Development area, the Bank has conducted education and training for Risk Management Officers who are Branch Risk Control Officers in carrying out their function of providing second opinion and handling inherent risks in each of the Bank's business activities.

To enhance insight in risk management, the Bank has conducted internal training and prepared pre-test as an initial selection for officers and staff intending to participate in a certification examination held by Risk Management Certification Body (BSMR). Since 2005 until the end of 2010, the Bank has 744 officers and staff who graduated from the risk management certification with 420 executives graduating at level 1, 219 persons graduating at level 2 and 82 executives graduating at level 3, and 13 officers graduating at level 4. In addition, there are 10 officers and staff who have obtained their risk management certification at matriculation level held by The Banking Profession Certification Institute (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan) (LSPP) and Bankers Association of Risk Management (BARa).

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarises the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2010 and not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after this date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**47. NILAI WAJAR ASET DAN KEWAJIBAN
KEUANGAN (lanjutan)**

**47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND
LIABILITIES (continued)**

	2010		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset			Assets
Kas	362.769	362.769	Cash
Giro pada Bank Indonesia	4.126.152	4.126.152	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	151.387	151.387	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia Dan bank lain	2.371.810	2.371.810	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek			Marketable securities
Nilai wajar melalui laporan laba rugi	399.000	399.000	Fair value through profit or loss
Tersedia untuk dijual	4.702	4.702	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	524.655	524.127	Held-to-maturity
Obligasi Pemerintah			Government Bonds
Tersedia untuk dijual	5.822.033	5.822.033	Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo	1.371.237	1.343.389	Held-to-maturity
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	50.668.815	50.668.815	Loans and sharia financing /receivables
Bunga yang masih akan diterima	580.476	580.476	Interest receivables
Aset lain-lain*)	262.024	262.024	Other assets*)
	66.645.060	66.616.684	
Kewajiban			Liabilities
Kewajiban segera**)	473.962	473.962	Current liabilities**)
Simpanan nasabah			Deposits from customers
Giro	5.174.175	5.174.175	Demand deposits
Tabungan	10.867.627	10.867.627	Savings accounts
Deposito berjangka	31.504.245	31.504.245	Time deposits
Simpanan dari bank lain			Deposits from other banks
Giro	16.688	16.688	Demand deposits
Tabungan	483	483	Savings accounts
Deposito dan <i>deposits on call</i>	541.100	541.100	Deposits and deposits on call
Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali	3.463.819	3.463.819	Securities sold under repurchase agreements
Surat-surat berharga diterbitkan	4.139.934	4.139.934	Securities issued
Pinjaman yang diterima	3.399.787	3.399.787	Fund Borrowings
Biaya yang masih harus dibayar	163.106	163.106	Accrued interest
Kewajiban lain-lain***)	1.090.538	1.090.538	Other liabilities***)
	60.835.464	60.835.464	

*) Terdiri dari tagihan pihak ketiga

*) Consist of third parties receivables

**) Terdiri dari titipan nasabah, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

**) Consist of customer remittances, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers

***) Terdiri dari setoran jaminan dan dana jaminan pengembang

***) Consist of guarantee deposits and developers' security deposits

- (i) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, piutang bunga dan aset lain-lain.

- (i) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks and Bank Indonesia, marketable securities, interest receivables and other assets.

Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia merupakan penanaman dana dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), FASBI syariah, *call money*, penempatan "*fixed term*", deposito berjangka dan lain-lain.

Placements with other banks and Bank Indonesia represent placements in the form of Bank Indonesia Deposit Facility (FASBI), sharia FASBI, *call money*, "*fixed-term*" placements, time deposits and others.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. NILAI WAJAR ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan)

Nilai tercatat dari kas dan setara kas, giro dan penyertaan saham serta penempatan dengan suku bunga mengambang adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

Estimasi nilai wajar terhadap penempatan dengan suku bunga tetap, efek-efek, piutang bunga dan aset lain-lain ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk hutang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari penempatan dengan suku bunga tetap dan aset lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(ii) Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas kredit jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

(iii) Kewajiban segera, simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain, kewajiban akseptasi dan kewajiban lain-lain

Estimasi nilai wajar kewajiban segera, simpanan tanpa jatuh tempo, termasuk simpanan tanpa bunga adalah sebesar jumlah yang harus dibayarkan sewaktu-waktu.

Estimasi nilai wajar terhadap simpanan dengan tingkat suku bunga tetap ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga hutang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa. Karena sisa jatuh tempo dibawah satu tahun sehingga nilai tercatat dari simpanan dengan suku bunga tetap dan kewajiban lain-lain adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The carrying amount of cash and cash equivalents, current accounts and equity investments as well as placements with floating rate is a reasonable approximation of fair value.

The estimated fair values of fixed interest bearing placements, marketable securities, interest receivables and other assets were based on discounted cash flows using prevailing money market interest rates for debts with similar credit risk and remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of fixed rate placements, interest receivables and other assets were a reasonable approximation of fair value.

(ii) Loans

Generally, the Bank's portfolio consists of loans with floating interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amounts of floating rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of fair value.

(iii) Obligations due immediately, deposits from customers and deposits from other banks, acceptances payable and other liabilities

The estimated fair values of obligations due immediately, deposits with no stated maturity, which include non-interest bearing deposits, is the amount repayable on demand.

The estimated fair values of fixed interest-bearing deposits are based on discounted cash flows using interest rates for new debts with similar remaining maturity. Since the maturity is below one year, the carrying amounts of fixed rate deposits and other liabilities were a reasonable approximation of fair value.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

47. NILAI WAJAR ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (lanjutan)

(iv) Efek-efek dan Obligasi Pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (*broker*)/pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

(v) Surat-surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan kurva *yield* terkini yang tepat untuk sisa periode jatuh temponya.

(vi) Tagihan derivatif dan kewajiban derivatif

Nilai wajar atas instrumen derivatif yang dinilai menggunakan teknik penilaian dengan menggunakan komponen yang dapat diamati di pasar terutama adalah suku bunga dan nilai tukar mata uang asing. Teknik penilaian yang paling banyak digunakan meliputi model penilaian *forward* dan *swap* yang menggunakan perhitungan nilai kini.

Model tersebut menggabungkan berbagai komponen yang meliputi kualitas kredit dari *counterparty*, nilai *spot* dan kontrak berjangka dan kurva tingkat suku bunga.

48. REKLASIFIKASI AKUN DAN LAPORAN ARUS KAS

Beberapa akun pada laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan pengungkapan akun pada laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebagai berikut:

DESKRIPSI AKUN	Dilaporkan Sebelumnya/ As previously reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah direklasifikasi/ As reclassified	ACCOUNT DESCRIPTION
NERACA				BALANCE SHEET
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN	136.688	2.532.481	2.669.169	PLACEMENT WITH BANK INDONESIA AND OTHERS BANK
EFEK-EFEK				SECURITIES
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	5.362.538	(2.532.481)	2.830.057	Held to Maturity

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

(iv) Securities and Government Bonds

The fair values for held-to-maturity marketable securities and Government Bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

(v) Securities issued and fund borrowings

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current yield curve appropriate for the remaining term to maturity.

(vi) Derivatives receivable and derivatives payable

The fair values of derivative instruments are valued using valuation techniques by using components that can be observed in the market, such as primarily interest rate and foreign currency exchange rate. Valuation techniques most widely used include forward and swap valuation models that use the present value calculation.

The model combines various components which include the credit quality of the counterparty, the exchange spot, forward contracts and interest rate curve.

48. RECLASSIFICATION OF ACCOUNT AND STATEMENTS OF CASH FLOWS

Some of the account in the financial statement for the year ended December 31, 2009 have been reclassified to adjust with the financial report for the year ended December 31, 2010 is as follow:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

48. REKLASIFIKASI AKUN DAN LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Januari 2010, komponen kas dan setara kas telah diubah seperti dijelaskan dalam Catatan 2a. Oleh karenanya, laporan arus kas komparatif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah direklasifikasi:

	2009		
	Sebelum Reklasifikasi/ <i>Before Reclassification</i>	Setelah Reklasifikasi/ <i>After Reclassification</i>	
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1.453.933	1.458.866	<i>Net cash provided by operating activities</i>
Kas bersih digunakan dari aktivitas investasi	(4.077.138)	(3.018.809)	<i>Net cash used in investing activities</i>
Kas bersih diperoleh untuk aktivitas pendanaan	3.729.876	3.729.876	<i>Net cash provided by financing activities</i>
Kenaikan bersih kas dan setara kas	1.106.671	2.169.933	<i>Net increase in cash and cash equivalents</i>
Kas dan setara kas pada awal tahun	2.063.176	3.544.083	<i>Cash and cash equivalents at beginning of year</i>
Kas dan setara kas pada akhir tahun	3.169.847	5.714.016	<i>Cash and cash equivalents at end of year</i>

49. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIREVISI

Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tetapi belum efektif pada tahun 2010:

1. PPSAK 4, "Pencabutan PSAK 31 (Revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana". Berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK 31 (Revisi 2000), PSAK 42 dan PSAK 49.
2. PPSAK 5, "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing".

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

1. PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.
2. PSAK 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas" memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (*financing*) selama suatu periode.

49. REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The following summarizes the revised PSAKs which have been issued by the Indonesian Institute of Accountants but not yet effective in year 2010:

1. PPSAK 4, "Revocation of PSAK 31: Accounting for Banking Industry, PSAK 42: Accounting for Securities Companies, and PSAK 49: Accounting for Mutual Funds". Applicable for all entities that apply PSAK 31 (Revised 2000), PSAK 42 and PSAK 49.
2. PPSAK 5, "Revocation of ISAK 6: Interpretation of Paragraphs 12 and 16 of PSAK 55 (1999) on Embedded Derivative Instruments in Foreign Currency".

Effective on or after January 1, 2011:

1. PSAK 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements" prescribes the basis for presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity's financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities.
2. PSAK 2 (Revised 2009), "Statements of Cash Flows" requires the provision of information about the historical changes in cash and cash equivalents by means of a statement of cash flows which classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**49. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIREVISI**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1
Januari 2011: (lanjutan)**

3. PSAK No. 3 (Revisi 2010), "Laporan Keuangan Interim", menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode interim.
4. PSAK 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" akan diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.
5. PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.
6. PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak yang berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri entitas induk, dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara tersendiri. Penerapan dini diperkenankan.
7. PSAK No. 8 (Revisi 2010), "Peristiwa Setelah Periode Laporan", menentukan kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan, dan pengungkapan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan. Mensyaratkan bahwa entitas tidak boleh menyusun laporan keuangan atas dasar kelangsungan usaha jika peristiwa setelah periode pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat.
8. PSAK No. 19 (Revisi 2010), "Aset Tidak Berwujud", menentukan perlakuan akuntansi bagi aset tidak berwujud yang tidak diatur secara khusus dalam PSAK lain. Mensyaratkan untuk mengakui aset tidak berwujud jika, dan hanya jika, kriteria tertentu dipenuhi, dan juga mengatur cara mengukur jumlah tercatat dari aset tidak berwujud dan pengungkapan yang berhubungan.

**49. REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS**

**Effective on or after January 1, 2011:
(continued)**

3. PSAK No. 3 (Revised 2010), "Interim Financial Reporting", prescribes the minimum contents of an interim financial report and the principles for recognition and measurement in complete or condensed financial statements for an interim period.
4. PSAK 4 (Revised 2009), "Consolidated and Separate Financial Statements" shall be applied in the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a parent and in accounting for investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associates when separate financial statements are presented as additional information.
5. PSAK 5 (Revised 2009), "Operating Segments". Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates.
6. PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures", requires disclosure of related party relationships, transactions and outstanding balances, including commitments in the consolidated and separate financial statements of a parent, and also applies to individual financial statements. Early application is allowed.
7. PSAK No. 8 (Revised 2010), "Events after the Reporting Period", prescribes when an entity should adjust its financial statements for events after the reporting period, and disclosures about the date when financial statements were authorized for issue and events after the reporting period. It provides that an entity shall not prepare financial statements on a going concern basis if events after the reporting period indicate that the going concern assumption is not appropriate.
8. PSAK No. 19 (Revised 2010), "Intangible Assets", prescribes the accounting treatment for intangible assets that are not dealt with specifically in another SFAS. It requires the recognition of an intangible asset if, and only if, the specified criteria are met, and also specifies how to measure the carrying amount of intangible assets and related disclosures.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**49. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIREVISI (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2011: (lanjutan)**

9. PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", diterapkan untuk transaksi atau peristiwa lain yang memenuhi definisi kombinasi bisnis guna meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding informasi yang disampaikan entitas pelapor dalam laporan keuangannya tentang kombinasi bisnis dan dampaknya.
10. PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan", mengidentifikasi keadaan saat kriteria mengenai pengakuan pendapatan akan terpenuhi, sehingga pendapatan akan diakui. Mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. Memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan.
11. PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset" menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkan dan jika aset tersebut terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diakui.
12. PSAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.
13. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) No. 14, "Aset Tidak Berwujud - Biaya Situs", mensyaratkan bahwa situs web yang muncul dari pengembangan dan digunakan untuk akses internal maupun eksternal merupakan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal, dan setiap pengeluaran internal atas pengembangan dan pengoperasian situs web akan dicatat sesuai dengan PSAK No. 19 (Revisi 2010).
14. ISAK No. 10, "Program Loyalitas Pelanggan", menjelaskan mengenai perlakuan akuntansi oleh entitas yang memberikan poin penghargaan kepada pelanggannya.
15. ISAK No. 17, "Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai", mensyaratkan bahwa entitas tidak membalik rugi penurunan nilai yang diakui pada periode interim sebelumnya berkaitan dengan *goodwill* atau investasi pada instrumen ekuitas atau aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan.

**49. REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (continued)**

**Effective on or after January 1, 2011:
(continued)**

9. PSAK No. 22 (Revised 2010), "Business Combinations", applies to a transaction or other event that meets the definition of a business combination to improve the relevance, reliability and comparability of the information that a reporting entity provides in its financial statements about a business combination and its effects.
10. PSAK No. 23 (Revised 2010), "Revenue", identifies the circumstances in which the criteria on revenue recognition will be met and, therefore, revenue will be recognized. It prescribes the accounting treatment of revenue arising from certain types of transactions and events. It provides practical guidance on the application of the criteria on revenue recognition.
11. PSAK 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets" prescribes the procedures applied to ensure that assets are carried at no more than their recoverable amount and if the assets are impaired, an impairment loss should be recognized.
12. PSAK 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" aims to provide that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets and to ensure that sufficient information is disclosed in the notes to enable users to understand the nature, timing and amount related to the information.
13. Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) No. 14, "Intangible Assets - Website Costs", provides that the website that results from internal research and development, and may be internally or externally accessed represents intangible assets. The internal costs to produce and operate the website will be recorded in accordance with SFAS No. 19 (Revised 2010).
14. ISAK No. 10, "Customers Loyalty Programs", describes the accounting treatment for an entity that gives reward points to its customers.
15. ISAK No. 17, "Interim Financial Reporting and Impairment", requires that an entity shall not reverse an impairment loss recognized in a previous interim period in respect of goodwill or an investment in either an equity instrument or a financial asset carried at cost.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**49. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIREVISI (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2012:**

1. PSAK No. 18 (Revisi 2010), "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya", mengatur akuntansi dan pelaporan program manfaat purnakarya untuk semua peserta sebagai suatu kelompok. Pernyataan ini melengkapi PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".
2. PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja", mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja.
3. PSAK No. 34 (Revisi 2010), "Akuntansi Kontrak Konstruksi", mengatur perlakuan akuntansi pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan kontrak konstruksi.
4. PSAK No. 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian", menetapkan prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan.
5. PSAK No. 60, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", mensyaratkan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan; dan jenis dan besarnya risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut.
6. PSAK No. 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah", diterapkan untuk akuntansi, dan pengungkapan, atas hibah pemerintah dan pengungkapan atas bentuk lain bantuan pemerintah.
7. ISAK No. 15, "PSAK No. 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya", memberikan pedoman bagaimana menilai pembatasan jumlah surplus dalam program imbalan pasti yang dapat diakui sebagai aset dalam PSAK No. 24 (Revisi 2010), "Imbalan Kerja".

**49. REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (continued)**

Effective on or after January 1, 2012:

1. PSAK No. 18 (Revised 2010), "Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans", establishes the accounting and reporting by the plan to all participants as a group. This Standard complements PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits".
2. PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits", establishes the accounting and disclosures for employee benefits.
3. PSAK No. 34 (Revised 2010), "Accounting for Construction Contracts", prescribes the accounting treatment of revenue and costs associated with construction contracts.
4. PSAK No. 50 (Revised 2010), "Financial Instruments: Presentation", establishes the principles for presenting financial instruments as liabilities or equity and for offsetting financial assets and financial liabilities.
5. PSAK No. 60, "Financial Instruments: Disclosures", requires disclosures in financial statements that enable users to evaluate the significance of financial instruments for financial position and performance; and the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed during the period and at the end of the reporting period, and how the entity manages those risks.
6. PSAK No. 61, "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance", applies in the accounting for, and in the disclosures of, government grants and in the disclosures of other forms of government assistance.
7. ISAK No. 15, "PSAK No. 24 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction", provides guidance on how to assess the limit on the amount of surplus in a defined scheme that can be recognized as an asset under PSAK No. 24 (Revised 2010), "Employee Benefits".

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**49. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIREVISI (lanjutan)**

**Efektif berlaku pada atau setelah tanggal
1 Januari 2012: (lanjutan)**

8. ISAK No. 18, "Bantuan Pemerintah - Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi", menetapkan bantuan pemerintah kepada entitas yang memenuhi definisi hibah pemerintah dalam PSAK No. 61, "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah", bahkan jika tidak ada persyaratan yang secara spesifik terkait dengan aktivitas operasi entitas selain persyaratan untuk beroperasi pada daerah atau sektor industri tertentu.
9. ISAK No. 20, "Pajak penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham", membahas bagaimana suatu entitas memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak tangguhan karena perubahan dalam status pajaknya atau pemegang sahamnya.

Bank sedang mengevaluasi dampak dari Standar, Interpretasi dan Pencabutan Standar yang direvisi dan yang baru tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangannya.

Sebagaimana dimungkinkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, untuk penerapan pertama kali PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi), Bank akan menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Sesuai dengan SE-BI tersebut ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dapat diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2011.

**49. REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (continued)**

**Effective on or after January 1, 2012:
(continued)**

8. ISAK No. 18, "Government Assistance-No Specific Relation to Operating Activities", prescribes government grants to entities that meet the definition of government grants in PSAK No. 61, "Accounting for Government Grants and Disclosures of Government Assistance", even if there are no conditions specifically relating to the operating activities of the entity other than the requirement to operate in certain regions or industry sectors.
9. ISAK No. 20, "Income Taxes-Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders", prescribes how an entity should account for the current and deferred tax consequences of a change in tax status of entities or its shareholders.

The Bank is presently evaluating and has not determined the effects of these revised and new Standards, Interpretations and Standards Revocation on its financial statements.

As allowed under the Bank Indonesia Circular Letter (SE-BI) No. 11/33/DPNP dated December 8, 2009 for initial adoption of PSAK No. 50 and No. 55 (Revised), the Bank will apply the transition rule for collective impairment calculation on loans based on the prevailing Bank Indonesia regulation on Asset Quality Ratings for Commercial Banks. In accordance with the aforementioned SE-BI, the transition rule for collective impairment calculation on loans can be applied until December 31, 2011.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

50. LABA BERSIH PER SAHAM

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba bersih per saham dasar dan dilusi adalah sebagai berikut:

50. EARNINGS PER SHARE

The reconciliation items in calculating the basic and diluted earnings per share are as follows:

2010			
(i) Laba bersih	915.938	(a)	Net income (i)
(ii) Saham biasa yang beredar	8.714.057.000	(b)	Number of shares outstanding (ii)
(iii) Laba per saham dasar	105	(a/b)	Basic earnings per share (iii)
(iv) Saham biasa yang beredar setelah efek dilusi MESOP I	8.774.195.330	(c)	Outstanding common shares after dilution effects - MESOP I (iv)
(v) Laba per saham dilusi - MESOP I	104	(a/c)	Diluted earning per share - MESOP I (v)
2009			
(i) Laba bersih	490.453	(a)	Net income (i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar:			Weighted average number of shares (ii)
1 Januari 2009, Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp2.559.804 dengan nilai per lembar saham Rp169.596	15.093.540		January 1, 2009, issued and fully paid-up capital amounting to Rp2,559,804 with nominal value (full amount) of Rp169,596 per share
6 Oktober 2009:			October 6, 2009:
Pemecahan saham, penurunan nilai per lembar saham dari Rp169.596 menjadi Rp500 untuk modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp2.559.804	5.119.608.000	(b)	Stock split, decrease in the nominal value per share from Rp169,596 (full amount) to become Rp500 (full amount) for the issued and fully paid-up capital of Rp2,559,804
Kapitalisasi cadangan umum, tujuan dan laba bersih periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp617.196 dengan nilai per lembar saham Rp500	1.234.392.000	(c)	Capitalization of appropriated retained earnings and net income for the six months period ended June 30, 2009 into issued and fully paid-up capital amounting to Rp617,196 with the nominal value of Rp500 per share
Jumlah lembar saham yang berdampak retroaktif pada tanggal 1 Januari 2009	6.354.000.000	(d = b + c)	Number of shares which were applied retroactively to January 1, 2009
17 Desember 2009:			December 17, 2009:
Penerbitan saham baru yang diterbitkan dari penawaran umum saham perdana termasuk program MESA sejumlah Rp1.180.028 dengan nilai per lembar saham Rp500	2.360.057.000	(e)	Newly issued shares arising from IPO including MESA program amounting to Rp1,180,028 with nominal value (full amount) of Rp500 per share
Rata-rata tertimbang saham biasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 [(351 hari x (d))+(14 hari x (d+e))]/365	6.444.522.734	(f)	Weighted average number of shares for the year ended December 31, 2009 [(351 days x (d))+(14 days x (d+e))]/365
(iii) Laba per saham dasar	76	(a/f)	Basic earnings per share (iii)

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2010 dan 2009
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended December 31, 2010 and 2009
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

51. INFORMASI TAMBAHAN

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah aktiva produktif (*non-performing ratio*) pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah sebesar 2,80% dan 2,69% (tidak diaudit).
- b. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, rasio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *syariah* terhadap simpanan (*loan-to-deposit-ratio* atau LDR) masing-masing adalah sebesar 108,42% dan 101,29% (tidak diaudit). LDR dihitung dengan membagi antara jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang *syariah* dengan jumlah simpanan.

52. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi XV Bank BTN tahun 2011, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang disertai dengan beberapa perubahan dalam penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan tersebut.

53. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan terlampir yang diselesaikan pada tanggal 25 Maret 2011.

51. ADDITIONAL INFORMATION

- a. As of December 31, 2010 and 2009, the Bank's *non-performing assets to total earning assets ratios* are 2.80% and 2.69%, respectively (*unaudited*).
- b. As of December 31, 2010 and 2009, the Bank's *ratios of loans and sharia financing/receivables over deposits (loans-to-deposit ratios) (LDR)* are 108.42% and 101.29%, respectively (*unaudited*). LDR is calculated by dividing total loans and sharia financing/receivables by total deposits.

52. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

Based on the Bank's plan for the Public Offering of BTN Bonds XV 2011, the Bank has reissued its financial statements for the years ended December 31, 2010, 2009 and 2008 with certain changes in the presentation and disclosure of such financial statements.

53. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is fully responsible for the preparation of the accompanying financial statements that were completed on March 25, 2011.

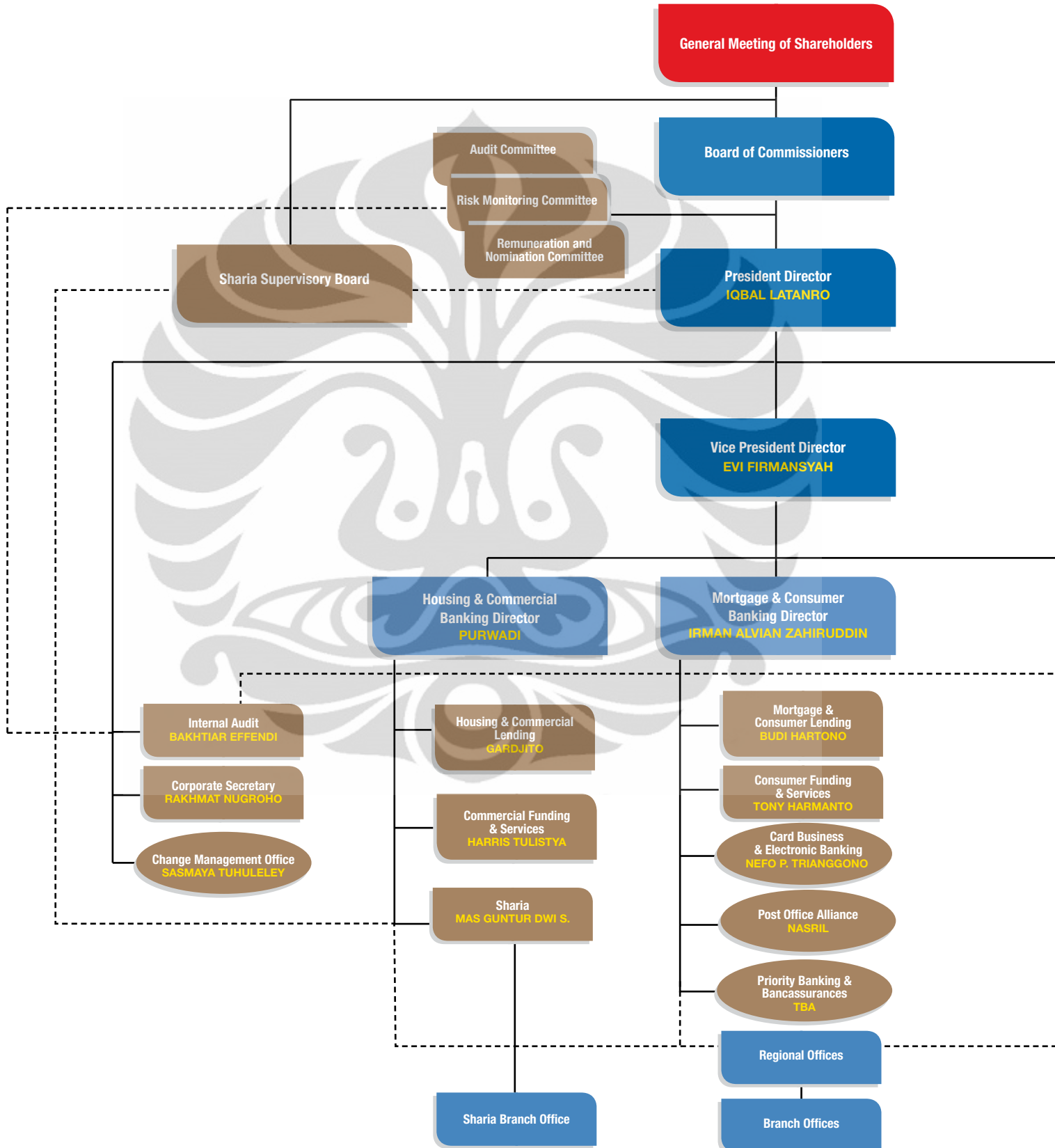


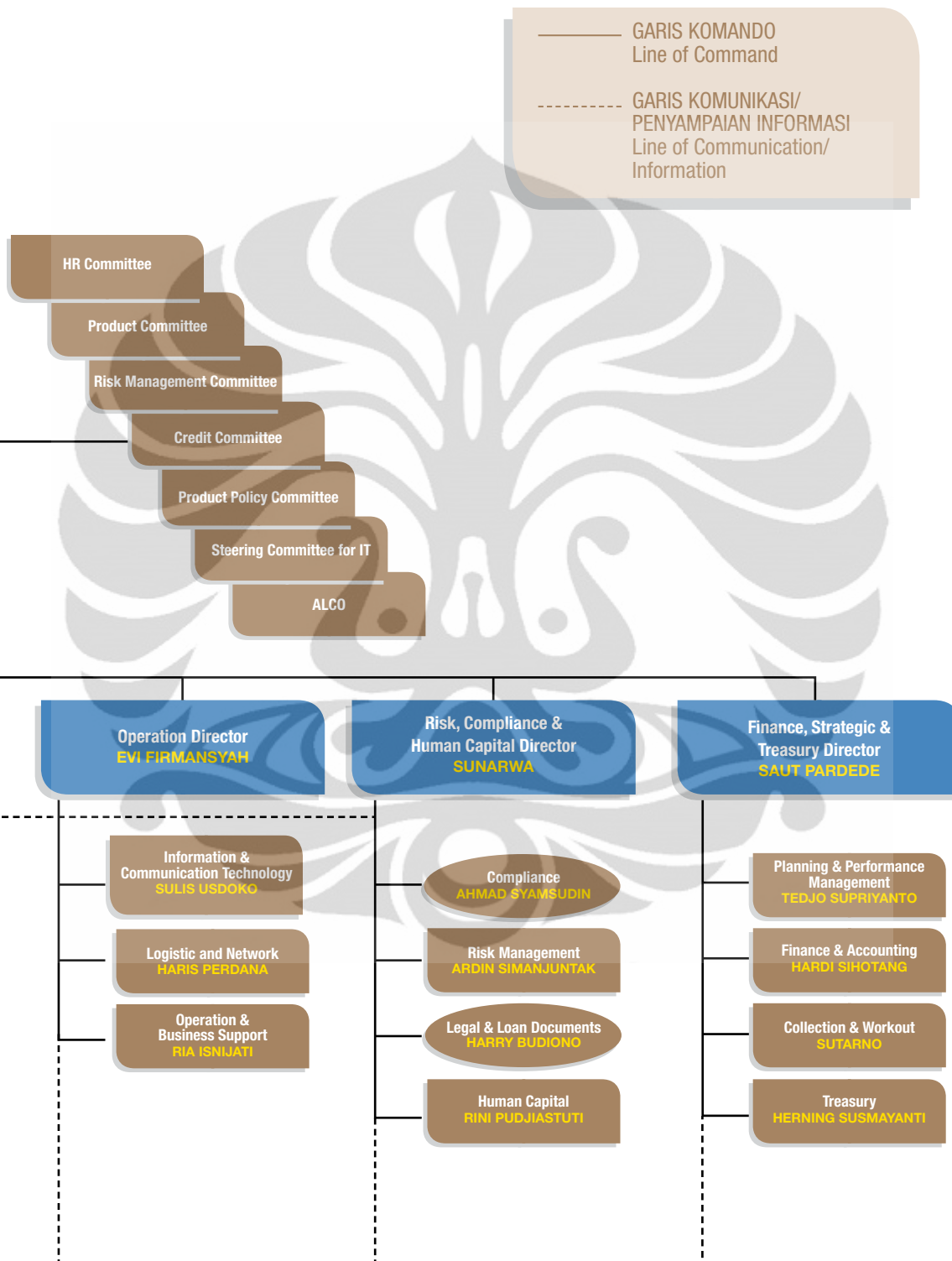


DATA PERUSAHAAN CORPORATE DATA

518	Bagan Struktur Organisasi	Organization Structure
521	Profil Anggota Dewan Komisaris	Board of Commissioners' Profile
526	Profil Anggota Direksi	Board of Directors' Profile
532	Profil Anggota Komite Audit	Audit Committee's Profile
533	Profil Komite Pemantau Resiko	Risk Monitoring Committee's Profile
534	Profil Komite Remunerasi & Nominasi	Remuneration & Nomination Committee's Profile
534	Profil Dewan Pengawas Syariah	Sharia Supervisory Board's Profile
536	Profil Kepala Unit Audit Internal	Head of Internal Audit's Profile
536	Profil Sekretaris Perusahaan	Corporate Secretary's Profile
537	Produk & Layanan	Products & Services
542	Kantor Cabang	Branch Offices

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE





KOMISARIS DAN DIREKSI BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

Zaki Baridwan
Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner (Independent)

Subarjo Joyosumarto
Komisaris Independen
Commissioner (Independent)

Mulabasa Hutabarat
Komisaris
Commissioner

Gatot Mardiwasiso
Komisaris
Commissioner

Deswandhy Agusman
Komisaris Independen
Commissioner (Independent)

DIREKSI Board of Directors

Iqbal Latanro
Direktur Utama
President Director

Evi Firmansyah
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Sunarwa
Direktur Risk, Compliance dan Human Capital
Risk, Compliance and Human Capital Director

Saut Pardede
Direktur Finance, Strategic dan Treasury
Financial, Strategic and Treasury Director

Irman Alvia Zahiruddin
Direktur Mortgage dan Consumer Banking
Mortgage and Consumer Banking Director

Purwadi
Direktur Housing dan Commercial Banking
Housing and Commercial Banking Director

KETUA & ANGGOTA KOMITE DI BAWAH KOMISARIS CHAIRMAN AND MEMBERS OF COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

KOMITE AUDIT Audit Committee

Zaki Baridwan
Ketua (Komisaris Utama – Independen)
Chairman (President Commissioner - Independent)

Gatot Mardiwasiso
Anggota (Komisaris)
Member (Commissioner)

Lifransyah Gumay
Anggota (Pihak Independen)
Member (Independent)

Muchamad Syafruddin
Anggota (Pihak Independen)
Member (Independent)

KOMITE PEMANTAU RISIKO Risk Monitoring Committee

Subarjo Joyosumarto
Ketua (Komisaris Independen)
Chairman (Commissioner Independent)

Mulabasa Hutabarat
Anggota (Komisaris)
Member (Commissioner)

Prihartono
Anggota (Pihak Independen)
Member (Independent)

Haryanto
Anggota (Pihak Independen)
Member (Independent)

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Remuneration and Nomination Committee

Deswandhy Agusman
Ketua (Komisaris Independen)
Chairman (Commissioner Independent)

Gatot Mardiwasiso
Anggota (Komisaris)
Member (Commissioner)

Rini Pudjiastuti
Anggota (Kepala Human Capital Division)
Member (Head of Human Capital Division)

DEWAN PENGAWAS SYARIAH SHARIA SUPERVISORY BOARD

Ahmad Nazri Adlani
Ketua
Chairman

Mohamad Hidayat
Anggota
Member

Muhammad Syakir Sula
Anggota
Member

SEKRETARIS PERUSAHAAN & KEPALA INTERNAL AUDIT CORPORATE SECRETARY & HEAD OF INTERNAL AUDIT

Rakhmat Nugroho
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Bakhtiar Effendi
Kepala Divisi Audit Internal
Head of Internal Audit Division

PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



Zaki Baridwan

Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner (Independent)

64 tahun, menjabat Komisaris Utama Bank BTN sejak Mei 2008. Beliau merupakan Dosen di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, sejak tahun 1974, serta pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi (2000-2004) dan Direktur Pasca Sarjana (1999-2000) di Universitas yang sama. Sejak tahun 2000 Beliau menjadi Komisaris Utama Bank BNI hingga Februari 2008. Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi, jurusan akuntansi, dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1973. Selanjutnya meraih gelar M.Sc pada tahun 1984 dan gelar DBA pada tahun 1989 masing-masing dari University of Kentucky, Amerika Serikat. Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh BSMR BI di Singapura pada tahun 2007 serta Executive Risk Management Refresher Program di Paris dan Global Islamic Finance Forum di Kuala Lumpur, keduanya pada tahun 2010.

Age of 64, he was assigned as President Commissioner of Bank BTN since May 2008. He is also a lecturer at Gajah Mada University, Yogyakarta since 1974, appointed as Dean in Faculty of Economics (2000-2004) and Director of Post-Graduate (1999-2000). In 2000 he was assigned as President Commissioner of Bank BNI until February 2008. He graduated from Gajah Mada University in Economics Degree in Accounting in 1973 and received his M.Sc degree in 1984 and DBA degree in 1989 from University of Kentucky, USA. He also participated in several training programs, such as Risk Management Certification Training conducted by BSMR BI in Singapore in 2007 as well as Executive Risk Management Refresher Program in Paris and Global Islamic Finance Forum in Kuala Lumpur in 2010.

PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



Mulabasa Hutabarat

Komisaris
Commissioner

57 tahun, menjabat Komisaris Bank BTN sejak Mei 2008. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK Kementerian Keuangan. Dari tahun 2002 hingga 2007, menjadi Komisaris di PT Pelindo I dan pernah menjadi Ketua Tim Pelaksana dari Tim Monitoring Bank Rekap. Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1982, selanjutnya menamatkan pendidikan Pasca Sarjana, dengan gelar M.A dari Indiana University, Amerika Serikat, bidang Economics pada 1990. Mengikuti sejumlah program pelatihan, termasuk di antaranya Reg of Financial Institutions yang diselenggarakan oleh CIDA di Canada, Pens Syst & Investment yang diselenggarakan oleh ADB di Manila dan Seminar Senior Management Risk Summit pada tahun 2010.

Age of 57, he was appointed as Commissioner of Bank BTN since May 2008. While also occupied the position of Chairman of Pension Funds Bureau of Bapepam-LK Ministry of Finance. From 2002 to 2007 he was assigned as Commissioner of PT Pelindo I and Head of Execution of Recap Bank Monitoring Team. Graduated from University of Indonesia with Economics Degree in 1982, he finished his Post Graduated and received his M.A degree in Economics from Indiana University, USA, in 1990. He also participated in several training programs, such as Reg of Financial Institutions conducted by CIDA in Canada, Pens Syst & Investment conducted by ADB in Manila and Senior Risk Management Summit Seminar in 2010.



Subarjo Joyosumarto

Komisaris (Independen)
Commissioner (Independent)

67 tahun, menjabat Komisaris Independen Bank BTN sejak Mei 2008. Beliau juga menjabat Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), sejak Januari 2007. Beliau pernah menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, bertanggung jawab atas Restrukturisasi Perbankan, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan, Pengawasan Bank-Bank BUMN dan Pengembangan Perbankan Syariah. Aktivitas Beliau lainnya adalah mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi, dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pada 1968, kemudian meraih gelar Master of Art (M.A) dalam bidang international economics dari Department of Economics, University of Colorado, Boulder, Colorado, Amerika Serikat pada 1984, dan melanjutkan studi hingga meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D), bidang Monetary Economics, dari universitas yang sama, pada 1987. Beliau mengikuti Seminar Sharpening Leadership for Senior Executive di Jakarta dan Global Islamic Finance Forum di Kuala Lumpur pada tahun 2010.

Age of 67, he was appointed as Independent Commissioner of Bank BTN since May 2008. He assumed a position as President Director of Indonesian Banking Development Institution since January 2007. He was once appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia, responsible for the Banking Restructuring, Development and Regulation, Monitoring of BUMN Banks, and the Development of Sharia Banking. His other activities includes teaching at several universities in Jakarta. Graduated in with Economics Degree from Gajah Mada University, Yogyakarta. He got his Master of Art (M.A) degree in international economic from Department of Economics, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA, in 1984, and continued his study and received his Doctor of Philosophy (Ph.D) in Monetary Economics from the same university in 1987. In 2010, he joined Sharpening Leadership for Senior Executive Seminar in Jakarta and Global Islamic Finance Forum in Kuala Lumpur.

PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE



Gatot Mardiwasiso

Komisaris
Commissioner

57 tahun, menjabat Komisaris Bank BTN sejak Mei 2008. Beliau juga menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Usaha Perbankan pada Kementerian BUMN. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT BNI Securities dan Direktur Keuangan pada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Jayabaya Jakarta, 1976, kemudian melanjutkan ke jenjang Pasca Sarjana, Universitas Indonesia Jakarta. Selanjutnya menempuh pendidikan Pasca Sarjana di Ecole Superieure Lyon, Perancis dan lulus pada 1989. Selain pendidikan formal, beliau sempat mengikuti Lokakarya Privatisasi Corporate Governance BUMN oleh Asian Development Bank/PriceWaterhouseCoopers, Finance Management oleh Institute International d'Administration Public di Paris, Urban Finance and Taxation dari Harvard Institute for International Development, Taiwan, Executive Risk Management Refresher Program di Paris dan Global Islamic Finance Forum di Kuala Lumpur pada tahun 2010.

Age of 57, he was appointed as Commissioner of Bank BTN since May 2008 while he was also appointed as Assistant Deputy for Banking Business Affairs in the Ministry of State Owned Enterprise (BUMN). Previously, he was assigned as Commissioner of PT BNI Securities and Director of Finance in PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). He received his Accounting Degree from Jayabaya University, Jakarta in 1976. He then continued his Post Degree in University of Indonesia, Jakarta, and in Ecole Superieure Lyon, France, and graduated in 1989. Apart from his formal education, he also participated in the State Companies Corporate Governance Privatization Workshop held by Asian Development Bank/PriceWaterhouseCoopers, Finance Management by Institute International d'Administration Public, Paris and Urban Finance and Taxation from Harvard Institute for International Development, Taiwan Executive Risk Management Refresher Program in Paris and Global Islamic Finance Forum in Kuala Lumpur in 2010.



Deswandhy Agusman

Komisaris (Independen)
Commissioner (Independent)

51 tahun, menjabat Komisaris Independen Bank BTN sejak Juli 2010. Saat ini Beliau juga menjabat sebagai Penasehat Ahli PT Permodalan Nasional Madani Investment Management sejak 2004. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani (2000-2005), Komisaris Bank Permata (1999-2004), Anggota Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (2002-2006) serta Staf Ahli Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pemanfaatan Teknologi (2001-2003). Menamatkan pendidikan Sarjana di Institut Teknologi Bandung, Jurusan Teknik Sipil, tahun 1985, kemudian mendapatkan gelar MBA dari The University of Denver, Colorado Amerika Serikat tahun 1988. Pada tahun 2010, beliau mengikuti International Conference Bara Risk Forum di Bali.

Age of 51, he was appointed Independent Commissioner of Bank BTN since July 2010. Currently he also serves as an Expert Advisor of PT Permodalan Nasional Madani Investment Management since 2004. He previously served as President Commissioner of PT Permodalan Nasional Madani (2000-2005), Commissioner of Bank Permata (1999-2004), Member of National Committee on Corporate Governance Policy (2002-2006) and Expert Staff to the Minister of Cooperatives and SME in Technology Sector (2001-2003). Completed his graduate education at Bandung Institute of Technology, Department of Civil Engineering, 1985, then earned his MBA from The University of Denver, Colorado USA 1988. In 2010, he participated in International Conference Bara Risk in Bali.

PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Iqbal Latanro
Direktur Utama
President Director

52 tahun, menjabat Direktur Utama Bank BTN sejak Desember 2007, setelah sebelumnya menjabat Direktur sejak 17 Maret 2005. Meniti karir di Bank BTN sejak tahun 1984, Beliau antara lain pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengelolaan dan Kebijakan Kredit, Kepala Cabang Bekasi dan Kepala Cabang Makassar. Saat ini Beliau aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar pembiayaan properti, Pengurus Pusat Perbanas, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Bankir Indonesia serta Penasehat Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin Makasar pada 1983 dan selanjutnya meraih gelar M.Si dari Universitas Hasanuddin Makasar pada 1998. Selain pendidikan formal, Beliau mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh BSMR di Singapura, Course of Study in Housing Finance dan Workshop on Securitization, keduanya di Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat serta turut berpartisipasi secara aktif di kegiatan World Saving Bank Institute.

Age 52, he was appointed as President Director of Bank BTN in December 2007, having previously worked as Director since 17 March 2005. His career in Bank BTN started in 1984, and he has held various positions, including Head of Loan Management and Policy Division, Head of Bekasi Branch Office and Head of Makassar Branch Office. Currently, he is a speaker at various property finance seminars, Board of Committee of Indonesian Banks Association (Perbanas), Committee of the Board of Administration of Indonesian Bankers (Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Bankir Indonesia) and Consultant of Indonesian Real Estate Companies Union (Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia). He received his Economics Degree from Hasanuddin University, Makassar, in 1983, and received his MSi from the same institution in 1998. Besides his formal education, he has also assisted the Risk Management Certification Program held by BSMR in Singapore, Course of Study in Housing Finance and Workshop on Securitization, both in Wharton School, University of Pennsylvania, USA, and actively participated in World Saving Bank Institute activities.



Evi Firmansyah
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

53 tahun, menjabat Wakil Direktur Utama Bank BTN sejak Desember 2007. Sebelumnya Beliau pernah bertugas sebagai Direktur PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Direktur BNI Sekuritas pada tahun 2004, Komisaris PT Bank Bumiputera Tbk pada tahun 2003 dan Direktur Eksekutif PT Danareksa (Persero) Holding Company pada tahun 2002. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1983. Beliau mengikuti sejumlah program pelatihan di dalam maupun luar negeri, diantaranya program Eksekutif Pengelolaan Risiko di Singapura pada tahun 2005, Towards to Functional Bond di Tokyo Stock Exchange, Jepang, International Housing Finance Program dan Workshop on Securitization di Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat, serta Risk Management in Retail Banking di Amsterdam, Belanda, tahun 2010.

Age 53, he was appointed Vice President Director of Bank BTN in December 2007. He previously worked as Director of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Director of BNI Sekuritas in 2004, Commissioner of PT Bank Bumiputera Tbk in 2003 and Executive Director of PT Danareksa (Persero) Holding Company in 2002. He received his Economics Degree from University of Indonesia in 1983, and has attended several national and international workshops, such as Risk Management Executive Program, Singapore, in 2005; Towards to Functional Bond at Tokyo Stock Exchange, Japan, and International Housing Finance Program and Workshop on Securitization in Wharton School, University of Pennsylvania in USA as well as Risk Management in Retail Banking in Amsterdam, Holland in 2010.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Sunarwa

Direktur Risk, Compliance & Human Capital
[Risk, Compliance & Human Capital Director](#)

52 tahun, menjabat Direktur Bank BTN sejak Desember 2007, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko pada tahun 2006, Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak tahun 2001 hingga tahun 2006 dan Kepala Divisi Teknologi Informasi pada tahun 2001. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada pada tahun 1983, dan meraih gelar Magister Manajemen jurusan Keuangan pada tahun 1997 dari Universitas yang sama. Beliau mengikuti Pelatihan dan Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 5 serta International Housing Finance Program dan Workshop on Securitization di Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat.

Age 52, he was appointed as Director of Bank BTN in December 2007, having previously worked as Head of Risk Management Division in 2006; Head of Human Resources Development Division from 2001 to 2006, and Head of Information Technology Division in 2001. He received his Economics Degree in 1983 and his Magister Management in Finance in 1997 from Gadjah Mada University, Yogyakarta. He attended training and preparation of Risk Management Certification Level 5 as well as International Housing Finance Program and Workshop on Securitization in Wharton School, University of Pennsylvania, USA.



Saut Pardede

Direktur Finance, Strategic & Treasury
Financial, Strategic & Treasury Director

49 tahun, menjabat Direktur Bank BTN sejak Desember 2007. Mulai bekerja di Bank BTN sejak 1 Mei 1987, sebelumnya Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury sejak tahun 2001. Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 1985 dan menyelesaikan Pasca Sarjana di Management Education Institute, ADL, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, pada tahun 1995. Mengikuti berbagai pelatihan dan seminar diantaranya Housing Finance Management yang diselenggarakan HDFC dan SMF di Lonavla, India tahun 2007, 5th SEACEN Seminar on Preparations for Implementation of BASEL II oleh The South East Asian Central Banks (SEACEN) dan Bank Indonesia di Bali pada 2008, Pelatihan dan Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 4 serta International Housing Finance Program dan Workshop on Securitization di Wharton School, University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Beliau pernah bertindak selaku Pembicara/Panelist pada Global Microcredit Summit, Global Microcredit Campaign, di Halifax, Nova Scotia, Kanada, pada bulan November 2006.

Age 49, he was appointed Director of Bank BTN in December 2007. He started his career in Bank BTN in 1 May 1987, and has worked as Head of the Treasury Division since 2001. He received his Law Degree from Diponegoro University, Semarang, in 1985, and finished his post-graduate degree in Management Education Institute, ADL, Cambridge, Massachusetts, USA, in 1995. He attended various workshops and seminars, such as Housing Finance Management held by HDFC and SMF in Lonavla, India, 2007 and 5th SEACEN Seminar on Preparations for Implementation of BASEL II held by the South East Asian Central Banks (SEACEN) and Bank Indonesia in Bali on March 2008, training and preparation of Risk Management Certification level 4 and International Housing Finance Program and Workshop on Securitization at Wharton School, University of Pennsylvania, USA. He also participated as a speaker/panelist in the Global Micro Credit Summit, Global Micro Credit Campaign, in Halifax, Nova Scotia, Canada, in November 2006.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILE



Irman A. Zahiruddin

Direktur Mortgage & Consumer Banking
[Mortgage & Consumer Banking Director](#)

47 tahun, menjabat sebagai Direktur Bank BTN sejak Desember 2007. Sebelumnya Beliau pernah bertugas sebagai Direktur Consumer Group PT Bank Permata Tbk, Direktur Eksekutif Perbanas (Perhimpunan Bank Bank Umum Nasional), Direktur di GE Capital dan PT GE Astra Finance. Beliau mengawali kariernya di Citibank sejak tahun 1989. Meraih gelar Master di Bidang Finance & Investment dari Golden Gate University, San Francisco, Amerika Serikat, pada tahun 1988 dan menyelesaikan Certified Wealth Management di Erasmus University - MM UGM Jakarta. Beliau mengikuti *workshop* Mastercard International di Roma, Italia pada tahun 2006, Course of Study in Housing Finance yang diselenggarakan Wharton School University of Pennsylvania USA pada tahun 2008 dan Executive Education Program di Cambridge, Inggris, tahun 2010. Beliau juga menjadi Ketua Consumer Banking Community Perbanas sampai saat ini.

Age 47, he was appointed as Bank BTN's Director in December 2007. He assumed the position of Director of Consumer Group PT Bank Permata Tbk, Executive Director of Perbanas (Indonesian Banks Association), Director of GE Capital and PT GE Astra Finance. He started his career at Citibank in 1989. He received his Master in Finance & Investment from Golden Gate University, San Francisco, USA, in 1988 and finished his Certified Wealth Management in Erasmus University-MM UGM Jakarta. He attended Mastercard International workshop in Rome, Italy in 2006, Course of Study in Housing Finance held by Wharton School University of Pennsylvania USA in 2008. He also participated in Executive Education Program at Cambridge, UK in 2010. He is also currently the Chairman of Perbanas Consumer Banking Community.



Purwadi

Direktur Housing & Commercial Banking
Housing & Commercial Banking Director

57 tahun, menjabat sebagai Direktur Bank BTN sejak Desember 2007. Memulai karir di Bank BTN sejak tahun 1984, sebelumnya Beliau bertugas sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Kebijakan Kredit pada tahun 2005 dan Kepala Cabang Bekasi pada tahun 2001. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1982. Beliau pernah mengikuti Uji Kompetensi Manajemen Risiko yang diadakan oleh BSMR pada 2006, dan SESPI BI Education - class XXXI pada tahun 2002. Mengikuti Seminar New Directions in Human Resource Management di Sydney Australia, Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh BSMR pada tahun 2006, Pelatihan dan Pembekalan Uji Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 4 dan 5, serta International Programme on Housing Finance Management 2010, HDFC, Lonavla – India.

Age 57, he was appointed Director of Bank BTN in December 2007. He started his career with Bank BTN in 1984, and was appointed Head of the Loan Policy Management Division in 2005 and Head of Bekasi Branch Office in 2001. He received his Economics Degree from Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1982. He attended the Risk Management Certification held by BSMR in 2006, and SESPI BI Education - class XXXI in 2002. He also joined New Directions in Human Resource Management Seminar in Sidney Australia, Risk Management Certification held by BSMR in 2006, Training and Preparation of Risk Management Test Level 4 and 5 as well as International Programme on Housing Finance Management 2010, HDFC, Lonavla – India.

PROFIL KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEES' PROFILE



Lifransyah Gumay

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

49 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Audit Bank BTN sejak tahun 2005. Sebelumnya pernah menjadi Direktur Utama di PT Dharma Sangkurindo Raharja, Jakarta pada tahun 1997. Berkarir pertama kali di Kantor Akuntan Publik Arthur Young International (sekarang Ernst & Young International). Pernah menjadi konsultan dan *trainer* pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pusat Pengembangan Akuntansi FEUI serta Staff Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan DPR RI. Pernah aktif di kepengurusan Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) dan Anggota Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI). Jabatan lain yang disandang saat ini adalah Komisaris di salah satu Perusahaan Pembangkitan Tenaga Listrik. Memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi pada tahun 1986 dan meraih gelar Magister Manajemen dari STIM - LPMI Jakarta pada tahun 2003 dengan predikat Cumlaude.

Age 49, he assumed a position as a member of the Audit Committee in 2005. He was appointed President Director of PT Dharma Sangkurindo Raharja, Jakarta, in 1997. He started his career had Arthur Young International Public Accountant (currently know as Ernst & Young International). He was a consultant and trainer at General Election Commission (KPU) and Center of Accounting Development, FEUI as well as Expert Staff in finance and economy for House of Representatives, Republik of Indonesia. He was an active member of Board of Indonesian Accountant Association (IAI-KASP) – Sector Accountant Compartment Sector and actively participates as a member of Indonesian Audit Committee Association (IKAI). He also appointed as one of Commissioners in electrical power company. He received his degree in Accounting from the Faculty of Economics at the University of Indonesia in 1986, and his Magister Management from STIM-LPMI Jakarta in 2003 with Cum Laude predicate.



Muchamad Syafruddin

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

48 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Audit Bank BTN sejak 2 Agustus 2010. Beliau merupakan Guru Besar dan Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Diponegoro, Semarang, sejak tahun 2008. Aktif dalam melakukan penelitian dan menerbitkan berbagai karya ilmiah di bidang akuntansi dan manajemen, Beliau merupakan anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional RI sejak tahun 2006 sampai saat ini. Menamatkan pendidikan Sarjana dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada tahun 1987. Dari Perguruan Tinggi yang sama, Beliau meraih gelar M.Si tahun 1996 dan Doktor tahun 2004. Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya International Training Workshop for Accreditors dan Global Initiative for Quality Assurance Capacity di Filipina tahun 2009.

Age of 48, served as a member of the Audit Committee since 2 August 2010. He is a Professor and Head of Accounting Department of Economics at the University of Diponegoro, Semarang, since 2008. Active in conducting research and published numerous scientific papers in the fields of accounting and management, he is a member of the National Accreditation Board of Higher Education in the Ministry of National Education from 2006 until today. Completed his education degree from the University of Gajah Mada in Yogyakarta in 1987. From the same university, he earned his doctorate MSI 1996 and 2004. Following a number of training programs, including the International Training Workshop for Accreditors and the Global Initiative for Quality Assurance Capacity in the Philippines in 2009.

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO RISK MONITORING COMMITTEE'S PROFILE



Prihartono

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of Risk Monitoring Committee

50 tahun, mulai bertugas sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2007. Selain itu juga bertugas sebagai anggota Komite Audit PT Pos Indonesia. Sebelumnya berkarir selama delapan tahun di Kelompok Usaha Bakrie (KUB) dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Departemen SDM. Jabatan sebelumnya pada KUB adalah Senior Manager pada Business Development. Karir sebelumnya pada sektor pemerintah selama enam belas tahun sebagai auditor pada; Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta DJPKN Departemen Keuangan. Sampai saat ini juga mengajar di Universitas Trisakti program S1 dan S2 serta di Sesko TNI AL. Mendapat gelar akuntan dari STAN tahun 1988 dan meraih gelar MBA dari Hull University, Inggris pada tahun 1992. Selain pendidikan formal, sempat mengikuti beberapa pelatihan diantaranya Training of Trainers Risk Management yang diselenggarakan BRRC pada tahun 2005 dan Operasional Audit oleh Swine Burne University of Technology, Melbourne, Australia.

Age 50, he commenced his duties as a member of the Risk Monitoring Committee in 2007. He is also appointed as member of PT Pos Indonesia Audit Committee. He also worked with Bakrie Business Group (KUB) with the latest position as Head of Human Resources Department. His previous position was Senior Manager in Business Development. His previous career in Governmental sector for 16 years was an auditor at General Auditor of Taxation, BPKP and DJPKN, Ministry of Finance. He is also a lecturer for S1 and S2 programs in Trisakti University and in Sesko TNI AL. He graduated from Indonesian State College of Accountancy (STAN) in 1988 and received his MBA in Accounting from Hull University, United Kingdom in 1992. His non-formal educational includes several training programs, such as Training for Trainers for Risk Management held by BRRC in 2005 and Operational Audit by Swine Burne University of Technology, Melbourne, Australia.



Haryanto

Anggota Komite Pemantau Risiko
Member of Risk Monitoring Committee

59 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak 1 Agustus 2008, setelah sebelumnya menjabat sebagai anggota Komite Audit di Bank BTN pada tahun 2005. Beliau banyak berkarir di bidang perbankan, diantaranya di Bank Bapindo dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Divisi setelah sebelumnya bertugas di Bank Niaga Yogyakarta sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Jasa Perbankan. Pernah bertugas sebagai Senior Manager di Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang dan Sudarmadji anggota Morison International & BKR dan sebagai Senior Konsultan pada kantor konsultan manajemen PT FIMAC, Jakarta. Aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi, Beliau mendapatkan gelar Magister Manajemen (Pemasaran) dari STIE – IPWI, Jakarta, setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Ekonomi (Akuntansi) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Age 59, he became a member of the Risk Monitoring Committee since 1 August 2008, after working as a member of the Audit Committee with Bank BTN since 2005. He has a remarkable career in banking, having worked with Bank Bapindo, ending as Deputy Division Head, and Bank Niaga in Yogyakarta, as Finance and Banking Services Department Head. He also worked as Senior Manager in Doli, Bambang and Sudarmadji Public Accountant Office; was a member of Morison International & BKR; and as a Senior Consultant with the Management Consultant Office PT FIMAC, Jakarta. An active lecturer at several universities, he graduated with a Magister Management (Marketing) degree from STIE – IPWI, Jakarta, after finishing his degree in accounting from Faculty of Economics, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

PROFIL KOMITE REMUNERASI & NOMINASI REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE'S PROFILE



Rini Pudjiastuti

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Member of Remuneration and Nomination Committee

51 tahun, menjabat sebagai Kepala Human Capital Division sejak 2010. Mengawali karir di Bank BTN sejak tahun 1985, sebelumnya Beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak 2008 dan Kepala Kantor Cabang Jakarta Harmoni sejak tahun 2001. Menamatkan pendidikan Sarjana di Universitas Trisakti pada tahun 1984, Beliau mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia, antara lain New Directions in Human Resource Management di Australia, Balance Scorecard, HR Execution, Aligning and Strategy dan Evaluasi Jabatan, juga pendidikan lainnya seperti Refreshment Program "Enterprise Risk Management (ERM)" serta Workshop for Corporate on Competition Law and Policy – Banking Sector.

Age of 51, she assumed the position of Head of Human Capital Division in 2010. Having started her career in Bank BTN in 1985, she was previously appointed as Head of Human Resource Development Division and was appointed as Head of the Jakarta Harmoni Branch Office in 2001. She obtained her degree at Trisakti University in 1984, and assisted many educational and training programs in the field of Human Resources, such as New Directions in Human Resource Management in Australia, Balance Scorecard, HR Execution, Aligning & Strategy and Position Evaluation, as well as other trainings such as Refreshment Program "Enterprise Risk Management (ERM)" and Workshop for Corporate on Competition Law and Policy – Banking Sector.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH SHARIA SUPERVISORY BOARD'S PROFILE



Ahmad Nazri Adlani

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Chairman of Sharia Supervisory Board

72 tahun, menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank BTN sejak 15 Februari 2005. Sebelumnya Beliau aktif di bidang kemiliteran dengan pangkat terakhir Brigjen TNI (purn). Pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Utusan Golongan, setelah sebelumnya menjadi Anggota MPR RI. Saat ini Beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri & Hubungan Antar Umat Beragama di Majelis Ulama Indonesia Pusat, serta turut mendirikan Dewan Syariah Nasional di MUI dan mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia. Pendidikan kemiliteran diperoleh di SUSBINMINU Departemen Hankam, SUSLAPA IF VII (Sekolah Perwira Infanteri AD) Bandung dan terakhir pada SUSCADOS BINTAL ABRI (Kursus Calon Dosen Pembinaan Mental ABRI) Jakarta. Beliau menamatkan studi S1 di Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, Cairo, Mesir, dan Fakultas Ushuluddin, IAIN, Syarif Hidayatullah, serta sempat belajar di Macquary University, Sydney, Australia.

Age of 72, he was named Chairman of Bank BTN Sharia Supervisory Board from 15 February 2005. He was active in military with his last position as Brigjen TNI (purn), once was Deputy Chairman of MPR RI, and previously a member of MPR RI. He is now the Chairman of Foreign Relations and Inter Religion Relations in State Ulama Council (MUI) Headquarter and takes major part in establishing National Sharia Board, MUI as well as developing Sharia economy in Indonesia. He received his military education from SUSBINMINU, Defense and Security Department, SUSLAPA IF VII (Extended Course for Infantry Officers), Bandung and finally from SUSCADOS BINTAL ABRI (ABRI Psychological Counseling Course for Lecturer Candidates) Jakarta. He finished his Degree at Faculty of Syariah of Al Azhar University, Cairo, Egypt, and Faculty of Ushuluddin, IAIN, Syarif Hidayatullah, and also once studied at Macquary University, Sydney, Australia.



Mohamad Hidayat

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

43 tahun, menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BTN sejak 15 Februari 2005. Beliau aktif menjadi Dosen di beberapa Perguruan Tinggi, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Sahid dan IAIN Jakarta. Beliau menamatkan studi S1 di Institut Agama Islam Negeri Jakarta dari Fakultas Syariah, meraih MBA dari IPWI Jakarta dan MH dari STIH IBLAM di bidang Hukum pada tahun 2003. Pelatihan yang pernah diikuti antara lain Pengawasan Syariah yang diselenggarakan oleh DSN-MUI pada tahun 2008, Islamic Banking di Langkawi Malaysia dan Sistem Pengawasan yang diselenggarakan oleh YPPI dan Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat. Beliau aktif dalam berbagai organisasi, antara lain Dewan Syariah Nasional MUI dan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah.

Age 43, he was appointed as member of the Sharia Supervisory Board in 15 February 2005. He is an active lecturer at several universities, such as University of Indonesia, Trisakti University, Sahid University and IAIN Jakarta. He completed his degree at the Faculty of Sharia of Institut Agama Islam Negeri, Jakarta, and his received his post-graduate degree from STIH IBLAM majoring in Law, in 2003. He has attended trainings in Sharia Monitoring, held by DSN-MUI in 2008, Islamic Banking in Langkawi, Malaysia and Monitoring System held by YPPI and Syariah Banking held by Bank Muamalat. He also actively participated in several organizations such as National Sharia Board MUI and Economic Community of Central Board of Sharia.



Muhammad Syakir Sula

Anggota Dewan Pengawas Syariah
Member of Sharia Supervisory Board

47 tahun, menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BTN sejak 19 Juli 2010. Saat ini juga menjabat sebagai Anggota Komite Perbankan Syariah Bank Indonesia, Deputi Humas Badan Wakaf Indonesia serta Dewan Pengawas Syariah di Panin Life, CAR, Nasre dan Jamkrindo. Sebelumnya, Beliau pernah menjabat sebagai CEO Batasa Tazkia Consulting tahun 2006, Adviser Dewan Direksi Bank Muamalat serta Direktur Marketing dan Operasional Asuransi Takaful. Menamatkan pendidikan S1 dari Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung tahun 1989, Beliau mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan, antara lain Workshop Perbankan Syariah, Training Internasional Perbankan & Finance Syariah serta Bank Insurance.

47 years, served as a Member of the Sharia Supervisory Board of Bank BTN since 19 July 2010. He currently serves as Member of Bank Indonesia Sharia Banking Committee, Deputy Public Relations Badan Wakaf Indonesia and Sharia Supervisory Board at Panin Life, CAR, Nasre and Jamkrindo. Previously, he served as CEO Batasa Tazkia Consulting in 2006, Adviser of the Board of Directors of Bank Muamalat Adviser and Director of Marketing and Operations of Takaful Insurance. Graduated from the Faculty of Agriculture, Padjadjaran University in Bandung in 1989, he followed some of the education and training, among other Islamic Banking Workshop, Training International Islamic Banking & Finance and the Bank Insurance.

PROFIL KEPALA UNIT AUDIT INTERNAL HEAD OF INTERNAL AUDIT'S PROFILE



Bakhtiar Effendi

Kepala Divisi Audit Internal
Head of Internal Audit Division

53 tahun, menjabat Kepala Divisi Audit Internal sejak April 2009. Memulai karir di Bank BTN pada tahun 1986, sebelumnya menjabat Kepala Cabang Makassar tahun 2007 – 2008 dan Wakil Kepala Divisi Operasi pada tahun 2007. Menamatkan pendidikan Sarjana di Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1984 dan melanjutkan pendidikan S2 di IPWI Jakarta, Beliau juga telah mengikuti berbagai pendidikan, diantaranya Sertifikasi Manajemen Risiko, Chief Audit Executive Forum "Audit of Basel II Risk Management" dan Audit Intern Tingkat Manajerial.

Age 53, he was appointed Head of Internal Audit Division in April 2009. He began his career in Bank BTN in 1986, and has worked as Head of the Makassar Branch Office in 2007 – 2008 and Deputy Head of Operation Division in 2007. He obtained his degree from Airlangga University, Surabaya in 1984, and received his post-graduate degree in IPWI Jakarta, He has also joined the Risk Management Certification, Chief Audit Executive Forum "Audit of Basel II Risk Management" and Audit Intern Managerial Level.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY'S PROFILE



Rakhmat Nugroho

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

52 tahun, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di Bank BTN sejak 1 Juni 2010. Beliau memulai karir di Bank BTN sejak tahun 1984, dan pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Semarang pada 1999, Kepala Cabang Bandung tahun 2003, Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis pada tahun 2007 dan Kepala Corporate Secretary Division tahun 2009. Meraih gelar Sarjana dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 1983 dan Magister Manajemen dari Universitas Diponegoro, Semarang pada 2006. Beliau mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar diantaranya Refreshment Program "Enterprise Risk Management (ERM) Batch II" serta WSBI Postal Savings Banks Forum di Afrika Selatan pada tahun 2010.

52 years, served as Corporate Secretary since 1 June 2010. He began his career at Bank BTN since 1984, and served as Head of Semarang Branch Office in 1999, Head of Bandung Branch Office in 2003, Head of Policy and Business Development Division in 2007 and Head of Corporate Secretary Division in 2009. He holds a Bachelor Degree of Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta in 1983 and Magister Management from the University of Diponegoro, Semarang in 2006. He followed a number of trainings and seminars such as Refreshment Program "Enterprise Risk Management (ERM) Batch II" and WSBI Postal Savings Banks Forum in South Africa in 2010.

PRODUK DAN LAYANAN PRODUCTS AND SERVICES

PRODUK DANA	FUNDING PRODUCTS
<p>Tabungan BTN Batara Tabungan multi guna yang aman untuk dana Anda dengan berbagai kemudahan yang terus meningkat</p>	<p>Tabungan BTN Batara A safe multipurpose savings product for fund with various benefits that keep on growing.</p>
<p>Tabungan BTN Payroll Tabungan bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan/ lembaga yang menggunakan jasa Payroll BTN untuk pembayaran gajinya.</p>	<p>Tabungan BTN Payroll A savings for employees working in companies / institutions who use the services of BTN Payroll for salary payments.</p>
<p>Tabungan BTN Prima Tabungan dengan suku bunga premium dilengkapi bonus bunga bila nasabah tidak melakukan penarikan tabungan selama periode tertentu</p>	<p>Tabungan BTN Prima A savings product with premium interest, complete with bonus interest if the customer does not make a withdrawal during certain period.</p>
<p>Tabungan BTN Junior Tabungan bagi pelajar sampai dengan usia 12 tahun.</p>	<p>Tabungan BTN Junior A savings product dedicated for students, with no monthly administration fee.</p>
<p>Tabungan BTN Juara Tabungan bagi pelajar dengan usia antara 12 - 23 tahun.</p>	<p>Tabungan BTN Juara A savings product dedicated for students with age above 12 years.</p>
<p>Tabungan BTN Haji Tabungan bagi calon Jemaah Haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah Haji</p>	<p>Tabungan BTN Haji A savings product for Haji applicants to prepare their pilgrimage expenses.</p>
<p>Tabungan BTN e-Batara Pos Tabungan yang diselenggarakan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) melalui loket Kantor Pos Online dan semua outlet Bank BTN.</p>	<p>Tabungan BTN e-BataraPos A savings product made in cooperation with PT Pos Indonesia (Persero) through Online Post Office and all Bank BTN outlets.</p>
<p>TabunganKu Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>TabunganKu A Savings for individuals with easy and light requirements, in order to grow the culture of saving and to improve the welfare of the community.</p>
<p>Giro BTN Produk simpanan dengan fleksibilitas tinggi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek dan Bilyet Giro atau media lainnya.</p>	<p>Giro BTN A current account with high flexibility: withdrawals may be done at anytime by using cheque and bill or any other media.</p>
<p>Giro BTN Valas Produk Giro BTN dengan fasilitas mata uang USD.</p>	<p>Giro BTN Valas Current account with USD currency facility.</p>
<p>Deposito BTN Berjangka Simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah yang menguntungkan.</p>	<p>Deposito BTN A very profitable time deposit in Rupiah currency.</p>
<p>Deposito BTN Valas Simpanan berjangka dalam mata uang Dollar Amerika Serikat yang menguntungkan.</p>	<p>Deposito BTN Valas A very profitable time deposits in US Dollar currency.</p>
JASA DAN LAYANAN	SERVICES
<p>ATM BTN Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui mesin ATM seperti tarik tunai, pembayaran tagihan dan sebagainya, dapat dilakukan di semua jaringan ATM Link dan ATM Bersama.</p>	<p>ATM BTN Card service facility that provides many benefits for the customers via ATM, such as money withdrawals, billing payments and so forth, which may be conducted at all ATMs connected to the Link and ATM Bersama networks.</p>
<p>iMobile BTN Layanan transaksi perbankan yang dapat diakses melalui telepon seluler, cukup dengan mengetik SMS ke 3555.</p>	<p>iMobile BTN Banking transaction facility accessible through mobile phone, by simply sending an SMS to 3555.</p>

PRODUK DAN LAYANAN

PRODUCTS AND SERVICES

JASA DAN LAYANAN	SERVICES
<p>Kartu Debit BTN Fasilitas kartu debit yang dapat digunakan di <i>merchant-merchant</i> dengan jaringan Visa International di seluruh dunia.</p>	<p>Kartu Debit BTN Debit card facilities used in all merchants with Visa International network throughout the world.</p>
<p>Kartu Kredit BTN Fasilitas kartu kredit dengan fitur-fitur khusus seperti potongan harga, poin, transfer balance dan promosi katalog-katalog belanja tertentu.</p>	<p>Kartu Kredit BTN Credit card facilities with special features such as discounts, points, balance transfer and promotion of shopping catalogs.</p>
<p>Contact Center BTN Fasilitas informasi mengenai fitur produk dan layanan serta rekening nasabah di Bank BTN dengan menghubungi 021-26533555.</p>	<p>Contact Center BTN Information facility on the Bank's products, services and customer accounts by dialing 021-26533555.</p>
<p>BTN Prioritas Layanan kepada nasabah dengan total dana diatas Rp 250 Juta baik dalam bentuk Tabungan, Giro ataupun Deposito di Bank BTN, yang akan mendapatkan BTN Prioritas Debit Card dan fasilitas-fasilitas prioritas lainnya.</p>	<p>BTN Prioritas Customers with over Rp 250 million total funds in form of Savings, Current Account or Time Deposits at Bank BTN will receive Priority Debit Card and other priority facilities.</p>
<p>BTN Shop Merupakan kredit kepemilikan barang-barang konsumsi, seperti elektronik dan furnitur.</p>	<p>BTN Shop A loan for purchasing consumer goods, such as electronics and furniture.</p>
<p>BTN Payroll Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan.</p>	<p>BTN Payroll A service given to any institution or individual in managing payroll, bonus and incentive payments, and other routine financial facility needs for Employees.</p>
<p>SPP Online BTN Layanan bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan delivery channel menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara online.</p>	<p>SPP Online BTN A service given to universities or schools in providing a delivery channel that can receive the education fees payment online.</p>
<p>Safe Deposit Box Sarana penyimpanan barang/surat-surat berharga yang aman dan terjaga dari risiko kebakaran, kejahatan dan bencana alam.</p>	<p>Safe Deposit Box A safe deposit facility for precious items; safe from fire, criminal and natural disaster risks.</p>
<p>Payment Point Fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin, seperti tagihan telepon, telepon seluler, listrik, air dan pajak.</p>	<p>Payment Point Service for customers to facilitate the payment of routine billings such as phone, mobile, electricity, water and taxes.</p>
<p>Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Fasilitas yang memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji dengan sistem online dari SISKOHAT.</p>	<p>Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji A facility to book the haji pilgrimage departure schedules online from SISKOHAT.</p>
<p>Western Union Layanan pengiriman uang ke seluruh dunia.</p>	<p>Western Union Money transfers throughout the world.</p>
<p>Kiriman Uang & Inkaso Layanan Bank BTN untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga atas inkaso tanpa dokumen di tempat lain, baik di dalam maupun luar negeri.</p>	<p>Kiriman Uang & Inkaso Bank BTN's service for billing to third parties through non-document collection in other places; domestic and international.</p>
<p>Money Changer Layanan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.</p>	<p>Money Changer Service for those who want to sell or buy any particular currencies, that have exchange notes in Bank Indonesia.</p>
<p>Bank Garansi Pernyataan yang dikeluarkan Bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak yang menerima jaminan.</p>	<p>Bank Garansi Statements given by the Bank upon the request of any customers to provide a guarantee for any risks that could occur if the customer cannot carry out his responsibility to the guarantee recipient.</p>

PRODUK KREDIT	LOAN PRODUCTS
KPR BTN Sejahtera Tapak Kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembelian rumah tapak (landed house).	KPR BTN Sejahtera Tapak Loan dedicated for low-income communities to buy a landed house.
KPR BTN Sejahtera Susun Kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembelian satuan rumah susun (Sarusun).	KPR BTN Sejahtera Susun Loan for low-income communities to buy a modest simple apartment.
KPR BTN Platinum Kredit untuk pembelian rumah, baik rumah baru atau lama dengan nilai kredit tak terhingga.	KPR BTN Platinum Loan to purchase any houses, new or secondary houses, with unlimited loan value.
KPA BTN Kredit untuk pembelian apartemen.	KPA BTN Loan to purchase an apartment.
Kredit Ruko BTN Kredit untuk pembelian rumah toko, rumah usaha, rumah kantor dan kios.	Kredit Ruko BTN Loan to purchase a shop-house, business house, home office or kiosk.
Kredit Agunan Rumah BTN Kredit untuk memenuhi segala keperluan debitur, seperti renovasi rumah, modal kerja, sekolah dan kebutuhan konsumtif lainnya.	Kredit Agunan Rumah BTN Loan to fulfill any needs of the debtor, such as home renovations, business capital, studies, or other consumptive needs.
Kredit Isi Ulang BTN Penyediaan dana tunai bagi nasabah untuk berbagai keperluan dan dapat ditarik sewaktu-waktu (stand by loan cash).	Kredit Isi Ulang BTN Providing cash to customers, for any necessity and can be withdrawn at anytime (stand-by loan).
PRR-KB BTN Jamsostek (Pinjaman Renovasi Rumah Kerjasama Bank) Kredit peruntukan renovasi rumah hasil kerjasama dengan PT Jamsostek, yang diberikan kepada para peserta Jamsostek.	PRR-KB BTN (Pinjaman Renovasi Rumah Kerjasama Bank) Loan dedicated for house renovation in cooperation with PT Jamsostek, which is given to the participants of Jamsostek program.
PUM-KB BTN (Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank) Kredit uang muka hasil kerjasama dengan PT Jamsostek, yang diberikan kepada pada peserta Jamsostek.	PUM-KB BTN (Pinjaman Uang Muka Kerjasama Bank) Down Payment loan services in cooperation with PT Jamsostek, which is given to the Jamsostek participant.
Kredit Bangun Rumah BTN Kredit untuk membangun rumah di atas tanah milik sendiri.	Kredit Bangun Rumah BTN Loan for those who want to build a house on their own land.
Kring BTN Kredit bagi karyawan dari perusahaan/instansi pengguna jasa payroll dengan agunan gaji karyawan.	Kring BTN Loan dedicated for employees of any company/institution that uses the Bank's payroll facility, with their salary as collateral.
Kring BTN Pensiunan Kredit bagi pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui payroll BTN dengan jaminan gaji pensiun.	Kring BTN Pensiunan Loan dedicated to the retire employee of any company/institution that uses Bank's payroll facility.
Kredit Swadana BTN Kredit bagi nasabah yang memerlukan dana segera dengan jaminan tabungan atau deposito yang ditempatkan di Bank BTN.	Kredit Swadana BTN Loan for customers who needs fresh funds with the guarantee of savings or deposits in Bank BTN.
Kredit Konstruksi BTN Kredit yang diberikan kepada pengembang untuk membantu modal kerja pendanaan pembangunan proyek perumahan.	Kredit Konstruksi BTN Loan to help developers with their working capital in financing housing development projects.
Kredit Pemilikan Lahan BTN Kredit untuk membeli lahan guna pembangunan perumahan RSH, yang akan dijual kepada masyarakat.	Kredit Pemilikan Lahan BTN Loan given to purchase area for RSH housing development that will be sold to the community.
Kredit Investasi BTN Kredit yang diberikan kepada PT, CV, Koperasi, Yayasan dan Perorangan dalam rangka pembiayaan Investasi.	Kredit Investasi BTN Loan to help finance investments by Limited Liability Companies, Cooperatives, Foundations and individuals.

PRODUK DAN LAYANAN

PRODUCTS AND SERVICES

PRODUK KREDIT	LOAN PRODUCTS
<p>KMK BTN Kredit untuk membantu menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja.</p>	<p>Kredit Modal Kerja Kontraktor BTN Loan to help completing construction lump sum contracts according to the working contract.</p>
<p>KUR BTN Kredit kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang skalanya berstatus sebagai usaha mikro, kecil dan menengah guna pembiayaan usaha produktif.</p>	<p>Kredit Usaha Rakyat BTN Loan given to debtors in micro, small and medium businesses to increase their productivity.</p>
<p>KUMK BTN Kredit untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman guna pembiayaan investasi dan modal kerja.</p>	<p>Kredit Usaha Menengah dan Kecil BTN Loan given to micro and small business to increase their access to funding for investments and working capital.</p>
<p>Kredit Perumahan Perusahaan BTN Kredit kepada perusahaan untuk penyediaan fasilitas perumahan dinas perusahaan atau fasilitas pemilikan rumah pegawai yang didasarkan pada kerjasama antara Bank BTN dengan perusahaan.</p>	<p>Kredit Perumahan Perusahaan BTN Loan for companies to provide corporate housing or employee housing in cooperation with Bank BTN.</p>
<p>Kredit Linkage BTN Kredit intermediasi dengan memberdayakan sektor UMKM.</p>	<p>Kredit Linkage BTN Loan intermediation by empowering the SME sector.</p>
<p>Pinjaman Lunak Konstruksi Bapertarum BTN Kredit bagi pengembang untuk membiayai pembangunan perumahan PNS dengan dana dari Bapertarum-PNS.</p>	<p>Pinjaman Lunak Konstruksi Bapertarum BTN Loan to help developers to finance a development of state employee housing with funds from Bapertarum-PNS.</p>
PRODUK BTN SYARIAH	BTN SHARIA PRODUCT
PRODUK DANA	SHARIA FUNDING PRODUCT
<p>Tabungan BTN Batara iB Tabungan yang bersifat titipan berdasarkan prinsip Wadiah.</p>	<p>Tabungan BTN Batara iB A savings account based on Wadiah Principle.</p>
<p>Tabungan BTN Payroll iB Tabungan bagi karyawan yang bekerja pada perusahaan/ lembaga yang menggunakan jasa Payroll BTN untuk pembayaran gajinya berdasarkan prinsip Wadiah.</p>	<p>Tabungan BTN Payroll iB A savings for employees working in companies /institutions who use the services of BTN Payroll for salary payments based on Wadiah Principle.</p>
<p>Tabungan BTN Prima iB Tabungan investasi atau berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah.</p>	<p>Tabungan BTN Prima iB Investment or time-based savings account based on Mudharabah principles.</p>
<p>Tabungan BTN Haji iB Tabungan investasi atau berjangka bagi calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji.</p>	<p>Tabungan BTN Haji iB Investment or savings deposits for Hajj prospective pilgrims travel expenses in preparation for Hajj worship.</p>
<p>TabunganKu iB Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip Wadiah.</p>	<p>TabunganKu iB A Savings for individuals with easy and light requirements, in order to grow the culture of saving and to improve the welfare of the community based on Wadiah principle.</p>
<p>Giro BTN iB Kemudahan bertransaksi dengan fleksibilitas tinggi berdasarkan prinsip Wadiah.</p>	<p>Giro BTN iB The benefits of high flexibility transactions based on Wadiah principles.</p>
<p>Giro BTN Investa iB Giro bersifat investasi dengan akad Mudharabah.</p>	<p>Giro BTN Investa iB A current account service with Mudharabah principle.</p>
<p>Deposito BTN iB Simpanan berjangka yang menguntungkan berdasarkan prinsip Mudharabah.</p>	<p>Deposito BTN iB Profitable time deposit on Mudharabah principles.</p>

PRODUK PEMBIAYAAN	FINANCING PRODUCT
<p>KPR BTN Sejahtera Tapak iB Pembiayaan untuk pengadaan perumahan dan pemukiman perumahan dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan.</p>	<p>KPR BTN Sejahtera Tapak iB Financing for purchasing house with subsidized housing facilities.</p>
<p>KPR BTN Sejahtera Susun iB Pembiayaan untuk pengadaan satuan unit rumah susun (Sarusun) dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan.</p>	<p>KPR BTN Sejahtera Susun iB Financing for purchasing simple apartment with subsidized housing facilities.</p>
<p>KPR BTN Platinum iB Pembiayaan untuk pembelian rumah dan jenis rumah tinggal lainnya.</p>	<p>KPR BTN Platinum iB Financing to purchase house.</p>
<p>KPR BTN Indent iB Pembiayaan untuk membeli tanah dan rumah dari Bank BTN yang dibangun oleh Pengembang yang bekerja sama dengan Bank BTN.</p>	<p>KPR BTN Indent iB To finance land and housing purchases from Bank BTN, built by a developer in cooperation with Bank BTN.</p>
<p>Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB Pembiayaan untuk pembelian mobil atau motor guna dimiliki atau dipergunakan sendiri.</p>	<p>Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB To finance the purchase of car or motorbike for personal purposes.</p>
<p>Pembiayaan Multijasa BTN iB Pembiayaan untuk mendanai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah yang tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip Syariah, seperti jasa pendidikan, pernikahan, kesehatan, dll.</p>	<p>Pembiayaan Multijasa BTN iB To finance the needs of customers' services that do not conflict with the Sharia principles, such as educational services, marriage, health, etc.</p>
<p>Pembiayaan Multimanfaat BTN iB Pembiayaan yang bersifat konsumtif bagi perorangan yang ditujukan bagi para pegawai dan pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN.</p>	<p>Pembiayaan Multimanfaat BTN iB To finance the consumptive needs of employees or the retiree employee of any company /institution that uses Bank's payroll facility.</p>
<p>Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB Pembiayaan untuk membangun rumah di atas tanah milik sendiri.</p>	<p>Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB To finance housing construction on self-owned land.</p>
<p>Pembiayaan Talangan Haji BTN iB Pembiayaan yang memenuhi biaya perjalanan ibadah haji sampai mendapatkan porsi kuota haji.</p>	<p>Pembiayaan Talangan Haji BTN iB To finance hajj travel costs until receiving the Hajj pilgrimage quota.</p>
<p>Pembiayaan Gadai BTN iB Pinjaman berdasarkan prinsip Qardh dengan penyerahan Marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah.</p>	<p>Pembiayaan Gadai BTN iB A financing based on Qardh principles by giving a Marhun (warrant) to guarantee the repayment of some or all of the customer's debt.</p>
<p>Pembiayaan Modal Kerja BTN iB Pembiayaan untuk memenuhi modal kerja usaha nasabah.</p>	<p>Pembiayaan Modal Kerja BTN iB To finance the customer's business working capital.</p>
<p>Pembiayaan Konstruksi BTN iB Pembiayaan modal kerja untuk pembangunan proyek perumahan kepada Pengembang.</p>	<p>Pembiayaan Konstruksi BTN iB To finance working capital provided to developer for housing project development</p>
<p>Pembiayaan Investasi BTN iB Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan investasi.</p>	<p>Pembiayaan Investasi BTN iB Financing provided to the customer for investment.</p>
<p>Pembiayaan KUR BTN iB Pembiayaan kepada nasabah yang bergerak dalam bidang usaha yang skalanya berstatus sebagai usaha mikro, kecil dan menengah guna pembiayaan usaha produktif.</p>	<p>Pembiayaan KUR BTN iB Financing provided to customers engaged in business as a micro, small and medium enterprises in order to finance productive business.</p>

KANTOR CABANG BRANCH OFFICES

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA/ KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
KANTOR PUSAT						
JAKARTA	KP	Menara Bank BTN Jl. Gajah Mada No. 01	Jakarta Pusat	10130	(021) 6336789	(021) 6336704
JAKARTA						
Jakarta Kuningan	KC	Wisma Budi Lt. 1 & 2 Jl. HR. Rasuna Said kav. C-6	Jakarta Selatan	12940	(021) 52964652	(021) 52964974
Arteri Pondok Indah	KCP	Jl. Iskandar Muda No.7F, Arteri Pondok Indah	Jakarta Selatan	12240	(021) 7210024	(021) 7210023
Cilandak	KCP	Jl. Raya Cilandak KKO No.12, Cilandak	Jakarta Selatan	12560	(021) 78836708, 78836810,78836520	(021) 7823902
Fatmawati	KCP	Jl. RS Fatmawati No. 12	Jakarta Selatan	12430	(021) 7500136, 75100135	(021) 7500137
Mampang	KCP	Jl. Mampang Prapatan No.42	Jakarta Selatan	12790	(021) 7944868	(021) 7944868
Mayestik	KCP	Jl. Kiai Maja No. 45 Kel. Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru	Jakarta Selatan	12130	(021) 7396959	(021) 7396087
Panglima Polim	KCP	Jl. Raya Panglima Polim No. 76, Keb. Baru	Jakarta Selatan	12170	(021) 2702647-49	(021) 2702764
Pasar Minggu	KCP	Jl. Raya Pasar Minggu Km 18 No. 8, Pejaten	Jakarta Selatan	12510	(021) 7902664, 7902947	(021) 7902663
Tebet	KCP	Jl. Tebet Barat Dalam Raya Blok F No. 114A, Tebet	Jakarta Selatan	12810	(021) 8293670, 8297768	(021) 8293670, 8297768,
Kebayoran Lama	KCP	Jl. Kebayoran Lama No. 17B, Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	12220	(021) 7254813/14	(021) 7207866
Ciganjur	KK	Jl. Muh. Kahfi I No. 47, Kel. Ciganjur Jagakarsa	Jakarta Selatan		(021) 7864948, 7864966	(021) 78892549
Tebet Timur	KK	Jl. Tebet Dalam Timur Raya No. 95, B Kel. Tebet Timur	Jakarta Selatan		(021) 8317168, 8317169	(021) 8290941
Bangka Raya	KK	Jl. Bangka Raya No. 40, F Kel. Pela Mampang	Jakarta Selatan		(021) 7198468, 7198469	(021) 7198480
Jati Padang	KK	Jl. Raya Ragunan No. 12 A Kel. Jati Padang	Jakarta Selatan		(021) 7821706, 78846317	(021) 78846289
Pondok Labu	KK	Jl. H. Ipin No. 1 B / 1 Kel. Pondok Labu	Jakarta Selatan		(021) 7653702, 7514857	(021) 7653883
Jakarta Harmoni	KC	Menara Bank BTN Lt. 1 & 2, Jl. Gajah Mada No.1	Jakarta Pusat	10130	(021) 6336789	(021) 63865983
Cikini	KCP	Jl. Raden Saleh Raya No. 12 B	Jakarta Pusat	10430	(021) 323053	(021) 323061
Kemayoran	KCP	Jl. Angkasa Kav. B.6, Komp. Mega Glodok Kemayoran Blok E-9	Jakarta Pusat	10630	(021) -26646747, 26646748	(021) -26646843
Pantai Indah Kapuk	KCP	Taman Resor Mediterania Jl. Pantai Indah Kapuk Utara II Blok K No. 8 C	Jakarta Utara	14430	(021) 55964491	(021) 55966281
Pluit	KCP	Jl. Pluit Kencana Raya No. 61	Jakarta Utara	10220	(021) 66601532,66601533	(021) 66601531
Roxy Mas	KCP	Komp. Ruko Roxy Mas Blok D2 No. 2 Jl. KH. Hasyim Ashari,	Jakarta Barat	10130	(021) 63858460	(021) 6320171
Sudirman	KCP	Wisma Nugra Sentana, Lt. Dasar, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7 - 8	Jakarta Pusat	10220	(021) 5700127-28	(021) 5700136
Tanah Abang	KCP	Jl. KH Mas Mansyur 86, Tanah Abang	Jakarta Pusat	10240	(021) 390-0114	(021) 390-0114
Waterboom Jakarta	KK	Rukan Bukit Golf Mediterania Blok B 17, Pantai Indah Kapuk Penjarangan	Jakarta Utara		(021) 56946212	(021) 56946211
Percetakan Negara	KK	Jl. Percetakan Negara 641 A Rawasari	Jakarta Pusat		(021) 4220150	(021) 4244793
STMIK Grogol	KK	Gedung STMIK Jl. Kyai Tapa No. 216 A Grogol	Jakarta Barat		(021) 56985688	(021) 56985687
Istana Pasar Baru	KK	Gedung Istana Pasar Baru Lt. 1 No. 41 B, Jl. Pintu Air Raya No. 58-64 Pasar Baru	Jakarta Pusat		(021) 3449835	(021) 3800272
Jakarta Cawang	KC	Patria Park Apartment & Office RK 01-02 Jl. Di Panjaitan Kav. 5 - 7	Jakarta Timur	13410	(021) 85918467, 85918469	(021) 85918470
Pasar Rebo	KCP	Ruko Mutiara Faza RB 4, Jl. Raya Condet No. 27	Jakarta Timur	13570	(021) 87784014/15	(021) 87784016
Dewi Sartika	KCP	Jl. Dewi Sartika No. 4H	Jakarta Timur	13630	(021) 8007434, 8008016	(021) 8007463
Jatinegara	KCP	Jl. Jatinegara Timur No.91, Balimester	Jakarta Timur	13350	(021) 2801314, 2801380	(021) 8560520
Klender	KCP	Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 44 D-F Klender	Jakarta Timur	13470	(021) 8606658	(021) 8611484
Kalimantang	KCP	Jl. Tarum Barat A 2/3A	Jakarta Timur	13450	(021) 8640666	(021) 86903823
Duren Sawit	KCP	Jl. Buaran III No. 11, Duren Sawit	Jakarta Timur	13470	(021) 8604278, 8604378	(021) 8661267
Perumnas Klender	KK	Jl. Raya Teratai Putih Klender Ruko No. 64A	Jakarta Timur		(021) 86615909	(021) 86615908
Penggilingan	KK	Jl. Raya Penggilingan No. 93, (Ruko Blok A)	Jakarta Timur		(021) 4803086	(021) 48701672
Pondok Bambu	KK	Jl. Pahlawan Revolusi	Jakarta Timur		(021) 86615915	(021) 86615916
Kramat Jati	KK	Ruko Pasar Induk Kramat Jati Blok D1 No. 10	Jakarta Timur		(021) 87788250	(021) 87785443
Cipinang Elok	KK	Ruko Wisma Elok No. 7, Jl. Cipinang Elok I Blok J No. 136	Jakarta Timur		(021) 85901951	(021) 85901951
Jakarta Kebon Jeruk	KC	Jl. Panjang No. 8 B-C Kebon Jeruk	Jakarta Barat	11560	(021) 53666345	(021) 53666344
Daan Mogot Baru	KCP	Jl. Tampak Siring Raya Blok KJH No. 1	Jakarta Barat	11840	(021) 54395483, 54395486	(021) 54395487
Palmerah	KCP	Jl. Palmerah Barat No. 39 C	Jakarta Barat	10270	(021) 5364276	(021) 5364277
Tanjung Duren	KCP	Jl. Tanjung Duren Raya No. 54-A Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan	Jakarta Barat	11470	(021) 5601685	(021) 5698987
Kembangan	KCP	Komp. Ruko Puri Indah Blok I No. 10, Kembangan	Jakarta Barat	11630	(021) 5821973	(021) 5828991
Taman Palem	KCP	Komplek Perum Taman Palem Lestari, Blok. D.1 No.15 - Cengkareng	Jakarta Barat	11730	(021) 55950463, 55956861	(021) 55956873

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA/ KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
Kemanggisan	KCP	Ruko Komplek Budhi Square, Jl. Budi Raya No. 7H	Jakarta Barat	11620	(021) 53666273, 53652991	(021) 53652993
Meruya Utara	KK	Jl. H. Lebar Blok B 6/ 7 Meruya Utara	Jakarta Barat		(021) 58900778	(021) 5873692
Joglo	KK	Rukan Botanical, Jl. Joglo Raya No. 33	Jakarta Barat		(021) 58900397	(021) 58900396
Taman Semanan Indah	KK	Taman Semanan Indah Blok H.31 Duri Kosambi	Jakarta Barat		(021) 54393437	(021) 54393437
Kedoya	KK	Ruko Green Garden Blok A7 No. 36 Kedoya Utara	Jakarta Barat		(021) 58351748	(021) 58351747
Cengkareng Timur	KK	Rukan Hawaii Blok A 117 Cengkareng Timur, Cengkareng	Jakarta Barat			
Rawabelong	KK	Jl. Kebayoran Lama No. 6 - 22 Kel. Sukabumi Utara	Jakarta Barat			
Kelapa Gading Square	KC	Jl. Raya Boulevard Barat Blok D No. 23, Kelapa Gading Square, Kelapa Gading	Jakarta Utara	14240	(021) 45866883-4, 45867201	(021) 45866885, 45867207
Kramat Jaya	KCP	Jl. Kramat Jaya No. 33	Jakarta Utara	14270	(021) 43903128	(021) 43934430
ITC Mangga Dua	KCP	ITC Mangga Dua Lt. 1 Blok D No. 48 A -B, Jl. Mangga Dua Raya	Jakarta Pusat	14430	(021) 62300772 - 73	(021) 6016563
Cempaka Mas	KCP	Ruko Grosir Cempaka Mas Blok A No. 26, Jl. Letjen Suprpto, Cempaka Putih	Jakarta Pusat	10510	(021) 42877134, 42877285	(021) 42886978
Kelapa Gading	KCP	Jl. Boulevard Raya Blok TA II No. 18, Kelapa Gading	Jakarta Utara	14240	(021) 4524419	(021) 4514282
Sunter	KCP	Komp. Puri Mutiara Blok A No. 96, Jl. Griya Utama	Jakarta Utara	14350	(021) 65310631-32	(021) 65310630
Rawamangun	KCP	Jl. Paus No. 89 Rawamangun	Jakarta Timur	13220	(021) 4898656-57	(021) 4753076
Cakung	KC	Komplek Ruko Pulogadung Trade Centre Blok B - 1 Kav.23	Jakarta Timur	13920	(021) 46800187-88	(021) 46801100
Kelapa Hibrida	KK	Jl. Raya Hibrida Blok FE 10 No. 2, Kelapa Gading	Jakarta Utara		(021) 45858023 dan 4587519	(021) 45879420
Boulevard Raya	KK	Jl. Boulevard Raya Blok FY No. 21, Kelapa Gading	Jakarta Utara		(021) 45879419 dan 45858544	(021) 45879420
Kebon Bawang	KK	Jl. Bugis No. 25, Kebon Bawang	Jakarta Utara		(021) 43800857	(021) 43905506
Danau Sunter	KK	Komp. Metro Sunter Blok B No. 14, Jl. Danau Sunter Utara Kel. Papanggo	Jakarta Utara		(021) 6521293	(021) 652194
Utan Kayu	KK	Jl. Utan Kayu 86 A, Utan Kayu Utara	Jakarta Timur		(021) 85913306, 85913315	(021) 8563315
Gading Nias	KK	Apartemen Gading Nias Blok AL 10 - AD 11 A Jl. Pegangsaan II No. 3, Kelapa Gading	Jakarta Utara	14250	(021) 45792801	(021) 34182868
Pulomas	KK	Gedung Plaza Property, Komp. Pertokoan Pulomas Blok VIII No. 1, Jl. Perintis Kemerdekaan	Jakarta Timur	13210	(021) 47884930, 47884931	(021) 47884932
AMBON						
Ambon	KC	Jl. Said Perintah No. 21 - 22	Ambon	97126	(0911) 355882, 354471, 348552	(0911) 348551, 348559
BALIKPAPAN						
Balikpapan	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 141	Balikpapan	76113	(0542) 441646, 420897, 420333	(0542) 420896
Karang Jati	KCP	Jl. Jend. A. Yani No. 16,	Balikpapan	76123	(0542) 426562, 420440	(0542) 426562
Sepinggan	KK	Jl. Marsma Iswahyudi No. 488 B	Balikpapan		(0542) 772172, 772174	(0542) 771140
Balikpapan Baru	KK	Jl. MT Haryono RT 100	Balikpapan		(0542) 877490, 877496	(0542) 874915
BANDA ACEH						
Banda Aceh	KC	Jl. Teuku Umar No. 163 - 169	Banda Aceh	23243	(0651) 41178, 42167	(0651) 41215
Lhokseumawe	KCP	Jl. Merdeka No. 2	Lhokseumawe	24300	(0645) 40305	(0645) 40745
BANDAR LAMPUNG						
Bandar Lampung	KC	Jl. Wolter Monginsidi No. 80-88	Bandar Lampung	35215	(0721) 489253 - 55, 484778, 483256	(0721) 489252
Way Halim	KCP	Jl. Kj. Maja Blok D No. 19, Way Halim	Bandar Lampung	35141	(0721) 788532, 703466	(0721) 705481
Bandar Jaya	KCP	Jl. Proklamator No. 29, Bandar Jaya	Lampung Tengah	34162	(0725) 528908, 528909	(0725) 528907
UNILA	KK	Jl. Soemantri Brojonegoro No. 10	Bandar Lampung		(0721) 700172, 707883	(0721) 700925
BANDUNG						
Bandung	KC	Jl. Jawa No. 7	Bandung	40117	(022) 4232112, 4241036	(022) 4204562
Tamansari	KCP	Jl. Taman Sari No. 18	Bandung	40116	(022) 4241801	(022) 421-5210
Sarjadi	KCP	Setrasari Mall B-1 No. 6, Jl. Prof Ir. Sutami	Bandung	40152	(022) 2016286, 2013160	(022) 2013160
Ujung Berung	KCP	Jl. Raya Ujung Berung 111	Bandung	40619	(022) 7832012, 783013	(022) 7800688
Garut	KCP	Jl. Jend A. Yani No. 5	Garut	44188	(0262) 241145	(0262) 232364
Antapani	KCP	Jl. Purwakarta No. 142	Bandung	40291	(022) 7200720	(022) 7100382
Sumber Sari	KCP	Jl. Sukarno Hatta No. 101 B	Bandung	40223	(022) 6121129-30	(022) 6121128
Buah Batu	KCP	Jl. Buah Batu No. 194	Bandung	40264	(022) 7323184, 7304996	(022) 7322185
Margahayu Raya	KCP	Komp. Metro Kav. 9 - 10, Jl. Sukarno Hatta No. 624	Bandung	40286	(022) 7562653	(022) 7563476

KANTOR CABANG BRANCH OFFICES

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA/ KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
Kopo Mas	KCP	Komp. Supermarket Kopo Mas Regency Blok 8 Kav. F, Jl. Kopo Sayati	Bandung	40224	(022) 5430317	(022) 5424707
Rancaekek	KCP	Jl. Dangdeur No. 14, Rancaekek	Bandung	40394	(022) 7792556	(022) 7792557
Kopo	KCP	Jl. Raya Kopo No. 470	Bandung	40223	(022) 5414802	(022) 5401625
Setiabudi	KCP	Jl. Setiabudi No. 171 D	Bandung	40141	(022) 231449	(022) 2041783
UNPAD	KCP	Gedung Pasca Sarjana UNPAD Jl. Dipati Ukur No. 35	Bandung	40132	(022) 2533827 - 28	(022) 2500947
Jatinangor	KCP	Jl. Raya Jatinangor No.194	Sumedang	40132	(022) 7782137	(022) 7792151
Sumedang	KCP	Jl. Mayor Abdurahman No. 50	Sumedang	45363	(0261) 202471, 202472	(0261) 202474
Bojong Soang	KK	Jl. Terusan Buahbatu No. 219	Bandung		(022) 7514376	(022) 7514376
Cibiru	KK	Jl. Raya Cinunuk No. 134	Bandung		(022) 7814420	(022) 7814420
Banjaran	KK	Jl. Raya Kamasan No. 22	Bandung		(022) 5942154	(022) 5942154
BANGKALAN						
Bangkalan	KC	Jl. Teuku Umar No. 16	Bangkalan	69116	(031) 3098929, 3098830-31	(031) 3098834
Sumenep	KCP	Jl. Trunojoyo No. 140	Sumenep	69417	(0328) 662777, 663219	(0328) 669000
BANJARMASIN						
Banjarmasin	KC	Jl. RE Martadinata No. 4	Banjarmasin	70111	(0511) 4368133, 4366669-70	(0511) 4366492, 3363964
Banjar Baru	KCP	Jl. A. Yani KM 34	Banjarbaru	70711	(0511) 4774171, 4781257	(0511) 4774116
Batu Licin	KCP	Jl. Raya Kampung Baru No. 12 Batulicin	Tanah Bumbu	70711	(0518) 71094	(0518) 70271
Kayutangi	KCP	Jl. Brigjen H. Hasan Basri C No. 1, Kayutangi	Banjarmasin	70124	(0511) 3307529	(0511) 3307528
Tanjung	KCP	Jl. Ir. Pangeran H. Muhammad Noor No. 1 - 2, Ds. Pembatasan	Tabalong		(0526) 2027693	(0526) 2027694
A. Yani	KK	Komp. Pertokoan Mitra No. 7, Jl. Jend. Ahmad Yani Km. 2	Banjarmasin		(0511) 3261048	(0511) 3261049
BATAM						
Batam	KC	Komp. Regency Park Lot 29 Jl. Sriwijaya	Batam	29432	(0778) 456806, 455744-45	(0778) 457262, 453923
Batuaji	KCP	Ruko Muka Kuning Indah II, Blok E.2 No. 10	Batam	29432	(0778) 361581	(0778) 361580
Batam Center	KCP	Komplek Pertokoan Hup Seng Blok A No.17 Jl. Engku Putri	Batam	29432	(0778) 467753, 467754	(0778) 467762
Penuin	KCP	Komp. PT Penuin Blok. F No.12 Lubuk Baja	Batam	29432	(0778) 422036	(0778) 421990
Sekupang	KCP	Komp. Pertokoan Cipta Blok DD No.1, Jl. Gajah Mada, Tiban Selatan, Sekupang	Batam	29425	(0778) 322440	(0778) 322430
Tanjung Uncang	KCP	Pertokoan Fanindo Blok D10 & 10 A, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji	Batam	29422	(0778) 3581274, 3581280	(0778) 3581194
Puri Legenda	KK	Pertokoan Puri Legenda Blok D1 No. 08, Batam Center	Batam		(0778) 8096200	(0778) 8096200
Panbil Mall	KK	Pertokoan Panbill Mall, Blok C2 No. 01, Panbill Batam	Batam		(0778) 37115	(0778) 37115
BEKASI						
Bekasi	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 19	Bekasi	17143	(021) 8840649	(021) 8849519
Bekasi Jaya Indah	KCP	Komp. Danita BJI, Jl. H. Agus Salim Blok AI No. 1	Bekasi Timur	17112	(021) 8815134	(021) 8808280
Bintara	KCP	Ruko Bintara Estate, Jl. Bintara Raya No. 3, Bintara	Bekasi	17000	(021) 8890973	(021) 88962974
Duta Plaza	KCP	Ruko Duta Plaza Blok B II No. 18, Jl. Raya Kalimalang	Bekasi	17145	(021) 88950878-79	(021) 8840416
Pondok Hijau	KCP	Komp. Pondok Hijau Permai, Jl. Pondok Hijau Raya Kav. 7	Bekasi Timur	17115	(021) 8202152, 8221208	(021) 8221214
Pondok Ungu	KCP	Ruko Sentra Niaga Boulevard, Harapan Indah Blok A No. 1, Medan Satria	Bekasi	17132	(021) 88875391, 88880118	(021) 88875393
Rawalumbu	KCP	Perumnas Rawalumbu, Jl. Trisatya No. 2, Rawa Lumbu	Bekasi	17116	(021) 8209409	(021) 8209407
Setia Mekar	KCP	Perumnas III Setia Mekar Jl. Pulau Sumatera Raya Kav. 7	Bekasi	17111	(021) 8828026	(021) 8828025
Harapan Baru	KCP	Ruko Harapan Baru Blok B 1 No. 3, Harapan Baru	Bekasi Barat	17133	(021) 8840070	(021) 8840289
Mustika Jaya	KCP	Ruko Pasadena Mutiara Gading Timur Blok R 3 No. 1-2, Mustika Jaya	Bekasi	17158	(021) 29081175-76	(021) 29081174
Teluk Pucung	KCP	Pertokoan Wisma Asri Blok M/11 - 12 Jl. Raya Perjuangan	Bekasi Utara	17121	(021) 88875158	(021) 88875159
Villa Mutiara Gading II	KK	Ruko Villa Mutiara Gading II Blok D1 - 18 Karang Satria Tambun	Bekasi		(021) 88377249	(021) 88377247
Kaliabang	KK	Ruko Panorama Bekasi No. 14 Jl. Raya Kaliabang Kel. Perwira	Bekasi Utara		(021) 88882507	(021) 88882506
Marakas	KK	Pondok Ungu Permai Sektor V Blok A 18 No. 3, Desa Bahagia Kec Babelan	Bekasi	17610	(021) 88882467	(021) 88882466
Galaksi	KK	Ruko Patung Kuda Dua - Galaksi Blok AR No. 1, Jakasetia	Bekasi		(021) 82436716	(021) 82435717
Pekayon	KK	Jl. Raya Pekayon No. 45 D, Pekayon Jaya	Bekasi Barat		(021) 82435718	(021) 82435719

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA/ KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
Sultan Agung	KK	Jl. Raya Sultan Agung KM 27 No. 21, Medan Satria	Bekasi		(021) 88856488	(021) 88856487
Dukuh Zamrud	KK	Ruko Dukuh Zamrud Blok B1 No. 1, Kel. Pedurenan Mustika Jaya	Bekasi		(021) 82614842, 82614843	(021) 82614849
Ahmad Yani	KK	Komplek Ruko Sentra Niaga Kalimalang A3 No. 2	Bekasi		(021) 88856498	(021) 88856497
Babelan	KK	Jl. Raya Babelan No. 4, Kel Babelan	Bekasi		(021) 89136069	(021) 89136070
Rawa Kalong	KK	Jl. Raya Setia Mekar Rt 08 / Rw 10 No. 79 Rawa Kalong Tambun	Bekasi		(021) 88343683, 88343748	(021) 88350757
Cikarang	KC	Ruko Cikarang Commercial Center, Blok B1 No. 3-5, Jl. Raya Cikarang-Cibarusah Km 40	Bekasi	17550	(021) 8936275, 89830014, 89841558	(021) 8936418
Pasar Central	KCP	Pasar Central Lippo Cikarang Blok ESA No. 17 Jl. Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang Selatan	Bekasi	17550	(021) 89920626, 89920642, 89920678	(021) 89920704
RE Martadinata	KCP	Jl. RE Martadinata No. 03, Cikarang Utara	Bekasi	17550	(021) 89109718, 89109652, 89109675	(021) 89108428
Tambun	KCP	Jl. Sultan Hasanudin No. 59, Tambun	Bekasi	17510	(021) 8824433	(021) 8824888
Cibitung	KCP	Jl. Teuku Umar No. 3, Kampung Utan Wanasari Cibitung	Bekasi	17520	(021) 88321060	(021) 88338151
Serang	KK	Ruko Jl. Raya Serang - Cibarusah Cikarang	Bekasi		(021) 89677353, 89677354	(021) 89677063
Pilar	KK	Jl. Gatot Subroto No. 102, Desa Karang Asih	Bekasi		(021) 89108728, 89108927	(021) 89108837
Pinangsia	KK	Ruko Pinangsia Blok A No. 26, Jl. Citanduy Raya	Bekasi		(021) 89744403	(021) 89744378
Taman Aster	KK	Komp. Taman Aster - Cikarang Barat Kab. Bekasi	Bekasi		(021) 88320941, 88320802	(021) 88321712
Setu	KK	Jl. WR. Supratman No. 14, Setu Kab. Bekasi	Bekasi		(021) 82678905, 82618906	(021) 82678904
Sentra Kalimas	KK	Ruko Sentra Niaga Kalimas Blok A - 09A, Jl. H. Noer Ali Kalimalang	Bekasi		(021) 88394736	(021) 88394735
Mangunjaya	KK	Jl. Mangunjaya Raya Rt 05/ 13, Kel. Mangunjaya	Bekasi		(021) 88337377, 8831668	(021) 88332966
Harapan Indah	KC	Komp. Ruko Sentra Niaga Blok SN No. 1 - 3 Jl. Boulevard Hijau, Harapan Indah	Bekasi	17132	(021) 88386971, 88386972, 88386974	(021) 88386974
BENGGKULU						
Bengkulu	KC	Jl. S. Parman No. 32	Bengkulu	38223	(0736) 20875, 342974	(0736) 20874
BOGOR						
Bogor	KC	Jl. Pengadilan No. 13 - 15	Bogor	16121	(0251) 8311700	(0251) 8323007, 8351432, 8352457
Cibinong	KCP	Central Ruko Cibinong Blok A No. 7/ 8 Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 63	Bogor	16910	(021) 8758564-65	(021) 8759543
Cimanggu	KCP	Jl. Sholeh Iskandar Ruko 24 No. 2G Cimanggu	Bogor	16164	(0251) 8387942	(0251) 8349263
Citeureup	KCP	Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 2 Blok 2 Citeureup	Bogor	16810	(021) 87903132, 87940239	(021) 87942071
Dramaga	KCP	Komp. Ruko At-Taufik No. A Jl. Raya Dramaga Km 26	Bogor	16620	(0251) 8420704, 8628621	(0251) 8628622
Tajur	KCP	Jl. Raya Tajur No. 67 Ruko No. 6 Tajur	Bogor	16720	(0251) 8391240	(0251) 8391241
Warung Jambu	KCP	Jl. Pajajaran Ruko No. 165, Kel. Bantarjati	Bogor	16153	(0251) 8322704	(0251) 8333900
Bojong Gede	KCP	Jl. Raya Bojong Gede Gelonggong Bojong Gede	Depok	16923	(021) 87987608	(021) 87983486
Ciomas	KK	Ruko Grand Ciomas No. 18 Jl. Raya Cikareteg Ciomas	Bogor		(0251) 8630608	(0251) 8630657
Bandongan	KK	Jl. Pahlawan No. 63 Ruko No. 6, Bondongan Bogor Selatan	Bogor		(0251) 8355844	(0251) 8355818
Sentul	KK	Ruko Gerbang Sentul Estate No. 8, Desa Sentul	Bogor		(021) 87900355	(021) 87904418
Sukahati	KK	Jl. Dedy Kusmayadi No. 55A, Sukahati Cibinong	Bogor		(021) 87909909	(021) 87909910
Plasa Lido	KK	Plaza Lido A1 No. 36 Jl. Raya Mayjen H.E Sukma Cigombong Cijeruk	Bogor		(0251) 8223976	(0251) 8223975
Pandu	KK	Ruko Banbarung Grande No. 8 Jl. Raya Pandu Bantarjati Bogor Utara	Bogor		(0251) 8355763	(0251) 8355743
Villa Bogor	KK	Ruko Villa Bogor Indah 2 Blok BB 2 No. 3, Kedung Halang	Bogor		(0251) 8662208	(0251) 8661804
CIBUBUR						
Cibubur	KC	Ruko Madison Blok B1 No. 6 - 8 Jl. Raya Transyogi Km 3 Cibubur Time Square	Cibubur	17435	(021) 84300071-75	(021) 84300070, 84599607
Bantar Gerbang	KCP	Jl. Raya Narogong KM 11 No. 99, Bantar Gebang	Bekasi	17310	(021) 82690717	(021) 82610288
Jati Asih	KCP	Jl. Jati Mekar No. 184, Jati Asih	Bekasi	17422	(021) 84994806	(021) 8477988
Pondok Gede	KCP	Jl. Jatiwaringin No. 14, Pondok Gede	Bekasi	17411	(021) 84995481, 84995483	(021) 8464541
Cileungsi	KCP	Jl. Raya Narogong No. 53, Cileungsi	Bogor	16820	(021) 8236080-81	(021) 8236082
Citra Indah	KK	Ruko Citra Indah Blok CS I No. 5, Jonggol	Bogor		(021) 89930626	(021) 89930722
Bojong Kulur	KK	Ruko Villa Nusa Indah II, Bojong Kulur - Bekasi	Bekasi		(021) 82422623	(021) 82435702
Jatimurni	KK	Jl. Raya Hankam No. 43 D, Jati Murni	Bekasi		(021) 84596158	(021) 84912175

KANTOR CABANG BRANCH OFFICES

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA/ KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
Radar Auri	KK	Jl. Auri No. 38, Cibubur Kec. Ciracas	Jakarta Timur		(021) 87751495	(021) 87755986
Jatisari	KK	Jl. Wibawamukti Ruko Tamanjatisari Permai Blok AG No. 7	Bekasi		(021) 84592719	(021) 84593401
CILEGON						
Cilegon	KC	Jl. Tirtayasa Kompleks Bonakarta	Cilegon	42411	(0254) 391766, 392681, 393479	(0254) 393480
Serang	KCP	Jl. Mayor Syafei No. 14	Serang	42115	(0254) 205403, 211422	(0254) 211421
Serang Timur	KCP	Jl. Raya Jakarta Km 76 Keragilan	Serang	42184	(0254) 283361	(0254) 283629
Pasar Baru	KK	Jl. KH. Washid Ruko Amanda Blok A No. 2, Pasar Baru	Cilegon		(0254) 393730, 393729	(0254) 393758
Pondok Cilegon Indah (PCI)	KK	Ruko Halmahera Blok E22 No. 12, Pondok Cilegon Indah	Cilegon		(0254) 393702, 393728	(0254) 393490
IAIN SMH	KK	Kampus IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Jl. Jend. Sudirman No. 30	Cilegon		(0254) 212888, 207415	(0254) 221858
CIMAHI						
Cimahi	KC	Jl. Raya Timur Cimahi 475	Bandung	40524	(022) 6651644-45	(022) 6652586
Sukabumi	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 75E	Sukabumi	43121	(0266) 223446	(0266) 223447
Cianjur	KCP	Jl. Siti Jenab No. 51	Cianjur	43211	(0263) 266310	(0263) 266309
Cijerah	KCP	Jl. Raya Cijerah No. 221	Bandung	40354	(022) 6027922	(022) 6027922
CIPUTAT						
Ciputat	KC	Jl. Dewi Sartika No. 21	Ciputat	15411	(021) 7445145	(021) 7490968, 7402731
Bintaro	KCP	Ruko Bintaro Sektor 3A Blok A No. 11 Bintaro	Jakarta	15225	(021) 7375789	(021) 7375889
Bintaro Trade Center	KCP	Pusat Niaga Bintaro Trade Center Blok A1 No. 2 Sektor VII Pondok Aren	Tangerang	15224	(021) 7452003	(021) 7453982
Cirendeui	KCP	Jl. Cirendeui Raya No. 66 C Desa Pisangan Kecamatan Ciputat	Tangerang	15419	(021) 74708010, 74708003	(021) 742628
Pamulang	KCP	Komp. Ruko Pamulang Permai Blok SH 10 No. 6 - 7 Pamulang	Tangerang	15417	(021) 7414308, 7423065	(021) 7414307
Ciledug	KCP	Jl. HOS Cokroaminoto No. 59B Ciledug	Tangerang	15157	(021) 7303846	(021) 7303844
Universitas Terbuka	KCP	Kampus Universitas Terbuka, Jl. Cabe Raya Pondok Cabe	Tangerang	15418	(021) 7403587, 7492520	(021) 7498427
Kampung Utan	KK	Ruko Sing Asri No. 2 Jl. WR. Supratman Kp. Utan	Tangerang		(021) 7412591	(021) 7412592
Pamulang 2	KK	Perum. Pamulang Permai 2, Jl. Pamulang Raya No. 22	Tangerang		(021) 74631697	(021) 7405837
Jombang	KK	Jl. Raya Jombang No. 62 Rt 007/ 02, Kel. Pondok Pucung	Tangerang		(021) 74863302	(021) 74863375, 74863477
Pondok Aren	KK	Jl. Raya Cegar No. 72B, Kel. Jurang Mangu Barat	Tangerang		(021) 7440531	(021) 73440529
CIREBON						
Cirebon	KC	Jl. Siliwangi No. 16	Cirebon	45121	(0231) 209143, 209153	(0231) 209777
Indramayu	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 123	Indramayu	45211	(0234) 275583-84	(0234) 277148
Kuningan	KCP	Jl. Siliwangi No. 6 - 7	Kuningan	45511	(0232) 871820	(0232) 817820
Rajawali	KCP	Jl. Rajawali Raya No. G 2 - 3 Perumnas	Cirebon	45141	(0231) 235562	(0231) 222241
DENPASAR						
Denpasar	KC	Jl. Dewi Sartika No. 2	Denpasar	80114	(0361) 243811	(0361) 243815
Gunung Agung	KCP	Jl. Gunung Agung No. 146	Denpasar	80119	(0361) 412157	(0361) 412401
Kuta	KCP	Jl. Kallianget No. 12	Denpasar	80361	(0361) 763021	(0361) 763543
Singaraja	KCP	Jl. A. Yani No. 94	Singaraja	81116	(0362) 23091, 21856	(0362) 21851
Surapati	KCP	Jl. Surapati No. 13	Denpasar	80232	(0361) 234840	(0361) 263474
DEPOK						
Depok	KC	Jl. Margonda Raya No. 186	Depok	16423	(021) 7751236	(021) 7772927
Beji	KCP	Jl. Nusantara Raya No. 20 A	Depok	16421	(021) 7762020	
Cimanggis	KCP	Jl. Raya Bogor Km 30 No. 1 - 2 Mekarsari	Cimanggis	16952	(021) 87703401	(021) 87702023
Depok Timur	KCP	Jl. Proklamasi Blok A 2-3	Depok	16417	(021) 7714746, 77826970	(021) 7714780
Lenteng Agung	KCP	Jl. Raya Lenteng Agung No. 39 Jagakarsa	Jakarta Selatan	12610	(021) 7871047	(021) 7870528
Sawangan	KCP	Komp. Ruko Rivaria Blok A2 No. 2, Bedahan - Sawangan	Depok	16511	(0251) 616743	(0251) 613785
Citayam	KCP	Ruko Citayam Permai No. 32 Pasar Rebo Citayam	Depok	16438	(021) 87986788	(021) 87986934
Cinere	KCP	Komplek Pertokoan Cinere Blok B2 No. 53 Jl. Cinere Raya-Depok	Depok	16514	(021) 7544677, 7544758	(021) 7544715
Kukusan	KK	Jl. K.H.M Usman Rt 02/08 No. 154A Kel Beji	Depok		(021) 77218265	(021) 77218267
Tole Iskandar	KK	Jl. Tole Iskandar Kav. No. 3 Rt 003/02 Kel. Mekar Jaya	Depok		(021) 77820557	(021) 77820548

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA/ KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
Kartini	KK	Jl. Citayam Ruko Kartini Rt 01/ 02 Kel Depok	Depok		(021) 77218275	(021) 77278276
Kelapa Dua	KK	Jl. Nusantara Hankam Rt. 007/ 02 No. 15 Cimanggis	Depok		(021) 87709099	(021) 87701550
Sukatani Arcadia	KK	Jl. Ciherang Sukatani No. 8C Rt 001/ 06 Kel. Sukatani	Depok		(021) 87745813	(021) 87745813
Fakultas Psikologi UI	KK	Kampus UI Depok, Gd. Fakultas Psikologi	Depok		(021) 78849000	(021) 78849111
GORONTALO						
Gorontalo	KC	Jl. Budi Utomo No. 20 Kel. Limba U1 Kota Selatan	Gorontalo	96155	(0435) 829481, 830490	(0435) 826707, 823943
GRESIK						
Gresik	KC	Komp. Pertokoan Multi Sarana Plaza Blok C 1 No. 1-3 Jl. Gubernur Suryo	Gresik	61118	(031) 3973455	(031) 3973456
Bojonegoro	KCP	Komp. Pertokoan Kereta Api Indonesia Kav. 13 - 15, Jl. Gajah Mada	Bojonegoro	62115	(0353) 893171	(0353) 893162
Tuban	KCP	Jl. Basuki Rachmat No. 67A	Tuban	61137	(0356) 321984	(0356) 334152
JAMBI						
Jambi	KC	Jl. Sultan Thaha No. 119	Jambi	36113	(0741) 34087, 33058	(0741) 26220
Jelutung	KCP	Jl. Sumatra No. 1 Kel. Handil Jaya	Jambi	36137	(0741) 41403	(0741) 444351
Muara Bungo	KCP	Jl. Lintas Sumatra No. 8 - 9, Kel. Batang Bungo, Muara Bungo	Jambi		(0747) 322577, 322667	(0747) 323177
JAYAPURA						
Jayapura	KC	Jl. Koti No. 22	Jayapura	99111	(0967) 537970-71	(0967) 533373
Waena	KCP	Jl. Raya Sentani No. 54 Waena	Jayapura	99358	(0967) 571557	(0967) 571282
JEMBER						
Jember	KC	Jl. Ahmad Yani No. 5	Jember	68118	(0331) 484611	(0331) 484617
Banyuwangi	KCP	Jl. PB Sudirman No. 49	Banyuwangi	68415	(0333) 415690	(0333) 415676
Universitas Negeri Jember (UNEJ)	KK	Pertokoan Java Square No. 14 Jl. Jawa	Jember		(0331) 324334	(0331) 324104
KARAWANG						
Karawang	KC	Jl. Surotokunto No. 55	Karawang	41313	(0267) 412033, 412269, 8452818	(0267) 412247
Cikampek	KCP	Jl. A. Yani No. 12 A Ruko Timbangan	Cikampek	41373	(0264) 8387517	(0264) 313140
KEDIRI						
Kediri	KC	Jl. Diponegoro No. 22 - 24	Kediri	64121	(0354) 691260-63	(0354) 691265
Tulungagung	KCP	Ruko Sudirman Trade Center Blok A.5 Jl. Sultan Hasanudin	Tulungagung	66224	(0355) 329509	(0355) 323142
Blitar	KCP	Jl. Merdeka No. 90	Blitar		(0342) 808640, 808641	(0342) 801303
KENDARI						
Kendari	KC	Jl. Sam Ratulangi No. 75 A - B	Kendari	93111	(0401) 322101, 327512	(0401) 322502
KUPANG						
Kupang	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 87	Kupang	85119	(0380) 831004, 831727, 830890	(0380) 833741
MADIUN						
Madiun	KC	Jl. H.A. Salim No. 90	Madiun	63129	(0351) 464650, 459034, 451460	(0351) 463510
Ponorogo	KCP	Jl. Sukarno Hatta No. 299	Ponorogo	63411	(0352) 463675-6, 463679	(0352) 463370
MAKASSAR						
Makassar	KC	Jl. Kajaolalido No. 4	Makassar	90111	(0411) 316016, 316011	(0411) 330539, 330544
Alauddin	KCP	Jl. Alauddin No. 206	Makassar	92111	(0411) 882474	(0411) 882475
Antang	KCP	Jl. Antang Raya No. 4	Makassar	90234	(0411) 495088	(0411) 492976
Mamuju	KCP	Jl. KS Tubun No. 27	Mamuju	91511	(0426) 22389	(0426) 21420
Maros	KCP	Jl. Jend. Sudirman Ruko Anjali No. 9 - 10	Makassar	90511	(0411) 373678	(0411) 373263
Palopo	KCP	Jl. Mangga No. 122 Komp. Pasar Sentral	Palopo	91921	(0471) 24000	(0471) 325750
Panakukang	KCP	Jl. Hertasning Blok I No. 2	Makassar	90222	(0411) 868831, 868833	(0411) 845125
Pare-pare	KCP	Jl. Andi Isa No. 01	Pare-pare	91114	(0421) 21132, 27707	(0421) 27722
RSUP Wahidin	KCP	Komp. RSUP Dr Wahidin Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10	Makassar	90245	(0411) 585388	(0411) 585388
Tamalanrea	KCP	Komp. Bumi Tamalanrea Permai Jl. Tamalanrea Raya No. 28-30	Makassar	90245	(0411) 4773741	(0411) -584307
Sungguminasa	KCP	Jl. KH Wahid Hasyim No. 236 A	Makassar	92111	(0411) 869962	(0411) 869963
Watampone	KCP	Jl. Ahmad Yani No. 27	Makassar	92111	(0481) 24444	(0481) 26777

KANTOR CABANG BRANCH OFFICES

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA/ KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
KIMA	KK	Jl. Kima Raya II No. 31 Komp. Kawasan Industri Makassar	Makassar		(0411) 4723268	(0411) 4723268
Pasar Sentral	KK	Jl. Andalas No. 176 A Makassar	Makassar		(0411) 311521	(0411) 311521
Kumala	KK	Jl. Daeng Tata No. 63 A Makassar	Makassar		(0411) 867024	(0411) 880459
MALANG						
Malang	KC	Jl. Ade Irma Suryani 2 - 4	Malang	65119	(0341) 323956	(0341) 323959, 350050
Jaksa Agung Suprpto	KCP	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 54	Malang	65111	(0341) 336232, 336233	(0341) 336231
Pasuruan	KCP	Jl. Panglima Sudirman No. 14 A	Pasuruan	67115	(0343) 411922, 411933, 411955	(0343) 411717
Sawojajar	KCP	Perum Perumnas Sawojajar Jl. Danau Toba No. 1 Sawojajar	Malang	65139	(0341) 711511, 710970-1	(0341) 716675
UIN Malang	KCP	Universitas Islam Negeri Malang Jl. Gajayana No. 50	Malang	65145	(0341) 557567, 557565	(0341) 557566
Probolinggo	KCP	Jl. Soekarno Hatta Ruko Blok D - E Kel. Kademangan	Probolinggo	67214	(0335) 434377	(0335) 434388
UNIBRAW	KCP	Universitas Brawijaya Jl. Veteran No. 16	Malang	65145	(0341) 583989, 5859689	(0341) 585969
MANADO						
Manado	KC	Jl. Wolter Monginsidi No. 56	Manado	95115	(0431) 855504-05, 868095	(0431) 868013
Bitung	KCP	Jl. Sam Ratulangi No. 3 Pakadoodan	Bitung	95521	(0438) 21734, 35545-46	(0438) 36546
UNIMA	KK	Komplek Kampus Universitas Negeri Manado Kel. Maesa	Minahasa		(0431) 321969	(0431) 321969
RSUP R. D Kandau	KK	Komplek Perkantoran RSUP Dr. Kandou Jl. Raya Tanawanko No. 56, Malalayang I Manado	Manado		(0431) 338115	(0431) 338115
MATARAM						
Mataram	KC	Jl. Pejangik No. 99 - 101, Cakranegara	Mataram	83121	(0370) 631186, 632234	(0370) 634542
Airlangga	KCP	Jl. Airlangga No. 1 B Gomong	Mataram	83126	(0370) 649023	(0370) 637553
MEDAN						
Medan	KC	Jl. Pemuda No. 10 A	Medan	20151	(061) 4149777	(061) 4153203, 4538112
Helvetia	KCP	Jl. Mawar Raya No. 143 A Perumnas Helvetia	Medan	20124	(061) 8460800	(061) 8460777
Iskandar Muda	KCP	Jl. Iskandar Muda No. 39 F	Medan	20154	(061) 4149905	(061) 4513260
Johor	KCP	Jl. AH Nasution No. 36B	Medan	20146	(061) 7880968	(061) 7852780
M. Yamin	KCP	Jl. M Yamin SH No. 398 - A/ 564	Medan	20233	(061) 4156739	(061) 4157601
Pematang Siantar	KCP	Komp. Ruko SBC No. 14 Jl. Sutomo	Pematang Siantar	21100	(0622) 23116	(0622) 24020
Pusat Pasar	KCP	Jl. Pusat Pasar No. 357/ 3A	Medan	20212	(061) 4550945	(061) 4555257
Setia Budi	KCP	Jl. Setiabudi No. 244	Medan	20132	(061) 8221443	(061) 8221469
Simalingkar	KCP	Jl. Karet Raya No. 59 - 61, Perumnas Simalingkar	Medan	20141	(061) 8360004	(061) 8360020
Tebing Tinggi	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 242 A	Tebing Tinggi	20615	(0621) 326888	(0621) 328271
Binjai	KK	Jl. Jendral Sudirman No. 42, Binjai	Binjai		(061) 8828700	(061) 8830697
Pulo Brayon	KK	Jl. Kol. Yos Soedarso No. 33 A / 197 A, Kel Pulo Brayon Kota, Kec. Medan Barat	Medan		(061) 6615552	(061) 6631293
Tanjung Morawa	KK	Jl. Irian No. 89, Kel. Pekan Tanjung Morawa, Kec. Tanjung Morawa	Medan		(061) 7943309	(061) 7943218
PADANG						
Padang	KC	Jl. HR Rasuna Said No. 3	Padang	25129	(0751) 32093-96, 31903	(0751) 31900
Bukit Tinggi	KCP	Jl. A. Karim No. 01	Bukittinggi	26113	(0752) 625830	(0752) 625830
DR. Sutomo	KCP	Jl. Dr. Sutomo No. 37 B	Padang	25123	(0751) 24772	(0751) 32915
Pasar Raya	KCP	Jl. M. Yamin No. 130	Padang	25112	(0751) 30717	(0751) 23351
Ulak karang	KCP	Jl. S. Parman No. 31 F	Padang	25133	(0751) 7051134	(0751) 41006
PALANGKARAYA						
Palangkaraya	KC	Jl. Ahmad Yani No. 56	Palangkaraya	73111	(0536) 3223407, 3222698, 3224136	(0536) 3221020
Sampit	KCP	Jl. MT. Haryono No. 60 D	Sampit	75328	(0531) 32511, 32512	(0531) 32522
PALEMBANG						
Palembang	KC	Jl. Jend. Sudirman Km 4,5 No. 125	Palembang	30128	(0711) 411175, 410552	(0711) 410854
Iilir Barat	KCP	Komp. Iilir Barat Permai Blok D I No. 60, Jl. Letkol Iskandar	Palembang	30124	(0711) 321714	(0711) 321714
Lubuk Linggau	KCP	Jl. Yos Sudarso No. 159, Kel. Jawa Kiri Kec. Lubuk Linggau	Lubuk Linggau	31623	(0733) 325955	(0733) 320047
Sako Kenten	KCP	Ruko No. 2, Sako Kenten Jl. Komp. Terminal Multiwahana Wijaya	Palembang	30163	(0711) 810746	(0711) 810746

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA/ KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
Alang - Alang Lebar	KK	Komplek Ruko Tanah Mas Jl. Raya Palembang - Betung Km 13	Palembang		(0711) 7433226	(0711) 7433227
Plaju	KK	Komp. Perum. & Ruko Bumi Patra Sriwijaya Blok A - 07 Jl. Jend. Ahmad Yani	Palembang		(0711) 514600	(0711) 515575
PALU						
Palu	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 2	Palu	94111	(0451) 424555, 428555, 422555	(0451) 425993
PANGKAL PINANG						
Pangkal Pinang	KC	Jl. Mayor Syafrie Rachman No. 21	Pangkal Pinang	33132	(0717) 434660	(0717) 422208
PEKALONGAN						
Pekalongan	KC	Jl. Hayam Wuruk No. 15	Pekalongan	51119	(0285) 433883-84, 433484	(0285) 433926
Tegal	KCP	Ruko Pacific Mall No. 9 & 10 Jl. Mayjen Sutoyo No. 35	Tegal	52125	(0283) 323038	(0283) 357439
PEKANBARU						
Pekan Baru	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 393	Pekanbaru	28116	(0761) 40494	(0761) 32271, 44776
Duri	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 36, Simpang Garoga, Duri	Riau	28884	(0765) 598519	(0765) 598518
Marpoyan	KCP	Jl. Kaharuddin Nasution No. 99, Simpang Marpoyan	Pekanbaru	28284	(0761) 673728	(0761) 673680
Panam	KCP	Jl. HR Subrantas No. 88 - 89	Panam	28298	(0761) 562333	(0761) 562111
Rumbai	KCP	Jl. Sekolah No. 7 - K Limbungan Rumbai	Pekanbaru	28261	(0761) 566115	(0761) 52468
Harapan Raya	KK	Jl. Imam Munandar No. 72F	Pekanbaru		(0761) 38443, 7871010	(0761) 38345
Arengka	KK	Jl. Sukarno Hatta No. 11	Pekanbaru		(0761) 589419	(0761) 589421
Riau	KK	Jl. Riau No. 4A	Pekanbaru		(0761) 38481 dan 45677	(0761) 38503
PONTIANAK						
Pontianak	KC	Jl. Imam Bonjol No. 29	Pontianak	78122	(0561) 740163-66	(0561)74016869
Jeruju	KCP	Jl. Komodor Yos Sudarso No. 27, Jeruju	Pontianak	78113	(0561) 770567	(0561) 779284
PURWAKARTA						
Purwakarta	KC	Jl. RE Martadinata No. 1	Purwakarta	41114	(0264) 201024	(0264) 201591
Subang	KCP	Jl. Jend. A. Yani No. 9 A - B	Subang	41211	(0260) 411811	(0260) 411524
Pamanukan	KCP	Jl. Ion Martasasmita No. 34	Pamanukan		(0260) 550081, 550082	(0260) 550083
Kalijati	KK	Jl. Raya Kalijati Desa Kalijati Timur, Kec. Kalijati	Subang		(0260) 463111, 463222	(0260) 463333
PURWOKERTO						
Purwokerto	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 431	Purwokerto	53116	(0281) 641114	(0281) 638386
Cilacap	KCP	Jl. A. Yani No. 391	Cilacap	53213	(0282) 538080	(0282) 528080
Purbalingga	KCP	Ruko A. Yani Blok A - B Jl. Jend. Achmad Yani No. 63	Purbalingga		(0281) 895646	(0281) 895657
SAMARINDA						
Samarinda	KC	Jl. RE Martadinata No. 1	Samarinda	75128	(0541) 736930, 731510, 735790	(0541) 737698
Bontang	KCP	Jl. Bhayangkara No. 03	Bontang	75311	(0548) 20667	(0548) 20668
Mall Lembuswana	KCP	Jl. S. Parman Komp. Mall Lembuswana Blok C - 11	Samarinda	75125	(0541) 206605	(0541) 732611
Tarakan	KCP	Jl. Yos Sudarso No. 6	Tarakan	77112	(0551) 25353, 24342, 24322	(0551) 24144
SEMARANG						
Semarang	KC	Jl. MT. Haryono 717	Semarang	50242	(024) 8312151	(024) 8312186, 8413818
Banyumanik	KCP	Jl. Jati Raya No. 1 Banyumanik	Semarang	50263	(024) 7471745, 7474098	(024) 7471745
Karangayu	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 234	Semarang	50141	(024) 7616823	(024) 7624020
Kudus	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 58 A	Kudus	59312	(0291) 430210	(0291) 430210
Majapahit	KCP	Jl. Majapahit No. 400	Semarang	50258	(024) 6709051	(024) 6724942
Pati	KCP	Jl. Jend. Sudirman 88	Pati	59111	(0295) 384202	(0295) 384276
RS Dr. Kariadi	KCP	Jl. Dr. Sutomo No. 17	Semarang	50113	(024) 8416780	(024) 8416780
Salatiga	KCP	Jl. Diponegoro No. 4	Salatiga	50711	(0298) 321048	(0298) 326305
Tlogosari	KCP	Jl. Tlogosari Raya No. 1	Semarang	50196	(024) 6713014	(024) 6713015
UNDIP Tembalang	KCP	SH Kampus UNDIP Tembalang Jl. Prof Sudarto,	Semarang	50273	(024) 7478346	(024) 7478346
Unggaran	KCP	Komp. Ungaran Square Jl. Diponegoro No. 745	Unggaran	50511	(024) 6925851	(024) 6925853
Magelang	KCP	Jl. Ahmad Yani No. 3 A	Magelang	56117	(0293) 365286	(0293) 314676
Kendal	KCP	Jl. Kendal No 33 Kel. Pegulon , Kec. Kendal	Semarang		(0294) 3686650, 3686640	(0294) 381268
Kedung Mundu	KK	Komp. Ruko Jl. Kedung Mundu Raya No. 511B	Semarang		(024) 76740039	(024) 76740039

KANTOR CABANG BRANCH OFFICES

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA/ KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
B S B	KK	Komp. Ruko Jatisari Indah II Blok C3 BSB Mijen Jl. Jatisari	Semarang		(024) 76672007	(024) 76672008
SIDOARJO						
Sidoarjo	KC	Jl. Ahmad Yani No. 15	Sidoarjo	61212	(031) 8957949-50, 8929211	(031) 8957951
Krian	KCP	Ruko Krianindo Blok FF No. 428 Jl. Basuki Rahmad, Krian	Sidoarjo	61262	(031) 8986202-205	(031) 8986201
SOLO						
Solo	KC	Jl. Slamet Riyadi No. 282	Solo	57141	(0271) 726930	(0271) 726931
Klaten	KCP	Jl. Pemuda Utara No. 117	Klaten	57414	(0272) 321448, 322435	(0272) 324405
Mojosongo	KCP	Jl. Malabar Utara No. 11 Perumnas Mojosongo	Solo	57127	(0271) 854942	(0271) 853675
Palur	KCP	Jl. Raya Palur No. 38 Palur	Karanganyar	57772	(0271) 846465	(0271) 826465
Sukoharjo	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 63	Sukoharjo	57514	(0271) 591112	(0271) 591112
UNS Solo	KCP	Gedung LPKWU Kampus UNS Jl. Ir. Sutami No. 36A	Solo	57126	(0271) 667520	(0271) 667531
SURABAYA						
Surabaya	KC	Jl. Pemuda No. 50	Surabaya	60271	(031) 5353513	(031) 5345073
Babatan Wiyung	KCP	Jl. Menganti No. 11 Kav. IV Babatan Wiyung	Surabaya	60227	(031) 7523572	(031) 7527724
Bubutan	KCP	Jl. Bubutan No. 9 E	Surabaya	60174	(031) 5340576	(031) 5340848
IAIN Sunan Ampel	KCP	Kampus IAIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani No. 17	Surabaya	60239	(031) 8475452	(031) 8475453
Jemursari	KCP	Jl. Raya Jemursari No. 76 Blok B/ 07	Surabaya	60237	(031) 8415754	(031) 8431902
Jombang	KCP	Jl. Wahid Hasyim No. 19 E	Jombang	61415	(0321) 871117-9	(0321) 854258
Mayjen Sungkono	KCP	Darmo Park I Blok 3 A/ 12 Jl. Mayjen Sungkono	Surabaya	60225	(031) 5662867	(031) 5687211
Mojokerto	KCP	Jl. Majapahit No. 134	Mojokerto	61321	(031) 323853	(031) 323850
Mulyosari	KCP	Jl. Raya Mulyosari 82 - 82A	Surabaya	60119	(031) 5932012	(031) 5931763
Rungkut	KCP	Jl. Palem TC 14 Pondok Tjandra	Sidoarjo	61256	(031) 8667237	(031) 8673954
Satelite Town Square	KCP	Komp. Satelite Town Square Blok A 5 No. 22, Suko Manunggal	Surabaya	60181	(031) 7320761-3	(031) 7320760
Tandes	KCP	Jl. Manukan Lor No. 3	Surabaya	60185	(031) 7405594	(031) 7404494
UNAIR	KCP	Kampus UNAIR Jl. Airlangga No. 4 - 6	Surabaya	60286	(031) 5038554	(031) 5038554
KH Mas Mansyur	KK	Jl. KH. M Mansyur No. 236 A, Surabaya	Surabaya		(031) 3572869, 3578829	(031) 3577748
Nginden Semolo	KK	Ruko Manyar Garden Regency Jl. Nginden Semolo No. 101 Kav. 40	Surabaya		(031) 5992799, 5964558, 5964567	(031) 5964576
Lakarsantri	KK	Jl. Raya Lakarsantri No. 83, Surabaya	Surabaya		(031) 7526814, 7535734	(031) 7525734
Universitas Negeri Surabaya (Unesa)	KK	Kampus Unesa Gd. H2 Ketintang Surabaya	Surabaya		(031) 8280902	(031) 8280974
Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)	KK	Kampus ITS Gd. SCC Lt. II	Surabaya		(031) 5967739	(031) 5967745
Surabaya Bukit Darmo	KC	Jl. Bukit Darmo Golf Blok 1 No. 07	Surabaya		(031) 7323344, 7322146, 7322147	(031) 7232899
TANGERANG						
Tangerang	KC	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Cikokol	Tangerang	15118	(021) 5539363	(021) 5537977
Cimone	KCP	Komp Pertokoan Sentra Blok A3 & A5, Cimone Jl. Raya Jend. Gatot Subroto Km. 2	Tangerang	15114	(021) 55795855, 55770678	(021) 55795853
Cipondoh	KCP	Jl. KH Hasyim Ashari No. 51 Ruko A - B Cipondoh	Tangerang	15118	(021) 55742093, 55742193	(021) 55742293
Duta Garden	KCP	Jl. Husen Sastra Negara Komp. Duta Garden Blok A1 No. 4 A	Tangerang	15111	(021) 54370336, 54370337	(021) 5400774
Peninggilan	KK	Jl. Raden Patah No. 89, Ciledug	Tangerang		(021) 7333898	(021) 7333098
Karang Tengah	KK	Jl. Raden Saleh No. 14A, Karang Tengah	Tangerang		(021) 37663845	(021) 7331613
Pinang	KK	Jl. KH. Hasyim Ashari Rt 08/ 02 Pinang	Tangerang		(021) 7331527, 37662745	(021) 7331539
City Mall	KK	Jl. Moch Toha km. 02 No. 1, Tangerang Kel. Nombu Jaya	Tangerang		(021) 55760803	(021) 55760802
Sastra Plaza	KK	Ruko Sastra Plaza Jl. Gatot Subroto Blok D No. 102 Jatiuwung	Tangerang		(021) 5918361	(021) 5918923
Bumi Serpong Damai	KC	Ruko BSD Sektor VII E Blok RK No. 8, Jl. Raya Serpong	Tangerang	15310	(021) 5372236-37	(021) 5372238
Gading Serpong	KCP	Jl. Kelapa Gading Selatan Sektor SG Blok SG 1 No. 37, Gading Serpong	Tangerang	15311	(021) 54201247	(021) 54201692
BSD Sektor 1.1	KK	Jl. Pinus Raya Blok RA No. 17 BSD Sektor 1.1	Tangerang		(021) 5381727	(021) 5381779
Graha Raya	KK	Ruko Graha Raya Bintaro Blok JF No. 09, Paku Jaya	Tangerang		(021) 53140045	(021) 53140045
Muncul	KK	Jl. Raya Puspitok No. 32, Muncul Cisauk	Tangerang		(021) 7561996, 7561997	(021) 7561896
Karawaci	KC	Perumnas Karawaci I Jl. Cendrawasih No. 1	Tangerang	15114	(021) 5517849-50, 5511420	(021) 5524367
Cikupa	KCP	Jl. Raya Serang Km. 17,2 Komp Ruko Kav. 6, Cikupa	Tangerang	15710	(021) 5962424	(021) 5962451

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA/ KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
Pasar Kemis	KCP	Jl. Raya Kutabumi Ruko Telaga Bumi Asri A.1 & A.2, Kutabumi	Tangerang	15561	(021) 5925028, 59316584	(021) 59316585
Curug	KK	Jl. Raya PLP Curuk KM 4 No. 8	Tangerang		(021) 5984676	(021) 5984643
TANJUNG PINANG						
Tanjung Pinang	KC	Jl. Raja Ali Haji No. 1 - 2	Tanjung Pinang	29124	(0771) 22155	(0771) 28280
TASIKMALAYA						
Tasikmalaya	KC	Jl. Sutisna Senjaya 101	Tasikmalaya	46113	(0265) 334464-65	(0265) 326465, 330884
TERNATE						
Ternate	KC	Jl. Zainal Abidin Syah No. 41	Ternate	97714	(0921) 3111330	(0921) 3126968
YOGYAKARTA						
Yogyakarta	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 71	Yogyakarta	55223	(0274) 589898, 581014, 581016	(0274) 561289, 580996
Colombo	KCP	Ruko Buletin Music Shop Jl. Colombo No. 7, Samirono, Sleman	Yogyakarta	55281	(0274) 588138	(0274) 588130
Condong Catur	KCP	Jl. Bakri No. 1 Ring Road Utara Condong Catur Depok, Sleman	Yogyakarta	55283	(0274) 881367, 881508	(0274) 881367
Nogotirto	KCP	Jl. Godean Km 5 No. 4 A, Sleman	Yogyakarta	55182	(0274) 621157	(0274) 627106
Bantul	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 182, Bantul	Yogyakarta		(0274) 6462894, 6462895	(0274) 367396
Universitas Gajah Mada	KK	Gedung Vokasi UGM Unit I Jl. Kaliurang No. 5, Sleman	Yogyakarta		(0274) 3155116	(0274) 3155116
Universitas Negeri Yogyakarta	KK	Jl. Afandi No. 1C, Catur Tunggal Depok Sleman	Yogyakarta		(0274) 3155117	(0274) 3155117
KANTOR CABANG SYARIAH						
Jakarta	KCS	Menara Bank BTN Lt. 2 Jl. Gajah Mada No. 1	Jakarta	10130	(021) 6336789 ext 8240, 63870226	(021) 6336742
Jakarta Kelapa Gading	KCPS	Jl. Raya Timur Boulevard Blok NB - 1 No. 40, Kel. Pegangsaan Dua Klp Gading	Jakarta		(021) 45856485	(021) 4515775
Jakarta Tanah Abang	KCPS	Jl. KH. Mas Mansyur No. 42 C, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang	Jakarta		(021) 102215, 31902960, 31904800	(021) 31903143
Jakarta Pasar Minggu	KCS	Ruko Grand Palace Blok G & H Jl. Pasar Minggu Km.16	Jakarta	12780	(021) 7993662, 7993015	(021) 7993174
Depok	KCPS	Jl. Margonda Raya No. 438 RT, 002/03, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji	Depok		(021) 7867664, 7867668	(021) 7868632
Jakarta Fatmawati	KCPS	Jl. RS. Fatmawati Komp. Pertokoan Duta Mas, Blok A1 No. 19	Jakarta		(021) 7237306	(021) 72793125
Bandung	KCS	Jl. Jawa No. 7	Bandung	40117	(022) 4235547, 4202711, 70808006	(022) 4233094
Banjarmasin	KCS	Kompleks Kencana No.1 Jl. Jend. A. Yani Km.5	Banjarmasin	70249	(0511) 3250530, 3250540, 3250560	(0511) 3260900
Balikpapan	KCS	Jl. Letjend Suprpto No. 18	Balikpapan	76131	(0542) 424917, 423524	(0542) 423524
Batam	KCS	Komp. Lumbung Rejeki Blok D No. 7 Jl. Sultan Abdul Rahman Nagoya	Batam	29432	(0778) 421921, 437880	(0778) 422126
Bekasi	KCS	Komp. Ruko Kali Mas Blok C No. 9 - 10 Jl. Chairil Anwar Kelurahan Margahayu	Bekasi	17113	(021) 88353676, 88345410	(021) 88353673
Bogor	KCS	Jl. Raya Warung Jambu No. 59 B Cibuluh	Bogor Utara	16153	(0251) 8380094-95	(0251) 8379764
Cilegon	KCS	Jl. Ahmad Yani No. 1 B, Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	Cilegon	42421	(0254) 378264, 378265	(0254) 378272
Cirebon	KCS	Ruko Cirebon City Centre Jl. Sisingamangaraja No. 27 - 28	Cirebon	45121	(0231) 235485-86, 235488	(0231) 205790
Makassar	KCS	Jl. Boulevard Ruko Jasper II No. 34, Panakkukang	Makassar	90222	(0411) 422666, 422333	(0411) 420779
Malang	KCS	Jl. Ade Irma Suryani No. 2 - 4	Malang	65119	(0341) 335620-1, 335959	(0341) 335622
Medan	KCS	Jl. Sisingamangaraja No. 14 A	Medan	20213	(061) 7325481, 7326869, 77015199	(061) 7326870
Palembang	KCS	Jl. Veteran No. 325-329,	Palembang	30114	(0711) 355963, 355417	(0711) 313366
Pekanbaru	KCS	Jl. Tuanku Tambusai Blok A No. 10 - 11 A Labuh Baru Timur, Payung Sekaki	Pekanbaru	28291	(0761) 7891314, 7891296	(0761) 7891313
Semarang	KCS	Jl. Majapahit No. 283 A	Semarang	50258	(024) 6700548, 6700549	(024) 6708014
Semarang Majapahit	KCPS	Jl. Majapahit No. 283 A	Semarang	50258	(024) 6700548, 6700549	(024) 6708014
Solo	KCS	Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 322	Solo	57141	(0271) 712127, 7008947, 726931	(0271) 717276
Surabaya	KCS	Jl. Diponegoro No. 29	Surabaya	60241	(031) 5666363, 5610518	(031) 5610519
Embung Kenongo	KCPS	Jl. Embong Kenongo No. 3	Surabaya	60271	(031) 5477118, 5477109	(031) 5477328
Jombang	KCPS	Jl. Wahid Hasyim No. 85	Jombang		(0321) 874091, 874092	(0321) 873296
Tangerang	KCS	Komp. Ruko Golden Madrid Blok D No. 07 Sektor XIV BSD City	Tangerang	15318	(021) 53160495, 53150481-482	(021) 53160496
Yogyakarta	KCS	Jl. Bakri No. 1 Ring Road Condong Catur Depok Sleman	Yogyakarta	55283	(0274) 7499742, 4462923	(0274) 4462924
Condong Catur	KCPS	Jl. Bakri No. 1 Ring Road, Condong Catur	Yogyakarta	55283	(0274) 47499742, 7499743, 4462923	(0274) 4462924



Berbagi cinta di rumah impian keluarga.
Ingin rumah, Bank BTN solusinya.

Merayakan hari kemerdekaan di rumah sendiri memang menyenangkan. Bank BTN menyediakan berbagai macam produk kredit pendanaan mulai dari uang muka, untuk kepemilikan, keperluan renovasi, sampai dengan membangun rumah di atas tanah sendiri.



REFERENSI BAPEPAM-LK
BAPEPAM-LK CROSS REFERENCE

REFERENSI BAPEPAM-LK BAPEPAM-LK CROSS REFERENCE

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
I. Umum General		
1. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris. <i>In good and correct Indonesian, it is recommended to present the report also in English.</i>		√
2. Dicetak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas. <i>Printed on light-colored paper so that the text is clear and easy to read.</i>		√
3. Mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. <i>Should state clearly the identity of the company.</i>	Nama perusahaan dan tahun Annual Report ditampilkan di: <i>Name of company and year of the annual report is placed on:</i> 1. Sampul muka, samping, dan belakang. <i>The front cover, sides, and back.</i> 2. Setiap halaman. <i>Each page.</i>	√
4. Laporan Tahunan ditampilkan di website perusahaan. <i>The Annual Report is presented in the company's website.</i>		√
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting Summary of Vital Financial Data		
1. Informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 tahun. <i>Financial information in comparative form over a period of 5 financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 5 years.</i>	Informasi memuat antara lain: <i>The information includes:</i> 1. Penjualan/pendapatan usaha. <i>Sales/income from business.</i> 2. Laba (rugi) kotor. <i>Gross profit (loss).</i> 3. Laba (rugi) usaha. <i>Business profit (loss).</i> 4. Laba (rugi) bersih. <i>Net profit (loss).</i> 5. Laba (rugi) bersih persaham. <i>Net profit (loss) per share.</i> 6. Modal kerja bersih. <i>Net working capital.</i> 7. Jumlah investasi. <i>Total investment.</i> 8. Jumlah aktiva. <i>Total assets.</i> 9. Jumlah kewajiban. <i>Total liabilities.</i> 10. Jumlah Ekuitas. <i>Total equity.</i> 11. Rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan. <i>Financial ratio which are common and relevant to the company's industry.</i>	12-13
2. Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Informasi harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus. <i>The Annual Report must contain information of the share price in the form of tables and graphs. The price of shares prior to the last revision in capital should be adjusted in the event, among others, that it was due to a splitting of shares, dividend on shares, and bonus shares.</i>	Informasi memuat: <i>The information includes:</i> 1. Harga saham tertinggi <i>Highest price</i> 2. Harga saham terendah <i>Lowest price</i> 3. Harga saham penutupan <i>Closing price</i> 4. Jumlah saham yang diperdagangkan <i>Transaction volume</i> 5. Jumlah saham yang dicatatkan untuk setiap triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada) <i>Total number of shares listed on the market for each three-month period in the last two (2) financial years (if any).</i>	14
3. Laporan Tahunan wajib memuat informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan dalam 2 tahun buku terakhir. <i>The Annual Report must contain information regarding the number of bonds or convertible bonds issued in the last 2 financial years.</i>	1. Jumlah obligasi/obligasi konversi yang beredar. <i>The number of bonds/convertible bonds outstanding.</i> 2. Tingkat bunga. <i>Interest rate.</i> 3. Tanggal jatuh tempo. <i>Maturity date.</i> 4. Peringkat obligasi. <i>Rating of bonds.</i>	15

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners' and Board of Directors' Report		
1. Laporan Dewan Komisaris. Board of Commissioners' Report.	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut: <i>Contains the following items:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan. <i>Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company.</i> 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. <i>View on the prospects of the company's business as established by the Board of Directors.</i> 3. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris. <i>Committees under the Board of Commissioners.</i> 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada). <i>Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any).</i> 	22-29
2. Laporan Direksi. Board of Directors' Report.	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut: <i>Contains the following items:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. <i>The company's performance, encompassing among others strategic policies, comparison between achievement of results and targets, and challenges faced by the company.</i> 2. Prospek usaha. <i>Business prospects.</i> 3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. <i>Implementation of Good Corporate Governance by the company.</i> 4. Perubahan komposisi Direksi (jika ada). <i>Changes in the composition of the Board of Directors (if any).</i> 	30-41
3. Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Signature of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut: <i>Contains the following items:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri. <i>Signatures are set on a separate page.</i> 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. <i>Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the annual report.</i> 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya. <i>Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and titles/positions.</i> 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. <i>A written explanation in a separate letter from each member of the Board of Commissioners or Board of Directors who refuses to sign the annual report, or written explanation in a separate letter from the other members in the event that there is no written explanation provided by the said member.</i> 	42-43
IV. Profil Perusahaan Company Profile		
1. Nama dan alamat perusahaan. Name and address of the company.	<p>Meliputi informasi tentang nama dan alamat, kode pos, nomor telepon dan/atau nomor faksimili, email, website. <i>Includes information on name and address, zip code, telephone and/or facsimile, email, website.</i></p>	181

REFERENSI BAPEPAM-LK

BAPEPAM-LK CROSS REFERENCE

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
2. Riwayat singkat perusahaan. <i>Brief history of the company.</i>	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan namaperusahaan jika ada. <i>Includes among others: date/year of establishment, name and change in the company name, if any.</i>	10-11
3. Bidang usaha. <i>Field of business.</i>	Meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan. <i>Includes the types of products and or services produced.</i>	4-5, 537-541
4. Struktur Organisasi. <i>Organizational structure.</i>	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan. <i>In the form of a chart, giving the names and titles.</i>	518-519
5. Visi dan Misi Perusahaan. <i>Company vision and mission.</i>	Mencakup hal-hal sebagai berikut: <i>Includes the following:</i> 1. Penjelasan tentang visi perusahaan. <i>Explanation on the company vision.</i> 2. Penjelasan tentang misi perusahaan. <i>Explanation on the company mission.</i>	6
6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris. <i>Identity and brief curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners.</i>	Informasi memuat antara lain: <i>The information should contain:</i> 1. Nama. <i>Name.</i> 2. Jabatan. <i>Title.</i> 3. Umur. <i>Age.</i> 4. Pendidikan. <i>Education.</i> 5. Pengalaman kerja. <i>Working experience.</i>	521-525
7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi. <i>Identity and brief curriculum vitae of the members of the Board of Directors.</i>	Informasi memuat antara lain: <i>The information should contain:</i> 1. Nama. <i>Name.</i> 2. Jabatan. <i>Title.</i> 3. Umur. <i>Age.</i> 4. Pendidikan. <i>Education.</i> 5. Pengalaman kerja. <i>Working experience.</i>	526-531
8. Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangankompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). <i>Number of employees (comparative in two years) and description of competence building (for example: education and training of employees).</i>	Informasi memuat antara lain: <i>The information should contain:</i> 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi. <i>The number of employees for each level of the organization.</i> 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan. <i>The number of employees for each level of education.</i> 3. Pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan. <i>Training of employees that has been and will be conducted.</i> 4. Adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan. <i>Availability of equal opportunity to all employees.</i> 5. Biaya yang telah dikeluarkan. <i>Expenses incurred.</i>	100-109
9. Komposisi Pemegang saham. <i>Composition of shareholders.</i>	Mencakup antara lain: <i>Should include:</i> 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham. <i>Names of shareholders having 5% or more shares.</i> 2. Direktur dan Komisaris yang memiliki saham. <i>Directors and Commissioners who own shares.</i> 3. Pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. <i>Public shareholders having respective share ownership of less than 5% .</i>	174-175
10. Daftar anak perusahaan dan/atau perusahaan asosiasi. <i>List of subsidiaries and/or affiliated companies.</i>	Informasi memuat antara lain: <i>The information contains, among others:</i> 1. Nama anak perusahaan/perusahaan asosiasi. <i>Name of subsidiaries/affiliated companies.</i> 2. Presentase Kepemilikan saham. <i>Percentage of share ownership.</i> 3. Keterangan tentang bidang usaha anak perusahaan atau perusahaan asosiasi. <i>Information on the field of business of the subsidiary or affiliated company.</i> 4. Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). <i>Explanation regarding the operational status of the subsidiary or affiliated company (already operating or not yet operating).</i>	n.a

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
11. Kronologi pencatatan saham. Chronology of shares listing.	Mencakup antara lain: Includes among others: <ol style="list-style-type: none"> Kronologi pencatatan saham. Chronology of shares listing. Jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham. Types of corporate action that caused changes in the number of shares. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku. Changes in the number of shares from the beginning of listing up to the end of the financial year. Nama Bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Name of Stock Exchange where the company shares are listed. 	179
12. Kronologi pencatatan Efek lainnya. Chronology of other securities listing.	Mencakup antara lain: Includes among others: <ol style="list-style-type: none"> Kronologi pencatatan efek lainnya. Chronology of other securities listing. Jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya. Types of corporate action that caused changes in the number of securities. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku. Changes in the number of securities from the initial listing up to the end of the financial year. Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkan. Name of Stock Exchange where the company's other securities are listed. Peringkat efek. Rating of the securities. 	15, 180
13. Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal. Name and address of institution and or profession supporting the capital market.	Informasi memuat antara lain: The information contains, among others: <ol style="list-style-type: none"> Nama dan alamat BAE. Name and address of BAE. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik. Name and address of the Public Accountants' Office. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. Name and address of the securities rating company. 	181
14. Akuntan Independen perseroan. Company Independent Accountant.	Informasi memuat antara lain: The information should contain: <ol style="list-style-type: none"> Jumlah periode akuntan telah mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan. Number of audit periods that the accountant audited the financial statements of the company. Jumlah periode audit Kantor Akuntan Publik telah mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan. Number of audit periods that the public accountant firm audited the financial statements of the company. Besarnya fee audit. The amount of audit fee. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit. Other service provided by the accountant in addition to financial audit. 	274
15. Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional. Reward and certification received by the company, both on a national scale and international scale.	Informasi memuat antara lain: Information should include: <ol style="list-style-type: none"> Nama penghargaan. Name of the reward. Tahun perolehan. Year of receiving the award. Badan pemberi penghargaan. Institution presenting the award. Masa berlaku. Period of validity. 	20-21
16. Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada). Name and address of subsidiary and or branch office or representative office (if any).		542-551

REFERENSI BAPEPAM-LK

BAPEPAM-LK CROSS REFERENCE

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan Management Analysis and Discussion on Company Performance		
1. Tinjauan operasi per segmen bisnis. Operational review per business segment.	Memuat uraian mengenai: Contains description of: 1. Produksi/kegiatan usaha. Production/line of business. 2. Penjualan/pendapatan usaha. Sales/income from business. 3. Profitabilitas. Profitability. 4. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen usaha. Increase/decrease in production capacity in each business segment.	44-127
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan. Description of company's financial performance.	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangantahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: An analysis of the financial performance which includes a comparison between the financial performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables), among others concerning: 1. Aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva. Current assets, non-current assets, and amount of assets. 2. Kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban. Current liabilities, non-current liabilities, and amount of liabilities. 3. Penjualan/pendapatan usaha. Sales/income from business. 4. Beban usaha. Overhead cost. 5. Laba/Rugi bersih. Net profit/loss.	128-155
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan. Discussion and analysis on the capacity to pay debts and the company's collectable accounts receivable.	Penjelasan tentang: Explanation on: 1. Kemampuan membayar hutang. Capacity to pay debts. 2. Tingkat kolektibilitas piutang. Collectable accounts receivable.	157
4. Bahasan tentang struktur modal, kebijakan manajemen atas struktur modal, dan tingkat likuiditas perusahaan. Discussion on capital structure, capital structure policies, and liquidity.	Penjelasan atas: Explanation on: 1. Struktur modal. Capital structure. 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal. Capital structure policies. 3. Tingkat likuiditas perusahaan. Liquidity.	156
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal. Discussion on material ties for the investment of capital goods.	Penjelasan tentang: Explanation on: 1. Tujuan dari ikatan tersebut. The purpose of such ties. 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut. Source of funds expected to fulfill the said ties. 3. Mata uang yang menjadi denominasi. Currency of denomination. 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisimata uang asing yang terkait. Steps taken by the company to protect the position of related foreign currency against risks.	159-160
6. Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. Discussion and analysis of financial information that was reported concerning extraordinary and rare events.	Ada atau tidak ada pengungkapan. Is this disclosed or not.	164
7. Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan. Information regarding substantial components of earnings and other costs, in order to calculate the company's income.	Ada atau tidak ada pengungkapan. Is this disclosed or not.	134-138
8. Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara	Ada atau tidak ada pengungkapan. Is this disclosed or not.	n.a

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
<p>lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru. If the financial statement discloses a material increase or decrease in the sales or net income, then an explanation should be included concerning the extent that such changes can be linked to, among others, the amount of goods or services sold, and or the existence of new products or services.</p>		
<p>9. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 tahun. Discussion on the impact of price change to the company's sales and net income and the operational profit of the company for the past two (2) years or since the company commenced its business, if the company has been operating for less than two years.</p>	<p>Ada atau tidak ada pengungkapan. Is this disclosed or not.</p>	<p>134-138, 165</p>
<p>10. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan. Material Information and facts subsequent to the accountant's report date.</p>	<p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. Description of important events after the date of the accountant's report including their impact on performance and business risks in the future.</p>	<p>163</p>
<p>11. Uraian tentang prospek usaha perusahaan. Description of the company's business prospects.</p>	<p>Uraian mengenai prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya. Information on the company prospects in connection with industry, economy in general, and the international market, which can be accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source.</p>	<p>310-325</p>
<p>12. Uraian tentang aspek pemasaran. Information on marketing aspects.</p>	<p>Uraian tentang pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar. Information regarding the marketing of the company's products and services, among others concerning the market segment.</p>	<p>118 - 127</p>
<p>13. Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 tahun buku terakhir. Statement regarding the dividend policy and the date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two (2) years.</p>	<p>Memuat uraian mengenai: Contains information on: 1. Besarnya dividen untuk masing-masing tahun. Amount of dividend for each year. 2. Besarnya Payout Ratio. Payout Ratio.</p>	<p>171</p>
<p>14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Realization of the use of IPO proceeds</p>	<p>Memuat uraian mengenai: Contains information on: 1. Total perolehan dana Total funds obtained 2. Rencana penggunaan dana Budget plan 3. Rincian penggunaan dana Details of budget plan 4. Saldo dana Balance 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada). Date of General Meeting of Shareholder stipulating the change in the budget plan (if any)</p>	<p>176</p>
<p>15. Informasi material, mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang (modal). Material information, among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring.</p>	<p>Memuat uraian mengenai: Contains information on: 1. Tujuan dilakukannya transaksi The purpose of transactions 2. Nilai transaksi atau jumlah yang di restrukturisasi Transaction value or number of transaction 3. Sumber dana Source of fund</p> <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud agar diungkapkan Notes: if there are no such transactions this should be disclosed</p>	<p>n.a</p>

REFERENSI BAPEPAM-LK

BAPEPAM-LK CROSS REFERENCE

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
16. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak afiliasi. Material information containing conflict of interest, and affiliated transactions.	Memuat uraian mengenai: Contains information on: 1. Nama pihak yang bertransaksi The parties involved in the transactions 2. Sifat hubungan afiliasi Nature of affiliation 3. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi Explanation on fairness of transaction 4. Realisasi transaksi pada periode berjalan Source of fund Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud agar diungkapkan Notes: if there are no such transactions this should be disclosed	163
17. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. Description on changes in laws and regulations having significant effects on the company.	Memuat uraian perubahan peraturan pemerintah dan dampaknya terhadap perusahaan. Description should include amendment to government regulation and impact on the company.	166-167
18. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Description of changes in the accounting policy.	Uraian memuat antara lain: kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Description should include among others: any revision to accounting policies, rationale and impact on the financial statement.	168-171
vi. Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance		
1. Uraian Dewan Komisaris. Information on the board of Commissioners.	Uraian memuat antara lain: The information should contain: 1. Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Description of the tasks implemented by the board of Commissioners. 2. Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris. Disclosing the procedure for determining, and the amount of remuneration for the members of the board of Commissioners. 3. Frekuensi pertemuan. Frequency of meetings. 4. Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan. Attendance of the board of Commissioners in the meetings.	198-207
2. Uraian Direksi. Information on the board of Directors.	Uraian memuat antara lain: The information should include: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Scope of work and responsibility of each member of the board of Directors. 2. Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi. Disclosing the procedure for determining, and the amount of remuneration for the members of the board of Directors. 3. Frekuensi pertemuan. Frequency of meetings. 4. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan. Attendance of the board of Directors in the meetings. 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi. Training programs for improving the competence of the board of Directors.	208-220
3. Komite Audit. Audit Committee.	Mencakup antara lain: Includes among others: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Audit. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Audit Committee. 2. Uraian tugas dan tanggung jawab. Description of tasks and responsibilities. 3. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit. Frequency of meetings and the attendance of the Audit Committee. 4. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit.	224-229

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
	<p>Brief report on the activities carried out by the Audit Committee.</p> <p>5. Independensi anggota Komite Audit. Independence of the members of the Audit Committee.</p>	
<p>4. Komite Remunerasi dan Nominasi. Remuneration and Nomination Committee.</p>	<p>Mencakup antara lain: <i>Includes among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. <i>Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Remuneration and Nomination Committee.</i> 2. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. <i>Independence of the members of the Remuneration and Nomination Committee.</i> 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. <i>Description of the tasks and responsibilities.</i> 4. Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi. <i>Activities carried out by the Remuneration and Nomination Committee.</i> 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi. <i>Frequency of meetings and the attendance of the Remuneration and Nomination Committee.</i> 	<p>235-239</p>
<p>5. Komite Pemantau Risiko. Risk Monitoring Committee.</p>	<p>Mencakup antara lain: <i>Includes among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Asuransi dan Risiko Usaha. <i>Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Insurance and business Risk Committee.</i> 2. Independensi anggota Komite Asuransi dan Risiko Usaha. <i>Independence of the members of the Insurance and business Risk Committee.</i> 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. <i>Description of the tasks and responsibilities.</i> 4. Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Asuransi dan Risiko Usaha. <i>Activities carried out by the Insurance and business Risk Committee</i> 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Asuransi dan Risiko Usaha <i>Frequency of meetings and the attendance of the Insurance and business Risk Committee</i> 	<p>229-235</p>
<p>6. Komite-Komite Lain yang dimiliki Perusahaan. Other Committees in the Company.</p>	<p>Mencakup antara lain: <i>Includes among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite GCG. <i>Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Good Corporate Governance Committee.</i> 2. Independensi anggota Komite GCG. <i>Independence of the members of the Good Corporate Governance Committee.</i> 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. <i>Description of the tasks and responsibilities.</i> 4. Uraian pelaksanaan kegiatan Komite GCG. <i>Activities carried out by the Good Corporate Governance Committee.</i> 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite GCG. <i>Frequency of meetings and the attendance of the Good Corporate Governance Committee.</i> 	<p>239-245</p>
<p>7. Uraian mengenai kebijakan penetapan remunerasi bagi Direksi yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Description of policy on the stipulation for the remuneration of the board of Directors in regards with the company's performance.</p>	<p>Mencakup antara lain: <i>Includes among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur penetapan remunerasi tertuang dalam SOP. <i>Procedure for the determination of the remuneration is included in the standard operating procedure.</i> 2. Indikator kinerja untuk mengukur performance Direksi. <i>Indicators to measure the BOD performance.</i> 	<p>218-219</p>
<p>8. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan. Description of tasks and function of the Corporate Secretary.</p>	<p>Mencakup antara lain: <i>Includes among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan riwayat jabatan singkat Sekretaris Perusahaan. <i>Name and brief history of the Corporate Secretary.</i> 2. Uraian pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan 	<p>247</p>

REFERENSI BAPEPAM-LK BAPEPAM-LK CROSS REFERENCE

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal/Laporan Page/Report
	Description of the tasks performed by the Corporate Secretary.	
9. Uraian tentang Unit Audit Internal. Description of the company's Internal Audit unit.	Mencakup antara lain: Includes among others: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat ketua Unit Audit Internal. Name and brief history of the Head of the Internal Audit unit. 2. Struktur Unit Audit Internal. Structure of the Internal Audit unit. 3. Piagam Unit Audit Internal. Internal Audit Charter 4. Uraian pelaksanaan tugas. Activities carried out by the Internal Audit unit.	275, 278-284
10. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Description of the company's risk management.	Mencakup antara lain: Includes among others: 1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah). Explanation of the risks faced by the company (for example: risks caused by fluctuation of the exchange rate or interest rate, competition in business, supply of raw materials, provisions set by other countries or international regulations, and government policies). 2. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. Efforts to manage those risks.	288-297
11. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen. Description of the activities and expenses incurred in related to corporate social responsibility, particularly on commitment to consumer protection.	Mencakup antara lain informasi tentang: Information includes among others: 1. Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen. Setting up Center for Consumer Complaint. 2. Program peningkatan layanan kepada konsumen. Program for improving services to consumers. 3. Biaya yang telah dikeluarkan. Expenses incurred.	297 & Laporan Berkelanjutan 2010/ 2010 Sustainability Report
12. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan. Description on the activities and expenses incurred related to corporate social responsibility, particularly on "community development program" which have been carried out.	Mencakup antara lain informasi tentang: Information includes among others: 1. Mitra Usaha binaan Perusahaan. Supervised business Partner. 2. Program pengembangan pendidikan. Education development program. 3. Program perbaikan kesehatan. Health improvement program. 4. Program pengembangan seni budaya. Culture development program. 5. Biaya yang telah dikeluarkan. Expenses incurred.	297 - 298 & Laporan Berkelanjutan 2010/ 2010 Sustainability Report
13. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan. Description on the activities and expenses incurred related to corporate social responsibility, particularly on environmental activities.	Mencakup antara lain informasi tentang: Information includes among others: 1. Aktivitas pelestarian lingkungan. Preserving environment activity. 2. Aktivitas pengelolaan lingkungan. Environment management activity. 3. Sertifikasi atas pengelolaan lingkungan. Certification to Environment management. 4. Biaya yang telah dikeluarkan. Expenses incurred.	297 - 298 & Laporan Berkelanjutan 2010/ 2010 Sustainability Report
14. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat. Important cases faced by the Issuer or Public Company, current members of the board of Directors and board of Commissioners.	Mencakup antara lain: Information includes: 1. Pokok perkara/gugatan. material of the case/claim. 2. Kasus posisi. Case status. 3. Status penyelesaian perkara/gugatan. Status of settlement of case/claim. 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Potential impacts on the financial condition of the company.	275 - 277
15. Akses informasi dan data perusahaan. Access to corporate information and data.	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, buletin dsb. Description on the availability of access to corporate information and data to the public, for example through website, mass media, mailing list, bulletin etc.	180-181

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
16. Etika Perusahaan. Company Ethics.	Memuat uraian antara lain: Contains information on: 1. Keberadaan Code of Conduct. The existence of the Code of Conduct. 2. Isi Code of Conduct. Content of the Code of Conduct. 3. Penyebaran Code of Conduct kepada karyawan dan upaya penegakannya. Distribution of the Code of Conduct to the employees and efforts to uphold the Code. 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan yang dimiliki perusahaan. Statement concerning the corporate culture.	255-274
17. Pengungkapan mengenai whistleblowing system. Disclosure of whistleblowing system	Memuat uraian antara lain: Contains information on: 1. Keberadaan whistleblowing system. The existence of whistleblowing system 2. Mekanisme whistleblowing system. Mechanism of whistleblowing system 3. Penggunaan dan output whistleblowing system Utilisation and output of whistleblowing system	260-265
vii. Informasi Keuangan Financial Information		
1. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Statement by the board of Directors concerning the Responsibility of the board of Directors on the Financial Statement.	Kesesuaian dengan peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan. Compliance with bapepam Regulation No.VIII.G.11 on Responsibility of the board of Directors on the Financial Statement.	330
2. Opini akuntan atas laporan keuangan. Accountant's opinion on the financial statement.	Kesesuaian dengan SPAP-IAI. Compliance with SPAP-IAI.	331-332
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini. Description of the Independent Auditor in the Opinion.	Deskripsi memuat tentang: The description contains: 1. Nama & tanda tangan. Name and signature. 2. Tanggal Laporan Audit. Date of the audit report. 3. No. ijin KAP (jika ada). KAP license number (if any).	332
4. Laporan keuangan yang lengkap. Comprehensive financial statement.	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: Contains all elements of the financial statement: 1. Neraca. Balance sheet. 2. Laporan laba rugi. Profit loss statement. 3. Laporan perubahan ekuitas. Equity statement. 4. Laporan arus kas. Cash flow report. 5. Catatan atas laporan keuangan. Notes to the financial statement.	333-515
5. Perbandingan tingkat profitabilitas. Comparison of profitability.	Uraian mengenai perbandingan laba/rugi usaha tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Description of the gain/loss from operations of current year compare to that of previous year.	338-339
6. Penyajian Laporan Arus Kas. Presentation of Cash Flow Report.	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: Meets the following provisions: 1. Penggunaan metode langsung (direct method). Uses a direct method. 2. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Grouped into three categories of activity: operational activity, investment, and funding. 3. Pengungkapan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas. Disclosing activities that do not influence the cash flow. 4. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas kepada pelanggan (customer), karyawan, pemasok, dan pembayaran pajak selama tahun berjalan pada aktivitas operasi. Separating the presentation between cash receipt and or cash expended to the customer, employee, supplier, and payment of taxes during the current year for operational activities.	343-345

REFERENSI BAPEPAM-LK

BAPEPAM-LK CROSS REFERENCE

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
	<p>5. Penyajian penambahan dan pembayaran hutang jangka panjang serta dividen pada aktivitas pendanaan. Presenting the addition and payment of long-term debt as well as dividend in funding.</p>	
<p>7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Summary of Accounting Policy.</p>	<p>Meliputi sekurang-kurangnya: Includes at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dasar penyajian laporan keuangan. Basic concept in presenting a financial statement. 2. Pengakuan pendapatan dan beban. Recognition of income and overhead. 3. Penilaian investasi. Assessment for investment. 4. Penilaian dan metode penyusutan aset tetap. Assessment and method of depreciating fixed ass ets. 5. Dasar perhitungan laba per saham. Basis for calculating profit per share. 	353-396
<p>8. Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Transaction with Affiliated Parties.</p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain: Issues that should be disclosed are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian jenis transaksi, nama pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan jumlah piutang dan atau hutang yang terkait. Details on the type of transaction, name of the affiliated party, and total accounts receivable and or related debts. 2. Dirinci jumlah masing-masing pos aset, kewajiban, penjualan dan pembelian (beban) kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aset, kewajiban, penjualan dan pembelian (beban). Details on the individual assets, liabilities, sales and purchase (charge) to the affiliated parties and percentage against the total assets, liabilities, sales and purchases. 3. Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah hutang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut. Explanation of transactions that are not related to the core business and the amount of debt/accounts receivable in connection with the said transaction. 4. Sifat hubungan, jenis dan unsur transaksi hubungan istimewa. Nature of the affiliation, type and element of transaction with affiliated parties. 5. Kebijakan harga dan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan harga dan syarat tersebut sama dengan kebijakan harga dan syarat untuk transaksi dengan pihak ketiga. Price policy and terms of transaction and a statement on whether the application of said price policy and terms are the same as the price policy and terms for transaction with a third party. 	483-484
<p>9. Pengungkapan yang Berhubungan dengan Perpajakan. Disclosure related to tax issues</p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan selain jenis dan jumlah hutang pajak Information that should be disclosed other than type and total of tax obligation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Reconciliation between tax charge (income) and the result of multiplying the accounting profit with the current rate and disclosing the basis for calculating the tax rate. 2. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini. Fiscal reconciliation and calculation of current tax. 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi telah sesuai dengan SPT. Statement that the amount of Taxable Profit as calculated through reconciliation is in accordance with the Tax Return. 4. Rincian aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disajikan pada neraca untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari 	473-475

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
	<p>jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca. <i>Details of the assets and liabilities in deferred tax presented in the balance sheet in each period of presentation, and amount of charge (income) of deferred tax acknowledged in the profit loss statement if the said amount is not evident in the asset or liability of deferred tax acknowledged in the balance sheet.</i></p> <p>5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. <i>Disclosure of whether or not there is a tax dispute.</i></p>	
<p>10. Aset & Kewajiban Dalam Mata Uang Asing <i>Assets and Liabilities in Foreign Currency.</i></p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: <i>Information that should be disclosed:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian aset dan kewajiban dalam mata uang asing serta ekuivalennya dalam rupiah. <i>Details of the assets and liabilities in foreign currency and the equivalent in rupiah.</i> 2. Posisi neto dari aset dan kewajiban dalam mata uang asing. <i>Net position of assets and liabilities in foreign currency.</i> 3. Rincian kontrak valuta berjangka dan ekuivalen dalam rupiah. <i>Details of futures contract in foreign currency and equivalent in rupiah.</i> 4. Kebijakan manajemen risiko mata uang asing. <i>Risk management in foreign currency.</i> 5. Apabila lindung nilai tidak dilakukan, alasan untuk tidak melakukannya. <i>If hedging is not done, what is the reason?</i> 	485
<p>11. Perkembangan terakhir standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan lainnya <i>Update of the financial accounting standard and other regulations</i></p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: <i>Information that should be disclosed:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai standar akuntansi keuangan dan peraturan baru yang diterapkan dan mempengaruhi aktivitas perusahaan <i>Explanation on the implemented financial accounting standard and new regulations which gave impact to the company's activities</i> 2. Dampak penerapan standar akuntansi keuangan dan peraturan baru tersebut <i>Impact of the financial accounting standard and the new regulations.</i> 	509-513
<p>12. Komitmen dan Kontinjensi. <i>Commitment and Contingency.</i></p>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan: <i>Information that should be disclosed:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk perikatan berupa perjanjian sewa, keagenan dan distribusi, bantuan manajemen, teknis, royalti dan lisensi memuat uraian tentang pihak-pihak yang terkait, periode berlakunya perikatan, dasar penentuan kompensasi dan denda, jumlah beban atau pendapatan pada periode pelaporan, dan pembatasan/pembatasan lainnya. <i>For ties in the form of a lease agreement, agency and distribution, managerial assistance, technical, royalty and license, a description on the related parties, period of validity, basis for determining compensation and fine, amount of charge or income in the reporting period, and other restrictions.</i> 2. Untuk perikatan berupa Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: pembangunan pabrik, perjanjian pembelian, ikatan untuk investasi, dsb. memuat uraian tentang pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, periode berlakunya perikatan, nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi. <i>For ties in the form of a contract/agreement which requires the use of funds in the future, such as: factory construction, purchase agreement, investment, etc., a description on the related parties in the agreement, the period of validity, total value, currency, and portion already realized.</i> 	476

REFERENSI BAPEPAM-LK

BAPEPAM-LK CROSS REFERENCE

Kriteria Criteria	Penjelasan Description	Hal Page
	<p>3. Untuk pemberian jaminan/garansi memuat uraian tentang pihak-pihak yang dijamin dan yang menerima jaminan, yang dipisahkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga untuk pihak yang dijamin, latar belakang dikeluarkannya jaminan, periode berlakunya jaminan, nilai jaminan. <i>For giving warranty/guarantee, a description on the parties to be covered and the party receiving the guarantee, and separating the affiliated parties and third party for the party being covered, the reason for issuing guarantee, period of validity of the guarantee, and value (amount) of the guarantee.</i></p> <p>4. Perkara/sengketa hukum dengan mengungkapkan pihak-pihak yang terkait, jumlah yang diperkarakan, serta latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (<i>legal opinion</i>). <i>Lawsuits/disputes, disclosing the related parties, the amount being disputed, the background, content and status of the case, and a legal opinion.</i></p> <p>5. Untuk peraturan pemerintah yang mengikat perusahaan seperti masalah lingkungan hidup, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya terhadap perusahaan. <i>For government regulations that bind the company, for example in environmental issues, a brief description of the regulation and its impact on the company.</i></p>	



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN

Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130

Tel: (021) 633 6789, 633 2666

Fax: (021) 634 6704

Contact Center: (021) 265 33 555

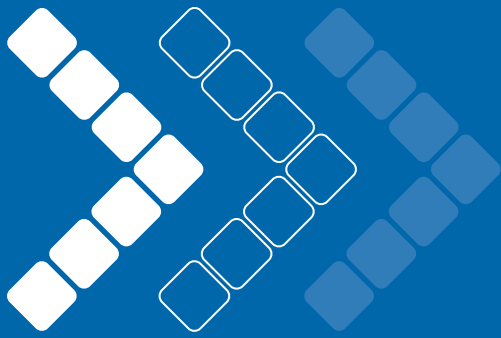
www.btn.co.id

Laporan Tahunan **2010**
Annual Report

Moving Towards A Brighter Future

2009 Laporan Tahunan
Annual Report





Profil Kami

Our Profile

2. Moving Towards a Brighter Future
4. Sekilas Bank BTN
6. Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan
10. Kilas Balik Bank BTN
12. Ikhtisar Keuangan
14. Informasi Pemegang Saham dan Efek yang Diterbitkan
20. Pencapaian 2009
22. Peristiwa Penting 2009
26. Penghargaan dan Sertifikasi 2009
28. Laporan Dewan Komisaris
34. Laporan Direksi

2. Moving Towards a Brighter Future
4. Bank BTN in Brief
6. Vision, Mission and Corporate Values
10. Bank BTN Milestones
12. Financial Highlights
14. Shareholders and Securities Issued Information
20. 2009 Achievements
22. 2009 Significant Events
26. 2009 Awards and Certification
28. Board of Commissioners' Report
34. Board of Directors' Report

Tinjauan Bisnis & Operasional

Business & Operational Overview

43. Perbankan Konsumer
53. Perbankan Komersial
59. Unit Usaha Syariah
65. Pemasaran

43. Consumer Banking
53. Commercial Banking
59. Sharia Business Unit
65. Marketing

Tinjauan Fungsional

Functional Overview

70. Teknologi dan Operasi
74. Sumber Daya Manusia
83. Manajemen Risiko
94. Jaringan

70. Technology and Operations
74. Human Resources
83. Risk Management
94. Network

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Report

102. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
108. Struktur Tata Kelola Perusahaan
123. Laporan Kepatuhan
132. Komite-Komite di Bawah Komisaris
143. Komite-Komite di Bawah Direksi
148. Self-Assessment Terhadap Praktik GCG

102. Corporate Governance Implementation
108. Corporate Governance Structure
123. Compliance Report
132. Committees under the Board of Commissioners
143. Committees under the Board of Directors
148. Self-Assessment on GCG Practice



irfindo
*Investor Relations, Financial
& Corporate Communications*

Daftar Isi Contents



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

- 154. Filosofi CSR
- 156. Berkontribusi melalui Komitmen Berkesinambungan
- 159. Melayani dengan Sepenuh Hati

- 154. CSR Philosophy
- 156. Contributing through Sustainability Commitment
- 159. Serving from the Heart

Prospek Usaha, Keunggulan Kompetitif dan Strategi

Business Prospect, Competitive Advantage and Strategy

- 164. Prospek Usaha
- 165. Keunggulan Kompetitif
- 168. Strategi

- 164. Business Prospects
- 165. Competitive Advantage
- 168. Strategy

Analisa dan Pembahasan Manajemen

Management Discussion and Analysis

- 174. Tinjauan Keuangan
- 186. Tanggung Jawab Laporan Tahunan
- 187. Laporan Keuangan 2009

- 174. Financial Overview
- 186. Responsibility for Annual Reporting
- 187. 2009 Financial Statements

Data Perseroan

Corporate Data

- 338. Struktur Organisasi
- 340. Profil Dewan Komisaris
- 344. Profil Direksi
- 349. Profil Sekretaris Perusahaan
- 349. Profil Kepala Divisi Internal Audit
- 350. Profil Komite-Komite
- 353. Profil Dewan Pengawas Syariah
- 354. Produk dan Layanan
- 358. Kantor Cabang

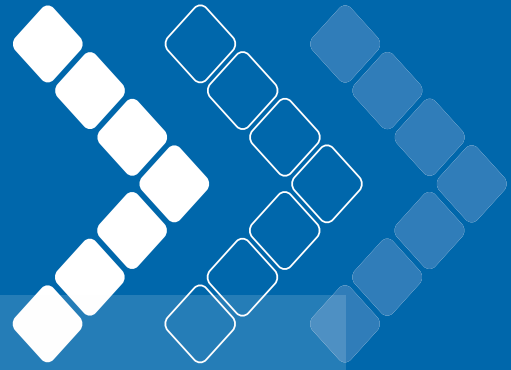
- 338. Organizational Structure
- 340. Board of Commissioners Profiles
- 344. Board of Directors Profiles
- 349. Corporate Secretary Profile
- 349. Head of Internal Audit Division Profile
- 350. Committee Profiles
- 352. Sharia Supervisory Board's Profile
- 354. Products and Services
- 358. Branch Offices



371 Referensi
BAPEPAM-LK

BAPEPAM-LK Cross Reference

MOVING TOWARDS A BRIGHTER FUTURE



Tahun 2009 merupakan babak baru bagi **Bank BTN sebagai bank pembiayaan perumahan terbesar di Indonesia**. Selain berhasil tumbuh di atas rata-rata perbankan, Bank BTN juga mempelopori dan menjadi bank pertama di Indonesia yang sukses melaksanakan sekuritisasi aset melalui transaksi **Kontrak Investasi Kolektif Efek Berangun Aset (KIK-EBA)**.

Menutup tahun 2009, Bank BTN melangkah pasti memasuki arena pasar modal setelah berhasil melalui proses **IPO (Penawaran Saham Perdana)** di Bursa Efek Indonesia pada 17 Desember 2009. Lembaran baru bagi Bank BTN ini semakin memantapkan langkah ke depan untuk terus bergerak dinamis di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global.

Bagi Bank BTN, pertumbuhan tidak sekedar profitabilitas, melainkan pemberian nilai tambah bagi **karyawan, nasabah, pemegang saham, komunitas, lingkungan dan bangsa** melalui kontribusi sebagai warga korporat yang baik.

Ke depan, sebagai perusahaan publik, Bank BTN berkomitmen untuk terus mengukir prestasi yang lebih baik berbekal sumber daya manusia dan permodalan yang kokoh, bersinergi dengan kekuatan strategi manajerial yang handal serta kepedulian pada lingkungan sekitar guna meraih pertumbuhan yang berkelanjutan menuju masa depan yang penuh harapan.



SEBUAH RENCANA BESAR UNTUK KELUARGA INDONESIA

Bank BTN reached a new milestone in 2009 as the biggest housing finance bank in Indonesia. Apart from its beyond average growth in the banking sector, Bank BTN became the first bank in Indonesia with the ability to execute asset securitization through an Assets-Backed Securities Collective Investment Contract transaction (KIK - EBA).

By the end of 2009, Bank BTN confidently entered the capital market after undergoing successful Initial Public Offering (IPO) on the Indonesia Stock Exchange on 17 December 2009. This new chapter will secure Bank BTN's positioning to take dynamic steps forward despite the uncertainty of the global economic condition. For Bank BTN, growth has never been merely profit oriented, but also includes increasing the added value for employees, customers, shareholders, communities, the environment and the nation through its contributions as a good corporate citizen.

Moving forward, as a public company, Bank BTN will uphold its commitment to reach better achievements through solid development of its human resources and capital, by synergizing a strong, reliable managerial strategy with environmental awareness to achieve a sustainable growth towards a brighter future.

SEKILAS BANK BTN Bank BTN in Brief

Bank BTN melangkah maju sebagai perusahaan publik dengan mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 17 Desember 2009. Seiring dengan langkah tersebut, Bank BTN tetap fokus pada inti bisnisnya sejak 1976 sebagai penyedia kredit perumahan dan menjadi market leader dalam pembiayaan perumahan hingga saat ini. Fokus bisnis ini juga ditegaskan dengan memelopori sekuritisasi aset di Indonesia melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK EBA) pada 2009. Kinerja Bank BTN terus bertumbuh dan pada tahun 2009 berhasil masuk dalam jajaran 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi jumlah aset dan jumlah kredit yang disalurkan.

Bank BTN will move forward as a public company, having listed its initial shares on the Indonesia Stock Exchange on 17 December 2009. Bank BTN will continue to focus on its core business, which it has adhered to since 1976, as a mortgage provider, and the goal to become the market leader in housing finance. Bank BTN established its position in the market by pioneering asset securitization in Indonesia through Asset-Backed Securities Collective Investment Contract transactions (KIK EBA) in 2009. The Bank's performance continues to grow, and in 2009 it became one of the 10 biggest banks in Indonesia in disbursed asset and loan value.

Perbankan Konsumer

Consumer Banking



Segmentasi Segmentation

Layanan terbaik bagi nasabah baik individu maupun perusahaan

Best services for both individual and corporate customers

Jaringan Distribusi Nasional National Distribution Network

Outlet sejumlah 265 dengan akses jaringan lebih dari 20.000 ATM dan dukungan layanan *online* di 2.045 Kantor Pos seluruh Indonesia

265 Outlets with access to more than 20,000 ATMs and online service support in 2,045 post offices throughout Indonesia

Pengembangan Teknologi serta Produk dan Layanan Baru

Technology Development and New Products and Services

Berinovasi dengan teknologi untuk menambah fitur-fitur produk serta penyempurnaan layanan seperti Kartu Debit BTN Visa, Layanan 151 dan pengembangan eLoan.

Technological innovations to increase product features and enhance services, such as BTN Visa Debit Card, 151 Service and eLoan development

Perbankan Komersial

Commercial Banking



Segmentasi Segmentation

Fokus pada pinjaman untuk nasabah individu dan perusahaan

Focus on individual and corporate loans

Pertumbuhan Kredit Konstruksi Construction Loan Growth

Kredit konstruksi perumahan terus bertumbuh dari tahun ke tahun, pada 2009 kredit baru yang disalurkan meningkat sebesar Rp 3,91 triliun, meningkat 18,83% dibanding tahun sebelumnya

Housing construction loans continue to grow. In 2009 the disbursed value of new loans rose to Rp 3.91 trillion, an 18.83% increase compared to the previous year

Kualitas Kredit Konstruksi Construction Loan Quality

Pertumbuhan kredit konstruksi yang tinggi juga didukung dengan kualitas kredit yang terjaga baik dengan NPL sebesar 2,72 % pada akhir 2009

The high construction loan growth was also supported by a well-maintained loan quality with NPL at 2.72% by the end of 2009

Perbankan Syariah

Sharia Banking



Bisnis Inti Core Business

Mengutamakan prinsip hukum Islam untuk memberi layanan terbaik bagi nasabah individu maupun perusahaan

Founded on the principles of Islamic law to deliver the best services for individual and corporate customers

Jaringan Distribusi Syariah Sharia Distribution Network

Jaringannya tersebar di 20 Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 119 Kantor Layanan Syariah (KLS)

Networks spread in 20 Sharia Branch Offices and 119 Sharia Service Offices

Pertumbuhan Unit Usaha Syariah Sharia Business Unit Growth

Unit Usaha Syariah terus berkembang secara signifikan dari tahun ke tahun, mencapai aset sebesar 2,26 triliun pada tahun 2009

Sharia Business Unit continuously develops significantly from year to year, reaching the assets of 2.26 trillion in 2009

VISI

Vision

Menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan

To be the leading bank in housing finance

MISI

Mission

1. Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan industri terkait, pembiayaan konsumsi dan usaha kecil menengah.
 2. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.
 3. Menyiapkan dan mengembangkan *human capital yang* berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
 4. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance* untuk meningkatkan *shareholder value*.
 5. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.
-
1. Providing pre-eminent service in housing finance and related industries, commercial loans and SME loans.
 2. Improving competitive excellence through continuous product and service innovation, and the latest technology-based strategic networks.
 3. Preparing and developing qualified, professional and high integrity human capital.
 4. Executing banking management in accordance with prudential and good corporate governance principles to increase shareholder value.
 5. Caring for community interests and the environment.



KPR Bank BTN

mewujudkan kebahagiaan
berjuta keluarga Indonesia

AYO ke BANK
www.btn.co.id

Bank  **BTN**

NILAI - NILAI PERUSAHAAN

Corporate Values

6 NILAI DASAR

6 CORE VALUES

PELAYANAN PRIMA
SERVICE EXCELLENCE

INOVASI
INNOVATION

KETELADANAN
EXEMPLARY BEHAVIOR

PROFESIONALISME
PROFESSIONALISM

INTEGRITAS
INTEGRITY

KERJASAMA
TEAMWORK

12 PERILAKU UTAMA

12 MAIN CONDUCT

- Ramah, sopan dan bersahabat
- Hospitable, polite and friendly
- Peduli, proaktif dan cepat tanggap
- Caring, pro-active and responsive

- Berinisiatif melakukan penyempurnaan
- Taking initiative to improve
- Berorientasi menciptakan nilai tambah
- Oriented to create added value

- Menjadi contoh dalam berperilaku baik dan benar
- Being a role model for good and proper behaviour
- Memotivasi penerapan nilai-nilai budaya kerja
- Spurring implementation of working culture values

- Kompeten dan bertanggungjawab
- Being competent and responsible
- Bekerja cerdas dan tuntas
- Working smart and thoroughly

- Konsisten dan disiplin
- Being consistent and disciplined
- Jujur dan berdedikasi
- Being honest and dedicated

- Tulus dan terbuka
- Being sincere and open-minded
- Saling percaya dan menghargai
- Trusting and respecting each other



PELAYANAN PRIMA SERVICE EXCELLENCE

Memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan (internal dan eksternal)

Delivering service beyond customers' expectations (both internally and externally)

INOVASI INNOVATION

Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi perusahaan

Constantly developing new ideas and sustainable improvement, thus delivering added value to Bank BTN

KETELADANAN

EXEMPLARY BEHAVIOUR

Mulai dari diri sendiri menjadi suri tauladan dalam berperilaku yang mencerminkan Nilai-nilai Budaya Kerja Bank BTN bagi insan Bank BTN dan pihak-pihak yang terkait

Starting with ourselves as role models of the values reflected in our work culture for staff and the parties concerned

PROFESIONALISME

PROFESSIONALISM

Kompeten di bidangnya dan senantiasa mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja terbaik serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan seluruh insan Bank BTN

Being competent in own expertise and continuously improving ourselves to yield the best performance and deliver added value for the company and everyone in Bank BTN

INTEGRITAS

INTEGRITY

Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji

Being consistent with company regulations, professional code of ethics and good principles in mindset, expression and action

KERJASAMA

TEAMWORK

Membangun hubungan yang tulus dan terbuka dengan sesama insan Bank BTN dan pihak lain dilandasi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama

Building sincere and open relationships between the people of Bank BTN, and with other parties, based on trustworthy respect for others to achieve common goals

KILAS BALIK BANK BTN

Bank BTN Milestones

1897

PENDIRIAN BANK BTN
Bank BTN didirikan dengan nama 'POSTSPAARBANK'.

COMPANY ESTABLISHMENT
The company was established under the name 'POSTSPAARBANK'.

1942

TYOKIN KYOKU
Jepang membekukan kegiatan 'POSTSPAARBANK' dan menggantinya dengan nama TYOKIN KYOKU.

TYOKIN KYOKU
Japan froze all activities undertaken by 'POSTSPAARBANK' and changed the name to TYOKIN KYOKU.

1950

BANK TABUNGAN POS
Diubah menjadi Bank Tabungan Pos (UU Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Pebruari 1950).

BANK TABUNGAN POS
Change of name to Bank Tabungan Pos (Emergency Law No. 9 Year 1950 dated 9 February 1950).

1963

BANK TABUNGAN NEGARA
Perubahan nama Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara atau BTN (Perpu No. 4 tahun 1963 dan UU No.2 tahun 1964).

BANK TABUNGAN NEGARA
Change of name from Bank Tabungan Pos to Bank Tabungan Negara or BTN (Government Regulation No. 4 year 1963 and Law No. 2 year 1964).

1968

BANK MILIK NEGARA
Bank BTN sebagai Bank Milik Negara (UU No. 20 Tahun 1968).

STATE-OWNED BANK
Bank BTN became a State-Owned Bank (Law No. 20 Year 1968)

1974

PELAYANAN KPR
Bank BTN ditugaskan memberikan pelayanan KPR sesuai Surat Menkeu No. B-49/MK/IV/1/1974 tanggal 29 Januari 1974 (realisasi KPR pertama tanggal 10 Desember 1976).

MORTGAGE SERVICES
Bank BTN was required by the government to provide mortgages according to Minister of Finance Decree No. B-49/MK/IV/1/1974 dated 29 January 1974 (first mortgage was extended in 10 December 1976).

1989

BANK UMUM
Bank BTN beroperasi sebagai Bank Umum dan mulai menerbitkan obligasi.

COMMERCIAL BANK
Bank BTN first operated as a commercial bank and started issuing bonds.

1992

STATUS HUKUM
Status hukum Bank BTN berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

LEGAL STATUS
Legal status of Bank BTN changed to a Limited Company.



1994

BANK DEVISA

Bank BTN mendapat ijin sebagai Bank Devisa.

FOREIGN EXCHANGE BANK

Bank BTN obtained the license to operate as a Foreign Exchange Bank.

2000

REKAPITALISASI

Bank BTN ikut dalam program rekapitalisasi.

RECAPITALIZATION

Bank BTN joined the recapitalization program.

2002

PINJAMAN TANPA SUBSIDI

Bank BTN sebagai Bank Umum dengan fokus pinjaman tanpa subsidi untuk perumahan (berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-554/M-MBU/2002 tanggal 21 Agustus 2002).

NON-SUBSIDIZED LOANS

Bank BTN, as a commercial bank, focused on non-subsidized housing loans (based on Minister of State-Owned Enterprise Decree No. S-554/M-MBU/2002 dated 21 August 2002).

2003

RESTRUKTURISASI

Restrukturisasi perusahaan secara menyeluruh yang tertuang dalam Persetujuan RJP Tahun 2003-2007 (berdasarkan Surat Menteri BUMN No. S-984/M-MBU/2003 tanggal 31 Maret 2003 dan ketetapan Direksi Bank BTN No. 306/DIR/IR-BTN/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004 perihal revisi RJP Bank BTN Tahun 2003-2007).

RESTRUCTURING

Restructured Bank, as written in the approval of the 2003-2007 RJP (based on Minister of State-Owned Enterprise Decree No. S-984/M-MBU/2003 dated 31 March 2003 and Bank BTN Board of Directors' Resolution No. 306/DIR/IR-BTN/XII/2004 dated 3 December 2004, regarding the revision of RJP of Bank BTN for the year 2003-2007).

2005

UNIT USAHA SYARIAH

Bank BTN membuka Unit Usaha Syariah

SHARIA UNIT

Bank BTN launched its Sharia Business Unit.

2009

SEKURITISASI ASET

DAN PENAWARAN SAHAM PERDANA

Bank BTN menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK-EBA) di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun yang sama, Bank BTN melepaskan 2.360.057.000 lembar saham, setara dengan 27,08% dari total saham Bank BTN, dan tercatat sebagai emisi IPO terbesar di tahun 2009 dengan nilai dana sebesar Rp 1,88 triliun.

ASSET SECURITIZATION

AND INITIAL PUBLIC OFFERING

Bank BTN became the first bank in Indonesia to list Asset-Backed Securities Collective Investment Contract transactions on the Indonesian Stock Exchange. In the same year, Bank BTN issued 2,360,057,000 shares, representing 27.08% of Bank BTN's total shares, and was the biggest IPO issuer in 2009 with total funds of Rp 1.88 trillion.

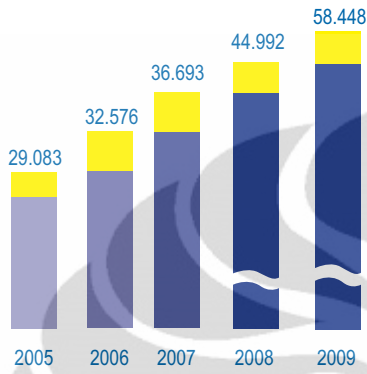
IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights

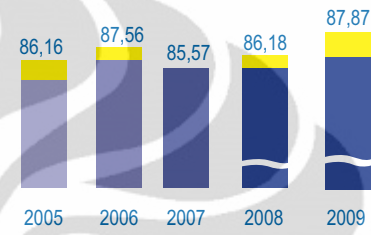
Keterangan	2009	2008	2007	2006	2005	REMARKS
dalam Miliar Rupiah						
in Billion Rupiah						
LAPORAN LABA RUGI			STATEMENT OF INCOME			
Pendapatan Bunga & Bagi Hasil	5.730	4.567	3.931	4.163	3.064	Interest Income & Profit Sharing
Beban Bunga	3.428	2.607	2.178	2.539	1.696	Interest Expense
Pendapatan Bunga Bersih	2.302	1.960	1.753	1.624	1.368	Net Interest Income
Pendapatan Operasional Lainnya	265	217	178	161	181	Other Operating Income
Beban Operasional Lainnya	1.763	1.502	1.342	1.176	1.097	Other Operating Expenses
Pembalikan (Beban) Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif dan Non Produktif	(53)	5	8	(57)	(2)	Reversal of Allowance (Provision) for Possible Losses on Earning and Non-Earning Assets
Laba (Rugi) Operasional	739	670	591	539	449	Income from Operations
Pendapatan (Beban) Non Operasional - bersih	6	(4)	11	4	3	Non-Operating Income (Expense)-net
Laba Sebelum Pajak	746	665	601	543	452	Income/Before Income Tax
Pendapatan (Beban) Pajak Tangguhan	(12)	(57)	(39)	(23)	(16)	Deferred Tax Income/Expenses
Taksiran Pajak Penghasilan	228	292	238	155	0	Provision for Income Tax
Laba (Rugi) Setelah Pajak	490	430	402	365	437	Net Income/(Loss) After Tax
Laba Bersih Per Saham Dasar (Nilai Penuh)	76	68	322	292	349	Basic Earnings Per Share (Full Amount)
NERACA			BALANCE SHEET			
Aktiva Produktif	53.805	41.526	33.088	30.040	26.973	Earning Assets
Kredit yang diberikan	38.737	30.774	21.796	17.829	15.273	Loans
Pembiayaan Syariah	1.996	1.251	547	257	91	Sharia Financing
Penempatan	137	132	55	294	102	Placement
Surat Berharga	5.488	1.737	1.911	1.752	1.977	Marketable Securities
Obligasi Pemerintah	7.380	7.577	8.618	9.738	9.484	Government Bonds
Total Aktiva	58.448	44.992	36.693	32.576	29.083	Total Assets
Dana Masyarakat	40.215	31.448	24.188	21.594	19.464	Third Party Fund
Giro	7.364	2.853	2.246	1.637	1.242	Current Accounts
Tabungan	8.941	7.375	7.156	6.057	5.513	Saving Accounts
Deposito	23.910	21.220	14.786	13.900	12.709	Deposit Accounts
Surat Berharga yang Diterbitkan	3.222	2.496	3.235	3.142	2.088	Securities Issued
Pinjaman yang Diterima	2.984	3.281	3.626	3.704	3.917	Fund Borrowings
Pinjaman Subordinasi	0	250	250	249	270	Subordinated Debt
Total Kewajiban	53.055	41.914	33.906	30.816	27.602	Total Liabilities
Ekuitas	5.393	3.078	2.787	1.760	1.481	Equity
RASIO KEUANGAN (%)			FINANCIAL RATIOS			
Imbal Hasil Rata-rata Aktiva (ROA)	1,47	1,80	1,89	1,78	1,66	Return On Assets (ROA)
Imbal Hasil Rata-rata Ekuitas (ROE)	18,27	19,64	21,54	23,36	33,66	Return On Equity (ROE)
Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM)	4,65	5,08	5,31	5,13	5,27	Net Interest Margin (NIM)
Rasio Kecukupan Modal (CAR)	21,54	16,14	21,86	18,23	16,60	Capital Adequacy Ratio (CAR)
Marjin Keuntungan (Profit Margin)	12,14	13,98	14,53	12,54	13,86	Profit Margin
Rasio Kredit Bermasalah (NPL) - Gross	3,36	3,20	4,05	3,91	4,04	NPL - Gross
Rasio Kredit Bermasalah (NPL) - Netto	2,75	2,66	2,81	1,77	1,18	NPL - Netto
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	87,87	86,18	85,57	87,56	86,16	Operating Expense to Operating Income
Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	101,29	101,83	92,38	83,75	78,93	Loan to Deposit Ratio (LDR)



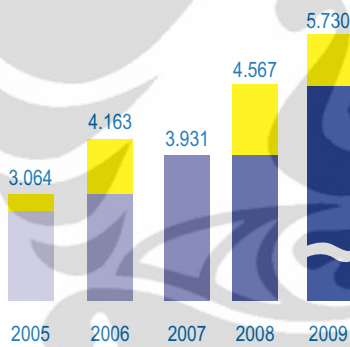
TOTAL AKTIVA (dalam Rp miliar)
TOTAL ASSETS (in Rp billion)



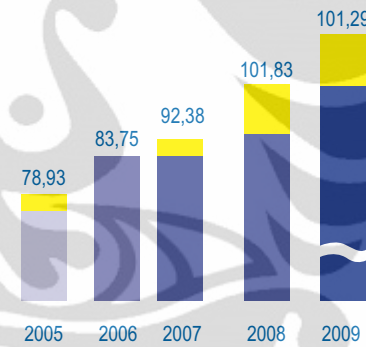
BOPO (%)
BOPO(%)



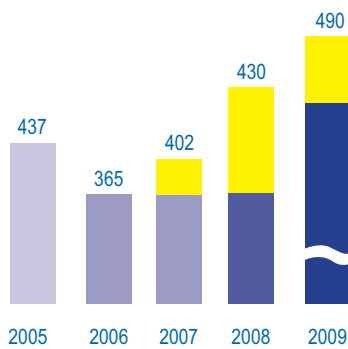
PENDAPATAN BUNGA (dalam Rp miliar)
INTEREST INCOME (in Rp billion)



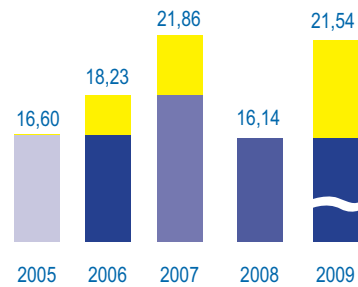
LDR (%)
LDR (%)



LABA BERSIH (dalam Rp miliar)
NET INCOME (in Rp billion)



Posisi CAR (%)
CAR (%)



INFORMASI PEMEGANG SAHAM DAN INFORMASI EFEK YANG DITERBITKAN

Shareholders and Securities Issued Information

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Selama tahun 2009, Bank BTN menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 (dua) kali pada 8 Mei 2009 dan 15 Desember 2009, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dilakukan sekali yakni pada 6 Oktober 2009 yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Peningkatan Modal Disetor yang berasal dari Cadangan atau Retained Earnings; RUPS menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia, yaitu dari Rp 2.559.804.000.000 yang terdiri atas 5.119.608.000 saham menjadi Rp 3.177.000.000.000 (tiga triliun seratus tujuh puluh miliar rupiah) yang terdiri atas 6.354.000.000 saham yang berasal dari:
 - a. Kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp 289.888.397.772
 - b. Kapitalisasi cadangan tujuan sebesar Rp 129.142.251.563
 - c. Kapitalisasi saldo laba periode 1 Januari 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 sebesar Rp 198.165.350.665
2. Perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero).
 - a. RUPS menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka antara lain disesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 dan perubahan status PT Bank Tabungan Negara (Persero) dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 - b. RUPS menyetujui perubahan nilai nominal saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang semula Rp 169.595,99 (seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen) setiap saham menjadi sebesar Rp 500 (lima ratus rupiah) setiap saham.
 - c. Menyetujui penerbitan 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna senilai Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan saham Seri B pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) berdasarkan ketentuan pasar modal.
3. Menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

During 2009, Bank BTN held two General Meetings of Shareholders, on May 8, 2009 and December 15, 2009, and one Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on October 6, 2009, which resulted in the following:

1. Paid in Capital increases originating from Reserves or Retained Earning; Shareholders approved an increase in Issued and Paid-in Capital in PT Bank Tabungan Negara (Persero) conducted by the Republic of Indonesia, from Rp 2,559,804,000,000 (5,119,608,000 shares) to Rp 3,177,000,000,000 (three trillion and one hundred seventy seven billion rupiah) which consist of 6,354,000,000 shares, originating from:
 - a. Capitalization of general reserves amounting to Rp 289,888,397,772
 - b. Capitalization of special reserves amounting to Rp 129,142,251,563
 - c. Capitalization of retained earnings from January 1, 2009 through June 30, 2009, amounting to Rp 198,165,350,665
2. Changes to the Articles of Association of PT Bank Tabungan Negara (Persero):
 - a. GMS approved changing the Articles of Association of PT Bank Tabungan Negara (Persero) allowing the Bank to be listed publicly, in accordance with Bapepam-LK Regulation No. IX.J.1, and changing the status of PT Bank Tabungan Negara (Persero) from a private company to a public listed company.
 - b. GMS approved changing the nominal value of PT Bank Tabungan Negara (Persero) shares from Rp 169,595.99 (one hundred sixty nine and five hundred ninety five point ninety nine rupiah) per share to Rp 500 (five hundred rupiah) per share.
 - c. Approved the issuance of 1 Dwiwarna Series A share valued at Rp 500 (five hundred rupiah) and Series B shares in PT Bank Tabungan Negara (Persero) based on capital market terms.
3. Approved the issuance of a maximum of 30% (thirty percent) new shares of the total issued in PT Bank Bank Tabungan Negara (Persero) and fully paid-up capital after the issuance of new shares or a maximum of 2,723,142,857 shares, resulting in ownership by the Republic of Indonesia of a minimum of 70% (Seventy Percent), or 6,354,000,000 shares, of the total issued and fully paid-up capital after the new issuance.

Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Options Plan/MESOP*). Persetujuan tersebut berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada PT Bank Tabungan Negara (Persero).

The newly issued shares were offered to the public through IPO, which included shares for Management and Employee Stock Allocation (MESA) and shares for Management and Employee Stock Option Plan (MESOP). The approval became effective after the issuance of the government regulation regarding the amendment of share ownership structures through IPO of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

- | | |
|---|---|
| <p>4 Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum saham perdana termasuk jumlah saham Program MESA dan MESOP.</p> | <p>4 Authorized the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara to declare the total issued shares in the IPO, including the total shares issued through the MESA and MESOP programs.</p> |
| <p>5 Memberikan kuasa kepada Direksi PT Bank Tabungan Negara untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, kecuali penetapan harga penawaran dan kepastian jumlah saham yang ditawarkan melalui penawaran umum, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana (IPO) termasuk tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Mencatatkan saham-saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) dalam Penitipan Kolektif sesuai peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia; b Mencatatkan seluruh saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; | <p>5 Authorized the Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara to implement all necessary actions in connection with the IPO, with the exception of deciding on the share price and amount of shares offered, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Record the shares of PT Bank Tabungan Negara (Persero) in Collective Custody in accordance with the Indonesian Central Securities Depository's regulations (KSEI); b Record the PT Bank Tabungan Negara (Persero) shares that were issued and fully paid-up to the Indonesia Stock Exchange; |
| <p>6 Persetujuan Program MESA dan MESOP
Menyetujui program kepemilikan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (<i>Management and Employee Stock Allocation/MESA</i>) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (<i>Management and Employee Stock Options Plan/MESOP</i>) dalam rangka IPO dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Program MESA diberikan maksimal sebesar 9,62% (sembilan koma enam puluh dua persen) dari saham baru yang diterbitkan dan program MESOP maksimal sebesar 4% (empat persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh. b Peserta program MESA dan MESOP adalah Karyawan tetap yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite kecuali Komisaris Independen dan anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara. c Diskon harga saham untuk pogram MESA sebesar 20% (dua puluh persen) dengan masa lock up selama 6 bulan. Diskon dimaksud menjadi beban perusahaan. d Hak opsi program MESOP dapat dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30%, dan tahap III sebesar | <p>6 Approval of MESA and MESOP Programs
To approve stock ownership in PT Bank Tabungan Negara (Persero) by management and employees through the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program and under the granting of option rights for the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) in connection with the IPO, with following terms:</p> <ul style="list-style-type: none"> a The MESA program is allocated a maximum of 9.62% (nine point sixty- two percent) of newly issued shares and a maximum of 4% (four percent) of the issued and fully paid-up capital was allocated for the MESOP program. b Participant in the MESA and MESOP programs are registered employees as of September 30, 2009 and the Board of Directors, the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, Secretary of the Board of Commissioners and Committee members except Independent Commissioner and member of Audit Committee of PT Bank Tabungan Negara. c Stock price discount in the MESA program amounting to 20% (twenty percent) with a lockup period of six months. The discount will be charged as the Bank's expenses. d The MESOP program can be executed in three stages. Stage I amounting to 40%, stage II |

30%. Harga pelaksanaan sesuai peraturan dan ketentuan berlaku. Umur opsi 5 tahun sejak diterbitkan dengan vesting period (masa tunggu) 1 (satu) tahun yang mana dalam periode tersebut hak opsi tidak dapat digunakan untuk membeli saham perusahaan.

- e Alokasi saham MESA dan MESOP antara Manajemen dan Karyawan PT Bank Tabungan Negara adalah 5%:95% dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajiban, prestasi kerja, masa kerja, jabatan, hak dan kewajiban.
- f Pengawasan program MESA dan MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada Pemegang Saham.

amounting to 30% and stage III amounting to 30%. The exercise price must comply with the prevailing rules and regulations. The option will expire in five years from the date of issuance, with a one-year vesting period during which the option is not exercisable.

- e MESA and MESOP stock allocations to management and employees of PT Bank Tabungan Negara is 5%:95% and should be justly implemented based on fairness, work achievement, work position, rights and obligation.
- f The implementation of MESA and MESOP is monitored by the Board of Commissioners and its implementation must comply with prevailing regulations, which will be reported to the stockholders.

PEMBAYARAN DIVIDEN

Bank BTN akan melakukan kebijakan dividen sebagai berikut:

- 1 Membayarkan dividen tunai minimum 25% dari laba bersih setiap tahunnya, yang besarnya akan diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi.
- 2 Keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank BTN setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2010

RUPS Tahunan akan diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2010 di Jakarta

Nama Perusahaan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel. 62-21 6336789, 6332666
Fax. 62-21 6346704

Pendirian Perusahaan

9 Februari 1950
Komposisi Pemegang Saham
(per 31 Desember 2009)

- Negara Republik 72,92%
- Karyawan dan Direksi 2,60%
- Masyarakat 24,48%

Pencatatan Saham

Bursa Efek Indonesia

Jenis Usaha

Bank Umum

Kode Saham

BBTN

DIVIDEND PAYMENT

Bank BTN will carry out its dividend policy as following:

- 1 Pay a minimum of 25% of the net income as cash dividends each year. The exact amount will be decided after the GMS based on recommendations from the Board of Directors.
- 2 Dividend payments are based on the profit, financial conditions and liquidity, compliance with others statutory regulations and factors considered relevant by the Board of Directors of the Company after GMS approval.

The 2010 Annual General Meeting of Shareholders

The AGMS 2010 will be held on May 19th 2010 in Jakarta

Name of Company

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel. 62-21 6336789, 6332666
Fax. 62-21 6346704

Establishment Date

February 9, 1950
The Ownership Composition
(as of December 31, 2009)

- Republic of Indonesia 72.92%
- Employees and BOD 2.60%
- Public 24.48%

Listing

Indonesia Stock Exchange

Line of Business

Commercial Bank

Ticker Code

BBTN

Akuntan Publik

Purwanto, Sarwoko & Sandjaja
anggota Ernst & Young Global
Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Menara 2, Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 -53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : 62-21 5289 5000
Fax. : 62-21 5289 4100

Biro Administrasi Efek

PT. Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav 34 -35
Jakarta 10220, Indonesia
Tel . 62-21 570 9009
Fax. 62-21 570 9026

Pemeringkat Efek

PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Setiabudi Atrium Suite 809 – 810
Jl. HR Rasuna Said Kav. 62
Jakarta 12920, Indonesia
Tel. 62-21 521 0077
Fax. 62-21 521 0078

Sekretaris Perusahaan

Rinna Mona Lindyana
Menara Bank BTN Lantai 20
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel. 62-21 6336789, 6332666
Fax. 62-21 6346704

Hubungan Investor

Nofri R. Putra
Menara Bank BTN Lantai 20
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel. 62-21 638 70107
Fax. 62-21 638 70104

Situs Perusahaan

www.btn.co.id

Contact Centre

62-21 265 33555

Public Accountant

Purwanto, Sarwoko & Sandjaja
member Ernst & Young Global
Indonesia Stock Exchange Building, Jakarta
Menara 2, 7th Fl.
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 -53
Jakarta 12190, Indonesia
Tel : 62-21 5289 5000
Fax. : 62-21 5289 4100

Share Register

PT. Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav 34 -35
Jakarta 10220, Indonesia
Tel . 62-21 570 9009
Fax. 62-21 570 9026

Credit Rating

PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)
Setiabudi Atrium Suite 809 – 810
Jl. HR Rasuna Said Kav. 62
Jakarta 12920, Indonesia
Tel. 62-21 521 0077
Fax. 62-21 521 0078

Corporate Secretary

Rinna Mona Lindyana
Menara Bank BTN 20th Fl.
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel. 62-21 6336789, 6332666
Fax. 62-21 6346704

Investor Relations

Nofri R. Putra
Menara Bank BTN 20th Fl.
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130, Indonesia
Tel. 62-21 638 70107
Fax. 62-21 638 70104

Company Website

www.btn.co.id

Contact Centre

62-21 265 33555

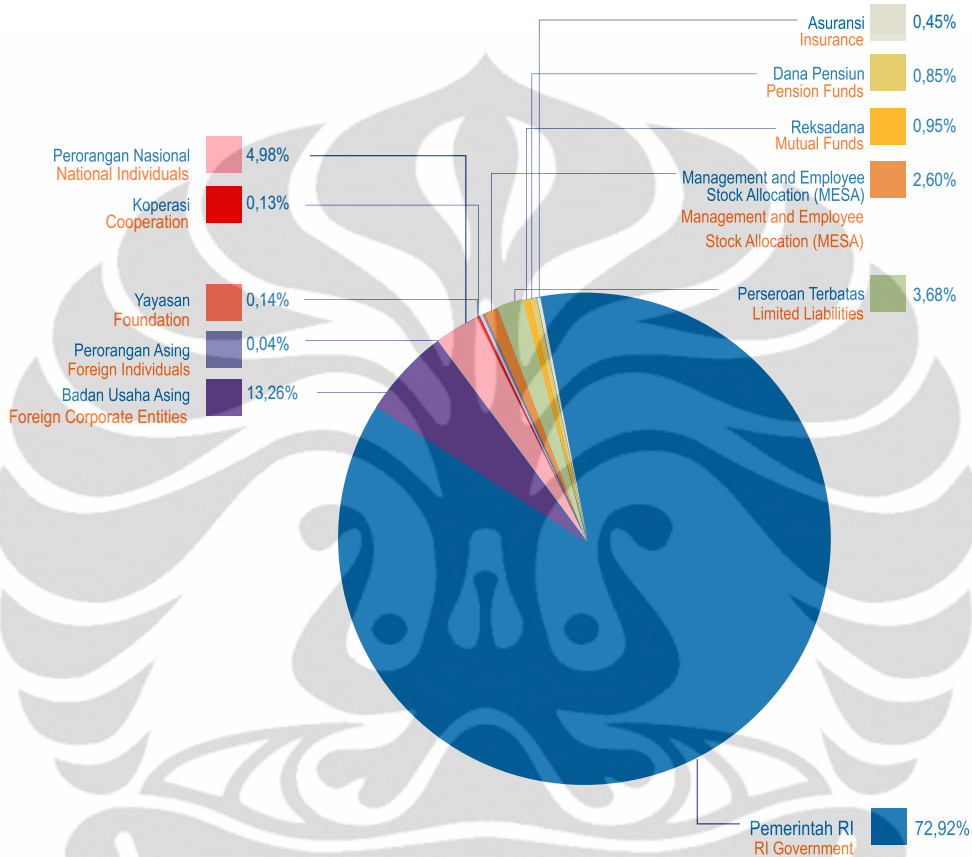
KEPEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2009
Shareholder Composition as of December 31, 2009

PEMEGANG SAHAM BANK BTN

Sampai dengan 31 Desember 2009, Bank BTN dimiliki oleh 9.149 pemegang saham, yang terdiri dari 9.074 pemegang saham domestik dan 75 pemegang saham asing

BANK BTN Shareholders

As of December 31, 2009, Bank BTN is owned by 9,149 shareholders, consisting of 9,074 domestic shareholders and 75 foreign holders



Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
IPO Fund Utilization Plan

Tanggal Date	Uraian Description	Jumlah (Rp) Total	Penggunaan Dana Fund Utilization
17 Desember 2009	Hasil IPO IPO Proceeds	1.888.234.882.515,00	-
	Biaya IPO Cost of IPO	68.580.713.165,00	-
	Hasil Bersih IPO Net Proceeds of IPO	1.819.654.169.350,00	-
	Realisasi penggunaan dana periode 17 s/d 31 Desember 2009 Realization of fund utilization from 17 to 31 Desember 2009	1.271.656.210.000,00	Ekspansi Kredit Loan Disbursement
31 Desember 2009	Sisa Dana Remaining Proceeds	547.997.959.350,00	Ekspansi Kredit Loan Disbursement

Pemegang Saham Tercatat yang Memiliki Lebih dari 5% Saham per 31 Desember 2009
Registered Shareholders above 5% Shares as of 31 December 2009

Nama Name	Jumlah Saham Number of Shares	% Saham % of Shares
Pemerintah Republik Indonesia Government of Republic Indonesia	6.354.000.000	72,92%

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Chronology of Share Listing

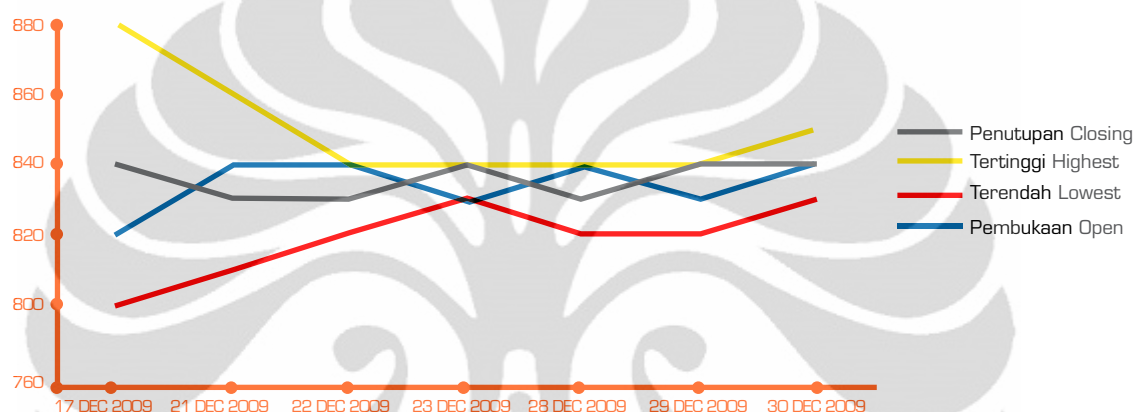
Riwayat Saham

Share History

Tanggal Date	Keterangan Details	Harga Nominal Nominal Price	Jumlah Lembar Saham Number of Shares	Nilai Buku Book Price	Harga Saham Share Price
17 Desember 2009	IPO	Seri B @ Rp. 500	2.360.057.000	500	Rp. 800
31 Desember 2009	At year end	Seri B @ Rp. 500	2.360.957.000	500	Rp. 840
Total			2.360.957.000		

Harga saham (dalam Rupiah)

Share Price (in Rupiah)



IKHTISAR OBLIGASI YANG DITERBITKAN BANK BTN

BANK BTN's Highlights of Bonds Issued

Obligasi Bonds	Jumlah (Rp) Total (Rp)	Jangka Waktu Period	Tingkat Bunga Interest Rate	Tanggal Penerbitan Issuing Date	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date
Obligasi Bank BTN I Tahun 1989	50.000.000.000	5 Tahun	18,75 %	10 Agustus 1989	25 Juli 1994
Obligasi Bank BTN II Tahun 1990	50.000.000.000	5 Tahun	16,25 %	18 Juni 1990	1 Juni 1995
Obligasi Bank BTN III Tahun 1991	50.000.000.000	5 Tahun	20,00 %	25 November 1991	11 November 1996
Obligasi Bank BTN IV Tahun 1992	100.000.000.000	5 Tahun	17,00 %	15 Februari 1992	15 Februari 1998
Obligasi Bank BTN V Tahun 1993	150.000.000.000	5 Tahun	15,25 %	31 Agustus 1993	31 Juli 1998
Obligasi Bank BTN VI Tahun 1995 Seri A	150.000.000.000	5 Tahun	17,25 %, ATD 6 bulan ditambah 1 % per tahun	28 Desember 1995	21 Desember 2000
Obligasi Bank BTN VI Tahun 1995 Seri B	200.000.000.000	5 Tahun	17,25 %, IRSOR 6 bulan ditambah 1,25 % per tahun	28 Desember 1995	21 Desember 2000
Obligasi Bank BTN VII Tahun 1996 Seri A	182.000.000.000	5 Tahun	17,125 %, ATD 6 bulan ditambah 1 % per tahun	5 Agustus 1995	22 Juli 2001
Obligasi Bank BTN VII Tahun 1996 Seri B	18.000.000.000	5 Tahun	17,125 %, IRSOR 6 bulan ditambah 1,25 % per tahun	5 Agustus 1995	22 Juli 2001
Obligasi Bank BTN VIII Tahun 1997	400.000.000.000	5 Tahun	14,15 %	4 Agustus 1997	18 Juli 2002
Obligasi Bank BTN IX Tahun 2003	750.000.000.000	5 Tahun	12,50 %	3 Oktober 2003	2 Oktober 2008
Obligasi Bank BTN X Tahun 2004	750.000.000.000	5 Tahun	12,20 %	25 Mei 2004	25 Mei 2009
Obligasi Subordinasi I Bank BTN 2004	250.000.000.000	10 Tahun	12,60 % (1-5 tahun)	25 Mei 2004	25 Mei 2014 call option 25 Mei 2009
Obligasi Bank BTN XI Tahun 2005	750.000.000.000	5 Tahun	12,00 %	7 Juli 2005	6 Juli 2010
Obligasi Bank BTN XII Tahun 2006	1.000.000.000.000	10 Tahun	12,75 %	20 September 2006	19 September 2016
Obligasi Bank BTN XIII Seri A	300.000.000.000	3 Tahun	11,75%	1 Juni 2009	29 Mei 2012
Obligasi Bank BTN XIII Seri B	300.000.000.000	4 Tahun	12,00 %	1 Juni 2009	29 Mei 2013
Obligasi Bank BTN XIII Seri C	900.000.000.000	5 Tahun	12,25 %	1 Juni 2009	29 Mei 2014

Obligasi Bank BTN XI - XIII seri C memiliki peringkat:
Bank BTN's XI until XIII C Bond have following rating:

idAA- (Double A Minus; Stable Outlook)
(21 April 2009 - 1 Mei 2010)

PENCAPAIAN 2009

2009 Achievements

Pertumbuhan Laba Bersih **13,93%**

mencapai Rp 490,45 miliar

Pertumbuhan Aset **29,91%**

mencapai Rp 58,52 triliun

Pertumbuhan Kredit dan Pembiayaan **27,19%**

menjadi Rp 40,73 triliun

Dana Pihak Ketiga meningkat **27,87%** menjadi Rp 40,21 triliun

Pencatatan Saham Perdana Kelebihan Permintaan **2,04 kali**

Meraih dana IPO sebesar Rp 1,88 triliun

NPL (Gross) **3,36%**

CAR **21,54%**

ROE **18,27%**

NIM **4,65%**



Net Income Growth **13.93%**

to Rp 490.45 billion

Asset Growth **29.91%**

to Rp 58.52 trillion

Loan and Financing Growth **27.19%**

to Rp 40.73 trillion

Third-Party Funds increased by **27.87%** amounting to Rp 40.21 trillion

IPO Oversubscribed by **2.04 times**

IPO proceed reached Rp 1.88 trillion

NPL (Gross) **3.36%**

CAR **21.54%**

ROE **18.27%**

NIM **4.65%**

PERISTIWA PENTING 2009

2009 Significant Events



**12
Jan**

Bank BTN menerima sertifikat ISO 9001:2000 dari PT. SGS Indonesia untuk layanan KPR dan KPA Komersial, yang merupakan proses penerimaan aplikasi kredit sampai dengan pencairan kredit.

Bank BTN received ISO 9001:2000 certification from PT. SGS Indonesia for its Commercial Mortgage and Apartment Loans (KPR and KPA), for the entire process from applying to receiving the loan.



**28
Jan**

Untuk mengembangkan bisnis dan mempercepat layanan kepada nasabah, Bank BTN membuka Kantor Cabang Jakarta Cawang yang berlokasi di Patria Park Apartment & Office.

To expand the business and accelerate service to customers, Bank BTN opened its Jakarta Cawang Branch located in Patria Park Apartment & Office.



**11
Feb**

Melihat besarnya potensi bisnis di wilayah BSD dan sekitarnya, kantor cabang pembantu Bumi Serpong Damai ditingkatkan dan diresmikan operasionalnya menjadi Kantor Cabang.

Taking into consideration of huge potential for business growth in the BSD area and its surroundings, Bumi Serpong Damai sub-branch office was upgraded and inaugurated as a branch office.



**12
Feb**

Bank BTN menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan sekuritisasi atas tagihan KPR. Tagihan yang dijual dengan nama KIK-DSMF I ini mendapatkan peringkat AAA-id dari PT. Moody's Indonesia dan efektif diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia.

Bank BTN became the first bank in Indonesia to securitize mortgage (KPR) receivables. The receivables, sold under the name of KIK-DSMF I, received an AAA-id ranking from PT. Moody's Indonesia and is effectively tradeable on the Indonesia Stock Exchange.



**18
Feb**

Peresmian kantor cabang Cikarang oleh Bupati Bekasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan perbankan dan melihat potensi bisnis yang berkembang sangat pesat di wilayah Cikarang.

The inauguration of Cikarang branch by the Bekasi Regent, to meet the banking needs of the community and realize the business potential that is growing aggressively in Cikarang.



**24
Feb**

Peresmian kantor cabang Kebon Jeruk yang menjadi kantor cabang Bank BTN yang ke-60, sekaligus penandatanganan kerjasama kredit antara Bank BTN dengan PT. Duta Anggada Reality.

The inauguration of the Kebon Jeruk branch, Bank BTN's 60th branch, together with the signing of a loan agreement between Bank BTN and PT. Duta Anggada Reality.



**23
Mar**

Sebagai bentuk transparansi kepada publik dan pemangku kepentingan, Bank BTN melakukan paparan kinerja Tahun 2008 dan rencana bisnis Tahun 2009 kepada media.

To increase transparency to the public and stakeholders, Bank BTN presented its 2008 public expose and 2009 business plan to the media.



**23
Apr**

Penawaran Umum Obligasi XIII Bank BTN Tahun 2009 di The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. Obligasi XIII dengan total dana Rp 1,5 triliun ini memiliki tenor 3, 4 dan 5 tahun dan mendapatkan peringkat idAA- (*stable outlook*) dari PT. Pefindo.

Bank BTN held a XIII Bonds Public Offering 2009 at The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. The XIII bonds, totaling Rp 1.5 trillion, have 3, 4 and 5 year tenures and received an idAA- (*stable outlook*) ranking from PT. Pefindo.



**25
Jun**

Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan, Bank BTN memberikan bantuan kepada Kick Andy Foundation, RS Dr. Soetomo, Universitas Airlangga dan Pemkot Surabaya dengan total bantuan Rp 500 juta. Penyerahan bantuan secara simbolis dilakukan serentak di Surabaya.

To demonstrate its concern for society and the environment, Bank BTN provided a total of Rp 500 million in donations to the Kick Andy Foundation, Dr. Soetomo Hospital, Airlangga University and Government of Surabaya, which was presented symbolically in Surabaya.



**04
Jul**

Penarikan Grand Prize undian Tabungan Batara dan Tabungan eBataraPos di Studio RCTI Jakarta, dengan hadiah sebuah rumah seharga Rp 1 miliar. Undian reguler sendiri dengan total hadiah sebesar Rp 14 miliar telah diundi pada tanggal 26 Juni 2009.

Tabungan Batara and Tabungan eBataraPos Grand Prize sweepstake withdrawal was held at RCTI Studio Jakarta, with the grand prize of one house worth Rp 1 billion. An annual lottery with total prizes amounting to Rp 14 billion was held on 26 June 2009.

PERISTIWA PENTING 2009

2009 Significant Events



**20
Ags**

Bank BTN meluncurkan produk Gadai Emas Syariah, sebagai upaya untuk meningkatkan portofolio kredit berjangka waktu pendek. Peluncuran produk ini di Kantor Cabang Syariah Cirebon dilakukan bersamaan dengan peresmian 5 kantor cabang Syariah yang baru, yaitu Cirebon, Palembang, Balikpapan, Cilegon dan Jakarta Pasar Minggu.

Bank BTN launched Gadai Emas Syariah (Sharia Gold Mortgage), to upgrade its short-term loan portfolio. The launch was held at the Cirebon Sharia branch, together with the inauguration of five new Sharia branch offices in Cirebon, Palembang, Balikpapan, Cilegon and Pasar Minggu, Jakarta.



**08
Sep**

Direksi Bank BTN menyampaikan Paparan Kinerja Bank BTN Semester I Tahun 2009 kepada media di Hotel Mulia, Jakarta.

Bank BTN Board of Directors presented the First Semester 2009 Public Expose to the media at Hotel Mulia, Jakarta.



**10
Sep**

Sebagai bagian dari kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Bank BTN memberikan bantuan untuk perbaikan sarana dan prasarana bagi korban gempa bumi di Tasikmalaya.

As a part of its Corporate Social Responsibility (CSR) activities, Bank BTN provided a donation to improve facilities for earthquake victims in Tasikmalaya.



**13
Sep**

Sebagai penghargaan kepada para pekerja bangunan di proyek-proyek perumahan yang dibiayai Bank BTN, Bank BTN mengadakan acara "Mudik Bersama Bank BTN, Terasa Asik". Keberangkatan 1000 peserta acara mudik bersama ini dilakukan di KC Bekasi.

To show its appreciation to the construction workers at a housing project financed by Bank BTN, Bank BTN held the "Mudik Bersama Bank BTN, Terasa Asik" event for those traveling home for the holidays. The departure of 1,000 participants in this event was held at the Bekasi branch.



**11
Nov**

Untuk kedua kalinya pada tahun 2009 dan sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki struktur pendanaan, Bank BTN mencatatkan sekuritisasi tagihan KPR BTN di Bursa Efek Indonesia melalui KIK-DSMF 02 sebesar Rp 360 miliar.

For the second time in 2009, and as one of its efforts to improve its funding structure, Bank BTN listed the securitization of BTN Mortgage (KPR) Billing on the Indonesia Stock Exchange through KIK-DSMF 02, for a total of Rp 360 billion.



**19
Nov**

Due Dilligence Meeting dan Public Expose IPO BTN di Ritz Carlton Pacific Place, dalam rangka Penawaran Saham Perdana (IPO) Bank BTN berlangsung di The Ritz Carlton Hotel Pacific Place Jakarta.

Bank BTN held a due diligence meeting and public expose IPO BTN at The Ritz Carlton Pacific Place concerning the upcoming IPO.



**21
Nov**

Melihat besarnya dampak bencana gempa bumi di Padang dan sekitarnya, Bank BTN memberikan bantuan sebesar Rp 780 juta untuk rehabilitasi Gedung SDN 50 Kampung Jambak di Padang.

Considering the significant impact of the earthquake on Padang and surrounding areas, Bank BTN donated Rp 780 million for the rehabilitation of SDN 50 Building in Kampung Jambak, Padang.



**09
Des**

Penawaran umum (*Public Offering*) Saham Bank BTN berlangsung pada tanggal 9 s/d 11 Desember 2009.

Bank BTN held a public offering of its shares from 9 to 11 December 2009.



**17
Des**

Bank BTN menjadi perusahaan terbuka dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Bank BTN melepas sebanyak 2,36 miliar saham atau setara dengan 27,08% dari total modal disetor.

Bank BTN officially became a public company by listing its shares on the Indonesia Stock Exchange. Bank BTN issued 2.36 billion shares, equivalent to 27.08% of the total paid-in capital.

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI 2009

2009 Awards & Certifications



- 1** ABFI BANKING AWARD & PERBANAS
Terbaik 2 Kategori Persero 2009
(Best Performance Banking)

ABFI BANKING AWARD & PERBANAS
Second Best Banking Performance in 2009 for
Persero Category
- 2** MAJALAH INFOBANK
Bank berpredikat “Sangat Baik” untuk kategori
Bank Dengan Kegiatan Usaha Terfokus Pada
Segmen Usaha Tertentu – Modal Rp 100 miliar
sampai dengan Rp 10 triliun

INFOBANK MAGAZINE
Rated “Excellent” for Bank with Activities Focused
on Specific Business Segments - with capital of
Rp 100 billion until Rp 10 trillion
- 3** IDEA RUMAH AWARD 2009 & MAJALAH IDEA
RUMAH
Produk Favorit Pilihan Pembaca Kategori Bank
Penyedia KPR/KPA/KPM/KTA

IDEA RUMAH AWARD 2009 & IDEA MAGAZINE
Reader Choice Favourite Product on
Category Bank Provider KPR/KPA/KPM/KTA
- 4** MAJALAH PROPERTY & BANK
Bank yang Eksis Membiayai KPR Dalam Program
Rusunami dan RSH, Kategori Bank Umum Terbaik

PROPERTY & BANK MAGAZINE
Best Commercial Bank in Housing Finance under
the Rusunami and RSH program
- 5** MAJALAH PROPERTY & BANK
Bank Pembiayaan Syariah Terbaik

PROPERTY & BANK MAGAZINE
Best Sharia Funding Bank
- 6** KARIM BUSINESS CONSULTING
Peringkat Ketiga Unit Syariah Terbaik, Kategori
Aset Diatas Rp 1 Triliun

KARIM BUSINESS CONSULTING
Ranked third for Best Sharia Unit with
Assets above Rp 1 trillion



- | | | |
|-----------|--|--|
| 7 | <p>KARIM BUSINESS CONSULTING
Peringkat Pertama “The Most Prudent” untuk
BTN Syariah</p> | <p>KARIM BUSINESS CONSULTING
Ranked first for Most Prudent Sharia Unit</p> |
| 8 | <p>KARIM BUSINESS CONSULTING
Peringkat Ketiga “The Most Expansive Funding”
untuk BTN Syariah.</p> | <p>KARIM BUSINESS CONSULTING
Ranked third for Most Expansive Sharia Funding
Unit</p> |
| 9 | <p>KARIM BUSINESS CONSULTING
Peringkat Kedua “The Most Expansive Financing
Bank” untuk BTN Syariah</p> | <p>KARIM BUSINESS CONSULTING
Ranked second for Most Expansive Sharia
Financing Bank for BTN Syariah</p> |
| 10 | <p>KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Penghargaan Adiupaya Puritama; Penghargaan
Khusus Atas Totalitas Komitmen, Konsistensi
dan Kinerja yang Luar Biasa Dalam Pelaksanaan
Program KPRSH Bersubsidi dengan Prinsip
Syariah</p> | <p>MINISTRY OF PUBLIC HOUSING
Adiupaya Puritama Award; Special Award for
Total Commitment, Consistency and Excellence
Performance in implementing KPRSH subsidized
program using Sharia Principles</p> |
| 11 | <p>MAJALAH THE ASSET
IPO 2009 Terbaik di Indonesia</p> | <p>THE ASSET MAGAZINE
Best 2009 IPO in Indonesia</p> |
| 12 | <p>MAJALAH ALPHA SOUTH EAST ASIA
IPO 2009 Terbaik di Asia Tenggara</p> | <p>MAJALAH ALPHA SOUTH EAST ASIA
Best 2009 IPO in South East Asia</p> |



LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Boards of Commissioners' Report

Pada akhir tahun 2009, Bank BTN termasuk penyedia kredit perumahan terbesar di Indonesia dengan penguasaan pasar 25,6% dari seluruh kredit perumahan.

At the end of 2009, Bank BTN was among the largest mortgage lenders in Indonesia, securing a 25.6% market share in mortgages.



Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Tahun 2009 baru saja kita lalui bersama dengan sejumlah pencapaian yang patut dibanggakan bagi Bank BTN. Tidak hanya dari sisi pencapaian kinerja keuangan, namun juga dari pencapaian lainnya seperti; peningkatan penerapan tata kelola perusahaan, pembenahan infrastruktur, teknologi informasi dan manajemen risiko, transformasi organisasi serta sumber daya manusia. Yang juga membanggakan adalah keberhasilan proses pencatatan saham perdana di akhir tahun yang membawa Bank BTN pada era baru pertumbuhan yang lebih menjanjikan.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya, dedikasi dan kerja keras Direksi, tim manajemen dan segenap anggota keluarga besar Bank BTN dalam mengeksekusi strategi 'Rencana Jangka Panjang Bank BTN 2008-2012' di tengah semakin ketatnya persaingan di industri perbankan dalam negeri.

Apabila kita melihat sekilas kondisi perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2009, maka dapat dikatakan bahwa indikator ekonomi makro Indonesia di tahun 2009 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi telah mencapai angka 4,3% atau lebih tinggi 7,5% dibandingkan dengan prediksi awal sebesar 4,0% sebagai akibat krisis finansial global di tahun 2007 dan 2008.

Resiliensi perekonomian kita dalam merespon ekonomi global relatif tinggi sehingga perekonomian kita termasuk dalam kelompok sedikit negara yang masih bisa tumbuh positif. Sementara itu, kebijakan moneter dan perbankan yang akomodatif sepanjang tahun 2009 turut mendukung kinerja perekonomian. Kebijakan ini juga didukung oleh langkah-langkah di tataran operasional seperti memperkuat operasi pasar terbuka dan memperbaiki struktur suku bunga yang sangat membantu menopang pertumbuhan di sektor perbankan.

KINERJA BANK BTN TAHUN 2009

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menilai bahwa kondisi makro ekonomi yang positif ini telah disambut baik oleh tim manajemen dan seluruh karyawan Bank BTN dengan beberapa pencapaian kunci sesuai sasaran dalam Rencana Jangka Panjang 2008-2012. Hal ini tercermin dari perbaikan pada kinerja kuantitatif dan kualitatif dengan parameter-parameter yang telah disepakati bersama. Kinerja kuantitatif dinilai berdasarkan unsur profitabilitas, efisiensi, kualitas aset, posisi Bank BTN di pasar dan aspek lainnya. Sedangkan kinerja kualitatif dinilai berdasarkan peringkat layanan, penerapan strategi bisnis, survei kepuasan karyawan dan pemenuhan asas *prudential banking*.

Dear Respected Stakeholders,

We have just concluded 2009 with a number of achievements for Bank BTN. Along with our achievements in financial performance, the Bank has enjoyed accomplishments in other areas, such as corporate governance, infrastructure, information technology, risk management, organizational transformation and human resources. The success of listing our shares at the end of year also serves as a milestone, taking Bank BTN into a new era of stronger prospective growth.

We owe these successes to the efforts, dedication and hardwork of our Board of Directors, management team and all members of Bank BTN in executing 'Bank BTN's Long-term Strategies' amidst the increasingly intense competition in the Indonesia's banking industry.

Looking back on Indonesia's economic situation over 2009, the macro-economic indicators during the year showed relatively optimistic development. The economic growth in Indonesia reached 4.3%, 7.5% higher than predicted at 4.0% in anticipation of the global financial crisis in 2007 and 2008.

The resilience of our economy in the face of the global crisis was among the highest, grouping us with only a few other countries that experienced positive growth. Meanwhile, accommodating monetary and banking policies in 2009 also supported our economic performance. On an operational level, the policies were further assisted by measures to empower the open market and improve interest rates. Those contributed significantly to the growth in the banking sector.

BANK BTN PERFORMANCE IN 2009

In executing its supervisory function, the Board of Commissioners considers that the positive macro-economy has been well utilized by the management team and all employees of Bank BTN, given a number of key achievements against the 2008-2012 Long-term Plan. These are reflected in the improvement in both the quantitative and qualitative performance based on our strategic parameters. The quantitative performance is measured against the Bank's profitability, efficiency, quality of assets, market position and others, while our qualitative performance is determined by the level of service, execution of business strategy, employee satisfaction survey and compliance with prudential banking principles.

Kinerja keuangan Bank BTN di tahun 2009 menunjukkan hasil yang positif antara lain terlihat dari pertumbuhan kredit yang disalurkan sebesar 27,19% atau mencapai Rp 40,73 triliun, meningkat dari Rp 32,03 triliun di tahun 2008. Hal ini juga tercermin dari peningkatan laba bersih sebelum pajak sebesar 12,06% pada akhir Desember 2009 menjadi Rp 745,82 miliar dari Rp 665,53 miliar pada periode yang sama 2008.

Rasio-rasio keuangan utama juga relatif stabil dibanding tahun sebelumnya dimana CAR mencapai 21,54%, LDR 101,29% dan NPL 3,36% pada akhir tahun 2009. Rasio NIM mengalami penyesuaian menjadi 4,65% yang disebabkan oleh penurunan rata-rata tingkat suku bunga pinjaman di pasar seiring dengan semakin ketatnya persaingan memasuki paruh kedua tahun 2009.

Pada akhir tahun 2009, Bank BTN termasuk penyedia kredit perumahan terbesar di Indonesia dengan penguasaan pasar 25,6% dari seluruh kredit perumahan. Selain itu, Bank BTN juga tercatat sebagai peringkat 9 besar dalam keseluruhan perbankan nasional bila dilihat dari total pinjaman sebesar Rp 40,73 triliun dan menduduki posisi 10 besar untuk kategori aset terbesar yakni mencapai Rp 58,45 triliun.

BABAK BARU SEBAGAI PERUSAHAAN PUBLIK

Bagi Bank BTN, menjadi Perusahaan Publik merupakan suatu babak baru dalam sejarah perjalanan Bank BTN. Hal ini bukan semata menjadi tujuan Bank, namun merupakan sarana untuk mencapai tujuan berikutnya yang lebih besar lagi. Penguatan struktur permodalan dari proses pencatatan perdana saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 telah berhasil meraih dana sebesar sekitar Rp 1,88 triliun.

Konsekuensi sebagai perusahaan publik yang harus diperhatikan antara lain, dari aspek keterbukaan dan transparansi pengelolaan Bank BTN secara profesional yang telah diatur dalam tatanan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) yang dikeluarkan oleh BAPEPAM dan Bank Indonesia serta praktek-praktek terbaik (*best practices*) GCG di dunia. Dengan demikian, momentum sebagai perusahaan publik harus memacu seluruh organ Bank BTN untuk meningkatkan penerapan tata kelola usaha yang baik di seluruh aspek Bank BTN.

Pengelolaan perusahaan dalam koridor GCG bukan sekedar mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi Bank BTN berjuang memberikan nilai tambah dalam setiap aspek bisnis bagi semua pemangku kepentingan. Pola perubahan yang terjadi di beberapa lini juga disesuaikan dengan tuntutan perubahan atau transformasi dalam tubuh Bank BTN.

The positive results in the Bank's financial performance in 2009 are evident in the expansion of loan disbursements by 27.19%, reaching Rp 40.73 trillion, an increase from Rp 32.03 trillion in 2008. The Bank also experienced 12.06% growth in net income before tax at the end of December 2009 to Rp 745,82 billion, from Rp 665,53 billion for the corresponding period of 2008.

The key financial ratios remained stable compared to the previous year. This year Bank BTN's CAR was 21.54%, LDR at 101.29% and NPL at 3.36% by the end of 2009. Bank BTN's NIM became 4.65%, which is attributed to the decline in the average market interest rates, and in line with more intense competition at the start of the second half of 2009.

At the end of 2009 Bank BTN was among the largest mortgage lenders in Indonesia, securing a 25.6% market share in mortgages. Based on the Bank BTN's total loans of Rp 40.73 trillion, we ranked ninth in the overall national banking sector, and were in the top ten of the largest asset category, with total assets of Rp 58.45 trillion.

NEW CHAPTER AS A PUBLIC COMPANY

To be a Public Enterprise is a new chapter in Bank BTN's journey. More than simply a company objective, it is a tool to achieve the next goal. As a result of the initial public listing on the Indonesia Stock Exchange on December 17, 2009, the Bank's capital structure became stronger, booking proceeds of approximately Rp 1.88 trillion.

We are aware of the consequences of being a public company, which include requirements for disclosure and transparency in the professional governance of Bank BTN, as stipulated in the Good Corporate Governance (GCG) principles issued by the Indonesian Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) and Bank Indonesia, as well as internationally acclaimed best practices. This momentum should inspire all areas of the Bank to enhance their good corporate governance in every way.

Beyond adhering to the regulations set by the government, in adhering to the GCG, Bank BTN has been striving to create added value in all its business activities for the benefit of all stakeholders. The changes that took place in several layers are to keep up with the demand for changes and transformation in the organization.



Kebijakan untuk bertransformasi yang mulai diterapkan tahun 2008, masih akan terus dilanjutkan pada tahun ini. Kami menilai seluruh komite yang mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris telah berjalan dengan baik, mulai dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

MEMPERTAJAM VISI

Tahun ini adalah momentum yang baik untuk melakukan transformasi di berbagai lini demi meningkatkan pertumbuhan berkesinambungan bagi Bank BTN. Hal ini disadari oleh jajaran Direksi dan karyawan Bank BTN sebagai tanggung jawab bersama mewujudkan visi perusahaan yakni menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan.

Menjadi bank yang terkemuka tidak hanya berkaitan dengan perolehan aset melainkan upaya Bank BTN untuk berpegang pada prinsip melayani kebutuhan perumahan bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Bank BTN berkeinginan menjadi bagian dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pemenuhan salah satu kebutuhan dasar, yaitu perumahan.

Kemantapan untuk mempertajam visi tersebut menjadi nilai lebih Bank BTN sehingga World Savings Banks Institute (WSBI) memberikan bantuan *grant* sebesar Rp 20 miliar lebih untuk mengembangkan suatu produk tabungan baru khusus bagi masyarakat kurang mampu. Bantuan ini diberikan WSBI kepada 5 finalis dari ratusan bank-bank peserta lainnya. Tetapi produk ini masih dikembangkan dan akan diluncurkan pada 2010 agar kemampuan finansial masyarakat bawah dapat lebih kuat.

MENYONGSONG MASA DEPAN YANG PENUH HARAPAN

Tahun 2010, Dewan Komisaris menilai situasi dalam negeri masih akan diwarnai oleh imbas ekonomi global dan ketidakpastian politik. Faktor tersebut perlu dipertimbangkan agar Direksi perlu senantiasa berhati-hati dalam menjalankan bisnis, antara lain dengan menjaga kualitas aktiva produktif, memelihara likuiditas yang cukup dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas Bank BTN.

Ke depan, Bank BTN akan tetap memegang komitmen untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan melalui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berkesinambungan. Bank BTN akan tetap melanjutkan implementasi berbagai program untuk memperbaiki, memperkuat dan menyempurnakan pelaksanaan praktik GCG di seluruh tingkatan organisasi. Upaya perbaikan diantaranya dilakukan melalui penyusunan dan

The transformation policy began in 2008, and will be continued this year. We feel that all committees supporting the Board of Commissioners' supervisory functions have proceeded well, particularly the Audit Committee, Risk Monitoring Committee as well as Remuneration and Nomination Committee.

REFINING THE VISION

This year provided Bank BTN with the momentum to undertake transformations on many fronts in an attempt to drive Bank BTN's sustainable growth. As such, the Board of Directors and all employees see it as a common responsibility to realize the vision of Bank BTN as the leading bank in housing finance.

Achieving this vision is not only related to the acquiring of assets, but also requires efforts to serve the housing needs of all levels of the Indonesian public. Bank BTN aspire to be part of the development of a prosperous Indonesia through the fulfilment of basic housing needs.

Our determination to refine our vision proved advantageous, as Bank BTN was awarded a Rp 20 billion grant by the World Saving Banks Institute (WSBI) to develop a new savings account for the poor. The grant was presented to only five finalists among hundreds of participating banks. The product is currently under development and is projected to be launched in 2010 to empower the financial capability of the people.

WELCOMING A BRIGHTER FUTURE

The Board of Commissioners predicts that in 2010 the domestic market will continue to be affected by the global economic crisis and political uncertainties. The Board of Directors must continue to adopt prudent business practices by guarding the quality of earning assets, maintaining adequate liquidity and improving the Bank's efficiency and productivity to weather these challenges in the coming year.

Moving forward, Bank BTN will continue to uphold its commitment to implement the corporate governance principles through the sustainable Good Corporate Governance (GCG) practices. In governance, the Bank will continue to implement a variety of programs to improve, strengthen and refine GCG practices throughout the organization by formulating and reviewing internal policies and procedures to maintain compliance with the

pelaksanaan *review* atas berbagai kebijakan dan prosedur internal agar tetap selaras dan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

prevailing laws and regulations.

Tekad, pengabdian dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh segenap jajaran karyawan dan Direksi dalam kinerja selama 2009 menjadi kebanggaan khusus bagi Dewan Komisaris. Mengingat pencapaian atas kinerja tahun ini adalah hasil dari kerjasama tim yang baik disertai semangat dan kerja keras yang pantang menyerah. Akhir kata, Dewan Komisaris pada kesempatan ini juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap jajaran karyawan dan Direksi Bank BTN dan para pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan pada Bank BTN selama ini.

The determination, service and commitment demonstrated by our employees and the Board of Directors in 2009 was a matter of particular pride for the Board of Commissioners. This year's performance is the result of good teamwork, complemented with unwavering spirit and hardwork. Last but not least, we would like to take this opportunity to extend our appreciation and gratitude to all the Bank's employees and Board of Directors, as well as to our stakeholders, for their solid support and trust in Bank BTN.

Jakarta, 31 Desember 2009



Zaki Baridwan
Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner (Independent)



DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

1. Zaki Baridwan - Komisaris Utama (Independen)/President Commissioner (Independent)
2. Subarjo Joyosumarto - Komisaris (Independen)/Commissioner (Independent)
3. Mulabasa Hutabarat - Komisaris/Commissioner
4. Gatot Mardiwasi - Komisaris/Commissioner





LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report

Setelah melalui kondisi ekonomi yang cukup menantang dalam beberapa tahun terakhir, sepanjang tahun 2009 Bank BTN telah berhasil meraih beberapa pencapaian kinerja yang patut dibanggakan.

Having been through challenging economic times over the past few years, Bank BTN secured a number of achievements in our performances in 2009.



Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Tahun 2009 bagi Bank BTN merupakan tahun yang bersejarah dalam perjalanannya. Selain berhasil mewujudkan rencana pencatatan saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) di akhir tahun 2009, Bank BTN juga menjadi bank pertama di Indonesia yang berhasil melakukan sekuritisasi portofolio kredit perumahan dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK-EBA).

Di dalam proses IPO, Bank BTN telah menjual 2,36 miliar lembar saham atau setara dengan 27,08% dari modal ditempatkan, dengan harga penawaran kepada masyarakat sebesar Rp 800 per lembar saham. Pencapaian IPO Bank BTN dengan nilai *proceed* mencapai Rp 1,88 triliun mendapat penghargaan "Best IPO in Indonesia 2009" dari majalah The Asset dan "Mid Cap/IPO Deal of The Year in Southeast Asia 2009" dari Publisher Alpha South Asia (Hongkong). Penghargaan tersebut semakin meneguhkan langkah Bank BTN menuju perusahaan publik yang siap mengimplementasikan nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik di setiap aktifitas bisnisnya.

Selain itu, tahun 2009 juga merupakan tonggak baru bagi Bank BTN yang kini telah masuk dalam jajaran 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset maupun kredit yang disalurkan. Pencapaian ini menjadikan kami semakin mantap melangkah untuk mencapai visi menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan di Indonesia.

KINERJA KEUANGAN 2009

Setelah melalui kondisi ekonomi yang cukup menantang dalam beberapa tahun terakhir, sepanjang tahun 2009 Bank BTN telah berhasil meraih beberapa pencapaian kinerja yang patut dibanggakan.

Total pinjaman yang disalurkan meningkat sebesar 27,19% mencapai sebesar Rp 40,73 triliun dibanding periode yang sama di tahun 2008 yang sebesar Rp 32,03 triliun. Pencapaian ini jauh di atas peningkatan penyaluran kredit nasional yang hanya berkisar 13% di tahun 2009. Pertumbuhan kredit tersebut juga diimbangi dengan kestabilan rasio kredit bermasalah/*Non Performing Loan* (NPL) yang menunjukkan angka sebesar 3,36% di tahun 2009.

Selain pertumbuhan kredit, dana pihak ketiga juga naik secara signifikan. Di akhir 2009, dana pihak ketiga tumbuh 27,87% mencapai Rp 40,21 triliun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 31,45 triliun. Komposisi dana pihak ketiga juga mengalami perubahan dimana giro dan tabungan mengalami peningkatan signifikan dibanding deposito berjangka. Hal ini mencerminkan keberhasilan Bank BTN dalam mengelola pendanaan dari sisi komposisi biaya dana yang optimal dengan meningkatkan *low cost funding*.

Dari sisi rasio permodalan, hasil IPO di akhir 2009 sangat membantu menaikkan CAR kami sebesar 5,40% menjadi 21,54% yang memungkinkan Bank BTN untuk melakukan ekspansi kredit tahun ini hingga beberapa tahun ke depan.

Dear Respected Stakeholders,

2009 has been full of new milestones for Bank BTN. Along with the success in holding an IPO on the Indonesia Stock Exchange at the end of 2009, Bank BTN has also become the first bank in Indonesia to do mortgage portfolio securitization through Asset-Backed Securities Collective Investment Contract (KIK-EBA).

Within the IPO process, Bank BTN sold 2.36 billion shares, equal to 27.08% of paid-in and issued capital. Each share was offered to the public at the price of Rp 800. Proceed generated by the IPO reached Rp 1.88 trillion, which won the Bank the "Best IPO in Indonesia 2009" award from The Asset magazine and "Mid Cap/IPO Deal of The Year in Southeast Asia 2009" from Publisher Alpha South Asia (Hongkong). Both of these awards confirmed all of Bank BTN's efforts to become a public company ready to implement the good corporate governance values in all of its business activities.

2009 also marked a new milestone for Bank BTN, as it is now included among the 10 biggest banks in Indonesia in terms of assets and loans disbursed. This achievement has strengthened our ability to attain our vision of becoming a leading bank in housing finance in Indonesia.

FINANCIAL PERFORMANCE IN 2009

Having been through a challenging economic situation in the last few years, Bank BTN succeeded in achieving several successes in its financial performance in 2009.

Total loans disbursed rose by 27.19% to Rp 40.73 trillion, compared to the same period in 2008 which reached Rp 32.03 trillion. This is far beyond the average national increase of loans disbursed in 2009 of only 13%. This loan growth is followed by the stability of the Non-Performing Loan (NPL) ratio at 3.36% in 2009.

Along with loan growth, third-party funds also rose significantly, up 27.87% by the end of 2009 at Rp 40.21 trillion compared to Rp 31.45 trillion the previous year. The composition of third-party funds changed slightly, with current and savings accounts rising sharply compared to time deposits. This reflects Bank BTN's success in managing the fund's costs associated with fund composition by increasing the low-cost funding.

The IPO contributed as much as 5.40% to the increase of CAR, and reached 21.54% by the end of 2009. This has made it possible for Bank BTN to expand this year's loans for several years.

Laba bersih per akhir 2009 mengalami kenaikan yang cukup moderat yaitu sebesar 13,93% atau mencapai Rp 490,45 miliar, naik dari Rp 430,47 miliar di akhir 2008. Hal ini juga meningkatkan laba bersih per saham 2009 yang meningkat sebesar 11,76% menjadi Rp 76 per saham, dari Rp 68 per saham di tahun 2008. Secara keseluruhan, kinerja keuangan 2009 telah melampaui beberapa sasaran kunci yang ditetapkan untuk tahun 2009 dan merupakan pencapaian yang positif di tengah persaingan yang semakin meningkat di industri perbankan.

PENERAPAN STRATEGI DALAM MELAKUKAN TRANSFORMASI

Dalam melakukan transformasi, kami menyadari bahwa menjadi perusahaan publik bukanlah merupakan tujuan yang ingin dicapai semata. Yang lebih tepat untuk dikemukakan bahwa IPO adalah salah satu sarana atau cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan bank. Tujuan yang dimaksud disini adalah Bank BTN sebagai pemimpin pangsa pasar dalam pembiayaan perumahan di Indonesia dan pemimpin dalam pengembangan produk-produk perbankan, khususnya produk pembiayaan perumahan dan turunannya. Untuk itu kami telah menetapkan kerangka strategi yang tepat dalam kegiatan transformasi yang berkesinambungan.

PERTUMBUHAN YANG MENGUNTUNGAN DAN BERKUALITAS

Para pemegang saham Bank BTN menaruh harapan pada kami agar dapat mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dan berkualitas. Upaya kami untuk memenuhi harapan tersebut adalah mempersiapkan diri dengan strategi-strategi transformasi dalam beberapa bidang, yaitu Kredit, Dana, *Fee-Based Income*, Efisiensi dan Kualitas Kredit.

Sepanjang 2009, strategi bisnis di bidang kredit kami fokuskan pada upaya perbaikan layanan kepada nasabah melalui percepatan proses kredit dengan mengembangkan program *Loan Origination System* (eLoan) seraya terus menerus melakukan perbaikan dan penyempurnaan *Credit Scoring Model* (CSM). Selain itu, dilakukan pula transformasi di bidang layanan kredit dalam wujud standarisasi proses aplikasi kredit 1-5-1 (1 hari persetujuan kredit, 5 hari proses administrasi kredit, 1 hari proses pencairan kredit). Standarisasi ini disertifikasi oleh ISO 9001:2000 sebagai bagian dari Sistem Manajemen Mutu secara bertahap di seluruh kantor cabang. Hingga akhir 2009, sudah lima cabang Bank BTN yang menerapkan standarisasi layanan kredit tersebut.

Strategi Dana menekankan pada peningkatan porsi penghimpunan dana berbiaya rendah seperti giro dan tabungan (CASA) dengan menyeimbangkan dana *wholesale* dan sekuritisasi aset untuk meminimalisasi *maturity mismatch*. Pada tahun 2009, kami telah melakukan penerbitan obligasi sebesar Rp 1,5 triliun serta sekuritisasi aset KIK-EBA sebesar Rp 500 miliar. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Bank BTN untuk menghimpun dana murah (CASA) adalah dengan cara memperluas outlet dan jaringan kantor selain melakukan pengembangan fitur tabungan e-batara

The net income at the end of 2009 increased by 13,93% to reach Rp 490.45 billion, rising from Rp 430.47 billion at the end of 2008. The increase of earning per share in 2009 rose by 11.76% to Rp 76 per share, from Rp 68 per share in 2008. The 2009 financial performance in general has exceeded some key targets for 2009. It was a positive achievement within the more challenging banking industry.

OUR STRATEGY FOR IMPLEMENTING TRANSFORMATION

Becoming a public company is merely the first step in our transformation. The IPO was one way to reach our goal of becoming the market leader in housing finance and banking product development in Indonesia, especially in housing finance and its derivatives. Beyond the IPO, we have developed a strategic framework to support for continuous transformation.

PROFITABLE AND QUALIFIED GROWTH

Bank BTN shareholders put their hope in us to secure profitable and qualified growth. To fulfil their expectations we have prepared several transformation strategies in loans, funding, fee-based income, efficiency and loan quality.

During 2009, our business strategy for loans was focused on the effort to improve the service for customers through loan process acceleration by developing a loan origination system (eLoan) and continuously perfecting the credit scoring model (CSM). We also transformed our loan services by developing the 1-5-1 standardized loan application process (1 day loan approval, 5 days loan administration process, 1 day loan drawdown/disburse). This standardization has been certified by ISO 9001:2000, and will be rolled out gradually as a part of our quality management system in all branch offices. By the end of 2009, five branch offices had implemented the standardized loan service.

Our fund strategy focused on improving low-cost funding, such as current account and saving accounts (CASA), which was balanced by wholesale fund and asset securitization to minimize the maturity mismatch. In 2009, we issued bonds valued at Rp 1.5 trillion and asset securitization KIK-EBA at Rp 500 billion. Bank BTN has made several efforts to collect the low-cost fund (CASA) by expanding outlets and office networks, while developing the e-batara pos saving features and improving our marketing activities. We also expanded our outlets in cooperation with PT Pos Indonesia (Persero)



pos dan peningkatan kegiatan pemasaran. Perluasan *outlet* juga kami lakukan melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk pembukaan *outlet* Kantor Pos yang terhubung secara *online* di seluruh Indonesia. Diharapkan di tahun 2010 dan 2011, kami akan terhubung *online* dengan lebih dari 2.100 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dari sisi strategi peningkatan *fee-based income*, kami memanfaatkan database nasabah khususnya yang masuk dalam kategori *high value customers*. Ke depan *database* mereka akan kami implementasikan untuk pengembangan bisnis *Priority Banking* dan *Wealth Management* guna semakin meningkatkan porsi *fee-based income* dalam pendapatan Bank BTN.

Rasio Biaya terhadap Pendapatan (Cost to Income Ratio) juga menjadi salah satu fokus kami untuk semakin dioptimalkan di tahun 2009 antara lain dengan mengimplementasikan *early retirement program* (ERP) dan penerapan struktur organisasi baru yang lebih ramping dan berorientasi pada bisnis. Selain itu, kami juga terus menekan biaya administrasi melalui pengembangan dan perbaikan sistem dan prosedur operasional.

MANAJEMEN RISIKO

Kami menyadari bahwa pengambilan dan pengendalian risiko merupakan elemen inti dalam kegiatan transformasi. Tujuan kami bukanlah untuk menghilangkan risiko sepenuhnya, namun kami ingin mencapai suatu keadaan yang seimbang antara risiko dan imbal balik yang diperoleh. Hal ini kami harapkan bisa dicapai melalui strategi yang telah kami sebutkan diatas sehingga Bank BTN dapat mengurangi risiko yang timbul serta meningkatkan pendapatan. Dengan demikian kami yakin bahwa ini merupakan salah satu *competitive advantage* yang kami miliki.

MEMBANGUN TRANSPARANSI UNTUK KEBERLANJUTAN

Penerapan transformasi juga dilakukan dalam bidang tata kelola perusahaan yang meliputi *Corporate Code of Conduct*, serta melakukan sosialisasi dan internalisasi GCG. Direksi telah mengeluarkan beberapa aturan manajemen risiko terkait dalam penyusunan tata kelola teknologi informasi. Upaya lain yang dilakukan juga dengan melakukan redefinisi fungsi *Division Risk and Control Officer* (DRCO) & *Branch Risk and Control Officer* (BRCO) untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan risiko di seluruh *risk taking unit* sesuai dengan perubahan organisasi yang direncanakan dan tetap terus meningkatkan kemampuan SDM melalui sertifikasi manajemen risiko.

Untuk memantapkan peran dan fungsi organisasi dalam tiap-tiap level dan meminimalisasi terjadinya penyimpangan maka dilakukan pembentukan fungsi (dengan kapasitas lintas unit kerja) yakni unit *Change Management Office* (CMO). Unit ini bertugas secara khusus melakukan pemantauan dan penyesuaian terhadap segala fungsi unit kerja yang ada di kantor pusat maupun kantor cabang dalam rangka transformasi secara komprehensif sesuai dengan Rencana Jangka Panjang yang telah ditetapkan.

by opening outlets in post offices, which are connected online throughout Indonesia. We hope that in 2010 and 2011, we will be able to connect online with more than 2,100 post offices in Indonesia.

In our fee-based income improvement strategy, we make use of our customer database, particularly for those in the high-value customer category. Moving forward, the information from this database will be implemented to develop the priority banking and wealth management business to improve the contribution of fee-based income to Bank BTN's income.

We were focused on optimizing the cost to income ratio in 2009 by implementing an early retirement program (ERP) and a slimmer, business-oriented organizational structure. We continuously reduced administration costs by developing and improving operational procedures and systems.

RISK MANAGEMENT

We realized that taking and controlling risks was a core element in our transformation. Our goal was not to eliminate all risk, but to achieve a balance between risk and return. We hope to achieve this through the strategy mentioned earlier, so that Bank BTN is able to reduce risks and increase revenue. We believe that this will give us a significant competitive advantage.

BUILDING TRANSPARENCY FOR SUSTAINABILITY

Transformation was also implemented in corporate governance, including the Corporate Code of Conduct, and socialization and internalization of the GCG. The Board of Directors has issued some risk-management rules to support regulations on governing information technology. We also redefined the Division Risk and Control Officer (DRCO) and Branch Risk and Control Officer (BRCO) functions to optimize the monitoring of risks in all units in accordance with well-planned changes to the organization that continue to improve the human resource capacity through the risk management certification.

To stabilize the organization's role and function at each level and minimize the deviation, the change management office (CMO) was established (with cross-unit capacity) to perform monitoring and adjustments of all working unit function in the headquarter and branch offices to secure a comprehensive transformation in accordance with the Long Term Plan.

MENUAI HARAPAN DI MASA DATANG

Ke depan, Bank BTN akan berupaya meningkatkan pencapaian pada 2009 terutama dalam hal pertumbuhan aset, pengembangan produk dan layanan serta perluasan jaringan operasi serta efisiensi pengambilan keputusan untuk perolehan kredit bagi nasabah. Bank BTN sudah mulai melakukan evaluasi dan pengembangan secara berkesinambungan atas diversifikasi produk KPR, Kredit Non Perumahan, serta produk dana baik dana ritel maupun dana *wholesale* yang sudah dimulai pada tahun 2008.

Tahap selanjutnya sebagai tindak lanjut program yang dijalankan di tahun sebelumnya adalah melakukan evaluasi dan pengembangan atas implementasi struktur organisasi berdasar SSU-SBU dan tersentralisasi dengan dukungan penerapan manajemen personalia dan kinerja yang baik serta dukungan penuh dari teknologi, evaluasi dan pengembangan pengukuran kapabilitas pengakuan pendapatan, alokasi biaya, serta pengukuran efektifitas produk, jaringan dan nasabah serta *Balance Score Card*.

Berbekal sumber daya manusia dan permodalan yang kokoh, bersinergi dengan kekuatan strategi manajerial yang handal, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan profitabilitas guna menunjang pertumbuhan berkesinambungan Bank BTN. Sebagai warga korporat yang baik, Bank BTN memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi bagi seluruh pemangku kepentingan melalui performa Bank BTN yang baik dan memberi nilai tambah bagi karyawan, mitra bisnis, komunitas, lingkungan dan bangsa.

Kami juga menyadari bahwa menjadi perusahaan yang terbuka dan memiliki konsentrasi pada *core bussiness*, akan membawa hal-hal positif bagi Bank BTN. Peningkatan kapasitas, kapabilitas, kesehatan, kinerja perusahaan serta aset akhirnya akan dapat memberikan dividen yang lebih besar bagi para pemegang saham.

Atas nama Direksi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas dukungan yang diberikan kepada kami secara terus menerus. Kami juga ingin menyampaikan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang saham, nasabah dan mitra kerja serta seluruh karyawan Bank BTN.

Akhir kata, kami percaya bahwa dengan dukungan Dewan Komisaris, seluruh pemegang saham, nasabah, mitra kerja serta seluruh karyawan Bank BTN, masa depan yang lebih baik bukanlah sekedar impian tetapi suatu pencapaian yang telah ada dalam genggaman.

REAPING FUTURE EXPECTATIONS

In the future, Bank BTN will build on its achievements in 2009, especially in asset growth, product and service development and operation network expansion, and will increase the efficiency of decision making for customer loan approval. In 2008, Bank BTN started an evaluation and ongoing development to diversify its mortgage, non-mortgage loans, and fund products, both retail and wholesale.

The next step to follow up on the program started in 2008 is to evaluate and develop an organizational structure based on SSU-SBU and centralized, supported by strong human resources management. This will also require full support and development of technology, evaluation and measurement capabilities in revenue recognition, cost allocation and product measurement, network and customer efficacy and the Balance Score Card.

Armed with solid human resources and capital, and synergized with a strong, reliable managerial strategy, we hope to increase growth in profitability to support the continuous development of Bank BTN. As a good corporate citizen, Bank BTN has the responsibility to contribute to all stakeholders through a good performance and give an added value for the employees, business partners, community, environment and nation.

We realize that becoming a public company and concentrating on our core business will have a positive impact on Bank BTN. The increase of capacity, capability, health, company performance and assets will ultimately contribute bigger dividends for shareholders.

On behalf of the Board of Directors, we would like to thank the Board of Commissioners for their continuous support. We also would like to extend our respect to the shareholders, customers and partners and all Bank BTN employees.

Last but not least, we believe that with the support of Board of Commissioners, shareholders, customers, partners and all Bank BTN employees, a better future is not only a dream, but an achievement that we already hold in our hands.

Jakarta, 31 Desember 2009



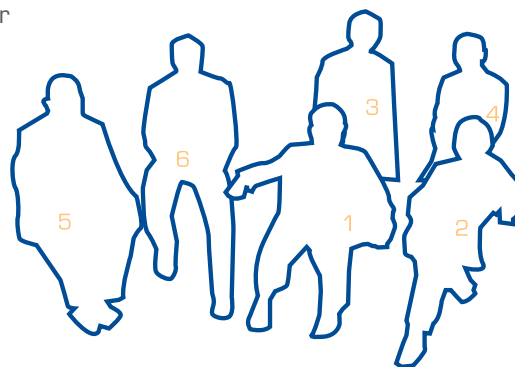
Iqbal Latanro
Direktur Utama
President Director



DIREKSI

Board of Directors

1. Iqbal Latanro - Direktur Utama/President Director
2. Evi Firmansyah - Wakil Direktur Utama/Vice President Director
3. Sunarwa - Direktur/Director
4. Purwadi - Direktur/Director
5. Saut Pardede - Direktur/Director
6. Irman A. Zahiruddin - Direktur/Director



A photograph of a man and a woman embracing from behind. The man is wearing a black and white striped shirt, and the woman is wearing a purple top. They are standing in front of a building with red accents and a window. The image is partially obscured by a semi-transparent blue and purple overlay.

BERTUMBUH MENUJU KEBERLANJUTAN

Pertumbuhan berkesinambungan menjadi fokus dalam setiap keputusan bisnis Bank BTN. Demi mengupayakan pertumbuhan tersebut, Bank BTN memperkuat komposisi permodalan melalui proses IPO didukung dengan aset yang potensial dan kinerja unit bisnis yang membanggakan.

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL

Business and Operational Overview



Towards Sustainable Growth

Sustainable growth has become Bank BTN's focus in every business decision making. In order to seek the sustainable growth, Bank BTN strives to strengthen capital composition through IPO process supported by potential assets and high quality performance from every business unit.

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL

Business and Operational Overview

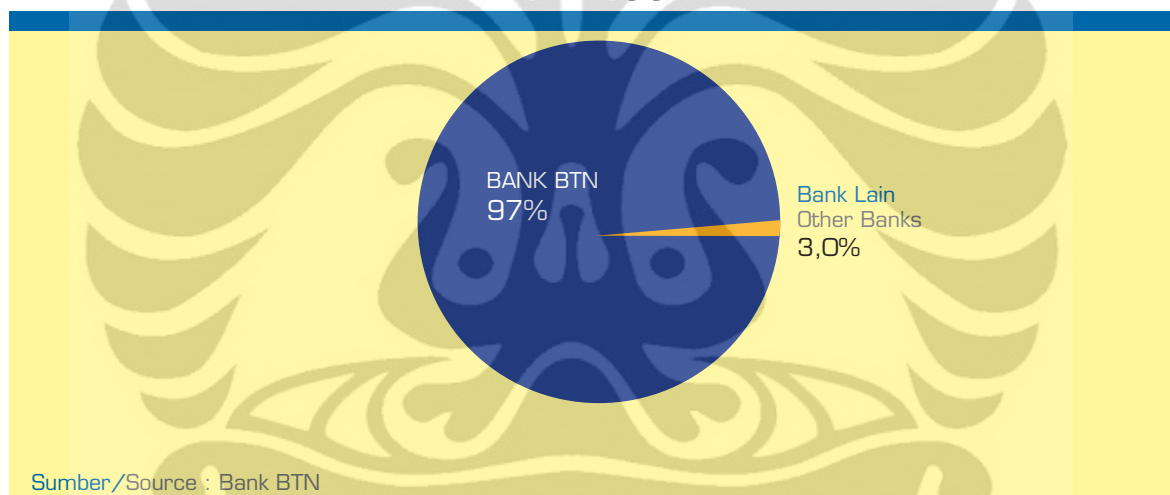
Bank BTN merupakan bank penyalur kredit perumahan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia per 31 Desember 2009, Bank BTN termasuk dalam 10 bank terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah aset dan kredit.

Bank BTN is the largest mortgage provider bank in Indonesia. Based on data from Bank Indonesia as of December 31, 2009, Bank BTN is one of 10 largest banks in Indonesia based on assets and loans.

Pangsa pasar yang dikuasai Bank BTN sebagai *market leader* kredit perumahan di Indonesia per akhir Desember 2009 adalah sekitar 25,6% dari jumlah seluruh kredit perumahan di Indonesia. Di pasar kredit subsidi pemerintah, Bank BTN merupakan penyedia pinjaman perumahan yang paling dominan dengan pangsa pasar sebesar 97% berdasarkan data jumlah kredit baru yang dicairkan per akhir Desember 2009.

Bank BTN, as a mortgage market leader in Indonesia, controlled approximately 25.6% of the market share on housing loans in Indonesia as of end December 2009. In government-subsidized mortgages markets, Bank BTN is the largest mortgage provider, with a market share of 97% based on data on new loans disbursed as of end of December 2009.

Pangsa Pasar Bank BTN pada Kredit Perumahan Bersubsidi Baru yang sudah dicairkan per 31 Des 2009
Bank BTN Market Share in New Subsidized Mortgages Disbursed as of 31 Dec 2009



Sumber/Source : Bank BTN

Meskipun sejak awal pendirian Bank BTN memiliki fokus pada pemberian kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk kredit perumahan bersubsidi, namun Bank BTN terus berupaya mengembangkan portofolio kredit lainnya sehingga porsi kredit non perumahan terhadap total kredit dapat terus ditingkatkan. Selain itu, Bank BTN juga terus berupaya untuk meningkatkan prosentase kredit perumahan komersial serta kredit lainnya yang memiliki target nasabah dengan segmen di atas kelas MBR.

Although Bank BTN has focused on providing mortgages for low-income people (MBR) through subsidized mortgages since the early years, Bank BTN has continued to develop a portfolio of other loans so that the portion of non-housing loans to total loans can be continuously improved. In addition, Bank BTN continues to strive to increase the percentage of commercial mortgages and other loans targeting the upper-class segment.

Oleh sebab itu, layanan utama Bank BTN dibagi menjadi tiga bagian: perbankan konsumen, komersial dan syariah, dimana setiap segmen akan fokus dalam pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa dalam bisnis utama masing-masing.

Therefore, Bank BTN has divided its main services into three parts: consumer, commercial and sharia banking. Each segment focuses on lending, funding and services within their respective core businesses.



PERBANKAN KONSUMER

Consumer Banking

Yang termasuk layanan perbankan konsumen (*consumer banking*) adalah Kredit Perumahan Bersubsidi, Kredit Perumahan Non Subsidi serta Kredit Konsumer Lainnya yang ditujukan kepada individu. Untuk sisi pendanaan, perbankan konsumen meliputi tabungan dan deposito berjangka perorangan.

Consumer banking service is including Subsidized Mortgages, Non-Subsidized Mortgages and Other Consumer Loans for individual purpose. In funding side, consumer banking includes savings deposits and individual time deposits.

CONSUMER Konsumer

Produk Kredit / Lending Product

- KPR Subsidi
- KPR Non Subsidi
 1. Kredit Griya Utama (Kredit Pemilikan Rumah Non Subsidi)
 2. Kredit Pemilikan Apartemen
 3. Kredit Pemilikan Ruko
 4. Kredit Swagriya (Kredit Pembangunan Rumah Milik Sendiri)
 5. Kredit Griya Sembada (Kredit Pembangunan Rumah Sewa)
- Kredit Konsumer Lainnya
 1. Kredit Griya Multi (Kredit dengan Jaminan Rumah)
 2. Kring Batara (Kredit Ringan Jaminan Gaji)
 3. Kredit Swadana (Kredit dengan Jaminan Dana)
- Subsidized Mortgages
- Non-subsidized Mortgages
 1. Kredit Griya Utama (Non-subsidized Mortgages)
 2. Apartment Ownership Loans
 3. Shophouse Ownership Loans
 4. Kredit Swagriya (Property Construction Loans)
 5. Kredit Griya Sembada (Construction of Rental Property Loans)
- Other Consumer Loans
 1. Kredit Griya Multi (Personal Loans Secured by Property)
 2. Kring Batara (Soft Loans Secured by Salary)
 3. Kredit Swadana (Cash Collateral Loans)

Produk Simpanan / Deposit Products

Giro
Tabungan
Deposito Berjangka

Current Accounts
Saving Accounts
Time Deposits



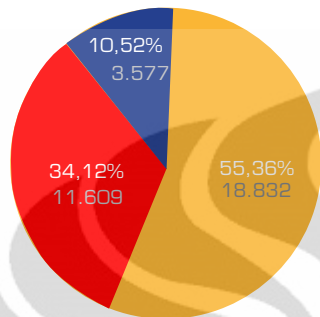
KPR Bank BTN memberikan kebahagiaan kepada berjuta keluarga Indonesia



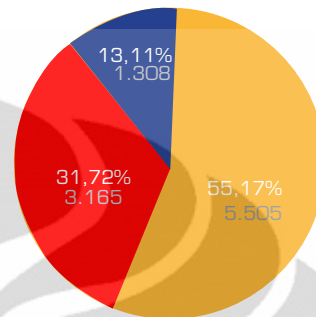
Pasar perbankan konsumen menghadapi tantangan dari pesaing yang cukup intensif di tahun 2009. Meskipun demikian, perbankan konsumen secara konsisten mampu memberikan kinerja yang stabil dengan imbal balik yang tinggi. Pertumbuhan yang stabil tercermin dari posisi kredit dan jumlah kredit baru yang disalurkan dalam perbankan konsumen (tidak termasuk pembiayaan Syariah) pada tahun 2009 yang digambarkan sebagai berikut.

The consumer banking market faced fairly intensive challenges from competitors in 2009. Nevertheless, consumer banking has been consistently able to provide stable performance with a high payoff. Steady growth reflects the position of the appropriations and the amount of new mortgages disbursed in 2009 in consumer banking (not including sharia financing) illustrated below.

Posisi Kredit Konsumer* (dalam miliar Rp)
Outstanding of Consumer Loan (in billion Rp)



Penyaluran Kredit Konsumer Baru* (dalam miliar Rp)
New Consumer Loan Disbursement (in billion Rp)



- KPR Bersubsidi / Subsidized Mortgages
- KPR Non Subsidi / Non-Subsidized Mortgages
- Kredit Konsumer Lainnya / Other Consumer Loans

* per 31 December 2009

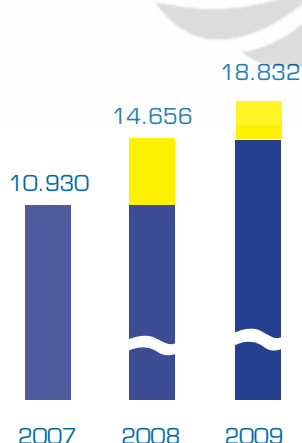
Kredit baru yang diberikan kepada nasabah Perbankan Konsumer Bank BTN secara konvensional (tanpa pembiayaan Syariah) selama tahun 2009 berjumlah sebesar Rp 9.978 miliar, atau 61,21% dari total penyaluran kredit baru Bank BTN selama tahun 2009. Seluruh pinjaman perorangan Bank BTN adalah dalam mata uang Rupiah.

New conventional loans disbursed to Bank BTN's consumer banking customers (without Sharia financing) during 2009 amounted to Rp 9.978 billion, or 61.21% of Bank BTN's total loan disbursements in 2009. All of the individual loans are denominated in Rupiah.

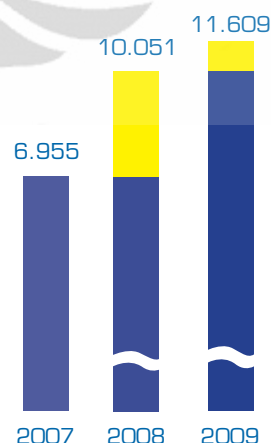
PRODUK KREDIT KONSUMER

CONSUMER LOAN PRODUCTS

Kredit Perumahan Bersubsidi (dalam miliar Rp)
Subsidized Mortgage (in billion Rp)



Kredit Perumahan Non-Subsidi* (dalam miliar Rp)
Non-Subsidized Mortgage (in billion Rp)



* tidak termasuk syariah (not included sharia)

KREDIT PERUMAHAN BERSUBSIDI (KPR BERSUBSIDI)

Program KPR Bersubsidi adalah bagian dari inisiatif pemerintah yang telah dicanangkan sejak 2003 melalui "Gerakan Nasional Pembangunan Sejuta Rumah" dan

SUBSIDIZED MORTGAGES (KPR)

The subsidized mortgage program is part of a government initiative planned in 2003 through the "National Movement to Develop One Million Houses" and "1000



“Program 1000 Tower Rumah Susun Sederhana” yang ditujukan bagi masyarakat dengan daya beli rendah. Subsidi yang diberlakukan didasarkan pada dua hal yakni:

- Subsidi Uang Muka
Pemerintah memberikan subsidi dalam hal pembayaran uang muka, sedangkan debitur melakukan pelunasan untuk tingkat bunga komersilnya. Besaran subsidi uang muka yang disediakan pemerintah mencapai maksimal Rp 8,5 juta per debitur.
- Subsidi Selisih Bunga
Pemerintah melakukan pelunasan tingkat suku bunga komersil yang seharusnya dibayarkan peminjam hingga pada batas tertentu tergantung dari lamanya pinjaman.

Pada kredit perumahan bersubsidi ini, nasabah berpenghasilan menengah ke bawah dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan subsidi kredit perumahan yang disediakan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perumahan Rakyat. Dalam hal kredit perumahan bersubsidi untuk rumah susun sederhana milik (rusunami), nasabah dapat menerima subsidi selisih bunga dan subsidi uang muka, sedangkan nasabah kredit rumah sederhana sehat (RSH) hanya dapat menerima satu jenis subsidi.

Sejak awal berdiri, Bank BTN berkomitmen untuk memberikan kredit perumahan bersubsidi melalui program KPR Bersubsidi dan KP Sarusun Bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah. Kredit perumahan bersubsidi ini pada dasarnya berorientasi pasar dan Bank BTN tetap memproses permohonan pinjaman di bawah program ini berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan memperhatikan profil risiko pengembalian.

Pasar untuk KPR Bersubsidi dibuka seluas-luasnya (*level playing field*), oleh karena itu, Bank BTN tidak lagi memiliki monopoli dalam penyediaan KPR Bersubsidi dan bank lain sudah dapat menawarkan produk sejenis. Meskipun demikian, Bank BTN yang telah memiliki pangsa pasar dominan di pasar KPR Bersubsidi serta pengalaman dan keahlian selama 33 tahun dengan infrastruktur dan proses yang efisien, terbukti mampu menghasilkan profitabilitas dari segmen KPR Bersubsidi.

Bank BTN mencatatkan pencapaian kinerja yang baik di sektor kredit perumahan bersubsidi di tahun 2009. Hal ini tercermin dari penyaluran kredit baru yang ditargetkan sebesar Rp 4.425 miliar atau sebanyak 110.661 unit, namun telah dapat dicapai sekitar Rp 5.505 miliar atau sebanyak 116.143 unit di akhir Desember 2009, atau 124,41% dari target sebelumnya. Kenaikan posisi kredit perumahan bersubsidi rata-rata setiap tahunnya sekitar 34% sejak tahun 2006 atau selama tiga tahun terakhir.

Dari sisi rasio kredit bermasalah (*non performing loan/ NPL*) kredit perumahan bersubsidi, hingga 31 Desember 2009 NPL Bank BTN telah mengalami perbaikan menjadi 3,91% dari periode yang sama tahun 2008 sebesar 4,15%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kondisi ekonomi yang masih terpengaruh krisis ekonomi pada paruh pertama tahun 2009 Bank BTN masih dapat mengendalikan kualitas kredit perumahan bersubsidi dengan berupaya menyempurnakan sistem pembinaan

Low-cost Apartments Program”, which are intended for people with low purchasing power. Subsidies are applied based on two criteria:

- Subsidy for Down Payment
The government provides subsidies for down payment, while debtors make payments at commercial interest rates. The maximum subsidy provided by the government for a down payment was Rp 8.5 million per debtor.
- Subsidy on Interest
The government makes payment settlements on the commercial interest rates that should be paid by debtors up to a certain limit, depending on the length of the loan.

With subsidized mortgages, lower middle-income customers may be eligible for subsidized mortgages provided by the government as stipulated in the regulations issued by the Ministry of Public Housing. In subsidized mortgages for low-cost apartments, customers can obtain subsidies on interest and on down payments, while simple mortgages customers (in the “simple, healthy housing” category) can only receive one type of subsidy.

Since its establishment, Bank BTN has been committed to providing subsidized mortgages through subsidized mortgage and subsidized Sarusun mortgage packages for lower-income communities. Subsidized mortgages are market oriented, and Bank BTN continues to process loan applications under this program with prudence and attention to risk return profiles.

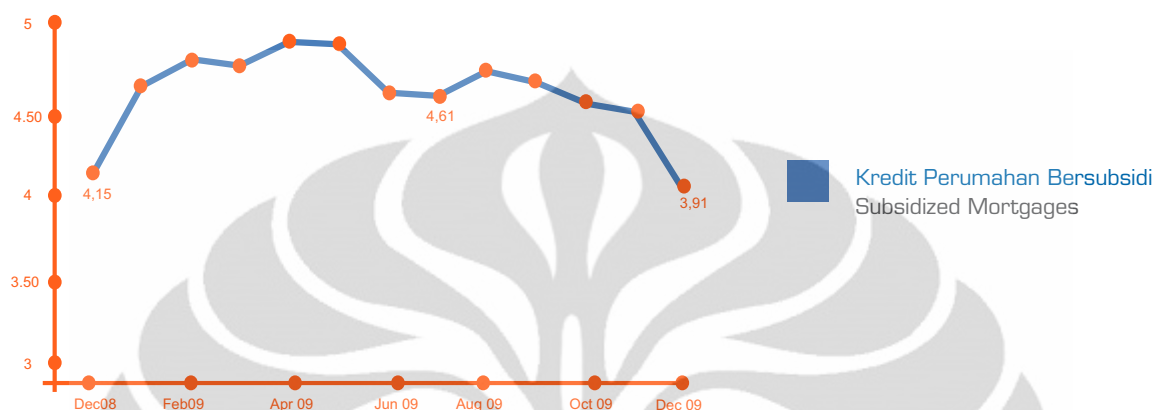
The subsidized mortgage market is a level playing field, therefore, Bank BTN no longer has a monopoly on the provision of subsidized mortgages and other banks are able to offer similar products. Nevertheless, Bank BTN has a dominant market share in the subsidized mortgage market, as well as 33 years of experience and expertise with efficient infrastructure and processes proven to generate the profitability of the subsidized mortgages segment.

Bank BTN recorded a good performance in the subsidized mortgages sector in 2009. This is reflected in new loan disbursement target of Rp 4,425 billion, or 110,661 units, but by the end of December 2009, Bank BTN reached approximately Rp 5,505 billion, or 116,143 units, 124.41% of the previous target. Bank BTN's position in the subsidized housing loan market has increased by an average of 34% per year since 2006.

Bank BTN's NPL has improved to 3.91% as of December 31, 2009, from 4.15% in the same period in 2008. This indicates that with the imposed adverse impact in economic conditions in the first half of 2009, Bank BTN was still able to control the quality of subsidized housing loans by improving loan collection and workout system to reduce the level of NPLs, for example by forming area collection in each lending region.

dan penyelamatan kredit untuk mengurangi tingkat NPL ini antara lain dengan cara pembentukan *area collection* di masing-masing wilayah pemberian kredit.

Tingkat NPL Untuk Kredit Perumahan Bersubsidi 2008 - 2009
Level of NPL Subsidized Mortgages 2008-2009



KREDIT PERUMAHAN NON SUBSIDI

Selain kredit perumahan bersubsidi, Bank BTN juga mengembangkan portofolio kredit perumahan non subsidi, dengan melihat adanya peluang yang sangat besar untuk memperluas nasabah ke segmen kelas menengah. Kredit Perumahan Non Subsidi di Bank BTN yang merupakan bagian dari perbankan konsumen antara lain terdiri dari:

- **Kredit Griya Utama (KGU) dan Kredit Platinum**
Melalui KGU, Bank BTN menyediakan kredit perumahan non subsidi kepada nasabah individu dengan pembiayaan sampai dengan 80% atau 90% untuk debitur kolektif, dari harga terendah pembelian rumah atau nilai terendah yang ditentukan oleh perusahaan penilai independen. Kredit dengan tingkat suku bunga mengambang ini memiliki masa jatuh tempo sampai dengan 15 tahun dan dijamin oleh rumah yang dibiayai.

Bank BTN juga memiliki KPR Platinum yang menyediakan kredit untuk pembelian rumah, baik rumah baru atau lama yang telah tersedia atau masih *indent*, dengan jumlah kredit lebih dari Rp 150 juta. Selain untuk pembelian rumah, nasabah juga dapat menggunakan kredit ini untuk pembelian apartemen.

- **Kredit Kepemilikan Ruko (KP Ruko)**
Pada produk KP Ruko ini, Bank BTN menyalurkan pinjaman untuk membeli Rumah Toko (Ruko), dalam artian sebagai toko, kantor ataupun dalam bentuk lain yang digunakan untuk bisnis. Kredit ini dibatasi hingga jumlah sampai dengan 70% dari harga beli atau nilai pasar tergantung mana yang lebih rendah.

NON-SUBSIDIZED MORTGAGES

In addition to subsidized mortgages, Bank BTN is also developing a portfolio of non-subsidized mortgages by identifying big opportunity for reaching the middle class segment. Bank BTN's non-subsidized mortgages, which are part of the consumer banking division, include:

- **Kredit Griya Utama (KGU) and Kredit Platinum**
Through KGU, Bank BTN provides non-subsidized mortgages to individual customers with financing up to 80%, or 90% to debtors collectively, of the lowest price to purchase a house or lowest value as determined by independent appraisal companies. Loan with floating interest rate have a maturity period of up to 15 years and is secured by the financed house.

Bank BTN also has KPR Platinum program providing a mortgage loan for home purchase, whether new or secondary houses that are already available or still under construction, with a loan amount of more than Rp 150 million. In addition to home purchases, customers also can use this loan to purchase an apartment.

- **Shophouse Mortgages (KP Ruko)**
Bank BTN disburses loans for shophouse mortgages (commercial purchases), such as a shops, offices or other properties used for business. These loans are limited to 70% of the purchase price or market value, whichever is lower.



Kredit jenis ini pada umumnya memiliki jangka waktu sampai dengan 15 tahun dengan jaminan berupa properti yang sedang dibiayai. Suku bunga kredit ini bersifat mengambang dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi daripada suku bunga kredit perumahan

Loans of this type generally have a term of up to 15 years and are secured by the property being financed. These loans have floating interest rates that are higher than the rate of the mortgage.

Pertumbuhan Penyaluran Kredit Griya Utama Dan KP Ruko Selama Tahun 2007 - 2009
Griya Utama And Shophouse Mortgages Loan Growth, 2007 – 2009

(dalam miliar Rp)
(in billion Rp)

Kredit / Loan	2007	2008	2009
Kredit Griya Utama / Griya Utama Loan	1.374	3.787	3.028
Kredit Pemilikan Ruko / Shophouse Mortgages	62	198	126

Pertumbuhan kedua jenis kredit di atas mengalami perlambatan di tahun 2009, karena pada triwulan pertama tahun tersebut, Bank BTN sedikit mengurangi realisasi kredit baru sebagai dampak krisis ekonomi di akhir tahun 2008. Namun demikian, secara keseluruhan kredit perumahan non subsidi Bank BTN tetap bertumbuh tiap tahunnya dan pasar ini merupakan area yang menjadi salah satu fokus perkembangan Bank BTN di masa mendatang. Bank BTN mencatatkan kenaikan persentase posisi kredit non subsidi sebesar 15,50% yakni Rp 11.609 miliar pada akhir Desember 2009 dibanding periode yang sama tahun 2008 sebesar Rp 10.051 miliar.

The growth of both loan types slowed in 2009, because in the first quarter, Bank BTN reduced the disbursement of new loans slightly to compensate for the impact of economic crisis in late 2008. However, overall non-subsidized mortgages continue to grow each year, and this market has become a focus for the development of Bank BTN in the future. Bank BTN recorded a 15.50% increase in non-subsidized loans, from Rp 11,609 billion at end December 2009 compared to Rp 10,051 billion in same period in 2008.

Peningkatan posisi Kredit Perumahan Non Subsidi tersebut menunjukkan semakin banyak peminjam yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, karena salah satu strategi bisnis Bank BTN ke depan meliputi diversifikasi produk dan jangkauan pasar pada kalangan menengah ke atas. Hal lain yang mendukung kenaikan kredit perumahan non subsidi adalah *brand image* Bank BTN yang semakin kuat di benak masyarakat sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan.

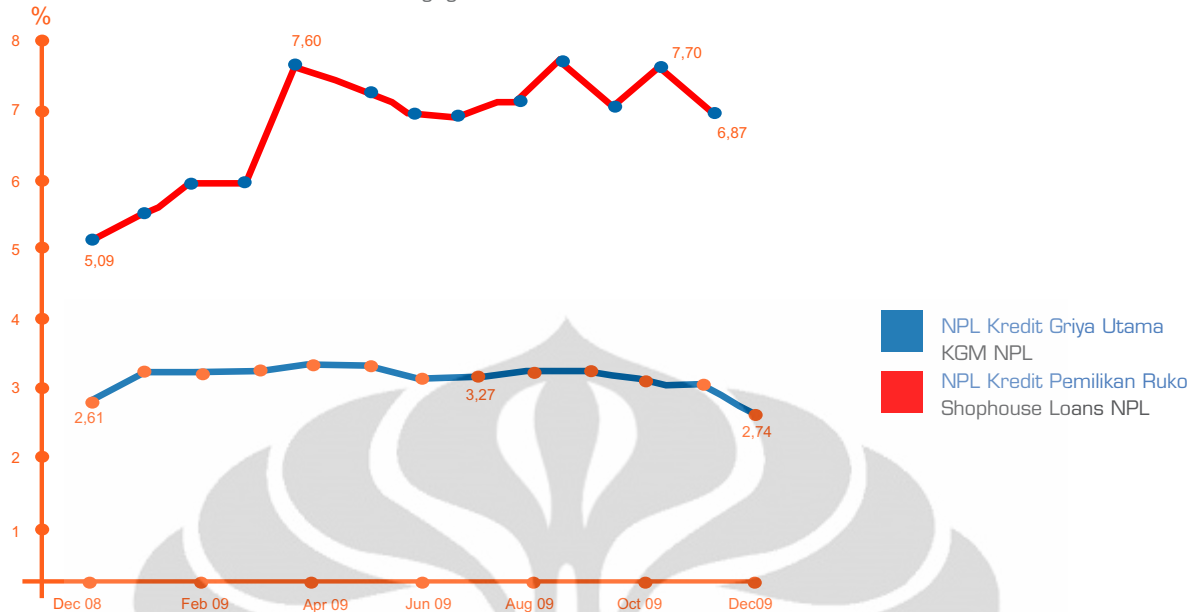
Improving outstanding non-subsidized mortgages indicates that an increasing number of debtors have heightened economic capacity. One of Bank BTN's future business strategies includes product diversification and market coverage to the upper-middle class. Another thing that supports the increase in non-subsidized mortgages is the brand image of Bank BTN, which is strong in the mind of the public as a bank that focuses on housing finance.

Dari sisi rasio kredit bermasalah, NPL kredit perumahan non subsidi menunjukkan sedikit kenaikan dari posisi 31 Desember 2008, termasuk KGU dan KP Ruko. Hal ini terjadi akibat masih berdampak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Akan tetapi, Bank BTN terus berupaya meminimalisasi tingkat NPL di sektor ini dengan menyempurnakan sistem pembinaan kredit (*collection*) dan memperkuat tenaga *collection* di tiap-tiap wilayah.

The NPL ratio on non-subsidized mortgages showed a slight increase from December 31, 2008, including KGU and Shophouse Mortgages. This was due to the impact of the economic crisis in 2008. However, Bank BTN strives to minimize the level of NPL in this sector by improving our loan guidance system (*collection*) and strengthening the capacity of collection staff in each region.

Tingkat NPL Kredit Perumahan Non-Subsidi Tahun 2008-2009

Level of NPL for Non-Subsidized Mortgages, 2008-2009



KREDIT KONSUMER LAINNYA

Sebagai bank yang memiliki basis pelanggan yang besar (*large customer base*) yaitu sekitar 1,2 juta rekening pinjaman dan sekitar 4 juta rekening simpanan, maka peluang Bank BTN untuk meningkatkan bisnis di luar kredit perumahan sangatlah luas. Selain itu, dengan pertumbuhan kemampuan nasabah yang ada (*existing customers*), maka produk-produk konsumen lainnya juga bisa ditawarkan oleh Bank BTN, antara lain Kredit Griya Multi (KGM) dan Kredit Ringan Batara (Kring Batara).

- **Kredit Griya Multi (KGM)**

Bank BTN juga menyediakan kredit kepada nasabah yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi nasabah. Keperluan tersebut bisa dalam bentuk apapun dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum dan dijamin dengan agunan berupa tanah dan rumah.

Jumlah kredit yang diberikan dalam KGM tidak melebihi 75% dari nilai taksasi oleh penilai dan apabila kredit dijamin dengan tanah dan rumah digunakan untuk kepentingan komersial, nilai kredit tersebut tidak boleh melebihi 60% dari nilai *appraisal*. Kredit ini memiliki jatuh tempo sampai dengan 10 tahun dengan tingkat suku bunga mengambang yang nilainya lebih tinggi daripada tingkat suku bunga kredit perumahan.

- **Kredit Ringan Batara (Kring Batara)**

Kring Batara memiliki nilai hingga Rp 100 juta dan ditawarkan kepada karyawan dari perusahaan dimana Bank BTN menangani sistem penggajian di perusahaan tersebut. Bank BTN akan memotong gaji karyawan untuk pembayaran angsuran kredit. Sedangkan jatuh tempo kredit ini berkisar antara satu sampai lima tahun dengan sistem suku bunga *flat*.

OTHER CONSUMER LOANS

As a bank with a large customer base of around 1.2 million loan accounts and 4 million deposit accounts, the opportunity for Bank BTN to increase its business outside the mortgage market is very big. In addition, with the growth of existing customers, other consumer products can also be offered by Bank BTN, including Kredit Griya Multi (KGM) and Kredit Ringan Batara (Kring Batara).

- **Kredit Griya Multi (KGM)**

Bank BTN provides loans that can be used by customers for various personal needs. They can be used for anything that remains within the boundaries of the law and is secured by collateral such as land or houses.

KGM loans cannot exceed 75% of the estimated appraisal value. If the loan is for commercial purposes and secured with land and houses, it cannot exceed 60% of the appraisal value. These loans can mature for up to 10 years, with a floating interest rate that is higher than mortgage interest rates.

- **Kredit Ringan Batara (Kring Batara)**

Kring Batara has a platform of up to Rp 100 million and is offered to employees of companies for which Bank BTN handles the payroll systems. Bank BTN deducts payment installments directly from the employees' salaries. This loan maturity offers flat rates ranging from one to five years.



Sepanjang 2009, realisasi Kring Batara adalah sebesar Rp 207 miliar dengan 5.016 rekening. Pencapaian tersebut tidak lepas dari upaya pemasaran produk ini yang dijelaskan secara khusus pada sub bab Pemasaran.

Throughout 2009, new disbursements of Kring Batara reached Rp 207 billion with 5,016 accounts. This achievement cannot be separated from the product marketing efforts, which are specifically mentioned in the Marketing section.

Pertumbuhan Kredit Griya Multi dan Kring Batara Tahun 2007 - 2009
Griya Multi and Kring Batara Loan Growth, 2007 - 2009

(dalam miliar Rp)
(in billion Rp)

Tahun / Year	2007	2008	2009
Kredit Griya Multi / Griya Multi Loan	740	1.135	799
Kring Batara / Kring Batara Loan	49	275	207

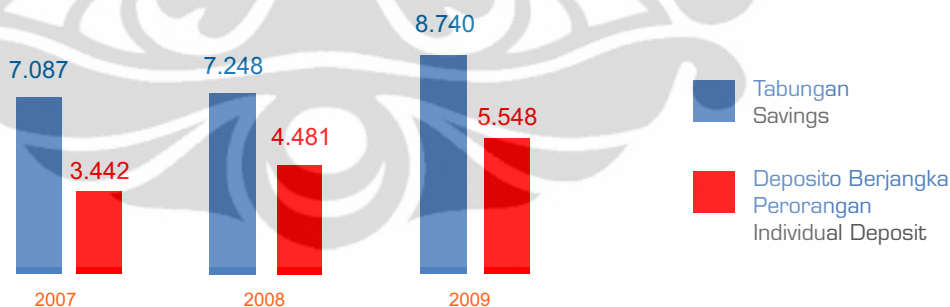
PRODUK-PRODUK PENDANAAN KONSUMER

CONSUMER FUNDING PRODUCTS

Dalam penghimpunan dana masyarakat, Bank BTN berpedoman pada strategi untuk mempertahankan komposisi pendanaan (*funding mix*) yang kompetitif, dengan mengurangi porsi dana deposito untuk menurunkan risiko konsentrasi. Adapun rincian posisi produk pendanaan konsumen (tidak termasuk produk Syariah) adalah sebagai berikut:

Bank BTN is guided by a strategy to maintain the competitive funding composition (*funding mix*) by reducing the amount of deposit funds to mitigate concentration risk. The details of consumer funding products (excluding Sharia products) are as follows:

Dana Pihak Ketiga
Third Party Fund



Selain menawarkan produk pembiayaan, melalui produk pendanaan konsumen Bank BTN menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka perorangan. Bank BTN mencatat peningkatan dalam perolehan dana konsumen dari masyarakat sebesar 21,82% dari Rp 11.729 miliar di tahun 2008 menjadi Rp 14.288 miliar di tahun 2009. Perkembangan pendanaan konsumen Bank BTN, baik tabungan dan deposito perorangan menunjukkan kinerja yang positif di tahun 2009. Adapun rincian posisi produk pendanaan konsumen (tidak termasuk produk Syariah) adalah sebagai berikut:

Besides offering financing products, Bank BTN collects public funds through consumer funding products in the form of individual savings accounts and time deposits. Bank BTN recorded an increase in consumer funds collection of 21,82% from Rp 11,729 billion in 2008 to Rp 14,288 billion in 2009. The growth of consumer financing, both individual savings and time deposits, showed a positive performance in 2009. The details of consumer funding products (excluding Sharia products) are as follows:

- **Tabungan**
Bank BTN mencatatkan peningkatan dalam jumlah dana masyarakat yang diperoleh dari tabungan sebesar 20,58% dari akhir Desember 2008

- **Savings Accounts**
Bank BTN recorded an 20.58% increase in public funds from Rp 7,248 billion at the end of December 2008 to Rp 8,740 billion at the end of 2009.

sebesar Rp 7.248 miliar menjadi Rp 8.740 miliar pada akhir 2009.

Komposisi masing-masing produk Tabungan adalah sebagai berikut:

The composition of each savings account product is as follows:

Perkembangan Tabungan (dalam miliar Rp)
Growth of Saving Account (in billion Rp)

Jenis Tabungan / Types of Saving Account	2007	2008	2009
Tabungan Batara / Savings Batara	4.513	4.669	5.505
Tabungan Batara Prima / Savings Batara Prima	1.979	1.849	2.031
Tabanas Batara/ National Saving Batara	274	237	218
Tabungan eBatara Pos / Saving eBatara Post	248	391	804
Tabungan Batara Junior / Junior Saving Batara	57	80	152
Tabungan Haji Nawaitu / Hajj Savings Nawaitu	16	23	31
Total	7.087	7.248	8.740

Semua produk tabungan mengalami peningkatan pada tahun 2009, dengan peningkatan terbesar pada Tabungan eBataraPos, yang merupakan peremajaan dari Tabanas Batara, sebesar 105,34% dari Rp 391 miliar pada akhir Tahun 2008 menjadi Rp 804 miliar per 31 Desember 2009. Pertumbuhan ini sejalan dengan strategi Bank BTN untuk meningkatkan kerjasama dengan PT Pos Indonesia (Persero) dengan mengembangkan Tabungan eBataraPos melalui outlet-outlet Kantor Pos yang terkoneksi secara online dengan outlet-outlet Bank BTN.

All savings account products have increased in 2009, with the highest increase in Tabungan eBataraPos, which is the newest type from Tabanas Batara, of from Rp 391 billion at the end of 2008 to Rp 804 billion as of December 31, 2009, or an increase of 105.34%. This growth is in line with Bank BTN's strategy to leverage the cooperation with PT Pos Indonesia (Persero) to develop Tabungan eBatara Pos through Post Office outlets, which are connected online with Bank BTN outlets.

Program-program pemasaran yang dikembangkan Bank BTN, khususnya bagi produk-produk tabungan, juga terbukti membawa hasil yang menggembirakan di tahun 2009. Hal ini tercermin dari peningkatan posisi Tabungan Batara dan Tabungan Batara Junior masing-masing sebesar 17,90% dan 89,65% dibandingkan tahun sebelumnya. Pengembangan fitur dan peningkatan program pemasaran pada kedua produk Tabungan ini diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan dana konsumen Bank BTN.

Marketing programs rolled out by Bank BTN, particularly for savings account products, also proved to deliver satisfactory results in 2009. This is reflected in the increase in Tabungan Batara and Tabungan Batara Junior, which grew 17.90% and 89.65% respectively against the previous year. The advancement features and improvements in the marketing programs for both products are expected to strengthen the growth in Bank BTN's consumer funds.

- **Deposito Berjangka**

Dari deposito berjangka perorangan, Bank BTN mencatatkan kenaikan perolehan dana sebesar 23,81% pada akhir 2009 yaitu sebesar Rp 5.548 miliar dari periode tahun sebelumnya sebesar Rp 4.481 miliar. Dengan pelayanan dan pemberian suku bunga yang bersaing dengan bank lain, peningkatan posisi deposito berjangka perorangan ini diharapkan dapat terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.

- **Time Deposits**

Bank BTN recorded an increase in individual time deposits from to Rp 4.481 billion at the end of 2008 to Rp 5.548 billion at the end of this year, or an increase of 23.81%. By continuing to improve the services and competitive interest rates, this positive performance is expected to be sustained in the coming years.



JASA

Bank BTN juga menyediakan jasa *fee-based* seperti Bank Garansi, pengiriman (*remittance*), *collection* dan sebagai *payment point* untuk berbagai macam pembayaran, termasuk pembayaran biaya pendidikan, tagihan telepon seluler dan pembayaran rutin seperti listrik dan air. Selain itu, Bank BTN juga berencana untuk menawarkan jasa *wealth management* dan *bancassurance* yang akan dimulai pada semester kedua tahun 2010.

SERVICES

Bank BTN provides fee-based transactions, such as Bank Guarantee, shipping (*remittance*), *collection* and as a payment point for various costs, including payment of tuition fees, cellular phone bills and regular payments such as electricity and water. In addition, Bank BTN also plans to offer wealth management services and bancassurance, which will begin in the second half of 2010.

KARTU DEBIT

Awal bulan November 2009, Bank BTN mulai memperkenalkan layanan Kartu Debit BTN VISA. Sistem pelayanan ini telah diujicoba sehingga secara sistem Kartu Debit BTN Visa dapat berjalan dengan lancar dan siap dipasarkan. Kartu Debit BTN Visa ini diluncurkan pada saat acara hari ulang tahun Bank BTN ke-60 tanggal 9 Februari 2010 kepada nasabah dan masyarakat umum.

DEBIT CARD

Early in November 2009, Bank BTN started the BTN VISA Debit Card service. This service system has been tested to ensure that the BTN Visa Debit Card system runs smoothly and is available for market. BTN Visa Debit Card was launched at Bank BTN's 60th birthday event on February 9, 2010 to customers and public.

Adapun target yang telah direncanakan oleh Bank BTN untuk layanan kartu debit ini ditujukan bagi nasabah yang memiliki simpanan di atas Rp 1 juta. Bank BTN saat ini telah mempersiapkan materi dan media promosi layanan kartu debit yang baru melalui iklan surat kabar dan surat elektronik.

Bank BTN is targeting its debit card services for customers with deposits of more than Rp 1 million. Bank BTN is now preparing promotional materials and a new debit card service through newspaper advertisements and electronic mail.

RENCANA KE DEPAN

Bagaimanapun, Bank BTN percaya bahwa ada peluang yang signifikan untuk memperluas pangsa pasar hingga kelas menengah atas. Salah satu strategi Bank BTN adalah berfokus untuk meningkatkan kredit perumahan kepada nasabah dengan penghasilan lebih besar.

FUTURE PLAN

Bank BTN believes that there are significant opportunities to expand its market share to the upper-middle class. One strategy is to focus on increasing mortgages to higher income customers.

Untuk mencapai tujuan ini, Bank BTN akan mengambil langkah-langkah seperti:

To achieve this objective, Bank BTN plans to take the following measures:

- menambah lebih banyak jaringan kantor, baik *outlet* Bank BTN maupun *outlet* Kantor Pos.

- opening more office networks, through both Bank BTN outlets and post office outlets.

LAYANAN 1-5-1/1-5-1 SERVICE



ISO 9001 : 2000 certification



- implementasi “Layanan 1-5-1” untuk mempercepat proses persetujuan permohonan kredit.
- memperbaiki sistem teknologi informasi untuk pemberian kredit dengan pengembangan *eLoan*.
- menawarkan tingkat suku bunga khusus kepada nasabah segmen kelas menengah atas melalui produk pinjaman khusus seperti KPR Platinum.
- implementing the “1-5-1 Service” to accelerate the loan application approval process.
- improving the technology information system for loan disbursement by developing the *eLoan* system.
- offering special rates to upper-middle class customers through mortgage products such as KPR Platinum.

Seluruh kredit perumahan (termasuk kredit perumahan tidak bersubsidi) memiliki tingkat suku bunga mengambang. Bank BTN bersama dengan pemerintah melakukan evaluasi dan penyesuaian atas perubahan suku bunga pasar setiap 12 bulan selama periode subsidi. Dalam hal terjadi fluktuasi tingkat bunga acuan selama periode tersebut, akan diperhitungkan pada periode berikutnya.

All mortgages (including non-subsidized) have a floating interest rates. Bank BTN, together with the government, will evaluate and make adjustments based on the fluctuation of market interest rates every 12 months during the subsidy period. Fluctuations during that period will be taken into account in the following period.

Bank BTN senantiasa mengupayakan layanan yang lebih efisien demi kepuasan nasabah. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank BTN menerapkan “Layanan 1-5-1” sejak 2008 dan terus dilakukan pengembangan sistem tersebut hingga saat ini. Prinsip layanan kredit 1-5-1 untuk proses KPR/KPA Komersial yang dimiliki Bank BTN yaitu 1 hari proses persetujuan kredit, 5 hari proses administrasi kredit dan 1 hari proses pencairan kredit menjadi pola standarisasi layanan kredit yang harus diimplementasikan di seluruh Kantor Cabang.

Bank BTN constantly strives to offer more efficient services to increase customer satisfaction. In achieving this goal, Bank BTN implemented the “1-5-1 Service” in 2008, and continues to develop the system. The 1-5-1 service offers a 1 day loan approval process, 5 day administration process and 1 day loan disbursement process for Bank BTN's loans, which will be implemented in all branch offices.

Saat ini telah diimplementasikan dengan baik dan mendapat sertifikasi ISO 9001:2000 untuk penerapan Sistem Manajemen Mutu di 5 Kantor Cabang yaitu kantor cabang Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor dan Jakarta Harmoni serta Divisi Pengelolaan Kredit di Kantor Pusat Bank BTN.

Until now, Bank BTN's principles have been well followed and five branches have been awarded the ISO 9001:2000 certification for Quality Management System Implementation, in Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor and Jakarta Harmoni, as well as the Loan Management Division at the Bank BTN headquarters.



PERBANKAN KOMERSIAL

Commercial Banking

Layanan perbankan komersial Bank BTN meliputi kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM) dan kredit komersial lainnya hingga bank garansi. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan bagi nasabah komersial seperti giro dan deposito berjangka serta jasa perbankan seperti Program Kerjasama Pengembangan Operasional. Per 31 Desember 2009, jumlah posisi *outstanding* pinjaman yang diberikan kepada nasabah perbankan komersial mencapai Rp 4.719 miliar, yang mewakili 11,58% dari total pinjaman yang diberikan.

Bank BTN's commercial banking services, including construction loans, working capital loans, investment loans, loans to small and medium enterprises (SMEs) and other commercial loans and bank guarantees. Bank BTN also offers financing products for commercial customers, such as demand deposits, time deposits and banking services such as the Operational Development Cooperation Program. As of December 31, 2009, the amount in outstanding commercial loans reached Rp 4,719 billion, representing 11.58% of total loans.

COMMERCIAL

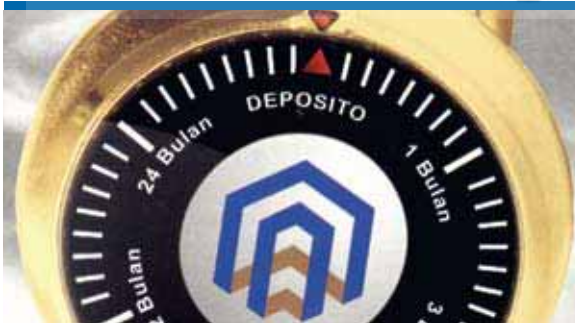
Komersial

Produk Kredit/Lending Products

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Konstruksi dan Real Estate <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit Yasa Griya (Kredit Konstruksi) 2. Kredit Pendukung Perumahan 3. Kredit Perumahan Perusahaan • Kredit Korporasi Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit Investasi 2. Kredit Modal Kerja • Pembiayaan Mikro & Kredit Usaha Kecil Menengah <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit Usaha Rakyat 2. Kredit Program Linkage | <ul style="list-style-type: none"> • Real Estate and Construction Loans <ol style="list-style-type: none"> 1. Kredit Yasa Griya (Construction Loans) 2. Housing Supporting Loans 3. Corporate Housing Loans • Other Corporate Loans <ol style="list-style-type: none"> 1. Investment Loans 2. Working Capital Loans • Microfinance and Small & Medium Enterprise Loans. <ol style="list-style-type: none"> 1. Small Business Loans 2. Linkage Program Loans |
|---|--|

Produk Dana/Funding Products

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Giro • Tabungan • Deposito Berjangka | <ul style="list-style-type: none"> • Current Account • Saving Account • Time Deposit |
|--|---|



Produk-produk kredit utama Bank BTN yang ditawarkan kepada nasabah perbankan komersial terdiri dari:

The main Bank BTN lending products offered to commercial banking customers are:

PRODUK KREDIT

LENDING PRODUCTS

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Yasa Griya (KYG) atau Kredit Konstruksi
KYG merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan | <ul style="list-style-type: none"> • Kredit Yasa Griya (KYG) or Construction Loan
KYG is a loan facility disbursed to housing developers for financing the construction of housing and apartments. |
|--|--|

modal kerja untuk pembiayaan pembangunan perumahan dan apartemen. Besaran persentase maksimal kredit yang diberikan maksimal 80% dari biaya pembangunan (biaya konstruksi). Jangka waktu kredit ini didasarkan pada perkiraan lamanya pembangunan dan perkiraan arus kas yang akan dihasilkan dari proyek tersebut setelah selesai pembangunan. KYG memiliki jaminan tanah dan properti yang dibangun dan memiliki tingkat suku bunga mengambang.

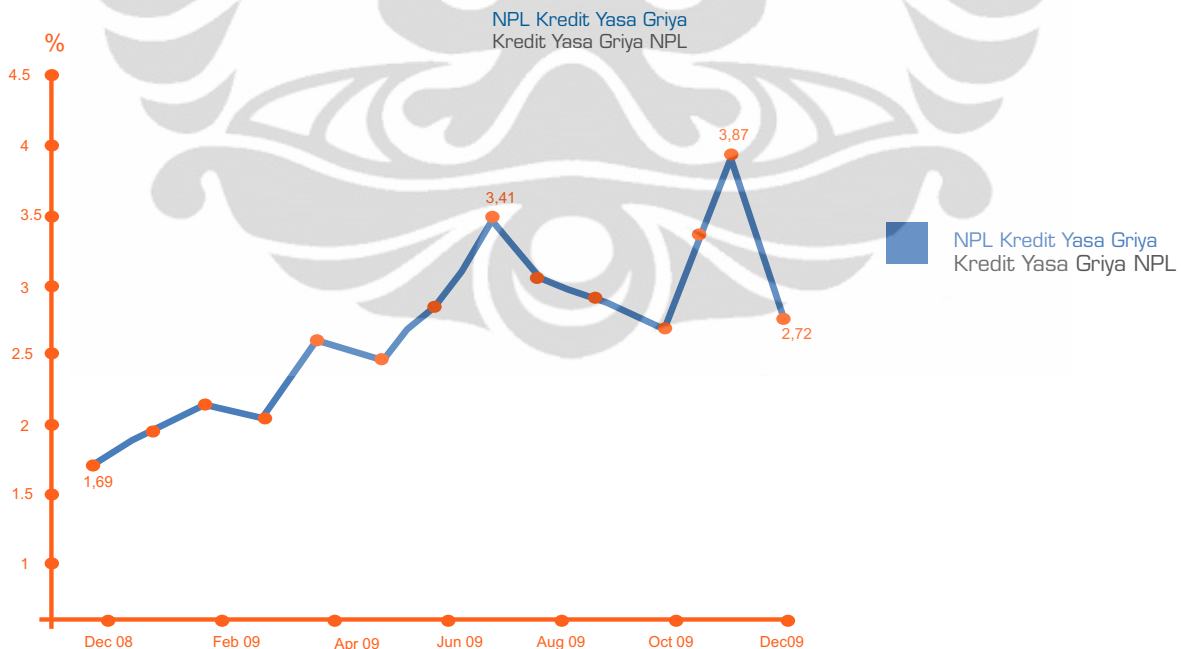
The maximum loan limit is 80% of construction costs. The loan terms are based on the approximate duration of housing construction and cash flow forecasts generated after the project completion. The collateral for KYG can be land or the property planned to be built, and has a floating interest rate.

Perkembangan realisasi KYG selama tahun 2007 hingga 2009 menunjukkan *trend* yang positif. Pada tahun 2009 realisasi KYG mengalami peningkatan sebesar 18,86% yaitu Rp 3.914 miliar dari Rp 3.293 miliar pada tahun sebelumnya. Dari sisi NPL, walaupun sedikit mengalami peningkatan, kualitas KYG disalurkan dapat tetap terjaga dengan baik.

KYG disbursement growth from 2007 to 2009 showed a positive trend. In 2009, the disbursement of KYG increased from Rp 3,293 billion in 2008 to Rp 3,914 billion in 2009, an increase of 18.86%. Though NPL increased slightly, the performance of KYG disbursements can be maintained properly.

Pertumbuhan Kredit Konstruksi (2007-2009)
Construction Loan Growth (2007-2009)

Tahun Year	Realisasi kredit (dalam miliar Rp) Loan disbursement (in billion Rp)
2007	1.797
2008	3.293
2009	3.914



- Kredit Pendukung Perumahan**
 Bank BTN menyediakan kredit bagi PT, CV, Koperasi, Firma dan Perorangan untuk pembiayaan modal kerja dan atau investasi bagi industri dan perdagangan yang terkait dengan perumahan. Kredit ini menawarkan pembiayaan jangka menengah untuk proyek pembangunan perumahan sebesar maksimal 70% dari total

- Housing Support Loans**
 Bank BTN provides loans for PT, CV, Cooperative, Firm and Individual Companies to finance working capital and or investments in the housing and commerce industries. These loans offer medium-term financing for housing development projects with a maximum of 70% of the total project financing working capital requirements or 65% of the total investment cost of



kebutuhan modal kerja pembiayaan proyek atau sebesar 65% dari total biaya investasi proyek tersebut. Kredit ini memiliki jangka waktu maksimal tiga tahun untuk kredit modal kerja dan lima tahun untuk kredit investasi. Kredit ini memiliki tingkat suku bunga mengambang.

the project. These loans have a maximum term of three years for working capital loans and five years for investment loans. The interest rate for those loans is floating.

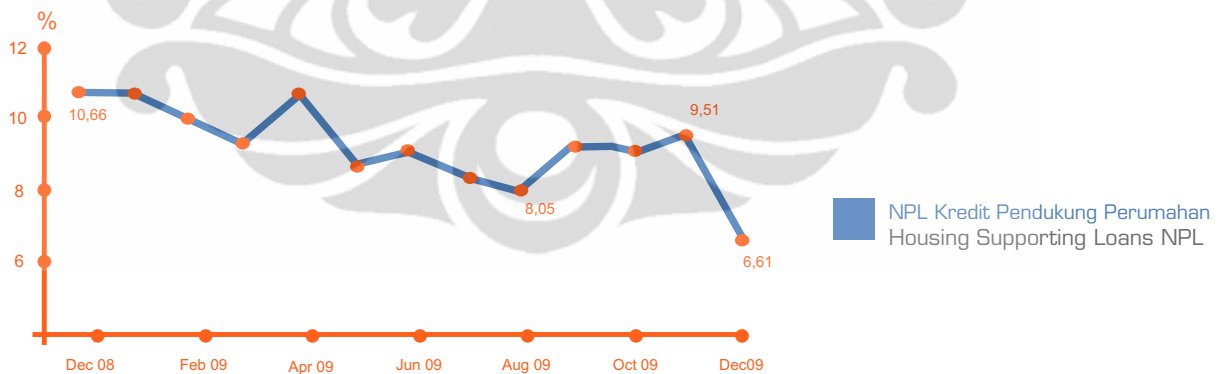
Kredit pendukung perumahan mengalami perkembangan yang menggembirakan pada tahun 2009, baik dari segi pertumbuhan realisasi kredit maupun kualitas kredit. Penyaluran kredit mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, dengan peningkatan sebesar 127,54% pada tahun 2009 dibandingkan tahun sebelumnya. Kualitas kredit juga mengalami perbaikan yang signifikan, dari NPL sebesar 10,66 pada akhir tahun 2008 menjadi 6,61 pada akhir Desember 2009.

Housing supporting loans showed positive growth in 2009, both in loan disbursement and quality. Loan disbursements have increased over the last three years, with a 127.54% increase in 2009 compared to previous year. Loans performance also improved significantly, from an NPL of 10.66 at the end of 2008 to 6.61 at the end of December 2009.

Pertumbuhan Kredit Pendukung Perumahan Tahun 2007-2009
Growth of Housing Supporting Loan, 2007-2009

Tahun Year	Realisasi Kredit Pendukung Perumahan(dalam miliar Rp) Housing Supporting Loans Disbursement (in billion Rp)
2007	141
2008	305
2009	694

NPL Kredit Pendukung Perumahan
Housing Supporting Loans NPL



Untuk meningkatkan pertumbuhan dan agar lebih mampu bersaing di pasaran, Bank BTN menerapkan langkah strategis dari sisi kredit konstruksi dan pendukung perumahan, yaitu dengan membuat keringanan kebijakan bagi debitur-debitur potensial seperti pembebasan penyerahan *fixed asset*, pemberian suku bunga khusus (bagi pengembang prima), dan pemberian keringanan biaya provisi atas debitur prima.

To increase growth and to be more competitive in the market, Bank BTN adopted a strategic action for construction loans and housing supporting loans, by making relief policies for potential debtors, such as the delivery liberation of fixed assets, provision of special interest rates (for prime developers), and provision of fee waivers for prime debtors.

- **Kredit Usaha Rakyat (KUR)**
Sebagai salah satu dari enam bank milik negara

- **Micro Loans (KUR)**
As one of six state-owned banks working in



yang bertanggung jawab dalam program pemberian kredit keuangan mikro, Bank BTN memiliki KUR dengan jumlah pinjaman maksimal Rp 50 juta kepada unit usaha mikro. Sedangkan pada sektor UKM, Bank BTN memberikan pinjaman modal kerja atau investasi antara Rp 50 juta hingga Rp 500 juta untuk usaha kecil dan menengah.

KUR modal kerja memiliki batas peminjaman maksimal tiga tahun dan dapat diperpanjang hingga dua kali. Sedangkan jangka waktu KUR investasi maksimal lima tahun atau apabila lebih harus dengan persetujuan Direktur Supervisi Bidang Kredit. Selain itu, jaminan yang diberlakukan bagi kredit ini adalah proyek terkait dan penjaminan dari sumber eksternal. Kredit ini memiliki tingkat suku bunga mengambang maksimum per tahun 24% untuk kredit sampai dengan Rp 5 juta dan 16% untuk kredit di atas Rp 5 juta berdasarkan peraturan Bank Indonesia.

Total debitur KUR tahun 2009 sebanyak 2.174 debitur mengalami peningkatan sebesar 109,85% dibandingkan debitur pada tahun 2008 sebanyak 1.036 debitur. Tingkat NPL tahun 2009 sebesar 2,80% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2008 sebesar 0,41%. Hal ini seiring dengan penurunan realisasi KUR tahun 2009 dengan total hanya 71,29% dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2009.

- **Kredit Linkage Program**

Melalui kredit ini, Bank BTN menjalin kerjasama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk disalurkan lagi kepada Usaha Mikro Kecil dan

microfinance lending, Bank BTN has a maximum KUR loan amount of Rp 50 million for micro units. While for the SME sector, Bank BTN provides working capital loans or investments between Rp 50 million to Rp 500 million for small and medium enterprises.

The maximum limit for KUR for working capital loans is three years, with the option of renewal up to two times. KUR for investment loans is five years. If a longer loan term is required, it must be approved by the Loan Supervisory Director. In addition, the collateral for these loans must be from related projects and from external sources. This loan has a floating interest rate with a maximum of 24% per year for loans up to Rp 5 million, and 16% for loans above Rp 5 million in accordance with Bank Indonesia regulations.

Total KUR debtors recorded a significant increase from 1,036 in 2008 to 2,174 in 2009, or 109,85%. NPL also increased from 0.41% in 2008 to 2.80% in 2009. This is in line with the decline of KUR disbursements in 2009, reaching a total of only 71.29% of the Bank BTN's Work Plan and Budget (WP&B) for 2009.

- **Linkage Loan Programme**

Through this loan, Bank BTN collaborated with the Permodalan Nasional Madani (PNM) to be distributed again to Micro Small and Medium Enterprises



Menengah (UMKM) yang juga dikelola oleh PNM. Selain itu, Bank BTN juga menyalurkan pinjaman keuangan mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi)

- **Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi).** Pinjaman ini umumnya memiliki jatuh tempo satu tahun dan dapat diperpanjang dua kali atas permintaan debitur untuk tambahan dua tahun. Kredit ini umumnya memiliki tingkat suku bunga mengambang. Kebijakan kredit di sektor ini, salah satunya pemberian kebijakan khusus bagi calon debitur potensial menurut penilaian kantor cabang, di antaranya meliputi:
 - Penurunan biaya provisi sampai dengan 0,5%
 - Penurunan suku bunga sampai dengan 0,5%
 - Penambahan jangka waktu kredit
 - Penurunan rasio *coverage* agunan dengan di-cover asuransi kredit untuk BUMN
 - Kelonggaran biaya administrasi

(MSMEs), which is also managed by the PNM. Bank BTN also provides microfinance loans through rural banks (BPR) as well as saving and credit cooperative (Cooperatives)

- **Credit Cooperatives (Cooperatives).** These loans generally have maturities of one year and can be extended twice at the request of the debtor for an additional two years. These loans generally have floating interest rates. The loan policy in this sector includes giving a special policy for potential borrowers upon the branch office's assessment, which takes into consideration:
 - Reduction of provision cost up to 0.5%
 - Lower interest rates up to 0.5%
 - Addition of loan terms
 - Reduction of the collateral coverage ratio by loan insurance for SOE
 - Flexibility in administrative costs

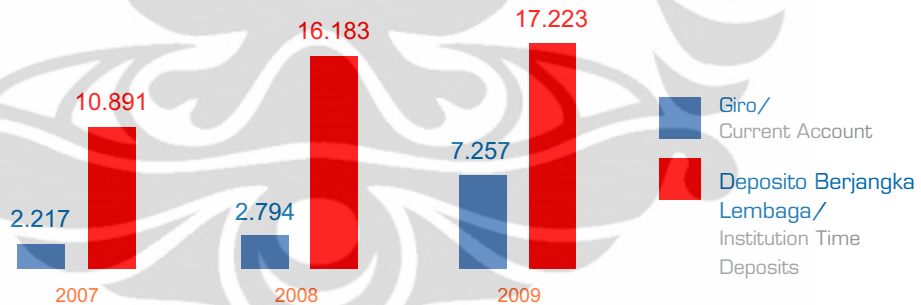
PRODUK PENDANAAN KOMERSIAL

Bank BTN menyediakan produk-produk pendanaan komersial dalam bentuk giro dan deposito berjangka lembaga. Semua produk tersebut menghasilkan kinerja yang menggembirakan selama tahun 2009 sebagaimana terlihat dari tabel dibawah ini:

COMMERCIAL FUNDING PRODUCTS

Bank BTN provides commercial funding products in the form of demand deposits and institutional time deposits. These products have shown positive results, through year 2009 as described below:

Pertumbuhan Pendanaan Komersial Tahun 2007-2009 (dalam miliar Rp)
Growth of Commercial Funding, 2007-2009 (in Rp billion)



Pertumbuhan Giro dan Deposito Berjangka Lembaga ini merupakan hasil dari upaya Bank BTN untuk meningkatkan kerjasama dengan lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi, rumah sakit dan lembaga lainnya, untuk pengelolaan dana operasional. Dalam Program Pengembangan Operasional ini, nasabah dapat menjaga saldo minimum dalam bentuk rekening koran di Bank BTN selama dua atau tiga tahun.

The positive growth of demand deposits and institutional time deposits is the result of Bank BTN's efforts to improve cooperation with institutions, both governmental agencies, private sector, universities, hospitals and other institutions, for the management of operational funds. In the Operational Development Program, customers can maintain a minimum balance in a checking account at Bank BTN for two or three years.

JASA

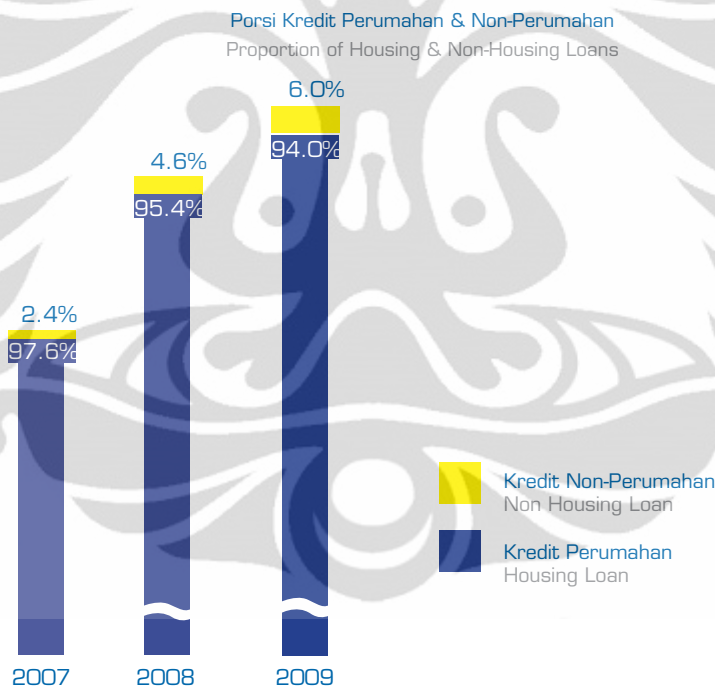
Bank BTN juga menyediakan layanan *fee based* seperti bank garansi, fasilitas pembayaran gaji secara *online*, penerimaan setoran pendidikan (SPP) dari sekolah atau perguruan tinggi serta berperan sebagai *servicer* pada transaksi sekuritisasi dan sebagai administrator kredit *channeling* dari Pemerintah.

SERVICE

Bank BTN also provides fee-based services, such as bank guarantees, an online payment facility, school fee payments (SPP) linked directly to schools or colleges, as well as act as securitization transaction services as an administrator and loan channel from the government.

Sesuai dengan bisnis inti (*core business*) yang dimiliki Bank BTN, maka fokus kegiatan tetap berada pada pemberian KPR kepada golongan menengah ke bawah, dimana Bank BTN merupakan *market leader* di segmen ini. Meskipun demikian, Bank BTN secara bertahap juga mulai memperluas usahanya dimulai dari pemberian KPR kepada golongan menengah atas, kemudian memulai pemberian kredit perumahan Non KPR, hingga pemberian kredit Non Perumahan seperti kredit komersil skala menengah dan besar.

Didukung oleh *customer base* yang besar (sekitar 4 juta nasabah kredit dan simpanan per akhir 2009), maka Bank BTN memiliki landasan yang kuat untuk melakukan *cross-selling* produk dan jasa yang ditawarkan serta melakukan ekspansi jumlah portofolio kredit non-perumahan. Hal ini tercermin dari bertumbuhnya porsi portofolio kredit non-perumahan sejak tahun 2006 hingga 2009 lalu seperti terlihat pada grafik di bawah ini.



Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka di tahun 2010 dan seterusnya, Bank BTN akan melanjutkan implementasi program *Loan Origination System (eLoan)* guna mempercepat proses kredit serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan *Credit Scoring Model (CSM)*. Semua ini diharapkan akan mempercepat proses pencapaian diversifikasi kredit perumahan dan non perumahan 75%:25% dengan fokus pada segmen komersial UKM di tahun 2012.

In accordance with Bank BTN's core business, our focus remains on providing mortgages to the lower-middle class, where Bank BTN is the market leader. Nevertheless, Bank BTN has also begun to gradually expand its business, starting from disbursing mortgages to the upper-middle class, to non-mortgage and non-housing, such as medium and large commercial loans.

Supported by a large customer base (approximately 4 million loan and savings account customers as of the end of 2009), Bank BTN has a strong foundation for cross-selling products and services offered, and to expand its non-mortgage portfolio. This is reflected in the growth of the non-mortgage portion of the loan portfolio from 2006 to 2009, and as shown in the table below.

In line with the above mentioned factors, in 2010 and forward, Bank BTN will continue to implement the Loan Origination System (eLoan) program to accelerate the loan process and make improvements and enhancements in Credit Scoring Model (CSM). This is expected to accelerate the process of achieving a 75%:25% diversification in housing and non-housing loans, and focus on the SME commercial segment in 2012.

UNIT USAHA SYARIAH

Sharia Business Unit

Selain melayani produk perbankan konvensional, sejak 2004 Bank BTN juga menawarkan produk dan jasa pembiayaan dan pendanaan komersial serta konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Untuk setiap produk dan jasa Syariah yang ditawarkan, Bank BTN berkonsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas dua anggota dan keduanya merupakan anggota dari Dewan Syariah Nasional.

Other than providing conventional banking products, since 2004 Bank BTN has been offering both loans and funding for commercial and consumer products and services, based on the principles of Islamic laws. For each sharia product and service the Bank offers, Bank BTN consulted the Sharia Supervisory Board, which consists of two members who are both members from National Sharia Board.

SYARIAH Sharia

Produk Pembiayaan/Financing Products

- Pembiayaan KPR BTN iB
- Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB
- Pembiayaan Modal Kerja BTN iB
- Pembiayaan Investasi BTN iB
- Pembiayaan Yasa Griya BTN iB (Pembiayaan Konstruksi)
- Pembiayaan KPR Indensya
- Pembiayaan Gadai Emas iB
- BTN iB Housing Financing
- BTN iB Vehicle Financing
- BTN iB Working Capital Financing
- BTN iB Investment Financing
- Yayasan Griya BTN iB Financing (Construction Financing)
- BTN iB Indensya Housing Financing
- BTN iB Gold Pawn Financing

Produk Dana/Funding Products

- Tabungan Investa Batara iB
- Tabungan Batara iB
- Tabungan Baitulah Batara iB
- Deposito Batara iB
- Giro Batara iB
- Giro Investa iB
- Investa Batara iB Saving Account
- Batara iB Saving Account
- Baitulah Batara iB Saving Account
- Batara iB Time Deposit
- Batara iB Current Account
- Investa iB Current Account





Kinerja Unit Usaha Syariah (UUS) di tahun 2009 memberikan kontribusi yang sangat baik pada kinerja keuangan Bank BTN. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan total laba sebesar 287% dari total laba sebelumnya di tahun 2008 sebesar Rp 8 miliar menjadi sebesar Rp 32 miliar di tahun 2009. Produk kontributor utama kinerja tersebut adalah produk pembiayaan konsumen (KPR BTN iB) dan pembiayaan komersial yang meliputi Pembiayaan Modal Kerja BTN iB dan Yasa Griya BTN iB.

Bank BTN juga memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan lewat jaringan Bank BTN UUS yang tersebar di 20 Kantor Cabang Syariah (KCS) dan 119 Kantor Layanan Syariah (KLS). Unit Usaha Syariah Bank BTN memfokuskan bisnis usahanya pada produk pembiayaan rumah, pembiayaan komersial dan transaksi ritel lainnya. Kelebihan yang dimiliki oleh produk Unit Usaha Syariah adalah pengembangan pada produk-produk pembiayaan sektor perumahan, mengingat Bank BTN merupakan bank penyalur kredit perumahan terbesar di Indonesia.

PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

Pada tanggal 31 Desember 2009, posisi pembiayaan Syariah Bank BTN mengalami peningkatan sebesar 59,55% menjadi Rp 1.996 miliar dari Rp 1.251 miliar pada periode yang sama tahun 2008. Bank BTN menawarkan produk dan layanan pembiayaan syariah sebagai berikut:

The performance of Sharia Business Unit in 2009 has made a significant contribution to Bank BTN's financial performance. This is shown in the increase in total income of 287% on the previous year, from Rp 8 billion to Rp 32 billion. The main contributors were consumer financing (KPR BTN iB) and commercial financing, which are made up of BTN iB Working Capital Financing and Yasa Griya BTN iB.

Bank BTN also provides ease for its customers in doing banking transactions through the Shariah Business Unit that has 20 Sharia Branches (KCS) and 119 Sharia Service Offices (KLS). The focus of the Sharia Business Unit is on housing finance products, commercial loans and other retail transactions. The product strength in the unit is the development on the financing products in housing sector, given that Bank BTN is the largest mortgage provider in Indonesia.

SHARIA FINANCING PRODUCTS

As of December 31, 2009, Bank BTN's outstanding sharia loans experienced a like-for-like increase of 59.55% to Rp 1,996 billion from Rp 1,251 billion. Bank BTN offers the following sharia funding products and services:



- **Pembiayaan KPR BTN iB dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB**
Melalui produk pembiayaan ini, Bank BTN melakukan dengan prinsip jual beli (Murabahah) dengan tingkat harga dan margin yang disepakati bersama nasabah. Berdasar prinsip tersebut, Bank BTN membeli rumah, apartemen atau kendaraan bermotor yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dalam tingkat harga dan margin yang telah disepakati bersama. Pembayaran oleh nasabah dilakukan secara periodik dengan jumlah tetap sama halnya dengan pembayaran angsuran kendaraan atau rumah konvensional pada umumnya.
- **Pembiayaan Modal Kerja BTN iB**
Dalam pembiayaan modal kerja ini menggunakan akad Mudharabah, Bank BTN menyediakan modal kerja bagi pendanaan nasabah bisnis (Mudharib). Kompensasi yang diperoleh Bank BTN berasal dari bagi hasil terhadap pendapatan yang didapat dari kegiatan bisnis yang sedang dibiayai.
- **Pembiayaan Yasa Griya BTN iB**
Melalui pembiayaan Yasa Griya ini menggunakan akad Musyarakah, Bank BTN menyediakan produk ini bagi pengembang perumahan dan bisnis sejenis untuk menyediakan modal kerja guna membiayai konstruksi proyek perumahan, termasuk infrastruktur terkait. Bagi hasil yang diperoleh Bank BTN berasal dari bagi hasil pendapatan nasabah yang dihasilkan dari bisnis yang dibiayai.
- **Pembiayaan KPR Indensya BTN iB**
Dalam perbankan Syariah, akad Istishna menjadi dasar pembiayaan perumahan Indensya. Prinsip tersebut mengharuskan Bank BTN membeli perumahan yang dibangun oleh suatu pengembang berdasarkan permintaan atau pesanan nasabah. Lalu Bank BTN menjual perumahan tersebut kepada nasabah dengan harga dan tingkat keuntungan yang telah disepakati. Adapun sistem pembayaran oleh nasabah dilakukan secara periodik dengan jumlah yang tetap hampir sama dengan pembayaran angsuran KPR rumah konvensional
- **Pembiayaan Investasi BTN iB**
Pembiayaan ini diberikan kepada nasabah lembaga atau Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) seperti pembelian mesin, pembangunan atau rehabilitasi gedung, pengadaan peralatan laboratorium dan lainnya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini menggunakan prinsip akad jual beli (Murabahah) atau kerjasama atau *joint venture* (Musyarakah), dengan sistem pembayaran oleh nasabah dilakukan sesuai *cash flow* yang telah disepakati.
- **Pembiayaan Gadai Emas iB/Rahn**
Pembiayaan jenis pegadaian ini berdasarkan harta nasabah berupa emas sebagai barang yang digadaikan. Bank BTN mengenakan imbal jasa atas penyimpanan barang gadai (Ujrah).
- **KPR BTN iB Home and Vehicle Financing**
These loan products are based on Murabahah (buy and sell) principle with jointly agreed pricing and margins. Using this principle, Bank BTN purchases homes, apartments or vehicles chosen by customers and then sells them to the customers under the agreed pricing and margin schemes. Pre-determined payments are made periodically by customers, similar to the installments for conventional vehicles or homes.
- **BTN iB Working Capital Financing**
The product adopts the Mudharabah pledge, in which Bank BTN provides working capital for funding customers' businesses (Mudharib). The compensation for the Bank comes from the yield sharing generated by the financed business.
- **Yasa Griya BTN iB Financing**
Through Yasa Griya Financing using the Musyarakah pledge, Bank BTN offers this product for housing and related businesses, including infrastructure. The yield share earned by Bank BTN comes from the customers' revenue sharing generated from the financed business.
- **KPR Indensya BTN iB Financing Funding**
In sharia banking, the Istishna principle is used as the basis for Indensya housing finance. The principle requires Bank BTN to buy houses in housing estates built by a developer as ordered by customers. Bank BTN then resells the house for the agreed price and profit. The system for the payment is a periodic fixed amount, like the installment payment for conventional mortgages.
- **BTN iB Investment Financing**
This funding is channeled to institutional or corporate clients for them to meet their capital expenditure needs, such as machinery purchases, building construction or renovations, procurement of laboratory equipments and other expenses. This funding uses the buy and sell principle (Murabahah), or cooperation or joint ventures (Musyarakah). The payment system by clients is based on the agreed cash flow.
- **Gadai iB/Rahn (Gold Pawn Financing)**
This financing is based on the customers' gold assets, serving as a pawned asset. Bank BTN applies fees for the storage of pawned goods (Ujrah).

Pembiayaan Syariah baru yang disalurkan oleh Bank BTN selama tahun 2009 mengalami peningkatan sebesar 33,64% menjadi Rp 1.407 miliar dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 1.053 miliar.

The total of sharia financing disbursed by Bank BTN in 2009 rose 33.64% to Rp 1.407 billion compared to Rp 1.053 billion in the previous year.

Realisasi Pembiayaan Syariah Dari Tahun 2007 Hingga 2009 (Dalam Miliar Rp)
Sharia Financing Disbursement From 2007 to 2009 (In Billion Rp)

Pembiayaan / Funding	2007	2008	2009
KPR RSH Syariah RSH Sharia Mortgages	46	88	71
KPR Syariah Komersial Commercial KPR Sharia	148	317	354
Swagriya Syariah Swagriya Sharia	-	-	13
Musyakarah Musyakarah	31	132	155
Multiguna Syariah Sharia multipurpose	39	30	4
Gadai Pawn	-	-	266
Mudharabah Mudharabah	132	473	721
Pembiayaan Investa Syariah Investa Sharia Financing	-	13	90
Total	396	1.053	1.407

PRODUK PENDANAAN SYARIAH

Hingga 31 Desember 2009, pendanaan Syariah Bank BTN mencapai Rp 1.447 miliar bila dibandingkan pada 31 Desember 2008 produk ini meningkat sebesar 110,83% dari Rp 686 miliar. Produk pendanaan Syariah memiliki rekening nasabah sebanyak 49.583 rekening.

Bank BTN memiliki produk-produk pendanaan Syariah yang ditawarkan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

- **Tabungan Investa Batara iB**
Pada perbankan Syariah, produk ini termasuk rekening tabungan yang berlandaskan pada prinsip Mudharabah (bagi hasil). Pada prinsipnya, produk pendanaan ini berlaku sebagai investasi dalam artian nasabah akan menerima pembagian bagi hasil sesuai nisbah (rasio) yang disepakati dari Bank BTN dan tentunya akan dibayarkan ke rekening secara bulanan. Terjadi peningkatan jumlah total Tabungan Investa Batara iB sebesar 148,65% dari Rp 84 miliar di tahun 2008 menjadi Rp 124 miliar di tahun 2009.
- **Tabungan Batara iB**
Prinsip Wadiah atau titipan menjadi landasan penawaran produk pendanaan syariah jenis ini kepada nasabah Bank BTN. Bagi nasabah produk pendanaan ini, Bank BTN tidak menjanjikan untuk memberikan tambahan atau hadiah kecuali dalam

SHARIA FUNDING PRODUCTS

By December 31, 2009, Bank BTN's Sharia funding reached Rp 1,447 billion. Compared to the corresponding period in the previous year, the product soared by 110.83% from Rp 686 billion, with a total of 49,583 accounts.

Bank BTN has the following sharia funding products for our customers:

- **Investa Batara iB Savings**
The product is based on the Mudharabah (yield share) principle. Adopting the principle, the funding product serves as an investment. That means customers will receive yield share from Bank BTN based on the agreed ratio. The amount will be transferred into the account monthly. There has been a 148.65% increase in Investa Batara iB Savings products, from Rp 84 billion in 2008 to Rp 124 billion in 2009.
- **Batara iB Savings**
The Wadiah, or deposit principle, is the basis for offering the product to Bank BTN's customers. Bank BTN offers no extras or rewards for customers, with an exception of athaya/ unpromised bonus. Meanwhile, the rewarding of bonuses is voluntary



bentuk bonus yang tidak diperjanjikan (athaya). Sementara itu, pemberlakuan pemberian bonus sifatnya sukarela dan saat ini Bank BTN mengambil kebijakan pemberian bonus bulanan, sehingga nasabah akan menerima pembagian bonus, yang dibayarkan ke rekening secara bulanan. Hingga 31 Desember 2009, jumlah total Tabungan Batara iB meningkat 177,48% dari Rp 43 miliar di tahun 2008 menjadi di Rp 95 miliar di tahun 2009.

- **Tabungan Baitulah Batara iB**

Tabungan jenis ini khusus digunakan untuk kebutuhan naik haji nasabah dan didasarkan pada prinsip Mudharabah. Pada produk ini, nasabah akan menerima pembagian bagi hasil sesuai nisbah (rasio) yang telah disepakati. Pembayaran bagi hasil tersebut akan diberikan ke rekening nasabah secara bulanan. Hingga 31 Desember 2009, jumlah total Tabungan Haji Baitullah Batara iB adalah Rp 2 miliar dengan total nasabah 696 orang termasuk mereka yang telah terdaftar di SISKOHAT DEPAG.

- **Deposito Batara iB**

Deposito jenis ini dapat dijadikan sebagai investasi dan menggunakan prinsip Mudharabah, yang merupakan bentuk kemitraan bisnis antara Bank BTN dan nasabah. Pada prinsipnya, nasabah dapat menarik rekening ini hanya pada saat tertentu berdasarkan kesepakatan antara Bank BTN dengan nasabah. Selain itu, pihak nasabah sebagai pemilik dana (sohibul maal) menyediakan dana dan bank sebagai pengelola dana (mudharib) bertanggung jawab untuk mengelola dana. Hasil investasi akan dibagi antara nasabah dan bank berdasarkan nisbah (rasio) bagi hasil yang telah disepakati bersama. Adapun jumlah total Deposito Batara iB meningkat 227,44% dari Rp 501 miliar di tahun 2008 menjadi di Rp 1.139 miliar di tahun 2009.

- **Giro Batara iB**

Pada produk ini, nasabah dapat menarik dana dari rekening kapan saja dan tidak menerima imbalan kecuali dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan. Pada prinsipnya, giro ini berdasarkan prinsip wadiah atau titipan. Sementara itu, jumlah total Giro Batara iB meningkat 177,97% dari Rp 59 miliar di tahun 2008 menjadi Rp 105 miliar di tahun 2009.

- **Giro Investa iB**

Nasabah diharuskan menjaga saldo minimal tertentu selama jangka waktu yang disepakati dan akan menerima bagi hasil sesuai nisbah atau rasio yang disepakati. Selain itu, giro yang baru diluncurkan pada November 2009 ini berdasarkan prinsip Mudharabah. Hingga 31 Desember 2009, jumlah nasabah giro Investa iB tahun ini sebanyak 36 nasabah dengan saldo sebesar Rp 3 miliar.

in nature and presently Bank BTN is employing a monthly bonus policy. Thus, customers will receive a share of bonus paid to their accounts every month. By December 31, 2009, the total amount of Batara iB Savings was up 177.48%, from Rp 43 billion in 2008 to Rp 95 billion in 2009.

- **Baitulah Batara iB Savings**

This saving is specifically intended for customers' hajj pilgrimages, and is based on the Mudharabah principle. The product will allow customers to receive the yield share based on an agreed ratio. The payment of yield shares will be deposited in the customer's account every month. By December 31, 2009, the total amount of Baitullah Batra iB Hajj Savings was Rp 2 billion, with 696 customers, including those listed in the SISKOHAT DEPAG (Indonesian Department of Religions).

- **Batara iB Time Deposits**

The time deposit can be used as an investment and adopts the Mudharabah principle, which is a partnership between the Bank and its customers. In principle, customers can withdraw their accounts over a certain period, as per agreement between Bank BTN and the customer. Customers, as the fund owners (sohibul maal), provide the funds, while the bank, as the fund manager (mudharib), is responsible for managing the funds. The investment yield is shared between the customers and the Bank based on the previously agreed yield share ratio. The total amount of Batara iB time deposits rose 227.44% from Rp 501 billion in 2008 to Rp 1,139 billion in 2009.

- **Batara iB Current Accounts**

One feature of the product is that customers are able to withdraw funds from their account anytime and do not receive any returns except in form of unpromised bonuses. Basically, the current account is based on the wadiah, or deposit, principle. The total amount of Batara iB current accounts leapt 177.97% from Rp 59 billion in 2008 to Rp 105 billion in 2009.

- **Investa iB Current Accounts**

This is a current account in which customers are required to maintain a minimum balance for a particular period and will receive a yield share based on the agreed ratio. The giro also adopts the Mudharabah principle. By December 31, 2009, the number of Investa iB current account customers was 36, with a total balance of Rp 3 billion.

Peningkatan *Brand Awareness* Produk Syariah

Untuk meningkatkan *brand awareness* dari Produk Pembiayaan Syariah, sepanjang tahun 2009 Bank BTN berpartisipasi pada acara-acara seminar

Brand Awareness Enhancement for Sharia Products

To further raise brand awareness of Sharia Financing Products, throughout 2009 Bank BTN participated in seminars related on sharia financing products. The

yang berhubungan dengan produk-produk Pembiayaan Syariah. Pemasaran khusus dilaksanakan di acara seminar dengan melakukan *marketing* langsung yang diikuti dengan penjualan perseorangan. Promosi seperti itu terbukti mampu menggenjot bisnis ini.

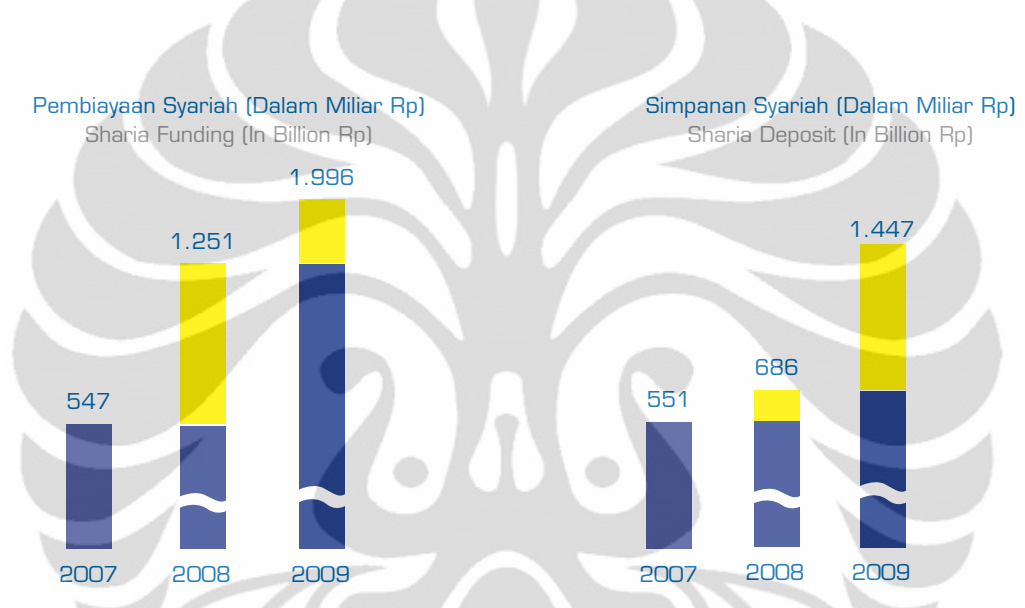
RENCANA KE DEPAN BISNIS SYARIAH

Bank BTN bertekad untuk meneruskan pengembangan bisnisnya demi memberikan produk dan pelayanan terbaik kepada para nasabah di sektor perbankan Syariah. Untuk itu Bank BTN berencana menambah jumlah cabang guna mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi di BTN Syariah yang meliputi 11 Kantor Cabang Pembantu Syariah (KCPS), 92 Kantor Layanan Syariah pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Konvensional.

marketing activities carried out at these events were direct marketing, followed up with individual sales. This kind of promotion has proved to effective to boost the business.

FUTURE PLANS FOR SHARIA BUSINESS

Bank BTN will strive to sustain its business development in a bid to provide the best products and services to our customers in the sharia banking sector. Bank BTN plans to add 11 sharia sub-branches (KCPS), 92 sharia service offices located in the conventional branches and sub-branches so that customers can do banking transactions in Sharia BTN with more ease.



Bisnis Syariah merupakan bidang pertumbuhan baru yang sangat potensial bagi Bank BTN dimana pertumbuhannya dari tahun ke tahun sangat pesat dan menjanjikan (di atas 100%).

Sharia banking has a high potential for growth for the Bank, which is rapidly escalating from year to year (above 100%).

Sedangkan dari sisi produk Syariah, Bank BTN juga menambah produk-produk pembiayaan baru seperti KPR MMQ BTN iB, Multijasa BTN iB, Suka-Suka BTN iB dan Syukur BTN iB. Sementara untuk produk dana, BTN Syariah akan meluncurkan *Deposit on Call* Batara iB, Tabungan Terencana Batara iB, dan TabunganKU iB. Bank BTN juga selalu berusaha untuk berinovasi dan memanfaatkan teknologi dengan menambah fitur-fitur baru seperti Kartu Debit, Kartu BTN iB, SPP Online Batara iB, Payroll Batara iB, dan lain-lain.

From the product side, Bank BTN will also add financing loan products such KPR MMQ BTN iB, Multijasa BTN iB, Suka-Suka BTN iB and Syukur BTN iB. As for funding, BTN Sharia will launch Deposits on Call Batara iB, Terencana Batara iB Savings and TabunganKu iB. Bank BTN always seeks to innovate and optimize technology by providing more new features, such as debit cards, BTN iB cards, school fee payments (SPP Online Batara iB), Batara iB Payroll and others.

Semua kegiatan dan program pengembangan di bidang Syariah diharapkan semakin mendukung pertumbuhan Bank BTN ke depan. Bagi Bank BTN, kinerja operasional yang terus menunjukkan pertumbuhan turut mendorong upaya memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

All development activities and programs in the sharia sector are expected to further support future growth of Bank BTN. For Bank BTN, the consistently growing operational performance also contributes to the efforts in providing added value for our stakeholders.

PEMASARAN

Marketing

Di tengah persaingan perbankan di Indonesia yang semakin ketat, Bank BTN masih mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar di sektor pembiayaan perumahan. Strategi pemasaran yang cermat dan tepat sangat berperan dalam penguasaan pangsa pasar tersebut.

Menilik pada bisnis inti Bank BTN, saat ini tetap berfokus pada pemberian KPR untuk masyarakat menengah ke bawah dimana posisinya sebagai *market leader* pada segmen ini. Tetapi upaya pengembangan usaha terus dilakukan Bank BTN, salah satunya merujuk pada sasaran menengah ke atas melalui pemberian kredit perumahan Non KPR hingga pemberian kredit Non Perumahan seperti Kredit Ringan Batara (kredit tanpa agunan).

Perluasan segmentasi pasar juga dilakukan Bank BTN seiring dengan pengembangan produk kredit dilakukan melalui pengembangan target konsumen. Pada produk KPR, sasaran nasabah yang semula tertuju pada debitur menengah ke bawah akan diperluas hingga ke debitur KPR menengah ke atas hingga debitur perumahan lainnya.

Selain itu, Bank BTN yang selama ini menjangkau debitur ritel perorangan akan dikembangkan menjadi debitur perumahan lainnya (Non KPR) hingga korporasi. Semula Bank BTN membidik debitur perumahan, ke depan akan mengembangkan sasaran pada debitur non-perumahan. Selama ini, Bank BTN melakukan kegiatan penghimpunan dana melalui penawaran produk seperti Tabungan Batara, Tabungan Batara Prima, Tabanas Batara, eBatara Pos, Giro, dan Deposito. Sedangkan produk jasa layanan meliputi pengiriman uang, fasilitas pembayaran telepon, listrik, ponsel, Wali Amanat, serta Bank Garansi.

Dalam kegiatan operasionalnya, Bank BTN tetap mengupayakan pembinaan terhadap debitur tersebut baik yang lancar memenuhi kewajiban maupun tidak, karena sebagai bagian dari pelayanan. Sejalan dengan pemberian kredit yang dijamin berlangsung aman dan lancar tentunya Bank BTN dapat tetap mempertahankan kualitas aktiva produktif.

Untuk merealisasi kredit tersebut dibutuhkan dana yang besar sehingga Bank BTN meningkatkan usaha penghimpunan dana masyarakat dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengubah jenis tabungan yang terdiri dari berbagai macam jenis menjadi satu jenis, yaitu Tabungan Batara yang sifatnya lebih fleksibel. Tabungan Batara memberikan banyak kegunaan bagi para penabung antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh KPR Bank BTN.

Tabungan yang ditawarkan Bank BTN saat ini ada empat jenis yaitu Tabungan Batara, Tabungan Batara Prima, Tabanas Batara dan eBatara Pos. Untuk Tabanas Batara dan eBatara Pos dilayani melalui Kantor Pos. Bank BTN hingga saat ini terus mempromosikan keempat jenis

Despite challenges and intensifying competition, Bank BTN has retained its market leadership in the housing finance sector. A careful and thorough marketing strategy plays an important role in preserving this market share.

Looking at the core business, Bank BTN currently remains focused on providing mortgages for lower-income customers whereas the Bank is the market leader in this segment. However, Bank BTN continues to drive business development, including targeting the middle- to upper-income segment through housing loan disbursement to non-subsidized and non-housing loans such as Kredit Ringan Batara (non collateralize loan).

The expansion of market segmentation is also carried along with the development of Bank BTN's loan products through the development of its customer segmentation. For mortgage products, the targeted segment will be expanded from lower- and middle-income debtors to the middle- and upper-income borrowers and other housing loans.

In addition, Bank BTN has been focussed on reaching individual debtors, and will now expand its retail business to non-mortgage loans to corporations. Bank BTN initially targeted mortgage debtors, and will expand to non-mortgage customers in the future. Bank BTN conducts fund collection activities and provides services. Fund collection is done through offering products like savings accounts, current accounts and deposits, while provision of services includes money transfer services, SMS banking, payment points for the payment of telephone, electricity and phones, trustee and bank guarantees.

In operational activities, Bank BTN gives guidance to debtors, both those who meet their obligations and those who do not, as one of its services. Along with the loans, which are guaranteed to be saved and managed smoothly, the Bank retains the quality of productive assets.

To realize these loan, a large mount of funds is required to increase the Bank's community fundraising efforts. One way to achieve this is by changing the type of savings products, which previously consisted of various types, to individual products, namely Tabungan Batara, which is more flexible in nature. Tabungan Batara has many uses for the customers, and is one of the conditions to get a mortgage from Bank BTN.

Bank BTN currently offers fours types of savings accounts: Tabungan Batara, Tabungan Batara Prima, Tabanas Batara and eBatara Pos. Tabungan Batara and Tabanas Batara and eBatara Pos are provided through the Post Office Online. Bank BTN continues to promote all of its savings

tabungan tersebut kepada masyarakat antara lain melalui pemasangan iklan di berbagai media, program undian berhadiah, fasilitas ATM dan lain-lain. Pengembangan fitur produk dan jasa layanan, seperti *SMS banking*, *Host-to-Host Payment* untuk pembayaran tagihan telepon, telepon seluler, SPP mahasiswa dan listrik, serta pembayaran gaji karyawan (*payroll*).

Penghimpunan dana melalui deposito dilaksanakan dengan penetapan bunga yang cukup bersaing di pasar. Sedangkan giro sampai saat ini terus dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas oleh Bank BTN agar dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada nasabah.

Adapun strategi pemasaran untuk masing-masing bisnis utama Bank BTN dijelaskan berikut ini:

Perbankan Konsumer

Strategi yang diterapkan Bank BTN untuk menjaga relasi jangka panjang dengan nasabah melalui penyediaan jasa berkualitas tinggi melalui saluran-saluran yang mudah untuk dijangkau. Bank BTN telah melanjutkan upaya untuk menyederhanakan proses persetujuan kredit lebih efisien melalui peningkatan kewenangan persetujuan kredit pada kantor-kantor cabang dan kantor-kantor cabang pembantu serta layanan kredit 1-5-1.

Aktifitas pemasaran yang berorientasi nasabah dilakukan melalui program penarikan undian dengan total hadiah sebesar Rp 8 miliar pada 2009, pemasangan iklan pada media cetak maupun elektronik, *sponsorship* bagi pengembang perumahan dan pameran, pembukaan outlet perbankan tambahan di mal-mal, program promosi dengan pengembang-pengembang tertentu. Melalui promo di berbagai media tersebut, Bank BTN memberikan kredit sampai dengan 90% dari harga beli serta tingkat suku bunga kredit untuk peminjam. Bank BTN juga memberlakukan promosi khusus untuk kredit perumahan dengan tingkat suku bunga khusus bagi karyawan BUMN dan melalui pemberian hadiah untuk nasabah lama dan karyawan yang membawa nasabah baru bagi Bank BTN.

Untuk Kredit Multi Griya, Bank BTN menerapkan strategi promosi melalui *canvassing* dengan membuka *stand* khusus di perumahan-perumahan, pemasangan spanduk dan penyebaran brosur di perumahan dengan tingkat hunian tinggi. Selain itu, kerjasama dengan kolektor angsuran, *direct selling* dengan mengirimkan surat penawaran pada instansi-instansi, promo khusus dengan memberikan keringanan biaya provisi dan administrasi.

Sedangkan upaya pemasaran untuk produk Kredit Ringan Batara (Kring Batara) melalui kampanye iklan menggunakan saluran *above the line*, salah satunya melalui iklan di media cetak lokal. Selain itu, Bank BTN juga melakukan promosi penjualan melalui *Direct Mail* yakni dengan mengirim surat penawaran dan brosur terkait produk Kring Batara pada perusahaan maupun instansi di seluruh wilayah Kantor Cabang. Selanjutnya *marketing officer* akan menindaklanjuti surat penawaran yang telah disampaikan. Program promosi lain untuk produk Kring Batara juga dilakukan melalui program *fee* kolektor yang progresif dan sosialisasi produk tersebut.

products to the community, including through advertising in various media, lottery events, ATM facilities and others. Development of product features and services, such as SMS banking, Host-to-host payments are available for telephone, cell phone, student tuition and electricity bills, as well as salary payments to employees (*payroll*).

The collection of funds through deposits is secured by setting competitive interest rates in the market. While current accounts to this day continue to be equipped with various facilities by Bank BTN to support increased customer service.

The marketing strategy for each of Bank BTN's main businesses are described below:

Consumer Banking

To maintain long-term relationships with our customers, Bank BTN continues to give high quality services through easy to reach channels. Bank BTN continues its efforts to simplify the loan approval process to be more efficient by increasing the branch and sub-branch offices' authority to approve loans as well as the development of 1-5-1 loan services.

Marketing activities for funds-oriented customers is conducted through prize drawing program, with total prizes worth RP 8 billion in 2009, advertising in print and electronic media, and gifts to loyal customers and employees who bring new customers to the Bank. To support loan growth, Bank BTN provided sponsorship for the activities of housing developers and exhibitions, the opening of additional banking outlets in shopping malls, and promotional programs with certain developers. Through promotions in the media, Bank BTN can provide loans up to 90% of the purchase price of the house. Bank BTN also imposes a special promotion for housing loans with special rates for SOE's employees.

For Kredit Griya Multi, Bank BTN applied a canvassing campaign strategy by opening special stands in housing areas, and installing banners and brochures in housing with high occupancy levels. In addition, the Bank has established partnerships with installment collectors, direct sales through mailings to agencies, and special promotions by providing waivers of fees and administrative costs.

Marketing campaigns for Kredit Ringan Batara (Kring Batara) are supported through an above the line advertising campaign, including ads in local print media. Bank BTN also conducts sales through a direct mail campaign, which sends Batara Kring promotional letters and brochures to companies and institutions in branch areas, which are followed up by marketing officers. Other promotional programs for Kring Batara's products include a progressive program carried out by fee collectors, who introduce the product by socializing it.



Fokus pemasaran perbankan ritel dan upaya ekspansi tertuju pada enam kota terbesar di Indonesia. Bank BTN juga melakukan ekspansi bisnis perbankan pada kota-kota dan propinsi di seluruh Indonesia dengan meningkatkan efisiensi operasional kantor-kantor cabang regional

The retail banking marketing and expansion efforts focus on the six biggest cities in Indonesia. Bank BTN also expanded its banking business in the cities and provinces throughout Indonesia by improving the operational efficiency of regional branch offices.

Perbankan Komersial

Pada segmen ini, Bank BTN melayani nasabah umum melalui *relationship manager* dan *account manager* yang berada di kantor pusat dan kantor cabang. *Relationship manager* bertanggungjawab pada spesialisasi layanan produk pembiayaan Bank BTN dan membangun hubungan serta memberikan solusi keuangan kepada nasabah Bank BTN.

Commercial banking

In this segment, Bank BTN serves customers through relationship managers and account managers located at the headquarters and branch offices. The relationship manager is responsible for Bank BTN's financing products by building relationships and providing financial solutions to customers.

Sedangkan *Account Manager* Bank BTN terspesialisasi pada layanan produk pendanaan, penyaluran solusi investasi, serta memantau pendanaan dan portofolio investasi untuk nasabah umum. Adapun Bank BTN memiliki target nasabah komersial yang beroperasi di sektor telekomunikasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan industri yang terkait dengan perumahan.

Bank BTN account managers are responsible for product funding services, providing investment solutions, and monitoring funding and investment portfolios for customers. Bank BTN targets commercial customers in the telecommunications, infrastructure, health, education and housing-related industries.

Strategi pemasaran dalam bidang kredit konstruksi, Bank BTN berperan aktif dalam pameran konstruksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan organisasi-organisasi pengembang seperti REI dan Apersi. Sedangkan dalam bidang kredit Usaha Mikro dan UKM, Bank BTN berpartisipasi aktif dalam pameran KUMK dan KUR yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Regarding marketing strategies for construction loans, Bank BTN played an active role in the construction exhibition organized by the Ministry of Public Works and organizations such as REI and Apersi developers. While in the field of micro and SME loans, Bank BTN actively participated in KUR and KUMK exhibitions organized by the Ministry of Cooperatives and Small Medium Enterprises.

Selain itu, strategi pemasaran dalam bidang kredit modal kerja dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga *linkage* baik itu antar instansi atau lembaga atau BUMN. Di bidang kredit modal kerja kontraktor, Bank BTN melakukan kontrak kerjasama dengan BUMN seperti PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan PT. Wijaya Karya.

The marketing strategy for working capital loans is carried out in cooperation with linkage institutions, either between institutions, between agencies or between SOEs. In the field of contractors' working capital loans, Bank BTN entered into contracts with SOEs, such as PT. Pembangunan Perumahan (PP) dan PT. Wijaya Karya.

Perbankan Syariah

Program Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008 yang dikeluarkan Bank Indonesia menetapkan target pangsa pasar perbankan Syariah sebesar 5% dari total aset perbankan nasional. Mengacu pada program tersebut, Bank BTN telah berkontribusi melalui komposisi rekening perbankan Syariah sebesar 4% dari total aset pinjaman. Bank BTN bertujuan untuk meningkatkan persentase aset perbankan Syariah menjadi minimal 5%.

Sharia Banking

The Sharia Banking Development Acceleration Program 2007-2008, issued by Bank Indonesia, set a target for sharia banking market share of at least 5% of national banks' total assets. Bank BTN has worked towards meeting the target set in the program, and has currently 4% of total loan assets are sharia banking accounts. Bank BTN aims to increase the percentage of Islamic banking assets to the 5% minimum.

Ke depan, Bank BTN mengembangkan bisnis dengan memaksimalkan program promosi yang bertujuan untuk mengembangkan *brand image*, melalui promosi melalui media elektronik seperti TV dan radio, media cetak, media promosi *outdoor*, pameran dan program sponsor.

Looking ahead, Bank BTN will develop its business by maximizing the promotional program designed to develop a brand image, through an electronic media (TV and radio), print media, outdoor media, promotional, exhibition and sponsorship campaigns.

Selain itu, untuk meningkatkan kesetiaan nasabah, Bank BTN juga menggelar beberapa program seperti undian, hadiah, membuat alat pemasaran untuk menarik nasabah dan membuat perkumpulan. Di sektor pembiayaan, Bank BTN senantiasa mendukung pengembangan program pembiayaan dengan ongkos pemasaran dan membuat alat pemasaran untuk produk-produk pembiayaan.

To improve customer loyalty, Bank BTN also conducts several programs such as lotteries to prizes to attract customers and introduce its services. In the financing sector, Bank BTN continues to support the development of financing programs with marketing costs and by creating marketing tools for financing products.



BERSINERGI DENGAN KOMPETENSI

Bank BTN memiliki komitmen untuk berada di garda depan dalam memberikan layanan prima bagi nasabah. Melalui sinergi kompetensi dalam hal penguasaan teknologi informasi, strategi manajerial yang handal dan sumber daya manusia yang bertanggungjawab, Bank BTN mewujudkan kemantapan menyongsong tantangan ke depan.

TINJAUAN FUNGSIONAL

Functional Review



Synergizing with Competencies

Bank BTN is committed for being a pioneer in delivering service excellence to its customers. Through synergizing its competence in technology information, reliable managerial strategy and responsible human resources, Bank BTN has achieved strong foothold in facing in future challenges.

TEKNOLOGI DAN OPERASI

Technology and Operation

Bank BTN meyakini bahwa Teknologi Informasi memainkan peranan yang penting dalam menentukan posisi persaingan Bank BTN dalam industri perbankan, meningkatkan layanan dan nasabah, memperkuat pengawasan internal dan sistem manajemen risiko.

Arah perkembangan teknologi Bank BTN ke masa depan telah ditetapkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2008-2012 yang merupakan dokumen *blueprint* Teknologi Informasi Bank BTN untuk 4 tahun ke depan. Pada bagian *Roadmap* RSTI di tahun 2010, Bank BTN akan melakukan penambahan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan bisnis dan produk perbankan serta meningkatkan efisiensi.

Berikut ini merupakan deskripsi atas sistem TI Bank BTN saat ini dan rencana pengembangan aplikasi pada sistem tersebut:

- Bank BTN memiliki *Loan Origination System* (LOS), yang disebut dengan *eLoan*, yang dapat mengefisienkan proses persetujuan kredit. Sistem *eLoan* saat ini berbasis *client server* dan akan digantikan dengan sistem berbasis *web* yang menggunakan teknologi *workflow* agar seluruh proses persetujuan kredit dapat termonitor dan terkontrol melalui sistem. Selain itu sistem ini menggunakan teknologi *digital imaging* untuk mempercepat proses informasi dan meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan data. Bank BTN berharap akan sudah sepenuhnya pindah dari sistem LOS lama menjadi sistem berbasis *web* dimana petugas kredit dapat menggunakan akses jarak jauh untuk mendapatkan data dari laptop atau PDA.
- *Collection and Recovery Management System* (CRMS), yang disebut dengan *eColl*, melakukan otomatisasi dan perampingan proses dan kegiatan pengelolaan atau pembinaan kredit. Dengan menggunakan sistem ini petugas penagihan memiliki informasi yang cepat dan akurat atas *terms of payment* debitur, tunggakan serta informasi-informasi lain misalnya janji debitur dalam melakukan pembayaran tunggakan yang pada akhirnya akan menekan nilai NPL. Seperti halnya dengan *eLoan*, Bank BTN memiliki rencana serupa untuk sepenuhnya pindah ke *eColl* berbasis *web* pada Januari 2010.
- Bank BTN saat ini memiliki *Management Information System* untuk memfasilitasi pelaporan data baik untuk pihak internal maupun eksternal. Untuk mempercepat akses dan analisa data Bank BTN sedang melakukan pengembangan *Enterprise Data Warehouse System* dan *Business Intelligence*, termasuk di dalamnya *Customer Relationship Management* (CRM), *Corporate Regulatory Reporting*, *Performance Measurement*, dan *Knowledge Management System* dan diharapkan dapat mulai digunakan pada pertengahan tahun 2010.
- Untuk mempercepat *time to market* terutama untuk produk atau layanan yang bekerja sama dengan pihak ketiga (*host to host*), Bank BTN sedang mengembangkan sistem *Middleware* yang tadinya tidak berbasis *Service Oriented Architecture* (SOA)

Bank BTN believes that Information Technology (IT) plays vital role in determining its position in the banking industry, as well as enhancing its service to customers and strengthening internal control and risk management systems.

The future direction of the development of Bank BTN's technology has been defined in the 2008-2012 IT Strategic Plan (RSTI), which is a blueprint document for the next 4 years. On the RSTI Roadmap for 2010, Bank BTN will enhance the technology aiming to improve the quality and quantity of business service and banking products, as well as to improve efficiency.

The information below describes Bank BTN's current IT system and development plan:

- Bank BTN has a Loan Origination System (LOS) called *eLoan*, which can boost efficiency in the loan approval process. The *eLoan* system is currently client server-based, which will be replaced by the web-based system with workflow technology to allow monitoring and control throughout loan approval process through a system. The system will adopt digital imaging technology to accelerate the information process and improve efficiency in data storage. Bank BTN plans to fully migrate from the old LOS system into a web-based system that enables loan officers to utilize long distance access to data from a laptop or PDA.
- *Collection and Recovery Management System* (CRM), called *eColl* automates and streamlines the process and activities in managing or supervising loans. By using the system, collection officers can obtain information promptly and accurately on debtors' terms of payment, past due payments and other information, such as debtors' pledge to overdue payments, which eventually will minimize the NPL. Similar to the *eLoan*, Bank BTN plans to migrate into the web-based *eColl* by January 2010.
- Bank BTN currently owns a Management Information System to facilitate data reporting for both internal and external parties. To accelerate data access and analysis, Bank BTN is undergoing development on its Enterprise Data Warehouse System and business intelligence, including but not limited to Customer Relationship Management (CRM), Corporate Regulatory Reporting, Performance Measurement and Knowledge Management System. The developed system is expected to be ready for use by mid-2010.
- To accelerate time-to-market information on products or services, Bank BTN is developing a Middleware system in collaboration with a third party (*host to host*). The development will change the non-Service Oriented Architecture (SOA) based



menjadi sistem yang berbasis SOA dan diharapkan dapat terimplementasi pada pertengahan 2010. Sistem ini akan mempercepat pembangunan *interface* dengan pihak ketiga walaupun pihak ketiga tersebut memiliki sistem komunikasi data yang berbeda.

- Bank BTN saat ini sedang melakukan pengembangan sistem *workflow* secara *paperless*, dimana sistem ini akan menyederhanakan dan mengotomatiskan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, kontrol yang lebih baik dan pada akhirnya meningkatkan layanan pada nasabah.
- Pengembangan Aplikasi PSAK 50/55, dengan mengacu pada ketentuan PSAK 50/55 yang merupakan salah satu regulasi akuntansi perbankan yang wajib diterapkan oleh bank di Indonesia pada tahun 2010.

Ke depan arah pengembangan TI adalah memperkaya fasilitas pelayanan yang berbasis TI antara lain:

- a. Pengembangan aplikasi strategis dan inovatif antara lain *Banking 2.0*
- b. *Reach* dan *Richness Delivery Channel*

PENGEMBANGAN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK Mendukung KONTINUITAS USAHA BANK BTN

Bank BTN juga mendapatkan pengalaman berharga akan pentingnya penerapan IT dan *backup* data nasabah setelah peristiwa kebakaran di kantor pusat Bank BTN pada awal Februari 2009. Pada tanggal 2 Februari 2009, terjadi peristiwa kebakaran di *basement* dan asap dari kabel yang terbakar berdampak pada beberapa peralatan dan sistem teknologi. Sistem kemudian dialihkan operasionalnya ke *Disaster Recovery Center*

system with an SOA-based system, which is expected to be implemented by mid-2010. The system will accelerate the development of interface with third parties, regardless of the data communication system used by the third parties.

- Bank BTN is developing a paperless workflow system, which will streamline and automate the business process, increase efficiency and provide a better control, which eventually will improve services to customers.
- The development of General Accepted Accounting Principles (PSAK 50/55) that comply with all prevailing regulations, including the compulsory accounting regulations to be adopted by banks in Indonesia in 2010.

The strengthening of our IT capacity aims to empower IT-based service facilities, such as:

- a. Strategic and innovation applications, such as *Banking 2.0*
- b. *Reach* and *Richness Delivery Channel*

INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT TO SUPPORT BANK BTN BUSINESS CONTINUITY

Bank BTN learned the importance of IT implementation and customer data back-up from the fire incident at Bank BTN's head office in early February 2009. On February 2, 2009 a fire was detected in the basement and smoke from burning cables impacted equipment and several technology systems. The system for operations was then shifted to the Bank's Disaster Recovery Center (DRC), located on a different site. At 11:00 a.m. the same day,

(DRC) yang berada pada lokasi yang berbeda. Pada pukul 11.00 WIB hari yang sama, 58 kantor telah dapat kembali beroperasi dan pada hari kedua layanan telah dapat berjalan seperti sedia kala.

Bank BTN telah memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP) sebagai kesiapan jika terjadi *disaster* dan untuk menjaga kontinuitas operasional teknologi informasi dan mendukung pertumbuhan bisnis Bank BTN. DRP juga berfungsi untuk meningkatkan kapasitas *Data Center* serta melakukan pembangunan *dual data center* yang bersifat *mirroring* secara *real time* pada lokasi yang berbeda. Kebijakan *Business Continuity Plan* (BCP) sebagai standarisasi dalam pelaksanaan jika terjadi kondisi *disaster*, telah selesai disusun dan disahkan sebagai kebijakan Bank BTN.

Dari peristiwa tersebut, Bank BTN melalui Divisi TI mengeluarkan beberapa inisiatif baru di tahun 2009 agar kualitas layanan TI dapat tercapai hasil lebih maksimal serta menghindari risiko reputasi dan risiko operasional yaitu :

- **Inisiatif Implementasi *Dual Data Center* Sistem *Data Center* & *Disaster Recovery Center* (DC&DRC)** sebelum peristiwa kebakaran pada 2009 ternyata tidak cukup memadai untuk mendukung ketersediaan data dan informasi yang senantiasa *realtime* meski kondisi *force majeure* terjadi. Oleh sebab itu, Bank BTN mengembangkan sistem *Data Center* yang dapat senantiasa diakses *realtime* dalam aktifitas bisnis perbankan dan menerapkan pengelolaan data yang lebih baik. Transformasi tersebut diwujudkan dengan mengganti sistem DC&DRC ke sistem *Dual Data Center*. Dengan adanya sistem *Dual Data Center*, DC yang berlaku sebagai DC *production* dapat melakukan perpindahan sewaktu-waktu tanpa harus menunggu kondisi terjadinya bencana/*disaster*. *infrastruktur* dan *Standard Operating Procedure* (SOP) penggantian sistem tersebut telah selesai dilaksanakan di tahun 2009 dan rencananya pada tahun 2011, Bank BTN akan memiliki 2 DC dan 1 *operation center* dimana di tahun 2010 ini sedang dipersiapkan infrastruktur dan aplikasinya.
- **Inisiatif sewa dan kualitas ruangan *Data Center*** Lokasi dan ruangan *Data Center* yang diinginkan Bank BTN diharapkan dapat memenuhi standarisasi sesuai dengan *best practices* perbankan kelas dunia dimana umumnya kebutuhan tersebut hanya dapat disediakan oleh penyedia jasa sewa *Data Center* profesional. Oleh sebab itu, maka pada tahun 2009 operasional *Data Center* telah menggunakan lokasi dan ruangan yang disewa dari pihak ketiga sebagai pengganti DC *site* di kantor pusat Bank BTN.
- **Inisiatif dalam penyusunan dokumen-dokumen kebijakan internal perusahaan yang berhubungan dengan *IT Governance***
Untuk memenuhi kepatuhan dan *IT Governance* (tata kelola TI) terhadap regulasi perbankan yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/15/PBI/2007 mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, maka Bank BTN sedang melakukan penyusunan kebijakan antara lain:
 1. Rencana Strategis Sistem Informasi (RSTI) 2008-2012
 2. Tata Kelola TI
 3. SOP Teknologi Informasi
 4. Taksonomi Informasi

58 offices were able to resume operations, and on the second day the services were back to normal.

Bank BTN's Disaster Recovery Plan (DRP) illustrates its readiness should a disaster strike and aims to secure the continuity of IT operations, as well as as supporting its business growth. The DRP also increased its data centre capacity and has undertaken the installation of dual data center, which has a real-time mirroring feature on different locations. The Business Continuity Plan (BCP) serves as a standard procedure for disaster conditions and has been formulated and formalized as a Bank BTN policy.

The incident has urged the Bank, through its IT Division, to launch a number of new initiatives in 2009 to achieve optimum IT service quality and prevent the following reputation and operational risks:

- **Initiative for Implementation of *Dual Data Center***
The *Data Center* & *Disaster Recovery Center* (DC&DRC) System prior to the fire incident in 2009 was not sufficient to support the availability of real-time data and information during force majeure conditions. Hence, Bank BTN is developing a *Data Center* system with real-time access for banking business activities and is improving data management. The transformation was realized through the replacement of DC&DRC with the *Dual Data Center* system. The new system allows the DC served as DC production to undergo transmission anytime, regardless of whether there is a disaster or not. Infrastructure and Standard Operating Procedures (SOP) of the abovementioned system replacement were finalized in 2009, and in 2011 Bank BTN plans to have 2 DC and 1 operation center, with preparation of the infrastructure and applications to be undertaken in 2010.
- **Initiative for *Data Center* rental and quality in conformity with best practice standards**
The *Data Centre* location and rental are expected to meet the standardization of world class banking best practices. This expectation can be fulfilled by the professional *Data Centre* lease provider. For the abovementioned purpose, in 2009 the operation of the *Data Center* utilized a location leased from a third party, as a replacement for the DC site at Bank BTN head office.
- **Initiative in formulating internal policy documents related to *IT Governance***
To meet the compliance and *IT governance* stipulated in Bank Indonesia Regulation (PBI) No.9/15/PBI/2007 on the Implementation of Risk Management in IT Applications by Commercial Banks, Bank BTN is formulating policies, including:

1. 2008-2012 IT Strategic Plan (RSTI)
2. IT Governance
3. IT SOP
4. Information Taxonomy



INVESTASI TEKNOLOGI INFORMASI DI TAHUN 2009

Adapun anggaran belanja modal (*capital expenditure*) untuk pengembangan TI di tahun 2009 adalah sebesar Rp 158,664 miliar. Berikut proyek-proyek yang berkaitan dengan pencapaian *capex* tersebut adalah antara lain:

- Aplikasi *Loan Origination System (eLoan)*
- Aplikasi *Collection Recovery Management System (eColl)*
- Aplikasi *Enterprise Data Warehouse (EDW)*
- Aplikasi *eProcurement, Aset TI dan Non TI*
- Aplikasi *Middleware*
- Aplikasi PSAK 50/55 dan Sistem Pendukungnya.
- Aplikasi *Electronic Journal ATM*
- Aplikasi *OPICS (Upgrade)*
- Aplikasi Syariah (Pembelian *Source Code* dan Pengembangan Produk dan Jasa)
- Pengadaan Mesin AS/400 untuk mendukung *Dual Data Center*
- Pengadaan Perangkat Pendukung *Dual Data Center*
 - a. Pengadaan *Total Security Solution*
 - b. Pengadaan *SAN Storage*
 - c. Pengadaan *Video Conference*

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI

Selain faktor penerapan sistem dan infrastruktur TI, sumber daya manusia yang mengelola segenap sistem tersebut juga memegang peran yang tak kalah penting. Proses transfer pengetahuan di bidang TI juga terus diupayakan Bank BTN baik itu melalui kegiatan *workshop*, pelatihan maupun mengikuti seminar-seminar. Adapun proses transfer pengetahuan tersebut dilakukan melalui:

- **Workshop**
Workshop ini berlaku untuk seluruh jajaran pegawai Divisi TI terkait transfer pengetahuan mengenai seluruh proyek-proyek yang sedang berjalan maupun rencana proyek-proyek yang akan dilaksanakan minimal 1 tahun sekali. Selain itu, Divisi TI juga melakukan *workshop* untuk masing-masing proyek pada saat proses implementasi sedang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing proyek.
- **Pelatihan untuk Para Pelatih**
Proses transfer pengetahuan juga dilakukan antara Divisi TI dengan Divisi lain selaku pengguna sistem atau aplikasi program TI atau antar pengguna TI. Sistem training for trainer diterapkan agar sosialisasi penggunaan aplikasi program TI dapat lebih luas. Diharapkan dengan penerapan sistem ini, pengetahuan TI pegawai dari seluruh Divisi Bank BTN dapat ditingkatkan guna mendukung operasional proses bisnis. Kegiatan ini berlangsung menyesuaikan dengan kebutuhan Bank BTN.
- **Peningkatan Pengetahuan Teknologi Informasi**
Divisi Teknologi Informasi juga mengirimkan pegawai-pegawainya untuk mengikuti kursus-kursus untuk meningkatkan skill dan pengetahuan TI. Kursus, seminar dan pelatihan yang diikuti biasanya dilakukan di luar dan disesuaikan dengan kebutuhan divisi.

IT INVESTMENT IN 2009

The capital expenditures for IT development in 2009 totaled Rp 158.664 billion. The following projects are associated with the targeted capex:

- Application of Loan Application System (eLoan)
- Application of Collection Recovery Management System (eColl)
- Application of Enterprise Data Warehouse (EDW)
- Application of eProcurement, IT and Non-IT Assets
- Middleware Applications
- Application of PSAK 50/55 and its Supporting Systems
- Application of the ATM Electronic Journal
- Application of OPICS (Upgrade)
- Application of Sharia (The purchase of Source Code and Products and Service Development)
- Procurement of AS/400 Machine to Support Dual Data
- Procurement of Dual Data Center Supporting Equipment
 - a. Procurement of Total Security Solution
 - b. Procurement of SAN Storage
 - c. Procurement of Video Conference

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN INFORMATION TECHNOLOGY

In addition to applying IT systems and infrastructure, human resources to manage all IT aspects are also essential. Knowledge of the transfer process in IT should be carried out on an ongoing basis, through workshops, training programs and seminars. This process has been carried out through the following:

- **Workshops**
Workshops are applicable for all employees in the IT division, to transfer knowledge on all ongoing and planned projects that will be executed at least once a year. The IT division also holds workshops for each project during implementation based on each project's needs.
- **Training for Trainers**
Transfer of knowledge is also exercised between IT and other divisions, as the users of IT systems or program applications, or among IT users. Trainings for trainers are implemented to intensify the socialization of IT application programs to employees from all divisions to increase their IT knowledge and support all business and operations processes based on the Bank's needs.
- **Information Technology Knowledge Improvement**
The IT division sends its personnel to attend IT skills and knowledge improvement courses. Courses, seminars and trainings usually are held externally, and participation is based on the division's needs.

SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources

Bank BTN memiliki paradigma “Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia” yang menempatkan pegawai sebagai aset berharga, bukan sekedar pelengkap atau alat untuk mencapai target bisnis. Bank BTN berkeyakinan bahwa suatu perusahaan tanpa pegawai hanyalah organisasi tanpa “nyawa” yang hanya berorientasi profit, tanpa sumbangsih nilai tambah bagi komunitas dan lingkungan sekitar.

Tujuan pembentukan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (DSDM) adalah menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berprestasi dan atau individu-individu yang unggul guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bank BTN. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa keberadaan DSDM merupakan katalisator manajemen SDM dan atau bertanggung jawab dalam mengelola SDM, mulai dari proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, manajemen karir, hingga peningkatan kesejahteraan.

Tahun 2009 merupakan momentum emas bagi Bank BTN dalam melaksanakan transformasi bisnis di segala lini. Pada bidang SDM, mencakup transformasi budaya kerja dengan fokus melaksanakan program internalisasi nilai-nilai dasar (*core values*) Bank BTN, yakni: Pelayanan Prima, Inovasi, Keteladanan, Profesionalisme, Integritas dan Kerjasama dengan akronim POLA PRIMA. Selain itu demi mendukung upaya transformasi dimaksud terdapat beberapa program kerja yang menjadi fokus DSDM pada periode tahun 2009.

PENGLOLAAN SDM YANG TERARAH DAN BERKUALITAS

Menyadari pentingnya peran SDM sebagai mitra utama dalam mendukung kelangsungan usaha, manajemen senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi dan produktifitas pegawai serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Oleh karena itu, selain memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pegawai untuk mengikuti program pendidikan dan pelatihan, Bank BTN melaksanakan program-program yang fokus dan atau dirancang demi mendukung keberhasilan proses transformasi bisnis yang telah dicanangkan oleh Manajemen, antara lain:

A. Program Pendidikan dan Pelatihan, yang meliputi :

1. Pendidikan karir yang dilaksanakan secara reguler dan sekaligus bertujuan untuk mengantisipasi rencana pembukaan sejumlah outlet, pengembangan organisasi dan jaringan kantor cabang, serta pengembangan karir. Bank BTN telah melaksanakan program ini dengan baik, diantaranya adalah pendidikan pegawai baru, orientasi pegawai, *Intermediate*

Bank BTN has the paradigm of “Managing and Developing Human Resources” which placed employees as a valuable asset and not only working as complement or instrument to achieve business target. Bank BTN believes that a company without employees is an organization without “soul” which only has profit orientation, without contributing additional value to community and surrounding environment.

The purpose of setting up the Human Resource Development Division (DSDM) is to create talented human resources with outstanding achievement to support the Vision and Mission of Bank BTN. In other word, it can be said that the presence of Human Resource Development Division has become a catalyst of human resource management. It responsibilities in managing the human resource, from the recruitment process, competence development, career management, to welfare improvement.

Year 2009 has been a golden moment for Bank BTN in implementing transformation in every business line. In Human Resource field, it includes transformation of work culture, focusing on implementation of internalization core values program of Bank BTN, which are: Service Excellence, Innovation, Exemplary Behavior, Professionalism, Integrity, and Team Work with POLA PRIMA acronym. Besides that, in supporting the transformation, there are some work programs that has become the focus of Human Resource Division in the period of 2009.

AN ALIGNED AND FOCUSED HUMAN CAPITAL MANAGEMENT

By realizing the importance of human capital role as a main partner in supporting business sustainability, the management always try to increase the competence and productivity of employees as well as to create a conducive working environment.

Therefore, besides encouraging the staff to join the education and training, Bank BTN performs a focused program to support business transformation process such as:

A. Educational and Training Program including:

1. Career education is conducted regularly and has the purpose to anticipate the plan in opening numbers of outlets, organization, branch offices network development, and also career development. Bank BTN has performed this program well, some of the programs are education of new employees, employees orientation, *Intermediate Supervisory Training*,



- Supervisory Training, Advance Supervisory Training, Top Management Program dan Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (Sespibank).*
2. Pendidikan dan pelatihan di bidang teknis perbankan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai. Program ini difokuskan pada upaya untuk mendukung target tahunan organisasi, yaitu: peningkatan penghimpunan dana murah dan kredit bermargin tinggi. Untuk itu, Bank BTN melaksanakan sejumlah pendidikan pada berbagai bidang atau teknis perbankan, diantaranya: analisis kredit umum, analisis kredit perorangan, pengembangan sistem informasi, prinsip mengenal nasabah (*KYC Principle*), audit, akuntansi, perpajakan, *Asset Liability Management (ALMA)* dan *treasury*, penelitian dan perencanaan, perbankan syariah; Dan, berbagai pelatihan, seperti: *Loan Origination System, Loan Account Officer, Managing Service, Selling dan Negotiation Skill*, sekuritisasi kredit kepemilikan rumah (KPR), pembinaan debitur, operasional dan prosedur, hukum dan protokol, dan pengembangan bisnis cabang.
 3. Pelatihan dan sosialisasi yang terkait dengan transformasi organisasi dan pengembangan jaringan dilakukan melalui pelatihan implementasi budaya kerja, sosialisasi IPO dan pelatihan serta sosialisasi sistem *online* Kantor Pos.
 4. Pendidikan akademis, dilakukan dengan memberi kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan S-2, baik di dalam maupun di luar negeri.
 5. Program peningkatan integritas pegawai dan efektifitas penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan bagian penting dari program DSDM. Bank BTN secara berkelanjutan melaksanakan pendidikan BTN di bidang GCG, budaya kerja, motivasi, emosional

Advance Supervisory Training, Top Management Program, and Staff and Leadership School (Sespibank).

2. Educational and training in technical banking in order to improve knowledge and expertise of the employees. This program is focused on supporting organization's annual target, which is improvement of low-cost fund and high-margin loan. For that purpose, Bank BTN is implementing various education programs in some sectors or technical banking, such as general loan analyst, individual loan analyst, development of information system, Know Your Customer Principle, audit, accounting, taxation, Asset Liability Management (ALMA) and treasury, research and planning, and Sharia Banking. And some training such as: Loan Origination System, Loan Account Officer, Managing Service, Selling and Negotiation skill, securitization of mortgages (KPR), collection, operational and procedure, law and protocol, and development of branch business .
3. Training and socialization associated with organization transformation and network expansion is done through implementation of work ethic training, socialization of IPO, and training and socialization of online system in Post Offices.
4. Academic Education is done through providing opportunity to employees to have Masters Degree education both domestically or overseas.
5. Improving employees' integrity program and effectiveness of implementation of Good Corporate Governance (GCG) has become an important part of the DSDM program. From time to time, Bank BTN has done various education programs in some fields, such as

spiritual quotient, etika, kepribadian, dan lain sebagainya.

6. Pada bidang pengelolaan risiko perbankan, sebagai bagian kepatuhan (*compliance*) bank terhadap peraturan Bank Indonesia, Bank BTN secara konsisten mengikutsertakan pejabat dan staf untuk mengikuti program Sertifikat Manajemen Risiko dan pendidikan di bidang *risk management* secara berkelanjutan.
7. Sedangkan program pengembangan kapasitas pegawai lainnya, dilakukan dengan mengikuti seminar, *workshop*, *outbound (team building)*, pelatihan persiapan pensiun, dan lain sebagainya.

Sepanjang tahun 2009, Bank BTN telah menginvestasikan dana untuk program-program pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan program pengembangan pegawai lainnya, sebesar Rp 41.163.036.000.

B. Melanjutkan Program Implementasi Restrukturisasi Human Capital

Program implementasi restrukturisasi *human capital* telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir. Pada periode tahun 2009, Bank BTN melanjutkan program ini, dengan melaksanakan pengembangan dan atau penyempurnaan berbagai sistem human capital, seperti: manajemen kinerja, *job grading*, imbal jasa, manajemen karir, termasuk sistem pendidikan dan pelatihan.

C. Program Internalisasi Budaya Kerja

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat budaya kerja, Bank BTN melaksanakan program internalisasi budaya kerja. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai POLA PRIMA kepada seluruh insan Bank BTN di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, yang berbasis pada nilai-nilai dasar (*core values*) Bank BTN, sebagai berikut:

- **Pelayanan Prima:** memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan (baik internal maupun eksternal).
- **Inovasi:** senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi Bank BTN.
- **Keteladanan:** mulai dari diri sendiri menjadi suri tauladan dalam berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai budaya kerja Bank BTN bagi insan Bank BTN dan pihak-pihak yang terkait.
- **Profesionalisme:** kompeten di bidangnya dan senantiasa mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja terbaik serta memberikan nilai tambah bagi Bank BTN dan seluruh insan Bank BTN.
- **Integritas:** konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan Bank BTN, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.
- **Kerja sama:** membangun hubungan yang tulus dan terbuka dengan sesama insan Bank BTN dan pihak lain dilandasi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama.

GCG, work culture, motivation, emotional spiritual quotients, ethics, personalities, and etc.

6. In risk management sector, as part of compliance to Bank Indonesia's regulations, officials and staff of Bank BTN are required to be involved consistently in certification of Risk Management Program and educational program in Risk Management continuously.
7. Besides that, development of employee capacity program is performed through seminars, workshops, *outbound (team building)*, retirement preparation program, and etc.

During 2009, Bank BTN has invested funds of Rp 41,163,036,000 for some programs such as; educational, socialization, and employee development programs:

B. Continuing Implementation and Restructurisation Human Capital Program

Implementation and restructurisation of human capital has began since the last few years. During the period of 2009, Bank BTN continued this program by developing and perfecting various human capital systems, such as: work performance management, job grading, compensation and benefits, career management, including education and training system.

C. Internalization of Work Culture Program

As a part of efforts in strengthening work culture, Bank BTN is carrying out internalization work culture program. This program has aims to applying POLA PRIMA values to all people in all stages and organization level in Bank BTN, which is based on core values of Bank BTN, such as:

- **Service Excellence:** delivering the service beyond customers' expectation (both internally and externally).
- **Innovation:** constantly developing new ideas and sustainable improvement, thus delivering added value to Bank BTN.
- **Exemplary Behavior:** starting from the self to be role models of behavior that reflects the culture values work for staff and the parties concerned.
- **Professionalism:** being competent in own expertise and continuously improving own self to yield the best performance as well as deliver added values for Bank BTN and the whole people in Bank BTN
- **Integrity:** being consistent between mindset, expressions and actions in accordance to Bank BTN's regulation, professional code of ethic and good principles.
- **Team Work:** build the sincere and open relationship among people in Bank BTN and with other parties based on trustworthy respect towards others to achieve common goals



D. Menyempurnakan Peraturan Tentang *Reward and Punishment*

Dalam rangka mendukung terwujudnya penerapan nilai-nilai Bank BTN dalam POLA PRIMA, maka diberlakukan sistem *reward and punishment*. Bentuk *reward* yang telah diberlakukan diantaranya adalah memberikan insentif bagi kantor cabang yang memiliki kinerja terbaik. Selain itu, berbagai sistem yang penting dalam penilaian kinerja, seperti implementasi *job grading*, *job evaluation*, *career plan* terus disempurnakan dengan menggunakan metode *balance score card*.

E. Komposisi Tim yang Solid

Kian hari industri perbankan semakin dinamis dan kompetitif. Bank BTN, dengan bekal SDM yang berkualitas, berkeyakinan teguh mampu bersaing dan senantiasa menunjukkan kinerja terbaik. Strategi penempatan SDM yang tepat dalam suatu tim yang solid menjadi kunci utama di dalam membangun institusi perbankan yang kuat ke depan.

Selain pengembangan SDM yang tepat selaras dengan dinamika perubahan bisnis yang terjadi, Bank BTN senantiasa mengkaji kebutuhan pegawai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Rekrutmen baru terus dilakukan untuk memenuhi rencana Bank BTN melebarkan sayap bisnis yang terus bertumbuh, tanpa mengesampingkan pembelajaran dan pengembangan SDM yang sudah ada.

Berdasarkan data terakhir per 31 Desember 2009, jumlah pegawai tetap Bank BTN mengalami kenaikan mencapai 4.085 orang dibanding tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 3.850 orang.

D. Refining The Rules On Reward And Achievement

In order to support the application of Bank BTN values in POLA PRIMA, the reward and punishment systems are introduced to Bank BTN. The rewards applied in the form of giving incentives for office branches that has best working performance. Besides that, there are various important systems in evaluating performance, such as job grading implementation, job evaluation, career plan which has been improved with balance score card method.

E. Solid Team Composition

From day to day, banking industry has become more dynamic and competitive. By having good quality of human resources, Bank BTN strongly believes to be able to compete and shows the best performance. Strategy in placing right human resource in a solid team has become the main key in building strong banking institution in the future.

Besides the development of the right human resource consistent with the dynamic changes of business, Bank BTN continuously review the employees' needs, both quality and quantity. New recruitment is continuously executed to meet the needs of Bank BTN in expanding the growing business, without putting aside education program and development of human resource that has already existed.

According to the data per 31 December 2009, the total number of employees increased to 4.085 people as compared to the previous year, which were 3.850 people.

Jumlah Pegawai Perseroan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Total Number of Employees Based on Education Level

Pendidikan Education	Jumlah Pegawai Tetap per 31 Desember 2009 Total Number of Permanent Employees per 31 December 2009	
	2009	2008
Pasca Sarjana / Post Graduate	240	207
Sarjana / Scholar	1.999	1.658
Sarjana Muda / Bachelor	756	644
SLTA / High School	1.089	1.340
SLTP / Junior High School	1	1
SD / Elementary	-	-
Total	4.085	3.850

Jumlah Pegawai Perseroan Berdasarkan Usia Total Number of Employees Based on Age

Usia Age	Jumlah Pegawai Tetap per 31 Desember 2009 Total Number of Permanent Employees per 31 December 2009	
	2009	2008
Di atas 55 tahun / Above 55 years old	-	-
51 - 55	270	192
46 - 50	722	640
41 - 45	828	837
36 - 40	1.192	1.272
31 - 35	178	258
26 - 30	590	456
20 - 25	305	195
Total	4.085	3.850

Jumlah Pegawai Perseroan Berdasarkan Jenjang Kepangkatan Total Number of Employees Based on Grade

Jenjang Kepangkatan Grade	Jumlah Pegawai Tetap per 31 Desember 2009 Total Number of Permanent Employees per 31 December 2009	
	2009	2008
Direktur Muda / Junior Director	1	1
Staf Utama / Main Staff	51	46
Staf Madya / Mid-Level Staff	634	511
Staf Muda / Junior Staff	419	562
Pengatur / Clerk	2.423	2.273
Pengatur Muda / Junior Clerk	557	457
Total	4.085	3.850



Sepanjang tahun 2009, terdapat 38 Pegawai yang mengajukan permohonan pengunduran diri, terdiri dari 34 orang level staf dan 4 orang pada level pejabat. Alasan pengunduran disebabkan karena :

1. Mengembangkan usaha sendiri/keluarga agar lebih fokus;
2. Diterima/mendapat pekerjaan ditempat lain yang lebih sesuai dengan pilihannya;
3. Melangsungkan pernikahan dengan sesama pegawai Bank BTN;
4. Lebih fokus mengurus keluarga;

Selain itu, pada tahun 2009, terdapat 8 pegawai yang mengikuti program Penawaran Pensiun Sukarela Terbatas (PPST), yang terdiri dari 7 orang level staf dan 1 orang level pejabat. Alasan mengikuti PPST adalah :

- karena kondisi kesehatan
- mengurus keluarga
- mengembangkan usaha sendiri/keluarga agar lebih fokus.

Dengan demikian, pada periode tahun 2009, dari 4.085 pegawai tetap Bank BTN, terdapat 46 pegawai yang mengundurkan diri. Berdasarkan angka ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat *turnover* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk hanya sebesar 1,13% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *turnover* yang sangat rendah.

• **Penilaian Kinerja Pegawai yang Transparan**

Pengelolaan SDM yang profesional merupakan syarat mutlak untuk mendukung keberhasilan proses transformasi Bank BTN. Oleh karena itu, Bank BTN membangun sistem yang mampu menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh pegawai dalam mengembangkan karir. Hal ini dilakukan dengan menerapkan suatu sistem manajemen kinerja yang transparan dan atau sistem penilaian pegawai berbasis kinerja, yang berguna untuk menciptakan pemahaman bersama antara atasan dan bawahan mengenai apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya.

Penilaian kinerja dimaksud dilaksanakan dengan melakukan serangkaian proses. Atasan menilai pencapaian sasaran dan atau memberikan penilaian kinerja bagi setiap pegawai berdasarkan data-data kinerja yang telah ditunjukkan oleh pegawai yang dinilai pada setiap periode penilaian dan dituangkan ke dalam Peraturan Direksi tentang Manajemen Kinerja Pegawai, sebagai berikut:

I. Proses Sistem Manajemen Kinerja Terdiri dari 3 tahapan, yaitu :

1. **Tahap Perencanaan**
Merupakan tahap untuk menetapkan sasaran unit kerja dan individu yang diturunkan dari sasaran Bank BTN.
2. **Tahap Bimbingan Kinerja, terdiri dari:**
 - a. **Formal**
Dalam proses ini dilakukan dua kali dalam satu tahun, yaitu periode I pada bulan April dan periode II pada bulan Agustus;
 - b. **Informal**
Dilakukan setiap saat oleh atasan kepada pegawainya.

In 2009, 38 employees tendered their resignation, consisting of 34 people at staff level and 4 at executive level. The following are the reasons for resignation:

1. Focusing on expansion of own or family business;
2. Accepted at another place of work more suitable with his/ her career choice;
3. Getting married with an employee of Bank BTN;
4. Focusing on taking care of family

In 2009, 8 employees opted for the Voluntary Retirement Program (PPST), consisting of 7 at staff level and 1 at executive level. Reasons of opting for this program included:

- health condition
- taking care of family
- focusing on expanding own or family business

Thus, during 2009, a total of 46 people resigned, of the total 4,085 staff. According to this data, we can conclude that the turnover level of Bank BTN is only 1.13% per year, which is very low .

• **Transparent Assessment of Employee's Performance**

Development of professional human resources is a prerequisite to support the successful transformation process of Bank BTN. Therefore, Bank BTN built a system that creates equal career development opportunities for all employees by applying transparency in performance management systems and performance-based assesment systems for employees. These create a mutual understanding between superiors and subordinates with regard to targeted achievements and how to achieve the goals.

Performance assessment is done through a series of processes. Supervisors evaluate achievements and/ or assess performance based on performance data provided by the employees. The employees are assessed according to the Directors' Regulation concerning Employee Performance Management, a follows:

I. Work Performance Management System consisting of three stages:

1. **Planning Stage**
The planning stage is used to set unit and individual work targets determined by Bank BTN
2. **Coaching Stage, consist of :**
 - a. **Formal**
This process is done twice a year, in April for the first period and August for the second period;
 - b. **Informal**
This process can be done at any moment as required by supervisors to the employees

3. Tahap Penilaian Kinerja

Proses penilaian dilaksanakan oleh setiap unit kerja pada bulan Januari tahun berikutnya dan dilakukan satu kali dalam satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada periode penilaian.

II. Unsur-unsur Penilaian Kinerja, meliputi :

1. Bagi Pejabat Kepala Seksi atau setingkat ke atas dinilai dengan menggunakan formulir A, yang terdiri dari unsur-unsur penilaian, sebagai berikut :
 - a. Sasaran Kerja
 - b. Keterampilan Kunci
 - c. Kompetensi
2. Bagi Pegawai Pelaksana/Staf dan Penyelia, dinilai dengan menggunakan formulir B, yang terdiri dari unsur-unsur penilaian, sebagai berikut :
 - a. Tugas Utama
 - b. Keterampilan Kunci
 - c. Kompetensi

III. Pembobotan

1. Setiap unsur penilaian diberikan bobot. Hal ini didasarkan pada tingkat kepentingan atau prioritas masing-masing unsur penilaian dengan total jumlah bobot ditetapkan 100 %.
2. Unsur penilaian yang penting (prioritas paling tinggi) diberikan bobot paling tinggi dan atau diatas rata-rata. Sedangkan unsur penilaian dengan tingkat paling rendah (prioritasnya paling rendah) diberikan bobot di bawah rata-rata.

IV Pengisian Rating dan Klasifikasi Penilaian

Pengisian rating ditentukan dengan melihat realisasi atau hasil pencapaian target setiap sasaran kerja atau tugas utama, dengan kriteria dan klasifikasi sebagaimana tabel berikut:

3. Performance Assessment Stage

This process is carried out by every working unit in January for the previous year from 1 January to 31 December.

II. Elements of Performance Assessment include:

1. Section Heads and above are assessed using Form A, which includes:
 - a. Work Targets
 - b. Main skills
 - c. Competencies
2. Staff and Supervisors are assessed using Form B, which includes:
 - a. Main Tasks
 - b. Main Skills
 - c. Competencies

III. Weighting

1. Weighting is given to every assessment element. This is based on the level of importance of each priority with a total assessment weighting of 100%.
2. Important assessment element (for the most important priorities) is given to activities with the highest or above average weighting, while assessment element are for activities with the lowest or below average weighting.

IV. Rating Filling and Assessment Classification

Rating filling is determined by looking at the realisation or achievements of every work target or main task, with criteria and classification as shown in the following table:

Rating	Kriteria dan Klasifikasi Penilaian	Assessment Criteria and Clasification
4	Istimewa Hasil akhir melebihi sasaran, yaitu di atas 110%	Distinction End results goes beyond target, which is above 110%
3	Baik Hasil akhir mencapai atau sedikit di bawah atau di atas sasaran, yaitu antara 95% s/d 110%	Good End result reaches or slightly above target, which is between 95% to 110%
2	Cukup Hasil akhir sebagian tidak mencapai sasaran, yaitu antara 80% s/d 95%	Adequate Some of the end result does not reach target, which is between 80% to 95%
1	Kurang Hasil akhir dibawah sasaran, yaitu dibawah 80%	Not Adequate End result is below target, which is below 80%



V Klasifikasi penilaian ditetapkan dengan range, sebagai berikut :

Bagi Pejabat Kepala Seksi Setingkat ke atas
For Section Head and Above

Klasifikasi / Classification	Range
A = Istimewa / Distinction	3151 – 3700
B = Baik / Good	2351 – 3150
C = Cukup / Adequate	1551 – 2350
D = Kurang / Not Adequate	1000 – 1550

V Assessment Classification is determined by range as follow:

Bagi Pegawai/Staf dan Penyelia
For Staff and Supervisors

Klasifikasi / Classification	Range
A = Istimewa / Distinction	3001 – 3500
B = Baik / Good	2251 – 3000
C = Cukup / Adequate	1501 – 2250
D = Kurang / Not Adequate	– 1500

VI Standar penilaian pegawai

1. Untuk kenaikan gaji berkala dan kenaikan jenjang kepangkatan, pegawai harus memperoleh kriteria penilaian kinerja minimal dengan predikat Cukup atau dengan sebutan C.
2. Bagi pegawai yang mendapatkan penilaian kinerja Kurang atau dengan sebutan D, hanya berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala.

VI Employment Assessment Standards

1. For periodic pay raises and promotions, employees must obtain a minimum result of a C, or Adequate, in their performance assessment.
2. Employees that obtain a D, or Inadequate, rating are only eligible for a periodic pay raise

RENCANA DAN STRATEGI SDM TAHUN 2010

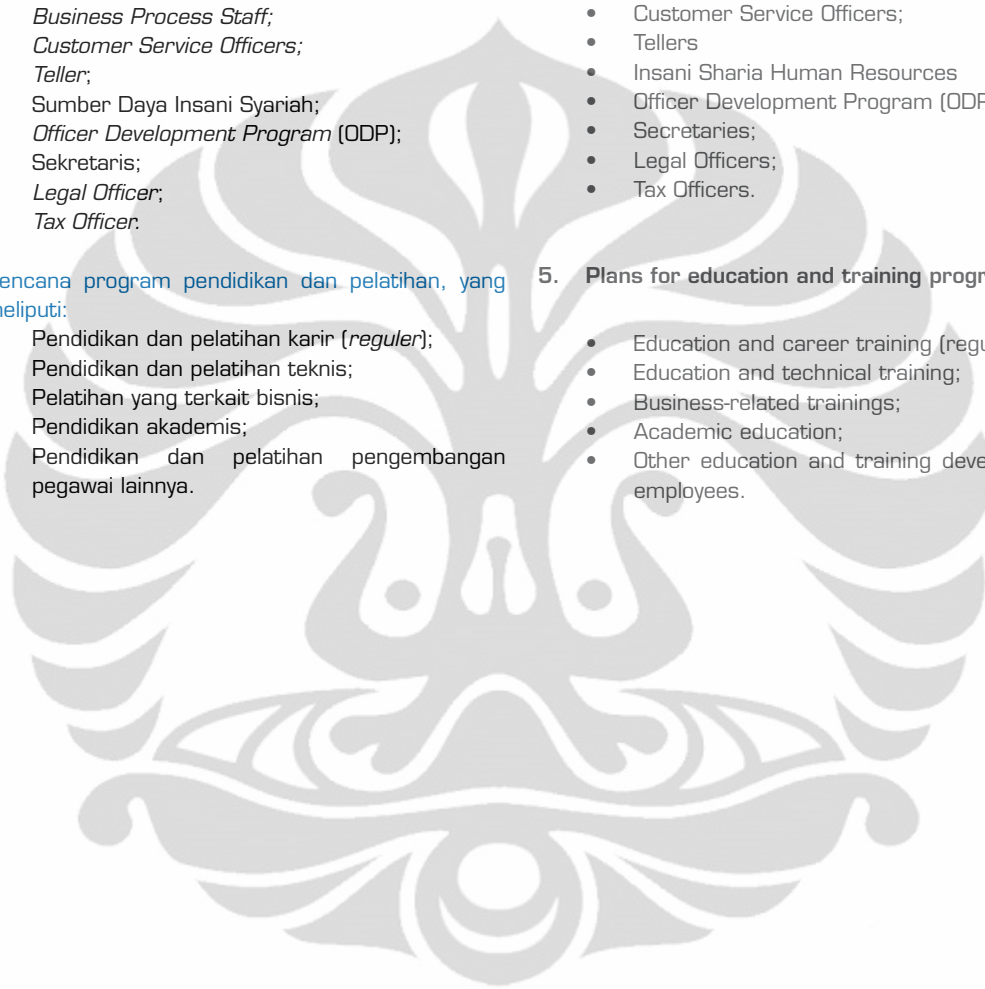
Rencana dan strategi "Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia" pada tahun 2010, meliputi berbagai hal sebagai berikut:

1. **Mengembangkan pegawai yang kompeten dan bermotivasi dengan melakukan program sebagai berikut:**
 - Evaluasi sistem *training need analysis*;
 - Mengembangkan *learning center*;
 - Implementasi sistem *reward* berdasarkan grading;
 - Implementasi manajemen karir (*career path*);
 - Penyusunan program *knowledge management*;
 - Program *assessment* ;
 - Tahap lanjutan analisis beban kerja level regional dan kantor cabang;
 - Program Penawaran Pensiun Sukarela Terbatas (PPST).
2. **Membangun organisasi yang efektif berbasis kinerja dengan melakukan program sebagai berikut:**
 - Penyesuaian dan perbaikan proses bisnis;
 - Implementasi perhitungan pegawai melalui *workload analysis*;
 - Implementasi penggolongan jabatan sesuai dengan struktur organisasi yang baru;
 - Implementasi sistem kinerja per unit kerja;
 - Implementasi *balanced score card* hingga level individu;

FUTURE PLAN AND HUMAN RESOURCE STRATEGY IN 2010

The plan and strategies for "Managing and Developing Human Resources" in 2010 include:

1. **Developing employees that are competent and fully motivated, through the following programs:**
 - Evaluation of training needs analysis system;
 - Development of a learning center;
 - Implementation of Reward System according to grading;
 - Implementation of Career Management (career path);
 - Organization knowledge management program;
 - Assessment program;
 - Continuation stage of workload analysis at regional level and branch offices;
 - Limited Offer of Voluntary Retirement Program (PPST)
2. **To build an effective performance-based organisation, the following programs are carried out:**
 - Adjustments and improvements to the business process;
 - Implementation of employee calculations by workload analysis ;
 - Implementation of job title classification according to the new organisational structure;
 - Implementation of performance systems per working unit;
 - Implementation of a balanced score card for individuals;

- 
3. Membangun budaya perusahaan berbasis POLA PRIMA dengan melakukan program sebagai berikut:
- *Monitoring* program internalisasi budaya kerja;
 - Eksternalisasi budaya kerja.
4. Rencana rekrutmen pegawai, untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang terdiri dari:
- *Profesional/Expert* di bidang *Card Business and Electronic Banking, Priority Banking and Bancassurance, Technology Information dan Investor Relations*;
 - *Business Process Staff*;
 - *Customer Service Officers*;
 - *Teller*;
 - Sumber Daya Insani Syariah;
 - *Officer Development Program (ODP)*;
 - Sekretaris;
 - *Legal Officer*;
 - *Tax Officer*.
5. Rencana program pendidikan dan pelatihan, yang meliputi:
- Pendidikan dan pelatihan karir (*reguler*);
 - Pendidikan dan pelatihan teknis;
 - Pelatihan yang terkait bisnis;
 - Pendidikan akademis;
 - Pendidikan dan pelatihan pengembangan pegawai lainnya.
3. **Building the Bank's culture based on the POLA PRIMA values, through the following programs:**
- Monitoring the internalization of the working culture;
 - Externalization of the working culture.
4. **The employee recruitment plan to support the needs of Bank BTN consists of:**
- Experts in Card Business and Electronic Banking, Priority Banking and Bancassurance, Information Technology and Investor Relations;
 - Business Process Staff;
 - Customer Service Officers;
 - Tellers
 - Insani Sharia Human Resources
 - Officer Development Program (ODP);
 - Secretaries;
 - Legal Officers;
 - Tax Officers.
5. **Plans for education and training programs cover:**
- Education and career training (regular);
 - Education and technical training;
 - Business-related trainings;
 - Academic education;
 - Other education and training development for employees.

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Sebagai bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau pembiayaan perumahan, Bank BTN memiliki portofolio aset yang didominasi oleh kredit perumahan. Menilik kondisi tersebut, kinerja Bank BTN sangat dipengaruhi oleh dampak negatif akibat adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi, tren penurunan tingkat suku bunga BI rate yang tidak diikuti dengan tingkat suku bunga simpanan dan stagflasi perekonomian dunia yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan bisnis bank. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut telah dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja bank yang sehat dan berkesinambungan.

Bank BTN telah berupaya meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar di bidang pembiayaan perumahan serta mengembangkan pembiayaan di sektor kredit non perumahan yang mencakup bidang telekomunikasi, perdagangan, perkebunan dan infrastruktur/industri. Dengan demikian, porsi kredit perumahan dan non perumahan menjadi 75%:25%.

Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata tekad Bank BTN dalam memberikan nilai tambah kepada *shareholder*. Pengelolaan risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis bank tetap dilaksanakan dalam berbagai bentuk antara lain penyempurnaan sistem *credit scoring model*, penambahan jaringan dan jumlah ATM secara mandiri maupun dengan bekerja sama dengan bank lain.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Selama tahun 2009 Bank BTN telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko di kantor cabang. Melalui *Branch Risk Control Officer (BRCO)*, kantor cabang didorong untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi *standard operating procedure (SOP)* secara berkala untuk meningkatkan dan menyegarkan kembali pemahaman pegawai atas prosedur operasional standar. Disamping untuk meminimalkan potensi risiko pada aktifitas operasional kantor cabang, kegiatan sosialisasi tersebut juga ditujukan untuk menjaga standar kualitas layanan kantor cabang. Selain peningkatan pemahaman terhadap SOP, kantor cabang didorong untuk meningkatkan *risk awareness* dan *dual control* dengan melakukan kegiatan *periodical checking*. *Periodical checking* tersebut dilakukan secara berkala dan ditujukan untuk memvalidasi kebenaran transaksi atau aktifitas operasional lainnya. *Periodical checking* dilakukan oleh petugas khusus yang ditunjuk kepala cabang dan pelaksanaannya dimonitor oleh BRCO. Apabila terdapat hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, BRCO akan menyampaikannya kepada kepala cabang atau melaporkan temuan atas pemeriksaan tersebut kepada Kepala Divisi Manajemen Risiko.

In line with its focus on lending or housing finance, Bank BTN portfolio is dominated by housing loans. Based on this, Bank BTN's performance is considerably affected by the negative impact resulting from changes in the external business climate, such as inflation and reductions in Bank Indonesia's interest rates that do not correspond with loan interest rates and stagflation of the global economy. These external factors might influence the bank's business. Efforts to minimize the negative impact on the Bank have been taken by managing risks through day-to-day risk management activities based on prudent principles to ensure the sound and sustainable performance of the bank.

Bank BTN has attempted to expand and secure its market share in the housing finance market and develop financing in the non-housing loan sector, including the telecommunications, trade, plantation and infrastructure/ industries. Hence, the portion of housing and non-housing loans became 75%:25%.

The above mentioned step is the manifestation of Bank BTN's strong determination to give added value to its shareholders. Risk management, which is inseparable from business growth and daily business activities, is undertaken through various programs, such as improvements to the credit scoring model, and the addition of networks and ATMs independently or in conjunction with other banks.

RISK MANAGEMENT SYSTEM

In 2009, Bank BTN enhanced its risk management culture in its branches. Through the Branch Risk Control Officer (BRCO), branches are encouraged to socialize the SOP regularly to improve and refresh employees' understanding. This aims to minimize the potential of risk in the operation of branches and maintain the quality of services by branches. In addition to improved comprehension on the SOP, the branches are also motivated to improve their risk awareness and dual control through periodical checking activities, which are carried out frequently and aimed to validate transactions or other operational activities. To perform periodical checking, a special officer is appointed by the Branch Head and monitored by a BRCO. Any issues requiring follow up are reported by the BRCO to the Branch Manager or reported to the Head of the Risk Management division.



Bank BTN telah melakukan *operational risk self assessment* untuk mengidentifikasi *operational key risk indicator* di kantor cabang. Hasil *self-assessment* yang ditujukan untuk memetakan potensi risiko operasional dari unit-unit kerja kantor cabang tersebut disamping digunakan sebagai dasar pencatatan kerugian risiko operasional dalam *database* risiko operasional juga berguna untuk mengembangkan parameter risiko operasional pada laporan profil risiko dan persiapan untuk melakukan pengukuran risiko operasional dengan menggunakan model internal (*advanced measurement approach*).

Bank BTN telah melakukan *stress testing* untuk memenuhi program kerja Bank Indonesia dalam rangka *Financial Self-Assessment Program (FSAP)*. *Stress testing* tersebut dilakukan untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophy* khususnya untuk risiko kredit, pasar, dan likuiditas. Berdasarkan hasil *stress testing* tersebut struktur permodalan Bank BTN yang ada saat ini mampu menahan kerugian risiko yang bernilai ekstrim dan sangat tinggi dari risiko kredit, pasar, dan likuiditas.

IMPLEMENTASI BASEL II

Persiapan implementasi Basel II di Bank BTN mengacu kepada *road map* yang disusun oleh Bank Indonesia dengan membentuk *organizing committee* yang bertugas merumuskan langkah-langkah sistematis dan berkesinambungan. *Organizing committee* ini beranggotakan pejabat dan staf dari divisi-divisi terkait yang dikelompokkan sesuai dengan kriteria 3 pilar Basel II. Bank BTN telah melakukan persiapan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* dan telah melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional sesuai dengan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan

Bank BTN has performed a self-assessment of operational risks to identify operational key risk indicators in branches. The result will be used to map the potential operational risks of the branch working units and provide the basis to record potential loss of operational risks in the operational risk database. The result is also useful to float the parameters of operational risks on the risk profile report and as preparation to measure operational risks by using an advanced measurement approach.

Bank BTN has executed stress testing to meet the working program of Bank Indonesia in connection with the Financial Self-Assessment Program (FSAP). The stress testing is carried out to assess the bank's resilience in the face of catastrophic incidents, especially for loan, market and liquidity risks. Based on the stress testing, it is deduced that the bank's current capital structure is capable of withstanding high or extreme losses in loan, market and liquidity risks.

BASEL II IMPLEMENTATION

The preparation of Basel II implementation in Bank BTN is based on the roadmap formulated by Bank Indonesia, and was carried out by the establishment of an organizing committee. The committee is tasked with formulating systematic and sustainable steps. The committee comprises officials and staff from related divisions, who are grouped according to the three pillars of Basel II. Bank BTN has carried out preparation of credit risk measurement by using a Standardized Approach and has carried out the calculation of minimum capital requirements using the Basic Indicator Approach for operational risks based on Bank Indonesia Circular Letter No.11/3/DPNP dated January 27, 2009 on the Calculation of Risk-Weighted Assets for Operational Risks by using the Basic Indicator Approach; and using



Indikator Dasar (PID) dan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SE BI No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI MANAJEMEN RISIKO

Berdasarkan Ketetapan Direksi Nomor 20/DIR/DPP/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang Divisi Manajemen Risiko (DMR), DMR dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Divisi Manajemen Risiko terdiri dari bagian Manajemen Risiko Kredit, Manajemen Risiko Pasar dan Manajemen Risiko Operasional, dimana setiap bagian dibantu oleh Kepala Seksi Kebijakan dan Kepala Seksi Pengukuran. Dalam menjalankan fungsi pengendalian risiko pada tingkat Divisi dan Kantor Cabang, Kepala Divisi Manajemen Risiko juga dibantu oleh *Division Risk Control Officer* (DRCO) dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO).

DRCO adalah pejabat pada Divisi Manajemen Risiko yang ditempatkan di kantor pusat dengan membidangi beberapa divisi sebagai mitra kepala divisi dalam mengelola risiko. DRCO adalah pejabat pada divisi manajemen risiko yang ditempatkan di kantor cabang sebagai mitra kepala cabang dalam mengelola risiko.

Per akhir Desember 2009, jumlah DRCO yang ditempatkan di kantor pusat ada 3 orang yaitu DRCO Risiko Pasar, DRCO Risiko Kredit dan DRCO Risiko Operasional. Sementara itu, jumlah BRCO yang ditempatkan ada 46 orang di 46 kantor cabang dari 60 kantor cabang (per Desember 2009). Untuk kantor cabang-kantor cabang yang belum ditempatkan BRCO, pemantauan pengelolaan risiko dilakukan oleh BRCO dari kantor cabang terdekat sebagai berikut:

NO	KANTOR CABANG PENUGASAN Branches Assigned	TAMBAHAN CAKUPAN WILAYAH KERJA Additional Work Area
1	BRCO KC Batam	KC Tanjung Pinang
2	BRCO KC Bandung	KC Cimahi
3	BRCO KC Bekasi	KC Cikarang
4	BRCO KC Jakarta Harmoni	KC Kelapa Gading SQ & KC Kebon Jeruk
5	BRCO KC Jakarta Kuningan	KC Cibubur & KC Cawang
6	BRCO KC Manado	KC Gorontalo & KC Ternate
7	BRCO KC Makassar	KC Ambon & KC Kendari
8	BRCO KC Medan	KC Banda Aceh
9	BRCO KC Palembang	KC Pangkal Pinang
10	BRCO KC Tangerang	KC Bumi Serpong Damai

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap

the *Standardized Model* for market risk based on Bank Indonesia Circular Letter No.9/33/DPNP dated December 18, 2007 on the Application of Standard Method Guidelines for the Calculation of Commercial Bank Minimum Reserve Requirement by Calculating Market Risk.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF RISK MANAGEMENT DIVISION

With reference to the Board of Directors' Stipulation No.20/DIR/DPP/2004 dated December 23, 2004 on the Risk Management Division (DMR), the Division is chaired by one Division Head who reports directly to the Compliance Director. The Risk Management Division consists of Credit Risk Management, Market Risk Management and Operational Risk Management departments, assisted by a Policy Section Head and Measurement Section Head. In exercising risk control functions at the divisional and branch levels, the Head of Risk Management Division is assisted by the Division Risk Control Officer (DRCO) and Branch Risk Control Officer (BRCO).

The DRCO is an official at the Risk Management Division stationed at the head office and in charge of several divisions as the partner of division heads in managing risks. The BRCO are officials in the Risk Management division stationed in the branches as partners of the branch heads in managing risks.

As of the end of December 2009, there were three DRCO stationed at head office, namely a Market Risk DRCO, Credit Risk DRCO and Operational Risk DRCO and 46 BRCO in 46 out of 60 branches. Branches that do not yet have a BRCO are monitored for risk by a BRCO from the nearest branch, as follows:

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

The Risk Management Committee plays an active role in providing recommendations on the inherent risks of policies put forward by the Board of Directors (BOD) and evaluations of past policies deemed inappropriate with

ketentuan-ketentuan lama yang dirasakan kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. Komite Manajemen Risiko (KMR) terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan atau jasa aktifitas baru sehingga bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu, apabila dipandang perlu KMR dapat melakukan evaluasi dan revisi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Bank BTN telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari *regulator* dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

PROFIL RISIKO

Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, secara rutin per triwulan menyampaikan laporan profil risiko ke Bank Indonesia yang meliputi laporan pengelolaan risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Laporan profil risiko tersebut mencakup parameter, indikator dan formula yang digunakan dalam menilai tingkat risiko dan sistem pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank BTN. Profil risiko kantor cabang disusun oleh *Branch Risk and Control Officer* (BRCO) dan disampaikan secara triwulanan kepada Divisi Manajemen Risiko dan salinannya ditembuskan kepada Divisi Audit Internal sebagai bahan untuk melakukan *general audit* ke kantor cabang.

Secara umum risiko komposit yang dimiliki Bank BTN pada triwulan IV tahun 2009 berada pada *level low to moderate*, di mana terdapat kategori risiko moderate pada jenis risiko kredit, low pada jenis risiko strategik, dan *low to moderate* untuk jenis risiko lainnya. Hal tersebut didukung oleh *Risk Control System* yang memadai (*acceptable*) meliputi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan *limit*, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen, serta efektifitas pengendalian internal.

the current situation and in need of adjustment. The Risk Management Committee is actively engaged in evaluating the inherent risks of every new product or service to enable the bank to take the necessary mitigation steps. Hence, when required the Risk Management Committee can evaluate and revise the Risk Management Policy Guideline.

ENHANCEMENT OF POLICIES AND PROCEDURES IN RISK MANAGEMENT

Bank BTN has the Risk Management Policy Guideline, which covers the minimum requirements stipulated in Bank Indonesia's regulations. The reevaluation on the internal policies is also carried out to align the policies with the latest regulatory stipulations. For that purpose, the Bank performs gap analyses and accommodates common best practices to improve the quality of risk management implementation.

In the early stages, risk management information systems are focused on the collection and improvement of the risk database, which is expected to be developed and applied gradually in the technology information system to allow for the integrated and timely delivery of risk measurement and monitoring processes.

RISK PROFILE

Based on Bank Indonesia Regulation No.11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 on the Amendment of Bank Indonesia Regulation No.5/8/PBI/2003 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, the bank's Risk Management Working Unit submits a risk profile report to Bank Indonesia on quarterly basis. The risk management report includes credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation and strategic risks. The risk profile report covers parameters, indicators and formulas used in rating the risk level and risk control systems used by Bank BTN. The risk profile of branches is mapped by the Branch Risk and Control Officer (BRCO) and submitted quarterly to the Risk Management Division and the Internal Audit Division as a general audit of the branches.

In general, the composite risks borne by Bank BTN in the fourth quarter 2009 were at a low to moderate level, with the following composition: moderate for credit risk, low for strategic risk and *low to moderate* for others. The condition was supported by an acceptable Risk Control System, comprising active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as appropriateness of information system policies, supervision and management, and effective internal controls.



Profil Risiko Bank BTN Per 31 Desember 2009
Bank BTN Risk Profile As Of 31st December 2009

NO	RISIKO RISK	INHERENT RISK		RISK CONTROL SYSTEM (RCS)				RISIKO KOMPOSIT COMPOSITE RISK
		SKOR IR	BOBOT	SKOR IR	SKOR RCS	BOBOT	SKOR RCS	
		PREDIKAT IR		TERBOBOT	PREDIKAT RCS		TERBOBOT	
		IR SCORE	WEIGHT	IR SCORE	RCS SCORE	WEIGHT	IR SCORE	
IR PREDICATE		WEIGHTED	RCS PREDICATE		WEIGHTED			
1.	KREDIT CREDIT	61,78	12,50%	7.72	65,89	12,50%	8,24	MODERATE
		MODERATE			ACCEPTABLE			
2.	PASAR MARKET	67,40	12,50%	8.43	64,75	12,50%	8,09	LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			
3.	LIKUIDITAS LIQUIDITY	62,60	12,50%	7.83	68,31	12,50%	8,54	LOW TO MODERATE
		MODERATE			STRONG			
4.	OPERASIONAL OPERATIONAL	84,45	12,50%	10.56	63,86	12,50%	7,98	LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			
5.	HUKUM LEGAL	100,00	12,50%	12.50	65,94	12,50%	8,24	LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			
6.	REPUTASI REPUTATION	78,00	12,50%	9.75	63,41	12,50%	7,93	LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			
7.	STRATEJIK STRATEGIC	96,00	12,50%	12.00	67,12	12,50%	8,39	LOW
		LOW			STRONG			
8.	KEPATUHAN COMPLIANCE	94,29	12,50%	11.79	65,77	12,50%	8,22	LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			
	AGREGAT AGGREGATE	80,56	100%		65,63	100%		LOW TO MODERATE
		LOW			ACCEPTABLE			

PENGELOLAAN ASET DAN LIABILITAS

Unit kerja *Supporting Group Asset & Liability* memiliki tugas untuk membantu Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) dalam memaksimalkan profitabilitas dengan mengevaluasi serta mengkaji prospek bisnis Bank BTN dengan mengacu kepada RKAP bank dan kondisi terkini dari makro ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja bank. Bank BTN akan berupaya untuk mengalokasikan sumber-sumber pendanaan ke dalam aktiva produktif dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan melakukan review terhadap sumber pendanaan, biaya pendanaan, penetapan suku bunga serta risiko likuiditas yang dihadapi Bank BTN.

ASSETS AND LIABILITIES MANAGEMENT

The Supporting Group Asset & Liability working unit is tasked with assisting the Assets and Liabilities Committee (ALCO) in maximizing profitability by evaluating and reviewing the bank's business prospects in reference to the Bank's RKAP and current condition of the macroeconomy, which can impact the Bank's performance. The bank seeks to allocate its source of funds into productive assets based on its prudent principles, and always reviews the source of funds, cost of funds, interest rate schemes and liquidity risks faced by the Bank.

Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan. Penerapan dan pengelolaan manajemen risiko telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam PBI Nomor 11/25/PBI/2009 risiko kredit didefinisikan sebagai risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

Pengelolaan risiko kredit dalam tahun 2009 telah dilakukan secara optimal hal ini tercermin dari peringkat penilaian risiko kredit per triwulan IV adalah *Moderate*. Kondisi ini tidak terlepas dari pencapaian tingkat *Non Performing Loan (NPL) Gross* per 31 Desember 2009 sebesar 3,36% dan masih di bawah ketentuan maksimal BI yang sebesar 5%. Adapun untuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam bidang risiko kredit telah berjalan sesuai dengan fungsinya dan untuk penilaian profil risiko berdasarkan *Risk Control System* yang maka diperoleh kesimpulan peringkat penilaian efektifitas pengendalian kredit adalah *acceptable*. Kondisi dapat dilihat dari tercapainya realisasi pemberian kredit baru yang sebesar dari yang dianggarkan dalam tahun 2009. Selain mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko, Bank BTN selalu memperbaharui manual kebijakan kredit dan pembiayaan dan melibatkan Divisi Manajemen Risiko dalam bentuk pembuatan kajian risiko atas kebijakan kredit dan pembiayaan Bank BTN.

Untuk aktifitas pengukuran kredit telah dilakukan kajian dan review *Credit Scoring Model (CSM)* sehingga saat ini telah memasuki *Credit Scoring Model Phase II*. Dengan penyempurnaan *Credit Scoring Model* tersebut maka diharapkan Bank BTN dapat memproses kredit secara masal sebagai upaya untuk mendukung percepatan pelayanan, keakuratan data dan proses "Sekuritisasi KPR" yang akan dijalankan oleh Bank BTN.

Pemantauan risiko kredit dilakukan secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk BRCO dan DRCO guna memantau eksposur risiko kredit baik dari proses pemberian kredit sampai dengan berakhirnya kredit. Pemantauan tersebut meliputi semua aspek baik dari sisi kepatuhan terhadap persyaratan, kecukupan agunan sampai dengan penanganan kredit bermasalah.

Proses selanjutnya adalah dengan melakukan pengendalian yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama BRCO dan DRCO dengan memastikan bahwa satuan kerja perkreditan melakukan aktifitas yang konsisten dengan SOP maupun batas yang telah ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian. Apabila ada terjadi pelanggaran yang signifikan maka BRCO dan DRCO bertindak cepat melaporkan kepada Divisi Manajemen Risiko untuk ditindaklanjuti.

Langkah strategik lainnya yaitu pengelolaan risiko konsentrasi kredit Bank BTN dengan melakukan penyebaran kredit guna meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar perumahan.

Credit risk management is part of the overall risk management. The application and management of risk management is regulated by Bank Indonesia Regulation No.11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 on the Amendment to Bank Indonesia Regulation on the Application of Risk Management for Commercial Banks, which defines credit risk as risk posed by the failure of debtors and or other parties to meet their commitments to the bank.

Credit risk management was carried out optimally in 2009, which is reflected in the Bank's moderate credit risk rating in the fourth quarter. This is attributed to the achievement in Gross NPL per December 31, 2009 of 3.36%, which is below BI's maximum of 5%. Active supervision by the Board of Commissioners and Board of Directors of the credit risk sector was performed in accordance with their function, while the rating for risk control-based credit risk profiles was concluded as acceptable. This is evident in achievement of the targeted loan disbursements for 2009. Other than reviewing the Risk Management Policy Guidelines, Bank BTN continuously updates its credit and mortgage policy manual and involves the Risk Management Division in preparing risk evaluations of Bank BTN's loan and financing policies.

For the credit measurement activities, the implementation of evaluation and review of the Credit Scoring Model (CSM) has enabled the Bank to enter the Credit Scoring Model Phase II. With this enhanced model, Bank BTN is expected to process loans collectively, aiming at accelerating service and achieving data accuracy and mortgages securitization executed by Bank BTN.

The monitoring of credit risk is executed regularly by the Risk Management Division, including BRCO and DRCO, and is aimed at monitoring the credit risk exposure, starting from disbursement to its settlement. Monitoring comprises all aspects, from compliance to prerequisites, and adequacy of collateral to the handling of NPL.

The subsequent process is the control by the Risk Management Division together with the BRCO and DRCO. They will ensure that the loan working unit has carried out activities consistent with the SOP and set limits, and has met the Bank's standards of prudence. Should there be any significant deviance, the BRCO and DRCO immediately report it to the Risk Management Division for follow up.

Another strategic step is the management of Bank BTN's loan concentration through the distribution of loans to improve both the loan portfolio and non-housing finance.



Hal tersebut sesuai dengan amanah Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank BTN Tahun 2008-2012 dimana pada tahun 2012 komposisi kredit Bank BTN adalah 75%:25% untuk kredit perumahan dan kredit non perumahan. Dengan penyebaran kredit tersebut diharapkan portofolio kredit Bank BTN tidak terfokus hanya pada sektor perumahan saja namun telah terdiversifikasi pada beragam sektor.

RISIKO PASAR

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*. Secara umum Bank terekspose pada risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, namun seiring dengan kondisi eksternal pasar keuangan yang membaik di tahun 2009, risiko pasar yang terpapar secara langsung adalah portofolio yang termasuk di dalam *Trading Book* dimana nilai *market-to-market* harga obligasi yang mulai bergerak naik akan berpengaruh positif terhadap pendapatan Bank.

Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Bank BTN menggunakan perhitungan *Standard Method*. Sedangkan risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejala eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal.

RISIKO LIKUIDITAS

Posisi dana pihak ketiga, likuiditas aset, kewajiban kepada *counterparts* dan komitmen kredit kepada debitur merupakan potensi risiko likuiditas bagi Bank. Ketidakmampuan untuk menghimpun dana dengan biaya wajar akan berdampak kepada profitabilitas Bank. Bank BTN mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas mencakup antara lain pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, penetapan strategi pendanaan serta memelihara akses pasar yang mencukupi. Likuiditas Bank BTN saat ini diukur melalui posisi *primary reserve* dan *secondary reserve*. Bank BTN memelihara *primary reserve* dan *secondary reserve* untuk memenuhi kebutuhan operasional harian serta sebagai cadangan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik penarikan dana tidak terduga maupun ekspansi aktiva. Bank BTN memelihara *primary reserves* dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dan kas di cabang-cabang.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas disusun sesuai dengan aktifitas bisnis yang dilaksanakan unit kerja operasional dan memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Untuk mengetahui kemampuan Bank BTN dalam menghadapi situasi likuiditas yang berbeda, Bank BTN melakukan serangkaian skenario likuiditas yang mencakup kondisi normal dan tidak normal

This is in line with the direction in Bank BTN's Long Term Plan for 2008-2012. In 2012, Bank BTN's loan composition is projected to reach 75%:25% for housing and non-housing loans. Through distribution, the loan portfolio is expected to be diversified into a range of sectors rather than only focused on the housing loan sector.

MARKET RISK

Market risk is risk related to the balance sheet position and administrative accounts, including derivative transactions, impacts of change on the overall market condition and option prices. Generally a bank is exposed to the interest rate risk and exchange rate risk; however, along with the improved external money market in 2009, the directly exposed market risk was the portfolio covered in the *Trading Book*, whereby the increase market-to-market bond prices would have a positive impact on the Bank's earnings.

To measure its market risk, Bank BTN adopts the Standardized Method calculation. Exchange rate risks, affected by fluctuations in exchange rates, are managed by maintaining the Net Open Position in accordance with Bank Indonesia's guidelines. External fluctuations are also accommodated by stress testing to assess the Bank's resilience against the changes resulting from the external condition.

LIQUIDITY RISK

Third-party funding, asset liquidity, liability to the counterparts and loan commitments to debtors pose potential liquidity risks to the Bank. The inability to collect funds for reasonable costs will impact the Bank's profitability. Bank BTN manages liquidity risks to meet every committed financial obligation on schedule and always seeks to maintain an adequate and optimal liquidity level.

The policies in liquidity risk management include the maintenance of optimal liquidity reserves, decisions on funding strategies and maintaining proper access to the market. Currently, Bank BTN's liquidity is measured by the primary and secondary reserve positions. Bank BTN maintains both reserves to meet the daily operational needs and as a reserve for liquidity demands resulting from unexpected withdrawals or asset expansion. Bank BTN maintains its primary reserves in the form of Minimum Demand Deposit Requirements in Bank Indonesia and cash in branches.

The policies for liquidity risk management are formulated based on business activities conducted by operational working units and by taking into account the needs for business expansion. To measure the Bank's ability to face different liquidity situations, the Bank exercises a series of liquidity scenarios that cover both normal and abnormal conditions, including

termasuk kondisi ekstrim atau krisis. Selain melalui dana pihak ketiga, Bank BTN dapat memenuhi kebutuhan likuiditas melalui sumber-sumber dana alternatif seperti: sekuritisasi aset, *repurchase agreements*, ataupun melalui penjualan surat berharga seperti Surat Utang Negara (*government bonds*).

RISIKO OPERASIONAL

Dalam mengidentifikasi risiko operasional, Bank BTN mengelompokkan sumber risiko operasional untuk kemudian dilakukan identifikasi risiko operasional yang material pada kantor cabang konvensional dan syariah melalui *check list* manajemen risiko bulanan yang dilaporkan setiap bulan ke Direktur yang membidangi Manajemen Risiko.

Dalam mengukur risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko telah melakukan simulasi perhitungan kebutuhan modal untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID). Divisi Manajemen Risiko juga menyusun laporan profil risiko yang dipergunakan untuk memantau dan melihat tingkat signifikansi risiko berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko bertugas melakukan pengumpulan data risiko operasional dalam bentuk *database* yang dapat dipergunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktifitas fungsional tertentu.

Dalam pemantauan risiko operasional, Divisi Audit Internal melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktifitas dan Divisi Manajemen Risiko berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktifitas fungsional, produk atau layanan baru.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank BTN. Divisi Manajemen Risiko bertugas untuk memastikan bahwa Bank BTN telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktifitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

RISIKO HUKUM

Bank BTN melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis. Di samping itu, setiap divisi bersama-sama dengan Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Sekretariat Perusahaan secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama Divisi Sekretariat Perusahaan berdasarkan laporan hasil evaluasi atas

extreme or crisis conditions. Other than through third-party funding, Bank BTN is able meet its liquidity needs through alternative sources of funding, such as assets securitization, repurchasing agreements or the sale of securities, for example government bonds.

OPERATIONAL RISK

The Bank categorizes sources of operational risk based on the identification of material operational risk in conventional and sharia branches. This is done through a monthly risk management checklist, which is reported to the Director in-charge of Risk Management every month.

To determine operational risk, the Risk Management Division has exercised a simulation to calculate the capital requirements for operational risks by using the Basic Indicators Approach as regulated by the Bank Indonesia Circular Letter No.11/3/PNP dated 27th January 2009 on the Calculation of Risk-Weighted Assets (ATMR) for Operational Risk by Using the Basic Indicator Approach (PID). The Risk Management Division also maps risk profile reports, which are used to monitor and review the significance level of risks based on their contributing factors. Besides that, Risk Management is also tasked with collecting operational risk data in a database, which can be used to project potential losses within one period or a particular functional activity.

In operational risk monitoring, the Internal Audit Division performs an evaluation on the implementation of risk management policies and procedures. The Risk Management Division ensures that risk identification, measurement, monitoring and control proceed effectively for every activity and new products or services.

The operational risk control and mitigation is conducted by all working units in the Bank BTN. The Risk Management Division is tasked with ensuring that Bank BTN has control policies and processes, as well as sufficient operational risk mitigation, which need to be adhered to and performed by every working unit to perform transactions and activities in an accurate, efficient and timely fashion.

LEGAL RISK

The Bank identifies legal risks based on contributing factors such as legal claims and juridical weaknesses. Every division meets regularly with the Risk Management and Corporate Secretary division to analyze the impact of changes in relevant stipulations and regulations against legal risk exposure.

The measurement of legal risk is conducted by the Risk Management division and the Corporate Secretary division, based on evaluation reports



analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mengevaluasi efektifitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum. Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, Divisi Sekretariat Perusahaan memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan review secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparts*.

RISIKO REPUTASI

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktifitas fungsional yang mencakup keterbukaan (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank BTN, perilaku karyawan Bank BTN dalam melayani nasabah, dan sistem komunikasi Bank BTN.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko reputasi. Risiko reputasi Bank BTN dikelola oleh Divisi Sekretariat Perusahaan dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis. Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dibangun sistem pemantauan reputasi yang dirancang agar dapat secara rutin memeriksa transaksi, peraturan, teknologi dan trend, perkembangan dan perubahan yang berpotensi mempengaruhi bisnis Bank BTN. Dalam hal ini, Bank BTN melakukan analisis kesenjangan antara kinerja Bank dengan harapan *stakeholder* pada umumnya nasabah khususnya, melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta dengan mengoptimalkan fungsi *corporate secretary*.

Dalam pengendalian risiko reputasi, Divisi Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation* (PSO) dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kegiatan *corporate social responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program yang berkesinambungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit subsidi dan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

RISIKO STRATEJIK

Identifikasi risiko stratejik dilakukan berdasarkan faktor-faktor penyebab risiko pada aktifitas fungsional tertentu, seperti aktifitas perkreditan, treasury dan investasi, serta operasional dan jasa. Kemudian, setiap divisi dan kantor cabang mencatat dan menata usahakan setiap kejadian terkait risiko stratejik dalam suatu *database* yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktifitas fungsional tertentu.

on the analysis of individual legal cases against the contingency obligations arising from legal claims.

The monitoring of legal risks is performed by the Risk Management division to evaluate the efficacy and compliance with policies, legal regulations and the Bank's limit requirements. Monitoring is conducted regularly against the whole legal risk position. In controlling the legal risks, the Corporate Secretary division provides legal opinions and recommendations to each division and working unit, and conducts regular reviews of agreements and contracts with counterparts.

REPUTATION RISK

Reputational risk is identified in the inherent risks in functional activities, including disclosure requirements, customer complaints, employee behavior in delivering services to customers and the Bank's communication system.

The measurement of the reputational system is carried out based on the factors contributing to the risk. Risk is managed by the Corporate Secretary division and is reported to Bank Indonesia by the Business Policy and Development division. To monitor reputational risks, the Bank has established a reputation monitoring system designed to enable routine monitoring of transactions, regulations, technology and trends, development and changes that could affect the Bank's business. As such, Bank BTN conducts gap analyses of the Bank's performance and shareholder expectations in general, and customer expectations specifically; prepares checklists on potential areas of reputation risk; and optimizes the functions of the Corporate Secretary.

To control reputational risk, the Corporate Secretary division is responsible for policy implementation related to the handling and settlement of negative publications or preventing counterproductive information. The Corporate Secretary is also responsible for Public Service Obligations (PSO), which is carried out through the Bank's corporate social responsibility (CSR) activities. The CSR activities are not solely focused on charity activities, but also features activities that support sustainable programs, including subsidized loans and the Environmental and Partnership Program.

STRATEGIC RISK

Strategic risk is identified based on the risk factors in certain functional activities, such as lending, treasury and investment, operations and services. Each division and branch records and manages all events associated with strategic risks in a database, which is used to project potential losses per period and activity.

Pengukuran risiko stratejik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank BTN yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja fungsional individu, dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko stratejik dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko secara berkala dengan mengidentifikasi strategi-strategi fungsional yang sedang dijalankan beserta target-sasarannya. Selanjutnya Dewan Komisaris, Direksi, divisi dan kantor cabang mereview strategi dasar dan fokus pada perubahan manajemen Bank BTN, perkreditan korporasi, pembiayaan perdagangan, treasury, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

Dalam pengendalian risiko stratejik, Divisi Penelitian dan Perencanaan berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala. Selanjutnya, Divisi Manajemen Risiko, satuan kerja bisnis, Divisi Audit Internal dan kantor cabang Bank BTN memantau risiko stratejik dengan membandingkan hasil yang ingin dicapai (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja fungsional unit kerja, dan memastikan pencapaian target (*target objective*).

RISIKO KEPATUHAN

Dalam identifikasi risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja. Di samping itu, Satuan Kerja Kepatuhan menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk *di-review*. Faktor-faktor risiko kepatuhan di Kantor Cabang dimonitor melalui *check list* kepatuhan dan *check list* manajemen risiko yang disampaikan kepada Kantor Cabang setiap bulan.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank BTN dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank BTN untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk *me-review* semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank BTN. Dalam pemantauan risiko kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektifitas implementasi manajemen risiko kepatuhan dengan memantau secara teratur seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan dan melakukan *review*.

Terkait pengendalian risiko kepatuhan, Divisi Sekretariat Perusahaan (DSP) membuat daftar peraturan dan hukum yang mengatur kegiatan perbankan dan mendistribusikan daftar tersebut kepada divisi yang tepat. Di samping itu DSP telah menyediakan portal khusus yang bernama Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) untuk memudahkan seluruh unit kerja melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank BTN. Selanjutnya, Satuan Kerja Kepatuhan

The measurement of strategic risks and parameters is performed based on the Bank's performance, by comparing expected results against actual results, evaluating individual functional performance and reviewing achieved progress against targets.

The monitoring is conducted by the Risk Management Division, which regularly identifies ongoing functional strategies and targets. To realize this, the Board of Commissioners, The Board of Directors, divisions and branches review the basic strategy and focus on changes in Bank's management, corporate lending, trade financing, treasury, operational and strength and weaknesses of IT system.

For strategic risk control, the Research and Planning division analyzes the actual report and business plan targets and submits the reports to the Board of Directors on a regular basis. Furthermore, the risk management division, a business unit, the internal audit and branch offices of Bank BTN monitor the strategic risks by measuring the expected results against the actual results, evaluating the functional performance of working units and ensuring the achievement on target objectives.

COMPLIANCE RISK

To identify compliance risk, the Compliance Working Unit compiles a list of prevailing regulations and laws applicable to working units, analyzes compliance risks and informs the Risk Management division and Risk Management Committee about any risks for review. The compliance risk factors in branches are monitored through the compliance checklist and risk management checklist, which are reported to the branch heads.

The measurement of compliance risks is conducted to estimate the potential losses resulting from lack of compliance or the inability to meet prevailing regulations. The scope of compliance risks is estimated based on Bank BTN's ability to comply with regulations in the past, and is projected to determine future risk. This includes a review of all penalties, litigation and complaints addressed by Bank BTN. In monitoring compliance risks, the Risk Management division and Compliance working unit are tasked with evaluating the efficacy of risk management implementation through regular monitoring of all potential compliance risks and conducting reviews.

In relation with compliance risk control, the Corporate Secretary division prepares a list of regulations and laws affecting banking activities and distributes the list to relevant divisions. The division also provides a special Standard Management Internal Access (AIMS) portal to facilitate access to the Bank's internal regulations by all working units. The Compliance Working Unit compares the expected results against the actual



membandingkan hasil yang diharapkan (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kemampuan fungsional masing-masing divisi, dan memeriksa perkembangan yang sudah dicapai untuk memastikan bahwa Bank BTN dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Secara berkala, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan pemantauan terhadap penyelesaian audit baik dari internal maupun eksternal, dalam hal ini BRCO melakukan fungsi memastikan bahwa kantor cabang telah menyelesaikan temuan atau hasil pemeriksaan tersebut.

PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO

Bagi Bank BTN, faktor SDM menjadi hal yang signifikan turut menentukan keberhasilan program manajemen risiko. Untuk itulah, Bank BTN telah melaksanakan beberapa program pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko yaitu BRCO dalam menjalankan fungsinya memberikan *second opinion* dan pertimbangan risiko yang melekat dalam setiap bisnis Bank.

Sedangkan dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan di bidang manajemen risiko, Bank BTN telah melakukan *internal training* dan mempersiapkan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko).

Sejak tahun 2005 sampai dengan akhir Desember 2009, jumlah pejabat dan staf yang telah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko banyak 381 orang, dengan rincian level 1 sebanyak 208 orang, level 2 sebanyak 116 orang dan level 3 sebanyak 57 orang. Selain itu terdapat 10 pejabat dan staf yang telah lulus mengikuti sertifikasi manajemen risiko level Matrikulasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dan *Banker Association of Risk Management* (BARa).

RENCANA PENGEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pengembangan sistem manajemen risiko, di tahun 2010 Bank BTN akan terus melakukan penyempurnaan *Key Risk Indicator* (KRI). Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyempurnaan KRI khususnya di kantor cabang adalah dengan melakukan *Risk Mapping*. Bank BTN akan melakukan *Risk Mapping* untuk memetakan kejadian-kejadian risiko beserta eksposurnya yang melekat dengan kegiatan operasional kantor cabang sehingga setiap potensi risiko yang ada dapat dikelola secara efektif dan menyeluruh. Disamping *Risk Mapping*, Bank BTN juga akan melaksanakan *Operational Risk Self-Assessment*. Bank BTN akan melakukan stress testing secara berkala untuk menilai kecukupan modal dan likuiditas dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophy*. Stress testing tersebut akan difokuskan untuk risiko kredit, pasar, likuiditas, dan operasional. Selain itu, untuk mengembangkan sistem manajemen risiko Bank BTN akan mengembangkan sistem manajemen informasi dan melakukan kaji ulang terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

results, evaluates the functional ability of each division and checks progress to ensure targets are achieved.

The Internal Audit working unit monitors internal and external audit settlements periodically. The BRCO ensures the settlement of the audit findings or results by branches.

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN RISK MANAGEMENT

Bank BTN understands the significance of human resources in achieving success of its risk management programs. Therefore, Bank BTN has implemented several human resources development programs through education and trainings for risk management officials, including the BRCO, to assist them in performing their role in giving second opinions and recommendations concerning inherent risks in business activities.

While in developing the knowledge capacity in risk management, Bank BTN has conducted internal trainings and is preparing a pre-test as initial scanning for officials and employees to take the certification examination held by BSMR (Risk Management Certification Body).

From 2005 to the end of December 2009, 381 officials and staff passed the risk management certification test, consisting of 208 from level 1, 116 from level 2 and 57 from level 3. Ten officials and staff also passed the risk management matriculation certification held by Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) and the Bankers' Association for Risk Management (BARa).

RISK MANAGEMENT DEVELOPMENT PLAN

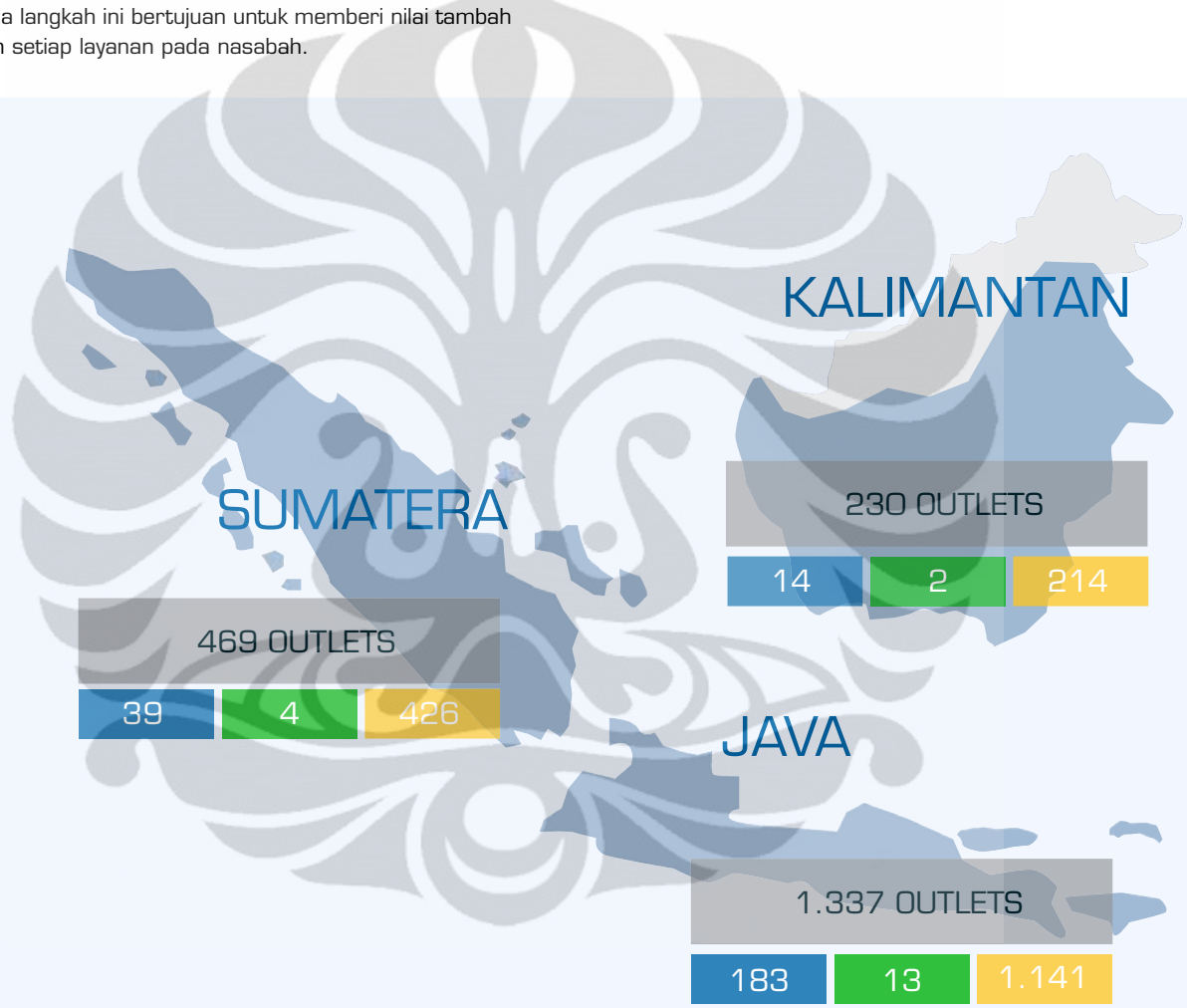
In 2010, Bank BTN will continue to enhance its Key Risk Indicators (KRI). One activity to enhance the KRI, especially in branches, is risk mapping. Bank BTN will map incidents involving risk and the inherent exposure to risk in the operational activities of branches to manage potential risks in an effective and comprehensive manner. In addition to risk mapping, Bank BTN will also hold an Operational Risk Self-Assessment. Bank BTN will carry out regular testing to evaluate the capital and liquidity adequacy in the event of extreme risk or catastrophe. The stress testing will be focused on loan, market, liquidity and operational risks. Bank BTN will also develop an information management system and review the Risk Management Policy Guidelines.

JARINGAN

Network

Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan perumahan, Bank BTN berupaya meningkatkan layanan transaksi perbankan melalui jaringan operasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Peningkatan layanan tersebut dilakukan dengan beberapa cara, dari memperluas jumlah dan jangkauan jaringan hingga peningkatan teknologi informasi yang mendukung kualitas layanan. Semua langkah ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dalam setiap layanan pada nasabah.

As a housing finance-oriented bank, Bank BTN seeks to improve banking transaction services through operational networks throughout Indonesia. Service improvement has been developed through the expansion of the number and range of our network and IT improvements that support service quality. These steps aim to provide added value to its customers.



265	Outlet Bank BTN / Bank BTN's Outlets
20	Outlet Bank BTN Syariah / Bank BTN's Sharia Outlets
2.045	Kantor Pos terhubung <i>online</i> dengan Bank BTN, tersebar di seluruh wilayah Indonesia Pos Office Connected online with Bank BTN, throughout Indonesia

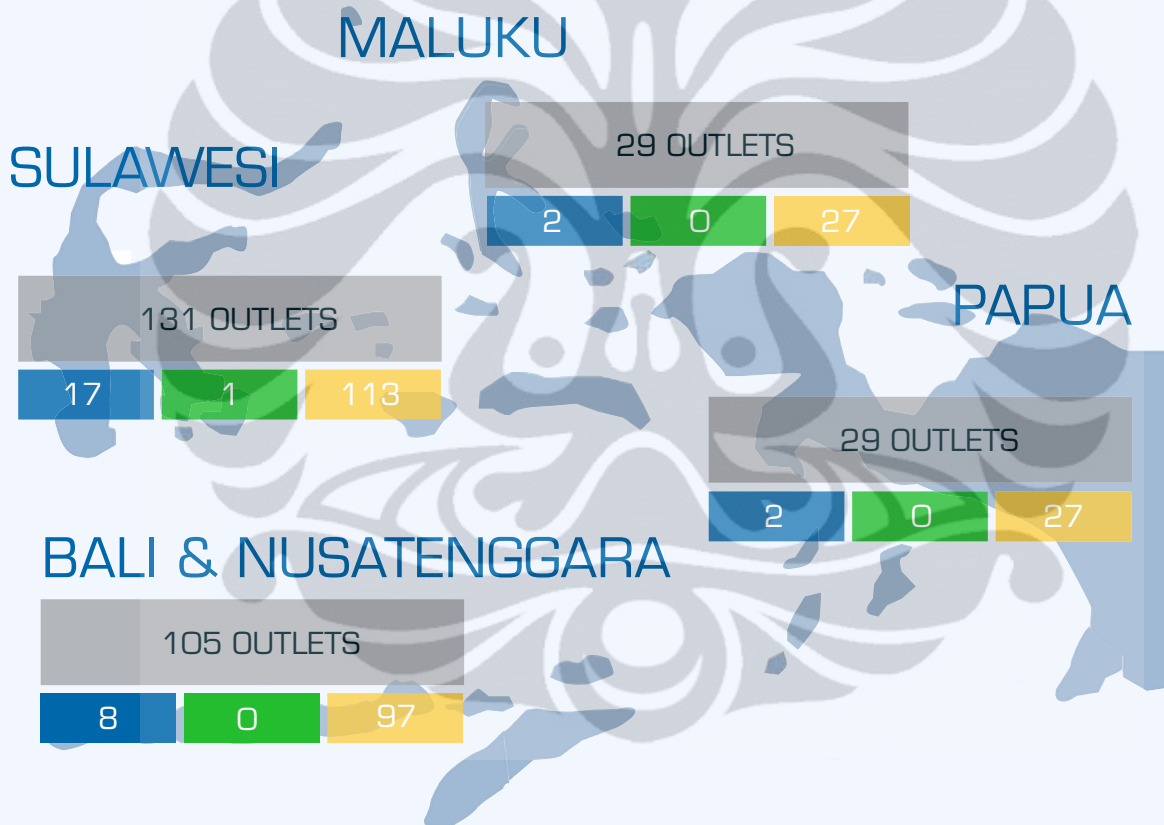


Selama tahun 2009, beberapa langkah peningkatan dan perluasan layanan Bank BTN yang menunjukkan kesiapan Bank BTN untuk terus mengembangkan layanan perbankan di masa mendatang adalah:

- Peningkatan fitur layanan tambahan *host-to-host* dengan lima operator telekomunikasi selular, Visa Electron dan fasilitas serta pembayaran pajak secara *online*.

During 2009 Bank BTN has taken several steps to improve and expand its service. This showed Bank BTN's readiness in developing, banking service, in the future. The steps taken are:

- Improving additional *host-to-host* services with five mobile telecommunications operators, Visa Electron and online tax payment facilities



Distribusi penyebaran termasuk

- 509 ATMs
- berada di lebih dari 20,000 ATM terhubung *online* dengan jaringan Link and ATM Bersama

Distribution channel includes:

- 509 ATMs
- over 20,000 ATMs linked to the Link and ATM Bersama Networks

- Penambahan fitur layanan ATM yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi pembayaran SPP, rekening PDAM dan saat ini sedang dikembangkan layanan pembelian tiket pesawat dari Garuda, Lion dan Mandala Airlines.
- Peluncuran layanan *SMS Banking* stadium 3.
- Pengembangan *Contact Center*.

- Additional of ATM service features that allow customers to make transaction payments for school fees, water, and other services which are currently being developed, such as airline ticket purchases from Garuda, Lion and Mandala Airlines
- Launch of service stage 3 SMS Banking
- Contact Center Development

Berdasarkan data per 31 Desember 2009, Bank BTN memiliki total 265 kantor cabang (termasuk kantor cabang pembantu), 20 kantor cabang syariah, 12 *payment point* dan 509 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 20.000 ATM termasuk jaringan ATM Link dan ATM Bersama. Selain itu, untuk mendekatkan diri kepada nasabah, Bank BTN bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) menyediakan layanan setara kantor kas sejumlah 2.045 Kantor Pos di seluruh Indonesia.

Based on data as of December 31, 2009, Bank BTN has a total of 265 branch offices (including sub-branch offices), 20 sharia branch offices, 12 payment points and 509 ATMs across Indonesia, as well as network access at over 20,000 ATMs, including the ATM Bersama and ATM Link networks. To improve its relationship with its customers, Bank BTN has partnered with PT Pos Indonesia (Persero) in 2,045 post offices across Indonesia.

Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan jaringan distribusi Bank BTN selama tiga tahun terakhir:

Below is the table showing the distribution Bank BTN's network over the last three years:

Keterangan Information	31 Desember		
	2009	2008	2007
Kantor Cabang (kecuali Cabang Syariah) Branch Offices (minor Sharia Branch)	61	60	53
Kantor Cabang Pembantu (kecuali Cabang Pembantu Syariah) Sub Branch Offices (minor Sharia Sub Branch)	204	182	180
Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Syariah *) Branch Offices and Sharia Sub Branch *)	20	16	12
Kantor Layanan Syariah Sharia Service Offices	119	66	39
Jumlah cabang Total Branch Offices	285	258	245
Jumlah ATM Total ATM	509	367	221
Kantor Pos yang secara elektronik terhubung dengan Bank BTN Post Office electronically link with Bank BTN	2.045	1.545	1.261

*) Belum termasuk Kantor Layanan Syariah yang terletak di kantor cabang dan cabang pembantu konvensional

*) Not including Sharia Channeling Offices located in branch offices and conventional sub-branches.

Tabel berikut ini memperlihatkan informasi mengenai penyebaran lokasi kantor cabang Bank BTN termasuk kantor cabang pembantu, ATM dan Kantor Layanan Setingkat Kantor Kas (KLKK) sampai dengan 31 Desember 2009.

The following table shows information about the locations of Bank BTN's branches, including branches, ATMs and the Office of Equal Cash Services (KLKK) as of December 31, 2009.



Wilayah Region	Cabang Branch	Cabang pembantu Branch Office	Cabang Syariah Sharia Branch	Total	ATM	KLKK	Payment Point outlets Payment Point outlets
Jakarta	5	36	2	43	51	103	2
Banten&Jawa Barat	16	67	6	89	175	427	2
Jawa Tengah	5	21	3	29	46	308	2
Jawa Timur	8	25	2	35	77	303	3
Sumatera	11	28	4	43	79	426	1
Sulawesi	5	12	1	18	29	113	2
Bali&Nusatenggara	3	5	0	8	15	97	-
Kalimantan	5	9	2	16	28	214	-
Irian, Papua & Maluku	3	1	0	4	9	54	-
Total	61	204	20	285	509	2.045	12

KANTOR PUSAT

Kantor Pusat Bank BTN terletak di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130, Indonesia.

KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG PEMBANTU

Bank BTN membagi empat tingkatan kantor cabang yang dimiliki yakni: cabang utama, cabang kelas satu, cabang kelas dua, dan cabang kelas tiga. Masing-masing kantor cabang beroperasi secara independen dan memiliki tingkat otoritas kredit yang berbeda tergantung klasifikasi masing-masing. Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan klasifikasi masing-masing cabang antara lain seperti jumlah nasabah, tingkat kepentingan strategi dari tiap lokasi, jumlah kantor cabang pembantu di bawah suatu kantor cabang dan saldo rekening keseluruhan. Klasifikasi yang diterapkan akan dievaluasi ulang secara rutin dan akan dilakukan penyesuaian terhadap kelas cabang.

Selain itu, Bank BTN juga telah memiliki izin sebagai bank devisa sejak 1994, sehingga dapat menerima simpanan dalam mata uang asing baik giro maupun deposito. Selain melayani simpanan mata uang asing, Bank BTN juga menyediakan layanan *remittance* dan jual beli mata uang asing (*money changer*) di 14 kantor cabang yang mendukung layanan tersebut.

Sementara itu, operasional kantor cabang pembantu berada di bawah pengawasan kantor cabang induk. Produk-produk yang ditawarkan kantor cabang pembantu sama dengan yang dimiliki kantor cabang namun dengan tingkat kewenangan persetujuan permohonan kredit yang berbeda.

KANTOR POS ONLINE

Pada akhir tahun 2005 Bank BTN bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) meluncurkan produk Tabungan eBatara Pos yang merupakan peremajaan produk Tabanas Batara. Perbedaan mendasar dari kedua produk tersebut adalah pada sistem dan layanannya,

HEAD OFFICE

Bank BTN's head office is located at Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130, Indonesia.

BRANCH OFFICES AND SUB-BRANCH OFFICES

Bank BTN has four levels of offices: main branches, first class branches, second class branches and third class branches. Branch offices operate independently and have different levels of authority depending on the classification of loans. The factors influencing differences in the classification of each branch include number of customers, level of strategic interest in the branch location, number of sub-branches and overall account balance. Classification will be routinely re-evaluated and adjusted to branch class.

Bank BTN has been licensed as a foreign exchange bank since 1994. Bank BTN can accept deposits in foreign currencies, either through demand deposits or time deposits. Besides serving foreign currency deposits, Bank BTN also offers remittance services and money changer transactions in 14 branch offices.

The operation of sub-branches is under the supervision of the main branch office. Products offered by sub-branches and branches are similar, with the exception of the level of loan approval.

ONLINE POST OFFICE

At the end 2005, Bank BTN entered a partnership with PT. Pos Indonesia (Persero) to launch Tabungan eBatara Pos, which is a new version of Tabanas Batara. The fundamental difference of the two products lies in the system and services: Tabungan eBatara Pos is available

dimana Tabungan e'Batara Pos sudah dapat *online realtime* dan dapat dilayani di seluruh *outlet* kantor pos *online*. Selain Tabungan e'Batara Pos, kantor pos *online* juga menerima layanan pembayaran angsuran KPR, setoran Tabungan Batara dan Giro serta jasa layanan perbankan lainnya.

Pola kerjasama Bank BTN dengan PT Pos Indonesia (Persero) diperbarui pada tanggal 1 Desember 2008, dimana pola kerjasama diubah dari semula semuanya berdasarkan transaksi *fee* menjadi pola *revenue sharing* khusus untuk layanan Tabungan e'Batara Pos. Dalam pola kerjasama *revenue sharing* ini, Bank BTN memberikan imbal jasa kepada PT. Pos Indonesia (Persero) sebesar prosentase tertentu yang dihitung dari posisi saldo harian Tabungan e'Batara Pos.

Adapun untuk transaksi lainnya yang berupa layanan angsuran KPR, setoran Tabungan Batara dan Giro serta layanan jasa perbankan lainnya imbal jasanya masih menggunakan *base* transaksi *fee*.

Hingga akhir Desember 2009, Bank BTN memiliki jaringan kantor pos *online* berjumlah 2.045 *outlet* dan telah menempatkan mesin ATM di *outlet* pos sebanyak 59 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Ke depan, Bank BTN akan terus menambah layanan pos *online*-nya.

KANTOR CABANG SYARIAH DAN KANTOR LAYANAN SYARIAH

Perbankan Syariah memiliki Kantor Cabang Syariah (KCS) yang menawarkan seluruh produk perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Selain itu, layanan perbankan Syariah juga dapat diakses nasabah melalui Kantor Layanan Syariah (KLS) di kantor cabang atau kantor cabang pembantu konvensional Hingga 31 Desember 2009, Bank BTN telah memiliki 119 KLS.

ATM DAN KARTU ATM

Hingga tanggal 31 Desember 2009, Bank BTN telah memiliki 509 mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan jumlah pemegang kartu ATM Bank BTN sebanyak 567.000. Selain pada mesin ATM yang dimiliki Bank BTN, nasabah juga dapat mengakses ATM di lebih dari 20.000 mesin ATM berlogo Link dan ATM Bersama.

Bank BTN berupaya memperluas jaringan ATM untuk meningkatkan penggunaan kartu ATM dan menyediakan kenyamanan layanan bagi para pemegang kartu ATM. ATM Bank BTN berlokasi di seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu, pusat perbelanjaan, gedung kantor dan area perumahan. Pemegang kartu ATM Bank BTN dapat menggunakan ATM untuk menarik dana, memantau saldo dan mentransfer dana antar rekening Bank BTN dan ke rekening bank lain yang terkoneksi dengan jaringan ATM Link dan ATM Bersama.

Layanan lain yang dapat dinikmati pemegang kartu ATM adalah pembayaran terhadap sejumlah tagihan seperti tagihan telepon, telepon seluler, kartu kredit, air dan tagihan lainnya, karena Bank BTN juga telah menandatangani perjanjian dengan penyedia jasa pihak

online in real time and can be accessed at all post offices. The online post office services also allow for payment of mortgage installments, depositing in Tabungan Batara and demand deposits and other banking services.

Cooperation between Bank BTN and PT Pos Indonesia (Persero) was shifted from transaction fee to revenue sharing on December 1, 2008, particularly for Tabungan e'Batara Pos. In this revenue sharing partnership, Bank BTN provides a certain percentage in compensation to PT. Pos Indonesia (Persero), based on the daily balance of Tabungan e'Batara Pos.

As for the other transaction services, such as mortgage installments, Tabungan Batara saving deposits, demand deposits and other banking services, compensation fees for services still use the base fee transaction.

By the end of December 2009, Bank BTN's network reached 2,045 online post offices, and placed ATMs in 59 postal outlets across Indonesia. Looking ahead, Bank BTN will continue to increase its online postal services.

SHARIA BRANCH OFFICE AND SHARIA CHANNELING OFFICE

The existing sharia branch offices offer all banking products based on sharia principles. Sharia banking services are also accessible to customers via sharia channeling offices at conventional branch or sub-branch offices. By December 31, 2009, there were 119 sharia channeling offices.

ATM AND ATM CARD

As of December 31, 2009, Bank BTN had 509 ATMs with 567,000 ATM card holders. Customers also have access to ATM services at more than 20,000 ATM machines with Link and ATM Bersama's logo on it.

Bank BTN is always seeking to expand its ATM network, increase the use of ATM cards and provide services to enhance the convenience for its ATM card holders. Bank BTN's ATMs are located at all branch and sub-branch offices, shopping centers, office buildings and residential areas. Bank BTN's ATM card holders can use ATMs to withdraw funds, monitor balances and transfer funds between accounts to Bank BTN and other bank accounts connected with the Link ATM network and ATM Bersama.

Other services that can be enjoyed by Bank BTN ATM card holders include bill payments for telephone, cell phone, credit card, water and more, due to Bank BTN's agreements with third-party service providers. Bank BTN ATM card holders can also



ketiga terkait penyediaan fasilitas tersebut. Selain itu, nasabah pemegang kartu ATM Bank BTN juga dapat menggunakan jasa pembelian *voucher* pulsa prabayar untuk telepon seluler melalui ATM Bank BTN. Jumlah transaksi ATM BTN selama tahun 2009 sebanyak 6,8 juta dengan nominal transaksi hingga Rp 2.513 miliar.

Selain itu, Bank BTN juga meluncurkan kartu debit VISA Bank BTN pada akhir 2009. Dengan fitur ini kartu ATM Bank BTN akan dapat digunakan sebagai kartu debit untuk keperluan pembelian di sejumlah *merchants*.

SMS BANKING

Untuk meningkatkan jaringan distribusi, Bank BTN juga memiliki fasilitas SMS Banking yakni transaksi perbankan secara *mobile* yang dapat diakses melalui telepon seluler. Layanan ini diluncurkan sejak 2004 dan masih berlangsung hingga saat ini. Cara kerjanya, layanan *SMS Banking* dapat diakses melalui telepon seluler merek apapun dengan menggunakan pesan SMS yang sederhana. Layanan yang tersedia mencakup pemindahan dana ke rekening Bank BTN, pembayaran tagihan dan isi ulang pulsa telepon seluler.

access prepaid voucher services for mobile phones. In 2009, 6.8 million transactions were made by ATM, with a nominal transaction value of Rp 2,513 billion.

In addition, Bank BTN launched the Bank BTN VISA debit card at the end of 2009, which can be used as a debit card for purchases at a number of merchants.

SMS BANKING

To improve the distribution network, Bank BTN has a SMS Banking facility for mobile banking transactions. This service was launched in 2004 and continues to grow. The SMS Banking service is accessible via any cellular phone using simple SMS messages. Services include fund transfers to Bank BTN accounts, bill payments and pre-paid cellular telephone voucher purchases.





BERKOMITMEN UNTUK MEMBANGUN LANDASAN
GCG YANG KOKOH BAGI PERTUMBUHAN
YANG BERKELANJUTAN

Bagi Bank BTN, tata kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam menjalankan bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif.

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Report

A photograph of a man in a dark suit and glasses speaking at a conference. He is looking to his left and has a microphone in front of him. The background is a plain wall. A large, faint watermark of the Bank BTN logo is visible in the center of the image.

Committed in Building a Solid GCG Platform for Sustainable Growth

For Bank BTN, corporate governance is an important pillar of doing business in a more competitive banking industry.

PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance Implementation

Tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sudah menjadi bagian dari Bank BTN sejak Bank BTN berdiri dan terus mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. *Momentum* dilakukannya pencatatan saham perdana (IPO) pada tahun 2009 menjadi pijakan bagi peningkatan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

Bagi Bank BTN, tata kelola perusahaan yang baik merupakan penopang penting dalam menjalankan bisnis di industri perbankan yang semakin kompetitif. Manfaat yang dapat diambil dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Bank BTN antara lain memperkuat posisi daya saing Bank BTN sebagai bank publik, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif, dan meningkatkan kepercayaan shareholder dan publik yang akhirnya dapat mewujudkan transformasi Bank BTN menjadi bank publik terkemuka (*Blue Chip Company*).

Untuk mewujudkan transformasi yang dimaksud, Bank BTN telah menerapkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik terbaik tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten, yang diyakini akan memberikan manfaat yang baik bagi Bank BTN maupun para pemangku kepentingan lainnya.

LANDASAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagai institusi yang bergerak di bidang perbankan, Bank BTN berpijak pada pedoman Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum juncto PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 dalam implementasi GCG juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Selain itu, sebagai bank umum yang sejak 17 Desember 2009 berstatus sebagai perusahaan publik, maka penerapan GCG beserta praktek-praktek terbaiknya di Bank BTN juga mengacu pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia seperti Undang Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Tentang BUMN, Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek GCG Pada BUMN serta peraturan BUMN terkait, Peraturan BAPEPAM, maupun Pedoman GCG Bank BTN.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Bagi Bank BTN, penerapan praktik GCG tidak hanya dimaksudkan sebagai pemenuhan terhadap peraturan pemerintah saja. Namun manajemen

Good Corporate Governance (GCG) has been part of Bank BTN since its establishment, and continues to grow over time. The momentum generated by the IPO in 2009 became the basis for improving the quality of its good corporate governance programs.

For Bank BTN, corporate governance is an important pillar of doing business in a more competitive banking industry. The application of corporate governance benefits the Bank by strengthening Bank BTN's competitive position as a public bank, increasing the effectiveness of resources and risks, and enhancing trust from the shareholders and public, which will support Bank BTN's transformation into a leading public bank (*Blue Chip Company*).

To realize this transformation, Bank BTN has applied the principles and best practices of good corporate governance consistently to provide good benefit for Bank BTN and other stakeholders.

IMPLEMENTATION OF THE GOOD CORPORATE GOVERNANCE PLATFORM

The implementation of GCG at Bank BTN is based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 8/4/PBI/2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks juncto PBI No. 8/14/PBI/2006 on the Amendment of PBI No. 8/4/PBI/2006 on the implementation of GCG juncto Bank Indonesia Circular Letter No. 9/12/DPNP dated May 30, 2007 on the Subject of Implementing GCG for Commercial Banks.

In addition, as a commercial bank that since December 17, 2009 changed its status to that of a public company, the implementation of GCG and best practices at Bank BTN also refers to the Law on Limited Liability Companies, the Law on SOE, Ministerial Decision for SOEs No. 117/M-MBU/2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in SOEs and related state regulations, Bapepam Regulations, as well as Bank BTN's Guidelines for Good Corporate Governance.

GCG IMPLEMENTATION OBJECTIVES

For Bank BTN, the implementation of solid GCG practices is not only intended to comply with government regulations. Bank BTN's management believes that Bank BTN must



meyakini bahwa perusahaan yang dikelola dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG berarti memfasilitasi *value driver* agar bekerja secara optimal yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai perusahaan (*value creation*). Karena itu manajemen Bank BTN senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan internal dan eksternal dalam mengelola perusahaan dengan berpedoman pada GCG. Bank BTN menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness* (TARIF), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terpenuhinya tujuan akhir Bank BTN sesuai dengan perspektif *stakeholders* maupun *shareholders*.

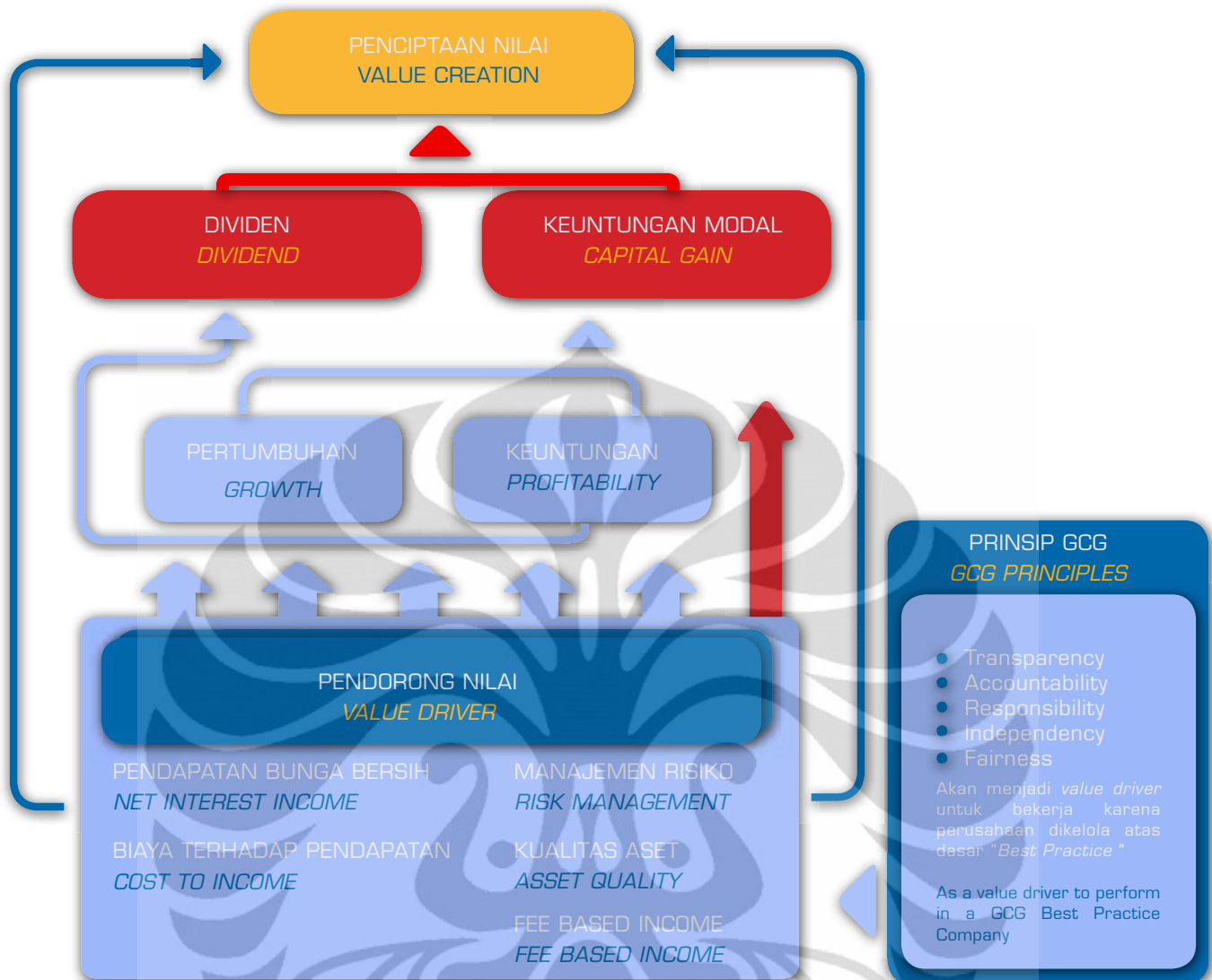
Manajemen Bank BTN berkomitmen penuh dalam mengimplementasikan GCG dalam pengelolaan Bank BTN, karena hal ini disadari akan memberikan lima manfaat utama, yakni:

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank BTN.
2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholders*, dengan meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.
3. Mempermudah perolehan dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *shareholders' values*.
4. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor.
5. Meningkatnya *human capital* yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.

be managed in accordance with the basic GCG principles to facilitate the optimization of value drivers, which in turn will increase the value creation of Bank BTN. Therefore, Bank BTN's management is always looking to balance internal and external interests in managing Bank BTN based on GCG. Bank BTN applies the basic principles of GCG, which include transparency, accountability, responsibility, independency and fairness (TARIF), in the belief that this will guarantee the attainment of Bank BTN's ultimate goals in accordance with the perspectives of stakeholders and shareholders.

The Management of Bank BTN is fully committed to implementing the GCG in managing Bank BTN, as this will provide the Bank with five major benefits, namely:

1. Strengthening of the Bank management's commitment in applying management principles supporting openness, accountability, responsibility, independence, fairness and prudence.
2. Increasing the Bank's performance, efficiency and service to stakeholders through the enhancement of its competitive advantage through innovative product development, strategic network services and the latest technology.
3. Facilitating access to cheaper funding, which in turn will increase the value for shareholders.
4. Increasing investor interest and confidence.
5. Increasing the quality, professionalism and integrity of human capital.



IMPLEMENTASI TATA KELOLA

Dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik diperlukan penilaian untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. Sejak 2007, Bank BTN telah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan GCG dengan *Metode Self-Assessment* seiring dengan dikeluarkannya PBI No. 8/4/PBI/2006 yang mengharuskan bank untuk melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self-assessment*) terhadap pelaksanaan GCG.

Hal penting lainnya yang telah dilakukan Bank BTN pada tahun 2009 adalah dengan disahkannya komitmen Manajemen untuk penerapan GCG dalam Ketetapan Direksi No. 06/DIR/DK/V/2009 pada tanggal 27 Mei 2009. Ketetapan Direksi tersebut menjadi pedoman bagi Bank BTN untuk melakukan praktik Pedoman GCG. Selain itu, dilandasi oleh kesadaran akan pentingnya penerapan GCG, Bank BTN juga melakukan penunjukan koordinator dan *assessor* GCG Bank BTN di setiap unit kerja divisi kantor pusat.

IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Assessments are required to ensure the quality of GCG continues to grow in the implementation of business processes. Since 2007, Bank BTN has conducted a self-assessment of its GCG program, and issued PBI No. 8/4/PBI/2006, which requires the bank to conduct internal self-assessments on the implementation of GCG.

Also important, is that the management is officially committed to the implementation of GCG in 2009 through Directors Decree No. 06/DIR/DK/V/2009 dated May 27, 2009. This directors decree was issued to guide Bank BTN in the practice of Good Corporate Governance's Guidelines. In addition, Bank BTN appointed a GCG coordinator and assessor in each working unit at its headquarters.



Memahami pentingnya pelaksanaan GCG, maka Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN telah menjadikan GCG sebagai bagian dari pengelolaan Bank BTN melalui penerapan suatu sistem yang mencerminkan prinsip-prinsip keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran.

Understanding the importance of GCG, the Board of Commissioners and the Board of Directors have made GCG part of the corporate management structure through the implementation of a system that reflects the principles of transparency, accountability, accountability, independence, equality and fairness.

Secara umum penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank BTN antara lain :

The application of GCG principles in Bank BTN include:

1. Keterbukaan

- Bank BTN mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Informasi tersebut meliputi visi, misi, sasaran bisnis, strategi Bank BTN, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, status kepatuhan, upaya penerapan sistem dalam implementasi GCG serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
- Prinsip keterbukaan itu tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kebijakan Bank BTN harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholders* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
- Bank BTN menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), Bursa Efek Indonesia, serta mengumumkan kepada publik mengenai terjadinya suatu peristiwa, informasi atau fakta material yang dapat mempengaruhi harga atau nilai efek atau keputusan investasi pemodal secara tepat waktu dan obyektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Transparency

- Bank BTN discloses information in a timely, adequate, clear and accurate fashion that can be accessed by stakeholders in accordance with their rights. Information includes the vision, mission, business objectives, strategy, financial condition, management structure and compensation, controlling shareholders, cross shareholding, executive officers, risk management, control systems and internal controls, compliance, efforts to implement GCG and information and material facts that could affect investors' decisions.
- The principle of transparency takes into account the Bank's confidentiality concerning positions held and personal rights according to laws and regulations.
- Bank BTN's policies are written and communicated to stakeholders, who are entitled to information about these policies.
- Bank BTN submits reports to Bank Indonesia, the Capital Market Supervisory Agency-Financial Institutions (Bapepam-LK), Indonesia Stock Exchange, and announces any events, information or material facts that could affect the price or value of securities or investment decisions by investors publicly in a timely fashion in accordance with current laws and regulations.

2. Akuntabilitas

- Bank BTN menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Bank BTN dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing.
- Dalam pengelolaannya, Bank BTN menerapkan *check and balance system*.
- Bank juga memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai Perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha dan strategi Bank serta memiliki sistem *reward and punishment system*.
- Bank BTN meyakini bahwa semua organ organisasi Bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam implementasi GCG.

2. Accountability

- Bank BTN has clearly communicated to every facet of its business that all divisions are responsible for upholding the vision, mission, business goals and strategies and demonstrate their competence in determining appropriate methods in which to fulfill this responsibility.
- In practice, Bank BTN implements a concrete checks and balances system.
- Bank BTN measures all levels of performance based on predetermined indicators consistent with the Corporate values, business goals, strategy and reward and punishment system.
- Bank BTN believes that all facets of the Bank are responsible for understanding and upholding the Bank's commitment to GCG

3. Tanggung Jawab

- Bank BTN berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
- Bank BTN sebagai *good corporate citizen* peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4. Independensi

- Bank BTN menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- Bank BTN mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan.
- Bank BTN memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).

5. Kewajaran

- Bank BTN memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank BTN serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.
- Dalam rangka menerapkan prinsip kewajaran (*fairness*) Bank BTN memperhatikan hak-hak dan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham sesuai dengan klasifikasi.

3. Responsibility

- Bank BTN adheres to prudential banking practices and ensures compliance with applicable regulations.
- Bank BTN, as a good corporate citizen, is concerned about its role in environmental and social responsibility.

4. Independency

- Bank BTN avoids unfair dominance by stakeholders, and is not affected by unilateral interests or conflicts of interest.
- Bank BTN makes decisions objectively and free from any external pressure.
- Bank BTN respects the interests of all stakeholders based on the principles of equality and fairness (equal treatment).

5. Fairness

- Bank BTN provides the opportunity for all stakeholders to provide input and opinions in the interest of Bank BTN and have access to information in accordance with the principles of openness.
- Bank BTN recognizes the rights of shareholders and ensures equal treatment in accordance with the classification of shareholders.

INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN SEBELUM GO PUBLIC

Upaya penerapan GCG yang dilakukan Bank BTN sebelum menjadi perusahaan terbuka melalui beberapa langkah sebagai berikut:

- Mengesahkan Pedoman GCG.
- Mengimplementasikan Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan GCG.
- Pembentukan Koordinator dan *Assessor* GCG di setiap unit kerja divisi/*desk*.
- *Self Assesment* pelaksanaan GCG Periode Januari sampai dengan Desember 2008.
- Program kepedulian terhadap GCG melalui sosialisasi praktik-praktik GCG melalui media internal di seluruh jajaran Bank BTN.

INTERNALISASI TATA KELOLA PERUSAHAAN SETELAH GO PUBLIC DAN RENCANA TATA KELOLA PERUSAHAAN KE DEPAN

Selain melanjutkan langkah-langkah penerapan GCG yang telah diterapkan pada tahun 2009, Bank BTN melanjutkan langkah-langkah penyempurnaan penerapan GCG setelah menjadi perusahaan terbuka melalui:

- Melakukan *self-assessment* pelaksanaan GCG periode Januari sampai dengan Desember 2009.
- Melanjutkan *review* terhadap peraturan-peraturan internal agar sesuai dengan kebutuhan Bank BTN sebagai perusahaan publik dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
- Melakukan *assesment* pelaksanaan GCG oleh pihak eksternal yang berkompeten.

INTERNALISATION OF GCG BEFORE GOING PUBLIC

The steps taken to implement GCG before Bank BTN became a public company include the following:

- Endorsed guidelines on Good Corporate Governance (GCG)
- Implementation of GCG Reporting Guidelines
- Appointment of GCG Coordinators and Evaluators in each working unit
- Self-Assessment of the implementation of GCG for January to December 2008
- Socialization of GCG programs through internal media at all levels of the Bank

INTERNALISATION OF GCG AFTER GOING PUBLIC AND BANK BTN'S CORPORATE GOVERNANCE FUTURE PLAN

Besides continuing the GCG implementation in 2009, Bank BTN continues to improve the implementation of GCG since it went public through the following:

- Conducting a self-assessment of the implementation of GCG programs for January to December 2009
- Continuing reviews of internal regulations to meet the needs of Bank BTN as a public company and in accordance with GCG principles
- Engaging competent external parties to assess the implementation of GCG



- Mengoptimalkan sistem teknologi dan informasi yang dimiliki Bank BTN untuk mengakselerasi penerapan GCG yang terpantau pada setiap proses bisnis Bank BTN.
- Meningkatkan kepedulian setiap jajaran Bank BTN terhadap penerapan GCG melalui *program e-Learning*.
- Optimizing its IT systems to accelerate the implementation of GCG in every business process
- Increasing awareness at all levels of the Bank on the implementation of GCG through e-Learning program.

Salah satu upaya untuk menumbuhkan kepedulian terhadap GCG antara lain melalui sosialisasi prinsip-prinsip dan praktik-praktik terbaik GCG serta kebijakan terkait lainnya kepada seluruh jajaran manajemen dan pegawai Bank BTN, seperti *corporate values* dan *corporate culture*. Langkah sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai cara antara lain sosialisasi secara langsung melalui forum *workshop*, Kelompok Budaya Kerja, maupun sosialisasi melalui media, seperti Majalah Paras Bank BTN.

Selain itu, sosialisasi dilakukan juga melalui pemuatan materi GCG dalam Laporan Tahunan, situs, dan media komunikasi Bank BTN lainnya sehingga pelaksanaan GCG Bank BTN memperoleh pandangan yang lebih objektif.

Peningkatan kepedulian terhadap pelaksanaan GCG juga dibangun dan didorong melalui sarana pemberian sertifikasi yang diperoleh Bank BTN yaitu seperti memperoleh sertifikasi dari Badan Sertifikasi ISO berupa sertifikat ISO 9001:2000 untuk Bidang Audit Intern dan Bidang Pelayanan Pemberian Kredit yaitu KPR dan KPA Komersial.

One effort to create awareness of GCG is by socializing GCG principles and best practices, as well as other related policies, to all levels of Bank BTN management and employees, including the corporate values and corporate culture. This was carried out through directly to our internal stakeholders through workshops and forums, Working Culture Groups, and socialized through other media, such as Bank BTN's Paras Magazine.

Information on Bank BTN's GCG programs was also socialized through material included in its annual report, on our website, and other media communication to provide a more objective view.

Increasing concern about the implementation of GCG was driven by the Bank's priority on certification in the field, such as the Certification ISO 9001: 2000 for Internal Audit Divisions, Commercial Mortgages and Apartment Loan Disbursement Services issued by the Agency for ISO Certification.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

The Structure of GCG

Bank BTN meyakini bahwa hubungan yang wajar antar Organ Bank akan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan pengelolaan Bank BTN dan implementasi GCG. Untuk itulah, Bank BTN memisahkan secara tegas fungsi dan tugas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama serta organ-organ pendukung Bank BTN.

Bank BTN believes that a reasonable relationship between the Bank's organs will have a positive influence on the success of Bank BTN's management in implementing GCG. For this reason, Bank BTN has clearly separated the roles and responsibilities of General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors, which constitute the main supporting organs of Bank BTN.

Bank BTN mendorong organ bank agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas dilandasi itikad baik dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab Bank terhadap pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan. Masing-masing organ Bank selalu menghormati dan bertindak sesuai fungsi dan peranan masing-masing, berhubungan atas dasar prinsip kesetaraan dan saling menghargai.

Bank BTN encourages the main organs to make decisions and carry out their duties in good faith, based on compliance with prevailing laws and regulations, and upholding their responsibility to related parties. Each organ of the Bank must act in accordance with the function and role of other organs, based on the principles of equality and mutual respect.

Bagan Struktur Tata Kelola Bank BTN

Bank BTN's Corporate Governance Structure





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ utama Bank BTN yang memegang kekuasaan dan mempunyai wewenang tertinggi. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan merupakan forum dimana Direksi dan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Bank BTN kepada pemegang saham. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan Komisaris dan Direksi, menetapkan remunerasi Komisaris dan Direksi serta mengevaluasi kinerja Komisaris dan Direksi.

Selama tahun 2009, Bank BTN menyelenggarakan RUPS Tahunan sebanyak 2 kali pada 8 Mei 2009 dan 15 Desember 2009, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) dilakukan sekali yakni pada 6 Oktober 2009. Perubahan status Bank BTN menjadi perusahaan terbuka ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 6 Oktober 2009. Adapun hasil RUPS Bank BTN sepanjang 2009 dijabarkan pada bagian Informasi Pemegang Saham laporan tahunan ini.

DEWAN KOMISARIS

Sebelum menjadi perusahaan publik susunan Komisaris ditetapkan oleh pemegang saham. Demikian pula pemberhentian Komisaris hanya bisa dilakukan oleh pemegang saham, karena Bank BTN masih menjadi suatu Badan Usaha Milik Negara. Sejak 17 Desember 2009 Bank BTN menjadi perusahaan publik, maka berlaku Anggaran Dasar Bank BTN yang menetapkan bahwa pengangkatan Komisaris oleh RUPS harus disetujui oleh pemegang saham Dwiwarna Seri A (Negara Republik Indonesia). Lebih lanjut anggaran dasar menegaskan bahwa bukan hanya pemegang saham Dwiwarna Seri A yang berhak mengajukan pencalonan Komisaris kepada RUPS melainkan juga oleh seorang pemegang saham yang mewakili 10% saham.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

The GMS, is a main organ of Bank BTN, and has ultimate authority. The GMS is the forum in which the Board of Directors and the Board of Commissioners report the Bank's performance to shareholders and can be held accountable. The GMS has the authority to appoint and dismiss commissioners and directors, determine the remuneration of commissioners and directors, and evaluate the performance of the commissioners and directors.

In 2009, Bank BTN held two GMS, one on May 8, 2009, and one on December 15, 2009, and one Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on October 6, 2009. The decision to change the status of Bank BTN to a public company was taken at the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on October 6, 2009. The results of the GMS can be referred to in the shareholder information section of this annual report.

BOARD OF COMMISSIONERS

Prior to becoming a public company, the Board of Commissioners was determined by shareholders. Similarly, only the shareholders had the authority to dismiss commissioners, because Bank BTN was a state-owned enterprise. Since December 17, 2009, the date on which Bank BTN became a public company, the Articles of Association of Bank BTN were changed to stipulate that the appointment of commissioners by the GMS must be approved by Dwiwarna Series A (Republic of Indonesia)'s shareholders. It further asserted that the nomination of commissioners is not only limited to Dwiwarna Series A's shareholders but also for any shareholder who holds more than 10% of the total shares.

Calon-calon anggota Dewan Komisaris & Direksi baru efektif setelah mereka lulus *fit and proper test* Bank Indonesia. PBI Nomor 8/4/PBI/2006 mengatur bahwa anggota Komisaris suatu bank minimal 3 orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Sejak bulan Oktober 2008, jumlah anggota Dewan Komisaris Bank BTN berjumlah 4 orang.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap terlaksananya tugas Komisaris yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank BTN secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektifitas komunikasi antara Komisaris dengan Direksi, auditor eksternal dan otoritas pengawas bank dan pasar modal.
- Dalam mengawasi efektifitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Bank BTN, Dewan Komisaris telah menyetujui Direksi untuk menerbitkan Pedoman GCG yaitu Ketetapan Direksi No.06/DIR/DK/2009 pada tanggal 27 Mei 2009.
- Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku.
- Dewan Komisaris wajib melakukan tindak lanjut hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan, anggaran dasar dan *prudential banking practices*.
- Dewan Komisaris memiliki Tata Tertib Komisaris yang mengikat dan ditaati oleh semua komisaris. Tata tertib tersebut antara lain mengatur mengenai Rapat Komisaris.
- Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham Bank BTN maupun perusahaan lainnya sesuai peraturan pasar modal.
- Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank BTN untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kewajaran di bidang perbankan.

Komposisi dan Independensi

Susunan Dewan Komisaris pada 31 Desember 2009 terdiri dari empat anggota dengan dua di antaranya sebagai Komisaris Independen. Adapun komposisi Dewan Komisaris hingga 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Candidates for the Board of Commissioners and the Board of Directors are only eligible for the position once they have passed fit and proper test conducted by Bank Indonesia. PBI 8/4/PBI/2006 ruled that a bank must consist of at least 3 members, and must not exceed the number of members of the Board of Directors. Since October 2008, Bank BTN has had 4 members on the Board of Commissioners.

Commissioner's Duties, Responsibilities and Obligations

- The Board of Commissioners is responsible for the effective and efficient implementation of the duties stipulated in Bank BTN's Articles of Association, as well as maintaining effective communication with the Board of Directors, external auditors and bank supervisory authorities and capital markets.
- To monitor the implementation of GCG at all levels of the Bank, the Board of Commissioners approved the issuance of GCG guidelines by the Board of Directors in Directors' Decision Letter No.06/DIR/DK/2009 dated May 27, 2009.
- The Board of Commissioners is responsible for supervising compliance with statutory provisions and applicable regulations of Bank Indonesia.
- The Board of Commissioners must monitor the results and recommendations provided in the event of deviation from the legislation, the Articles of Association and prudential banking practices.
- The Rules and Order of the Board of Commissioners is binding, and must be adhered to by all commissioners. It includes regulations on the meetings.
- Commissioners must disclose ownership of any shares in Bank BTN or other companies, in accordance with capital market regulations.
- Commissioners are prohibited from utilizing Bank BTN for their personal, family, corporate or business groups in any way contrary to the legislation and fairness in the field of banking.

Composition and Independency

The composition of the Board of Commissioners as of per December 31, 2009 consists of four members, two of which are Independent Commissioners. The composition of the Board of Commissioners until December 31, 2009 is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Zaki Baridwan	Komisaris Utama (Independen) President Commissioner (Independent)
2.	Mulabasa Hutabarat	Komisaris Commissioner
3.	Subarjo Joyosumarto	Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)
4.	Gatot Mardiwasiso	Komisaris Commissioner



Rankap Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seorang Komisaris boleh merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. Komisaris ada yang menduduki jabatan di instansi lain, yaitu Mulabasa Hutabarat yang menjabat sebagai Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK Departemen Keuangan, Subarjo Joyosumarto (Komisaris Independen) menjabat sebagai Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia serta Gatot Mardiwastito yang menjabat rangkap sebagai Asisten Deputi Urusan Usaha Perbankan pada Kementerian Negara BUMN.

Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya. Selaku Komisaris Independen harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dalam rangka mendukung pelaksanaan GCG Bank, pemegang saham dalam RUPS menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha Bank.

Selain itu, dalam PBI No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

PBI tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah komisaris independen. Salah satu komisaris independen ditetapkan sebagai Ketua Komite Audit. Saat ini 2 orang dari 4 anggota Komisaris Bank BTN yang merupakan Komisaris Independen, yaitu Zaki Baridwan sekaligus sebagai Komisaris Utama adalah Ketua Komite Audit dan Subarjo Joyosumarto sekaligus sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.

Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris Bank BTN terus proaktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi dan memberikan masukan kepada Direksi. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris tentunya mengacu pada implementasi atas rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris terhadap Direksi maupun melalui komite-komite yang dibentuk.

Concurrent Position of Commissioners

According to applicable regulations, a commissioner may act concurrently as a member of the Board of Commissioners, Director or the Executive Officer of a non-financial institution or company or a supervisory member of a Board of Commissioners, The Board of Directors, or Executive Officer with a non-Bank subsidiary controlled by Bank BTN. Commissioners holding positions with other agencies are: Hutabarat Mulabasa, who served as head of the Bureau of Pensions at Bapepam-LK in the Ministry of Finance; Subarjo Joyosumarto (Independent Commissioner), who served as the Director of the Indonesian Banking Development Institute; and Gatot Mardiwastito, who served as Deputy Assistant for Business Banking with the Ministry of State-Owned Enterprises.

Independent Commissioners

Independent commissioners are intended to encourage a more objective work environment and increase fairness and equality among the various interests in a company, including the interests of minority shareholders and other stakeholders. Independent commissioners should be free from any conflicts of interest. To support the implementation of GCG in the Bank, shareholders in the GMS determine the number of and requirements for independent commissioners as stipulated in laws and regulations, to supervise the Bank and any business groups that do not perform business activities of the Bank.

PBI No. 8/14/PBI/2006 on the Implementation of Good Corporate Governance by Commercial Banks states that independent commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have any financial relationships, management, ownership or family relationship with the other Commissioners, Directors or controlling shareholders or any other relationships that could affect their ability to act independently.

The PBI also stipulates that at least 50% of the total members of the Board of Commissioners must be independent commissioners. One of which must be appointed as Chairman of the Audit Committee. Two of the four members on Bank BTN's Board of Commissioners are independent commissioners, namely Zaki Baridwan, who is also a Chairman of the Audit Committee, and Subarjo Joyosumarto, who is also as a Chairman of the Risk Monitoring Committee.

Supervision and Recommendation of the Board of Commissioners

As part of its duties and responsibilities, Bank BTN's Board of Commissioners continue to proactively supervise the performance of the Board of Directors and provide them with input. Their supervision is limited to the implementation of recommendations provided by the Board of Commissioners to Board of Directors or through established committees.

Adapun pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Bank BTN selama 2009 meliputi kinerja keuangan, implementasi manajemen risiko, transformasi di segenap lini bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis Bank BTN, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal termasuk hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

Berikut rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris Bank BTN untuk ditindaklanjuti:

- Meminta kepada Direksi untuk melakukan persiapan dalam rangka implementasi strategi dan pencapaian target Bank BTN, seperti pencapaian komposisi kredit, penghimpunan dana pihak ketiga.
- Pembahasan pelaksanaan *IPO* Bank BTN, termasuk program MESA dan MESOP.
- Rekomendasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan kinerja Bank BTN secara regular.
- Pengembangan struktur organisasi baru Bank BTN yang menekankan kepada proses bisnis dan fokus pada nasabah.
- Mengoptimalkan kerjasama dengan lembaga-lembaga besar seperti PT Pos Indonesia, Universitas, Dana Pensiun, dan lain sebagainya untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.
- Meminta kepada Bank BTN untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam menangani bisnis baru sesuai dengan strategi Bank BTN.
- Bank BTN agar menyempurnakan sistem pengisian jabatan, sistem manajemen kinerja dan manajemen karir bagi pegawai untuk menunjang pengembangan bisnis Bank.
- Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk Direksi dan setiap unit kerja.
- Meminta Bank BTN untuk terus memantau risiko Perseroan mengingat tingkat ketidakpastian yang tinggi akibat krisis ekonomi global.
- Memperhatikan keamanan semua gedung kantor yang dimiliki oleh Bank BTN, dengan melakukan pemeriksaan secara regular dan memastikan *Data Recovery System* (DRC) dalam keadaan baik agar kegiatan operasional Bank tidak terganggu.
- Pengembangan sistem Teknologi Informasi untuk mendukung pengembangan bisnis dan jaringan Bank BTN.
- Memberikan masukan dalam konsultasi kredit atau rencana penyaluran kredit.

DIREKSI

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 menetapkan bahwa usulan penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Kemudian para pemegang saham berdasarkan rekomendasi tersebut memilih Direksi dalam RUPS yang terbuka dan transparan. Seperti halnya pemberhentian Komisaris, pemberhentian Direksi hanya bisa dilakukan oleh pemegang saham dalam RUPS.

Oleh karena Bank BTN adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang telah Terbuka, Anggaran Dasar Bank

The monitoring performed by the Board of Commissioners in 2009 included financial performance, implementation of risk management, transformation of all business lines as part of Bank BTN's business plan, follow-up examinations of internal and external audits, including the audit results from Bank Indonesia.

The following recommendations have been given to Bank BTN's Board of Commissioners for further action:

- Request the Board of Directors make preparations to implement Bank BTN's strategy and achieve its targets, such as loan composition and fund collection from third parties.
- Discuss the implementation of Bank BTN's IPO, including the MESA and MESOP programs.
- Provide regular recommendations concerning the Bank's working plan and budget and performance.
- Develop a new organizational structure that emphasizes Bank BTN's business processes and focuses on customers.
- Optimize collaboration with major institutions, such as PT. Pos Indonesia, universities, pension funds, etc. to improve the collection of third-party funds.
- Request Bank BTN provide human resources competent of handling Bank BTN's new business strategy .
- Request Bank BTN improve its recruitment, performance management and career management systems to support business development.
- Determine the key performance indicators (KPI) for the Board of Directors and each working unit.
- Request Bank BTN continue monitoring its exposure to risk given the high level of uncertainty from the global economic crisis.
- Monitor the security of all office buildings owned by Bank BTN, with regular checks and ensure that the Data Recovery System (DRC) is in good condition so that operational activities are not disturbed.
- Develop IT systems to support business development and networking.
- Provide input on loan counseling and distribution plans.

BOARD OF DIRECTORS

Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 determined that the proposed replacement and or appointment of members of the Board of Directors by the Board of Commissioners to the GMS to consider recommendations Remuneration and Nomination Committee. Then shareholders vote on the recommendations put forward by the Board of Directors in the GMS in an open and transparent way. The dismissal of commissioners or directors can only be done by shareholders in the GMS.

Since Bank BTN is a publicly owned enterprise, the Articles of Association stipulate that the appointment



mengatur bahwa pengangkatan Direksi oleh RUPS harus disetujui oleh pemegang saham Dwiwarna Seri A (Negara Republik Indonesia). Lebih lanjut Anggaran Dasar mengatakan bahwa hanya pemegang saham Dwiwarna Seri A yang berhak mengajukan pencalonan kepada RUPS. Penunjukan tersebut efektif setelah Direksi terpilih lulus *fit and proper test* Bank Indonesia.

Tugas, Tanggung Jawab dan Kewajiban Direksi

Sebagai implementasi PBI No. 8/4/PBI/2006 khususnya mengenai Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, selama tahun 2009 Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Direksi melakukan kepengurusan Bank BTN dengan penuh tanggung jawab.
- Direksi dalam mengelola bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Direksi dalam setiap kegiatan usaha Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Direksi selalu menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- Direksi telah membentuk satuan kerja:
 1. Satuan Kerja Audit Internal
 2. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko
 3. Satuan Kerja Kepatuhan
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi Bank.
- Direksi telah menyediakan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- Direksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

of the Board of Directors by the GMS must be approved by Dwiwarna Series A shareholders (the Republic of Indonesia). It further stipulates that only Dwiwarna Series A shareholders are entitled to put forward nominations at the GMS. Any appointments are only effective once the candidate has passed a fit and proper test conducted by Bank Indonesia.

Directors Duties, Responsibilities and Obligations

In accordance with PBI No. 8/4/PBI/2006 on Duties and Responsibilities of Directors, the Board of Directors performed the following activities in 2009:

- Management of Bank BTN with full responsibility.
- Management of the Bank in accordance with their authority and responsibilities stipulated in the Articles of Association and the prevailing statutory regulations.
- Implementation of the principles of good corporate governance in every business activity at all levels of the organization.
- Follow up on audit findings and recommendations by the Internal Audit working unit, external auditors, Bank Indonesia and/or supervision of any other authority.
- Establishment of working units:
 1. Internal Audit Working Unit
 2. Risk Management Working Unit and Risk Management Committee
 3. Compliance Working Unit
- Accountability for their performance to shareholders through the GMS
- Socialization of the Bank's strategic policies concerning employment to all employees in accordance with the Bank's organizational structure.
- Provision of accurate, relevant and timely information to the Board of Commissioners.
- Performance of duties within their field of expertise in a responsible fashion in accordance with the Articles of Association that are binding for every member of the Board of Directors.

Komposisi

Berikut susunan Direksi Bank BTN hingga 31 Desember 2009 yang terdiri dari enam orang sebagai berikut:

Composition

The following is an overview of Bank BTN's Board of Directors up to December 31, 2009, including the following six people :

No.	Nama Name	Jabatan Position
1.	Iqbal Latanro	Direktur Utama President Director
2.	Evi Firmansyah	Wakil Direktur Utama Vice President Director
3.	Sunarwa	Direktur Director
4.	Saut Pardede	Direktur Director
5.	Irman A. Zahiruddin	Direktur Director
6.	Purwadi	Direktur Director

Adapun tanggung jawab masing-masing Direksi adalah:

- Direktur Utama, Iqbal Latanro, melakukan supervisi atas Divisi Audit Internal.
- Wakil Direktur Utama, Evi Firmansyah, melakukan supervisi atas Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Penelitian dan Perencanaan serta Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis.
- Direktur Sunarwa melakukan supervisi atas Desk Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Direktur Saut Pardede melakukan supervisi atas Divisi Treasury, Divisi Pemasaran Ritel, dan Divisi Syariah.
- Direktur Irman Alvia Zahiruddin melakukan supervisi atas Divisi Akuntansi, Divisi Operasi dan Divisi Teknologi Informasi.
- Direktur Purwadi melakukan supervisi atas Divisi Pengelolaan Kredit, Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit serta Divisi Logistik.

Responsibilities of Board of Directors is:

- President Director, Iqbal Latanro supervises the Internal Audit Division.
- Vice President Director Evi Firmansyah supervises the Corporate Secretary Division, Research and Planning Division, and Policy and Business Development Division.
- Director Sunarwa supervises the Compliance Desk, Risk Management Division and Human Resource Development Division.
- Director Saut Pardede supervises the Treasury Division, Retail Marketing Division, and Sharia Division.
- Director Irman Alvia Zahiruddin supervises the Accounting Division, Operations and Information Technology Division.
- Director Purwadi supervises the Loan Management Division, Loan Collection and Workout Division and Logistics Division.

Pelaksanaan Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi

Bank BTN senantiasa melakukan pengembangan kompetensi bagi seluruh jajarannya. Untuk menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi, selama Tahun 2009, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN telah mengikuti berbagai program pelatihan, workshop, konferensi, seminar antara lain:

Training Implementation of Board of Commissioners and Board of Directors

Bank BTN always made the development of competencies for the entire staff our top priority. To support the implementation of their duties, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors has attended various training programs, workshops, conferences, seminars in 2009, including:

Zaki Baridwan	Forum Komisaris Bank BUMN – Diskusi mengenai penetapan KPI dan <i>framework</i> penilaian kinerja Direksi. Commissioner Forum of Bank BUMN – Discussion about Board of Directors' KPI performance assesment framework.
Mulabasa Hutabarat	Forum Komisaris Bank BUMN – Diskusi mengenai penetapan KPI dan <i>framework</i> penilaian kinerja Direksi. Commissioner Forum of Bank BUMN – Discussion about Board of Directors' KPI performance assesment framework.
Subarjo Joyosumarto	Forum Komisaris Bank BUMN – Diskusi mengenai penetapan KPI dan <i>framework</i> penilaian kinerja Direksi. Commissioner Forum of Bank BUMN – Discussion about Board of Directors' KPI performance assesment framework.
Gatot Mardiwasiso	Forum Komisaris Bank BUMN – Diskusi mengenai penetapan KPI dan <i>framework</i> penilaian kinerja Direksi. Commissioner Forum of Bank BUMN – Discussion about Board of Directors' KPI performance assesment framework.



Iqbal Latanro	<ul style="list-style-type: none">• The 22nd WSBI World Congress “Financial Inclusion in a Globalized World: Our Challenge”, Santiago – Chile• 15th Meeting of The WSBI Asia/Pasific Regional Group, Bangkok – Thailand <ul style="list-style-type: none">• The 22nd WSBI World Congress “Financial Inclusion in a Globalized World: Our Challenge”, Santiago – Chile• 15th Meeting of The WSBI Asia/Pasific Regional Group, Bangkok – Thailand
Evi Firmansyah	<ul style="list-style-type: none">• Securitization Workshop Wharton University Philadelphia, USA• International Housing Finance Program Wharton University, Philadelphia, USA <ul style="list-style-type: none">• Securitization Workshop Wharton University Philadelphia, USA• International Housing Finance Program Wharton University, Philadelphia, USA
Sunarwa	<ul style="list-style-type: none">• Economic Recovery, Asian Financial Service Congress, Singapore• The 4th Jakarta Risk Management Convention “Global Financial Crisis: What Went Wrong & What We Learned”, BSMR, Jakarta <ul style="list-style-type: none">• Economic Recovery, Asian Financial Service Congress, Singapore• The 4th Jakarta Risk Management Convention “Global Financial Crisis: What Went Wrong & What We Learned”, BSMR, Jakarta
Saut Pardede	<ul style="list-style-type: none">• The 22nd WSBI World Congress “Financial Inclusion in a Globalized World: Our Challenge”, Santiago – Chile• Asian Bankers Workshop, Seoul – Korea• Diskusi “Implikasi Hukum Atas Perjanjian Pembentukan ASEAN Economic Community Bagi Perbankan Indonesia”, Direktorat Hukum Bank Indonesia – Jakarta• The 4th Jakarta Risk Management Convention “Global Financial Crisis: What Went Wrong & What We Learned”, BSMR, Jakarta <ul style="list-style-type: none">• The 22nd WSBI World Congress “Financial Inclusion in a Globalized World: Our Challenge”, Santiago – Chile• Asian Bankers Workshop, Seoul – Korea• Discussion of “Implications of the Law on Establishment Agreement for ASEAN Economics Community for Indonesian Banking”, Directorate of Bank Indonesia Law - Jakarta• The 4th Jakarta Risk Management Convention “Global Financial Crisis: What Went Wrong & What We Learned”, BSMR, Jakarta
Irman Alvian Zahiruddin	<ul style="list-style-type: none">• Konferensi dan Pameran CeBIT, Sidney – Australia• Seminar “Global Financial Tsunami”, Bank Indonesia, Bali• Banking Business Technology Summit, Perth – Australia <ul style="list-style-type: none">• Conference and exhibition of CeBIT, Sydney - Australia• Seminar “Global Financial Tsunami”, Bank Indonesia, Bali• Banking Business Technology Summit, Perth – Australia
Purwadi	<ul style="list-style-type: none">• Seminar Prospek Bisnis Perumahan Tahun 2009, Jakarta• Diskusi Nasional Pengembangan Sektor Perumahan, Makassar <ul style="list-style-type: none">• Seminar of Housing Business Prospect for 2009, Jakarta• Discussion of National Development of Housing Sector, Makassar

Hubungan Dewan Komisaris Dan Direksi

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi adalah *check and balances* serta konsultatif. Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang. Hal ini tercermin pada:

- Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Terlaksananya manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal dengan baik.
- Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi pemegang saham.
- Terlindunginya kepentingan stakeholders secara wajar.
- Terpenuhinya implementasi GCG.
- Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen di semua lini organisasi.

Untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan pola hubungan *check and balances* tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan
- Rencana jangka panjang, Strategi, Sasaran bisnis, maupun rencana kerja dan anggaran tahunan.
- Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan unit-unit kerja dalam Bank dan personalianya.
- Struktur organisasi di tingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Bank.
- Melaksanakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi Serta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi serta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi diselenggarakan secara rutin untuk membahas hal-hal yang bersifat strategis.

Relationship between Board of Commissioners and Board of Directors

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors are for checks and balances as well as consultation. The Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with their respective functions, are responsible for the long-term continuity of the Bank's business. This is reflected in:

- Maintaining the health of the Bank in accordance with the precautionary principles and criteria stipulated by Bank Indonesia.
- Implementing good risk management and internal control systems.
- Achieving a reasonable return for shareholders.
- Protecting the interests of stakeholders .
- Implementing GCG.
- Implementing a leadership succession and continuity of management in all lines of the organization.

To fulfill the responsibilities and exercise patterns of the checks and balances relationship, the Board of Commissioners and the Board of Directors have agreed on the following:

- Vision, mission and values
- Long-term plans, strategy, business targets, work plans and annual budgets.
- Policies in meeting the statutory provisions, Articles of Association and prudential banking practices, including the commitment to avoid all forms of conflict of interest.
- Policies and methods for performance assessments of all personnel and working units .
- Organizational structure at the executive level to support the achievement of business objectives .
- Need for joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors at least once every three months.

Board of Commissioners and Board of Directors meetings, and Joint Meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors

The Board of Commissioners and the Board of Directors hold regular and join meetings on a regular basis to discuss strategic matters.

	Rapat Dewan Komisaris The Board of Commissioners Meeting	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meeting
	Jumlah Rapat: 29 Total Numbers of Meeting: 29	Jumlah Rapat: 9 Total Numbers of Meeting: 9
Dewan Komisaris The Board of Commissioners		
Zaki Baridwan	29	9
Mulabasa Hutabarat	28	8
Subarjo Joyosumarto	27	9
Gatot Mardiwasto	29	9



	Rapat Direksi The Board of Directors Meeting	Rapat Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meeting
	Jumlah Rapat: 118 Total Numbers of Meeting: 118	Jumlah Rapat: 9 Total Numbers of Meeting: 9
Direksi The Board of Directors		
Iqbal Latanro	104	9
Evi Firmansyah	105	8
Sunarwa	110	8
Saut Pardede	109	8
Irman Alvian Zahiruddin	94	5
Purwadi	109	9

Catatan: - Ketidakhadiran dalam rapat terutama karena dinas
- Kehadiran adalah secara fisik atau memberikan surat kuasa

Notes: - Absence in meeting because of official service
- Present physically with procurator or provision of a letter of authority

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration Policy and other Facilities for Board of Commissioners and Board of Directors

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun (dalam juta Rp) Total Received in 1 Year (in million Rp)				Remuneration Type and Other Facilities
	Dewan Komisaris The Board of Commissioners		Direksi The Board of Directors		
	Orang People	Rupiah Rupiah	Orang People	Rupiah Rupiah	
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) *	8*	7.454	6	27.064	Remuneration (salary, bonus, leave, routine allowed, tantiem and other facilities) *
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya yang :					Other facilities in form of housing, health insurance, transportation and others which:
• Dapat dimiliki	4	29	6	2.216	• Can be owned
• Tidak dapat dimiliki	4	385	6	5.031	• Cannot be owned
Total		7.868		34.311	Total

Keterangan :

*) Remunerasi untuk Dewan Komisaris terdiri dari 4 Komisaris saat ini dan 4 Mantan Komisaris

Information:

*) Remuneration for Board of Commissioners consists of 4 Commissioners and 5 Former Commissioners

Data Remunerasi dalam 1 Tahun Dikelompokkan dalam Kisaran Tingkat Penghasilan

Remuneration data in 1 Year Grouped in Ranges of Income Level

No	Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 tahun Total Remuneration Per Person in 1 year	Jumlah Direksi Number of BOD	Jumlah Dewan Komisaris Number of BOC
1	Di atas Rp 2 miliar Above Rp 2 Billion	6	-
2	Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar Between Rp 1 Billion to Rp 2 Billion	-	4
3	Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar Above Rp 500 Million to Rp 1 Billion	-	-
4	Rp 500 juta ke bawah Below Rp 500 Million	-	4

Keterangan:

- Remunerasi untuk Dewan Komisaris terdiri dari 4 Komisaris dan 4 Mantan Komisaris

Information:

- Remuneration for the Board of Commissioners consists of 4 Commissioners and 4 former Commissioners

Hubungan Keuangan dan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank BTN

Financial and Familial Relationships among the Board of Commissioners and the Board of Directors and/or Bank BTN's Controlling Shareholders

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

There are no financial or familial relationships between members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, other Directors or Bank BTN's Controlling Shareholders, as illustrated in the following table:

Nama Name	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with						Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with					
	Dewan Komisaris BOC		Direksi BOD		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder		Komisaris BOC		Direksi BOC		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholder	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Komisaris BOC												
Zaki Baridwan		X		X		X		X		X		X
Mulabasa Hutabarat		X		X		X		X		X		X
Subarjo Joyosumarto		X		X		X		X		X		X
Gatot Mardiwasisito		X		X		X		X		X		X
Direksi BOD												
Iqbal Latanro		X		X		X		X		X		X
Evi Firmansyah		X		X		X		X		X		X
Sunarwa		X		X		X		X		X		X
Saut Pardede		X		X		X		X		X		X
Irman Alvian Zahiruddin		X		X		X		X		X		X
Purwadi		X		X		X		X		X		X

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Share Ownership of Members of the Board of Commissioners and the Board of Directors that Reach 5% or More in Paid-in Capital

Nama Name	Bank BTN	Perusahaan Lain Other Company	Bank Lain Other Bank	Lembaga Bukan Bank Non Bank Financial Institution	Keuangan Financial	Keterangan Information
	Bank BTN	Other Company	Other Bank	Non Bank Financial Institution	Financial	
I Dewan Komisaris The Board of Commissioners						
1 Zaki Baridwan	-	-	-	-	-	Tidak Ada None
2 Subarjo Joyosumarto	-	-	-	-	-	
3 Mulabasa Hutabarat	-	-	-	-	-	
4 Gatot Mardiwasisito	-	-	-	-	-	
II Direksi The Board of Directors						
1 Iqbal Latanro	-	-	-	-	-	Tidak Ada None
2 Evi Firmansyah	-	-	-	-	-	
3 Sunarwa	-	-	-	-	-	
4 Saut Pardede	-	-	-	-	-	
5 Irman Alvian Zahiruddin	-	-	-	-	-	
6 Purwadi	-	-	-	-	-	



PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM

Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif memiliki opsi untuk membeli saham yang dikenal dengan *shares option*. Opsi tersebut dapat dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan atau Anggaran Dasar. Bank BTN juga menerapkan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Bank BTN. Tujuan utama program ini adalah agar manajemen dan karyawan Bank BTN mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktifitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder Bank BTN*.

Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Bank BTN terdiri dari:

A. Program Alokasi Saham Manajemen dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank BTN No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui Program MESA untuk pemesan khusus sebagai berikut:

Peserta Program MESA terdiri dari semua karyawan tetap Bank BTN yang termasuk dalam daftar karyawan Bank BTN per tanggal 30 September 2009, seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota komite, kecuali Komisaris Independen dan anggota Komite Audit, yang masih menjabat pada saat implementasi Program MESA.

Jumlah saham dalam Program MESA sebesar 9,62% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam penawaran umum atau sebesar 226.928.500 saham. Program MESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.A.7, dimana peserta Program MESA akan diberikan alokasi untuk membeli saham dengan jatah pasti dengan membayar secara tunai harga saham dengan diskon sebesar 20% dari harga saham saat Penawaran Umum Perdana.

Beban pembelian saham dengan harga diskon tersebut menjadi tanggungan Bank BTN. Saham yang dibeli dalam program MESA tidak dapat dijual dalam periode 6 bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Bank BTN di Bursa Efek.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program MESA kurang dari 226.928.500 saham, maka sisa saham akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.

B. Program Pemberian Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen Dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Bank BTN No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham

SHARES OWNERSHIP PROGRAMS

Members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and Executive Officers have the option to purchase shares, known as a share option. These options can be done through a stock offering or stock offering options in connection with compensation determined by the GMS and/or Articles of Association. Bank BTN also implements the Management Stock Ownership Program for its management and employees to enable management and employees of Bank BTN to build a sense of belonging in the Bank, which is expected to increase the productivity of employee and ultimately improve the overall corporate performance. This increase in corporate value can be enjoyed by all Bank BTN stakeholders .

The Management and Employee Stock Ownership Program of Bank BTN consists of:

A. Management and Employee Stock Allocation (MESA)

Deed of Statement of Decision No. EGMS of Bank BTN No. 7 dated October 12, 2009 made by Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, approved the MESA program for special orders as follows:

MESA Program participants include all regular employees of Bank BTN who were included on Bank BTN's employee list as of September 30, 2009 and all members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, Secretary of the Board of Commissioners and members of the committee, except members of Independent Commissioner and the Audit Committee, who are still holding the position at the time of MESA Program implementation.

The number of shares in the MESA program is 9.62% of the total issued shares to the public in a public offering, or equal to 226,928,500 shares. The MESA program is implemented in accordance with BAPEPAM Regulation No. IX.A.7, whereas the qualified participants in the MESA program will be given a limited allocation of stocks available for purchase by cash payment, with a 20% discount on the IPO stock price.

The expense of selling shares at a discounted price is borne by Bank BTN. Shares purchased through the MESA program cannot be sold within a period of six months from the date of listing.

If the number of shares booked in the MESA program is less than 226,928,500 shares, the remaining shares will be offered to the public.

B. Management and Employee Stock Option Plan/MESOP

Based on Deed of Statement of Decision No. EGMS of Bank BTN No. 7 dated October 12, 2009 made by Fathiah Helmi, SH, Notary in Jakarta, the Shareholders

menyetujui rencana Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan/MESOP*).

Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Bank BTN, sebanyak-banyaknya 4% dari modal ditempatkan dan disetor Bank BTN, setelah Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan berdasarkan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.4. Mekanisme pelaksanaan MESOP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1.A yang akan dilaporkan kemudian. Penanggung jawab program MESOP adalah Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Pelaksanaan program MESOP akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 3 tahap dengan rincian sebagai berikut:

- **Tahap Pertama**
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40% dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2010.
- **Tahap Kedua**
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2011.
- **Tahap Ketiga**
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada 2012.

Hak Opsi yang diberikan kepada peserta program MESOP dalam setiap tahapan tersebut dapat digunakan untuk membeli saham dalam program MESOP (*option life* = masa berlakunya hak opsi) selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya.

Peserta dapat menggunakan haknya untuk membeli saham dalam program MESOP pada periode pelaksanaan dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan yang akan ditetapkan dikemudian hari, setelah melewati *Vesting Period* (Masa Tunggu) yakni 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Hak Opsi, dalam *Vesting Period* tersebut Peserta belum dapat menggunakan Hak Opsi yang diberikan kepadanya untuk membeli saham dalam program MESOP.

Periode Pelaksanaan akan ditetapkan, sebanyak-banyaknya 2 periode setiap tahunnya selama Masa Berlakunya Hak Opsi (*option life*). Sedangkan Harga Pelaksanaan akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 hari bursa berturut-turut di pasar *reguler* sebelum laporan akan dibukanya periode pelaksanaan.

approved the Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).

The MESOP program is a stock purchase option right for qualified participants to purchase new shares to be issued from Bank BTN's portepel. A maximum of 4% of the issued and paid-up capital of Bank BTN will be offered after the IPO, based on Bapepam Regulation No. IX.D.4. The MESOP implementation mechanism will be conducted in accordance with Regulation of the Indonesia Stock Exchange No.1.A which will be reported later. The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, is responsible for the MESOP Program and report to the GMS.

The MESOP program implementation will be done by issuing a rights option in three phases, with the following details:

- **First Stage**
The maximum number of option rights to be issued is 40% of the total shares in the MESOP program, and will be published and distributed to participants of the MESOP program in 2010.
- **Second Stage**
The maximum number of option rights to be issued is 30% of the total shares in the MESOP program, and will be published and distributed to participants of the MESOP program in 2011.
- **Third Stage**
The maximum number of option rights to be issued is 30% of the total shares in the MESOP program, and will be published and distributed to participants of the MESOP program in 2012.

Option rights granted to participants of the MESOP program in each stage can be made by buying stock through the MESOP program (*Option Life* = *Option Right validity period*) for five years from the date of issuance.

Participants may use their rights to purchase shares in the MESOP program during the exercise period by paying full exercise price to be determined later, after passing through a one-year vesting period from the date of issuance, during which the option is not exercisable.

As many as two exercise periods will be determined each year during the period of validity Rights Option (*Option Life*). While the exercise price will be determined in reference to the provisions set forth in item IA V.2.2 Regulation Appendix I Decree of the Board of Directors of PT Jakarta Stock Exchange No. 305/BJ/07-2004 dated July 19, 2004, which is at least 90% of the average of Bank BTN's shares closing price recorded in 25 consecutive stock exchange days on the regular market before the opening of the exercise period report.



Pelaksanaan Program MESOP telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Bank BTN dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pemodal, Bank BTN sebagai perusahaan publik membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara Bank, BAPEPAM-LK dan publik.

Bank BTN telah melaporkan penunjukan Sekretaris Perusahaan kepada BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia serta mengumumkannya di salah satu harian nasional.

Beberapa aktifitas yang dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2009, antara lain:

- Melakukan paparan kinerja Bank BTN kepada media sebagai bentuk keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik.
- Memberikan informasi kepada pemegang saham dan masyarakat terkait kinerja dan aktifitas-aktifitas yang dilakukan Bank BTN.
- Menyampaikan laporan berkala dan insidental kepada Bapepam-LK dan bursa, termasuk laporan mengenai hasil pelaksanaan aksi-aksi korporasi seperti IPO.
- Mengkoordinasi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Menghadiri setiap pelaksanaan Rapat Direksi dan membuat risalah hasil Rapat Direksi.

The MESOP Program implementation was undertaken in accordance with the terms and conditions set by the Board of Directors, with respect to prevailing laws and regulations.

Corporate Secretary

To improve its service to the public investors, Bank BTN, as a public company, established Corporate Secretary division, which serves as a liaison with the Bank's investors, capital market participants, regulators and analysts. The corporate secretary serves as the primary liaison between the Bank, Bapepam-LK and the public to facilitate effective communication and ensure the availability of information.

Bank BTN has reported the appointment of the corporate secretary to the Bapepam-LK, the Indonesia Stock Exchange and announced it in one national daily.

Some activities undertaken by the corporate secretary during 2009 include:

- Conducting a public expose on Bank BTN's performance to the media as a form of information disclosure and Good Corporate Governance.
- Providing information on Bank BTN's activities to shareholders and related communities.
- Delivering periodic and incidental reports to Bapepam-LK and the stock exchange, including a report on the results of the implementation of corporate actions such as the IPO.
- Coordinating the implementation of the Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- Attending any Board of Directors meetings and producing the meeting minutes.

DAFTAR SIARAN PERS BANK BTN TAHUN 2009 LIST OF BANK BTN'S PRESS RELEASE IN 2009

No.	January 2009		
1	Layanan KPR Bank BTN Peroleh ISO 9001:2000	12 January	Bank BTN achieved ISO 9001:2000 for Mortgages Service
2	Bank BTN Turunkan Suku Bunga Kredit	19 January	Bank BTN decreases the Loan Interest Rate
3	Bank BTN Berdukacita Atas Meninggalnya 3 Pejabatnya	25 January	Bank BTN was in grieve for death of 3 officials
4	Bank BTN Buka Kantor Layanan di Cawang	28 January	Bank BTN opens branch office in Cawang
February 2009			
5	KIK EBA Mulai Diperdagangkan di Pasar	3 February	KIK EBA is traded in the Market
6	HUT Bank BTN Ke-59: Tetap Konsisten Mendukung Program Perumahan Nasional	9 February	Bank BTN 59th Anniversary: Consistent in Supporting National Housing Program
7	Bank BTN Buka Cabang Di Cikarang	18 February	Bank BTN opens Branch Office in Cikarang
8	Bank BTN Kebon Jeruk Naik Status	24 February	Bank BTN Kebon Jeruk increase it's branch status
March 2009			
9	Kondisi Makro Tidak Kondusif, Kinerja BTN Optimal	23 March	Not conducive macro condition, BTN performance Optimal

DAFTAR SIARAN PERS BANK BTN TAHUN 2009
LIST OF BANK BTN's PRESS RELEASE IN 2009

June 2009			
10	Bank BTN Turunkan Lagi Suku Bunga Kredit	14 June	Bank BTN decreases loan interest rate again
11	Bank BTN Kerjasama Dengan Kantor Pos	25 June	Bank BTN cooperates with Post Office
12	CSR Bank BTN Menyentuh Wilayah Surabaya	25 June	Bank BTN CSR goes to Surabaya
13	Bank BTN Siapkan Rp. 9 Miliar Lebih Untuk Nasabah Tabungan	26 June	Bank BTN prepares more than Rp 9 Billion for saving account's customer
July 2009			
14	Bank BTN Undi Grand Prize Rumah 1 Milyar	4 July	Bank BTN raffles a 1 billion house as Grand Prize
15	Bank BTN Tambah 500 Outlet Di Kantor Pos	31 July	Bank BTN adds 500 outlets in Post Offices
August 2009			
16	Bank BTN Bantu Pembangunan Masjid di Sulawesi Selatan	6 August	Bank BTN supports development of Mosque in South Sulawesi
17	Bank BTN Tambah Layanan Gadai Syariah	20 August	Bank BTN adds Pawn Sharia Service
September 2009			
18	Bank BTN Turunkan Lagi Suku Bunga Kreditnya	1 September	Bank BTN reduces loan interest rate again
19	Bank BTN Luncurkan Kredit Platinum Berbunga Murah	4 September	Bank BTN publishes Platinum Mortgage with low interest rate
20	Kinerja Keuangan Semester I Tahun 2009: Optimis Target Akhir Tahun Tercapai	8 September	Financial Performance Semester 1 2009: Be Optimist, Achieving end of year target
21	Bank BTN Bantu Korban Gempa Tasikmalaya	10 September	Bank BTN helps earthquake victims in Tasikmalaya
22	Bank BTN Fasilitasi Mudik 1.000 Pekerja Informal	13 September	Bank BTN facilitates "Return Home" for 1.000 Informal worker
October 2009			
23	Bank BTN Turunkan Lagi Suku Bunga Kreditnya	15 October	Bank BTN decreases loan interest rate again
November 2009			
24	Bank BTN Bekerjasama dengan World Saving Banks Institute (WSBI) Untuk Peningkatan Layanan Tabungan Bagi Masyarakat	2 November	Bank BTN cooperates with World Saving Banks Institute (WSBI) to increase the saving service to the community
25	KIK EBA KPR-BTN Tahap II Didaftarkan di Bursa Hari Ini: Pembiayaan Perumahan di Indonesia Berpotensi Meningkat	11 November	Step II of KIK EBA KPR BTN is registered today: Housing funding in Indonesia is potentially increase
26	IPO Membawa Bank BTN Lebih Baik	18 November	IPO brings Bank BTN to better way
27	Bank BTN Rehabilitasi Gedung Sekolah di Sumatera Barat	21 November	Bank BTN rehabilitates school building in West Sumatra
December 2009			
28	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kini Telah Memasuki Era Baru Sebagai Perusahaan Terbuka	17 December	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk has entered the new era as Public Company

LAPORAN KEPATUHAN

Compliance Report

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Bank BTN telah menetapkan perubahan susunan pengurus Bank BTN dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi dengan merujuk pada anggaran dasar Bank BTN.

Mengacu pada PBI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Internal Audit Bank Umum yang mengatur tata cara penugasan anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan, hingga saat ini posisi Direktur Kepatuhan masih dipegang oleh Sdr. Sunarwa berdasarkan pengajuan permohonan persetujuan Direktur Kepatuhan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia melalui surat No. 164/DIR/DHHP/IV/2008 tanggal 17 April 2008 dan No. 492/DSP/HK/VI/2008 tanggal 17 Juni 2008 perihal Permohonan Persetujuan atas Penugasan Sdr. Sunarwa sebagai Direktur Kepatuhan PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Menindaklanjuti permohonan tersebut, Bank Indonesia melalui surat No. 10/97/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 2 Juli 2008 telah memberikan persetujuan atas penunjukkan Sdr. Sunarwa sebagai Direktur Kepatuhan Bank BTN. Sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, untuk menjaga independensi Direktur Kepatuhan tidak boleh merangkap sebagai Direktur Utama, tidak membawahi kegiatan operasional, akuntansi dan atau Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), memahami peraturan perundang-undangan serta mampu bekerja secara independen.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk pemerataan pembagian tugas Direksi Bank BTN, maka Sdr. Sunarwa juga merangkap sebagai Direktur Supervisi yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko. Dalam kapasitasnya tersebut, hubungan pelaporan Direktur Kepatuhan adalah langsung kepada Bank Indonesia selain juga kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

Penerapan fungsi kepatuhan Bank BTN atau tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di atur di dalam PBI No. 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

- **Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)**
Selama periode Januari sampai dengan Desember 2009, tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK, baik untuk pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank BTN.
- **Posisi Devisa Neto (PDN)**
Selama periode Januari sampai dengan Desember 2009, tidak pernah terjadi pelanggaran Posisi Devisa Neto.

At its Annual General Meeting of Shareholder (GMS), Bank BTN decided to change its management structure and authorize the Board of Commissioners to determine the division of duties and authorities among the members of the Board of Directors with reference to the corporate charter.

Referring to PBI No. 1/6/PBI/1999 dated 20 September 1999 on the Assignment of a Compliance Director and Implementation of Standards for the Internal Audit Function for Commercial Banks governing the assignment of members of the Board of Directors as Compliance Director, currently the position of Compliance Director is held by Mr. Sunarwa based on submission of an application for approval for compliance director to the Bank Indonesia Board of Governors through Letter No. 164/DIR/DHHP/IV/2008 dated 17 April 2008 and No. 492/DSP/HK/VI/2008 dated June 17, 2008 regarding the Approval of Mr. Sunarwa's Assignment Application as the Compliance Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Following up on the request, the Bank Indonesia, through letter No. 10/97/GBI/DPIP/Rahasia dated July 2, 2008, granted approval for the appointment of Sunarwa as compliance director of Bank BTN. According to the prevailing Bank Indonesia regulation, to maintain the compliance director's independence, a compliance director cannot act as President Director, nor in any other supervisory operations, accounting and or the Internal Audit working unit, understand the legislation and be able to work independently.

Based on this, Mr. Sunarwa is concurrently serving as director of supervision of Human Resources and Risk Management. In this capacity, the compliance director reports directly to Bank Indonesia, Bank BTN President Director and the Board of Commissioners.

APPLICATION OF COMPLIANCE FUNCTION

The application of Bank BTN's compliance function and adherence to Bank Indonesia's rules and regulations and prevailing laws and regulations as stipulated in the PBI No. 6/10/PBI/2004 of Health Rating System for Commercial Banks is as follows:

- **Legal Lending Limit (LLL)**
From January to December 2009, no LLL's violations occurred involving parties involved or not affiliated with Bank BTN.
- **Net Open Position (NOP)**
From January to December 2009, no Net Open Position violations occurred

- **Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer / KYC*)**

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank BTN menghadapi berbagai risiko usaha dan untuk mengurangi risiko usaha tersebut Bank BTN menerapkan prinsip kehati-hatian, salah satunya melalui penerapan prinsip *Know Your Customer / Anti Money Laundering* (KYC/AML).

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan prinsip KYC/AML merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur Bank BTN secara keseluruhan dengan memasukkan unsur-unsur yang meliputi pengawasan oleh pengurus Bank BTN, pendelegasian wewenang, pemisahan tugas dan tanggung jawab, sistem pengawasan internal dan pelatihan karyawan.

Penerapan KYC/AML di kantor cabang dikoordinasi oleh Penanggung jawab KYC/AML yaitu minimal Pejabat setingkat Pembantu Pimpinan Cabang dan pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas Khusus KYC/AML yaitu salah satu *Customer Service* berdasarkan Surat Keputusan Kepala Cabang setempat. Untuk efektivitas penerapan prinsip KYC/AML di Bank BTN dipantau oleh unit kerja khusus setingkat Kepala Seksi di dalam unit kerja *Compliance Desk* di Kantor Pusat. Unit ini disebut sebagai Seksi *Know Your Customer / Anti Money Laundering* (KYC/AML). Unit kerja ini bertanggung jawab kepada Kepala Desk Kepatuhan, selaku Pejabat Khusus yang ditunjuk oleh Direksi dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, mekanisme tanggung jawab pejabat khusus ini berada langsung di bawah Direktur Kepatuhan.

Selain itu juga Bank BTN saat ini telah mengembangkan dan memiliki sistem informasi yang memadai untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau dan menyediakan laporan mengenai transaksi pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak otoritas.

Pemantauan yang dilakukan terhadap penerapan prinsip KYC/AML di lapangan dibagi 2 kegiatan yaitu :

1. Untuk *Cash Transaction* (CTR) dilakukan melalui system KYC/AML secara on line oleh Staf Khusus KYC/AML di *Compliance Desk* berdasarkan data yang di-up date oleh Petugas Khusus KYC/AML pada H + 1 setelah proses *End of Day*.
2. Untuk *Suspicious Transaction* (STR) dilakukan berdasarkan Laporan data yang dikirim oleh Penanggung Jawab KYC/AML di Kantor Cabang.

Penerapan prinsip KYC/AML ini juga senantiasa merupakan obyek pemeriksaan Internal Audit, Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Secara berkesinambungan Bank BTN terus melakukan penyempurnaan terhadap *Customer Information Files* (CIF) untuk meningkatkan keakurasian dan kelengkapan data nasabah agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan standar internasional.

Dengan berlakunya PBI No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT)

- **Know Your Customer Principle (*Know Your Customer / KYC*)**

In conducting its business activities, Bank BTN deals with various business risks and applies precautionary principles to reduce these risks. One is the application of the *Know Your Customer / Anti Money Laundering* principle.

Policies and procedures related to the *Know Your Customer / Anti Money Laundering* principles are an integral part of the Bank's policies and procedures as a whole, and include supervision by Bank officials, delegation of authority, segregation of duties and responsibilities, internal control systems and training employees.

Implementation of the *Know Your Customer / Anti Money Laundering* principles in branches is co-ordinated by those responsible for the program, who must be assistance branch managers or above, and special officers, who are responsible for implementing the program. The special officer is part of our customer service team, in accordance with a branch manager decision letter. In order for the *Know Your Customer / Anti Money Laundering* principles to be run effectively, the program is monitored by a special working unit, equivalent to the section head at the compliance desk at head office. This unit is referred to as the *Know Your Customer / Anti Money Laundering* Section, and responsible to the head of the compliance desk, as the special officer appointed by the Board of Directors. In accordance with Bank Indonesia regulations, this particular officer falls directly under the Compliance Director.

In addition, Bank BTN currently has developed adequate information systems to identify, analyze, monitor and provide reports on money laundering transactions conducted by customers to the authorities.

Monitoring is conducted through the application of two *Know Your Customer / Anti Money Laundering* activities, namely:

1. Cash transactions done online are monitored by the special staff at the compliance desk based on data updated by the special officer at H + 1 after end of day.
2. Suspicious transactions are monitored based on data reports submitted by the responsible *Know Your Customer / Anti Money Laundering* staff at the branch office.

Application of the *Know Your Customer / Anti Money Laundering* principles is always subject to investigation by the Internal Audit working unit, Bank Indonesia and the Center for Analysis and Reporting Financial Transactions (PPATK). Bank BTN continuously makes improvements to its customer information files to improve the accuracy of customer data in order to conform with Bank Indonesia and international standards.

With the enactment of PBI No.11/28/PBI/2009 dated July 1, 2009 on the Implementation of Anti-Laundering Program and Terrorist Financing Prevention for Banks



Bagi Bank Umum jo SE BI No. 11/31/DPNP Tanggal 30 November 2009 Perihal Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bagi Bank Umum, Manajemen telah menetapkan *action plan* penerapan program APU dan PPT pada Bulan Desember 2009 guna memastikan terlaksananya perubahan PBI Tentang KYC/AML oleh PBI Tentang Penerapan Program APU dan PPT.

jo BI No. SE. 11/31/DPNP on 30 November 2009 Standard Subject Guideline Implementation Program Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention for Commercial Banks, management has set up the Anti-Laundering Program Terrorist Financing Prevention action plans and in December 2009 to ensure effective change in PBI about KYC Know Your Customer / Anti Money Laundering through PBI on the Anti-Laundering and Terrorist Financing Prevention Program Implementation.

Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab pula untuk memastikan bahwa Bank BTN telah melaksanakan Pokok-Pokok Penerapan Fungsi Kepatuhan, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh *Desk* Kepatuhan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Memberikan opini terhadap penerbitan Peraturan Internal Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - Menginformasikan ketentuan Bank Indonesia yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait.
 - Pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank BTN kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
2. Pemberitahuan kepada Direksi Bank BTN agar tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala setiap semester kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Disamping itu juga dibuat laporan kepada Bank Indonesia setiap semester.
4. Proses penunjukan Direktur Kepatuhan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Mengkoordinir pelaksanaan self assessment GCG Bank BTN.
6. Mengkoordinir pelaporan dan pelaksanaan GCG.
7. Mengkoordinir pelaporan uang palsu.
8. Memantau pelaksanaan keputusan ALCO.

AUDIT INTERNAL

Divisi Audit Internal (DAI) Bank BTN bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan Bank BTN. Seperti tercantum dalam struktur organisasi Bank BTN, Divisi Audit Intern (DAI) merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab, serta melapor langsung kepada Direktur Utama dan Komite Audit. Sifat independen DAI juga diatur dalam Piagam Audit (*Charter Audit*) Intern Bank BTN yang memberikan kewenangan pada DAI untuk bekerja tanpa hambatan, bebas dan obyektif tanpa campur tangan dari pihak manapun.

The compliance function is also responsible for ensuring that Bank BTN implements its application compliance functions, to include:

1. Compliance with Bank Indonesia provisions and prevailing legislation, conducted by the compliance desk with the following steps:
 - Giving opinions on the publication of the Bank's internal regulations in order not to deviate from the provisions of Bank Indonesia and prevailing legislation.
 - Informing related working units of newly issued Bank Indonesia regulations.
 - Monitoring and maintaining Bank BTN's compliance with all agreements and commitments made by Bank BTN to Bank Indonesia and the authority of the authorized institutions.
2. Notice to the Board of Directors of the Bank for not adhering to policies and/or taking the decision to deviate from the prevailing rules and regulations.
3. Submitting the Compliance Director's report for the implementation of duties and responsibilities to the President Director each semester, with copies provided to the Board of Commissioners. A report is also submitted to Bank Indonesia every semester.
4. The appointment process of the Compliance Director is in accordance with applicable regulations.
5. Coordinating the implementation of Bank BTN's GCG self-assessment.
6. Coordinating the reporting and implementation of GCG.
7. Coordinating the reporting of counterfeit money.
8. Monitoring the implementation of ALCO's decisions.

INTERNAL AUDIT

Bank BTN's Internal Audit division is responsible for checking all of Bank BTN's activities. As stipulated in the organizational structure of Bank BTN, the Internal Audit division is an independent working unit from the operational working units, and reports directly to the president director and the Audit Committee. The independent nature of the Internal Audit division was also stipulated in the Internal Charter Audit of Bank BTN, which gives authority to the Internal Audit division to work freely and objectively, without any interference from other parties.

Piagam Audit Bank BTN, terakhir ditetapkan menurut surat keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 01/KOM-DIR/DAI/X/2007 tertanggal 10 Oktober 2007 tentang "Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) PT Bank Tabungan Nasional (Persero)". Bank BTN sedang melakukan review dan penyesuaian terhadap Piagam Audit ini, dengan memperhatikan status Bank BTN sebagai perusahaan publik.

Fungsi utama DAI adalah membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian internal bank dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan bank. Tugas-tugas yang dilakukan diantaranya:

1. Merumuskan perencanaan dan menjabarkan secara operasional pelaksanaan audit, serta pemantauan tindak lanjut atas hasil audit.
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Bank BTN.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen.
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dengan berlandaskan pada semua ketentuan yang berlaku.
5. Melakukan evaluasi guna meningkatkan/menyempurnakan efektifitas manajemen risiko, kontrol dan proses pengelolaan *governance processes*.

AUDIT EKSTERNAL

Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit eksternal maka Bank BTN telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank BTN, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tentang transparansi kondisi keuangan Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bank BTN telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2009 kepada Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh RUPS.
2. Bank telah menunjuk KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang telah terdaftar di Bank Indonesia, sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank per 31 Desember 2009.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Bank tidak lebih dari 5 tahun buku berturut-turut.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank direalisasikan melalui perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan antara pihak Bank BTN dengan KAP, termasuk besaran biaya penggunaan jasa auditor eksternal tersebut sebesar adalah Rp 900.000.000 (sudah termasuk pajak dan *out of pocket expenses*)
5. Bank menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2009 yang telah diaudit dan surat komentar (*management letter*) kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan.

Bank BTN's Charter Audit, was established in Board of Commissioners and Directors' Joint Decision Letter No. 01/KOM-DIR/DAI/X/2007 dated October 10, 2007 on the " Internal Audit Charter of PT Bank Tabungan Negara (Persero) ". Bank BTN is doing a review and making adjustments to this Charter, taking into consideration the status of Bank BTN as a public company.

The Internal Audit division's main function is to assist the President Director and the Board of Commissioners, as well as all levels of management to ensure the adequacy of the Bank's internal control systems and provide advice on the bank's strategic and constructive management. The tasks performed include:

1. Formulate and describe plans for audit implementation and monitor the follow-up of audit findings.
2. Analyze and assess finance, accounting, operations and other activities by auditing on- and off-site monitoring, including a management audit of all Bank BTN working units.
3. Provide recommendations for improvements and objective information about audited activities to all levels of management.
4. Identify all possibilities for improving the efficiency and effectiveness of resource usage based on all applicable regulations.
5. Conduct evaluations to enhance and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.

EXTERNAL AUDIT

To ensure implementation of an effective external audit function, Bank BTN fulfilled the requirements concerning the relationship between Bank BTN, the public accountant firm and Bank Indonesia, as stipulated in the provisions for the transparency of the Bank's financial condition by doing the following:

1. Assigning a public accountant firm to audit the Annual Financial Report from January to December 2009, approved by the AGM.
2. Appointing public accountant firm Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, which is registered with Bank Indonesia, as an external auditor to audit its financial statements as of 31 December 2009.
3. Appointing a public accountant firm for not more than 5 consecutive years.
4. Appointing a public accountant firm to audit the Bank's Annual Financial Report, through a working agreement in accordance with provisions from Bank BTN for working with a public accountant firm, including fees for services, which amount to Rp 900,000,000 (including tax and out of pocket expenses)
5. Submitting an audited financial report as of December 31, 2009 and management letter to Bank Indonesia in accordance with provisions.



Penyediaan Dana Pihak Terkait dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) adalah sebagai berikut:

Provision of Related Party and Large Exposure Funds

The provision of related party and large exposure funds is outlined below:

No.	Penyediaan Dana Fund Provision	Jumlah Total	
		Debitur Debtor	Nominal (jutaan Rp) Nominal (million Rp)
1.	Kepada Pihak Terkait For Related Party	949	177.136
2.	Kepada Debitur Inti For Core Debtor		
	a. Individu Individual	465	10.553.204
	b. Grup Group	85	1.979.796

Sebagai bagian dari tugas Pengawasan Dewan Komisaris, penyediaan dana kepada pihak terkait selalu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris, sesuai dengan PBI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

The provision of funds to related parties requires the approval of the Board of Commissioners, in accordance with PBI No. 9/12/DPNP dated May 30, 2007 on Implementation of Good Corporate Governance for Banks.

Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Berikut tabel jumlah penyimpangan internal hingga 31 Desember 2009 :

Total Number of Incidences of Internal Fraud

The following is the total number of internal fraud incidences as per December 31, 2009:

	Internal Fraud dalam 1 Tahun Internal Fraud in 1 year	Jumlah kasus yang dilakukan oleh Total case conducted by					
		Pengurus Management		Pegawai Tetap Permanent Employee		Pegawai Tidak Tetap Contract Employee	
		Tahun Sebelumnya Previous year	Tahun Berjalan Current year	Tahun Sebelumnya Previous year	Tahun Berjalan Current year	Tahun Sebelumnya Previous year	Tahun Berjalan Current year
1.	Jumlah internal fraud Total Number of Internal Fraud	-	-	11	8	-	-
2.	Telah diselesaikan Dalam proses Solved	-	-	10	7	-	-
3.	Dalam Proses Penyelesaian internal Still in internal process	-	-	-	1	-	-
4.	Belum diupayakan penyelesaiannya Un-solved	-	-	-	-	-	-
5.	Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Followed up through legal process	-	-	1	-	-	-

Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian BUMN, Bank BTN secara reguler menerima pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil temuan audit BPK di tahun 2008 menyangkut proses kerjasama pengelolaan Gedung Menara Bank BTN dengan PT Binayasa Putra Batara yang belum sesuai dengan Prosedur Pengadaan Barang dan atau Jasa.

Berdasarkan temuan dan saran atas hasil pemeriksaan BPK tentang pengadaan barang dan jasa Bank BTN tersebut, Direksi Bank BTN telah menyampaikan penjelasan terkait hal tersebut dalam surat Direksi Nomor: 123/ S/DIR/CSD/IR/III/2010 tertanggal 29 Maret 2010.

Pihak Direksi juga telah mengenakan sanksi kepada panitia pengadaan yang memproses perpanjangan jangka waktu Jasa Pengelolaan Gedung Menara Bank

Follow-up BPK'S Findings

As a state-owned enterprise under the Ministry of SOEs, Bank BTN was regularly checked by the Audit Board. In 2008, the Audit Board found the jointly-managed Bank BTN Towers Building with PT Putra Batara Binayasa was not in accordance with the procedures for the procurement of goods and services.

Based on the Audit Board's findings and recommendations on procurement of goods and services, the Board of Directors submitted an explanation related to the issue in Letter of Directors No. 123 / S/DIR/CSD/IR/III/2010 dated March 29, 2010.

The Board of Directors also imposed sanctions on the procurement committee that processed the extensions of Tower Building Management Services for Bank BTN

BTN tahun 2007. Selain itu, sejak Desember 2009, Bank BTN telah melaksanakan proses Pengadaan Jasa Pengelolaan Gedung Menara Bank BTN melalui metode lelang yang *fair* dan terbuka sesuai *best practice* yang berlaku di Indonesia. Adapun surat penjelasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tersebut telah diterima oleh Kementerian BUMN Deputi Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan dengan tanggapan “dapat dipahami”.

in 2007. In addition, since December 2009, the Bank has undertaken the process of the Tower Building Management Services Procurement through an auction method, in accordance with fair and open best practices prevailing in Indonesia. The follow-up letter of explanation for the RI CPC examination was received by the Deputy Ministry for SOEs on Banking and Financial Services with “acceptable” response.

PERMASALAHAN HUKUM

LITIGATION

No.	Permasalahan Hukum Litigation	Jumlah Total	
		Perdata Civil Law	Pidana Criminal Law
1.	Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) Resolved (Possess strong legal basis)	11	2
2.	Dalam proses penyelesaian In the process of resolution	71	14
Total		16	82

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

TRANSACTIONS WITH CONFLICTS OF INTEREST

Sesuai Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan atau pihak terkait dengan Bank.

According to Bapepam Rule Number IX.E.1 on Conflicts of Interest for Certain Transactions, a conflict of interest is the difference between the economic interests of the Bank with the private economic interests of its owners, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, executive officers and/or parties related to the Bank.

Terkait dengan persetujuan atas permohonan kredit oleh Debitur, Bank sudah memiliki kebijakan internal mengenai pengaturan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank BTN sebagaimana dimuat dalam Pedoman Per kreditan Bank mengenai Pemberian Kredit kepada calon Debitur yang memiliki hubungan keluarga maupun yang mengandung benturan kepentingan dengan pemroses dan atau pemutus kredit.

Associated with the approval of the loan application by a debtor, Bank BTN has an internal policy, Bank Lending Guidelines, which prohibits any managers or employees from granting loans to prospective debtors with familial relationships or any other conflict of interest that could influence the processing and/or decision of the loan maker.

Selain itu, Bank BTN sudah mempunyai ketentuan mengenai benturan kepentingan sebagaimana sebagai berikut:

In addition, BTN already has the following provisions regarding conflicts of interest:

1. Menghindari terjadinya konflik kepentingan pribadi.
2. Menghindarkan diri dari penyuapan.
3. Tidak memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi (*insider trading*).
4. Tidak menerima imbalan atau cinderamata.

1. Avoid conflicts of personal interest
2. Avoid bribery
3. Do not to use your position for insider trading
4. Do not to receive rewards or tokens

Bank BTN telah mengungkapkan adanya benturan kepentingan dalam setiap keputusan khususnya yang terkait dengan persetujuan kredit serta terdokumentasi dengan baik. Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai Bank BTN berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi atau menghindari adanya benturan kepentingan dalam menjalankan operasional perbankan sehingga untuk periode Januari – Desember 2009, Bank BTN tidak melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Bank BTN understands that conflicts of interest are possible in any decision, particularly those relating to loan approvals and proper documentation. Bank BTN commissioners, directors and employees make every effort to reduce or avoid any conflict of interest in carrying out banking operations, which resulted in no reported conflicts of interest transaction from January to December 2009.



PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Selama periode Januari hingga Desember 2009, Bank BTN hanya memberikan dana untuk kegiatan sosial terkait dengan program CSR. Laporan mengenai alokasi anggaran untuk program CSR dibahas pada bab Tanggung Jawab Sosial buku Laporan Tahunan ini. Selain itu, Bank BTN tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Data Skala Perbandingan Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Per Bulan

No	Rasio Gaji Salary Ratio	Rasio (Perbandingan) Ratio
1	Gaji pegawai *) yang tertinggi dan terendah Employee Salary *) highest and lowest	13,73 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah The highest and lowest Board of Directors' salary	1,11 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah The highest and lowest Board of Commissioners' salary	1,11 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi The highest Directors' and Employees' salary	4,97 : 1

Keterangan :

*) Pegawai adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana.

FUNDS FOR SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITIES

From January to December 2009, Bank BTN only provided funds for social activities related to its social programs. The report on the budget allocation for the CSR program is discussed in the Social Responsibilities chapter of this annual report. In addition, Bank BTN did not fund any political activities.

RATIO BETWEEN THE HIGHEST AND LOWEST SALARIES

Ratio Scale of the Highest and Lowest Salaries Per Month

Note:

*) Employees are Bank BTN permanent employees up to Staff Level

KODE ETIK PERUSAHAAN YANG Mendukung PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Dalam menjalankan segenap aktifitas bisnisnya, bank mengupayakan penerapan standar etika terbaik sesuai dengan visi, misi dan budaya yang dimiliki melalui implementasi *Code of Conduct* (Pedoman Perilaku). *Code of Conduct* Bank BTN merupakan tuntunan sikap dan perilaku yang dituntut dan berlaku bagi seluruh jajaran Bank BTN. Bank menyadari sepenuhnya bahwa hubungan yang baik dengan *stakeholders* dan peningkatan nilai Pemegang Saham dalam jangka panjang hanya dapat dicapai melalui integritas bisnis dalam setiap aktifitas bisnis bank sebagaimana tercantum dalam *Code of Conduct*.

Panduan Perilaku merupakan sekumpulan norma, nilai, serta tindak perbuatan yang diyakini oleh jajaran Bank sebagai suatu standar perilaku yang ideal bagi Bank BTN.

Nilai-Nilai dan Budaya Kerja Bank BTN

Budaya kerja BTN memiliki 6 nilai dasar dengan akronim POLA PRIMA :

- P = PELAYANAN PRIMA
- O = INOVASI
- LA = KETELADANAN
- PR = PROFESIONALISME
- I = INTEGRITAS
- MA = KERJASAMA

CODE OF CONDUCT THAT SUPPORT THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

In running its business activities, the Bank tries to implement the best standards of ethics with the vision, mission, and culture through the implementation of the Code of Conduct. The Code of Conduct is a requirement on the attitudes and behaviours of Bank BTN employees, and applies to all working units. The Bank realizes that a good relationship with its stakeholders and increased value of shareholders can be achieved from long-term business integration as stated in the Code of Conduct.

The Code of Conduct guidelines are based on common norms, values and behaviours, which are believed by the Bank to be the ideal standard for Bank BTN.

Values and Culture of Bank BTN

BTN working culture has 6 basic values that make up the acronym POLA PRIMA:

- P = Service Excellence
- O = INNOVATION
- LA = EXEMPLARY BEHAVIOUR
- PR = PROFESSIONALISM
- I = INTEGRITY
- MA = TEAMWORK

Enam nilai dasar Budaya Kerja yang menjadi landasan bagaimana Bank BTN mencapai visi “Menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan” adalah sebagai berikut:

- **Pelayanan Prima**
Memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan (internal dan eksternal)
- **Inovasi**
Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan berkelanjutan yang memberi nilai tambah bagi Bank BTN.
- **Keteladanan**
Mulai dari diri sendiri menjadi suri tauladan dalam berperilaku yang mencerminkan Nilai-nilai Budaya kerja Bank BTN bagi insan Bank BTN dan pihak-pihak yang terkait.
- **Profesionalisme**
Kompeten di bidangnya dan senantiasa mengembangkan diri sehingga menghasilkan kinerja terbaik serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan seluruh insan Bank Bank BTN
- **Integritas**
Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan prinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.
- **Kerjasama**
Membangun hubungan yang tulus dan terbuka dengan sesama insan Bank BTN dan pihak lain dilandasi sikap saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan bersama

Etika Jabatan Jajaran Manajemen dan Pegawai Bank

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Jajaran Manajemen dan Pegawai Bank harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan. Etika jabatan meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- **Etika berkaitan dengan Keteladanan**
Jajaran Manajemen dan Pegawai Bank harus mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung standar etika tertinggi di Perusahaan, salah satu caranya adalah dengan menjadikan dirinya sebagai teladan bagi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- **Etika berkaitan dengan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan**
Jajaran Manajemen dan Pegawai Bank wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Pedoman GCG serta kebijakan Bank yang telah ditetapkan.
- **Etika berkaitan dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi**
Jajaran Manajemen dan Pegawai Bank harus mengungkapkan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya termasuk rahasia Bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Bank.
- **Etika berkaitan dengan Peluang Bank**
Jajaran Manajemen dan Pegawai Bank tidak diperkenankan untuk:
 - Mengambil peluang bisnis Bank untuk dirinya sendiri;

The six basic cultural values that underlie Bank BTN's vision “To be the leading bank in housing finance “ are:

- **Service Excellence**
Delivering service beyond customers' expectations (both internally and externally)
- **Innovation**
Constantly developing new ideas and sustainable improvements to deliver added value to Bank BTN.
- **Exemplary Behavior**
Starting with oneself as a role model of behavior that reflects the working culture and values.
- **Professionalism**
Being competent in one's own expertise and continuously improving oneself to yield the best performance and deliver added value for the company and everyone at Bank BTN.
- **Integrity**
Being consistent in mindset, expression and action, in accordance with company regulations, professional codes of ethics and good principles.
- **Teamwork**
Building sincere and open relationships between people in Bank BTN and with other parties, based on trustworthy respect for others to achieve common goals

Code of Ethics of the Management Boards and Bank Employees

In carrying out its duties and functions, the management board and bank employees will have to base themselves in the ethics of the Bank, which include, but are not limited to:

- **Ethics through Exemplary Behaviour**
Bank management and staff should encourage the creation of ethical behaviour and uphold the highest ethical standards in the Company by becoming models in carrying out their duties and obligations.
- **Ethics through Compliance with Laws and Regulations**
Bank management and employees must obey all applicable laws and regulations, Articles of Association, Guidelines for GCG and Bank policies.
- **Ethics through the Disclosure and Confidentiality of Information**
Bank management and staff must disclose information in accordance with legislative provisions, and always maintain the confidentiality of information entrusted to them, including Bank secrecy laws in accordance with the prevailing laws and regulations and policies of the Bank.
- **Ethics through Banking Opportunities**
The management boards and employees are not allowed to:
 - Take advantage of any banking opportunity to benefit themselves

- Menggunakan aset Bank, informasi Bank atau jabatannya untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Bank yang berlaku.
- **Etika berkaitan dengan Benturan Kepentingan**
Benturan kepentingan adalah suatu kondisi tertentu di mana kepentingan Jajaran Manajemen dan Pegawai Bank BTN bertentangan dengan kepentingan Bank BTN untuk meraih laba, meningkatkan nilai, mencapai visi dan menjalankan misi serta arahan Rapat Umum Pemegang Saham, yang pada akhirnya akan merugikan Bank BTN.

Berkaitan hal tersebut maka Jajaran Manajemen dan Pegawai Bank:

- Dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Bank;
- Mengisi daftar khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Bank maupun perusahaan lain;
- Tidak memanfaatkan jabatan bagi kepentingan pribadi atau bagi kepentingan orang atau pihak lain yang terkait yang bertentangan dengan kepentingan Bank;
- Menghindari setiap aktifitas yang dapat mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan tugas;
- Melakukan pengungkapan dalam hal terjadi benturan kepentingan, dan yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Bank yang berkaitan dengan hal tersebut.
- **Etika berkaitan dengan Korupsi dan Penyuapan**
Jajaran Manajemen dan Pegawai Bank BTN senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi, gratifikasi, dan penyuapan dalam cara, bentuk dan atau untuk kepentingan apapun yang diyakini dapat merugikan Bank BTN.

Beberapa hal yang dilarang bagi Jajaran Manajemen dan Pegawai Bank BTN adalah sebagai berikut:

- Menghindarkan diri untuk memberikan atau menawarkan, atau menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada nasabah atau seorang pejabat pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha seperti hadiah, sumbangan atau entertainment, tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut dan melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi.

- Use the Bank's assets, information or position for personal interests that conflict with applicable legislation or policies

- **Ethics through Conflicts of Interest**

A conflict of interest is a specific condition in which the interests of the Bank's management and employees are against the interests of the Bank to make profits, increase value, and achieve the vision, mission and direction of the GMS, which will eventually be detrimental to Bank BTN.

To address this, the management and employees of the Bank will:

- Not engage in any transactions in which a conflict of interest exists or personal benefit can be obtained from the Bank's activities;
- Submit a registered list indicating their and/or their family's ownership in the Bank or other companies.
- Not use their position for personal benefit or the benefit of other persons or parties that could cause a conflict of interest for the Bank.
- Avoid any activity that may affect their performance.
- Disclose all facts in the event of a conflict of interest, and not be involved in the decision making process relating to the Bank.

- **Ethics through Bribery and Corruption**

Bank BTN's management and employees must prevent and refrain from practices of corruption, graft and bribery in the manner, form and/or for any purpose that is believed to be detrimental to Bank BTN.

Example of things that are prohibited for the management and employees of the Bank are as follows:

- Giving, offering or receiving, either directly or indirectly, anything of value to or from customers or government officials to influence or as a reward for what he had done and/or any other actions that do not conform with legislation and regulations.
- Accept or provide a gesture of thanks for business activities, such as gifts, donations or entertainment, or anything that could be considered to be an inappropriate or illegal act that violates the laws and regulations governing corruption.

KOMITE-KOMITE DI BAWAH KOMISARIS

Committees under the Board of Commissioners

Seperti tahun sebelumnya, dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 komite yaitu komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi.

As in previous years, the Board of Commissioners (BOC) was assisted in its duties by three committees: Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee.

LAPORAN KOMITE AUDIT

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Selain Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG, Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Keputusan Ketua BAPEPAM nomor 29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dan Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M.MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, pelaksanaan tugas Komite Audit juga diatur dalam *Charter* Komite Audit.

Struktur dan keanggotaan Komite Audit dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang dirumuskan dalam surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara No.63/KOM/BTN/VII/2009 Tanggal 15 Juli 2009 tentang pengangkatan anggota Komite Audit, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 168/DIR/2009 tanggal 30 Juli 2009. Susunan Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk periode 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2011 adalah sebagai berikut:

Ketua : Zaki Baridwan (Komisaris Utama – Independen)
Anggota : Gatot Mardiwisisto (Komisaris)
Anggota : Lifransyah Gumay (Pihak Independen)
Anggota : Dewi Wulan Sari (Pihak Independen)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite ini bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan efektifitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, yaitu:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan yang terdapat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP).
2. Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
3. Mengevaluasi laporan manajemen atas ketaatan Perseroan terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas

AUDIT COMMITTEE REPORT

Structure, Membership, Expertise and Independence of the Audit Committee

In executing its duties, the Audit Committee observes Bank Indonesia regulations on Good Corporate Governance, BAPEPAM Chairman Decree no 29/PM/2004 on the Formation and Working Guidelines of Audit Committee and the Decree of the State Minister of State-owned Enterprises Decree No. Kep-117/M.MBU/2002 dated 31st July 2002. In addition, the responsibilities of the Committee are stipulated in the Audit Committee Charter.

The structure and membership of Audit Committee is set based on resolutions taken in BOC meetings, which are defined in PT Bank Tabungan Negara BOC letter No. No.63/KOM/BTN/VII/2009 dated 15th July 2009 on the Installation of Audit Committee Membership. The installation is formalized by the BOD Decree No.168/DIR/2008 dated 30th July 2009. Membership in the Audit Committee at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk for the period of 1st August- 31st July 2011 is as follows:

Ketua : Zaki Baridwan (President Commissioner – Independent)
Anggota : Gatot Mardiwisisto (Commissioner)
Anggota : Lifransyah Gumay (Independent Party)
Anggota : Dewi Wulan Sari (Independent Party)

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The Audit Committee is responsible for assisting the BOC in their supervisory functions related to financial information, internal control systems and audit effectiveness as follows:

1. Reviewing published and to-be-published financial information, such as financial statements, projections and information in the Bank Business Plan, Bank Working Plan and Budget and Long-term Plan
2. Evaluating the effectiveness of audits by the external auditor, including reviewing the independency and objectivity of the external auditor, and reviewing the adequacy of the audit to ensure that all key risks have been taken into consideration.
3. Evaluating the management report on the Bank's compliance with all relevant laws.
4. Monitoring and evaluating of the internal audit planning, implementation and follow up of the audit report to determine the adequacy of the internal audit, including the adequacy of the financial reporting process. Reviews and evaluations should

perencanaan dan pelaksanaan audit internal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI).
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Kantor Akuntan Publik, BPK dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
 7. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk meminta Divisi Audit Internal melaksanakan audit khusus jika diperlukan.
 8. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang usulan pengangkatan Kepala Divisi Audit Internal.
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris.

Rangkap Jabatan Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit Bank BTN tidak merangkap jabatan atau terafiliasi sebagai pejabat dalam struktur organisasi Bank BTN.

Rapat Komite Audit periode 1 Januari-31 Desember 2009

DAFTAR KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

No	Nama Name	Jumlah Kehadiran Total Attendance
1	Zaki Baridwan	12
2	Gatot Mardiasisto	12
3	Lifransyah Gumay	12
4	Dewi Wulan Sari	9
	Total	12

Catatan:

- Ketidakhadiran dalam rapat terutama karena dinas.
- Kehadiran terdiri dari kehadiran secara fisik dan memberikan surat kuasa

Rapat tersebut merupakan rapat gabungan dengan manajemen yang membahas laporan hasil audit yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal dan pembahasan

focus on the following at least:

- The implementation of the Internal Audit Division's duties
 - The conformity between audit implementation by the public accounting firm and prevailing standards
 - The conformity of financial statements with prevailing standards
 - Follow up actions by the Board of Directors (BOD) concerning the findings by the Internal Audit Committee, public accounting firm and State Financial Audit Agency and the results of the supervision by Bank Indonesia
5. Providing recommendations on the appointment of a public accounting firm to the BOC to be conveyed at the GMS
 6. Reviewing and reporting complaints related to the Bank to the BOC
 7. Recommending the BOC request the Internal Audit Division, when necessary, hold special audits
 8. Providing recommendations to the BOC on the proposed appointment of the Head of Internal Audit Division.
 9. Executing other duties as assigned by the BOC.

Dual Positions of Audit Committee Members

Members of Bank BTN Audit Committee neither have dual position nor are they affiliated as officials in the Bank's organizational structure.

Meetings of the Audit Committee period 1st January -31st December 2009

ATTENDANCE AT AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Note:

- Absence in meetings was mainly due to other working assignments.
- Attendance includes physical attendance and by letter of consent.

The meetings were joint meetings with the management and discussed the audit reports by the Internal Audit Division and monthly performance. As part of the BOC

kinerja bulanan perusahaan. Sebagai bagian dari fungsi pengawasan Dewan Komisaris, rapat-rapat tersebut juga dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan anggota Komite Audit.

Selain rapat gabungan tersebut, Komite Audit mengadakan rapat internal Dewan dengan Dewan Komisaris dan antar Komite yang ada dibawah Komisaris serta menghadiri rapat yang diadakan atas undangan Dewan Komisaris membahas hal-hal tertentu dengan manajemen. Anggota Komite Audit juga menghadiri undangan rapat di beberapa Kantor Cabang dan Divisi Kantor Pusat untuk membahas temuan audit yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal.

Laporan Kegiatan Audit Tahun 2009

supervisory function, the meetings were also attended by the members of the BOC who are not members in Audit Committee.

In addition to the joint meetings, the Audit Committee held internal committee meetings with the BOC and between Committees under the BOC. The Audit Committee was also invited by BOC to attend meetings to discuss certain issues with the management. Members of Audit Committee, by invitation, also attended meetings at the Branches and Head Office Divisions to discuss audit findings by the Internal Audit Division.

Report of Audit Activities in 2009

No	Jenis Audit Type of Audit	Jumlah Temuan No. of Findings	Selesai Completed	Belum Selesai In Progress
1	General Audit – Kantor Cabang General Audit – Branches	1.488	1.120	368
2	General Audit – Kantor Cabang Syariah General Audit – Shariah Branches	175	145	30
3	Audit Teknologi Sistem Informasi Information Technology System Audit	145	109	36
4	General Audit – Kantor Pusat General Audit – Head Office	165	36	129
5	General Audit – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan General Audit – Environmental and Partnership Program	2	0	2
6	Bank Indonesia Bank Indonesia	21	10	11
7	Kantor Akuntan Publik (2008) Public Accounting Firm (2008)	91	80	11

Pengawasan atas Audit Eksternal

Auditor eksternal bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah menyajikan secara wajar, dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Pada tahun buku 2009, Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Bank BTN adalah KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja (Anggota Ernst & Young International), yang juga merupakan auditor laporan keuangan Bank BTN pada tahun buku 2008. Komite audit telah menelaah proses penunjukan tersebut dan menetapkan jumlah *fee audit* yang masih dalam batas kewajaran.

Dalam melakukan pengawasan proses audit eksternal, Komite Audit telah berkoordinasi dan mengadakan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik untuk

Supervision of External Audit

The external auditor is responsible for auditing financial statements based on the Indonesian Professional Standards of Public Accountants and providing opinions on whether the financial statements have been properly presented, in all material aspects, the Bank's financial positions, activity results and cash flow are in accordance with the generally accepted Financial Accounting Standards in Indonesia.

In financial year 2009, the public accounting firm assigned to audit the Bank's consolidated financial statements was KAP Purwantoro, Sarwoko and Sandjaja (Member of Ernst & Young International), which was also the auditor for the Bank's financial statements in financial year 2008. The Audit Committee has reviewed the appointment process and determined that the audit fee was within the reasonable range.

In supervising the external audit process, the Audit Committee coordinated and met with the Public Accounting Firm to discuss the audit plan, obstacles



membahas rencana audit, hambatan dan temuan audit yang penting. Komite Audit selanjutnya memastikan hambatan dan temuan tersebut dapat diatasi dan ditindaklanjuti oleh manajemen. Di samping itu, Komite Audit juga mengevaluasi kualitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, berdasarkan standar audit dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk juga evaluasi atas independensi dan obyektivitas akuntan publik.

Selama tahun buku 2009 terdapat beberapa peristiwa yang berdampak pada posisi keuangan dan hasil usaha Bank BTN, di antaranya, terjadinya musibah kebakaran kabel gedung Kantor Pusat yang menimbulkan kerugian (net) sebesar Rp. 21.929.984.256 dan adanya aksi korporasi pada akhir tahun 2009 yaitu penerbitan saham perdana (IPO) Bank BTN pada tanggal 17 Desember 2009 dalam rangka menambah modal Bank BTN.

Pengawasan Atas Audit Internal

Dalam menjalankan fungsi review terhadap sistem pengendalian internal, Komite Audit berupaya agar peran audit internal dapat terus senantiasa ditingkatkan dengan melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, pelaporan pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuannya.

Komite Audit telah melakukan review hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Divisi Audit Internal selama tahun 2009, yang terdiri dari audit umum konvensional (Kantor Cabang dan Divisi) sebanyak 70 obyek, audit umum syariah sebanyak 16 obyek dan audit teknologi sistem informasi sebanyak 14 obyek dan 8 audit khusus. Selama tahun 2009 jumlah obyek yang diaudit telah dapat diselesaikan seratus persen. Berdasarkan review terhadap pelaksanaan audit, Komite Audit menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Agar auditor internal meningkatkan evaluasi atas pengendalian internal yang terkait dengan bisnis proses pemberian kredit komersial (non KPR), mengingat porsi kredit non perumahan akan mengalami peningkatan pada tahun mendatang.
2. Agar pada tahun 2010 Divisi Audit Internal dapat melakukan audit yang lebih terfokus pada proses bisnis yang mengandung risiko tinggi melalui penerapan metode audit berbasis risiko (*risk based audit*) secara penuh, serta membangun koordinasi yang lebih baik dengan Divisi Manajemen risiko karena dua divisi tersebut merupakan bagian dari sistem pengendalian internal.

Selain melakukan review laporan audit internal, Komite Audit juga memonitor tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas temuan hasil audit pihak lain seperti; audit oleh Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit lainnya, telah dilakukan *review* paket kompensasi/remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Selama tahun buku 2009 Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN telah menerima kompensasi/remunerasi sebesar Rp 42.179.003.741. Komite Audit menyimpulkan bahwa pembayaran kompensasi/remunerasi Direksi dan Komisaris selama tahun buku 2009 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

and key audit findings. The Audit Committee ensured that both obstacles and findings could be handled and followed up by the management. Further, the Audit Committee evaluated the quality of the audit by the external auditor, which is based on prevailing auditing standards and other rules, including an evaluation of the public accountant's independency and objectivity.

Throughout financial year 2009, several incidents impacting the financial position and business performance happened, including the cable fire incident at the head office, which caused (net) losses of Rp 21,929,98,256 and the IPO of Bank BTN shares on 17th December 2009, aimed at increasing the Bank's capital.

Supervision on Internal Audit

In executing its review function of the internal control system, the Audit Committee seeks to continuously improve the role of the internal audit by evaluating human resources, organizational structure, reporting of internal audit implementation and follow up to the findings.

The Audit Committee has reviewed the work undertaken by the Internal Audit Division in 2009, which consisted of 70 conventional general audits of branches and divisions, 16 general audits of sharia units, and 14 audits and 8 special audits of the IT systems. Throughout 2009, all the above audits were duly completed. Based on a review on the audit implementation, the Audit Committee has proposed the following:

1. The internal auditor needs to improve its evaluation of the internal controls associated with commercial (non-mortgage) loan disbursements, considering that the portion of non-housing loans will increase in the coming years.
2. The Internal Audit Division needs to carry out audits that are more focused on high-risk business process through the full application of risk-based audit methods, and establish better coordination with the Risk Management division, as both divisions are part of internal control system.

Other than reviewing internal audit report, the Audit Committee also monitored the follow up by management on the findings from other parties, such as the audit by Bank Indonesia and the State Financial Audit Agency.

In connection with its other duties, Audit Committee has reviewed the compensation/remuneration packages of the BOC and BOD. Throughout 2009, the BOC and BOD received compensation/remuneration totalling Rp 42,179,003,741. The conclusion by the Audit Committee is that the compensation/remuneration for the BOC and BOD in financial year 2009 was in accordance with prevailing regulations.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan seperti tersebut diatas, Komite Audit berpendapat bahwa:

1. Penyajian laporan keuangan yang dipublikasikan telah memenuhi azas keterbukaan.
2. Bank telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Komite Audit juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktifitas Bank BTN yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasehat kepada Direksi. Sehubungan dengan itu maka tidak ada masalah-masalah signifikan yang perlu ditambahkan dalam laporan.

LAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Komite Pemantau Risiko

Selain Peraturan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG, Komite Pemantau Risiko dalam melakukan tugasnya berpedoman pada peraturan perundangan, diantaranya Peraturan Bank Indonesia, PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M.MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktik GCG pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko juga diatur dalam Piagam Pemantau Risiko.

Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris yang dirumuskan dalam surat Dewan Komisaris Bank BTN No. 63/KOM/BTN/VII/2009 Tanggal 15 Juli 2009 tentang pengangkatan anggota Komite Audit, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 169/DIR/2009 tanggal 30 Juli 2009. Susunan Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. untuk periode 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Juli 2011 adalah sebagai berikut:

Ketua : Subarjo Joyosumarto
Anggota : Mulabasa Hutabarat
Anggota : Prihartono
Anggota : Haryanto

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite ini bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kebijakan risiko Bank, yaitu:

1. Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank dan memonitor pelaksanaannya.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank.

Based on the review and discussions at the abovementioned meetings, the Audit Committee concluded that:

1. The presentation of publicized financial statements has fulfilled the principle of openness.
2. The Bank has an adequate internal control system.

The Audit Committee has submitted reports, recommendations and comments on the Bank's activities that require attention from the BOC in executing its supervisory responsibilities and functions, and in providing advice to the BOD. Based on the above, there are no more significant issues needed to be added to the reports.

RISK MONITORING COMMITTEE REPORT

Structure, Membership, Expertise and Independency of Risk Monitoring Committee

In executing its duties, the Risk Monitoring Committee observes Bank Indonesia regulations on Good Corporate Governance, Bank Indonesia Regulation PBI No. 5/8/PBI/2003 dated May 19, 2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks and State Minister of State-owned Enterprises Decree No. Kep-117/M.MBU/2002 dated July 31, 2002 on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-owned Enterprises. In addition, the duties of the Committee are also stipulated in the Risk Monitoring Committee Charter.

The structure and membership of the Risk Monitoring Committee is set based on the resolutions taken in BOC meetings, which are defined in Bank BTN BOC Letter No. 63/KOM/BTN/VII/2009 dated July 15, 2009 on the Installation of Risk Management Committee Membership. The installation is formalized by BOD Decree No. 168/DIR/2008 dated July 30, 2009. Membership of the Risk Monitoring Committee at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk for the period of August 1, 2009 - July 31, 2011 is as follows:

Chair : Subarjo Joyosumarto (Independent Commissioner)
Member : Mulabasa Hutabarat (Commissioner)
Member : Prihartono (Independent Party)
Member : Haryanto (Independent Party)

Duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee

The Committee is tasked with assisting the BOC in executing its supervisory functions on the bank's risk policy, which consist of:

1. Evaluating the Bank's risk management policy and monitoring its implementation.
2. Evaluating the conformity between the risk management policy and its implementation to provide recommendations to the BOC.
3. Monitoring and evaluating the exercise of duties by the Risk Management Committee and Risk Management Working Unit to provide recommendation to the BOC
4. Encouraging the effective function of the Bank's risk management.



5. Melakukan pemantauan atas risiko akibat perubahan indikator-indikator dalam pasar (suku bunga, kurs, dan sebagainya) untuk memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu kestabilan Bank.
6. Melakukan pemantauan atas segenap risiko Bank.
7. Mengevaluasi kebijakan, sistem dan pengendalian intern yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko konsentrasi kredit.
8. Melakukan pemantauan atas pengendalian internal penyaluran kredit.
9. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaiannya.
10. Melakukan tugas khusus lainnya yang terkait dengan pemantauan manajemen risiko Bank.
11. Dapat mengakses data dan informasi dari manajemen Bank, yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemantauan risiko.

5. Monitoring risks caused by changes in market indicators (interest rates, exchange rates and others) to ensure the changes will not disrupt the Bank's stability.
6. Monitoring of all Bank's risks.
7. Evaluating policies, systems and effective internal controls to identify, measure, monitor and control loan concentration risks.
8. Monitoring of internal controls for loan disbursements.
9. Reporting to the BOC about possible risk incidents and proposing alternative solutions.
10. Conducting other special duties related with the Bank's risk management monitoring.
11. Accessing data and information from the Bank management required to execute risk monitoring duties.

Rangkap Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko Bank BTN tidak merangkap jabatan atau terafiliasi sebagai pejabat dalam struktur organisasi Bank BTN.

Dual Position of Risk Monitoring Committee Members

Members of Bank BTN Risk Monitoring Committee neither have dual position nor are they affiliated as officials in the Bank's organizational structure.

DAFTAR KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO 1 JAN-31 DES 2009

ATTENDANCE LIST OF RISK MONITORING COMMITTEE MEETINGS 1 JAN-31 DES 2009

No	Nama Name	Jumlah Kehadiran No. of Attendance
1	Subarjo Joyosumarto*	7
2	Mulabasa Hutabarat	7
3	Prihartono	7
4	Haryanto	7
	Total	7

* Merupakan Komisaris Independen

* Independent Commissioner

Rapat tersebut merupakan pertemuan dengan manajemen, Divisi Manajemen Risiko, Divisi terkait dan rapat internal yang membahas laporan profil risiko. Selain rapat tersebut, Komite Pemantau Risiko mengikuti rapat gabungan sebanyak 41 kali yang diadakan atas undangan Dewan Komisaris membahas hal-hal tertentu dengan manajemen, termasuk manajemen risiko.

LAPORAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

Pemantauan atas Pengendalian Internal Penyaluran Kredit

Berdasarkan data dari manajemen, dalam upaya memantau penyaluran kredit Bank, Komite Pemantau Risiko telah melakukan kajian tentang persoalan yang menyangkut *Non Performing Loan Gross (NPL Gross)*, kolektibilitas kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK), Debitur yang dalam realisasi dalam tahun pertama sudah menunggak (DRBM), khususnya terhadap kantor-kantor cabang tertentu yang NPL Gross-nya di atas 5%, DRBM-nya diatas 2% serta DPK-nya di atas

DAFTAR KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI 1 JAN-31 DES 2009

ATTENDANCE AT REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETINGS 1 JAN-31 DES 2009

No	Nama Name	Jumlah Kehadiran No. of Attendance
1	Zaki Baridwan	3
2	Subarjo Joyosumarto	3
3	Rini Pudjiastuti	3
	Total	3

These meetings were with the management, Risk Management division, related divisions and internal meetings to discuss the risk profile report. Other than the above meetings, the Risk Monitoring Committee attended 41 joint meetings upon invitation from the BOC, to discuss issues concerning management, including risk management.

WORKING REPORT BY THE RISK MONITORING COMMITTEE

Monitoring of Internal Controls for Loan Disbursement

Based on the data from the management, in an effort to monitor the Bank's loan disbursement, the Risk Monitoring Committee studied issues pertaining to the Gross NPL, loan collectivity under special attention, debtors who had defaulted on their first year obligation, especially for branches whose Gross NPL was above 5%, debtors who had defaulted on their first year obligation above 2% and loan collectivity under special attention above 10%. The Risk Monitoring Committee also monitored a list

10%. Disamping itu, Komite Pemantau Risiko juga memonitor daftar 15 cabang dengan risiko kredit tertinggi dilihat dari *outstanding* total kredit, NPL Gross, DPK dan DRBM.

Pemantauan atas Penghimpunan Dana Giro, Tabungan Dan Deposito

Dalam upaya memantau penghimpunan dana pihak ketiga, Komite Pemantau Risiko telah menyusun kajian tentang perkembangan dana giro, tabungan dan deposito sejak tahun 1993 sampai dengan 2009. Hal ini dimaksudkan sebagai dorongan bagi manajemen dan jajarannya agar di masa yang akan datang dapat memperoleh dana pihak ketiga dengan risiko yang lebih kecil.

Pemantauan atas *review* Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PMKR) oleh Manajemen

Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi atas usulan *review* PMKR oleh manajemen dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Komisaris. Hal ini mendukung tugas Dewan Komisaris sesuai pasal 6 PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tersebut diatas, yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Bank.

Pemantauan atas Laporan Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia

Dalam hal pelaksanaan GCG, Bank telah menyusun Pedoman GCG dan mensosialisasikan kepada seluruh staf dan karyawan Bank. Selanjutnya dalam hal pelaksanaan prinsip kehati-hatian, tidak ada peraturan dan ketentuan yang dilanggar. Namun dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan, masih ada beberapa hal yang perlu perbaikan antara lain:

- Adanya keterlambatan penyampaian laporan ke Bank Indonesia, yang dampaknya dikenakan denda;
- Belum sepenuhnya temuan audit Bank Indonesia dan audit internal ditindak lanjuti;
- Sosialisasi *Know Your Customer* dan *Anti Money Laundering* belum sepenuhnya dilaksanakan terhadap semua staf dan karyawan Bank.

Pemantauan Atas Dampak Risiko Kebakaran Gedung Bank
Terjadinya musibah kebakaran kabel gedung Kantor Pusat pada awal tahun 2009 membawa dampak risiko operasional antara lain: menimbulkan kerugian (net) sebesar Rp. 21.929.984.256, tempat kerja yang menyebar di beberapa tempat. Namun dengan semangat kebersamaan yang tinggi, pada akhir tahun 2009 tempat kerja sudah dapat menyatu kembali.

Pemantauan atas Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi

Sampai dengan akhir tahun 2008, penggunaan teknologi dan sistem informasi pada Bank masih belum memadai. Namun didasari keinginan yang cukup tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, staf dan karyawan maka sejak awal tahun 2009 program penyempurnaan teknologi dan sistem informasi pada Bank telah dimulai dan diharapkan mulai awal bulan Maret 2010 sudah dapat direalisasikan.

of the 15 highest credit risk branches based on total outstanding loans, Gross NPL, loan collectivity under special attention and debtors who had defaulted on their first year obligation.

Monitoring of the Acquisition of Demand Deposits, Savings and Time Deposits

To monitor the acquisition of third-party funds, the Risk Monitoring Committee prepared studies of current accounts, savings accounts and time deposits from 1993 to 2009 to encourage the management and teams to acquire third-party funds with lower risks.

Monitoring of the Review of Risk Management Policy Guidelines by the Management

The Risk Monitoring Committee carried out an evaluation to follow up a proposed review by the management of the Risk Management Policy Guidelines, which was to be reported to the BOC. This evaluation supported the BOC in carrying out its responsibilities, as stated in article 6 PBI No.5/8/PBI/2003 dated May 19, 2003 on the responsibility of the BOC to approve and evaluate the Bank's Risk Management policies.

Monitoring of the Compliance Director's Report for Bank Indonesia

In implementing GCG, the Bank has developed GCG guidelines and socialized them to all employees. Later in its implementation, there were no violations of the GCG rules and stipulations detected. Nonetheless, in implementing the compliance function, several things require improvement, among others:

- There was a delay in report submission to Bank Indonesia, resulting in a fine.
- Not all findings by Bank Indonesia and the internal audit have been followed up on.
- Socialization of the Know Your Customer/Anti-Money Laundering programs have yet to be duly implemented to all staff members and employees.

Monitoring on The Impact of The Fire at The Bank's Head Office

The cable fire at the Bank's head office in early 2009 impacted the operational risk, including net losses of Rp 21,929,984,256 and displacement of working areas to different locations. However, with the strong sense of togetherness, by the end of 2009 the impacted working areas were unified again.

Monitoring of the IT System Application

By the end 2008, the technology utilization and information system at the Bank were not yet adequate. Nevertheless, with the strong will of the BOC, BOD and employees since the beginning of 2009, the IT system enhancement program was started and is expected to be realized by early March 2010.



Pemantauan atas Penyempurnaan Struktur Organisasi

Dalam upaya peningkatan kinerja bank, salah satu hal yang dilakukan adalah penyempurnaan terhadap struktur organisasi dan dilakukan oleh unit khusus yaitu *Change Management Office*, antara lain dengan dibentuknya Kantor Wilayah. Dengan adanya struktur organisasi yang memadai didukung sistem informasi dan teknologi yang cukup canggih, diharapkan target kinerja bank akan dapat dicapai.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan seperti tersebut diatas, Komite Pemantau Risiko berpendapat bahwa:

1. Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko dan telah mengidentifikasi 8 jenis risiko Bank yang terkait.
2. Dalam hal penyaluran kredit, Divisi Manajemen Risiko cukup berperan dengan menyampaikan risiko-risiko yang perlu di mitigasi.
3. Didukung struktur organisasi yang memadai dan teknologi serta sistem informasi yang cukup canggih, Bank akan dapat lebih meningkatkan kinerjanya.

Komite Pemantau Risiko juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasehat kepada Direksi.

LAPORAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Zaki Baridwan (Komisaris Utama – Independen)
Anggota : Gatot Mardiwasiso (Komisaris)
Anggota : Rini Pudjiastuti (Kepala Divisi Pengembangan SDM)

Susunan komposisi, keahlian dan kriteria independensi Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam – LK.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite ini membantu Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan penetapan kualifikasi dan proses nominasi serta remunerasi Komisaris, Direksi dan para pejabat eksekutif, yaitu:

1. Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan remunerasi, yaitu:
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Monitoring of Organizational Structure Enhancement

One of the Bank's efforts to improve its performance is improving the organizational structure, which is being carried out by a special unit called the Change Management Office. This special unit has commissioned the establishment of a regional office. With a proper organizational structure, backed by advanced technology and information systems, the Bank's business targets are projected to be realized.

Based on reviews and discussions in the abovementioned meetings, the Risk Monitoring Committee opines that:

1. The bank has adequate Risk Management Policy Guidelines to identify 8 types of related risks in the Bank.
2. For the loan disbursement, the Risk Management Division has played an adequate role in reporting risks requiring mitigation.
3. Supported by an adequate organizational structure with advanced IT systems, the Bank will be more capable to improve its performance.

The Committee has submitted reports, recommendations and comments on various activities requiring the attention of the BOC in executing their supervisory function, and provided advice to the BOD.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE REPORT

Structure and Membership of the Remuneration and Nomination Committee

The Remuneration and Nomination Committee was established through BOD Decree No.170/DIR/2009 dated July 30, with the following membership:

Chair : Zaki Baridwan (President Commissioner – Independent)
Member : Gatot Mardiwasiso (Commissioner)
Member : Rini Pudjiastuti (Head of Human Resources Development Division)

The criteria concerning the composition, expertise and independence of the Remuneration and Nomination Committee has been developed in accordance with the regulations issued by Bank Indonesia and Bapepam-LK.

Duties and Responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee

The Committee assists the BOC in executing its supervisory function on issues related to qualification requirements, nomination process and remuneration of BOC, BOD and executive officials, consisting of:

1. Duties and responsibilities associated with the remuneration policy:
 - Evaluating the remuneration policy.
 - Providing recommendations to the BOC on the remuneration policy for the BOC and BOD to be conveyed at the GMS.
 - Providing recommendations to the BOC on the remuneration policy for executive officials and employees, to be submitted to the BOD.

2. Tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan nominasi, yaitu:
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
3. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai telah dengan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Prestasi kerja individual.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi sesuai Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank.
4. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi perbaikan atau perubahan yang diperlukan.
5. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

Laporan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2009, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 3 kali rapat dengan hasil sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi terkait dengan penentuan *Key Performance Indicators (KPI)* untuk menilai kinerja Direksi, yang meliputi berbagai aspek sebagai berikut:
 - *Tools* yang digunakan dalam penilaian kinerja Direksi yang dikaitkan dengan penerapan *Balanced Scorecard*.
 - Pembobotan terhadap aspek-aspek yang dinilai, yaitu finansial, operasional, administrasi, kolejal dan individual, serta terkait kinerja jangka pendek dan jangka panjang.
 - Aspek *fairness* dalam penilaian.
2. Menyempurnakan pedoman dan tata kerja Komite Remunerasi dan Nominasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris

Working Report of the Remuneration and Nomination Committee

During 2009, the Remuneration and Nomination Committee held three meetings with the following results:

1. Conducting an evaluation of the remuneration policy KPIs to assess the BOD's performance, including the following:
 - Tools used in the assessment are linked with the Balanced Scorecard application
 - Weighting of the assessed aspects: financial, operational, administration, collegial and individual, and short- and long-term plans.
 - Fairness of the assessment.
2. Enhancing the guidelines and working procedures of the Remuneration and Nomination Committee
3. Providing recommendations to the BOC on the remuneration and nomination policy for executive officials and employees.
4. Providing recommendations to the BOC to be conveyed to the BOD on the following:
 - The enrichment of the Personnel Committee's duties and responsibilities in monitoring

untuk disampaikan kepada Direksi mengenai beberapa hal sebagai berikut:

- Pengembangan tugas dan tanggung jawab Komite Personalia dalam hal memonitoring pelaksanaan program Officer Development Program (ODP), terutama bagi ODP yang menonjol.
- Rencana rekrutmen dan kenaikan gaji pegawai harus mempertimbangkan Biaya Operasional dibandingkan Pendapatan Operasional (BOPO).
- Penerapan grading system berbasis kompetensi dan performance based salary dengan melaksanakan evaluasi jabatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi terkait dengan penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) untuk menilai kinerja Direksi, Komite Remunerasi dan Nominasi mengusulkan paket remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang sepadan dengan kinerjanya. Dalam usulan tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi harus dapat memastikan bahwa kepentingan Bank BTN telah sejalan dengan kepentingan Pemegang Saham.

Di tahun 2010, Komite Remunerasi dan Nominasi tetap akan melaksanakan program kerjanya untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan agar dapat berjalan dengan baik.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Dewan Pengawas Syariah

Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank BTN per 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

1. Drs. H.A. Nazri Adlani (Ketua)
2. Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA, MBL (Anggota)

Pengangkatan Ketua dan Anggota DPS Bank BTN berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) No. 16/DIR/2009 tanggal 10 Februari 2009 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Surat Keputusan berlaku terhitung mulai tanggal 15 Februari 2009 s/d 14 Februari 2013.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (UUS) berikut tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah :

1. DPS bertugas dan bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada butir 1 meliputi antara lain:
 - Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip Syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS Bank BTN.
 - Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS Bank BTN sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.

the execution of the Officer Development Program, especially for the outstanding Officer Development Program.

- The Recruitment and Salary Increment Plan should take Operating Costs vs Operating Revenues into consideration
- The application of a competency-based grading system and performance-based salaries through position evaluations.

For the evaluation of the remuneration policy, which is linked to setting up KPIs to assess the performance of the BOD, the Remuneration and Nomination Committee proposes a remuneration package for the BOD and BOC that is commensurate with their performance. In the proposal, the Committee has to ensure that the Bank's interests are consistent with the shareholders'.

In 2010, the Remuneration and Nomination Committee will continue with its working program to assist the BOC in performing its supervisory function properly.

SHARIA SUPERVISORY BOARD REPORT

Structure, Membership, Expertise and Independency of the Sharia Supervisory Board

Membership of the Sharia Supervisory Board as of December 31, 2009 was as follows:

1. Drs. H.A. Nazri Adlani (Chair)
2. Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA, MBL (Member)

The appointment of the Chair and Member of Bank BTN's Sharia Supervisory Board is based on PT Bank Tabungan Negara (Persero) BOD Decree No. 16/DIR/2009 dated February 10, 2009 on the Installation of PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Shariah Supervisory Board Chair and Member. The Decree is effective from February 15, 2009 to February 14, 2013.

Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board

In reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 on the Sharia Business Units, the following are the duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board:

1. Providing advice to the sharia business unit director and supervising activities to ensure its compliance with sharia principles.
2. The execution of duties and responsibilities as mentioned in point one include the following:
 - Measuring and ensuring compliance with sharia principles in the guidelines for operations and products launched by the sharia business unit.
 - Supervising the product development process from its initiation up to the launching stage.
 - Providing sharia-based recommendations on new products and/or restructured funding.

- Memberikan opini Syariah terhadap produk baru dan atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
 - Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru UUS Bank BTN.
3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana butir-butir di atas akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan terbaru.

Laporan Kerja Dewan Pengawas Syariah

Selama Tahun 2009, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan pertemuan baik internal maupun eksternal dengan hasil sebagai berikut:

1. Memberikan opini mengenai produk dan layanan Bank BTN Syariah, yaitu Produk Giro Investa Batara iB, pemberian hadiah undian, produk Deposit on Call, Pembiayaan Gadai BTN iB, Pembiayaan PUM Jamsostek, Pembiayaan SYUKUR BTN iB, Kartu ATM Batara Syariah, pembiayaan premi asuransi jiwa dan pembiayaan Gold Bar BTN iB.
2. Memberikan opini mengenai:
 - Mekanisme kerjasama UUS Bank BTN dengan PT. Sarana Multigriya Finance mengenai *Refinancing Portfolio* KPR BTN iB.
 - Ketentuan kesepakatan jadwal pembayaran angsuran pada jual beli rumah dengan *Akad Istishna*.
 - Ketentuan Pembiayaan Modal Kerja dengan Skema PRK (Pembiayaan Rekening Koran) Syariah.
 - Ketentuan Produk Pembiayaan Konsumtif (Multijasa).
 - Ketentuan pengenaan charge denda kepada Developer mitra kerjasama KPR Indensya BTN iB yang wanprestasi dalam penyelesaian pembangunan rumah sesuai dengan yang disepakati.
 - Penyelesaian perselisihan Akad Syariah.
3. Menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah semester 1 (Januari – Juni 2009).
4. Melakukan evaluasi progress tindak lanjut penyelesaian permasalahan pembiayaan dan kesesuaian upaya tindak lanjut tersebut dari *Sharia Compliance*.
5. Mewakili Bank BTN dalam Ijtima Sanawy DSN MUI dengan tema 'Revitalisasi peran DPS pada LKS/LBS di Indonesia'.
6. Menyampaikan usulan pembahasan optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam rangka melaksanakan Peraturan Bank Indonesia tentang GCG dari DSN MUI.

Working Report by the Shariah Supervisory Board

Throughout 2009, the Shariah Supervisory Board has conducted both internal and external meetings with the following resolutions:

1. Providing opinions for Bank BTN sharia products and services: Investa Batara iB Demand Deposit, lottery prizes, Deposits on Calls, BTN iB Pawn Funding, PUM Jamsostek Funding, SYUKUR BTN iB funding, Batara Sharia ATM Card, life insurance premium funding and BTN iB Gold Bar funding.
2. Providing recommendations on:
 - Collaboration mechanism between Bank BTN's sharia business unit and PT. Sarana Multigriya Finance on BTN iB Mortgage Portfolio Refinancing.
 - Requirements on the installment schedule on housing transactions with Akad Istishna.
 - Requirements on the Working Capital Financing with PRK Shariah Scheme (Current Account Funding).
 - Requirements on Consumers Financing Product (Multijasa)
 - Requirements on penalties against defaulting partner developers in BTN iB Indensya Home Loans to complete housing projects.
 - Settlement of disagreements in Sharia Pledge.
3. Submitting the Supervisory Report of the Sharia Supervisory Board for the first semester (January – June 2009).
4. Evaluating the progress of settlements for financing issues and conformity with sharia compliance.
5. Representing Bank BTN at the Ijtima Sanawy DSN MUI event 'Revitalization of Sharia Business Unit Roles in Sharia Financial/Business Institutions in Indonesia'.
6. Submitting suggestions for discussion on optimizing the role of sharia business units and announcing the implementation of the Bank Indonesia regulation on GCG from DSN MUI.



KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Committees under the Board of Directors

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Ketetapan Direksi No. 12/DIR/DKMR/2004 tentang Komite Manajemen Risiko Bank BTN tanggal 26 April 2004, maka susunan struktur organisasi komite manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Direktur Kepatuhan
2. Sekretaris : Kepala Divisi Manajemen Risiko
3. Anggota :
 - Seluruh Direksi kecuali Direktur Utama
 - Seluruh Kepala Divisi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Tugas dan kegiatan Komite Manajemen Risiko adalah untuk memastikan bahwa Bank pada setiap waktu telah memiliki kerangka manajemen risiko yang lengkap serta efektif dan penuh kehati-hatian (*prudential principle*) untuk melindungi kepentingan baik pemegang saham maupun nasabah.

Laporan Kerja Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2009, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan 2 kali rapat tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai produk-produk baru yang akan diluncurkan Bank BTN (Kredit Kendaraan Bermotor dan Gadai BTN iB).
2. Review terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).
3. Pembahasan mengenai kebijakan, pengelolaan dan identifikasi risiko produk Kredit Modal Kerja dan Kredit Ringan Batara Pensiunan.

KOMITE ASET DAN LIABILITY (ALCO)

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Aset dan Liability (ALCO)

Berdasarkan Peraturan Direksi No. 19/PD/DTRS/2004 tentang *Asset Liability Committee* (ALCO) Bank BTN tanggal 22 Juli 2004, maka susunan struktur personil ALCO adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Direktur Utama
2. Sekretaris merangkap anggota : Direktur yang mensupervisi Treasury
3. Anggota :
 - Seluruh Direksi kecuali Direktur Utama
 - Seluruh Kepala Divisi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Komite ALCO bertugas mengelola aset dan kewajiban Bank BTN. Dalam aspek yang lebih luas, ALCO juga memiliki tugas mengelola likuiditas, pengelolaan perbedaan waktu (*management gap*), pengelolaan valuta

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

Structure, Membership and Expertise of the Risk Management Committee

Based on BOD Decree No. 12/DIR/DKMR/2004 on the Bank's Risk Management Committee dated April 26, 2004, the organizational structure of the committee is as follows:

1. Chair, Compliance Director
2. Secretary, Head of Risk Management Division
3. Members:
 - All Directors, except the President Director
 - All Division Heads

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

The duties and responsibilities of the Risk Management Committee ensure that the Bank, at anytime, has a complete, effective and prudent risk management framework to protect both its shareholders and consumers

Working Report by the Risk Management Committee

Throughout 2009, the Risk Management Committee conducted two meetings with the following:

1. Deliberation of new products to be launched by Bank BTN (vehicles loans and BTN iB Pawn).
2. Review of the Risk Management Policy Guidelines.
3. Deliberation of policies, management and identification of working capital loan products and Batara Pensiunan soft loans.

ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Structure, Membership and Expertise of ALCO

In reference to BOD Regulation No. 19/PD/DTRS/2004 on the Assets and Liabilities Committee (ALCO) dated July 22, 2004, the structure of ALCO is as follows:

1. Chair: President Director
2. Secretary cum member: Supervising Director of the Treasury
3. Members:
 - All Directors, except the President Director
 - All Division Heads

Duties and Responsibilities of the ALCO

ALCO is tasked with managing the Bank's assets and liabilities. In a greater scope, ALCO is also responsible for managing liquidity, management gaps, foreign exchange, interest rates, investments and revenue management.

asing, manajemen suku bunga, manajemen investasi dan pendapatan.

Laporan Kerja Komite ALCO

Selama tahun 2009, Komite ALCO telah mengadakan 13 kali rapat dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1. Melakukan *review* dan penyesuaian terhadap suku bunga produk Dana dan Kredit, Nisbah produk pendanaan Syariah serta marjin dan bagi hasil pembiayaan Syariah.
2. Menetapkan langkah-langkah perbaikan *Net Interest Margin* (NIM).
3. Menetapkan langkah-langkah perbaikan *Non Performing Loan* (NPL) dan Debitur Realisasi Baru Menunggak (DRBM).
4. Menetapkan kebijakan *Interest Rate Swap* (IRS) terhadap Obligasi BTN XII.
5. Menetapkan langkah-langkah bagi peningkatan penghimpunan dana dan realisasi kredit untuk pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RKAP.

KOMITE KREDIT

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Kredit

Berdasarkan Peraturan Direksi No.10/PD/DKPB/2009 tentang Komite Kebijakan Perkreditan dan Komite Kredit Bank tanggal 27 Agustus 2009, maka susunan struktur Organisasi Komite Kredit adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Direktur Utama
2. Wakil Ketua : Direktur Kredit
3. Sekretaris :
 - Kepala Divisi Pengelolaan Kredit
 - Kepala Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit
4. Anggota :
 - Direktur Akunting, Direktur Treasury dan Direktur Sekretariat Perusahaan
 - Kepala Divisi Pengelolaan Kredit, Kepala Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit, Kepala Divisi Treasury, Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis dan Kepala Divisi Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kredit

Komite Kredit bertugas untuk memberikan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemberian kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit sesuai batasan wewenangnya berdasarkan integritas profesionalisme yang dilakukan secara jujur, obyektif, cermat dan seksama.

Laporan Kerja Komite Kredit

Selama tahun 2009, Komite Kredit telah mengadakan 12 kali rapat untuk membahas dan memutuskan permohonan-permohonan kredit dengan plafon kredit yang melebihi wewenang kantor cabang dan harus diputuskan dalam Komite Kredit.

KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Kebijakan Perkreditan

Berdasarkan Peraturan Direksi Peraturan Direksi No.10/PD/DKPB/2009 tentang Komite Kebijakan

Working Report by ALCO

Throughout 2009, ALCO conducted 13 meetings, with the following resolutions:

1. Reviewing and adjusting the interest rates for funding and loan products; and funding ratios, profit sharing and margins for sharia products.
2. Determining actions to improve net interest margins.
3. Determining steps to minimize NPL and debtors who default on their first year obligations.
4. Determining interest rate swap policies for the BTN XII Bond.
5. Determining steps to increase fund acquisition and loan disbursement to achieve business plan targets.

LOAN COMMITTEE

Structure, Membership and Expertise of the Loan Committee

Based on BOD Regulation No.10/PD/DKPB/2009 on Bank Loan Policy Committees and Loan Committees dated August 27, 2009, the organizational structure of the Loan Committee is as follows:

1. Chair : President Director
2. Deputy : Loan Director
3. Secretary :
 - Head of Loan Management Division
 - Head of Loan Collection and Workout Division
4. Member :
 - Accounting Director, Treasury Director and Corporate Secretary Director
 - Head of Loan Management Division, Head of Loan Collection and Workout Division, Head of Business Policy and Development Division and Head of Sharia Division

Duties and Responsibilities of the Loan Committee

The Loan Committee is tasked with approving or rejecting loan applications, restructuring and settlements that are not aligned with the prevailing rules. The committee is also responsible for undertaking tasks related to loan disbursement, restructuring and settlement within its authority and upholding professionalism, integrity in an honest, objective, diligent and careful manner.

Working Report by the Loan Committee

In 2009, the Loan Committee conducted 12 meetings to discuss and decide on loan applications with limits exceeding the branch's authority, thus must be decided by the Loan Committee.

LOAN POLICY COMMITTEE

Structure, Membership and Expertise of the Loan Policy Committee

In reference to the BOD Regulation No.10/PD/DKPB/2009 on Bank Loan Policy Committees and Loan



Perkreditan dan Komite Kredit Bank BTN tanggal 27 Agustus 2009, maka susunan struktur Organisasi Komite Kebijakan Perkreditan adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Direktur Utama
2. Wakil Ketua : Direktur Kredit
3. Sekretaris : Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis
4. Anggota :
 - Seluruh Direksi kecuali Direktur Utama dan Direktur Kredit
 - Seluruh Kepala Divisi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Perkreditan

Tugas Komite Kebijakan Perkreditan dalam memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan kebijakan perkreditan Bank yang berupa pokok-pokok kebijakan perkreditan Bank, terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan dan bertanggung jawab menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:

- Pokok-pokok kebijakan perkreditan Bank yang telah ditetapkan sebagai pedoman Bank dalam melaksanakan kegiatan perkreditannya.
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan Bank.
- Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemberian kredit, restrukturisasi dan penyelesaian kredit.

Laporan Kerja Komite Kebijakan Perkreditan

Selama tahun 2009, Komite Kebijakan Perkreditan telah mengadakan beberapa kali rapat dengan hasil keputusan sebagai berikut:

1. Perubahan ketentuan internal mengenai Komite Kebijakan Perkreditan Bank dan Komite Kredit Perseroan.
2. Perubahan Pedoman Kebijakan Perkreditan Perseroan.
3. Perubahan ketentuan internal mengenai Kredit Usaha Rakyat.
4. Perubahan ketentuan internal mengenai Penyediaan Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja yang Sumber dananya Berasal dari Bank.

KOMITE PRODUK

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Produk

Berdasarkan Peraturan Direksi No.04/DIR/DPRT/0202 tentang Komite Produk Bank BTN tanggal 22 Februari 2002, maka susunan struktur Organisasi Komite Produk adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Direktur III
2. Anggota :
 - Seluruh Direksi, kecuali Direktur Utama
 - Seluruh Kepala Divisi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk

Komite Produk bertugas memberikan pengarahan dan pertimbangan atas rencana pengembangan produk Bank BTN sehingga produk Bank BTN yang akan dikeluarkan

Committees dated August 27, 2009, the organizational structure of the Loan Policy Committee is as follows:

1. Chair : President Director
2. Deputy : Loan Director
3. Secretary : Head of Business Policy and Development Division
4. Members :
 - All Directors, except the President Director and Loan Director
 - All Division Heads

Duties and Responsibilities of the Loan Policy Committee

The duties and responsibilities of the Loan Policy Committee are to provide inputs to the BOD on the formulation of the Bank's loan policy, which consists of key policies in bank loan activities, particularly in connection with the formulation of prudent principles for loan disbursement. The committee is also responsible for submitting periodic written reports to the BOD, with copies to the BOC, on the following:

- The Bank's key policies on loan activities.
- Conclusions of its supervision of the application and execution of the Bank's loan policy.
- The results of its monitoring and evaluation of issues related to loan disbursement, restructuring and settlement.

Working Report by the Loan Policy Committee

In 2009, the Loan Policy Committee conducted several meetings with the following resolutions:

1. Changes to internal policies on the Bank's Loan Committee and Loan Committee .
2. Changes to the Bank's Loan Policy guidelines.
3. Changes to internal policies on mass business loans.
4. Changes to internal policies on micro, small and medium business loans for investment and working capital funded by the Bank.

PRODUCT COMMITTEE

Structure, Membership and Expertise of the Product Committee

Based on BOD Regulation No.04/DIR/DPRT/0202 on Bank BTN's Product Committee dated February 22, 2002, the organizational structure of the Product Committee is as follows:

1. Chair : Director III
2. Members :
 - All Directors, except the President Director
 - Division Heads

Duties and Responsibilities of the Product Committee

The Product Committee is tasked with providing directives and recommendations on product development plans to ensure all planned products meet the prevailing standards

memenuhi ketentuan dan prosedur yang berlaku serta mempunyai daya saing dan daya tarik terhadap kompetisi pasar.

Laporan Kerja Komite Produk

Selama tahun 2009, Komite Produk telah mengadakan beberapa kali rapat dengan materi pembahasan mengenai pengembangan produk dan layanan baru sebagai berikut:

1. Pengembangan produk kredit terdiri dari kredit kendaraan bermotor dan produk *refinancing* berbasis properti hunian.
2. Pengembangan produk dan layanan Syariah yaitu Gadaai BTN iB dengan jaminan emas untuk pembiayaan Syariah.
3. Pengembangan fitur-fitur produk, yaitu *SMS Banking* dan Kartu Debit Visa.
4. Pengembangan layanan nasabah, yaitu *Payroll* dan *SPP Online*.
5. Pengembangan kerjasama pembayaran, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembelian tiket pesawat, pembayaran zakat.

LAPORAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pengarah Teknologi Informasi

Berdasarkan Ketetapan Direksi No.41/DIR/DTI/2008 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank BTN tanggal 24 Desember 2008, maka susunan struktur Organisasi Komite Teknologi adalah sebagai berikut:

1. Ketua :
Direktur Bidang Teknologi Informasi dan Direktur yang membawahi Manajemen Risiko
2. Sekretaris merangkap anggota :
Kepala Divisi Teknologi Informasi
3. Anggota :
 - Kepala Divisi Manajemen Risiko
 - Kepala Divisi Pemasaran Ritel
 - Kepala Divisi Operasi
 - Kepala Divisi Pengelolaan Kredit
 - Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis
 - Kepala Divisi Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertugas adalah memberikan pertimbangan sekaligus menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi yang diimplementasikan oleh Bank BTN untuk memberikan dukungan layanan kepada nasabahnya. Komite ini akan merumuskan arah pengembangan teknologi informasi dan strateginya untuk memenuhi kebutuhan operasional Bank BTN.

Laporan Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2009, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan 6 kali rapat dengan hasil keputusan sebagai berikut:

- Penyusunan proyek TI.
- Penataan operasional TI pasca kebakaran Menara Bank BTN.

and procedures, and have a competitive and attractive advantage in the market .

Working Report by the Product Committee

In 2009, the Product Committee conducted several meetings on product and service development, with the following agenda:

1. Loan product development: vehicle loans and home-property-based refinancing product.
2. Sharia product and service development: BTN iB Pawn with gold collateral for sharia funding.
3. Development of product features: SMS Banking and Visa Debit Card.
4. Development of customer services: Payroll and Online Tax Submission.
5. Development of payment collaboration: taxes, airlines and tithes.

INFORMATION TECHNOLOGY DIRECTING COMMITTEE REPORT

Structure, Membership and Expertise of the Information Technology Directing Committee

Based on the BOC Announcement No.41/DIR/DTI/2008 on the Information Technology Directing Committee dated December 24, 2008, the organizational structure of the committee is as follows:

1. Head :
Director of Information Technology and Director of Risk Management
2. Secretary cum member:
Head of Information Technology Division
3. Members :
 - Head of Risk Management Division
 - Head of Retail Marketing Division
 - Head of Operational Division
 - Head of Loan Management Division
 - Head of Business Policy and Development Division
 - Head of Sharia Division

Duties and Responsibilities of the Information Technology Directing Committee

The Information Technology Directing Committee is tasked with providing considerations as well as determining policy related to IT development, aimed at supporting services to customers. The committee will be formulating the direction of IT development and strategies required for the Bank's operations.

Working Report by the Information Technology Directing Committee

In 2009, the Committee conducted six meetings, with the following resolutions:

- IT project formulation
- IT operational arrangements after the fire at Bank BTN's head office



- Pengelolaan *Data Center* dan *Data Recovery Center*.
- Pembahasan mengenai hasil *assessment* aplikasi.
- Menetapkan prioritas investasi dan proyek TI Bank BTN
- Penyusunan Arsitektur TI.
- Pengembangan aplikasi *Human Resource Information System* (HRIS), *Enterprise Data Warehouse* (EDW), aplikasi e-Procurement dan Tata Kelola Asset dan implementasi pembuatan aplikasi PSAK 50/55.

- Management of Data Center and Data Recovery Center
- Deliberation of the assessment results of applications.
- Determination of investment priorities and IT projects
- IT architecture formulation
- Development of a Human Resource Information application, Enterprise Data Warehouse, e-Procurement and Asset Management procedures, and implementation of the PSAK 50/55 application.

LAPORAN KOMITE PERSONALIA

REPORT BY PERSONNEL COMMITTEE

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Personalialia

Structure, Membership and Expertise of the Personnel Committee

Berdasarkan Peraturan Direksi No.15/PD/DSDM/2008 tentang Komite Personalialia Bank BTN tanggal 28 Juli 2008, maka susunan struktur Organisasi Komite Personalialia adalah sebagai berikut:

Based on BOD Regulation No.15/PD/DSDM/2008 dated July 28, 2008 on the Bank Personnel Committee, the organizational structure of the committee is as follows:

1. Ketua :
Direktur yang mensupervisi Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Sekretaris merangkap anggota :
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia
3. Anggota :
 - Kepala Divisi Audit Internal
 - Kepala Divisi Kebijakan dan Pengembangan Bisnis
 - Kepala Divisi Pembinaan dan Penyelamatan Kredit
 - Kepala Divisi Pengelolaan Kredit
 - Kepala Divisi Pemasaran Ritel

1. Head :
Supervising Director of the Human Resources Development Division
2. Secretary cum member: Head of the Human Resources Division
3. Members:
 - Head of the Internal Audit Division
 - Head of the Business Policy and Development Division
 - Head of the Loan Collection and Workout Division
 - Head of the Loan Management Division
 - Head of the Retail Marketing Division

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Personalialia

Duties and Responsibilities of the Personnel Committee

Komite Personalialia bertugas adalah menetapkan dan memutuskan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan SDM, kenaikan dan variable imbal jasa, insentif dan kemaslahatan serta memantau dan mengawasi pelaksanaan program SDM dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SDM.

The Personnel Committee is tasked with determining the strategy, policy and human resource management systems, increments and variables for rewards and incentives, as well as monitoring and supervision of the execution of human resources programs and solving problems related to human resources.

Laporan Kerja Komite Personalialia

Working Report by the Personnel Committee

Selama tahun 2009, Komite Personalialia telah mengadakan 43 kali rapat dengan hasil keputusan sebagai berikut:

In 2009, the Personnel Committee conducted 43 meetings with the following resolutions:

1. Menetapkan promosi dan mutasi terhadap karyawan.
2. Menetapkan strategi dan program pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan karyawan.
3. Memutuskan dan menetapkan kebijakan mengenai reward berupa insentif dan sanksi bagi karyawan.
4. Menetapkan strategi dan kebijakan mengenai rekrutmen karyawan sesuai kebutuhan dan strategi bisnis Bank.
5. Menetapkan kebijakan mengenai *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) terkait dengan pencatatan saham perdana Bank BTN.

1. Determining employee promotions and mutations.
2. Determining strategies and education and training programs for employee development.
3. Determining reward policies, consisting of incentives and sanctions for employees.
4. Determining the recruitment strategy and policies based on the Bank's needs and business strategy.
5. Determining the policy for the Management and Employee Stock Allocation (MESA) in connection with Bank BTN's IPO.

SELF-ASSESSMENT TERHADAP PRAKTIK GCG

Self-Assessment on GCG Practice

Dalam implementasi GCG dibutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan Bank BTN. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis.

Seiring dengan dikeluarkannya PBI No. 8/4/PBI/2006 yang mengharuskan Bank BTN melakukan penilaian sendiri secara internal (*internal self-assessment*) terhadap pelaksanaan GCG, maka Bank BTN telah melakukan penilaian GCG secara internal sejak tahun 2007 dengan menggunakan *Metode Self-Assessment*. Hal penting lainnya yang telah dilakukan Manajemen pada 2009 adalah dengan disahkannya komitmen Manajemen untuk penerapan GCG dalam Ketetapan Direksi No.06/DIR/DK/V/2009 pada 27 Mei 2009 yaitu Pedoman GCG Bank BTN sekaligus penunjukan Koordinator dan Assessor GCG Bank BTN di setiap unit kerja Divisi Kantor Pusat.

Menurut Peraturan Bank Indonesia tersebut mewajibkan Bank BTN untuk melaporkan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku. Laporan pelaksanaan GCG untuk posisi laporan akhir Desember 2009 adalah sebagai berikut:

The implementation of GCG requires ongoing assessments to measure the progress of the implementation of GCG principles by the Bank. These assessments are useful to ensure sustainable improvements in the quality of the implementation of GCG in the business process.

Based on PBI No.8/4/PBI/2006, which requires the Bank to conduct an internal self-assessment of its GCG programs, the Bank has conducted self-assessments on its GCG programs since 2007. Another key action by the management in 2009, was to formalize the management's commitment to GCG implementation through BOD stipulation No.06/DIR/DK/V/2009 dated May 27, 2009, which serves as a guideline for the Bank's GCG programs and appoints a GCG coordinator and evaluator in every working unit in each division based in head office.

The Bank Indonesia regulation requires Bank BTN to report the implementation of its GCG programs every financial year. The report on the implementation of the Bank's GCG programs for the year ending December 2009 is as follows:

KESIMPULAN UMUM HASIL					
SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE					
NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN *)
	ASSESSED ASPECTS	WEIGHT	RANK	SCORE	NOTES*)
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,1	1,5	0,15	Komposisi, kriteria dan independensi Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank
	Execution of BOC Duties and Responsibilities	0,1	1,5	0,15	Composition, criteria and independency of BOC match the size and complexity of Bank's business
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,2	1,5	0,3	Komposisi, kriteria dan independensi Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.
	Execution of BOC Duties and Responsibilities	0,2	1,5	0,3	Composition, criteria and independency of BOD match the size and complexity of Bank's business
	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0,1	2	0,2	Komposisi dan kompetensi komite sesuai dibandingkan dengan ukuran kompleksitas usaha Bank, namun masih terdapat kelemahan minor
	Completeness and Execution of Committees' Tasks	0,1	2	0,2	Committees' composition and competency match the size and complexity of Bank's business, yet minor weaknesses still prevail



SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

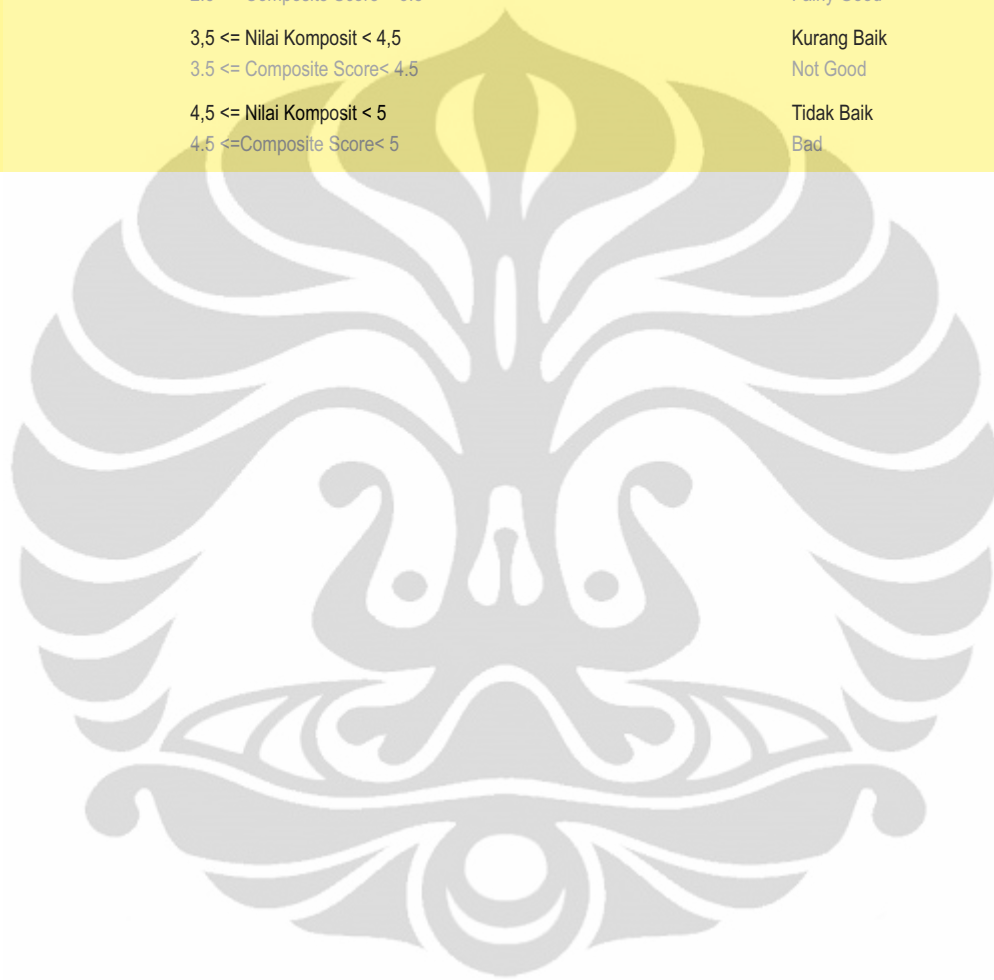
NO	ASPEK YANG DINILAI ASSESSED ASPECTS	BOBOT WEIGHT	PERINGKAT RANK	NILAI SCORE	CATATAN *) NOTES *)
	Penanganan Benturan Kepentingan	0,1	1	0,1	Bank telah dapat mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank melalui kebijakan internal Bank.
	Handling of Conflict of Interests	0,1	1	0,1	Bank through its internal policy has prevented or avoid the conflict of interest cases that could inflict losses on the Bank.
	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0,05	2	0,1	Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik.
	Implementation of Compliance Function	0,05	2	0,1	The Compliance function undertaken by Compliance Director and Compliance Unit has proceeded well based on the their duties and authority, in which such elements have maintain their independency properly.
	Penerapan Fungsi Audit Internal	0,05	1	0,05	Organisasi dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah berjalan dengan baik dan efektif atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.
	Implementation of Internal Audit Functions	0,05	1	0,05	The organization and function of the Bank's Internal Audit Unit has run well and effectively with regard all aspects and components in the Bank's activities
	Penerapan Fungsi Audit Eksternal	0,05	1	0,05	Pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi prinsip-prinsip GCG seperti yang tercantum dalam PBI No. 8/4/PBI/2006.
	Implementation of External Audit Function	0,075	1	0,05	The implementation to appoint Public Accountant and Public Accounting Firm has meet GCG principles as stated in PBI No. 8/4/PBI/2006.
	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal	0,075	1,5	0,1125	Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal Bank telah berjalan efektif dalam melakukan identifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank termasuk risiko dari produk dan aktifitas baru.
	Implementation of Risk Management and Internal Control Function	0,075	1	0,15	The function of Risk Management and Internal Control have run effectively in identifying and controlling all risks, including riks derived from new products and activities.

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

NO	ASPEK YANG DINILAI ASSESSED ASPECTS	BOBOT WEIGHT	PERINGKAT RANK	NILAI SCORES	CATATAN *) NOTES *)
	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures)	0,75	2	0,15	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang <i>up-to-date</i> dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, tidak pernah ada pelanggaran BMPK, diversifikasi penyediaan dana merata, pengambilan keputusan dilakukan secara independen.
	Fund provision to related party and large exposures	0,15	2	0,15	Bank has updated and complete written policy, system and procedure in place in the event fund provision to related party and large exposures; there were no breach against BMPK, even diversification of fund provision, and decisions were independently made.
	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	0,15	2	0,05	Bank telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam penyediaan informasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan PBI No. 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan.
	Transparency of Financial and Non Financial Condition, Report on GCG Implementation and Report on Internal Transparency	0,15	2	0,05	Bank has fully met the GCG principles in providing financial and non financial information based on the PBI No.3/22/PBI/2001 on the Transparency of Financial Condition.
	Rencana Strategis Bank	0,05	1	0,05	Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank, disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat
	Bank's Strategic Plan	0,05	1	0,05	Bank's business plan conforms its vision and mission as well as its corporate plan, formulated in a very realistic manner and have taken consideration all external and internal factors, prudent principles and sound banking principles.
Nilai Komposit / Composite Score			1	1,56	Baik / Good



NILAI KOMPOSIT COMPOSITE SCORE	PREDIKAT RATING
Nilai Komposit < 1,5 Composite Score < 1.5	Sangat Baik Very Good
1,5 <= Nilai Komposit < 2,5 1.5 <=Composite Score < 2.5	Baik Good
2,5 <= Nilai Komposit < 3,5 2.5 <= Composite Score < 3.5	Cukup Baik Fairly Good
3,5 <= Nilai Komposit < 4,5 3.5 <= Composite Score < 4.5	Kurang Baik Not Good
4,5 <= Nilai Komposit < 5 4.5 <=Composite Score < 5	Tidak Baik Bad





TUJUAN KAMI, BERMAKNA BAGI SESAMA

Bank BTN memiliki tanggung jawab untuk senantiasa memberi makna dalam setiap langkah bisnis yang diambil. Tanggung jawab sosial Perusahaan, bagi Bank BTN, tak sekedar kewajiban tetapi mengambil bagian dalam membangun kesejahteraan bersama.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibilities



Our Mission, Being Meaningful to Others

Bank BTN is responsible for giving meaning to every business step it takes. For the Bank, corporate social responsibility is not merely an obligation, but serve as a mean building welfare for others.

FILOSOFI CSR

CSR Philosophy

Sebagai bank yang telah melayani masyarakat Indonesia sejak tahun 1897. Bank BTN telah membuktikan kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal berkontribusi menyediakan perumahan bagi mereka. Semangat untuk melayani inilah yang mendasari pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) selama ini.

Bank BTN berupaya mewujudkan nilai kehidupan dalam kesejahteraan, maka kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni nasabah, karyawan, mitra bisnis, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan sekitar menjadi titik pijakan bisnis kami.

Upaya tersebut adalah perwujudan dari filosofi dan tujuan kegiatan CSR Perusahaan yang tercantum sebagai berikut :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki lingkungan.
- Mengembangkan nilai dan budaya Bank yang sesuai dengan *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan yang berlaku.
- Membentuk citra Bank yang positif di mata publik.
- Meningkatkan kerjasama dan saling menghormati dengan masyarakat dan lingkungan sekitar tempat beroperasinya kantor-kantor Bank BTN.

Dalam praktiknya, Bank BTN tidak hanya melakukan program pemberian bantuan (*charity*) hanya untuk sekedar memenuhi kewajiban atau karitatif semata. Namun lebih jauh, Bank BTN berkomitmen untuk menjadikan filosofi dan tujuan CSR sebagai bagian tak terpisahkan dengan strategi bisnis di semua lini.

Aktifitas CSR Bank BTN pun berpijak pada konsep pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Karena kesejahteraan masyarakat dan bangsa juga berarti keberhasilan Bank BTN memberikan bagian terbaik yang dimiliki untuk sebuah kebersamaan. Demi memenuhi cita bersama tersebut, Bank BTN memfokuskan aktivitas CSR pada tiga bidang yakni meliputi:

EKONOMI

Sektor ekonomi menjadi titik pijakan kegiatan CSR Bank BTN mengingat hampir seluruh aktifitas dalam kehidupan terkait dengan sektor ini. Terutama melihat bisnis utama Bank BTN yang bergerak di bidang perbankan dan perumahan rakyat. Adapun kegiatan CSR di bidang ekonomi adalah kegiatan-kegiatan yang berdampak pada peningkatan peluang kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan dan penurunan kemiskinan di masyarakat. Bidang ini antara lain mencakup pengembangan koperasi, lembaga keuangan mikro, usaha dan industri mikro, teknologi kewirausahaan, pasar dan pemasaran, infrastruktur ekonomi, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan. Memberikan bantuan bagi pengembangan

Serving the nation since 1897, Bank BTN has demonstrated its concern towards the public's needs through its contributions to providing housing for them. We base our Corporate Social Responsibility (CSR) programs on this spirit to serve.

As Bank BTN works hard to create prosperous living standards for all, and the interests of our stakeholders, which include customers, employees, business partners, shareholders, communities and the environment, have become our business standpoint.

Bank BTN realizes its CSR philosophy and objectives through the following programs:

- Improving public welfare and the environment.
- Developing values and culture in line with GCG and prevailing regulations.
- Creating a positive image among the public
- Enhancing partnerships and mutual respect with the communities and environment where Bank BTN operates.

In practice, Bank BTN's charity program is not merely an obligation or requirement that must be fulfilled. Bank BTN is committed to cultivating the philosophy and objectives of its CSR programs as an integral part of its business strategies in all of its business lines.

The concept of sustainable community development is the foundation for our CSR activities. Bank BTN believes that the people's and nation's prosperity is a reflection of our accomplishments in delivering our best to build togetherness. To fulfill these common aspiration, Bank BTN focuses its CSR activities on the following three areas:

ECONOMIC

As almost all human activities are connected with economics, this sector has been established as the foundation for Bank BTN's CSR activities. The economy is also relevant to the bank's core business in the banking and housing sectors. The activities in this sector comprise ones that have impacts in increasing job and business opportunities, income improvement and poverty eradication in the society. Our CSR programs in the economic sector include the development of cooperatives, microfinance institutions, micro businesses and industries, entrepreneurship technologies, market and marketing, economic infrastructure, agriculture, plantations, fisheries, farming and food security. Bank BTN's is committed to extending assistance



usaha mikro menjadi komitmen bagi Bank BTN untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Filosofi lebih baik memberi kail daripada umpan itu yang selalu dipegang, karena kemampuan untuk berjuang demi penghidupan yang layak itulah yang ingin ditekankan.

LINGKUNGAN

Berbicara tentang kelestarian lingkungan hidup, Bank BTN memiliki semangat tinggi untuk mewujudkan keseimbangan dalam fungsi ekologi. Di tengah tingkat kerusakan lingkungan hidup yang makin menjadi, Bank BTN justru makin menggalakkan program CSR di bidang lingkungan. Adapun kegiatan yang dilakukan Bank BTN di bidang ini mencakup manajemen lingkungan, reboisasi, infrastruktur air bersih dan pengairan, pengendalian polusi udara, air dan tanah, lingkungan pemukiman (drainase dan penanganan banjir), serta penghematan energi.

SOSIAL

Dalam bidang sosial, Bank BTN senantiasa mengedepankan memberi dengan hati dalam bidang-bidang yang tersentuh pelayanan sosialnya seperti di bawah ini:

- Pendidikan, mencakup pemberian kemudahan akses memperoleh pendidikan, pemberian *training* atau pelatihan dan peningkatan infrastruktur pendidikan.
- Kesehatan, meliputi pemberian kemudahan pengobatan, peningkatan layanan dan infrastruktur kesehatan.
- Seni dan Budaya, diwujudkan dalam upaya pelestarian seni dan budaya serta peningkatan infrastruktur seni dan budaya.
- Olahraga, mencakup peningkatan prestasi dan infrastruktur olahraga.
- Keagamaan, dilakukan dengan peningkatan infrastruktur dan kegiatan keagamaan.

Selain ketiga kegiatan di atas, Bank BTN juga melaksanakan program CSR yang bersifat insidental. Kegiatan insidental ini untuk meringankan beban masyarakat akibat musibah atau dampak kondisi perekonomian tertentu. Kegiatan ini mencakup antara lain bantuan bagi korban gempa, banjir dan kerusakan fasilitas umum.

for microbusinesses to improve the people's welfare. 'Teach a man to fish and he will eat for a lifetime' is the fundamental philosophy Bank BTN refers to in building its ability to fight for a better life.

ENVIRONMENT

In regards to environmental preservation, Bank BTN is determined to achieve balance ecological through its activities. In facing increasing environmental damage, Bank BTN has been intensifying its CSR programs in the environmental sector, which include environmental management; reforestation; clean water infrastructure and irrigation; air, water, and soil pollution control; residential environment development (drainage and flood management) and energy saving.

SOCIAL

In the social sector, Bank BTN is committed to giving from the heart in fields engaged with social activities:

- Education, including access to education, trainings and workshops and improvements in educational infrastructure.
- Health, including access to medical treatments, services and infrastructure.
- Arts and Culture, through efforts to preserve arts and culture; and improve infrastructure support arts and culture
- Sports, including increasing achievements in sports and infrastructure.
- Religion, through participation in infrastructural improvements and religious activities.

Other than the abovementioned activities, Bank BTN also carries out incidental CSR programs aimed at alleviating burdens on the public due to disasters or economic challenges. These activities include extending assistance to earthquake and flood victims and repairing damages to public facilities.

BERKONTRIBUSI MELALUI KOMITMEN BERKESINAMBUNGAN

Contributed through Sustainable Commitment

Di tahun 2009, Bank BTN melalui program Bina Lingkungan mengalokasikan Rp 7.636.928.796 untuk semua kegiatan CSR baik itu yang telah terencana maupun insidental. Adapun rincian dana yang telah dikeluarkan adalah sebagai berikut:

BANK BTN GREEN COMMUNITY

Dari tanggal 20 Juni hingga 29 Agustus 2009, Bank BTN bekerja sama dengan Harian Republika menyelenggarakan "Bank BTN Green Community". Program ini diisi dengan aktifitas seperti pelatihan, sosialisasi dan pendampingan kepada warga di Perumahan Villa Bogor Indah dan sekitarnya dalam hal pengelolaan sampah. Adapun total bantuan untuk kegiatan ini yakni sebesar Rp 288.697.500.

Dalam program yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ini, warga dibekali pelatihan mengenai pembuatan sumur biopori, pupuk kompos, kertas daur ulang dan bentuk-bentuk pengelolaan sampah lainnya. Ke depan, diharapkan warga dapat menggunakan ketrampilan mengelola sampah ini untuk ditularkan kepada warga lain, sehingga kesadaran untuk mulai memperhatikan pengelolaan sampah dapat menjadi gaya hidup masyarakat secara perlahan tapi pasti.

BANTUAN SOSIAL KEPADA WARGA SURABAYA

Bantuan sosial Bank BTN juga menyentuh wilayah Surabaya dan sekitarnya. Beberapa bantuan yang diberikan langsung pada tanggal 25 Juni 2009 adalah:

- Bantuan kepada Kick Andy Foundation sebesar Rp 250.000.000 untuk mendukung Gerakan 1.000 kaki palsu, yaitu pengadaan kaki palsu yang dibuat sendiri oleh penyandang cacat kaki dan diperuntukkan bagi para penyandang cacat kaki secara gratis.
- Program pelatihan dan penyuluhan bagi penanggulangan kanker serviks di RS Dr. Soetomo Surabaya sebesar Rp 75.000.000
- Pembangunan klinik KUKM Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah sebesar Rp 75.000.000
- Bantuan perbaikan sarana pendidikan sebesar Rp 100.000.000 bekerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya.

MUDIK BERSAMA BANK BTN "TERASE ASIK"

Sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada para pekerja sektor informal di proyek perumahan yang dibiayai Bank BTN dan di sekitar kantor Bank BTN, Bank BTN memberikan fasilitas mudik bersama kepada 1.000 pekerja informal untuk dapat menikmati Hari Raya di kampung halamannya. Pemberangkatan para pekerja informal ini ke Yogyakarta, Solo dan Semarang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2009 di Bank BTN Kantor Cabang Bekasi. Selain mendapatkan fasilitas

In 2009, Bank BTN allocated Rp 7,636,928,796 through its 'Bina Lingkungan' program for both planned and incidental CSR activities. The breakdown of funds spent is as follows:

BANK BTN GREEN COMMUNITY

From June 20 to August 29, 2009, Bank BTN collaborated with Republika Daily to hold "Bank BTN Green Community." The program provided workshops, socialization and coaching on waste management for residents in Villa Bogor Indah housing estate and surrounding areas. Total assistance for this program was Rp 288,697,500.

As the program was aimed at environmental preservation, participants were involved workshops on making biopori wells, producing compost, recycling paper and other environmentally friendly ways of processing waste. In the future, the participants are expected to utilize these skills and transfer them to other residents in order to raise awareness of recycling as a lifestyle.

SOCIAL ASSISTANCE TO SURABAYA RESIDENTS

Bank BTN also provided assistance to Surabaya and surrounding areas. The following donations were given directly to the beneficiaries on June 25, 2009:

- Donation to Kick Andy Foundation, totalling Rp 250,000,000, to provide 1,000 prosthetic legs made by and given to people with leg disabilities free of charge.
- Trainings and seminars on cervical cancer at Dr. Soetomo Hospital Surabaya, amounting to Rp 75,000,000
- Building a KUKM clinic at the Faculty of Economics, Airlangga University, to support the development of small and medium enterprises, amounting to Rp 75,000,000.
- Donation for the renovation of educational facilities in collaboration with the Surabaya regional government, for a total of Rp 100,000,000.

"TERASE ASIK" VISITING HOMETOWN PROGRAM WITH BANK BTN

As a token of its appreciation to the informal workers in housing projects financed by Bank BTN and areas surrounding Bank BTN's offices, Bank BTN provided facilities for 1,000 workers to celebrate going home for the Eid-ul Fitr holidays. The departure of workers to Yogyakarta, Solo and Semarang was on September 13, 2009 from the Bank BTN branch in Bekasi. In addition to transportation, the participants received parcels



transportasi, peserta mudik bersama juga mendapatkan bingkisan dan makanan selama perjalanan. Ini merupakan program mudik bersama kedua kalinya yang dilakukan oleh Bank BTN setelah Tahun 2008.

BEASISWA KEPADA PUTRA-PUTRI DEBITUR KPR BANK BTN

Melanjutkan program yang sama pada tahun sebelumnya, Bank BTN memberikan beasiswa kepada 122 putra/putri debitur KPR BTN di wilayah Jabodetabek. Beasiswa diberikan kepada putra-putri debitur KPR BTN yang memiliki prestasi akademik yang baik dan berasal dari keluarga yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan di tingkat SMA. Setiap siswa diberikan bantuan pendidikan dan buku untuk jangka waktu 1 tahun. Total bantuan program ini sebesar Rp 221.093.280. Pemberian beasiswa ini merupakan wujud kepedulian Bank BTN kepada para debitur KPR yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan Bank BTN.

OPERASI JANTUNG ANAK

Kepedulian terhadap anak-anak yang tidak mampu terutama yang menderita sakit, juga menjadi perhatian program CSR Bank BTN. Tingginya biaya kesehatan menjadi faktor utama aksesibilitas sarana kesehatan yang sulit dijangkau oleh masyarakat yang kurang mampu. Bekerja sama dengan Yayasan Jantung Anak Indonesia, Bank BTN memberikan bantuan operasi kepada 2 anak penderita sakit jantung yang berasal dari keluarga tidak mampu. Jumlah bantuan yang diberikan kepada keluarga tersebut sebesar Rp 123.000.000.

BANTUAN BENCANA ALAM DI PADANG

Peristiwa bencana alam gempa bumi di beberapa wilayah di Indonesia pada akhir September 2009 telah menghancurkan rumah dan fasilitas umum termasuk sekolah. Mengingat pentingnya sarana pendidikan yakni bangunan sekolah maka Bank BTN membantu

and food during the trip. This program was held for the second time in 2009.

SCHOLARSHIPS FOR THE CHILDREN OF BANK BTN MORTGAGE HOLDERS

Continuing with a similar program which started in 2008, Bank BTN granted scholarships to 122 children of the Bank's mortgage holders to pursue their studies in high school. Recipients were required to have good academic records and come from lower-income families. Each student received assistance for their school fees and books for one year. The total assistance amounted to Rp 221,093,280. The scholarships were part of Bank BTN's concern for its customers, who are part of the Bank's stakeholders.

CHILDREN HEART SURGERY

Care for children from lower-income families, particularly those suffering from diseases, is one area of focus for our CSR programs. High medical costs is a main factor limiting access to healthcare for lower-income communities. In collaboration with Yayasan Jantung Anak Indonesia, Bank BTN provided assistance to two children suffering from heart problems. The total donations to the families amounted to Rp 123,000,000.

ASSISTANCE FOR NATURAL DISASTER IN PADANG

The earthquake that struck several parts of Indonesia at the end of September 2009 damaged houses and public facilities, including schools. Given the urgency for educational infrastructure, Bank BTN assisted the reconstruction of Elementary School 50 in Koto

proses pembangunan kembali SDN 50 Kecamatan Koto Tengah, Padang. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 780.000.000. Selain untuk rehabilitasi sekolah, Bank BTN juga memberikan bantuan tanggap darurat berupa makanan dan obat-obatan untuk korban bencana gempa bumi di Padang dan sekitarnya.

Tengah sub-district, Padang. Bank BTN provided Rp 780,000,000 for the reconstruction, and delivered emergency assistance, including food and medicine, for the earthquake victims in Padang and surrounding areas.

BANTUAN PROGRAM KEMITRAAN

Sebagai bentuk kepedulian Bank kepada masyarakat di bidang ekonomi, Bank BTN memberikan pinjaman modal kerja kepada lebih dari 400 petani tebu di PTPN X Surabaya dan petani *cassava* di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

ASSISTANCE FOR PARTNERSHIP PROGRAMS

As a token of its appreciation to the public, Bank BTN has distributed working loans to more than 400 sugar cane farmers in PTPN X Surabaya and cassava farmers in Enrekang District, South Sulawesi.

JUMLAH BIAYA KEGIATAN CSR PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK 2009
TOTAL AMOUNT FOR CSR ACTIVITIES OF PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK 2009

No.	Uraian Kegiatan Description	Jumlah (Rp.) Amount (Rp.)
1.	Bantuan Korban Bencana Alam Donation to the Victims of Natural Disasters	1.429.145.660
2.	Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Assistance for Education and Training	1.474.312.535
3.	Bantuan Peningkatan Kesehatan Assistance for Health Improvement	506.366.101
4.	Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum Assistance for Public Facilities and Infrastructures	1.408.727.000
5.	Bantuan Sarana Ibadah Assistance for Worship Facilities	2.261.180.000
6.	Bantuan Pelestarian Alam Assistance for Environmental Perserevance	657.197.500
Total		7.636.928.796



MELAYANI DENGAN SEPENUH HATI

Serving from the Heart

Komitmen untuk memberikan layanan terbaik juga menjadi fokus perhatian Bank BTN terutama bagi nasabah. Mengelola bisnis bagi Bank BTN tak sekedar berorientasi profitabilitas tetapi mewujudkan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bertransaksi terus diupayakan melalui berbagai program.

Sebagai bank yang konsisten dengan bisnis utama di bidang pembiayaan perumahan, Bank BTN terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik. Terbukti dengan beberapa penghargaan yang diraih, salah satunya dari Majalah Infobank yakni bank berpredikat "Sangat Baik" untuk kategori "Bank dengan Kegiatan Usaha Terfokus Pada Segmen Usaha Tertentu – Modal Rp 100 miliar sampai dengan Rp 10 triliun". Pencapaian tersebut semakin mendorong Bank BTN untuk terus mengelola layanan dan penyempurnaan penerimaan dan umpan balik keluhan, pengaduan dan pertanyaan dari para nasabah dan calon nasabah.

BTN CARE

Sebagai salah satu bentuk layanan kepada nasabah, Bank BTN menyediakan beberapa pintu bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan, pengaduan dan pertanyaan. Di seluruh *outlet* Bank BTN, baik kantor cabang, kantor cabang pembantu maupun kantor pos *online*, nasabah dapat menyampaikan permasalahannya kepada *customer service officer* Bank BTN. Dengan mengusung perilaku 'pelayanan prima' yang menjadi nilai dasar budaya kerja Bank BTN, *Customer Service* akan melayani dan menyelesaikan permasalahan nasabah terkait dengan transaksi, produk dan layanan Bank BTN.

Media lainnya adalah program BTN Care melalui situs Bank BTN berupaya untuk menjalin hubungan dengan para nasabah maupun calon nasabah melalui komunikasi dua arah. Nasabah maupun calon nasabah dapat mengajukan pertanyaan melalui form pengaduan dan pertanyaan serta menyampaikan pertanyaan, keluhan atau pengaduan mengenai layanan dan informasi produk. Bank BTN akan menjawab setiap pertanyaan dan pengaduan dan dapat dilihat di halaman situs BTN Care.

Selain itu, Bank BTN juga memiliki media komunikasi yang dapat dihubungi melalui telepon yakni *contact center* dengan nomor 021-26533555, *contact center* memberikan informasi mengenai fitur produk dan layanan serta menindaklanjuti komplain dan saran nasabah.

PENERIMAAN PENGADUAN DAN SARAN PELANGGAN

Sepanjang tahun 2009, Bank BTN menerima pengaduan, keluhan dan saran dari nasabah yang datang ke *outlet-outlet* Bank BTN sejumlah 3.622 pengaduan. Sementara itu, pengaduan dan pertanyaan melalui situs Bank BTN (BTN Care) berjumlah rata-rata 57 pengaduan setiap bulannya.

Bank BTN is committed to delivering the best services. Running a business cannot simply be profit oriented, but must also seek to continuously provide ease, security and comfort for its customers.

As a bank whose main focus is housing finance, Bank BTN strives to provide best services. Its efforts to do so are illustrated in the number of accolades received by the Bank; including the "Sangat Baik" or "Excellent" rating in the "Bank with Focus on a Particular Business Segment – with Capital from Rp 100 billion up to Rp 10 trillion" category, awarded by Infobank Magazine. This award has further encouraged Bank BTN to continue to manage its services well and enhance the way it accommodates complaints, feedback, comments and queries from customers and prospective customers.

BTN CARE

One way to show our commitment to our customers through our services is by dedicating a number of channels for customers to submit complaints, comments and queries. In every branch, sub-branch and online post office, customers can address their problems with our customer service officers. With the 'Service Excellence,' which is the basis of our core working attitude, our customer service will help to solve customers' problems related to Bank BTN's banking transactions, products and services.

Bank BTN also provide the BTN Cares program on our website, through which Bank BTN is committed to maintaining its relationships with customers and prospective customers by utilizing two-way communication. Customers and prospective customers can submit their queries through the complaint and query form. They can also submit questions, complaints or comments about service and product information. Bank BTN responds to all queries and complaints on the BTN Cares webpage.

In addition, Bank BTN has contact center which can be reached by telephone at 021-26533555. The contact center provides information on product and service features, and follows up on complaints and suggestions.

HANDLING CUSTOMERS' COMPLAINTS AND SUGGESTIONS

In 2009, Bank BTN received a total of 3,622 comments, complaints and suggestions from customers visiting the Bank's outlets. The average number of complaints and queries via BTN Care was 57 per month. Other complaints and suggestions were submitted through the contact center, which commenced operations in 2009.



Pengaduan dan saran lainnya diterima dari nasabah maupun calon nasabah melalui *contact center*, yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Melalui media-media komunikasi tersebut, Bank BTN akan mengolah setiap keluhan, pengaduan dan saran yang diajukan. Selanjutnya, Bank BTN akan memberikan umpan balik yang sesuai baik itu terkait informasi produk, layanan maupun solusi terhadap permasalahan yang mungkin ditimbulkan.

UMPAN BALIK PENGADUAN NASABAH

Adapun Bank BTN terus berupaya memperhatikan setiap kebutuhan dan keinginan nasabah. Melalui sarana pengaduan, keluhan dan saran yang disampaikan melalui berbagai media komunikasi, Bank BTN berusaha untuk memberikan umpan balik semaksimal mungkin. Dari berbagai keluhan, pengaduan dan saran yang masuk, Bank BTN berupaya untuk menanggapi semua pengaduan yang diterima.

PENGEMBANGAN PENANGANAN PENGADUAN NASABAH

Bank BTN senantiasa berusaha memberikan layanan terbaik agar semua pemangku kepentingan mendapat manfaat dan nilai tambah yang optimal.

Maka ke depan, Bank BTN akan terus mengembangkan dan melakukan penyempurnaan prosedur maupun penanganan pengaduan, keluhan dan saran yang diterima. Sehingga umpan balik yang diterima oleh nasabah maupun calon nasabah dapat memenuhi kebutuhan terhadap informasi seputar Bank BTN yang diperlukan.

Through the above media, Bank BTN processed every complaint, comment and suggestion it received and provided relevant feedback on products and services as well as providing solutions for problems.

FEEDBACK TO CUSTOMERS' COMPLAINTS

Bank BTN constantly strives to attend to all of our customers' needs and expectations. Bank BTN aims to provide feedback to complaints, comments and suggestions received via various media in the most optimal way. Bank BTN puts effort into responding to all complaints, comments and suggestions received.

IMPROVEMENTS IN HANDLING CUSTOMERS' COMPLAINTS

Bank BTN always strives to provide the best services, which are accessible by all of our stakeholders to provide them with optimal benefits and added value.

Moving ahead, Bank BTN will continue to develop and enhance our procedures and the way in which we handle complaints, comments and suggestions to meet the need for information on the Bank required by our customers and prospective customers.

MENILIK RENCANA CSR KE DEPAN

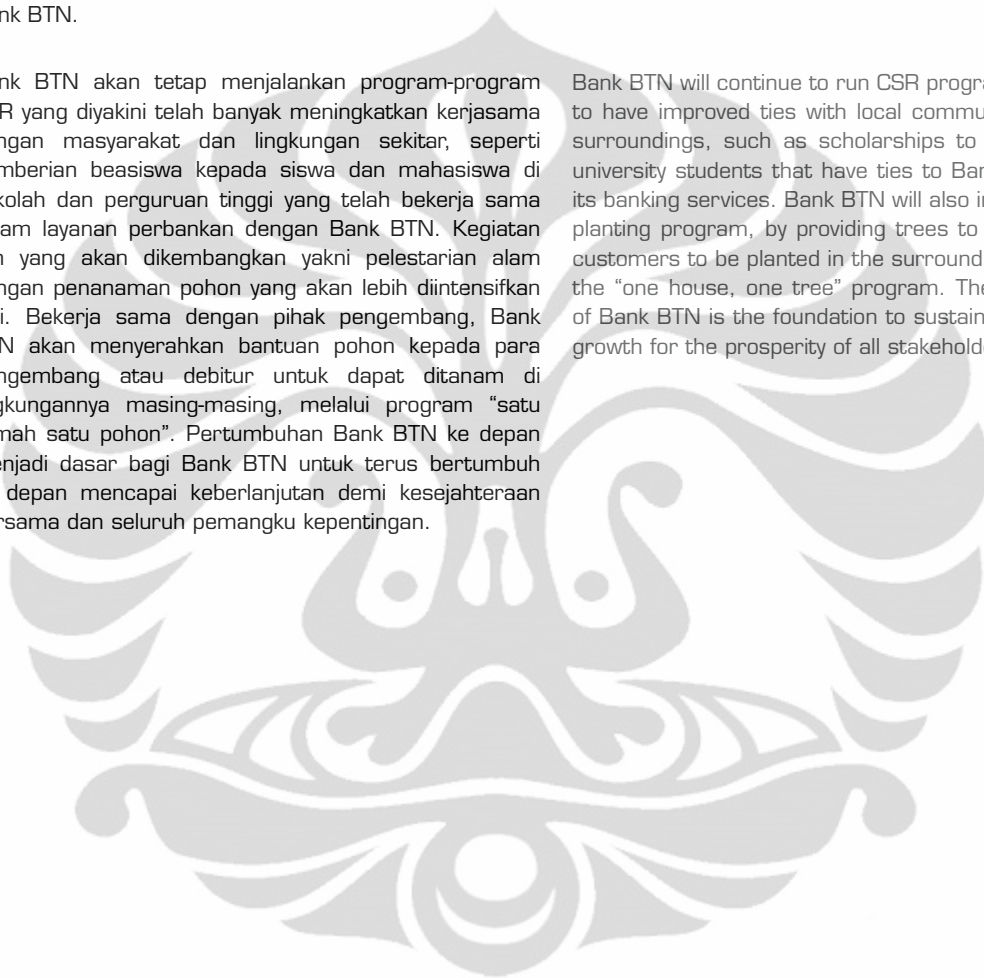
Kegiatan CSR Bank BTN telah berkembang dari tahun ke tahun, baik itu dilihat dari jenis kegiatan maupun jumlah bantuan yang diberikan. Bank BTN juga melibatkan seluruh kantor cabang dan kantor cabang syariah untuk melaksanakan kegiatan CSR. Ke depan, Bank BTN masih akan melanjutkan kegiatan-kegiatan CSR pada bidang-bidang yang telah ditentukan yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Selain itu, jangkauan sasaran program CSR juga akan diperluas ke seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan pengembangan jaringan kantor Bank BTN.

Bank BTN akan tetap menjalankan program-program CSR yang diyakini telah banyak meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti pemberian beasiswa kepada siswa dan mahasiswa di sekolah dan perguruan tinggi yang telah bekerja sama dalam layanan perbankan dengan Bank BTN. Kegiatan lain yang akan dikembangkan yakni pelestarian alam dengan penanaman pohon yang akan lebih diintensifkan lagi. Bekerja sama dengan pihak pengembang, Bank BTN akan menyerahkan bantuan pohon kepada para pengembang atau debitur untuk dapat ditanam di lingkungannya masing-masing, melalui program "satu rumah satu pohon". Pertumbuhan Bank BTN ke depan menjadi dasar bagi Bank BTN untuk terus bertumbuh ke depan mencapai keberlanjutan demi kesejahteraan bersama dan seluruh pemangku kepentingan.

A GLIMPSE INTO THE FUTURE

Bank BTN's CSR activities have been growing from year to year, both in range of activities and amount of assistance distributed. Bank BTN has involved all standard branches and sharia branches in its CSR activities. In the future, Bank BTN will continue to carry out its CSR programs in the economic, environment and social sectors and will expand these programs throughout Indonesia, in line with the development of the Bank's network.

Bank BTN will continue to run CSR programs considered to have improved ties with local communities and their surroundings, such as scholarships to high school and university students that have ties to Bank BTN through its banking services. Bank BTN will also intensify its tree-planting program, by providing trees to developers and customers to be planted in the surrounding areas under the "one house, one tree" program. The future growth of Bank BTN is the foundation to sustain its progressive growth for the prosperity of all stakeholders.



MERAIH PELUANG KE DEPAN

Bank BTN telah dikenal unggul dalam hal penguasaan nasabah untuk sektor kredit perumahan dan jaringan yang luas. Berbekal dua hal tersebut tersebut, ke depan Bank BTN berharap dapat mengembangkan peluang bisnis.



PROSPEK USAHA, KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN STRATEGI

Business Prospect, Competitive Advantage and Strategy

Embracing Future Opportunities

Bank BTN is known for its excellence in dominating the housing finance sector and its wide network. These two advantages, will develop the Bank's business opportunities.



PROSPEK USAHA

Business Prospect

Permintaan perumahan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun, meski disadari perekonomian global dan regional yang sedang menuju pemulihan pasca krisis memang membawa dampak bagi sektor perumahan di Indonesia.

Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) menilai peluang pengembangan perumahan sederhana dan rumah susun untuk kalangan menengah masih terus meningkat tahun ini baik permintaan dan penyediaannya. Hal itu disebabkan kondisi ekonomi domestik yang terus membaik bahkan REI menargetkan sekitar 50.000 unit terjual dalam tahun ini.

Didukung juga dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum bahwa dalam 5 tahun terakhir, permintaan rumah baru diperkirakan mencapai sebesar 800.000 unit, sedangkan persediaan rumah baru hanya mencapai sekitar 400.000 unit setiap tahunnya.

Peluang meningkatnya permintaan perumahan ini akan semakin diperkuat dengan beberapa faktor seperti pertumbuhan penduduk, perubahan status hukum serta regulasi kepemilikan tanah, pengembangan infrastruktur, peningkatan efisiensi pasar kredit perumahan, dan lain sebagainya.

Selain itu, dukungan pemerintah untuk memfasilitasi rumah layak huni bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah juga mendorong peluang bahwa bisnis perumahan akan terus bertumbuh. Bank BTN pun turut andil dalam program pemerintah memberikan kredit perumahan bersubsidi dimana saat ini *market share* paling besar dipegang Bank BTN.

Demand for housing in Indonesia is increasing; however, the post-crisis recovery of the global and regional economies continues to impact the housing sector in Indonesia.

The Indonesian Central Executive Real Estate Council predicts that both demand and supply for housing and apartment development for the middle class will grow to approximately 50,000 units this year due to the improved domestic economic condition.

This is supported by data from the Ministry of Public Works, which indicates that demand for new homes in the last 5 years reached 800,000 units, while the supply of new homes only reached about 400,000 units annually.

The possible increase in housing demand will be strengthened by population growth, changes in legal and regulatory status of land ownership, infrastructure development, improvements in the efficiency of mortgage markets, and other factors.

The government's support to facilitate the supply of adequate housing for mid- to lower-income communities will also push opportunities for growth in the real estate business. Bank BTN contributes to government programs by providing subsidized mortgages, and currently holds the largest market share in this market.



KEUNGGULAN KOMPETITIF

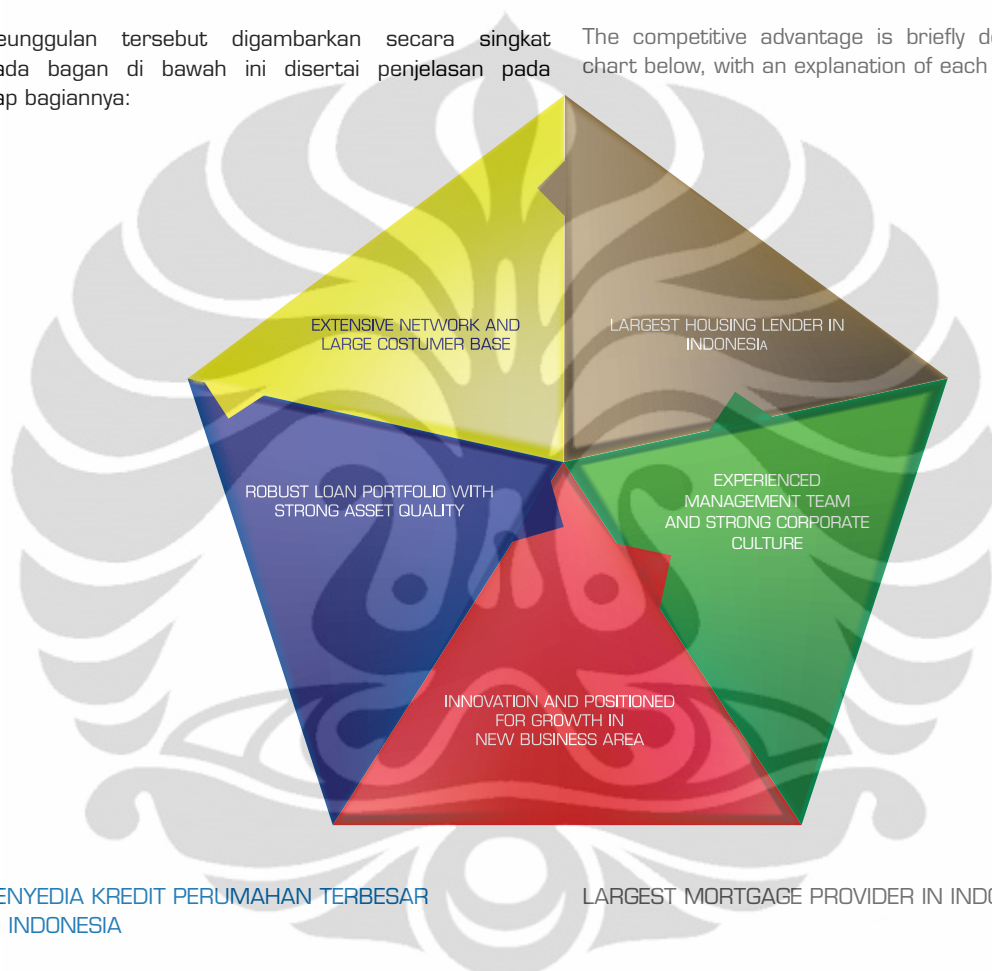
Competitive Advantage

Pencapaian sepanjang 2009 menjadi catatan bahwa ke depan dengan mengembangkan keunggulan-keunggulan dan peluang yang dimiliki, maka Bank BTN dapat bersaing kompetitif dengan bank-bank lain.

By examining the achievements of 2009 and developing strategic advantages and opportunities, Bank BTN is convinced that it can compete with other banks.

Keunggulan tersebut digambarkan secara singkat pada bagan di bawah ini disertai penjelasan pada tiap bagiannya:

The competitive advantage is briefly described in the chart below, with an explanation of each part:



PENYEDIA KREDIT PERUMAHAN TERBESAR DI INDONESIA

LARGEST MORTGAGE PROVIDER IN INDONESIA

Berdasar data Bank Indonesia, pangsa pasar yang dikuasai Bank BTN sebagai *market leader* kredit perumahan di Indonesia per akhir Desember 2009 adalah sekitar 25,6% dari jumlah seluruh kredit perumahan di Indonesia. Sedangkan untuk pasar kredit subsidi pemerintah, Bank BTN merupakan penyedia pinjaman perumahan dominan dengan 97% pangsa pasar berdasarkan data jumlah kredit baru yang dicairkan hingga per akhir Desember 2009.

Based on Bank Indonesia data, Bank BTN is the leader in the housing loan market in Indonesia, and controlled approximately 25.6% of the total mortgages in Indonesia as of end December 2009. Bank BTN is also the dominant provider of mortgages in the government-subsidized loan market, with a 97% market share based on the number of new loans disbursed by the end of December 2009.

Posisi Bank BTN sebagai pemimpin dalam pasar kredit perumahan telah membentuk citra perusahaan yang kuat, sehingga membantu Bank BTN dalam meraih pasar berbagai kelompok masyarakat.

Bank BTN's position as a leader in the mortgage market has formed a strong company image, and helped the Bank reach several market groups in the community.

BASIS NASABAH DAN JARINGAN YANG LUAS

CUSTOMER BASE AND EXTENSIVE NETWORK

Keunggulan dalam hal penguasaan nasabah dan jaringan yang luas juga menjadi bekal bagi Bank BTN untuk mengembangkan peluang bisnis. Bank BTN memiliki

The competitive advantage of a strong customer base and extensive network is also a strength for Bank BTN to develop business opportunities. Bank BTN has an

basis nasabah yang luas, dengan rekening kredit sekitar 1,2 juta dan 4 juta rekening simpanan per 31 Desember 2009.

Basis nasabah Bank BTN pada segmen konsumen dan komersial menjadi dasar yang kuat untuk memasarkan produk dan jasa Bank guna meningkatkan bisnis kredit non-perumahan. Basis nasabah tersebut juga didukung oleh jaringan layanan perbankan yang luas. Selain memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu, Bank BTN juga menjalin kerjasama dengan Kantor Pos dalam hal penyediaan layanan setara kantor kas di Kantor Pos *online*. Jaringan Kantor Pos *online* di seluruh Indonesia hingga 31 Desember 2009 berjumlah 2.045. Angka ini akan terus meningkat seiring upaya perluasan jaringan demi layanan terbaik bagi nasabah dan konsumen potensial.

PORTOFOLIO KREDIT DAN KUALITAS ASET YANG KUAT

Rasio kredit bermasalah (NPL) senantiasa dijaga oleh Bank BTN agar tetap berada pada tingkat yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio NPL bersih pada tingkat 2,81%, 2,66%, dan 2,75% secara berturut-turut per 31 Desember 2007, 31 Desember 2008 serta per 31 Desember 2009. Hal tersebut terjadi karena upaya Bank BTN untuk terus menyempurnakan sistem pembinaan dan penyelamatan kredit.

Bagi Bank BTN, mengelola kredit juga tidak lepas pada upaya menjaga kualitas manajemen risiko dengan membentuk sistem organisasi dan sistem informasi terpusat. Alur informasi yang cepat memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan informasi atas risiko operasi, sehingga meningkatkan manajemen risiko Bank BTN dan sistem kontrol internal. Misalnya, untuk mengelola risiko kredit dengan lebih efektif, Bank BTN telah menerapkan beberapa langkah efisiensi prosedur termasuk menyempurnakan proses persetujuan kredit, sistem penilaian kredit internal, sistem pemeringkatan serta meninjau model penilaian kredit. Selain itu, Bank BTN juga menerapkan peraturan-peraturan yang terkait dengan Basel II yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

BERINOVASI DEMI PERTUMBUHAN BISNIS KE DEPAN

Pertumbuhan bisnis ke depan terus diupayakan Bank BTN melalui bisnis inti maupun diversifikasi usaha baru. Selama 2009, Bank BTN telah mulai menawarkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragunan Aset (KIK-EBA) di Indonesia sejumlah Rp 500 miliar. Posisi Bank BTN di bidang kredit perumahan dan kualitas aset yang kuat telah memberikan kontribusi pada kesuksesan peluncuran KIK-EBA tersebut.

Pengembangan pasar KIK-EBA dapat membantu mendiversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan kapasitas pemberian kredit dan memaksimalkan neraca. Bank BTN juga mendirikan Unit Usaha Syariah pada tahun 2004 yang hingga sekarang telah bertumbuh dengan pesat. Bank BTN kini telah mengubah posisinya menjadi bank dengan produk dan jasa ritel yang bervariasi melalui usaha pengembangan dan diversifikasi produk.

extensive customer base, with approximately 1.2 million loan accounts and 4 million savings accounts as of December 31, 2009.

Bank BTN's customer base in the consumer and commercial segments provides a strong foundation for market bank products and services to enhance the business of non-housing loans. Our customer base is supported by an extensive network of banking services. In addition to branch offices, Bank BTN also collaborates with online post offices to deliver the same services as cash offices. The online post office network throughout Indonesia until December 31, 2009 had 2,045 locations. These numbers will continue to increase with our efforts to expand our network and deliver the best service for our customers and potential customers.

LOAN PORTFOLIO AND STRONG ASSET QUALITY

The NPL ratio is maintained at a low level by the Bank. This is indicated by the net NPL ratio of 2.81%, 2.66%, and 2.75% as of December 31, 2007, December 31, 2008 and as of December 31, 2009 respectively. This is possible because of the continued advancements in Bank BTN's loan collection and workout system.

For Bank BTN, managing loans is necessary to maintain the quality of risk management by establishing organization and centralized information systems. Rapid flow of information will support the management of operating risks, thus improving Bank BTN's risk management and internal control systems. For example, to manage credit risks more effectively, Bank BTN has implemented several measures, including improving the efficiency of procedures for the loan approval process, internal credit rating system, ranking system and credit rating review models. In addition, Bank BTN also applies regulations related to Basel II implemented by Bank Indonesia.

INNOVATIONS FOR FUTURE BUSINESS GROWTH

Bank BTN continues to push forward business growth through the diversification of core and new businesses. During 2009, Bank BTN started offering Asset-Backed Securities Collective Investment Contracts in Indonesia, amounting to Rp 500 billion. Bank BTN's position in the field of housing loans and strong asset quality have contributed to the success of the launch of the Asset-Backed Securities Collective Investment Contracts.

The development of the Asset-Backed Securities Collective Investment Contract market can help diversify funding sources, increase capacity of loan distribution and maximize Bank BTN's balance sheet. Bank BTN also established sharia business units in 2004, which have been growing rapidly. Bank BTN has now changed its position to become a bank with a variety of retail business development and product diversification products and services.



TIM MANAJEMEN YANG BERPENGALAMAN DAN IMPLEMENTASI BUDAYA PERUSAHAAN YANG BARU

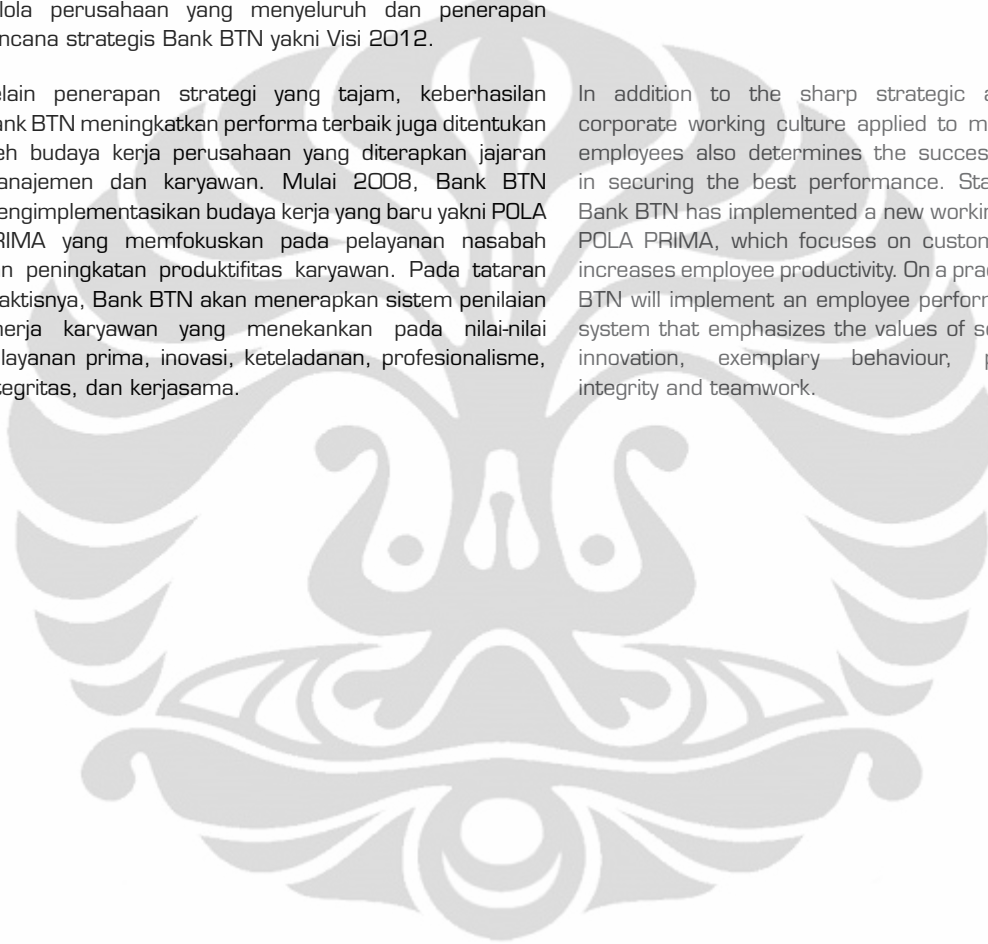
EXPERIENCED MANAGEMENT TEAM AND IMPLEMENTATION OF A NEW CORPORATE CULTURE

Bank BTN memiliki tim manajemen yang memberikan arahan strategi dan langkah bisnis untuk menghadapi situasi perbankan yang makin kompetitif. Berbekal pengalaman yang luas di industri perbankan selama rata-rata lebih dari 20 tahun, tim manajemen tersebut diharapkan mampu menganalisa kondisi internal Bank BTN agar tetap dapat mempertahankan posisi sebagai *market leader* di segmen perumahan. Tim manajemen juga merekomendasikan beberapa langkah, salah satunya implementasi pada inisiatif tata kelola perusahaan yang menyeluruh dan penerapan rencana strategis Bank BTN yakni Visi 2012.

Selain penerapan strategi yang tajam, keberhasilan Bank BTN meningkatkan performa terbaik juga ditentukan oleh budaya kerja perusahaan yang diterapkan jajaran manajemen dan karyawan. Mulai 2008, Bank BTN mengimplementasikan budaya kerja yang baru yakni POLA PRIMA yang memfokuskan pada pelayanan nasabah dan peningkatan produktifitas karyawan. Pada tataran praktisnya, Bank BTN akan menerapkan sistem penilaian kinerja karyawan yang menekankan pada nilai-nilai pelayanan prima, inovasi, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan kerjasama.

Bank BTN has a management team that provides strategic business direction in facing a more competitive banking industry. Armed with extensive experience in the banking industry average of more than 20 years, the management team are expected to analyze the internal situation to ensure Bank BTN retains its position as market leader in the residential segment. The management team has recommended several strategies, including implementing a comprehensive good corporate governance program and applying Bank BTN's strategic plan: 2012 Vision.

In addition to the sharp strategic application, the corporate working culture applied to management and employees also determines the success of Bank BTN in securing the best performance. Starting in 2008, Bank BTN has implemented a new working culture called POLA PRIMA, which focuses on customer service and increases employee productivity. On a practical level, Bank BTN will implement an employee performance appraisal system that emphasizes the values of service excellent, innovation, exemplary behaviour, professionalism, integrity and teamwork.



STRATEGI

Strategy

Berebakl keunggulan kompetitif yang dimiliki, Bank BTN berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi bisnis yang dijalankan. Langkah yang ditempuh dengan menyusun strategi Rencana Jangka Panjang Bank BTN 2008-2012 yang diterapkan melalui strategi baru yang disebut Visi 2012.

Rencana ini ditujukan untuk mempertahankan posisi Bank BTN sebagai penyedia kredit perumahan terkemuka. Tujuan lain untuk memperluas portofolio kredit ke bidang kredit non perumahan, diversifikasi sumber pendanaan, meningkatkan *fee based income*, meningkatkan efisiensi dan kualitas kredit serta meningkatkan pelayanan nasabah dan memperkuat budaya perusahaan.

Berikut dari strategi Bank BTN tersebut antara lain:

1. Peningkatan proporsi kredit non perumahan

Fokus Bank BTN pada sisi kredit, terutama menitikberatkan pada upaya peningkatan persentase kredit non perumahan dari 6% dari seluruh total pinjaman per Desember 2009 menjadi sekitar 25% dari seluruh jumlah pinjaman pada akhir 2012. Tujuan strategi ini untuk memperpendek profil jatuh tempo dengan meningkatkan porsi pemberian kredit jangka pendek, meningkatkan pendapatan bunga bersih (NIM) dan menurunkan risiko konsentrasi.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, Bank BTN mengambil langkah antara lain pemrosesan awal kredit melalui kerjasama strategis, perencanaan dan peningkatan jumlah kantor cabang pembantu yang hanya memproses kredit non perumahan serta penerimaan karyawan dan pelatihan karyawan pada bidang kredit non perumahan.

2. Fokus pada pemberian kredit perumahan kepada segmen nasabah berpenghasilan tinggi

Bank BTN telah dikenal memiliki target segmen debitur berpenghasilan menengah ke bawah. Untuk peningkatan *brand awareness*, Bank BTN mulai tertuju pada sasaran debitur dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Gaya hidup efektif dan efisien menjadi ciri khas segmentasi yang dibidik Bank BTN. Untuk itu Bank BTN mengembangkan layanan yang memberi kemudahan bagi nasabah melalui proses persetujuan kredit yang lebih pendek. Penerapan langkah tersebut dapat dilihat melalui "Layanan 1-5-1" yakni nasabah akan mendapatkan persetujuan permohonan kredit satu hari yang sama, berlanjut pada proses dan pemenuhan dokumentasi kredit yang diselesaikan dalam lima hari kerja dan pencairan kredit sehari berikutnya. Selain itu, upaya lain dilakukan melalui peningkatan usaha pemasaran dengan *outsource* SDM, melakukan pelatihan ulang bagi analis kredit dan membuat aliansi strategis dengan pengembang terkemuka.

Based on its competitive advantages, Bank BTN seeks to achieve sustainable business growth. Bank BTN's Long Term Strategic Plan 2008-2012 is applied through a new strategy called Vision 2012.

This plan is intended to maintain the position of Bank BTN as a leading provider of mortgages, expand its loan portfolio to the non-housing loan sector, diversify funding sources, increase fee-based income, improve efficiency of quality loans and customer service and strengthen its corporate culture.

The strategies are as follows

1. Increasing the proportion of non-housing loans

Bank BTN focuses on loans, particularly focusing on increasing the percentage of non-housing loans from 6% of total loans as of December 2009 to approximately 25% of total loans by the end of 2012. The purpose of this strategy is to shorten the maturity profile by increasing the portion of short-term loan disbursements, increasing the NIM and reducing the concentration of risk.

To realize these strategies, Bank BTN will provide initial processing of loans through strategic partnerships, increase the number of sub-branches to handle non-housing loans only, and hire and train employees in non-housing loans.

2. Focus on providing housing loans to high-income customers

Bank BTN is known for focusing its services on the middle and lower-income segments. To increase brand awareness, Bank BTN has started targeting middle- and upper-income customers.

An effective and efficient lifestyle characterize Bank BTN's targeted segmentation. Therefore, Bank BTN is developing services that provide convenience to customers through a shorter loan approval process. Customers can apply through the "1-5-1 Service", which provides approval for mortgages the same day, process all loan documentation within five working days, and disburses loans the next day. In addition, other endeavors carried out through increased marketing efforts with HR outsourcing, retraining for loan analysts and creating strategic alliances with leading developers.

STRATEGI BANK BTN Bank BTN Strategy

Berbekal strategi yang tepat, Bank BTN melangkah maju untuk mencapai kinerja terbaik.

Armed with the right strategy, Bank BTN will move forward toward the best performance.

LOAN SECTOR

DIVERSIFICATION OF
LOAN AND IMPROVING
LOAN QUALITY

FUNDING SECTOR

IMPROVE FUNDING COMPOSITION

SERVICE STRATEGY

INCREASE FEE-BASED INCOME

VISION 2012

Bank  **BTN**

ORGANISATIONAL
AND HUMAN
RESOURCES
STRATEGY

CONTROL
AND RISK
MANAGEMENT

3. Penurunan biaya pendanaan

Upaya berkelanjutan yang dilakukan Bank BTN untuk meningkatkan margin operasi adalah melalui langkah menurunkan biaya pendanaan. Bank BTN melakukan hal ini dengan mempromosikan berbagai produk berbiaya rendah seperti tabungan, tabungan eBatarapos serta giro. Bank BTN meningkatkan penjualan produk tabungan Kantor Pos melalui peningkatan jumlah Kantor Pos online, yang direncanakan akan bertambah sebanyak 500 *outlet* pada 2010 dan 2011. Langkah lain melalui diluncurkannya sekuritisasi kredit perumahan yang nantinya akan dijadikan sumber pendanaan.

Karena baru diluncurkan pada 2009, jumlah aset kredit perumahan yang disekuritisasi ini memang masih belum terlalu signifikan besarnya dibandingkan jumlah aset kredit Bank BTN. Tetapi ke depan rencana untuk memperbesar jumlah aset kredit yang disekuritisasi akan dimantapkan.

4. Mengurangi ketidakcocokan jatuh tempo antara aset dan kewajiban

Langkah yang ditempuh untuk menyasati ketidakcocokan jatuh langkah yang ditempuh untuk menyasati kesenjangan jatuh tempo antara aset dan kewajiban adalah dengan melanjutkan penerbitan obligasi dengan jatuh tempo antara 5-10 tahun yang berlangsung sejak 1989.

Selain itu, langkah lain dengan melakukan transaksi-transaksi sekuritisasi atas kredit perumahan Bank BTN yang dimulai sejak awal tahun 2009 dan menawarkan produk tabungan dengan jangka waktu lebih panjang. Contoh produk tabungan jangka panjang seperti *bancassurance* dan produk tabungan pendidikan yang akan diluncurkan pada 2010. Bank BTN percaya bahwa peningkatan persentase kredit non-perumahan dalam portofolio Bank BTN akan membantu mengurangi kesenjangan jatuh tempo tersebut.

5. Meningkatkan pendapatan berdasarkan skema pendapatan

Peningkatan pendapatan berdasar skema pendapatan dilakukan melalui penerapan beberapa layanan yang memberi nilai tambah disertai penambahan produk maupun fitur baru. Misalnya, Bank BTN menghasilkan pendapatan (*fee income*).

Bank BTN akan meningkatkan pendapatan berdasarkan skema pendapatan dengan mengimplementasikan sejumlah layanan, produk dan fitur baru. Sebagai contoh, Bank BTN sebagai *servicer* dari aset-aset yang dialihkan terkait transaksi sekuritisasi telah mulai menghasilkan pendapatan (*fee income*) dari sektor tersebut. Selain itu, upaya menaikkan pendapatan juga dilakukan melalui peningkatan prioritas pada kredit perumahan dan kredit lainnya kepada nasabah menengah ke atas. Mendukung rencana tersebut, Bank BTN berencana mengembangkan produk-produk perbankan yang diciptakan bagi segmen tersebut. Salah satunya melalui layanan *wealth management* yang akan diperkenalkan pada semester kedua tahun 2010.

3. Decreasing the cost of funding

Bank BTN has worked to improve its operating margin by lowering funding costs. Bank BTN is doing this by promoting low-cost products such as savings, e'Batarapos' savings and demand deposits. Bank BTN increased sales of post office savings products through the increased number of online post offices, which is planned to increase to 500 outlets in 2010 and 2011. The Bank has also launched mortgage securitization, which will be used as a source of funding.

Because this service was only launched in 2009, the amount of securitized mortgage assets remains low compared to the total loan assets held by Bank BTN. However, in the future, a plan to increase the amount of loan assets will be established.

4. Reducing the maturity gap between assets and liabilities

To respond to the maturity gap between assets and liabilities, Bank BTN will continue to issue bonds with maturity of between 5-10 years. This strategy was started in 1989.

In addition, Bank BTN will offer securitized transactions for mortgages, which started in early 2009, and longer-term savings products. Examples of long-term savings products, such as *bancassurance* and education savings accounts, will be launched in 2010. Bank BTN believes that the increase in the percentage of non-housing loans in its portfolio will help reduce the maturity gap.

5. Increasing income by income scheme

Bank BTN will increase revenue through income schemes to offer several services and value-added products, as well as the addition of new features. For example, Bank BTN generates revenue (*fee income*).

Bank BTN will increase revenues based on a revenue scheme by implementing a number of services, products and new features. For example, Bank BTN, as a *servicer* of the assets transferred through securitization transactions, has started to generate revenues (*fee income*) from the sector. Efforts have also been made to raise revenues by increasing the priority for housing loans and other loans to middle- and upper-income customers. Supporting this plan, Bank BTN plans to develop banking products created specially for this segment, including wealth management services, which will be introduced in the second half of 2010.



6. Meningkatkan bisnis Syariah

Dari sisi perbankan Syariah yang menerapkan prinsip hukum Islam, Bank BTN telah mengembangkan dengan baik melalui kinerja keuangan yang terus meningkat. Dapat dilihat dari aset pembiayaan Bank BTN Syariah yang naik 59,50% dari Rp 1,25 triliun pada 31 Desember 2008 menjadi Rp 1,99 triliun pada periode yang sama 2009.

Angka tersebut menurut data Bank Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan rata-rata pembiayaan Syariah seluruh bank di Indonesia yaitu sebesar 3,5%. Pengembangan segmen Syariah juga dilakukan melalui penambahan kantor cabang dan peningkatan layanan melalui penambahan produk maupun fiturnya.

7. Melanjutkan penyederhanaan proses persetujuan kredit

Proses persetujuan kredit yang lebih efektif dan efisien menjadi upaya berkelanjutan yang akan terus dikembangkan Bank BTN. Langkah yang telah diterapkan Bank BTN adalah dengan meningkatkan kewenangan persetujuan kredit pada kantor cabang dan kantor cabang pembantu untuk mempersingkat proses persetujuan kredit. Percepatan proses persetujuan kredit juga ditingkatkan melalui "Layanan 1-5-1", penyempurnaan model penilaian kredit (*Credit Scoring Model*) serta implementasi sistem pemrosesan kredit (eLoan).

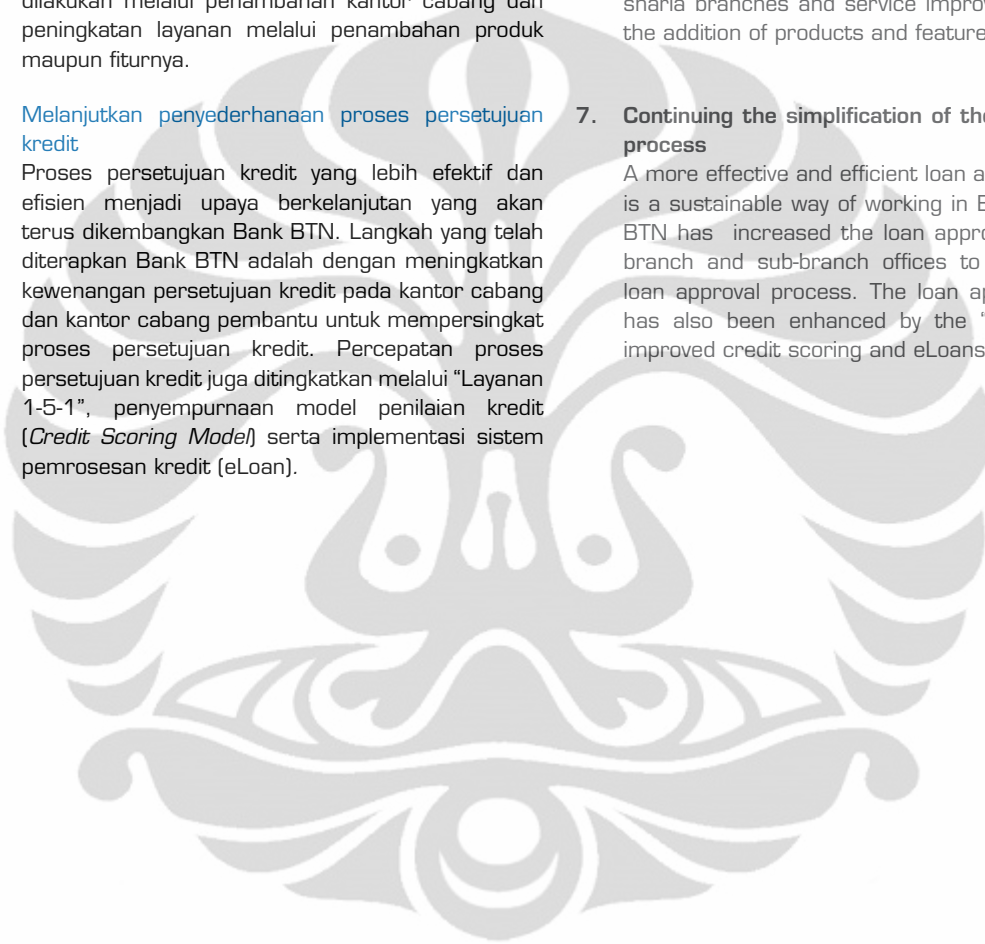
6. Improve sharia business

Bank BTN has continued to improve the financial performance of its sharia banking business, which applies the principles of Islamic law. Bank BTN Syariah financing assets rose 59.50% from Rp 1.25 trillion on December 31, 2008 to Rp 1.99 trillion in the same period in 2009.

According to Bank Indonesia data, this figure is 3.5% higher than the average increase in the bank's Islamic finance in Indonesia. The sharia segment has also been developed through the addition of sharia branches and service improvement through the addition of products and features.

7. Continuing the simplification of the loan approval process

A more effective and efficient loan approval process is a sustainable way of working in Bank BTN. Bank BTN has increased the loan approval authority of branch and sub-branch offices to streamline the loan approval process. The loan approval process has also been enhanced by the "1-5-1 Service", improved credit scoring and eLoans.





BERUPAYA MEMBERIKAN KINERJA TERBAIK

Bank BTN melaporkan peningkatan laba bersih sebesar 13,93% menjadi Rp 490,45 miliar di tahun 2009 dibanding pencapaian sebesar Rp 430,47 miliar di tahun 2008

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management's Discussion and Analysis



Striving for the Best Performance

Bank BTN reported an increase in net income increase of 13.93% to Rp 490.45 billion in 2009, compared to Rp 430.47 billion in 2008.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Overview

HASIL OPERASI

Bank BTN melaporkan peningkatan laba bersih sebesar 13,93% menjadi Rp 490,45 miliar di tahun 2009 dibanding pencapaian sebesar Rp 430,47 miliar di tahun 2008. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada pinjaman yang diberikan sebesar 27,19% menjadi Rp 40,73 triliun di tahun 2009, dari Rp 32,03 triliun di tahun 2008 serta keberhasilan Bank BTN dalam mengelola komposisi dana pihak ketiga untuk mengoptimalkan biaya dana (*cost of fund*) meskipun terjadi penekanan pada Marjin Bunga Bersih (NIM) dari 5,08% menjadi 4,65% akibat penurunan rata-rata suku bunga acuan Bank Indonesia.

Bagian ini akan mendiskusikan dan memberikan analisa tinjauan keuangan Bank BTN selama tahun 2009 dibandingkan tahun 2008. Analisa disampaikan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian, yang dibuat sesuai Prinsip Standar Akuntansi Perusahaan (PSAK) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2009. Laporan keuangan telah diaudit Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young).

LAPORAN LABA RUGI

Pendapatan Bunga Bersih

Pendapatan bunga bersih Bank BTN naik 17,44% menjadi Rp 2,3 triliun sepanjang tahun 2009, dibanding Rp 1,96 triliun di tahun 2008. Pendapatan Bank BTN dari bunga kredit termasuk yang berasal dari provisi dan komisi kredit di 2009 naik 25,46% menjadi Rp 5,73 triliun, dari sebelumnya Rp 4,57 triliun di tahun 2008. Sementara itu beban bunga meningkat 31,50% menjadi Rp 3,43 triliun dibanding periode tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,61 triliun.

Pendapatan bunga Bank BTN mengalami peningkatan karena mampu menjaga laju pertumbuhan kredit, khususnya penyaluran pinjaman perumahan selagi permintaan pinjaman perumahan naik akibat tingkat suku bunga yang lebih rendah serta didorong oleh serangkaian penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Pendapatan dari bunga pinjaman naik 25,15% menjadi Rp 5,47 triliun sepanjang tahun 2009, dari Rp 4,37 triliun di tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh penambahan pinjaman baru sebesar lebih dari Rp 16,30 triliun.

Sementara itu, beban bunga Bank BTN atas juga naik 31,55% menjadi Rp 3,42 triliun di 2009, dari Rp 2,60 triliun di 2008 akibat adanya kenaikan dana pihak ketiga yang cukup signifikan di tahun 2009 sebesar 27,87%.

OPERATIONAL RESULT

Bank BTN reported an increase in net income increase of 13.93% to Rp 490.45 billion in 2009, compared to Rp 430.47 billion in 2008. This increase was mainly due to significantly higher loans, which rose by 27.19% to Rp 40.73 trillion in 2009, from Rp 32.03 trillion in 2008, and Bank BTN's success in managing third-party funds to optimize the cost of funds, despite pressure on NIM from 5.08% to 4.65% caused by the decline in Bank Indonesia's benchmark interest rate.

This section will discuss and provide analysis on Bank BTN's financial results in 2009 compared to 2008. The analysis was made based on Consolidated Financial Statement, which was based on the Indonesian Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) for the year ending December 31, 2009. The financial statements have been audited by the public accounting firm Purwanto, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young).

STATEMENT OF INCOME

Net Interest Income

Bank BTN's Net Interest Income rose by 17.44% to Rp 2.3 trillion in 2009, compared to Rp 1.96 trillion in 2008. Bank BTN's total interest income including provision and fees from loans in 2009 rose by 25.46% to Rp 5.73 trillion, up from Rp 4.57 trillion in 2008. Meanwhile, total interest expenses also rose by 31.50% to Rp 3.43 trillion in 2009, from Rp 2.61 trillion in the previous year.

Bank BTN's interest income increased as the Bank managed to keep growing loans, specifically mortgage disbursements, as demand for housing loans increased due to the lower interest rates, induced by the series of benchmark rate cuts by Bank Indonesia. Interest income rose 25.15% to Rp 5.47 trillion in 2009, up from Rp 4.37 trillion in 2008, due to an additional Rp 16.30 trillion in new loans.

Meanwhile Bank BTN's interest expenses rose by 31.55% to Rp 3.42 trillion in 2009, from Rp 2.60 trillion in 2008, due to a significant increase in third-party funds in 2009 of 27.87%.



KOMPOSISI PENDAPATAN BUNGA (DALAM JUTAAN RUPIAH)
INTEREST INCOME COMPOSITION (IN MILLION RUPIAH)

	2009	2008	% YOY	
Kredit Yang Diberikan	4.662.561	3.508.107	32,91%	Loans
Obligasi Pemerintah (Obligasi Rekapitalisasi)	633.685	695.204	-8,85%	Government Bonds (Recapitalization Bonds)
Efek-Efek	112.085	132.161	-15,19%	Securities
Penempatan Pada Bank Lain	27.933	25.540	9,37%	Placement With Other Banks
Tagihan Swap Suku Bunga	35.464	-	-	Interest Rate Swap Receivables
Giro Pada Bank Indonesia	-	8.622	100,00%	Current Account With Bank Indonesia
Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali	-	2.375	100,00%	Securities Purchased Under Resale Agreements
Jumlah	5.471.728	4.372.009	25,15%	Total

KOMPOSISI BEBAN BUNGA (DALAM JUTAAN RUPIAH)
INTEREST EXPENSE COMPOSITION (IN MILLION RUPIAH)

	2009	2008	% YOY	
Deposito Berjangka	2.267.720	1.456.403	55,71%	Time Deposits
Surat-Surat Berharga yang Diterbitkan	358.777	379.200	-5,39%	Securities Issued
Efek Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	257.604	146.590	75,73%	Securities Sold Under Repurchase Agreements
Tabungan	286.731	313.796	-8,63%	Savings Deposits
Pinjaman Yang Diterima	111.655	122.013	-8,49%	Fund Borrowings
Giro	90.047	91.641	-1,74%	Demand Deposits
Simpanan Dari Bank Lain	35.211	18.555	89,77%	Deposits From Other Banks
Pinjaman Subordinasi	12.600	31.500	-60,00%	Subordinated Loans
Kewajiban Swap Suku Bunga	-	40.362	100,00%	Interest Rate Swap Liabilities
Jumlah	3.420.345	2.600.060	31,55%	Total

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya naik sebesar 22,01% di tahun 2009, menjadi Rp 264,86 miliar, dibanding Rp 217,07 miliar di tahun 2008. Hal ini terutama berasal dari kenaikan pendapatan dari pungutan administrasi dan denda simpanan dan kredit yang diberikan sebesar Rp 208,94 miliar, yang naik 18,49% dari Rp 176,33 miliar di tahun 2008 sejalan dengan keberhasilan Bank dalam memanfaatkan basis nasabah untuk melakukan *cross sell* produk dan layanannya. Pendapatan imbal jasa yang bersifat *recurring* diperkirakan akan terus naik seiring pertumbuhan Bank di masa depan.

Other Operating Income

Other operating income rose by 22.01% in 2009, to Rp 264.86 billion, compared to Rp 217.07 billion in 2008. Most of the increase comes from income from fees and commission amounting to Rp 208.94 billion, up by 18.49% from Rp 176.33 billion in 2008, along with the Bank's success in using its customer base to implement cross selling of product and services. Recurring fee-based income is expected to continue to increase along with the bank's growth in the future.

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA (DALAM JUTAAN RUPIAH)
OTHER OPERATING INCOME (IN MILLION RUPIAH)

	2009	2008	% YOY	
Pungutan Administrasi dan Denda Simpanan dan Kredit yang Diberikan	208.936	176.330	18,49%	Penalties and Administration Fees on Deposits and Loans
Keuntungan dari Penjualan Kembali Obligasi dalam Perbendaharaan - Bersih	-	321	-	Gain on Resale of Treasury Bonds - Net
Keuntungan dari Penjualan Obligasi Pemerintah (Obligasi Rekapitalisasi) - Bersih	5.198	-	-	Gain on Sale of Government Bonds (Recapitalization Bonds) - Net
Keuntungan dari Penjualan Efek-Efek - Bersih	-	53	100,00%	Gain on Sale of Securities - Net
Keuntungan dari Kenaikan Nilai Efek-Efek yang Diperdagangkan - Bersih	2	-	-	Gain From Increase In Value of Trading Securities - Net
Lain-Lain	50.721	40.367	25,65%	Others
Jumlah	264.857	217.071	22,01%	Total

Beban Operasional

Secara keseluruhan, beban operasional lainnya meningkat 17,36% dari Rp 1,5 triliun di tahun 2008 menjadi Rp 1,76 triliun di tahun 2009. Peningkatan beban operasional lainnya ini sejalan dengan pengembangan usaha yang dilakukan pada tahun 2009 dengan memperkuat aspek sumber daya manusia di Bank BTN, dimana beban gaji dan tunjangan karyawan meningkat 21,25% di tahun 2009 menjadi Rp 937,08 miliar dari Rp 772,82 miliar di tahun 2008. Selain itu dengan adanya penambahan dana pihak ketiga, maka Premium Program Garansi Pemerintah juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu naik sebesar 37,55% dari Rp 51,3 miliar menjadi 70,56 miliar.

Operating Expenses (OPEX)

Overall, the Bank's Operating Expenses rose 17.36% from Rp 1.5 trillion in 2008 to Rp 1.76 trillion in 2009. The increase of operating expenses is along with business expansion in 2009, by strengthening Bank BTN's human resources; salaries and employee benefits rose 21.25% in 2009 to Rp 937.08 billion from Rp 772.82 billion in 2008. Also, with increase of third-party funds, Premiums on Governments Guarantee Program also rose significantly, up 37.55% from Rp 51.3 billion to Rp 70.56 billion.

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (DALAM JUTAAN RUPIAH)
OTHER OPERATING EXPENSES (IN MILLION RUPIAH)

	2009	2008	% YOY	
Gaji dan Tunjangan Karyawan	937.075	772.818	21,25%	Salaries and Employee Benefits
Umum dan Administrasi	673.954	555.335	21,36%	General and Administrative
Premi Program Penjaminan Pemerintah	70.562	51.298	37,55%	Premium on Government's Guarantee Program
Kerugian dari Transaksi Mata Uang Asing - Bersih	11.407	3.530	223,14%	Loss on Foreign Exchange Transactions - Net
Kerugian dari Penjualan Kembali Obligasi Dalam Perbendaharaan - Bersih	127	-	-	Loss on Resale of Treasury Bonds - Net
Kerugian dari Penjualan Obligasi Pemerintah (Obligasi Rekapitalisasi) - Bersih	-	23.105	-	Loss on Sale of Government Bonds (Recapitalization Bonds) - Net



	2009	2008	% YOY	
Kerugian dari Penurunan Nilai Obligasi Pemerintah (Obligasi Rekapitalisasi) yang Diperdagangkan - Bersih	-	32.116	-	Loss From Decrease in Value of Trading Government Bonds (Recapitalization Bonds) - Net
Kerugian Penurunan Nilai Efek-Efek Untuk Diperdagangkan - Bersih	27	7.535	-99,64%	Loss From Decrease In Value Of Trading Securities - Net
Lain-Lain	70.257	56.853	23,58%	Others
Jumlah	1.763.409	1.502.590	17,36%	Total

Laba Bersih

Sepanjang tahun 2009, laba bersih Bank BTN naik cukup moderat sebesar 13,93%, mencapai Rp 490,45 miliar, dari sebelumnya Rp 430,47 miliar di tahun 2008. Kenaikan ini terutama terjadi karena kenaikan pendapatan bunga bersih meskipun terjadi kenaikan pada pos beban bunga dan beban operasional. Sementara itu, laba bersih per saham juga naik 11,7% menjadi Rp 76 per saham, dari Rp 68 per saham, akibat IPO Bank BTN di tahun 2009 yang telah menaikkan jumlah saham Bank BTN secara signifikan.

Pendapatan Bersih Syariah

Pertumbuhan pada bisnis Syariah yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir menghasilkan peningkatan laba bersih Syariah sebesar 287% menjadi Rp 31,70 miliar, dari Rp 8,19 miliar di tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut berasal dari membaiknya laba usaha akibat adanya kenaikan pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil sebesar 80,16% pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008.

NERACA

Total Aktiva

Nilai aktiva naik 29,91% menjadi Rp 58.45 triliun akhir tahun 2009, naik dari Rp 44.99 triliun pada tahun 2008. Pertumbuhan aktiva ini didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit baru hingga Rp 16,30 triliun di tahun 2009, yang membuat total pinjaman yang disalurkan, termasuk pembiayaan Syariah, naik 27,19% menjadi Rp 40.73 triliun di tahun 2009, dari Rp 32,03 triliun di 2008.

Aset bank pada tahun 2009 masih didominasi oleh aktiva produktif setelah dikurangi dengan provisi kredit NPL (PPAP) sekitar 90,82%, sedangkan sisanya berupa aktiva non produktif. Aktiva produktif naik 29,64% menjadi Rp 53,08 triliun pada tahun 2009, dari Rp 40,95 triliun pada tahun 2008, atau terjadi penambahan aset produktif sebesar Rp 12.14 triliun selama 2009. Sebagian besar aktiva produktif terdiri dari kredit dan pembiayaan (75,41%), diikuti oleh obligasi Pemerintah (13,90%), efek (10,33%) dan aset produktif lainnya (0,36%)

Kredit

Bank BTN secara konsisten aktif menjalankan fungsi intermediasinya, bahkan di tengah pemulihan krisis global dan likuiditas yang sempat terjadi di paruh pertama 2009.

Net Income

During 2009, the Bank's net income rose moderately by 13.93%, to reach Rp 490.45 billion, up from Rp 430.47 billion in 2008. The increase was mainly due to higher net interest income, despite the increase in interest and operating expenses. Meanwhile, our earnings per share also increased by 11.7% to Rp 76 per share, from Rp 68 per share, as the Bank's December 2009 IPO increased the bank's number of shares substantially.

Net Sharia Income

The growth of the Bank's sharia business has been quite robust in the last few years, including the increase of net sharia income by 287% to Rp 31.70 billion during 2009, up from Rp 8.19 billion in the previous year. This increase comes from the improved operating revenues caused by an increase in profit sharing and marginal income by 80.16% in 2009 compared to 2008.

BALANCE SHEET

Total Assets

The Bank's asset rose by 29.91% to Rp 58.45 trillion by end of 2009, up from Rp 44.99 trillion in 2008. Asset growth was driven by a large increase in loans, up Rp 16.30 trillion in 2009, which made the bank's total loans, including sharia financing rise by 27.19% to Rp 40.73 trillion in 2009, from Rp 32.03 trillion in 2008.

The bank's assets in 2009 were still dominated by its earning assets, or net earning assets, after deducting the NPL loan provision of around 90.82%, while the remainder other assets took the rest. Earning assets rose by 29.64% to Rp 53.08 trillion in 2009, from Rp 40.95 trillion in 2008, swelling to Rp 12.14 trillion in 2009. Most of the productive or earning assets consisted of loans and financing (75.41%), followed by government bonds (13.90%), marketable securities (10.33%) and other earning assets (0.36%).

Loans

Bank BTN is active in conducting its intermediacy function, despite the global financial crisis and liquidity crisis during the first half of

Jumlah pinjaman yang disalurkan naik 27,19% mencapai Rp 40,73 triliun pada 2009, dari Rp 32,03 triliun pada 2008, karena kenaikan pada pinjaman konsumsi, yang mencakup KPR, yang tetap menjadi bagian terbesar dari kredit Bank BTN, atau mencakup sekitar 77,5%.

Hingga akhir 2009, Bank BTN telah menyalurkan kredit perumahan sejumlah Rp 31,57 triliun, naik dari 24,22% dari Rp 25,41 triliun pada akhir 2008. Kredit non KPR yang telah disalurkan juga naik 11,5% menjadi Rp 3,19 triliun hingga akhir 2009, dibanding jumlah tahun sebelumnya sebesar Rp 2,86 triliun.

Jenis kredit lainnya, seperti kredit modal kerja dan kredit investasi juga naik sebesar berturut-turut, 52,9% dan 246,5%; walaupun jumlahnya tetap terbilang kecil dibandingkan dengan kredit konsumsi. Kredit modal kerja kini mencapai 13% dari total kredit, sementara kredit investasi masih kurang dari 1%. Kredit modal kerja kini sejumlah Rp 5,3 triliun, naik dari Rp 3,46 triliun di tahun 2008, sementara kredit investasi kini pada posisi Rp 343 milyar di tahun 2009, naik dari Rp 98,9 milyar di 2008

2009. Total loans disbursed rose 27.19% to Rp 40.73 trillion in 2009, from Rp 32.03 trillion in 2008, due to an increase in consumer loans, which include mortgages, which remain the bulk of the Bank's loans of around 77.5%.

As of end of 2009, Bank BTN had disbursed mortgage loans amounting to Rp 31.57 trillion, up by 24.22% from Rp 25.41 trillion at the end of 2008. The non-housing finance loans disbursed also rose by 11.5%, to Rp 3.19 trillion, as of end of 2009 compared to one year earlier at Rp 2.86 trillion.

Other types of loans, such as working capital loans and investment loans, increased by 52.9% and 246.5% respectively, despite the fact that the actual amount remains small compared to consumer loans. Working capital loans now make up 13% of total loans, while investment loans make up less than 1%. Working capital loans stand at Rp 5.3 trillion, up from Rp 3.46 trillion in 2008, while investment loans are at Rp 343 billion in 2009, up from Rp 98.9 billion in 2008.

KOMPOSISI KREDIT BERDASARKAN SEGMENT (DALAM JUTAAN RUPIAH) LOAN BASED ON SEGMENT (IN MILLION RUPIAH)

Loans by Segment	2009	2008	% YOY	
Konsumsi	34.764.371	28.278.223	22,94%	Consumer loans
Modal Kerja	5.301.415	3.466.112	52,95%	Working Capital
Investasi	343.046	98.995	246,53%	Investment
Sindikasi	48.882	48.882	0,00%	Syndicated
Direksi dan Karyawan				Directors and Employees
• Pihak yang Tidak Mempunyai Hubungan Istimewa	255.774	126.130	102,79%	• Non Related Parties
• Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa	19.466	6.889	182,57%	• Related Parties
Jumlah	40.732.954	32.025.231	27,19%	Total

Pertumbuhan kredit menurut sektor usaha juga didominasi oleh sektor properti, yang tumbuh 25% sepanjang 2009, dimana sektor properti masih mendominasi hampir 95% dari kredit Bank BTN. Tidak ada satu sektorpun yang memiliki porsi lebih dari 1% dari total kredit, kecuali sektor konstruksi sebesar 1,4%, dimana kredit ke sektor konstruksi tumbuh lebih dari tiga kali lipat, menjadi Rp 570 miliar dari Rp 175 miliar di 2008.

Loans growth by sectors is also dominated by property sectors, which grew by 25% during 2009, as the property sector still dominated almost 95% of the Bank BTN's loans. No single sectors had more than 1% from total loans, with the exception of construction sectors, with 1.4%, in which the loan to construction sectors more than tripled to Rp 570 billion, from Rp 175 billion in 2008.



KREDIT BERDASARKAN SEKTOR USAHA (DALAM JUTAAN RUPIAH)
LOAN BASED ON SECTORS (IN MILLION RUPIAH)

	2009	2008	% YOY	
Perumahan	38.668.245	30.873.261	25,25%	Property
Konstruksi	570.504	175.833	224,46%	Construction
Jasa-Jasa Dunia Usaha	155.046	90.387	71,54%	Business Services
Manufaktur	4.221	65.461	-93,55%	Manufacturing
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	3.692	7.452	-50,46%	Transportation, Warehousing, and Communication
Perdagangan, Restoran, dan Hotel	60.245	39.383	52,97%	Trading, Restaurant, and Hotel
Pertanian	6.415	5.812	5,73%	Farming
Pertambangan	118	1.222	-90,34%	Mining
Jasa-Jasa Sosial	1.463	1.747	-16,26%	Social Services
Listrik Gas dan Air	443	-	-	Electricity Gas and Water
Lain-Lain	1.262.832	764.673	65,15%	Others
Jumlah	40.732.954	32.025.231	27,19%	Total

Obligasi Pemerintah

Total obligasi pemerintah turun sedikit sebesar 2,6% menjadi Rp 7,38 triliun pada akhir 2009, dari Rp 7,58 triliun pada akhir 2008. Sebagian besar dari obligasi pemerintah Rp 4,98 triliun, kini dikategorikan pada portfolio Tersedia Untuk Dijual, sementara sisanya Rp 2,38 triliun ditempatkan pada portfolio Dimiliki Hingga Jatuh tempo. Hanya Rp 10,72 miliar yang ditempatkan pada portfolio diperdagangkan.

Government Bonds

Total government bonds dropped slightly by 2.6%, to Rp 7.38 trillion by the end of 2009, from Rp 7.58 trillion at the end of 2008. Most of the government bonds, Rp 4.98 trillion, were classified in the Available for Sale portfolio, while the rest, Rp 2.38 trillion, were put into Held to Maturity portfolios. Only Rp 10.72 billion were put into active trading portfolios.

OBLIGASI PEMERINTAH (DALAM JUTAAN RUPIAH)
GOVERNMENT BOND (IN MILLION RUPIAH)

	2009	2008	% YOY	
Diperdagangkan	10.723	-	-	Trading
Tersedia Untuk Dijual	4.984.710	5.203.036	-4,20%	Available For Sale
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	2.384.780	2.373.533	0,47%	Held To Maturity
Jumlah	7.380.213	7.576.569	-2,59%	Total

Pembiayaan Syariah

Total pembiayaan syariah Bank BTN naik 59,50% menjadi Rp 1,99 triliun pada tahun 2009, dari Rp 1,25 triliun pada 2008. Pembiayaan syariah Bank BTN didominasi oleh metode pembiayaan Piutang Murabahah, mencakup 49,2%, diikuti oleh Pembiayaan Mudharabah sebesar 40,5%, Pembiayaan Musyarakah 7,9%, Piutang istishna 2,4% dan sisanya Rahn 0,01%

Sharia Financing

Total sharia financing increased by 59.50% to Rp 1.99 trillion in 2009, from Rp 1.25 trillion in 2008. Bank BTN's sharia financing was dominated by Murabahah financing, comprising 49.2%, followed by Mudharabah at 40.5%, Musyarakah at 7.9%, Istishna at 2.4%, and the remainder is in Rahn 0.01%.

**PORTFOLIO PENDANAAN BTN SYARIAH (DALAM JUTAAN RUPIAH)
BTN SHARIA FINANCING PORTFOLIO (IN MILLION RUPIAH)**

	2009	2008	% YOY	
Piutang Murabahah	981.836	702.190	39,82%	Murabahah Receivables
Pembiayaan Mudharabah	808.813	453.061	78,52%	Mudharabah Financing
Pembiayaan Musyarakah	157.468	83.877	87,74%	Musyarakah Financing
Piutang Istishna	47.486	12.108	292,19%	Istishna Receivables
Rahn	149			Rahn
Jumlah	1.995.752	1.251.236	59,50%	Total

Belanja Modal

Bank BTN sadar bahwa dengan dengan berada di jajaran 10 teratas bank terbesar di negeri ini, layanan harus ditingkatkan, terutama dalam bidang teknologi informasi, teknologi informasi membantu bank dalam mendapatkan data bisnis lebih cepat, lebih akurat, dan lebih transparan.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, dalam dua tahun terakhir, Bank BTN telah mengalokasikan dana untuk meningkatkan kemampuan TI, dialokasikan secara signifikan dari belanja modal. Pada tahun 2009, Bank BTN menghabiskan Rp 347,64 miliar untuk belanja modal, sebagian besar untuk pengembangan teknologi informasi dan *recovery* menara Bank BTN. Investasi barang modal tersebut seluruhnya berasal dari sumber dana internal.

Kewajiban

Dana Pihak Ketiga yang merupakan mayoritas kewajiban Bank BTN pada tahun 2009, mencapai 75,80% dari total kewajiban, dengan sisanya merupakan pinjaman pemerintah, surat berharga yang diterbitkan dan pinjaman lainnya.

Simpanan Para Nasabah (Dana Pihak Ketiga/DPK)

Di tengah kondisi persaingan yang ketat dalam merebut dana nasabah, Bank BTN mampu membukukan kenaikan yang cukup signifikan untuk DPK, termasuk simpanan berbasis Syariah, sebesar 27,87% menjadi Rp 40,21 triliun dari Rp 31,45 triliun di tahun sebelumnya.

Simpanan para nasabah masih didominasi oleh deposito berjangka yang berbiaya mahal, walaupun dominasinya mulai berkurang. Deposito berjangka kini mencapai Rp 23,91 triliun, atau 59,46% dari total dana pihak ketiga hingga akhir 2009, dibandingkan Rp 21,22 triliun, atau sekitar dua pertiga dari DPK Bank BTN pada tahun 2008.

Kenaikan giro sebesar 158% yang tercatat sebesar Rp 7,36 triliun di tahun 2009 dibandingkan angka Rp 2,85 triliun pada 2008, mendorong pergeseran penempatan dana masyarakat dari biaya tinggi ke biaya rendah bagi Bank BTN. Porsi giro dari total DPK kini berlipat ganda dari 9,07% menjadi 18,31% hanya dalam kurun waktu setahun. Dengan pertumbuhan yang tinggi proporsi dana berbunga rendah, maka biaya dana Bank BTN bisa ditekan sehingga dapat mengurangi dampak menurunnya suku bunga pinjaman terhadap NIM.

Capital Expenditures

Bank BTN is aware that now that it is among the top 10 biggest bank in the country, it must step up its services, particularly in IT, as it could help the bank in getting faster, more accurate and more transparent business data.

In order to do so, in the last two years, the Bank budgeted to improve its IT, by allocating a significant portion of its capital expenditures. In 2009, the Bank spent Rp 347,64 billion in capital expenditures, mostly for IT development and recovery of Menara Bank BTN. All capital expenditure investments were funded by internal sources.

Liabilities

Third-party funds remained the majority of Bank BTN's liabilities in 2009, accounting for 75.80% of total liabilities, with the remainder divided over government loans, marketable securities and other borrowings.

Third-Party Funds

Amid the tight competition for customers' funds, Bank BTN booked a significant increase in third-party funds, including sharia-based savings, rising 27.87% to Rp 40.21 trillion from Rp 31.45 trillion in the previous year.

Third-party deposits remained dominated by higher cost time deposits, although the domination is receding. Time deposits currently amount to Rp 23.91 trillion, or 59.46% of total third-party deposits as of end of 2009, compared to Rp 21.22 trillion, or about two-thirds of the bank's third-party deposits in 2008.

The increase in demand deposits, by 158% to Rp 7.36 trillion in 2009, compared to Rp 2.85 trillion in 2008, drove the shift from high-cost financing to low-cost financing for Bank BTN. The contribution of demand deposits for third-party funds doubled from 9.07% to 18.31% in just a year. With high growth in the portion of low-cost funds, Bank BTN's cost of funds could be pushed down to reduce the impact of interest loans on the NIM.



KOMPOSISI DANA PIHAK KETIGA (DALAM JUTAAN RUPIAH)
COMPOSITION OF THIRD PARTY FUNDS (IN MILLION RUPIAH)

	2009	% Share	2008	% Share	% YOY	
Giro	7.364.272	18,31%	2.853.230	9,07%	158,10%	Demand Deposits
Tabungan	8.940.964	22,23%	7.375.098	23,45%	21,23%	Savings
Deposito Berjangka	23.909.718	59,45%	21.220.416	67,48%	12,67%	Time Deposits
Jumlah	40.214.954	100,00%	31.448.744	100,00%	27,87%	Total

Simpanan Syariah

Simpanan berbasis syariah Bank BTN berlipat ganda atau meningkat 110,83% menjadi Rp 1,45 triliun. Kenaikan di tahun 2009 ini didorong oleh pertumbuhan deposito berjangka syariah yang melampaui angka Rp 1 triliun, atau naik 127,44% lalu disusul oleh giro Syariah (naik 82,33%) dan tabungan Syariah (naik 58,44%). Per akhir 2009, deposito berjangka Syariah masih mendominasi komposisi simpanan Syariah dengan porsi 78,69% dari angka total DPK syariah yang diikuti oleh tabungan Syariah (13,87%) dan giro Syariah (7,44%).

Sharia Deposits

Bank BTN's sharia-based deposits doubled, booking an increase of 110.83% to Rp 1.45 trillion. The increase in 2009 was driven by growth in time deposits based on sharia principles, which exceeded the Rp 1 trillion mark, rising 127.44%, followed by an increase in sharia-based demand deposits (which rose 82.33%), and sharia-based savings (up by 58.44%). As of end of 2009, sharia-based time deposits still dominated at 78.69% of total sharia-based deposits, followed by sharia savings (13.87%), and sharia-based demand deposits (7.44%).

KOMPOSISI DPK SYARIAH (DALAM JUTAAN RUPIAH)
COMPOSITION OF SHARIA DEPOSITS (IN MILLION RUPIAH)

	2009	%Share	2008	% Share	%Change	
Tabungan Syariah	200.638	13,87%	126.631	18,45%	58,44%	Sharia Savings
Giro Syariah	107.713	7,44%	59.075	8,61%	82,33%	Sharia Demand Deposits
Deposito berjangka Syariah	1.138.599	78,69%	500.613	72,94%	127,44%	Sharia Time Deposits
Jumlah	1.446.950	100,00%	686.319	100,00%	110,83%	Total

Surat-surat berharga yang diterbitkan

Walaupun secara historis simpanan nasabah merupakan mayoritas pendanaan, Bank BTN juga menerbitkan surat berharga dalam bentuk obligasi sejak tahun 1989. Posisi Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank BTN pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 3.221,89 miliar berupa Obligasi Rupiah. Pada tahun 2009 Bank BTN menerbitkan Obligasi XIII seri A dan B masing-masing sebesar Rp 300 miliar, serta Obligasi XIII seri C dengan nilai nominal sebesar Rp 900 miliar. Sementara itu, Obligasi X Bank BTN Tahun 2004 senilai Rp 750 miliar jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2009.

Securities Issued by BTN

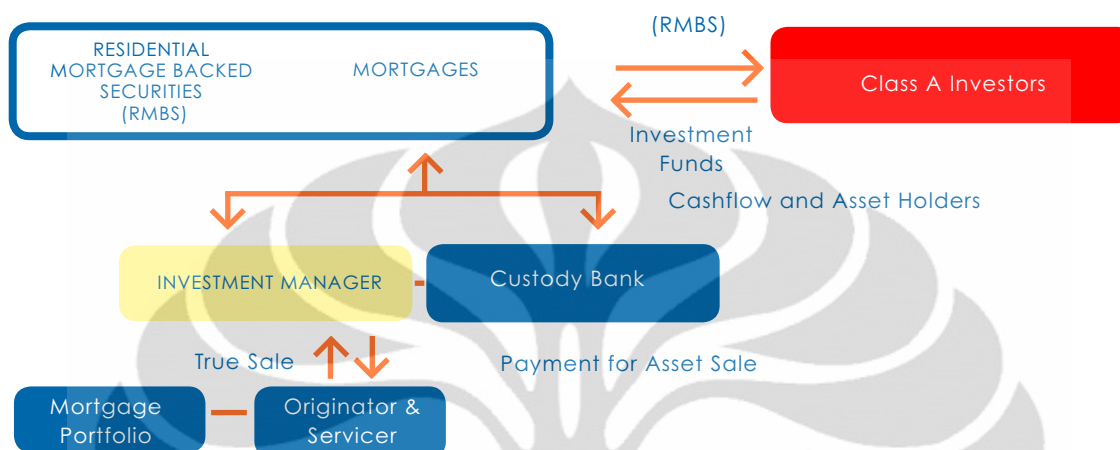
Despite the historical domination of customer deposits driving our funding, Bank BTN has also issued marketable securities in the form of bonds since 1989. The outstanding performance of marketable securities issued by Bank BTN as of the end of 2009 was Rp 3,221.89 billion, in the form of rupiah bonds. In 2009, Bank BTN issued its 13th series A and B bonds, each valued at Rp 300 billion, and series C bonds worth Rp 900 billion. Meanwhile, Bank BTN's 10th Bond issued in 2004 of Rp 750 billion has come due and was paid off on May 25, 2009.

Data lebih detail mengenai obligasi-obligasi yang pernah diterbitkan Bank BTN dapat dilihat pada bagian informasi saham dan obligasi dalam laporan tahunan ini.

Further detailed data regarding the bonds issued by Bank BTN is available in the information regarding stocks and bonds in this annual report.

Sekuritisasi Aset

Sebagai sumber pendanaan lainnya, Bank BTN juga telah melakukan sekuritisasi KPR melalui mekanisme jual putus (*true sale*) kepada PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp 500 miliar dan menerima pinjaman beragunan aset dari PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan jumlah yang sama. Bagan mengenai struktur sekuritisasi KPR adalah sebagai berikut:



Asset Securitization

As an alternative source of funding, Bank BTN also has Rp 500 billion in mortgage securities through a true sale mechanism with PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), and received asset-backed loans from PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) for the same amount. The structure of the mortgage asset securitization is shown in the following diagram:

Ekuitas

Sebagai hasil dari pencatatan saham perdana di Bursa Efek Indonesia (IPO), ekuitas Bank BTN naik sebesar 75,21% di tahun 2009 menjadi Rp 5,39 triliun, dari Rp 3,08 triliun pada tahun 2008. Bank BTN menerima dana sekitar Rp 1,88 triliun (sebelum dikurangi biaya emisi saham) pada bulan Desember 2009 sebagai hasil dari IPO tersebut.

Equity

As a result of the Bank's listing on the Indonesia Stock Exchange (IDX), the bank's equity rose 75.21% to Rp 5.39 trillion in 2009, up from Rp 3.08 trillion in 2008. The Bank received Rp 1.88 trillion (before deduction of listing expenses) from the December 2009 IPO proceeds.

RASIO KEUANGAN PERBANKAN

BANKING FINANCIAL RATIOS

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio*) Bank BTN naik 5,40%, menjadi 21,54% per akhir tahun 2009, dimana pada 2008 hanya 16,14%. Rasio CAR terutama meningkat akibat IPO di akhir tahun 2009 yang meningkatkan jumlah ekuitas Bank BTN secara signifikan serta mampu mengimbangi penurunan alamiah CAR akibat ekspansi kredit di sepanjang tahun 2009. Bank BTN akan secara konsisten menerapkan pengelolaan modal yang sehat dan efisien agar selalu di atas ketentuan minimum sebesar 8% sesuai persyaratan minimum Bank Indonesia.

Capital Adequacy Ratio

Bank BTN's capital adequacy ratio was up 5.40% to 21.54% as of end of 2009, from 16.14% in 2008. The CAR ratio also rose, mainly due to the IPO, which increased the Bank BTN's equity significantly, and could offset the normal decline of CAR due to loan expansion in 2009. Bank BTN will consistently implement healthy and efficient capital management to comply with Bank Indonesia's minimum capital requirement of 8%.

RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (DALAM MILIAR RUPIAH) CAPITAL ADEQUACY RATIO (IN BILLION RUPIAH)

	2009	2008
Modal Inti (Tier 1 Capital)	5.191	2.959
Modal Pelengkap (Tier 2 Capital)	317	266
CAR dengan memperhitungkan Risiko Kredit & Pasar (CAR included Credit & Market Risk)	21,54 %	16,14 %



Pinjaman Bermasalah (Non Performing Loan/NPL)
Pinjaman Bermasalah (NPL) Bank BTN secara historis lebih rendah dari *peer group*-nya, yaitu tak pernah lebih dari 5% untuk NPL Bruto, dan 3% untuk NPL bersih/net. Rasio NPL yang rendah tersebut dikarenakan sifat kredit perumahan yang sangat aman (*secured*) dan merupakan proporsi terbesar kredit yang disalurkan Bank BTN.

Non-Performing Loan (NPL) Ratio

Bank BTN's NPL ratio has historically been lower than other banks, that is, we have never exceeded 5% in gross NPL, or 3% in net NPL. The relatively low NPL rate is due to the nature of Bank BTN's mortgages, which are deemed very safe loans, and comprise mostly disbursed loans.

**KOLEKTIBILITAS KREDIT (DALAM JUTAAN RUPIAH)
LOAN COLLECTIBILITY (IN MILLION RUPIAH)**

Kolektibilitas Kredit : Loan Collectibility :	Usia Tunggakan (hari) Debt Age (Days)	2009	2008
		Jumlah Amount	Jumlah Amount
Lancar Current	0	34.326.341	27.743.616
Daftar Perhatian Khusus Special Mentions	1-90	5.036.303	3.257.737
Total Performing Loans		39.362.644	31.001.353
Tingkat Kredit Macet: Non Performing Loans:			
Kurang Lancar Sub Standard	91-120	102.956	96.848
Diragukan Doubtful	121-180	182.637	138.260
Macet Loss	>180	1.066.717	788.770
Total NPL		1.370.310	1.023.878
Total Loans		40.732.954	32.025.231

Rasio Kecukupan Penyisihan terhadap NPL (Ratio of Loan Loss Reserve to NPL)

Bank BTN tetap mempertahankan kebijakan rasio pemenuhan PPA Produktif lebih besar dari 100% di tahun 2009. Penetapan ini mencerminkan upaya yang serius untuk menerapkan praktek kehati-hatian seiring dengan aktifitas penyaluran kredit yang diharapkan akan terus meningkat di tahun 2010 dan ke depan.

Ratio of Requirement for Provision of Earning Assets

Bank BTN has maintained its policy to meet the requirement for provision of earning assets of more than 100% in 2009. This policy reflects the serious effort to implement the prudence in loan disbursement activities, which are expected to increase in 2010 and beyond.

**RASIO PEMENUHAN PPA PRODUKTIF (DALAM MILIAR RUPIAH)
RATIO OF REQUIREMENT FOR PROVISION OF EARNING ASSETS (IN BILLION RUPIAH)**

	2009	2008	% Y.O.Y
Kredit Bermasalah (NPL)	675,76	491,21	37,57%
Pencadangan Kerugian Kredit (Loan Loss Reserve / LLR)	759,30	605,69	25,36%
LLR/NPL RATIO (Coverage Ratio)	112,36%	123,31%	(10,95%)

Rasio Imbal Hasil Terhadap Aktiva

Rasio imbal hasil terhadap aktiva (*return on asset - ROA ratio*) sedikit turun ke level 1,47% pada tahun 2009, dibandingkan dengan 1,8% pada tahun 2008, dikarenakan pertumbuhan aktiva lebih tinggi dibanding pertumbuhan pendapatan yang mengalami tekanan akibat penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Rasio Imbal hasil atas Ekuitas

Rasio imbal hasil atas ekuitas (*return on equity - ROE ratio*) cenderung stabil di angka 18,27% pada 2009, dibandingkan pencapaian sebesar 19,64% pada 2008. Hal ini dikarenakan kenaikan laba yang lebih kecil dibanding pertumbuhan ekuitas akibat adanya dana masuk hasil pencatatan saham perdana (IPO)

Marjin Bunga Bersih

Marjin pendapatan bunga bersih (*Net Interest Margin-NIM*) Bank BTN pada 2009 sedikit lebih rendah dibandingkan 2008 atau 4,65% dibanding 5,08%.

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio total biaya operasional terhadap total pendapatan operasional (Beban Operasional Pendapatan Operasional - BOPO) pada tahun 2009 meningkat menjadi 87,87%, dari 86,18% di tengah upaya kami melakukan efisiensi biaya yang baru mulai digiatkan di tahun 2009.

Rasio Pinjaman terhadap Dana Pihak Ketiga (*Loan to Deposit Ratio/LDR*)

Bank BTN menjaga LDR tetap di level sekitar 100%. LDR Bank BTN bertahan 101,29% per akhir 2009, atau sedikit lebih rendah dibanding 2008 yang sebesar 101,83% namun masih tetap di atas rata-rata LDR bank-bank pemerintah yang sebesar 69,55%. Hal ini mencerminkan jalannya fungsi intermediasi perbankan pada Bank BTN sesuai komitmen kami sejak awal pendirian.

Informasi Keuangan dengan Kejadian Luar Biasa

Selama tahun 2009, tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi

Return on Assets

The return on asset ratio declined slightly to 1.47% in 2009, compared to 1.8% in 2008, as asset growth was faster than our income growth, which was under pressure due to decline of benchmark interest rate set by Bank Indonesia.

Return on Equity

Return on equity is relatively stable at 18.27% in 2009, compared to 19.64% in 2008. This is due to smaller growth of profits compared to equity growth due to large proceeds from the Bank's IPO (IPO).

Net Interest Margin (NIM)

Our NIM is slightly lower in 2009 compared to 2008, at 4.65% versus 5.08%.

Operational Expense to Operating Income Ratio

The ratio of total operational expenses to total operating income increased to 87.87%, from 86.18%, due to our efforts to increase cost efficiency in 2009.

Loan to Deposit Ratio/LDR

Bank BTN is maintaining the LDR at around 100%. Bank BTN's LDR stood at 101.29% at the end of 2009, or slightly lower than 2008, at 101.83%, but remains above the average LDR for state-owned banks at 69.55%. This reflected the good intermediacy function done by Bank BTN in accordance with the commitment we have upheld since our founding.

Financial Information of extraordinary events

There were no extraordinary events in 2009.



IKHTISAR RASIO KEUANGAN
FINANCIAL RATIO HIGHLIGHTS

	2009	2008		
PERMODALAN			CAPITAL	
CAR dengan memperhitungkan Risiko Kredit	21,78%	16,44%	CAR - credit risk	
CAR dengan memperhitungkan Risiko Pasar	21,54%	16,14%	CAR - credit and market risk	
Aktiva Tetap terhadap Modal	35,62%	53,97%	Fixed Assets to Capital	
KUALITAS AKTIVA			ASSETS QUALITY	
Aktiva Produktif Bermasalah	2,42%	2,36%	Non-Performing Earning Assets	
PPA Produktif terhadap Aktiva Produktif	1,33%	1,39%	Provision to Earning Assets	
Pemenuhan PPA Produktif	112,36%	123,31%	Requirement for Provision of Earning Assets	
Pemenuhan PPA Non Produktif	108,85%	119,85%	Requirement for Provision of Non-Earning Assets	
Pemenuhan PPA	112,30%	123,10%	Coverage Ratio	
NPL Kotor	3,36%	3,20%	NPL Gross	
NPL Bersih	2,75%	2,66%	NPL Net	
Rentabilitas			Profitability	
ROA	1,47%	1,80%	Return on Assets	
ROE	18,27%	19,64%	Return on Equity	
NIM	4,65%	5,08%	Net Interest Margin	
BOPO	87,87%	86,18%	Total Operating Expense to total operating Income	
LIKUIDITAS			LIQUIDITY	
LDR	101,29%	101,83%	Loan to Deposit Ratio	
KEPATUHAN			COMPLIANCE	
Persentase pelanggaran BMPK		0%	0%	Percentage of Legal Lending Limit Violation
1. Pihak terkait	0%	0%	1. Related Parties	
2. Pihak tidak terkait	0%	0%	2. Third Parties	
Persentase Pelampauan BMPK		0%	0%	Percentage of Legal Lending Limit in Excess
1. Pihak terkait	0%	0%	1. Related Parties	
2. Pihak tidak terkait	0%	0%	2. Third Parties	
Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	6,92%	5,26%	Reserves Requirement in Rupiah	
Posisi Devisa Netto (PDN)	1,15%	0,38%	Net Open Position	

TANGGUNG JAWAB PELAPORAN TAHUNAN

Responsibility for Annual Reporting

Laporan Tahunan berikut laporan keuangan dan informasi keuangan lain yang terkait merupakan tanggung jawab Manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing di bawah ini.

This annual report, accompanying financial statements and related financial information are the responsibility of the Management of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk and have been approved by members of the Board of Directors and the Board of Commissioners whose signatures appear below.

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS



Zaki Baridwan
Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner (Independent)



Subarjo Joyosumarto
Komisaris (Independen)
Commissioner (Independent)



Mulabasa Hutabarat
Komisaris
Commissioner

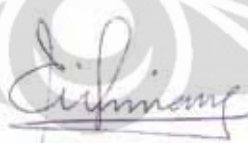


Gatot Mardiwasiso
Komisaris
Commissioner

DIREKSI BOARD OF DIRECTORS



Iqbal Latanro
Direktur Utama
President Director




Evi Firmansyah
Wakil Direktur Utama
Vice President Director



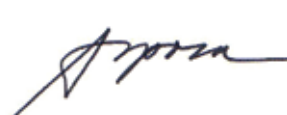
Sunarwa
Direktur
Managing Director



Saut Pardede
Direktur
Managing Director



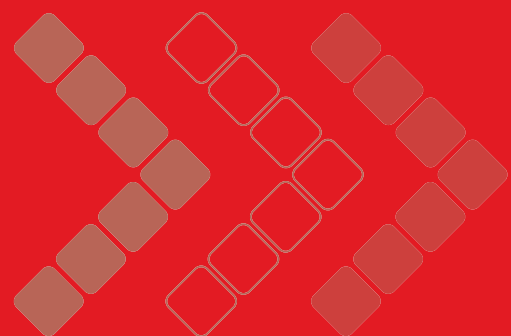
Irman A. Zahiruddin
Direktur
Managing Director



Purwadi
Direktur
Managing Director



LAPORAN KEUANGAN 2009
Financial Statements 2009





PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008/

Financial statements with independent auditors' report years ended December 31, 2009 and 2008

Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

 **ERNST & YOUNG**

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk.
KANTOR PUSAT :
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Telp : (021) 6336789 – 6332666 – 2310490
Fax : (021) 6346704

www.btn.co.id



DIREKSI

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN BESERTA
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2009 DAN 2008
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS WITH
THE INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2009 AND 2008
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Iqbal Latanro
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130
Alamat Rumah : Jl. Denpasar Raya Blok A 12
Setia Budi, Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 634 6764
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Saut Pardede
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130
Alamat Rumah : Jl. Kayu IV/6 Kayu Putih
Jakarta Timur
Nomor Telepon : (021) 638 51856
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
2. Laporan keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned:

1. Name : Iqbal Latanro
Office address : Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130
Residential address : Jl. Denpasar Raya Blok A 12
Setia Budi, Jakarta Selatan
Telephone : (021) 634 6764
Title : President Director
2. Name : Saut Pardede
Office address : Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130
Residential address : Jl. Kayu IV/6 Kayu Putih
Jakarta Timur
Telephone : (021) 638 51856
Title : Director

declare that:

1. We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
2. The financial statements of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia;
3. a. All information in the financial statements of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The financial statements of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk do not contain any incorrect material information or fact, nor do they omit information or fact;
4. We are responsible for the internal control system of PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

This declaration has been made in a truthful manner.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors
Jakarta, 07 April 2010/Jakarta, April 07, 2010

Iqbal Latanro
Direktur Utama/President Director

Saut Pardede
Direktur/Director

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2009 AND 2008

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/Pages</u>	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditors' Report</i>
Neraca.....	1-5	<i>Balance Sheets</i>
Laporan Laba Rugi.....	6-7	<i>Statements of Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas.....	8-9	<i>Statements of Changes in Stockholders' Equity</i>
Laporan Arus Kas.....	10-12	<i>Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan.....	13-143	<i>Notes to the Financial Statements</i>

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-11516

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami telah mengaudit neraca PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-11516

The Stockholders, and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

We have audited the balance sheets of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") as of December 31, 2009 and 2008, and the related statements of income, changes in stockholders' equity and cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2009 and 2008, and the results of its operations and its cash flows for the years then ended in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. RPC-11388 tanggal 7 April 2010 atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 (disajikan untuk tujuan perbandingan), serta periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2007. Terkait dengan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi XIV Bank BTN tahun 2010, Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan seperti disebutkan di atas yang disertai dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan tersebut (Catatan 52).

We have issued independent auditors' report No. RPC-11388 dated April 7, 2010 of the Bank's financial statements for the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007 (presented for comparative purposes), seven-month period ended December 31, 2007 and five-month period ended May 31, 2007. Related to the Bank's plan for the public offering of BTN Bonds XIV 2010, the Bank has reissued its financial statements mentioned above with certain changes in the presentation and disclosures of such financial statements (Note 52).

Purwanto, Sarwoko & Sandjaja



Drs. Hari Purwanto

Izin Akuntan Publik No. 98.1.0065/Public Accountant License No. 98.1.0065

7 April 2010/April 7, 2010

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to review such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NERACA
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
BALANCE SHEETS
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	2009	Catatan/ Notes	2008	
ASET				ASSETS
KAS	294.357	2a,4	229.843	CASH
GIRO PADA BANK INDONESIA	2.842.112	2a,5	1.811.728	CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN	33.378	2a,2d,2e,6	21.605	CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Penyisihan kerugian	(7.686)		(10.011)	<i>Allowance for possible losses</i>
	25.692		11.594	
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	136.688	2d,2f,7	131.755	PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
Penyisihan kerugian	(3.763)		(6.542)	<i>Allowance for possible losses</i>
	132.925		125.213	
EFEK-EFEK - setelah dikurangi bunga dan diskonto dan ditambah premium yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp8.878 dan Rp5.045 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008		2d,2g,8		SECURITIES - Net of interest and discount plus unamortized premium of Rp8,878 and Rp5,045 as of December 31, 2009 and 2008, respectively
Diperdagangkan	20.002		-	<i>Trading</i>
Tersedia untuk dijual	105.432		89.385	<i>Available-for-sale</i>
Dimiliki hingga jatuh tempo	5.362.538		1.648.009	<i>Held-to-maturity</i>
Jumlah efek-efek	5.487.972		1.737.394	<i>Total securities</i>
Penyisihan kerugian	(4.411)		(4.029)	<i>Allowance for possible losses</i>
	5.483.561		1.733.365	
OBLIGASI PEMERINTAH (OBLIGASI REKAPITALISASI) - setelah dikurangi diskonto dan ditambah premium yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp8.158 dan Rp9.405 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008		2d,2h,9		GOVERNMENT BONDS (RECAPITALIZATION BONDS) - Net of unamortized discount and plus premium of Rp8,158 and Rp9,405 as of December 31, 2009 and 2008, respectively
Diperdagangkan	10.723		-	<i>Trading</i>
Tersedia untuk dijual	4.984.710		5.203.036	<i>Available-for-sale</i>
Dimiliki hingga jatuh tempo	2.384.780		2.373.533	<i>Held-to-maturity</i>
	7.380.213		7.576.569	
TAGIHAN SWAP SUKU BUNGA	33.410	2d,2i,10,28,29	33.361	INTEREST RATE SWAP RECEIVABLES
Penyisihan kerugian	(351)		(333)	<i>Allowance for possible losses</i>
	33.059		33.028	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
BALANCE SHEETS (continued)
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	2009	Catatan/ Notes	2008	
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH		2c,2d,2j, 2k,11,16, 17,18,22,42		LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES
Kredit yang diberikan				<i>Loans</i>
Pihak ketiga	38.718.344		30.767.976	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	18.858		6.019	<i>Related parties</i>
Jumlah kredit yang diberikan	38.737.202		30.773.995	<i>Total loans</i>
Penyisihan kerugian	(619.829)		(540.827)	<i>Allowance for possible losses</i>
	38.117.373		30.233.168	
Pembiayaan/piutang syariah				<i>Sharia financing/receivables</i>
Pihak ketiga	1.995.144		1.250.366	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	608		870	<i>Related parties</i>
Jumlah pembiayaan/piutang syariah	1.995.752		1.251.236	<i>Total sharia financing/receivables</i>
Penyisihan kerugian	(83.724)		(15.768)	<i>Allowance for possible losses</i>
	1.912.028		1.235.468	
	40.029.401		31.468.636	
ASET PAJAK TANGGUHAN - Bersih	72.221	2x,36	103.981	DEFERRED TAX ASSETS - Net
ASET TETAP		2l,12,32		PREMISES AND EQUIPMENT
Nilai tercatat	1.962.073		1.740.475	<i>Carrying value</i>
Akumulasi penyusutan	(725.401)		(667.830)	<i>Accumulated depreciation</i>
	1.236.672		1.072.645	
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	508.542	13	466.851	INTEREST RECEIVABLES
ASET LAIN-LAIN	408.912	2d,2m,14	358.718	OTHER ASSETS
JUMLAH ASET	58.447.667		44.992.171	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
BALANCE SHEETS (continued)
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	2009	Catatan/ Notes	2008	
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				LIABILITIES AND STOCKHOLDER'S EQUITY
KEWAJIBAN				LIABILITIES
KEWAJIBAN SEGERA	664.765	15	592.025	CURRENT LIABILITIES
SIMPANAN DARI NASABAH		2c,2n,42 16		DEPOSITS
Giro				<i>Demand deposits</i>
Pihak ketiga	7.222.120		2.732.840	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	34.439		61.315	<i>Related parties</i>
	7.256.559		2.794.155	
Giro Wadiah		16		<i>Wadiah demand deposits</i>
Pihak ketiga	99.919		58.137	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	7.794		938	<i>Related parties</i>
	107.713		59.075	
	7.364.272		2.853.230	
Tabungan		17		<i>Savings deposits</i>
Pihak ketiga	8.714.702		7.238.122	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	25.624		10.345	<i>Related parties</i>
	8.740.326		7.248.467	
Tabungan Wadiah dan Mudharabah		17		<i>Wadiah and Mudharabah savings deposits</i>
Pihak ketiga	200.021		125.630	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	617		1.001	<i>Related parties</i>
	200.638		126.631	
	8.940.964		7.375.098	
Deposito Berjangka		18		<i>Time Deposits</i>
Pihak ketiga	22.743.026		20.678.662	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	28.093		41.141	<i>Related parties</i>
	22.771.119		20.719.803	
Deposito Berjangka Mudharabah		18		<i>Mudharabah Time Deposits</i>
Pihak Ketiga	1.133.098		493.703	<i>Third parties</i>
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	5.501		6.910	<i>Related parties</i>
	1.138.599		500.613	
	23.909.718		21.220.416	
Jumlah Simpanan Dari Nasabah	40.214.954		31.448.744	<i>Total Deposits</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
BALANCE SHEETS (continued)
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	2009	Catatan/ Notes	2008	
SIMPANAN DARI BANK LAIN	504.763	2o,19	330.190	DEPOSITS FROM OTHER BANKS
KEWAJIBAN SWAP SUKU BUNGA	-	2i,10, 28,29	2.115	INTEREST RATE SWAP LIABILITIES
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI - setelah dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi sebesar Rp6.777 pada tanggal 31 Desember 2009	3.564.709	2p,9,20	1.775.000	SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE AGREEMENTS - Net of unamortized interest expense of Rp6,777 as of December 31, 2009
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN - setelah dikurangi obligasi dalam perbendaharaan sebesar Rp20.000 pada tanggal 31 Desember 2009 dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp8.106 dan Rp3.843 pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008	3.221.894	1c,2q,2r, 21	2.496.157	SECURITIES ISSUED - Net of treasury bonds of Rp20,000 as of December 31, 2009, and unamortized bonds issuance cost of Rp8,106 and Rp3,843 as of December 31, 2009 and 2008, respectively
PINJAMAN YANG DITERIMA	2.983.997	11,22	3.281.294	FUND BORROWINGS
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	161.604	23	196.752	ACCRUED INTEREST
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	39.538	2d,24,38	28.183	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
KEWAJIBAN LAIN-LAIN	1.698.318	25	1.513.339	OTHER LIABILITIES
PINJAMAN SUBORDINASI - setelah dikurangi biaya emisi obligasi subordinasi yang belum diamortisasi sebesar Rp98 pada tanggal 31 Desember 2008	-	1c,2q, 2r,26	249.902	SUBORDINATED LOANS - Net of unamortized subordinated bonds issuance cost of Rp98 as of December 31, 2008
JUMLAH KEWAJIBAN	53.054.542		41.913.701	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NERACA (lanjutan)
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
BALANCE SHEETS (continued)
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	2009	Catatan/ Notes	2008	
EKUITAS				STOCKHOLDERS' EQUITY
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) dan Rp169.595,99 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008				Capital stock - Rp500 (full amount) and Rp169,595.99 (full amount) par value per share as of December 31, 2009 and 2008, respectively
Modal dasar - 20.478.432.000 saham (terdiri dari 1 lembar saham seri A dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) dan 60.374.163 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008				Authorized - 20,478,432,000 shares (consist of 1 share of Series A dwiwarna and 20,478,431,999 shares of series B) and 60,374,163 shares as of December 31, 2009 and 2008, respectively
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.714.057.000 saham (terdiri dari 1 lembar saham seri A dwiwarna dan 8.714.056.999 lembar saham seri B) dan 15.093.540 saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008	4.357.029	27a	2.559.804	Issued and fully paid - 8,714,057,000 shares (consist of 1 shares of series A dwiwarna and 8,714,056,999 shares of series B) and 15,093,540 shares as of December 31, 2009 and 2008, respectively
Tambahan modal disetor	639.626	27b	-	Additional paid-in capital
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang tersedia untuk dijual - bersih	(54.239)	2g,2h,8,9	(114.747)	Unrealized loss on available- for-sale securities and government bonds (recapitalization bonds) - net
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	158.421		202.939	Appropriated retained earnings
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya	292.288	2b,3	430.474	Unappropriated retained earnings
JUMLAH EKUITAS	5.393.125		3.078.470	NET STOCKHOLDERS' EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	58.447.667		44.992.171	TOTAL LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF INCOME
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

	2009	Catatan/ Notes	2008	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil				<i>Interest Income and Income from Profit Sharing</i>
Bunga	5.471.728	2c,2s,28,42	4.372.009	<i>Interest</i>
Provisi dan komisi	124.954	2t	120.320	<i>Fees and commissions</i>
Bagi hasil secara syariah	133.259	2u	74.697	<i>Income from sharia</i>
Jumlah Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	5.729.941		4.567.026	<i>Total Interest Income and Income from Profit Sharing</i>
Beban Bunga dan Bonus				<i>Interest and Bonus Expenses</i>
Bunga	(3.420.345)	2c,2s,29,42	(2.600.060)	<i>Interest</i>
Beban pendanaan lainnya	(4.115)		(3.859)	<i>Other financing expenses</i>
Bonus	(3.272)	2u	(2.775)	<i>Bonus</i>
Jumlah Beban Bunga dan Bonus	(3.427.732)		(2.606.694)	<i>Total Interest and Bonus Expenses</i>
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Bersih	2.302.209		1.960.332	<i>Interest Income and Income from Profit Sharing - Net</i>
Pendapatan Operasional Lainnya				<i>Other Operating Income</i>
Pungutan administrasi dan denda simpanan dan kredit yang diberikan	208.936		176.330	<i>Penalties and administration fees on deposits and loans</i>
Keuntungan dari penjualan obligasi dalam perbendaharaan - bersih	-		321	<i>Gain on resale of treasury bonds - net</i>
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) - bersih	5.198	2h,9	-	<i>Gain on sale of government bonds (recapitalization bonds) - net</i>
Keuntungan dari penjualan efek-efek - bersih	-	2g,8	53	<i>Gain on sale of securities - net</i>
Keuntungan dari kenaikan nilai efek-efek yang diperdagangkan - bersih	2	2g,8	-	<i>Gain from increase in value of trading securities - net</i>
Lain-lain	50.721	30	40.367	<i>Others</i>
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	264.857		217.071	<i>Total Other Operating Income</i>
Pembalikan (Beban) Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif dan Non-Produktif	(52.864)	2d,31	4.782	<i>Reversal of allowance (provision) for Possible Losses on Earning and Non-earning Assets</i>
Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	(11.355)	2d,24	(9.770)	<i>Provision for Possible Losses on Commitments and Contingencies</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF INCOME (continued)
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

	2009	Catatan/ Notes	2008	
Beban Operasional Lainnya				<i>Other Operating Expenses</i>
Gaji dan tunjangan karyawan	(937.075)	2v,33,39,42	(772.818)	<i>Salaries and employee benefits</i>
Umum dan administrasi	(673.954)	32	(555.335)	<i>General and administrative</i>
Premi program penjaminan				<i>Premium on Government's</i>
Pemerintah	(70.562)	41	(51.298)	<i>guarantee program</i>
Kerugian dari transaksi				<i>Loss on foreign exchange</i>
mata uang asing - bersih	(11.407)	2w	(3.530)	<i>transactions - net</i>
Kerugian pembelian kembali				<i>Loss on repurchase of treasury</i>
obligasi dalam perbendaharaan				<i>bonds - net</i>
- bersih	(127)	2q,21	-	
Kerugian dari penjualan				<i>Loss on sale of government</i>
obligasi pemerintah (obligasi				<i>bonds (recapitalization</i>
rekapitalisasi) - bersih	-	2h,9	(23.105)	<i>bonds) - net</i>
Kerugian dari penurunan nilai				<i>Loss from decrease in value</i>
obligasi pemerintah (obligasi				<i>of trading government</i>
rekapitalisasi) yang				<i>bonds (recapitalization</i>
diperdagangkan - bersih	(27)	2h,9	(32.116)	<i>bonds) - net</i>
Kerugian penurunan nilai				<i>Loss from decrease in value</i>
efek-efek yang				<i>of trading securities - net</i>
diperdagangkan - bersih	-	2g,8	(7.535)	
Lain-lain	(70.257)	34	(56.853)	<i>Others</i>
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(1.763.409)		(1.502.590)	<i>Total Other Operating Expenses</i>
LABA OPERASIONAL	739.438		669.825	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN				NON-OPERATING
OPERASIONAL - BERSIH	6.379	35	(4.292)	INCOME (EXPENSE) - NET
LABA SEBELUM				INCOME BEFORE INCOME TAX
PAJAK PENGHASILAN	745.817		665.533	INCOME TAX BENEFIT
(BEBAN) MANFAAT PAJAK		2x,36		(EXPENSE)
Kini	(227.996)		(291.935)	<i>Current</i>
Tangguhan	(11.578)		56.876	<i>Deferred</i>
Beban Pajak - Bersih	(239.574)		(235.059)	<i>Income Tax Expense - Net</i>
LABA BERSIH SEBELUM POS				NET INCOME BEFORE
LUAR BIASA	506.243		430.474	EXTRAORDINARY ITEM
POS LUAR BIASA - BERSIH	(15.790)	2l,12,37	-	EXTRAORDINARY ITEM - NET
LABA BERSIH	490.453		430.474	NET INCOME
LABA BERSIH PER				BASIC EARNINGS
SAHAM DASAR				PER SHARE
(nilai penuh)	76	2z,27,50	68	<i>(full amount)</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY**

**Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	Keuntungan (kerugian) Yang Belum Direalisasi Atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Obligasi Rekapitalisasi) Yang Tersedia Untuk Dijual - bersih/ Unrealized Gain (Loss) on Available-for-sale Securities and Government Bonds (Recapitalization Bonds) - net	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Saldo Laba Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated Retained Earnings	Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated Retained Earnings	Ekuitas Bersih/ Net Stockholders' Equity	
Saldo per 31 Desember 2007 Laba bersih (satu tahun)						Balance as of December 31, 2007
Pembagian laba bersih		2.559.804	-	233.976	2.787.412	Net income for the year
Dividen	27c	-	-	430.474	430.474	Distribution of net income
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan		-	-	(23.598)	(23.598)	Dividend
Program kemitraan dan bina lingkungan		-	202.939	(202.939)	-	Appropriation for general and special reserves
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang tersedia untuk dijual		-	-	(9.439)	(9.439)	Partnership and environmental development program
	2g, 2h, 8, 9	-	-	-	(106.379)	Unrealized loss on available-for-sale securities and government bonds (recapitalization bonds)
Saldo per 31 Desember 2008		2.559.804	202.939	430.474	3.078.470	Balance as of December 31, 2008
Laba bersih (satu tahun)		-	-	490.453	490.453	Net income for the year
Pembagian laba bersih	27c	-	-	(43.047)	(43.047)	Distribution of net income
Dividen		-	-	374.513	-	Dividend
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan		-	-	-	-	Appropriation for general and special reserves

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CHANGES IN STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)
Years ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

	Keuntungan (kerugian) Yang Belum Direalisasi Atas Efek-efek dan Obligasi Pemerintah (Obligasi Rekapitalisasi) Yang Tersedia Untuk Dijual - bersih/ Unrealized Gain (Loss) on Available-for-sale Securities and Government Bonds (Recapitalization Bonds) - net	Saldo Laba Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated Retained Earnings	Saldo Laba Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated Retained Earnings	Saido Laba Ekuitas Bersih/ Net Stockholders' Equity	
Catatan/ Notes	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital			
Program kemiraan dan bina lingkungan	-	-	-	(12.914)	Partnership and environmental development program
Kapitalisasi Laba yang telah ditentukan penggunaannya dan laba bersih periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh	617.196	-	(419.031)	(198.165)	Capitalization of appropriated retained earnings and income for the six-months period ended June 30, 2009 into issued and fully paid capital stock
Penerbitan saham	1.180.029	-	-	1.180.029	Stock issuance
Tambahan modal disetor	-	639.626	-	639.626	Additional paid-in capital
Kerugian yang belum direalisasi atas efek-erek dan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang tersedia untuk dijual	-	-	-	60.508	Unrealized gain on available-for-sale securities and government bonds (recapitalization bonds)
Saldo per 31 Desember 2009	4.357.029	639.626	158.421	292.288	Balance as of December 31, 2009
				5.393.125	

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

	2009	Catatan/ Notes	2008	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga dan bagi hasil, provisi dan komisi	5.691.970		4.480.873	<i>Interest and profit sharing, fees and commissions received</i>
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	86.671	11	93.280	<i>Bad debt recoveries</i>
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(3.462.878)		(2.535.349)	<i>Interest and bonus, fees and commissions paid</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan	(269.211)		(293.709)	<i>Corporate income tax paid</i>
Beban operasional lainnya - bersih	(1.379.881)		(1.181.133)	<i>Other operating expenses - net</i>
Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - bersih	6.379		(4.292)	<i>Other non-operating income (expense) - net</i>
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan kewajiban operasi	673.050		559.670	<i>Cash receipts before changes in operating assets and liabilities</i>
Perubahan dalam aset dan kewajiban operasi:				<i>Changes in operating assets and liabilities:</i>
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				<i>Decrease (increase) in operating assets:</i>
Penempatan pada bank lain	(4.933)		(77.195)	<i>Placements with other banks</i>
Efek-efek diperdagangkan dan tersedia untuk dijual	(36.049)		(58.331)	<i>Trading and available-for-sale securities</i>
Obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) diperdagangkan dan tersedia untuk dijual	288.294		1.047.424	<i>Trading and available-for-sale government bonds (recapitalization bonds)</i>
Tagihan swap suku bunga	(49)		109.367	<i>Interest rate swap receivables</i>
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	(8.794.395)		(9.775.606)	<i>Loans and sharia financing/receivables</i>
Aset lain-lain	(43.972)		139.904	<i>Other assets</i>
Kenaikan (penurunan) dalam kewajiban operasi:				<i>Increase (decrease) in operating liabilities:</i>
Kewajiban segera	120.096		88.817	<i>Current liabilities</i>
Simpanan dari nasabah				<i>Deposits</i>
Giro	4.462.404		577.466	<i>Demand deposits</i>
Giro Wadiah	48.638		30.577	<i>Wadiah demand deposits</i>
Tabungan	1.491.859		161.802	<i>Savings deposits</i>
Tabungan Wadiah dan Mudharabah	74.007		57.162	<i>Wadiah and Mudharabah savings deposits</i>
Deposito berjangka	2.051.316		6.386.571	<i>Time deposits</i>
Deposito berjangka Mudharabah	637.986		48.078	<i>Mudharabah time deposits</i>
Simpanan dari bank lain	174.573		315.042	<i>Deposits from other banks</i>
Kewajiban swap suku bunga	(2.115)		2.115	<i>Interest rate swap liabilities</i>
Kewajiban lain-lain	184.979		219.401	<i>Other liabilities</i>
Kas bersih dari aktivitas normal	1.413.633		(167.736)	<i>Net cash from normal activity</i>
Penerimaan dari klaim asuransi	40.300		-	<i>Collection of fire insurance claim</i>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	1.453.933		(167.736)	<i>Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

	2009	Catatan/ Notes	2008	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penjualan (pembelian) efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	(3.718.363)		141.946	<i>Sale (purchase) of held-to-maturity securities</i>
Pembelian aset tetap	(347.641)	12	(134.503)	<i>Acquisitions of premises and equipment</i>
Pembelian obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang dimiliki hingga jatuh tempo	(11.134)		(50.172)	<i>Purchased of held-to-maturity government bonds (recapitalization bonds)</i>
Penjualan aset tetap	-		4.947	<i>Sale of premise and equipment</i>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.077.138)		(37.782)	Net Cash Used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	1.500.000		-	<i>Receipt from issuance of securities issued</i>
Pelunasan pinjaman subordinasi	(250.000)		-	<i>Repayment of subordinated loan</i>
Pembayaran biaya emisi surat-surat berharga yang diterbitkan	(6.231)		-	<i>Payment on securities issuance cost</i>
Hasil dari efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.789.710		1.124.999	<i>Proceeds from securities sold under repurchase agreements</i>
Penjualan (pembelian) kembali obligasi dalam perbendaharaan	(20.000)		8.000	<i>Resale (repurchase) of treasury bonds</i>
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang diterbitkan	(750.000)		(750.000)	<i>Payment on maturity of securities issued</i>
Penerbitan saham	1.888.046		-	<i>Stock issuance</i>
Pembayaran biaya emisi penerbitan saham	(68.391)		-	<i>Payment on stock issuance cost</i>
Pembayaran dividen dan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Pembayaran) pinjaman yang diterima	(55.961)	27c	(33.037)	<i>Repayments of dividends and Partnership and Environmental Development Program</i>
	(297.297)		(344.460)	<i>Payment of fund borrowings</i>
Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	3.729.876		5.502	Net Cash provided by Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	1.106.671		(200.016)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.063.176		2.263.192	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	3.169.847		2.063.176	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
 Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
 31 Desember 2009 dan 2008
 (Disajikan dalam jutaan rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
 Years Ended
 December 31, 2009 and 2008
 (Expressed in millions of rupiah,
 unless otherwise stated)

	2009	Catatan/ Notes	2008	
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:				The details of cash and cash equivalents at end of year are as follows:
Kas	294.357	2a,4	229.843	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.842.112	2a,5	1.811.728	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	33.378	2a,6	21.605	Current accounts with other banks
Jumlah	3.169.847		2.063.176	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A. Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan perubahan yang didokumentasikan dalam Akta yang dibuat oleh Notaris Emi Susilowati, S.H., No. 45 tanggal 24 April 2008. Perubahan terakhir ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-35584.AH.01.02 tanggal 25 Juni 2008.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip *syariah*.

Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip *syariah* pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang *syariah* pertama di Jakarta - Harmoni.

1. GENERAL

a. Bank's establishment

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") was established as a state-owned bank originally under the name "Bank Tabungan Pos" based on Martial Law No. 9 of 1950 dated February 9, 1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to "Bank Tabungan Negara" based on Government Regulation Amendment of Law No. 4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989.

Based on Government Regulation No. 24 of 1992, the status of the Bank has been changed to a state-owned limited liability corporation (Persero). The Bank's deed of establishment as a limited liability corporation was documented under deed No. 136 dated July 31, 1992 of Muhani Salim, S.H. and was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 dated August 12, 1992, and was published in Supplement No. 6A of State Gazette No. 73 dated September 11, 1992. The articles of association of the Bank has been amended several times, the last amendment of which was made under notarial deed No. 45 dated April 24, 2008 of Emi Susilowati, S.H. This last amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-35584.AH.01.02 dated June 25, 2008.

Based on the Decision Letter No. 27/55/KEP/DIR dated September 23, 1994 of the Directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

According to article 3 of the Bank's articles of association, the scope of the Bank's activities is to conduct commercial banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Bank's activities based on *sharia* principles.

The Bank started its activities based on *sharia* principles on February 14, 2005 through the establishment of its first *sharia* branch in Jakarta - Harmoni.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Berdasarkan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H. mengenai pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka.

Berdasarkan keputusan tersebut, anggaran dasar bank telah diubah pada tanggal 13 Oktober 2009. Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH.01.02. tahun 2009.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Bank memiliki 81 kantor cabang (termasuk 20 kantor cabang *syariah*), 205 cabang pembantu (termasuk 1 kantor cabang pembantu *syariah*) dan 2.045 SOPP (System On-line Payment Points/Kantor Pos *On-line*).

b. Rekapitalisasi

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang penambahan penyertaan Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang penambahan modal Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp2.805.000, sehingga tambahan penyertaan Pemerintah keseluruhan menjadi sebesar Rp14.005.000. Penambahan modal tersebut dilakukan melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi Pemerintah untuk Bank sebesar Rp9.803.500 dan Rp4.201.500 masing-masing pada tanggal 25 Juli 2000 dan 31 Oktober 2000 (Catatan 27a).

1. GENERAL (continued)

a. Bank's establishment (continued)

The decision in the Extraordinary Stockholders' General Meeting to amend all of the Bank's articles of association to become a public company was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H.

Based on the decision above, the Bank's articles of association has been amended on October 13, 2009. The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its letter No. AHU-49309.AH.01.02. of 2009.

The Bank is domiciled in Jakarta and its head office is located at Jalan Gajah Mada No. 1, Central Jakarta.

As of December 31, 2009, the Bank has 81 branches (including 20 sharia branches), 205 sub-branches (including 1 sharia sub-branch) and 2,045 SOPP (System On-line Payment Points/On-line Post Offices).

b. Recapitalization

On May 28, 1999, the Government issued Government Regulation No. 52 of 1999 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp11,200,000. On August 21, 2000, the Government issued Government Regulation No. 68 of 2000 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp2,805,000 so that the additional Government capital participation would total Rp14,005,000. The increase in the Government participation was settled through the issuance to the Bank of the Government's recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 and Rp4,201,500 on July 25, 2000 and October 31, 2000, respectively (Note 27a).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

b. Rekapitalisasi (lanjutan)

Pada tanggal 28 Februari 2001, Direksi Bank dan Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Manajemen yang berisikan antara lain bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi akhir Bank adalah sebesar Rp13.843.540 dan kelebihan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp161.460 harus dikembalikan kepada Pemerintah. Pada tanggal 5 November 2001, kelebihan obligasi rekapitalisasi tersebut dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

c. Penawaran umum obligasi Bank

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 13 kali penerbitan dan 1 kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN I/ BTN Bonds I	50.000	5 tahun/years	25 Juli 1994/ July 25, 1994	18,75% tetap/ 18.75% fixed
Obligasi BTN II/ BTN Bonds II	50.000	5 tahun/years	1 Juni 1995/ June 1, 1995	16,25% tetap/ 16.25% fixed
Obligasi BTN III/ BTN Bonds III	50.000	5 tahun/years	11 November 1996/ November 11, 1996	20,00% tetap/ 20.00% fixed
Obligasi BTN IV/ BTN Bonds IV	100.000	5 tahun/years	23 Januari 1998/ January 23, 1998	17,00% tetap/ 17.00% fixed

1. GENERAL (continued)

b. Recapitalization (continued)

On February 28, 2001, the Bank's Directors and the Minister of Finance entered into a Management Contract which includes, among others, the total final recapitalization requirement of the Bank of Rp13,843,540 and the excess recapitalization bonds of Rp161,460 should be returned to the Government. On November 5, 2001, the Bank returned such excess recapitalization bonds to the Government.

As a result of the Management Contract, the Minister of Finance issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the determination of the final amount of the Government's required capital contribution to the Bank amounting to Rp13,843,540 and implementation of the Government's rights as a result of the additional contributed capital of the Republic of Indonesia to the capital of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk as a limited liability company in relation to the commercial banks recapitalization program through conversion to become 13,843,540 shares of stock which were issued by the Bank with a nominal value (full amount) of Rp1,000,000 per share. This Regulation was applied retroactively to May 31, 2007.

c. Public offering of bonds

The Bank issued thirteen series of bonds and a series of subordinated bond instruments from July 25, 1989 to December 31, 2009, with the details as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Penawaran umum obligasi Bank (lanjutan)

c. Public offering of bonds (continued)

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Obligasi BTN V/ BTN Bonds V	150.000	5 tahun/years	31 Juli 1998/ July 31, 1998	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 15.25% fixed for first and second years, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VI/ BTN Bonds VI	350.000	5 tahun/years	21 Desember 2000/ December 21, 2000	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.25% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VII/ BTN Bonds VII	200.000	5 tahun/years	22 Juli 2001/ July 22, 2001	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.125% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VIII/ BTN Bonds VIII	400.000	5 tahun/years	18 Juli 2002/ July 18, 2002	14,15% tetap/ 14.15% fixed
Obligasi BTN IX/ BTN Bonds IX	750.000	5 tahun/years	2 Oktober 2008/ October 2, 2008	12,50% tetap/ 12.50% fixed
Obligasi BTN X/ BTN Bonds X	750.000	5 tahun/years	25 Mei 2009/ May 25, 2009	12,20% tetap/ 12.20% fixed
Obligasi BTN XI/ BTN Bonds XI	750.000	5 tahun/years	6 Juli 2010/ July 6, 2010	12,00% tetap/ 12.00% fixed
Obligasi BTN XII/ BTN Bonds XII	1.000.000	10 tahun/years	19 September 2016/ September 19, 2016	12,75% tetap/ 12.75% fixed
Obligasi BTN XIII A/ BTN Bonds XIII A	300.000	3 tahun/years	29 Mei 2012/ May 29, 2012	11,75% tetap/ 11.75% fixed
Obligasi BTN XIII B/ BTN Bonds XIII B	300.000	4 tahun/years	29 Mei 2013/ May 29, 2013	12,00% tetap/ 12.00% fixed
Obligasi BTN XIII C/ BTN Bonds XIII C	900.000	5 tahun/years	29 Mei 2014/ May 29, 2014	12,25% tetap/ 12.25% fixed
Obligasi Subordinasi BTN I/ Subordinated Bonds BTN I	250.000	10 tahun/years	25 Mei 2014/ May 25, 2014	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun ke enam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan/ 12.60% fixed for first year until fifth year, 22.60% fixed for sixth year until tenth year if the Bank does not exercise its buy option on the fifth year since the issuance date

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham

Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. PW.01/3104/DPR RI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (nilai penuh) per saham.

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock Allocation/MESA). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lockup* selama enam bulan. Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in its chairman letter No. PW.01/3104/DPR RI/V/2009 dated May 29, 2009, and was enacted by the government as stipulated by Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 of 2009 and regulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of the stock ownership structure of the state through Initial Public Offering of shared of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the registration statement submitted by the Bank relating to the Initial Public Offering of 6,353,999,999 ordinary shares Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 ordinary shares New Series B, at Rp500 (full amount) per share to the public, became effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, were listed and traded in the Indonesia Stock Exchange on December 17, 2009, with the selling price of Rp800 (full amount) per share.

In relation to the Initial Public Offering of shares, the Bank implemented the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares for registered employees as of September 30, 2009. The MESA Program became effective on September 17, 2009 and all qualified employees took the program which consisting of 226,928,500 Series B shares (with nominal value Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering amounting to Rp800 per share) with a lock up period until six months. The share price discount for MESA program was recognized as the Bank's expense in 2009, amounting to 20% or Rp41,353 including the income tax expense.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan karyawan

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. KEP-29/MBU/2008 tanggal 22 Januari 2008, susunan dewan komisaris Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama (merangkap komisaris independen)

Zaki Baridwan

President Commissioner - (also acting as Independent Commissioner)

Komisaris

Mulabasa Hutabarat

Commissioner

Komisaris

Subarjo Joyosumarto

Commissioner

Komisaris

Memed Sosiawan*

Commissioner

Komisaris

Gatot Mardiwastito

Commissioner

* Permohonan pengunduran diri telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-203/MBU/2008 tanggal 21 Oktober 2008

* Request for resignation has been approved based on Decision Letter No. KEP-203/MBU/2008 dated October 21, 2008 of the Ministry of State-owned Enterprises

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-291/MBU/2007 tanggal 19 Desember 2007, susunan dewan direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Based on the Decision Letter No. KEP-291/MBU/2007 dated December 19, 2007 of the Ministry of State-owned Enterprises, the composition of the Bank's Board of Directors as of December 31, 2009 and 2008 is as follows:

Direktur Utama

Iqbal Latanro

President Director

Wakil Direktur Utama

Evi Firmansyah

Vice President Director

Direktur Kepatuhan

Sunarwa

Compliance Director

Direktur Treasury dan Syariah

Saut Pardede

Treasury and Sharia Director

Direktur Keuangan

Irman Alvian Zahiruddin

Finance Director

Direktur Kredit

Purwadi

Credit Director

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Bank adalah sebesar Rp34.518 dan Rp23.753 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Rapat Umum Pemegang Saham Bank yang diadakan pada tanggal 8 Mei 2009 dan 27 Mei 2008, Bank membagikan *tantiem* masing-masing sebesar Rp12.940 dan Rp8.124 bagi dewan komisaris dan direksi yang dialokasikan dari laba bersih yang dibayarkan masing-masing pada tanggal 12 Mei 2009 dan 6 Juni 2008 (Catatan 33).

Salaries and other compensation benefits paid to the boards of Directors and Commissioners of the Bank amounted to Rp34,518 and Rp23,753 for the years ended December 31, 2009 and 2008, respectively. In the Stockholders' General Meeting held on May 8, 2009 and May 27, 2008 the Bank distributed bonuses to the directors' and commissioners' amounting to Rp12,940 and Rp8,124, respectively, which were allocated from net income paid on May 12, 2009 and June 6, 2008, respectively (Note 33).

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2009, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 16/DIR/2009 tanggal 10 Februari 2009 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2009 based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 16/DIR/2009 dated February 10, 2009 is as follows:

Ketua
Anggota

A. Nazri Adlani
Moh. Hidayat

Chairman
Member

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

e. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2008, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 019/DIR/2005 tanggal 18 Maret 2005 adalah sebagai berikut:

Ketua	A. Nazri Adlani	Chairman
Anggota	Moh. Hidayat	Member
Anggota	Endy M. Astiwara	Member

Susunan Dewan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 112/DIR/2008 tanggal 7 Agustus 2008 (menindaklanjuti Ketetapan Komisaris melalui Surat No. 42/KOM/BTN/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008) adalah sebagai berikut:

Ketua	Zaki Baridwan	Chairman
Anggota	Gatot Mardiwasiso	Member
Anggota	Lifransyah Gumay	Member
Anggota	Dewi Wulan Sari	Member

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah 4.085 orang dan 3.850 orang (tidak diaudit).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar penyajian laporan keuangan

Laporan keuangan Bank disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000) tentang "Akuntansi Perbankan" yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang diterbitkan atas kerjasama IAI dengan Bank Indonesia dan praktek-praktek industri perbankan yang berlaku, pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh otoritas perbankan Indonesia serta peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. VIII.G.7 yang merupakan lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan serta Surat Edaran BAPEPAM-LK No. SE-02/BL/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi dan Perbankan.

1. GENERAL (continued)

e. Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and employees (continued)

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2008 based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 019/DIR/2005 dated March 18, 2005 is as follows:

Chairman
Member
Member

Based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 42/KOM/BTN/VII/2008 dated July 16, 2008 followed by the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 112/DIR/2008 dated August 7, 2008, the composition of the Bank's Audit Committee as of December 31, 2009 and 2008 is as follows:

Chairman
Member
Member
Member

The Bank's permanent employees as of December 31, 2009 and 2008 totalled 4,085 and 3,850 persons (unaudited), respectively.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of financial statement presentation

The Bank's financial statements have been presented in conformity with Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 31 (revised 2000), "Accounting for the Banking Industry", issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), the Accounting Guidelines for Indonesian Banking (PAPI) issued under the cooperation of IAI with Bank Indonesia and, where applicable, prevailing banking industry practices and accounting and reporting guidelines prescribed by the banking authority in Indonesia and Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) Regulation No. VIII.G.7 attached to Decision Letter of the Chairman of BAPEPAM-LK No. KEP-06/PM/2000 dated March 13, 2000 regarding the Guidelines for Financial Statement Presentation, and BAPEPAM-LK Circular Letter No. SE-02/BL/2008 dated January 31, 2008 regarding the Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuers or Publicly-Owned Companies in General Mining Industry, Oil and Gas and Banking.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar penyajian laporan keuangan (lanjutan)

Untuk cabang Bank yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah, laporan keuangan disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 - 106 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, Akuntansi Murabahah, Akuntansi Salam, Akuntansi Istishna, Akuntansi Mudharabah, dan Akuntansi Musyarakah, menggantikan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terhadap topik-topik tersebut dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang diterbitkan atas kerjasama IAI dengan Bank Indonesia. Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan dan akrual, kecuali untuk efek-efek dan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) diperdagangkan dan tersedia untuk dijual, tagihan dan kewajiban swap suku bunga dinyatakan sebesar nilai wajar dan tagihan bunga atas aktiva produktif yang digolongkan sebagai *non-performing* yang dicatat secara *cash basis*.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode langsung yang dimodifikasi. Untuk tujuan penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain yang tidak dijadikan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah.

b. Kuasi-Reorganisasi

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", Kuasi-Reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan kewajibannya berdasarkan nilai wajar. Dengan Kuasi-Reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan neraca yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasi menjadi nihil.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of financial statement presentation (continued)

The financial statements for the Bank's sharia branches have been presented in conformity with PSAK No. 101-106 concerning Sharia Financial Statement Presentation, Accounting for Murabahah, Accounting for Salam, Accounting for Istishna, Accounting for Mudharabah and Accounting for Musyarakah which superseded PSAK No. 59, "Accounting for Sharia Banks", in relation to the recognition, measurement, presentation and disclosure for the above-mentioned topics and the Accounting Guidelines for Indonesian Syariah Banks (PAPSI) issued under the cooperation of IAI with Bank Indonesia. The financial statements have been prepared on an accrual basis using the historical cost concept, except for trading and available-for-sale securities and government bonds (recapitalization bonds), interest rate swap receivables and payables which are stated at fair values, and interest receivable on non-performing earning assets which are recorded on cash basis.

The statements of cash flows present receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are presented using the modified direct method. For purposes of presentation in the statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash and current accounts with Bank Indonesia and other banks which are not restricted or used as collateral.

The reporting currency used in the financial statements is the Indonesian rupiah.

b. Quasi-Reorganization

Based on PSAK No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its balance sheet showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Kuasi-Reorganisasi (lanjutan)

Estimasi nilai wajar aset dan kewajiban dalam rangka Kuasi-Reorganisasi ditentukan berdasarkan informasi terbaik sesuai dengan karakteristik aktiva dan kewajiban yang bersangkutan atau nilai pasar aktiva dan kewajiban yang bersangkutan. Apabila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aktiva sejenis, estimasi nilai sekarang atau arus kas diskontoan. Untuk aktiva dan kewajiban tertentu, penilaian dilakukan sesuai PSAK terkait.

Sebagai hasil dari Kuasi-Reorganisasi per tanggal 31 Mei 2007, saldo defisit Bank sebesar Rp14.226.290 dieliminasi ke akun saldo laba telah ditentukan penggunaannya, keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek yang tersedia untuk dijual dan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi), selisih penilaian kembali aset tetap dan modal ditempatkan dan disetor penuh.

**c. Transaksi dengan pihak-pihak yang
mempunyai hubungan istimewa**

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai hubungan istimewa seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".

Semua transaksi signifikan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Transaksi dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan Pemerintah, termasuk dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah dan Lembaga Penjaminan Simpanan tidak diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan PSAK tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

b. Quasi-Reorganization (continued)

The fair value estimation for assets and liabilities under a quasi-reorganization is determined based on the best available information according to the characteristics of the related assets and liabilities or the market value for the related assets and liabilities. If the market value is not available, the fair value estimation is conducted by considering the value of similar assets, present value estimation, or discounted cash flows. For certain assets and liabilities, the valuation is conducted according to the related PSAK.

As a result of the quasi-reorganization as of May 31, 2007, the Bank's deficit balance amounting to Rp14,226,290 was eliminated against the net amount of the appropriated retained earnings, unrealized gain (loss) on available-for-sale securities and government bonds (recapitalization bonds), revaluation increment on premises and equipment and issued and fully paid capital stock.

c. Transactions with related parties

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with certain parties which are regarded as having related party relationships as defined under PSAK No. 7, "Related Party Disclosures".

All significant transactions with related parties, whether or not made under terms and conditions similar to those granted to third parties, are disclosed in the notes to the financial statements. Transactions with state-owned/region-owned entities, and companies owned or controlled by the Government including entities related to the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) or Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah and Lembaga Penjaminan Simpanan, are not disclosed as transactions with related parties in accordance with the above-mentioned PSAK.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Penyisihan kerugian aktiva produktif, aktiva non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

Aktiva produktif terdiri atas giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi), tagihan *swap* suku bunga, kredit yang diberikan, pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah serta komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit.

Aktiva non-produktif adalah aset Bank yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk properti terbengkalai dan *suspense accounts*.

Komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit terdiri dari fasilitas kredit yang belum ditarik dan garansi yang diterbitkan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Bank mengklasifikasikan aktiva produktif ke dalam lima kategori. Aktiva produktif tidak bermasalah (*performing*) diklasifikasikan sebagai "Lancar" dan "Dalam Perhatian Khusus" sedangkan aktiva produktif bermasalah (*non-performing*) diklasifikasikan sebagai "Kurang Lancar", "Diragukan" dan "Macet".

Pengklasifikasian aktiva produktif ke dalam satu dari lima kategori tersebut didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 atas Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang mana pasal-pasal tertentu telah diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. Dalam penerapan peraturan ini, Bank mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan evaluasi manajemen Bank atas prospek usaha, kinerja (*performance*), kemampuan membayar setiap debitur dan juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti klasifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia, klasifikasi yang ditetapkan oleh bank umum lainnya atas aktiva produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank dan ketersediaan laporan keuangan debitur yang telah diaudit. Pengklasifikasian kualitas aktiva produktif untuk kredit dan penyediaan dana lain sampai dengan jumlah Rp1.000, kredit usaha kecil (KUK) didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, serta kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu sampai dengan jumlah Rp1.000 didasarkan atas ketepatan debitur pembayaran pokok atau bunga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets, including estimated losses on commitments and contingencies

Earning assets consist of current accounts with other banks, placements with other banks, securities, government bonds (recapitalization bonds), interest rate swap receivables, loans, sharia financing/receivables, and commitments and contingencies bearing credit risk.

Non-earning assets are the Bank's assets that bear potential loss, such as abandoned properties and suspense accounts.

Commitments and contingencies that bear credit risk consist of unused loan facilities and guarantees issued.

Based on Bank Indonesia regulation, the Bank classifies its earning assets into five categories. Performing earning assets are classified as "Current" and "Special Mention"; while non-performing earning assets are classified as "Substandard", "Doubtful" and "Loss".

The classification of earning assets into one of the five categories is based on Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/2/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding valuation of the Quality of Assets in Commercial Banks, wherein certain provisions have been amended by PBI No. 8/2/PBI/2006 dated January 30, 2006 and No. 9/6/PBI/2007 dated March 30, 2007, and PBI No. 11/2/PBI/2009 dated January 29, 2009. In the implementation of these regulations, the Bank classifies its earning assets based on management's evaluation on the debtor's business prospects, performance, ability to repay and also after considering other factors, such as classification based on the results of Bank Indonesia's examination, classification by other commercial banks for earning assets given by more than one bank and the availability of the debtor's audited financial statements. The classification of the quality of earning assets for loans and other funding for amounts of up to Rp1,000, loans to small-scale businesses based on the applicable Bank Indonesia regulation, and loans and other funding for debtors in certain locations for business provisions existing in certain region for amounts of up to Rp1,000 is based on the debtor's compliance with the schedule of payment for principal and interest.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Penyisihan kerugian aktiva produktif,
aktiva non-produktif serta estimasi
kerugian komitmen dan kontinjensi
(lanjutan)**

Jumlah minimum penyisihan kerugian aktiva produktif, aktiva non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit dihitung dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

Pembentukan jumlah minimum penyisihan kerugian aktiva produktif serta estimasi komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit berdasarkan peraturan Bank Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Penyisihan umum sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar kecuali untuk aktiva produktif dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Hutang Pemerintah (Obligasi Rekapitalisasi dan Obligasi Pemerintah lainnya) dan bagian aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, emas, SBI, Surat Hutang Pemerintah, jaminan Pemerintah Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *standby letter of credit* dari *prime bank* yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP)* atau *International Standard Practices (ISP)* yang berlaku.
- 2). Penyisihan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan
 - b. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi agunan
 - c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi agunan
 - d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**d. Allowance for possible losses on earning
assets and non-earning assets, including
estimated losses on commitments and
contingencies (continued)**

The minimum amount of allowance for possible losses on earning assets, non-earning assets and estimated losses on commitments and contingencies which have credit risks is calculated in accordance with the Bank Indonesia regulations mentioned above.

The recognition of the minimum allowance for possible losses on earning assets and estimated losses on commitments and contingencies with credit risks based on such Bank Indonesia guidelines is as follows:

- 1). General allowance at the minimum of 1% of earning assets classified as current, excluding earning assets in the form of Bank Indonesia certificates (SBI), government bonds (recapitalization bonds and other government bonds) and part of earning assets pledged with cash collateral, in the form of current deposit, time deposit, savings deposit, guarantee payment, gold, SBI, government debentures, guarantee by the Republic of Indonesia according to the prevailing regulations, *standby letter of credit* from *prime bank* issued in accordance with the prevailing *Uniform Customs and Practices for Documentary Credit (UCP)* or *International Standard Practices (ISP)*.
- 2). Special reserve at the minimum of:
 - a. 5% of earning assets classified as special mention, net of collateral
 - b. 15% of earning assets classified as substandard, net of collateral
 - c. 50% of earning assets classified as doubtful, net of collateral
 - d. 100% of earning assets classified as loss, net of collateral.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Penyisihan kerugian aktiva produktif, aktiva non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (lanjutan)

Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan penyisihan kerugian aktiva hanya dilakukan untuk aktiva produktif saja. Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang ditetapkan berdasarkan nilai terendah antara nilai agunan yang dapat diperhitungkan dengan nilai pengikatan agunan dimana nilai maksimal adalah sebesar nilai pengikatan agunan.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan kerugian aktiva produktif dan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi terdiri atas surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan, persentase tertentu dari tanah, gedung, rumah tinggal, mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan dan resi gudang yang laporan penilaiannya tidak melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan atau tidak melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan dari tanggal neraca apabila jaminannya berupa tanah atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal yang penilaiannya dilakukan oleh penilai independen. Penilaian untuk plafon kredit diatas Rp5 miliar dilakukan oleh penilai independen.

Estimasi kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit disajikan di sisi kewajiban pada neraca.

Saldo aktiva produktif dihapuskan atas beban masing-masing penyisihan kerugian pada saat manajemen Bank berpendapat bahwa aktiva tersebut sudah tidak dapat tertagih lagi. Penerimaan pembayaran aktiva produktif yang telah dihapusbukukan dicatat sebagai penambahan cadangan penyisihan kerugian selama periode berjalan. Jika terdapat kelebihan dari penerimaan pokok kredit yang dihapusbukukan, kelebihannya diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets, including estimated losses on commitments and contingencies (continued)

The use of collateral value as deductible factor in calculating allowance for possible losses is only made on earning assets. The value of deductible collaterals is based on the lower value between the collateral value and the pledged value, with a maximum amount equal to the pledged value.

The value of collaterals that can be calculated as deduction in the form of allowance for possible losses on earning assets and estimated losses on commitments and contingencies consists of the maximum amount of 50% of the recorded value at the end of the month of securities and shares of stock actively traded in the stock exchange in Indonesia or have investment rating, certain percentage of land, building, residential house, machine attached to a land, airplane, ship, land vehicles, inventory and warehouse receipt, with appraisal reports dated not more than 24 (twenty-four) months or not more than 30 (thirty) months from the balance sheet date if the collaterals are in the form of land or residential building appraised by an independent appraiser. The appraisal is required to be made by an independent appraiser for principal loans above Rp5 billion.

Estimated losses on commitments and contingencies which have credit risks are presented in the liabilities section of the balance sheets.

The outstanding balances of earning assets are written off against the respective allowance for possible losses when the assets are determined by the Bank's management to be definitely uncollectible. Recovery of earning assets previously written off is recorded as an addition to the allowance for possible losses during the current period. If there is an excess from the recovery of loan principal previously written off, the excess is recorded as interest income in the statement of income.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

- d. Penyisihan kerugian aktiva produktif, aktiva non-produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, pedoman pembentukan penyisihan kerugian aktiva produktif dan penentuan kualitas aktiva produktif cabang syariah mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 yang mana pasal-pasal tertentu telah diamandemen dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 tanggal 18 Juni 2007.

- e. Giro pada bank lain**

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan penyisihan kerugian.

- f. Penempatan pada bank lain**

Penempatan pada bank lain merupakan penanaman dana pada bank lain berupa deposito berjangka termasuk deposito berjangka *mudharabah*, *tabungan mudharabah* dan *inter-bank call money* yang disajikan sebesar nilai penempatan Bank yang tertera dalam kontrak dikurangi penyisihan kerugian.

- g. Efek-efek**

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi dan obligasi subordinasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

- d. Allowance for possible losses on earning assets and non-earning assets, including estimated losses on commitments and contingencies (continued)**

As of December 31, 2009 and 2008, the guidance for the recognition of allowance for possible losses and the determination of classification of earning assets of sharia branch is based on Regulation No.8/21/PBI/2006 dated October 5, 2006 of Bank Indonesia regarding the Valuation of Quality of Earning Assets in Commercial Banks which Operate under Sharia Principles, effective on January 1, 2007 with certain provisions amended by PBI No. 9/9/PBI/2007 dated June 18, 2007.

- e. Current accounts with other banks**

Current accounts with other banks are stated at their total outstanding balance net of allowance for possible losses.

- f. Placements with other banks**

Placements with other banks represent placements of funds in other banks in the form of time deposits including *mudharabah* time deposits, *mudharabah* savings and *inter-bank call money* which are stated at the amount placed by the Bank or at the contract amount, net of allowance for possible losses.

- g. Securities**

Securities consist of securities traded in the capital market and money market, such as Bank Indonesia Certificates (SBI), bonds and subordinated bonds.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Efek-efek (lanjutan)

Sesuai dengan PSAK No.50 tentang "Akuntansi Investasi Efek Tertentu", efek-efek disajikan di neraca sesuai dengan klasifikasi efek yang bersangkutan, sebagai berikut:

- i. Efek-efek yang diperdagangkan, dinyatakan berdasarkan nilai wajar. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar dikreditkan (dibebankan) pada operasi tahun berjalan.
- ii. Efek-efek yang tersedia untuk dijual, dinyatakan berdasarkan nilai wajar. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar disajikan tersendiri sebagai komponen ekuitas. Keuntungan (kerugian) yang telah direalisasi diakui pada operasi tahun berjalan.
- iii. Efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo, dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah disesuaikan dengan amortisasi premi (diskonto). Penurunan permanen nilai surat-surat berharga dibebankan pada operasi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, efek-efek yang dimiliki Bank diklasifikasikan sebagai diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia dan BAPEPAM-LK mengeluarkan *joint press release* tanggal 9 Oktober 2008 tentang penerapan nilai wajar dan reklasifikasi Surat Utang Negara (SUN). Sehubungan dengan surat tersebut, Bank telah melakukan reklasifikasi atas surat berharga yang tersedia untuk dijual menjadi dimiliki hingga jatuh tempo.

SBI disajikan sebesar nilai nominal setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi. Obligasi disajikan sebesar nilai wajar. Laba atau rugi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajar diakui pada operasi periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Securities (continued)

In accordance with PSAK No. 50, "Accounting for Certain Security Investments", securities are presented in the balance sheets based on the following related classifications:

- i. Trading securities, which are stated at fair value. Unrealized gain (loss) from the increase (decrease) in fair value is credited (charged) to current year operations.
- ii. Available-for-sale securities, which are stated at fair value. Unrealized gain (loss) from the increase (decrease) in fair value is reported separately as a component of stockholders' equity. Realized gain (loss) is recognized in current year operations.
- iii. Held-to-maturity securities, which are stated at cost, after adjusting for the amortization of premium or (discount). Any permanent decline in value of the securities is charged to current year operations.

As of December 31, 2009 and 2008, the securities owned by the Bank are classified as trading, available-for-sale and held-to-maturity.

On October 9, 2008, Bank Indonesia, the Indonesian Institute of Accountants and BAPEPAM-LK issued a joint press release on fair value application and reclassification of Promissory Notes (SUN). In connection with the joint press release, the Bank reclassified securities classified as available-for-sale to become held-to-maturity securities.

SBI are presented at their nominal amount, net of unamortized interest. Bonds are stated at fair values. Unrealized gains or losses resulting from the increase or decrease in fair values are recognized in current period operations.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Efek-efek (lanjutan)

Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar yang berlaku.

Penentuan biaya perolehan dalam penghitungan laba atau rugi yang direalisasi digunakan metode identifikasi khusus.

Penyisihan kerugian disajikan sebagai pengurang dari akun efek-efek.

h. Obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi)

Obligasi pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah RI termasuk obligasi rekapitalisasi yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka rekapitalisasi bank umum. Obligasi pemerintah disajikan sesuai dengan klasifikasinya dan perlakuan akuntansinya adalah sama dengan perlakuan akuntansi untuk efek-efek seperti dijelaskan pada Catatan 2g di atas.

i. Instrumen derivatif

Instrumen derivatif dicatat di neraca sebagai aktiva atau kewajiban sebesar nilai wajarnya.

Akuntansi untuk perubahan dalam nilai wajar suatu instrumen derivatif berdasarkan transaksi lindung nilai yang efektif mengharuskan pemenuhan kriteria atas pendokumentasian, tujuan dan pengungkapannya. Bank melakukan kontrak derivatif *swap* suku bunga untuk melindungi risiko pasar akibat fluktuasi suku bunga yang berkaitan dengan obligasi tingkat bunga tetap yang diterbitkan oleh Bank. Instrumen tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai transaksi lindung nilai yang efektif sesuai dengan persyaratan khusus menurut PSAK No. 55 dan tidak ditunjukkan sebagai aktivitas lindung nilai untuk tujuan akuntansi. Dengan demikian, perubahan nilai wajar instrumen tersebut dicatat langsung pada operasi tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Securities (continued)

Fair value is determined based on the prevailing quoted market price.

The determination of acquisition cost in calculating the realized gain or loss is based on the specific identification method.

Allowance for possible losses is deducted from the respective securities amounts.

h. Government bonds (recapitalization bonds)

Government bonds represent bonds issued by the Indonesian Government including recapitalization bonds which represent bonds issued by the Government in connection with recapitalization of commercial banks. Government bonds are presented based on the bonds classification, while the accounting treatment is the same as the accounting treatment for securities as explained above in Note 2g.

i. Derivative instruments

Derivative instruments are recorded in the balance sheets as either assets or liabilities at their fair value.

The accounting for changes in the fair value of a derivative instrument under an effective hedging transaction requires that the criteria on documentation, designation and disclosure be met. The Bank has entered into interest rate swap derivative contracts to hedge market risks arising from fluctuations in interest rates relating to the fixed interest rate bonds issued by the Bank. Those instruments do not qualify as effective hedging transactions with specific terms under PSAK No. 55 and are not designated as hedging activities for accounting purposes. Accordingly, changes in the fair value of such instruments are recorded directly in the current year's operations.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

Kredit yang diberikan disajikan sebesar saldo kredit bruto dikurangi dengan penyisihan kerugian yang dibentuk, berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir periode.

Dampak restrukturisasi kredit yang hanya mengakibatkan perubahan jangka waktu dan tidak mengakibatkan penerimaan saham atau aktiva tertentu diakui secara prospektif dan tidak mengubah nilai tercatat kredit yang diberikan pada tanggal restrukturisasi, kecuali jika jumlah yang dicatat melebihi nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan dalam persyaratan pinjaman. Jika jumlah nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditentukan oleh peraturan baru tersebut lebih rendah dari pada nilai tercatat kredit yang diberikan sebelum restrukturisasi, Bank mengurangi saldo kredit yang diberikan ke suatu jumlah yang sama dengan jumlah nilai tunai penerimaan kas masa depan dan selisihnya dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Dalam rangka sekuritisasi atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("Kumpulan Tagihan"), Bank telah melakukan penjualan atas Kumpulan Tagihan kepada pihak ketiga. Perlakuan akuntansi atas penjualan tersebut mengacu kepada Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-493/BL/2008 tentang perubahan peraturan BAPEPAM-LK No. IX.K.1 tentang pedoman kontrak investasi kolektif efek beragunan aset (*Asset-Backed Securities*) yang menyatakan bahwa dalam hal pengalihan aset keuangan sebagai akibat dari transaksi antara kreditor awal dan kontrak investasi kolektif efek beragunan aset dimaksudkan untuk memenuhi transaksi jual beli atau tukar menukar putus/lepas secara akuntansi, maka pengalihan dimaksud harus memenuhi persyaratan jual putus/lepas menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pemenuhan kondisi jual beli atau tukar menukar putus/lepas atau tidak, wajib dilakukan secara konsisten dan didukung dengan pendapat akuntan yang terdaftar di BAPEPAM-LK.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Loans

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified time.

Loans are stated at their gross outstanding balance net of allowance for possible losses, based on the management's review on the loans collectibility at the end of each period.

The effects of restructuring a loan receivable, which involves only the modification of terms and does not involve receipt of certain shares or assets, are recognized prospectively and do not change the carrying amount of the receivable at the restructuring date, unless the recorded amount exceeds the total present value of future cash receipts specified by the loan terms. In case the total of the present value of future cash receipts is lower than the carrying amount of the receivable before restructuring, the Bank shall reduce the receivable to an amount equal to the total present value of future cash receipts and the difference is charged to current year's statements of income.

In connection with the Bank's mortgage securitization on its housing loans bills ("pool of receivables"), the Bank sold its pool of receivables to third parties. The accounting treatment of such sales is based on the Decision Letter No. KEP-493/BL/2008 of the Chairman of BAPEPAM-LK concerning the amendment of BAPEPAM-LK Regulation No. IX.K.1 regarding the Guidelines on Collective Investment Contract (*Asset-Backed Securities*), which states that if a transfer of financial assets resulting from a transaction with an initial creditor and collective investment contract on asset-backed securities is considered to meet an outright buy or sale or exchange transaction for accounting, such transfer must meet the criteria of outright buy or sale based on generally accepted accounting principles. The fulfillment of the criteria on outright buy or sale or exchange must be consistently met and supported with an opinion by an accountant registered with BAPEPAM-LK.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Keputusan BAPEPAM-LK tersebut juga menyatakan bahwa dalam hal aset yang membentuk portofolio kontrak investasi kolektif efek beragunan aset yang penerbitannya didasarkan pada aset keuangan yang telah dialihkan dari kreditor awal tersebut, maka kreditor awal hanya dapat melakukan jual beli atau tukar menukar putus/lepas dimaksud paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai aset keuangan yang dialihkannya tersebut.

Perlakuan akuntansi Bank juga mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/4/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Prinsip Kehati-hatian Dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa kondisi jual putus terjadi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Seluruh manfaat yang diperoleh dan atau akan diperoleh dari aset keuangan telah dialihkan kepada penerbit;
- b. Risiko kredit dari aset keuangan yang dialihkan secara signifikan telah beralih kepada Penerbit; dan
- c. Kreditor asal tidak memiliki pengendalian baik langsung maupun tidak langsung atas aset keuangan yang dialihkan.

PBI tersebut mengatur lebih lanjut bahwa pemenuhan kondisi jual putus tersebut wajib dilengkapi dengan pendapat auditor independen dan pendapat hukum yang independen.

k. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah

Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *Murabahah* dan piutang *Istishna*, pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musarakah*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Loans (continued)

The above decision letter of BAPEPAM-LK also states that in connection with assets forming the Collective Investment Contract on Asset-Backed Securities portfolio which was issued based on the financial assets transferred from the initial creditor, the creditor will only be allowed to conduct an outright buy or sale or exchange transaction at the maximum of 10% of the amount of financial asset transferred.

The Bank's accounting treatment is also based on Bank Indonesia Regulation No. 7/4/PBI/2005 dated January 20, 2005 regarding the Prudence Concept in Asset Securitization Activities for Commercial Banks which provides that an outright sale occurs if the following terms are met:

- a. All benefits obtained and/or will be obtained from the financial asset have been transferred to the issuer;
- b. Credit risks from the financial asset transferred have been transferred significantly to the issuer; and
- c. The original creditor does not have a direct or indirect control of the financial asset transferred.

The Bank Indonesia regulation further states that the fulfillment of the "outright sale" condition must be accompanied by the opinion of an independent auditor and legal practitioner.

k. Sharia financing/receivables

Sharia financing/receivables are receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale and purchase arrangements and profit sharing between the Bank and other parties for certain period of time. Such receivables consist of receivables that arise from *Murabahah* transactions, *Istishna* transactions, *Mudharabah* financing and *Musarakah* financing.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga pembelian dan margin yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual dan dibuat secara eksplisit (dinyatakan dalam akad pembiayaan). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *Murabahah* berdasarkan pesanan, Bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Pada saat akad *Murabahah*, piutang *Murabahah* yang timbul diakui sebesar biaya perolehan aktiva *Murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Pada tanggal neraca, piutang *Murabahah* dinyatakan sebesar saldo piutang dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir periode. Pendapatan margin *Murabahah* yang ditangguhkan disajikan sebagai pengurang atas saldo piutang *Murabahah*.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan nisbah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal neraca, pembiayaan *Mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musyarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal neraca, pembiayaan *musyarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo penyisihan kerugian yang dibentuk berdasarkan hasil review oleh manajemen terhadap tingkat kolektibilitasnya pada setiap akhir tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Sharia financing/receivables (continued)

Murabahah is a transaction carried out based on sales and purchase agreement whereby the price and the profit margin are agreed by the buyer and seller and are disclosed explicitly. *Murabahah* may be carried out based on certain order or no order to purchase certain goods. Under *Murabahah* based on a certain order, the purchase will be realized by the Bank after the order from the customers is received. At the effective date of the *Murabahah* agreement, the resulting *Murabahah* receivable is recognized at the acquisition cost of the *Murabahah* asset plus the agreed margin. At balance sheet date, the *Murabahah* receivable is stated at the outstanding balance less allowance for possible losses which is provided based on the management's review on the collectibility level of the receivables at the end of each year. Deferred *Murabahah* margin is presented as a contra account of *Murabahah* receivables.

Mudharabah represents joint financing between the Bank as the owner of the fund and the customer as the business executor. Distribution of profit sharing on a project or other business activity is determined in accordance with the mutually agreed *nisbah* (*pre-determined ratio*). At balance sheet date, *Mudharabah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for possible losses which is provided based on the management's review on its collectibility level at the end of each year.

Musyarakah is a partnership contract between fund owners (*musyarakah partners*) to contribute funds and conduct business on a joint basis through partnership with profit sharing based on a predetermined ratio, while loss is shouldered proportionally based on the capital contribution. At the balance sheet date, *Musyarakah* financing is stated at the outstanding balance of the financing less allowance for possible losses based on the management's review on the *Musyarakah* financing collectibility level at the end of each year.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pembiayaan/piutang berdasarkan prinsip syariah (lanjutan)

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi penyisihan kerugian.

l. Aset tetap

Efektif tanggal 1 Januari 2008, Bank menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2007), "Aset Tetap", yang menggantikan PSAK No. 16 (1994), "Aktiva Tetap dan Aktiva Lain-lain" dan PSAK No. 17 (1994), "Akuntansi Penyusutan". Bank telah melakukan revaluasi aset tetap sebelum penerapan PSAK No. 16 (Revisi 2007) dan memilih model biaya untuk mengukur nilai tercatat aset tetap, maka nilai revaluasi aset tetap tersebut dianggap sebagai biaya perolehan (*deemed cost*) dan biaya perolehan tersebut adalah nilai pada saat PSAK No. 16 (Revisi 2007) diterbitkan.

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Sharia financing/receivables (continued)

Istishna is a purchase agreement between an *al-mustashni* (buyer) and an *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to make or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at an agreed price. *Istishna* receivables are presented based on the outstanding billings to the final buyer less allowance for possible losses.

l. Premises and equipment

Effective January 1, 2008, the Bank applied PSAK No. 16 (Revised 2007), "Fixed Assets", which supersedes PSAK No. 16 (1994), "Fixed Assets and Other Assets", and PSAK No. 17 (1994), "Accounting for Depreciation". The Bank had revalued its premises and equipment before the application of PSAK No. 16 (Revised 2007) and has chosen the cost model for the measurement of the carrying value of its premises and equipment, therefore the revalued amount of the premises and equipment is considered as deemed cost and the cost is the value at the time PSAK No. 16 (Revised 2007) is applied.

Premises and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the premises and equipment when that cost is incurred, if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in statements of income as incurred.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset tetap (lanjutan)

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/Years
Bangunan	10 - 20
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4 - 8

Pada setiap akhir tahun buku, Bank melakukan penelaahan atas nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Pada tahun 2007, berdasarkan hasil penelaahan periodik dan terkait dengan penilaian kembali bangunan, Bank merubah masa manfaat bangunan menjadi 20 tahun. Tidak ada pengaruh signifikan atas perubahan masa manfaat ini terhadap laba rugi tahun berjalan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Sesuai dengan PSAK No. 47 tentang "Akuntansi Tanah", biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak pemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi selama umur hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, periode mana yang lebih pendek.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Premises and equipment (continued)

Depreciation of buildings is computed using the straight-line method while depreciation of office furniture and fixtures, and motor vehicles is computed using the double-declining balance method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Years
Buildings	10 - 20
Office furniture and fixtures, and motor vehicles	4 - 8

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the Bank and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year.

Based on the periodic review and in relation to the revaluation of buildings conducted in 2007, the Bank extended the useful life of its buildings to 20 years. There is no significant effect to current year profit or loss resulting from the change in this estimated useful life.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period such asset is derecognized.

Landrights are recorded at cost and not depreciated. In accordance with PSAK No. 47, "Accounting for Land", certain expenses incurred in the acquisition or extension of the terms of the landrights are deferred and amortized over the terms of the landrights or their useful lives, whichever period is shorter.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Bank melakukan penelaahan untuk menentukan indikasi adanya penurunan nilai aktiva pada akhir periode sesuai dengan PSAK No. 48 tentang "Penurunan Nilai Aktiva". Jika terdapat indikasi penurunan nilai, Bank menghitung taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atas nilai semua aktivanya untuk menentukan apakah terdapat penurunan nilai aktiva dan mengakuinya sebagai kerugian penurunan nilai dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Aktiva dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat pekerjaan aktiva tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan.

m. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

n. Simpanan

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Giro *Wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Premises and equipment (continued)

The Bank conducts a review to determine whether there are indications of asset impairment at the end of the period in accordance with PSAK No. 48, "Accounting for Impairment of Asset Value". If there are any indications of impairment, the Bank should compute the estimated recoverable amount of all its assets to determine if there is a decrease in the value of the assets, and recognize an impairment loss in the current year statement of income.

Construction in progress is stated at cost. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate premises and equipment account when the construction is substantially completed and the asset constructed is ready for its intended use.

m. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

n. Deposits

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which are available for withdrawal at any time and earn bonus based on the Bank's policy. *Wadiah* demand deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Simpanan (lanjutan)

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Tabungan *Mudharabah* merupakan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati (Catatan 2k). Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Deposito berjangka *Mudharabah* merupakan simpanan pihak ketiga dengan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati di muka. Pemegang deposito hanya bisa menarik deposito tersebut pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank. Deposito berjangka *Mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

o. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka dan *inter-bank call money*. Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai pada saat jatuh tempo kepada bank lain.

p. Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali disajikan sebagai kewajiban sebesar harga pembelian kembali yang disepakati setelah dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali diamortisasi sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak saat penjualan sampai dengan saat pembelian kembali.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Deposits (continued)

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the Bank's policy. Mudharabah savings deposits represent third party funds which earn profit sharing from the Bank's revenue for the use of funds in accordance with the agreed nisbah (Note 2k). Wadiah and Mudharabah savings deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

Mudharabah time deposits represent third party placements in which the profit sharing is in accordance with the nisbah as determined and agreed in advance. Depositors are entitled to withdraw the fund at specific dates in accordance with agreements between the depositors and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at the amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

o. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of savings deposits, demand deposits, time deposits and inter-bank call money. Deposits from other banks are stated at the amounts due to the other banks.

p. Securities sold under repurchase agreements

Securities sold under repurchase agreements are recognized as liability at the agreed repurchase price less unamortized interest expense. The difference between the selling price and repurchase price is amortized as interest expense over the period from the time of sale up to the time of repurchase.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

q. Surat-surat berharga yang diterbitkan dan obligasi subordinasi

Surat-surat berharga yang diterbitkan termasuk obligasi yang diperdagangkan di pasar modal. Obligasi subordinasi yang diterbitkan dan diperdagangkan di pasar modal disajikan terpisah sebagai bagian dari "Pinjaman Subordinasi" dalam neraca. Obligasi dan obligasi subordinasi yang diterbitkan oleh Bank dinyatakan sebesar nilai nominal dikurangi dengan biaya emisi yang belum diamortisasi.

Obligasi yang diterbitkan Bank yang dibeli dengan maksud untuk dijual kembali (obligasi dalam perbendaharaan) disajikan sebagai pengurang surat berharga yang diterbitkan. Pembelian kembali obligasi yang tidak dimaksudkan sebagai pelunasan diperlakukan seolah-olah telah terjadi pelunasan dalam laporan keuangan. Selisih antara nilai nominal obligasi dengan nilai wajar pada tanggal pembelian kembali dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan. Pendapatan bunga yang dihasilkan dari obligasi dalam perbendaharaan disajikan sebagai pengurang atas biaya bunga hutang obligasi.

r. Biaya emisi surat-surat berharga yang diterbitkan dan obligasi subordinasi yang belum diamortisasi

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan surat-surat berharga dan obligasi subordinasi dikurangkan langsung dari hasil emisi tersebut. Selisih antara hasil emisi bersih dengan nilai nominal diamortisasi selama jangka waktu penerbitan surat-surat berharga dan obligasi subordinasi yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

q. Securities issued and subordinated bonds

Securities issued include bonds traded in the capital market. Subordinated bonds issued and traded in the capital market are reported separately as part of "Subordinated Loans" in the balance sheets. Bonds and subordinated bonds issued by the Bank are stated at nominal amounts less deferred issuance costs.

Bonds issued and purchased by the Bank with intention to resell (treasury bonds) are presented as a deduction of bonds payable issued. The repurchase of bonds which is not intended to be a payment is treated in the financial statements as if there is a payment. The difference between the bonds nominal amount and the fair value at the date of buy-back is credited or charged to the current period statement of income. Interest income from treasury bonds is presented as a deduction of interest expense on bonds payable.

r. Unamortized issuance costs of bonds and subordinated bonds

Costs incurred in relation to the issuance of bonds and subordinated bonds are deducted directly from the proceeds of the issuance. The difference between the net result from the issuance and the nominal amount is amortized over the term of the related bonds and subordinated bonds.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Pendapatan dan beban bunga

Pendapatan dan beban bunga diakui atas dasar akrual. Pendapatan bunga atas aktiva produktif yang diklasifikasikan sebagai "non-performing" (kurang lancar, diragukan dan macet) diakui pada saat diterima secara tunai (*cash basis*). Pada saat aktiva produktif diklasifikasikan sebagai "non-performing", tagihan bunga dari aktiva tersebut yang sudah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima, dibatalkan dan selanjutnya diakui sebagai tagihan kontinjensi (disajikan di luar neraca).

Seluruh penerimaan tunai atas kredit yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit. Kelebihan penerimaan tunai dibandingkan dengan pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi.

t. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sesuai dengan jangka waktunya.

Pendapatan provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat transaksi dilakukan. Provisi dan komisi yang belum diamortisasi atas komitmen yang diselesaikan sebelum jatuh tempo diakui sebagai pendapatan pada tanggal penyelesaian.

u. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan *Istishna*, marjin *Murabahah*, bonus dan bagi hasil pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* serta aktiva produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban bonus secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Interest income and expense

Interest income and expense are recognized on an accrual basis. Interest from non-performing earning assets (substandard, doubtful and loss) is recognized as income at the time of collection of cash (cash basis). When an earning asset is classified as non-performing, any unpaid accrued interest receivable related to such asset is reversed against interest income and treated as a contingent receivable (presented off-balance sheet).

All cash receipts from loans classified as doubtful or loss are recognized first as a deduction from the outstanding principal balance. Any excess of cash receipts over the outstanding principal balance is recognized as interest income in the statement of income.

t. Fees and commissions

Significant fees and commissions directly related to lending activities or having specific time periods are deferred and amortized using the straight-line method over their respective periods.

Other fees and commissions not directly related to lending activities or specific time periods are recognized at the transaction date. Unamortized fees and commissions on commitments settled before maturity are recognized as income at the date of settlement.

u. Sharia profit sharing income and bonus expense

Sharia profit sharing income represents income from istishna, margin from Murabahah, bonuses and profit-sharing on Mudharabah and Musyarakah financing and other earning assets which are recognized on the accrual basis. Sharia bonus expense represents the bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah (lanjutan)

Pendapatan *Istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang. Pendapatan marjin *Murabahah* diakui sepenuhnya pada saat terjadinya, apabila akad berakhir dalam periode yang sama dengan periode laporan keuangan; atau selama periode akad secara proporsional apabila akad tersebut melampaui satu periode laporan keuangan.

Jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan/piutang *syariah* dan dari aktiva produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank, dihitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam piutang *Murabahah* dan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang disalurkan. Dari jumlah pendapatan marjin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pendapatan marjin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aktiva produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank.

v. Imbalan kerja

Bank mengakui kewajiban imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003. Bank menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2004) mengenai "Akuntansi Imbalan Kerja" untuk mengakui kewajiban imbalan kerja.

Bank memiliki program pensiun manfaat pasti ("Program Pensiun") untuk karyawan yang memenuhi syarat. Dana pensiun dibiayai dari iuran karyawan dan iuran Bank. Iuran karyawan adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan iuran Bank adalah sesuai dengan perhitungan aktuaris. Aktiva Program Pensiun diadministrasikan dan dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (DPBTN). DPBTN mendapat izin dari Menteri Keuangan melalui Surat Keputusan No. KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 untuk mengganti statusnya dari yayasan menjadi dana pensiun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Sharia profit sharing income and bonus expense (continued)

Income from istishna is recognized at the date of transfer of assets. Murabahah margin income is recognized in full as earned if the related period of the contract ends in the same period of the financial statements, or proportionately over the period of the contract if the contract covers more than one financial statement period.

Total margin and profit sharing on the sharia financing/receivables transactions and other earning assets for distribution to the depositors and the Bank are computed proportionately based on allocation of funds from the depositors and the Bank to be used to finance the Murabahah receivables and Mudharabah and Musyarakah financing and other earning assets financed. The total available margin income and profit sharing for such customers are distributed to customers as "shahibul maal" (owner of funds) and to the Bank as "mudharib" (fund manager) in accordance with a mutually pre-determined ratio (nisbah). Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which use the Bank's funds all belong to the Bank.

v. Employee benefits

The Bank recognizes its employee service entitlement liability in accordance with Labor Law No. 13 of 2003 dated March 25, 2003. The Bank adopts PSAK No. 24 (Revised 2004), "Accounting for Employee Benefits", to account for its liability for employee service entitlements.

The Bank has a defined benefit pension plan ("Pension Plan") covering all its eligible employees. The Pension Plan is funded through contributions from both the employees and the Bank. Employees' contributions are computed at 5% of the employees' basic pension salaries and the Bank's contributions are based on actuarial computations. The Pension Plan's assets are being administered and managed by Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk (DPBTN). DPBTN obtained the approval from the Ministry of Finance based on Decision Letter No. KEP-232/KM.17/1993 dated October 13, 1993 to change its status as a foundation to become a pension fund.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Imbalan kerja (lanjutan)

Selain program pensiun manfaat pasti, Bank juga menyelenggarakan Program Pensiun luran Pasti yang pesertanya adalah pegawai aktif Bank sejak September 2004. Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) yang telah memperoleh izin usaha oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor KEP-1100/KM.17/1998 tanggal 23 November 1998. Kontribusi atas iuran karyawan terhadap Program Pensiun luran Pasti sebesar 25% dari jumlah iuran.

Bank juga memiliki program manfaat pasti lainnya ("Program Lainnya") seperti program Tunjangan Hari Tua (THT), program perawatan kesehatan pasca kerja dan lainnya. Kontribusi karyawan terhadap dana THT adalah sebesar 1,35% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank besarnya 3 kali dari kontribusi peserta. Aktiva Program Lainnya diadministrasikan dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

Biaya atas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian bersih yang belum diakui untuk setiap program pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi jumlah yang lebih besar diantara 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (*Present Value of Defined Benefit Obligation*) dan 10% dari nilai wajar aktiva program pada tanggal tersebut. Besarnya keuntungan dan kerugian aktuarial tersebut diakui menggunakan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja dari para karyawan dalam program tersebut. Selanjutnya, beban jasa lalu (*past service cost*) atas kewajiban manfaat pasti atau perubahan dari kewajiban imbalan dari program yang telah ada harus diamortisasi berdasarkan sisa periode sampai imbalan tersebut menjadi hak (*vested*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Employee benefits (continued)

Other than the defined benefit plans, the Bank also has a defined contribution pension plan with participants consisting of the Bank's entire active employees since September 2004. This defined pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK BNI) which obtained its operating permit from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia based on Decision Letter No. KEP-1100/KM.17/1998 dated November 23, 1998. Contribution from employees in the defined pension plan is 25% from the total contribution.

The Bank has also other defined benefit plans ("other plans") such as Old-age Retirement plan (Tunjangan Hari Tua or THT), healthcare program for retirement and other benefits. Employees' contributions are 1.35% of their net wages for old-age retirement benefits and the Bank contributes 3 times the employees' contributions. The other plan assets are being administered and managed by Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

The cost of providing employee benefits is determined separately for each plan using the projected-unit-credit method. Actuarial gains or losses are recognized as income or expense when the cumulative unrecognized actuarial net gains or losses for each individual plan from prior period exceed the higher of the 10% of the present value of the defined benefit obligation and 10% of the fair value of the plan assets at such date. These actuarial gains or losses are recognized using the straight-line method over the remaining average working lives of the employees covered by the plan. Further, past service cost on the defined benefit plans or changes in the benefit liability from existing programs must be amortized based on the remaining period until the benefits become vested.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Imbalan kerja (lanjutan)

Bank juga memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu suatu jangka waktu tertentu sebelum usia pensiun jabatan pegawai yang membebaskan pegawai dari tugas-tugas rutin sebagaimana pegawai aktif dimana pegawai tidak masuk kerja dengan tetap memperoleh fasilitas kepegawaian yang ditentukan, meliputi: gaji, fasilitas kesehatan, tunjangan hari raya keagamaan, cuti tahunan (jika pada periode tahun berjalan masih terdapat masa kerja pegawai aktif), cuti besar (jika perhitungan cuti besarnya jatuh tempo pada periode MPP), uang duka dan santunan duka. Pegawai yang berhak mendapatkan MPP adalah pegawai yang bekerja 1 tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal, yaitu mulai usia 55 tahun sampai dengan usia 56 tahun.

Bank juga memberikan jasa produksi kepada karyawan yang memiliki kualifikasi dan untuk setiap periode laporan dicadangkan dan diakui sebagai beban pada periode berjalan yang jumlahnya diestimasi berdasarkan persentase tertentu atas laba bersih yang telah ditetapkan oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Bank memberikan program Santunan Purna Jabatan kepada Direksi, Komisaris dan Sekretaris Komisaris yang aturan pelaksanaannya mengacu kepada hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 15 Januari 2003. Keputusan rapat tersebut mengatur, antara lain, Santunan Purna Jabatan diberikan dalam pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iuran tahunannya ditanggung oleh Bank. Sedangkan besaran premi atau iuran tahunan yang ditanggung adalah maksimal 25% dari gaji/honorarium dalam satu tahun dan jumlah tersebut harus dicantumkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Bank setiap tahun anggaran dan diakui sebagai beban pada periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Employee benefits (continued)

The Bank also provides employee benefits in the form of retirement preparation period (MPP), which is defined as a certain period of time before an employee reaches retirement age in which an employee is released from routine duties as active employee where the employee does not report for work but still receives specified employee facilities which consist of salary, health benefits, religious holiday benefit, annual leave (if there is active employee's working period in the current year), major leave (if the calculation of the major leave falls within the retirement preparation period) and family death benefits. Employees entitled for the retirement preparation period (MPP) are active employees within one year from the normal pension age, which ranges from 55 to 56 years old.

The Bank provides production service benefit also to its qualified employees and, for each report period, has provided and recognized as expense in the current period, the amount it estimated based on a certain percentage of net income which has been approved by the stockholder in the Annual Stockholders' General Meeting regarding the Bank's annual Budget and Work Plan (RKAP).

The Bank provides post-work benefit program to the Board of Directors, Board of Commissioners and the Commissioners' Secretary which is implemented by referring to the decision in the Annual Stockholders' General Meeting held on January 15, 2003. The decision of such meeting provides, among others, that post-work benefits be given through an insurance program or pension savings with annual insurance premium/contribution being paid by the Bank. The amount of annual insurance premium/contribution paid amounts up to a maximum of 25% of the annual salary/fee and should be disclosed in the Bank's RKAP for each budget year and recorded as an expense in the current year.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

w. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs spot Reuters pada tanggal tersebut pukul 16.00 WIB. Laba atau rugi kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

	2009	2008
1 Dolar Amerika Serikat	9.395,00	10.900,00
1 Poundsterling Inggris	15.164,94	15.755,42
1 Euro Eropa	13.542,43	15.356,48
1 Yen Jepang	102,19	120,65
1 Dolar Singapura	6.704,50	7.587,91
1 Dolar Australia	8.453,16	7.554,26
1 Dolar Hong Kong	1.211,48	1.406,44

x. Pajak penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak untuk periode bersangkutan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aktiva dan kewajiban yang tercatat di neraca dengan dasar pengenaan pajak atas aktiva dan kewajiban tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak yang belum digunakan, seperti akumulasi rugi pajak yang belum digunakan, juga diakui apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At balance sheet dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into rupiah based on Reuters' spot rates at 16.00 WIB (West Indonesian local time) on those dates. The resulting gains or losses are credited or charged to current year's statements of income.

As of December 31, 2009 and 2008, the exchange rates used in translating the foreign currencies into rupiah are as follows (full amounts in rupiah):

	2009	2008	
1 Dolar Amerika Serikat	9.395,00	10.900,00	United States Dollar 1
1 Poundsterling Inggris	15.164,94	15.755,42	British Poundsterling 1
1 Euro Eropa	13.542,43	15.356,48	European Euro 1
1 Yen Jepang	102,19	120,65	Japanese Yen 1
1 Dolar Singapura	6.704,50	7.587,91	Singapore Dollar 1
1 Dolar Australia	8.453,16	7.554,26	Australian Dollar 1
1 Dolar Hong Kong	1.211,48	1.406,44	Hong Kong Dollar 1

x. Income tax

Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the related period. Deferred tax assets and liabilities are recognized for all temporary differences between the balance sheet and tax bases of such assets and liabilities at each reporting date. Unused tax benefits, such as the carry-forward of unused tax losses, are also recognized to the extent that future realization of such benefits is probable.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Pajak penghasilan (lanjutan)

Aset dan kewajiban pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan diterapkan pada periode aset atau kewajiban tersebut direalisasi atau diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan-peraturan pajak) yang berlaku atau secara substansi telah berlaku pada tanggal neraca. Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dikreditkan atau dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

y. Pelaporan segmen

Berdasarkan PSAK No. 5 (Revisi 2000) tentang "Pelaporan Segmen", Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan segmen geografis (segmen utama) dan segmen usaha (segmen sekunder) Bank.

z. Laba bersih per saham dasar

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan sesuai dengan PSAK No. 56 tentang "Laba Per Saham". Jumlah saham beredar disesuaikan akibat pengaruh pemecahan saham dan kapitalisasi dari laba ditahan dan laba bersih untuk tahun yang bersangkutan (Catatan 50).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Income tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the assets are realized or the liabilities are settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are credited or charged to the current period operations, except for the change relating to transaction previously charged or credited directly to equity.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

y. Segment reporting

Based on PSAK No. 5 (Revised 2000), "Segment Reporting", the Bank identifies and discloses financial information based on the Bank's geographic segment (major segment) and business segment (secondary segment).

z. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding during the related period in accordance with PSAK No. 56, "Earnings Per Share". Total number of shares outstanding was adjusted due to retroactive effect of stock split and capitalization of retained earnings and net income for the related year (Note 50).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Penggunaan estimasi

Dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, manajemen Bank telah menggunakan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Adanya unsur ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi dapat menyebabkan jumlah sebenarnya yang dilaporkan pada tahun yang akan datang berbeda dengan jumlah yang telah diestimasi.

3. PELAKSANAAN KUASI-REORGANISASI

Kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, yang disebabkan terutama oleh melemahnya kurs mata uang Rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga yang tidak stabil, sangat langkanya likuiditas serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak yang buruk bagi industri perbankan di Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak pada para debitur Bank dalam memenuhi kewajibannya sehingga Bank mengalami defisit yang cukup besar. Berdasarkan neraca pada tanggal 31 Mei 2007 Bank memiliki akumulasi saldo defisit sejumlah Rp14.226.290.

Untuk memperoleh awal yang baik (*fresh start*) dengan neraca yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit, maka Bank melaksanakan Kuasi-Reorganisasi per 31 Mei 2007 (Catatan 2b). Kuasi-Reorganisasi dilakukan Bank sebagai langkah penting untuk bisa meneruskan usaha secara lebih baik.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tanggal 19 Januari 2006, pemegang saham Bank memutuskan antara lain bahwa pemegang saham mendukung rencana Bank untuk melakukan Kuasi-Reorganisasi dalam rangka menetapkan besarnya nilai akhir Penyertaan Modal Negara dalam Bank dan perbaikan struktur modal Bank, dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect amounts reported therein. Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods might be based on amounts which differ from those estimates.

3. IMPLEMENTATION OF QUASI-REORGANIZATION

The unfavorable economic condition starting in 1997-mid until 1999, which was caused mainly by the weakening of the rupiah in relation to other foreign currencies such as the United State dollar, the instability of interest rates, liquidity problem and the low level of trust by investors, has provided an adverse impact to the banking industry in Indonesia. This condition has also affected the Bank debtors in fulfilling their obligations. As a result, the Bank suffered a significant amount of deficit. Based on the balance sheet as of May 31, 2007, the Bank had an accumulated deficit balance amounting to Rp14,226,290.

In order to make a fresh start with a balance sheet showing present values without the burden of deficit, the Bank conducted a Quasi-Reorganization as of May 31, 2007 (Note 2b). The Quasi-Reorganization was recognized by the Bank as a necessary step to positively continue its business.

In the Bank's General Stockholders' Meeting held on January 19, 2006 regarding the Approval of the Bank's Budget and Work Plan, the stockholder decided, among others, that they support the Bank's plan to conduct the Quasi-Reorganization in order to decide the final amount of the Government's capital contribution and to restructure the Bank's capital, which should be implemented according to the prevailing regulations.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

4. KAS

	2009	2008	
Rupiah	294.103	229.259	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	156	472	United States Dollar
Euro Eropa	89	101	European Euro
Dolar Singapura	7	8	Singapore Dollar
Yen Jepang	2	3	Japanese Yen
Jumlah	294.357	229.843	Total

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp59.642 dan Rp48.912 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

The rupiah balance included cash in ATMs (Automatic Teller Machines) of Rp59,642 and Rp48,912 as of December 31, 2009 and 2008, respectively.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	2009	2008	
Rupiah	2.840.750	1.809.962	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1.362	1.766	United States Dollar
Jumlah	2.842.112	1.811.728	Total

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp77.502 dan Rp37.908 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts amounting to Rp77,502 and Rp37,908 as of December 31, 2009 and 2008, respectively, which are accounted for based on sharia banking principles.

Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

The minimum reserve ratios as of December 31, 2009 and 2008 required under Bank Indonesia regulations are as follows:

	2009	2008	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Rupiah			Rupiah
Utama	5%	5%	Primary
Sekunder	2,5%	-	Secondary
Dolar Amerika Serikat	1%	1%	United States Dollar
<u>Syariah</u>	5%	5%	<u>Sharia</u>
Rupiah			Rupiah

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM Bank (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Rupiah			Rupiah
Utama	6,96%	5,24%	Primary
Sekunder	15,97%	-	Secondary
Dolar Amerika Serikat	1,21%	1,17%	United States Dollar
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Rupiah	5,73%	5,97%	Rupiah

Pada tanggal 31 Desember 2009 perhitungan rasio GWM didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang GWM Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing. GWM Utama dan sekunder dalam Rupiah yang harus dipelihara adalah sebesar 5% dan 2,5% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam Rupiah.

Pemenuhan GWM sekunder dalam Rupiah mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, perhitungan rasio GWM berdasarkan prinsip perbankan syariah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/21/PBI/2004 tanggal 3 Agustus 2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang diamandemen dengan PBI No. 8/23/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan PBI No. 10/23/PBI/2008 tanggal 16 Oktober 2008.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The minimum reserve ratio of the Bank (unaudited) as of December 31, 2009 and 2008 is as follows:

As of December 31, 2009, the computation of minimum reserve ratio was based on Bank Indonesia Regulation No. 10/25/PBI/2008 dated October 23, 2008 concerning amendment of Bank Indonesia regulation No. 10/19/PBI/2008 dated October 14, 2008 regarding the Minimum Reserve Requirements of Commercial Banks with Bank Indonesia in Rupiah and Foreign Currencies. Primary and secondary minimum reserve in Rupiah is to be maintained equivalent to 5% dan 2.5% of the third party funds in Rupiah.

The requirement on the secondary minimum required reserves in Rupiah becomes applicable on October 24, 2009.

As of December 31, 2009 and 2008, the computation of the minimum reserve ratio based on sharia banking principles was based on Bank Indonesia Regulation No. 6/21/PBI/2004 dated August 3, 2004 concerning the Minimum Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies for Commercial Banks which operate under sharia banking principles, which regulation was amended by Bank Indonesia Regulations No. 8/23/PBI/2006 dated October 5, 2006 and No. 10/23/PBI/2008 dated October 16, 2008.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	2009	2008
Rupiah	4.481	5.803
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	19.223	7.056
Euro Eropa	9.090	8.429
Yen Jepang	584	317
	28.897	15.802
Jumlah	33.378	21.605
Penyisihan kerugian	(7.686)	(10.011)
Bersih	25.692	11.594

b. Berdasarkan bank

	2009	2008
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	960	1.817
Citibank N.A., Jakarta	910	902
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	808	685
PT Bank Syariah Mandiri	669	1.196
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	527	-
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	186	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	160	302
Standard Chartered Bank, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	21	85
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	2	43
Lainnya	82	111
Jumlah Rupiah	4.481	5.803
<u>Mata uang asing</u>		
JP Morgan Chase Bank N.A., London	18.802	6.642
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	7.427	8.429
Deutsche Bank AG	1.663	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Tokyo	584	317
Citibank N.A.	421	414
Jumlah mata uang asing	28.897	15.802
Jumlah	33.378	21.605
Penyisihan kerugian	(7.686)	(10.011)
Bersih	25.692	11.594

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. By currency

Rupiah	
Foreign currencies	
United States Dollar	
European Euro	
Japanese Yen	
Total	
Allowance for possible losses	
Net	

b. By bank

<u>Rupiah</u>	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	
Citibank N.A., Jakarta	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Syariah Mandiri	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Standard Chartered Bank, PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta	
PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk	
Others	
Total Rupiah	
<u>Foreign currencies</u>	
JP Morgan Chase Bank N.A., London	
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	
Deutsche Bank AG	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Tokyo Branch	
Citibank N.A.	
Total foreign currencies	
Total	
Allowance for possible losses	
Net	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 tidak terdapat giro pada bank lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Dalam giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp672 dan Rp1.440 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

c. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, kolektibilitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Lancar	25.951	13.176	
Macet	7.427	8.429	
Jumlah	33.378	21.605	Total

d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Rupiah	1,91%	1,66%	Rupiah
Mata uang asing	0,03%	1,03%	Foreign currencies

e. Perubahan penyisihan kerugian giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Saldo awal tahun	10.011	222	Balance at beginning of year
Pembentukan (pembalikan) penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)	(2.325)	9.789	Provision (reversal) of allowance during the current year (Note 31)
Saldo akhir tahun	7.686	10.011	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

b. By bank (continued)

As of December 31, 2009 and 2008, the Bank had no current accounts with other banks with related party relationship.

Current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp672 and Rp1,440 as of December 31, 2009 and 2008, respectively.

c. Collectibility

As of December 31, 2009 and 2008, the collectibility classification of current accounts with other banks is as follows:

d. Average annual interest rates for current accounts with other banks are as follows:

	2009	2008	
Rupiah	1,91%	1,66%	Rupiah
Foreign currencies	0,03%	1,03%	Foreign currencies

e. The changes in the allowance for possible losses on current accounts with other banks are as follows:

	2009	2008	
Saldo awal tahun	10.011	222	Balance at beginning of year
Pembentukan (pembalikan) penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)	(2.325)	9.789	Provision (reversal) of allowance during the current year (Note 31)
Saldo akhir tahun	7.686	10.011	Balance at end of year

The management believes that the allowance for possible losses provided on current accounts with other banks is adequate.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

	2009	2008
Rupiah		
Deposito berjangka Mudharabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	10.654	5.358
Tabungan Mudharabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1	201
	10.655	5.559
<i>Inter-bank call money</i> Standard Chartered Bank, Jakarta	125.000	125.000
	135.655	130.559
Dolar Amerika Serikat Deposito berjangka Bank of New York, Hong Kong	1.033	1.196
Jumlah	136.688	131.755
Penyisihan kerugian	(3.763)	(6.542)
Bersih	132.925	125.213

7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

a. Based on currency and type

	Rupiah
Mudharabah time deposits PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Mudharabah savings deposits PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
<i>Inter-bank call money</i> Standard Chartered Bank, Jakarta	Inter-bank call money Standard Chartered Bank, Jakarta
United States Dollar Time deposits Bank of New York, Hong Kong	United States Dollar Time deposits Bank of New York, Hong Kong
Total	Total
Allowance for possible losses	Allowance for possible losses
Net	Net

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 tidak terdapat penempatan pada bank lain pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

As of December 31, 2009 and 2008, there were no placements with other banks to related parties.

Dalam penempatan pada bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp10.655 dan Rp5.559 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

As of December 31, 2009 and 2008, placements with other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp10,655 and Rp5,559, respectively.

b. Berdasarkan Sisa Umur Hingga Jatuh Tempo

b. Based on Remaining Periods Until Maturity

Penempatan pada Bank Lain mempunyai sisa umur hingga jatuh tempo kurang dari satu bulan kecuali untuk penempatan dalam bentuk *inter-bank call money* pada Standard Chartered Bank, Jakarta pada tanggal 31 Desember 2009 yang mempunyai sisa umur hingga jatuh tempo antara 1 sampai dengan 3 bulan.

As of December 31, 2009, the placements with other banks have remaining periods to maturity of less than one month except for the placements in the form of *inter-bank call money* in Standard Chartered Bank, Jakarta, which have remaining periods to maturity of between one month and three months.

c. Kolektibilitas

c. Collectibility

Kolektibilitas seluruh penempatan pada bank lain adalah lancar.

The collectibility classification of all placements with other banks is current.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

7. PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan)

- d. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Rupiah	7,19%	8,14%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,30%	2,32%	United States Dollar

- e. Perubahan penyisihan kerugian penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Saldo awal tahun	6.542	547	Balance at beginning of year
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)	(2.779)	5.995	Provision of allowance during the current year (Note 31)
Saldo akhir tahun	3.763	6.542	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penempatan pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

**7. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
(continued)**

- d. Average annual interest rates for placements with other banks are as follows:

- e. The changes in the allowance for possible losses on placements with other banks are as follows:

Management believes that the allowance for possible losses provided on placements with other banks is adequate.

- f. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, penempatan berupa deposito berjangka pada Bank of New York, Hong Kong merupakan deposito Bank untuk keanggotaan VISA International (VISA) yang hanya dapat ditarik ketika Bank sudah tidak lagi menjadi anggota VISA.

- f. As of December 31, 2009 and 2008, the placement in the form of time deposits in Bank of New York, Hong Kong represents the Bank's deposit for membership in VISA International (VISA) which can only be withdrawn upon termination of the VISA membership.

- g. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, penempatan berupa *inter-bank call money* pada Standard Chartered Bank, Jakarta merupakan penempatan yang dilakukan sehubungan dengan transaksi efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dengan Standard Chartered Bank (Catatan 20).

- g. As of December 31, 2009 and 2008, the placement in the form of inter-bank call money in Standard Chartered Bank, Jakarta represents the placement in relation to the sale of securities transaction under repurchase agreement with Standard Chartered Bank (Note 20).

8. EFEK-EFEK

- a. Berdasarkan jenis dan penerbit

	2009	2008	
<u>Diperdagangkan</u>			<u>Trading</u>
Rupiah			Rupiah
Obligasi			Bonds
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Seri II 2009	10.000	-	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Series II 2009
Obligasi Subordinasi			Subordinated Bonds
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Seri I 2009	5.000	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Series I 2009
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Seri II 2009	5.002	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Series II 2009
Sub-jumlah	20.002	-	Sub-total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan penerbit (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

a. Based on type and issuer (continued)

	2009	2008	
<u>Tersedia untuk dijual</u>			<u>Available-for-sale</u>
Rupiah			Rupiah
Obligasi			Bonds
Perum Pegadaian Seri XII A 2007	19.334	20.000	Perum Pegadaian Series XII A 2007
Bank Ekspor Indonesia Seri IV A 2009	10.368	-	Bank Ekspor Indonesia Series IV A 2009
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Seri I B 2007	9.925	9.978	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Series I B 2007
PT Indosat Tbk Seri VI A 2008	10.000	10.000	PT Indosat Tbk Series VI A 2008
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Seri IV 2007	9.347	8.504	PT Indofood Sukses Makmur Tbk Series IV 2007
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Seri IX A 2007	9.800	10.075	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Series IX A 2007
PT Jasa Marga (Persero) Seri XIII R 2007	7.035	7.000	PT Jasa Marga (Persero) Series XIII R 2007
PT Excelcomindo Pratama Tbk Seri II 2007	5.000	3.932	PT Excelcomindo Pratama Tbk Series II 2007
PT Bank Panin Tbk Seri II B 2007	4.987	4.150	PT Bank Panin Tbk Series II B 2007
PT Berlian Laju Tanker Tbk Seri III 2007	5.083	4.965	PT Berlian Laju Tanker Tbk Series III 2007
Obligasi Subordinasi PT Bank NISP Tbk Seri II 2008	4.935	4.513	Subordinated Bonds PT Bank NISP Tbk Series II 2008
	95.814	83.117	
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
Obligasi			Bonds
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN 2017	9.618	6.268	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN 2017
Sub-jumlah	105.432	89.385	Sub-total
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>			<u>Held-to-maturity</u>
Rupiah			Rupiah
Sertifikat Bank Indonesia	5.185.000	1.478.054	Bank Indonesia Certificates
Obligasi			Bonds
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)			PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Syariah Ijarah I 2006	30.000	30.000	Syariah Ijarah I 2006
Sukuk Ijarah II 2007	28.000	28.000	Sukuk Ijarah II 2007
PT Indosat Tbk			PT Indosat Tbk
Sukuk Ijarah III 2008	30.000	30.000	Sukuk Ijarah III 2008
Sukuk Ijarah II 2007	15.000	15.000	Sukuk Ijarah II 2007
Syariah Ijarah 2005	14.000	14.000	Syariah Ijarah 2005
PT Mayora Indah Tbk			PT Mayora Indah Tbk
Sukuk Mudharabah I 2008	14.000	14.000	Sukuk Mudharabah I 2008

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis dan penerbit (lanjutan)

	2009	2008	
Dimiliki hingga jatuh tempo (lanjutan)			<i>Held-to-maturity (continued)</i>
Rupiah (lanjutan)			<i>Rupiah (continued)</i>
PT Aneka Gas Industri			<i>PT Aneka Gas Industri</i>
Sukuk Ijarah I 2008	11.000	11.000	<i>Sukuk Ijarah I 2008</i>
PT Berlian Laju Tanker Tbk			<i>PT Berlian Laju Tanker Tbk</i>
Sukuk Ijarah 2007	2.000	2.000	<i>Sukuk Ijarah 2007</i>
PT Matahari Putra Prima Tbk			<i>PT Matahari Putra Prima Tbk</i>
Syariah Ijarah I 2004	-	31.000	<i>Syariah Ijarah I 2004</i>
Efek Beragunan Aset			<i>Residential Mortgage Backed Securities</i>
KIK EBA Danareksa			<i>KIK EBA Danareksa</i>
SMF II - KPR BTN			<i>SMF II - KPR BTN</i>
(Catatan 11e)	31.305	-	<i>(Note 11e)</i>
Efek Beragunan Aset			<i>Residential Mortgage Backed Securities</i>
KIK EBA Danareksa			<i>KIK EBA Danareksa</i>
SMF I - KPR BTN			<i>SMF I - KPR BTN</i>
(Catatan 11e)	11.111	-	<i>(Note 11e)</i>
	5.371.416	1.653.054	
Bunga dan diskonto yang belum diamortisasi	(8.958)	(5.141)	<i>Unamortized interest and discount</i>
Premi yang belum diamortisasi	80	96	<i>Unamortized premium</i>
Bersih	5.362.538	1.648.009	<i>Net</i>
Jumlah	5.487.972	1.737.394	<i>Total</i>
Penyisihan kerugian	(4.411)	(4.029)	<i>Allowance for possible losses</i>
Bersih	5.483.561	1.733.365	<i>Net</i>

b. Jatuh tempo dan suku bunga

b. *Maturity and interest rate*

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah				<i>Rupiah</i>
Bank Indonesia	Sertifikat Bank Indonesia/ <i>BI Certificates</i>	< 1 tahun/ < 1 year	Rata-rata 7,53% dan 8,849% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008/Average of 7.53% and 8.849% for the years ended December 31, 2009 and 2008, respectively	<i>Bank Indonesia</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

b. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan)				Rupiah (continued)
Perum Pegadaian Seri XII A 2007	Obligasi/Bonds	4 September 2017/ September 4, 2017	10,0250% tetap/ 10.0250% fixed	Perum Pegadaian Series XII A 2007
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Seri IX A 2007	Obligasi/Bonds	10 Juli 2017/ July 10, 2017	10,4000% tetap/ 10.4000% fixed	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Series IX A 2007
Syariah Ijarah I 2006	Obligasi/Bonds	21 September 2016/ September 21, 2016	13,6000%/ 13.6000%	Syariah Ijarah I 2006
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	10 Juli 2017/ July 10, 2017	10,4000%/ 10.4000%	Sukuk Ijarah II 2007
PT Indosat Tbk Seri VI A 2008	Obligasi/Bonds	9 April 2013/ April 9, 2013	10,2500% tetap/ 10.2500% fixed	PT Indosat Tbk Series VI A 2008
Sukuk Ijarah III 2008	Obligasi/Bonds	4 September 2013/ September 4, 2013	10,2500%/ 10.2500%	Sukuk Ijarah III 2008
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	29 Mei 2014/ May 29, 2014	10,2000%/ 10.2000%	Sukuk Ijarah II 2007
Syariah Ijarah 2005	Obligasi/Bonds	21 Juni 2011/ June 21, 2011	12,0000%/ 12.0000%	Syariah Ijarah 2005
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Seri I B 2007	Obligasi/Bonds	19 April 2012/ April 19, 2012	10,6000% tetap/ 10.6000% fixed	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Series I B 2007
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Seri IV 2007	Obligasi/Bonds	15 Mei 2012/ May 15, 2012	10,0125% tetap/ 10.0125% fixed	PT Indofood Sukses Makmur Tbk Series IV 2007
PT Jasa Marga (Persero) Seri XIII R 2007	Obligasi/Bonds	21 Juni 2017/ June 21, 2017	10,2500% tetap/ 10.2500% fixed	PT Jasa Marga (Persero) Series XIII R 2007
PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Seri IV A 2009	Obligasi/Bonds	28 Juni 2010/ June 28, 2010	10,0000% tetap/ 10.0000% fixed	PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Series IV A 2009
PT Berlian Laju Tanker Tbk Seri III 2007	Obligasi/Bonds	5 Juli 2012/ July 5, 2012	10,3500% tetap/ 10.3500% fixed	PT Berlian Laju Tanker Tbk Series III 2007
Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	5 Juli 2012/ July 5, 2012	10,3000%/ 10.3000%	Sukuk Ijarah 2007
PT Bank Panin Tbk Seri II B 2007	Obligasi/Bonds	19 Juni 2012/ June 19, 2012	10,7500% tetap/ 10.7500% fixed	PT Bank Panin Tbk Series II B 2007
PT Excelcomindo Pratama Tbk Seri II 2007	Obligasi/Bonds	26 April 2012/ April 26, 2012	10,3500% tetap/ 10.3500% fixed	PT Excelcomindo Pratama Tbk Series II 2007
PT Matahari Putra Prima Tbk Syariah Ijarah I 2004	Obligasi/Bonds	11 Mei 2009/ May 11, 2009	13,8000%/ 13.8000%	PT Matahari Putra Prima Tbk Syariah Ijarah I 2004
PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008	Obligasi/Bonds	5 Juni 2013/ June 5, 2013	13,7500%/ 13.7500%	PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008
PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008	Obligasi/Bonds	7 Juli 2013/ July 7, 2013	14,5600%/ 14.5600%	PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Seri II 2009	Obligasi/Bonds	3 Januari 2011/ January 3, 2011	9,5000% tetap/ 9.5000% fixed	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Series II 2009
PT Bank NISP Tbk Seri II 2008	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	11 Maret 2018/ March 11, 2018	11,1000% tetap/ 11.1000% fixed	PT Bank NISP Tbk Series II 2008

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Date of Maturity	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah (lanjutan) PT Bank Mandiri Tbk Seri I 2009	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	11 Desember 2016/ December 11, 2016	11,8500% tetap/ 11.8500% fixed	Rupiah (continued) PT Bank Mandiri Tbk Series I 2009
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Seri II 2009	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	22 Desember 2014/ December 22, 2014	10,9500% tetap/ 10.9500% fixed	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Series II 2009
KIK - EBA Danareksa SMF II - KPR BTN (Catatan 11e)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	10 Desember 2019/ December 10, 2019	Tidak tetap/ Variable cash flow	KIK - EBA Danareksa SMF II - KPR BTN (Note 11e)
KIK - EBA Danareksa SMF I - KPR BTN (Catatan 11e)	Efek Beragunan Aset - KPR/ Residential Mortgage Backed Securities	10 Maret 2018/ March 10, 2018	Tidak tetap/ Variable cash flow	KIK - EBA Danareksa SMF I - KPR BTN (Note 11e)
Dolar Amerika Serikat PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN 2017	Obligasi/Bonds	28 Juni 2017 June 28, 2017	7,250% tetap/ 7.250% fixed	United States dollar PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN 2017

8. SECURITIES (continued)

b. Maturity and interest rate (continued)

c. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo
(efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo)

c. Remaining period to maturity (held-to-maturity
securities)

	2009	2008	
≤ 1 tahun	5.185.000	1.509.054	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 5 tahun	86.000	71.000	> 1 year ≤ 5 years
> 5 tahun ≤ 10 tahun	100.416	73.000	> 5 years ≤ 10 years
	5.371.416	1.653.054	
Bunga dan diskonto yang belum diamortisasi	(8.958)	(5.141)	Unamortized interest and discount
Premi yang belum diamortisasi	80	96	Unamortized premium
Bersih	5.362.538	1.648.009	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

d. Peringkat

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero) dan Moody's Investor Service pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

Penerbit	Jenis/ Type	2009	2008	Issuer
Perum Pegadaian Seri XII A 2007	Obligasi/Bonds	idAA+	idAA+	Perum Pegadaian Series XII A 2007
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Seri IX A 2007	Obligasi/Bonds	idAA-	Aa2.id	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Series IX A 2007
Syariah Ijarah I 2006	Obligasi/Bonds	idAA-(Sy)	idAA-(Sy)	Syariah Ijarah I 2006
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	idAA-(Sy)	Aa2.id	Sukuk Ijarah II 2007
PLN 2017	Obligasi/Bonds	Ba2	BB-e	PLN 2017
PT Bank Danamon Indonesia Tbk Seri I B 2007	Obligasi/Bonds	idAA+	idAA+	PT Bank Danamon Indonesia Tbk Series I B 2007
PT Indofood Sukses Makmur Tbk Seri IV 2007	Obligasi/Bonds	idAA	idAA+	PT Indofood Sukses Makmur Tbk Series IV 2007
PT Jasa Marga (Persero) Seri XIII R 2007	Obligasi/Bonds	idAA-	idAA-	PT Jasa Marga (Persero) Series XIII R 2007
PT Bank Panin Tbk Seri II B 2007	Obligasi/Bonds	idAA-	idA	PT Bank Panin Tbk Series II B 2007
PT Excelcomindo Pratama Tbk Seri II 2007	Obligasi/Bonds	idA+	idAA-	PT Excelcomindo Pratama Tbk Series II 2007
PT Berlian Laju Tanker Tbk Seri III 2007	Obligasi/Bonds	idA	idA+	PT Berlian Laju Tanker Tbk Series III 2007
Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	idA(Sy)	idA+(Sy)	Sukuk Ijarah 2007
PT Indosat Tbk Seri VI A 2008	Obligasi/Bonds	idAA+	idAA+	PT Indosat Tbk Series VI A 2008
Sukuk Ijarah III 2008	Obligasi/Bonds	idAA+(Sy)	idAA+(Sy)	Sukuk Ijarah III 2008
Sukuk Ijarah II 2007	Obligasi/Bonds	idAA+(Sy)	idAA+(Sy)	Sukuk Ijarah II 2007
Syariah Ijarah I 2005	Obligasi/Bonds	idAA+(Sy)	idAA+(Sy)	Syariah Ijarah I 2005
PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Seri IV A 2009	Obligasi/Bonds	idAAA	-	PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Series IV A 2009
PT Matahari Putra Prima Tbk Syariah Ijarah I 2004	Obligasi/Bonds	-	idA+(Sy)	PT Matahari Putra Prima Tbk Syariah Ijarah I 2004
PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008	Obligasi/Bonds	idA+(Sy)	idA+(Sy)	PT Mayora Indah Tbk Sukuk Mudharabah I 2008
PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008	Obligasi/Bonds	idBBB(Sy)	A3.id	PT Aneka Gas Industri Sukuk Ijarah I 2008
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Seri II 2008	Obligasi/Bonds	idAA	-	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Series II 2008
PT Bank NISP Tbk Seri II 2008	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	idA+	idA+	PT Bank NISP Tbk Series II 2008
PT Bank Mandiri Tbk Seri I 2009	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	idAA+	-	PT Bank Mandiri Tbk Series I 2009
PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Seri II 2009	Obligasi Subordinasi/ Subordinated Bonds	idAA+	-	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Series II 2009

8. SECURITIES (continued)

d. Rating

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Persero) and Moody's Investor Service on December 31, 2009 and 2008, are as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, kolektibilitas Efek-efek adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Lancar	5.483.827	1.737.394	Current
Dalam Perhatian Khusus	4.087	-	Special mention
Kurang Lancar	39	-	Substandard
Diragukan	17	-	Doubtful
Macet	2	-	Loss
Jumlah	5.487.972	1.737.394	Total
Penyisihan kerugian	(4.411)	(4.029)	Allowance for possible losses
Bersih	5.483.561	1.733.365	Net

f. Perubahan penyisihan kerugian efek-efek adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Saldo awal tahun	4.029	2.911	Balance at beginning of period
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)	382	1.118	Provision of allowance during the current year (Note 31)
Saldo akhir tahun	4.411	4.029	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian efek-efek yang dibentuk telah memadai.

As of December 31, 2009 and 2008, the securities collectibility classification is as follows:

f. The changes in the allowance for possible losses on securities are as follows:

Management believes that the allowance for possible losses provided on securities is adequate.

g. Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan efek-efek sebesar Rp53 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan efek-efek - bersih" di laporan laba rugi.

g. The Bank recognized net gain on sale of securities amounting to Rp53 for the year ended December 31, 2008 which is presented in the statement of income as "Gain on sale of securities - net".

h. Bank mengakui keuntungan bersih dari kenaikan nilai efek-efek yang diperdagangkan Rp2 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari kenaikan nilai efek-efek yang diperdagangkan - bersih". Bank juga mengakui kerugian bersih dari penurunan nilai efek-efek yang diperdagangkan - bersih sebesar Rp7.535 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang disajikan dalam akun "Kerugian penurunan nilai efek-efek yang diperdagangkan - bersih" di laporan laba rugi.

h. The Bank recognized net gain from the increase in value of trading securities amounting to Rp2 for the year ended December 31, 2009 which is presented in the statement of income as "Gain from increase in value of trading securities - net". The Bank also recognized net loss from the decrease in value of trading securities amounting to Rp7,535 for the year ended December 31, 2008 which is presented in the statement of income as "Loss from decrease in value of trading securities - net"

i. Nilai pasar untuk obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2009 adalah 98,646% sampai dengan 111,406%, dari nilai nominal obligasi yang dimiliki oleh Bank.

i. As of December 31, 2009, the market values of all held-to-maturity bonds ranged from 98.646% to 111.406% of the nominal amounts of bonds owned by the Bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- j. Keuntungan yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 sebesar Rp2.213 dan kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar efek-efek tersedia untuk dijual sebesar Rp3.422 disajikan dalam akun "Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang tersedia untuk dijual - bersih" dalam komponen ekuitas.
- k. Pada tanggal 1 September 2008, Bank telah melakukan reklasifikasi efek-efek diperdagangkan ke efek-efek tersedia untuk dijual dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat. Jumlah nilai pasar efek-efek diperdagangkan pada tanggal pemindahan (1 September 2008) dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat tersebut masing-masing sebesar Rp83.792 dan US\$10.934.268 (dalam dolar penuh).

8. SECURITIES (continued)

- j. As of December 31, 2009 and 2008, the unrealized gain due to increase in the fair value of available-for-sale securities amounting to Rp2,213 and unrealized loss due to decline in the fair value of available-for-sale securities amounting Rp3,422, respectively are presented as part of "Unrealized loss on available-for-sale securities and government bonds (recapitalization bonds) - net" under stockholders' equity.
- k. On September 1, 2008, the Bank reclassified trading securities to become available-for-sale securities denominated in rupiah and United States dollar. The total market value of the trading securities at the date of transfer (September 1, 2008) in rupiah and United States dollars amounted to Rp83,792 and US\$10,934,268 (full amount), respectively.

9. OBLIGASI PEMERINTAH REKAPITALISASI)

(OBLIGASI

9. GOVERNMENT BONDS (RECAPITALIZATION BONDS)

	2009	2008	
Diperdagangkan			Trading
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 002	10.723	-	FR 002
Jumlah Obligasi Pemerintah yang diperdagangkan	10.723	-	Total Government bonds - Trading
Tersedia untuk dijual			Available-for-sale
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
Rupiah			Rupiah
FR 0047	55.143	50.048	FR0047
FR 0010	40.520	40.859	FR0010
FR 0020	35.402	32.673	FR0020
FR 0036	32.664	29.147	FR0036
FR 0048	32.333	28.473	FR0048
FR 0026	32.332	28.958	FR0026
FR 0028	30.782	27.017	FR0028
FR 0038	22.014	19.599	FR0038
FR 0045	21.735	19.871	FR0045
FR 0033	11.112	20.454	FR0033
FR 0013	10.577	10.617	FR0013
FR 0002	-	91.350	FR 0002
ORI 0002	-	58.404	ORI 0002
FR 0049	-	27.041	FR 0049
FR 0012	-	10.166	FR 0012
	324.614	494.677	

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

9. OBLIGASI PEMERINTAH REKAPITALISASI (lanjutan)	(OBLIGASI	2009	2008	9. GOVERNMENT BONDS (RECAPITALIZATION BONDS) (continued)
Tersedia untuk dijual (lanjutan)				Available-for-sale (continued)
Tingkat bunga tetap (lanjutan)				Fixed interest rate (continued)
Dollar Amerika Serikat				United States Dollar
RI 2018		31.077	36.792	RI 2018
RI 2017		20.756	18.666	RI 2017
RI 2016		10.693	9.330	RI 2016
RI 2037		9.328	8.219	RI 2037
RI 2015		-	19.882	RI 2015
		71.854	92.889	
Sub-jumlah		396.468	587.566	Sub-total
Zero Coupon Bonds				Zero Coupon Bonds
ZC 0002		-	46.032	ZC 0002
Tingkat bunga mengambang				Variable interest rate
VR 0031		1.074.375	1.122.975	VR 0031
VR 0023		875.916	876.033	VR 0023
VR 0028		811.241	777.993	VR 0028
VR 0027		540.028	540.321	VR 0027
VR 0026		461.265	448.597	VR 0026
VR 0029		457.228	437.344	VR 0029
VR 0021		338.697	336.617	VR 0021
VR 0022		26.597	26.607	VR 0022
VR 0018		2.201	2.184	VR 0018
VR 0017		694	685	VR 0017
VR 0016		-	82	VR 0016
		4.588.242	4.569.438	
Jumlah Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual		4.984.710	5.203.036	Total Government bonds - Available-for-sale
Dimiliki hingga jatuh tempo				Held-to-maturity
Tingkat bunga tetap				Fixed interest rate
FR 0010		10.000	-	FR 0010
Tingkat Bunga mengambang				Variable interest rate
VR 0031		1.125.000	1.125.000	VR 0031
VR 0020		750.000	750.000	VR 0020
VR 0029		457.938	457.938	VR 0029
Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0002 2008		50.000	50.000	Government sharia bond Series IFR-0002 2008
		2.392.938	2.382.938	
Diskonto yang belum diamortisasi		(8.444)	(9.577)	Unamortized discount
Premi yang belum diamortisasi		286	172	Unamortized premium
Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo - bersih		2.384.780	2.373.533	Government bonds held-to-maturity - net
Jumlah		7.380.213	7.576.569	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

9. OBLIGASI PEMERINTAH (OBLIGASI REKAPITALISASI) (lanjutan)

Obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) sejumlah nominal Rp4.200.527 dan Rp1.957.817 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, telah dijual dengan janji dibeli kembali (Catatan 20).

Obligasi tingkat bunga tetap memperoleh bunga tahunan berkisar antara 6,625% sampai dengan 15,425% dan 9,00% sampai dengan 15,43% masing-masing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

Nilai pasar untuk obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) tingkat suku bunga tetap yang diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar 107,2288% dari nominal obligasi.

Nilai pasar untuk obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing berkisar antara 89,8138% sampai dengan 118,0056% dan antara 83,1135% sampai dengan 108,9116% dari nilai nominal obligasi yang dimiliki oleh Bank. Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp56.452 dan Rp111.325 yang disajikan dalam akun "Kerugian yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang tersedia untuk dijual - bersih" dalam komponen ekuitas.

Nilai pasar untuk obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang dimiliki hingga jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing berkisar antara 95,500% sampai dengan 101,3000% dan 98,1110% sampai dengan 99,8200% dari nominal obligasi.

Bank mengakui keuntungan bersih atas penjualan obligasi pemerintah sebesar Rp5.198 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang disajikan dalam akun "Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) - bersih", serta kerugian bersih atas penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) sebesar Rp23.105 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang disajikan dalam akun "Kerugian dari penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) - bersih" di laporan laba rugi.

Bank mengakui kerugian bersih dari penurunan nilai obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang diperdagangkan sebesar Rp27 dan Rp32.116 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang disajikan dalam akun "Kerugian dari penurunan nilai obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang diperdagangkan - bersih" di laporan laba rugi.

9. GOVERNMENT BONDS (RECAPITALIZATION BONDS) (continued)

As of December 31, 2009 and 2008, the government bonds (recapitalization bonds) with nominal amounts of Rp4,200,527 and Rp1,957,817, respectively, were sold under repurchase agreements (Note 20).

The bonds with fixed interest rates bear interest at annual rates ranging from 6.625% to 15.425% and from 9.00% to 15.43% for the years ended December 31, 2009 and 2008, respectively.

As of December 31, 2009, the market values of fixed interest rate government bonds for trading (recapitalization bonds) amounted to 107.2288% of the nominal amounts of the bonds.

As of December 31, 2009 and 2008, the market values of available-for-sale government bonds (recapitalization bonds) ranged from 89.8138% to 118.0056% and from 83.1135% to 108.9116%, respectively, of the nominal amounts of the bonds owned by the Bank. As of December 31, 2009 and 2008, the unrealized loss due to the decrease in the fair value of available-for-sale government bonds amounted to Rp56,452 and Rp111,325, respectively, which is presented as "Unrealized loss on available-for-sale securities and government bonds (recapitalization bonds) - net" as a component of Stockholders' equity.

As of December 31, 2009 and 2008, the market values of held-to-maturity government bonds (recapitalization bonds) ranged from 95.500% to 101.3000% and from 98.1110% to 99.8200% respectively of the bonds nominal amounts.

The Bank recognized net gain on sale of government bonds amounting to Rp5,198 for the year ended December 31, 2009, which is presented as "Gain on sale of government bonds (recapitalization bonds) - net" and recognized net loss on sale of government bonds amounting to Rp23,105 for the year ended December 31, 2008, which is presented as "Loss on sale of government bonds (recapitalization bonds) - net" in the statements of income.

The Bank recognized net loss from the decrease in value of government bonds (recapitalization bonds) classified as trading amounting to Rp27 and Rp32,116 for the years ended December 31, 2009 and 2008, respectively, which is presented as "Loss from decrease in value of trading government bonds (recapitalization bonds) - net" in the statements of income.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

9. OBLIGASI PEMERINTAH (OBLIGASI REKAPITALISASI) (lanjutan)

Berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 10/177/DpG/DPNP tanggal 9 Oktober 2008 perihal Penetapan Nilai Wajar dan Reklasifikasi Surat Utang Negara (SUN), pada tanggal 19 Desember 2008, Bank telah melakukan reklasifikasi Obligasi Pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang Tersedia untuk Dijual ke Obligasi Pemerintah (obligasi rekapitalisasi) Dimiliki Hingga Jatuh Tempo efektif per tanggal 1 September 2008, dengan nilai nominal sebesar Rp2.332.938. Nilai pasar Obligasi Pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang Tersedia untuk Dijual pada tanggal pemindahan (1 September 2008) tersebut adalah Rp2.322.981. Selisih antara nilai nominal dan nilai pasar diamortisasi sampai dengan obligasi jatuh tempo. Laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas dan diamortisasi sampai dengan jatuh tempo obligasi.

Pada tanggal 1 September 2008, Bank juga telah melakukan reklasifikasi Obligasi Pemerintah (obligasi rekapitalisasi) yang Diperdagangkan ke Obligasi Pemerintah (obligasi rekapitalisasi) Tersedia Untuk Dijual. Nilai pasar Obligasi Diperdagangkan pada tanggal pemindahan (1 September 2008) sebesar Rp241.437.

10. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN SWAP SUKU BUNGA

Bank menghadapi risiko pasar atas perubahan tingkat suku bunga dan menggunakan instrumen derivatif sehubungan dengan aktivitas manajemen risiko. Bank tidak menggunakan atau menerbitkan instrumen derivatif untuk tujuan diperdagangkan.

Pada bulan September 2006 dan 2005, Bank menandatangani perjanjian *swap* suku bunga dengan beberapa *counter-party* untuk melindungi risiko suku bunga yang berhubungan dengan obligasi tingkat bunga tetap yang diterbitkan oleh Bank (obligasi BTN IX tahun 2003, obligasi BTN XI tahun 2005 dan obligasi BTN XII tahun 2006) dan rincian saldo pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2009/December 31, 2009

Counter-party	Tanggal Kontrak/ Contract Date	Tanggal Efektif/ Effective Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Jumlah Nominal (Kontrak)/ Notional Amount (Contract)	Suku bunga tetap yang dibayar oleh counter-party/ Fixed interest rate paid by counter-party	Suku bunga mengambang yang dibayar oleh Bank/ Floating interest rate paid by the Bank	Counter-party
Tagihan <i>swap</i> suku bunga							Interest rate swap receivables
Standard Chartered Bank	1/9/2005	6/9/2005	6/7/2010	375.000	12,00%	SBI 3 bulan/months -1,60%	Standard Chartered Bank
ABN-AMRO Bank N.V.	22/9/2005	26/9/2005	6/7/2010	250.000	12,00%	SBI 3 bulan/months -1,70%	ABN-AMRO Bank N.V.

9. GOVERNMENT BONDS (RECAPITALIZATION BONDS) (continued)

Based on Letter No. 10/177/DpG/DPNP dated October 9, 2008 of Bank Indonesia regarding Fair Value Determination and Reclassification of State Promissory Notes, as of December 19, 2008, the Bank reclassified government bonds (recapitalization bonds) classified as available-for-sale to become held-to-maturity government bonds (recapitalization bonds) with nominal amount of Rp2,332,938, effective on September 1, 2008. The market value of available-of-sale government bonds (recapitalization bonds) as of such transfer date (September 1, 2008) amounted to Rp2,322,981. The difference between the nominal and market value is amortized until maturity of the bonds. The unrealized gain or loss on the date of reclassification is presented as a component of stockholders' equity and amortized until the maturity date of the bonds.

On September 1, 2008, the Bank also reclassified government bonds (recapitalization bonds) classified as trading to become available-for-sale. The market value of the trading bonds amounted to Rp241,437 on the date of reclassification (September 1, 2008).

10. INTEREST RATE SWAP RECEIVABLES AND LIABILITIES

The Bank is exposed to market risks on the changes in interest rates, and uses derivative instruments in connection with its risk management activities. The Bank does not use or issue derivative financial instruments for trading purposes.

In September 2006 and 2005, the Bank entered into interest rate swap agreements with several counter-parties to hedge against interest rate risks relating to fixed rate bonds issued by the Bank (BTN IX bonds in 2003, BTN XI bonds in 2005 and BTN XII bonds in 2006) and the details as of December 31, 2009 and 2008 are as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

10. TAGIHAN DAN KEWAJIBAN SWAP SUKU BUNGA (lanjutan)

10. INTEREST RATE SWAP RECEIVABLES AND LIABILITIES (continued)

31 Desember 2008/December 31, 2008

Counter-party	Tanggal Kontrak/ Contract Date	Tanggal Efektif/ Effective Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Jumlah Nosional (Kontrak)/ Notional Amount (Contract)	Suku bunga tetap yang dibayar oleh counter-party/ Fixed interest rate paid by counter-party	Suku bunga mengambang yang dibayar oleh Bank/ Floating interest rate paid by the Bank	Counter-party
<u>Tagihan swap suku bunga</u>							<u>Interest rate swap receivables</u>
Standard Chartered Bank	1/9/2005	6/9/2005	6/7/2010	375.000	12,00%	SBI 3 bulan/months -1,60%	Standard Chartered Bank
ABN-AMRO Bank N.V.	22/9/2005	26/9/2005	6/7/2010	250.000	12,00%	SBI 3 bulan/months -1,70%	ABN-AMRO Bank N.V.
<u>Kewajiban swap suku bunga</u>							<u>Interest rate swap liabilities</u>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	27/9/2005	29/9/2005	19/9/2009	250.000	12,75%	SBI 1 bulan/months +2,47%	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
JP Morgan Chase Bank, N.A.	27/9/2006	29/9/2005	19/9/2009	250.000	12,75%	SBI 1 bulan/months +2,45%	JP Morgan Chase Bank, N.A.
Nilai Wajar/Fair Values							
				2009			2008
<u>Tagihan swap suku bunga</u>				19.934			19.729
Standard Chartered Bank				13.476			13.632
ABN-AMRO Bank N.V.				33.410			33.361
Jumlah				(351)			(333)
Penyisihan kerugian				33.059			33.028
Bersih							
<u>Kewajiban swap suku bunga</u>				-			1.249
JP Morgan Chase Bank, N.A.				-			866
PT Bank Danamon Indonesia Tbk				-			-
Jumlah				-			2.115
							Total
							Total

Pada tahun 2009, rata-rata tingkat suku bunga mengambang yang dibayar oleh Bank kepada counter-party Standard Chartered Bank dan ABN-AMRO Bank N.V. adalah masing-masing sebesar 7,02% dan 6,92%. Sedangkan pada tahun 2008, rata-rata tingkat suku bunga mengambang yang dibayar oleh Bank kepada counter-party Standard Chartered Bank, ABN-AMRO Bank N.V., PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan JP Morgan Chase Bank, N.A. adalah masing-masing sebesar 8,99%, 8,89%, 11,23% dan 11,21%.

In 2009, the average floating interest rate paid by the Bank to Standard Chartered Bank and ABN-AMRO Bank N.V. amounted to 7.02% and 6.92%, respectively. In 2008, the average floating interest rate paid by the Bank to Standard Chartered Bank, ABN-AMRO Bank N.V., PT Bank Danamon Indonesia Tbk and JP Morgan Chase Bank, N.A. amounted to 8.99%, 8.89%, 11.23% and 11.21%.

Bank mencatat penerimaan bunga atas transaksi swap suku bunga sebesar Rp35.464 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 (Catatan 28). Bank juga mencatat beban bunga atas transaksi swap suku bunga sebesar Rp40.362 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 (Catatan 29).

The Bank recorded interest income amounting to Rp35,464 on the interest rate swap transactions for the year ended December 31, 2009 (Note 28). The Bank also recorded interest expense on interest rate swap transactions amounting to Rp40,362 for the year ended December 31, 2008 (Note 29).

Perubahan penyisihan kerugian pada tagihan swap suku bunga adalah sebagai berikut:

The changes in the allowance for possible losses on interest rate swap receivables are as follows:

	2009	2008	
Saldo awal tahun	333	1.713	Balance at beginning of year
Pembalikan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)	18	(1.380)	Reversal of allowance during the current year (Note 31)
Saldo akhir tahun	351	333	Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian tagihan swap suku bunga telah memadai.

Management believes that the allowance for possible losses on the interest rate swap receivables is adequate.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah adalah dalam Rupiah. Rincian kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah berdasarkan jenis, sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah

2009							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi							Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	26.363.843	4.126.606	87.254	137.285	855.073	31.570.061	Housing loans (KPR)
Non-kepemilikan rumah	2.685.826	374.900	7.906	13.499	112.179	3.194.310	Non-housing loans
Modal kerja	29.049.669	4.501.506	95.160	150.784	967.252	34.764.371	
Investasi	4.728.904	418.732	25.660	31.530	96.589	5.301.415	Working capital
Sindikasi	276.306	63.902	-	167	2.671	343.046	Investment
Direksi dan karyawan	-	48.882	-	-	-	48.882	Syndicated
Pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa	252.547	2.730	136	156	205	255.774	Non-related parties
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	18.915	551	-	-	-	19.466	Related parties
Jumlah	34.326.341	5.036.303	120.956	182.637	1.066.717	40.732.954	Total
Penyisihan kerugian	(389.390)	(65.319)	(4.232)	(19.876)	(224.736)	(703.553)	Allowance for possible losses
Bersih	33.936.951	4.970.984	116.724	162.761	841.981	40.029.401	Net

2008							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Konsumsi							Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	21.910.375	2.628.256	79.124	121.531	674.494	25.413.780	Housing loans (KPR)
Non-kepemilikan rumah	2.479.361	308.563	6.338	11.613	58.568	2.864.443	Non-housing loans
Modal kerja	24.389.736	2.936.819	85.462	133.144	733.062	28.278.223	
Investasi	3.130.323	265.926	11.035	5.066	53.762	3.466.112	Working capital
Sindikasi	92.344	4.602	347	50	1.652	98.995	Investment
Direksi dan karyawan	-	48.882	-	-	-	48.882	Syndicated
Pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa	124.582	1.250	4	-	294	126.130	Non-related parties
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	6.631	258	-	-	-	6.889	Related parties
Jumlah	27.743.616	3.257.737	96.848	138.260	788.770	32.025.231	Total
Penyisihan kerugian	(340.480)	(43.079)	(3.138)	(14.574)	(155.324)	(556.595)	Allowance for possible losses
Bersih	27.403.136	3.214.658	93.710	123.686	633.446	31.468.636	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

b. Sektor Ekonomi

b. Economic Sector

2009							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Perumahan							Property
Pemilikan rumah (KPR)	26.363.843	4.126.606	87.254	137.285	855.073	31.570.061	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	6.153.931	705.912	23.951	37.890	176.500	7.098.184	Non-housing loan
	32.517.774	4.832.518	111.205	175.175	1.031.573	38.668.245	
Konstruksi	424.928	129.270	565	4.289	11.452	570.504	Construction
Jasa-jasa dunia usaha	148.742	1.401	3.255	276	1.372	155.046	Business services
Manufaktur	3.521	187	-	-	513	4.221	Manufacturing
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	3.182	-	142	-	368	3.692	Transportation, warehousing and communication
Perdagangan, restoran dan hotel	52.551	2.020	2.365	470	2.839	60.245	Trading, restaurant and hotel
Pertanian	5.903	22	-	-	220	6.145	Farming
Pertambangan	-	118	-	-	-	118	Mining
Jasa-jasa sosial	914	-	-	-	549	1.463	Social services
Listrik, gas dan air	443	-	-	-	-	443	Electricity, gas and water
Lain-lain	1.168.383	70.767	3.424	2.427	17.831	1.262.832	Others
Jumlah	34.326.341	5.036.303	120.956	182.637	1.066.717	40.732.954	Total
Penyisihan kerugian	(389.390)	(65.319)	(4.232)	(19.876)	(224.736)	(703.553)	Allowance for possible losses
Bersih	33.936.951	4.970.984	116.724	162.761	841.981	40.029.401	Net
2008							
	Lancar/ Current	Dalam Perhatian Khusus/ Special Mention	Kurang Lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Jumlah/ Total	
Perumahan							Property
Pemilikan rumah (KPR)	21.888.306	2.628.256	79.124	121.531	674.494	25.391.711	Housing loan (KPR)
Non-kepemilikan rumah	4.809.877	551.579	14.740	13.254	92.100	5.481.550	Non-housing loan
	26.698.183	3.179.835	93.864	134.785	766.594	30.873.261	
Konstruksi	159.423	9.910	460	177	5.863	175.833	Construction
Jasa-jasa dunia usaha	86.652	1.633	72	248	1.782	90.387	Business services
Manufaktur	15.021	49.381	390	-	669	65.461	Manufacturing
Perdagangan, restoran dan hotel	34.644	1.211	826	65	2.637	39.383	Trading, restaurant and hotel
Transportasi, perdagangan dan komunikasi	7.452	-	-	-	-	7.452	Transportation, warehousing and communication
Pertanian	4.349	-	-	-	1.463	5.812	Farming
Jasa-jasa sosial	1.678	-	-	-	69	1.747	Social services
Pertambangan	1.127	-	-	-	95	1.222	Mining
Lain-lain	735.087	15.767	1.236	2.985	9.598	764.673	Others
Jumlah	27.743.616	3.257.737	96.848	138.260	788.770	32.025.231	Total
Penyisihan kerugian	(340.480)	(43.079)	(3.138)	(14.574)	(155.324)	(556.595)	Allowance for possible losses
Bersih	27.403.136	3.214.658	93.710	123.686	633.446	31.468.636	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

c. Jangka Waktu (sesuai dengan perjanjian kredit dan pembiayaan/piutang syariah)

	2009	2008	
≤ 1 tahun	893.963	165.284	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	2.021.729	2.114.950	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	3.314.836	2.533.078	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	34.502.426	27.211.919	> 5 years
Jumlah	40.732.954	32.025.231	Total
Penyisihan kerugian	(703.553)	(556.595)	Allowance for possible losses
Bersih	40.029.401	31.468.636	Net

d. Sisa Umur Jatuh Tempo

	2009	2008	
≤ 1 tahun	2.989.680	1.919.666	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	1.782.696	1.123.874	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	4.524.875	3.740.874	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	31.435.703	25.240.817	> 5 years
Jumlah	40.732.954	32.025.231	Total
Penyisihan kerugian	(703.553)	(556.595)	Allowance for possible losses
Bersih	40.029.401	31.468.636	Net

e. Informasi Pokok Lainnya

i. Termasuk di dalam kredit yang diberikan adalah pembiayaan/piutang syariah yang diberikan dengan rincian sebagai berikut:

	2009	2008	
Piutang Murabahah	981.836	702.190	Murabahah receivables
Pembiayaan Mudharabah	808.813	453.061	Mudharabah financing
Pembiayaan Musyarakah	157.468	83.877	Musyarakah financing
Piutang Istishna	47.486	12.108	Istishna receivable
Rahn	149	-	Rahn
Jumlah	1.995.752	1.251.236	Total
Penyisihan kerugian	(83.724)	(15.768)	Allowance for possible losses
Bersih	1.912.028	1.235.468	Net

ii. Suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit perumahan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 11,66% dan 12,07%. Suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit korporasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 13,31% dan 12,93%.

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

c. Loan Period (based on agreements covering loan and sharia financing/receivables)

d. Remaining Period to Maturity

e. Other Significant Information

i. The loans include sharia financing/receivables with details, as follows:

ii. The average annual interest rates for housing loans were 11.66% and 12.07% for the years ended December 31, 2009 and 2008, respectively. The average annual interest rates for corporate loans for the years ended December 31, 2009 and 2008 were 13.31% and 12.93%, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

e. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

- iii. Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit yang berkaitan dengan perumahan. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, KPR masing-masing sebesar Rp896.311 dan Rp721.520 telah dijadikan jaminan pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (Catatan 22).
- iv. Kredit yang diberikan dijamin dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank (Catatan 16, 17 dan 18).
- v. Bank telah melakukan sekuritisasi pertama atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("Kumpulan Tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai Koordinator Global dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas Kumpulan Tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa SMFI-KPR BTN (KIK-DSMF-I) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 80 tanggal 16 Januari 2009 dan Akta cession No. 70 tanggal 11 Februari 2009. KIK-DSMF-I dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 79 tanggal 16 Januari 2009. Nilai pokok Kumpulan Tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan Kumpulan Tagihan terseleksi adalah sebesar Rp111.111 yang terdiri dari 5.060 debitur dengan harga sebesar nilai pokok Kumpulan Tagihan pada tanggal cut-off final (7 Januari 2009). Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur Kumpulan Tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 15% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah tanggal 7 Desember 2015. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

e. Other Significant Information (continued)

- iii. Consumer loans consist of housing loans and other housing-related loans. As of December 31, 2009 and 2008, housing loans amounting to Rp896,311 and Rp721,520, respectively, are used as collateral for loans obtained from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (Note 22).
- iv. The loans are collateralized by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell, current accounts, savings deposits, time deposits, or by other collaterals generally acceptable to the Bank (Notes 16, 17 and 18).
- v. The Bank conducted the first securitization on its housing loans bills ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Global Coordinator, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, was sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa SMF I-KPR BTN (KIK-DSMF-I) based on sale-purchase deed No. 80 dated January 16, 2009 and cession deed No. 70 dated February 11, 2009. KIK-DSMF-I was established based on Collective Investment Contract, between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 79 dated January 16, 2009. As of January 7, 2009, (cut-off date), the pool of receivables, which represents selected receivables totaling Rp111,111 and consisting of 5,060 debtors, was sold and transferred at their total principal value. The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale amounted to 15% with a maximum maturity up to December 7, 2015. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

e. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

e. Other Significant Information (continued)

Selanjutnya, KIK-DSMF-I menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas Kumpulan Tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

Further, KIK-DSMF-1 issued Asset-Backed Securities (ABS) which represent an instrument of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

(i) EBA Kelas A senilai Rp100.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 13% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 10 Maret 2018. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Moody's Indonesia yaitu *Aaa_id (triple A; Stable Outlook)*. Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DSMF-I telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui surat No. S-647/BL/2009 tanggal 29 Januari 2009; dan

(i) Class A ABS amounting to Rp100,000 which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of class A ABS with interest at the annual fixed rate of 13% and due on March 10, 2018. The Class ABS were rated *Aaa_id (triple A; Stable Outlook)* by PT Moody's Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DSMF-I became effective based on Letter No. S-647/BL/2009 dated January 29, 2009 of the Chairman of BAPEPAM-LK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp11.111 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Maret 2018. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 10 Februari 2009, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada neraca Bank (Catatan 8).

(ii) Class B ABS with principal value of Rp11,111 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and will mature on March 10, 2018. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that the Bank has the first priority to purchase Class B ABS. Class B ABS holders have the right on the residual cash flow based on the payment priorities in each interest period. On February 10, 2009, the Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities on the Bank's balance sheets (Note 8).

Transaksi penjualan Kumpulan Tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan Kumpulan Tagihan sebesar Rp111.111 dari neraca Bank (*penghentian pengakuan*).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank has excluded the pool of receivables amounting to Rp111,111 from its balance sheets (*derecognition*).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

e. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

e. Other Significant Information (continued)

Atas transaksi sekuritisasi atas Kumpulan Tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 114/PKS/DIM/08 tanggal 4 Desember 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua Perjanjian Penyediaan Jasa No. 46/ADD/PKS/DIR/2008 tertanggal 26 Desember 2008. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DSMF-I dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DSMF-I yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 114/PKS/DIM/08 dated December 4, 2008 which was last amended by the second Amendment of Service Provider Agreement No. 46/ADD/PKS/DIR/2008 dated December 26, 2008, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DSMF-I and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DSMF-I, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas Kumpulan Tagihan telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut off final* (7 Januari 2009), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, Kumpulan Tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari Kumpulan Tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok terutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (January 7, 2009), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders which are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher price between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables after deducting the amount of late payments on the receivable at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

e. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

e. Other Significant Information (continued)

vi. Bank telah melakukan sekuritisasi kedua atas tagihan Kredit Pemilikan Rumah ("Kumpulan Tagihan") yang dimilikinya dengan menunjuk PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) sebagai coordinator Global dan Pembeli Siaga serta Pendukung Kredit. Selanjutnya atas Kumpulan Tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Danareksa SMFII-KPR BTN (KIK-DSMF-II) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 135 tanggal 19 Oktober 2009 dan Akta cession No. 33 tanggal 10 November 2009. KIK-DSMF-II dibentuk berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 13 tanggal 5 Agustus 2009 dan diamandemen dengan akta No. 134 tanggal 19 Oktober 2009. Nilai pokok Kumpulan Tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut yang merupakan Kumpulan Tagihan terseleksi adalah sebesar Rp391.305 yang terdiri dari 15.114 debitor dengan harga sebesar nilai pokok Kumpulan Tagihan pada tanggal cut-off final (7 Oktober 2009). Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitor Kumpulan Tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 15% dengan tanggal jatuh tempo maksimum adalah 7 Oktober 2017. Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

Selanjutnya, KIK-DSMF-II menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas Kumpulan Tagihan. EBA diterbitkan dalam dua kelas yaitu:

vi. The Bank conducted the second securitization transaction on its housing loans bills ("pool of receivables"), by appointing PT Sarana Multi Griya Finansial (Persero) as the Global Coordinator, Standby Buyer and Credit Support. The pool of receivables which have met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, was sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities Danareksa SMFII-KPR BTN (KIK-DSMF-II) based on sale-purchase deed No. 135 dated October 19, 2009 and cession deed No. 33 dated November 10, 2009. KIK-DSMF-II was established based on Collective Investment Contract, between PT Danareksa Investment Management as the investment manager and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 13 dated August 5, 2009 which was amended with deed No. 134 dated October 19, 2009. On the final cut-off date (October 7, 2009), the pool of receivables, which represents selected receivables totaling Rp391,305 and consisting of 15,114 debtors, was sold and transferred at their total principal value. The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale amounted to 15% with a maximum maturity up to October 7, 2017. With the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Further, KIK-DSMF-II issued Asset-Backed Securities (ABS) which represent an instrument of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in two types or classes as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

e. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

e. Other Significant Information (continued)

(i) EBA Kelas A senilai Rp360.000 yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas A dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 10 Desember 2019. EBA Kelas A telah mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun aset dari PT Pemeringkat Efek Indonesia yaitu idAAA. Pada tanggal 30 Oktober 2009, Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-DSMF-II telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui surat No. S-9604/BL/2009 tanggal 30 Oktober 2009; dan

(i) Class A ABS amounting to Rp360,000 which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 100% of the nominal value of class A ABS with interest at the annual fixed rate of 11% and due on December 10, 2019. The Class ABS was rated idAAA by PT Pemeringkat Efek Indonesia. The Registration Statement Letter from KIK-DSMF-II became effective based on Letter No. S-9604/BL/2009 dated October 30, 2009 of the Chairman of BAPEPAM-LK; and

(ii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp31.305 yang ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai pokok EBA Kelas B dan memiliki tanggal jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2019. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa Bank mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli EBA Kelas B. Pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran untuk setiap periode bunga. Pada tanggal 10 November 2009, Bank telah membeli dan mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang dimiliki hingga jatuh tempo pada neraca Bank (Catatan 8).

(ii) Class B ABS with a principal value of Rp31,305 offered at 100% of the nominal value of Class B ABS and mature on December 10, 2019. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that the Bank has the first priority to purchase Class B ABS. Class B ABS holders have the right on the residual cash flow based on the payment priorities in each interest period. On November 10, 2009, Bank purchased and recorded Class B ABS as held-to-maturity securities on the Bank's balance sheets (Note 8).

Transaksi penjualan Kumpulan Tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan Kumpulan Tagihan sebesar Rp391.305 dari neraca Bank (*penghentian pengakuan*).

A true sale opinion was rendered on the sale of the pool of receivables from independent parties which consisted of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank has removed the pool of receivables amounting to Rp391,305 from its balance sheets (*derecognition*).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

e. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

e. Other Significant Information (continued)

Atas transaksi sekuritisasi atas Kumpulan Tagihan tersebut di atas, Bank juga bertindak sebagai Penyedia Jasa sebagaimana tertuang dalam perjanjian penyediaan jasa No. 56/PKS/DIR/2009 tanggal 7 Agustus 2009. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-DSMF-II dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-DSMF-II yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

Based on the Service Provider Agreement No. 56/PKS/DIR/2009 dated August 7, 2009, the Bank also acts as a service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-DSMF-II and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-DSMF-II, which represents the ABS holders.

Setelah jumlah pokok terhutang atas Kumpulan Tagihan telah berkurang menjadi 10% (atau kurang) dari jumlah pokok terhutang pada tanggal *cut off* final (7 Oktober 2009), Bank sebagai penyedia jasa, mempunyai opsi untuk membeli dari para pemegang EBA Kelas A yang diwakili oleh Bank kustodian, pada tiap tanggal pembayaran, seluruh dan tidak hanya sebagian, Kumpulan Tagihan yang tersisa dengan harga yang sama dengan, mana yang lebih tinggi, antara (i) jumlah pokok terhutang dari Kumpulan Tagihan berikut bunganya yang terhutang dikurangi dengan tagihan tertunggak pada saat dilaksanakannya *clean-up call* atau (ii) jumlah pokok tertutang dari EBA kelas A berikut bunganya yang terhutang ditambah biaya-biaya senior dan pajak terhutang saat itu yang wajib dibayar.

After the decrease in the outstanding principal amount of the pool of receivables to 10% (or less) from the principal amount on the final cut-off date (October 7, 2009), the Bank as the service provider, has the option to purchase on each payment date, all and not only a part of the residual pool of receivables from the Class A ABS holders which are represented by the custodian bank, at a price equal to or the higher price between (i) the outstanding principal amount of the pool of receivables including interest after deducting the amount of late payments on the receivable at the time of exercising the clean-up call and (ii) the outstanding principal amount of Class A ABS including interest and other senior expenses and taxes payable at that period of time.

- vii. Jumlah pendapatan bunga kredit yang diterima secara kas atas kredit yang diklasifikasikan sebagai *non-performing* pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp54.765 dan Rp40.269.

- vii. Interest income received in cash for the years ended December 31, 2009 and 2008 from loans classified as non-performing amounted to Rp54,765 and Rp40,269, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

e. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

e. Other Significant Information (continued)

viii. Kredit yang diberikan kepada direksi dan karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya yang dibebani bunga dengan suku bunga rata-rata pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 7,55% dan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sebesar 7,50% dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 10 tahun. Kredit ini dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan.

viii. The loans given to the Bank's directors and employees consist of loans intended for acquisitions of vehicles and other personal necessities with average interest of 7.55% for the year ended December 31, 2009 and 7.50% for the year ended December 31, 2008, with terms of 1 to 10 years. The loans are settled through monthly payroll deductions.

ix. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp19.466 dan Rp6.889. Persentase kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar 0,0477% dan 0,0215%.

ix. As of December 31, 2009 and 2008, the outstanding balances of loans and sharia financing/receivables from related parties amounted to Rp19,466 and Rp6,889, respectively. As of December 31, 2009 and 2008, the percentages of loans and sharia financing/receivables from related parties represent approximately 0.0477% and 0.0215%, respectively, of the total loans and sharia financing/receivables.

x. Perubahan penyisihan kerugian kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

x. The changes in the allowance for possible losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

	2009	2008	
Saldo awal tahun	556.595	487.569	Balance at beginning of year
Pembentukan (pembalikan) penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 31)	68.301	(24.254)	Provision (reversal) of allowance during the current year (Note 31)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	86.671	93.280	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(8.014)	-	Loans written-off
Saldo akhir tahun	703.553	556.595	Balance at the end of year

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

e. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

e. Other Significant Information (continued)

Termasuk di dalam saldo penyisihan kerugian adalah penyisihan kerugian pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp83.724 dan Rp15.768 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

As of December 31, 2009 and 2008, the balance of allowance for possible losses includes allowance for possible losses of sharia financing/receivables amounted to Rp83,724 and Rp15,768, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the amount of allowance for possible losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

xi. Kredit bermasalah dan sedang dalam proses penyelamatan atau restrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp140.913 dan Rp139.401. Restrukturisasi yang dilakukan Bank adalah dengan menanggungkan pembayaran bunga dan/atau memperpanjang masa pembayaran pokok kredit dan bunga tertunggak, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga dan penambahan fasilitas kredit.

xi. As of December 31, 2009 and 2008, non-performing loans under restructuring amounted to Rp140,913 and Rp139,401, respectively. Restructuring schemes undertaken by the Bank include the suspension of payment of interest and/or extension of payment period for loan principal and interest payable, decrease in interest rates, discount on interest payable and granting of additional credit facilities.

xii. Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit (*credit limit*) dan kebijakan penyaluran kredit yang seragam, melakukan pengawasan individual portofolio secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit.

xii. The credit control function of the Bank focuses on preventing the deterioration of the quality of credit portfolio and unsound practices in granting credit facilities that may result in losses. Credit risks are managed by establishing credit limits and setting uniform lending policies, periodic monitoring of individual portfolio, and measuring the collectibility level of credit portfolio.

xiii. Dalam laporan Bank ke Bank Indonesia disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa maupun kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa.

xiii. Based on report submitted by the Bank to Bank Indonesia as of December 31, 2009 and 2008, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

e. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

e. Other Significant Information (continued)

xiv. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode *gross* dan *net*) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut:

xiv. The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the gross and net methods) are shown in the following table:

Kolektibilitas	2009		2008		Collectibility
	Konvensional/ Conventional	Syariah	Konvensional/ Conventional	Syariah	
Kurang Lancar	108.657	12.299	95.382	1.466	Substandard Doubtful Loss
Diragukan	180.587	2.050	137.070	1.190	
Macet	1.014.296	52.421	786.264	2.506	
	1.303.540	66.770	1.018.716	5.162	Allowance for possible losses for NPL/NPF
Penyisihan kerugian atas NPL/NPF	(198.475)	(50.369)	(172.123)	(913)	
Bersih	1.105.065	16.401	846.593	4.249	Net
Jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	38.737.202	1.995.752	30.773.995	1.251.236	Total loans and sharia financing/receivables
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (Gross NPL/NPF)	3,37%	3,35%	3,31%	0,41%	% of non-performing loans and sharia financing/ receivables (Gross NPL/NPF)
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah (Net NPL/NPF)	2,85%	0,82%	2,75%	0,34%	% of non-performing loans and sharia financing/ receivables (Net NPL/NPF)

NPL/NPF neto dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setelah dikurangi penyisihan kerugian dengan jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah keseluruhan.

The net NPL/NPF ratios are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables net of allowance for possible losses, by the total loans and sharia financing/receivables.

xv. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan sebesar 3,17% dan 2,91% dari jumlah kredit sindikasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

xv. Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2009 and 2008, the Bank's share as a co-lender in syndicated loans was 3.17% and 2.91%, respectively, of the total syndicated loans.

xvi. Jumlah Kredit Usaha Kecil (KUK) pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp19.475.728 dan Rp14.973.488.

xvi. As of December 31, 2009 and 2008, the total loans to small-scale enterprises (KUK) amounted to Rp19,475,728 and Rp14,973,488, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN
PEMBIAYAAN/PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

e. Informasi Pokok Lainnya (lanjutan)

e. Other Significant Information (continued)

xvii. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Bank memiliki saldo kredit yang dihapusbukukan masing-masing sebesar Rp754.984 dan Rp833.641. Bank terus melakukan usaha-usaha penagihan atas kredit tersebut. Ikhtisar mutasi kredit hapus buku adalah sebagai berikut:

xvii. The Bank has loans written-off as of December 31, 2009 and 2008 amounting to Rp754,984 and Rp833,641, respectively. The Bank continues to pursue these loans for collection. The summary of the movements of the loans written-off is as follows:

	2009	2008	
Saldo awal tahun	833.641	926.921	<i>Balance at beginning of year</i>
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	8.014	-	<i>Write-off during the current year</i>
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	(86.671)	(93.280)	<i>Recovery of loans written-off</i>
Saldo akhir tahun	754.984	833.641	<i>Balance at the end of year</i>

12. ASET TETAP

12. PREMISES AND EQUIPMENT

	2009				
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ Reklasifikasi/ <i>Additions/ Reclassifications</i>	Pengurangan/ Reklasifikasi/ <i>Deductions/ Reclassifications</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
<u>Nilai Tercatat</u>					<u>Carrying Value</u>
Tanah	511.786	300	-	512.086	<i>Land</i>
Bangunan	545.397	37.356	133.765	448.988	<i>Buildings</i>
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	655.155	106.783	21.974	739.964	<i>Office furniture, fixtures and motor vehicles</i>
Jumlah	1.712.338	144.439	155.739	1.701.038	<i>Total</i>
Aktiva dalam penyelesaian	28.137	232.898	-	261.035	<i>Constructions in progress</i>
Jumlah Nilai Tercatat	1.740.475	377.337	155.739	1.962.073	<i>Total Carrying Value</i>
<u>Akumulasi Penyusutan</u>					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	168.283	19.293	33.983	153.593	<i>Buildings</i>
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	499.547	79.840	7.579	571.808	<i>Office furniture, fixtures and motor vehicles</i>
Jumlah Akumulasi Penyusutan	667.830	99.133	41.562	725.401	<i>Total Accumulated Depreciation</i>
Nilai Buku	1.072.645			1.236.672	<i>Net Book Value</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

	2008				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Nilai Tercatat					<u>Carrying Value</u>
Tanah	511.596	190	-	511.786	Land
Bangunan	511.577	33.822	2	545.397	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	560.702	114.683	20.230	655.155	Office furniture, fixtures and motor vehicles
Jumlah	1.583.875	148.695	20.232	1.712.338	Total
Aktiva dalam penyelesaian	29.086	13.960	14.909	28.137	Constructions in progress
Jumlah Nilai Tercatat	1.612.961	162.655	35.141	1.740.475	Total Carrying Value
Akumulasi Penyusutan					<u>Accumulated Depreciation</u>
Bangunan	146.874	21.411	2	168.283	Buildings
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	468.425	51.321	20.199	499.547	Office furniture, fixtures and motor vehicles
Jumlah Akumulasi Penyusutan	615.299	72.732	20.201	667.830	Total Accumulated Depreciation
Nilai Buku	997.662			1.072.645	Net Book Value

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp99.133 dan Rp70.670 (Catatan 32).

Depreciation of premises and equipment charged to operations amounted to Rp99,133 and Rp70,670 for the years ended December 31, 2009 and 2008, respectively (Note 32).

Hak atas tanah terdiri dari hak milik dan hak guna bangunan yang diperoleh untuk jangka waktu antara 20 tahun sampai 30 tahun yang akan berakhir pada berbagai tanggal, yaitu antara tanggal 4 Juni 2010 sampai 30 Maret 2036, kecuali untuk dua puluh satu sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang telah jatuh tempo pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 yang sedang dalam proses peningkatan status menjadi hak milik. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu hak atas tanah dapat diperbaharui/diperpanjang kembali.

Landrights consist of ownership rights and rights to use for periods ranging from 20 to 30 years and will expire on various dates from June 4, 2010 up to March 30, 2036 except for twenty-one rights to build (HGB) which expired in 2006, 2007, 2008 and 2009 which are in the process of status upgrade to ownership rights. Management has the opinion that the terms of the landrights can be renewed/extended upon their expiration.

Penambahan aset tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 termasuk reklasifikasi dari properti terbengkalai sebesar Rp29.696. Penambahan aset tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 termasuk reklasifikasi dari aktiva dalam penyelesaian sebesar Rp14.909, reklasifikasi dari properti terbengkalai sebesar Rp11.181 dan reklasifikasi dari aset tetap tidak digunakan dengan nilai perolehan dan akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp2.062 dan Rp2.062.

For the year ended December 31, 2009, additions to premises and equipment include reclassification from abandoned properties amounting to Rp29,696. For the year ended December 31, 2008 additions to premises and equipment include reclassification from construction in progress amounting to Rp14,909 from abandoned properties amounting to Rp11,181 and from unused premises and equipment with carrying value and accumulated depreciation amounting to Rp2,062 and Rp2,062, respectively.

Pada tahun 2008, Bank menjual aset tetap berupa kendaraan dan perabot rumah dinas yang mempunyai nilai buku Rp31. Laba atas penjualan aset tersebut di atas, sebesar Rp4.916 pada tahun 2008 dicatat dalam akun "Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih" pada laporan laba rugi (Catatan 35).

In 2008, the Bank sold vehicles and office furniture with net book value amounting to Rp31. The gain from this sale amounting to Rp4,916 in 2008 was recorded as part of "Non-operating income (expense) - net" in the statement of income (Note 35).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

12. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap kecuali tanah diasuransikan terhadap risiko kerugian karena kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu antara lain pada PT Asuransi Bina Griya Upakara (pihak yang mempunyai hubungan istimewa) dan PT Asuransi Ramayana Tbk. Jumlah seluruh nilai pertanggungan adalah sebesar Rp1.086.430 dan Rp1.032.891 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko tersebut adalah cukup.

Persentase tingkat penyelesaian aktiva dalam penyelesaian pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing diperkirakan sebesar 83,89% dan 68,62%. Aktiva dalam penyelesaian terdiri dari bangunan dan peralatan kantor dan diperkirakan akan selesai dalam waktu kurang dari 1 sampai 2 tahun setelah tanggal neraca.

Pada tanggal 2 Februari 2009, telah terjadi kebakaran pada Ruang *Mechanical and Electrical* dan *Air Handling Unit Room* Gedung Menara BTN dari lantai basement sampai ke lantai atap. Gedung Menara BTN yang berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat, merupakan gedung dimana kantor pusat Bank, kantor Bank Cabang Harmoni dan Cabang Syariah Jakarta berada. Berdasarkan laporan konsultan bangunan tertanggal 20 Februari 2009, status struktur Gedung Menara BTN paska kebakaran hanya mengalami kerusakan minor sehingga setelah dilakukan pembersihan dan perbaikan, struktur gedung dapat difungsikan kembali.

Bank telah melakukan estimasi atas penurunan nilai aset tetap akibat kebakaran yang perhitungannya didasarkan pada laporan PT LAPI ITB melalui suratnya kepada Bank tanggal 22 Juni 2009 tentang tingkat kerusakan akibat kebakaran. Berdasarkan perhitungan tersebut Bank telah mencatat penurunan nilai aset tetap sebesar Rp98.930 yang terdiri dari penurunan nilai gedung sebesar Rp98.849 dan penurunan nilai mesin sebesar Rp81.

12. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Premises and equipment, except landrights, are covered by insurance against fire and other risks under certain blanket policies with, among others, PT Asuransi Bina Griya Upakara (a related party) and PT Asuransi Ramayana Tbk. The total insurance coverage amounted to Rp1,086,430 and Rp1,032,891 as of December 31, 2009 and 2008, respectively. Management has the opinion that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

The percentages of completion of the constructions in progress as of December 31, 2009 and 2008 were approximately 83.89% and 68.62%, respectively. Constructions in progress consist of buildings and furnitures and fixtures and are estimated to be completed in less than 1 year up to 2 years after the balance sheet date.

On February 2, 2009, the Mechanical and Electrical and Air Handling Unit Room of the BTN Tower Building, caught fire from the basement floor to the top-most floor. The BTN Tower Building, which is located in Jalan Gajah Mada No.1, Central Jakarta, is utilized as the Bank's Head Office, Jakarta Harmoni Branch Office and Jakarta Sharia Branch Office. Based on the building consultants' report dated February 20, 2009, the BTN Tower Building's structure suffered minor damage and requires clean-up and repairs before it can be used again.

The Bank estimated an impairment of assets due to the fire based on the report dated June 22, 2009 of PT LAPI ITB to the Bank regarding the level of damage due to the fire. Based on the above calculation, the Bank recorded an impairment loss amounting to Rp98,930 which consisted of the impairment of building and machineries amounting to Rp98,849 and Rp81, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

12. ASET TETAP (lanjutan)

Terkait peristiwa kebakaran tersebut di atas, perusahaan asuransi PT Binagriya Upakara, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dan PT Asuransi Parolamas, telah menunjuk *Independent Loss Adjuster* untuk melakukan penilaian kerusakan yang terjadi atas sarana dan prasarana gedung serta peralatan dan perlengkapan kantor Bank. Penilaian ini untuk menentukan nilai kerugian yang terjadi akibat kebakaran sebagai dasar menentukan jumlah klaim yang dapat ditanggung perusahaan asuransi. Gedung Menara BTN telah diasuransikan oleh Bank dengan jenis asuransi diantaranya adalah asuransi kebakaran atas inventaris dan asuransi *Property All Risk* atas Gedung Menara BTN dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp260.206 dan Rp224.421.

Bank telah membukukan pendapatan klaim atas asuransi di atas dengan jenis asuransi *Property All Risk* untuk Gedung Menara BTN dan asuransi kebakaran untuk inventaris sebesar Rp77.000 berdasarkan surat dari PT Binagriya Upakara sebagai pemimpin perusahaan asuransi Bank tanggal 30 Juni 2009. Kerugian akibat kebakaran dan pendapatan klaim atas asuransi telah dibukukan pada tahun 2009 (Catatan 37).

12. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

In connection with this event, the insurance companies, PT Binagriya Upakara, PT Asuransi Ramayana Tbk, PT Asuransi Dayin Mitra Tbk and PT Asuransi Parolamas, appointed an *Independent Loss Adjuster* to appraise the damage on the building infrastructure and the Bank's office supplies and equipment. This appraisal determined the amount of loss incurred due to the fire, which was used as the basis to determine the claim from the insurance companies. The BTN Tower Building is insured by the Bank under several insurance policies which, among others, are on supplies and property all-risk insurance on the BTN Tower Building with coverage amounting to Rp260,206 and Rp224,421, respectively.

Based on letter dated June 30, 2009 from PT Binagriya Upakara, as a lead insurer, the Bank recorded income from the insurance claim on the property all-risks insurance for the BTN Tower Building and fire insurance on office supplies and equipment amounting to Rp77,000. The fire loss and claim for insurance were recognized in year 2009 (Note 37).

13. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

	2009	2008
Kredit yang diberikan	415.420	323.775
Obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi)	85.825	137.999
Efek-efek	6.030	3.020
Penempatan pada bank lain	1.267	2.057
Jumlah	508.542	466.851

13. INTEREST RECEIVABLES

Loans
Government bonds (recapitalization bonds)
Securities
Placements with other banks
Total

14. ASET LAIN-LAIN

	2009	2008
Tagihan kepada pihak ketiga	240.566	212.693
Biaya dibayar di muka	128.356	98.001
Properti terbengkalai - setelah dikurangi penyisihan kerugian sebesar Rp18.722 dan Rp29.455 masing- masing untuk tahun 2009 dan 2008	5.503	24.466
Nota debit dalam penyelesaian - bersih	719	147
Lainnya	33.768	23.411
Jumlah	408.912	358.718

14. OTHER ASSETS

Third party receivables
Prepaid expenses
Abandoned properties - net of allowance for possible losses of Rp18,722 and Rp29,455 in 2009 and 2008, respectively
Debit notes in process - net
Others
Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

14. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia qq Kementerian Perumahan Rakyat atas subsidi selisih bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR), tagihan kepada perusahaan asuransi terkait dengan klaim Bank atas kerugian akibat kebakaran (Catatan 12), tagihan kepada Perum Asabri sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit oleh Bank kepada anggota Asabri dan tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sehubungan dengan kerja sama penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos dan penagihan angsuran KPR.

Biaya dibayar di muka diantaranya merupakan biaya-biaya sewa gedung, sewa rumah, sewa kendaraan dan asuransi.

Properti terbengkalai adalah aset tetap yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai aset tetap yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim. Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang telah dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas properti terbengkalai adalah cukup.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank tanggal 22 Mei 2007 dan persetujuan Komisaris Bank tanggal 10 Oktober 2007, Bank telah menghapusbukukan properti terbengkalai sebesar Rp19.199.

Bank terus melakukan usaha-usaha penjualan atas properti terbengkalai tersebut. Properti terbengkalai yang dihapusbukukan ini tidak disajikan dalam neraca, tetapi disajikan di luar neraca dalam buku besar Bank. Ikhtisar mutasi properti terbengkalai hapus buku adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Saldo awal tahun	19.199	19.199	<i>Balance at begining of year</i>
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	-	-	<i>Write-off during the current year</i>
Saldo akhir tahun	19.199	19.199	<i>Balance at end of year</i>

14. OTHER ASSETS (continued)

Third party receivables represent receivables from customers and other parties such as the Government of the Republic of Indonesia qq Department of People's Housing in connection with the subsidy for interest rate differentials on housing loans, insurance companies in connection with the Bank's claim due to loss on fire (Note 12), Perum Asabri in connection with the Bank's loan facility to members of Asabri and PT Pos Indonesia (Persero) in connection with the mutual operation of Tabungan Batara Kantor Pos and collection of KPR installments.

Prepaid expenses represent, among others, rental of building, house and vehicle, and insurance.

Abandoned properties represent fixed asset previously classified under premises and equipment which are owned by the Bank but are not used in the Bank's regular or normal operations. Management has the opinion that the allowance for possible losses is adequate to cover losses on the abandoned properties.

In the Bank's Annual Stockholders' General Meeting (RUPS) held on May 22, 2007 and the Bank Commissioners' approval dated October 10, 2007, the Bank wrote off abandoned properties of Rp19,199.

The Bank continues to pursue the sale of the abandoned properties. These abandoned properties written-off are not presented in the balance sheet but maintained as off-balance sheet account in the Bank's general ledgers. The summary of the movement of the abandoned properties written-off is as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

15. KEWAJIBAN SEGERA

15. CURRENT LIABILITIES

	2009	2008	
Hutang pajak			Taxes payable
Pajak penghasilan			Income tax
Pasal 4 (2)	29.355	30.980	Article (4) 2
Pasal 25	14.464	15.377	Article 25
Pasal 21	6.914	13.459	Article 21
Pasal 29 (Catatan 36)	24.574	71.017	Article 29 (Note 36)
Titipan nasabah	405.359	383.538	Customer remittances
Bagi hasil yang belum dibagikan	4.111	2.842	Undistributed profit sharing
Deposito berjangka jatuh tempo	1.110	2.048	Matured time deposits
Bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah	684	632	Interest on time deposits not collected by customers
Lain-lain	178.194	72.132	Others
Jumlah	664.765	592.025	Total

16. GIRO

16. DEMAND DEPOSITS

	2009	2008	
Non Bank			Non-bank
Pihak ketiga			Third parties
Rupiah	7.291.883	2.785.682	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	30.156	5.295	United States Dollar
	7.322.039	2.790.977	
Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa			Related parties
Rupiah	42.187	62.199	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	46	54	United States Dollar
	42.233	62.253	
Jumlah	7.364.272	2.853.230	Total

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo giro termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp107.713 dan Rp59.075.

As of December 31, 2009 and 2008, demand deposits include deposits based on sharia banking principles amounting to Rp107,713 and Rp59,075, respectively.

Suku bunga rata-rata per tahun pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 untuk giro dalam Rupiah masing-masing sebesar 2,76% dan 3,22% sedangkan untuk suku bunga giro dalam Dolar Amerika Serikat masing-masing sebesar 0,38% dan 0,42%.

Average annual interest rates for the years ended December 31, 2009 and 2008 were 2.76% and 3.22%, respectively, for rupiah demand deposits and 0.38% and 0.42%, respectively, for United States Dollar demand deposits.

Giro yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rpnil dan Rp6.082.

Demand deposits amounting to RpNil and Rp6,082 as of December 31, 2009 and 2008, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

17. TABUNGAN

	2009	2008
Tabungan Batara	8.740.326	7.248.467
Tabungan Batara Mudharabah	76.326	83.626
Tabungan Batara Wadiah	124.312	43.005
Jumlah	8.940.964	7.375.098

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp200.638 dan Rp126.631.

Suku bunga rata-rata per tahun untuk tabungan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah 3,86% dan 4,36%.

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp7.957 dan Rp2.420.

Tabungan dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp25.624 dan Rp10.345.

Tabungan *Wadiah* dan *Mudharabah* dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp617 dan Rp1.001.

17. SAVINGS DEPOSITS

Batara savings deposits
Batara Mudharabah savings deposits
Batara Wadiah savings deposits

Total

As of December 31, 2009 and 2008, savings deposits include savings deposits based on sharia banking principles amounting to Rp200,638 and Rp126,631, respectively.

Average annual interest rates for the years ended December 31, 2009 and 2008 on the above deposits are 3.86% and 4.36%, respectively.

Savings deposits amounting to Rp7,957 and Rp2,420 as of December 31, 2009 and 2008, respectively, are pledged as collateral for loans extended by the Bank to its customers.

As of December 31, 2009 and 2008, savings deposits of related parties amounted to Rp25,624 and Rp10,345, respectively.

Wadiah and Mudharabah savings deposits of related parties as of December 31, 2009 and 2008 amounted to Rp617 and Rp1,001, respectively.

18. DEPOSITO BERJANGKA

a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun:

18. TIME DEPOSITS

a. The average interest rates of time deposits are as follows:

	Suku Bunga Rata-rata Per Tahun (%)/ Average Annual Interest Rate (%)		
	2009	2008	
Rupiah			<i>Rupiah</i>
1 bulan	6,43	6,54	<i>1 month</i>
3 bulan	6,43	6,54	<i>3 months</i>
6 bulan	6,68	6,82	<i>6 months</i>
12 bulan	6,68	6,81	<i>12 months</i>
24 bulan	6,68	7,08	<i>24 months</i>
Dolar Amerika Serikat			<i>United States Dollar</i>
1 bulan	2,17	3,25	<i>1 month</i>
3 bulan	2,17	3,25	<i>3 months</i>
6 bulan	2,17	3,25	<i>6 months</i>
12 bulan	2,17	3,25	<i>12 months</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

18. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

- b. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu:

	2009	2008
Rupiah		
1 bulan	12.502.518	11.017.295
3 bulan	6.951.596	4.334.585
6 bulan	1.535.050	2.192.727
12 bulan	2.895.150	3.587.645
24 bulan	16.139	15.190
	<u>23.900.453</u>	<u>21.147.442</u>
Dolar Amerika Serikat		
1 bulan	9.124	72.624
3 bulan	70	115
6 bulan	24	180
12 bulan	47	55
	<u>9.265</u>	<u>72.974</u>
Jumlah	<u>23.909.718</u>	<u>21.220.416</u>

- c. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan sisa umur hingga jatuh tempo:

	2009	2008
Rupiah		
≤ 1 bulan	15.106.388	12.276.612
> 1 bulan ≤ 3 bulan	6.455.683	4.382.551
> 3 bulan ≤ 6 bulan	938.164	1.267.966
> 6 bulan ≤ 12 bulan	1.388.139	3.212.718
> 12 bulan ≤ 24 bulan	12.079	7.595
	<u>23.900.453</u>	<u>21.147.442</u>
Dolar Amerika Serikat		
≤ 1 bulan	9.124	72.657
> 1 bulan ≤ 3 bulan	94	262
> 3 bulan ≤ 6 bulan	-	-
> 6 bulan ≤ 12 bulan	47	55
	<u>9.265</u>	<u>72.974</u>
Jumlah	<u>23.909.718</u>	<u>21.220.416</u>

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, deposito berjangka yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp1.138.599 dan Rp500.613.

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada konsumennya pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp125.403 dan Rp86.343.

18. TIME DEPOSITS (continued)

- b. The details of time deposits by currency and contract period are as follows:

	Rupiah
1 bulan	11.017.295
3 months	4.334.585
6 months	2.192.727
12 months	3.587.645
24 months	15.190
	<u>21.147.442</u>
United States Dollar	
1 month	72.624
3 months	115
6 months	180
12 months	55
	<u>72.974</u>
Total	<u>21.220.416</u>

- c. Details of time deposits by currency and remaining period to maturity are as follows:

	Rupiah
≤ 1 month	12.276.612
> 1 month ≤ 3 months	4.382.551
> 3 months ≤ 6 months	1.267.966
> 6 months ≤ 12 months	3.212.718
> 12 months ≤ 24 months	7.595
	<u>21.147.442</u>
United States Dollar	
≤ 1 month	72.657
> 1 month ≤ 3 months	262
> 3 months ≤ 6 months	-
> 6 months ≤ 12 months	55
	<u>72.974</u>
Total	<u>21.220.416</u>

As of December 31, 2009 and 2008, time deposits based on sharia banking principles amounted to Rp1,138,599 and Rp500,613, respectively.

As of December 31, 2009 and 2008, time deposits amounting to Rp125,403 and Rp86,343, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI**

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, rincian saldo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali adalah sebagai berikut:

**20. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS**

As of December 31, 2009 and 2008, the details of securities sold under repurchase agreements are as follows:

2009						
Nasabah	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Nilai Pembelian Kembali/ Repurchase Value	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Bersih/ Net Value	Customer
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0029	21 Oktober/ October 21, 2009	21 Januari/ January 21, 2010	175.441	787	174.654	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0029
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0031	21 Oktober/ October 21, 2009	21 Januari/ January 21, 2010	335.444	1.505	333.939	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0031
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0031	15 Oktober/ October 15, 2009	15 Januari/ January 15, 2010	513.601	1.446	512.155	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0031
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0028	7 Juli/ July 7, 2009	21 Januari/ January 21, 2010	208.612	931	207.681	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0028
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Obligasi pemerintah seri VR0029	7 Juli/ July 7, 2009	21 Januari/ January 21, 2010	318.470	1.421	317.049	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Government bonds series VR0029
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0027	14 Oktober/ October 14, 2009	14 Januari/ January 14, 2010	254.856	687	254.169	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0027
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0028	13 Agustus/ August 13, 2009	13 Agustus/ August 13, 2010	250.000	-	250.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0028
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0020	29 Maret/ March 29, 2005	23 April/ April 23, 2015	390.000	-	390.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0020
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0020	28 Maret/ March 28, 2005	23 April/ April 23, 2015	260.000	-	260.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0020
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Obligasi pemerintah seri VR0026	7 Agustus/ August 7, 2009	9 Agustus/ August 9, 2010	240.062	-	240.062	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Government Bonds series VR0026
Standard Chartered Bank Obligasi pemerintah seri VR0031	18 Februari/ February 18, 2009	18 Februari/ February 18, 2010	625.000	-	625.000	Standard Chartered Bank Government bonds series VR0031
Jumlah			3.571.486	6.777	3.564.709	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

**20. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

2008

Nasabah	Tanggal Dimulai/ Commencement Date	Tanggal Pembelian Kembali/ Repurchase Date	Nilai Pembelian Kembali/ Repurchase Value	Beban Bunga yang Belum Diamortisasi/ Unamortized Interest Expense	Nilai Bersih/ Net Value	Customer
Standard Chartered Bank Obligasi pemerintah seri VR0031	12 Agustus/ August 12, 2008	12 Februari/ February 12, 2009	625.000	-	625.000	Standard Chartered Bank Government bonds series VR0031
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Obligasi pemerintah seri VR0026	16 Juli/ July 16, 2008	16 Juli/ July 16, 2009	128.686	-	128.686	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd Government bonds series VR0026
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd. Obligasi pemerintah seri VR0027	16 Juli/ July 16, 2008	16 Juli/ July 16, 2009	371.314	-	371.314	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd Government bonds series VR0027
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0020	29 Maret/ March 29, 2005	23 April/ April 23, 2015	390.000	-	390.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0020
Deutsche Bank AG Obligasi pemerintah seri VR0020	28 Maret/ March 28, 2005	23 April/ April 23, 2015	260.000	-	260.000	Deutsche Bank AG Government bonds series VR0020
Jumlah			1.775.000	-	1.775.000	Total

Bank memiliki kontrak-kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) VR0029 dan VR0031 yaitu tanggal 21 Oktober 2009, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp171.819 dan Rp328.520 (jumlah seluruhnya sebesar Rp500.339) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0029 dan VR0031 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp215.000 dan Rp430.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp645.000) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank dikenakan bunga oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,65%. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Dalam transaksi ini, Bank berkewajiban membeli kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) tersebut dengan nilai pembelian kembali sudah termasuk bunga pada setiap tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal-tanggal 21 Oktober 2009, 21 Januari 2010, 21 April 2010 dan 16 Juli 2010, dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0029 dan VR0031 dengan nilai nominal Rp645.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).

The Bank has contracts to sell bonds with agreements to repurchase with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk covering government bonds (recapitalization bonds). On the commencement date of the contract to sell government bonds (recapitalization bonds) series VR0029 and VR0031, October 21, 2009, the Bank received funds amounting to Rp171,819 and Rp328,520 (totaling Rp500,339) from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and delivered the government bonds (recapitalization bonds) series VR0029 and VR0031 with nominal values of Rp215,000 and Rp430,000, respectively (totaling Rp645,000) to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Bank is charged with interest by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates plus 1.65%. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pays to the Bank the same amount of coupons it receives. In this contract, the Bank is obliged to repurchase the government bonds (recapitalization bonds) with repurchase value including the interest charges on each maturity dates, which are, October 21, 2009, January 21, 2010, April 21, 2010 and July 16, 2010 and receive the government bonds (recapitalization bonds) series VR0029 and VR0031 with total nominal value of Rp645,000 or funds in the same amount (Note 9).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 yaitu tanggal 15 Oktober 2009, Bank menerima dana sebesar Rp504.097 dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp621.000 kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank dikenakan bunga sebesar 7,35% yang terhutang pada tanggal jatuh tempo kontrak tersebut. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp513.601 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 dengan nilai nominal Rp621.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0028 dan VR0029 yaitu tanggal 7 Juli 2009, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp199.399 dan Rp304.406 (jumlah seluruhnya sebesar Rp503.805) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0028 dan VR0029 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp245.000 dan Rp375.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp620.000) kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Bank dikenakan bunga oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar 8,40% yang terhutang pada tanggal jatuh tempo kontrak tersebut. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp527.082 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0028 dan VR0029 dengan nilai nominal sebesar Rp620.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).

**20. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

On the commencement date of the contract to sell government bonds (recapitalization bonds) series VR0031, October 15, 2009, the Bank received funds amounting to Rp504,097 from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and delivered the government bonds (recapitalization bonds) series VR0031 with nominal value of Rp621,000 to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Bank is charged with interest rate by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at the rate of 7.35% which is payable on the maturity date. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp513,601 to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and will receive back the government bonds (recapitalization bonds) series VR0031 with total nominal value of Rp621,000 or funds in the same amount (Note 9).

On the commencement date of the contract to sell government bonds (recapitalization bonds) series VR0028 and VR0029, July 7, 2009, the Bank received funds amounting to Rp199,399 and Rp304,406, respectively, (totaling Rp503,805) from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and delivered the government bonds (recapitalization bonds) series VR0028 and VR0029 with nominal values of Rp245,000 and Rp375,000 (totalling Rp620,000) to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. The Bank is charged with interest rate by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk at the rate of 8.40% which is payable on the maturity date. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp527,082 to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and will receive back the government bonds (recapitalization bonds) series VR0028 and VR0029 with total nominal value of Rp620,000 or funds in the same amount (Note 9).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Bank memiliki kontrak-kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) kepada Deutsche Bank AG dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0027 yaitu tanggal 14 Oktober 2009, Bank menerima dana Rp250.000 dari Deutsche Bank AG dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0027 dengan nilai nominal Rp320.000 kepada Deutsche Bank AG. Bank dikenakan bunga sebesar 7,60% yang terhutang pada tanggal jatuh tempo kontrak tersebut. Deutsche Bank AG membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG sebesar Rp254.856 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0027 dengan nilai nominal Rp320.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0028 yaitu tanggal 13 Agustus 2009, Bank menerima dana sebesar Rp250.000 dari Deutsche Bank AG dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0028 dengan nilai nominal sebesar Rp310.527 kepada Deutsche Bank AG. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank AG sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,25% yang terhutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi). Deutsche Bank AG membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG sebesar Rp250.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0028 dengan nilai nominal sebesar Rp310.527 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).

**20. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

The Bank has contracts to sell bonds with agreements to repurchase with Deutsche Bank AG covering government bonds (recapitalization bonds). On the commencement date of the contract to sell of government bonds (recapitalization bonds) series VR0027, October 14, 2009, the Bank received funds amounting to Rp250,000 from Deutsche Bank AG and delivered the government bonds (recapitalization bonds) series VR0027 with nominal value of Rp320,000 to Deutsche Bank AG. The Bank is charged with interest rate by Deutsche Bank AG at the rate of 7.60% which is payable on the maturity date. Deutsche Bank AG pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp254,856 to Deutsche Bank AG and will receive back the government bonds (recapitalization bonds) series VR0027 with total nominal value of Rp320,000 or funds in the same amount (Note 9).

On the commencement date of the contract to sell government bonds (recapitalization bonds) series VR0028, August 13, 2009, the Bank received funds amounting to Rp250,000 from Deutsche Bank AG and delivered the government bonds (recapitalization bonds) series VR0028 with nominal value of Rp310,527 to Deutsche Bank AG. The Bank is charged with interest rate by Deutsche Bank AG at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates plus 1.25% which is payable quarterly. Deutsche Bank AG pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp250,000 to Deutsche Bank AG and will receive back the government bonds (recapitalization bonds) series VR0028 with total nominal value of Rp310,527 or funds in the same amount (Note 9).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Pada tanggal dimulainya kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0020 yaitu 29 Maret 2005 dan 28 Maret 2005, Bank menerima dana masing-masing sebesar Rp260.000 dan Rp390.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp650.000) dari Deutsche Bank AG, Jakarta dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0020 dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp300.000 dan Rp450.000 (jumlah seluruhnya sebesar Rp750.000) kepada Deutsche Bank AG, Jakarta. Bank dikenakan bunga oleh Deutsche Bank AG, Jakarta sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,45% yang terhutang setiap triwulan atau berdasarkan aturan yang terdapat pada kupon obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi). Deutsche Bank AG, Jakarta membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sebesar Rp650.000 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0020 dengan nilai nominal sebesar Rp750.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).

Bank memiliki kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0026 kepada The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak yaitu tanggal 7 Agustus 2009, Bank menerima dana sebesar Rp240.062 dari HSBC dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0026 dengan nilai nominal sebesar Rp309.000 kepada HSBC. Bank dikenakan bunga oleh HSBC sebesar 8,15% yang terhutang setiap bulan. HSBC membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada HSBC sebesar Rp240.062 dan menerima kembali obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0026 dengan nilai nominal total sebesar Rp309.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).

**20. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

On the commencement date of the contract to sell government bonds (recapitalization bonds) series VR0020, March 29, 2005 and March 28, 2005, the Bank received funds amounting to Rp260,000 and Rp390,000, respectively, (totaling Rp650,000) from Deutsche Bank AG and delivered the government bonds (recapitalization bonds) series VR0020 with nominal values of Rp300,000 and Rp450,000 (totaling Rp750,000) to Deutsche Bank AG. The Bank is charged with interest rate by Deutsche Bank AG at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates plus 1.45% which is payable quarterly or based on terms of the government bonds (recapitalization bonds). Deutsche Bank AG pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp650,000 to Deutsche Bank AG and will receive back the government bonds (recapitalization bonds) series VR0020 with total nominal value of Rp750,000 or funds in the same amount (Note 9).

The Bank has contract to sell bonds with agreements to repurchase covering government bonds (recapitalization bonds) series VR0026 with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC). On the commencement date of the contract, August 7, 2009, the Bank received funds amounting to Rp240,062 from HSBC, and submitted government bonds (recapitalization bonds) series VR0026 with total nominal values of Rp309,000 to HSBC. The Bank was charged with interest by HSBC at the rate of 8.15%, which is payable monthly. HSBC pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp240,062 to HSBC and will receive back the government bonds (recapitalization bonds) series VR0026 with total nominal value of Rp309,000 or funds in the same amount (Note 9).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**20. EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI
DIBELI KEMBALI (lanjutan)**

Bank memiliki kontrak penjualan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 kepada Standard Chartered Bank, Jakarta dengan janji untuk dibeli kembali. Pada tanggal dimulainya kontrak yaitu tanggal 18 Februari 2009, Bank menerima dana sebesar Rp625.000 dari Standard Chartered Bank dan menyerahkan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp625.000 serta menyerahkan dana sebesar Rp125.000 kepada Standard Chartered Bank (Catatan 7). Bank dikenakan bunga oleh Standard Chartered Bank sebesar Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 3 bulan ditambah 1,70% yang terhutang setiap triwulan. Standard Chartered Bank membayar kepada Bank sejumlah kupon yang diterima. Pada saat jatuh tempo, Bank membayar kepada Standard Chartered Bank sebesar Rp625.000 dan menerima kembali dana sebesar Rp125.000 dan obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) seri VR0031 dengan nilai nominal sebesar Rp625.000 atau menerima dana sebesar jumlah tersebut (Catatan 9).

**20. SECURITIES SOLD UNDER REPURCHASE
AGREEMENTS (continued)**

The Bank has contract to sell bonds with agreements to repurchase covering government bonds (recapitalization bonds) series VR0031 with Standard Chartered Bank. On the commencement date of the contract, February 18, 2009, the Bank received funds amounting to Rp625,000 from Standard Chartered Bank and submitted government bonds (recapitalization bonds) series VR0031 with a total nominal value of Rp625,000 and placement amounting to Rp125,000 (Note 7) to Standard Chartered Bank. The Bank was charged with interest by Standard Chartered Bank at a rate equal to the interest rate for 3 months of Bank Indonesia Certificates plus 1.70%, which is payable quarterly. Standard Chartered Bank pays to the Bank the same amount of coupons it receives. On maturity date, the Bank will pay Rp625,000 to Standard Chartered Bank and will receive again the placement amounting to Rp125,000 and the government bonds (recapitalization bonds) series VR0031 with a total nominal value of Rp625,000 or funds in the same amount (Note 9).

**21. SURAT-SURAT
DITERBITKAN**

BERHARGA YANG

21. SECURITIES ISSUED

	2009	2008	
Rupiah			Rupiah
Obligasi BTN XIII	1.500.000	-	BTN Bonds XIII
Obligasi BTN XII	1.000.000	1.000.000	BTN Bonds XII
Obligasi BTN XI	750.000	750.000	BTN Bonds XI
Obligasi BTN X	-	750.000	BTN Bonds X
Jumlah	3.250.000	2.500.000	Total
Obligasi BTN XI dalam perbendaharaan	(20.000)	-	Treasury bonds BTN XI
Biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi	(8.106)	(3.843)	Deferred bonds issuance cost
Bersih	3.221.894	2.496.157	Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. SURAT-SURAT BERTAHAGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

21. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Obligasi

a. Bonds

i. Obligasi BTN XIII

i. BTN Bonds XIII

Bank menerbitkan Obligasi BTN XIII Tahun 2009 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.500.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 11,75%, 12% dan 12,25% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi BTN XIII Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Mei 2012, 29 Mei 2013 dan 29 Mei 2014. Penerbitan Obligasi BTN XIII tahun 2009 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-4019/BL/2009 tanggal 19 Mei 2009.

The Bank issued BTN Bonds XIII of 2009 with a total nominal value of Rp1,500,000 which are registered at the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with annual fixed interest rate of 11.75%, 12%, and 12.25%, payable every 3 months for BTN XIII Series A, Series B and Series C, respectively, and are due on May 29, 2012, May 29, 2013, and May 29, 2014, respectively. The issuance of BTN Bonds XIII of 2009 became effective based on Letter No. S-4019/BL/2009 dated May 19, 2009 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank pari-passu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Setelah ulang tahun ke-1 (pertama) Obligasi sejak tanggal penerbitan, Bank dapat melakukan pembelian kembali (*buy-back*) atas obligasi yang belum jatuh tempo, secara langsung maupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar.

After the first anniversary from the bonds issuance date, the Bank may buy back the unmatured bonds directly or indirectly, partially or in full at market price.

Pada tanggal 31 Desember 2009, Obligasi BTN XIII mendapat penilaian peringkat IdAA-, dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). Harga rata-rata tertimbang obligasi BTN XIII A, B, dan C pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 masing-masing sebesar 100,9490%, 101,1555%, dan 101,9988%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XIII adalah PT Bank Mega Tbk.

As of December 31, 2009, BTN Bonds XIII were rated IdAA- by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). The weighted average prices for BTN Bonds XIII A, B and C for the years ended December 31, 2009 were 100.9490%, 101.1555% and 101.9988% respectively. The trustee for BTN Bonds XIII is PT Bank Mega Tbk.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

21. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Obligasi (lanjutan)

a. Bonds (continued)

ii. Obligasi BTN XII

ii. BTN Bonds XII

Bank menerbitkan Obligasi BTN XII Tahun 2006 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya (BES) (dimerger dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 12,75% yang dibayarkan tiap tiga bulanan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 19 September 2016. Penerbitan Obligasi BTN XII Tahun 2006 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM No. S-1844/BL/2006 tanggal 8 September 2006.

The Bank issued BTN Bonds XII of 2006 with a total nominal value of Rp1,000,000 which are registered at the Surabaya Stock Exchange (BES) (which merged with the Jakarta Stock Exchange to become the Indonesia Stock Exchange). The bonds were issued at 100% of their nominal value with the annual fixed interest rate of 12.75%, payable every 3 months. These bonds are due on September 19, 2016. The issuance of BTN Bonds XII of 2006 became effective based on Letter No. S-1844/BL/2006 dated September 8, 2006 of the Chairman of BAPEPAM.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit yang diberikan. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank pari-passu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditors' rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Setelah satu tahun pertama sejak tanggal penerbitan, Bank dapat melakukan pembelian kembali (*buy-back*) atas obligasi, secara langsung maupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar.

After the first anniversary from the issuance date, the Bank may buy back directly or indirectly the bonds partially or in full at market price.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Obligasi BTN XII mendapat penilaian peringkat masing-masing "idAA-" dan "idAA-", dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). Harga rata-rata tertimbang Obligasi BTN XII pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah 101,17% dan 104,49%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XII adalah PT Bank Mega Tbk.

As of December 31, 2009 and 2008, BTN Bonds XII were rated "idAA-" and "idAA-", respectively, by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo). The weighted average prices for BTN Bonds XII for the years ended December 31, 2009 and 2008 were 101.17% and 104.49%, respectively. The trustee for BTN Bonds XII is PT Bank Mega Tbk.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

iii. Obligasi BTN XI

Bank menerbitkan Obligasi BTN XI Tahun 2005 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp750.000 yang terdaftar di BES (dimerger dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 12,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2010. Penerbitan Obligasi BTN XI tahun 2005 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM No. S-1696/PM/2005 tanggal 28 Juni 2005.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit yang diberikan. Obligasi tersebut tidak dijamin dengan agunan khusus, maupun oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Setelah satu tahun sejak tanggal penerbitan, Bank dapat melakukan pembelian kembali (*buy-back*) atas obligasi, secara langsung maupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar.

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Obligasi BTN XI mendapat penilaian peringkat masing-masing "idAA-" dan "idAA-" dari PT Pefindo. Harga rata-rata tertimbang Obligasi BTN XI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah 103,46% dan 102,54%. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN XI adalah PT Bank Niaga Tbk.

21. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

iii. BTN Bonds XI

The Bank issued BTN Bonds XI of 2005 with a total nominal value of Rp750,000 which are registered at the BES (which merged with the Jakarta Stock Exchange to become the Indonesia Stock Exchange). These bonds were issued at 100% of their nominal value with the annual fixed interest rate of 12.00%, payable every 3 months. These bonds are due on July 6, 2010. The issuance of BTN Bonds XI of 2005 became effective based on Letter No. S-1696/PM/2005 dated June 28, 2005 of the Chairman of BAPEPAM.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The bonds are not secured by specific collateral or guaranteed by other third parties and are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

After the first anniversary from the issuance date, the Bank may buy back directly or indirectly the bonds partially or in full at market price.

As of December 31, 2009 and 2008, BTN Bonds XI were rated "idAA-" and "idAA-", respectively, by PT Pefindo. The weighted average prices for BTN Bonds XI for the years ended December 31, 2009 and 2008 were 103.46% and 102.54%, respectively. The trustee for BTN Bonds XI is PT Bank Niaga Tbk.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

iv. Obligasi BTN X

Bank menerbitkan Obligasi BTN X Tahun 2004 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp750.000 yang terdaftar di BES (dimerger dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 12,20% yang dibayarkan tiap tiga bulanan. Obligasi tersebut telah dibeli kembali pada jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2009. Penerbitan Obligasi BTN X tahun 2004 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM No. S-1255/PM/2004 tanggal 10 Mei 2004.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit yang diberikan. Obligasi tersebut tidak dijamin dengan agunan khusus, maupun oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Setelah satu tahun sejak tanggal penerbitan, Bank dapat melakukan pembelian kembali (*buy-back*) atas obligasi, secara langsung maupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagian dengan harga pasar.

Pada tanggal 31 Desember 2008, Obligasi BTN X mendapat penilaian peringkat "idAA-" dari PT Pefindo. Harga rata-rata tertimbang Obligasi BTN X adalah 101,94% untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2008. Bertindak sebagai wali amanat Obligasi BTN X adalah PT Bank Niaga Tbk.

21. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

iv. BTN Bonds X

The Bank issued BTN Bonds X of 2004 with a total nominal value of Rp750,000 which were registered at the BES (which merged with the Jakarta Stock Exchange to become the Indonesia Stock Exchange). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with the annual fixed interest rate of 12.20%, paid every 3 months. The bonds were redeemed upon maturity on May 25, 2009. The issuance of BTN Bonds X of 2004 became effective based on Letter No. S-1255/PM/2004 dated May 10, 2004 of the Chairman of BAPEPAM.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The bonds were not secured by specific collateral or guaranteed by other third parties and were not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

After the first anniversary from the issuance date, the Bank had the option to buy back directly or indirectly the bonds partially or in full at the prevailing market price.

As of December 31, 2008, BTN Bonds X were rated "idAA-", by PT Pefindo. The weighted average price for BTN Bonds X for the year ended December 31, 2008 was 101.94%. The trustee for BTN Bonds X was PT Bank Niaga Tbk.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**21. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

a. Obligasi (lanjutan)

Perjanjian perwalianamanatan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50% dari seluruh kekayaan Bank.
- Melakukan penggabungan, peleburan dan/atau akuisisi yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Mengubah bidang usaha Bank yang secara material akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Bank atau kemampuan Bank dalam memenuhi kewajiban Bank terhadap pemegang obligasi, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.
- Membagikan dividen kepada para pemegang saham, kecuali atas permintaan dan/atau perintah Pemerintah dan/atau otoritas yang berwenang.

Pada tanggal 31 Desember 2009 and 2008, Bank telah memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian perwalianamanatan tersebut.

b. Obligasi dalam perbendaharaan

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, Bank melakukan pembelian kembali Obligasi BTN IX dengan nilai nominal sebesar Rp6.000 dengan harga beli Rp6.047 dan melakukan penjualan Obligasi BTN X dalam perbendaharaan dengan nilai nominal sebesar Rp8.000 dengan harga jual Rp8.368. Pada tanggal 31 Desember 2009 Bank memiliki obligasi dalam perbendaharaan yang merupakan Obligasi BTN XI. Pada tahun 2009 Bank membeli kembali Obligasi BTN X dan XI dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp27.000 dan Rp20.000 dengan harga beli masing-masing sebesar 27.027 dan Rp20.100.

21. SECURITIES ISSUED (continued)

a. Bonds (continued)

The trusteeship agreements covering all the bonds impose several restrictive covenants on the Bank and require the trustees' written approval, prior to performing the following:

- Transfer, transfer the right to, or pledge as collateral, all or more than 50% of the Bank's total assets.
- Enter into consolidation or merger and/or acquire entities that would result in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfil its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.
- Change the main business of the Bank resulting in a material negative impact to the Bank's going concern status or the ability of the Bank to fulfil its obligations to the bondholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.
- Distribute dividends to stockholders, except when required and/or directed by the Government and/or any governing authority.

As of December 31, 2009 and 2008, the Bank has complied with the existing terms of the above trusteeship agreements.

b. Treasury Bonds

For the year ended December 31, 2008, the Bank bought back BTN Bonds IX with nominal value of Rp6,000 for Rp6,047 and sold BTN Bonds X with nominal value of Rp8,000 for Rp8,368. As of December 31, 2009, the Bank has treasury bonds which represent BTN Bonds XI. In 2009, the Bank bought back BTN Bonds X and XI with nominal value of Rp27,000 and Rp20,000 at the purchase price Rp27,027 and Rp20,100, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

22. PINJAMAN YANG DITERIMA

22. FUND BORROWINGS

	2009	2008	
Rupiah			Rupiah
Bank Indonesia			Bank Indonesia
Penyalur kredit program	1.113.798	1.190.088	Loan channeling program
Fasilitas kredit likuiditas	411.082	604.951	Liquidity loan facility
	<u>1.524.880</u>	<u>1.795.039</u>	
Pemerintah			Government
Rekening Dana Investasi	759.117	906.255	Investment Funds Account
Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil	-	80.000	Funding of Micro-and-Small Scale Loans
	<u>759.117</u>	<u>986.255</u>	
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	700.000	500.000	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Jumlah	<u>2.983.997</u>	<u>3.281.294</u>	Total

a. Bank Indonesia

a. Bank Indonesia

i. Penyalur Kredit Program

i. Loan Channeling Program

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, Bank telah ditunjuk sebagai Bank Koordinator penyaluran Kredit Program untuk Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sederhana (KPR-RS) dan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS). BUMN yang ditunjuk sebagai Bank Koordinator dalam penyaluran Kredit Program tersebut, juga ditunjuk untuk menerima pengalihan KLBI dalam rangka kredit program yang belum digunakan dan masih berjalan serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/3/PBI/2000 tanggal 1 Februari 2000 dan diperbaharui melalui Peraturan Bank Indonesia No. 5/20/PBI/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pengalihan Pengelolaan KLBI Dalam Rangka Kredit Program. Meskipun Bank telah ditunjuk sebagai Bank Koordinator, dalam program tersebut Bank tetap berpartisipasi sebagai bank pelaksana.

Based on Decision Letter No. 487/KMK.017/1999 dated October 13, 1999 of the Minister of Finance, the Bank was appointed as coordinator in the loan channeling program for Simple Housing Loans (KPR-RS) and Very Simple Housing Loans (KPR-RSS). The state-owned companies which are appointed as coordinator banks in the Loan Channeling Program are also appointed to receive the transfer of KLBI under the loan program for those unused and still outstanding and approved but not yet drawn based on Bank Indonesia Regulation No. 2/3/PBI/2000 dated February 1, 2000 as amended by Bank Indonesia Regulation No. 5/20/PBI/2003 dated September 17, 2003 concerning the "Transfer of Management of KLBI within the Framework of Credit Program". Although the Bank was appointed as a coordinator for channeling loans, the Bank also participates in the program as an executor bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Bank Indonesia (lanjutan)

i. Penyalur Kredit Program (lanjutan)

Berdasarkan perjanjian didokumentasikan dalam akta No. 13 oleh Notaris Ismudjadi, S.H., tanggal 15 November 1999 antara Bank dengan Bank Indonesia tentang Pengalihan Pengelolaan KLBI, Bank telah menerima penyerahan pengalihan pengelolaan KLBI yang telah ditarik oleh bank-bank pelaksana sebesar Rp2.539.023 pada posisi tanggal 31 Oktober 1999 dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memberi wewenang kepada Bank untuk menagih kepada bank-bank pelaksana sebesar angsuran pokok pada saat jatuh tempo.

Tanggung jawab dalam pengelolaan KLBI tersebut antara lain:

- a) Menerima permohonan pencairan kelonggaran tarik dari Bank Pelaksana;
- b) Menganalisis persyaratan teknis dan keuangan terhadap permohonan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
- c) Membuat rekomendasi untuk Bank Indonesia atas pencairan kelonggaran tarik yang diajukan oleh Bank Pelaksana;
- d) Menerbitkan Surat Perjanjian Kerja untuk dan atas nama Bank Indonesia;
- e) Mengadministrasikan kelonggaran tarik yang dikelola; dan
- f) Mengelola hasil angsuran pokok KLBI yang diterima dari masing-masing Bank Pelaksana untuk disalurkan kembali melalui Bank Pelaksana sampai dengan jatuh tempo. Bank Indonesia tidak mengenakan bunga terhadap angsuran pokok KLBI yang dikelola oleh Bank.

Hak tagih atas KLBI yang pengelolaannya dibawah Bank, sampai KLBI tersebut jatuh tempo atau dilunasi sebelum jatuh tempo, tetap dimiliki oleh Bank Indonesia.

22. FUND BORROWINGS (continued)

a. Bank Indonesia (continued)

i. Loan Channeling Program (continued)

Based on an agreement between the Bank and Bank Indonesia which is covered by deed No. 13 dated November 15, 1999 of Notary Ismudjadi, S.H., regarding the transfer of management of KLBI, the Bank accepted from Bank Indonesia the management of KLBI totaling Rp2,539,023 as of October 31, 1999 drawn by participating banks. Bank Indonesia has given the Bank the authority to bill the executor banks for the principal installments at maturity.

Responsibilities in the management of the KLBI include the following:

- a) Receive application from executor banks to draw down unused facility;
- b) Analyze technical and financial terms submitted by the executor banks to draw down unused facility;
- c) Recommend to Bank Indonesia the drawdown of unused facility as proposed by the executor banks;
- d) Issue working agreement letter for and on behalf of Bank Indonesia;
- e) Administer unused facility that are managed; and
- f) Manage collection of KLBI principal installments received from executor banks and re-lend through executor banks until maturity period. Bank Indonesia does not charge interest on KLBI principal installments which are managed by the Bank.

The right to bill KLBI under the management of the Bank until KLBI have matured or are repaid before maturity remains with Bank Indonesia.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Bank Indonesia (lanjutan)

i. Penyalur Kredit Program (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, jumlah angsuran dari bank-bank pelaksana yang diterima oleh Bank termasuk Bank sendiri sebagai bank pelaksana yang belum disetorkan ke Bank Indonesia masing-masing sebesar Rp1.113.798 dan Rp1.190.088.

ii. Fasilitas Kredit Likuiditas

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia (Kredit Likuiditas Bank Indonesia atau KLBI) pada berbagai tanggal sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1999 untuk menunjang program Pemerintah. Suku bunga rata-rata per tahun KLBI adalah sebesar 6,60% pada masing-masing tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Pinjaman ini akan jatuh tempo dalam 10 sampai 20 tahun dan digunakan untuk pembiayaan sebagai berikut:

	2009	2008	
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	303.598	410.946	Housing loans (KPR)
Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS)	107.484	193.997	Very simple housing loans (KPR-RSS)
Kredit Pemilikan Kavling Siap Bangun (KPKSB)	-	8	Loans for land available for construction projects (KPKSB)
Jumlah	411.082	604.951	Total

Sesuai Undang-undang No. 23 tanggal 17 Mei 1999, sejak tahun 1999, Bank Indonesia tidak lagi memberikan fasilitas KLBI. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/5/PBI/1999 tanggal 1 September 1999, seluruh KLBI yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum ditarik, dialihkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan perjanjian tanggal 16 November 1999 antara Pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah. Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah Bank, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

22. FUND BORROWINGS (continued)

a. Bank Indonesia (continued)

i. Loan Channeling Program (continued)

As of December 31, 2009 and 2008, the total installment payments received by the Bank from executor banks, including the Bank itself as an executor bank but not yet paid to Bank Indonesia amounted to Rp1,113,798 and Rp1,190,088, respectively.

ii. Liquidity Loan Facility

This account represents borrowing facilities obtained from Bank Indonesia (Bank Indonesia Liquidity Loans or KLBI) on various dates from 1983 through 1999 in line with the Government Program. Average annual interest rate of KLBI was 6.60% for each of the years ended December 31, 2009 and 2008. These borrowings will mature within 10 to 20 years and were used to finance the following:

In accordance with Law No. 23 dated May 17, 1999, effective 1999, Bank Indonesia will no longer grant KLBI. Based on Bank Indonesia regulation No. 1/5/PBI/1999 dated September 1, 1999, all outstanding KLBI and those which have not yet matured and which have been approved but not yet drawn down are transferred to state-owned companies based on the agreement dated November 16, 1999 between the Government and the state-owned companies appointed by the Government. The state-owned companies appointed by the Government are the Bank, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk and PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pemerintah

i. Rekening Dana Investasi (RDI)

Akun ini merupakan fasilitas Rekening Dana Investasi (RDI) yang diterima Bank dari Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS) dan Kredit Pemilikan Rumah-rumah Sederhana (KPR-RS).

Pinjaman ini pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, dibebani suku bunga rata-rata per tahun sebesar 3.70%. Jangka waktu pinjaman ini adalah masing-masing 10, 15 dan 20 tahun dan jatuh tempo dalam berbagai tanggal sampai tahun 2016.

Berdasarkan perjanjian pinjaman yang dibuat pada tanggal 19 Maret 1999 antara Pemerintah dan Bank, Bank telah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai koordinator dalam penyaluran dana RDI kepada bank pelaksana. Tujuan penyediaan dana ini adalah untuk membiayai program KPR-RSS dan KPR-RS dengan jumlah maksimum sebesar Rp22.000.

Jumlah dana yang diterima dari bank pelaksana untuk pokok dan bunga yang belum disetorkan ke Departemen Keuangan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, masing-masing adalah sebesar Rp4.739 dan Rp3.422.

ii. Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil

Bank dan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 14 Mei 2004 menandatangani perjanjian pinjaman dalam rangka Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil dengan maksimal pinjaman sebesar Rp250.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Desember 2009. Dana pinjaman tersebut bersumber dari Surat Hutang Pemerintah. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar suku bunga SBI berjangka waktu 3 bulan dan dibayarkan setiap 3 bulan. Bank sudah membayar lunas pada tanggal jatuh tempo atas pendanaan yang diterima.

22. FUND BORROWINGS (continued)

b. Government

i. *Investment Funds Account*

This account represents Investment Funds Account (Rekening Dana Investasi or RDI) facility obtained from the Government of the Republic of Indonesia which was used to finance Very Simple Housing Loans (KPR-RSS) and Simple Housing Loans (KPR-RS).

These borrowings are charged with average annual interest rates for the years ended December 31, 2009 and 2008 of 3.70%. The loans have terms of 10, 15 and 20 years and have various maturity dates until 2016.

Based on the loan agreement dated March 19, 1999 between the Government and the Bank, the Bank was appointed by the Government as coordinator for the channeling of RDI loans to executor banks. The funds are intended to finance KPR-RSS and KPR-RS with a maximum amount of Rp22,000.

As of December 31, 2009 and 2008, the total funds received from executor banks for principal and interest payments not yet paid to the Ministry of Finance amounted to Rp4,739 and Rp3,422, respectively.

ii. *Funding of Micro-and Small-scale Loans*

On May 14, 2004, the Bank and the Government of the Republic of Indonesia entered into a borrowing agreement for funding of micro-and small-scale loans with a maximum amount of Rp250,000 which will mature on December 10, 2009. The funding of such borrowing was derived from Government debentures. The loans bear interest at the rate of three months Bank Indonesia Certificates which is payable every 3 months. The Bank has fully settled the funding received.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

22. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

c. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

Akun ini terdiri dari Fasilitas Pinjaman IV dan Pembiayaan yang diperoleh dari PT SMF yang ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Plafon pinjaman untuk Fasilitas IV sebesar Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman adalah 60 bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2013.

Suku bunga per tahun atas fasilitas pinjaman ini adalah sebesar 10,25% dan bersifat tetap selama 5 (lima) tahun. Pokok fasilitas pinjaman IV dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Jaminan pinjaman atas fasilitas pinjaman adalah tagihan KPR dengan kriteria tertentu termasuk hak agunan yang melekat atas tagihan tersebut dengan jumlah minimum sebesar 150% dari nilai plafon pinjaman pada saat penandatanganan perjanjian dan wajib dikelola minimum sebesar 100% dari outstanding pinjaman sampai jatuh tempo.

Fasilitas Pembiayaan dari PT SMF memiliki plafon pembiayaan sebesar Rp200.000 dengan jangka waktu pembiayaan 60 bulan sejak tanggal pencairan dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 November 2014.

Porsi nisbah yang disepakati untuk tahun pertama atas fasilitas pembiayaan ini adalah sebesar 65,59% untuk PT SMF dan 34,41% untuk Bank dan bersifat tetap selama tahun pertama. Besarnya Nisbah akan ditinjau setiap tahun. Pembayaran pokok Fasilitas Pembiayaan dibayar pada tanggal jatuh tempo.

Jaminan pembiayaan atas fasilitas pembiayaan adalah tagihan KPR dengan kriteria tertentu dengan jumlah minimum sebesar 125% dari nilai plafon pembiayaan pada saat penandatanganan akad dan wajib dikelola minimum sebesar 100% dari baki debit pembiayaan sampai jatuh tempo.

22. FUND BORROWINGS (continued)

c. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

This account represents Loan Facility IV and financing obtained from PT SMF which is intended to finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

Loan principal for Loan Facility IV is Rp500,000 with maturity period of 60 months and will mature on June 4, 2013.

The loan facility bears interest at the annual fixed rate of 10.25% for the five-year period until maturity. The principal payment for Loan Facility IV will be settled on its maturity date.

The guarantees for the loans are the Housing Loans (KPR) bills with specific criteria, including collateral rights associated with the bills, with a minimum amount of 150% of the loan principal at the signing of the agreement and should be maintained with a minimum amount up to 100% of the outstanding loan until the maturity date.

The Financing Facility received from PT SMF has a financing limit amounting to Rp200,000 with maturity period of 60 months from withdrawal date and will mature on November 13, 2014.

The agreed portion of revenue sharing at the annual rate of 65.59% for PT SMF and 34.41% for the Bank which is fixed for the first year. The agreed portion of revenue sharing will be reviewed in each year. The principal payment for Financing Facility will be settled on its maturity date.

The guarantees for the financing obtained are the Housing Loans (KPR) bills with specific criteria, with a minimum amount of 125% of the financing principal at the signing of the agreement and should be maintained with a minimum amount up to 100% of the outstanding financing until the maturity date.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

23. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2009	2008
Deposito berjangka	86.049	120.879
Surat-surat berharga yang diterbitkan	41.067	34.650
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	21.576	27.651
Pinjaman yang diterima	11.894	9.953
Simpanan dari bank lain	1.018	469
Pinjaman subordinasi	-	3.150
Jumlah	161.604	196.752

23. ACCRUED INTEREST

<i>Time deposits</i>
<i>Securities issued</i>
<i>Securities sold under repurchase agreements</i>
<i>Fund borrowings</i>
<i>Deposits from other Banks</i>
<i>Subordinated loans</i>
Total

**24. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN
KONTINJENSI**

Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi dalam mata uang Rupiah dan Dolar Amerika Serikat yang berasal dari garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar Rp39.538 dan Rp28.183.

Kolektibilitas garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Lancar Rupiah		
Fasilitas kredit yang belum ditarik	2.946.360	2.004.234
Garansi yang diterbitkan	53.536	14.002
	2.999.896	2.018.236
Dolar Amerika Serikat		
Garansi yang diterbitkan	4.075	3.904
	3.003.971	2.022.140
Dalam Perhatian Khusus Rupiah		
Fasilitas kredit yang belum ditarik	166.433	141.382
Jumlah	3.170.404	2.163.522

**24. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND
CONTINGENCIES**

Estimated losses on commitments and contingencies in Rupiah and United States Dollar arising from guarantees issued and unused loan facilities as of December 31, 2009 and 2008 are Rp39,538 and Rp28,183, respectively.

The collectibility classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks is as follows:

<i>Current Rupiah</i>
<i>Unused loan facility</i>
<i>Guarantees issued</i>
<i>United States Dollar</i>
<i>Guarantees issued</i>
<i>Special mention Rupiah</i>
<i>Unused loan facility</i>
Total

Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Saldo awal tahun	28.183	18.413
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	11.355	9.770
Saldo akhir tahun	39.538	28.183

The changes in the estimated losses on commitments and contingencies are as follows:

<i>Balance at beginning of year</i>
<i>Provision during the current year</i>
Balance at end of year

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai.

Management has the opinion that the provision for estimated losses on commitments and contingencies is adequate.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

25. KEWAJIBAN LAIN-LAIN

	2009	2008
Dana jaminan pengembang	1.006.415	855.973
Penerimaan di muka	422.694	427.794
Cadangan atas bonus	121.915	150.657
Kesejahteraan pegawai dan sosial	66.298	42.959
Biaya yang masih harus dibayar	38.534	9.278
Setoran jaminan	26.403	3.304
Nota kredit dalam penyelesaian	15.374	18.839
Cadangan kewajiban litigasi	280	2.690
Lainnya	405	1.845
Jumlah	1.698.318	1.513.339

Penerimaan di muka merupakan penerimaan bunga subsidi yang diberikan pemerintah terkait dengan pembiayaan Rumah Sehat Sederhana (RSH).

Cadangan atas bonus merupakan kewajiban atas jasa produksi karyawan pada tahun berjalan yang belum dibagikan pada akhir tahun.

Dalam saldo akun "Kesejahteraan pegawai dan sosial" pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, termasuk Kewajiban Imbalan Kerja (Cadangan) masing-masing sebesar Rp46.707 dan Rp33.485 (Catatan 39).

Dalam melakukan usahanya, Bank menjadi tergugat dari beberapa perkara dan tuntutan hukum terutama sehubungan dengan hak dan kewajiban para pihak. Walaupun belum ada kepastian, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada, keputusan terakhir dari perkara dan tuntutan hukum ini tidak akan memiliki dampak yang merugikan secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Bank telah membentuk penyesihan untuk sejumlah tuntutan hukum terhadap Bank masing-masing sebesar Rp280 dan Rp2.690. Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyesihan tersebut adalah telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat dari litigasi yang belum memiliki keputusan hukum tetap atau kasus litigasi yang masih berlangsung.

25. OTHER LIABILITIES

	2009	2008	
		855.973	<i>Developers' security deposits</i>
		427.794	<i>Unearned income</i>
		150.657	<i>Bonus payable</i>
		42.959	<i>Social and employee welfare</i>
		9.278	<i>Accrued expenses</i>
		3.304	<i>Guarantee deposits</i>
		18.839	<i>Credit notes in process</i>
		2.690	<i>Allowance for litigation liabilities</i>
		1.845	<i>Others</i>
Jumlah	1.698.318	1.513.339	Total

Unearned income represents interest income from subsidized fund from the Government relating to simple housing loans (RSH).

Bonus payable represents unpaid employees' bonus for the current year which is not yet distributed at the end of the year.

As of December 31, 2009 and 2008, social and employee welfare includes employee benefits liability amounting to Rp46,707 and Rp33,485, respectively (Note 39).

In the ordinary course of business, the Bank is a defendant in various litigation actions and claims mainly with rights and obligations of customers. Although there can be no assurance, the Bank has the opinion that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings will not likely have a material adverse effect on the results of its operations, financial position or liquidity. As of December 31, 2009 and 2008, the Bank has made provision amounting to Rp280 and Rp2,690, respectively, for several pending lawsuits filed against the Bank. Management has the opinion that the provision is adequate to cover possible losses arising from pending litigation, or litigation cases currently in progress.

26. PINJAMAN SUBORDINASI

	2009	2008
Obligasi Subordinasi BTN I	-	250.000
Dikurangi biaya emisi dan diskonto yang belum diamortisasi	-	(98)
Bersih	-	249.902

26. SUBORDINATED LOANS

*Subordinated bonds BTN I
Less unamortized issuance costs and discount*

Net

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PINJAMAN SUBORDINASI (lanjutan)

Bank menerbitkan Obligasi Subordinasi BTN I Tahun 2004 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp250.000 berjangka waktu 10 tahun dengan opsi beli (pelunasan awal) pada tahun kelima sejak tanggal emisi. Pada pelaksanaan opsi beli, Bank dapat melunasi keseluruhan obligasi subordinasi dengan harga 100,00% dari jumlah pokok obligasi. Obligasi subordinasi tersebut diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 12,60% untuk tahun pertama sampai tahun kelima dan 22,60% untuk tahun keenam sampai dengan tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan, bunga dibayarkan tiap tiga bulan. Obligasi subordinasi akan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2014 atau waktu yang lebih awal yaitu tanggal 25 Mei 2009, jika Bank melaksanakan opsi beli. Penerbitan Obligasi Subordinasi BTN I Tahun 2004 tersebut telah dinyatakan efektif pada tanggal 10 Mei 2004 dan telah terdaftar di Bursa Efek Surabaya (BES) (dimerger dengan Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia).

Setelah tahun pertama sejak tanggal emisi, Bank dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) obligasi subordinasi sebagian atau seluruhnya untuk dijual dikemudian hari atau sebagai pelunasan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi subordinasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit yang diberikan sekaligus untuk memperkuat struktur permodalan Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Obligasi subordinasi tersebut tidak dijamin dengan agunan khusus maupun oleh pihak ketiga manapun dan tidak termasuk dalam program jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

Penerbitan dan klasifikasi obligasi subordinasi sebagai Pinjaman Subordinasi telah mendapatkan izin prinsip dari Bank Indonesia melalui Surat No. 6/109/DPwB2/PwB23 tanggal 18 Agustus 2004.

Pada tanggal 25 Mei 2009 Bank telah mengeksekusi hak opsi beli dengan melunasi seluruh kewajiban subordinasi dengan harga 100% dari nilai pokoknya.

26. SUBORDINATED LOANS (continued)

The Bank issued Subordinated Bonds BTN I of 2004 with a total nominal value of Rp250,000 and a term of 10 years with a call option (earlier settlement) at the fifth year after the issuance date. Upon the exercise of the call option, the Bank may settle all subordinated bonds at the price of 100.00% of the nominal value of the bonds. The subordinated bonds were issued at 100.00% of their nominal value with interest at the fixed annual rate of 12.60% for the first until the fifth year and 22.60% for the sixth until the tenth year if the Bank does not exercise its option to buy on the fifth year since the issuance date, payable every 3 months. The subordinated bonds are due on May 25, 2014 or at an earlier date on May 25, 2009 if the Bank will exercise the call option. The issuance of Subordinated Bonds BTN I of 2004 became effective based on May 10, 2004 and the bonds are registered at the Surabaya Stock Exchange (BES, which merged with the Jakarta Stock Exchange to become the Indonesia Stock Exchange).

After the anniversary since the issuance date, the Bank had the option to buy back the subordinated bonds partially or fully for resale in the future or for settlement considering existing regulations.

The net proceeds from the issuance of the subordinated bonds were used to finance loans and at the same time strengthen the Bank's capital structure in accordance with Bank Indonesia regulations.

The subordinated bonds were not secured by specific collateral or guaranteed by other third parties and were not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

The issuance and classification of the bonds as subordinated loans were approved by Bank Indonesia in its Letter No. 6/109/DPwB2/PwB23 dated August 18, 2004.

On May 25, 2009, the Bank bought back and fully settled the subordinated bonds at the price of 100% of its nominal value.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2009/ December 31, 2009					
	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)/ Par Value Per Share (Full Amount)	Jumlah Nilai Saham/ Total Shares Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of owned share	
Modal Dasar Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0%	Authorized Series A Stock Dwiwarna
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100%	Common Stock Series B
Jumlah Modal Dasar	20.478.432.000		10.239.216	100%	Total Authorized
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0%	Issued and fully paid Government Stock Dwiwarna Series A
Saham Biasa atas nama Seri B	6.353.999.999	500	3.177.000	72,92%	Common Stock Series B
Masyarakat Saham Biasa atas nama Seri B*	2.360.057.000	500	1.180.029	27,08%	Public Common Stock Series B*
Jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh	8.714.057.000	500	4.357.029	100%	Total Issued and fully paid

* termasuk program MESA

* Including MESA program

31 Desember 2008/ December 31, 2008					
	Jumlah Lembar Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal Per Lembar Saham (Rupiah Penuh)/ Par Value Per Share (Full Amount)	Jumlah Nilai Saham/ Total Shares Value	Persentase kepemilikan/ Percentage of owned share	
Modal Dasar	60.374.163	169.595,99	10.239.216	0%	Authorized
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia	15.093.540	169.595,99	2.559.804	100%	Issued and fully paid Government

Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah telah menyetujui jumlah rekapitalisasi Bank sebesar Rp14.005.000 melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi yaitu sebesar Rp9.803.500 pada tanggal 25 Juli 2000 dan sebesar Rp4.201.500 pada tanggal 31 Oktober 2000. Berdasarkan Kontrak Manajemen pada tanggal 28 Februari 2001, jumlah penyertaan modal Pemerintah direvisi menjadi sebesar Rp13.843.540 (Catatan 1b).

On August 21, 2000, the Government approved the Bank recapitalization of Rp14,005,000 through the issuance of recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 on July 25, 2000 and Rp4,201,500 on October 31, 2000. Based on a Management Contract dated February 28, 2001, the recapitalization amount was revised to Rp13,843,540 (Note 1b).

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Sebelum Kuasi-Reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007 (Catatan 2b), Anggaran Dasar Bank belum diubah, khususnya mengenai perubahan modal maka penempatan Pemerintah ini sementara dibukukan sebagai tambahan modal disetor pada ekuitas di neraca.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen antara Direksi Bank dan Menteri Keuangan, Menteri mengeluarkan Peraturan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak Pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Bank dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham baru yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

Kemudian, untuk pelaksanaan peraturan tersebut di atas, Pemegang Saham pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2008 memutuskan:

1. Peningkatan Modal Dasar Bank dari Rp5.000.000 yang terbagi atas 5 juta saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham menjadi 15.093.540 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham.
2. Penerbitan saham baru Bank sejumlah 13.843.540 saham dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar saham yang diambil dari saham portopol Bank.

Perubahan Anggaran Dasar Bank sehubungan dengan Keputusan RUPS Bank tersebut di atas telah dilegalisasi dengan akta No. 63 tanggal 31 Maret 2008 Notaris Siti Rayhana, S.H., notaris pengganti dari notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-16595.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 3 April 2008.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

Before the Quasi-Reorganization as of May 31, 2007 (Note 2b), pending the amendment of the Bank's articles of association, particularly the change in capital, this government placement was temporarily recorded as additional paid-in capital, a component of Stockholders' equity in the balance sheets.

As a result of the Management Contract between the Bank directors and the Ministry of Finance, the Minister issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the final amount of the Government's capital contribution to the Bank which amounted to Rp13,843,540 and the implementation of the Government rights as a result of the additional contributed capital by the Republic of Indonesia to the Bank in relation to the commercial bank recapitalization program by converting it to 13,843,540 new shares of stock which were issued by the Bank, with nominal value amounting to Rp1,000,000 per share (full amount). This regulation was applied retroactively in May 31, 2007.

Further, for the implementation of the above regulation, the Bank's stockholder, in the Stockholders' General Meeting held on March 26, 2008, decided the following:

1. Increase in the authorized capital stock from Rp5,000,000 which consists of 5 million shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share to 15,093,540 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share.
2. Issuance of 13,843,540 new Bank shares with a nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share which are taken from the Bank's unissued shares.

The amendment of the Bank's articles of association in relation to the above decision in the Stockholders' General Meeting, which is legalized under deed No. 63 dated March 31, 2008 of Notary Siti Rayhana, S.H., who replaced Notary B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro, S.H., was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its decision letter No. AHU-16595.AH.01.02 of 2008, dated April 3, 2008.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Selanjutnya, sehubungan dengan Kuasi-Reorganisasi Bank efektif pada tanggal 31 Mei 2007, Pemegang Saham pada saat RUPS Bank yang dilakukan pada tanggal 22 April 2008 memutuskan:

1. Bahwa Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-67/MBU/2008 selaku wakil pemerintah dalam RUPS Bank yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Bank dan Perubahan Anggaran Dasar mempunyai daya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.
2. Pelaksanaan Kuasi-Reorganisasi Bank efektif pada tanggal 31 Mei 2007 guna menutup saldo defisit sebesar Rp14.226.290 dengan mengeliminasi defisit tersebut ke Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya, perubahan Nilai Wajar Obligasi Pemerintah (Obligasi Rekapitalisasi) dan Selisih Penilaian Kembali Aset Tetap masing-masing sebesar Rp1.021.336, (Rp6.213) dan Rp677.431 serta mengurangi modal saham ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp12.533.736.
3. Penurunan nilai nominal per lembar saham Bank dari semula Rp1.000.000 (Rupiah penuh) menjadi Rp169.595,99 (Rupiah penuh) sebagai akibat pengurangan modal saham ditempatkan dan disetor Bank sebesar Rp12.533.736, sehingga modal saham ditempatkan dan disetor Bank menjadi Rp2.559.804 yang terbagi atas 15.093.540 lembar saham dengan nilai nominal Rp169.595,99 (Rupiah penuh) per lembar saham.
4. Perubahan modal saham dasar Bank dari semula Rp15.093.540 menjadi Rp10.239.216 yang terbagi atas 60.374.163 lembar saham dengan nilai nominal Rp169.595,99 (Rupiah penuh) per lembar saham.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

Further, in connection with the Quasi-Reorganization effective as of May 31, 2007, the Bank's stockholder, in the Stockholders' General Meeting held on April 22, 2008, decided the following:

1. The decision No. KEP-67/MBU/2008 of the Ministry of the State-owned Enterprises, which acted as the Government's representative in the Bank's Stockholders' General Meeting held on March 26, 2008 regarding the addition in the Government's capital contribution to the Bank's capital and the amendment of the articles of association, was to be applied retroactively to May 31, 2007.
2. The implementation of the Bank's Quasi-Reorganization became effective as of May 31, 2007 to absorb the deficit balance amounting to Rp14,226,290 by eliminating such deficit against the appropriated retained earnings, change in fair value of government bonds (recapitalization bonds) and revaluation increment on premises and equipment which amounted to Rp1,021,336, (Rp6,213) and Rp677,431, respectively, and by reducing the issued and fully paid capital stock by Rp12,533,736.
3. Decrease in the Bank's nominal value per share from Rp1,000,000 (full amount) to Rp169,595.99 (full amount) as a result of the decrease in issued and fully paid capital stock amounting to Rp12,533,736 resulting in the Bank's issued and fully paid capital stock to become Rp2,559,804 consisting of 15,093,540 shares with a nominal value of Rp169,595.99 (full amount) per share.
4. The change in the Bank's authorized capital stock from Rp15,093,540 to become Rp10,239,216 consisting of 60,374,163 shares with a nominal value of Rp169,595.99 (full amount) per share.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Bank tentang Perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah dilegalisasi dengan akta No. 45 tanggal 24 April 2008, Notaris Emi Susilowati, S.H. dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-35584.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 25 Juni 2008.

Kedua keputusan perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007 sehingga pada tanggal 31 Mei 2007 (setelah Kuasi-Reorganisasi) modal saham dasar Bank menjadi sebesar Rp10.239.216 yang terbagi atas 60.374.163 lembar saham dengan nilai nominal Rp169.595,99 (Rupiah penuh) per lembar saham dan modal saham ditempatkan dan disetor penuh Bank menjadi sebesar Rp2.559.804 yang terbagi atas 15.093.540 lembar saham dengan nilai nominal Rp169.595,99 (Rupiah penuh) per lembar saham.

Pada tanggal 18 Juli 2009, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2009 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Bank yang ditetapkan sebesar Rp12.533.736 yang berlaku pada tanggal 31 Mei 2007 dan bertujuan untuk mengeliminasi kerugian (defisit) Bank melalui Kuasi-Reorganisasi. Pengurangan penyertaan modal tersebut menyebabkan perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh Negara Republik Indonesia yang semula sebesar Rp15.093.540 atau sebanyak 15.093.540 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1.000.000 (Rupiah penuh) menjadi sebesar Rp2.559.804 atau sebanyak 15.093.540 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp169.595,99 (Rupiah penuh).

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The decision in the Bank's Stockholders' General Meeting regarding the Amendment of the Bank's Articles of Association was notarized under deed No. 45 dated April 24, 2008 of Notary Emi Susilowati, S.H. and was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its decision letter No.AHU-35584.AH.01.02 of 2008 dated June 25, 2008.

The two decisions on the amendment of the Bank's Articles of Association were applied retroactively to May 31, 2007 resulting in the Bank's authorized capital stock as of May 31, 2007 (after Quasi-Reorganization) to become Rp10,239,216 which consists of 60,374,163 shares with a nominal value of Rp169,595.99 (full amount) per share and the Bank's issued and fully paid capital stock to become Rp2,559,804 which consists of 15,093,540 shares with a nominal value of Rp169,595.99 (full amount) per share.

On July 18, 2009, the Government issued Regulation No. 50 of 2009 regarding the decrease in the Government's Capital Participation in the Bank determined at Rp12,533,736 retroactive to May 31, 2007 and for the purpose of the loss (deficit) elimination through Quasi-Reorganization. The decrease in the Government's capital participation resulted in the change in the issued and fully paid capital stock from Rp15,093,540 or 15,093,540 shares with a nominal value per share of Rp1,000,000 (full amount) to Rp2,559,804 or 15,093,540 shares with a nominal value per share of Rp169,595.99 (full amount).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 6 Oktober 2009 pemegang saham memutuskan antara lain sebagai berikut:

1. RUPS-LB menyetujui peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor penuh dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia, yaitu dari Rp2.559.804 yang terdiri atas 5.119.608.000 lembar saham menjadi Rp3.177.000 yang terdiri atas 6.354.000.000 lembar saham yang berasal dari:
 - a. Kapitalisasi cadangan umum sebesar Rp289.888.397.772 (Rupiah penuh).
 - b. Kapitalisasi cadangan tujuan sebesar Rp129.142.251.563 (Rupiah penuh).
 - c. Kapitalisasi saldo laba periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2009 sebesar Rp198.165.350.665 (Rupiah Penuh).
2. Perubahan seluruh Anggaran Dasar, yaitu:
 - a. Dalam RUPS pemegang saham menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) dalam rangka menjadi Perseroan Terbuka antara lain disesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.J.1 dan perubahan status PT Bank Tabungan Negara (Persero) dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
 - b. Dalam RUPS pemegang saham menyetujui perubahan nilai nominal saham Bank yang semula Rp169.595,99 (Rupiah penuh) setiap saham menjadi sebesar Rp500 setiap saham.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

Based on the Extraordinary General Shareholders Meeting dated October 6, 2009, decided as follows:

1. *The Extraordinary Stockholders' General Meeting approved the increase in issued and fully paid-up capital in PT Bank Tabungan Negara (Persero) which is carried out by the Republic of Indonesia, from Rp2,559,804 including 5,119,608,000 shares to Rp3,177,000 including 6,354,000,000 shares, which resulted from the following items:*
 - a. *Capitalized general reserve amounting to Rp289,888,397,772 (full amount)*
 - b. *Capitalized special reserve amounting to Rp129,142,251,563 (full amount).*
 - c. *Capitalized retained earnings from January 1 until June 30, 2009 amounting to Rp198,165,350,665 (full amount).*
2. *The changes in the entire articles of association, are as follows:*
 - a. *In the Extraordinary Stockholders' General Meeting. The shareholders approved to change PT Bank Tabungan Negara (Persero)'s articles of association to become a public company based on Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) Rule No. IX.J.1 and the change in the Bank's status from a Limited Company to Public Company.*
 - b. *In the Extraordinary General Shareholders' Meeting, The shareholders agreed the change in nominal amount of shares of Rp169,595.99 (full amount) per share to become Rp500 per share.*

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

c. Pemegang saham menyetujui penerbitan 1 lembar saham Seri A Dwiwarna senilai Rp500 dan saham Seri B pada Bank berdasarkan ketentuan pasar modal. Pemegang saham Seri A Dwiwarna mempunyai hak-hak istimewa untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar termasuk perubahan modal, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, dan pembubaran, dan meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

3. Pemegang saham menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Bank sebanyak-banyaknya 30% dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 lembar saham sehingga kepemilikan Negara Republik Indonesia menjadi paling sedikit 70% atau 6.354.000.000 lembar saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran baru. Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) yang di dalamnya sudah termasuk penjabatan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*). Persetujuan tersebut berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Bank.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

c. The shareholders approved the issuance of 1 (one) share of Series A Dwiwarna amounting to Rp500 and Series B based on the capital market regulations. The shareholder of Series A Dwiwarna has the rights to approve the appointment and termination of the Boards of Commissioners and Directors, including the approval on the amendment in the articles of association, mergers, joint ventures, acquisition and separation, the proposal on the liquidation of the Bank, dismissal and to obtain reports and explanation regarding certain issues from the Bank's Boards of Directors and Commissioners with consideration on the prevailing rules and regulations, specially on Capital Market regulation.

3. The shareholders approved issuance of new shares from the Bank with a maximum amount of 30% of the total issued and fully paid up capital after the issuance of new share or a maximum of 2,723,142,857 shares, resulting in the ownership of the Republic of Indonesia with a minimum of 70% or 6,354,000,000 shares of the total issued and fully paid up capital after the new issuance. The newly issued shares are offered to the public through Initial Public Offering (IPO) which included the shares for Management and Employee Stock Option Plan (MESOP). The approval became effective after the issuance of the Government regulation regarding the amendment of the share ownership structure through the Bank's Initial Public Offering.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

4. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Bank untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum saham perdana termasuk jumlah saham program MESA dan MESOP.
5. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi Bank untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan, kecuali penetapan harga penawaran dan kepastian jumlah saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum, sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana (IPO) termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Mencatatkan saham-saham Bank dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
 - b. Mencatatkan seluruh saham Bank yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek.
6. Menyetujui program kepemilikan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) oleh Manajemen dan Karyawan melalui penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*) dalam rangka IPO dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Program MESA diberikan maksimal sebesar 9,62% dari saham baru yang diterbitkan dan program MESOP maksimal sebesar 4% dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh.
 - b. Peserta program MESA dan MESOP adalah karyawan yang tercatat pada tanggal 30 September 2009 dan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit.
 - c. Diskon harga saham untuk program MESA sebesar 20% dengan masa *lockup* selama enam bulan. Diskon dimaksud menjadi beban Bank.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

4. Authorize the Bank's Board of Commissioners to declare the realization of the total issued shares in the Initial Public Offering including the total shares of MESA and MESOP programs.
5. Authorize the Bank's Board of Directors to implement the necessary actions, except to decide on the share price and amount of shares offered through the Initial Public Offering (IPO), in connection with the IPO which includes but is not limited to:
 - a. Record the Bank's share in Collective Custody in accordance with Indonesian Central Securities Depository's regulations
 - b. Record all the Bank's shares which were issued and fully paid up to the Indonesia Stock Exchange.
6. To approve the stock ownership by management and employees through the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program and under the grant of option right to Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) in connection with the IPO and with following terms:
 - a. MESA program is allocated with a maximum amount of 9.62% of the newly issued shares and a maximum amount of 4% of the issued and fully paid-up capital for the MESOP program.
 - b. Participants of the MESA and MESOP program are registered employees as of September 30, 2009 and the Board of Directors, the Board of Commissioners, members of the Sharia Supervisory Board, Secretary of the Board of Commissioners and members of the Audit Committee.
 - c. Stock price discount in the MESA program amounted to 20% with a lockup period until six months. The discount will be charged as the Bank's expenses.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

- d. Hak opsi program MESOP dapat dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahap I sebesar 40%, tahap II sebesar 30% dan tahap III sebesar 30%. Harga pelaksanaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Umur opsi lima tahun sejak diterbitkan dengan *vesting period* (masa tunggu) satu tahun yang mana dalam periode tersebut hak opsi tidak dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan.
- e. Alokasi saham MESA dan MESOP antara manajemen dan karyawan adalah 5%:95% dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, prestasi kerja, masa kerja, jabatan, hak dan kewajiban.
- f. Pengawasan program MESA dan MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya agar mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada Pemegang Saham.

Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan RUPS-LB tersebut di atas telah diaktakan dengan akta No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-49309.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009.

Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No. 167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

- d. The MESOP program can be executed in three stages. Stage I amounting to 40%, stage II amounting to 30% and stage III amounting to 30%. The exercise price must comply with the prevailing rules and regulations. The option will expire in five years since the date of issuance with one year vesting period which is the period the option is not exercisable.
- e. MESA and MESOP stock allocation to management and employees is 5%:95% and should be implemented by considering justice, fairness, work achievement, work position, rights and obligation concept.
- f. The implementation of MESA and MESOP is monitored by the Board of Commissioners and its implementation must comply with prevailing regulation which will be reported to the stockholders.

The amendment of the Bank's articles of association was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H. and was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its decision letter No. AHU-49309.AH.01.02. year 2009 dated October 13, 2009.

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66 year 2009 and regulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of structure of the stock ownership through Initial Public Offering of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the registration statement which was submitted by the Bank related to the Initial Public Offering of 6,353,999,999 ordinary shares of Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 ordinary shares of New Series B, amounting to Rp500 (full amount) per share to the public, became

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (nilai penuh) per saham dan pada saat yang bersamaan seluruh saham tersebut juga dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Bersamaan dengan efektifnya IPO Bank, program MESA telah efektif dengan jumlah lembar saham biasa Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham). Sementara untuk program MESOP sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, program tersebut belum terlaksana.

b. Tambahan modal disetor - Bersih

Tambahan modal disetor sebesar Rp639.626 berasal dari hasil penjualan 2.360.057.000 lembar saham biasa atas nama seri B pada saat penawaran umum perdana saham pada harga penawaran Rp800 (Rupiah Penuh) per saham dikurangi dengan nilai nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham dan dikurangi dengan biaya-biaya emisi penawaran umum perdana saham sebesar Rp68.391 yang telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara melalui Surat No. S-146/MBU/2010 tanggal 10 Maret 2010 perihal penetapan hasil dan biaya privatisasi.

c. Penggunaan Laba

2009

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 8 Mei 2009, pemegang saham memutuskan pengalokasian laba bersih untuk pembayaran dividen sebesar Rp43.047 atau sebesar Rp2.852 per lembar saham (Rupiah penuh), pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar Rp374.513, tantiem direksi dan komisaris sebesar Rp12.940 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar Rp12.914.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, started to be traded on December 17, 2009 with the selling price of Rp800 (full amount) per share and listed in the Indonesia Stock Exchange.

Along with the effectiveness of the Bank's IPO, the MESA program were effective with number of Series B shares totaling 226,928,500 shares (with nominal value Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering amounting to Rp800 per share). While the MESOP program was not implemented up to the financial statement completion date.

b. Additional paid in capital - Net

Additional paid in capital amounting to Rp639,626 resulted from the sale of 2,360,057,000 ordinary B series shares in the initial public offering at sale price amounting to Rp800 (full amount) per share less nominal value amounting to Rp500 (full amount) per share and less stock issuance cost amounting to Rp68,391 which was based on the approval from the Ministry of State-owned Enterprises in its Letter No. S-146/MBU/2010 dated March 10, 2010 regarding regarding the proceeds and privatization expense.

c. Profit Distribution

2009

In the Annual Stockholders' General Meeting held on May 8, 2009, the stockholder decided to distribute dividends of Rp43,047 or Rp2,852 (full amount) per share and to allocate Rp374,513 as general and special reserve, Rp12,940 as directors' and commissioners' tantiem and Rp12,914 for the partnership and environmental development program.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

27. EKUITAS (lanjutan)

c. Penggunaan Laba (lanjutan)

2008

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang diadakan pada tanggal 27 Mei 2008, pemegang saham memutuskan pengalokasian laba bersih untuk pembayaran dividen sebesar Rp23.598 atau sebesar Rp1.563 per lembar saham (Rupiah penuh), pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan sebesar Rp202.939, tantiem direksi dan komisaris sebesar Rp8.124 dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar Rp9.439.

27. STOCKHOLDERS' EQUITY (continued)

c. Profit Distribution (continued)

2008

In the Annual Stockholders' General Meeting held on May 27, 2008, the stockholder decided to allocate net income to pay dividends of Rp23,598 or Rp1,563 (full amount) per share and to allocate Rp202,939 as general and special reserve, Rp8,124 as directors' and commissioners' tantiem and Rp9,439 for the partnership and environmental development program.

28. PENDAPATAN BUNGA

	2009	2008
Kredit yang diberikan	4.662.561	3.508.107
Obligasi pemerintah (Obligasi rekapitalisasi)	633.685	695.204
Efek-efek	112.085	132.161
Penempatan pada bank lain	27.933	25.540
Tagihan swap suku bunga (Catatan 10)	35.464	-
Giro pada Bank Indonesia	-	8.622
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	2.375
Jumlah	5.471.728	4.372.009

28. INTEREST INCOME

Loans
Government bonds (recapitalization Bonds)
Securities
Placements with other banks
Interest rate swap receivables (Note 10)
Current accounts with Bank Indonesia
Securities purchased under resale agreements
Total

29. BEBAN BUNGA

	2009	2008
Deposito berjangka	2.267.720	1.456.403
Surat-surat berharga yang diterbitkan	358.777	379.200
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	257.604	146.590
Tabungan	286.731	313.796
Pinjaman yang diterima	111.655	122.013
Giro	90.047	91.641
Simpanan dari bank lain	35.211	18.555
Pinjaman subordinasi	12.600	31.500
Kewajiban swap suku bunga (Catatan 10)	-	40.362
Jumlah	3.420.345	2.600.060

29. INTEREST EXPENSE

Time deposits
Securities issued
Securities sold under repurchase agreements
Savings deposits
Fund borrowings
Demand deposits
Deposits from other banks
Subordinated loans
Interest rate swap liabilities (Note 10)
Total

30. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

	2009	2008
Jasa perbankan	29.584	25.126
Jasa penagihan - payment points	3.637	3.845
Lain-lain	17.500	11.396
Jumlah	50.721	40.367

30. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

Bank services
Collection services - payment points
Others
Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**31. BEBAN PENYISIHAN (PEMBALIKAN)
KERUGIAN AKTIVA PRODUKTIF DAN NON-
PRODUKTIF**

	2009	2008
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11e)	68.301	(24.254)
Giro pada bank lain (Catatan 6e)	(2.325)	9.789
Penempatan pada bank lain (Catatan 7e)	(2.779)	5.995
Efek-efek (Catatan 8f)	382	1.118
Properti terbengkalai	(10.733)	3.950
Tagihan swap suku bunga (Catatan 10)	18	(1.380)
Bersih	52.864	(4.782)

**31. PROVISION (REVERSAL OF ALLOWANCE) FOR
POSSIBLE LOSSES ON EARNING AND
NON-EARNING ASSETS**

*Loans and sharia financing/
receivables (Note 11e)
Current accounts with other banks (Note 6e)
Placements with other banks
(Note 7e)
Securities (Note 8f)
Abandoned properties
Interest rate swap receivables
(Note 10)*

Net

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2009	2008
Perbaikan dan pemeliharaan	152.573	134.671
Sewa	109.963	72.237
Penyusutan (Catatan 12)	99.133	70.670
Promosi	98.036	85.849
Listrik, air dan komunikasi	81.015	73.476
Beban kantor	59.703	50.624
Transportasi	34.535	33.802
Jasa profesional	16.903	16.702
Lainnya	22.093	17.304
Jumlah	673.954	555.335

32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

*Repairs and maintenance
Rent
Depreciation (Note 12)
Promotion
Electricity, water and telecommunications
Office expenses
Transportation
Professional fees
Others*

Total

33. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

	2009	2008
Gaji dan upah	857.678	702.146
Pelatihan dan pengembangan	41.163	34.016
Lainnya	38.234	36.656
Jumlah	937.075	772.818

33. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

*Salaries and wages
Training and development
Others*

Total

34. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

	2009	2008
Imbalan atas jasa penagihan	26.723	25.719
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah	24.910	16.413
Lainnya	18.624	14.721
Jumlah	70.257	56.853

34. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

*Fees for collection services
Loss on bad debt settlement
Others*

Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**35. PENDAPATAN (BEBAN)
OPERASIONAL - BERSIH**

	2009	2008
Pendapatan sewa gedung	60	1.464
Laba penjualan kendaraan dan Peralatan kantor (Catatan 12)	-	4.916
Pendapatan (beban) lainnya - bersih (masing-masing di bawah Rp500)	6.319	(10.672)
Bersih	6.379	(4.292)

35. NON-OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET

Building rental income
Gain on sale of vehicle and office furniture (Note 12)
Others - net (each below Rp500)
Net

36. PERPAJAKAN

a. Rekonsiliasi antara laba sebelum (beban) manfaat pajak menurut laporan laba rugi dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan dan sebelum pos luar biasa sesuai dengan laporan laba rugi	745.817	665.533
Beda temporer:		
Penurunan nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(3.828)	132.714
Penyisihan untuk imbalan kerja - bersih	15.680	15.625
Penyisihan (pembalikan) kerugian aktiva produktif dan non-produktif	(33.610)	80.499
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan:		
Kenikmatan karyawan	49.411	39.467
Sewa	14.462	11.660
Beban kantor	8.365	7.236
Dana sosial dan representasi	5.992	4.155
Perbaikan dan pemeliharaan	9.671	13.650
Penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut pajak	2.201	1.593
Denda pajak	111	1.042
Taksiran penghasilan kena pajak sebelum pos luar biasa	814.272	973.174
Pos luar biasa - bersih (Catatan 37)	(21.930)	-
Taksiran penghasilan kena pajak	792.342	973.174

36. TAXATION

a. The reconciliation between income before income tax benefit (expense), as shown in the statements of income, and estimated taxable income for the years ended December 31, 2009 and 2008 is as follows:

Income before income tax benefit and extraordinary item per statements of income
Temporary differences:
Decrease in value of trading securities
Provision for employee benefits - net
Provision (reversal of allowance) for possible losses on earning and non-earning assets
Permanent differences:
Non-deductible expenses:
Employee welfare
Rent
Office expense
Social funds and representation
Repairs and maintenance
Depreciation of premises and equipment which are non-depreciable for tax purposes
Tax penalties
Estimated taxable income before extraordinary item
Extraordinary item (Note 37)
Estimated taxable income
Income tax expense in accordance with applicable tax rate
Income tax paid - Article 25
Corporate income tax payable (Note 15)

Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	221.856	291.935
Pajak penghasilan yang dibayar sendiri - Pasal 25	(197.282)	(220.918)
Hutang pajak penghasilan Badan (Catatan 15)	24.574	71.017

Perhitungan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 di atas digunakan sebagai dasar penyajian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2008.

The tax computation for the year ended December 31, 2008 above was used as the basis for the amount reported in the Bank's tax return for 2008.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

- b. Rincian manfaat (beban) pajak tangguhan - bersih dengan memperhitungkan pengaruh beda temporer pada tarif pajak adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Penyisihan (pembalikan) kerugian aktiva produktif dan non-produktif	(13.985)	14.668	<i>Provision (reversal of allowance) for possible losses on earning and non-earning assets</i>
Penurunan (kenaikan) nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(1.412)	39.094	<i>Decrease (increase) in value of trading securities</i>
Penyisihan (pembayaran) untuk imbalan kerja - bersih	3.819	3.114	<i>Provision for (payment of) employee benefits - net</i>
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan - Bersih	(11.578)	56.876	<i>Deferred Income Tax Benefit (Expense) - Net</i>

36. TAXATION (continued)

- b. The details of the deferred income tax benefit (expense) - net computed on temporary differences tax rate are as follows:

- c. Aset (Kewajiban) Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan komersial dan pajak adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Aset Pajak Tangguhan			<i>Deferred tax assets</i>
Penyisihan kerugian aktiva produktif dan non-produktif	38.115	52.100	<i>Allowance for possible losses on earning and non-earning assets</i>
Penyisihan untuk imbalan kerja	12.291	8.472	<i>Provision for employee benefits</i>
Kewajiban Pajak Tangguhan			<i>Deferred tax liability</i>
Penurunan nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	(8.346)	(8.749)	<i>Decrease in value of trading securities</i>
Aset Pajak Tangguhan - efek dari ekuitas			<i>Deferred tax asset - effect from equity</i>
Perubahan nilai wajar obligasi rekapitalisasi yang tersedia untuk dijual	30.161	52.158	<i>Unrealized change in fair value of available - for-sale securities and government bonds (recapitalization bonds)</i>
Aset Pajak Tangguhan - Bersih	72.221	103.981	<i>Deferred Tax Assets - Net</i>

- c. Deferred tax assets (liability)

The tax effects on significant outstanding temporary differences between commercial and tax reporting purposes are as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

36. PERPAJAKAN (lanjutan)

- d. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum pajak penghasilan dan (beban) pajak penghasilan - bersih seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008	
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan dan sebelum pos luar biasa sesuai dengan laporan laba rugi	745.817	665.533	<i>Income before income tax and extraordinary item per statements of income</i>
Pos luar biasa - bersih	(21.930)	-	<i>Extraordinary Item - net</i>
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan sesuai dengan laporan laba rugi	723.887	665.533	<i>Income before income tax per statements of income</i>
Beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku	(202.688)	(199.643)	<i>Income tax expense at the applicable tax rate</i>
Beda tetap - bersih	(25.260)	(23.641)	<i>Permanent differences - net</i>
Perubahan tarif pajak	-	(6.015)	<i>Change in tax rate</i>
Koreksi	(5.486)	(5.760)	<i>Adjustments</i>
Beban Pajak Penghasilan sebelum manfaat pajak pos luar biasa	(233.434)	(235.059)	<i>Income tax expense before extraordinary income tax benefit</i>
Manfaat pajak penghasilan pos luar biasa	(6.140)	-	<i>Extraordinary income tax benefit</i>
Beban pajak penghasilan - bersih	(239.574)	(235.059)	<i>Income tax expense - net</i>

36. TAXATION (continued)

- d. The reconciliation between the income tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before income tax and the income tax expense - net shown in the statements of income for the years ended December 31, 2009 and 2008, is as follows:

37. POS LUAR BIASA

Pos luar biasa terdiri atas kerugian yang dialami Bank pada tahun 2009 sebagai dampak kebakaran gedung Menara BTN. Perhitungan kerugian akibat kebakaran gedung Menara BTN adalah sebagai berikut (Catatan 13):

Nilai buku gedung	98.849	<i>Book value of building</i>
Nilai buku mesin	81	<i>Book value of machineries</i>
Pendapatan klaim asuransi	(77.000)	<i>Claim from insurance</i>
Kerugian kebakaran - bersih	21.930	<i>Loss</i>
Manfaat pajak penghasilan	(6.140)	<i>Income tax benefit</i>
Kerugian kebakaran- bersih setelah pajak	15.790	<i>Net loss due to fire - net of tax</i>

37. EXTRAORDINARY ITEM

Extraordinary item represents the net loss suffered by the Bank in 2009 from the fire that damaged the Bank's building. The amount of the net loss is calculated as follows (Note 13):

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	2009	2008
KOMITMEN		
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik (Catatan 24)	3.112.793	2.145.616
Irrevocable L/C	-	-
Lain-lain	73	22
Jumlah Kewajiban Komitmen	3.112.866	2.145.638
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	304.446	217.458
Garansi yang diterima	70.621	6.392
Lain-lain	157.317	112.892
Jumlah Tagihan Kontinjensi	532.384	336.742
Kewajiban Kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan (Catatan 24)	57.611	17.906
Tagihan Kontinjensi - Bersih	474.773	318.836

39. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA

Bank membentuk cadangan imbalan kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 berdasarkan laporan aktuaris yang dilakukan oleh PT Dian Artha Tama, aktuaris independen berdasarkan laporannya masing-masing pada tanggal 18 Februari 2010 dan 10 Februari 2009 dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Asumsi-asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaris adalah sebagai berikut:

- Tingkat bunga teknis per tahun 10% dan 12% untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.
- Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun per tahun 7% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.
- Tingkat mortalita (kematian) mengikuti GAM - 1971 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.
- Tingkat cacat diasumsikan sebesar 0,05% per tahun.
- Tingkat pengunduran diri per tahun sejak usia < 46, 46 - 50, 51, 52, 53, 54, 55 dan 56 tahun masing-masing sebesar 1%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 9% dan 100%.

38. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

The outstanding commitments and contingencies as of December 31, 2009 and 2008 are as follows:

COMMITMENTS	
Commitments payable	
Unused loan commitments (Note 24)	
Irrevocable L/C	
Others	
Total commitments payable	
CONTINGENCIES	
Contingent receivables	
Interest income on non-performing assets	
Guarantees received	
Others	
Total contingent receivables	
Contingent payables	
Guarantees issued (Note 24)	
Contingent receivables - net	

39. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS

The Bank provided allowance for employee benefits for the years ended December 31, 2009 and 2008 based on the actuarial calculation performed by PT Dian Artha Tama, an independent actuary, based on its reports dated February 18, 2010 and February 10, 2009, respectively, by using the *projected unit credit method*.

The key assumptions used in the actuarial calculations are as follows:

- Annual discount rates of 10% and 12% for the years ended December 31, 2009 and 2008, respectively.
- Basic pensionable annual salary increase rate of 7% for the years ended December 31, 2009 and 2008.
- Mortality rate following GAM - 1971 for the years ended December 31, 2009 and 2008.
- Assumed disability rate of 0.05% per year.
- Retirement rates per year for ages < 46, 46 - 50, 51, 52, 53, 54, 55 and 56 years: 1%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 9% and 100%, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

39. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (lanjutan)

Berikut adalah ringkasan komponen dari status pendanaan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dan biaya imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut:

2009

a. Kewajiban untuk imbalan kerja

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Kewajiban kini	602.406	329.946	932.352	Present value of obligation
Nilai wajar aktiva program	721.635	418.274	1.139.909	Fair value of plan assets
Status pendanaan	119.229	88.328	207.557	Funded status
Keuntungan aktuarial ditangguhkan	9.672	(69.796)	(60.124)	Deferred actuarial gain
Kelebihan nilai wajar aktiva	128.901	18.532	147.433	Excess of assets fair value
Eliminasi kelebihan nilai wajar atas kewajiban	(128.901)	(18.532)	(147.433)	Elimination of assets fair value over liability
Kewajiban yang diakui dalam neraca	-	-	-	Liability recognized in balance sheets

b. Biaya imbalan kerja

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Biaya jasa kini	20.558	24.094	44.652	Current service cost
Biaya bunga	44.848	26.503	71.351	Interest cost
Amortisasi keuntungan aktuarial ditangguhkan	-	(4.244)	(4.244)	Amortization of deferred actuarial gain
Pengembangan aktiva program	(55.266)	(28.899)	(84.165)	Assets program development
Beban imbalan kerja - bersih	10.140	17.454	27.594	Employee benefits expense - net

c. Mutasi atas Kelebihan nilai wajar aset atas kewajiban untuk imbalan kerja

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Saldo pada awal tahun	110.049	21.805	131.854	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan	(10.140)	(17.454)	(27.594)	Employee benefits expense during the current year
luran pemberi kerja tahun berjalan	28.992	14.181	43.173	Bank's contribution during the current year
Saldo pada akhir tahun	128.901	18.532	147.433	Balance at end of year

39. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

The following summarizes the components of the funded status as of December 31, 2009 and 2008 and the employee benefits expense recognized in the statements of income for the years then ended:

2009

a. Employee benefits liability

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Kewajiban kini	602.406	329.946	932.352	Present value of obligation
Nilai wajar aktiva program	721.635	418.274	1.139.909	Fair value of plan assets
Status pendanaan	119.229	88.328	207.557	Funded status
Keuntungan aktuarial ditangguhkan	9.672	(69.796)	(60.124)	Deferred actuarial gain
Kelebihan nilai wajar aktiva	128.901	18.532	147.433	Excess of assets fair value
Eliminasi kelebihan nilai wajar atas kewajiban	(128.901)	(18.532)	(147.433)	Elimination of assets fair value over liability
Kewajiban yang diakui dalam neraca	-	-	-	Liability recognized in balance sheets

b. Employee benefits expense

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Biaya jasa kini	20.558	24.094	44.652	Current service cost
Biaya bunga	44.848	26.503	71.351	Interest cost
Amortisasi keuntungan aktuarial ditangguhkan	-	(4.244)	(4.244)	Amortization of deferred actuarial gain
Pengembangan aktiva program	(55.266)	(28.899)	(84.165)	Assets program development
Beban imbalan kerja - bersih	10.140	17.454	27.594	Employee benefits expense - net

c. Movement of excess of assets fair value over liability for employee benefits

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Saldo pada awal tahun	110.049	21.805	131.854	Balance at beginning of year
Beban imbalan kerja tahun berjalan	(10.140)	(17.454)	(27.594)	Employee benefits expense during the current year
luran pemberi kerja tahun berjalan	28.992	14.181	43.173	Bank's contribution during the current year
Saldo pada akhir tahun	128.901	18.532	147.433	Balance at end of year

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

39. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA (lanjutan)

2008

a. Kewajiban untuk imbalan kerja

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Kewajiban kini	448.479	265.030	713.509	Current value of obligation
Nilai wajar aktiva program	614.065	361.236	975.301	Fair value of plan assets
Status pendanaan	165.586	96.206	261.792	Funded status
Keuntungan aktuarial ditangguhkan	(55.537)	(74.401)	(129.938)	Deferred actuarial gain
Kelebihan nilai wajar aktiva	110.049	21.805	131.854	Excess of assets fair value
Eliminasi kelebihan nilai wajar atas kewajiban	(110.049)	(21.805)	(131.854)	Elimination of excess of assets fair value over liability
Kewajiban yang diakui dalam neraca	-	-	-	Liability recognized in balance sheets

b. Biaya (pendapatan) imbalan kerja

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Biaya jasa kini	15.035	19.492	34.527	Current service cost
Biaya bunga	45.443	36.385	81.828	Interest cost
Penyesuaian aset	(24.280)	190	(24.090)	Plan assets adjustments
Amortisasi keuntungan aktuarial ditangguhkan	(129)	(1.007)	(1.136)	Amortization of deferred actuarial gain
Pengembangan aktiva program	(51.736)	(30.664)	(82.400)	Asset program development
Biaya jasa lalu - vested	35.899	-	35.899	Past service cost - vested
Beban (pendapatan) imbalan kerja - bersih	20.232	24.396	44.628	Net employee benefits expense (income)

c. Mutasi atas kelebihan nilai wajar aset atas kewajiban untuk imbalan kerja

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Saldo pada awal tahun	113.359	32.876	146.235	Balance at beginning of year
Pendapatan (beban) imbalan kerja tahun berjalan	(20.232)	(24.396)	(44.628)	Employee benefits income (expense) during the current year
luran pemberi kerja tahun berjalan	16.922	13.325	30.247	Bank's contribution during the current year
Saldo pada akhir tahun	110.049	21.805	131.854	Balance at end of year

Selain cadangan imbalan kerja atas program pensiun dan program lainnya (program Tunjangan Hari Tua (THT), program perawatan kesehatan pasca kerja dan lainnya), Bank juga telah membentuk cadangan imbalan kerja atas Program Pensiun luran Pasti dan Program Masa Persiapan Pensiun (MPP). Jumlah kewajiban cadangan imbalan kerja dari kedua program tersebut berdasarkan hasil perhitungan aktuaris independen yang sama, PT Dian Artha Tama, adalah sebesar Rp46.707 dan Rp33.485 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008. Sedangkan beban kedua program tersebut di atas yang telah dibebankan pada laporan laba rugi pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp14.463 dan Rp17.159.

39. PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

2008

a. Employee benefits liability

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Kewajiban kini	448.479	265.030	713.509	Current value of obligation
Nilai wajar aktiva program	614.065	361.236	975.301	Fair value of plan assets
Status pendanaan	165.586	96.206	261.792	Funded status
Keuntungan aktuarial ditangguhkan	(55.537)	(74.401)	(129.938)	Deferred actuarial gain
Kelebihan nilai wajar aktiva	110.049	21.805	131.854	Excess of assets fair value
Eliminasi kelebihan nilai wajar atas kewajiban	(110.049)	(21.805)	(131.854)	Elimination of excess of assets fair value over liability
Kewajiban yang diakui dalam neraca	-	-	-	Liability recognized in balance sheets

b. Employee benefits expense (income)

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Biaya jasa kini	15.035	19.492	34.527	Current service cost
Biaya bunga	45.443	36.385	81.828	Interest cost
Penyesuaian aset	(24.280)	190	(24.090)	Plan assets adjustments
Amortisasi keuntungan aktuarial ditangguhkan	(129)	(1.007)	(1.136)	Amortization of deferred actuarial gain
Pengembangan aktiva program	(51.736)	(30.664)	(82.400)	Asset program development
Biaya jasa lalu - vested	35.899	-	35.899	Past service cost - vested
Beban (pendapatan) imbalan kerja - bersih	20.232	24.396	44.628	Net employee benefits expense (income)

c. Movement of excess of assets fair value over liability for employee benefits

	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Jumlah/ Total	
Saldo pada awal tahun	113.359	32.876	146.235	Balance at beginning of year
Pendapatan (beban) imbalan kerja tahun berjalan	(20.232)	(24.396)	(44.628)	Employee benefits income (expense) during the current year
luran pemberi kerja tahun berjalan	16.922	13.325	30.247	Bank's contribution during the current year
Saldo pada akhir tahun	110.049	21.805	131.854	Balance at end of year

In addition to the employee benefit liability on pension program and other programs (Old-age Retirement plan (Tunjangan Hari Tua or THT), healthcare program for retirement and other benefits), the Bank also provides estimated liability for defined contribution pension plans and employee's retirement preparation period (MPP) benefits. As of December 31, 2009 and 2008, the employee benefits liability on both programs based on the calculation of the independent actuary, PT Dian Artha Tama, amounted to Rp46,707 and Rp33,485, respectively. The above expenses are recorded in the statements of income for the years ended December 31, 2009 and 2008 which amounted to Rp14,463 and Rp17,159, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PELAPORAN SEGMENT

a. Informasi segmen usaha berdasarkan wilayah geografis:

40. SEGMENT REPORTING

a. Segment information based on geographical area is as follows:

Keterangan	2009						Jumlah/ Total	Description
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa selain Jabotabek/ Java excluding Jabotabek	Sumatera/ Sumatra	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination		
Pendapatan Segmen								Segment Income
Pendapatan bunga								Interest income
Kredit yang diberikan	-	2.268.686	958.288	753.908	681.679	-	4.662.561	Loans
Obligasi pemerintah (Obligasi rekaptalisasi)	633.685	-	-	-	-	-	633.685	Government bonds (recapitalization bonds)
Efek-efek	112.085	-	-	-	-	-	112.085	Securities
Penempatan pada bank lain	27.366	-	538	12	17	-	27.933	Placements with other banks
Tagihan Swap Suku Bunga	35.464	-	-	-	-	-	35.464	Interest rate swap receivables
Provisi dan komisi	-	50.549	28.450	22.897	23.058	-	124.954	Fees and commissions
Bagi hasil secara syariah	25.255	6.817	65.450	19.999	15.738	-	133.259	Income from sharia
	833.855	2.326.052	1.052.726	796.816	720.492	-	5.729.941	
Beban Segmen								Segment Expenses
Beban bunga								Interest expense
Deposito berjangka	-	1.822.420	267.686	113.815	63.799	-	2.267.720	Time deposits
Surat-surat berharga yang diterbitkan	358.777	-	-	-	-	-	358.777	Securities issued
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	257.604	-	-	-	-	-	257.604	Securities sold under repurchase agreements
Tabungan	-	95.151	89.401	41.573	60.606	-	286.731	Savings deposits
Pinjaman subordinasi	12.600	-	-	-	-	-	12.600	Subordinated loan
Pinjaman yang diterima	111.654	1	-	-	-	-	111.655	Fund borrowings
Giro	80	29.803	34.750	12.388	13.026	-	90.047	Demand deposits
Simpanan dari bank lain	19.927	157	4.935	3.281	6.911	-	35.211	Deposits from other banks
Beban pendanaan lainnya	1.589	140	910	542	934	-	4.115	Other financing expenses
Bonus	-	919	1.407	612	334	-	3.272	Bonus
	762.231	1.948.591	399.089	172.211	145.610	-	3.427.732	
Pendapatan segmen - bersih	71.624	377.461	653.637	624.605	574.882	-	2.302.209	Segment income - net
Pendapatan operasional lainnya	18.637	95.048	70.223	39.838	41.111	-	264.857	Other operating income
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian aktiva produktif dan non-produktif	(46.796)	4.886	3.126	4.695	(18.775)	-	(52.864)	Reversal of allowance (provision) for possible losses on earning and non-earning assets
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(144)	(6.813)	(2.852)	(982)	(564)	-	(11.355)	Provision for possible losses on commitments and contingent expense
Beban operasional lainnya	(983.587)	(257.930)	(255.449)	(135.007)	(131.436)	-	(1.763.409)	Other operating expenses
Laba (rugi) operasional	(940.266)	212.652	468.685	533.149	465.218	-	739.438	Income (Loss) from Operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih	(1.133.275)	1.435.893	34.205	(192.226)	(138.218)	-	6.379	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak penghasilan - bersih	(239.574)	-	-	-	-	-	(239.574)	Income tax expense - net
Laba bersih sebelum Pos Luar biasa	(2.313.115)	1.648.545	502.890	340.923	327.000	-	506.243	Net income before extraordinary item
Pos luar biasa - bersih	(15.790)	-	-	-	-	-	(15.790)	Extraordinary item - net
Laba (Rugi) Bersih	(2.328.905)	1.648.545	502.890	340.923	327.000	-	490.453	Net Income (Loss)
Aset								Assets
Kas	-	92.235	100.207	38.264	63.651	-	294.357	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.842.112	-	-	-	-	-	2.842.112	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - bersih	22.771	170	1.118	788	845	-	25.692	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada bank lain - bersih	122.323	5.327	1	-	5.274	-	132.925	Placements with other banks - net
Efek-efek - bersih	5.483.561	-	-	-	-	-	5.483.561	Securities - net
Obligasi pemerintah (obligasi rekaptalisasi) - bersih	7.380.213	-	-	-	-	-	7.380.213	Government bonds (recapitalization bonds) - net
Tagihan swap suku bunga - bersih	33.059	-	-	-	-	-	33.059	Interest rate swap receivables - net
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - bersih	(16.619)	17.059.000	9.410.228	7.189.813	6.386.979	-	40.029.401	Loans and sharia financing/ receivables - net
Aset pajak tangguhan - bersih	72.221	-	-	-	-	-	72.221	Deferred tax assets - net
Aset tetap - bersih	649.693	86.718	294.762	77.309	128.190	-	1.236.672	Premises and equipment - net
Bunga yang masih akan diterima	93.122	175.174	96.364	76.929	66.953	-	508.542	Interest receivables
Aset lain-lain	15.433.368	21.232.058	2.835.998	749.359	892.409	(40.734.280)	408.912	Other assets
Jumlah Aset	32.115.824	38.650.682	12.738.678	8.132.462	7.544.301	(40.734.280)	58.447.667	Total Assets

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

40. PELAPORAN SEGMENT (lanjutan)

40. SEGMENT REPORTING (continued)

a. Informasi segmen usaha berdasarkan wilayah geografis: (lanjutan)

a. Segment information based on geographical area is as follows: (continued)

2009								
Keterangan	Kantor Pusat/ Head Office	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa selain Jabotabek/ Java excluding Jabotabek	Sumatera/ Sumatra	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	Description
Kewajiban								Liabilities
Kewajiban segera	203.418	164.703	134.857	76.418	85.369	-	664.765	Current liabilities
Simpanan dari nasabah								Deposits
Giro	-	5.254.812	1.075.825	467.077	458.845	-	7.256.559	Demand deposits
Giro Wadiah	-	30.215	43.342	26.565	7.591	-	107.713	Wadiah demand deposits
Tabungan	-	2.689.783	2.972.218	1.262.131	1.816.194	-	8.740.326	Savings deposits
Tabungan Wadiah dan Mudharabah	-	52.458	96.509	30.820	20.851	-	200.638	Wadiah and Mudharabah savings deposits
Deposito berjangka	-	18.165.349	2.671.281	1.268.854	665.635	-	22.771.119	Time deposits
Deposito berjangka Mudharabah	-	714.333	294.552	73.464	56.250	-	1.138.599	Mudharabah time deposits
Simpanan dari bank lain	89.253	135.572	239.433	365	40.140	-	504.763	Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.564.709	-	-	-	-	-	3.564.709	Securities sold under repurchase agreements
Surat-surat berharga yang diterbitkan - bersih	3.221.894	-	-	-	-	-	3.221.894	Securities issued - net
Pinjaman yang diterima	2.983.997	-	-	-	-	-	2.983.997	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	74.540	70.501	9.667	4.685	2.211	-	161.604	Accrued interest
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	16.180	8.094	7.358	7.906	-	39.538	Estimated losses on commitments and contingencies
Kewajiban lain-lain	18.857.376	10.255.132	4.690.009	4.573.802	4.056.279	(40.734.280)	1.698.318	Other liabilities
Jumlah Kewajiban	28.995.187	37.549.038	12.235.787	7.791.539	7.217.271	(40.734.280)	53.054.542	Total Liabilities
2008								
Keterangan	Kantor Pusat/ Head Office	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa selain Jabotabek/ Java excluding Jabotabek	Sumatera/ Sumatra	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	Description
Pendapatan Segmen								Segment Income
Pendapatan bunga								Interest income
Kredit yang diberikan	-	1.633.827	795.271	580.846	498.163	-	3.508.107	Loans
Obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi)	695.204	-	-	-	-	-	695.204	Government bonds (recapitalization bonds)
Efek-efek	132.161	-	-	-	-	-	132.161	Securities
Penempatan pada bank lain	25.494	-	18	10	18	-	25.540	Placements with other banks
Giro pada Bank Indonesia	8.622	-	-	-	-	-	8.622	Current accounts with Bank Indonesia
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	2.375	-	-	-	-	-	2.375	Securities purchased under resale agreements
Provisi dan komisi Bagi hasil secara syariah	-	45.079	26.940	23.751	24.550	-	120.320	Fees and commissions
	18.061	(5.265)	42.203	6.615	13.083	-	74.697	Income from sharia
	881.917	1.673.641	864.432	611.222	535.814	-	4.567.026	
Beban Segmen								Segment Expenses
Beban bunga								Interest expense
Deposito berjangka	-	1.168.669	192.993	53.994	40.747	-	1.456.403	Time deposits
Surat-surat berharga yang diterbitkan	379.200	-	-	-	-	-	379.200	Securities issued
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	146.590	-	-	-	-	-	146.590	Securities sold under repurchase agreements
Tabungan	-	106.089	100.373	44.602	62.732	-	313.796	Savings deposits
Pinjaman yang diterima	122.012	1	-	-	-	-	122.013	Fund borrowings
Giro	-	28.538	35.636	9.796	17.671	-	91.641	Demand deposits
Kewajiban Swap Suku Bunga	40.362	-	-	-	-	-	40.362	Interest rate swap liabilities
Pinjaman subordinasi	31.500	-	-	-	-	-	31.500	Subordinated loans
Simpanan dari bank lain	16.372	148	61	1.315	659	-	18.555	Deposits from other banks
Beban pendanaan lainnya	1.676	96	813	507	767	-	3.859	Other financing expenses
Bonus	-	660	1.351	471	293	-	2.775	Bonus
	737.712	1.304.201	331.227	110.685	122.869	-	2.606.694	
Pendapatan Segmen - Bersih	144.205	369.440	533.205	500.537	412.945	-	1.960.332	Segment Income - Net
Pendapatan operasional lainnya	11.485	74.458	61.856	34.049	35.223	-	217.071	Other operating income

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

40. PELAPORAN SEGMENT (lanjutan)

40. SEGMENT REPORTING (continued)

a. Informasi segmen usaha berdasarkan wilayah geografis: (lanjutan)

a. Segment information based on geographical area is as follows: (continued)

2008								
Keterangan	Kantor Pusat/ Head Office	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa selain Jabotabek/ Java excluding Jabotabek	Sumatera/ Sumatra	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	Description
								Reversal of allowance (provision) for possible losses on earning and non-earning assets
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian aktiva produktif dan non-produktif	(19.822)	(55.264)	19.770	10.238	49.860	-	4.782	
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	70	(3.645)	(811)	(1.868)	(3.516)	-	(9.770)	Provision for possible losses on commitments and contingencies
Beban operasional lainnya	(781.861)	(240.840)	(238.640)	(121.724)	(119.525)	-	(1.502.590)	Other operating expenses
Laba (rugi) operasional	(645.923)	144.149	375.380	421.232	374.987	-	669.825	Income (Loss) from Operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih	(700.472)	888.908	31.529	(155.922)	(88.335)	-	(4.292)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak penghasilan - bersih	(235.059)	-	-	-	-	-	(235.059)	Income tax expense - net
Laba (Rugi) Bersih	(1.581.454)	1.033.057	406.909	265.310	306.652	-	430.474	Net Income (Loss)
Aset								Assets
Kas	-	67.929	85.016	31.693	45.205	-	229.843	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.811.728	-	-	-	-	-	1.811.728	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - bersih	6.745	820	2.629	814	586	-	11.594	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada bank lain - bersih	125.012	-	201	-	-	-	125.213	Placements with other banks - net
Efek-efek - bersih	1.733.365	-	-	-	-	-	1.733.365	Securities - net
Obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi) - bersih	7.576.569	-	-	-	-	-	7.576.569	Government bonds (recapitalization bonds) - net
Tagihan swap suku bunga - bersih	33.028	-	-	-	-	-	33.028	Interest rate swap receivables - net
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bersih	(47)	13.093.490	7.715.470	5.635.807	5.023.916	-	31.468.636	Loans and sharia financing/ receivables - net
Aset pajak tangguhan - bersih	103.981	-	-	-	-	-	103.981	Deferred tax assets - net
Aset tetap - bersih	482.846	84.039	297.395	79.429	128.936	-	1.072.645	Premises and equipment - net
Bunga yang masih akan diterima	143.076	134.856	79.296	58.259	51.364	-	466.851	Interest receivables
Aset lain-lain	11.313.222	16.569.734	2.393.081	689.237	818.793	(31.425.349)	358.718	Other assets
Jumlah Aktiva	23.329.525	29.950.868	10.573.088	6.495.239	6.068.800	(31.425.349)	44.992.171	Total Assets
Kewajiban								Liabilities
Kewajiban segera	145.726	159.274	132.225	70.319	84.481	-	592.025	Current liabilities
Simpanan dari nasabah								Deposits
Giro	-	1.352.906	687.119	392.288	381.842	-	2.794.155	Demand deposits
Giro Wadiah	-	12.879	27.692	14.303	4.201	-	59.075	Wadiah demand deposits
Tabungan	-	2.342.090	2.259.153	1.083.105	1.564.119	-	7.248.467	Savings deposits
Tabungan Wadiah dan Mudharabah	-	28.129	67.202	19.669	11.631	-	126.631	Wadiah and Mudharabah savings deposits
Deposito berjangka Mudharabah	-	16.043.212	2.821.082	1.083.402	772.107	-	20.719.803	Time deposits
Simpanan dari bank lain	39.240	30.863	151.052	30.000	79.035	-	330.190	Mudharabah time deposits
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.775.000	-	-	-	-	-	1.775.000	Securities sold under repurchase agreement
Surat-surat berharga yang diterbitkan - bersih	2.496.157	-	-	-	-	-	2.496.157	Securities issued - net
Kewajiban swap suku bunga	2.115	-	-	-	-	-	2.115	Interest rate swap liabilities
Pinjaman yang diterima	3.281.294	-	-	-	-	-	3.281.294	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	75.406	95.586	14.317	7.389	4.054	-	196.752	Accrued interest
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	9.322	5.180	6.358	7.323	-	28.183	Estimated losses on commitments and contingencies
Kewajiban lain-lain	13.853.839	8.923.128	3.836.135	3.493.111	2.832.475	(31.425.349)	1.513.339	Other liabilities
Pinjaman subordinasi - bersih	249.902	-	-	-	-	-	249.902	Subordinated loans - net
Jumlah Kewajiban	21.918.679	29.262.117	10.166.177	6.229.927	5.762.150	(31.425.349)	41.913.701	Total Liabilities

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PELAPORAN SEGMENT (lanjutan)

40. SEGMENT REPORTING (continued)

b. Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha:

b. Segment information based on business type is as follows:

	2009				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
Pendapatan segmen	5.596.682	133.259	-	5.729.941	Segment income
Beban segmen	(3.424.459)	(3.273)	-	(3.427.732)	Segment expenses
Pendapatan segmen - bersih	2.172.223	129.986	-	2.302.209	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	249.101	15.756	-	264.857	Other operating income
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian aktiva produktif dan non-produktif	15.827	(68.691)	-	(52.864)	Reversal of allowance (provision) for possible losses on earning and non-earning assets
Beban estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(11.355)	-	-	(11.355)	Provision for possible losses on commitments and contingencies
Beban operasional lainnya	(1.721.133)	(42.276)	-	(1.763.409)	Other operating expenses
Laba operasional	704.663	34.775	-	739.438	Income from Operation
Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih	9.455	(3.076)	-	6.379	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak penghasilan - bersih	(239.574)	-	-	(239.574)	Income tax expense - net
Laba bersih sebelum pos luar biasa	474.544	31.699	-	506.243	Income before extraordinary item
Pos luar biasa - bersih	(15.790)	-	-	(15.790)	Extraordinary item - net
Laba bersih	458.754	31.699	-	490.453	Net income
Jumlah Aset	96.925.283	2.256.664	(40.734.280)	58.447.667	Total Assets
	2008				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
Pendapatan segmen	4.492.329	74.697	-	4.567.026	Segment income
Beban segmen	(2.603.919)	(2.775)	-	(2.606.694)	Segment expenses
Pendapatan segmen - bersih	1.888.410	71.922	-	1.960.332	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	205.330	11.741	-	217.071	Other operating income
Pembalikan (beban) Penyisihan kerugian aktiva produktif dan non-produktif	14.624	(9.842)	-	4.782	Reversal of allowance (provision) for possible losses on earning and non-earning assets
Pembalikan (beban) estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	(9.912)	142	-	(9.770)	Reversal of allowance (provision) for possible losses on commitments and contingencies
Beban operasional lainnya	(1.466.294)	(36.296)	-	(1.502.590)	Other operating expenses
Laba operasional	632.158	37.667	-	669.825	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - bersih	25.184	(29.476)	-	(4.292)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak penghasilan - bersih	(235.059)	-	-	(235.059)	Income tax expense - net
Laba bersih	422.283	8.191	-	430.474	Net income
Jumlah Aset	74.860.627	1.556.893	(31.425.345)	44.992.171	Total Assets

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PELAPORAN SEGMENT (lanjutan)

Penjelasan:

- Wilayah Jabotabek terdiri dari kantor cabang Bekasi, Bogor, Bumi Serpong Damai, Cilegon, Cikarang, Ciputat, Cibubur, Depok, Jakarta Harmoni, Jakarta Kuningan, Jakarta Cawang, Karawang, Kebon Jeruk, Kelapa Gading dan Karawaci, Tangerang serta kantor cabang *syariah* Jakarta Harmoni, Bekasi, Bogor, Tangerang dan Cilegon.
- Wilayah Jawa selain Jabotabek terdiri dari kantor cabang Bangkalan, Bandung, Cirebon, Cimahi, Gresik, Jember, Kediri, Madiun, Malang, Semarang, Solo, Surabaya, Pekalongan, Purwakarta, Purwokerto, Sidoarjo, Tasikmalaya dan Yogyakarta serta kantor cabang *syariah* Bandung, Cirebon, Malang, Solo, Semarang, Surabaya dan Yogyakarta.
- Wilayah Sumatra terdiri dari kantor cabang Banda Aceh, Bandar Lampung, Batam, Bengkulu, Jambi, Medan, Padang, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta kantor cabang *syariah* Batam, Medan, Pekanbaru dan Palembang.
- Wilayah lainnya terdiri dari kantor cabang Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Gorontalo, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Mataram, Palangkaraya, Palu, Pontianak, Samarinda dan Ternate dan serta kantor cabang *syariah* Banjarmasin, Makassar dan Balikpapan.
- Aktiva lain-lain yang dieliminasi dengan kewajiban lain-lain merupakan akun rekening antar kantor.

40. SEGMENT REPORTING (continued)

Explanations:

- The Jabotabek area consists of branches in Bekasi, Bogor, Bumi Serpong Damai, Cilegon, Cikarang, Ciputat, Cibubur, Depok, Jakarta Harmoni, Jakarta Kuningan, Jakarta Cawang, Karawang, Kebon Jeruk, Kelapa Gading and Karawaci, Tangerang, and sharia branches in Jakarta Harmoni, Bekasi, Bogor, Tangerang and Cilegon.
- The Java area, excluding Jabotabek, consists of branches in Bangkalan, Bandung, Cirebon, Cimahi, Gresik, Jember, Kediri, Madiun, Malang, Semarang, Solo, Surabaya, Pekalongan, Purwakarta, Purwokerto, Sidoarjo, Tasikmalaya and Yogyakarta, and sharia branches in Bandung, Cirebon, Malang, Solo, Semarang, Surabaya and Yogyakarta.
- The Sumatra area consists of branches in Banda Aceh, Bandar Lampung, Batam, Bengkulu, Jambi, Medan, Padang, Palembang, Pangkal Pinang, Pekanbaru and Tanjung Pinang, and sharia branches in Batam, Medan, Pekanbaru and Palembang.
- Other areas consist of branches in Ambon, Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Gorontalo, Jayapura, Kendari, Kupang, Makassar, Manado, Mataram, Palangkaraya, Palu, Pontianak, Samarinda and Ternate, and sharia branches in Banjarmasin, Makassar and Balikpapan.
- Other assets which were eliminated against other liabilities represent inter-branch accounts.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**41. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP
KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM**

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tatacara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, Bank telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp70.562 dan Rp51.298.

**41. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE
OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS**

Based on article 8 of the Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, as a result of the termination of the role and winding-up of IBRA, the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998 would be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit (Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah) (UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementing Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Minister of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005. To replace UP3, based on Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 of the Republic of Indonesia regarding the Lembaga Penjamin Simpanan, the Government established Deposit Insurance Corporation (LPS) which is an independent institution to guarantee public funds including funds from other banks in the form of current deposits, time deposits, certificates of deposit, savings on deposits and/or other equivalent form.

The Bank paid premium on the guarantee program amounting to Rp70,562 and Rp51,298 for the years ended December 31, 2009 and 2008, respectively.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

42. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usaha normal, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dilaksanakan dengan syarat dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, kecuali untuk kredit yang diberikan pada direksi dan karyawan Bank.

Saldo aktiva dan kewajiban serta pendapatan bunga dan beban bunga dari transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

	2009	2008
Aset		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah untuk direksi dan karyawan	19.466	6.889
Persentase jumlah aktiva pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah aktiva	0,0333%	0,0153%
Kewajiban		
Giro dan giro Wadiah	42.233	62.253
Tabungan dan tabungan Wadiah dan Mudharabah	26.241	11.346
Deposito berjangka dan deposito berjangka Mudharabah	33.594	48.051
Jumlah kewajiban untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa	102.068	121.650
Persentase jumlah kewajiban pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah kewajiban	0,1924%	0,2902%
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.448	804
Persentase jumlah pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah pendapatan bunga dan pendapatan bagi hasil	0,0253%	0,0176%

42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank entered into transactions with related parties. Transactions with related parties were conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, with the exception of loans granted to the Bank's directors and employees.

Balances of assets and liabilities, and interest income earned from and expenses incurred on transactions with related parties are as follows:

	2009	2008
Assets		
Loans and sharia financing/receivables for directors and employees	19.466	6.889
Percentage of assets from related parties to total assets	0,0333%	0,0153%
Liabilities		
Demand deposits and Wadiah demand deposits	42.233	62.253
Savings deposits and Wadiah and Mudharabah savings deposits	26.241	11.346
Time deposits and Mudharabah time deposits	33.594	48.051
Total liabilities to related parties	102.068	121.650
Percentage of liabilities to related parties to total liabilities	0,1924%	0,2902%
Interest Income and Profit Sharing		
Loans and sharia financing/receivables	1.448	804
Percentage of interest income and profit sharing from related parties to total interest income and income from profit sharing	0,0253%	0,0176%

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

42. TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA (lanjutan)

**42. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

	2009	2008	
<u>Beban Bunga dan Bonus</u>			<i>Interest Expense and Bonus</i>
Giro dan giro <i>Wadiah</i>	522	692	<i>Demand deposits and Wadiah demand deposits</i>
Tabungan dan tabungan <i>Wadiah</i> dan <i>Mudharabah</i>	518	474	<i>Savings deposits and Wadiah and Mudharabah savings deposits</i>
Deposito berjangka dan deposito berjangka <i>Mudharabah</i>	309	1.379	<i>Time deposits and Mudharabah time deposits</i>
Jumlah beban bunga dan bonus untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa	<u>1.349</u>	<u>2.545</u>	<i>Total interest expense and bonus incurred on related parties</i>
Persentase jumlah beban bunga dan bonus untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa terhadap jumlah beban bunga dan bonus	<u>0,0394%</u>	<u>0,0976%</u>	<i>Percentage of interest expense and bonus incurred on related parties to total interest expense and bonus</i>
Gaji dan kompensasi lainnya (termasuk <i>tantiem</i>) yang dibayarkan kepada dewan komisaris Bank	7.454	4.815	<i>Salaries and other compensation (including tantiem) paid to the Bank's board of commissioners</i>
Gaji dan kompensasi lainnya (termasuk <i>tantiem</i>) yang dibayarkan kepada direksi Bank	27.064	18.938	<i>Salaries and other compensation (including tantiem) paid to the Bank's board of directors</i>
Gaji dan kompensasi lainnya (termasuk <i>tantiem</i>) yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Bank	<u>34.518</u>	<u>23.753</u>	<i>Salaries and other compensation (including tantiem) paid to the Bank's board of commissioners and board of directors</i>
Persentase jumlah gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris dan direksi Bank terhadap jumlah gaji dan tunjangan karyawan	<u>3,6836%</u>	<u>3,0736%</u>	<i>Percentage of salaries and other compensation paid to the Bank's board of commissioners and board of directors to total salaries and employee benefits</i>

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

43. POSISI DEvisa NETO

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/37/PBI/2005 tanggal 30 September 2005. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN neraca dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam rupiah dari selisih bersih antara aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan kewajiban komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang.

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008:

		2009			
		Aktiva/ Assets	Kewajiban/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
<u>Neraca</u>					<u>Balance Sheet</u>
Dolar Amerika Serikat		103.810	151.642	47.832	United States Dollar
Euro Eropa		9.179	-	9.179	European Euro
Yen Jepang		586	-	586	Japanese Yen
Dolar Singapura		7	-	7	Singapore Dollar
		113.582	151.642	57.604	
<u>Rekening Administratif</u>					<u>Administrative Accounts</u>
Dolar Amerika Serikat		5.822	-	5.822	United States Dollar
		119.404	151.642	63.426	
Modal				5.507.241	Capital
Rasio PDN (Neraca)				1,05%	NOP ratio (Balance Sheet)
Rasio PDN (Rekening Administratif)				0,11%	NOP ratio (Administrative Accounts)
Rasio PDN				1,15%	NOP ratio

		2008			
		Aktiva/ Assets	Kewajiban/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
<u>Neraca</u>					<u>Balance Sheet</u>
Dolar Amerika Serikat		132.451	137.746	5.295	United States Dollar
Euro Eropa		101	3	98	European Euro
Yen Jepang		320	-	320	Japanese Yen
Dolar Singapura		8	-	8	Singapore Dollar
		132.880	137.749	5.721	
<u>Rekening Administratif</u>					<u>Administrative Accounts</u>
Dolar Amerika Serikat		6.388	-	6.388	United States Dollar
		139.268	137.749	12.109	
Modal				3.224.948	Capital
Rasio PDN (Neraca)				0,18%	NOP ratio (Balance Sheet)
Rasio PDN (Rekening Administratif)				0,20%	NOP ratio (Administrative Accounts)
Rasio PDN				0,38%	NOP ratio

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM**

Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, rasio kewajiban penyediaan modal minimum atau *capital adequacy ratio* (CAR) Bank masing-masing adalah sebesar 21,78% dan 16,44%, dihitung dengan mengacu pada PBI No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001. Berdasarkan PBI No. 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003, Bank harus memasukkan risiko pasar dalam perhitungan CAR. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, CAR Bank dengan memperhitungkan risiko pasar masing-masing adalah sebesar 21,54% dan 16,14%.

Perhitungan CAR Bank pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 adalah sebagai berikut:

	<u>2009</u>		<u>2008</u>	
Modal Inti	4.513.696	a	2.281.464	Core Capital
Modal Pelengkap (Maksimal 100% dari Modal Inti)	993.545	b	943.517	Supplementary Capital (Maximum of 100% of Core Capital)
Modal Pelengkap Tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi Risiko Pasar	-	c	-	Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Risk
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	5.507.241	d=a+b	3.224.981	Total Core Capital and Supplementary Capital
Jumlah Modal Inti, Modal Pelengkap dan Modal Pelengkap Tambahan yang Dialokasikan untuk Mengantisipasi Risiko Pasar	5.507.241	e=c+d	3.224.981	Total Core Capital, Supplementary Capital and Additional Supplementary Capital Allocated for Anticipation of Market Risk
Penyertaan	-	f	-	Investment
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit	5.507.241	g=d-f	3.224.981	Total Capital for Credit Risk
Jumlah Modal untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar	5.507.241	h=e-f	3.224.981	Total Capital for Credit Risk and Market Risk
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit	25.289.156	i	19.620.219	Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk
ATMR untuk Risiko Pasar	277.277	j	361.636	Risk Weighted Assets (RWA) for Market Risk
Jumlah ATMR untuk Risiko Kredit dan Pasar	25.566.433	k	19.981.855	Total Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk and Market Risk

**44. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR)**

As of December 31, 2009 and 2008, the Bank's CARs are 21.78% and 16.44%, respectively, computed based on PBI No. 3/21/PBI/2001 dated December 13, 2001. Based on PBI No. 5/12/PBI/2003 dated July 17, 2003, the Bank should consider market risk in the computation of its CARs. As of December 31, 2009 and 2008, the Bank's CARs after considering market risk are 21.54% and 16.14%, respectively.

The computations of the Bank's CARs as of December 31, 2009 and 2008 are as follows:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**44. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (lanjutan)**

	2009		2008	
CAR untuk Risiko Kredit	21,78%	g/i	16,44%	CAR for Credit Risk
CAR untuk Risiko Kredit dan Risiko Pasar	21,54%	h/k	16,14%	CAR for Credit Risk and Market Risk
CAR Minimum yang Diwajibkan	8%		8%	Minimum CAR

45. PROFIL JATUH TEMPO

Profil jatuh tempo aktiva dan kewajiban Bank (sebelum premi/diskonto, bunga dan biaya emisi obligasi yang belum diamortisasi, obligasi dalam perbendaharaan, penyisihan kerugian serta akumulasi penyusutan) adalah sebagai berikut:

45. MATURITY PROFILE

The Bank's maturity profile for its assets and liabilities (before premium/discount, interest and unamortized bonds issuance cost, treasury bonds, allowance for possible losses and accumulated depreciation) is as follows:

	2009				Jumlah/ Total	
	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1 - 6 bulan/ > 1 - 6 months	> 6 - 12 bulan/ > 6 - 12 months	> 12 bulan/ > 12 months		
Aset						Assets
Kas	294.357	-	-	-	294.357	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.842.112	-	-	-	2.842.112	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	33.378	-	-	-	33.378	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain	11.688	125.000	-	-	136.688	Placements with other banks
Efek-efek	5.205.002	10.368	-	281.480	5.496.850	Securities
Obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi)	10.732	50.520	10.577	7.316.542	7.388.371	Government bonds (recapitalization bonds)
Tagihan swap suku bunga Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	-	-	33.410	-	33.410	Interest rate swap receivables
Lain-lain	236.938	1.102.127	1.650.615	37.743.274	40.732.954	Loans and sharia financing/receivables
	984.172	-	-	1.986.298	2.970.470	Others
Jumlah Aset	9.618.379	1.288.015	1.694.602	47.327.594	59.928.590	Total Assets
Kewajiban						Liabilities
Giro	7.256.559	-	-	-	7.256.559	Demand deposits
Giro Wadiah	107.713	-	-	-	107.713	Wadiah demand deposits
Tabungan	8.740.326	-	-	-	8.740.326	Savings deposits
Tabungan Wadiah dan Mudharabah	200.638	-	-	-	200.638	Wadiah and Mudharabah savings deposits
Deposito berjangka	14.408.989	6.976.221	1.373.835	12.074	22.771.119	Time deposits
Deposito berjangka Mudharabah	706.524	417.720	14.350	5	1.138.599	Mudharabah time deposits
Simpanan dari bank lain	501.748	1.990	1.025	-	504.763	Deposits from other banks
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.806.424	625.000	490.062	650.000	3.571.486	Securities sold under repurchase agreements
Surat-surat berharga yang diterbitkan	-	-	750.000	2.500.000	3.250.000	Securities issued
Pinjaman yang diterima	7.502	125.353	111.002	2.740.140	2.983.997	Fund borrowings
Lain-lain	2.515.937	23.396	24.892	-	2.564.225	Others
Jumlah Kewajiban	36.252.360	8.169.680	2.765.166	5.902.219	53.089.425	Total Liabilities
Aset (Kewajiban) Bersih	(26.633.981)	(6.881.665)	(1.070.564)	41.425.375	6.839.165	Net Assets (Liabilities)

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)

45. PROFIL JATUH TEMPO (lanjutan)

45. MATURITY PROFILE (continued)

	2008				Jumlah/ Total	
	≤ 1 bulan/ ≤ 1 month	> 1 - 6 bulan/ > 1 - 6 months	> 6 - 12 bulan/ > 6 - 12 months	> 12 bulan/ > 12 months		
Aset						Assets
Kas	229.843	-	-	-	229.843	Cash
Giro pada Bank Indonesia	1.811.728	-	-	-	1.811.728	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	21.605	-	-	-	21.605	Current accounts with other banks
Penempatan pada bank lain	131.755	-	-	-	131.755	Placements with other banks
Efek-efek	1.478.054	31.000	-	233.385	1.742.439	Securities
Obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi)	-	91.350	46.114	7.448.510	7.585.974	Government bonds (recapitalization bonds)
Tagihan swap suku bunga	-	-	-	33.361	33.361	Interest rate swap receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	171.752	691.899	1.056.016	30.105.564	32.025.231	Loans and sharia financing/receivables
Lain-lain	896.597	8.487	-	1.794.396	2.699.480	Others
Jumlah Aset	4.741.334	822.736	1.102.130	39.615.216	46.281.416	Total Assets
Kewajiban						Liabilities
Giro	2.794.155	-	-	-	2.794.155	Demand deposits
Giro Wadiah	59.075	-	-	-	59.075	Wadiah demand deposits
Tabungan	7.248.467	-	-	-	7.248.467	Savings deposits
Tabungan Wadiah dan Mudharabah	126.631	-	-	-	126.631	Wadiah and Mudharabah savings deposits
Deposito berjangka	12.088.248	5.499.451	3.125.975	6.129	20.719.803	Time deposits
Deposito berjangka Mudharabah	261.022	151.327	86.798	1.466	500.613	Mudharabah time deposits
Simpanan dari bank lain	328.660	600	930	-	330.190	Deposits from other banks
Kewajiban swap suku bunga	-	-	2.115	-	2.115	Interest rate swap liabilities
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	625.000	500.000	650.000	1.775.000	Securities sold under repurchase agreements
Surat-surat berharga yang diterbitkan	-	750.000	-	1.750.000	2.500.000	Securities issued
Pinjaman yang diterima	6.297	183.152	247.944	2.843.901	3.281.294	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi	-	-	-	250.000	250.000	Subordinated loans
Lain-lain	2.266.042	30.471	33.786	-	2.330.299	Others
Jumlah Kewajiban	25.178.597	7.240.001	3.997.548	5.501.496	41.917.642	Total Liabilities
Aset (Kewajiban) Bersih	(20.437.263)	(6.417.265)	(2.895.418)	34.113.720	4.363.774	Net Assets (Liabilities)

46. MANAJEMEN RISIKO

46. RISK MANAGEMENT

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk sebagai Bank yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau pembiayaan perumahan, portofolio asetnya didominasi oleh kredit KPR yang sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi, tingkat suku bunga SBI yang meningkat dan stagflasi perekonomian dunia yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan bisnis Bank. Upaya dalam meminimalkan dampak negatif tersebut telah dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Bank telah berupaya meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar di bidang pembiayaan KPR serta mengembangkan pembiayaan di sektor non kredit perumahan yang mencakup bidang telekomunikasi, perdagangan, perkebunan dan infrastruktur/industri. Dengan demikian porsi kredit perumahan dan non perumahan menjadi 75:25.

PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, as a bank that primarily focuses on providing loans and financing housing loans, has most of its asset portfolio consisting of housing loans which are significantly influenced by external business changes, such as inflation, increasing BI certificate interest rate and global economic crisis that could affect the Bank's business development. The Bank has taken actions to minimize those negative impacts through day-to-day risk management activities based on the concept of prudence to ensure the Bank's continuous performance and sound growth.

The Bank is continuously maintaining and enhancing its market share on housing loans and other areas, and developing the financing in the non-housing loan sector, telecommunication, trade, agriculture and infrastructure/industry. Therefore, the proportion of housing loan and non-housing loan is 75:25.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata tekad Bank dalam memberikan nilai tambah kepada pemegang saham. Pengelolaan risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pertumbuhan bisnis dan kegiatan harian bisnis Bank tetap dilaksanakan dalam berbagai bentuk antara lain penyempurnaan sistem *credit scoring model*, penambahan jaringan dan jumlah ATM secara mandiri maupun dengan bekerja sama dengan bank lain.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan lama yang dirasakan kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. Komite Manajemen Risiko terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

The above-mentioned actions are taken to provide added value to the shareholder. Risk management as an inseparable element of the Bank's daily activities and business growth is carried out, which includes, among others, improvement in the credit scoring model system, increasing networks and number of independent and joint ATMs.

Risk Management Committee

The Risk Management Committee is actively involved in providing advice on the inherent risk affecting the Directors' policies and providing evaluation on regulations considered to be outdated and require adjustments or updating. The Risk Management Committee is also actively involved in conducting risk measurement on the risks associated to each of the new products and/or services/ activities to enable the Bank to take the necessary mitigating actions. The Risk Management Committee can evaluate the Risk Management Policy Guidance, if needed.

Policy Improvements and Risk Management Procedures

The Bank has established guidance on risk management policies known as Risk Management Policies Manual (RMPM) which includes minimum requirements based on Bank Indonesia regulation. A review is also conducted on internal policies to comply with prevailing regulations from regulatory bodies by preparing gap analysis and to accommodate common best practices to enhance the quality of the risk management implementation.

The initial stage of the risk management information system focuses on risk database gathering and improvement which is expected to be gradually developed and applied in the information technology system so that risk measurement and monitoring can be integrated and presented to the Bank's management on a timely basis.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko sesuai dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum secara rutin per triwulan menyampaikan laporan profil risiko ke Bank Indonesia yang meliputi laporan pengelolaan risiko antara lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Laporan profil risiko tersebut mencakup parameter, indikator dan formula yang digunakan dalam menilai tingkat risiko dan sistem pengendalian risiko yang dilakukan oleh Bank.

Secara umum risiko komposit yang dimiliki Bank pada triwulan I tahun 2009 berada pada *level moderat*, di mana terdapat kategori risiko moderat pada jenis risiko kredit, likuiditas, strategik dan reputasi sedangkan risiko lainnya berada pada tingkat *low to moderate*. Hal tersebut didukung oleh *Risk Control System* yang memadai (*acceptable*) meliputi pengawasan aktif Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan limit, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen, serta efektifitas pengendalian intern.

Pengelolaan Aset dan Liabilitas

Unit kerja *Supporting Group Asset & Liability* memiliki tugas untuk membantu Komite Aset dan Liabilitas (ALCO) dalam memaksimalkan profitabilitas dengan mengevaluasi serta mengkaji prospek bisnis Bank dengan mengacu kepada RKAP Bank dan kondisi terkini dari makro ekonomi yang berpengaruh terhadap kinerja Bank. Bank akan berupaya untuk mengalokasikan sumber-sumber pendanaan ke dalam aktiva produktif dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan melakukan review terhadap sumber pendanaan, biaya pendanaan, penetapan suku bunga serta risiko likuiditas yang dihadapi Bank.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile

The Risk Management Working Unit, which is set up based on Bank Indonesia Regulation No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the amendment of Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 on the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, prepares quarterly risk profile report to Bank Indonesia, which includes risk management report covering, among others, the following: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputation risk and strategic risk. The risk profile report includes parameters, indicators and formulas used by the Bank to determine the level of risk and the risk control system implemented.

In general, the Bank's composite risk in the first quarter of 2009 was at the moderate level, with moderate risk level for credit, liquidity and operational risk and low risk level for the other risks mentioned above. These risk levels are supported by acceptable Risk Control System and include active monitoring from the Boards of Commissioners and Directors, adequate policies, limits and procedures, measurement, monitoring, management information system and effective internal control.

Asset and Liability Management

The Asset & Liability Supporting Group Working Unit assists the Asset & Liability Committee (ALCO) in maximizing profit by evaluating and analyzing the Bank's business prospects, by referring to the Bank's Budget and Work Plan (RKAP) and the current macroeconomic condition that could affect the Bank's performance. The Bank allocates its financing sources on earning assets based on the concept of prudence and reviews the financing sources, financing cost, interest rate determination and liquidity risk faced by the Bank.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit

Risiko Kredit didefinisikan sebagai kerugian yang timbul akibat dari kegagalan debitur (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Dalam melakukan mitigasi risiko kredit Bank telah menyempurnakan *credit scoring model* (CSM) sebagai alat bantu dalam memutuskan pemberian kredit perorangan yang berkualitas. Bank secara aktif melakukan upaya analisa, menerapkan *four eyes principle*, pemisahan tugas, penetapan batas wewenang memutus kredit dan pembekalan skill bagi staf di bidang operasional kredit. Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan risiko kredit mengacu kepada prinsip kehati-hatian dengan mengacu kepada *best practices*. Satuan Kerja Manajemen Risiko bidang kredit telah melakukan langkah awal dalam menyusun internal rating bagi debitur korporasi, hal ini sejalan dengan konsep pengukuran risiko yang digagas dalam Basel II dan termasuk salah satu materi dalam rangka persiapan implementasi Basel II.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki Bank. Secara umum Bank terekspose pada risiko suku bunga dan risiko nilai tukar, namun seiring dengan kondisi eksternal pasar keuangan yang kurang baik di tahun 2008 risiko pasar yang terpapar secara langsung adalah portofolio yang termasuk di dalam *Trading Book* dimana nilai *mark-to-market* harga obligasi yang cenderung turun akan berpengaruh langsung terhadap laba rugi Bank. Meskipun hal ini terjadi secara umum di perbankan nasional, namun Bank ke depan akan mengambil kebijakan mengenai portofolio mana saja yang akan ditetapkan sebagai *Trading*, *Held to Maturity* atau *Available for Sale* tergantung kepada tujuan dan kemampuan Bank dalam menghadapi risiko yang melekat di dalamnya.

Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Bank menggunakan perhitungan *Standard Method*. Metode internal model yang direncanakan pada masa yang akan datang akan digunakan, pada saat ini aktivitas yang dilakukan adalah melakukan identifikasi persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan model ini sesuai ketentuan yang telah diterbitkan regulator. Sedangkan risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejala eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk

Credit risk is defined as a loss due to debtor (counterparty) repayment failure in meeting its obligation. In mitigating such credit risks, the Bank has improved its Credit Scoring Model (CSM) as a tool for quality decision-making in granting individual loans. The Bank is actively analyzing and implementing the four eyes principle, segregation of duties, hierarchy for loans decision-making and equipping staff with skills in credit operating activities. These tools are intended so that credit risk management refers to the concept of prudence and best practices. In order to align with risk measurement concept in Basel II and as part of its preparation for implementation, the Credit Risk Management Working Unit has taken initial steps in preparing internal ratings for corporate debtors.

Market Risk

Market risk is defined as the risk due to market variable factors and the Bank's portfolio movements. In general, the Bank is exposed to interest rate and exchange rate risks and, with the unfavorable financial market external conditions in 2008, market risk has directly affected the portfolio classified in the Trading Book with the declining mark-to-market values on bond prices affecting the Bank's profit and loss. This condition has greatly affected the national banking industry but the Bank will take actions to select portfolio to be classified in the Trading, Held-to-Maturity or Available-for-Sale categories, depending on the Bank's intention and ability to meet the associated inherent risks.

In measuring market risk, the Bank uses the Standard Method in its calculation. The planned internal model method will be implemented in the future, with its current activities to include the identification of requirements based on the regulations by the regulatory bodies which should be met in implementing the model, while the Exchange risk due to fluctuating exchange rate is managed by maintaining the Net Open Position based on Bank Indonesia Regulation. External pressures are accommodated by conducting stress testing to evaluate the ability of the Bank to keep up with various kinds of external condition changes.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas

Posisi dana pihak ketiga, likuiditas aset, kewajiban kepada *counter-parties* dan komitmen kredit kepada debitur merupakan sumber potensi likuiditas bagi Bank. Ketidakmampuan untuk menghimpun dana dengan biaya wajar akan berdampak kepada profitabilitas Bank. Bank mengelola risiko likuiditas agar dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas mencakup antara lain pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, penetapan strategi pendanaan serta memelihara akses pasar yang mencukupi. Likuiditas Bank saat ini diukur melalui posisi *primary reserve* dan *secondary reserve*. Bank memelihara *primary reserve* dan *secondary reserve* untuk memenuhi kebutuhan likuiditas baik penarikan dana tidak terduga maupun ekspansi aktiva. Bank memelihara *primary reserve* dalam bentuk Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia dan Kas di cabang-cabang.

Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas disusun sesuai dengan aktivitas bisnis yang dilaksanakan unit kerja operasional dan memperhitungkan kebutuhan untuk ekspansi bisnis. Untuk mengetahui kemampuan Bank melakukan serangkaian skenario likuiditas yang mencakup kondisi normal dan tidak normal termasuk kondisi ekstrim/krisis. Selain melalui dana pihak ketiga, Bank dapat memenuhi kebutuhan likuiditas melalui sumber-sumber dana alternatif seperti: sekuritisasi asset, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali ataupun melalui penjualan surat berharga seperti Surat Utang Negara (*governments bonds*).

Risiko Operasional

Dalam mengidentifikasi risiko operasional, Bank mengelompokkan sumber risiko operasional untuk kemudian dilakukan identifikasi risiko operasional yang material pada kantor cabang konvensional dan syariah melalui checklist bulanan yang dilaporkan setiap bulan ke Direktur yang membidangi Manajemen Risiko.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk

The amounts of third party funds, asset liquidity, liabilities to counter-parties and loan commitments to debtors are potential liquidity sources for the Bank. The incapability to raise funds with tolerable cost will impact the Bank's profitability. The Bank manages its liquidity risk to fulfill each agreed financial liability on a timely basis and to maintain an adequate and optimum liquidity position at any time.

The policy on liquidity risk management covers, among others, the maintenance of optimum liquidity reserve, determination of funding strategy and maintaining an adequate access to the market. The Bank's current liquidity is measured through its primary and secondary reserves. The Bank maintains its primary and secondary reserves to fulfill its liquidity needs to satisfy unexpected withdrawals or expansion of assets. The Bank maintains its primary reserve through the minimum reserve requirements imposed by Bank Indonesia and cash in its branches.

The policy on liquidity risk management is prepared in accordance with the business activities carried out by operational units and considers the needs to expand the business. The Bank conducts liquidity scenarios which include normal, abnormal and extreme conditions to identify the Bank's ability to manage liquidity risk. The Bank is able to fulfill liquidity needs through alternative sources of financing other than through third party funds, which include asset securitization, securities under repurchase agreements or sale of securities including government bonds.

Operational Risk

In identifying operational risk, the Bank has classified the operational risk sources and identifies material operational risk in conventional and sharia branches by preparing monthly checklist to be reported monthly to the Director of Risk Management.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Dalam mengukur risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko menyusun laporan profil risiko yang dipergunakan untuk memantau dan melihat tingkat signifikansi risiko berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko bertugas melakukan pengumpulan data risiko operasional dalam bentuk *database* yang dapat dipergunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.

Dalam pemantauan risiko operasional, Divisi Audit Intern melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktifitas. Divisi Manajemen Risiko berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktifitas fungsional, produk atau layanan baru.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank. Divisi Manajemen Risiko bertugas untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

Risiko Hukum

Bank melaksanakan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang meliputi tuntutan hukum, tidak adanya peraturan regulasi hukum yang mendukung, dan kelemahan perjanjian. Di samping itu, setiap divisi bersama-sama dengan Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Sekretariat Perusahaan secara berkala menganalisis dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur risiko hukum.

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko bersama-sama Divisi Sekretariat Perusahaan berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

In measuring operational risk, the Risk Management Division prepares risk profile report which is used to identify and monitor the significance level of a risk based on its causes. The Risk Management Division also gathers operational risk data in the form of database to estimate potential loss for certain functional activities and in a certain period of time.

In monitoring operational risk, the Bank's Internal Audit Division conducts an appraisal on the implementation of risk management policies and procedures on each activity. The Risk Management Division ensures that the risk identification, measurement, monitoring and controlling process is effective in each of the functional activities, new products or services.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by the Bank's working units. The Risk Management Division ensures that the Bank has adequate policies and procedures to control and mitigate operational risk which must be complied and carried out by each working unit in conducting accurate, efficient and timely transactions and activities.

Legal Risk

The Bank identifies legal risk based on its causes which include legal litigation, absence of support in law or regulation and weak agreement. At the same time, each division together with the Risk Management Division and Corporate Secretary Division, analyzes periodically the impact of changes in certain rules and regulations on the Bank's legal risk exposures.

Legal risk measurement is conducted by the Risk Management Division and Corporate Secretary Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Hukum (lanjutan)

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, Divisi Sekretariat Perusahaan memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan review secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Risiko Reputasi

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko reputasi. Risiko reputasi Bank dikelola oleh Divisi Sekretariat Perusahaan, dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh Divisi Kebijakan dan Pengembangan (DKPB).

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dibangun sistem pemantauan reputasi yang dirancang agar dapat secara rutin memeriksa transaksi, peraturan, teknologi dan trend, perkembangan dan perubahan yang berpotensi mempengaruhi bisnis Bank. Dalam hal ini, Bank melakukan analisis kesenjangan antara kinerja Bank dengan harapan stakeholder pada umumnya nasabah khususnya, melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta dengan mengoptimalkan fungsi *corporate secretary*.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation (PSO)* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Legal Risk (continued)

Legal risk monitoring is conducted by the Risk Management Division to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance implementation against the Bank's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk positions.

In controlling legal risk, the Corporate Secretary Division provides legal advice and recommendation to each division and working unit and conducts a periodic review on cooperative agreements with counter-parties.

Reputational Risk

Reputational risk is identified on inherent risk factors associated to functional activities which include disclosure requirement, customer complaints to the Bank, employee attitudes when providing service to customers and the Bank's communication system.

Reputational risk measurement is conducted based on the evaluation results of its causes. The Bank's reputation risk is handled by the Corporate Secretary Division and reported to Bank Indonesia by the Policy and Improvements Division (DKPB).

In the monitoring of reputational risk, the monitoring system is designed to routinely examine transactions, regulations, technology and trends, current developments and changes that could potentially affect the Bank's business. In this case, the Bank analyzes the gap between the Bank's performance against stakeholders' expectation in general and customers' expectation in particular, and identifies issues that may potentially raise reputation risk by optimizing the corporate secretary's functions.

In controlling risk reputation, the working unit acting as corporate secretary is responsible in the implementation of policies relating to managing and settling negative issues or avoiding contra-productive information and performs the Public Service Obligation (PSO) function in connection with carrying out corporate social responsibility.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Strategik

Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan faktor-faktor penyebab risiko pada aktifitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi, serta operasional dan jasa. Kemudian, setiap divisi dan kantor cabang mencatat dan menatausahakan setiap kejadian terkait risiko strategik dalam suatu database yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja fungsional individu, dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Pemantauan risiko strategik dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko secara berkala dengan mengidentifikasi strategi-strategi fungsional yang sedang dijalankan beserta target sarannya. Selanjutnya Dewan Komisaris, Direksi, divisi dan kantor cabang mereview strategi dasar dan fokus pada perubahan manajemen Bank, perkreditan korporasi, pembiayaan perdagangan, treasury, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

Dalam pengendalian risiko strategik, Divisi Penelitian dan Perencanaan berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala. Selanjutnya, Divisi Manajemen Risiko, satuan kerja bisnis, Divisi Audit Intern dan kantor cabang Bank memantau risiko strategik dengan membandingkan hasil yang ingin dicapai (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja fungsional unit kerja, dan memastikan pencapaian target (*target objective*).

Risiko Kepatuhan

Dalam identifikasi risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada seluruh satuan kerja. Di samping itu, Satuan Kerja Kepatuhan menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk direview.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Strategic Risk

Strategic risk is identified based on its causes on each of the functional activities such as loans, treasury and investment and operating and service activities. Each division and branch record and maintain events relating to strategic risk in a database which could be used to estimate potential loss in a certain period of time and from certain functional activity.

Strategic risk measurement based on parameters set is conducted based on the Bank's performance by making a comparison between the expected and actual results, evaluating individual functional performance and examining progress achieved against predetermined targets.

Strategic risk monitoring is conducted periodically by the Risk Management Division by identifying functional strategies currently carried out and their related targets. The Boards of Commissioners and Directors, divisions and branches review basic strategies and focus on the Bank's management transformation, corporate loans, trade finance, treasury, operational and information technology system strengths and weaknesses.

In controlling strategic risk, the Research and Development Division analyzes actual results with target plans and reports periodically to the Board of Directors. The Risk Management Division, business working unit, Internal Audit Division and branches monitor strategic risk by comparing the expected results with the actual results, evaluating working unit functional performance and ensuring target achievement (target objective).

Compliance Risk

In identifying compliance risk, the Compliance Working Unit prepares a list of prevailing laws and regulations affecting each of the working units. At the same time, the Compliance Working Unit analyzes events that may raise compliance risk and reports such matters to the Risk Management Division and Risk Management Committee for their review.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereview semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko kepatuhan dengan memantau secara teratur seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan dan melakukan review.

Terkait pengendalian risiko kepatuhan, Divisi Sekretariat Perusahaan (DSP) membuat daftar peraturan dan hukum yang mengatur kegiatan perbankan dan mendistribusikan daftar tersebut kepada divisi yang tepat. Di samping itu DSP telah menyediakan portal khusus yang bernama Akses Internal Manajemen Standard (AIMS) untuk memudahkan seluruh unit kerja melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank. Selanjutnya, Satuan Kerja Kepatuhan membandingkan hasil yang diharapkan (expected result) dengan hasil aktual, mengevaluasi kemampuan fungsional masing-masing divisi, dan memeriksa perkembangan yang sudah dicapai untuk memastikan bahwa Bank dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Sedangkan profil risiko kantor cabang disusun oleh *Branch Risk and Control Officer* (BRCO) disampaikan secara triwulanan kepada Divisi Manajemen Risiko dan salinannya ditembuskan kepada Divisi Audit Internal sebagai bahan untuk melakukan general audit ke kantor cabang. Dan secara berkala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan pemantauan terhadap penyelesaian audit baik dari intern maupun ekstern, dalam hal ini BRCO melakukan proses evaluasi dan memastikan kantor cabang telah menyelesaikan temuan/hasil pemeriksaan tersebut.

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Bank telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko yaitu *Branch Risk Control Officer* dalam menjalankan fungsinya memberikan *second opinion* dan pertimbangan risiko yang melekat dalam setiap bisnis Bank.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

Compliance risk measurement is conducted by measuring the potential loss caused by the Bank's non-compliance or inability to comply with prevailing regulations. The level of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to comply with prevailing and upcoming regulations. These activities include reviewing all penalties, litigation and complaints received by the Bank.

In monitoring compliance risk, the Risk Management Division and Compliance Working Unit evaluate the effectiveness of compliance risk management implementation by regularly reviewing all types of activities which have potential compliance risk and conducting a general review.

In regards to the control of compliance risk, the Corporate Secretary Division prepares a list of laws and regulations that regulate banking activities and distributes it to the relevant divisions. At the same time, the Corporate Secretary Division has provided an internet site named as "Standard Management Internal Access" (AIMS) allowing working units to have access to the Bank's internal regulations. The Compliance Working Unit then compares the expected results with the actual results, evaluates each division's functional ability and examines improvement achieved to ensure the Bank's ability to attain the predetermined goal.

The branches' risk profile is prepared by the Branch Risk Control Officer (BRCO) and reported quarterly to the Risk Management Division with a copy to the Internal Audit Division as a basis to conduct a general audit on those branches. The Internal Audit Working Unit (SKAI) regularly monitors internal and external audit completion and the BRCO, in this context, evaluates and ensures that branches have resolved the audit findings.

In the Human Resource Development area, the Bank has conducted education and training for Risk Management Officers who are Branch Risk Control Officers in carrying out their function of providing second opinion and handling inherent risks in each of the Bank's business activities.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Sedangkan dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan di bidang manajemen risiko, Bank telah melakukan *internal training* dan mempersiapkan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko). Sejak tahun 2005 sampai dengan akhir September 2009, jumlah pejabat dan staf yang telah lulus ujian sertifikasi manajemen risiko sebanyak 381 orang, dengan rincian level 1 sebanyak 208 orang, level 2 sebanyak 116 orang dan level 3 sebanyak 57 orang. Selain itu terdapat 10 pejabat dan staf yang telah lulus mengikuti sertifikasi manajemen risiko level matrikulasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dan Banker's Association of Risk Management (BARa).

47. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun pada laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan pengungkapan akun pada laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai berikut:

DESKRIPSI AKUN	Dilaporkan Sebelumnya/ As previously reported	Reklasifikasi/ Reclassification	Setelah direklasifikasi/ As reclassified	ACCOUNT DESCRIPTION
NERACA				BALANCE SHEET
EFEK-EFEK				SECURITIES
Tersedia untuk dijual	182.274	(92.889)	89.385	Available-for-sale
OBLIGASI PEMERINTAH (OBLIGASI REKAPITALISASI) -				GOVERNMENT BONDS (RECAPITALIZATION BONDS)
Tersedia untuk dijual	5.110.147	92.889	5.203.036	Available-for-sale
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA				INTEREST RECIVABLES
Efek-efek	5.809	(2.789)	3.020	Securities
Obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi)	135.210	2.789	137.999	Government bonds (Recapitalization bonds)
LAPORAN LABA RUGI				STATEMENTS OF INCOME
PENDAPATAN BUNGA				INTEREST INCOME
Efek-efek	134.609	(2.448)	132.161	Securities
Obligasi pemerintah (obligasi rekapitalisasi)	692.756	2.448	695.204	Government bonds (Recapitalization bonds)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

To enhance the knowledge capacity in risk management, the Bank has conducted *internal training* and prepared *pre-test* as an initial selection for officers and staff intending to participate in a certification examination held by Risk Management Certification Body (BSMR). Since 2005 until the end of September 2009, the Bank has 381 officers and staff who graduated from the risk management certification with 208 executives graduating at level 1, 116 persons graduating at level 2 and 57 executives graduating at level 3. In addition, there are 10 officers and staff who have obtained their risk management certification at matriculation level held by The Banking Profession Certification Institute (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan) (LSPP) and Bankers Association of Risk Management (BARa).

47. ACCOUNT RECLASSIFICATION

Some of the account in the financial statement for the year ended December 31, 2008 have been reclassified to adjust with the financial report for the year ended December 31, 2009 is as follow:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**48. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIREVISI**

Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia tetapi belum efektif pada tahun 2009:

1. PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan. Persyaratan penyajian tersebut diterapkan terhadap klasifikasi instrumen keuangan, dari perspektif penerbit, dalam aset keuangan, kewajiban keuangan, dan instrumen ekuitas; pengklasifikasian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, dan keadaan dimana aset keuangan dan kewajiban keuangan akan saling hapus. Pernyataan ini mensyaratkan pengungkapan, antara lain, informasi mengenai faktor yang mempengaruhi jumlah, waktu dan tingkat kepastian arus kas masa datang yang terkait dengan instrumen keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk instrumen tersebut. PSAK No. 50 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 50, "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan diterapkan secara prospektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.
2. PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Pernyataan ini, antara lain, memberikan definisi dan karakteristik terhadap derivatif, kategori dari instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, akuntansi lindung nilai dan penetapan dari hubungan lindung nilai. PSAK No. 55 (Revisi 2006) ini menggantikan PSAK No. 55, "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai", dan diterapkan secara prospektif untuk laporan keuangan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. Penerapan lebih dini diperkenankan dan harus diungkapkan.
3. PPSAK 4, "Pencabutan PSAK 31 (Revisi 2000): Akuntansi Perbankan, PSAK 42: Akuntansi Perusahaan Efek, dan PSAK 49: Akuntansi Reksa Dana". Berlaku untuk semua entitas yang menerapkan PSAK 31 (Revisi 2000), PSAK 42 dan PSAK 49.

**48. REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS**

The following summarizes the revised PSAKs which have been issued by the Indonesian Institute of Accountants but not yet effective in year 2009:

1. PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" contains the requirements for the presentation of financial instruments and identifies the information that should be disclosed. The presentation requirements apply to the classification of financial instruments, from the perspective of the issuer, into financial assets, financial liabilities and equity instruments; the classification of related interests, dividends, losses and gains; and the circumstances in which financial assets and financial liabilities should be offset. This standard requires the disclosure, among others, of information about factors that affect the amount, timing and certainty of an entity's future cash flows relating to financial instruments and the accounting policies applied to those instruments. PSAK No. 50 (Revised 2006) supersedes PSAK No. 50, "Accounting for Certain Investments in Securities" and is applied prospectively for the periods beginning on or after January 1, 2010. Earlier application is permitted and should be disclosed.
2. PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" establishes the principles for recognizing and measuring financial assets, financial liabilities, and some contracts to buy or sell non-financial items. This standard provides for the definitions and characteristics of a derivative, the categories of financial instruments, recognition and measurement, hedge accounting and determination of hedging relationships, among others. PSAK No. 55 (Revised 2006) supersedes PSAK No. 55, "Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities", and is applied prospectively for financial statements covering the periods beginning on or after January 1, 2010. Earlier application is permitted and should be disclosed.
3. PPSAK 4, "Revocation of PSAK 31: Accounting for Banking Industry, PSAK 42: Accounting for Securities Companies, and PSAK 49: Accounting for Mutual Funds". Applicable for all entities that apply PSAK 31 (Revised 2000), PSAK 42 and PSAK 49.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**48. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIREVISI (lanjutan)**

4. PPSAK 5, "Pencabutan ISAK 06: Interpretasi atas Paragraf 12 dan 16 PSAK No. 55 (1999) tentang Instrumen Derivatif Melekat pada Kontrak dalam Mata Uang Asing".

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

1. PSAK 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (*general purpose financial statements*) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.
2. PSAK 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas" memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (*financing*) selama suatu periode.
3. PSAK 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" akan diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.
4. PSAK 5 (Revisi 2009), "Segmen Operasi". Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.
5. PSAK 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset" menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkan dan jika aset tersebut terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diakui.

**48. REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (continued)**

4. PPSAK 5, "Revocation of ISAK 6: Interpretation of Paragraphs 12 and 16 of PSAK 55 (1999) on Embedded Derivative Instruments in Foreign Currency".

Effective on or after January 1, 2011:

1. PSAK 1 (Revised 2009), "Presentation of Financial Statements" prescribes the basis for presentation of general purpose financial statements to ensure comparability both with the entity's financial statements of previous periods and with the financial statements of other entities.
2. PSAK 2 (Revised 2009), "Statements of Cash Flows" requires the provision of information about the historical changes in cash and cash equivalents by means of a statement of cash flows which classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities.
3. PSAK 4 (Revised 2009), "Consolidated and Separate Financial Statements" shall be applied in the preparation and presentation of consolidated financial statements for a group of entities under the control of a parent and in accounting for investments in subsidiaries, jointly controlled entities and associates when separate financial statements are presented as additional information.
4. PSAK 5 (Revised 2009), "Operating Segments". Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and the economic environments in which it operates.
5. PSAK 48 (Revised 2009), "Impairment of Assets" prescribes the procedures applied to ensure that assets are carried at no more than their recoverable amount and if the assets are impaired, an impairment loss should be recognized.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

**48. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN YANG DIREVISI (lanjutan)**

6. PSAK 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.

Bank sedang mengevaluasi dampak dari Standar, Interpretasi dan Pencabutan Standar yang direvisi dan yang baru tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangannya.

Sebagaimana dimungkinkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SE-BI) No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, untuk penerapan pertama kali PSAK No. 50 dan No. 55 (Revisi), Bank akan menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Sesuai dengan SE-BI tersebut ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dapat diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2011.

49. KONDISI EKONOMI

Banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengalami dampak krisis keuangan global yang mulai dirasakan dampaknya pada semester kedua di tahun 2008 dan semester pertama tahun 2009. Akibat utamanya adalah sangat langkanya likuiditas, tingginya tingkat bunga dan kurs mata uang. Kondisi ini mencakup pula penurunan drastis harga saham, pengetatan penyediaan kredit, dan penghentian atau penundaan pelaksanaan proyek konstruksi tertentu, serta menurunnya aktivitas produksi dan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Dampak kondisi ekonomi global, yang juga mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, terhadap debitur Bank telah menurunkan jumlah pemberian kredit dan meningkatnya risiko kredit bawaan dalam kredit yang diberikan.

Penyelesaian kondisi ekonomi di atas tergantung pada kebijakan fiskal dan moneter yang akan diambil oleh pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi - suatu tindakan yang berada di luar kendali Bank. Oleh karena itu, tidaklah mungkin untuk menentukan dampak berlanjutnya kondisi ekonomi dimasa depan terhadap likuiditas dan pendapatan Bank, termasuk dampak mengalirnya dana investor dan deposito, serta debitur ke dan dari Bank.

**48. REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (continued)**

6. PSAK 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" aims to provide that appropriate recognition criteria and measurement bases are applied to provisions, contingent liabilities and contingent assets and to ensure that sufficient information is disclosed in the notes to enable users to understand the nature, timing and amount related to the information.

The Bank is presently evaluating and has not determined the effects of these revised and new Standards, Interpretations and Standards Revocation on its financial statements.

As allowed under the Bank Indonesia Circular Letter (SE-BI) No. 11/33/DPNP dated December 8, 2009 for initial adoption of PSAK No. 50 and No. 55 (Revised), the Bank will apply the transition rule for collective impairment calculation on loans based on the prevailing Bank Indonesia regulation on Asset Quality Ratings for Commercial Banks. In accordance with the aforementioned SE-BI, the transition rule for collective impairment calculation on loans can be applied until December 31, 2011.

49. ECONOMIC ENVIRONMENT

Many countries, including Indonesia, are experienced the impact of the global financial crisis that started in the second semester of 2008 and first semester 2009. The principal consequences of such have been an extreme lack of liquidity and high level of exchange and interest rates. This condition has also involved declining prices in shares, tightening of available credit, stoppage or postponement of certain construction projects, and slowdown in production and trading in exporting companies. The effects of the global economic condition also affected the economic condition in Indonesia on the Bank's debtors which have reduced the amounts of loans and increased credit risk inherent in loans.

Resolution of the above economic condition is dependent on the fiscal and monetary measures that will be taken by the Government, actions which are beyond the Bank's control, to achieve economic recovery. Accordingly, it is not possible to determine the future effect a continuation of the economic condition may have on the Bank's liquidity and earnings, including the effects of the flow of funds from and to the Bank's investors, customers and debtors.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

50. LABA PER SAHAM

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

Laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009:

	<u>2009</u>		
(i) Laba bersih	490.453	(a)	Net income (i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar:			Weighted average number (ii) of shares
1 Januari 2009, Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp2.559.804 dengan nilai per lembar saham Rp169.596	15.093.540		January 1, 2009, issued and fully paid-up capital amounting to Rp2,559,804 with nominal value (full amount) of Rp169,596 per share
6 Oktober 2009:			October 6, 2009:
Pemecahan saham, penurunan nilai per lembar saham dari Rp169.596 menjadi Rp500 untuk modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp2.559.804	5.119.608.000	(b)	Stock split, decrease in the nominal value per share from Rp169,596 (full amount) to become Rp500 (full amount) for the issued and fully paid-up capital of Rp2,559,804
Kapitalisasi cadangan umum, tujuan dan laba bersih periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2009 menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp617.196 dengan nilai per lembar saham Rp500	1.234.392.000	(c)	Capitalization of appropriated retained earnings and net income for the six months period ended June 30, 2009 into issued and fully paid-up capital amounting to Rp617,196 with the nominal value of Rp500 per share
Jumlah lembar saham yang berdampak retroaktif pada tanggal 1 Januari 2009	6.354.000.000	(d = b + c)	Number of shares which were applied retroactively to January 1, 2009
17 Desember 2009:			December 17, 2009:
Penerbitan saham baru yang diterbitkan dari penawaran umum saham perdana termasuk program MESA sejumlah Rp1.180.028 dengan nilai per lembar saham Rp500	2.360.057.000	(e)	Newly issued shares arising from IPO including MESA program amounting to Rp1,180,028 with nominal value (full amount) of Rp500 per share
Rata-rata tertimbang saham biasa untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 [(351 hari x (d))+(14 hari x (d+e))]/365	6.444.522.734	(f)	Weighted average number of shares for the year ended December 31, 2009 [(351 days x (d))+(14 days x (d+e))]/365
(iii) Laba per saham dasar	76	(af)	Basic earnings per share (iii)

50. EARNINGS PER SHARE

The reconciliation items in calculating the basic earnings per share are as follows:

Earnings per share for the year ended December 31, 2009:

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

50. LABA PER SAHAM (lanjutan)

Labanya per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008:

	2008		
(i) Laba bersih	430.474	(a)	Net income
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar			Weighted average number of shares outstanding
1 Januari 2008	15.093.540	(b)	January 1, 2008
31 Desember 2008 (pengaruh retroaktif pemecahan saham dan kapitalisasi saldo laba ditahan dan laba bersih menjadi modal disetor tahun 2009)	6.354.000.000	(c)	December 31, 2008 (retroactive effect of stock split and capitalization of retained earnings and net income to become fully paid-up capital in 2009)
Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 (365 hari x (c))/365	6.354.000.000	(d)	Weighted average number of shares for the year ended December 31, 2008 (365 days x (c))/365
(iii) Laba per saham dasar	68	(c = a/d)	Basic earnings per share

51. INFORMASI TAMBAHAN

- Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah aktiva produktif (*non-performing ratio*) pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 2,42% dan 2,36% (tidak diaudit).
- Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, rasio kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah terhadap simpanan (*loan-to-deposit-ratio* atau LDR) masing-masing adalah sebesar 101,29% dan 101,83% (tidak diaudit). LDR dihitung dengan membagi antara jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dengan jumlah simpanan.

52. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan rencana Bank untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi XIV Bank BTN tahun 2010 dan Surat BAPEPAM dan LK kepada Direksi Bank No. S-3044/BL/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran, Bank menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 (disajikan untuk tujuan perbandingan), serta periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007, dan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2007 yang disertai dengan beberapa perubahan penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan tersebut.

50. EARNINGS PER SHARE (continued)

Earnings per share for the year ended December 31, 2008:

51. ADDITIONAL INFORMATION

- As of December 31, 2009 and 2008, the Bank's *non-performing assets to total earning assets ratios* are 2.42% and 2.36%, respectively (unaudited).
- As of December 31, 2009 and 2008, the Bank's ratios of loans and sharia financing/receivables over deposits (*loans-to-deposit ratios*) (LDR) are 101.29% and 101.83%, respectively (unaudited). LDR is calculated by dividing total loans and sharia financing/receivables by total deposits.

52. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

Based on the Bank's plan for the public offering of BTN Bonds XIV 2010 and Bapepam-LK's Letter to the Bank's Directors No. S-3044/BL/2020 dated April 7, 2010 concerning Amendment and or Additional Information on the Registration Statement, the Bank reissued its financial statements for the years ended December 31, 2009, 2008 and 2007 (presented for comparative purposes), seven-month period ended December 31, 2007 and five-month period ended May 31, 2007 with certain changes in the presentation and disclosures of such financial statements.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2009 dan 2008
(Disajikan dalam jutaan rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Years Ended
December 31, 2009 and 2008
(Expressed in millions of rupiah,
unless otherwise stated)**

53. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan terlampir yang diselesaikan pada tanggal 7 April 2010.

53. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is fully responsible for the preparation of the accompanying financial statements that were completed on April 7, 2010.

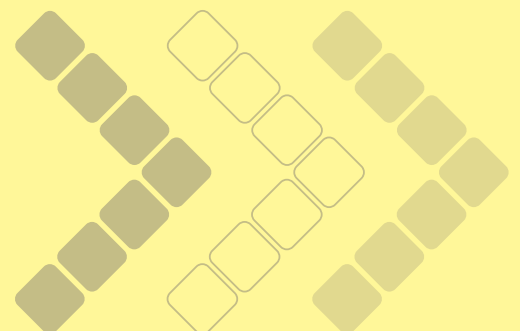




Halaman ini sengaja di kosongkan
This page is intentionally left blank

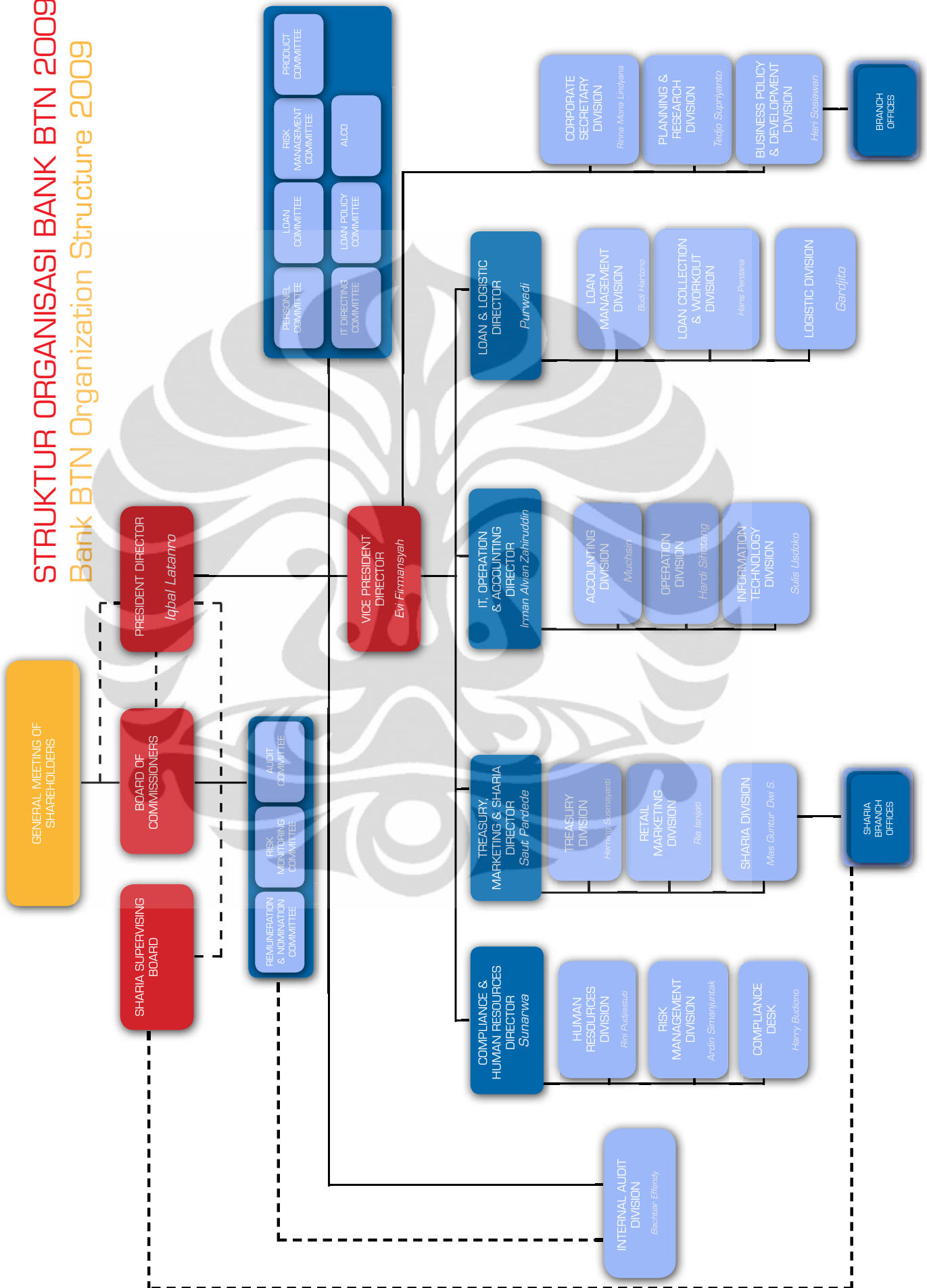


DATA PERSEROAN
Corporate Data



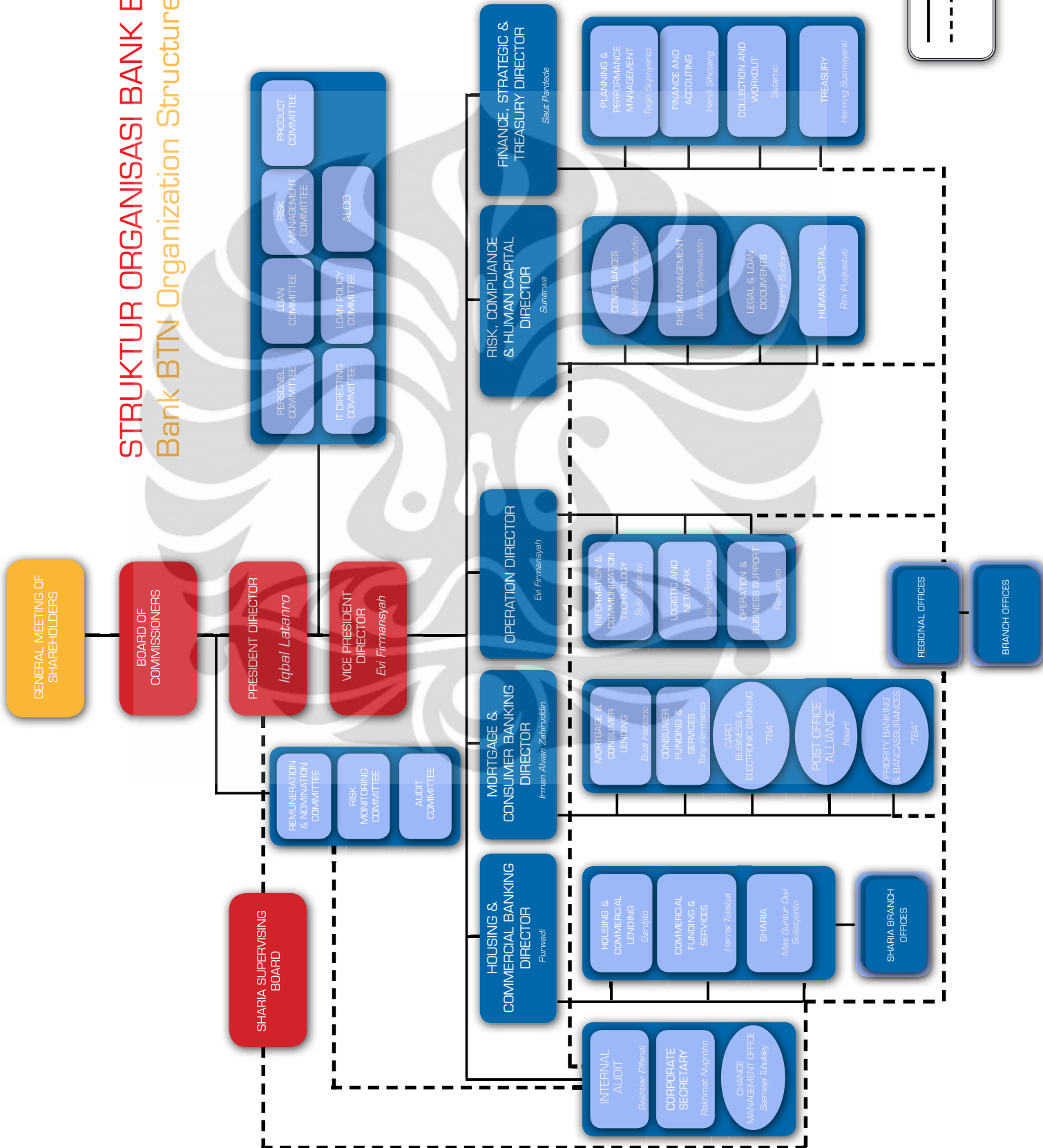
STRUKTUR ORGANISASI BANK BTN 2009

Bank BTN Organization Structure 2009



STRUKTUR ORGANISASI BANK BTN 2010

Bank BTN Organization Structure 2010

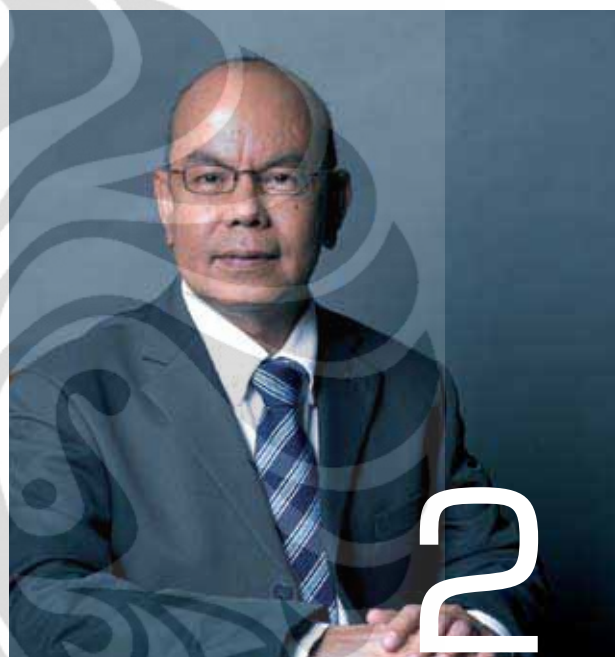


——— GARIS KOMANDO
 - - - - - GARIS KOMUNIKASI /
 PENYAMPAIAN INFORMASI

PROFIL DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners' Profile



Zaki Baridwan
Komisaris Utama (Independen)
President Commissioner
(Independent)



Mulabasa Hutabarat
Komisaris
Commissioner



Subarjo Joyosumarto
Komisaris (Independen)
Commissioner (Independent)



Gatot Mardiwasisito
Komisaris
Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Profile

1 Zaki Baridwan

Komisaris Utama (Independen)

President Commissioner (Independent)

63 tahun, menjabat sebagai Komisaris Utama Bank BTN sejak Mei 2008. Beliau merupakan Dosen di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, sejak tahun 1974, pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi (2000-2004) dan Direktur Pasca Sarjana (1999-2000) di Universitas yang sama. Sejak tahun 2000 hingga Februari 2008 beliau menjadi Komisaris Utama Bank BNI. Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi, jurusan akuntansi, dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 1973. Selanjutnya meraih gelar MSc pada tahun 1984 dan gelar DBA pada tahun 1989 masing-masing dari University of Kentucky, USA. Mengikuti sejumlah program pelatihan, diantaranya Pre-MBA dari Management Laboratories, USA, pada tahun 1982 dan Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh BSMR BI di Singapura pada tahun 2007.

Age of 63, he was assigned as President Commissioner of Bank BTN since May 2008. He was also teaching at Gajah Mada University, Yogyakarta since 1974, appointed as Dean in Faculty of Economics (2000-2004) and Director of Post-Graduate (1999-2000) there. Starting in 2000 until February 2008, he was assigned as President Commissioner of Bank BNI. He graduated from Gajah Mada University in Economics Degree in Accounting in 1973 and received his MSc degree in 1984 and DBA degree in 1989 from University of Kentucky, USA. He also participated in several training programs, such as Pre-MBA from Management Laboratories, USA, in 1982 and Risk Management Certification Training conducted by BSMR BI in Singapore in 2007.

2 Mulabasa Hutabarat

Komisaris

Commissioner

56 tahun, menjabat sebagai Komisaris Bank BTN sejak Mei 2008. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Biro Dana Pensiun Bapepam-LK Departemen Keuangan. Dari tahun 2002 hingga 2007, menjadi Komisaris di PT Pelindo I dan pernah menjadi Ketua Tim Pelaksana dari Tim Monitoring Bank Rekap. Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1982, selanjutnya menamatkan pendidikan Pasca Sarjana, dengan gelar MA dari Indiana University, USA, bidang Economics pada 1990. Mengikuti sejumlah program pelatihan, termasuk di antaranya Reg of Financial Institutions yang diselenggarakan oleh CIDA di Canada, Pens Syst & Investment yang diselenggarakan oleh ADB di Manila dan Pacap Financial Executive Program yang diselenggarakan oleh Rhode Island University, USA.

Age of 56, he was appointed as Commissioner of Bank BTN since May 2008 while also occupied the position of Chairman of Pension Funds Bureau of Bapepam-LK Departement of Finance. From 2002 to 2007 he was assigned as Commissioner of PT Pelindo I and Head of Execution Team of Recap Bank Monitoring Team. Graduated from University of Indonesia with Economics Degree in 1982, he finished his Post Graduate and received his MA degree in Economics from Indiana University, USA, in 1990. He also participated in several training programs, such as Reg of Financial Institutions conducted by CIDA in Canada, Pens Syst & Investment conducted by ADB in Manila and Pacap Financial Executive Program by Rhode Island University, USA.

3 Subarjo Joyosumarto Komisaris (Independen) Commissioner (Independent)

66 tahun, menjabat sebagai Komisaris Independen Bank BTN sejak Mei 2008. Beliau juga menjabat Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, sejak Januari 2007. Beliau pernah menjabat sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia, bertanggung jawab atas Restrukturisasi Perbankan, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan, Pengawasan Bank-Bank BUMN dan Pengembangan Perbankan Syariah. Akitivitas beliau lainnya adalah mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Jakarta. Menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi, dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pada 1968, kemudian meraih gelar Master of Art (M.A) dalam bidang international economics dari Department of Economics, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA, pada 1984, dan melanjutkan studi hingga meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D), bidang Monetary Economics, dari universitas yang sama, pada 1987.

Age of 66, he was appointed as Independent Commissioner of Bank BTN since May 2008. He assumed a position as President Director of Indonesian Banking Development Institution since January 2007. He was once appointed as Deputy Governor of Bank Indonesia, responsible for the Banking Restructuring, Development and Regulation, Monitoring of BUMN Banks, and the Development of Sharia Banking. His other activity includes teaching at several universities in Jakarta. Graduated in with Economics Degree from Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1968, he received his Master of Art (M.A) in international economics from Department of Economics, University of Colorado, Boulder, Colorado, USA, in 1984, and continued his study and received his Doctor of Philosophy (PhD) in Monetary Economics from the same university in 1987.

4 Gatot Mardiwasisito Komisaris Commissioner

56 tahun, menjabat sebagai Komisaris Bank BTN sejak Mei 2008. Beliau juga menjabat sebagai Asisten Deputy Urusan Usaha Perbankan pada Kementerian BUMN. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT. BNI Securities dan Direktur Keuangan pada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Jayabaya Jakarta, 1976, kemudian melanjutkan ke jenjang Pasca Sarjana, Universitas Indonesia Jakarta. Selanjutnya menempuh pendidikan Pasca Sarjana di Ecole Superieure Lyon, Perancis dan lulus pada 1989. Selain pendidikan formal, beliau sempat mengikuti Lokakarya Privatisasi Corporate Governance BUMN oleh Asian Development Bank/PriceWaterhouseCoopers, Finance Management oleh Institute International d'Administration Public, Paris dan Urban Finance and Taxation dari Harvard Institute for International Development, Taiwan.

Age of 56, he was appointed as Commissioner of Bank BTN since May 2008 while he was also appointed as Assistant Deputy for Banking Business Affairs in the Ministry of State Owned Enterprise (BUMN). Previously, he was assigned as Commissioner of PT. BNI Securities and Director of Finance in PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). He received his Accounting Degree from Jayabaya University Jakarta, in 1976. He then continued his Post Degree in University of Indonesia, Jakarta, and in Ecole Superieure Lyon, France, and graduated in 1989. Apart from his formal education, he also participated in the State Companies Corporate Governance Privatization Workshop held by Asian Development Bank/PriceWaterhouseCoopers, Finance Management by Institute International d'Administration Public, Paris and Urban Finance and Taxation from Harvard Institute for International Development, Taiwan.

PROFIL DIREKSI

Board of Directors' Profile



Iqbal Latanro
Direktur Utama
President Director

Evi Firmansyah
Wakil Direktur Utama
Vice President Director

Sunarwa
Direktur
Managing Director



Saut Pardede
Direktur
Managing Director



Irman A. Zahiruddin
Direktur
Managing Director



Purwadi
Direktur
Managing Director

PROFIL DIREKSI

Board of Directors' Profile

1

Iqbal Latanro

Direktur Utama

President Director

51 tahun, menjabat sebagai Direktur Utama Bank BTN sejak Desember 2007, setelah sebelumnya memegang jabatan sebagai Direktur sejak 17 Maret 2005. Meniti karir di Bank BTN sejak tahun 1984, Beliau antara lain pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Pengelolaan dan Kebijakan Kredit, Kepala Cabang Bekasi dan Kepala Cabang Makassar. Saat ini beliau aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar pembiayaan properti, Pengurus Pusat Perbanas, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Bankir Indonesia serta Penasehat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia. Menyelesaikan Sarjana Ekonomi pada 1983 dan selanjutnya meraih gelar Msi pada 1998 dari Universitas Hasanuddin Makasar. Selain pendidikan formal, beliau mengikuti Program Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh BSMR di Singapore, Course of Study in Home Financing dan Workshop on Securitization, keduanya di Wharton School, University of Pennsylvania, USA, serta aktif dalam kegiatan World Saving Bank Institute.

Age 51, he was appointed as President Director of Bank BTN in December 2007, having previously worked as Director since March 2005. His career in Bank BTN started in 1984, and he has held various positions, including Head of Loan Management and Policy Division, Head of Bekasi Branch Office and Head of Makassar Branch Office. Currently, he is a speaker at various property finance seminars, Board of Committee of Indonesian Banks Association (Perbanas), Committee of the Board of Administration of Indonesian Bankers (Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Bankir Indonesia) and Consultant of Indonesian Real Estate Companies Union (Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia). He received his Economics Degree from Hasanuddin University, Makassar, in 1983, and received his Msi from the same institution in 1998. Besides his formal education, he has also assisted the Risk Management Certification Program held by BSMR in Singapore, Course of Study in Home Financing and Workshop on Securitization, both in Wharton School, University of Pennsylvania, USA, and actively participated in World Saving Bank Institute activities.

2

Evi Firmansyah

Wakil Direktur Utama

Vice President Director

52 tahun, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Bank BTN sejak Desember 2007. Sebelumnya beliau pernah bertugas sebagai Direktur PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Direktur BNI Sekuritas pada tahun 2004, Komisaris PT Bank Bumiputera Tbk pada tahun 2003 dan Direktur Eksekutif PT Danareksa (Persero) Holding Company pada tahun 2002. Meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1983. Beliau mengikuti sejumlah program pelatihan di dalam maupun luar negeri, diantaranya PRBP program di Amerika Serikat pada tahun 2006, program Eksekutif Pengelolaan Risiko di Singapura pada tahun 2005, Towards to Functional Bond di Tokyo Stock Exchange, Jepang serta International Home Financing Program dan Workshop on Securitization di Wharton School, University of Pennsylvania, USA.

Age 52, he was appointed Vice President Director of Bank BTN in December 2007. He previously worked as Director of PT Bank Ekspor Indonesia (Persero), Director of BNI Sekuritas in 2004, Commissioner of PT Bank Bumiputera Tbk in 2003 and Executive Director of PT Danareksa (Persero) Holding Company in 2002. He received his Economics Degree from University of Indonesia in 1983, and has attended several national and international workshops, such as PRBP program in USA in 2006, Risk Management Executive Program, Singapore, in 2005; Towards to Functional Bond at Tokyo Stock Exchange, Japan, and International Home Financing Program and Workshop on Securitization in Wharton School, University of Pennsylvania in USA.

3 Sunarwa Direktur Managing Director

51 tahun, menjabat sebagai Direktur Bank BTN sejak Desember 2007, setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko pada tahun 2006, Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak tahun 2001 hingga tahun 2006, Kepala Divisi Teknologi Informasi pada tahun 2001. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1983, dan meraih gelar Magister Manajemen jurusan Keuangan pada tahun 1997 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Beliau mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko dan The 4th Jakarta Risk Management Convention "Global Financial Crisis: What Went Wrong & What We Learned" yang diselenggarakan oleh BSMR.

Age 51, he was appointed Director of Compliance and Human Resources with Bank BTN in December 2007, having previously worked as Head of Risk Management Division in 2006; Head of Human Resources Development Division from 2001 to 2006, and Head of Information Technology Division in 2001. He received his Economics Degree in 1983 and his Magister Management in Finance in 1997 from Gadjah Mada University, Yogyakarta. He attended the Risk Management Certification and the fourth Jakarta Risk Management Convention "Global Financial Crisis: What Went Wrong & What We Learned" held by BSMR.

4 Saut Pardede Direktur Managing Director

48 tahun, menjabat sebagai Direktur Bank BTN sejak Desember 2007. Mulai bekerja di Bank BTN sejak 1 Mei 1987, sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Treasury sejak tahun 2001. Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang, pada tahun 1985 dan menyelesaikan Pasca Sarjana di Management Education Institute, ADL, Cambridge, Massachusetts, USA, pada tahun 1995. Mengikuti berbagai pelatihan dan seminar diantaranya Home Financing Management yang diselenggarakan HDFC dan SMF di Lonavla, India tahun 2007, 3rd Meeting on Business Corporation in The WSBI Asia Pasific Regional Group yang diselenggarakan World Saving Banks Institute (WSBI) di Chiangmai, Thailand tahun 2008, serta 5th SEACEN Seminar on Preparations for Implementation of BASEL II diselenggarakan oleh The South East Asian Central Banks (SEACEN) dan Bank Indonesia di Bali pada Maret 2008. Beliau pernah bertindak selaku Pembicara/Panelist pada Global Microcredit Summit, Global Microcredit Campaign, di Halifax, Nova Scotia, Canada, pada bulan November 2006.

Age 48, he was appointed Director of Bank BTN in December 2007. He started his career in Bank BTN in May 1987, and has worked as Head of the Treasury Division since 2001. He received his Law Degree from Diponegoro University, Semarang, in 1985, and finished his post-graduate degree in Management Education Institute, ADL, Cambridge, Massachusetts, USA, in 1995. He attended various workshops and seminars, such as Home Financing Management held by HDFC and SMF in Lonavla, India, 2007, 3rd Meeting on Business Corporation in The WSBI Asia Pacific Regional Group held by World Saving Banks Institute (WSBI) in Chiangmai, Thailand, 2008, and 5th SEACEN Seminar on Preparations for Implementation of BASEL II held by the South East Asian Central Banks (SEACEN) and Bank Indonesia in Bali on March 2008. He also participated as a speaker/panelist in the Global Micro Credit Summit, Global Micro Credit Campaign, in Halifax, Nova Scotia, Canada, in November 2006.

PROFIL DIREKSI

Board of Directors' Profile

5 Irman A. Zahiruddin

Direktur
Managing Director

46 tahun, menjabat sebagai Direktur Bank BTN sejak Desember 2007. Sebelumnya beliau pernah bertugas sebagai Direktur Consumer Group PT Bank Permata Tbk, Direktur Eksekutif Perbanas (Perhimpunan Bank Bank Umum Nasional), Direktur di GE Capital dan PT. GE Astra Finance dan mengawali kariernya di Citibank sejak tahun 1989. Meraih gelar Master di Bidang Finance & Investment dari Golden Gate University, San Francisco, USA, pada tahun 1988 dan menyelesaikan Certified Wealth Management di Erasmus University-MM UGM Jakarta. Beliau mengikuti workshop Mastercard International di Roma pada tahun 2006, Course of Study in Home Financing yang diselenggarakan Wharton School University of Pennsylvania USA pada tahun 2008 dan IT Risk Governance: Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan IT yang diselenggarakan oleh IRPA di Jakarta pada tahun 2008. Beliau juga menjadi Ketua Consumer Banking Community Perbanas sampai saat ini.

Age 46, he was appointed Bank BTN's Director in December 2007. He started his career at Citibank in 1989, and then assumed the position of Director of Consumer Group PT Bank Permata Tbk, Executive Director of Perbanas (Indonesian Banks Association), Director of GE Capital and PT. GE Astra. He received his Master in Finance & Investment from Golden Gate University, San Francisco, USA, in 1988 and finished his Certified Wealth Management in Erasmus University-MM UGM Jakarta. He attended Mastercard International workshop in Rome in 2006, Course of Study in Housing Finance held by Wharton School University of Pennsylvania USA in 2008 and IT Risk Governance: the Implementation of Risk Management in IT Application' held by IRPA in Jakarta, 2008. He is also currently the Chairman of Perbanas Consumer Banking Community.

6 Purwadi

Direktur
Managing Director

56 tahun, menjabat sebagai Direktur Bank BTN sejak Desember 2007. Memulai karir di Bank BTN sejak tahun 1984, sebelumnya Beliau bertugas sebagai Kepala Divisi Pengelolaan Kebijakan Kredit pada tahun 2005 dan Kepala Cabang Bekasi pada tahun 2001. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1982. Mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh BSMR pada tahun 2006, ESQ Leadership Training pada tahun 2004, serta Pendidikan SESPI BI Angkatan XXXI pada tahun 2002.

Age 56, he was appointed Director of Bank BTN in December 2007. He started his career with Bank BTN in 1984, and was appointed Head of the Loan Policy Management Division in 2005 and Head of Bekasi Branch Office in 2001. He received his Economics Degree from Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1982. He assisted the Risk Management Certification held by BSMR in 2006, ESQ Leadership Training in 2004, and SESPI BI Education - class XXXI in 2002.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN Corporate Secretary's Profile



Rinna Mona Lindyana

55 tahun, menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di Bank BTN sejak April 2008. Beliau memulai karir di Bank BTN sejak tahun 1984, dan pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Tangerang pada tahun 1997, Kepala Cabang Jakarta Harmoni di tahun 1999 dan Kepala Divisi Pemasaran Ritel pada tahun 2001. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris Tim Privatisasi pada tahun 2008 – 2009. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, beliau mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar diantaranya Sertifikasi Manajemen Risiko pada 2006, berbagai pelatihan *Marketing* serta *Corporate Image* di tahun 2008.

Age 55, she was appointed Corporate Secretary for Bank BTN in April 2008. She started her career in Bank BTN in 1984, and her previous assignments include Head of Tangerang Branch Office in 1997, Head of Jakarta Harmoni Branch Office in 1999 and Head of Retail Marketing Division in 2001. She was appointed Secretary of the Privatization Team in 2008 – 2009. She obtained her Law Degree from Parahyangan Catholic University, Bandung, and assisted several workshops and seminars such as Risk Management Certification in 2006, various Marketing and Corporate Image Course in 2008.

PROFIL KEPALA DIVISI AUDIT INTERNAL Head of Internal Audit's Profile



Bakhtiar Effendi

52 tahun, menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Internal sejak April 2009. Memulai karir di Bank BTN pada tahun 1986, sebelumnya menjabat Kepala Cabang Makassar tahun 2007 – 2008 dan Wakil Kepala Divisi Operasi pada tahun 2007. Menamatkan pendidikan Sarjana di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1984 dan melanjutkan pendidikan S2 di IPWI Jakarta, beliau juga telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko pada tahun 2006 – 2007.

Age 52, he was appointed Head of Internal Audit Division in April 2009. He began his career in Bank BTN in 1986, and has worked as Head of the Makassar Branch Office in 2007 – 2008 and Deputy Division Head of Operation in 2007. He obtained his degree from Airlangga University, Surabaya in 1984, and received his post-graduate degree in IPWI Jakarta, He has also assisted the Risk Management Certification in 2006 – 2007.

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

Risk Monitoring Committee's Profile

1

Prihartono

Anggota Komite Pemantau Risiko

**As Member of Risk Monitoring
Committee**



49 tahun, mulai bertugas sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tahun 2007. Selain itu juga bertugas sebagai Head of Financial & Administration Department pada Spiritia Foundation, Jakarta. Sebelumnya berkarir di PT Austral Byna dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager of *Human Resource*. Pernah berkarir di Bakrie Investindo sebagai Manager Planning and Development, dan sebagai Tax Auditor di lingkungan Dirjen Pajak, Departemen Keuangan. Beliau juga merupakan pengajar di Universitas Trisakti program S1 dan S2 dan di Sesko TNI AL. Menamatkan pendidikan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 1988, dan meraih gelar MBA di Bidang Akuntansi dari Hull University, UK pada tahun 1992. Selain pendidikan formal, beliau sempat mengikuti beberapa pelatihan diantaranya Training of Trainers untuk *Risk Management* yang diselenggarakan oleh BRRC dan Operational Audit oleh Swine Burne University of Technology, Melbourne, Australia.

Age 49, he commenced his duties as a member of the Risk Monitoring Committee in 2007. He is also Head of Financial & Administration Department in Spiritia Foundation, Jakarta. He worked in PT Austral Byna, with his last position as Senior Manager of Human Resources. He also worked with Bakrie Investindo as Manager Planning and Development and Tax Auditor in General Director of Taxation, Finance Department. He is also a lecturer for S1 and S2 programs in Trisakti University and in Sesko TNI AL. He graduated from Indonesian State College of Accountancy (STAN) in 1988 and received his MBA in Accounting from Hull University, United Kingdom in 1992. His non-formal educational includes several training programs, such as Training for Trainers for Risk Management held by BRRC and Operational Audit by Swine Burne University of Technology, Melbourne, Australia.

2

Haryanto

Anggota Komite Pemantau Risiko

**As Member of Risk Monitoring
Committee**



58 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak 01 Agustus 2008, setelah sebelumnya menjabat sebagai anggota Komite Audit di Bank BTN pada tahun 2005. Beliau banyak berkarir di bidang perbankan, diantaranya di Bank Bapindo dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Kepala Divisi setelah sebelumnya bertugas di Bank Niaga, Yogyakarta, sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Jasa Perbankan. Pernah bertugas sebagai Senior Manager di Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang dan Sudarmadji anggota Morison International & BKR dan sebagai Senior Konsultan pada kantor konsultan manajemen PT FIMAC, Jakarta. Aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi, Beliau mendapatkan gelar Magister Manajemen (Pemasaran) dari STIE – IPWI, Jakarta, setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Fakultas Ekonomi (Akuntansi) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Age 58, he became a member of the Risk Monitoring Committee in August 2008, after working as a member of the Audit Committee with the Bank since 2005. He has a remarkable career in banking, having worked with Bank Bapindo, ending as Deputy Division Head, and Bank Niaga in Yogyakarta, as Finance and Banking Services Department Head. He also worked as Senior Manager in Doli, Bambang and Sudarmadji Public Accountant Office; was a member of Morison International & BKR; and as a Senior Consultant with the Management Consultant Office PT FIMAC, Jakarta. An active lecturer at several universities, he graduated with a Magister Management (Marketing) degree from STIE – IPWI, Jakarta, after finishing his degree in accounting from Faculty of Economics, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

PROFIL KOMITE AUDIT

Audit Committees' Profile



1

Lifransyah Gumay

Anggota Komite Audit

As Member of Audit Committee

48 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2005. Sebelumnya Beliau berkarir di PT Dharma Sangkurindo Raharja, Jakarta, sebagai Direktur Utama pada tahun 1997 dan Direktur Keuangan pada PT Artekindo Mas Group of Real Estate, Jakarta, pada tahun 1992. Selain itu banyak bertugas sebagai peneliti senior, anggota Pokja, Konsultan dan sebagai *trainer*. Beliau pernah aktif sebagai pengurus Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Sektor dan aktif sebagai anggota Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI). Beliau memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi pada tahun 1986, dan meraih gelar Magister Manajemen dari STIM-LPMI Jakarta pada tahun 2003.

Age 48, he assumed a position as a member of the Audit Committee in 2005. He was appointed President Director of PT Dharma Sangkurindo Raharja, Jakarta, in 1997 and Finance Director in PT Artekindo Mas Group of Real Estate, Jakarta, in 1992. He also assumes several duties as senior researcher, member of workgroups, consultant and trainer. He was an active member of Board of Indonesian Accountant Association – Sector Accountant Compartment Sector and actively participates as a member of Indonesian Audit Committee Association (IKAI). He received his degree in Accounting from the Faculty of Economics at the University of Indonesia in 1986, and his Magister Management from STIM-LPMI Jakarta in 2003.



2

Dewi Wulan Sari

Anggota Komite Audit

As Member of Audit Committee

32 tahun, menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2005. Selain itu juga menjadi Auditor pada KAP Doli, Bambang & Sudarmadji, dengan pengalaman pemeriksaan diantaranya perseroan PT. Harumandana Sekuritas, PT Delta Angkasa Pratama dan PT Dirgantara Indonesia Mendapatkan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi STIE YKPN, Yogyakarta, pada 2002, kemudian melanjutkan studi dan meraih gelar Pasca Sarjana pada program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada pada 2003 dan Program PPA di Universitas Indonesia, Jakarta pada 2005.

Age 32, she was assigned as a member of the Audit Committee in 2005. She also works as an auditor with Doli, Bambang and Sudarmadji Public Accounting Office, and has a wealth of experience in auditing, including with PT. Harumandana Sekuritas, PT Delta Angkasa Pratama and PT Dirgantara Indonesia. She obtained her degree from the Faculty of Economics in Accounting, STIE YKPN, Yogyakarta, in 2002, and continued to receive her post-graduate in the Magister Management Program at Gadjah Mada University in 2003, and PPA Program from University of Indonesia, Jakarta, 2005.

PROFIL KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee's Profile

Rini Pudjiastuti

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

As Member of Remuneration and Nomination Committee



50 tahun, menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia sejak Februari 2008. Mengawali karir di Bank BTN sejak tahun 1985, sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Jakarta Harmoni sejak tahun 2001. Menamatkan pendidikan Sarjana di Universitas Trisakti pada tahun 1984, beliau mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang Sumber Daya Manusia, antara lain *Balance Scorecard*, *HR Execution*, *Aligning and Strategy* serta Sertifikasi Manajemen Risiko.

Age 50, she assumed the position of Head of Human Resources Development Division in February 2008. Having started her career in Bank BTN in 1985, she was appointed Head of the Jakarta Harmoni Branch Office in 2001. She obtained her degree at Trisakti University in 1984, and assisted many educational and training programs in the field of Human Resources, such as Balance Scorecard, HR Execution, Aligning and Strategy, and Risk Management Certification.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sharia Supervisory Board's Profile

1

Ahmad Nazri Adlani



71 tahun, menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank BTN sejak 15 Februari 2005. Sebelumnya beliau aktif di bidang kemiliteran dengan pangkat terakhir Brigjen TNI (purn). Pernah menjabat Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Utusan Golongan, setelah sebelumnya menjadi Anggota MPR RI. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri & Hubungan Antar Umat Beragama di Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI). Pendidikan kemiliteran diperoleh di SUSBINMINU Departemen Hankam, SUSLAPA IF VII (Kursus lanjutan Perwira Infanteri) Bandung dan terakhir pada SUSCADOS BINTAL ABRI (Kursus Calon Dosen Pembinaan Mental ABRI) Jakarta. Beliau menamatkan studi S1 di Fakultas Syariah Universitas Al Azhar, Cairo, Mesir, dan Fakultas Ushuluddin, IAIN, Syarif Hidayatullah, serta sempat belajar di Macquary University, Sydney, Australia.

Age 71, he was assumed his role as Chairman of Bank BTN's Sharia Monitoring Board since 15 February 2005. He was active in the military, rising to Brigjen TNI (purn). He was once was Deputy Chairman of MPR RI, and previously a member of MPR RI. He is now the Chairman of Foreign Relations and Inter-religious Relations with the Indonesian Ulama's Council (MUI) . He received his military education from SUSBINMINU, Defense and Security Department, SUSLAPA IF VII (Extended Course for Infantry Officers), Bandung and finally from SUSCADOS BINTAL ABRI (ABRI Psychological Counseling Course for Lecturer Candidates) Jakarta. He completed his Degree at Faculty of Syariah of Al Azhar University, Cairo, Egypt, and Faculty of Ushuluddin, IAIN, Syarif Hidayatullah, and also once studied at Macquary University, Sydney, Australia.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sharia Supervisory Board's Profile

2

Mohamad Hidayat



42 tahun, menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BTN sejak 15 Februari 2005. Beliau aktif menjadi Dosen di beberapa Perguruan Tinggi, diantaranya Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Sahid dan IAIN Jakarta. Beliau menamatkan studi S1 di Institut Agama Islam Negeri, Jakarta, dari Fakultas Syariah dan S2 dari STIH IBLAM di bidang Hukum pada tahun 2004. Pelatihan yang pernah diikuti antara lain Pengawasan Syariah yang diselenggarakan oleh DSN-MUI pada tahun 2008, Islamic Banking di Langkawi, Malaysia, Sistem Pengawasan yang diselenggarakan oleh YPPI dan Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh Bank Muamalat.

Age 42, he was appointed as member of the Syariah Supervisory Board in 15 February 2005. He is an active lecturer at several universities, such as University of Indonesia, Trisakti University, Sahid University and IAIN Jakarta. He completed his degree at the Faculty of Sharia of National Islamic Institute, Jakarta, and his received his post-graduate degree from STIH IBLAM majoring in Law, in 2004. He has attended trainings in Syariah Monitoring, held by DSN-MUI in 2008, Islamic Banking in Langkawi, Malaysia, Monitoring System held by YPPI and Syariah Banking held by Bank Muamalat.

PRODUK DAN LAYANAN

Products and Services

PRODUK DANA

- **Tabungan Batara**
Tabungan multiguna yang aman untuk dana anda dengan berbagai kemudahan yang terus meningkat
- **Tabungan Batara Prima**
Tabungan dengan suku bunga premium dilengkapi bonus bunga bila nasabah tidak melakukan penarikan tabungan selama periode tertentu
- **Tabungan eBataraPos**
Tabungan yang diselenggarakan bekerja sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) melalui loket Kantor Pos *Online* dan semua *outlet* Bank BTN
- **Tabungan Haji Nawaitu**
Tabungan bagi calon Jemaah Haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah Haji
- **Tabungan Batara Junior**
Tabungan bagi pelajar tanpa biaya administrasi bulanan
- **Giro**
Produk simpanan dengan fleksibilitas tinggi yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek dan Bilyet Giro atau media lainnya, terdiri dari Giro Rupiah dan Giro USD
- **Deposito Berjangka**
Simpanan berjangka dalam mata uang Rupiah dan USD yang menguntungkan

FUND PRODUCT

- **Tabungan Batara**
A safe multipurpose savings product for fund with various benefits that keep on growing.
- **Tabungan Batara Prima**
A savings product with premium interest, complete with bonus interest if the customer does not make a withdrawal during certain period.
- **Tabungan eBataraPos**
A savings product made in cooperation with PT. Pos Indonesia (Persero) through Online Post Office and all Bank BTN outlets.
- **Tabungan Haji Nawaitu,**
A savings product for Hajj applicants to prepare their pilgrimage expenses.
- **Tabungan Batara Junior**
A savings product dedicated for students, with no monthly administration fee.
- **Giro**
A savings product with high flexibility: withdrawals may be done at anytime by using cheque and bill or any other media; available in Giro Rupiah and Giro USD
- **Deposito Berjangka**
A very profitable time-based saving in Rupiah and USD

PRODUK KREDIT

- **KPR Bersubsidi**
Kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembelian rumah sederhana sehat (RSH)
- **KP Sarusun Bersubsidi,**
Kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk pembelian satuan rumah susun (Sarusun)
- **KPR Griya Utama**
Kredit dengan peruntukan pembelian rumah, baik rumah baru maupun rumah lama
- **KPR Platinum**
Kredit untuk pembelian rumah dengan nilai kredit di atas Rp 150 juta
- **Kredit Pemilikan Apartemen**
Kredit untuk pembelian apartemen
- **Kredit Pemilikan Ruko**
Kredit untuk pembelian rumah toko, rumah usaha, rumah kantor dan kios
- **Kredit Griya Multi**
Kredit untuk memenuhi segala keperluan debitur, seperti renovasi rumah, modal kerja, sekolah dan kebutuhan konsumtif lainnya

LOAN PRODUCT

- **KPR Bersubsidi**
Loan dedicated for low-income communities to buy a healthy small house (RSH)
- **KP Sarusun Bersubsidi**
Loan for low-income communities to buy a modest apartment unit (Sarusun)
- **KPR Griya Utama**
Loan dedicated to purchase any house, either new or secondary
- **KPR Platinum**
Loan to purchase any house with a loan value above Rp 150 million
- **Kredit Pemilikan Apartemen**
Loan to purchase an apartment
- **Kredit Pemilikan Ruko**
Loan to purchase a shop-house, business house, home office or kiosk.
- **Kredit Griya Multi**
Loan to fulfill any needs of the debtor, such as home renovations, business capital, studies, or other consumptive needs

- **Kredit Swa Griya**
Kredit untuk membangun rumah di atas tanah milik sendiri
- **Kredit Swadana**
Kredit bagi nasabah yang memerlukan dana segera dengan jaminan tabungan atau deposito yang ditempatkan di Bank BTN
- **Real Cash**
Penyediaan dana tunai bagi nasabah untuk berbagai keperluan dan dapat ditarik sewaktu-waktu (stand by loan cash)
- **Kring Batara**
Kredit bagi karyawan dari perusahaan/instansi pengguna jasa payroll dengan agunan gaji karyawan
- **Kredit Yasa Griya**
Kredit yang diberikan kepada pengembang untuk membantu modal kerja pendanaan pembangunan proyek perumahan
- **Pinjaman Lunak Konstruksi Bapertarum**
Kredit bagi pengembang untuk membiayai pembangunan perumahan PNS dengan dana dari Bapertarum-PNS
- **Kredit Pembelian Lahan**
Kredit untuk membeli lahan guna pembangunan perumahan RSH, yang akan dijual kepada masyarakat
- **Kredit Investasi**
Kredit yang diberikan kepada PT, CV, Koperasi, Yayasan dan Perorangan dalam rangka pembiayaan investasi
- **Kredit Pendukung Perumahan**
Kredit untuk pembiayaan kebutuhan modal kerja dan atau investasi, khususnya kepada sektor industri yang terkait dengan perumahan
- **Kredit Modal Kerja Kontraktor**
Kredit untuk membantu menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan kontrak kerja
- **Kredit Usaha Rakyat**
Kredit kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang skalanya berstatus sebagai usaha mikro, kecil dan menengah guna pembiayaan usaha produktif
- **Kredit Usaha Mikro dan Kecil**
Kredit untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil terhadap dana pinjaman guna pembiayaan investasi dan modal kerja
- **Kredit Perumahan Perusahaan**
Kredit kepada perusahaan untuk penyediaan fasilitas perumahan dinas perusahaan atau fasilitas pemilikan rumah pegawai yang didasarkan pada kerjasama antara Bank BTN dengan perusahaan
- **Kredit Swa Griya**
Loan for those who want to build a house on their own land.
- **Kredit Swadana**
Loan for customers who needs fresh funds with the guarantee of savings or deposits in Bank BTN
- **Real Cash**
Providing cash to customers, for any necessity and can be withdrawn at anytime (stand-by loan)
- **Kring Batara**
Loan dedicated for employees of any company/ institution that uses the Bank's payroll facility, with their salary as collateral.
- **Kredit Yasa Griya**
Loan to help developers with their working capital in financing housing development projects.
- **Pinjaman Lunak Konstruksi Bapertarum**
Loan to help developers finance state employee housing development with funds from Bapertarum-PNS
- **Kredit Pembelian Lahan**
Loan given to purchase area for RSH housing development that will be sold to the community.
- **Kredit Investasi**
Loan to help finance investments by Limited Liability Companies, Cooperatives, Foundations and individuals.
- **Kredit Pendukung Perumahan**
Loan to finance working capital needs and/or investments, especially for housing-related industrial sector
- **Kredit Modal Kerja Kontraktor**
Loan to help complete construction lump sum contracts according to the working contract.
- **Kredit Usaha Rakyat**
Loan given to debtors in micro, small and medium businesses to increase their productivity.
- **Kredit Usaha Mikro dan Kecil**
Loan given to micro and small business to increase their access to funding for investments and working capital.
- **Kredit Perumahan Perusahaan**
Loan for companies to provide corporate housing or employee housing in cooperation with Bank BTN.

PRODUK DAN LAYANAN

Products and Services

LAYANAN

- **ATM Batara**
Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui mesin ATM seperti tarik tunai, pembayaran tagihan dan sebagainya, dapat dilakukan di semua jaringan ATM Link dan ATM Bersama
- **SMS Batara**
Layanan transaksi perbankan yang dapat diakses melalui telepon seluler, cukup dengan mengetik SMS ke 3555
- **Contact Center**
Fasilitas informasi mengenai fitur produk dan layanan serta rekening nasabah di Bank BTN dengan menghubungi 021-26533555
- **Western Union**
Layanan pengiriman uang ke seluruh dunia
- **BTN Visa Debit Card**
Fasilitas debit di seluruh jaringan Visa International
- **Batara Payroll**
Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan
- **SPP Online**
Layanan bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan delivery channel menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara online
- **Safe Deposit Box**
Sarana penyimpanan barang/surat-surat berharga yang aman dan terjaga dari risiko kebakaran, kejahatan dan bencana alam
- **Payment Point**
Fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin, seperti tagihan telepon, telepon seluler, listrik, air dan pajak
- **Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji**
Fasilitas yang memberikan kepastian keberangkatan ibadah haji dengan sistem online dari SISKOHAT
- **Kiriman Uang**
Fasilitas layanan pengiriman uang dalam bentuk Rupiah dan mata uang asing lainnya kepada pihak lain di suatu tempat, dalam dan luar negeri
- **Inkaso**
Layanan Bank BTN untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga atas inkaso tanpa dokumen di tempat lain, baik di dalam maupun luar negeri
- **Money Changer**
Layanan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia
- **Bank Garansi**
Pernyataan yang dikeluarkan Bank atas permintaan nasabah untuk menjamin risiko tertentu yang timbul apabila nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik kepada pihak yang menerima jaminan

SERVICES

- **ATM Batara**
Card service facility that provides many benefits for the customers via ATM, such as money withdrawals, billing payments and so forth, which may be conducted at all ATMs connected to the Link and ATM Bersama networks.
- **SMS Batara**
Banking transaction facility accessible through mobile phone, by simply sending an SMS to 3555
- **Contact Center**
Information on the Bank's facilities regarding featured products, services and customer accounts by dialing 021-26533555
- **Western Union**
Money transfers throughout the world
- **BTN Visa Debit Card**
Transaction facilities using International Visa network
- **Batara Payroll**
A Service given to any institution or individual in managing payroll, bonus and incentive payments, and other routine financial facility needs for employees.
- **SPP Online**
A service given to universities or schools in providing a delivery channel that can receive the education fees payment online
- **Safe Deposit Box**
A safe deposit facility for precious items; safe from fire, criminal and natural disaster risks.
- **Payment Point**
Service for customers to facilitate the payment of routine billings such as phone, mobile, electricity, water and taxes.
- **Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji**
A facility to book the hajj pilgrimage departure schedules online from SISKOHAT
- **Kiriman Uang**
Money transfer facility in rupiah and other foreign currencies for domestic and international parties.
- **Inkaso**
Bank BTN's service for billing to third parties through non-document collection in other places; domestic and international.
- **Money Changer**
Service for those who want to sell or buy any particular currencies, that have exchange notes in Bank Indonesia
- **Bank Garansi**
Statements given by the Bank upon the request of any customers to provide a guarantee for any risks that could occur if the customer cannot carry out his responsibility to the guarantee recipient.

PRODUK DANA SYARIAH

- **Tabungan Batara iB**
Tabungan yang bersifat titipan berdasarkan prinsip Wadiah
- **Tabungan Investa Batara iB**
Tabungan investasi atau berjangka berdasarkan prinsip Mudharabah
- **Tabungan Baitullah Batara iB**
Tabungan investasi atau berjangka bagi calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji
- **Deposito Batara iB**
Simpanan berjangka yang menguntungkan berdasarkan prinsip Mudharabah
- **Giro Batara iB**
Kemudahan bertransaksi dengan fleksibilitas tinggi berdasarkan prinsip Wadiah

PRODUK PEMBIAYAAN

- **KPR BTN iB**
Pembiayaan untuk pembelian rumah, rumah toko, apartemen dan jenis rumah tinggal lainnya
- **KPR Indensya BTN iB**
Pembiayaan untuk membeli tanah dan rumah dari Bank yang dibangun oleh Pengembang yang bekerja sama dengan Bank
- **KPR BTN Konversi iB**
Pembiayaan untuk konversi KPR konvensional ke pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah
- **KPR Subsidi BTN iB**
Pembiayaan untuk pengadaan perumahan dan pemukiman perumahan dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan
- **Multiguna BTN iB**
Pembiayaan untuk pembelian mobil atau motor guna dimiliki atau dipergunakan sendiri
- **Swagriya BTN iB**
Pembiayaan untuk membangun rumah di atas tanah milik sendiri
- **Modal Kerja BTN iB**
Pembiayaan untuk memenuhi modal kerja usaha nasabah
- **Yasa Griya BTN iB**
Pembiayaan modal kerja untuk pembangunan proyek perumahan kepada Pengembang
- **Pembiayaan Investa BTN iB**
Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pembiayaan investasi
- **Gadai BTN iB**
Pinjaman berdasarkan prinsip Qardh dengan penyerahan Marhun (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah

SYARIAH FUND PRODUCT

- **Tabungan Batara iB**
A savings deposit account based on Wadiah principles
- **Tabungan Investa Batara iB**
Investment- or time-based savings account based on Mudharabah principles
- **Tabungan Baitullah Batara iB**
Investment- or time-based savings account for haji applicants to prepare their pilgrimage expenses
- **Deposito Batara iB**
Profitable time-based savings based on Mudharabah principles
- **Giro Batara iB**
The benefits of high flexibility transactions based on Wadiah principles

FINANCING PRODUCT

- **KPR BTN iB**
To finance housing, shop-house, apartment and other housing purchases.
- **KPR Indensya BTN iB**
To finance land and housing purchases from the Bank, built by a developer in cooperation with the Bank.
- **KPR BTN Konversi iB**
To shift conventional mortgages to financing based on Syariah principles.
- **KPR Subsidi BTN iB**
To finance housing and housing complexes with the support of a housing subsidy.
- **Multiguna BTN iB**
To finance the purchase of car or motorbike for personal purposes.
- **Swagriya BTN iB**
To finance housing construction on self-owned land.
- **Modal Kerja BTN iB**
To finance the customer's business working capital.
- **Yasa Griya BTN iB**
Working capital for the development of housing project.
- **Pembiayaan Investa BTN iB**
Financing provided to the customer through investment.
- **Gadai BTN iB**
A loan based on Qardh principles by giving a Marhun (mortgage) to guarantee the repayment of some or all of the customer's debt.

KANTOR CABANG

Branch Offices

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
KANTOR PUSAT						
Jakarta	KP	Menara Bank BTN II Jl. Gajah Mada No. 01	Jakarta Pusat	10130	(021) 6336789 6332666	(021) 6336737
CABANG JAKARTA KUNINGAN						
Jakarta Kuningan	KC	Wisma Budi Lt. 1 & 2 Jl. HR. Rasuna Said kav. C-6	Jakarta Selatan	12940	(021) 52964652	(021) 52964974
Arteri Pondok Indah	KCP	Komplek Ruko Jl. Iskandar Muda No.7F Arteri Pondok Indah	Jakarta Selatan	12441	(021) 7210024 720 2521	(021) 7210023
Cakung	KCP	Komplek Ruko Pulogadung Trade Centre Blok B-1 Kav.23	Jakarta Timur	13920	(021) 46800187-88	(021) 46801100
Cinere	KCP	Komplek Pertokoan Cinere Ruko A Jl. Cinere Raya-Depok	Depok	16514	(021) 7544677, 7544727	(021) 7544715
Cikini	KCP	Jl. Raden Saleh Raya No. 12 B	Jakarta Pusat	10430	(021) 31923053 3928747	(021) 31923061
Cilandak	KCP	Jl. Raya Cilandak KKO No.12 Cilandak	Jakarta Selatan	12560	(021) 78836860 78836810	(021) 7823902
Dewi Sartika	KCP	Jl. Dewi Sartika No.231 C kec. Kramat Jati	Jakarta Timur	13640	(021)8008016,	(021) 8007463
Fatmawati	KCP	Jl. RS Fatmawati No. 12 Cilandak	Jakarta Selatan	12430	(021) 7500136 75100135	(021) 7500137
Jatinegara	KCP	Jl. Jatinegara Timur No.91 Balimester	Jakarta Timur	13530	(021) 2801314, 8518690	(021) 8560520
Mampang	KCP	Jl. Mampang Prapatan Raya No.42	Jakarta Selatan	12790	(021) 7944868 7941374	(021) 7985619
Mayestik	KCP	Jl. Kiai Maja No. 45 Kel Kramat Pela Kec. Kebayoran Baru	Jakarta Selatan	12130	(021) 7203328 7208581	(021) 7262524
Panglima Polim	KCP	Jl. Raya Panglima Polim No. 76 Keb. Baru	Jakarta Selatan	12170	(021) 2702647-49	(021) 2702764
Pasar Minggu	KCP	Jl. Raya Pasar Minggu Km 18 No. 8 Pejaten Barat	Jakarta Selatan	12510	(021) 7902664, 7902947	(021) 7902663
Pasar Rebo	KCP	Ruko Mutiara Faza RB 4, Jl. Raya Condet No. 27 Pasar Rebo	Jakarta Timur	13570	(021) 87784014/15	(021) 87784016
Rawamangun	KCP	Jl. Paus No. 89 Rawamangun	Jakarta Timur	13220	(021) 4898856-57	(021) 4753076
Tanah Abang	KCP	Jl. KH Mas Mansyur 86 Tanah Abang	Jakarta Pusat	10240	(021) 31906685 31905230	(021) 390-0114
Tebet	KCP	Jl. Tebet Barat Dalam Raya No. 114 S , Tebet	Jakarta Selatan	12820	(021) 8297776, 8297768	(021)8307776
CABANG JAKARTA HARMONI						
Jakarta Harmoni	KC	Menara bank BTN, Lt1 &2, Jl. Gajah mada no 1.	Jakarta Pusat	10130	(021)6336789 6336809, 6342546	(021) 63865983 6332676, 6333021
Cempaka Mas	KCP	Kompleks Ruko Grosir Cempaka Mas Mas Blok A, No. 26, Jl. Letjen Suprpto, Cempaka Putih	Jakarta Pusat	10510	(021) 42877134 , 42877285	(021) 42886978
Duren Sawit	KCP	Jl. Buaran III No. 11, Duren Sawit	Jakarta Timur	13470	(021) 8604278 , 8604378	(021) 86612867
ITC Mangga Dua	KCP	ITC Mangga Dua Lt.1 Blok D No. 52 A-B, Jl. Mangga Dua Raya	Jakarta Utara	14430	(021) 62300772 – 73	(021) 62202699
Kalimalang	KCP	Jl. Tarum Barat A 2/3A	Jakarta Timur	13450	(021) 86903822	(021) 8640666

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG JAKARTA HARMONI						
Kebayoran Lama	KCP	Jl. Kebayoran Lama No. 17B Kebayoran Lama	Jakarta Selatan	12220	(021) 7254813/14	(021) 7207866
Kelapa Gading	KCP	Jl. Boulevard Raya Blok TA II No. 18 Kelapa Gading	Jakarta Utara	14240	(021) 45224419 4514281	(021) 4514282
Kemanggisian	KCP	Ruko Komplek Budhi Square, Jl. Budi Raya No. 7H. Kemanggisian Palmerah	Jakarta Barat	11620	(021) 4524419	(021) 53652993
Mega Glodok Kemayoran	KCP	Komplek Mega Glodok Kemayoran Blok E-9, Jl. Angkasa Kav. B.6	Jakarta Pusat	10630	(021) 26646747 26646748	(021) 26646843
Kembangan	KCP	Komp. Ruko Puri Indah Blok I No. 10, Kembangan	Jakarta Barat	11630	(021) 5821973, 5809054	(021) 5828991
Klender	KCP	Jl. I Gusti Ngurah Rai No. 44 D-F Klender	Jakarta Timur	13470	021 8606658, 8606555, 86604384	(021)8611484
Palmerah	KCP	Jl. Palmerah Barat No. 39 C	Jakarta Barat	10270	(021) 5364276, 5355820	(021)5364277
Pantai Indah Kapuk	KCP	Taman Resor Mediterania Jl. Pantai Indah Kapuk Utara II Blok K No. 8 C	Jakarta Utara	14430	(021) 55964491, 55966281	(021) 5882090
Pluit	KCP	Jl. Pluit Kencana Raya No. 61	Jakarta Utara	10220	(021) 66601532 66601533	(021) 66601531
Roxy Mas	KCP	Komplek ITC Roxy Mas Blok D-2 No. 2 Jl. KH. Hasyim Ashari	Jakarta Utara	10130	(021) 63858460, 63858641, 63858637	(021) 6320171
Sudirman	KCP	Wisma Nugra Santana, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8	Jakarta Pusat	10220	(021) 5700127-28	(021) 5700136
Sunter	KCP	Rukan Puri Mutiara Blok A No. 96 Jl. Griya Utama Sunter Agung, Sunter	Jakarta Utara	14350	(021) 65310631-32 , 65310629	(021) 65310630
Tanjung Duren	KCP	Jl. Tanjung Duren Raya No. 54-A Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan	Jakarta Barat	11470	(021) 56940388-89	(021) 56968987 , 5601685
Taman Palem	KCP	Komplek Perum Taman Palem Lestari, Blok. D.1 No.15 - Cengkareng	Jakarta Barat	11730	(021) 55950463, 55956861	(021) 55956873
CABANG JAKARTA CAWANG						
Jakarta Cawang	KC	Patria Park Apartment & Office RK 01- 02 Jl. DI Panjaitan Kav. 5-7	Jakarta Timur	13410	(021) 85918467, 85918469	(021) 85918470
CABANG AMBON						
Ambon	KC	Jl. Diponegoro 75 B	Ambon	97126	(0911) 355882, 354471	(0911) 348551, 348559
CABANG BANDA ACEH						
Banda Aceh	KC	Jl. Teuku Umar No. 163 - 169	Banda Aceh	23243	(0651) 41178 , 42167	(0651) 41215
Lhokseumawe	KCP	Jl. Merdeka No. 2	Lhokseumawe	24300	(0645) 40305	(0645) 40745
CABANG BALIKPAPAN						
Balikpapan	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 141	Balikpapan	76113	(0511) 441646 , 420897, 420333	(0511) 4366492 , 3363964
Karang Jati	KCP	Jl. Jend. A. Yani No. 16, Karang Jawa	Balikpapan	76123	(0542) 426562, 420440	(0542) 426562
CABANG BANDAR LAMPUNG						
Bandar Lampung	KC	Jl. Wolter Monginsidi No. 80-88	Bandar Lampung	35215	(0721) 489253-55, 484778, 483256	(0721) 489252
Way Halim	KCP	Jl. Ki Maja Blok D No. 19, Way Halim	Bandar Lampung	35141	(0721) 788532 , 703466	(0721) 705481

KANTOR CABANG

Branch Offices

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG BANJARMASIN						
Banjarmasin	KC	Jl. RE Martadinata No. 4	Banjarmasin	70111	(0511) 4368133, 4366669-70	(0511) 4366492, 3363964
Banjar Baru	KCP	Jl. Brigjen. H. Hasan Basri C1 Kel. Pangeran	Banjarbaru	70124	(0511) 3307529	(0511) 4774116
Batu Licin	KCP	Jl. Ahmad Yani Km 34,800 Rt 01 Rw 01 Banjarbaru Kota	Tanah Bumbu	70711	(0511) 4781257, 4774171	(0511) 4774116
Kayutangi	KCP	Jl. Raya Kampung Baru No. 12 Batulicin, Kab. Tanah Bumbu	Banjarmasin	72171	(0511) 3307529	(0518) 71094
CABANG BANDUNG						
Bandung	KC	Jl. Jawa No. 7	Bandung	40117	(022) 4232112, 4239412, 4241034	(022) 4204562, 4233094
Tamansari	KCP	Jl. Taman Sari No. 16	Bandung	40116	(022) 4241801	(022) 421-5210
Sarjadi	KCP	Setrasari Mall B-1 No : 6, Jl. Dr. Sutami	Bandung	40152	(022) 2013160	(022) 2013160
Ujung Berung	KCP	Jl. Raya Ujung Berung 111	Bandung	40619	(022) 7832012, 783013	(022) 7831921
Garut	KCP	Jl. Jend A. Yani No. 5	Bandung	44188	(0262) 241145	(0262) 232364
Antapani	KCP	Jl. Purwakarta No. 142	Bandung	40291	(022) 7200720	(022) 7100382
Sumber Sari	KCP	Jl. Sukarno Hatta No. 101 B	Bandung	40223	(022) 6121129-30	(022) 6121128
Buah Batu	KCP	Jl. Buah Batu No. 194	Bandung	40264	(022) 7323184, 7304996	(022) 7322185
Margahayu Raya	KCP	Komp. Metro Kav. 9-10 Jl. Sukarno Hatta No. 624	Bandung	40286	(022) 7562653, 7505981	(022) 7563476
Kopo Mas	KCP	Komp. Kopo Mas Regency Blok 8 N	Bandung	40277	(022) 5424708, 5416933	(022) 5424707
Rancaekek	KCP	Jl. Raya Rancaekek No. 199 , Rancaekek	Bandung	40394	(022) 7792557, 7793103	(022) 7796973
Cijerah	KCP	Jl. Raya Cijerah No. 221	Bandung	40534	(022) 6027922	(022) 6027922
Kopo	KCP	Jl. K. H. Wahid Hasyim No. 457	Bandung	40223	(022) 5414802	(022) 5401625
Setiabudi	KCP	Jl. Setiabudi No. 171 D	Bandung	40141	(022) 2031449	(022) 2041783
UNPAD	KCP	Gedung Pasca Sarjana UNPAD Jl. Dipati Ukur No. 35	Bandung	40132	(022) 2533827	(022) 2500947
Jatinangor	KCP	Jl. Raya Jatinangor No.194	Sumedang	45363	(022) 7782137	(022) 7792151
CABANG BANGKALAN						
Bangkalan	KC	Jl. Teuku Umar No. 16	Bangkalan	69116	(031) 3098929, 3098830-31	(031) 3098834
Sumenep	KCP	Jl. Trunojoyo No. 140	Sumenep	69417	(0328) 662777 , 663219	(0328) 669000
CABANG BATAM						
Batam	KC	Komp. Regency Park Lot 29 Jl. Sriwijaya		29432	(0778) 456806	(0778) 457262
Batuaji	KCP	Komplek Ruko Aviari Blok E.2 No. 10 , Batuaji	Batam	29432	(0778) 361580	(0778) 361580
Batam Center	KCP	Komplek Pertokoan Hup Seng Blok A No.17 Jl. Engku Putri	Batam	29432	(0778) 467753	(0778) 467758
Penuin	KCP	Komplek Ruko Center Penuin Blok. F No.12	Batam	29432	(0778) 421990	(0778) 425962

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG BATAM						
Sekupang	KCP	Komp. Pertokoan Ciptapuri Blok DD No.1, Jl. Gajah Mada, Tiban Selatan, Sekupang	Batam	29425	(0778) 322440	(0778) 322430
Tanjung Uncang	KCP	Pertokoan Fanindo Blok Blok D 10 & 10 A, Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji	Batam	29422	(0778) 3581274, 3581280	(0778) 3581280
CABANG BEKASI						
Bekasi	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 19	Bekasi	17143	(021) 8840649	(021) 8849519
Bantar Gerbang	KCP	Jl. Raya Narogong KM 11 No. 99, Bantar Gebang	Bekasi	17310	(021) 82690717	(021) 82610288
Bekasi Jaya Indah	KCP	Komp. Danita BJI, Jl. H. Agus Salim Blok AI No. 1	Bekasi Timur	17112	(021) 8815134	(021) 8808280
Bintara	KCP	Ruko Bintara Estate, Jl. Bintara Raya No. 3, Bintara	Bekasi	17000	(021) 8890973	(021) 88962974
Cibitung	KCP	Jl. Teuku Umar No. 3, Kampung Utah Wanasari Cibitung	Bekasi	17520	(021) 88321060	(021) 88338151
Duta Plaza	KCP	Ruko Duta Plaza Blok B II No. 18, Jl. Raya Kalimalang	Bekasi	17145	(021) 88950878-79	(021) 8840416
Pondok Gede	KCP	Jl. Jatiwaringin No. 14 Pondok Gede	Bekasi	17411	(021) 84995481, 84995483	(021) 8464541
Pondok Hijau	KCP	Komp. Pondok Hijau Permai, Jl. Pondok Hijau Raya Kav. 7	Bekasi Timur	17115	(021) 8202152, 8221208	(021) 8221214
Pondok Ungu	KCP	Ruko Sentra Niaga Boulevard, Harapan Indah Blok A No. 1, Medan Satria	Bekasi	17132	(021) 88875391, 88880118	(021) 88875393
Rawalumbu	KCP	Perumnas Rawalumbu, Jl. Trisatya No. 2, Rawa Lumbu	Bekasi	17116	(021) 8209409	(021) 8209407
Setia Mekar	KCP	Perumnas III Setia Mekar Jl. Pulau Sumatera Raya Kav. 7	Bekasi	17111	(021) 8828026	(021) 8828025
Harapan Baru	KCP	Ruko Harapan Baru Blok B 1 No. 3, Harapan Baru	Bekasi Barat	17133	(021) 8840070	(021) 8840289
Jati Asih	KCP	Jl. Jati Mekar No. 184 Jati Asih	Bekasi	17422	(021) 84994806	(021) 8477988
Mustika Jaya	KCP	Ruko Pasadena Mutiara Gading Timur Blok R 3 No. 1-2, Mustika Jaya	Bekasi	17158	(021) 29081175-76	(021) 29081174
Tambun	KCP	Jl. Sultan Hasanudin No. 59 Tambun	Bekasi	17510	(021) 8824433	(021) 8824888
Teluk Pucung	KCP	Pertokoan Wisma Asri Blok M/11-12 Jl. Raya Perjuangan	Bekasi Utara	17121	(021) 88875158	((021) 88875159
CABANG BENGKULU						
Bengkulu	KC	Jl. S. Paman No. 32	Bengkulu	38223	(0736) 20875, 342974	(0736) 20874
CABANG BOGOR						
Bogor	KC	Jl. Pengadilan No. 13-15	Bogor	16121	(0251) 8311700	(0251) 8323007, 8351432, 8352457
Cianjur	KCP	Jl. Siti Jenab No. 51	Cianjur	43211	(0263) 266310	(0263) 266309
Cibinong	KCP	Central Ruko Cibinong Blok A No. 7/8 Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 63	Bogor	16910	(021) 8758564-65	(021) 8759543
Cileungsi	KCP	Jl. Raya Narogong No. 53 Cileungsi	Bogor	16820	(021) 8236080-81	(021) 8236082

KANTOR CABANG

Branch Offices

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG BOGOR						
Cimanggu	KCP	Jl. Sholeh Iskandar Ruko 24 No. 2G Cimanggu	Bogor	16164	(0251) 8387942	(0251) 8349263
Citeureup	KCP	Jl. Mayor Oking Jayaatmaja No. 2 Blok 2 Citeureup	Bogor	16810	(021) 87903132, 87940239	(021) 87942071
Dramaga	KCP	Komp. Ruko At-Taufik No. A Jl. Raya Dramaga Km 26	Bogor	16620	(0251) 8420704 , 8628621	(0251) 8628622
Sukabumi	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 75E	Sukabumi	43121	(0266) 223446	(0266) 223447
Tajur	KCP	Jl. Raya Tajur No. 67 Ruko No. 6 Tajur	Bogor	16720	(0251) 8391240	(0251) 8391241
Warung Jambu	KCP	Jl. Pajajaran Ruko No. 165 Kel. Bantarjati	Bogor	16153	(0251) 8322704	(0251) 8333900
CABANG BUMI SERPONG DAMAI						
Bumi Serpong Damai	KC	Ruko BSD Sektor VII E Blok RK No. 8 Jl. Raya Serpong	Tangerang	15310	(021) 5372236-37	(021) 5372238
CABANG CIBUBUR						
Cibubur	KC	Ruko Madison Blok B1 No. 6-8 Jl. Raya Transyogi Km 3 Cibubur Time Square	Cibubur	17435	(021) 84300071-75	(021) 84300070, 84599607
CABANG CIKARANG						
Cikarang	KC	Ruko Cikarang Commercial Center, Blok B1 No. 3-5, Jl. Raya Cikarang- Cibarusah Km 40	Bekasi	17550	(021) 8936275, 89830014, 89841558	(021) 8936418
Pasar Central	KCP	Pasar Central Lippo Cikarang Blok ESA No. 17 Jl. Raya Cikarang Cibarusah, Cikarang Selatan	Bekasi	17550	(021) 89920626, 89920642, 89920678	(021) 89920704
RE Martadinata	KCP	Jl. RE Martadinata No. 03 Cikarang Utara	Bekasi	17550	(021) 89109718, 89109652, 89109675	(021) 89108428
CABANG CILEGON						
Cilegon	KC	Jl. Tirtayasa Kompleks Bonakarta	Cilegon	42411	(0254) 391766, 392681, 393479	(0254) 393480
Serang	KCP	Jl. Mayor Syafei No. 14	Serang	42115	(0254) 205403, 211422	(0254) 211421
Serang Timur	KCP	Jl. Raya Jakarta Km 76 Kerajinan	Serang	42184	(0254) 284443, 284441, 283361	(0254) 283629
CABANG CIMAH						
Cimahi	KC	Jl. Raya Timur Cimahi 475	Bandung	40524	(022) 6651644-45	(022) 6652586
CABANG CIPUTAT						
Ciputat	KC	Jl. Dewi Sartika No. 21	Ciputat	15411	(021) 7445145	(021) 7490968, 7402731
Bintaro	KCP	Ruko Bintaro Sektor 3A Blok A No. 11 Bintaro	Jakarta	15225	(021) 7375789	(021) 7375889
Bintaro Trade Center	KCP	Pusat Niaga Bintaro Trade Center Blok A1 No. 2 Sektor VII Pondok Aren	Tangerang	15224	(021) 7452003	(021) 7453982
Cirendeui	KCP	Jl. Cirendeui Raya No. 66 C Desa Pisangan Kecamatan Ciputat	Tangerang	15419	(021) 74708010, 74708003	(021) 742628
Pamulang	KCP	Komp. Ruko Pamulang Permai Blok SH 10 No. 6-7 Pamulang	Tangerang	15417	(021) 7414308, 7423065	(021) 7414307

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG CIPUTAT						
Universitas Terbuka	KCP	Kampus Universitas Terbuka, Jl. Cabe Raya Pondok Cabe	Tangerang	15418	(021) 7490941	(021) 7490941
Ciledug	KCP	Jl. HOS Cokroaminoto No. 59B Ciledug	Tangerang	15157	(021) 7303846	(021) 7303844
CABANG CIREBON						
Cirebon	KC	Jl. Siliwangi No. 16	Cirebon	45121	(0231) 209143, 209153	(0231) 209777
Indramayu	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 123	Indramayu	45211	(0234) 275583-84	(0234) 277148
Kuningan	KCP	Jl. Siliwangi No. 6-7	Kuningan	45511	(0232) 817820	(0232) 817820
Rajawali	KCP	Jl. Rajawali Raya No. G 2-3 Perumnas	Cirebon	45141	(0231) 235562	(0231) 222241
CABANG DENPASAR						
Denpasar	KC	Jl. Dewi Sartika No. 2	Denpasar	80114	(0361) 243811	(0361) 243815
Gunung Agung	KCP	Jl. Gunung Agung No. 146	Denpasar	80119	(0361) 412157	(0361) 412401
Kuta	KCP	Jl. Kalianget No. 99 komp Pertokoan Kuta Berlian Kav 12	Denpasar	80361	(0361) 763021	(0361) 763543
Singaraja	KCP	Jl. A. Yani No. 94	Singaraja	81116	(0362) 23091, 21856	(0362) 21851
Surapati	KCP	Jl. Surapati No. 13	Denpasar	80232	(0361) 234840	(0361) 263474
CABANG DEPOK						
Depok	KC	Jl. Margonda Raya No. 186	Depok	16423	(021) 7751236	(021) 7772927
Beji	KCP	Jl. Nusantara Raya No. 20 A	Depok	16421	(021) 7762020	(021) 7762020
Bojong Gede	KCP	Jl. Raya Bojong Gede Gelonggong Bojong Gede	Depok	16923	(021) 87987608	(021) 87983486
Cimanggis	KCP	Jl. Raya Bogor Km 30 No. 1-2 Mekarsari	Cimanggis	16952	(021) 87703401	(021) 87702023
Depok Timur	KCP	Jl. Proklamasi Blok A 2-3	Depok	16417	(021) 7714746, 77826970	(021) 7714780
Lenteng Agung	KCP	Jl. Raya Lenteng Agung No. 39 Jagakarsa	Jakarta Selatan	12610	(021) 7871047	(021) 7870528
Sawangan	KCP	Komp. Ruko Rivaria Blok A2 No. 2 Bedahan-Sawangan	Depok	16511	(0251) 616743	(0251) 613785
Citayam	KCP	Ruko Citayam Permai No. 32 Pasar Rebo Citayam	Depok	16438	(021) 87986788	(021) 87986934
CABANG GORONTALO						
Gorontalo	KC	Jl. Budi Utomo No. 20 Kel. Limba U1 Kota Selatan	Gorontalo	96155	(0435) 829481, 830490	(0435) 826707, 823943
CABANG GRESIK						
Gresik	KC	Komp. Pertokoan Multi Sarana Plaza Blok C 1 No. 1-3 Jl. Gubernur Suryo	Gresik	61118	(031) 3973455	(031) 3973456
Bojonegoro	KCP	Komp. Pertokoan Kereta Api Indonesia Kav. 13-15, Jl. Gajah Mada	Bojonegoro	62115	(0353) 893171	(0353) 893162
Tuban	KCP	Jl. Basuki Rachmat No. 67A	Tuban	61137	(0356) 321984	(0356) 334152

KANTOR CABANG

Branch Offices

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG JAMBI						
Jambi	KC	Jl. Sultan Thaha No. 119	Jambi	36113	(0741) 34087, 33058	(0741) 26220
Jelutung	KCP	Jl. Sumatra No. 1 Kel. Handil Jaya	Jambi	36137	(0741) 41403	(0741) 444351
CABANG JAYAPURA						
Jayapura	KC	Jl. Koti No. 22	Jayapura	99111	(0967) 537970-71	(0967) 533373
Waena	KCP	Jl. Raya Sentani No. 54 Waena	Jayapura	99358	(0967) 571557	(0967) 571282
CABANG JEMBER						
Jember	KC	Jl. Ahmad Yani No. 5	Jember	68118	(0331) 484611	(0331) 484617
Banyuwangi	KCP	Jl. PB Sudirman No. 49	Banyuwangi	68415	(0333) 415690	(0333) 415676
CABANG KARAWACI						
Karawaci	KC	Perumnas Karawaci I Jl. Cendrawasih No. 1	Tangerang	15114	(021) 5517849-50, 5511420	(021) 5524367
CABANG KARAWANG						
Karawang	KC	Jl. Surotokunto No. 55	Karawang	41313	(0267) 412033, 412269, 8452818	(0267) 412247
Cikampek	KCP	Jl. A. Yani No. 12 A Ruko Timbangan	Cikampek	41373	(0264) 8387517	(0264) 313140
CABANG KEBON JERUK						
Kebon Jeruk	KC	Jl. Panjang No. 8 B-C Kebon Jeruk	Jakarta Barat	11560	(021) 53666345	(021) 53666344
Daan Mogot Baru	KCP	Jl. Tampak Siring Raya Blok KJH No. 1	Jakarta Barat	11840	(021) 54370832	(021) 54370832
CABANG KEDIRI						
Kediri	KC	Jl. Diponegoro No. 22-24	Kediri	64121	(0354) 691260-63	(0354) 691265
Tulungagung	KCP	Ruko Sudirman Trade Center Blok A.5 Jl. Sultan Hasanudin	Tulungagung	66224	(0355) 329509	(0355) 323142
CABANG KELAPA GADING SQUARE						
Kelapa Gading Square	KCP	Jl. Raya Boulevard Barat Blok D No. 23 Kelapa Gading Square, Kelapa Gading	Jakarta Utara	14240	(021) 45866883-4, 45867201	(021) 45866885, 45867207
Kramat Jaya	KCP	Jl. Kramat Jaya No. 33	Jakarta	14270	(021) 43903128	(021) 43934430
CABANG KENDARI						
Kendari	KC	Jl. Sam Ratulangi No. 75 A-B	Kendari	93111	(0401) 322101, 327512	(0401) 322502
CABANG KUPANG						
Kupang	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 87	Kupang	85119	(0380) 831004, 831727, 830890	(0380) 833741
CABANG MADIUN						
Madiun	KC	Jl. H.A. Salim No. 90	Madiun	63129	(0351) 464650, 459034, 451460	(0351) 463510

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG MADIUN						
Ponorogo	KC	Jl. Sukarno Hatta No. 299	Ponorogo	63411	(0352) 463675-6, 436670	(0352) 463678
CABANG MAKASSAR						
Makassar	KC	Jl. Kajaolalido No. 4	Makassar	90111	(0411) 316016, 316011	(0411) 330539, 330544
Alauddin	KC	Jl. Alauddin No. 206	Makassar	92111	(0411) 882474	(0411) 882475
Antang	KC	Jl. Antang Raya No. 4	Makassar	90234	(0411) 495088	(0411) 492976
Mamuju	KCP	Jl. KS Tubun No. 27	Mamuju	91511	(0426) 22389	(0426) 21420
Maros	KCP	Jl. Jend. Sudirman Ruko Anjali No. 9-10	Makassar	92111	(0411) 373678	(0411) 882475
Palopo	KCP	Jl. Mangga No. 122 Komp. Pasar Sentral	Palopo	91921	(0471) 24000	(0471) 325750
Panakukang	KCP	Jl. Hertasing Blok I No. 2	Makassar	90222	(0411) 868831, 868833	(0411) 845125
Pare-pare	KCP	Jl. Andi Isa No. 01	Pare-pare	91114	(0421) 21132, 27707	(0421) 27722
RSUP Wahidin	KCP	Komp. RSUP Dr Wahidin Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10	Makassar	90245	(0411) 585388	(0411) 585388
Tamalanrea	KCP	Komp. Bumi Tamalanrea Permai Jl. Tamalanrea Raya No. 28-30	Makassar	90245	(0411) 4773741	(0411) -584307
Sunguminasa	KCP	Jl. KH Wahid Hasyim No. 236 A	Makassar	92111	(0411) 869962	(0411) 869963
Watampone	KCP	Jl. Ahmad Yani No. 27	Makassar	92111	(0481) 24444	(0481) 26777
CABANG MALANG						
Malang	KC	Jl. Ade Irma Suryani 2-4	Malang	65119	(0341) 323956	(0341) 323959, 350050
Jaksa Agung Suprpto	KCP	Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 54	Malang	65111	(0341) 336232, 336233	(0341) 336231
Pasuruan	KCP	Jl. Panglima Sudirman No. 14 A	Pasuruan	67115	(0343) 411922, 411933, 411955	(0343) 411717
Sawojajar	KCP	Perum Perumnas Sawojajar Jl. Danau Toba No. 1 Sawojajar	Malang	65139	(0341) 711511, 710970-1	(0341) 716675
UIN Malang	KCP	Universitas Islam Negeri Malang Jl. Gajayana No. 50	Malang	65145	(0341) 557567, 557565	(0341) 557566
Probolinggo	KCP	Jl. Soekarno Hatta Ruko Blok D-E Kel. Kademangan	Probolinggo	67214	(0335) 434377	((0335) 434388
UNIBRAW	KCP	Universitas Brawijaya Jl. Veteran No. 16	Malang	65145	(0341) 583989, 5859689	(0341) 585969
CABANG MANADO						
Manado	KC	Jl. Wolter Monginsidi No. 56	Manado	95115	(0431) 855504-05, 868095	(0431) 868013
Bitung	KCP	Jl. Sam Ratulangi No. 3 Pakadoodan	Bitung	95521	(0438) 21734, 35545-46	(0438) 36546

KANTOR CABANG

Branch Offices

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG MATARAM						
Mataram	KC	Jl. Pejangik No. 99-101 Cakranegara	Mataram	83121	(0370) 631186, 632234	(0370) 634542
Airlangga	KCP	Jl. Airlangga No. 1 B Gomong	Mataram	83126	(0370) 649023	(0370) 637553
CABANG MEDAN						
Medan	KC	Jl. Pemuda No. 10 A	Medan	20151	(061) 4149777	(061) 4153203, 4538112
Helvetia	KCP	Jl. Mawar Raya No. 143 A Perumnas Helvetia	Medan	20124	(061) 8460800	(061) 8460777
Iskandar Muda	KCP	Jl. Iskandar Muda No. 39 F	Medan	20154	(061) 4149905	(061) 4513260
Johor	KCP	Jl. AH Nasution No. 36B	Medan	20146	(061) 7880968	(061) 7852780
M. Yamin	KCP	Jl. M Yamin SH No. 398-A/564	Medan	20233	(061) 4156739	(061) 4157601
Pematang Siantar	KCP	Komp. Ruko SBC No. 14 Jl. Sutomo	Pematang Siantar	21100	(0622) 23116	(0622) 24020
Pusat Pasar	KCP	Jl. Pusat Pasar No. 357/3A	Medan	20212	(061) 4550945	(061) 4555257
Setia Budi	KCP	Jl. Setiabudi No. 244	Medan	20132	(061) 8221443	(061) 8221469
Simalingkar	KCP	Jl. Karet Raya No. 59-61 Perumnas Simalingkar	Medan	20141	(061) 8360004	(061) 8360020
Tebing Tinggi	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 242 A	Tebing Tinggi	20615	(0621) 326888	(0621) 328271
CABANG PADANG						
Pasar Raya	KCP	Jl. M. Yamin No. 130	Padang	25112	(0751) 30717	(0751) 23351
Ulak karang	KCP	Jl. S. Parman No. 31 F	Padang	25133	(0751) 7051134	(0751) 41006
Padang	KC	Jl. HR Rasuna Said No. 3	Padang	25129	(0751) 32093-96, 31903	(0751) 31900
Bukit Tinggi	KCP	Jl. A. Karim No. 01	Bukittinggi	26113	(0752) 625830	(0752) 625830
DR. Sutomo	KCP	Jl. Dr. Sutomo No. 37 B	Padang	25123	(0751) 24772	(0751) 32915 (0536) 3221020
CABANG PALANGKARAYA						
Palangkaraya	KC	Jl. Ahmad Yani No. 56	Palangkaraya	73111	(0536) 3223407, 3222698, 3224136	(0531) 32522
Sampit	KCP	Jl. MT. Haryono No. 60 D	Sampit	75328	(0531) 32511, 32512	
CABANG PALEMBANG						
Palembang	KC	Jl. Jend. Sudirman Km 4,5 No. 125	Palembang	30128	(0711) 411175, 410552	(0711) 410854
Ilir Barat	KCP	Komp. Ilir Barat Permai Blok D I No. 60 Jl. Letkol Iskandar	Palembang	30124	(0711) 321714	(0711) 321714
Lubuk Linggau	KCP	Jl. Yos Sudarso No. 159 Kel. Jawa Kiri Kec. Lubuk Linggau 9-10	Lubuk Linggau	31623	(0411) 373678	(0411) 882475
Sako Kenten	KCP	Ruko No. 2 Sako Kenten Jl. Komp. Terminal Multiwahana Wijaya	Palembang	30163	(0711) 810746	(0711) 810746

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG PALU						
Palu	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 2	Palu	94111	(0451) 424555, 428555, 422555	
CABANG PANGKAL PINANG						
Pangkal Pinang	KCP	Jl. Mayor Syafrie Rachman No. 21	Pangkal Pinang	33132	(0717) 434660	(0717) 434660
CABANG PEKALONGAN						
Pekalongan	KC	Jl. Hayam Wuruk No. 15	Pekalongan	51119	(0285) 433893-84, 433484	(0285) 433926
Tegal	KCP	Ruko Pacific Mall No. 9 & 10 Jl. Mayjen Sutoyo No. 35	Tegal	52125	(0283) 323038	(0283) 357439
CABANG PEKAN BARU						
Pekan Baru	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 393	Pekanbaru	28116	(0761) 40494	(0761) 32271, 44776
Duri	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 36 Simpang Garoga, Duri	Riau	28884	(0765) 598519	(0765) 598518
Marpoyan	KCP	Jl. Kaharuddin Nasution No. 99 Simpang Marpoyan	Pekanbaru	28284	(0761) 673728	(0761) 673680
Panam	KCP	Jl. HR Subrantas No. 88-89	Pekanbaru	28298	(0761) 562333	(0761) 562111
Rumbai	KCP	Jl. Sekolah No. 7-K Limbungan Rumbai	Pekanbaru	28261	(0761) 556115	(0761) 52468
CABANG PONTIANAK						
Pontianak	KC	Jl. Imam Bonjol No. 29	Pontianak	78122	(0561) 740163-66	(0561) 740168-69 4538112
Jeruju	KCP	Jl. Komodor Yos Sudarso No. 27 Jeruju	Pontianak	78113	(0561) 770567	(0561) 779284
CABANG PURWAKARTA						
Purwakarta	KC	Jl. RE Martadinata No. 1	Purwakarta	41114	(0264) 201024	(0264) 201591
Subang	KCP	Jl. Jend. A. Yani No. 9 A-B	Subang	41211	(061) 7880968	(061) 7852780
CABANG PURWOKERTO						
Purwokerto	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 431	Purwokerto	53116	(0281) 641114	(0281) 638386
Cilacap	KCP	Jl. A. Yani No. 391	Cilacap	53213	(0282) 538080	(0282) 528080
CABANG SAMARINDA						
Samarinda	KC	Jl. RE Martadinata No. 1	Samarinda	75128	(0541) 736930, 731510, 735790	(0541) 737698
Bontang	KCP	Jl. Bhayangkara No. 03	Bontang	75311	(0548) 20667	(0548) 20668
Mall Lembuswana	KCP	Jl. S. Parman Komp. Mall Lembuswana Blok C-11	Samarinda	75125	(0541) 206605	(0541) 732611
Tarakan	KCP	Jl. Yos Sudarso No. 6	Tarakan	77112	(0551) 25353, 24342, 24322	(0551) 24144

KANTOR CABANG

Branch Offices

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG SEMARANG						
Semarang	KC	Jl. MT. Haryono 717	Semarang	50242	(024) 8312151	(024) 8312186, 8413818
Banyumanik	KCP	Jl. Jati Raya No. 1 Banyumanik	Semarang	50263	(024) 7471745, 7474098	(024) 7471745
Karangayu	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 234	Semarang	50141	(024) 7616823	(024) 7624020
Kudus	KCP	Jl. Jend.Sudirman No. 58 A	Kudus	59312	(0291) 430210	(0291) 430210
Majapahit	KCP	Jl. Majapahit No. 400	Semarang	50258	(024) 6709051	(024) 6724942
Pati	KCP	Jl. Jend. Sudirman 88	Pati	59111	(0295) 384202	(0295) 384276
RS Dr. Kariadi	KCP	Jl. Dr Sutomo No. 17	Semarang	50113	(024) 8416780	(024) 8416780
Salatiga	KCP	Jl. Diponegoro No. 4	Salatiga	50711	(0298) 321048	(0298) 326305
Tlogosari	KCP	Jl. Tlogosari Raya No. 1 Blok D I No. 60 Jl. Letkol Iskandar	Semarang	50196	(024) 6713014	(024) 6713015
UNDIP Tembalang	KCP	SH Kampus UNDIP Tembalang Jl. Prof Sudarto, 9-10	Semarang	50273	(024) 7478346	(024) 7478346
Ungaran	KCP	Komp. Ungaran Square Jl. Diponegoro No. 745	Unggaran	50511	(024) 6925851	(024) 6925853
CABANG SIDOARJO						
Sidoarjo	KC	Jl. Ahmad Yani No. 15	Sidoarjo	61212	(031) 8957949-50, 8929211	(031) 8957951
Krian	KCP	Ruko Krianindo Blok FF No. 428 Jl. Basuki Rahmad, Krian	Sidoarjo	61262	(031) 8986202-205	(031) 8986201
CABANG SOLO						
Solo	KC	Jl. Slamet Riyadi No. 282	Solo	57141	(0271) 726930	(0271) 726931
Klaten	KCP	Jl. Pemuda Utara No. 117	Klaten	57414	(0272) 321448, 322435	(0272) 324405
Mojosongo	KCP	Jl. Slamet Riyadi No. 282	Solo	57127	(0271) 854942	(0271) 853675
Palur	KCP	Jl. Raya Palur No. 38 Palur	Karanganyar	57772	(0271) 846465	(0271) 591112
Sukoharjo	KCP	Jl. Jend. Sudirman No. 63	Sukoharjo	57514	(0271) 591112	(0271) 591112 44776
UNS Solo	KCP	Gedung LPKWU Kampus UNS Jl. Ir. Sutami No. 36A	Solo	57126	(0271) 667520	(0271) 667531
CABANG SURABAYA						
Surabaya	KC	Jl. Pemuda No. 50	Surabaya	60271	(031) 5353513	((031) 5345073
Babatan Wiyung	KCP	Jl. Menganti No. 11 Kav. IV Babatan Wiyung	Surabaya	60227	(031) 7523572	(031) 7527724
Bubutan	KCP	Jl. Bubutan No. 9 E	Surabaya	60174	(031) 5340576	(031) 5340848
IAIN Sunan Ampel	KCP	Kampus IAIN Sunan Ampel, Jl. A. Yani No. 17	Surabaya	60239	(031) 8475452	(031) 8475453

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG SURABAYA						
Jemursari	KCP	Jl. Raya Jemursari No. 76 Blok B/07	Surabaya	60237	(031) 8415754	(031) 8431902
Jombang	KCP	Jl. Wahid Hasyim No. 19 E	Jombang	61415	(0321) 871117-9	(0321) 854258
Mayjen Sungkono	KCP	Darmo Park I Blok 3 A/12 Jl. Mayjen Sungkono	Surabaya	60225	(031) 5662867	(031) 5687211
Mojokerto	KCP	Jl. Majapahit No. 134	Mojokerto	61321	(031) 323853	(031) 323850
CABANG SURABAYA						
Mulyosari	KCP	Jl. Raya Mulyosari 82-82A	Surabaya	60119	(031) 5932012	(031) 5931763
Rungkut	KCP	Jl. Palembang TC 14 Pondok Tjandra	Sidoarjo	61256	(031) 8667237	(031) 8673954
Satellite Town Square	KCP	Komp. Satellite Town Square Blok A 5 No. 22 Suko Manunggal	Surabaya	60181	(031) 7320761-3	(031) 7320760
Tandes	KCP	Jl. Manukan Lor No. 3	Surabaya	60185	(031) 7405594	(031) 7404494
UNAIR	KCP	Kampus UNAIR Jl. Airlangga No. 4-6	Surabaya	60286	(031) 5038554	(031) 5038554
CABANG TANGERANG						
Tangerang	KC	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1 Cikokol	Tangerang	15118	(021) 5539363	(021) 5537977
Cikupa	KCP	Jl. Raya Serang Km. 17,2 Komp Ruko Kav. 6, Cikupa	Tangerang	15710	(021) 5962424	(021) 5962451
Cimone	KCP	Komp Pertokoan Sentra Blok A3 & A5 Cimone Jl. Raya Jend. Gatot Subroto Km. 2	Tangerang	15114	(021) 55795855, 55770678	(021) 55795853
Cipondoh	KCP	Jl. KH Hasyim Ashari No. 51 Ruko A-B Cipondoh	Tangerang	15118	(021) 55742093, 55742193	(021) 55742293
Duta Garden	KCP	Jl. Husen Sastra Negara Komp. Duta Garden Blok A1 No. 4 A	Tangerang	15111	(021) 54370336, 54370337	(021) 5400774 8413818
Gading Serpong	KCP	Jl. Kelapa Gading Selatan Sektor SG Blok SG 1 No. 37 Gading Serpong	Tangerang	15311	(021) 54201247	(021) 54201692
Pasar Kemis	KCP	Jl. Raya Kutabumi Ruko Telaga Bumi Asri A.1 & A.2 Kutabumi	Tangerang	15561	(021) 5925028, 59316584	(021) 59316585
CABANG TANJUNG PINANG						
Tanjung Pinang	KC	Jl. Raja Ali Haji No. 1-2	Tanjung Pinang	29124	(0771) 22155	(0771) 28280
CABANG TASIKMALAYA						
Tasikmalaya	KC	Jl. Sutisna Senjaya 101	Tasikmalaya	46113	(0265) 334464-65	(0265) 326465, 330884
CABANG TERNATE						
Ternate	KC	Jl. Zainal Abidin Syah No. 41	Ternate	97714	(0921) 3111330	(0921) 3126968
CABANG YOGYAKARTA						
Yogyakarta	KC	Jl. Jend. Sudirman No. 71	Yogyakarta	55223	(0274) 589898, 581014, 581016	(0274) 561289, 580996
Colombo	KCP	Ruko Buletin Music Shop Jl. Colombo No. 7	Yogyakarta	55281	(0274) 588138	(0274) 588130

KANTOR CABANG

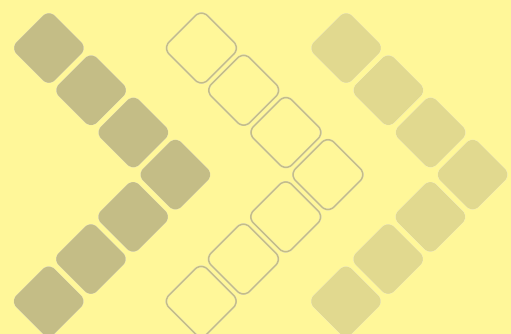
Branch Offices

UNIT OPERASI OPERATING UNIT	JENIS UNIT OPERASI TYPE OF OU	ALAMAT KANTOR ADDRESS	KOTAMADYA /KABUPATEN	KODEPOS POSTCODE	TELEPON TELEPHONE	FAKSIMILI FAXIMILE
CABANG YOGYAKARTA						
Condong Catur	KCP	Jl. Bakri No. 1 Ring Road Utara Condong Catur Depok, Sleman	Yogyakarta	55283	(0274) 881367, 881508	(0274) 881367
Kadipirog	KCP	Komp. Ruko Bayeman Permai Jl. Wates Km 3 No. 16	Yogyakarta	55182	(0274) 374443	(0274) 375155
Magelang	KCP	Jl. Ahmad Yani No. 3 A	Magelang	56117	(0293) 365286	(0293) 314676
KANTOR CABANG SYARIAH						
KCS Bandung	KCS	Jl. Jawa No. 7	Bandung	40117	(022) 4235547, 4202711, 70808006	(022) 4233094
KCS Banjarmasin	KCS	Kompleks Kencana No.1 Jl. Jend. A. Yani Km.5	Banjarmasin	70249	(0511) 3250530, 3250540, 3250560	(0511) 3260900
KCS Balikpapan	KCS	Jl. Letjend Suprpto No. 18	Balikpapan	76131	(0542) 424917, 423524	(0542) 423524
KCS Batam	KCS	Komp. Lumbang Rejeki Blok D No. 7 Jl. Sultan Abdul Rahman Nagoya	Batam	29432	(0778) 421921, 437880	(0778) 422126
KCS Bekasi	KCS	Komp. Ruko Kali Mas Blok C No. 9-10 Jl. Chairil Anwar Kelurahan Margahayu	Bekasi	17113	(021) 88353676, 88345410	(021) 883 53673
KCS Bogor	KCS	Jl. Raya Warung Jambu No. 59 B Cibuluh	Bogor Utara	16153	(0251) 8380094-95	(0251) 8379764
KCS Cilegon	KCS	Jl. Ahmad Yani No. 1 B, Kel. Sukmajaya Kec. Jombang	Cilegon	42421	(0254) 378264, 378265	(0254) 378272
KCS Cirebon	KCS	Ruko Cirebon City Centre Jl. Sisingamangaraja No. 27-28	Cirebon	45121	(0231) 235485-86, 235488	(0231) 205790
KCS Jakarta	KCS	Menara Bank BTN Lt. 2 Jl. Gajah Mada No. 1	Jakarta	10130	(021) 6336789 ext 8240, 63870226	(021) 6336742
KCS Jakarta Pasar Minggu	KCS	Ruko Grand Palace Blok G & H Jl. Pasar Minggu Km. 16	Jakarta	12780	(021) 7993662, 7993015	(021) 7993174
KCS Makassar	KCS	Jl. Boulevard Ruko Jasper II No. 34 Panakkukang	Makassar	90222	(0411) 422666, 422333	(0411) 420779
KCS Malang	KCS	Jl. Ade Irma Suryani No. 2-4	Malang	65119	(0341) 335620-1, 335959	(0341) 335622
KCS Medan	KCS	Jl.Sisingamangaraja No. 14 A	Medan	20213	(061) 7325481, 7326869, 77015199	(061) 7326870
KCS Palembang	KCS	Jl. Veteran No. 325-329,	Palembang	30114	(0711) 355963, 355417	(0711) 313366
KCS Pekanbaru	KCS	Jl. Tuanku Tambusai Blok A No. 10-11 A Labuh Baru Timur, Payung Sekaki	Pekanbaru	28291	(0761) 7891314, 7891296	(0761) 7891313
KCS Semarang	KCS	Jl. Majapahit No.283 A	Semarang	50258	(024) 6700548, 6700549	(024) 6708014
KCS Solo	KCS	Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 322	Solo	57141	(0271) 712127, 7008947, 726931	(0271) 717276
KCS Surabaya	KCS	Jl. Diponegoro No. 29	Surabaya	60241	(031) 5666363, 5610518	(031) 5610519
KCS Tangerang	KCS	Komp. Ruko Golden Madrid Blok D No. 07 Sektor XIV BSD City	Tangerang	15318	(021) 53160495, 53150481-482	(021) 53160496
KCS Yogyakarta	KCS	Jl. Bakri No. 1 Ring Road Condong Catur Depok Sleman	Yogyakarta	55283	(0274) 7499742, 4462923	(0274) 4462924



Referensi Isi Annual Report dengan Peraturan BAPEPAM-LK

Annual Report's Content Cross
Reference with BAPEPAM-LK



REFERENSI BAPEPAM-LK

BAPEPAM-LK Cross Reference

I. Umum		I. General
<p>1. Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.</p> <p>2. Dicitak pada kertas yang berwarna terang agar mudah dibaca dan jelas.</p> <p>3. Mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas. Nama perusahaan dan tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka, samping, dan belakang. 2. Setiap halaman.</p> <p>4. Laporan Tahunan ditampilkan di website perusahaan.</p>	<p>V</p> <p>V</p> <p>V</p> <p>V</p>	<p>1. In a good and correct Indonesian, it is recommended to present the report also in English.</p> <p>2. Printed on light-colored papers so that the text is clear and easy to read.</p> <p>3. Should state clearly the identity of the company. Name of company and year of the annual report is placed on: 1. The front cover, sides, and back. 2. Each page.</p> <p>4. The Annual Report is presented in the company's website.</p>
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting	Hal Page	II. Summary of Key Financial Information
<p>1. Informasi keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 tahun. Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha. 2. Laba (rugi) kotor. 3. Laba (rugi) usaha. 4. Laba (rugi) bersih. 5. Laba (rugi) bersih persaham. 6. Modal kerja bersih. 7. Jumlah investasi. 8. Jumlah aktiva. 9. Jumlah kewajiban. 10. Jumlah Ekuitas. 11. Rasio-rasio keuangan secara umum dan yang relevan dengan industri perusahaan.</p> <p>2. Laporan Tahunan wajib memuat informasi harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan, serta jumlah saham yang diperdagangkan (dicatatkan) untuk setiap masa triwulan dalam 2 tahun buku terakhir (jika ada). Harga saham sebelum perubahan permodalan terakhir wajib disesuaikan dalam hal terjadi antara lain karena pemecahan saham, dividen saham, dan saham bonus.</p>	<p>12,13</p> <p>18,19</p>	<p>1. Financial information in comparative form over a period of 5 financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 5 years. The information contained includes: 1. Sales/income from business. 2. Gross profit (loss). 3. Business profit (loss). 4. Net profit (loss). 5. Net profit (loss) per share. 6. Net working capital. 7. Total investment 8. Total assets. 9. Total liabilities. 10. Total equity. 11. Financial ratio which are common and relevant to the company's industry.</p> <p>2. The Annual Report must contain information regarding the highest price of shares, lowest price of shares, and closing price, and the number of shares placed on the market (listed) for each three-month period in the last two financial years (if any). The price of shares prior to the last revision in capital should be adjusted in the event, among others, that it was due to a splitting of shares, dividend on shares, and bonus shares.</p>

II. Ikhtisar Data Keuangan Penting	Hal Page	II. Summary of Key Financial Information
<p>Dalam bentuk tabel dan grafik.</p> <p>3. Laporan Tahunan wajib memuat informasi jumlah obligasi atau obligasi konvertibel yang diterbitkan yang masih beredar, tingkat bunga, dan tanggal jatuh tempo dalam 2 tahun buku terakhir.</p> <p>1. Jumlah obligasi/obligasi konversi 2. Tingkat bunga. yang beredar. 3. Tanggal jatuh tempo. 4. Peringkat obligasi.</p>	19	<p>In the form of tables and graphs.</p> <p>3. The Annual Report must contain information regarding the number of bonds or convertible bonds issued which remain outstanding, the interest rate, and date of maturity in the last 2 financial years.</p> <p>1. The number of bonds/convertible bonds outstanding. 2. Interest rate. 3. Maturity date. 4. Rating of bonds.</p>
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	Hal Page	III. Board of Commissioners' and Board of Directors' Report
<p>1. Laporan Dewan Komisaris. Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Penilaian kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan. 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. 3. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris. 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada).</p> <p>2. Laporan Direksi. Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Kinerja perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Prospek usaha. 3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. 4. Perubahan komposisi Direksi (jika ada).</p> <p>3. Tanda tangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri. 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan.</p>	<p>28-33</p> <p>34-39</p> <p>186</p>	<p>1. Board of Commissioners' Report. Contains the following items:</p> <p>1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company. 2. View on the prospects of the company's business as established by the Board of Directors 3. Committees under the Board of Commissioners. 4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any).</p> <p>2. Board of Directors' Report. Contains the following items:</p> <p>1. The Company's Performance, encompassing among others strategic policies, comparison between achievement of results and targets, and challenges faced by the company. 2. Business prospects. 3. Implementation of Good Corporate Governance by the company. 4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any).</p> <p>3. Signature of members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Contains the following items:</p> <p>1. Signatures are set on a separate page. 2. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the accuracy of the annual report.</p>

III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	Hal Page	III. Board of Commissioners' and Board of Directors' Report
<p>3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya.</p> <p>4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.</p>		<p>3. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors, stating their names and titles/positions.</p> <p>4. A written explanation in a separate letter from each member of the Board of Commissioners or Board of Directors who refuses to sign the annual report, or written explanation in a separate letter from the other members in the event that there is no written explanation provided by the said member.</p>
IV. Profil Perusahaan	Hal Page	IV. Company Profile
<p>1. Nama dan alamat perusahaan. Meliputi informasi tentang nama dan alamat, kode pos, nomor telepon dan/atau nomor faksimili, email, website.</p> <p>2. Riwayat singkat perusahaan. Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama perusahaan jika ada.</p> <p>3. Bidang usaha. Meliputi jenis produk dan atau jasa yang dihasilkan.</p> <p>4. Struktur Organisasi. Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan.</p> <p>5. Visi dan Misi Perusahaan. Mencakup hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan tentang visi perusahaan. 2. Penjelasan tentang misi perusahaan. <p>6. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris. Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama. 2. Jabatan. 3. Umur. 4. Pendidikan. 5. Pengalaman kerja. <p>7. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Direksi. Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama. 2. Jabatan. 3. Umur. 4. Pendidikan. 5. Pengalaman kerja. 	<p>16-17</p> <p>10-11</p> <p>16, 354-355</p> <p>338-339</p> <p>6</p> <p>340-343</p> <p>344- 348</p>	<p>1. Brief history of the company. Includes information on name and address, zip code, telephone and/or facsimile, email, website.</p> <p>2. Brief history of the company. Includes among others: date/year of establishment, name and change in the company name, if any.</p> <p>3. Field of business. Includes the types of products and or services produced.</p> <p>4. Organizational structure. In the form of a chart, giving the names and titles.</p> <p>5. Company vision and mission. Includes the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Explanation on the company vision. 2. Explanation on the company mission. <p>6. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Board of Commissioners. The information should contain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name. 2. Title. 3. Age. 4. Education. 5. Working experience. <p>7. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Board of Directors. The information should contain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name. 2. Title. 3. Age. 4. Education. 5. Working experience.

IV. Profil Perusahaan	Hal Page	IV. Company Profile
<p>8. Jumlah Karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan). Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah karyawan untuk masing- masing level organisasi. 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan. 3. Pelatihan karyawan yang telah dan akan dilakukan. 4. Adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan. 5. Biaya yang telah dikeluarkan. 	74-82	<p>8. Number of employees (comparative in two years) and description of competence building (for example: education and training of employees). The information should contain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The number of employees for each level of the organization. 2. The number of employees for each level of education. 3. Training of employees that has been and will be conducted. 4. Availability of equal opportunity to all employees. 5. Expenses incurred.
<p>9. Komposisi Pemegang saham. Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham. 2. Direktur dan Komisaris yang memiliki saham. 3. Pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 	18	<p>9. Composition of shareholders. Should include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Names of shareholders having 5% or more shares. 2. Directors and Commissioners who own shares. 3. Public shareholders having respective share ownership of less than 5%.
<p>10. Daftar anak perusahaan dan/atau perusahaan asosiasi. Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama anak perusahaan/perusahaan asosiasi. 2. Presentase Kepemilikan saham. 3. Keterangan tentang bidang usaha anak perusahaan atau perusahaan asosiasi. 4. Keterangan status operasi perusahaan anak atau perusahaan asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). 	n.a	<p>10. List of subsidiaries and/or affiliated companies. The information contains, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of subsidiaries/affiliated companies. 2. Percentage of share ownership. 3. Information on the field of business of the subsidiary or affiliated company. 4. Explanation regarding the operational status of the subsidiary or affiliated company (already operating or not yet operating).
<p>11. Kronologi pencatatan saham. Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kronologi pencatatan saham. 2. Jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah saham. 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku. 4. Nama Bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. 	19	<p>11. Chronology of shares listing. Includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chronology of shares listing. 2. Types of corporate action that caused changes in the number of shares. 3. Changes in the number of shares from the beginning of listing up to the end of the financial year. 4. Name of Stock Exchange where the company shares are listed.

IV. Profil Perusahaan	Hal Page	IV. Company Profile
<p>12. Kronologi pencatatan Efek lainnya.</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kronologi pencatatan efek lainnya. 2. Jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah efek lainnya. 3. Perubahan jumlah efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku. 4. Nama Bursa dimana efek lainnya perusahaan dicatatkan. 5. Peringkat efek. 	19	<p>12. Chronology of other securities listing.</p> <p>Includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chronology of other securities listing. 2. Types of corporate action that caused changes in the number of securities. 3. Changes in the number of securities from the initial listing up to the end of the financial year. 4. Name of Stock Exchange where the company's other securities are listed. 5. Rating of the securities.
<p>13. Nama dan alamat lembaga dan atau profesi penunjang pasar modal.</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat Biro Administrasi Efek. 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik. 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. 	16-17	<p>13. Name and address of institution and or profession supporting the capital market.</p> <p>The information contains, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and address of Share Registrar. 2. Name and address of the Public Accountants' Office. 3. Name and address of the securities rating company.
<p>14. Akuntan perseroan.</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berapa periode audit akuntan telah mengaudit laporan keuangan perusahaan. 2. Berapa periode audit kantor akuntan publik telah mengaudit laporan keuangan perusahaan. 3. Besarnya fee audit. 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit. 	126	<p>14. Company accountant.</p> <p>The information should contain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. How many audit periods has the accountant audited the financial statements of the company. 2. How many audit periods has the public accountant firm audited the financial statements of the company. 3. The amount of audit fee. 4. Other service provided by the accountant in addition to financial audit.
<p>15. Penghargaan dan sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional.</p> <p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama penghargaan. 2. Tahun perolehan. 3. Badan pemberi penghargaan. 4. Masa berlaku. 	26-27	<p>15. Reward and certification received by the company, both on a national scale and international scale.</p> <p>Information should include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of the reward. 2. Year of receiving the award. 3. Institution presenting the award. 4. Period of validity.
<p>16. Nama dan alamat anak perusahaan dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada).</p>	358-370	<p>16. Name and address of subsidiary and or branch office or representative office (if any).</p>

V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	Hal Page	V. Management Analysis and Discussion on Company Performance
<p>1. Tinjauan operasi per segmen bisnis. Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi. 2. Penjualan/pendapatan usaha 3. Profitabilitas. 4. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi untuk masing-masing segmen bisnis. 	40-64	<p>1. Operational review per business segment. Contains description of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Production. 2. Sales/income from business 3. Profitability. 4. Increase/decrease in production capacity in each business segment.
<p>2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan.</p> <p>Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan jumlah aktiva. 2. Kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan jumlah kewajiban 3. Penjualan/pendapatan usaha. 4. Beban usaha. 5. Laba/Rugi bersih. 	172-185	<p>2. Description of company's financial performance. An analysis of the financial performance which includes a comparison between the financial performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables), among others concerning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Current assets, non-current assets, and amount of assets. 2. Current liabilities, non-current liabilities, and amount of liabilities 3. Sales/income from business. 4. Overhead cost. 5. Net profit/loss.
<p>3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar hutang dan tingkat kolektibilitas piutang Perseroan.</p> <p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan membayar hutang. 2. Tingkat kolektibilitas piutang. 	177-182	<p>3. Discussion and analysis on the capacity to pay debts and the company's collectable accounts receivable. Explanation on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacity to pay debts. 2. Collectable accounts receivable.
<p>4. Bahasan tentang struktur modal, kebijakan manajemen atas struktur modal, dan tingkat likuiditas perusahaan.</p> <p>Penjelasan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur modal. 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal. 3. Tingkat likuiditas perusahaan. 	182	<p>4. Discussion on capital structure, capital structure policies, and liquidity. Explanation on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capital structure. 2. Capital structure policies 3. Liquidity.
<p>5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal.</p> <p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan dari ikatan tersebut. 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut. 3. Mata uang yang menjadi denominasi. 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. 	180	<p>5. Discussion on material ties for the investment of capital goods. Explanation on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The purpose of such ties. 2. Source of funds expected to fulfil the 3. Currency of denomination. 4. Steps taken by the company to protect the position of related foreign currency against risks.
<p>6. Bahasan dan analisis tentang informasi keuangan yang telah dilaporkan yang mengandung kejadian yang sifatnya luar biasa dan jarang terjadi. Ada atau tidak ada pengungkapan.</p>	n.a	<p>6. Discussion and analysis of financial information that was reported concerning extraordinary and rare events. Is this disclosed or not.</p>

V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	Hal Page	V. Management Analysis and Discussion on Company Performance
<p>7. Uraian tentang komponen-komponen substansial dari pendapatan dan beban lainnya, untuk dapat mengetahui hasil usaha perusahaan.</p> <p>Ada atau tidak ada pengungkapan.</p>	174-176	<p>7. Information regarding substantial components of earnings and other costs, in order to calculate the company's income.</p> <p>Is this disclosed or not.</p>
<p>8. Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan atau pendapatan bersih, maka wajib disertai dengan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan antara lain dengan, jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru.</p> <p>Ada atau tidak ada pengungkapan.</p>	n.a	<p>8. If the financial statement discloses a material increase or decrease in the sales or net income, then an explanation should be included concerning the extent that such changes can be linked to, among others, the amount of goods or services sold, and or the existence of new products or services.</p> <p>Is this disclosed or not.</p>
<p>9. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan atau pendapatan bersih perusahaan serta laba operasi perusahaan selama 2 tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 tahun.</p> <p>Ada atau tidak ada pengungkapan.</p>	174-176	<p>9. Discussion on the impact of price change to the company's sales and net income and the operational profit of the company for the past two (2) years or since the company commenced its business, if the company has been operating for less than two years.</p> <p>Is this disclosed or not.</p>
<p>10. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.</p> <p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.</p>	n.a	<p>10. Material Information and acts that occurred after the date of the accountant's report.</p> <p>Description of important events after the date of the accountant's report including their impact on performance and business risks in the future.</p>
<p>11. Uraian tentang prospek usaha perusahaan.</p> <p>Uraian mengenai prospek perusahaan sehubungan dengan industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional serta dapat disertai data pendukung kuantitatif jika ada sumber data yang layak dipercaya.</p>	162-169	<p>11. Description of the company's business prospects.</p> <p>Information on the company prospects in connection with industry, economy in general, and the international market, which can be accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source.</p>
<p>12. Uraian tentang aspek pemasaran.</p> <p>Uraian tentang pemasaran atas produk dan jasa perusahaan, antara lain meliputi pangsa pasar.</p>	65-67	<p>12. Information on marketing aspects.</p> <p>Information regarding the marketing of the company's products and services, among others concerning the market segment.</p>
<p>13. Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 tahun buku terakhir.</p> <p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya dividen untuk masing-masing tahun. 2. Besarnya Payout Ratio. 	16	<p>13. Statement regarding the dividend policy and the date and amount of cash dividend per share and amount of dividend per year as announced or paid during the past two (2) years.</p> <p>Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amount of dividend for each year. 2. Pay-out ratio.

V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	Hal Page	V. Management Analysis and Discussion on Company Performance
<p>14. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total perolehan dana. 2. Rencana penggunaan dana. 3. Rincian penggunaan dana. 4. Saldo. 5. Perubahan penggunaan dana (jika ada). <p>15. Informasi material, antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/modal, transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sifat transaksi dengan pihak afiliasi.</p> <p>16. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan. Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan pemerintah dan dampaknya terhadap laporan keuangan.</p> <p>17. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.</p>	<p>18</p> <p>n.a</p> <p>n.a</p> <p>330-332</p>	<p>14. Realization of uses of funds obtained from the public offering. Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total funds obtained. 2. Budget plan. 3. Details of budget plan. 4. Balance. 5. Change in the budget plan (if any). <p>15. Material information, among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/capital restructuring, transactions containing conflict of interest, and the nature of transactions with affiliated parties.</p> <p>16. Description on changes in laws and regulations having significant effects on the company. Information containing among others: amendment to government regulations and impacts on the financial statements.</p> <p>17. Description of changes in the accounting policy. Description should contain among others: any revision to accounting policies, rationale and impact on the financial statement.</p>
VI. Tata Kelola Perusahaan	Hal Page	VI. Corporate Governance
<p>1. Uraian Dewan Komisaris. Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. 2. Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Dewan Komisaris. 3. Frekuensi pertemuan. 4. Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan. <p>2. Uraian Direksi. Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2. Pengungkapan prosedur penetapan dan besarnya remunerasi anggota Direksi. 3. Frekuensi pertemuan. 4. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan. 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi. 	<p>109-112, 116</p> <p>112-117</p>	<p>1. Information on the Board of Commissioners. The information should contain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Description of the tasks implemented by the Board of Commissioners. 2. Disclosing the procedure for determining, and the amount of remuneration for the members of the Board of Commissioners. 3. Frequency of meetings. 4. Attendance of the Board of Commissioners in the meetings. <p>2. Information on the Board of Directors. The information should include:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scope of work and responsibility of each member of the Board of Directors. 2. Disclosing the procedure for determining, and the amount of remuneration for the members of the Board of Directors. 3. Frequency of meetings. 4. Attendance of the Board of Directors in the meetings. 5. Training programs for improving the competence of the Board of Directors.

VI. Tata Kelola Perusahaan	Hal Page	VI. Corporate Governance
<p>3. Komite Audit.</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Audit. 2. Uraian tugas dan tanggung jawab. 3. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Audit. 4. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit. 5. Independensi anggota Komite Audit. 	132- 136	<p>3. Audit Committee.</p> <p>Includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Audit Committee. 2. Description of tasks and responsibilities. 3. Frequency of meetings and the attendance of the Audit Committee. 4. Brief report on the activities carried out by the Audit Committee. 5. Independence of the members of the Audit Committee.
<p>4. Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. 2. Independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi. 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi 	139- 141	<p>4. Remuneration and Nomination Committee.</p> <p>Includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Remuneration and Nomination Committee. 2. Independence of the members of the Remuneration and Nomination Committee. 3. Description of the tasks and responsibilities. 4. Activities carried out by the Remuneration and Nomination Committee. 5. Frequency of meetings and the attendance of the Remuneration and Nomination Committee.
<p>5. Komite Monitoring Risiko.</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota Komite Monitoring Risiko. 2. Independensi anggota Komite Monitoring Risiko. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan Komite Monitoring Risiko. 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Komite Monitoring Risiko. 	136-139	<p>5. Risk Monitoring Committee.</p> <p>Includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the Risk Monitoring Committee. 2. Independence of the members of the Risk Monitoring Committee. 3. Description of the tasks and responsibilities. 4. Activities carried out by the Risk Monitoring Committee. 5. Frequency of meetings and the attendance of the Risk Monitoring Committee.
<p>6. Komite-komite lain yang dimiliki oleh perusahaan.</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain. 2. Independensi anggota komite lain. 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain. 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. 	143-147	<p>6. Other committees in the company.</p> <p>Includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name, title, and brief curriculum vitae of the members of the committees. 2. Independence of the members of the committees. 3. Description of the tasks and responsibilities. 4. Activities carried out by the committees. 5. Frequency of meetings and the attendance of the committees.
<p>7. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan.</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan riwayat jabatan singkat Sekretaris Perusahaan. 2. Uraian pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan 	120-121, 349	<p>7. Description of tasks and function of the Corporate Secretary.</p> <p>Includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and brief history of the position of Corporate Secretary. 2. Description of the tasks performed by the Corporate Secretary.

VI. Tata Kelola Perusahaan	Hal Page	VI. Corporate Governance
<p>8. Uraian mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern.</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang keberadaan SPI. 2. Penjelasan tentang aktifitas SPI. 3. Penjelasan mengenai pengendalian internal perusahaan. 	125	<p>8. Description of the internal control and audit implemented by the company.</p> <p>Includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Information on the existence of SPI (internal control system). 2. Explanation on the activities of SPI. 3. Explanation on the internal control of the company.
<p>9. Uraian tentang Unit Audit Internal.</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang keberadaan Unit Audit Internal. 2. Penjelasan tentang Piagam Audit Internal. 3. Penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan Unit Audit Internal. 5. Nama dan riwayat hidup singkat kepala Unit Audit Internal. 	125-126, 349	<p>9. Description of the company's Internal Audit Unit.</p> <p>Includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Information on the existence of the Internal Audit Unit. 2. Explanation on the Internal Audit Charter. 3. Explanation on the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit. 4. Activities carried out by the Internal Audit Unit. 5. Name and brief curriculum vitae of the Head of the Internal Audit.
<p>10. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan.</p> <p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan (misalnya risiko yang disebabkan oleh fluktuasi kurs atau suku bunga, persaingan usaha, pasokan bahan baku, ketentuan negara lain atau peraturan internasional, dan kebijakan pemerintah). 2. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. 	83-93	<p>10. Description of the company's risk management.</p> <p>Includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Explanation of the risks faced by the company (for example: risks caused by fluctuation of the exchange rate or interest rate, competition in business, supply of raw materials, provisions set by other countries or international regulations, and government policies). 2. Efforts to manage those risks.
<p>11. Uraian mengenai aktifitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai komitmen perusahaan terhadap perlindungan konsumen.</p> <p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen. 2. Program peningkatan layanan kepada konsumen. 3. Biaya yang telah dikeluarkan. 	159-160	<p>11. Description of the activities and expenses incurred in related to corporate social responsibility, particularly on commitment to consumer protection.</p> <p>Information includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setting up Center for Consumer Complaint. 2. Program for improving services to consumers. 3. Expenses incurred.
<p>12. Uraian mengenai aktifitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama mengenai "community development program" yang telah dilakukan.</p> <p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mitra Usaha binaan Perusahaan. 2. Program pengembangan pendidikan. 3. Program perbaikan kesehatan. 4. Program pengembangan seni budaya. 5. Biaya yang telah dikeluarkan. 	156-158	<p>12. Description on the activities and expenses incurred related to corporate social responsibility, particularly on "community development program" which have been carried out.</p> <p>Information includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Supervised Business Partner. 2. Education development program. 3. Health improvement program. 4. Culture development program. 5. Expenses incurred.

VI. Tata Kelola Perusahaan	Hal Page	VI. Corporate Governance
<p>13. Uraian mengenai aktifitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktifitas lingkungan.</p> <p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktifitas pelestarian lingkungan. 2. Aktifitas pengelolaan lingkungan. 3. Sertifikasi atas pengelolaan lingkungan. 4. Biaya yang telah dikeluarkan. 	155	<p>13. Description on the activities and expenses incurred related to corporate social responsibility, particularly on environmental activities.</p> <p>Information includes among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Preserving environment activity. 2. Environment management activity. 3. Certification to Environment management. 4. Expenses incurred.
<p>14. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.</p> <p>Mencakup antara lain: Information includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan. 2. Kasus posisi. 3. Status penyelesaian perkara/gugatan. 4. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. 	128	<p>14. Important cases faced by the Issuer or Public Company, current members of the Board of Directors and Board of Commissioners.</p> <p>Information includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Material of the case/claim. 2. Case status. 3. Status of settlement of case/claim. 4. Potential impacts on the financial condition of the company.
<p>15. Akses informasi dan data perusahaan.</p> <p>Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website, media massa, mailing list, buletin dsb.</p>	16-17	<p>15. Access to corporate information and data.</p> <p>Description on the availability of access to corporate information and data to the public, for example through website, mass media, mailing list, bulletin etc.</p>
<p>16. Etika Perusahaan.</p> <p>Memuat uraian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Code of Conduct. 2. Isi Code of Conduct. 3. Penyebaran Code of Conduct kepada karyawan dan upaya penegakannya. 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan yang dimiliki perusahaan. 	129-131	<p>16. Company Ethics.</p> <p>Contains information on:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The existence of the Code of Conduct. 2. Content of the Code of Conduct. 3. Distribution of the Code of Conduct to the employees and efforts to uphold the Code. 4. Statement concerning the corporate culture.
VII. Informasi Keuangan	Hal Page	VII. Financial Information
<p>1. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.</p> <p>Kesesuaian dengan peraturan Bapepam No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.</p> <p>2. Opini akuntan atas Laporan Keuangan.</p> <p>Kesesuaian dengan SPAP-IAI.</p> <p>3. Deskripsi Auditor Independen di Opini.</p> <p>Deskripsi memuat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama & tanda tangan. 2. Tanggal Laporan Audit. 3. No. ijin KAP (jika ada). 	186	<p>1. Statement by the Board of Directors concerning the Responsibility of the Board of Directors on the Financial Statement.</p> <p>Compliance with Bapepam Regulation No.VIII.G.11 on Responsibility of the Board of Directors on the Financial Statement.</p> <p>2. Accountant's opinion on the financial statement.</p> <p>Compliance with SPAP-IAI.</p> <p>3. Description of the Independent Auditor in the Opinion.</p> <p>The description contains:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and signature. 2. Date of the audit report. 3. KAP license number (if any).

VII. Informasi Keuangan	Hal Page	VII. Financial Information
<p>4. Laporan keuangan yang lengkap. Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neraca. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan ekuitas. 4. Laporan arus kas. 5. Catatan atas laporan keuangan. 	193-335	<p>4. Comprehensive financial statement. Contains all elements of the financial statement:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Balance sheet. 2. Profit loss statement. 3. Equity statement. 4. Cash flow report. 5. Notes to the financial statement.
<p>5. Perbandingan tingkat profitabilitas.</p>	300-301	<p>5. Comparison of profitability.</p>
<p>6. Penyajian Laporan Arus Kas. Memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan metode langsung (<i>direct method</i>). 2. Pengelompokan dalam tiga kategori aktifitas: aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan. 3. Pengungkapan aktifitas yang tidak mempengaruhi arus kas. 4. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas kepada pelanggan (<i>customer</i>), karyawan, pemasok, dan pembayaran pajak selama tahun berjalan pada aktifitas operasi. 5. Penyajian penambahan dan pembayaran hutang jangka panjang serta dividen pada aktifitas pendanaan. 	202-204	<p>6. Presentation of Cash Flow Report. Meets the following provisions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uses a direct method. 2. Grouped into three categories of activity: operational activity, investment, and funding. 3. Disclosing activities that do not influence the cash flow. 4. Separating the presentation between cash receipt and or cash expended to the customer, employee, supplier, and payment of taxes during the current year for operational activities. 5. Presenting the addition and payment of long-term debt as well as dividend in funding.
<p>7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi. Meliputi sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dasar penyajian laporan keuangan. 2. Pengakuan pendapatan dan beban. 3. Penilaian investasi. 4. Penilaian dan metode penyusutan aktiva tetap. 5. Dasar perhitungan laba per saham. 	211-234	<p>7. Summary of Accounting Policy. Includes at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basic concept in presenting a financial statement. 2. Recognition of income and overhead. 3. Assessment for investment. 4. Assessment and method of depreciating fixed assets. 5. Basis for calculating profit per share.
<p>8. Transaksi dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian jenis transaksi, nama pihak yang memiliki hubungan istimewa, dan jumlah piutang dan atau hutang yang terkait. 2. Dirinci jumlah masing-masing pos aktiva, kewajiban, penjualan dan pembelian (beban) kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa beserta persentasenya terhadap total aktiva, kewajiban, penjualan dan pembelian (beban). 	315-316	<p>8. Transaction with Affiliated Parties. Issues that should be disclosed are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Details on the type of transaction, name of the affiliated party, and total accounts receivable and or related debts. 2. Details on the individual assets, liabilities, sales and purchase (charge) to the affiliated parties and percentage against the total assets, liabilities, sales and purchases.

<p>3. Penjelasan transaksi yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha utama dan jumlah hutang/piutang sehubungan dengan transaksi tersebut.</p> <p>4. Sifat hubungan, jenis dan unsur transaksi hubungan istimewa.</p> <p>5. Kebijakan harga dan syarat transaksi serta pernyataan apakah penerapan kebijakan harga dan syarat tersebut sama dengan kebijakan harga dan syarat untuk transaksi dengan pihak ketiga.</p>		<p>3. Explanation of transactions that are not related to the core business and the amount of debt/accounts receivable in connection with the said transaction.</p> <p>4. Nature of the affiliation, type and element of transaction with affiliated parties.</p> <p>5. Price policy and terms of transaction and a statement on whether the application of said price policy and terms are the same as the price policy and terms for transaction with a third party.</p>
<p>9. Pengungkapan yang Berhubungan dengan Hal-hal yang harus diungkapkan selain Jenis dan Jumlah Hutang Perpajakan.</p> <p>1. Rekonsiliasi antara beban (penghasilan) pajak dengan hasil perkalian laba akuntansi dengan tarif yang berlaku dengan mengungkapkan dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku.</p> <p>2. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini.</p> <p>3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi telah sesuai dengan SPT.</p> <p>4. Rincian aktiva dan kewajiban pajak tangguhan yang disajikan pada neraca untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aktiva atau kewajiban pajak tangguhan yang diakui pada neraca.</p> <p>5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.</p>	303-305	<p>9. Disclosure related to matters which must be disclosed other than type and total of tax obligation.</p> <p>1. Reconciliation between tax charge (income) and the result of multiplying the accounting profit with the current rate and disclosing the basis for calculating the tax rate.</p> <p>2. Fiscal reconciliation and calculation of current tax.</p> <p>3. Statement that the amount of Taxable Profit as calculated through reconciliation is in accordance with the Tax Return.</p> <p>4. Details of the assets and liabilities in deferred tax presented in the balance sheet in each period of presentation, and amount of charge (income) of deferred tax acknowledged in the profit loss statement if the said amount is not evident in the asset or liability of deferred tax acknowledged in the balance sheet.</p> <p>5. Disclosure of whether or not there is a tax dispute.</p>
<p>10. Aktiva & Kewajiban Dalam Mata Uang Asing Hal-hal yang harus diungkapkan.</p> <p>1. Rincian aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing serta ekuivalennya dalam rupiah.</p> <p>2. Posisi neto dari aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing.</p> <p>3. Rincian kontrak valuta berjangka dan ekuivalen dalam rupiah.</p> <p>4. Kebijakan manajemen risiko mata uang asing.</p> <p>5. Apabila lindung nilai tidak dilakukan, alasan untuk tidak melakukannya.</p>	317	<p>10. Assets and Liabilities in Foreign Currency.</p> <p>1. Details of the assets and liabilities in foreign currency and the equivalent in rupiah.</p> <p>2. Net position of assets and liabilities in foreign currency.</p> <p>3. Details of futures contract in foreign currency and equivalent in rupiah.</p> <p>4. Risk management in foreign currency.</p> <p>5. If hedging is not done, what is the reason?</p>
<p>11. Komitmen dan Kontinjensi. Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <p>1. Untuk perikatan berupa perjanjian sewa, keagenan dan distribusi, bantuan manajemen, teknis, royalti dan lisensi memuat uraian tentang pihak-pihak yang terkait, periode berlakunya perikatan, dasar penentuan kompensasi dan</p>	306	<p>11. Commitment and Contingency. Matters that should be disclosed:</p> <p>1. For ties in the form of a lease agreement, agency and distribution, managerial assistance, technical, royalty and license, a description on the related parties, period of validity, basis for determining compensation and fine, amount of charge</p>


- denda, jumlah beban atau pendapatan pada periode pelaporan, dan pembatasan-pembatasan lainnya.
2. Untuk perikatan berupa Kontrak/perjanjian yang memerlukan penggunaan dana di masa yang akan datang, seperti: pembangunan pabrik, perjanjian pembelian, ikatan untuk investasi, dsb. memuat uraian tentang pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, periode berlakunya perikatan, nilai keseluruhan, mata uang, dan bagian yang telah direalisasi.
 3. Untuk pemberian jaminan/garansi memuat uraian tentang pihak-pihak yang dijamin dan yang menerima jaminan, yang dipisahkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga untuk pihak yang dijamin, latar belakang dikeluarkannya jaminan, periode berlakunya jaminan, nilai jaminan.
 4. Perkara/sengketa hukum dengan mengungkapkan pihak-pihak yang terkait, jumlah yang diperkarakan, serta latar belakang, isi dan status perkara dan pendapat hukum (*legal opinion*).
 5. Untuk peraturan pemerintah yang mengikat perusahaan seperti: masalah lingkungan hidup, diungkapkan uraian singkat tentang peraturan dan dampaknya terhadap perusahaan.

or income in the reporting period, and other restrictions.

2. For ties in the form of a contract/agreement which requires the use of funds in the future, such as: factory construction, purchase agreement, investment, etc., a description on the related parties in the agreement, the period of validity, total value, currency, and portion already realized.
3. For giving warranty/guarantee, a description on the parties to be covered and the party receiving the guarantee, and separating the affiliated parties and third party for the party being covered, the reason for issuing guarantee, period of validity of the guarantee, and value (amount) of the guarantee.
4. Lawsuits/disputes, disclosing the related parties, the amount being disputed, the background, content and status of the case, and a legal opinion.
5. For government regulations that bind the company, for example in environmental issues, a brief description of the regulation and its impact on the company.

Halaman ini sengaja di kosongkan
This page is intentionally left blank





PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Pusat/Head Office
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No.1 Jakarta 10130
Tel./Phone : (021) 633 6789, 633 2666
Fax : (021) 634 6704
Contact Center : (021) 265 33 555

www.btn.co.id



PROSPEKTUS

Tanggal Efektif : 8 Desember 2009
 Masa Penawaran : 9-11 Desember 2009
 Tanggal Penjualan : 15 Desember 2009

JADUAL

Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik : 16 Desember 2009
 Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 16 Desember 2009
 Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia : 17 Desember 2009

BAPEPAM DAN LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYERAHKAN KEMAHABAN ATAU KECUKULPILAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PELUKAHARIAN PERSEORAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk. DISINGKIP PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk. ("PERSEORAN") DAN PARA PELAKSANA EMISI EFEK BERHANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEMAHABAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJUBAN PONDAPAT YANG TERBANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PENCATATAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

Kegiatan Usaha Utama
 Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat
 Gedung Mersa BTN
 Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
 P.O. BOX 3198 / JKT 10130
 Tel: (021) 633-6733, 633-6789
 Fax: (021) 633-6737

Dengan 60 kantor cabang, 20 kantor cabang Syariah, 184 kantor cabang pembantu, 276 ATM, 8 payment point, 1 kantor kas, 112 Kantor Layanan Syariah dan 1.957 kantor layanan setara kantor kas

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebesar 2.360.057.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh tujuh ribu) saham biasa atau nama Seri B, atau sebesar 27,06% dari modal disetor pada Penawaran, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp600 (delapan ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Penawaran Perbelanjaan Saham ("FPSS"). Nilai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.416.045.000.000 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar empat puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perdana saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi)



PT CIMB Securities Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| PT Bahana Securities (Terafiliasi) | PT Danarela Securities (Terafiliasi) |
| PT Andalan Artha Adrisindo Sekuritas | PT Indomita Securities |
| PT Asia Kapitalindo Sekuritas | PT Ivi Fikasa Sekurindo |
| PT BNI Securities (Terafiliasi) | PT Lantardhana Securitindo |
| PT Dian Swidana Artha Cemerlang | PT Makista Securities |
| PT Equity Securities Indonesia | PT Mega Capital Indonesia |
| PT E - Capital Securities | PT OSK Nusantara Securities |
| PT HD Capital | PT Overseas Securities |
| | PT Philip Securities Indonesia |
| | PT Prabawa Capital Indonesia |
| | PT Re-capital Securities |
| | PT Sinarmas Sekuritas |
| | PT Sucorinvest Central Gand |
| | PT Victoria Sekuritas |
| | PT Yulia Sekurindo Tbk |

SAHAM INI BUKAN MERUPAKAN PRODUK PERBANKAN DAN TIDAK DIJAMIN OLEH PEMERINTAH

RISIKO UTAMA YANG DIMADAPI PERSEORAN YAITU RISIKO KETIDAKMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KUALITAS PORTOFOLIO KREDIT MILIK PERSEORAN, RISIKO USAHA DAN RISIKO KEPENILIKAN SAHAM PERSEORAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEORAN TIDAK MEMERSTIKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PEMITIHAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2009

PERUSAHAAN PERSEROAN (Persero) PT BANK TABUNGAN NEGARA Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Baepem dan LK") di Jakarta dengan surat No.55/S/Dir/TIM-Prft/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya disebut "UUPM") dan peraturan pelaksanaannya.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 19 Oktober 2009. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi dan fakta material serta kejujuran pendapat, keterangan yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan, PT Mandiri Sekuritas dan PT CIMB Securities Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek (selanjutnya PT Mandiri Sekuritas dan PT CIMB Securities Indonesia dalam Prospektus ini disebut sebagai "Penjamin Pelaksana Emisi Efek")

Kecuali PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT BNI Securities, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek, bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIV tentang Penjaminan Emisi Efek.

PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan oleh UUPM.

PENAWARAN UMUM SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	ix
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	7
III. PERNYATAAN HUTANG	8
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	14
V. RISIKO USAHA	47
VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ...	63
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	64
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	64
2. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	66
3. PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	70
4. SUMBER DAYA MANUSIA	78
5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA	84
6. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	87
7. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN	91
VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	93
1. UMUM	93
2. KEBIJAKAN UMUM PERSEROAN DAN MANAJEMEN	93
3. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	93
4. JARINGAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN	103
5. PERSAINGAN USAHA	108
6. PEMASARAN	108
7. KERJASAMA KELEMBAGAAN	108
8. PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN	108
9. STRATEGI PERSEROAN	108
10. MANAJEMEN RISIKO	108
11. KEPATUHAN	108
12. AUDIT INTERN	108
13. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)	108
14. TEKNOLOGI INFORMASI	108
15. TINGKAT KESEHATAN BANK	108
16. PERTANGGUNGAN ASURANSI	108
IX. INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA	108
X. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	108
XI. EKUITAS	108
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN	108

XIII. PERPAJAKAN	108
XIV. PENJAMINAN EMISI EFEK	108
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	108
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	108
XVII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	108
XVIII. LAPORAN PENILAI	108
XIX. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	108
XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	108
1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	108
2. PEMESANAN YANG BERHAK	108
3. JUMLAH PEMESANAN	108
4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF	108
5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	108
6. MASA PENAWARAN	108
7. TANGGAL PENJATAHAN	108
8. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM SECARA KHUSUS	108
9. SYARAT PEMBELIAN	108
10. BUKTI TANDA TERIMA	108
11. PENJATAHAN SAHAM	108
12. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM	108
13. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN	108
14. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	108
15. LAIN-LAIN.....	108
XXI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	108

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, dan persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel dan tercantum dalam Prospektus ini yaitu antara nilai hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama Postpaarbank berdasarkan *Besluit van den Gouverneur – General van Nederlandsch - Indie* No.27 tahun 1934 pada tanggal 30 November 1934 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1935. Kemudian nama Postspaarbank sebagai awal dari nama Bank ini, diubah menjadi Bank Tabungan Pos, pada tanggal 9 Pebruari 1950 berdasarkan Undang-Undang Darurat No.9 Tahun 1950 Lembaran Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 1950.

Selanjutnya pada tahun 1953, dengan Undang-Undang No.36 Tahun 1953 Lembaran Negara Republik Indonesia No.86 Tahun 1953 ditetapkan Undang-Undang tentang "Bank Tabungan Pos" mencabut Postpaarbank Ordonantie.

Pada tahun 1974, Pemerintah mulai dengan rencana pembangunan perumahan. Guna menunjang keberhasilan kebijakan tersebut, Bank Tabungan Negara ditunjuk sebagai Lembaga Pembiayaan Kredit Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No B-49/MK/IV/1/1974 tanggal 29 Januari 1974, lahirah Kredit Pemilikan Rumah. Tahun 1989 dengan surat Direksi Bank Indonesia No.22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, Bank Tabungan Negara ditetapkan menjadi Bank Umum.

Pada tanggal 1 Agustus 1992, status hukum Bank Tabungan Negara diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan kepemilikan saham mayoritas oleh Pemerintah cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan No.C2-6587.HT.01.01.TH.92 tertanggal 12 Agustus 1992, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73, tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A.

Penyesuaian bentuk hukum tersebut tidak didahului dengan atau dilakukan dengan cara pembubaran (likuidasi), satu dan lain sebagaimana termaktub di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.S-940/MK.01/1992 tanggal 31 Juli 1992.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.7 tanggal 12 Oktober 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-49309.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009.

Pada bulan Agustus 2009, Perseroan memiliki 1 kantor pusat, 60 kantor cabang, 20 kantor cabang Syariah, 184 kantor cabang pembantu, 1.957 kantor layanan setara kantor kas, 1 kantor kas, 8 *payment point*, 112 Kantor Layanan Syariah, dan 378 ATM serta lebih dari 17.000 jaringan ATM Bersama yang didalamnya termasuk jaringan ATM link yang merupakan kerja sama Perseroan dengan Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara) dalam rangka mendukung kegiatan operasionalnya.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.7 tanggal 12 Oktober 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp0,00)	(%)
Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999	3.176.999.999.500	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.354.000.000	3.177.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.124.432.000	7.062.216.000.000	

3. PENAWARAN UMUM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebesar 2.360.057.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh tujuh ribu) saham biasa atas nama
 Nilai nominal : Rp500 (lima ratus Rupiah)
 Harga Penawaran : Rp800 (delapan ratus Rupiah)
 Nilai Emisi : Rp1.888.045.600.000 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar empat puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah)
 Tanggal Masa Penawaran Umum : 9 – 11 Desember 2009
 Tanggal Pencatatan di BEI : 17 Desember 2009

Dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, sebesar 9,62% (sembilan koma enam dua persen) akan dijatahkan secara khusus untuk program kepemilikan saham manajemen dan karyawan (*management and employee stock allocation/ MESA*) yang diberikan alokasi jatah pasti untuk membeli saham dengan harga diskon dengan harga diskon 20% (dua puluh persen) dari Harga Penawaran saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Diskon dimaksud ditanggung oleh Perseroan. Saham yang diperoleh melalui program MESA tersebut akan dikenakan *lock up* selama 6 (enam) bulan.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam program MESA), secara profoma menjadi sebagai berikut:

	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan MESOP			Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000		20.478.432.000	10.239.216.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00%	1	500	0,00%
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999	3.176.999.999.500	100,00%	6.353.999.999	3.176.999.999.500	72,92%
2. Masyarakat						
Manajemen dan Karyawan						
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	-	-	-	226.928.500	113.464.250.000	2,60%
Masyarakat Lainnya						
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	-	-	-	2.133.128.500	1.066.564.250.000	24,48%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.354.000.000	3.177.000.000.000	100,00%	8.714.057.000	4.357.028.500.000	100,00%
C. Saham Dalam Portepel	14.124.432.000	7.062.216.000.000		11.784.375.000	5.882.187.500.000	

Perseroan merencanakan program pemberian opsi saham kepada manajemen dan karyawan (*management and employee stock option plan/ MESOP*) yang memberikan opsi kepada Peserta Program MESOP untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dengan jumlah maksimum sebesar 4% (empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum. Hak Opsi akan diterbitkan dalam 3 (tiga) tahap masing-masing dengan umur opsi selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dengan masa tunggu 1 (satu) tahun. Hak Opsi termasuk dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan dalam periode pelaksanaan yang akan ditetapkan yaitu 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun selama umur Opsi dengan membayar harga pelaksanaan yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesudah terlaksananya program MESOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan MESOP			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000		20.478.432.000	10.239.216.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00%	1	500	0,00%
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999	3.178.999.999.500	72,92%	6.353.999.999	3.178.999.999.500	70,00%
2. Masyarakat						
Karyawan dan Manajemen						
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	226.928.500	113.464.250.000	2,80%	226.928.500	113.464.250.000	2,50%
Masyarakat Lainnya						
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	2.133.128.500	1.066.564.250.000	24,48%	2.133.128.500	1.066.564.250.000	23,50%
3. Saham hasil MESOP						
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	-	-	0,00%	363.085.500	181.542.750.000	4,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	8.714.057.000	4.357.028.500.000	100,00%	9.077.142.500	4.538.571.250.000	100,00%
C. Saham Dalam Portapel	11.764.375.000	5.892.187.500.000		11.401.289.500	5.700.644.750.000	

Seluruh Saham Yang Ditawarkan sejumlah 2.360.057.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh tujuh ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B baru atau sebesar 27,08% (dua puluh tujuh koma nol delapan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum akan dicatatkan di BEI. Perseroan atas nama pemegang saham juga akan mencatatkan sejumlah 6.263.228.575 (enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima) Saham Biasa Atas Nama Seri B sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 8.623.285.575 (delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham atau 98,96% (sembilan puluh delapan koma sembilan enam persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Sedangkan sejumlah 90.771.425 (sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima) atau 1,04% (satu koma nol empat persen) saham milik Negara RI tidak dicatatkan di BEI guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang akan diperoleh dari hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk memperkuat basis permodalan Perseroan guna mendukung ekspansi portofolio kredit Perseroan di masa mendatang.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut:

A. Risiko-risiko yang berkaitan dengan Perseroan

1. Risiko ketidakmampuan mempertahankan kualitas portofolio kredit milik Perseroan
2. Risiko terjadinya peningkatan penyisihan kerugian untuk menutup kerugian portofolio kredit yang terjadi di masa mendatang
3. Risiko konsentrasi kredit pada sektor dan daerah tertentu
4. Jaminan yang diberikan untuk menjamin kredit yang diberikan oleh Perseroan mungkin tidak mencukupi dan Perseroan tidak bisa merealisasikan secara penuh nilai jaminan yang diberikan
5. Risiko kesulitan likuiditas akibat jatuh tempo aktiva dan kewajiban yang tidak sepadan
6. Risiko perubahan kebijakan Pemerintah sehubungan dengan KPR bersubsidi
7. Perseroan mungkin tidak dapat mengelola pertumbuhan Perseroan yang cepat
8. Risiko kegagalan penerapan strategi Perseroan
9. Risiko menurunnya nilai pasar dari obligasi Pemerintah dan surat berharga lainnya dalam portofolio Perseroan terhadap nilai buku dari aset tersebut
10. Risiko sistem teknologi informasi
11. Risiko berkurangnya likuiditas
12. Risiko Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas Perseroan

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek untuk dan atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 2.360.057.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh tujuh ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B yang merupakan Saham baru dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut sebagai "Saham Yang Ditawarkan") kepada Masyarakat dengan harga penawaran Rp800,- (delapan ratus Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Nilai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp1.888.045.600.000 (satu triliun delapan ratus delapan puluh delapan miliar empat puluh lima juta enam ratus ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Bank  BTN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Kantor Pusat

Gedung Menara BTN

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia

P.O. BOX 3198 / JKT 10130

Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6701

Dengan 60 kantor cabang, 20 kantor cabang Syariah, 184 kantor cabang pembantu, 378 ATM, 8 *payment point*, 1 kantor kas, 112 Kantor Layanan Syariah, dan 1.957 kantor layanan setara kantor kas yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO KETIDAKMAMPUAN MEMPERTAHANKAN KUALITAS PORTOFOLIO KREDIT MILIK PERSEROAN. RISIKO USAHA DAN RISIKO KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Perseroan didirikan dengan nama Postpaarbank berdasarkan *Besluit van den Gouverneur – Generaal van Nederlandsch – Indie* No.27 tahun 1934 pada tanggal 30 Nopember 1934 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1935. Kemudian nama Postpaarbank sebagai awal dari nama Bank ini, diubah menjadi Bank Tabungan Pos, pada tanggal 9 Pebruari 1950 berdasarkan Undang-Undang Darurat No.9 Tahun 1950 Lembaran Negara Republik Indonesia No.12 Tahun 1950.

Selanjutnya pada tahun 1953, dengan Undang-Undang No.36 Tahun 1953 Lembaran Negara Republik Indonesia No.86 Tahun 1953 ditetapkan Undang-Undang tentang "Bank Tabungan Pos" mencabut Postpaarbank Ordonantie.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 Tahun 1963 Lembaran Negara Republik Indonesia No.62 Tahun 1963 tanggal 22 Juni 1963, nama Bank Tabungan Pos diganti menjadi Bank Tabungan Negara.

Pada tahun 1974, Pemerintah mulai dengan rencana pembangunan perumahan. Guna menunjang keberhasilan kebijakan tersebut, Bank Tabungan Negara ditunjuk sebagai Lembaga Pembiayaan Kredit Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No.B-49/MK/IV/1/1974 tanggal 29 Januari 1974, lahirilah Kredit Pemilikan Rumah. Tahun 1989 dengan surat Direksi Bank Indonesia No.22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, Bank Tabungan Negara ditetapkan menjadi Bank Umum.

Pada tanggal 1 Agustus 1992, status hukum Bank Tabungan Negara diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan kepemilikan saham mayoritas oleh Pemerintah cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No.136 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Pengesahan No.C2-6587.HT.01.01.TH.92 tertanggal 12 Agustus 1992, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.TWapan/1992/PNJS, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.73, tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A. Penyesuaian bentuk hukum tersebut tidak didahului dengan atau dilakukan dengan cara pembubaran (likuidasi), satu dan lain sebagaimana termaktub di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No.S-940/MK.01/1992 tanggal 31 Juli 1992.

Perseroan memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia No.22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.7 tanggal 12 Oktober 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-49309.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 13 Oktober 2009.

Perseroan telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor PW.01/3104/DPR RI/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.66 Tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No.167 tanggal 16 Nopember 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp0,00)	(%)
Modal Dasar			20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:					
Negara Republik Indonesia					
- Saham Seri A Dwiwarna		1		500	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999			3.176.999.999.500	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.354.000.000			3.177.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel			14.124.432.000	7.062.216.000.000	

Saham Seri A – Dwiwarna

Saham yang dikeluarkan Perseroan terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Biasa Atas Nama Seri B. Perseroan hanya mengeluarkan 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada siapapun.

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada Negara Republik Indonesia hak istimewa sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- Hak untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- Hak untuk mengubah anggaran dasar termasuk perubahan modal
- Menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran
- Meminta laporan dan penjelasan mengenai hal tertentu kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal

Saham Biasa Atas Nama Seri B

Kecuali untuk hak-hak istimewa yang berdasarkan anggaran dasar hanya diberikan secara khusus kepada pemegang saham Seri A Dwiwarna sebagaimana telah diterangkan di atas, maka pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan pemegang saham Seri A Dwiwarna, antara lain untuk (i) menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, (ii) menerima dividen, dan (iii) membeli saham baru Perseroan.

Saham Biasa Atas Nama Seri B yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama Seri B lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini (sudah termasuk saham yang dialokasikan kepada manajemen dan karyawan dalam program MESA), secara proforma menjadi sebagai berikut:

	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan MESOP			Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000		20.478.432.000	10.239.216.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0,00%	1	500	0,00%
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999	3.176.999.999.500	100,00%	6.353.999.999	3.176.999.999.500	72,92%
2. Masyarakat						
Manajemen dan Karyawan						
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	-	-	-	226.928.500	113.464.250.000	2,60%
Masyarakat Lainnya						
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	-	-	-	2.133.128.500	1.066.564.250.000	24,48%
3. Saham hasil MESOP						
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	-	-	-	-	-	-
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.354.000.000	3.177.000.000.000	100,00%	8.714.057.000	4.357.028.500.000	100,00%
C. Saham Dalam Portepel	14.124.432.000	7.062.216.000.000		11.764.375.000	5.882.187.500.000	

Seluruh Saham Yang Ditawarkan sejumlah 2.360.057.000 (dua miliar tiga ratus enam puluh juta lima puluh tujuh ribu) Saham Biasa Atas Nama Seri B baru atau sebesar 27,08% (dua puluh tujuh koma nol delapan persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum akan dicatatkan di BEI. Perseroan atas nama pemegang saham juga akan mencatatkan sejumlah 6.263.228.575 (enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima) Saham Biasa Atas Nama Seri B sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 8.623.285.575 (delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima) saham atau 98,96% (sembilan puluh delapan koma sembilan enam persen) dari seluruh jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Sedangkan sejumlah 90.771.425 (sembilan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima) atau 1,04% (satu koma nol empat persen) saham milik Negara RI tidak dicatatkan di BEI guna memenuhi Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1999 ("PP No. 29") tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Sesuai dengan PP No. 29 ditetapkan bahwa:

- a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- b. Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- c. Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- d. Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3)

Dan sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 ("Pengumuman Bursa Efek") perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh pemodal asing akan dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP No. 29 tersebut di atas.

Perseroan tidak akan mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Penawaran Umum ini menjadi Efektif, kecuali sehubungan dengan penerbitan opsi dalam rangka MESOP. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud melakukan hal tersebut, maka Perseroan akan mengikuti semua ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan

Tujuan utama Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan adalah agar manajemen dan karyawan Perseroan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholder* Perseroan.

Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan Perseroan terdiri dari:

A. Program Alokasi Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/ MESA*)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah disetujui Program MESA untuk pemesan khusus sebagai berikut :

Peserta Program MESA terdiri dari semua karyawan tetap Perseroan yang termasuk dalam daftar karyawan Perseroan per tanggal 30 September 2009, seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris dan anggota komite, kecuali Komisaris Independen dan anggota Komite Audit, yang masih menjabat pada saat implementasi Program MESA.

Jumlah saham dalam Program MESA sebesar 9,62% (sembilan koma enam puluh dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum atau sebesar 226.928.500 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) saham. Program MESA diimplementasikan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No.IX.A.7, dimana Peserta Program MESA akan diberikan alokasi untuk membeli saham dengan jatah pasti dengan membayar secara tunai harga saham dengan diskon sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga saham saat Penawaran Umum Perdana. Beban pembelian saham dengan harga diskon tersebut menjadi tanggungan Perseroan. Saham yang dibeli dalam Program MESA tidak dapat dijual dalam periode 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan dalam program MESA kurang dari 226.928.500 (dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) saham, maka sisa saham akan ditawarkan kembali kepada masyarakat.

B. Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management & Employee Stock Option Plan/ MESOP*).

Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak-banyaknya 4% (empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan berdasarkan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.4. Mekanisme pelaksanaan MESOP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1.A yang akan dilaporkan kemudian. Penanggung jawab program MESOP adalah Direksi di bawah pengawasan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Pelaksanaan program MESOP akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut:

- **Tahap Pertama**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40% (empat puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2010.

- **Tahap Kedua**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2011.

- **Tahap Ketiga**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2012.

Hak Opsi yang diberikan kepada Peserta Program MESOP dalam setiap tahapan tersebut dapat digunakan untuk membeli saham dalam program MESOP (*Option Life* = Masa Berlakunya Hak Opsi) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Peserta dapat menggunakan haknya untuk membeli saham dalam program MESOP pada Periode Pelaksanaan dengan membayar secara penuh Harga Pelaksanaan yang akan ditetapkan dikemudian hari, setelah melewati *Vesting Period* (Masa Tunggu) yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Hak Opsi, dalam *Vesting Period* tersebut Peserta belum dapat menggunakan Hak Opsi yang diberikan kepadanya untuk membeli saham dalam program MESOP.

Periode Pelaksanaan akan ditetapkan, sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode setiap tahunnya selama Masa Berlakunya Hak Opsi (*Option Life*). Sedangkan Harga Pelaksanaan akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan saham Perusahaan Terdaftar yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dibukanya Periode Pelaksanaan.

Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terlaksananya program MESOP, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

	Sesudah Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan MESOP			Sesudah Penawaran Umum dan Sesudah Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
A. Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000		20.478.432.000	10.239.216.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. Negara Republik Indonesia						
- Saham Seri A Dwiwama	1	500	0,00%	1	500	0,00%
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.899.999	3.176.999.999.500	72,92%	6.353.999.999	3.176.999.999.500	70,00%
2 Masyarakat						
Karyawan dan Manajemen						
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	226.928.500	113.464.250.000	2,60%	226.928.500	113.464.250.000	2,50%
Masyarakat Lainnya						
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	2.133.128.500	1.066.564.250.000	24,48%	2.133.128.500	1.066.564.250.000	23,50%
3. Saham hasil MESOP						
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	-	-	0,00%	363.085.500	181.542.750.000	4,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.714.057.000	4.357.028.500.000	100,00%	9.077.142.500	4.538.571.250.000	100,00%
C. Saham Dalam Portepel	11.784.375.000	5.882.187.500.000		11.401.289.500	5.700.644.750.000	

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut "FPPS"). Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli yang dikeluarkan oleh para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XXI - Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

2. PEMESANAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/ Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, sebagaimana telah diubah dengan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.

3. JUMLAH PEMESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-0014/PE/KSEI/1009 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 15 Oktober 2009.

A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham, akan tetapi saham-saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 16 Desember 2009 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
2. Sebelum Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan ("FKP") sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham.
6. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Selama Masa Penawaran, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja umum yang berlaku pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan :

- a. fotocopy tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotocopy paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas.
- b. bukti kepemilikan rekening efek atas nama pemesan
- c. serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.

6. MASA PENAWARAN

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 9 Desember 2009 dan ditutup pada tanggal 11 Desember 2009. Mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Namun demikian jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah Saham Yang Ditawarkan maka para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Bapepam dan LK, dapat mempersingkat Masa Penawaran dengan ketentuan Masa Penawaran tersebut tidak kurang dari 1 (satu) hari kerja.

7. TANGGAL PENJATAHAN

Tanggal akhir penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesan adalah tanggal 15 Desember 2009.

8. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM SECARA KHUSUS

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan Harga Penawaran dan/ atau pihak-pihak tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan, tanpa melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek atau para Agen Penjualan, selama Masa Penawaran sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah saham yang ditawarkan.

9. SYARAT PEMBELIAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dilaksanakan pada saat pemesan menyampaikan FPPS. Pembayaran hanya dapat dilaksanakan dengan tunai atau menggunakan cek/bilyet giro Bank Tabungan Negara atau *bank transfer* ke rekening bank penerima atas nama yang telah ditentukan atau dengan *irrevocable standing instruction* kepada Penjamin Emisi Efek yang dilaksanakan pada Tanggal Penjatahan, bagi pemesan saham dengan Penjatahan Pasti. Sedangkan untuk tanggal 11 Desember 2009, metode pembayaran yang diterima hanya dengan tunai atau menggunakan cek/bilyet giro Bank Tabungan Negara. Setoran dimasukkan kedalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada:

Bank Tabungan Negara

Cabang Jakarta Harmoni

Atas nama: Mandiri Sekuritas PT QQ IPO BTN

No. Rekening: 0001401300014144

Pembayaran menggunakan cek/bilyet giro Bank Tabungan Negara harus dilampirkan pada saat melaksanakan pemesanan saham.

Seluruh pembayaran harus diterima (*in good funds*) segera selambat-lambatnya pada tanggal 11 Desember 2009 pukul 15.00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal 11 Desember 2009 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut diatas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

10. BUKTI TANDA TERIMA

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, dan Agen Penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5 (lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima tersebut harus disimpan dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi Pemesan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

11. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mandiri Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat ("*Pooling*") dan Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*") sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang merupakan lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku. Penjatahan saham akan diaudit dengan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.12 Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus.

1. Penjatahan Pasti ("*Fixed Allotment*")

Penjatahan pasti dibatasi 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 2.124.051.500 (dua miliar seratus dua puluh empat juta lima puluh satu ribu lima ratus) saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu, baik domestik maupun luar negeri. Porsi penjatahan pasti ini sudah termasuk jumlah saham dalam program MESA sebesar 9,62% (sembilan koma enam puluh dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum ini.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan kontrak penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam Prospektus bahwa saham tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.

2. Penjatahan Terpusat ("Pooling")

Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 236.005.500 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ribu lima ratus) saham. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

- a. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi yang merupakan direktur, komisaris, pekerja atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Agen Penjualan efek atau pihak lain yang terafiliasi dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum ini, dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham terafiliasi sebagaimana dimaksud di butir 2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - i. Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan dicatatkan.
 - ii. Apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
 - iii. Penjatahan bagi pihak yang terafiliasi

Jika para pemesan karyawan Perseroan dan pemesan yang tidak terafiliasi telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang mempunyai hubungan afiliasi.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Bapepam dan LK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII. G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

Penjamin Emisi Efek akan menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Bapepam dan LK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan.

12. PEMBATALAN ATAU PENUNDAAN PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No.21 tanggal 16 Oktober 2009, sebagaimana diubah dengan Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 12 tanggal 4 Desember 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari Bapepam dan LK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan Bapepam dan LK No.IX. A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

13. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang pemesanan dilakukan dalam mata uang Rupiah oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan atas nama pemesan dengan cara diambil sendiri di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Atas kelalaian pengembalian uang pemesanan yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai dari hari ke-3 (ketiga) sebesar tarif suku bunga jasa giro yang pada saat itu berlaku pada Bank Penerima (Receiving Bank) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan jumlah hari dalam 1 (satu) bulan adalah 30 hari.

Pengembalian uang tidak disertai bunga, apabila pengembalian uang tersebut telah tersedia di kantor para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan tempat dimana pemesan mengajukan FPPS sampai dengan Hari Kerja kedua setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Pengembalian uang pemesanan hanya dapat diberikan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Pembayaran pengembalian uang pemesanan dapat diberikan dengan menggunakan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPS atau bilyet giro, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan dimana FPPS diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan .

14. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham atas distribusi saham tersebut dapat diambil pada kantor Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

15. LAIN-LAIN

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.

Sejalan dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Bapepam No.48/PM/1996, tanggal 17 Januari 1996 Pasal 12, setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat membatalkan pemesanan tersebut.

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00136/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1272 tanggal 17 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 8.201.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	8.201.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	21 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	21 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.718.300.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 50.219.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 18 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

**DATINDO
ENTRYCOM**

*biro
administrasi
efek*

Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/III/11-1272

Jakarta, 17 Maret 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 17 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah 8.201.000 saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.800.871.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	8.201.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.809.072.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukamto
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00133/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1267 tanggal 16 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 8.318.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	8.318.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	18 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	18 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.710.099.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 58.420.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 17 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

01192

**DATINDO
ENTRYCOM**

*biro
administrasi
efek*

Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/III/11-1267

Jakarta, 16 Maret 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

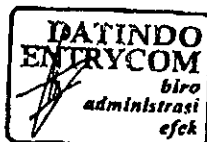
Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 16 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **8.318.500** saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.792.552.500
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	8.318.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.800.871.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukamto
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00127/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1262 tanggal 15 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 7.389.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	7.389.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	17 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	17 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.701.781.075 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 66.739.000 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 16 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

01169

**DATINDO
ENTRYCOM**
*biro
administrasi
efek*

Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/III/11-1262

Jakarta, 15 Maret 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

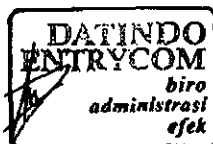
Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 15 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **7.389.500** saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.785.163.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	7.389.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.792.552.500

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukamto
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00124/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1250 tanggal 14 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 4.077.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	4.077.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	16 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	16 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.694.391.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 74.128.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 15 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

DATINDO ENTRYCOM

*biro
administrasi
efek*

Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/III/11-1250

Jakarta, 14 Maret 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPEI MESOP**

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up.: **Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa**

Dengan hormat,

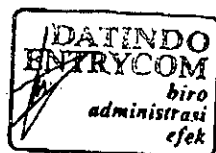
Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 14 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **4.077.000** saham dengan perincian sebagai berikut:

Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh

Total Saham Sebelumnya	8.781.086.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	4.077.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.785.163.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukanto
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00117/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1252 tanggal 11 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 3.238.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	3.238.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	15 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	15 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.690.314.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 78.205.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 14 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Abdul Mun'im
Ph. Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

0119

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/III/11-1252

Jakarta, 11 Maret 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**

Kepada Yth.:

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 11 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 11 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **3.238.000** saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.777.848.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	3.238.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.781.086.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukamto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00115/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1245 tanggal 10 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 3.195.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	3.195.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	14 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	14 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.687.076.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 81.443.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 11 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

01038

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/III/11-1245

Jakarta, 10 Maret 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: **Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa**

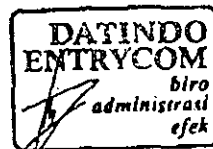
Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 10 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah 3.195.000 saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.774.653.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	3.195.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.777.848.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukamto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00112/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1242 tanggal 9 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 3.815.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	3.815.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	11 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	11 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.683.881.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 84.638.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 10 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

01060

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/III/11-1242

Jakarta, 9 Maret 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

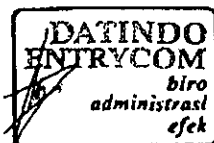
Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 9 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 9 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah 3.815.500 saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.770.837.500
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	3.815.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.744.653.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukamto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00108/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1235 tanggal 8 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 3.499.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	3.499.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	10 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	10 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.680.066.075 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 88.454.000 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 9 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

01038

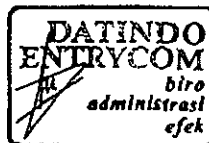
**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman -- Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026No. : DE/III/11-1235
Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP** Jakarta, 8 Maret 2011Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 8 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 8 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **3.499.500** saham dengan perincian sebagai berikut:Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh

Total Saham Sebelumnya	8.767.338.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	3.499.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.770.837.500

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukanto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00103/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1229 tanggal 7 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 3.468.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	3.468.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	9 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	9 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.676.566.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 91.953.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 8 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00096/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1224 tanggal 4 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 4.265.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	4.265.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	8 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	8 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.673.098.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 95.421.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 7 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00989

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/III/11-1224

Jakarta, 4 Maret 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

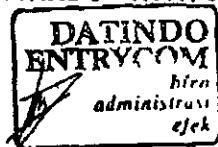
Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 4 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 4 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah 4.265.500 saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.759.604.500
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	4.265.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.763.870.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukanto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00092/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1222 tanggal 3 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 3.099.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	3.099.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	7 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	7 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.668.833.075 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 99.687.000 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 4 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00960

**DATINDO
ENTRYCOM**

*biro
administrasi
efek*

Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/III/11-1222

Jakarta, 3 Maret 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

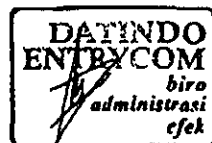
Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 3 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 3 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **3.099.000** saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.756.505.500
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	3.099.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.759.604.500

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukarnto
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00087/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1215 tanggal 2 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 2.611.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	2.611.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	4 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	4 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.665.734.075 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 102.786.000 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 3 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00936

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/III/11-1215

Jakarta, 2 Maret 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

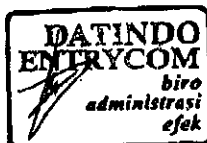
Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 2 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 2 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **2.611.000** saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.753.894.500
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	2.611.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.756.505.500

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukamto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00085/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/III/11-1143 tanggal 1 Maret 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 1.456.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	1.456.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	3 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	3 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.663.123.075 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 105.397.000 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 2 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

009,09

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/III/11-1143

Jakarta, 1 Maret 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: **Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 1 Maret 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 1 Maret 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **1.456.500** saham dengan perincian sebagai berikut:**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.752.438.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	1.456.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.753.894.500

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukamto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00081/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-1135 tanggal 28 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 1.971.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	1.971.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	2 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	2 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.661.666.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 106.853.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 1 Maret 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00882

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-1135

Jakarta, 28 Februari 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: **Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 28 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **1.971.000** saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.750.467.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	1.971.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.752.438.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukamto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00077/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-1130 tanggal 25 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 1.429.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	1.429.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	1 Maret 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	1 Maret 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.659.695.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 108.824.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 28 Februari 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00850

DATINDO ENTRYCOM

*biro
administrasi
efek*

Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-1130

Jakarta, 25 Februari 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

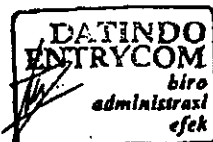
Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 25 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 25 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **1.429.500** saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.749.037.500
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	1.429.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.750.467.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukamto
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00073/BEL.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-1126 tanggal 24 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 1.585.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	1.585.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	28 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	28 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.658.266.075 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 110.254.000 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 25 Februari 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Rina Hadriyani
Ph. Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00036

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-1126

Jakarta, 24 Februari 2011

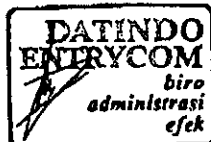
Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 24 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 24 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **1.585.500** saham dengan perincian sebagai berikut:**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.747.452.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	1.585.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.749.037.500

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukamto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00071/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-1121 tanggal 23 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 2.096.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	2.096.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	25 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	25 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.656.680.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 111.839.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 24 Februari 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Rina Hadriyani
Ph. Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

0000

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-1121

Jakarta, 23 Februari 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: **Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 23 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 23 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah 2.096.000 saham dengan rincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.745.356.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	2.096.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.747.452.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukanto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmst Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00065/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-0855 tanggal 22 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 2.365.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	2.365.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	24 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	24 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.654.584.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 113.935.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 23 Februari 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00751

DATINDO ENTRYCOM

*biro
administrasi
efek*

Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0855

Jakarta, 22 Februari 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

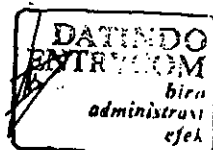
Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 22 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 22 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **2.365.500** saham dengan perincian sebagai berikut:

Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh

Total Saham Sebelumnya	8.742.990.500
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	2.365.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.745.356.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukamto
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00062/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-0850 tanggal 21 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 2.185.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	2.185.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	23 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	23 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.652.219.075 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 116.301.000 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 22 Februari 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00751

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman - Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0850

Jakarta, 21 Februari 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: *Ibu Umi Kulsum - KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

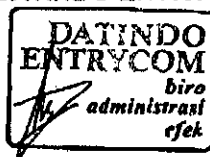
Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 21 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 21 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **2.185.000** saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.740.805.500
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	2.185.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.742.990.500

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukamto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00057/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-0846 tanggal 18 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 1.669.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	1.669.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	22 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	22 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.650.034.075 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 118.486.000 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 21 Februari 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00720

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0846

Jakarta, 18 Februari 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: **Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 18 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 18 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **1.669.000** saham dengan perincian sebagai berikut:**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.739.136.500
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	1.669.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.740.805.500

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukamto**
Direktur

Tembusan Yth.: Bapak Rachmat Nugroho - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00054/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-0840 tanggal 17 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 2.730.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	2.730.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	21 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	21 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.648.365.075 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 120.155.000 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 18 Februari 2011

Dwi Shara Soekarno
Ph. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

50608

**DATINDO
ENTRYCOM**

*biro
administrasi
efek*

Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0840
Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**

Jakarta, 17 Februari 2011

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up.: **Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 17 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 17 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **2.730.500** saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.736.406.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	2.730.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.739.136.500

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukanto
Direktur

Tembusan Yth.: Ibu Rinna Mona Lindiana - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00051/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-0834 tanggal 16 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 2.690.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	2.690.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	17 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	17 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.645.634.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 122.885.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 16 Februari 2011

Goklas Tambunan

Ph. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0834

Jakarta, 16 Februari 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: **Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 16 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **2.690.000** saham dengan perincian sebagai berikut:**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.733.716.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	2.690.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.736.406.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukamto**
Direktur

Tembusan Yth.: Ibu Rinna Mona Lindiana - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00049/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-0819 tanggal 11 Februari 2011 dan No. DE/II/11-0828 tanggal 14 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 4.169.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	4.169.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	16 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	16 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.642.944.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 125.575.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 14 Februari 2011

Goklas Tambunan

Ph. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

DATINDO ENTRYCOM

*biro
administrasi
efek*

Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0819

Jakarta, 11 Februari 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up.: **Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa**

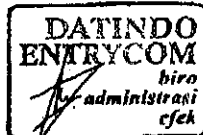
Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 11 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 11 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **1.790.500** saham dengan perincian sebagai berikut:

	<u>Saham Ditempatkan Dan Disetor Penuh</u>
Total Saham Sebelumnya	8.729.547.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	1.790.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	<u>8.731.337.500</u>

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukanto
Direktur

Tembusan Yth.: Ibu Rinna Mona Lindiana - Corporate Secretary

DATINDO
ENTRYCOM
biro
administrasi
efek

Wisma Sudirman – Puri Datindo
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
 Jakarta 10220
 Telp.: (021) 570 9009
 Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0828
 Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP

Jakarta, 14 Februari 2011

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
 Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
 Jakarta 12190

Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 14 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 14 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **2.378.500** saham dengan perincian sebagai berikut:

	<u>Saham Ditempatkan</u> <u>Dan Disetor Penuh</u>
Total Saham Sebelumnya	8.731.337.500
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	2.378.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	<u>8.733.716.000</u>

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukamto
 Direktur

Tembusan Yth.: Ibu Rinna Mona Lindlana - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00047/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-0812 tanggal 10 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 2.425.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	2.425.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	14 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	14 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.638.775.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 129.744.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 11 Februari 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00600

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman - Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0812

Jakarta, 10 Februari 2011

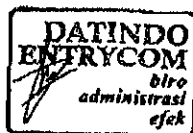
Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: *Ibu Umi Kulsum - KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 10 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **2.425.000** saham dengan perincian sebagai berikut:

Saham Ditempatkan Dan Disetor Penuh	
Total Saham Sebelumnya	8.727.122.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	2.425.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.729.547.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOMSastra Sukanto
Direktur

Tembusan Yth.: Ibu Rinna Mona Lindiana - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00043/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-0808 tanggal 9 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 3.758.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	3.758.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	11 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	11 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.636.350.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 132.169.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 10 Februari 2011

Eddy Nurcahyo

Ph. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Abdul Mun'im

Ph. Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00578

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0808

Jakarta, 9 Februari 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 9 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **3.758.000** saham dengan perincian sebagai berikut:**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.723.364.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	3.758.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.727.122.000

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukanto**
Direktur

Tembusan Yth.: Ibu Rinna Mona Lindiana - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00039/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-0806 tanggal 8 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 2.361.000 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	2.361.000 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	10 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	10 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.632.592.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 135.927.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 9 Februari 2011

Eddy Nurcahyo

Ph. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

00162

**DATINDO
ENTRYCOM***biro
administrasi
efek*Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0806

Jakarta, 8 Februari 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190Up.: *Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 8 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 8 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah 2.361.000 saham dengan perincian sebagai berikut:

	<u>Saham Ditempatkan Dan Disetor Penuh</u>
Total Saham Sebelumnya	8.721.003.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	2.361.000
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	<u>8.723.364.000</u>

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM**Sastra Sukamto**
Direktur

Tembusan Yth.: Ibu Rinna Mona Lindiana - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00038/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-0702 tanggal 7 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 1.893.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	1.893.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	9 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	9 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.630.231.575 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 138.288.500 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 8 Februari 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

**DATINDO
ENTRYCOM**
*biro
administrasi
efek*

Wisma Sudirman – Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0702 Jakarta, 7 Februari 2011
Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up.: **Ibu Umi Kulsum – KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 7 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 7 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah 1.893.500 saham dengan perincian sebagai berikut:

Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh

Total Saham Sebelumnya	8.719.109.500
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	1.893.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	<u>8.721.003.000</u>

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukamto
Direktur

Tembusan Yth.: Ibu Rinna Mona Lindiana - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00037/BEI.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. No. DE/II/11-0630 tanggal 4 Februari 2011 perihal Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP (terlampir), telah terjadi konversi Opsi Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) Tahap I menjadi saham sejumlah 5.052.500 saham.

2. Keterangan efek yang akan dicatatkan :

Jumlah Saham	5.052.500 saham
Asal saham	Konversi MESOP Tahap I
Tanggal Pencatatan	8 Februari 2011
Tanggal Mulai Perdagangan	8 Februari 2011

3. Dengan demikian, saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. yang tercatat di Bursa Efek Indonesia seluruhnya **8.628.338.075 saham**, sedangkan hak opsi MESOP Tahap I yang belum dikonversi sejumlah ekuivalen dengan 140.182.000 saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 7 Februari 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre P.J. Toelle
Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE - Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa - Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Datindo Entrycom;
7. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

DATINDO ENTRYCOM

*biro
administrasi
efek*

Wisma Sudirman - Pun Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220
Telp.: (021) 570 9009
Fax.: (021) 570 9026

No. : DE/II/11-0830

Jakarta, 4 Februari 2011

Perihal : **Penambahan Saham Baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Hasil Pelaksanaan OPSI MESOP**

Kepada Yth.:
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190

Up.: *Ibu Umi Kulsum - KaDiv. Pencatatan Sektor Jasa*

Dengan hormat,

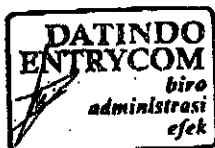
Sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP (Management and Employee Stock Option Plan) dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tertanggal 4 Februari 2011, bersama ini kami sampaikan bahwa pada tanggal 4 Februari 2011 telah diterbitkan saham baru hasil pelaksanaan Opsi MESOP sejumlah **5.052.500** saham dengan perincian sebagai berikut:

**Saham Ditempatkan
Dan Disetor Penuh**

Total Saham Sebelumnya	8.714.057.000
Pelaksanaan Opsi MSOP Tahap I	5.052.500
Total Setelah Pelaksanaan Opsi	8.719.109.500

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. DATINDO ENTRYCOM



Sastra Sukamto
Direktur

Tembusan Yth.: Ibu Rinna Mona Lindiana - Corporate Secretary

PENGUMUMAN
Keterbukaan Informasi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
(Tercatat Di Papan: Utama)
No. Peng-KI-00041/BEI.PPJ/03-2011
(dapat dilihat di laman: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia telah menerima surat dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan No. 52/S/CSD/IR/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 mengenai laporan hasil pelaksanaan ESOP.MSOP sebagaimana terlampir (1 lembar).

Demikian agar maklum.

Jakarta, 23 Maret 2011

Umi Kulsum

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre PJ. Toelle

Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK;
2. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Ptt_BBTN_ki_20110323_41

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk
KANTOR PUSAT :
Menara Bank BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
Telp : (021) 6336789 – 6332666 – 2310490
Fax : (021) 6346704



www.btn.co.id

No : 52 /S/CSD/IR/III/2011

Jakarta, 22 Maret 2011

Lamp: -

Kepada Yth.
PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building Tower I
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan ESOP/MSOP PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN)

Menunjuk:

1. Surat Bank BTN No. 53/S/DIR/DSP/III/2010, tanggal 03 Februari 2010, perihal Permohonan Pra Pencatatan Saham Tambahan dan Laporan Rencana Pelaksanaan MESOP Tahap I PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
2. Surat Bank BTN No. 07/S/Corsec/II/2010, tanggal 4 Februari 2010, perihal Revisi Surat Permohonan Pra Pencatatan Saham Tambahan dan Laporan Rencana Pelaksanaan MESOP Tahap I PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan
3. Surat Bursa Efek Indonesia No. S-00743/BEI.PPJ/02-2010, tanggal 5 Februari 2010, perihal Persetujuan Pra Pencatatan Saham Dalam Rangka Pelaksanaan Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)

maka dalam rangka memenuhi ketentuan dalam angka 8 Surat Edaran Bursa Efek Indonesia No. SE-003/BEJ/09-2005, tanggal 09 September 2005, perihal Tata Cara Pelaksanaan Penentuan dan Pelaporan Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya *Exercise* MESOP Tahap I untuk periode pelaksanaan pada tahun 2011 yang dimulai pada tanggal 01 Februari 2011 s.d. 16 Maret 2011 (*exercise windows* pertama tahun 2011), maka dapat kami laporkan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah MESOP Tahap I yang telah dilaksanakan hak konversinya	95.015.000
2	Jumlah Saham baru yang diterbitkan	95.015.000
3	Jumlah MESOP Tahap I yang belum dilaksanakan dan masih berlaku	50.219.500
4	Jumlah MESOP Tahap I yang belum dilaksanakan dan habis masa berlakunya (kehilangan hak konversinya), jika ada.	-

2. Selanjutnya terhadap butir 1 di atas, anggota Direksi Bank BTN yang telah membeli Saham BBTN dalam rangka *exercise* MESOP Tahap I adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	Iqbal Latanro	Direktur Utama	200.000
2	Saut Pardede	Direktur	466.500
3	Irman A. Zahiruddin	Direktur	466.500
4	Purwadi	Direktur	466.500

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
CORPORATE SECRETARY DIVISION

Rakhmat Nugroho
Corporate Secretary

Nofri Rony Poetra
Investor Relations Head

NPWP : 01.001.609.5-051.000

LS *ls*

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat di Papan : Utama
No. Peng-P-00075/BEL.PPJ/02-2011
(dapat dilihat di *website*: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia melalui surat S-00951/BEL.PPJ/02-2011 tanggal 11 Februari 2011 telah menyetujui pencatatan saham dalam rangka pelaksanaan *Management Stock Option Program* dan *Employee Stock Option Program* (ESOP/MSOP) Tahap II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sejumlah **108.925.500 saham**.

2. Keterangan Efek yang akan dicatatkan secara pra pencatatan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang dicatatkan	108.925.500 saham	
Nilai Nominal	Rp 500,- per saham	
Harga pelaksanaan Tahap II	Rp 1.297,44 per saham	
Periode Pelaksanaan MESOP Tahap II	Tahun 2012	30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Februari 2012
		30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Oktober 2012
	Tahun 2013	30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Februari 2013
		30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Oktober 2013
	Tahun 2014	30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Februari 2014
		30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Oktober 2014
	Tahun 2015	30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Februari 2015
		30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Oktober 2015

3. Selanjutnya pencatatan dan perdagangan saham-saham hasil pelaksanaan ESOP/MSOP akan kami umumkan kemudian setelah adanya laporan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau dari Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tentang pelaksanaan (*exercise*) dari ESOP/MSOP menjadi saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 25 Februari 2011

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Rina Hadriyani
Ph. Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth :

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE, Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Direksi PT Datindo Entrycom (BAE).

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat Di Papan : Utama
No. Peng-P-00072/BEI.PPJ/02-2010
(dapat dilihat di *website*: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia melalui surat No. S-00743/BEI-PPJ/02-2010 tanggal 5 Februari 2010 telah menyetujui pencatatan saham secara pra pencatatan dalam rangka pelaksanaan *Management Stock Option Plan* dan *Employee Stock Option Plan* (MSOP/ESOP) Tahap I PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sejumlah **145.234.500 saham**.

2. Keterangan Efek yang akan dicatatkan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang dicatatkan secara pra pencatatan	145.234.500 saham	
Nilai Nominal	Rp 500,- per saham	
Harga pelaksanaan Tahap I	Rp 855,- per saham	
Periode Pelaksanaan ESOP Tahap I	Tahun 2011	30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Februari 2011
		30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Oktober 2011
	Tahun 2012	30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Februari 2012
		30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Oktober 2012
	Tahun 2013	30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Februari 2013
		30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Oktober 2013
	Tahun 2014	30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Februari 2014
30 Hari Bursa sejak tanggal 1 Oktober 2014		
Tahun 2015	2 - 30 Januari 2015	

3. Selanjutnya pencatatan dan perdagangan saham-saham hasil pelaksanaan MSOP/ESOP akan kami umumkan kemudian setelah adanya laporan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau dari Biro Administrasi Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tentang pelaksanaan (*exercise*) dari MSOP/ESOP menjadi saham.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 22 Februari 2010

Umi Kulsum
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Andre PJ. Toelle
Pjs. Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth :

1. Ketua Bapepam dan LK;
2. Kepala Biro TLE, Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa, Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
7. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Direksi PT Datindo Entricom (BAE).

PENGUMUMAN
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN)
Tercatat Di Papan : Utama
No. Peng- P-00592/BEI.PPJ/12-2009

(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

PT Bursa Efek Indonesia dengan ini mengumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia melalui surat No. S-06530/BEI.PPJ/12-2009 tanggal 14 Desember 2009, telah menyetujui Pencatatan Efek PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. sebanyak 8.623.285.575 saham seri B.

2. Keterangan Efek yang akan dicatatkan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham Biasa Atas Nama Seri B	8.623.285.575 saham
▪ Negara Republik Indonesia	6.263.228.575 saham
▪ Penawaran Umum	2.360.057.000 saham
Nilai Nominal Saham	Rp 500,- per saham
Harga Penawaran Saham	Rp 800,- per saham
Kode Saham	BBTN
Tanggal Pencatatan Saham	17 Desember 2009
Tanggal Mulai Perdagangan Saham	17 Desember 2009
Papan Pencatatan Saham	Papan Utama

3. Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.29 tahun 1999 yang antara lain menetapkan bahwa saham bank hanya boleh tercatat di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99%, maka dari hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan menunjuk Prospektus Penawaran Umum PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dari jumlah saham modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 8.714.057.000 saham, terdapat saham sebanyak 1 saham Seri A Dwiwarna dan 90.771.424 saham seri B atau sebesar 1,04% dari jumlah saham modal ditempatkan dan disetor penuh yang tidak dicatatkan yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
4. Perlu kami umumkan juga bahwa sesuai dengan pernyataan di dalam Prospektus Penawaran Umum dijelaskan bahwa :
 - a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mengadakan program alokasi saham manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) sebesar 9,62% dari jumlah saham yang ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum atau sebesar 226.928.500 saham. Saham yang dibeli dalam program MESA tidak dapat dijual dalam periode 6 bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. di Bursa Efek Indonesia.
 - b. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. merencanakan program pemberian opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (*Management Employee Stock Option Plan/MESOP*) yang memberikan hak opsi kepada peserta program MESOP untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dengan jumlah maksimum 4% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 - Tahap Pertama
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40% dari total saham dalam program MESOP dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2010.

- Tahap Kedua
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% dari total saham dalam program MESOP dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2011.
 - Tahap Ketiga
Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% dari total saham dalam program MESOP dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada bulan Januari 2012.
- c. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tidak akan mengeluarkan atau mencatatkan saham lain dan/atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal Penawaran Umum menjadi Efektif, kecuali sehubungan dengan penerbitan opsi dalam rangka MESOP. Apabila di kemudian hari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bermaksud melakukan hal tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. akan mengikuti semua ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 16 Desember 2009

Umi Kulsum

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Jasa

Abdul Mun'im

Ph. Kepala Divisi Perdagangan Saham

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
2. Kepala Biro TLE Bapepam dan LK;
3. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam dan LK;
4. Pusat Referensi Pasar Modal;
5. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
6. Direksi PT Mandiri Sekuritas;
7. Direksi PT CIMB Securities Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
10. Direksi PT Datindo Entrycom (BAE).

Kepada Yth.
Direksi Perusahaan Tercatat
di-
Tempat

Jakarta, 09 September 2005

SURAT EDARAN
Nomor: SE-003/BEJ/09-2005

Perihal: Tata Cara Pelaksanaan Penentuan Dan Pelaporan Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Perusahaan Tercatat (Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004) khususnya mengenai ketentuan ESOP/MSOP, dengan ini kami sampaikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ESOP/MSOP sebagai berikut:

1. Yang dimaksud Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP dalam ketentuan V.2.1 peraturan tersebut di atas adalah periode dimana karyawan/direksi/komisaris penerima hak opsi dapat melaksanakan haknya untuk melakukan konversi hak opsi menjadi saham Perusahaan Tercatat.
2. Yang dimaksud dengan pengertian “setahun” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.1 peraturan tersebut di atas adalah jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang diperhitungkan sejak bulan dimulainya periode pelaksanaan pertama.
3. Yang dimaksud dengan kewajiban laporan sebelum tanggal Pelaksanaan ESOP/MSOP dalam ketentuan V.2.1. adalah laporan mengenai rencana Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP yang wajib disampaikan oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum tanggal dimulainya setiap Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP.
4. Guna memastikan bahwa Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP dapat dilakukan secara efisien oleh pemegang ESOP/MSOP, maka Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP ditentukan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) Hari Bursa dan sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) Hari Bursa.
5. Pencatatan saham tambahan yang berasal dari ESOP/MSOP dilakukan secara Pra-Pencatatan, yaitu dengan tata cara sebagai berikut:
 - 5.1. Permohonan pencatatan saham tambahan yang berasal dari ESOP/MSOP wajib disampaikan kepada Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum tanggal distribusi ESOP/MSOP;
 - 5.2. Biaya Pra-Pencatatan saham yang berasal dari ESOP/MSOP wajib dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal Pra-Pencatatan yang direncanakan;

- 5.3. Pengumuman Pra-Pencatatan dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Perusahaan Tercatat membayar biaya Pra-Pencatatan saham yang berasal dari ESOP/MSOP.
6. Hal-hal yang harus dimuat dalam pelaporan kepada Bursa selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa sebelum dimulainya setiap periode pelaksanaan ESOP/MSOP sebagaimana dimaksud pada ketentuan V.2.1 peraturan tersebut di atas, memuat penjelasan sebagai berikut:
 - 6.1. Putusan RUPS yang menyetujui penerbitan ESOP/MSOP;
 - 6.2. Tatacara mengenai distribusi dan pelaksanaan ESOP/MSOP;
 - 6.3. Periode Pelaksanaan konversi ESOP/MSOP menjadi saham yang akan dilaksanakan;
 - 6.4. Jumlah keseluruhan ESOP/MSOP yang memiliki hak konversi yang masih berlaku;
 - 6.5. Jumlah ESOP/MSOP yang berhak untuk dikonversi pada periode pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 6.3 di atas;
 - 6.6. Harga pelaksanaan ESOP/MSOP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2.2. peraturan tersebut di atas.
7. Rencana Periode Pelaksanaan ESOP/MSOP yang telah dilaporkan kepada Bursa, menjadi efektif sejak diumumkan di Bursa.
8. Dalam rangka memberikan keterbukaan informasi mengenai hasil Pelaksanaan ESOP/MSOP, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa setelah berakhirnya Periode Pelaksanaan, Perusahaan Tercatat menyampaikan laporan kepada Bursa untuk diumumkan di Bursa yang memuat informasi sebagai berikut:
 - 8.1. Jumlah ESOP/MSOP yang telah dilaksanakan hak konversinya berikut jumlah saham baru yang telah diterbitkan;
 - 8.2. Jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan masih berlaku;
 - 8.3. Jumlah ESOP/MSOP yang belum dilaksanakan dan habis masa berlakunya (kehilangan hak konversinya), jika ada.
9. Pengumuman pencatatan saham hasil Konversi ESOP/MSOP diumumkan Bursa selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah diterimanya laporan hasil pelaksanaan ESOP/MSOP.

Dalam hal RUPS Perusahaan Tercatat yang diselenggarakan sebelum pemberlakuan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, telah memutuskan mengenai pembagian ESOP/MSOP, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan Tercatat yang telah menetapkan ESOP/MSOP, telah mengumumkan tata cara pelaksanaan ESOP/MSOP dimaksud, termasuk penetapan harga dan hak ESOP/MSOP telah didistribusikan kepada karyawan/direksi/komisaris, dan juga telah melakukan Pra-Pencatatan saham hasil konversi ESOP/MSOP di Bursa, maka terhadap pelaksanaan konversi ESOP/MSOP tersebut tetap mengacu pada tata cara pelaksanaan ESOP/MSOP sebelum pemberlakuan Peraturan I-A dimaksud.

- b. Bagi Perusahaan Tercatat yang belum menetapkan ESOP/MSOP dan atau belum mengumumkan tata cara pelaksanaan ESOP/MSOP termasuk penetapan harga, berlaku ketentuan V.2. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan Surat Edaran ini.

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian agar maklum.



PT Bursa Efek Jakarta

Erry Firmansyah
Direktur Utama

Eddy Sugito
Direktur Pencatatan

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam);
2. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
3. Asosiasi Emiten Indonesia;
4. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
5. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
6. Asosiasi Biro Administrasi Efek;
7. Pusat Referensi Pasar Modal;
8. Komisaris PT Bursa Efek Jakarta.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP-105/BL/2010

TENTANG

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN
OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan mengenai pembelian kembali saham dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta memberikan fleksibilitas kepada Emiten atau Perusahaan Publik pada aksi korporasi berupa pembelian kembali saham atau pengalihannya lebih lanjut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-45/PM/1998 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK.

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor XI.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-45/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Nomor XI.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-401/BL/2008 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Emiten atau Perusahaan Publik yang telah menyelesaikan pembelian kembali saham sebelum tanggal 16 Agustus 2007, wajib telah menyelesaikan pengalihan saham hasil pembelian kembali saham Emiten atau Perusahaan Publik paling lambat tanggal 16 Agustus 2013.

Pasal 4

Emiten atau Perusahaan Publik yang pada saat dikeluarkannya Peraturan ini sedang melakukan pembelian kembali saham dengan menggunakan Peraturan Nomor XI.B.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-401/BL/2008 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Kondisi Pasar Yang Berpotensi Krisis, wajib menyelesaikan proses pembelian kembali sahamnya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 13 April 2010.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 April 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

PERATURAN NOMOR XI.B.2: PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

1. KETENTUAN UMUM

- a. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - 1) Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
 - 2) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Perusahaan dapat membeli kembali sahamnya sesuai ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 UUPT tanpa melanggar ketentuan Pasal 91, Pasal 92, Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sepanjang memenuhi ketentuan Peraturan ini.
- c. Perusahaan dapat pula membeli kembali sahamnya dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 62 UUPT.
- d. Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- a. RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1.
- b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) perkiraan jadwal, perkiraan biaya pembelian kembali saham, dan perkiraan jumlah nilai nominal seluruh saham yang akan dibeli kembali;
 - 2) penjelasan, pertimbangan, dan alasan dilakukannya pembelian kembali saham Perusahaan;
 - 3) perkiraan menurunnya pendapatan Perusahaan sebagai akibat pelaksanaan pembelian kembali saham dan dampak atas biaya pembiayaan Perusahaan;
 - 4) proforma laba per saham Perusahaan setelah rencana pembelian kembali saham dilaksanakan, dengan mempertimbangkan menurunnya pendapatan;
 - 5) pembatasan harga saham untuk pembelian kembali saham;
 - 6) pembatasan jangka waktu pembelian kembali saham;
 - 7) metode yang akan digunakan untuk membeli kembali saham; dan
 - 8) analisis dan pembahasan manajemen mengenai pengaruh pembelian kembali saham terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perusahaan di masa mendatang.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-2-

- c. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi atas pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perubahan atau penambahan informasi tersebut wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPS.
 - d. Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan.
3. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM
- a. Pelaksanaan pembelian kembali saham wajib diselesaikan paling lama 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d.
 - b. Pembelian kembali saham dapat dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.
 - c. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Bursa Efek, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) transaksi beli dilakukan melalui satu Anggota Bursa Efek; dan
 - 2) harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.
 - d. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan di luar Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perusahaan paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perusahaan;
 - 2) atas saham Perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perusahaan paling tinggi sebesar harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau
 - 3) atas saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pembelian kembali saham Perusahaan paling tinggi sebesar harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau paling tinggi sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih rendah.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-3-

- e. Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 62 UUP, maka Perusahaan wajib mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Bapepam dan LK keterbukaan informasi mengenai:
 - 1) penjelasan dilakukannya pembelian kembali saham Perusahaan;
 - 2) nama pemegang saham yang sahamnya dapat dibeli kembali oleh Perusahaan;
 - 3) harga saham serta tata cara penentuan harga tersebut; dan
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham tersebut.
 - f. Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan RUPS dalam rangka aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) UUP.
 - g. Perusahaan wajib melaporkan hasil pembelian kembali saham kepada Bapepam dan LK secara berkala setiap 6 (enam) bulan, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Penyampaian laporan tersebut paling lambat disampaikan pada tanggal 15 bulan berikutnya dan disusun sesuai dengan Formulir Nomor: XI.B.2-1 Lampiran Peraturan ini.
 - h. Emiten atau Perusahaan Publik yang sahamnya dicatatkan pada Bursa Efek dilarang membeli kembali sahamnya, jika akan mengakibatkan berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu yang mungkin mengurangi secara signifikan likuiditas saham di Bursa Efek.
4. PENGALIHAN SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI
- a. Saham hasil pembelian kembali dapat dialihkan dengan cara, antara lain:
 - 1) dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek;
 - 2) ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;
 - 3) pelaksanaan *Employee Stock Option Plan* atau *Employee Stock Purchase Plan*; dan/atau
 - 4) pelaksanaan konversi Efek Bersifat Ekuitas.
 - b. Pengalihan saham yang dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) hanya dapat dilaksanakan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pembelian kembali saham Perusahaan dilaksanakan seluruhnya;
 - 2) dapat dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS;
 - 3) tidak dapat dilaksanakan dalam kurun waktu bersamaan dengan masa pembelian kembali saham Perusahaan; dan
 - 4) harga pengalihan saham tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata pembelian kembali saham Perusahaan serta:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-4-

- a) atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek satu hari sebelum tanggal penjualan saham atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan, mana yang lebih tinggi;
- b) atas saham Perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau
- c) atas saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih tinggi.
- c. Dalam hal Perusahaan melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham hasil pembelian kembali, maka penghitungan harga pembelian kembali saham disesuaikan dengan mengikuti perbandingan antara nilai nominal saham pada saat pembelian kembali dengan nilai nominal saham hasil aksi korporasi dimaksud.
- d. Dalam hal masih terdapat saham hasil pembelian kembali yang dikuasai oleh Perusahaan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak selesainya pembelian kembali saham, maka Perusahaan wajib mulai mengalihkan saham hasil pembelian kembali dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- e. Dalam hal kewajiban pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak dapat dilaksanakan atau belum dapat diselesaikan oleh Perusahaan, maka dalam jangka waktu paling lama satu tahun setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Perusahaan wajib telah selesai mengalihkan saham dimaksud.
- f. Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud huruf a butir 1), maka harga penjualan saham serendah-rendahnya pada harga:
 - 1) atas saham Perusahaan yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek satu hari sebelum tanggal penjualan saham atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan, mana yang lebih tinggi;
 - 2) atas saham Perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai; atau

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-5-

- 3) atas saham Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek, namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum tanggal penjualan saham oleh Perusahaan tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, tidak boleh lebih rendah dari harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Penilai atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, mana yang lebih tinggi.
- g. Dalam hal pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf d atau huruf e dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), Perusahaan dapat memperpanjang jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf d atau huruf e, jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - 1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari indeks harga saham gabungan satu hari bursa sebelumnya, selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - 2) Bursa Efek dimana saham Perusahaan dicatat dan diperdagangkan ditutup;
 - 3) perdagangan saham Perusahaan tersebut di Bursa Efek dihentikan; dan/atau
 - 4) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.
- h. Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf g telah berakhir, maka Perusahaan wajib segera melanjutkan pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d atau huruf e.
- i. Perusahaan wajib mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan bukti pengumuman dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dan LK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakannya penjualan saham hasil pembelian kembali.
- j. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i untuk penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan di luar Bursa Efek, paling sedikit meliputi:
 - 1) identitas Pihak yang akan menerima saham;
 - 2) waktu pelaksanaan penjualan saham;
 - 3) kegiatan usaha Pihak yang akan menerima saham, apabila Pihak dimaksud merupakan badan usaha; dan
 - 4) sifat hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan Perusahaan (jika ada).

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-6-

- k. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i untuk penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan di Bursa Efek, paling sedikit meliputi:
- 1) nama Anggota Bursa yang ditunjuk untuk melakukan penjualan saham;
 - 2) waktu pelaksanaan penjualan saham; dan
 - 3) jumlah seluruh saham yang akan dijual.
- l. Dalam hal saham hasil pembelian kembali dijual melalui Bursa Efek, maka wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- 1) transaksi jual wajib dilaksanakan melalui satu Anggota Bursa;
 - 2) transaksi jual hanya dapat dilakukan setelah 30 (tiga puluh) menit sejak pembukaan sampai dengan 30 (tiga puluh) menit sebelum penutupan perdagangan; dan
 - 3) jumlah penjualan kembali saham pada setiap hari adalah paling banyak sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah seluruh saham yang telah dibeli kembali oleh Perusahaan.
- m. Dalam hal saham yang dibeli kembali telah dijual pada harga yang lebih rendah dari harga pembelian kembali, maka kerugian tersebut wajib diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan Perusahaan.
5. KETENTUAN PENUTUP
- a. Dalam hal pengalihan saham hasil pembelian kembali merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi Peraturan ini.
 - b. Dalam hal pengalihan saham hasil pembelian kembali merupakan Transaksi Material, maka Perusahaan hanya wajib memenuhi Peraturan ini.
 - c. Pihak sebagai berikut:
 - 1) komisaris, direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perusahaan;
 - 2) orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
 - 3) Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir 1) atau 2),
dilarang melakukan transaksi atas saham Perusahaan tersebut pada hari yang sama dengan pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh Perusahaan melalui Bursa Efek.
 - d. Dalam hal kewajiban penyampaian keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf f, angka 4 huruf i, atau pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf g, jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian keterbukaan informasi atau pelaporan dimaksud wajib disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-105/BL/2010

Tanggal : 13 April 2010

-7-

- e. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 13 April 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

FORMULIR NOMOR : XI.B.2-1

LAMPIRAN: 1
Peraturan Nomor : XI.B.2

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI
SAHAM

PT.
Tanggal s/d

No	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham yang dibeli (lembar)	Harga rata-rata pembelian (Rp.)	Persentase jumlah nominal saham yang dibeli dari seluruh jumlah nominal saham yang akan dibeli sesuai RUPS	Sisa biaya pembelian kembali saham
	Jumlah				

Jakarta,20

Emiten

Direktur

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 429/BL/2009

TENTANG

PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan dari Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik sehingga dapat membuat Pasar Modal sebagai pilihan alternatif sumber pembiayaan yang lebih kompetitif bagi dunia usaha dan mendorong peningkatan kepemilikan publik secara lebih meluas atas perusahaan terbuka, dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-44/PM/1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

Pasal 1

Ketentuan mengenai penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu diatur dalam Peraturan Nomor IX.D.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-44/PM/1998 tanggal 14 Agustus 1998 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Desember 2009.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Desember 2009
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan
ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2009

Tanggal : 9 Desember 2009

PERATURAN NOMOR IX.D.4: PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Perusahaan adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disebut HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain.

2. PERSYARATAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD

- a. Perusahaan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.D.1, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penambahan modal tersebut paling banyak 10 % (sepuluh perseratus) dari modal disetor; atau
- 2) jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuangan Perusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:
 - a) bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus) dari modal disetor atau kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yang berwenang;
 - b) Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset Perusahaan tersebut pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menyetujui penambahan modal; atau
 - c) Perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi pinjaman tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham atau obligasi konversi Perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

- b. Penambahan modal tanpa HMETD wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

3. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

- a. RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2009

Tanggal : 9 Desember 2009

- 2 -

- b. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, Perusahaan wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham yang paling kurang memuat:
 - 1) perkiraan periode pelaksanaan (jika ada); dan
 - 2) analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perusahaan sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa HMETD serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan modal;
dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan.
 - c. Dalam hal penambahan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan angka 2 huruf a butir 2), maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perusahaan juga wajib mengungkapkan Fakta Material tentang kondisi keuangan terakhir yang antara lain meliputi:
 - 1) penjelasan mengenai akun persediaan yang tidak likuid;
 - 2) pinjaman atau piutang ragu-ragu;
 - 3) Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek dan Fasilitas Pembiayaan Darurat (khusus untuk perbankan); dan/atau
 - 4) pinjaman atau piutang macet termasuk pinjaman atau piutang kepada Pihak terafiliasi.
4. PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL TANPA HMETD
- a. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai waktu pelaksanaan penambahan modal tersebut.
 - b. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD, Perusahaan wajib memberitahukan kepada Bapepam dan LK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan penambahan modal tersebut, yang meliputi informasi antara lain jumlah dan harga saham yang diterbitkan.
 - c. Dalam hal penambahan modal dilaksanakan melalui Penawaran Umum, maka pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.A.1.
5. KETENTUAN PENUTUP
- a. Dalam hal penambahan modal tanpa HMETD merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, maka Perusahaan disamping wajib memenuhi Peraturan ini juga wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-429/BL/2009

Tanggal : 9 Desember 2009

- 3 -

- b. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 9 Desember 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Delaksanaan GCG Periode Januari-Desember 2010

PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk



DAFTAR ISI

Pendahuluan	2
I. Pengungkapan Pelaksanaan GCG	2
1. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris	2
2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi	4
3. Rekomendasi Dewan Komisaris	24
4. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite	25
5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern	38
6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	49
7. Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>)	53
8. Rencana Strategis Bank	53
9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank	57
II. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment	76

PENDAHULUAN

Pada penghujung tahun 2009, Bank BTN membuka lembaran sejarah baru dengan menjadi perusahaan terbuka. Langkah strategis ini membawa perubahan mendasar dengan tekad menjadi perusahaan kelas dunia (*world class banking company*). Dengan demikian, segenap aspek pengelolaan bisnis Bank harus disempurnakan dengan melakukan berbagai proses transformasi bisnis.

Salah satu upaya pelaksanaan GCG dimaksud adalah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penerapan GCG yang tertuang dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, pasal 61 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Bank wajib menyusun laporan pelaksanaan Good Corporate Governance pada setiap akhir tahun buku*" serta pemenuhan transparansi pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank, maka Bank BTN menyusun Laporan Pelaksanaan GCG (periode Januari – Desember 2009) yang meliputi:

- I. Pengungkapan Pelaksanaan GCG
- II. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment*

Selanjutnya Laporan Pelaksanaan GCG Bank BTN adalah sebagai berikut :

I. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GCG

Persyaratan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi:

1. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris.

- a. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris berjumlah 5 (lima) orang, dengan komposisi sebagai berikut:
Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Zaki Baridwan
Komisaris Independen : Subarjo Joyosumarto
Komisaris : Gatot Mardiwasisto
Komisaris : Mulabasa Hutabarat
Komisaris Independen : Deswandhy Agusman

Catatan:

- Bapak Deswandhy Agusman diangkat menjadi Komisaris Independen Bank BTN per Juli 2010.
- 2) Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank BTN berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
 - 3) Anggota Dewan Komisaris Bank diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS.
 - 4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan.
 - 5) Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Bank.
 - 6) Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank BTN, maupun pada Bank dan perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam negeri dan di luar negeri.
- b. Persyaratan mengenai jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi adalah sebagai berikut:
- 1) Jumlah anggota Direksi Bank BTN adalah 6 (enam) orang, dengan komposisi sebagai berikut :
Direktur Utama (*President Director*) : Iqbal Latanro
Wakil Direktur Utama (*Vice President Director*) : Evi Firmansyah
Direktur *Risk, Compliance and Human Capital* : Sunarwa

Direktur *Financial , Strategic and Treasury* : Saut Pardede
Direktur *Mortgage and Consumer Banking* : Irman Alvian Zahiruddin
Direktur *Housing and Commercial Banking* : Purwadi

- 2) Seluruh anggota Direksi Bank BTN berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
- 3) Direksi Bank diganti dan diangkat oleh pemegang saham melalui RUPS.
- 4) Seluruh anggota Direksi Bank BTN telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
- 5) Direksi tidak memangku jabatan rangkap sebagai Direktur Utama atau Direktur lainnya pada Badan Usaha Negara, Daerah dan Swasta atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Bank BTN, maupun jabatan struktural, dan jabatan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank BTN dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- 6) Direksi tidak memiliki saham 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank BTN, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan atau perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 7) Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan GCG bagi Bank Umum.
- 8) Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi

2. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya. Secara garis besar, tugas utama Dewan Komisaris di antaranya adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan nasihat dan masukan kepada Direksi serta memastikan Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris, termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Adapun uraian pokok tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank BTN di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Bank oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan bisnis Bank.
- 2) Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan, ketentuan Bank Indonesia dan/atau keputusan RUPS, diantaranya adalah:
 - a. Mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan bisnis Bank (kebijakan kepengurusan oleh Direksi).
 - b. Mengawasi efektivitas penerapan GCG pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi Bank.
 - c. Mengawasi pelaksanaan manajemen risiko.
 - d. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi.
 - e. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia

dan pihak-pihak lainnya.

- f. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RJP, RBB dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - g. Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - h. Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal.
- 3) Menyusun pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing anggota Dewan Komisaris.
 - 4) Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme *review* terhadap kinerja Dewan Komisaris.
 - 5) Menyusun mekanisme penyampaian informasi dari Dewan Komisaris kepada *stakeholders*.
 - 6) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris kepada RUPS.

Dalam melakukan pengawasan atas pengurusan Bank, Dewan Komisaris berkewajiban:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank.
2. Memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan, serta rencana lainnya, yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Mengikuti, mengawasi perkembangan kegiatan Bank, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank.
4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
5. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan

pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.

6. Meneliti dan menelaah serta memberikan tanggapan atas laporan berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan Bank.
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
8. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
9. Melaporkan kepada Bank mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.
10. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
11. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS, diantaranya adalah:
 - a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB) yang diusulkan Direksi.
 - b. Memberikan pendapat kepada RUPS mengenai masalah strategis atau yang dianggap penting, termasuk pendapat mengenai kelayakan Visi dan Misi Bank.
 - c. Menandatangani Laporan dan Kesimpulan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG.
 - d. Mengikuti kegiatan operasional Bank dalam hal pengambilan keputusan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. Namun tidak meniadakan tanggung

jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

- e. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi, termasuk laporan hasil audit intern Bank.
- f. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- g. Memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- h. Membentuk komite untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- i. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- j. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang sekurang-kurangnya mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja; dan pengaturan rapat.
- k. Menghindari pemanfaatan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- l. Tidak mengambil dan/atau tidak menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- m. Mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima pada laporan pelaksanaan *good corporate governance* sesuai ketentuan yang berlaku.

Hak dan wewenang Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa

dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

- b) Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Bank
- c) Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bank dan Direksi harus memberikan semua keterangan dan/atau penjelasan yang berkenaan dengan Bank sebagaimana diperlukan oleh Komisaris
- d) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi
- e) Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris
- f) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris, atas usul pemegang saham Seri A Dwi Warna
- g) Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank
- h) Membentuk Komite Audit, Komite Remunirasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan
- i) Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Bank, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- j) Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank.
- k) Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal

yang dibicarakan.

l) Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS, diantaranya adalah:

- a. Berhak memperoleh akses mengenai Bank dan memperoleh informasi secara berkala, tepat waktu, dan lengkap sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Berhak bertanya kepada Direksi mengenai pengurusan kegiatan usaha Bank dan meminta kepada Direksi menghadiri rapat Komisaris untuk memperoleh penjelasan tentang kondisi Bank.
- c. Berhak mengajukan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d. Berhak mendapatkan remunerasi dan fasilitas sesuai yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Berwenang untuk mengambil keputusan di dalam maupun di luar rapat Dewan Komisaris mengenai hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Perseroan, tugas pokok Direksi adalah menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Bank untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setiap anggota Direksi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dapat menetapkan pembagian

tugas dan wewenang setiap anggota Direksi. Tugas dan wewenang Direksi dalam melakukan supervisi atas divisi adalah:

- 1) Melakukan pembinaan dan pengawasan atas *Division* yang berada di bawah supervisinya, terutama berkenaan dengan pelaksanaan keputusan Direksi.
- 2) Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing Direktur dapat memberikan keputusan atas permasalahan yang diajukan oleh *Division* yang berada di bawah supervisinya.
- 3) Mengambil tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang dianggap perlu sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka peningkatan kinerja Bank dalam batas-batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Bank.
- 4) Menyampaikan hasil dan tindakan-tindakan dan langkah-langkah di atas kepada Direktur Utama, baik secara langsung maupun dalam forum Rapat Direksi.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diantara anggota Direksi, ditetapkan pembagian supervisi *Director* atas *Division* dan Koordinator Wilayah Kerja Kantor Cabang, sebagai berikut:

1. *President Director* berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank dan melakukan supervisi atas Internal Audit Division, Corporate Secretary Division, dan Change Management Office.
2. *Vice President Director* sebagai *Operation Director* dan melakukan supervisi atas *Information & Comunication Technology Division*, *Logistic & Network Division*, dan *Operation & Bussiness Support Division*.
3. *Housing and Comercial Banking Director*, melakukan supervisi atas *Housing & Comercial Lending Division*, *Comercial Funding & Services Division*, dan *Sharia Division*.
4. *Risk, Compliance and Human Capital Director*, melakukan supervisi atas *Compliance Desk*, *Risk Management Division*, *Legal & Loan Documen Desk* dan

Human Capital Division.

5. *Mortgage & Consumer Director*, melakukan supervisi atas *Mortgage & Consumer Lending Division, Consumer Funding & Service Division, Card Business & Electronic Banking Desk, Pos Office Alliance Desk* dan *Priority Banking & Baneassurance Desk.*
6. *Financial, Strategic & Treasury Director*, melakukan supervisi atas *Planing & Performance Management Division, Financial & Accounting Division, Treasury Division*, dan *Collection & Workout Division.*

Dalam hal salah seorang anggota Direksi berhalangan, maka ditetapkan sebagai Direktur supervisi pengganti adalah dengan urutan, sebagai berikut:

1. Jika *President Director* berhalangan, maka yang bertindak sebagai Director supervise pengganti sesuai dengan urutan adalah *Vice President Director* atau anggota Direksi lain yang tertua dalam usia.
2. Jika *Vice President Director* berhalangan dan yang bersangkutan tidak melakukan penunjukan kepada salah seorang anggota Direksi lainnya untuk bertindak sebagai Director supervise pengganti, maka yang bertindak sebagai Director supervise pengganti sesuai dengan urutan adalah *Housing & Comercial Banking Director* atau *Mortgage & Consumer Director* atau *Financial, Strategic & Treasury Director* atau *President Director.*
3. Jika *Housing & Comercial Banking Director* berhalangan dan yang bersangkutan tidak melakukan penunjukan kepada salah seorang anggota Direktur lainnya untuk bertindak sebagai Direktur supervise pengganti, maka yang bertindak sebagai Direktur supervise pengganti sesuai dengan urutan adalah *Mortgage & Consumer Director* atau *Financial, Strategic & Treasury Director* atau *Vice President Director* atau *President Director.*
4. Jika *Risk, Compliance & Human Capital Director* berhalangan, maka yang

bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti adalah *Vice President Director*, dengan ketentuan pada saat *Vice President Director* sedang bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti *Risk, Compliance & Human Capital Director*, maka yang bersangkutan tidak boleh merangkap pula sebagai Direktur supervisi pengganti dari *President Director* dan jabatan *Vice President Director* sebagai supervisi Operation diserahkan kepada *Housing & Commercial Banking Director*.

5. Jika *Mortgage & Consumer Director* berhalangan dan yang bersangkutan tidak melakukan penunjukan kepada salah seorang anggota Direktur lainnya untuk bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti, maka yang bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti sesuai dengan urutan adalah *Financial, Strategic & Treasury Director* atau *Housing & Commercial Banking Director* atau *Vice President Director* atau *President Director*.
6. Jika *Financial, Strategic & Treasury Director* berhalangan dan yang bersangkutan tidak melakukan penunjukan kepada salah seorang anggota Direktur lainnya untuk bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti, maka yang bertindak sebagai Direktur supervisi pengganti sesuai dengan urutan adalah *Housing & Commercial Banking Director* atau *Mortgage & Consumer Director* atau *Vice President Director* atau *President Director*.
7. *President Director* untuk kepentingan Bank atas pertimbangannya sendiri dapat menetapkan Direktur supervisi pengganti lain yang tidak sama dengan ketentuan di atas.

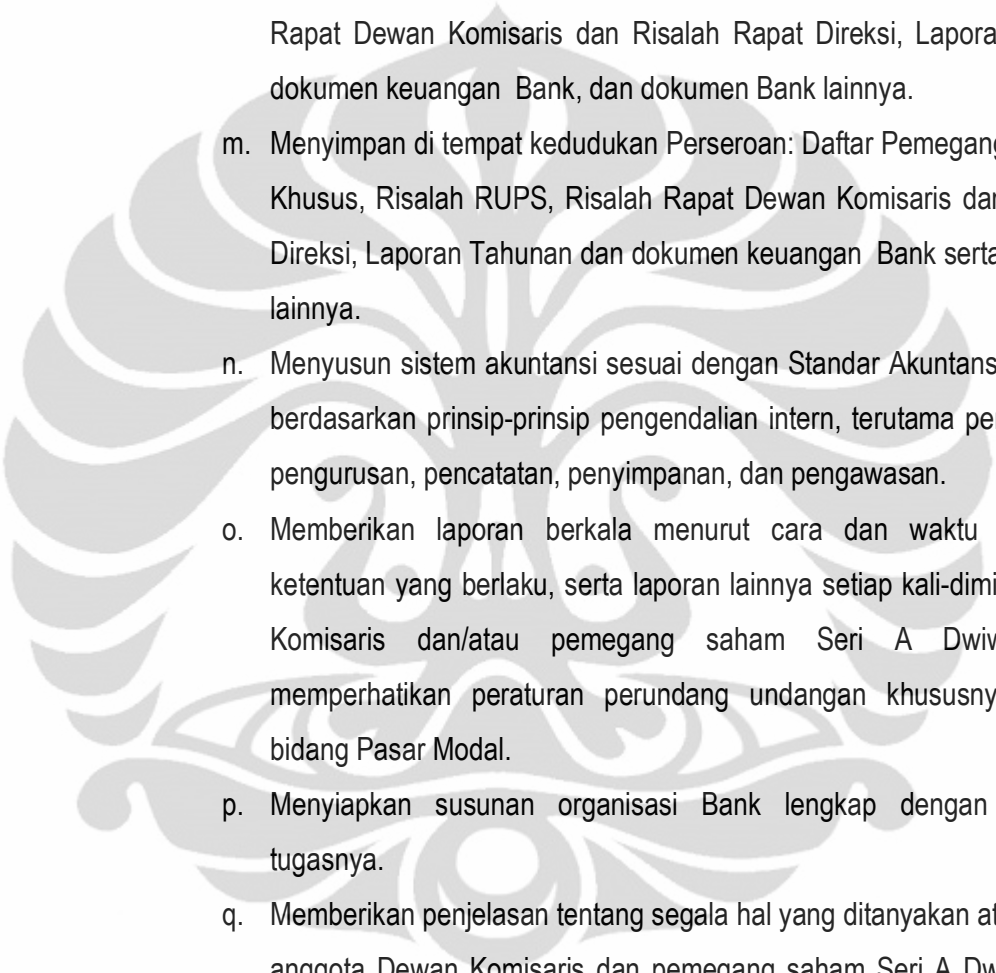
Dalam melaksanakan tugas-tugas di atas, Direksi berhak dan berwenang untuk:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Bank, yang meliputi:
 - a. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai

Bank baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.

- b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, jasa produksi dan penghasilan lain bagi pegawai Bank berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengangkat, memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai Bank berdasarkan peraturan kepegawaian Bank dan peraturan perundang-undangan.
- d. Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary).
- e. Menghapusbuku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
- f. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang diluar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit, namun, dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- g. Menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Bank.
- h. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Bank, mengikat Bank dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Bank, termasuk tetapi tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan aset Bank, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

2. Direksi berkewajiban untuk:
- a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
 - b. Menyiapkan RJP, RBB, RKAP dan rencana kerja lainnya, berikut perubahannya serta menyampaikannya paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
 - c. Menyiapkan RJP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan Bank yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, menandatangani bersama dengan Dewan Komisaris, dan menyampaikannya kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
 - d. Menyiapkan RBB dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Menyiapkan RKAP dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah guna pengajuan pengesahan kepada RUPS.
 - f. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
 - g. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Bank, serta dokumen keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan.
 - h. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
 - i. Menyampaikan Laporan Tahunan setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Bank berakhir kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan.
 - j. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.

- 
- k. Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri.
 - l. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Bank, dan dokumen Bank lainnya.
 - m. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan: Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Bank serta dokumen Bank lainnya.
 - n. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
 - o. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali-diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
 - p. Menyiapkan susunan organisasi Bank lengkap dengan perincian dan tugasnya.
 - q. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.
 - r. Menyusun dan menetapkan blue print organisasi Bank.
 - s. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan

peraturan perundang-undangan, seperti:

- 1) Membuat pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
- 2) Mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang harus dicatatkan dalam Daftar Khusus yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.
- 3) Mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.
- 4) Mengungkapkan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain, yang harus dicatatkan dalam Daftar Khusus yang dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.
- 5) Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 6) Tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- 7) Tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

Direksi Bank BTN, selama tahun 2010 menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 95 (sembilan puluh lima) kali, membahas berbagai persoalan dan/atau strategi pengelolaan Perseroan. Dari rapat-rapat tersebut, persoalan dan/atau strategi yang dibahas dan diputuskan bersama dalam Rapat Direksi, diantaranya adalah:

a) Bidang Kepengurusan, diantaranya:

- 1) Evaluasi kinerja Bank tahun 2009, penetapan RKAP 2011 dan penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) 2011 - 2013
- 2) Implementasi PSAK 50/55
- 3) Pengembangan produk dan layanan baru (Tabungan, Kartu Kredit & Priority Banking)
- 4) Pengembangan jaringan kantor (kantor kas)
- 5) Implementasi struktur organisasi baru untuk kantor cabang dan kantor pusat
- 6) Kebijakan penghimpunan dana melalui sekuritisasi KPR

b) Bidang Manajemen Risiko, diantaranya:

- 1) Pengembangan sistem manajemen risiko, meliputi: pengembangan budaya manajemen risiko, sosialisasi *standard operating procedure* (SOP) secara berkala melalui *Branch Risk Control Officer* (BRCO), pelaksanaan *operational risk self assessment*, pelaksanaan *stress testing* untuk menilai ketahanan Bank dalam menghadapi kejadian risiko yang bersifat ekstrim (*catastropy*).
- 2) Implementasi Basel II, meliputi: persiapan implementasi Basel II yang mengacu kepada *road map* yang disusun Bank Indonesia, melakukan persiapan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach*, melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Basic Indicator Approach* untuk risiko operasional dan *Standardized Methods* untuk risiko pasar.
- 3) Penempatan *Division Risk Control Officer* (DRCO) dan *Branch Risk Control*

Officer (BRCO) sesuai dengan struktur organisasi Bank. Per akhir Desember 2010, jumlah *Division Risk Control Officer* (DRCO) yang ditempatkan di Kantor Pusat ada 3 orang yaitu DRCO Risiko Pasar, DRCO Risiko Kredit dan DRCO Risiko Operasional. Sementara itu, jumlah *Branch Risk Control Officer* (BRCO) yang ditempatkan ada 42 orang di 42 Kantor Cabang dari 63 (enam puluh tiga) Kantor Cabang (per Desember 2010). Untuk beberapa Kantor Cabang yang belum ditempatkan BRCO, pemantauan pengelolaan risiko dilakukan oleh BRCO dari Kantor Cabang terdekat sebagai berikut:

No	KC Penugasan	Tambahan Cakupan Wilayah Kerja
1	BRCO KC Batam	KC Tanjung Pinang
2	BRCO KC Bandung	KC Cimahi
3	BRCO KC Cibubur	KC Harapan Indah
4	BRCO KC Jakarta Harmoni	KC Kebon Jeruk
5	BRCO KC Mataram	KC Kupang
6	BRCO KC Manado	KC Gorontalo dan KC Ternate
7	BRCO KC Makasar	KC Ambon dan KC Kendari
8	BRCO KC Malang	KC Jember
9	BRCO KC Palembang	KC Pangkal Pinang dan KC Jambi
10	BRCO KC Surabaya Pemuda	KC Surabaya Darmo
11	BRCO KC Jakarta Cawang	KC Jakarta Kelapa Gading
12	BRCO KC Karawang	KC Cikarang
13	BRCO KC Tangerang	KC Tangerang Karawaci
14	BRCO KC Pekanbaru	KC Padang
15	BRCO KC Pontianak	KC Samarinda

- 4) Penyempurnaan kebijakan dan prosedur pengelolaan manajemen risiko, melalui pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.
- 5) Pengembangan sistem informasi manajemen risiko. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang

diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

- 6) Pembuatan profil risiko dan pengelolaan risiko yang meliputi: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan.
 - 7) Pengembangan SDM di Bidang Manajemen Risiko, dengan melaksanakan beberapa program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko, yaitu: *Branch Risk Control Officer* dalam menjalankan fungsinya memberikan *second opinion* dan pertimbangan risiko yang melekat dalam setiap bisnis Bank. Sedangkan dalam mengembangkan kapasitas pengetahuan di bidang manajemen risiko, Bank telah mengikutsertakan seluruh pegawai di Bank BTN termasuk di RMD, DRCO dan sebagian besar BRCO dalam rangka sertifikasi manajemen risiko, selanjutnya Bank juga melakukan *internal training* dan mempersiapkan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan karyawan yang akan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Risiko).
- c) Bidang Pengendalian Internal.
- 1) Evaluasi fungsi compliance pada internal control di kantor cabang
 - 2) Tindak lanjut hasil pemeriksaan audit Bank
 - 3) Penanganan dan tindak lanjut terhadap fraud
 - 4) Penanganan dan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen kredit yang disekuritisasi
 - 5) Satuan kerja manajemen risiko bekerja sama dan atau berkoordinasi dengan satuan audit internal dengan melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya peningkatan *internal control* dalam berbagai kegiatan operasional,

diantaranya:

- a) Dalam setiap pelaksanaan audit di lapangan oleh Divisi Audit Internal telah dilaksanakan prosedur *Audit Rating* dan *Control Self Assesment* berupa kuesioner yang diperuntukkan bagi seluruh jajaran manajemen dimana salah satu variabel diantaranya adalah untuk menilai manajemen Kantor Cabang secara umum serta gaya kepemimpinan dan kontrol di Kantor Cabang sebagai cermin penilaian tata kelola hubungan antara para pelaku GCG secara detil meliputi hubungan antara Kepala Cabang dengan Para Manajer Lininya serta dengan para pegawai dan sebaliknya.
- b) Sejak tahun 2006/2007 IAD dan DMR telah menginstruksikan kepada seluruh Kantor Cabang untuk melakukan evaluasi dan sosialisasi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) di kantor Cabang yang pelaksanaannya harus dan telah dibuat Berita Acara per masing-masing karyawan/pejabat peserta sosialisasi.
- c) Para pejabat BRCO yang ditempatkan di Kantor Cabang telah diberikan pelatihan ACL (*Audit Command Language*) oleh Divisi Audit Intern agar dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dapat melakukan evaluasi dan *asesment* terhadap risiko dan pengendalian rekening aplikasi nasabah dan debitur. Dengan demikian *day to day risk control* dapat di tingkatkan berdasarkan masukan dari BRCO.
- d) Bidang GCG, diantaranya:
 - 1) Menetapkan GCG sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator/KPI*) dalam kontrak Manajemen.
 - 2) Mengesahkan hasil *review* dan pengembangan beberapa *GCG Softstructure*,
diantaranya:

- Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 - Board Manual
 - Corporate Code of Conduct
 - Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
 - Kebijakan Penerimaan dan Pemberian Hadiah/Gratifikasi
 - Kebijakan Aktivitas Politik
 - Kebijakan Whistleblowing
 - Kebijakan Penyediaan Dana Besar dan Pihak Terkait
 - Penyediaan Dana besar dan Dana Pihak Terkait
 - Kebijakan Rencana Strategis
- 3) Melengkapi *GCG Infrastructure*, diantaranya adalah:
- Perubahan Struktur Organisasi Baru
Bank BTN telah membentuk unit kerja baru yang secara khusus menangani implementasi GCG, yaitu *GCG Departement*, yang merupakan bagian dari *Corporate Secretary Division*.
 - Penunjukan *GCG Champion* (koordinator dan asesor GCG) di seluruh unit kerja Kantor Pusat dalam upaya untuk meningkatkan koordinasi pelaksanaan implementasi GCG sehari-hari.
 - Pembuatan *CGC Scoreboard* untuk memantau implementasi pelaksanaan GCG di setiap unit kerja dan sekaligus sebagai indikator untuk menentukan pencapaian KPI unit kerja sesuai metode *Balanced Scorecard*.
 - Monitoring dan Pengembangan *GCG Software* (*Corporate Governance Management System*).
- 4) Agar proses monitoring (identifikasi permasalahan, mencari alternatif

pemecahan dan memberikan saran langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini) terhadap pelaksanaan implementasi GCG menjadi lebih efektif dan efisien, Bank BTN telah melakukan analisis dan pengembangan GCG Software (Corporate Governance Management System) dengan dukungan teknologi informasi.

- 5) Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai, Direksi telah mengirimkan 2 (dua) orang manajer untuk mengikuti *8th International Conference on Corporate Governance: Corporate Governance and Sustainability; Previous International Conferences Organized by the Centre for Good Corporate Research, Birmingham Business School*, pada tanggal 23 Juni 2010.
 - 6) *GCG Awareness Inhouse Training*. Bank BTN telah melaksanakan *GCG Awareness Inhouse Training* pada tanggal 13 sampai dengan 15 Oktober 2010 dengan peserta seluruh Kepala Divisi/Desk/Regional Office dan *GCG Champion* seluruh unit kerja.
 - 7) Melakukan *teleconference* dalam rangka melakukan sosialisasi tentang arti penting implementasi GCG dengan Kantor Cabang.
 - 8) Sosialisasi Kebijakan GCG melalui *workshop*. Sebagai sarana untuk sosialisasi dan sekaligus untuk mendapatkan masukan-masukan terhadap 4 (empat) kebijakan GCG, yaitu: *Code of Conduct, Conflict of Interest, Gratifikasi dan Aktivitas Politik*, Bank BTN telah mengadakan *workshop* bekerja sama dengan Lembaga Komisararis dan Direksi Indonesia (LKDI) pada tanggal 26 s/d 27 Oktober 2010.
- e) Bidang CSR
- Bank memiliki tanggung jawab atau senantiasa memberi makna dalam setiap langkah bisnis yang diambil. Tanggung jawab sosial Perusahaan, bagi Bank, tidak sekedar kewajiban tetapi mengambil bagian dalam membangun

kesejahteraan bersama. Bank berupaya mewujudkan kesejahteraan bagi para *stakeholders*, yakni: nasabah, pegawai, mitra bisnis, pemegang saham, masyarakat dan lingkungan sekitar yang menjadi titik pijakan bisnis Bank. Pada tahun 2010, Bank telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya adalah Bank BTN *Integrated Community Program*, pemberian bantuan sosial, mudik bersama Bank BTN "Mudik Untuk Semua", pemberian beasiswa, pemberian bantuan operasi jantung anak, bantuan kepada korban bencana alam Wasior, gempa bumi Mentawai dan letusan Gunung Berapi, bantuan pembinaan kepada atlet judo dalam rangka mendukung program Indonesia Emas 2011, serta bantuan program kemitraan lainnya.

3. Rekomendasi Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris selama masa tugasnya pada periode 2010 telah melakukan tugas pengawasan, penelaahan dan pemberian saran kepada Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan, yang meliputi kinerja keuangan, implementasi manajemen risiko, transformasi di segenap lini bisnis sebagai bagian dari rencana bisnis Bank BTN, tindak lanjut atas hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal, termasuk hasil pemeriksaan Bank Indonesia. Berikut rekomendasi yang telah diberikan Dewan Komisaris Bank BTN untuk ditindaklanjuti:

- Memberikan rekomendasi atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Bank BTN tahun 2010 untuk disahkan dalam RUPS
- Memberikan rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank BTN tahun 2010 -2012.
- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas penerbitan Obligasi XIV.
- Meminta Direksi agar terus meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi internal kontrol.
- Memberikan pertimbangan kepada Direksi terhadap pemberian kredit yang memiliki risiko tinggi dan minta kepada Direksi agar memperhatikan prinsip kehati-hatian.

- Agar memperhatikan cabang-cabang yang mempunyai NPL tinggi dan berupaya lebih progresif untuk memperbaiki NPL sesuai target pada RKAP dan RBB.
- Menyetujui Direksi untuk melaksanakan kegiatan pendidikan bagi karyawan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian.
- Memberikan arahan dalam rangka penyempurnaan penyusunan RKAP yang akan datang.
- Memberikan persetujuan atas RKAP tahun 2011 dan rekomendasi RBB untuk tahun 2011-2013.
- Merekomendasikan agar realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dijadikan Key Performance Indikator (KPI) Direksi.
- Menekankan agar semua jajaran Bank BTN taat dan disiplin terhadap peraturan yang berlaku dan berkaitan dengan kewajiban laporan kepada BI agar tepat waktu sehingga tidak dikenakan denda dari Bank Indonesia.
- Meminta kepada Direksi dan semua jajaran agar segera menyelesaikan semua temuan-temuan yang ada, baik temuan BPK-RI, BI, Auditor Eksternal (KAP) maupun temuan Auditor Internal (IAD).
- Meminta kepada Direksi dan semua jajaran Bank BTN Direksi agar memperhatikan dan menekan BOPO yang tinggi.
- Mengoptimalkan keberadaan Kantor Cabang baru, sehingga Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berbiaya murah, yaitu giro dan tabungan akan meningkat.
- Mengoptimalkan fee based income, antara lain dengan penerbitan Kartu Kredit, dan harus dihitung antara cost dan benefitnya.

4. **Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, terdiri dari:**

- a. Kelengkapan mengenai struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite, yaitu:

1) Komite Audit.

- a) Komite Audit Bank BTN terdiri dari 4 (empat) orang. Salah seorang anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris Independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua Komite Audit dan dibantu 3 (tiga) anggota Komite Audit lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang dari yang berasal dari pihak independen.
- b) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan bahwa setiap anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup, paling tidak dalam salah satu bidang audit, perbankan, keuangan, atau akuntansi, serta memiliki pengetahuan serta pengalaman yang cukup dalam bidang-bidang lain yang dianggap perlu dalam melaksanakan tugasnya.
- c) Anggota Komite Audit Bank tidak ada yang berasal dari Direksi BTN maupun dari Bank lain.
- d) Rangkap jabatan anggota Komite Audit dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- e) Anggota Komite Audit dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2) Komite Pemantau Risiko.

- a) Komite Pemantau Risiko telah dibentuk dengan Ketua Komisaris

Independen dan anggotanya terdiri 1 (satu) orang Komisaris dan 2 (dua) orang yang berasal dari pihak independen.

- b) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan dan mempertimbangkan integritas, akhlak, moral, dan independensi serta memiliki pengetahuan di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan manajemen risiko.
 - c) Anggota Komite Pemantau Risiko Bank tidak ada yang berasal dari Direksi BTN maupun dari Bank lain.
 - d) Rangkap jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen telah memperhatikan dan mempertimbangkan kompetensi, kriteria, independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- 3) Komite Remunerasi dan Nominasi.
- a) Komite Remunerasi dan Nominasi telah dibentuk dengan Ketua Komisaris Independen dengan anggotanya terdiri dari 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang perwakilan pegawai, yaitu Kepala Divisi *Human Capital*.
 - b) Komisaris membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi tidak secara terpisah melainkan menjadi satu kesatuan.
 - c) Kompetensi/kualifikasi sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan bahwa pengangkatan setiap anggota telah memiliki kompetensi dan pengetahuan sesuai yang dipersyaratkan BI, yaitu memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank, dan sistem nominasi serta *succession plan* Bank.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite

1) Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah:

Komite Audit bertanggung jawab membantu Komisaris dalam pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian internal dan efektivitas pemeriksaan oleh auditor eksternal dan internal, diantaranya:

- a) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan baik yang telah maupun yang akan dikeluarkan Bank seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan yang terdapat dalam Rencana Bisnis Bank (RBB), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang (RJP)
- b) Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan
- c) Mengevaluasi laporan manajemen atas ketaatan Bank terhadap perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank.
- d) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Paling kurang dengan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - 1) Pelaksanaan tugas Internal Audit Division.
 - 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku.
 - 3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku.
 - 4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Internal Audit

Division, Kantor Akuntan Publik, BPK dan hasil pengawasan Bank Indonesia

- e) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Bank.
 - g) Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk meminta Audit Internal Division melaksanakan audit khusus jika diperlukan.
 - h) Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang usulan pengangkatan Kepala Audit Internal Division.
 - i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris
- 2) Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah:
- a) Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank dan memonitor pelaksanaannya.
 - b) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - c) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
 - d) Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank.
 - e) Melakukan pemantauan atas risiko akibat perubahan indikator-indikator dalam pasar (suku bunga, kurs, dan sebagainya) untuk memastikan perubahan tersebut tidak mengganggu kestabilan Bank.
 - f) Melakukan pemantauan atas segenap risiko Bank.

- g) Mengevaluasi kebijakan, sistem dan pengendalian intern yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko konsentrasi kredit.
 - h) Melakukan pemantauan atas pengendalian intern penyaluran kredit.
 - i) Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaiannya.
 - j) Melakukan tugas khusus lainnya yang terkait dengan pemantauan manajemen risiko Bank.
 - k) Dapat mengakses data dan informasi dari manajemen Bank, yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas pemantauan risiko.
- 3) Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:
Tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan kebijakan remunerasi, yaitu:
- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
 - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
 - d) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai telah dengan:
 - 1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2) Prestasi kerja individual.
 - 3) Kewajaran dengan *peer group*.
 - 4) Pertimbangan sasaran dan strategi sesuai RJP Bank.

- e) Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi perbaikan/perubahan yang diperlukan.

Tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan nominasi, yaitu:

- a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS
- c) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris
- d) Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi
- e) Selain berbagai hal di atas, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan
- f) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai telah dengan:
 - Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Prestasi kerja individual.
 - Kewajaran dengan *peer group*.
 - Pertimbangan sasaran dan strategi sesuai RJP Bank
- g) Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi perbaikan/perubahan yang diperlukan.
- h) Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j) Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasinya kepada Dewan Komisaris secara berkala maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

c. Frekuensi rapat Komite selama tahun 2010

No	Bulan	Frekuensi Rapat		
		Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi
1	Januari	1	-	1
2	Februari	1	1	-
3	Maret	1	-	1
4	April	1	1	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	1	1	1
7	Juli	1	1	-
8	Agustus	1	-	-
9	September	1	1	-
10	Oktober	-	-	-
11	November	2	1	1
12	Desember	1	1	1
	Jumlah	11	7	5

d. 1) Program kerja Komite Audit dan realisasinya pada periode 2010, diantaranya:

a) Pengawasan atas audit eksternal.

Auditor eksternal bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku di Indonesia dan memberikan opini apakah laporan keuangan tersebut telah menyajikan secara wajar, dalam seluruh aspek-aspek yang material, posisi keuangan, dan hasil kegiatan dan arus kas perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Pada tahun buku 2010, Kantor Akuntan Publik yang ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan adalah KAP Purwantono, Suherman dan Surya (PSS-EY). Kantor Akuntan Publik tersebut merupakan Kantor Akuntan Publik baru setelah mengalami pergantian nama dari sebelumnya KAP Purwantono, Sarwoko dan Sandjaja. Pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik tersebut telah melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komite audit telah menelaah proses penunjukan tersebut dan penetapan jumlah *fee audit* yang masih dalam batas kewajaran.

Dalam melakukan pengawasan proses audit eksternal, Komite Audit telah berkoordinasi dan mengadakan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik untuk membahas rencana audit, isu utama, temuan audit yang penting, serta kemungkinan adanya hambatan dalam penugasan audit. Komite Audit selanjutnya memastikan hambatan dan temuan tersebut dapat diatasi dan ditindaklanjuti oleh manajemen. Di samping itu, Komite Audit juga mengevaluasi kualitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, berdasarkan standar audit dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk juga evaluasi atas independensi dan obyektivitas akuntan publik.

b) Pengawasan atas audit internal.

Dalam menjalankan fungsi *review* terhadap sistem pengendalian internal, Komite Audit berupaya agar peran audit internal dapat terus senantiasa ditingkatkan dengan melakukan evaluasi atas sumber daya manusia, struktur organisasi, pelaporan pelaksanaan audit internal dan tindak lanjut atas temuannya.

Komite Audit telah melakukan *review* hasil pekerjaan yang dilakukan oleh *Internal Audit Division* selama tahun 2010, yang terdiri dari audit umum konvensional (Kantor Cabang dan Divisi) sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) obyek audit atau 101,39% dari rencana 72 obyek audit, audit umum syariah sebanyak 21 (dua puluh satu) obyek audit atau 100% dari rencana 21 (dua puluh satu) obyek audit dan audit ICT (Information & Communication Technology Audit) sebanyak 14 (empat belas) obyek atau 100% dari rencana 14 (empat belas) obyek audit serta audit khusus sebanyak 13 (tiga belas) obyek. Selama tahun 2010 pelaksanaan audit umum dan audit ICT (Information & Communication Technology Audit) telah selesai dilaksanakan 121 obyek atau 109,01% dari total 111 obyek sesuai anual audit plan 2010.

Berdasarkan *review* terhadap pelaksanaan audit, Komite Audit menyampaikan saran sebagai berikut:

- 1) Agar auditor internal meningkatkan evaluasi atas pengendalian internal yang terkait dengan bisnis proses pemberian kredit komersial (non KPR), termasuk KUR agar NPL dapat ditekan mengingat porsi kredit non perumahan dan KUR akan mengalami peningkatan pada tahun mendatang.
- 2) Agar pada tahun 2011 Internal Audit Division dapat melakukan audit yang lebih terfokus pada proses bisnis yang mengandung risiko tinggi melalui penerapan metode audit berbasis risiko (*risk based audit*), dengan penerapan metode ini kekurangan sumber daya auditor diharapkan dapat

teratasi

Selain mereview laporan audit internal, Komite Audit juga memonitor tindak lanjut yang dilakukan manajemen atas temuan hasil audit pihak lain seperti: audit oleh Bank Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit lainnya, telah dilakukan review paket kompensasi/remunerasi Komisaris dan Direksi. Selama tahun buku 2010 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menerima kompensasi/remunerasi sebesar Rp.24.863.699.144. Komite Audit menyimpulkan bahwa pembayaran kompensasi/remunerasi Direksi dan Komisaris selama tahun buku 2010 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan seperti tersebut diatas, Komite Audit berpendapat bahwa:

1. Penyajian laporan keuangan yang dipublikasikan telah memenuhi azas keterbukaan.
2. Bank telah memiliki sistem pengendalian internal yang memadai.

Komite Audit juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta memberikan nasehat kepada Direksi

- 2) Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya pada periode 2010, diantaranya adalah:
 - a) Komite Pemantau Risiko telah melakukan kajian yang menyangkut *Non Performing Loan (NPL) Gross, Non Performing Financing (NPF) Gross* dan Debitur yang dalam realisasi tahun pertama sudah menunggak (DRBM). Pemantauan dilakukan terhadap cabang-cabang konvensional dan cabang-cabang Syariah dengan *outstanding* total kredit terbesar. Komite Pemantau

Risiko juga secara khusus memantau kantor cabang tersebut di atas yang NPL Gross-nya dan NPF Gross-nya diatas 5%, serta DRBM-nya diatas 2%.

- b) Komite Pemantau Risiko telah menyusun kajian perkembangan dana giro, tabungan dan deposito. Selain itu juga mengkaji *one month maturity mismatch*, *Loan to Deposit Ratio*, pemeliharaan *Secondary Reserve*, Giro Wajib Minimum dan BOPO. Secara khusus Komite Pemantau Risiko memantau proporsi penghimpunan dana murah dan penghimpunan dana mahal, *coscentration risk* yang berhubungan dengan dana pihak ketiga, dan efisiensi beban operasional relatif terhadap pendapatan operasionalnya.
- c) Komite Pemantau Risiko memantau risiko reputasi terutama yang berhubungan dengan aktivitas Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Informasi Manajemen. Secara khusus, Komite terus memantau frekuensi keluhan nasabah yang berhubungan dengan aktivitas ini.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan pertemuan yang telah dilakukan, Komite Pemantau Risiko berpendapat bahwa:

- 1) Bank telah memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko dan telah mengidentifikasi 8 (delapan) jenis risiko Bank yang terkait.
- 2) Bank perlu lebih mengendalikan NPL, NPF, dan DRBM terhadap cabang tertentu yang NPL, NPF, serta DRBMnya relatif besar.
- 3) Bank perlu lebih memperbaiki proporsi penghimpunan dana murah dan penghimpunan dana mahal, menurunkan *concentration risk*, serta menurunkan rasio BOPO
- 4) Frekuensi keluhan nasabah yang berhubungan dengan aktivitas TSI dan SIM agar diupayakan terus menurun dengan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya.
- 5) Ketaatan dalam penyampaian laporan kepada Bank Indonesia masih dapat

lebih ditingkatkan.

Komite Pemantau Risiko juga telah menyampaikan laporan, saran dan catatan atas berbagai aktivitas perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya serta dalam memberikan nasehat kepada Direksi.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2010, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Melakukan pembahasan dan evaluasi program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi periode 2009 dan menyusun program kerja tahun 2010.
- b) Mengembangkan dan mengesahkan Piagam Komite Remunersai dan Nominasi.
- c) Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap kebijakan penetapan Key Performance Indicators Direksi, kepala divisi dan pejabat eksekutif Bank, terutama berkaitan dengan parameter yang digunakan dalam penilaian kinerja terkait dengan penerapan metode Balanced Scorecard.
- d) Melakukan evaluasi dan rekomendasi tentang penetapan sistem reward and punishment pegawai Bank, terutama terkait dengan kebijakan penetapan jasa produksi.
- e) Memberikan rekomendasi agar manajemen dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga pemberdayaan sumber daya manusia dapat lebih efektif.
- f) Melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2010.
- g) Melakukan evaluasi dan rekomendasi terhadap penerapan Pool of Talent, terkait mekanisme dan metode yang digunakan yang harus selaras dengan penerapan.

5. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern dapat diinformasikan sesuai dengan kinerja dari fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, yaitu:

a Fungsi kepatuhan

Penerapan fungsi kepatuhan Bank atau tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan BI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di atur di dalam PBI No.6/10/PBI/2004 tanggal 12-04-2004 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah sebagai berikut:

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2010, tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK, baik untuk pihak terkait maupun pihak tidak terkait dengan Bank BTN.

2) Posisi Devisa Neto (PDN)

Sampai periode Januari sampai dengan Desember 2010, tidak pernah terjadi pelanggaran Posisi Devisa Neto.

3) Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris.

Dengan diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/31/DPNP tanggal 30 Nopember 2009 Perihal Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, langkah langkah antisipasi yang telah dilakukan oleh Bank BTN adalah sebagai berikut:

a. Menyusun ketentuan internal tentang Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), yaitu:

- Peraturan Direksi No.17/PD/DK/2010 tanggal 29 Juni 2010 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Bank BTN.

- Surat Edaran Direksi No.26/DIR/DK/2010 tanggal 30 Juni 2010 Perihal Pedoman Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- b. Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan APU dan PPT
- Pendidikan APU dan PPT diberikan kepada calon pegawai : *Customer Service, Teller Service, Business Process, Officer Development Program (ODP)*.
 - Sosialisasi APU dan PPT diberikan kepada pegawai sebagai sarana *update* pengetahuan terbaru terkait APU dan PPT.
 - Sosialisasi APU dan PPT diberikan kepada pegawai Kantor Pos atas pembukaan Kantor Layanan setara Kantor Kas Bank BTN di Kantor Pos yang melayani produk tabungan e'Batara Pos.
- c. Pengkinian Data Nasabah
- Bank BTN telah menyusun Laporan Rencana Pengkinian Data Nasabah. Sedangkan untuk pengkinian data nasabah yang berbasis risiko akan dilakukan pada tahun 2011 dengan prioritas kepada nasabah yang memiliki saldo lebih dari Rp.500.000.000,-
- 4) Pelaksanaan Compliance Control
- Untuk meminimalisir temuan yang berulang (menggejala) disebabkan lemahnya *Internal Control* di Kantor Cabang, telah dilakukan evaluasi faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyimpangan prosedur dan atau ketentuan yang berlaku. Untuk itu menetapkan langkah-langkah selanjutnya, yaitu:
- a. Tahap Pengenalan I pemeriksaan *Compliance Control* dilakukan oleh Kantor Cabang dengan mengambil 1 (satu) tanggal sampling di bulan Juni atau Juli 2010.
 - b. Tahap Pengenalan II pemeriksaan *Compliance Control* dilakukan oleh Kantor

- Cabang dengan mengambil 3 (tiga) tanggal sampling di bulan Juli 2010.
- c. Uji coba pemeriksaan *Compliance Control* yang dilakukan oleh Kantor Cabang:
 - Periode pemeriksaan *Compliance Control* dibuat dalam kurun waktu bulanan (12 periode dalam setahun) dengan mengambil beberapa tanggal sampling setiap bulan dan dilaporkan ke *Compliance Desk* paling lambat pada tanggal 5 (lima) setelah periode laporan.
 - Dari hasil pemeriksaan *Compliance Control* yang dimulai bulan Agustus 2010 s/d Desember 2010 didapat rata-rata indeks kepatuhan untuk Kantor Cabang Konvensional dan untuk Kantor Cabang Syariah.
 - d. Uji petik pemeriksaan *Compliance Control* yang dilakukan oleh Tim Standardisasi *Compliance Control* Kantor Pusat di 6 (enam) Kantor Cabang Konvensional dan 4 (empat) Kantor Cabang Syariah (wilayah Jabodetabek) dari tanggal 07 Desember 2010 s/d 24 Desember 2010. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mereview pelaksanaan kegiatan *Compliance Control* yang dilakukan oleh Kantor Cabang.
 - e. Finalisasi *draft* Peraturan Direksi (PD), Surat Edaran Direksi (SE), *Standard Operating Procedure* (SOP) serta *Job Description Compliance Control*.
- 5) Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab pula untuk memastikan bahwa Bank BTN telah melaksanakan Pokok-Pokok Penerapan Fungsi Kepatuhan, sekurang-kurangnya meliputi:
- a. Pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan oleh Desk Kepatuhan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Memberikan opini terhadap penerbitan Peraturan Intern Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

- Menginformasikan ketentuan Bank Indonesia yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait.
 - Pemantauan dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.
- b. Pemberitahuan kepada Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala setiap semester kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Disamping itu juga dibuat laporan kepada Bank Indonesia setiap semester.
 - d. Proses penunjukan Direktur Kepatuhan Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Mengkoordinir pelaporan uang palsu.
 - f. Memantau pelaksanaan keputusan ALCO.
- b. Fungsi audit intern
- 1) Penerapan Fungsi Audit Secara Umum
Internal Audit Division (IAD) Bank BTN bertanggung jawab melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan Bank BTN. IAD merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab, serta melapor langsung kepada Direktur Utama dan Komite Audit. Sifat independen IAD juga diatur dalam Piagam Audit (*Charter Audit*) Intern Bank BTN yang memberikan kewenangan pada IAD untuk bekerja tanpa hambatan, bebas dan obyektif tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Piagam Audit Intern Bank BTN, terakhir ditetapkan menurut surat keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.SKB-01/DEKOM-DIR/IAD/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010 tentang "Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Bank Tabungan Nasional (Persero), Tbk". Perseroan sedang melakukan review dan penyesuaian terhadap Piagam Audit ini, dengan memperhatikan status Bank BTN sebagai perusahaan publik.

Fungsi utama IAD adalah membantu tugas Direktur Utama dan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern bank dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan bank. Tugas-tugas yang dilakukan diantaranya:

- a) Merumuskan perencanaan dan menjabarkan secara operasional pelaksanaan audit, serta pemantauan tindak lanjut atas hasil audit.
 - b) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Bank BTN.
 - c) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit kepada semua tingkatan manajemen.
 - d) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dengan berlandaskan pada semua ketentuan yang berlaku.
 - e) Melakukan evaluasi guna meningkatkan/menyempurnakan efektifitas manajemen risiko, kontrol dan *governance processes*.
- 2) Pelaksanaan Audit Sistem Online Payment Point (SOPP)
- Pelaksanaan Audit telah dilakukan terhadap kegiatan operasional terdiri atas:
- a) Audit atas SOPP di Outlet pihak ketiga Kantor Pos untuk Transaksi

Penerimaan dan Pembayaran Tabungan Bank BTN (Tabanas Batara dan e'Batara Pos *Online*). SOPP kegiatan transaksi pada *loket counter* Kantor Pos ini merupakan jasa layanan dari pihak Kantor Pos dalam penyediaan jasa layanan untuk penerimaan dan pembayaran Dana Pihak Ketiga produk Tabungan dari Bank BTN, yaitu Tabanas Batara dan e'Batara Pos *Online*. Nilai Transaksi Dana yang diterima dari SOPP ini nilainya cukup signifikan dan mengendap sebagai bagian dari Dana Pihak Ketiga Tabungan sehingga memerlukan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Operasional Bersama termasuk dalam proses pengisian Customer Information File (CIF). Oleh karenanya, kegiatan audit untuk aktifitas ini memerlukan ketentuan kebijakan bersama, karena objek auditnya adalah produk yang dikelola bersama dengan kebijakan, prosedur, *internal control system* bersama antara bank BTN dan Kantor Pos. Dalam hal ini, proses penerimaan dan pembayaran tabungan di loket kantor pos, proses transfer tagihan dan kewajiban surplus minus dana dari hasil transaksi penerimaan dan pembayaran, hingga proses rekonsiliasinya merupakan variabel kontrol bersama antara Bank BTN dan Kantor Pos. Oleh karenanya, Bank BTN dan Kantor Pos telah membuat Perjanjian Kerjasama (PKS) yang mengatur Kebijakan, Sistem dan Prosedur Bersama untuk kegiatan Proses SOPP kantor Pos ini sejak tahun 2005 dan diperbaharui pada tahun 2008 yang telah mengatur kewajiban pihak Kantor Pos untuk menerima aktifitas audit oleh auditor intern Bank BTN maupun Auditor eksternal yang diinformasikan oleh Bank BTN untuk melaksanakan kegiatan audit atas kegiatan SOPP (Kantor Layanan setara Kantor Kas/KLKK) di kantor Pos. Kebijakan bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara PT.BTN (Persero) dengan PT.Pos Indonesia (Persero) tahun 2005 No.30/PKS/DIR/2005 dan No.34/DIRUT/2005, tanggal 10 Mei 2005 dan

Addendum No.16/ADD/PKS/DIR/2006 dan No.57/ADD/ PKS/DIRBISUG/0706 tanggal 26 Juli 2006, serta Addendum No.19/ADD/PKS/DIR/2007 dan No.49/ADD/PKS/ DIRBISKUG/0507, tanggal 01 Mei 2007 yang kemudian yang diperbaharui dengan PKS tahun 2008 Nomor Pihak Pertama: 111/PKS/DIR/2008 dan Nomor Pihak Kedua:97A/DIRUT/1208 tanggal 01-12-2008 pada pasal 6 Kewajiban Masing-Masing Pihak ayat (2) Kewajiban Pihak Kedua - PT Pos Indonesia (Persero) butir h, mengatur kewajiban PT POS Indonesia sebagai berikut: Mengizinkan Bank Indonesia, Auditor Internal Pihak Pertama (Bank BTN) dan Auditor Eksternal yang diinformasikan Pihak Pertama untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Transaksi di UPT SOPP serta menyampaikan data yang diperlukan untuk itu, sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundangan perbankan yang berlaku. Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut, maka Internal Auditor Bank BTN (IAD) telah mulai dapat melaksanakan audit langsung kepada Kantor Pos/Kantor Layanan setara Kantor Kas (KLKK) yang dipilih sebagai sampel di dalam pelaksanaan general audit rutin. Pelaksanaan audit terhadap SOPP (KLKK) kantor Pos oleh Internal Audit ini telah dimulai sejak periode audit tahun 2008 bersamaan dengan pelaksanaan audit umum.

- b) Audit atas SOPP di *Counter / Outlet* Bank BTN sebagai jasa Layanan *Fee Base* untuk kepentingan Entitas / Pihak lain. SOPP kegiatan transaksi pada *loket counter* Bank BTN yang merupakan jasa layanan *fee base* Bank BTN dalam proses penerimaan pembayaran/ angsuran untuk kepentingan entitas pihak ketiga lain seperti: Pembayaran tagihan Telekom, Listrik, Air, SPP Sekolah/ Perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Dalam hal ini SOPP hanyalah merupakan bagian pekerjaan *teller* bank BTN untuk kegiatan penerimaan kas dari pelanggan Telepon, PLN, PDAM, atau SPP dari Siswa / Mahasiswa, dan

lain sebagainya. Transaksi dalam hal ini hanya merupakan penerimaan dana (*cash in*) dan tidak ada pembayaran (*cash out*), sehingga cukup hanya memerlukan kebijakan, sistem dan SOP internal Bank BTN saja dan tidak memerlukan pengembangan kebijakan, sistem dan prosedur bersama. Dana yang diterima dari SOPP ini tidak mengendap sebagai bagian dari Dana Pihak Ketiga tetapi hanya akan ditampung sementara sebagai Kewajiban Segera Lain dan secara periodik dana di transfer ke rekening Pihak Ketiga yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank BTN. Oleh karenanya Kegiatan audit dalam hal ini telah dilakukan secara kontinyu otomatis dalam setiap kegiatan audit umum oleh internal audit untuk kantor-kantor cabang yang menjalani kegiatan SOPP ini, khususnya untuk proses bisnis operasional lain pada unit *teller*. Audit untuk aktifitas ini dilaksanakan terhadap *internal control sistem* bank BTN khususnya di unit *teller* sebagai bagian dari proses audit umum rutin di Kantor Cabang, sehingga tidak memerlukan ketentuan/kebijakan Audit bersama antara Bank BTN dengan rekanan Pihak Ketiga karena objek auditnya adalah proses bisnis dan *internal control system* penerimaan kas dalam hal ini merupakan variabel kontrol dari internal Bank BTN.

3) Audit Bersifat Strategis

Pada dasarnya, pelaksanaan audit intern memang telah didorong dan dilaksanakan untuk lebih bersifat strategis. Hal ini telah dinyatakan pada *Internal Audit Charter* maupun Pedoman GCG Bank BTN. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a) *Internal Audit Charter* mengatur bahwa audit intern sebagai bagian dari struktur pengendalian intern berperan sebagai mitra kerja strategis (*strategic business partner*), karena fungsinya membantu semua tingkatan manajemen

dalam mengamankan kegiatan operasional bank yang melibatkan dana dari masyarakat, mendorong terwujudnya bank yang sehat dan berkembang secara wajar.

- b) Ketetapan Direksi No.06/DIR/DK/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Pedoman GCG PT.BTN (Persero) huruf N, Pengendalian Internal Bank butir 3, Pengelolaan Fungsi Audit Intern pada huruf b, menjelaskan bahwa Internal Audit IAD berperan sebagai *strategic business partner* bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran bank dengan melakukan evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara objektif dan jasa konsultasi (narasumber) terutama menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk managemen, control* dan *governance processes*.
- c) Pelaksanaan audit yang lebih bersifat strategis telah dilaksanakan oleh auditor internal melalui pelaksanaan audit umum di lapangan maupun melalui *Desk Audit* dengan penjelasan sebagai berikut:
- *Audit Field Work* (Audit Umum) yang dilakuan di Kantor Pusat dan Kantor Cabang tidak lagi hanya melalui pendekatan *compliance* saja. Namun, sejalan dengan peran IAD sebagai *strategic bussiness partner*, dilakukan juga manajemen audit dan operasional audit yang lebih strategis untuk mendorong kinerja operasional. Oleh karenanya, hasil audit juga tidak lagi berorientasi pada kepatuhan namun lebih dominan pada rekomendasi perbaikan bagi seluruh aspek kegiatan operasional dan proses bisnis bank yang lebih baik terutama menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk managemen, control* dan *governance processes* untuk mendorong terwujudnya bank yang sehat dan berkembang secara wajar.
 - Desk Audit melakukan Koordinasi Lintas Divisi sebagai *follow up* untuk penyelesaian temuan-temuan strategis menyangkut permasalahan

kebijakan yang implementasinya tidak/kurang efektif/efisien untuk operasional (perlu disempurnakan) dan menyangkut permasalahan strategis kegiatan operasional yang memerlukan penyelesaian bersama antar Divisi dan dengan Kantor Cabang.

4. Upaya Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Audit Agar Suatu Kasus Lebih Cepat Terdeteksi, antara lain:

- a) IAD telah membentuk dan menjalankan satuan kerja Pengendalian Mutu Audit (PMA) dan satuan kerja Audit Mutu Internal (AMI) ISO 9001:2000. Tugas dan Fungsi PMA dan AMI ini adalah menilai kualitas proses pelaksanaan kegiatan audit dan hasil-hasil audit. Hasil penilaian kinerja PMA ini menjadi bagian penilaian SMK individu Auditor, dengan demikian memotivasi para auditor untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan auditnya.
- b) Untuk meningkatkan kualitas para auditor agar memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan audit yang lebih berkualitas, termasuk agar dapat mendeteksi secara dini adanya penyimpangan/*fraud* telah dilakukan beberapa kali (secara bertahap) pendidikan dan pelatihan "*Forensic Audit* untuk Deteksi Dini *Fraud* dan Penyimpangan" kepada para Auditor sejak tahun 2006. Hingga saat ini lebih dari setengah jumlah auditor IAD telah memperoleh pendidikan *Forensic Audit*.
- c) Dalam pelaksanaan audit di lapangan dilakukan koordinasi antara Tim Audit Internal IAD dengan pejabat dari DMR yang ditempatkan di Kantor Cabang, yaitu: *Branch Risk Control Officer* (BRCO). Koordinasi dengan BRCO ini sangat diperlukan karena BRCO ini yang melakukan *risk assessment*, *control assessment* maupun GCG *assessment* sehari-hari di Kantor Cabang, dibanding IAD yang hanya melakukan audit setiap tahun sekali. Koordinasi IAD dan DMR ini telah diinstruksikan langsung oleh Direktur Kepatuhan yang

langsung membawahi DMR dan BRCO. Bentuk koordinasi antara DMR dan IAD ini sesuai dengan Risalah Rapat tanggal 25 Juni 2009 nomor 2. Perkembangan dan Tindak Lanjut Hasil Audit butir 2.5 dan 26, yaitu:

- DMR diminta untuk mendorong BRCO agar tiap Kantor Cabang menunjuk Pejabat dan Tim (kesepakatan lokal) yang melakukan monitoring *day to day* terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan audit dan menyelesaikan tindak lanjut temuan. BRCO selalu memantau apakah kesepakatan lokal tersebut di jalankan.
 - Tim Audit IAD agar melakukan evaluasi langsung kepada personil BRCO di kantor cabang bersangkutan termasuk fungsi dan tugas dari BRCO tersebut. Kriteria evaluasi didiskusikan bersama DMR sehingga hasilnya dapat digunakan DMR sebagai data untuk penilaian kinerja BRCO
- d) Pembentukan unit Audit Khusus yang terlepas dari penugasan audit umum. Unit Audit Khusus ini khusus untuk menangani kasus-kasus khusus yang bersifat *fraud*, penyimpangan atau pelanggaran berdasarkan hasil temuan awal dari *group* audit umum atau dari sumber pengaduan, temuan kantor cabang, *Branch Risk Control Officer* (BRCO) atau dari sumber-sumber lain. Dengan demikian kasus-kasus khusus ini dapat ditangani secara khusus, fokus dan lebih cepat.
- c. Fungsi audit ekstern
- Untuk memastikan pelaksanaan efektifitas fungsi audit ekstern maka Bank telah memenuhi ketentuan mengenai hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan BI sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Bank telah memberikan penugasan audit terhadap Laporan Keuangan Tahunan periode Januari sampai dengan Desember 2009 kepada Kantor Akuntan Publik

yang disetujui oleh RUPS.

- b) Bank telah menunjuk KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja yang telah terdaftar di Bank Indonesia, sebagai auditor eksternal untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank per 31 Desember 2009 dan 31 Desember 2010.
- c) Penunjukan Kantor Akuntan Publik Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
- d) Penunjukan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan Bank direalisasikan melalui perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan antara pihak Bank BTN dengan KAP.
- e) Bank menyampaikan laporan keuangan per 31 Desember 2009 yang telah diaudit kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan (saat ini sedang dalam proses audit Laporan Keuangan tahun 2010)

6. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern, meliputi:

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) melalui surat persetujuan Nomor 17/KOM/BTN/III/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Persetujuan Review PKMR PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko (KPR) secara triwulanan telah melakukan evaluasi atas laporan profil risiko Bank yang diantaranya mencakup evaluasi terhadap frekuensi pelaporan profil risiko, penetapan tolok ukur *risk control system* (RCS), dan pembagian kriteria penilaian risiko dan RCS.

- Profil risiko disampaikan kepada Komisaris secara triwulanan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan implementasinya.
- 2) Direksi melakukan pengawasan aktif dengan melakukan hal-hal berikut:
- Melalui satuan kerja manajemen risiko melakukan kaji ulang atas kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan dimana setiap kebijakan internal yang menyangkut kegiatan operasional dan sistem informasi Bank harus mendapatkan kajian RMD terlebih dahulu sebelum diminta persetujuannya kepada Direksi.
 - Kaji ulang dilakukan RMD setiap adanya rancangan kebijakan internal oleh divisi yang menyusun kebijakan.
 - Direksi telah memastikan bahwa kualitas sumber daya manusia yang bertugas di satuan kerja manajemen risiko memiliki kompetensi dan mampu melaksanakan/menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan kualifikasi SDM untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan Satuan Kerja Bisnis dan satuan kerja manajemen risiko untuk memastikan efektifitas proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian.
 - Dalam rangka menyediakan sumber daya yang berkualitas telah dilakukan *fit & proper test* sebagai dasar penempatan pejabat di satuan kerja manajemen risiko (Kepala Divisi, Kepala Departemen Market Risk Management, Credit Risk Management, Deaptemen Operational Risk Mangement). Selain itu, dilakukan pelatihan rutin terkait manajemen risiko bagi pegawai dan pejabat di satuan kerja manajemen risiko.
 - Bank telah secara rutin dan berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan

serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya dalam seminar yang terkait dengan manajemen risiko.

- Bank telah mengikutsertakan beberapa pegawai di satuan kerja manajemen risiko untuk mengikuti program magister di bidang manajemen risiko serta perbankan dan keuangan.
- Bank telah mengikutsertakan staf/pegawai dan pejabatnya untuk mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). Sampai dengan Desember 2010 telah mengikuti ujian sertifikasi sebanyak 740 pegawai dengan rincian untuk level 1 sebanyak 420 orang, level 2 sebanyak 219 orang dan level 3 sebanyak 82 orang dan level 4 sebanyak 13 orang serta level 5 sebanyak 6 orang.

b) Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang diatur dalam PD No. 12/PD/DMR/2010 tgl 12 Mei 2010 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Pada PT BTN (Persero) Tbk, yang telah direview secara berkala. Pada periode 2010, telah dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- Direksi menetapkan limit risiko dan besar maksimum risiko dengan mempertimbangkan pengalaman, kemampuan mengelola manajemen risiko, sumber daya manusia, peraturan-peraturan Bank Indonesia, dan praktek prudensial Bank yang baik.
- Penetapan limit risiko disusun oleh Satuan Kerja Bisnis untuk kemudian direkomendasikan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko dan disetujui oleh Direksi.
- Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam memutus kredit di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per level jabatan.
- Terdapat klasifikasi limit kredit untuk mendapat *second opinion* dari BRC dan

- DRCO untuk permohonan kredit di Kantor Cabang dan Kantor Pusat.
- Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam melakukan transaksi terasury per level jabatan.
 - Terdapat klasifikasi limit kewenangan dalam melakukan otorisasi dan fiat bayar di Kantor Cabang dan Kantor Pusat per level jabatan.
- c) Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko:
- 1) Satuan manajemen risiko telah secara efektif melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko melalui laporan *check list* manajemen risiko Kantor Cabang dan laporan profil risiko dan laporan *Quantitative Impact Studies* (QIS).
 - 2) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko telah dilakukan secara aktif oleh *Division Risk Control Officer* (DRCO) di Kantor Pusat dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO).
 - 3) Satuan manajemen risiko melakukan pengumpulan data kerugian risiko operasional selama kurang lebih 5 tahun sejak 2004 s/d 2009.
- d) Beberapa hal mengenai pelaksanaan sistem pengendalian intern di Bank BTN:
- 1) Bank telah membentuk *Division Risk Control Officer* (DRCO) di Kantor Pusat dan *Branch Risk Control Officer* (BRCO) di Kantor Cabang dalam rangka pengawasan aktif pengelolaan risiko di Divisi dan Kantor Cabang.
 - 2) Bank telah menempatkan BRCO pada 42 Kantor Cabang dari 63 Kantor Cabang, 21 Kantor Cabang yang belum ditempatkan BRCO tetap mendapat pemantauan dari BRCO.pada KC terdekat. Bank juga telah menempatkan 3 orang DRCO pada Divisi di Kantor Pusat.
 - 3) Bank telah menyelenggarakan pelatihan pembekalan bagi BRCO baru dan pelatihan ACL bagi seluruh BRCO.

- 4) Bank telah mengikutsetkan BRCO dan DRCO pada seminar, workshop guna mendapatkan kompetensi dalam melakukan pemantauan dan pengendalian risiko.

7. **Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) adalah sebagai berikut:**

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	444	21.230
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	-	-
	b. Group	50	3.613.407

8. **Rencana Strategis Bank.**

a) Rencana jangka panjang (*corporate plan*) 2008-2012

- 1) Bank telah memiliki Rencana Jangka Panjang (RJP/*corporate plan*) tahun 2008-2012 yang disusun secara lengkap sesuai Keputusan Menteri BUMN No: KEP-102/M-BUMN/2002 tentang Penyusunan Rencana Jangka Panjang Badan Usaha Milik Negara dan PBI 6/25/PBI/2004 serta SE BI 6/44/DPNP.
- 2) Rencana Jangka Panjang (RJP) tahun 2008-2012 merupakan rencana strategis Bank sesuai dengan visi dan misi Bank dimana dalam prosesnya perlu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Komisaris.
- 3) Setelah mendapatkan persetujuan Komisaris selanjutnya Direksi meminta persetujuan dari pemegang saham dan telah mendapatkan pengesahan/persetujuan RUPS pada tanggal 08 April 2008.

b) Rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*).

- 1) Bank BTN telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2010-2012 secara lengkap sesuai PBI 6/25/PBI/2004 dan SE BI 6/44/DPNP.
- 2) Dalam menyusun RBB tahun 2010-2012, Bank telah memperhatikan tingkat risiko komposit *Risk Control System (RCS)* dalam kaitannya dengan *strategic*

risk.

- 3) Disamping itu, Bank BTN juga memperhatikan dan mempertimbangkan secara realistis, komprehensif, terukur serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian serta mengakomodasi perubahan bisnis internal dan eksternal dalam rangka kelangsungan usaha Bank.
 - 4) Bank secara rutin telah menyampaikan RBB kepada BI setiap tahun dan menyampaikan laporan realisasinya setiap triwulan.
 - 5) Direksi melaksanakan RBB secara efektif dan konsisten sehingga target-target dan rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dipenuhi atau dapat dicapai untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
- c) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Laporan pengawasan atas pelaksanaan RBB telah disampaikan oleh Komisaris kepada BI secara rutin semesteran.
- d) Realisasi berbagai hal yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Bank, surat BI No. 11/91/DPB1/TPB1-5 adalah sebagai berikut:
- 1) Pembukaan jaringan kantor
Sepanjang tahun 2010, telah dibuka beberapa jaringan kantor sesuai rencana sebagai berikut:
 - Pembukaan kantor baru KC sebanyak 2 kantor.
 - Pembukaan kantor baru KCP sebanyak 10 kantor.
 - Pembukaan kantor baru KK sebanyak 103 kantor.
 - Penempatan mesin ATM sebanyak 215 unit.
 - Pembukaan Layanan Setara Kantor Kas (KLKK-Kantor Pos) sebanyak 616 kantor.
 - Adapun pembukaan KCP Syariah baru yang tidak tercapai seluruhnya sesuai rencana, dimana telah buka 7 KCPS dari rencana sebanyak 11 KCPS serta

peningkatan status payment point menjadi KK sebanyak 8 kantor dari rencana sebanyak 12 kantor

2) Pengembangan produk baru

Sepanjang tahun 2010, telah diluncurkan beberapa produk baru sbb:

- Batara Tabunganku
- Batara Investa
- Electronic Banking System
- Tabungan Deposito
- KRB Pensiunan
- PRR KB
- Tabungan BTN Juara
- Tabungan BTN Junior
- Payment SPP
- Kartu ATM Debit Visa
- Kartu Kredit
- Syukur BTN iB

3) Restrukturisasi SDM

Sepanjang tahun 2010, ada beberapa program restrukturisasi SDM yang dilaksanakan, sebagai berikut :

- Program budaya kerja dengan fokus pada internalisasi nilai-nilai dasar perusahaan berdasarkan POLA PRIMA melalui efektivitas peran change agent.
- Restrukturisasi organisasi baru yang berdasarkan SBU/SSU dengan tahapan implementasi organisasi Kantor Pusat, Regional Office 1 dan sebagian Kantor Cabang sebagai pilot project.
- Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
- Recruitment dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan jaringan

kantor

- Implementasi *strategic map Balance Score Card* level korporat dan level divisi yang dijadikan acuan dalam penyusunan *performance management* hingga ke level individu.

4) Strategi peningkatan dana ritel:

- Promosi dan hadiah: Telah dilakukan beberapa kegiatan promosi dan pemberian hadiah sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) seperti : Undian berhadiah Tabungan Batara, Bonus Bunga dan *Point Reward* untuk Tabungan Batara Prima, Undian berhadiah Tabungan e'Batara Pos, serta promosi-promosi melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang.
- Perluasan jaringan terutama jaringan baru Kantor Kas sebagai strategi dalam meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang murah.
- Peningkatan pelayanan, dengan terus memberikan pelatihan kepada *front liner* dan melakukan standarisasi pelayanan melalui pembagian CD dan buku panduan kepada seluruh outlet mengenai standar sikap dan perilaku layanan.
- Aliansi strategis: Telah dilakukan beberapa kerjasama dengan lembaga lain seperti aliansi dengan Kantor Pos dalam meningkatkan penghimpunan DPK melalui *outlet* Kantor Pos. Aliansi lain yang terus dikembangkan adalah kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi, Pemda, Perusahaan, dan Institusi Kesehatan dalam mengelola keuangan.

5) Kajian yang bersifat strategis dan atau upaya untuk mengantisipasi berbagai hal yang dapat berpengaruh kepada Bank dilakukan dengan mencermati perkembangan:

- Ekonomi makro, diantaranya adalah trend inflasi, kurs, proyeksi IHSG, BI Rate, harga minyak, perkembangan ekonomi dunia (seperti dampak krisis financial

global, resesi dunia, indeks bursa saham global, ketahanan ekonomi Asia, Imbal hasil obligasi jangka panjang dan credit default swap, Ekonomi negara-negara Asia, dan kawasan Amerika Utara dan Uni Eropa).

- Perbankan, diantaranya adalah posisi asset, pertumbuhan kredit, pertumbuhan DPK, CAR, ROA dan ROE, NIM dan BOPO, NPL, LDR, dan laba.
- Kajian Treshold Maturity Mismatch Bank, yang menganalisa ambang batas maturity mismatch Bank BTN.
- Kajian permodalan, yang menganalisa strategi permodalan Bank BTN yang dikaitkan dengan regulasi GWM-LDR.

Kajian-kajian dimaksud telah dilaksanakan oleh Bank secara periodik dan atau telah dilakukan sebagai masukan bagi manajemen dalam memberikan respon dan antisipasi terhadap perkembangan kondisi eksternal.

9. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum di ungkap dalam laporan lainnya, yang meliputi:

- a) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank BTN maupun pada lembaga keuangan bukan bank, bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
- b) Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
- c) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:
 - a) Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank adalah: gaji dan bonus/tantiem.

b) Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, yang mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi, dan jumlah seluruh paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain adalah:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, uang cuti, tunjangan rutin, tantiem, fasilitas kesehatan dan komunikasi)*	5	9.854	6	29.738
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya*) yang:				
a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
b. Tidak dapat dimiliki	5	1.075	6	3.984
Total		10.929		33.722

Keterangan:

- Add.1 : Gaji, Tantiem, Tunjangan Cuti, Tunjangan Pajak Penghasilan, Uang Sandang, Tunjangan Hari Raya dan Premi Santunan Purna jabatan.
- Add 2 : - Direksi mendapat fasilitas perumahan, transportasi dan kesehatan
- Komisaris mendapat fasilitas transportasi dan kesehatan

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

(satuan orang)

No.	Jumlah Remunerasi Per Orang dlm 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
1.	Di atas Rp 2 miliar	6	4
2.	Di atas Rp 1 milyar s.d Rp 2 miliar	-	-
3.	Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	1
4.	Rp 500 juta ke bawah	-	-

d) *Shares option*

a) Kebijakan dalam pemberian *shares option*, adalah sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru. Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) yang di dalamnya sudah termasuk penjatahan saham untuk Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*) dan pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Options Plan/MESOP*).

Program MESOP diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, Sekretaris Dewan Komisaris, anggota Komite dan pegawai tetap yang tercatat pada tanggal 30 September 2009, kecuali Komisaris Independen dan anggota Komite Audit. Pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program dimaksud, untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebanyak-banyaknya 4% (empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Perdana yang akan dilakukan berdasarkan Peraturan BAPEPAM No.IX.D.4. Mekanisme pelaksanaan MESOP akan dilakukan sesuai dengan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1.A. Penanggung jawab program MESOP adalah Direksi di bawah pengawasan Komisaris dan akan dilaporkan dalam RUPS.

Pelaksanaan program MESOP akan dilakukan dengan menerbitkan hak opsi

dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut:

- **Tahap Pertama**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 40% (empat puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2010.

- **Tahap Kedua**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2011.

- **Tahap Ketiga**

Jumlah hak opsi yang akan diterbitkan sebesar maksimum 30% (tiga puluh persen) dari total saham dalam program MESOP, dan akan diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta program MESOP pada tahun 2012.

Hak Opsi yang diberikan kepada Peserta Program MESOP dalam setiap tahapan tersebut dapat digunakan untuk membeli saham dalam program MESOP (*Option Life* = Masa Berlakunya Hak Opsi) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penerbitannya. Peserta dapat menggunakan haknya untuk membeli saham dalam program MESOP pada periode pelaksanaan dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan yang akan ditetapkan dikemudian hari, setelah melewati *Vesting Period* (Masa Tunggu) yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Hak Opsi, dalam *Vesting Period* tersebut peserta belum dapat menggunakan Hak Opsi yang diberikan kepadanya untuk membeli saham dalam program MESOP.

Periode Pelaksanaan akan ditetapkan, sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode setiap tahunnya selama Masa Berlakunya Hak Opsi (*Option Life*). Sedangkan Harga Pelaksanaan akan ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa

Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga rata-rata penutupan saham perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum laporan akan dibukanya periode pelaksanaan. Pelaksanaan Program MESOP telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Pengungkapan *shares option* tahap I yang mencakup:

- Jumlah saham yang telah dimiliki masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif sebelum diberikan *shares option*;
- Jumlah *shares option* yang diberikan;
- Jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir masa pelaporan;
- Harga *opsi* yang diberikan;
- Jangka waktu berlakunya eksekusi *share option*.

adalah sebagai berikut:

MESOP TAHAP I

Keterangan / Nama		Jml saham yang dimiliki	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu Pemesanan
			yang diberikan (Lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
KOMISARIS	ZAKI BARIDWAN	-	-	-	-	-
	MULABASA HUTABARAT	-	-	-	-	-
	SUBARJO JOYOSUMARTO	-	-	-	-	-
	GATOT MARDIWASISTO	-	-	-	-	-
DIREKSI	IQBAL LATANRO (DIRUT)	-	1,253,500	-	855	2011 s.d 2015
	EVI FIRMANSYAH (WADIRUT)	-	1,195,500	-	855	2011 s.d 2015
	SUNARWA	-	1,137,500	-	855	2011 s.d 2015
	SAUT PARDEDE	-	1,137,500	-	855	2011 s.d 2015

	IRMAN ALVIAN ZAHIRUDDIN	-	1,137,500	-	855	2011 s.d 2015
	PURWADI	-	1,137,500	-	855	2011 s.d 2015
DEWAN PENGAWAS SYARIAH	AHMAD NAZRI ADLANI	-	-	-	-	
	MOHAMMAD HIDAYAT	-	-	-	-	
PEJABAT EKSEKUTIF	PEDRO PASARIBU (KACAGA)	-	71,500	-	855	2011 s.d 2015
	ANSAR (KACAGA)	-	69,000	-	855	2011 s.d 2015
	TENGGU JUNAIIDI (KACAGA)	-	70,500	-	855	2011 s.d 2015
	SRI HANDAYANI (KACAGA)	-	82,500	-	855	2011 s.d 2015
	TURKHON MAULAWY (KACAMA)	-	133,500	-	855	2011 s.d 2015
	EDY RUDIANA (KACAGA)	-	76,500	-	855	2011 s.d 2015
	ADE PRAWITA (KACADA)	-	82,500	-	855	2011 s.d 2015
	R.HENDRIONO K (KACATU)	-	99,500	-	855	2011 s.d 2015
	HULMANSYAH (KACAMA)	-	105,000	-	855	2011 s.d 2015
	HULMAN SIAHAAN (KACAGA)	-	72,000	-	855	2011 s.d 2015
	VIATOR SIMBOLON (KACAMA)	-	108,000	-	855	2011 s.d 2015
	SETYAWATI BUDINASTITI (KACAGA)	-	80,500	-	855	2011 s.d 2015
	MAWARDI (KACAGA)	-	59,500	-	855	2011 s.d 2015
	FRISABA H YUSDIANTO (KACAGA)	-	78,500	-	855	2011 s.d 2015
	NURMIAH (KACADA)	-	85,000	-	855	2011 s.d 2015
	TEKI DANARDONO (KACAGA)	-	77,500	-	855	2011 s.d 2015
	SRI REZEKI M.S (KACADA)	-	84,000	-	855	2011 s.d 2015
	MUHAMMAD NURDIN (KACADA)	-	89,500	-	855	2011 s.d 2015
	MANCU SILITONGA (KACADA)	-	79,000	-	855	2011 s.d 2015
	SUSI SULASTRI (KACADA)	-	84,500	-	855	2011 s.d 2015
	AGUS RIYANTO (KACAGA)	-	71,500	-	855	2011 s.d 2015
	SUBUR SARAGIH (KACAGA)	-	78,000	-	855	2011 s.d 2015
	SUDARMADJI (KACAGA)	-	83,000	-	855	2011 s.d 2015
	EDWARD ALIMIN SYARIF (KACADA)	-	70,000	-	855	2011 s.d 2015
	P. PANDU PAMUNGKAS S. (KACAGA)	-	59,500	-	855	2011 s.d 2015
	AGUNG PRIJANTO (KACAGA)	-	79,500	-	855	2011 s.d 2015
DEWI FITRIANINGRUM (KACADA)	-	83,000	-	855	2011 s.d 2015	

YUSMANSYAH (KACAMA)	-	116,000	-	855	2011 s.d 2015
M ADRIAN SYAHBANDI A (KACAGA)	-	59,500	-	855	2011 s.d 2015
HERI SOSIAWAN (KACAMA)	-	110,500	-	855	2011 s.d 2015
SYAMSUL BAHRI (KACAGA)	-	85,000	-	855	2011 s.d 2015
NINIK KUSUMA WARDANI (KACAGA)	-	78,000	-	855	2011 s.d 2015
IMAM HAMZAH SERIO LAGO (KACAGA)	-	70,000	-	855	2011 s.d 2015
SURYANTI AGUSTINAR (KACADA)	-	83,500	-	855	2011 s.d 2015
KASMAWATI (KACAGA)	-	76,000	-	855	2011 s.d 2015
SYAH INDRA (KACAGA)	-	78,500	-	855	2011 s.d 2015
KOMARUDDIN (KACAMA)	-	102,500	-	855	2011 s.d 2015
SUBANDI (KACATU)	-	105,500	-	855	2011 s.d 2015
RICARDO ARIFIN P MARBUN (KACAGA)	-	83,000	-	855	2011 s.d 2015
IKHSAN (KACAGA)	-	69,000	-	855	2011 s.d 2015
YUMNA ELYNAR (KACATU)	-	119,000	-	855	2011 s.d 2015
ERWIN ASRUL (KACADA)	-	100,000	-	855	2011 s.d 2015
MUCHTAR MUHAMMAD NOOR S (KACAGA)	-	58,500	-	855	2011 s.d 2015
YOSSIE PD WARDHANA (KACADA)	-	85,000	-	855	2011 s.d 2015
FARIDAH KADIR (KACAGA)	-	70,000	-	855	2011 s.d 2015
WARANEISENA P.WOWOR (KACAGA)	-	59,000	-	855	2011 s.d 2015
HARY HARYONO S (KACAGA)	-	59,500	-	855	2011 s.d 2015
UTOYO EDY PURWANTO (KACATU)	-	102,000	-	855	2011 s.d 2015
AHMAD FATONI (KACAGA)	-	59,000	-	855	2011 s.d 2015
MARET DS SANTOSA (KACADA)	-	87,000	-	855	2011 s.d 2015
BAMBANG PRASETYO (KACAGA)	-	66,000	-	855	2011 s.d 2015
MAMAT SETIAWAN (KACAGA)	-	88,500	-	855	2011 s.d 2015
POERNOMO (KACAMA)	-	118,500	-	855	2011 s.d 2015
DOHAR SIAHAAN (KACAGA)	-	81,500	-	855	2011 s.d 2015
HENDRATNO (KACADA)	-	87,500	-	855	2011 s.d 2015
M.SIGIT MINTOWARDONO (KACAMA)	-	124,500	-	855	2011 s.d 2015
MUHAMMAD AZHAR (KACAGA)	-	59,500	-	855	2011 s.d 2015
YOHARSYAH S. ADAM (KACAMA)	-	109,500	-	855	2011 s.d 2015

WAWAN SUNARYA (KACAGA)	-	89,000	-	855	2011 s.d 2015
FREDDY DAVIDS PAATH (KACAGA)	-	67,000	-	855	2011 s.d 2015
HERTANTA (KACADA)	-	79,500	-	855	2011 s.d 2015
SASMAYA TUHULELEY (VICE PRESIDENT)	-	84,000	-	855	2011 s.d 2015
SUTARNO (KADIV)	-	120,000	-	855	2011 s.d 2015
HARRIS TULISTYA (KADIV)	-	118,000	-	855	2011 s.d 2015
AHMAD SYAMSUDDIN (KADESK)	-	123,000	35,000	855	2011 s.d 2015
TONY HARMANTO (KADIV)	-	120,000	-	855	2011 s.d 2015
RAKHMAT NUGROHO (KADIV)	-	153,500	-	855	2011 s.d 2015
AMTSAL YUSPIN (KACAB SYARIAH)	-	56,500	-	855	2011 s.d 2015
TEGUH WAHYUDI (KACAB SYARIAH)	-	58,000	-	855	2011 s.d 2015
MUHAMMAD DODI IMAN S (KACAB SYARIAH)	-	66,500	-	855	2011 s.d 2015
SETIYADI (KACAB SYARIAH)	-	56,500	-	855	2011 s.d 2015
TRI MULYONO (KACAB SYARIAH)	-	56,000	-	855	2011 s.d 2015
MARTHA KIRANA (KACAB SYARIAH)	-	68,000	-	855	2011 s.d 2015
EKO DANIEL SW. (KACAB SYARIAH)	-	51,000	-	855	2011 s.d 2015
HERRY FITRIANTO (KACAB SYARIAH)	-	58,500	-	855	2011 s.d 2015
ALEX SOFYAN NOOR (KACAB SYARIAH)	-	78,000	-	855	2011 s.d 2015
APRIANTO (KACAB SYARIAH)	-	49,500	-	855	2011 s.d 2015
KABUL BUDHI SETIAWAN (KACAB SYARIAH)	-	58,500	-	855	2011 s.d 2015
GAMARIA (KACAB SYARIAH)	-	89,000	-	855	2011 s.d 2015
CUK HIDAYAT (KACAB SYARIAH)	-	50,500	-	855	2011 s.d 2015
INDRO SETIADJI (KACAB SYARIAH)	-	67,500	-	855	2011 s.d 2015
R.ANGGARANI (KACAB SYARIAH)	-	78,000	-	855	2011 s.d 2015
MAMAN KARDIMAN (KACAB SYARIAH)	-	78,000	-	855	2011 s.d 2015
MOHAMMAD FAIZ (KACAB SYARIAH)	-	57,000	-	855	2011 s.d 2015
HERMAN SUGIHARTO (KACAB SYARIAH)	-	57,000	-	855	2011 s.d 2015
HARDI SIHOTANG (KADIV)	-	141,500	-	855	2011 s.d 2015
GARDJITO (KADIV)	-	149,500	-	855	2011 s.d 2015
RINI PUDJIASTUTI (KADIV)	-	155,000	-	855	2011 s.d 2015

SULIS USDOKO (KADIV)	-	138,500	-	855	2011 s.d 2015
BAKHTIAR EFFENDI (KADIV)	-	130,500	-	855	2011 s.d 2015
HARRY BUDIONO (VICE PRESIDENT)	-	106,500	-	855	2011 s.d 2015
HARIS PERDANA (KADIV)	-	148,000	-	855	2011 s.d 2015
BUDI HARTONO (KADIV)	-	137,500	-	855	2011 s.d 2015
RIA ISNIJATI (KADIV)	-	159,000	-	855	2011 s.d 2015
TEDJO SUPRIYANTO (KADIV)	-	140,500	-	855	2011 s.d 2015
NASRIL (VICE PRESIDENT)	-	88,000	-	855	2011 s.d 2015
ARDIN MH SIMANJUNTAK (KADIV)	-	144,500	-	855	2011 s.d 2015
MAS GUNTUR DWI SULISTIYANTO (KADIV)	-	155,500	-	855	2011 s.d 2015
HERNING SUSMAYANTI (KADIV)	-	136,000	-	855	2011 s.d 2015

e) Rasio gaji tertinggi dan terendah.

Rasio gaji tertinggi dan terendah per bulan (skala perbandingan) sebagai berikut:

No	Rasio Gaji	Rasio (Perbandingan)
1	Gaji pegawai *) yang tertinggi dan terendah	13,84 : 1
2	Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,11 : 1
3	Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,11 : 1
4	Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	4,93 : 1

Keterangan :

*) Pegawai adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana

f) Frekuensi rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat anggota Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam periode Januari sampai dengan Desember 2010 adalah kali. Sedangkan jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui teknologi telekonferensi tidak ada dan kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat adalah sebagai berikut :

Bulan	Kehadiran Rapat Komisaris (Periode Januari s/d Desember 2010)														
	Zaki Baridwan			Subarjo Joyosumarto			Gatot Mardiwasisito			Mulabasa Hutabarat			Deswandhy Agusman		
	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran	Kehadiran Fisik	Telekonferensi	Jml Kehadiran
Jan	3	-	3	3	-	3	3	-	3	3	-	3	-	-	-
Feb	5	-	5	5	-	5	4	-	4	4	-	4	-	-	-
Mar	5	-	5	5	-	5	4	-	4	4	-	4	-	-	-
Apr	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5	-	-	-
Mei	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Juni	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	-	-	-
Juli	5	-	5	5	-	5	3	-	3	5	-	5	-	-	-
Agust	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4
Sep	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4	4	-	4
Okt	2	-	2	1	-	1	2	-	2	2	-	2	1	-	1
Nov	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5	5	-	5
Des	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	2
Jumlah	43	-	43	42	-	42	39	-	39	41	-	41	16	-	16

g) Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).

Jumlah *internal fraud* yang telah diselesaikan, *internal fraud* yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank, jumlah *internal fraud* yang belum diupayakan penyelesaiannya dan jumlah *internal fraud* yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum, adalah sebagai berikut:

Internal Fraud Dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan
Jumlah internal fraud	-	-	19	7	-	-
Telah diselesaikan	-	-	17	4	-	-
Dalam proses penyelesaian internal	-	-	1	3	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	1	-	-	-

h) Permasalahan hukum

Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang telah selesai (telah

mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian adalah sebagai berikut:

No.	Permasalahan Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1.	Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	7	-	1
2.	Dalam proses penyelesaian	85	-	-
	Total	92	-	1

i) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

1) Transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Jabatan Yang memiliki benturan kepentingan		Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Ket
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Maman Kardiman	Kepala Cabang	Emon Subiantoro	Kepala Kancapem	Kredit	350	-
2	Muhamad Adrian SA	Kepala Cabang	Rosalina	Kepala Kancapem	Kredit	291	-
3	Nurwidi Purboyo	Kepala Cabang	Lulu Sri Lukitowati	Kepala Kancapem	Kredit	300	-
4	Sasmaya Tuhuleley	Kepala CMO	Imam Hamzah Serio Lago	Kepala Cabang	Kredit	375	-
5	Gamaria	Kepala Cabang	Dewan Komisaris		Kredit	671	-

2) Upaya agar pejabat dan pegawai senantiasa menggunakan wewenang dan tugas untuk kepentingan dan tanpa merugikan bank, antara lain:

Komisaris Bank BTN tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank. Dewan komisaris hanya terlibat dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi

pengawasan. Diantaranya adalah memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait dengan melaksanakan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses kredit dilaksanakan oleh Kantor Cabang untuk direkomendasikan ke Kantor Pusat. Selanjutnya, Kantor Pusat akan meneruskannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- b. Khusus untuk transaksi kredit yang mengandung benturan kepentingan, seperti kredit kepada Kepala Cabang, maka Kepala Cabang yang bersangkutan proses pengajuan kredit dilaksanakan oleh Kantor Cabang diluar wilayah kerjanya untuk kemudian direkomendasikan ke Kantor Pusat. Selanjutnya, Kantor Pusat akan meneruskan permohonan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan keputusan kredit.

Pengaturan Benturan Kepentingan Antara Bank dan Anggota Direksi, yaitu:

- a. Apabila terjadi/terdapat suatu transaksi atau kegiatan hukum yang dilakukan oleh Bank, ternyata melibatkan suatu pihak yang mewakili hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan seorang atau lebih anggota Direksi (namun tidak semua anggota Direksi), maka transaksi atau kegiatan hukum tersebut mengandung unsur "benturan kepentingan" antara kepentingan Bank dan kepentingan anggota Direksi.
- b. Apabila terjadi "benturan kepentingan" sebagaimana dimaksud, maka dengan persetujuan Komisaris, Bank dalam transaksi/kegiatan hukum bersangkutan diwakili oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi memiliki benturan kepentingan, sedangkan anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan harus menarik diri keluar dari transaksi/kegiatan hukum yang bersangkutan.
- c. Apabila terjadi/terdapat "benturan kepentingan" yang menyangkut semua anggota Direksi atau semua anggota Direksi terkena/memenuhi ketentuan

dimaksud, maka Bank dalam transaksi/kegiatan hukum yang bersangkutan diwakili oleh Komisaris atau yang ditunjuk oleh Komisaris.

- d. Dalam hal tidak ada Komisaris, maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Bank dalam transaksi/kegiatan hukum yang bersangkutan.

Upaya lainnya agar pejabat dan pegawai senantiasa menggunakan wewenang dan tugas untuk kepentingan dan tanpa merugikan bank, antara lain:

- a. Setiap Divisi/Desk/Regional Office wajib mentransparansikan transaksi yang mengandung benturan, yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangannya.
- b. Dalam hal penghimpunan dana, Bank telah menerapkan manajemen risiko, tidak memberikan hadiah/insentif kepada nasabah dan/atau pihak terkait berkenaan dengan penempatana dana di Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Setiap pegawai Bank BTN diinstruksikan tidak boleh mempunyai usaha sampingan terkait dengan bisnis Bank BTN, seperti suplier/rekanan, penyedia barang/jasa, penyedia lahan, subkontraktor dan lain sebagainya baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.dalam rangka menghindari terjadinya benturan kepentingan.
- d. Karyawan Bank BTN (pejabat dan staf) dan Pengurus Dana Pensiun serta YKP Bank BTN serta anak perusahaan tidak diperkenankan untuk menerima hadiah dari pihak ketiga dalam bentuk apapun dan nilai berapapun. Demikian juga dengan pemberian hadiah kepada Penyelenggara Negara dalam bentuk apapun dan nilai berapapun. Kebijakan ini selain bertujuan untuk menjamin pelaksanaan GCG di Bank BTN juga untuk menghindarkan karyawan Bank

BTN dari konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

- e. Kepala Cabang selaku Pembina Koperasi Pegawai Bank BTN diminta agar memastikan bahwa Koperasi Pegawai dalam berbisnis dengan Bank BTN telah sesuai dengan AD/ART Koperasi Pegawai.
- f. Penyediaan tenaga *outsourcing* yang membutuhkan pembinaan atau keahlian khusus (satpam, penjaga malam) hanya diberikan kepada perusahaan penyedia jasa yang memiliki kualifikasi yang sesuai.

Pada tahun 2010 Bank telah melakukan *up date* peraturan yang terkait dengan penanganan benturan kepentingan & GCG yaitu :

- Peraturan Direksi tentang Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris PT. BTN (Persero) Tbk. dan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk. tentang Panduan Tata Kerja Komisaris dan Direksi (*Board Manual*)
 - Peraturan Direksi tentang Tata Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi PT. BTN (Persero) Tbk.
 - Peraturan Direksi tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) PT. BTN (Persero) Tbk.
 - Peraturan Direksi tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku Pegawai (*Code of Conduct*) PT. BTN (Persero) Tbk.
 - Peraturan Direksi tentang Larangan Pemberian dan Penerimaan Bagi Direksi, Komisaris Dan Pegawai PT. BTN (Persero) Tbk.
 - Peraturan Direksi tentang Aktivitas Politik Komisaris, Direksi Dan Pegawai PT. BTN (Persero) Tbk.
- 3) Upaya meningkatkan transparansi dan kewajaran dalam penanganan dan penyelesaian terhadap pegawai yang melakukan kesalahan untuk meminimalkan ketidakpuasan dari karyawan tersebut, dilakukan dengan melaksanakan

mekanisme atau tata cara penanganan, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pengakuan atau tertangkap tangan atau berdasarkan laporan atau hasil temuan intern/pimpinan unit dengan bukti pelanggaran yang cukup, maka dibuat laporan kepada Kepala Cabang/Divisi.
- b. Berdasarkan laporan tersebut, Kepala Cabang/Divisi melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:
 - Menonaktifkan semua *user id* pegawai yang diindikasikan terlibat dalam pelanggaran.
 - Membentuk Tim Pemeriksa.
 - Apabila diperlukan dapat melakukan tindakan administratif berupa *skorsing* terhadap terperiiksa.
 - Laporan hasil pemeriksaan beserta lampiran Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi disampaikan ke HCD dan IAD Kantor Pusat untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum diajukan dalam rapat LKS Bipartit khusus untuk rekomendasi sanksi pegawai.
- c. Mekanisme penanganan dapat juga dilaksanakan berdasarkan hasil audit umum/khusus, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan awal *general audit*, atau laporan/pengaduan dari kalangan intern maupun kalangan ekstern disertai dengan bukti yang cukup, maka Tim Audit merekomendasikan kepada Direksi untuk melakukan *Special Audit*.
- d. Atas persetujuan Direksi dibentuk Tim *Special Audit* yang diketuai oleh *Internal Audit Division* (IAD).
- e. Atas laporan hasil audit dari Tim *Special Audit* yang disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur Kepatuhan, Komisaris, Komite Audit, dan *Human Capital Division*, maka *Human Capital Division* mengadakan rapat Bipartit khusus untuk merumuskan dan menyampaikan

usulan sanksi kepada Direksi.

- f. Pegawai yang dijatuhi sanksi disiplin mempunyai hak untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sanksi tersebut secara tertulis, yang ditujukan ke *Human Capital Division* dengan disertai bukti baru.
- g. Pegawai dapat direhabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Pegawai diputus bebas dari segala putusan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Tidak ditemukan cukup bukti yang kuat.
 - Telah selesai menjalani masa pembinaan

4) Fungsi Direktur *Risk, Compliance and Human Capital* dan *Internal Audit Division* (IAD) dalam rapat ALCO dapat dijelaskan sebagai berikut:

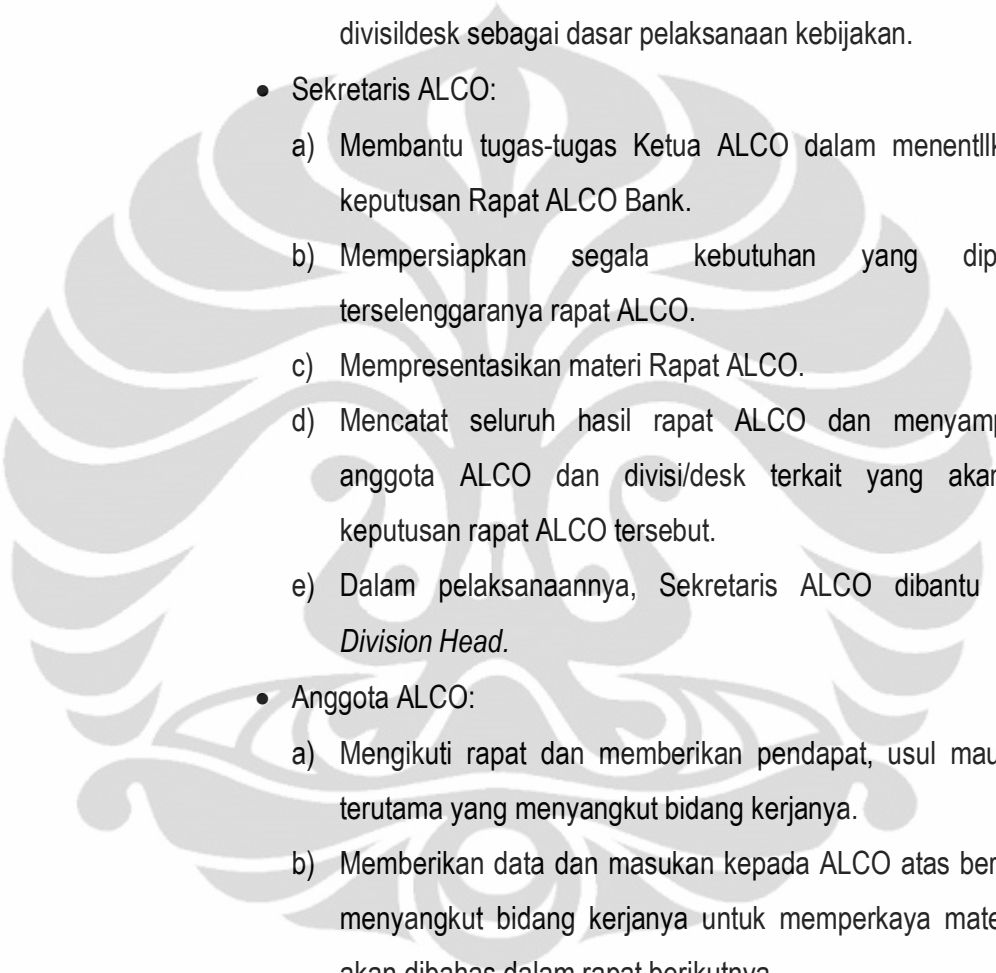
- a. Kebijakan Bank BTN yang mengatur fungsi dan peranan Direktur *Risk, Compliance and Human Capital* dan SKAI dalam rapat ALCO Bank BTN adalah Peraturan Direksi yang di dalamnya telah mengatur fungsi Direktur *Risk, Compliance and Human Capital* dan IAD dalam rapat ALCO sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugasnya, ALCO memiliki susunan personil:

- Anggota Tetap diantaranya adalah Seluruh Direktur (termasuk di dalamnya adalah Direktur *Risk, Compliance and Human Capital*).
- Anggota Tidak Tetap diantaranya adalah Kepala *Audit Internal Division* (IAD).

Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota ALCO, termasuk Direktur *Risk, Compliance and Human Capital* sebagai anggota tetap dan Kepala *Audit Internal Division* sebagai anggota Tidak Tetap terdiri adalah sebagai berikut:

- Ketua ALCO:

- 
- a) Memimpin Rapat ALCO sehingga dapat diperoleh keputusan strategis dari rekomendasi untuk pemecahan masalah yang ada.
 - b) Mengesahkan hasil rapat ALCO agar dapat ditindaklanjuti oleh divisidesk sebagai dasar pelaksanaan kebijakan.
 - Sekretaris ALCO:
 - a) Membantu tugas-tugas Ketua ALCO dalam menentlkan keputusan-keputusan Rapat ALCO Bank.
 - b) Mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan bagi terselenggaranya rapat ALCO.
 - c) Mempresentasikan materi Rapat ALCO.
 - d) Mencatat seluruh hasil rapat ALCO dan menyampaikan kepada anggota ALCO dan divisi/desk terkait yang akan menjalankan keputusan rapat ALCO tersebut.
 - e) Dalam pelaksanaannya, Sekretaris ALCO dibantu oleh *Treasury Division Head*.
 - Anggota ALCO:
 - a) Mengikuti rapat dan memberikan pendapat, usul maupun informasi, terutama yang menyangkut bidang kerjanya.
 - b) Memberikan data dan masukan kepada ALCO atas berbagai hal yang menyangkut bidang kerjanya untuk memperkaya materi ALCO yang akan dibahas dalam rapat berikutnya.
 - c) Menindaklanjuti keputusan-keputusan Rapat ALCO yang telah disahkan oleh Ketua ALCO sebagai pedoman pelaksanaan yang bersifat strategis.
- b. Tata cara penyelenggaraan rapat ALCO yang mengatur kuorum Rapat ALCO

ditetapkan dengan kehadiran Ketua ALCO, Sekretaris ALCO dan Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta minimal 6 (enam) anggota tetap ALCO lainnya. Rapat diselenggarakan minimal satu kali dalam sebulan, tetapi jika dipandang perlu Ketua ALCO dapat menyelenggarakan Rapat sewaktu-waktu. Apabila Kepala Divisi anggota ALCO berhalangan hadir karena sebab-sebab yang telah diketahui sebelumnya seperti keluar kota, sakit, tugas belajar dan lain-lain, maka Anggota ALCO tersebut dapat menunjuk pejabat lain dari Divisi yang sama untuk mewakili.

c. Implementasi fungsi dan peranan Direktur *Risk, Compliance and Human Capital* dan IAD dalam rapat ALCO adalah sebagai berikut:

- Rapat ALCO yang dilakukan setiap bulan dengan dikoordinir oleh Divisi Treasury selalu mengundang Direktur *Risk, Compliance and Human Capital* sebagai anggota tetap dan Kepala *Internal Audit Division* sebagai anggota tidak tetap.
- Direktur Kepatuhan selalu menghadiri undangan Rapat ALCO setiap bulan karena sesuai ketentuan intern akan menentukan kuorumnya anggota rapat.
- Kepala *Internal Audit Division* menghadiri Rapat ALCO bulanan jika tidak sedang berhalangan dengan penugasan lain seperti *exit meeting* ke Kantor-Kantor Cabang, pendidikan-seminar-workshop atau penugasan lain. Dalam hal berhalangan tersebut maka kehadiran Kepala diwakilkan kepada pejabat IAD yang lain.
- Risalah rapat ALCO selalu didistribusikan kembali kepada seluruh anggota ALCO (termasuk Direktur *Risk, Compliance and Human Capital* dan *Internal Audit Division*) untuk ditindaklanjuti secara proporsional sesuai wewenang dan tugas masing-masing anggota.

- Dalam menghadiri rapat ALCO, Direktur *Risk, Compliance and Human Capital* senantiasa menjaga agar Direksi Bank tidak menempuh kebijakan dan atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping memastikan bahwa hasil keputusan rapat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan melalui unit kerja kepatuhan. Dalam rapat ALCO, setiap pelaksanaan rapat dimaksud, Direktur *Risk, Compliance and Human Capital* memantau dan atau memastikan bahwa hasil keputusan rapat ALCO sebelumnya telah dipastikan dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan berdasarkan laporan yang disampaikan unit kerja kepatuhan.

j) *Buy back shares* dan *buy back* obligasi Bank

- 1) Kebijakan Bank dalam melakukan *buy back* obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pada periode 2010, Bank melakukan transaksi *buy back* obligasi, berikut:

Penjelasan Kebijakan Buy Back Obligasi	Jumlah Buy Back Obligasi (jutaan Rp)	Harga Buy Back	Peningkatan Laba dari hasil Buy Back Obligasi (jutaan Rp)
Untuk mendapatkan keuntungan dari Pasar Modal, yaitu dengan melakukan pembelian Obligasi sendiri (<i>buy back</i>) pada saat harga di bawah par	NIHIL	NIHIL	NIHIL

k) Pemberian dana kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan, yaitu:

- 1) Bank tidak memberikan dana untuk kegiatan politik.
- 2) Pemberian Dana untuk kegiatan sosial adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1.	Bantuan Korban Bencana Alam	634.500.000
2.	Bantuan Pendidikan dan Pelatihan	2.070.115.300
3.	Bantuan Peningkatan Kesehatan	890.585.556
4.	Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum	1.418.541.000
5.	Bantuan Sarana Ibadah	1.022.369.000
6.	Bantuan Pelestarian Alam	176.148.000
Jumlah		6.212.258.856

II. KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT*

1. Kesimpulan umum hasil *self assessment* adalah predikat komposit Bank tergolong ke dalam kategori **Sangat Baik** dengan nilai komposit **1.23**.
2. Perhitungan nilai komposit *self assessment* tersebut adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN UMUM HASIL <i>SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>					
NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT	PERINGKAT	NILAI	CATATAN
		(a)	(b)	(a) x (b)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10%	1	0.10	Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	1	0.20	Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10%	1.5	0.15	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite telah memenuhi prinsip-prinsip GCG sesuai ketentuan Bank Indonesia.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	1	0.10	Bank telah dapat mencegah atau menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank melalui kebijakan internal Bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	5%	1.5	0.075	Fungsi Kepatuhan yang dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan telah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan menjaga independensinya dengan baik.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5%	1	0.05	Organisasi dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah berjalan dengan baik dan efektif atas seluruh aspek dan unsur kegiatan Bank.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5%	1	0.05	Pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi prinsip-prinsip GCG sebagaimana ketentuan yang berlaku.
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.5%	1.5	0.11	Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Bank telah berjalan efektif dalam melakukan identifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Debitur Besar (<i>large exposures</i>)	7.5%	1.5	0.11	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang <i>up to date</i> dan lengkap untuk penyediaan dana besar, tidak pernah ada pelanggaran BMPK, pengambilan keputusan dilakukan secara independen.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan	15%	1.5	0.225	Bank telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG dalam penyediaan informasi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal					
11	Rencana Strategis Bank	5%	1	0.05	Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank, disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat.
Nilai Komposit		100%	1.23		SANGAT BAIK

3. *Action plan* penyempurnaan pelaksanaan GCG sebagai tindak lanjut atas hasil *self assessment* adalah sebagai berikut:

No	Rekomendasi / Tindak lanjut Hasil Self Assessment	Pihak-Pihak Terkait			Organ Pendukung
		Pemegang Saham / RUPS	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	
KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE					
1	Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi pengangkatan Direksi pada periode berikutnya.		V		V Komite Remunerasi dan Nominasi
PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN					
2	Bank akan melanjutkan membangun software pemantauan kepatuhan dan Aplikasi Akses Internal Manajemen Standar (AIMS) untuk ketentuan eksternal agar pemantauan kepatuhan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.			V	V Compliance Desk
PENERAPAN GCG SECARA KESELURUHAN					
3	Melanjutkan proses internalisasi GCG sesuai dengan Rencana Jangka Panjang (RJP) Bank secara lebih komprehensif dan berkesinambungan	V	V		V Corporate Secretary Division dan seluruh unit kerja terkait

Jakarta, April 2011
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Ttd

Ttd

Zaki Baridwan
Komisaris Utama

Iqbal Latanro
Direktur Utama